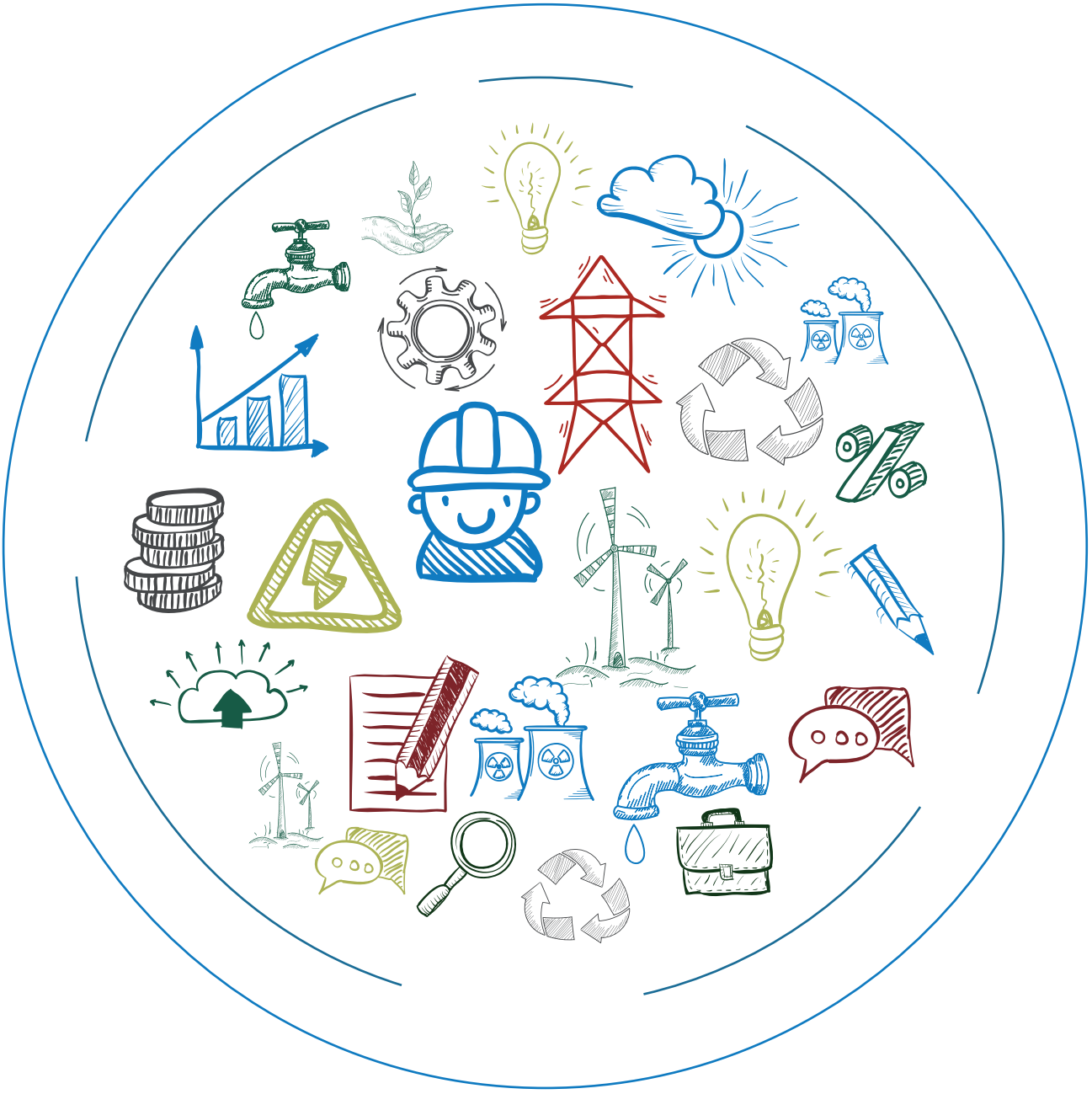


The Next Level

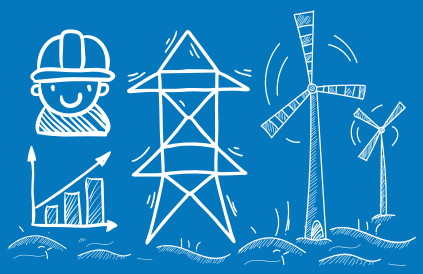
Through Human Capital Excellence and Innovation

LAPORAN TAHUNAN **2017** ANNUAL REPORT

INDONESIA POWER



The Next Level
Through Human Capital Excellence and Innovation



Tahun 2017 menjadi babak baru dalam pengelolaan Perusahaan sekaligus tahun pijakan untuk tumbuh dengan melakukan investasi di bidang pengembangan pembangkit dalam mendukung program 35.000 MW. Sejauh ini kami telah menetapkan 3 (tiga) sasaran utama meliputi *Human Capital Excellence* (HCE), *Operation & Maintenance Excellence* (OME) dan *Business Development Excellence* (BDE). Kami meyakini bahwa kecukupan jumlah dan kualitas sumber daya manusia merupakan modal Perusahaan dalam memenangkan persaingan. Untuk itulah kami melakukan berbagai upaya seperti melakukan akselerasi kompetensi *Operation & Maintenance* (O&M) dan membangun *centre of excellence* untuk *Fire and Safety Academy*. Berbagai inovasi di bidang teknologi pembangkitan pun terus kami kembangkan agar dapat memberikan nilai tambah baik bagi pembangkit eksisting maupun pembangkit baru dalam mendukung pencapaian kinerja produksi yang ditetapkan serta menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan juga segenap pihak berkepentingan.

The year 2017 was a new stage in Company management, as well as a starting point to grow through investment in the development of power plant in supporting the 35,000 MW project. To date, we have determined 3 (three) main goals covering Human Capital Excellence (HCE), Operation Maintenance Excellence (OME) and Business Development Excellence (BDE). We believe that human resource adequacy and quality are Company's asset in winning the competition. Therefore, we made various efforts such as accelerating O&M competency, developing centre of excellence for Fire and Safety Academy. We keep on developing various innovations in power generation technology to bring added value both to the existing and new power plant, to support the achievement of the specified production performance and to create added value for shareholders and all stakeholders.

DAFTAR ISI
CONTENTS





01 PENDAHULUAN
Introduction

01 The Next Level Through Human Capital Excellence and Innovation

02 Daftar Isi
Contents

06 Kesinambungan Tema
Theme Continuity

08 Pemenuhan Rekomendasi Annual Report Award 2016
Implementation of Recommendation from the 2016 Annual Report Award

10 Ringkasan Kinerja Utama Tahun 2017
2017 Key Performance Highlights

15 Ikhtisar Data Keuangan Penting
Financial Performance Highlights

29 Peristiwa Penting 2017
Important Events in 2017

32 LAPORAN KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
Report to Shareholders and Stakeholders

34 Laporan Dewan Komisaris
Report of the Board of Commissioners

46 Laporan Direksi
Report of the Board of Directors

62 Surat Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2017 PT Indonesia Power
Statement from Board of Commissioners and Board of Directors on Accountability over Annual Report 2017 PT Indonesia Power

64 PROFIL PERUSAHAAN
Company Profile

66 Identitas Perusahaan
Corporate Identity

68 Informasi Website Perusahaan
Company's Website

70 Sejarah Singkat Indonesia Power
A Brief History of Indonesia Power

72 Jejak Langkah
Milestone

74 Visi, Misi dan Budaya Perusahaan
Company Vision, Mission and Culture

80 Tujuan, Sasaran dan Strategi Perusahaan
Company Objectives, Goal and Strategy

85 Bidang Usaha
Business Sector

92 Stuktur dan Komposisi Pemegang Saham
Shareholders Structure and Composition

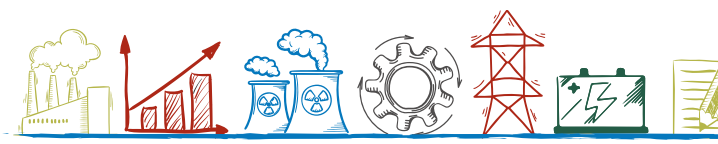
94 Struktur Organisasi Perusahaan
Company's Organizational Structure

96 Identitas dan Riwayat Singkat Dewan Komisaris
Identity and Brief History of the Board of Commissioners

99 Identitas dan Riwayat Singkat Direksi
Identity and Brief History of the Board of Directors

106 Profil Pegawai Perusahaan
Company's Personnel Profile

121 Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal
Education and Training for the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit







122 Struktur Grup Perusahaan
Corporate Group Structure

124 Penghargaan dan Sertifikasi Tahun 2017
Award and Certification in 2017

134 Daftar Anak Perusahaan, Perusahaan Patungan dan Perusahaan Asosiasi
List of Subsidiaries, Joint Ventures and Associated Entities

137 Sekilas Kinerja Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi dan Perusahaan Patungan
Performance of Subsidiaries, Associated Entities and Joint Ventures in Brief

154 Peta Wilayah Operasional Perusahaan
Work Area of Indonesia Power

158 Sinergi Dalam Grup Indonesia Power
Synergy in Indonesia Power Group

159 Lembaga Profesi Penunjang Perusahaan
Company-Supporting Professional Institutions

160 Kronologis Pencatatan Saham
Share Listing Chronology

161 Kronologis Pencatatan Efek Lainnya
Other Securities Listing Chronology

164 **ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN**
Management Discussion and Analysis

166 Tinjauan Industri
Industry Overview

170 Aspek Pemasaran dan Pangsa Pasar
Marketing Aspect and Market Share

174 Tinjauan Kinerja Operasi Per Segmen
Operational Performance Overview by Segment

175 • Penyediaan Tenaga Listrik
Electricity Supply

191 • Jasa *Operation and Maintenance* (O&M)
Operation and Maintenance (O&M) Services

199 Profitabilitas Per Segmen
Profitability by Segment

201 Tinjauan Kinerja Keuangan
Financial Performance Review

201 • Laporan Posisi Keuangan
Financial Position Statements

216 • Laba Rugi Komprehensif
Statements of Profit or Loss

219 • Laporan Arus Kas
Statements of Cash Flows

223 Kemampuan Membayar Utang, Kolektibilitas Piutang dan Rasio Keuangan Lainnya
Solvency, Receivables Collectability, and Other Financial Ratios

232 Struktur Modal
Capital Structure

235 Kontribusi kepada Negara
Contribution to the Country

237 Perbandingan antara Target 2017, Realisasi 2017 dan Target 2018
Comparison of 2017 Target and Actual and 2018 Target

244 Tingkat Kesehatan Perusahaan dan Pencapaian KPI
Company Soundness Level and KPI Achievement

247 Kebijakan Dividen
Dividend Policy

249 Informasi Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal
Information on Material Commitments for Capital Investment

258 Investasi Barang Modal
Capital Investment

262 Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau dengan Pihak Afiliasi/Berelasi
Information on Material Transactions Containing Conflict of Interest and/or Transactions with Affiliates/Related Parties

268 Informasi Material Terkait Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi dan Restrukturisasi
Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Acquisition and Restructuring

DAFTAR ISI
CONTENTS





272 Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Actual Use of Funds from Public Offering

273 Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (MSOP/ESOP)
Management/Employee Stock Ownership Plan (MSOP/ESOP)

274 Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan
Information and Material Facts after Accountant's Reporting Date

275 Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya terhadap Perusahaan
Changes in Accounting Policies and Their Impacts on the Company

279 Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Signifikan dan Dampaknya terhadap Perusahaan
Significant Regulatory Changes and Their Impacts on the Company

281 Informasi Keuangan yang mengandung Kejadian Luar Biasa dan Jarang Terjadi
Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events

282 Dampak Perubahan Harga terhadap Kinerja Perusahaan
Impact of Price Changes to Company Performance

284 Informasi Kelangsungan Usaha
Information on Business Sustainability

286 Prospek Usaha
Business Outlook

292 **TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS**
Business Support Review

294 Sumber Daya Manusia
Human Resources

308 Teknologi Informasi
Information Technology

317 Inovasi dan Teknologi Pembangkitan
Power Generation Innovation and Technology

321 Sistem Manajemen Indonesia Power (InPower IMS)
Indonesia Power Management System (InPower IMS)

330 **TATA KELOLA PERUSAHAAN**
Corporate Governance

332 Pendahuluan
Introduction

336 *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Roadmap

338 Komitmen Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan
Commitment to Sustainable Governance Implementation

350 Struktur, Kebijakan dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Structure, Policy and Mechanism

356 Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali
Information on Major and Controlling Shareholders

357 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
General Meeting of Shareholders (GMS)

368 Dewan Komisaris
Board of Commissioners

379 Direksi
Board of Directors





387 Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
Policy on the Diversity in the Board of Commissioners and the Board of Directors

392 Hubungan Afiliasi Antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali
Affiliations Between Members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Majority and/or Controlling Shareholders

397 Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi
Frequency and Attendance of Board of Commissioners and Board of Directors Meetings

406 Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi
Performance Assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors

408 Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Policy on the Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors

412 Komite Audit | Audit Committee

422 Komite Manajemen Risiko
Risk Management Committee

432 Fungsi Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Function

434 Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of the Board of Commissioners

436 Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

440 Audit Internal | Internal Audit

452 Sistem Pengendalian Internal
Internal Control

459 Audit Eksternal | External Audit

462 Manajemen Risiko
Risk Management

480 Pengadaan Barang/Jasa
Procurement of Goods and Services

486 Kode Etik Perusahaan | Code of Conduct

490 Kode Etik Perusahaan
Whistle Blowing System

496 Perkara Penting yang Dihadapi oleh Perusahaan
Legal Issues Faced by the Company

501 Kebijakan Tentang Pemenuhan Hak-Hak Kreditur
Policy on the Fulfillment of Creditor's Rights

502 Akses Informasi dan Data Perusahaan
Access to Information and Company Data

507 Pernyataan Tidak Melakukan Praktik *Bad Corporate Governance*
Statement of Not Committing Bad Corporate Governance

508 **TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**
Corporate Social Responsibility

510 Pendahuluan
Introduction

515 Metode dan Program Pelaksanaan CSR Indonesia Power
Indonesia Power CSR Implementation Method and Program

519 Pelaksana Pengelolaan CSR
CSR Manager

520 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Lingkungan Hidup
Corporate Social Responsibility to the Environment

538 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Corporate Social Responsibility in Employment and OHS

556 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan
Corporate Social Responsibility in Social and Community Development

569 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Konsumen
Corporate Social Responsibility to the Customer

580 **LAPORAN KEUANGAN**
Financial Report

689 **KRITERIA ANNUAL REPORT AWARD 2017**
2017 Annual Report Award Criteria

KESINAMBUNGAN TEMA
THEME CONTINUITY

EXCELLENT EXECUTION TOWARDS WORLD CLASS SERVICE COMPANY

Kami terus berkarya yang fokus pada hasil terbaik dengan mengedepankan eksekusi ekselen yang bersungguh-sungguh dan berkelanjutan agar Indonesia Power dapat terus mencapai kinerja yang optimal.

We continue to work with a focus on best results by emphasizing on earnest and sustainable excellent execution, enabling Indonesia Power to achieve optimal performance continuously.

TOWARDS EXCELLENT BUSINESS PROCES

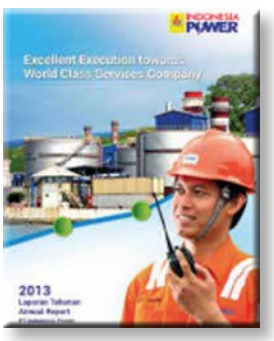
Kami melakukan transformasi menuju proses bisnis yang ekselen dalam mendukung pencapaian sasaran Perusahaan melalui perubahan visi dan misi baru, program efisiensi secara menyeluruh dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

We implement transformation towards excellent business process in supporting the achievement of the Company target through a new vision and mission, overall efficiency program and sustainable growth.

SUMBER DAYA UNGGUL UNTUK MENJAWAB TANTANGAN PERTUMBUHAN
Excellent Resources to Meet the Challenge of Growth

Kami berhasil terus memperkuat sumber daya yang dimiliki Indonesia Power sebagai strategi pertumbuhan berkelanjutan.

We continue to strengthen Indonesia Power's resources as sustainable growth strategy.



2013



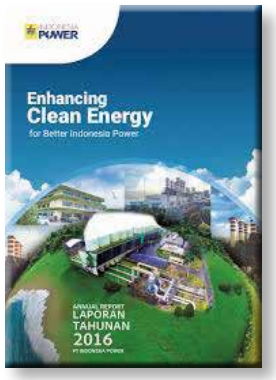
2014



2015







2016

ENHANCING CLEAN ENERGY FOR BETTER INDONESIA POWER

Kami terus memperoleh berbagai pencapaian penting serta aktif menggali potensi dan mengembangkan energi terbarukan yang ramah lingkungan.

Attaining important achievements and actively exploring every potential and generating environmentally friendly, renewable energy.

2017

THE NEXT LEVEL THROUGH HUMAN CAPITAL EXCELLENCE AND INNOVATION

Kami terus berkarya dan fokus pada hasil terbaik dengan mengedepankan pengelolaan SDM yang ekselen dan inovasi di berbagai bidang secara berkelanjutan agar Indonesia Power dapat terus memberikan nilai tambah dan mencapai kinerja yang optimal.

We continue to work with focus on the best results by emphasizing on excellent HR management and sustainable innovation in all areas to enable Indonesia Power to bring added values and achieve optimum performance.



PEMENUHAN REKOMENDASI ANNUAL REPORT AWARD 2016

IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATION FROM THE 2016 ANNUAL REPORT AWARD

No	Kriteria Penjelasan Criteria Explanation		Halaman Page
1	Laporan tahunan 2016 dan tahun-tahun sebelumnya ditampilkan di *website* perusahaan.	The 2016 annual report and previous years' reports are displayed on the Company's website.	√
2	Agar diungkapkan secara lengkap pada Ikhtisar Keuangan Penting mengenai Informasi harga saham dalam bentuk tabel mengenai jumlah saham yang beredar; kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan dan volume perdagangan saham masing-masing untuk setiap triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir termasuk informasi apabila Perusahaan tidak memiliki kapitalisasi pasar, informasi harga saham dan volume perdagangan saham.	Please elaborate in the Important Financial Review section the information on share price in the form of table containing the number of outstanding shares, market capitalization, the highest, lowest and closing share price, and trade volume for each quarter in the last 2 (two) fiscal year, including information that the Company does not have market capitalization, information on share price and share trade volume.	18
3	Laporan Dewan Komisaris agar memuat penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya, pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; pandangan atas penerapan/ pengelolaan *whistleblowing system* (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut; dan perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.	Report of the Board of Commissioners should contain assessment of Board of Directors performance and the basis for the assessment, Directors' opinion on company's business prospect and the basis of consideration, opinion on whistleblowing system (WBS) implementation/management in the company and the role of the Board of Commissioners in WBS, as well as change in the composition of the Board of Commissioners (if applicable) and the reason for the change.	34-43
4	Agar diungkapkan secara lengkap mengenai jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) untuk masing-masing level organisasi, tingkat pendidikan, dan status kepegawaian serta data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan; termasuk biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku.	Please elaborate the number of employees (2 comparative years) for each organizational level, education level and employment status, as well as employee competence building data for the relevant fiscal year, which includes the party (position level) joining the training, type of training and training objectives, including the cost of employee competence building spent on the relevant fiscal year.	106-121
5	Kronologi penerbitan saham (termasuk *private placement*) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku termasuk apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham.	Share listing chronology (including private placement) and/or share listing from the initial right issue to the end of the fiscal year, including when there is no chronology of share listing in the company.	160
6	Agar ditampilkan pada *Website* Perusahaan informasi Pemegang Saham sampai dengan pemilik akhir individu; Isi Kode Etik;Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan; Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir); Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan Piagam/*Charter* Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal.	Please display Shareholders Information on Company's Website to the last individual holder, Content of Code of Conduct, Information on General Meeting of Shareholders (GMS) that contains at least subject of discussion in the GMS, summary of the GMS, and information on important dates, i.e. GMS announcement date, date of summons to the GMS, GMS date, announcement date of the summary of GMS, individual annual financial statement (for the last 5 years), Board of Commissioners' Profile and Board of Directors' Profile, Charter of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees and Internal Audit Unit.	68-69
7	Agar diungkapkan bahasan tentang struktur modal (*capital structure*) yang terdiri dari utang berbasis bunga/ sukuk dan ekuitas, kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure policy*) dan dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal.	Please explain capital structure that consists of interest/ bonds-based and equity-based debt, management's policy for capital structure and the basis of determination of management's policy for capital structure.	231-234
8	Agar diungkapkan informasi perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan pada tahun buku terakhir atau informasi apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi.	Please disclose information on change in accounting policy, the reason and quantitative impact on financial statement for the last fiscal year or information when there is no change in accounting policy.	274-277

No	Kriteria Penjelasan Criteria Explanation		Halaman Page
9	Agar diungkapkan Informasi mengenai hal-hal yang berpotensi signifikan terhadap kelangsungan usaha pada tahun buku terakhir, *assessment* manajemen atas hal-hal tersebut dan asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan *assessment* atau informasi asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir.	Please disclose information on matters that may have potentially significant impact on business continuity in the last fiscal year, assessment by management of these matters and the assumption used by the management to conduct assessment, or information on the underlying assumption of the management in believing that there is no potentially significant matters that may impact continuity of company's business in the last fiscal year.	283-284
10	Agar diungkapkan secara lengkap mengenai kriteria penentuan Komisaris Independen dan pernyataan independensi masing-masing Komisaris Independen.	Please elaborate the criteria for Independent Commissioner appointment and statement of independence by each Independent Commissioner.	374-375
11	Agar diungkapkan nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi; independensi, uraian tugas dan tanggung jawab, uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi pada tahun buku, frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran, pernyataan adanya pedoman komite nominasi dan/atau remunerasi; dan kebijakan mengenai suksesi direksi.	Please disclose name, position, and brief biography of members of nomination and/or remuneration committee, their independence, description of duty and responsibility, nomination and/or remuneration committee activity in the relevant fiscal year, frequency of meeting and attendance rate, statement of availability of guideline for nomination and/or remuneration committee, and director succession plan policy.	432-433
12	Agar diungkapkan akses informasi dan data perusahaan kepada publik, melalui *website* (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, *mailing list,* buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.	Please disclose access to company information and data to the public through website (both in Indonesian language and in English), mass media, mailing list, bulletin, meeting with analysts, etc.	500-504
13	Agar diungkapkan kebijakan tertulis mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi atau alasan dan pertimbangan apabila perusahaan tidak memiliki kebijakan dimaksud.	Please disclose written policy on the diversity of Board of Commissioners and Board of Directors composition or the reason and consideration for unavailability of the policy.	387-391
14	Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi agar disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.	Disclosure related to operation segments should comply with the applicable provision.	174-200

RINGKASAN KINERJA UTAMA TAHUN 2017
2017 KEY PERFORMANCE HIGHLIGHTS



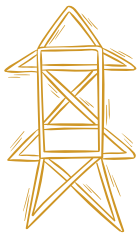
WILAYAH OPERASIONAL
Work Area

5 Unit Pembangkitan (UP) | Generating Unit (GU)
3 Unit Pembangkitan dan Jasa Pembangkitan (UPJP)
Generating and Generating Service Unit (GGSU)
13 Unit Jasa Pembangkitan (UJP)
Generating Service Unit (GSU)
1 Unit Jasa Pemeliharaan (UJH)
Maintenance Service Unit (MSU)



JUMLAH PEGAWAI
Total Personnel

4.209 Orang
People



TOTAL KAPASITAS DAYA TERPASANG
Total Power Capacity Installed

14.903 MW



SINERGI GRUP INDONESIA POWER
Synergy Group Indonesia Power

5 Anak Perusahaan | Subsidiaries
1 Perusahaan Patungan | Joint Venture Companies
2 Perusahaan Asosiasi | Associated Entities
3 Afiliasi dari Anak Perusahaan
Affiliation of Subsidiaries



LABA BERSIH
Net Income

Rp 3.232.323 Juta
Million



JUMLAH ASET
Total Asset

Rp 218.339.042 Juta
Million

SKOR GCG PREDIKAT SANGAT BAIK
GCG Score Predicate
Very Good



93,07



PENJUALAN LISTRIK
Electricity Sales

40.307,40 GWh



PENDAPATAN USAHA
Revenues

Rp 39.436.418 Juta
Million

PRESTASI DAN PENGHARGAAN
Achievements and Awards



- The Best Power Plant Company
- Special Mention as The Most Popular Subsidiary of State-Owned Enterprises Category Energy
- Energy Management Leadership Award 2017
- Appreciation of Human Capital Management Improvement 2017
- Risk Champion dan I and Risk Manager dalam I in ASEAN Risk Awards 2017

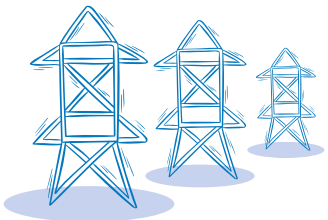


PROPER

9 PROPER Hijau
Green Proper

6 PROPER Biru
Blue Proper

PRODUKSI LISTRIK
Electricity Production



42.220,40 GWh

REALISASI ANGGARAN INPOWER-CARE
Realization of InPower-Care Budget



Rp 28.384 Juta
Million

SKOR GCG BERDASARKAN ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD
GCG Score based on ASEAN Corporate Governance Scorecard



85,51

INDONESIA POWER BUDAYAKAN INOVASI: CAPAI KEANDALAN, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMBANGKIT

INDONESIA POWER CULTIVATES INNOVATION: ACHIEVE POWER PLANTS RELIABILITY, EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY



Indonesia Power fokus dalam membangun budaya kreatif dan inovatif dalam rangka meningkatkan kemandirian teknologi yang dapat diaplikasikan secara nyata pada bidang ketenagalistrikan Indonesia.

Sebagai salah satu perusahaan pembangkit di tanah air, Indonesia Power memandang inovasi sebagai salah satu prioritas dalam upaya meningkatkan keandalan pembangkit yang dimiliki dan dikelolanya. Melalui inovasi peningkatan mutu, efektivitas, dan efisiensi bagi peralatan maupun tata kelola bisnis pembangkitan dapat terus ditingkatkan. Seluruh unit menyusun makalah karya inovasi dan terpilih sebagai *"Best of The Best"* untuk 3 kategori, yaitu Pembangkitan, *Technical Supporting*, dan *Non-Technical Supporting*.

Tahun 2017, Indonesia Power mengikuti Seleksi Penghargan Karya Inovasi (SPKI) tingkat nasional PT PLN (Persero) dan meraih juara 1 untuk kategori Pembangkitan dengan judul makalah "Re-engineering Gland Washer dan Gland Follower PCV Reheat Spray untuk Mencegah Derating Unit 1-4 PLTU Suralaya"

Indonesia Power focuses on developing creative and innovative culture to improve technological independence that can be applied to Indonesia electricity sector.

As one of power plant companies in the country, Indonesia Power sees innovation as a priority in improving the reliability of power plants under its ownership and management. Power generation business will continue to be improved through innovation in quality, effectiveness and efficiency improvement for its equipment and business governance. All units prepared innovation papers and were awarded "Best of the Best" for 3 categories, namely Power Generation, Technical Supporting and Non-Technical Supporting category.

In 2017, Indonesia Power participated in national level of "Seleksi Penghargan Karya Inovasi (SPKI)" PT PLN Persero and won 1st place for Power Generator category with paper "Re-engineering Gland Washer and Gland Follower PCV Reheat Spray for Prevent Derating of Unit 1-4 Suralaya SPP"

FIRE & SAFETY ACADEMY: PUSAT PELATIHAN K3 BIDANG PEMBANGKITAN YANG PERTAMA DAN TERLENGKAP DI INDONESIA

THE FIRST AND MOST COMPREHENSIVE POWER GENERATION OHS TRAINING CENTER IN INDONESIA



Guna menumbuhkan budaya K3 (Keselamatan & Kesehatan Kerja) serta membangun kepedulian dan kesadaran akan pentingnya K3, Indonesia Power membangun *Center of Excellence Fire & Safety Academy* (FSA) di Pandean Lamper, Semarang, Jawa Tengah. Sejak diresmikan 8 Agustus 2017 lalu, FSA Pandean Lamper pun menjadi pusat pelatihan K3 bidang pembangkitan yang pertama dan terlengkap di Indonesia.

Kehadiran FSA di lingkungan Indonesia Power dan juga PLN Grup dilatarbelakangi oleh komitmen perusahaan untuk mengurangi risiko dan potensi bahaya dari pengoperasian dan pemeliharaan PLTU-PLTU berbahan bakar batubara kalori rendah atau *low rank coal*. *Low rank coal* merupakan jenis batubara berkalori rendah yang memiliki sifat swabakar. Dengan sifat tersebut, *low rank coal* membutuhkan penanganan dan pengelolaan secara khusus. Dengan demikian, para ujung tombak pembangkitan pun harus mengetahui dan memahami seluk beluk *low rank coal* dengan baik, mulai dari pengelolaan hingga pencegahan dan penanggulangan terhadap risiko dan potensi bahaya yang mungkin terjadi.

To develop OHS (Occupational Health & Safety) culture and raise concern and awareness of the importance of OHS, Indonesia Power established a Center of Excellence - Fire & Safety Academy (FSA) in Pandean Lamper, Semarang, Central Java. Since its establishment on August 8, 2017, FSA Pandean Lamper has been the first and most complete OHS training center in Indonesia.

The background of FSA establishment in Indonesia Power and PLN Group is company's commitment to reduce risk and hazard potential from operation and maintenance of SPPs that use low calorie coal or low rank coal as the fuel. Low rank coal is combustible coal with low calorific value. Having this nature, low rank coal requires specific care and handling. Therefore, power generation leaders must also properly know and understand low rank coal details, from the management to prevention and handling of risk and hazard potential that may arise.

FIRE & SAFETY ACADEMY: PUSAT PELATIHAN K3 BIDANG PEMBANGKITAN YANG PERTAMA DAN TERLENGKAP DI INDONESIA

THE FIRST AND MOST COMPREHENSIVE POWER GENERATION OHS TRAINING CENTER IN INDONESIA






Melalui program pendidikan dan pelatihan bidang K3 yang diselenggarakan FSA, diharapkan dapat meningkatkan kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas para personel pembangkitan, khususnya PLTU *low rank coal*, baik tenaga operator maupun teknisi pembangkitan. FSA juga dapat dimanfaatkan, tidak hanya oleh personel pembangkitan Indonesia Power, melainkan juga oleh para operator dan teknisi pembangkitan di lingkungan PLN Grup.

Di antaranya, *simulator control room* pembangkit, miniatur *coal handling*, serta *fire ground* yang dilengkapi dengan *bunker*, trafo, *smoke chamber*. Kemudian, FSA dilengkapi pula dengan peralatan-peralatan ketenagalistrikan, gedung *workshop*, dan fasilitas pendukung lainnya.

Through OHS education and training program by FSA, it is expected that power generator personnel competence, capacity and capability will increase, particularly for SPP that uses low rank coal, both for its operators and power generation engineers. FSA can also be utilized not only by power generation personnel in Indonesia Power, but also by power generation operators and engineers in PLN Group.

Among other things, power plant simulator control room, coal handling miniature and fire ground that is equipped with bunker, transformer and smoke chamber are available. In addition, FSA is also equipped with electricity equipment, workshop building, and other supporting facilities.

INDONESIA POWER
FIRE & SAFETY
ACADEMY

"Fasilitas pendidikan ini diharapkan bisa meminimalkan potensi risiko akibat sifat bawaan batubara berkalori rendah yang digunakan sebagai bahan bakar pada PLTU. Pengoperasian FSA juga membangun kepedulian akan pentingnya budaya K3 sekaligus meningkatkan kompetensi personel melalui beragam program pelatihan K3. Kehadiran FSA pun melengkapi 11 akademi yang sudah dimiliki oleh PLN."

"This education facility is expected to be able to minimize risk potential due to the nature of low rank coal that is used as fuel for Steam Power Plant. FSA operation also builds concern on the importance of OHS culture and improve personnel competence through various OHS training program. FSA also completes 11 academies that have been established by PLN."

Muhamad Ali
Direktur | Director Human Capital Management (HCM) PT PLN (Persero)

"Fasilitas FSA akan membentuk karakter siswa yang lebih baik melalui pengajaran praktik sesuai denganlingkungan dunia kerja yang sebenarnya. Terlebih lagi,melalui fasilitas pendidikan ini, siswa bisa mendapatkan sertifikat kompetensi."

"FSA facility will build better character on the participants through practical study that suits the real work environment. Moreover, through this education facility, participants may obtain their certificate of competence."

Sri Puryono
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
Regional Secretary of Province of Central Java

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
FINANCIAL PERFORMANCE HIGHLIGHTS

IKHTISAR KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE

(Rp Juta | Rp Million)

POSISI KEUANGAN	2013	2014	2015	2016	2017	FINANCIAL POSITION
Jumlah Aset	**53.480.492**	**53.248.058**	**226.720.248**	**220.888.024**	**218.339.042**	**Total Asset**
Aset Tidak Lancar	27.886.878	27.491.959	198.594.427	194.855.586	183.308.746	Fixed Asset
Aset Lancar	25.593.614	25.756.099	28.125.821	26.032.438	35.030.296	Current Asset
Jumlah Liabilitas	**8.633.813**	**8.598.429**	**11.963.977**	**7.665.482**	**9.208.877**	**Total Liabilities**
Liabilitas Jangka Panjang	4.743.253	5.353.506	2.757.598	3.111.035	3.673.564	Non Current Liabilities
Liabilitas Jangka Pendek	3.890.560	3.244.923	9.206.379	4.554.447	5.535.313	Current Liabilities
Jumlah Ekuitas	**44.846.679**	**44.649.629**	**214.756.271**	**213.222.542**	**209.130.165**	**Total Equity**
Modal Kerja bersih	21.703.054	22.434.320	25.624.954	21.477.991	29.494.983	Net Working Capital
Investasi pada Entitas Asosiasi (Entitas Lain)	168.850	198.540	203.696	267.047	618.394	Investment on other entities
LABA RUGI						**PROFIT/LOSS**
Pendapatan Usaha	33.531.493	35.723.617	32.020.186	36.705.954	39.436.418	Revenues
Beban usaha	31.514.317	33.527.047	29.895.661	32.610.030	35.069.946	Operating Expenses
Laba Usaha	**2.017.176**	**2.196.570**	**2.124.525**	**4.095.924**	**4.366.472**	**Operating Income**
Penghasilan (Beban) Lain-lain	**(129.950)**	**73.881**	**(34.982)**	**(171)**	**(636.065)**	**Other Income (Expenses)**
Laba Sebelum Pajak	**1.887.226**	**2.270.451**	**2.089.543**	**4.095.753**	**3.730.407**	**Profit Before Tax**
Beban Pajak	**(644.756)**	**(623.219)**	**2.582.979**	**(1.209.049)**	**(498.084)**	**Tax Expense**
Laba Bersih	**1.242.470**	**1.647.232**	**4.672.522**	**2.886.704**	**3.232.323**	**Net Income**
diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	1.240.108	1.642.422	4.668.403	2.885.017	3.220.175	attributable to Owners of the parent
diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali	2.362	4.810	4.119	1.687	12.148	attributable to Non-controlling interests
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan setelah pajak	**-**	**(169.707)**	**167.014.505**	**(221.710)**	**(4.456.914)**	**Comprehensive income for the year after tax**
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	**1.242.470**	**1.477.525**	**171.687.027**	**2.664.994**	**(1.224.591)**	**Total comprehensive income for the year**
diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	-	1.472.715	171.682.908	2.663.307	(1.236.739)	attributable to Owners of the parent
diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali	-	4.810	4.119	1.687	12.148	attributable to Non-controlling interests
Laba per Saham (Rp penuh)	**238**	**315**	**895**	**553**	**617**	**Earnings per Share (in Rupiah full amount)**

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

FINANCIAL PERFORMANCE HIGHLIGHTS

RASIO KEUANGAN	2013	2014	2015	2016	2017	FINANCIAL RATIOS
Rasio Likuiditas						**Liquidity Ratio**
Rasio Kas (%)	25,23	13,96	9,85	32,09	86,10	Cash Ratio(%)
Rasio Cepat (%)	585,84	696,07	268,31	455,60	516,07	Quick Ratio (%)
Rasio Lancar (%)	712,66	794,87	308,69	554,16	609,21	Current Ratio (%)
Rasio Profitabilitas						**Profitability Ratio**
Margin Operasi (%)	6,02	6,15	6,53	11,16	13,19	Operating Margin (%)
Margin Laba Bersih (%)	3,71	4,61	14,60	7,86	8,20	Operating Margin (%)
Tingkat Pengembalian Modal (%)	2,84	3,74	2,22	1,37	1,57	Return on Equity (ROE) (%)
Tingkat Pengembalian Investasi (%)	8,77	9,62	2,13	4,05	4,79	Return on Investment (ROI) (%)
Rasio Solvabilitas						**Solvability Ratio**
Rasio Utang terhadap Asset (%)	16,21	16,15	5,13	3,47	4,22	Debt to Total Assets Ratio (%)
Rasio Utang Terhadap Modal (%)	19,80	19,26	5,40	3,59	3,47	Debt to Total Equity Ratio (%)
Rasio Aktivitas						**Activity Ratio**
Perputaran Persediaan (hari)	20,00	21,00	25,00	19,52	19,28	Inventory Turn Over (ITO) (days)
Periode Penagihan (hari)	223,00	237,00	269,00	197,88	225,18	Collection Period (CP) (days)
Perputaran Aset (%)	60,63	63,80	14,16	16,68	23,46	Total Assets Turn Over (TATO) (%)
Rasio Modal Terhadap Aset (%)	83,67	83,86	92,81	96,53	95,78	Total Equity to Total Assets (TETA) (%)

IKHTISAR OPERASIONAL	2013	2014	2015	2016	2017	OPERATIONAL PERFORMANCE
Equivalent Availability Factor/EAF (%)	93,04	89,88	90,85	85,63*	86,55*	Equivalent Availability Factor/EAF (%)
Equivalent Forced Outage Rate/EFOR (%)	1,66	7,16	3,16	7,23*	5,95*	Equivalent Forced Outage Rate/EFOR (%)
Efisiensi *Thermal Netto* (%)	33,81	33,97	33,76	34,27*	33,61*	Net Thermal Efficiency (%)
Tara Kalor Netto (kCal/kWh)	2.543,63	2.531,65	2.547,10	2.537,06*	2.558,74*	Net Plant Heat Rate (kCal/kWh)
Jumlah Daya Terpasang Pembangkit Milik Sendiri (MW)	8.936	8.901	9.029,72	8.877,68	8.782,68	Total of Installed Capacity in Existing Unit (MW)
Tingkat Kesehatan Perusahaan (%)	99,64	91,67	95,25	95,53	93,45	Corporate Soundness Level
Jumlah Pegawai (pegawai)	3.463	3.553	3.639	3.725	4.209	Total Employee
Skor *Assessment* GCG (%)	92,04	90,06	91,19	91,99	93,07	GCG Assessment Score(%)

Keterangan:
* Gabungan kinerja pembangkit milik sendiri dan pembangkit jasa O&M Jawa.

Description:
* Combination of power plant performance existing unit and O&M services unit in Java.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
FINANCIAL PERFORMANCE HIGHLIGHTS

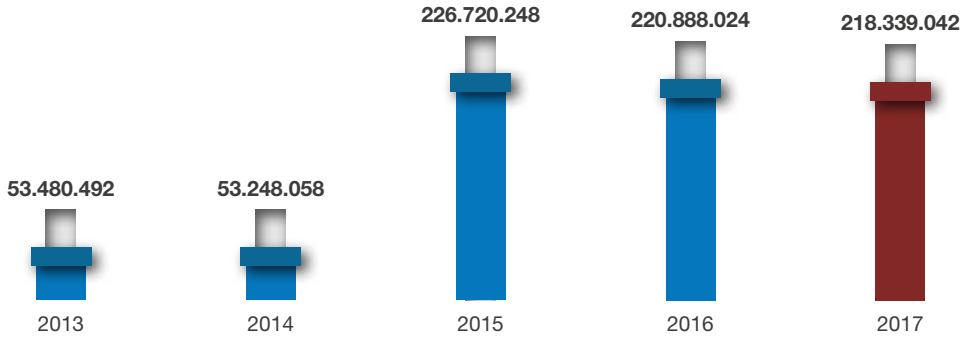
Ikhtisar Saham
Sampai dengan akhir tahun 2017, Indonesia Power tidak melakukan perdagangan saham sehingga tidak ada informasi terkait dengan jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, harga saham terendah dan harga saham penutupan serta volume saham yang diperdagangkan.

Share Overview
Until the end of 2017, Indonesia Power did not do any share trading, therefore there is no information related to the published shares, market capitalization, highest share prices, lowest share prices, and closing share prices, as well as share volume traded.

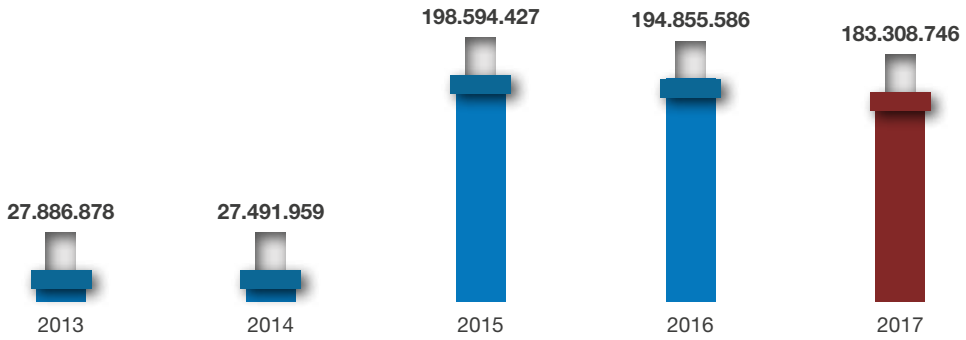
Ikhtisar Obligasi
Sampai dengan akhir tahun 2017, Indonesia Power tidak menerbitkan obligasi, sukuk dan obligasi konversi sehingga tidak ada informasi terkait dengan jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo dan peringkat obligasi/sukuk.

Bonds Overview
Until the end of 2017, Indonesia Power did not publish bonds, sukuk, and convertible bonds, therefore there is no information related to the total of bonds/sukuk/convertible bonds published, interest rate/yield, maturity date, and ratings of bonds/sukuk.

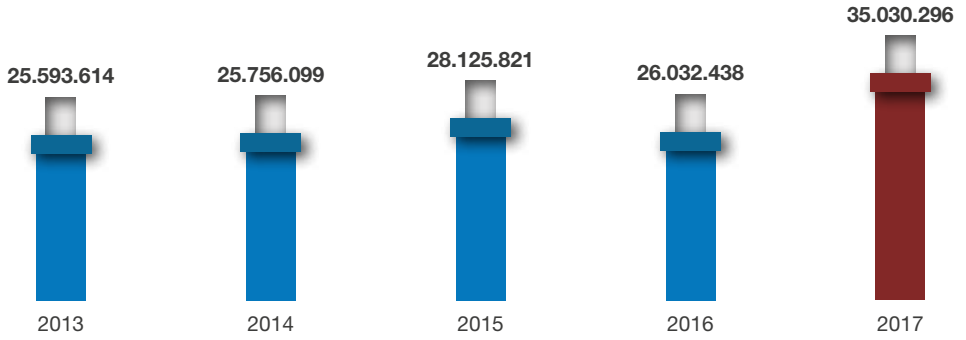
Jumlah Aset (Rp juta)
Asset (Rp million)



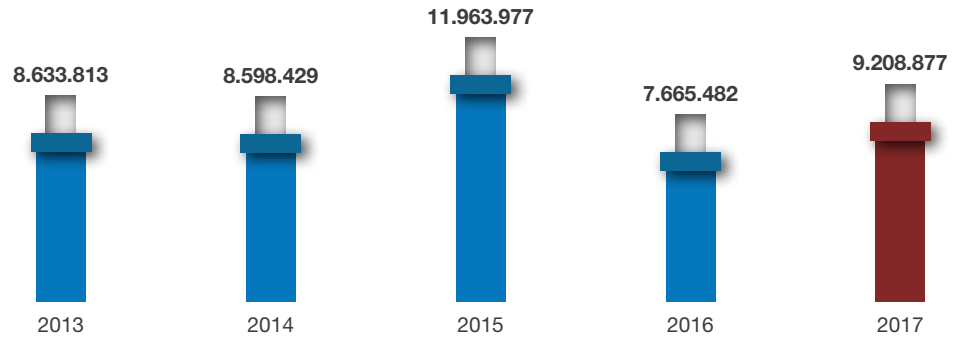
Aset Tidak Lancar (Rp juta)
Non-Current Asset (Rp million)



Aset Lancar (Rp juta)
Current Asset (Rp million)



Jumlah Liabilitas (Rp juta)
Liabilities (Rp million)

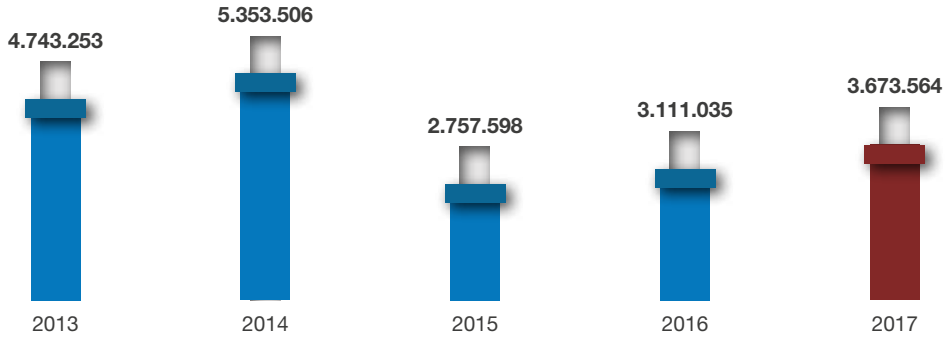


IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

FINANCIAL PERFORMANCE HIGHLIGHTS

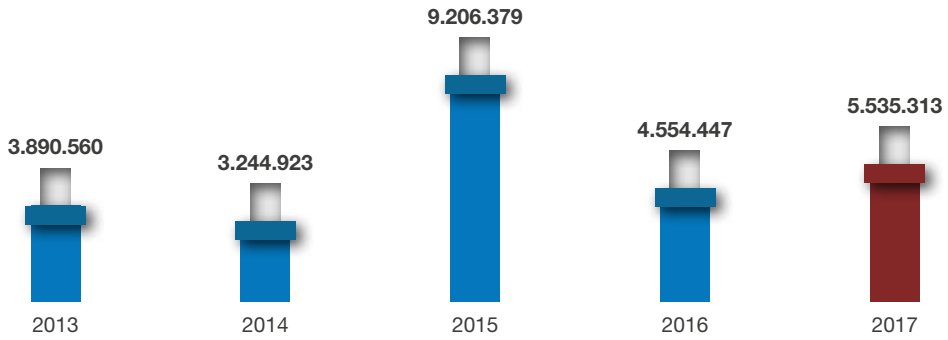
Liabilitas Jangka Panjang (Rp juta)

Long-Term Liabilities (Rp million)



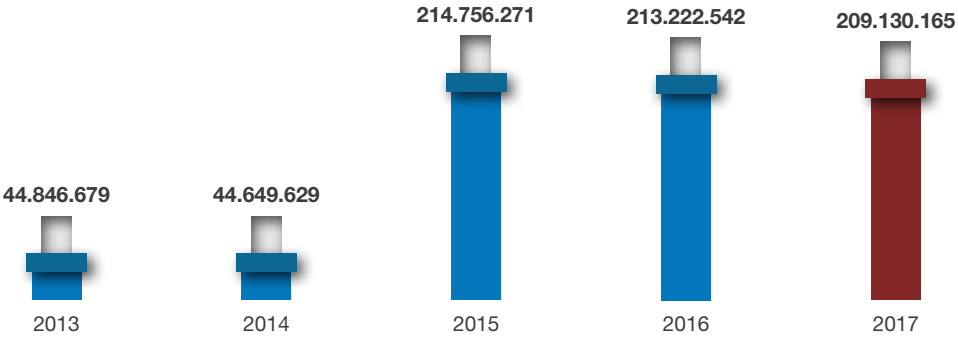
Liabilitas Jangka Pendek (Rp juta)

Short-Term Liabilities (Rp million)



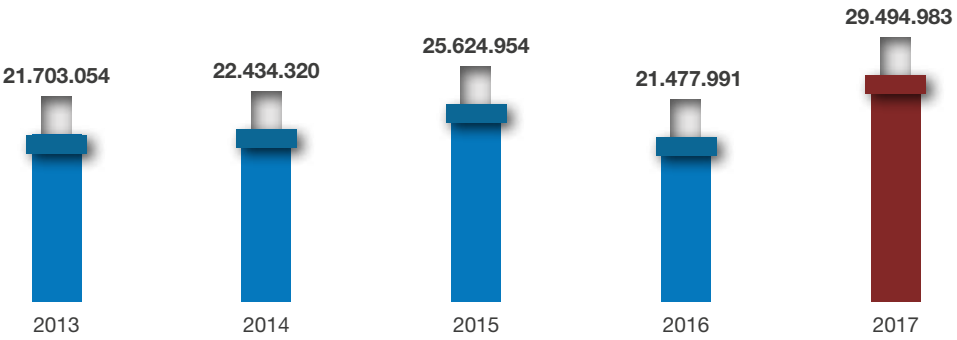
Jumlah Ekuitas (Rp juta)

Equity (Rp million)

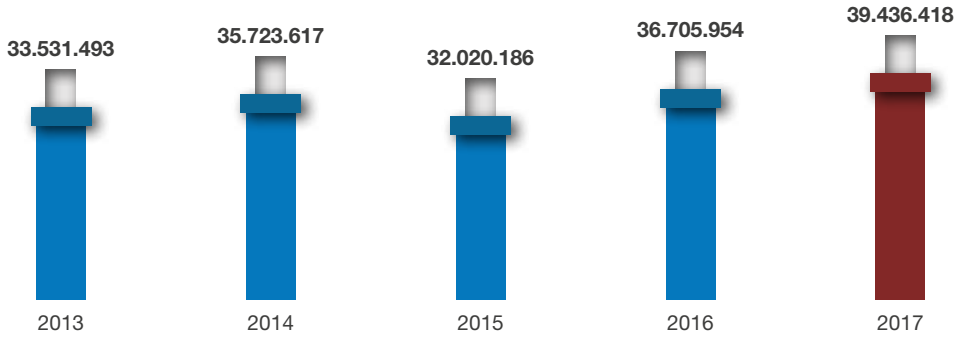


Modal Kerja Bersih (Rp juta)

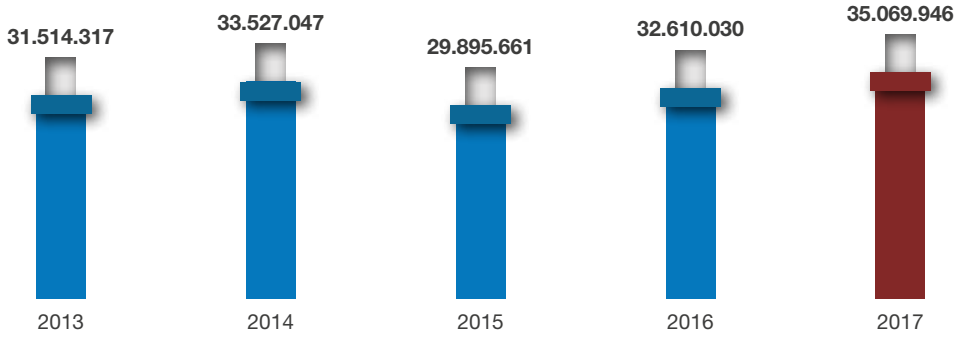
Net working capital (Rp million)



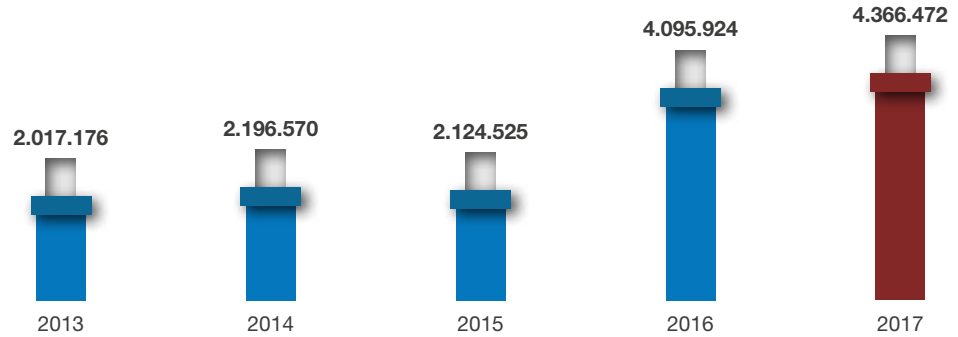
Pendapatan Usaha (Rp juta)
Revenues (Rp million)



Beban Usaha (Rp juta)
Operating Expenses (Rp million)



Laba Usaha (Rp juta)
Operating Income (Rp million)

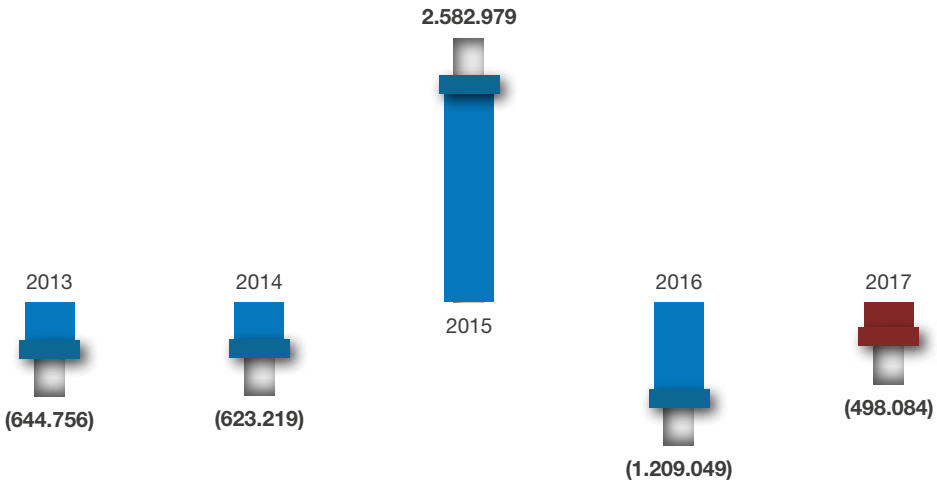


IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

FINANCIAL PERFORMANCE HIGHLIGHTS

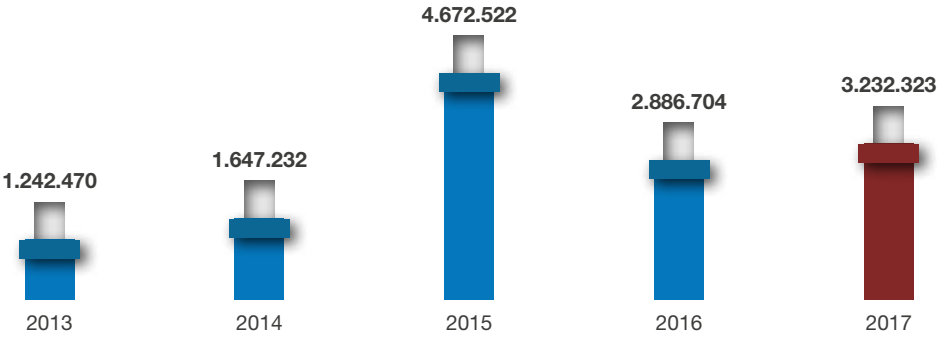
Beban Pajak (Rp juta)

Tax Expense (Rp million)



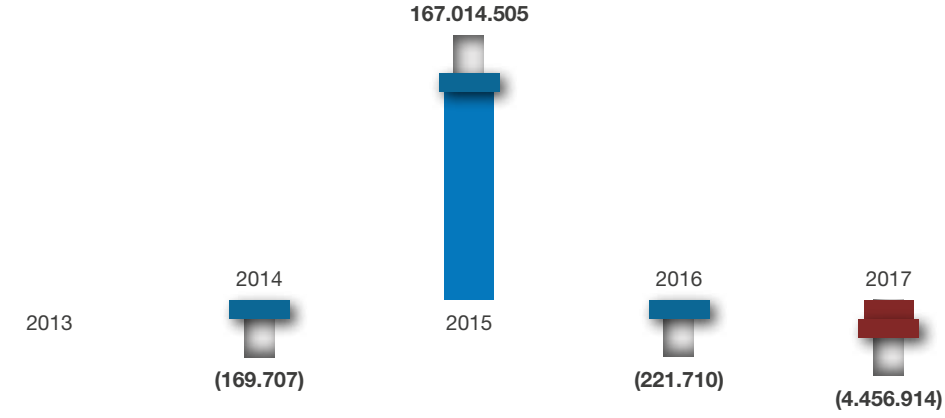
Laba Bersih (Rp juta)

Net Income (Rp million)

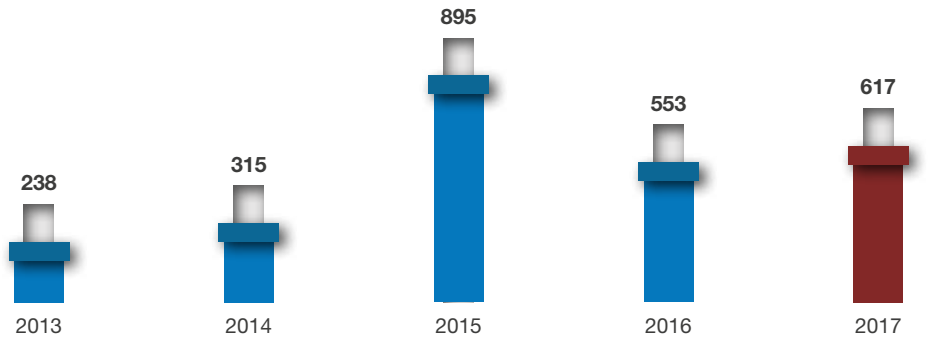


Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Setelah Pajak (Rp juta)

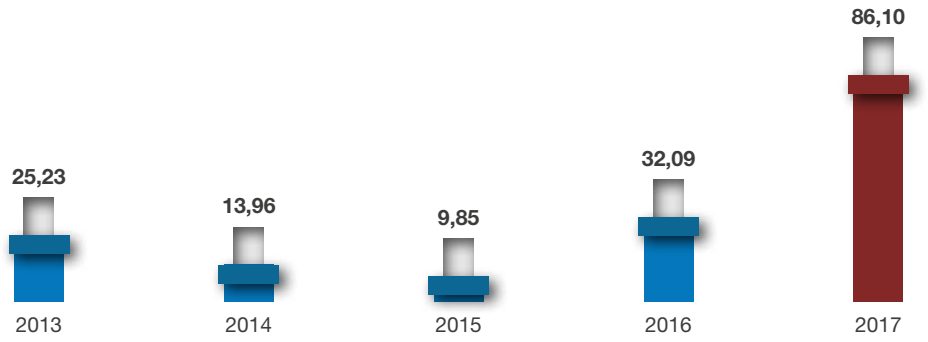
Comprehensive Income for the Year After Tax (Rp million)



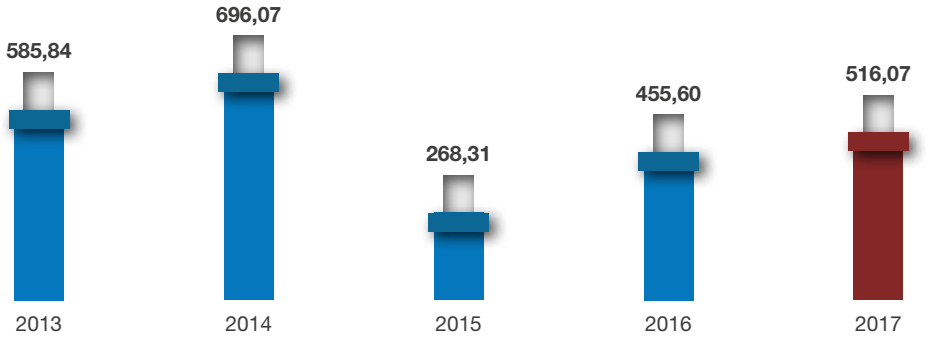
Laba Per Saham (Rp Penuh)
Earnings per Share (in Rupiah full amount)



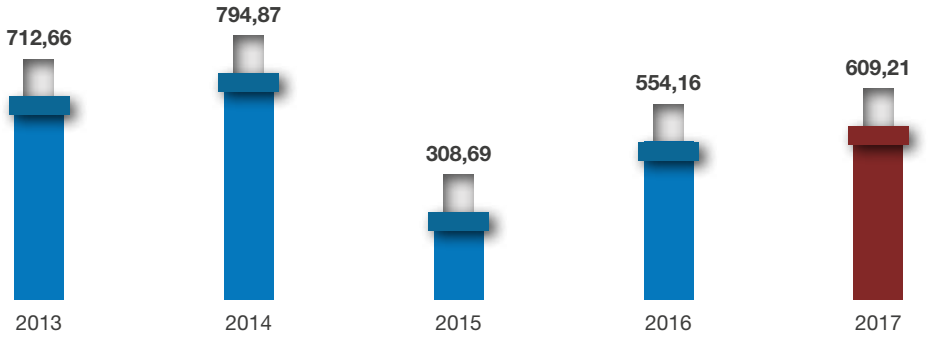
Rasio Kas (%)
Cash Ratio (%)



Rasio Cepat (%)
Quick Ratio (%)



Rasio Lancar (%)
Current Ratio (%)

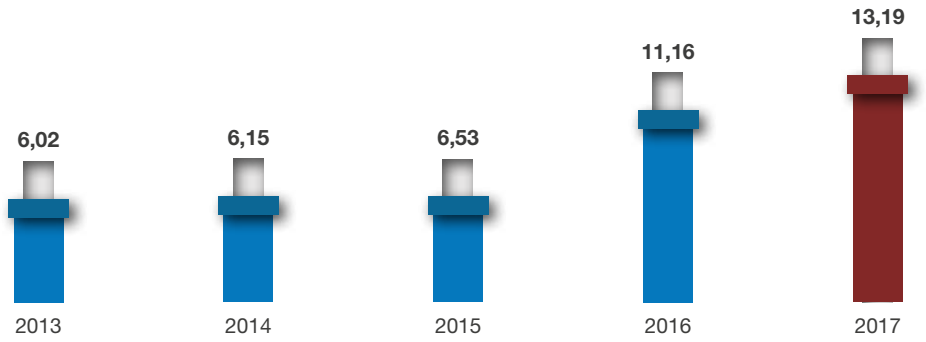


IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

FINANCIAL PERFORMANCE HIGHLIGHTS

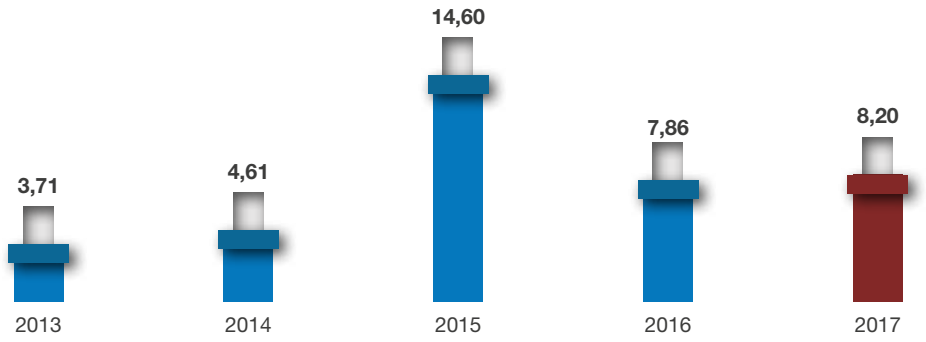
Margin Operasi (%)

Operating Margin (%)



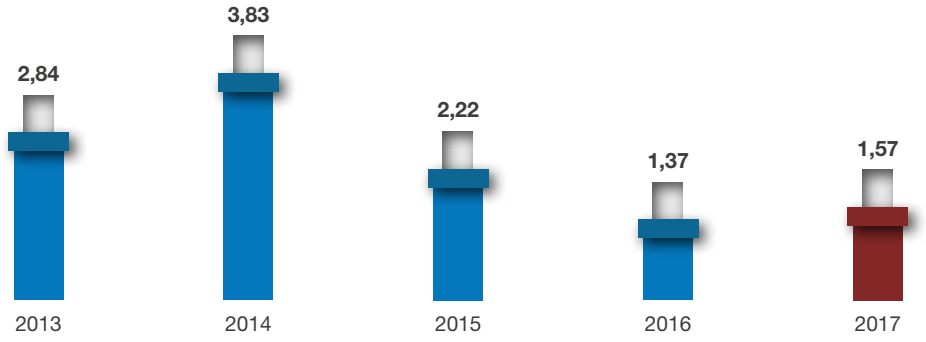
Margin Laba Bersih (%)

Net Income Margin (%)



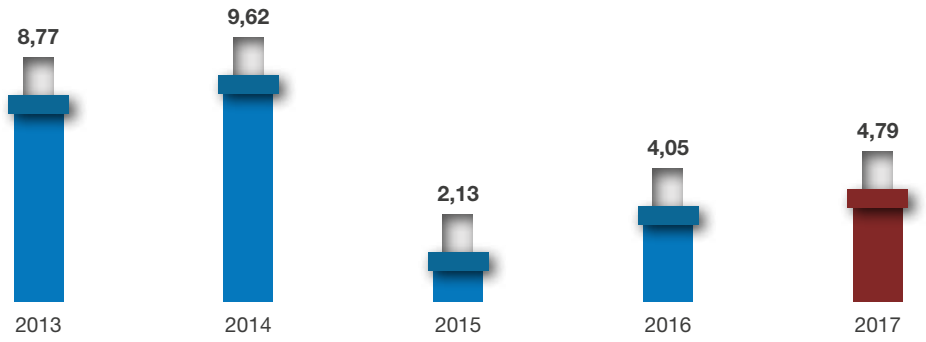
Tingkat Pengembalian Modal (%)

Return on Equity (ROE) (%)

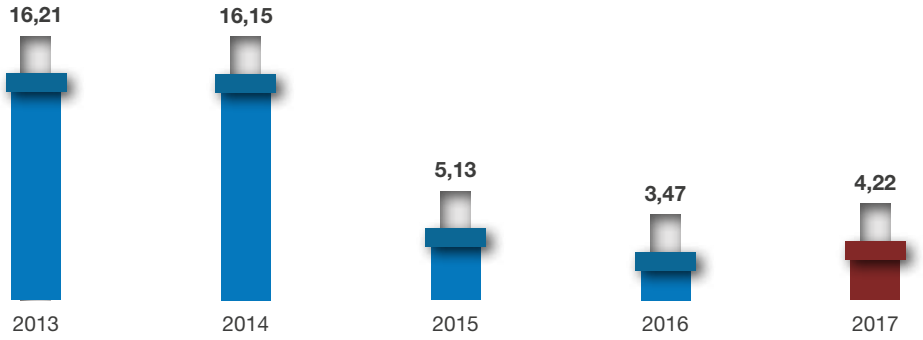


Tingkat Pengembalian Investasi (%)

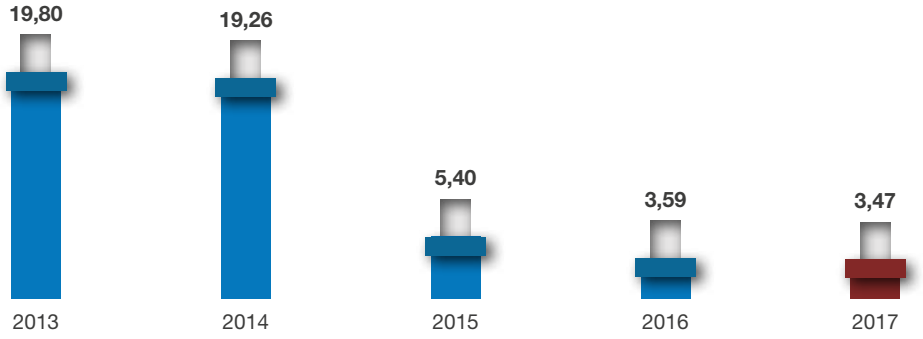
Return on Investment (ROI) (%)



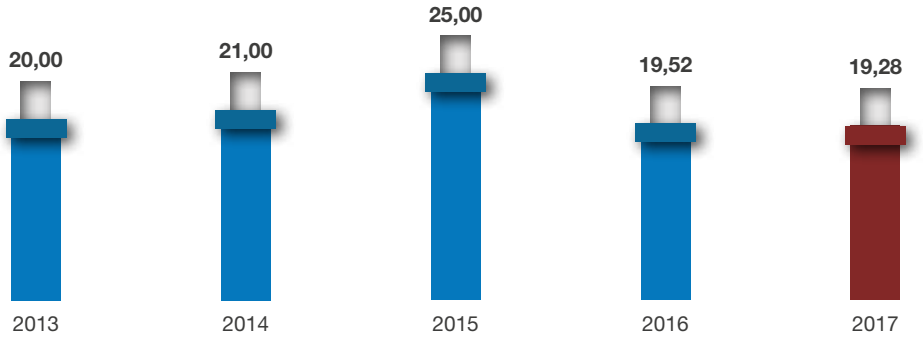
Rasio Utang terhadap Asset (%)
Debt to Total Assets Ratio (%)



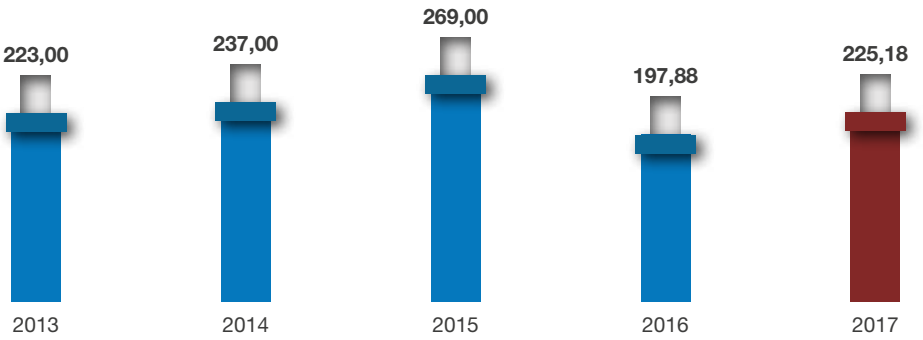
Rasio Utang terhadap Modal (%)
Debt to Total Equity Ratio (%)



Perputaran Persediaan (hari)
Inventory Turn Over (ITO) (days)



Periode Penagihan (hari)
Collection Period (CP) (days)

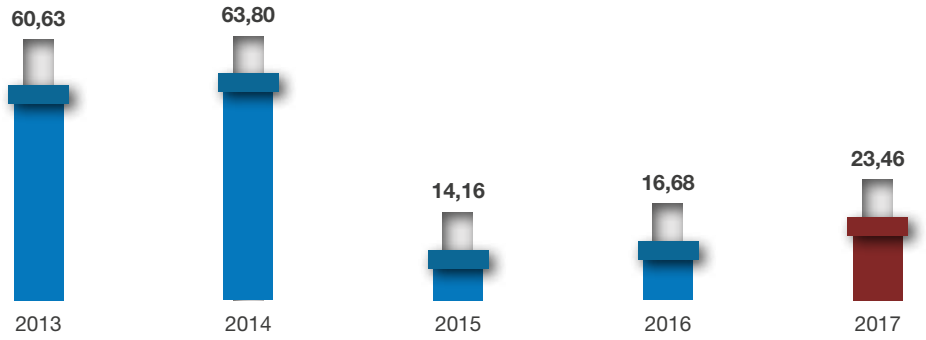


IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

FINANCIAL PERFORMANCE HIGHLIGHTS

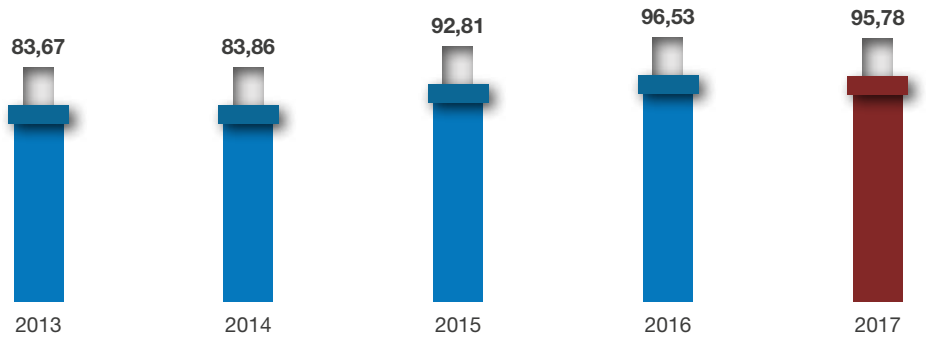
Perputaran Aset (%)

Total Assets Turn Over (TATO) (%)

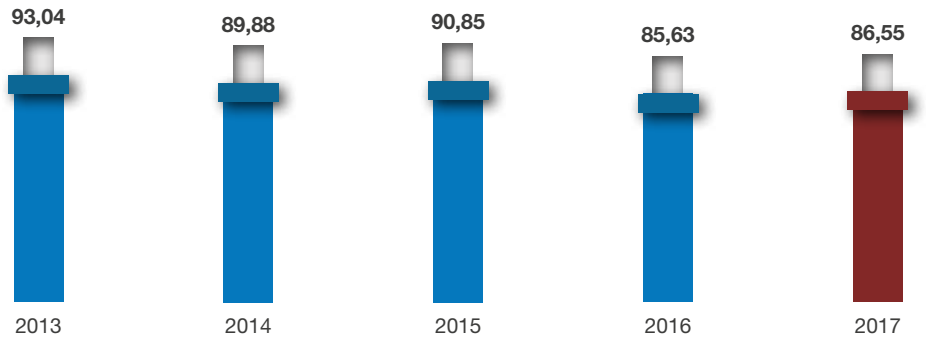


Rasio Modal terhadap Aset (%)

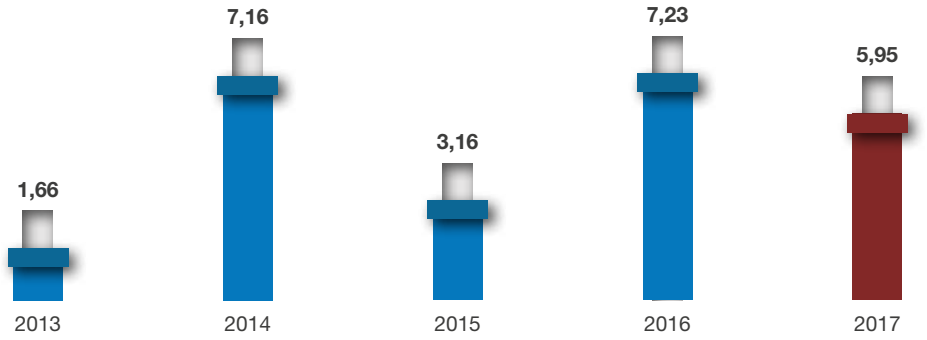
Total Equity to Total Assets (TETA) (%)



Equivalent Availability Factor/EAF (%)

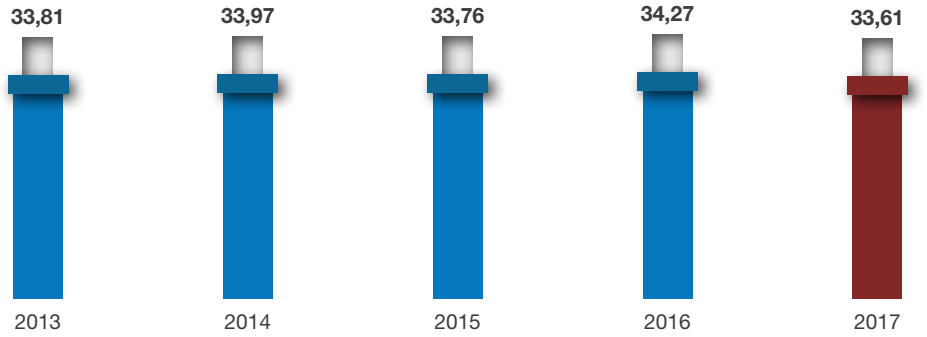


Equivalent Forced Outage Rate/EFOR (%)



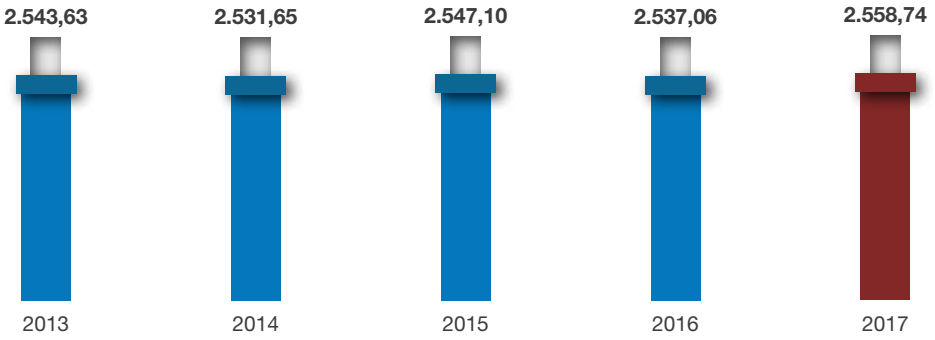
Efisiensi *Thermal* Netto (%)

Net Thermal Efficiency (%)



Tara Kalor Netto (kCal/kWh)

Net Plant Heat Rate (kCal/kWh)

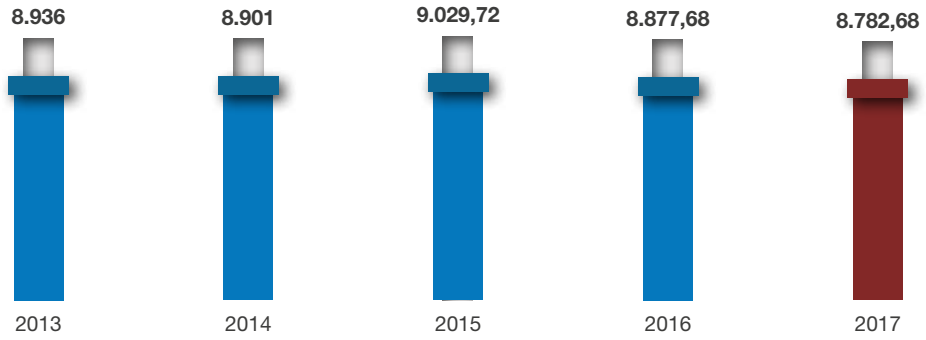


IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

FINANCIAL PERFORMANCE HIGHLIGHTS

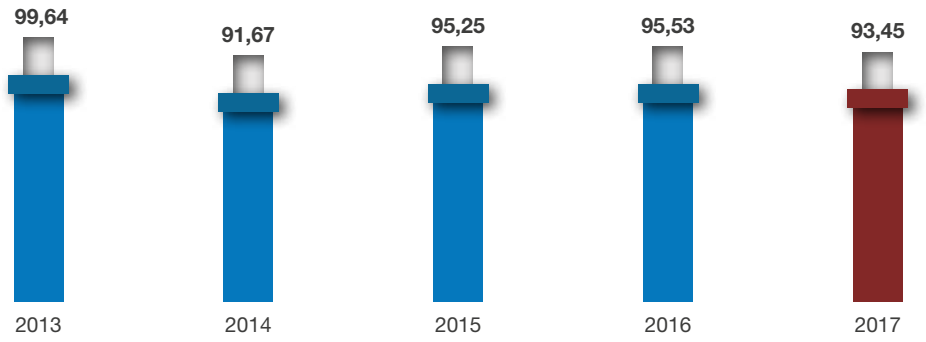
Jumlah Daya Terpasang Pembangkit Milik Sendiri (MW)

Total of Installed Capacity in Existing Unit (MW)



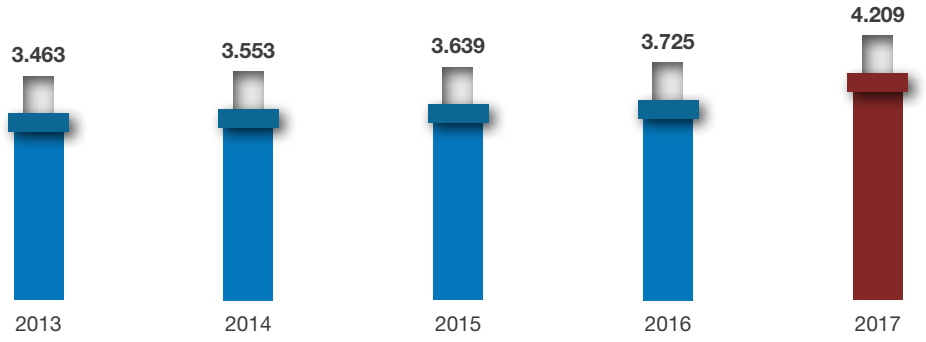
Tingkat Kesehatan Perusahaan

Corporate Soundness Level



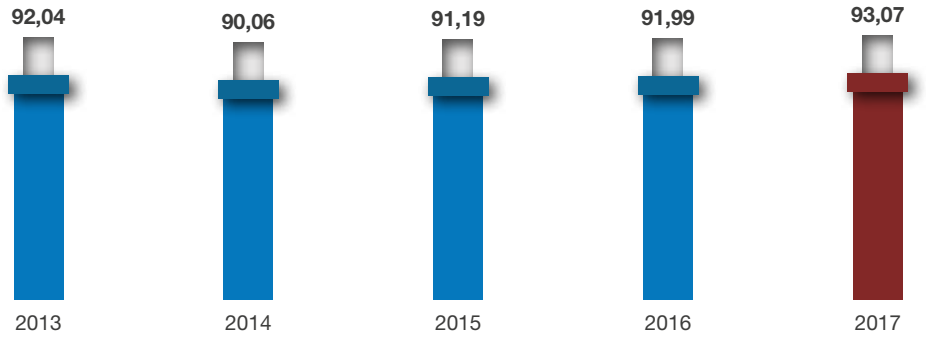
Jumlah Pegawai

Total Employee



Skor *Assessment* GCG

GCG Assessment Score



PERISTIWA PENTING 2017
IMPORTANT EVENTS IN 2017



17 Februari | February 2017

Penandatanganan kerjasama antara Indonesia Power dengan PT PAL, Mitsubishi Corporation, PT Poesser Indonesia dan PT Power Systems Service Indonesia dalam rangka *Long Term Services Agreement* (LTSA) meliputi *supply materials, repair services* dan *supervision services*.

Signing of agreement between Indonesia Power and PT PAL, Mitsubishi Corporation, PT Poesser Indonesia and PT Power System Service Indonesia on Long Term Service Agreement (LTSA), which includes supply materials, repair services and supervision services.

INDO RAYA TENAGA

15 Maret | March 2017

Pendirian Afiliasi dari Anak Perusahaan yaitu PT Indo Raya Tenaga (IRT).

Establishment of Subsidiary's Affiliation, namely PT Indo Raya Tenaga (IRT).

PLN SC

16 Juni | June 2017

Pendirian Afiliasi dari Anak Perusahaan yaitu PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLN SC).

Establishment of Subsidiary's Affiliation, namely PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLN SC).

PERISTIWA PENTING 2017

IMPORTANT EVENTS IN 2017



7 Agustus | August 2017

Penandatanganan Kerjasama antara Indonesia Power dengan PT Mofatama Energi dalam rangka pengembangan PLTU Adipala dengan kapasitas 1 x 1000 MW.

Signing of Cooperation between Indonesia Power and PT Mofatama Energi on development of Adipala Steam Power Plant with 1 xx 1000MW capacity.



8 Agustus | August 2017

Peresmian *Center of Excellent Fire & Safety Academy* di Pandean Lamper Semarang.

Official launching of Center of Excellence - Fire & Safety Academy in Pandean Lamper, Semarang.



25 Agustus | August 2017

Penyerahan pengelolaan jasa O&M PLTA Orya Genyem 2x10 MW kepada Perusahaan yang dikukuhkan melalui penandatanganan *Asset Management Contract* (AMC) PLTA Orya Genyem.

Transfer of O&M service management for Orya Genyem 2x10 MW Hydro Power Plant to the Company, as formalized through signing of Asset Management Contract (AMC) for Orya Genyam HPP.



20 September 2017

Indonesia Power melakukan Pencatatan Perdana Sekuritisasi Efek Beragun Aset (EBA) dengan nama EBA Danareksa Indonesia Power PLN1-Piutang Usaha (EBA DIPP1).

Indonesia Power made Initial Listing of Asset-Backed Securities (ABS) in the name of EBA Danareksa Indonesia Power PLN1-Piutang Usaha (EBA DIPP1).



5 Oktober | October 2017

Ground Breaking PLTU IPP Jawa 9 dan 10 dengan kapasitas 2.000 MW yang diresmikan oleh Presiden RI.

Ground Breaking of IPP Jawa 9 and 10 SPP with 2,000MW capacity by President of the Republic of Indonesia.

7 November 2017

Perubahan nama PT Tangkuban Parahu Geothermal menjadi PT Indo Tenaga Hijau (ITH) dengan perubahan bidang usaha menjadi bergerak pada bidang energi baru dan/atau terbarukan.

Change of name of PT Tangkuban Perahu Geothermal into PT Indo Tenaga Hijau (ITH) and business sector shift into new and/or renewable energy business.



01

LAPORAN KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

REPORT TO SHAREHOLDERS AND STAKEHOLDERS



> Pencapaian indikator kinerja kunci sebagian besar mencapai target, baik dalam hal kinerja finansial, operasional, maupun pengembangan bisnis.
>
> The achievement of Key Performance Indicators mostly aimed, either in terms of financial performance, operations or business development.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
REPORT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS



Bagus Setiawan
Komisaris Utama
President Commissioner

Dewan Komisaris menilai Direksi telah bekerja dengan baik selama tahun 2017. Hal tersebut tercermin dari pencapaian indikator kinerja kunci (*Key Performance Indicator*) yang mencapai target, baik dalam hal kinerja finansial, operasional, maupun pengembangan bisnis. Penilaian kami didasarkan pada sejumlah indikator obyektif, antara lain margin operasi meningkat 18,16%, margin laba bersih meningkat 4,28% dan tingkat pengembalian investasi meningkat 18,32%.

The Board of Commissioners views that the Board of Directors had shown commendable performance in 2017. This is reflected from the achievement of Key Performance Indicators (KPIs), either in terms of financial performance, operations or business development. Our assessment is based on objective indicators, such as the increasing operational margin of 18.16%, increased net profit margin of 4.28% and higher return on investment of 18.32%.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, PT Indonesia Power selanjutnya disebut Indonesia Power atau Perusahaan' dapat melalui tahun 2017 dengan mencatatkan kinerja yang baik. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris memastikan bahwa Indonesia Power telah melaksanakan kegiatan operasionalnya sesuai dengan rencana bisnis yang telah ditetapkan. Perkenankanlah kami selaku Dewan Komisaris untuk melaporkan kinerja Direksi sekaligus laporan pelaksanaan tugas pengawasan untuk tahun buku 2017.

Sejak krisis keuangan global, perekonomian dunia di tahun 2017 menghadapi berbagai kekhawatiran dan tantangan seperti adanya ketidakpastian kebijakan, proteksionisme dagang, serta kondisi politik yang penuh dinamika di seluruh belahan dunia. Seiring berjalannya waktu, tantangan tersebut dapat dilalui dan saat ini tengah menunjukan arah perbaikan. Hal tersebut dibuktikan dengan perekonomian dan perdagangan global terus menguat, pasar keuangan meningkat, serta kondisi operasional di negara-negara ASEAN juga semakin membaik. Pertumbuhan ekonomi global mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 3,7%, jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan di tahun 2016 sebesar 3,2%. Perbaikan ekonomi terlihat pada sektor investasi, perdagangan dan manufaktur. Perekonomian negara-negara ASEAN tumbuh rata-rata sebesar 5,2% dibandingkan pertumbuhan di tahun 2016 sebesar 4,8%.

Dear Shareholders and Stakeholders,

First of all, let us all praise Allah SWT, God the Almighty, since thanks to His blessings and gifts PT Indonesia Power, hereinafter referred to as Indonesia Power or the Company, successfully passed 2017 by achieving good performance. In fulfilling its duties and responsibilities, the Board of Commissioners confirms that Indonesia Power has conducted its operations in accordance with the business plan in place. Therefore, as the Board of Commissioners, we would like to report the Directors' performance and our supervisory duty for the fiscal year 2017.

Since the global financial crisis hit, in 2017 the world's economy still had several concerns and faced several challenges, such as uncertain policies, trade protectionism and highly dynamic political situations in every corner of the world. However, with the passing of time, such challenges could be overcome and now we could see a lot of improvements. It is proven by the strengthening of global market and trade that continues to take place, improving financial markets and growing operational activities in ASEAN countries. Global economic growth posted an average growth of 3.7%, higher than the previous year that reached 3.2%. The economic improvement can be seen from the sectors of investment, commerce and manufacture. ASEAN countries' economic growth saw an average increase of 5.2% compared to 2016's growth that stood at 4.8%.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
REPORT FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS

Sementara perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,1% di tahun 2017, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,0%. Inflasi mencapai level 3,6% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,02%. Nilai tukar Rupiah mengalami depresiasi pada akhir tahun 2017 mencapai sebesar Rp13.540 per Dolar US. Walaupun pertumbuhan permintaan listrik sepanjang tahun 2017 mengalami perlambatan berada pada kisaran 3,8%, namun hal tersebut diharapkan tidak berlangsung lama karena pusat-pusat pertumbuhan baru seperti kawasan industri diharapkan akan selesai dalam waktu dekat. Faktor-faktor di atas tentunya mempengaruhi perkembangan industri listrik nasional.

Meanwhile, Indonesia managed to reach an economic growth of 5.1% in 2017, an increase compared to the previous year's 5%. The inflation rate was at 3.6% compared to 2016 which was 3.02%. The Rupiah depreciated to Rp13,540 per US Dollar by the end of 2017. Even though electricity demand in 2017 had a slow growth at 3.8%, this is expected to improve in the near future as new centers of economic development such as new industrial areas come to the fore. Those factors, needless to say, influence electric power industry development.

Dengan berbagai tantangan di atas, Indonesia Power berhasil menutup tahun 2017 dengan pencapaian yang cukup menggembirakan, di mana laba komprehensif meningkat 11,97% terutama dipengaruhi peningkatan pendapatan jasa O&M. Indonesia Power mengembangkan berbagai strategi dan inisiatif baru sebagai modal dasar dalam meraih peluang dan mengoptimalkan pencapaian kinerja saat ini dan masa mendatang.

With various challenges described above, Indonesia Power still ended 2017 with significant achievements, where the Company booked an increased comprehensive profit of 11.97% which especially was influenced by revenue generated from the O&M service. Indonesia Power also keeps on developing strategies and taking new initiatives as the foundation laid for seizing the opportunity and optimizing current performance well into the future.

Penilaian atas Kinerja Direksi

Dalam ketidakpastian perekonomian global maupun nasional telah memberikan dampak terhadap kondisi industri listrik di tahun 2017, namun demikian Direksi mampu mengambil berbagai inisiatif strategis dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan. Direksi telah melaksanakan arahan dan nasehat Dewan Komisaris terkait dengan aspek yang perlu mendapat perhatian. Yaitu terkait dengan program efisiensi biaya pokok produksi (BPP), mengupayakan penyelesaian permasalahan pasokan gas dan batubara, dan penataan ulang terhadap kegiatan bisnis seluruh Anak Perusahaan sehingga memberikan nilai tambah yang optimal serta peningkatan kompetensi pegawai secara berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan pengoperasian seluruh pembangkit.

Assessment on the Board of Directors' Performance

Economic uncertainties both at global and national levels had given significant impacts to electricity industry in 2017. However, the Board of Directors was able to take some strategic initiatives as a way to improve the Company's performance. The Directors implemented the directions and heeded the advices from the Board of Commissioners in relation to the aspects that need more attention, such as the production cost efficiency program, resolving gas and coal supply issues, restructuring business activities of all subsidiaries so they could provide optimized added values, and continuous personnel competency development in an effort to fulfill operational needs in all the Company's power plants.

Indonesia Power telah menunjukkan kinerja keuangan maupun operasional yang cukup baik sepanjang tahun 2017 dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Realisasi produksi energi listrik tahun 2017 menurun 2,22% menjadi sebesar 42.220,40 GWh dibandingkan tahun 2016 sebesar 43.180,60 GWh. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan produksi pembangkit PLTA karena variasi musim dimana tahun 2017 merupakan musim normal dan terjadi penurunan pasokan gas ke Tambak Lorok di UP Semarang. Untuk menanggulangi hal tersebut, Perusahaan telah melakukan peningkatan keandalan dan *availability* PLTU Suralaya serta berkoordinasi aktif dengan PLN P2B untuk pengoperasian PLTP dalam rangka penyerapan TOP panas bumi UP Kamojang. Adapun realisasi penjualan energi listrik pada tahun 2017 menurun 2,40% menjadi sebesar 40.307,40 GWh dibandingkan tahun 2016 sebesar 41.299,01 GWh.

Indonesia Power showed good performances both in financial and operational activities throughout 2017, compared to the previous year. Electricity production in 2017 decreased by 2.22% to around 42,220.40 GWh compared to 2016 that reached 43,180.60 GWh. The decrease was caused by the slowing down of HPP production due to seasonal varieties where 2017 was a normal season and declining gas supply to Tambak Lorok in Semarang GU. To overcome it, the Company improved the availability and reliability of SPP Suralaya and actively coordinated with PLN P2B to commence Geothermal Power Plant operation for absorbing the geothermal TOP in GU Kamojang. As for electricity sales in 2017, it saw a decline of 2.40% to around 40,307.40 GWh compared to the previous year's 41,299.01 GWh.

Indikator kinerja operasi pembangkit terdiri dari faktor keandalan (*Equivalent Availability Factor*/EAF), faktor gangguan (*Equivalent Forced Outage Rate*/EFOR), dan efisiensi thermal. Nilai EAF korporat tahun 2017 mencapai sebesar 86,55%, meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 85,63%. Pencapaian *Equivalent Forced Outage Rate* (EFOR) tahun 2017 sebesar 5,95% meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 2,94% dan realisasi Efisiensi Thermal Netto tahun 2017 lebih baik menjadi 33,95% dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 32,90%.

The indicators of generating operational performance consist of the Equivalent Availability Factor (EAF), Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) and thermal efficiency. The Company's EAF ratio reached 86.55% in 2017, which increased from the previous year of 85.63%. The EFOR ratio in 2017 reached 5.95% which increased from 2.94% in 2016 while the Net Thermal Efficiency in 2017 reached 33.95%, which meant it was better compared to the 2016's 32.90%.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi telah bekerja dengan baik dalam mengelola Indonesia Power di sepanjang tahun 2017. Penilaian kami didasarkan pada sejumlah indikator obyektif, antara lain margin operasi meningkat 18,16% menjadi sebesar 13,19, margin laba bersih meningkat 4,28% menjadi 8,20 dan tingkat pengembalian investasi meningkat 18,32% menjadi sebesar 4,79. Meskipun total aset mengalami depresiasi 1,15% menjadi sebesar Rp218.339.042 juta, namun Perusahaan berhasil menurunkan biaya pokok produksi (BPP), serta meningkatkan pertumbuhan laba bersih secara signifikan menjadi sebesar Rp3.232.323 juta.

The Board of Commissioners believes that the Board of Directors had conducted Indonesia Power management properly in 2017. Our assessment is based on a number of objective indicators, such as operating margin which increased by 18.16% to 13.19, net profit margin increased by 4.28% to 8.20 and increased return on investment as much as 18.32% to 4.79. Even though the total assets depreciated by 1.15% to around Rp218,339,042 million, the Company successfully lowered production cost while increased the net profit growth significantly to Rp3,232,323 million.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
REPORT FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS

Indonesia Power terus mendorong setiap strategi dan berbagai upaya dalam meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Pada tahun 2017 Indonesia Power mencapai kinerja keuangan yang positif dibandingkan tahun lalu, dimana pendapatan usaha meningkat sebesar 7,44% yang dikontribusi dari pendapatan konsesi jasa dan pendapatan jasa, serta laba komprehensif meningkat sebesar 11,97%. Pendapatan usaha tahun 2017 meningkat 7,44% menjadi sebesar Rp39.436.418 juta dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp36.705.954 juta, yang didorong oleh kenaikan tarif pendapatan penjualan listrik dan pendapatan jasa O&M. Jumlah laba komprehensif meningkat menjadi sebesar Rp3.232.323 juta dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp2.886.704 juta, terutama dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan jasa O&M.

Indonesia Power continues to support every strategy and effort to improve the Company's performance in all respects. Throughout 2017, Indonesia Power recorded positive financial performance in comparison to the previous year where the operating revenues increased to 7.44%, obtained from the contribution of concession and service revenues as well as comprehensive revenue that increased by 11.97%. The operating revenues grew by 7.44% to Rp39,436,418 million, compared to the previous year of 2016 which posted Rp36,705,954 million, thanks to the increasing tariffs in electricity sales and O&M service revenues. The comprehensive revenue increased to Rp3,232,323 million compared to 2016's Rp2,886,704 million, owing to the increasing O&M service revenue.

Pandangan atas Prospek Usaha Perusahaan yang Disusun Direksi

Pertumbuhan ekonomi nasional untuk tahun 2018 diperkirakan lebih baik dibanding tahun sebelumnya, dengan telah mempertimbangkan potensi dan berbagai risiko ekonomi baik yang berasal dari eksternal maupun domestik. IMF memperkirakan pertumbuhan global menjadi 3,9% pada tahun 2018 dan 2019, dan ASEAN akan tumbuh sebesar 5,1% sedangkan Indonesia diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,4%.

Sebagai salah satu kebutuhan utama, energi listrik berdasarkan RUPTL PLN 2016-2025 diperkirakan akan meningkat menjadi 457,0 TWh pada tahun 2025, atau tumbuh rata-rata 8,6% per tahun. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan listrik tersebut diperlukan produksi listrik baik dari yang berbahan bakar energi fosil dan juga energi baru terbarukan seperti panas bumi. Adapun jumlah pelanggan diproyeksikan terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2018 diprediksi mencapai 71.046 pelanggan dan 92.974 pelanggan di tahun 2027. Meningkatnya jumlah konsumsi listrik dan pelanggan tentunya berdampak positif untuk produksi listrik termasuk penggunaan energi terbarukan secara lebih optimal.

Review on the Company's Business Prospect that the Board of Directors Prepared

National economic growth in 2018 is predicted to be better than in the previous year, taking into account the economic potentials and risks both from external and internal factors. The IMF predicted that the global economic growth would be at 3.9% in 2018 and 2019. ASEAN's economic growth is expected to rise to 5.1% while Indonesia's national growth is predicted to reach 5.4%.

As one of the main needs, based on the Electric Power Supply Business Plan (RUPTL) of PLN for the period 2016-2025 electricity will increase to 457.0 TWh in 2025, or an increase of 8.6% per year. Therefore, in a bid to fulfill the demand for electricity, it is necessary to produce more electricity derived from both fossil fuels and such renewable energy as geothermal. The number of electric customers is projected to grow year by year. In 2018, it is projected to reach 71,046 customers and 92,974 customers in 2027. The upturn in electricity consumption and number of customers will surely give positive impacts on electricity production, including the utilization of renewable energy optimally.

Dewan Komisaris menilai bahwa prospek usaha yang telah disusun oleh Direksi dipandang dapat menciptakan *sustainable value* bagi para pemegang saham maupun bagi para pemangku kepentingan lainnya. Pengembangan kapasitas pembangkit tenaga listrik dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pemerintah, diupayakan dengan prinsip biaya penyediaan listrik terendah (*least cost*), dengan tetap memenuhi kecukupan daya dan tingkat keandalan yang wajar dalam industri tenaga listrik. Dewan Komisaris optimis jika upaya dan langkah strategi yang dilakukan oleh Direksi dan seluruh pegawai dalam meningkatkan pertumbuhan yang berkelanjutan telah berada pada jalur yang benar dalam mencapai Visinya "Menjadi perusahaan energi tepercaya yang tumbuh berkelanjutan".

The Board of Commissioners observed that the business prospect formulated by the Directors is capable of creating sustainable values to both shareholders and stakeholders. The development of plant capacity is implemented in accordance with the government policy and based on the principle of least cost on electricity provision while ensuring the adequacy of electricity power supply and reasonable level of reliability in electrical industry. The Board of Commissioners is optimistic that the Directors and all Indonesia Power personnel has carried out the strategic efforts and measures in improving sustainable development in the right track to achieve the mission "To become a trusted energy company with sustainable growth".

Selain itu, Dewan Komisaris berpendapat bahwa Indonesia Power perlu terus melakukan penyempurnaan proses bisnis terutama terkait dengan kaji ulang kegiatan usaha seluruh anak perusahaan di bawah grup Indonesia Power sehingga mendukung proses bisnis PLN Grup. Indonesia Power akan terus mengembangkan energi baru terbarukan yang aman dan bersih, strategi maupun operasional yang andal agar dapat terus tumbuh berkelanjutan di masa mendatang. Kemampuan dan pengembangan individu pegawai, serta kerjasama tim yang solid perlu terus ditingkatkan melalui program inovasi yang akan memberi nilai tambah.

In addition, the Board of Commissioners believes that Indonesia Power needs to continue the refinement of its business process, especially related to the review of business activities for all of its subsidiaries to support PLN Group's business process. Indonesia Power will keep developing clean and safe new, renewable energy and also reliable strategy and operations, so it continues to grow sustainably in the future. The personnel's ability and development as well as good team work needs to be improved through innovation programs which ensure added values.

Komitmen Implementasi Tata Kelola Perusahaan

Dewan Komisaris secara konsisten telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam rangka menjaga keselarasan dan keseimbangan antara kepentingan Indonesia Power dan seluruh pemangku kepentingan guna meraih kinerja yang optimal dan berkesinambungan. Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi terhadap kemajuan yang dicapai oleh Indonesia Power sepanjang tahun 2017 di berbagai bidang baik terkait dengan kinerja usaha maupun operasional Perusahaan. Dalam upaya mencapai keunggulan dan meraih kepercayaan, Indonesia Power senantiasa mendorong peningkatan

Commitment on the Implementation of Good Corporate Governance

The Board of Commissioners consistently implements the principles of Good Corporate Governance (GCG) in order to keep the balance and harmony between Indonesia Power's interests and that of all the stakeholders in achieving optimum and sustainable performance. The Board also expressed its appreciation for the progress Indonesia Power made in 2017 in all aspects, related to business performance and the Company's operational activity. As a way to accomplish excellence and gain trust, Indonesia Power always encourages the improvement of GCG implementation

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
REPORT FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS

implementasi GCG dan berupaya menciptakan budaya yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Di tahun 2017, Indonesia Power telah melakukan sinergi GCG pada Anak Perusahaan, menyelenggarakan *Vendor Meeting* dan Survei Perilaku Etis kepada mitra kerja, serta melakukan evaluasi penerapan GCG secara berkala. Selain itu, telah terdapat pembagian tugas yang jelas antar anggota Dewan Komisaris, dimana salah seorang anggota Dewan Komisaris ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam pengawasan implementasi GCG.

and establishes corporate culture upholding integrity, professionalism and compliance with the prevailing regulations. During the course of 2017, Indonesia Power enhanced synergy on GCG implementation with the subsidiaries, organized Vendor Meeting and conducted an Ethical Behavior Survey to its business partners as well as evaluated the implementation of GCG periodically. In addition, there are clear job descriptions between members of the Board of Commissioners, in which a member of the Board is appointed as the Person in Charge for supervising GCG implementation.

Untuk tahun 2017, Indonesia Power telah melakukan *assessment* mengacu pada Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 dengan memperoleh skor GCG sebesar 93,07% dari total nilai maksimal sebesar 100,00 yang setara dengan 93,07% sehingga secara *overall* hasil *assessment* GCG mendapatkan predikat "Sangat Baik". Indonesia Power juga telah mengikuti *rating* GCG yang diselenggarakan oleh The Institute for Corporate Governance (IICG) mendapatkan predikat "*The Trusted Company*" dengan capaian skor 84,22 eningkat dari skor tahun sebelumnya sebesar 82,94. Dengan demikian, Dewan Komisaris meyakini penerapan GCG mampu mendorong penciptaan nilai tambah dalam jangka panjang sekaligus mencapai kinerja ekselen.

In 2017, Indonesia Power conducted assessment that refers to Decree of the Secretary to the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 with a GCG score of 93.07% from a maximum of 100.00 or equal to 93.07%, so overall the result of GCG assessment is "Very Good". Indonesia Power also attended GCG rating organized by The Institute for Corporate Governance (IICG) and acquired the title of "The Trusted Company" by scoring 84.22 that increased from the previous year's of 82.94. Therefore, the Board of Commissioners believes that the implementation of GCG is able to support the creation of long term added values and achievement of excellent performance.

Terkait dengan manajemen risiko, Indonesia Power telah menerapkan kerangka kerja berdasarkan *Enterprise Risk Management* (ERM) dalam aktivitas usaha dan pengambilan keputusan bisnis. Kami menilai Direksi berhasil melaksanakan ERM sebagai inisiatif yang berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur manajemen risiko yang memadai. Pada tahun 2017, Direksi telah melaksanakan seluruh proses-proses manajemen risiko di Indonesia Power yang mencakup 1) identifikasi risiko yang signifikan dalam kegiatan bisnis Perusahaan; 2) pengukuran risiko dengan metodologi yang memadai; 3) pengelolaan, pengendalian dan pelaporan risiko secara berkesinambungan guna mengevaluasi dan mengelola risiko yang ada.

Related to risk management, Indonesia Power has implemented an Enterprise Risk Management (ERM)-based work plan for its business activities and decision making. We deemed that the Directors has succeeded in implementing ERM as a sustainable initiative with the adequate support of risk management infrastructure. The Board of Directors conducted all risk management processes throughout 2017 that comprised: 1) identification of significant risks within the Company's business activity, 2) risk measurement by applying proper method, 3) continuous risk management, supervision and reporting as a way to evaluate and manage existing risks.

Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan dan monitoring, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko sesuai peran dan fungsinya sebagaimana diatur dalam piagam komite yang menjadi pedoman kerja masing-masing komite.

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas pengendalian internal yang dilakukan oleh audit internal maupun eksternal serta mengawasi penerapan GCG. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit memiliki pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam komite mengacu pada Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: 240.K/010/IP/2016 dan Nomor: 014. SK/DEKOM-IP/2016. Sepanjang tahun 2017, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali sesuai program kerja yang ditetapkan antara lain membahas telaah atas informasi keuangan Perusahaan, telaah atas program audit tahunan maupun telaah atas atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan auditor baik internal maupun eksternal. Seluruh temuan, catatan dan rekomendasi dari hasil pelaksanaan kegiatan, penelaahan dan analisa Komite Audit selama tahun 2017 telah dikomunikasikan dan didiskusikan dengan manajemen Indonesia Power, Satuan Audit Internal (SAI) dan auditor eksternal, serta telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan tindak lanjutnya dari manajemen Perusahaan.

Komite Manajemen Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam bidang pengawasan penerapan manajemen risiko yang efektif dan menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Manajemen Risiko memiliki pedoman kerja yang ditetapkan dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Nomor 241/010/IP/2016 dan Nomor 016. SK/DEKOM-IP/2016. Sepanjang tahun 2017, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali rapat internal sesuai program kerja yang ditetapkan. Komite Manajemen Risiko secara aktif memberikan masukan penyempurnaan terkait dengan pengawasan dan pengendalian risiko serta pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi agar berjalan efektif.

Performance Assessment of the Board of Commissioners

In an effort to improve the effectiveness of monitoring and supervision, the Board of Commissioners is assisted by Audit Committee and Risk Management Committee in accordance with their duties and responsibilities as regulated in the Committee Charters that become their guidelines.

Audit Committee helps the Board of Commissioners to ensure the effectiveness of internal control conducted by internal and external audit and to monitor the implementation of GCG. In performing its duties, Audit Committee has a guideline which is determined in the Committee Charter that refers to Joint Decree of the Board of Directors and Commissioners' No. 240.K/010/IP/2016 and No. 014.SK/DEKOM-IP/2016. During 2017, Audit Committee organized nine meetings in accordance with the work plan. The meetings discussed, among other things, reviews of the Company's financial statement, annual audit program and adequacy of audit conducted by both internal and external auditors. All findings, notes and recommendations from the Audit Committee's activity, analysis, and evaluation in 2017 had been communicated and discussed with Indonesia Power management, Internal Audit Unit and external auditor, and reported to the Board of Commissioners for improvement and further follow-up from the Company's management.

Risk Management Committee helps the Board of Commissioners monitor the implementation of effective risk management and run the function of nomination and remuneration. In performing its duties, Risk Management Committee refers to the guideline determined in Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners No. 241/010/IP/2016 and No. 016.SK/DEKOM-IP/2016. Throughout 2017, Risk Management Committee organized seven internal meetings in accordance with the work plan. Risk Management Committee gives advices for improving risk control as well as effective implementation of the nomination and remuneration function.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
REPORT FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS

Selain itu, Dewan Komisaris mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris yang bertugas memberikan dukungan administratif dan kesekretariatan kepada Dewan Komisaris dalam memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris.

In addition, the Board of Commissioners appointed Secretary to the Board that provides administrative and secretarial supports to expedite the Board of Commissioners' duties.

Pandangan atas Penerapan *Whistleblowing System*

Indonesia Power telah menerapkan sistem pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System/WBS) berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor 136.K/020/IP/2011 dan Nomor 011.SK/DEKOM-IP/2011. Hal tersebut merupakan wujud nyata upaya pengendalian internal Perusahaan secara menyeluruh dalam setiap aspek kegiatan bisnisnya. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit berperan untuk melakukan pengawasan guna memastikan terselenggaranya WBS dengan baik apabila pengaduan pelanggaran merupakan jalur Dewan Komisaris. Adapun Pengaduan pelanggaran jalur Direksi, tim diketuai oleh Direktur Utama apabila pelanggaran diduga dilakukan oleh pegawai jenjang Eksekutif Utama dan diketuai oleh Kepala Satuan Audit Internal apabila pelanggaran diduga dilakukan oleh pegawai lainnya.

Secara bertahap, Indonesia Power terus meningkatkan mekanisme pelaporan dalam sistem WBS. Dewan Komisaris bersama dengan Komite Audit dan unit-unit lainnya melakukan evaluasi serta menerapkan langkah-langkah tindak lanjut atas laporan yang diterima. Selama tahun 2017, pelaporan pelanggaran yang masuk sebanyak 10 laporan dan seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti.

Our Take on Whistle Blowing System Implementation

Indonesia Power has put the Whistle Blowing System (WBS) in place, based on Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors No. 136.K/020/IP/2011 and No. 011.SK/DEKOM-IP/2011. The issuance of such decree represents the Company's actual effort in internal control for all aspects of its business. The Board of Commissioners, assisted by Audit Committee, plays a key role in monitoring and ensuring proper implementation of the WBS if the whistle blowing falls under the Board's responsibility. When the complaint falls under the Directors' responsibility, the President Director leads the team when the perpetrator is from Executive level. But when the alleged violation is committed by other employees, the team is led by Head of the Internal Audit Unit.

Through the stages, Indonesia Power keeps on improving the reporting mechanism of the WBS. Together with Audit Committee, the Board of Commissioners and related units conducted evaluation and follow-ups on the received report. Throughout 2017, there were 10 (ten) reports of alleged infringements and all was managed properly.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Pada tahun 2017 tidak terjadi perubahan komposisi Dewan Komisaris sehingga jumlah dan komposisinya tetap berjumlah 6 (enam) orang. Yaitu terdiri dari satu orang Komisaris Utama, tiga orang Komisaris Independen, dan dua orang anggota Komisaris. Komposisi Dewan Komisaris telah mempertimbangkan aspek keberagaman dan tentunya proses pengambilan keputusan agar dapat dilakukan secara efektif. Kami akan terus meningkatkan peran aktif setiap anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penasehatan agar kinerja Indonesia Power terus tumbuh berkelanjutan di masa depan.

Change to the Composition of the Board of Commissioners

In 2017, there was no alteration in the Board of Commissioners composition, so it remains consisting of 6 (six) people with the roles as follows: one President Commissioner, three Independent Commissioners and two Member Commissioners. Such composition has considered that the diversity aspect and decision-making process are managed effectively. The Board of Commissioners ensures that each of its member fulfills his/her supervisory and advisory roles to support Indonesia Power's continuous performance into the future.

Apresiasi

Atas nama Dewan Komisaris, Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak atas pencapaian kinerja Indonesia Power tahun 2017 kepada Pemegang Saham, Direksi, Pelanggan, Pegawai, mitra kerja dan seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungannya sehingga Indonesia Power mampu mencapai kinerja positif dan terus tumbuh berkelanjutan.

Dewan Komisaris akan selalu berupaya untuk profesional dan independen dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat agar kinerja Perusahaan dapat terus tumbuh di masa mendatang. Demikianlah laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris tahun 2017 ini disampaikan. Dengan tetap menjalin sinergi positif dengan berbagai pihak, Indonesia Power berkomitmen untuk dapat mengatasi tantangan sekaligus meraih peluang-peluang baru di tahun mendatang.

Appreciation

On behalf of the Board of Commissioners, we would like to extend our gratitude and appreciation to all related parties for Indonesia Power's best performance and achievement in 2017; to the Shareholders, Board of Directors, Customers, Personnel, Partners and all the stakeholders for their continued trust and support, so that Indonesia Power is able to demonstrate positive performance and continue to grow in a sustainable manner.

The Board of Commissioners will at all times be professional and independent in implementing its supervisory and advisory roles so that the Company's performance keeps growing in the future. Thus, this Board of Commissioners' report on monitoring in 2017 was written and delivered. By maintaining positive synergies with relevant parties, Indonesia Power is committed to overcoming the obstacles and challenges and seizing new opportunities in the upcoming years.

Jakarta, 30 Mei 2018 | Jakarta, May 30, 2018
Atas Nama Dewan Komisaris PT Indonesia Power
On behalf of the Board of Commissioners of PT Indonesia Power



Bagus Setiawan
Komisaris Utama
President Commissioner

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS





Keterangan foto (dari kiri ke kanan)
Photo caption (left to right)

1. **Tri Setyo Nugroho**
   Komisaris
   Commissioner
2. **Abdi Mustakim**
   Komisaris
   Commissioner
3. **Bagus Setiawan**
   Komisaris Utama
   President Commissioner
4. **Agus Hernawan**
   Komisaris
   Commissioner
5. **Munir Ahmad**
   Komisaris
   Commissioner
6. **Ahmad Yani**
   Komisaris
   Commissioner

LAPORAN DIREKSI
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS



Sripeni Inten Cahyani

Direktur Utama

President Director

Indonesia Power senantiasa berupaya memberikan yang terbaik bagi segenap pemangku kepentingan dengan pencapaian kinerja di berbagai bidang. Pencapaian kinerja keuangan untuk tahun 2017 menunjukkan hasil yang positif. Perolehan pendapatan usaha meningkat 7,44%, laba tahun berjalan meningkat 11,97%, margin laba bersih meningkat 4,28% dan tingkat pengembalian investasi meningkat 18,32%. Selain itu, Indonesia Power telah memperoleh penghargaan dan prestasi di berbagai bidang antara lain penghargaan *Special Mention as The Most Popular Subsiadiary of State-Owned Enterprises Category Energy, Energy Management Leadership Award 2017, Appreciation of Human Capital Management Improvement 2017*.

Indonesia Power always strives to provide all stakeholders with the best performance achievement in all areas. Financial performance in 2017 brought positive result. Operating revenue increased by 7.44%, profit for the year increased at 11.97%, net profit margin increased at 4.28%, and return of investment increased by 18.32%. In addition, Indonesia Power managed to win awards and scored achievement in various areas, including Special Mention as The Most Popular Subsidiary of State-Owned Enterprises Category Energy, Energy Management Leadership Award 2017 and Appreciation of Human Capital Management Improvement 2017.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Direksi Indonesia Power kembali mampu membawa Perusahaan melalui tahun 2017 yang penuh tantangan dengan cukup baik dan penuh prestasi. Untuk itu, atas nama Direksi, dengan ini kami sampaikan Laporan Tahunan Perusahaan untuk tahun buku 2017 sebagai bentuk pertanggungjawaban kami atas pengelolaan Perusahaan. Tahun ini, Laporan Tahunan mengambil tema "*The Next Level Through Human Capital Excellence and Innovation*". Ini menunjukkan komitmen Kami untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai modal Perusahaan dalam memenangkan persaingan sekaligus melakukan berbagai inovasi di bidang teknologi pembangkitan agar dapat memberikan nilai tambah terhadap proses bisnis yang terjadi.

Pemulihan perekonomian global masih tetap berlanjut selama tahun 2017, meskipun belum terlalu signifikan. Pertumbuhan ekonomi global rata-rata tumbuh sebesar 3,7%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan di tahun 2016 sebesar 3,2%. Adapun perbaikan ekonomi terlihat pada sektor investasi, perdagangan dan manufaktur. Semakin membaiknya perekonomian global memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Sementara perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,1% di tahun 2017, membaik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,0%. Di tengah perbaikan

Dear Valued Shareholders and Stakeholders,

Praise and thanks go to God the Almighty for the grace and mercy, the Board of Directors of Indonesia Power had been able to drive the Company through challenges in 2017 with satisfying result and achievements. In the name of the Board of Directors, we hereby present the Company's Annual Report 2017 as a manifestation of our responsibility in the Company management. The theme of this Annual Report is "The Next Level Through Human Capital Excellence and Innovation". This theme reflects our commitment to keep on improving human resources quality as Company's asset to win the competition and make various innovation in power generation technology, in order to bring added values to the business process.

Global economic recovery continued throughout 2017, even when the progress was insignificant. The average growth of the global economy was 3.7%, higher than the 2016's growth at 3.2%. Meanwhile, economic improvement was seen in investment, trade, and manufacturing sector. The developing global economy brought positive impact on our national economy. At the same time, Indonesian economy grew at 5.1% in 2017, better than the previous year at 5.0%. Amid such improvement, inflation rate was 3.6% in comparison to the same in the previous year at 3.02% while Rupiah

LAPORAN DIREKSI
REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS

tersebut, tingkat inflasi mencapai level 3,6% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,02% dan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar US mengalami depresiasi mencapai sebesar Rp13.540. Adapun pertumbuhan permintaan listrik sepanjang tahun 2017 mengalami perlambatan berada pada kisaran 3,8%.

exchange rate to US Dollar depreciated to IDR13,450 per USD. As for the electricity demand throughout 2017, the year recorded a decline of 3.8%.

Untuk itulah Indonesia Power senantiasa memonitor perkembangan perekonomian baik global, nasional maupun perkembangan industri kelistrikan agar dapat merumuskan strategi bisnis yang tepat. Pelaksanaan strategi tersebut telah membuahkan hasil dengan pencapaian kinerja yang baik di 2017. Kami terus berkomitmen mendukung ketahanan listrik nasional dengan melakukan efisiensi biaya pembangkit, yang berkontribusi terhadap penurunan Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik PT PLN (Persero). Selain itu, beberapa penugasan dari PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham, untuk mendukung program pemerintah juga Kami laksanakan, diantaranya PLTU Muara Jawa 2x27,5 MW yang merupakan warisan dari Pemerintah dalam FTP-1 yang berhasil Kami selesaikan dan akan melakukan produksi komersial perdana atau Commercial Operation Date (COD) dalam waktu dekat. Kami juga terus berkomitmen dalam meningkatkan produksi listrik dengan bauran energi terbarukan (EBT). Untuk tahun 2017, penggunaan bauran energi EBT tersebut adalah 7.099,98 GWh atau 60,83% untuk tenaga air 2.781,27 GWh dan 4.318,71 GWh atau 39,17% untuk panas bumi. Tentu kami akan terus meningkatkan penggunaan EBT untuk mendukung gerakan energi bersih maupun program rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca yang dicanangkan pemerintah.

Therefore, Indonesia Power always monitors economic dynamics at both national and global levels as well as developments in power generation industry in order to formulate the effective business strategies. Such strategies were well implemented and brought to fruition the solid performance recorded in 2017. We are committed to continuously support the efforts aimed at ensuring national power security by providing electricity at competitive prices, successfully lowering Cost of Goods Sold (BPP) which affect PT PLN (Persero) while maintaining the Company's profitability. We managed to complete PT PLN (Persero)'s assignment at PLTU Muara Jawa 2x27.5 in support of the FTP-1 program mandated by the Government. We will deliver the Commercial Operation Date (COD) in the near future. We also continue to be committed to increasing electricity production with new, renewable energy mix (EBT). For 2017, the use of the EBT mix was 7,099.98 GWh comprising 60.83% for hydropower 2,781.27 GWh and 4,318.71 GWh or 39.17% for geothermal. We will certainly continue to intensify the use of EBT to support clean energy movement as well as the national action plan program for greenhouse gas emission reduction proclaimed by the government.

Seiring dengan program Pemerintah yang giat membangun infrastruktur ketenagalistrikan untuk memenuhi pasokan listrik 35 ribu MW, PT PLN (Persero) bersama dengan Indonesia Power melakukan sekuritisasi aset keuangan melalui penerbitan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Danareksa Indonesia Power PLN 1 (KIK EBA-DIPP 1). Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan alternatif sumber pembiayaan eksternal sekaligus mengoptimalkan peluang bisnis dan mengambil peran yang semakin besar. Kiranya tidak berlebihan apabila kontribusi tersebut kami sebut dengan "The Power of Indonesia Power".

Consistent with the Government's expansive program to build electricity infrastructure to meet the supply target of 35,000 MW, PT PLN (Persero) together with Indonesia Power issued asset-backed securities through the Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Danareksa Indonesia Power PLN 1 (KIK EBA-DIPP 1). This aims to source alternative external financing as well as to optimize business opportunities and take on increasingly significant roles. It is not too far off if we call such contribution "the power of Indonesia Power".

Pencapaian Kinerja Indonesia Power Tahun 2017

Implementasi Kebijakan Strategis

Dalam menghadapi kondisi ekonomi yang penuh tantangan, Indonesia Power telah menetapkan strategi utama sebagaimana tertuang dalam RJPP 2017-2021, yaitu meliputi 1) pengembangan pembangkit melalui skema kemitraaan strategis dengan berbagai pihak, 2) peningkatan kapasitas pembangkit *renewable energy*, 3) pengembangan jasa O&M di dalam dan di luar PLN, 4) peningkatan ketersediaan, keandalan dan efisiensi termal pembangkit yang dikelola serta ramah lingkungan, 5) peningkatan peran Anak Perusahaan sesuai dengan *value creation* yang ditetapkan, 6) peningkatan keamanan dan jumlah pasokan energi primer non-BBM dengan harga yang kompetitif dan 7) pencapaian *Human Capital Excellence*.

Adapun kebijakan dan program kerja Perusahaan tahun 2017 fokus untuk mencapai sasaran di bidang *Human Capital Excellence, Operation & Maintenance Excellence* dan *Business Development Excellence*. Direksi telah melakukan restrukturisasi organisasi di tahun 2017 dalam rangka yang menyelaraskan proses bisnis dan fokus pada eksekusi ekselen sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direksi No.193.K/010/IP/2017 tentang Struktur Organisasi Indonesia Power tanggal 12 Oktober 2017.

Selain itu, Indonesia Power juga berupaya terus meningkatkan keandalan pembangkit (*availability*) dan efisiensi, baik melalui implementasi manajemen aset, inovasi dalam teknologi pembangkitan, optimalisasi peran Anak Perusahaan untuk mendukung integrasi bisnis di Indonesia Power grup khususnya di bidang jasa O&M dan energi serta mengembangkan Green Power Plant secara berkelanjutan.

Performance Achievement of Indonesia Power in 2017

Implementation of Strategic Policy

In addressing the challenging economic condition, Indonesia Power implemented its key strategies as set out in the 2017-2021 Company Long Term Plan (LTP). These strategies include 1) developing power plant through strategic partnership scheme with various parties, 2) improving the capacity of renewable energy power plant, 3) developing O&M service inside and outside of PLN, 4) improving availability, reliability, and thermal efficiency of power plants under its management and ensuring that they are environmentally friendly, 5) enhancing the role of Subsidiary in accordance with the specified value creation, 6) improving the security and amount of non-oil fuel primary energy supply at competitive price, and 7) achieving Human Capital Excellence.

Company's policy and work program in 2017 focused on achieving human capital excellence, operation & maintenance excellence, and business development excellence. The Board of Directors had carried out restructuring in 2017 to align with and focus the Company's business process on the excellent execution as set out in Decree of the Board of Directors No.193.L/010/IP/2017 concerning Organizational Structure of Indonesia Power, dated October 12, 2017.

In addition, Indonesia Power seeks to continuously improve power plant reliability, availability, and efficiency, both through implementation of asset management, innovation of power generation technology, optimization of the role of Subsidiary to support business integration in Indonesia Power group, particularly in O&M and energy service, as well as continuously develop Green Power Plant.

LAPORAN DIREKSI
REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS

Perbandingan Hasil dengan Target 2017

Dilihat dari sisi kinerja operasional pembangkitan, indikator tersebut tercermin produksi listrik, penjualan, EAF, EFOR, efisiensi *thermal* dan tara kalor. Pencapaian indikator kinerja operasional dibandingkan dengan target RKAP 2017, yaitu EAF mencapai 86,55% atau 98,13% dari target, EFOR mencapai 5,95% atau 67,78% dari target, SdOF mencapai 2,45 kali atau 65,05% dari target, efisiensi thermal mencapai 33,61% atau 97,50% dari target dan tara kalor sebesar 2.558,74 Kcal/KWh atau 97,45% dari target. Adapun realisasi produksi dan penjualan listrik tahun 2017 masing-masing sebesar 42.220,40 GWh dan 40.307,40 GWh atau 101,54% dan 101,51% dari target atau keduanya mencapai target yang ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, produksi listrik turun 2,22% dan penjualan energi listrik turun 2,40%. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh turunnya produksi pembangkit PLTA karena variasi musim dan penurunan pasokan gas ke Tambak Lorok di UP Semarang. Walaupun dari sisi penjualan tenaga listrik menurun, namun pendapatan usaha diperoleh sepanjang tahun 2017 tetap dapat tumbuh karena ditopang dari pendapatan jasa yang diberikan, seperti jasa O&M.

Untuk tahun 2017 pendapatan usaha meningkat 7,44% menjadi sebesar Rp39.436.418 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp36.705.954 juta atau 93,25% dari target, yang terdiri dari penjualan tenaga listrik sebesar Rp36.566.932 juta atau 92,72% dan pendapatan O&M lain-lain sebesar Rp2.869.486 juta atau 7,28% dari target. Adapun beban usaha mengalami peningkatan 7,54% menjadi Rp35.069.946 juta dibanding tahun sebelumnya atau 89,51% dari target dipengaruhi oleh meningkatnya komponen biaya bahan bakar sebagaimana diatur dalam kontrak ketenagalistrikan. Dengan demikian, pendapatan usaha mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan jasa O&M serta beban usaha, sehingga mendorong peningkatan laba tahun berjalan sebesar 11,97% menjadi Rp3.232.323 juta dibanding tahun sebelumnya.

Result and Target Comparison in 2017

From the operational performance aspect of a power generation, this indicator reflects electricity production, sale, EAF, EFOR, thermal efficiency and heat equivalent rate. Achievement of operational performance indicator in comparison to the target in CWBP 2017 is as follows: EAF at 86.55% or equal to 98.13% of the target, EFOR at 5.95% or equal to 67.78% of the target, SdOF at 2.45x or 65.05% of the target, thermal efficiency at 33.61% or equal to 97.50% of the target, and heat equivalent rate at 2,558.74 Kcal/KWh or equal to 97.45% of the target. Meanwhile, realization of electricity production and sale in 2017 was 42,220.40 GWh and 40,307.40 GWh respectively or equal to 101.54% and 101.51% of the target, and both of them met the specified target.

In comparison to performance in the previous year, electricity production decreased at 2.22% and electricity sale decreased at 2.40%. The decrease was mainly affected by decrease of SPP production due to season change and decrease of gas supply to Tambak Lorok GU in Semarang. Despite the decrease in electricity sale, the operating revenue in 2017 grew as it was supported by service revenue, such as O&M service.

Operating revenue in 2017 increased at 7.44% to Rp39,436,418 million in comparison to the previous year at Rp36,705,954 million or equal to 93.25% of the target, which consisted of electricity sale of Rp36,566,932 million or equal to 92.72%, and O&M revenue and other revenues of Rp2,869,486 million or equal to 7.28% of the target. Meanwhile, operating expenses increased at 7.54% to Rp35,069,946 million in comparison to the previous year or equal to 89.51% of the target, due to increase of fuel component as set out in the SPAEP (PJBTL) that specifies Component C as a pass-through. Therefore, operating revenue increased due to increase of O&M service revenue and operating expenses, which resulted in increase of profit for the year at 11.97% to Rp3,232,323 million in comparison to the previous year.

Pada tahun 2017 Indonesia Power mencatatkan posisi keuangan yang cukup baik. Total aset mengalami sedikit penurunan 1,15% menjadi sebesar Rp3.232.323 juta dibandingkan tahun sebelumnya atau 102,60% dari target terutama disebabkan oleh proses depresiasi aset tetap selama tahun 2017. Sedangkan total ekuitas menurun 1,92% menjadi sebesar Rp209.130.165 juta dibandingkan tahun 2016 atau 94,30% dari target, yang disebabkan oleh pembayaran dividen kepada pemegang saham dan penurunan ekuitas atas *other comprehensif income* dari surplus revaluasi atas pembangkit yang keluar sistem.

In 2017, Indonesia Power managed to record a good financial position. Total asset slightly decreased at 1.15% to Rp3,232,323 million in comparison to the previous year or equal to 102.60% of the target, mainly due to fixed asset depreciation in 2017. Meanwhile, total equity decreased at 1.92% to Rp209,130,165 million in comparison to the same in 2016 or equal to 94.30% of the target, due to dividend payment to shareholders and decrease of equity statement of comprehensive income from surplus of discontinued power plant revaluation.

Dalam hal efisiensi energi, Indonesia Power terus melanjutkan implementasi program Peningkatan & Pembudayaan Manajemen Efisiensi Energi (PPE) telah dimulai sejak tahun 2015 dan di tahun 2016 diimplementasikan kepada 7 unit pembangkit. Selain itu, *asset management* juga dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, implementasi ISO 50001 Manajemen Energi di seluruh unit sehingga dapat mencapai penurunan BPP untuk tahu 2017 menjadi sebesar Rp33,86 kWh. Untuk mendorong pencapaian kinerja yang ekselen, Indonesia Power secara konsisten dan berkesinambungan menerapkan Indonesia Power *Integrated Management System* (InPower IMS) yang merupakan sistem terintegrasi berbasiskan persyaratan Standar Internasional yang meliputi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 28001:2007, ISO 55001:2014, SMK3, dan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP).

As to energy efficiency, Indonesia Power continues to implement Energy Efficiency Management Culture & Enhancement (PPE) program, which began in 2015 and was implemented at 7 power generating units in 2016. In addition, asset management was carried out consistently and continuously, by which implementation of ISO 50001: Energy Management at all units contributed to COGS decrease to Rp33.86 kWh in 2017. To drive achievement of excellent performance, Indonesia Power consistently and continuously implements Indonesia Power Integrated Management System (InPower IMS), an integrated system based on International Standards, which include ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 28001:2007, ISO 55001:2014, OHSMS, and Security Management System (SMS).

Prestasi dan pengakuan dari berbagai pihak menjadi bukti bahwa Indonesia Power terus berupaya memberikan yang terbaik bagi segenap pemangku kepentingan dengan pencapaian kinerja di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Penghargaan tersebut antara lain *Special Mention as The Most Popular Subsiadiary of State-Owned Enterprises Category Energy, Energy Management Leadership Award* 2017, *Appreciation of Human Capital Management Improvement 2017* dan penghargaan lainnya. Pencapaian tersebut merupakan hasil sinergi, kolaborasi dan dukungan dari segenap pemangku kepentingan yang diharapkan membangun reputasi Perusahaan yang positif dan kuat.

Achievements and recognition from various parties proof that Indonesia Power keeps on putting all efforts to provide the best result for all stakeholders with regard to performance achievement in economic, social, and environmental aspects. These awards include Special Mention as The Most Popular Subsidiary of State-Owned Enterprises Category Energy, Energy Management Leadership Award 2017, Appreciation of Human Capital Management Improvement 2017 and several other awards. Such achievement is the result of synergy, collaboration, and support from all stakeholders, which is expected to build positive and strong reputation of the Company.

LAPORAN DIREKSI
REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS

Kendala yang Dihadapi Perusahaan

Indonesia Power memandang bahwa kendala terbesar yang dihadapi saat ini antara lain terkait dengan perubahan lingkungan bisnis, yaitu regulasi di bidang pembangkitan termasuk peran penugasan anak Perusahaan dalam mendukung program 35.000 MW yang dicanangkan pemerintah. Untuk menghadapi hal tersebut Indonesia Power telah melakukan akselerasi kompetensi bidang O&M, meningkatan kompetensi *problem-solving* serta kerjasama strategis dengan perguruan tinggi untuk penyediaan tenaga kerja dengan keahlian teknis pembangkit, selain itu Perusahaan juga menjalin kerjasama dengan mitra-mitra strategis untuk meningkatkan value creation PLN Group. Perusahaan juga melakukan inovasi pembangkitan untuk meningkatkan efisiensi pembangkit yang dikelola.

Kendala berikutnya adalah terkait dengan perijinan sehingga memperlambat pelaksanaan COD (*Commercial Operation Date*) pembangkit. Indonesia Power terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak berwenang dan berkepentingan agar Perusahaan mendapatkan kepastian perolehan perizinan serta kepastian hukum terkait pembangunan pembangkit. Adapun penetapan harga jual beli energi listrik dilakukan melalui kesepakatan harga antara Indonesia Power dengan PT PLN (Persero) dibuat setiap tahun. Hal ini menjadi tantangan bagi Indonesia Power dalam melakukan proses negosiasi dengan PT PLN (Persero) selaku pembeli tenaga listrik yang dihasilkan.

Issues Faced by the Company

Indonesia Power sees the greatest obstacle is currently related to change of business environment, i.e. regulation in electricity sector, including assignment of the Subsidiary in supporting the 35,000 MW program by the government. In addressing this issue, Indonesia Power has made competency acceleration in O&M sector, improved problem-solving competency and strategic cooperation with universities for provision of workforce with technical skill related to power plant, as well as innovations in power generation to improve efficiency of power plants under the Company's management. In addition, the Company works closely with its strategic partners to enhance creation of values within PLN Group. The Company also ensures.

Another obstacle is related to licensing that delays implementation of power plant COD (Commercial Operation Date). Indonesia Power keeps on establishing coordination with authorized and interested parties for the Company to get assurance in obtaining necessary licensing and legal certainty related to power plant construction. As to electricity sale price, it is specified upon agreement between Indonesia Power and PT PLN (Persero) in each year. This becomes a challenge for Indonesia Power in conducting negotiation process with PT PLN (Persero) as the customer of electricity power.

Prospek Usaha Perusahaan ke Depan

Pertumbuhan ekonomi nasional untuk tahun 2018 diperkirakan lebih baik dibanding tahun sebelumnya, dengan telah mempertimbangkan potensi dan berbagai risiko ekonomi baik yang berasal dari eksternal maupun domestik. IMF memperkirakan pertumbuhan global menjadi 3,9% pada tahun 2018 dan 2019, dan ASEAN akan tumbuh sebesar 5,1% sedangkan Indonesia diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,4%.

Future Prospect of the Company's Business

National economic growth for 2018 is estimated to be better than the previous year, in consideration of various economic potentials and risks, both from external and domestic sides. IMF predicted a global growth of 3.9% in 2018 and 2019, with a growth of 5.1% in ASEAN region and 5.4% in Indonesia.

Pengembangan kapasitas pembangkit tenaga listrik diarahkan untuk memenuhi pertumbuhan beban, dan pada beberapa wilayah tertentu diutamakan untuk emmenuhi kekurangan pasokan tenaga listrik. Pengembangan kapasitas pembangkit tenaga listrik dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pemerintah, misalnya dalam pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) serta peran dalam program 35.000 MW.

Power plant capacity enhancement is projected to meet the growth of electricity load, and in certain regions, to meet lack of electricity supply. Power plant capacity enhancement is carried out in line with government's policy, such as on New and Renewable Energy (NRE) and the role in 35,000 MW program.

Indonesia Power mengelola berbagai jenis pembangkit (PLTU, PLTGU, PLTG, PLTA, PLTD dan PLTP) dan menjadi modal dasar dalam meraih berbagai peluang di masa depan. Keunggulan tersebut perlu dikelola dan diciptakan suatu strategi yang sesuai dalam menghadapi tantangan dan persaingan yang makin ketat. Indonesia Power juga ikut berpartisipasi dalam pengembangan pembangkit 35.000 MW yang diprogramkan oleh pemerintah, melalui 2 (dua) cara, yaitu *pertama*, pemanfaatan area pembangkit eksisting untuk pembangunan pembangkit baru yang akan dimiliki oleh perusahaan, dan *kedua*, mengikuti *tender Independent Power Producer* (IPP) yang diselenggarakan oleh PLN, bekerjasama dengan *investor/developer* nasional maupun internasional.

Indonesia Power manages various types of power plant (SPP, GSPP, GPP, HPP, DPP, and GPP) that become its assets in achieving wide opportunities in the future. This advantage should be managed properly and appropriate strategy must be made to face the increasingly tight challenge and competition. Indonesia Power also participates in the development of 35,000 MW power plant in government's program in 2 (two) ways, i.e. by utilization of the existing power plant area for development of new power plant that will be owned by the Company, and by participating in tender for Independent Power Producer (IPP) held by PLN in cooperation with national and international investor/ developer.

Selain itu, Indonesia Power juga melakukan pengembangan sejumlah pembangkit energi terbarukan yang saat ini dalam tahap *feasibility study, engineering* dan *survey* serta proses perizinan. Dengan berbagai perkembangan tersebut serta upaya efisensi di segenap lini operasi, kami optimis kinerja Indonesia Power akan terus tumbuh secara berkelanjutan. Dalam rangka menjawab peluang dan tantangan tersebut, kami melanjutkan untuk menerapkan tiga sasaran utama, yaitu *human capital excellence, operation & maintenance excellence* serta *business development excellence*.

In addition, Indonesia Power also develops a number of renewable energy power plants, which are currently in the feasibility study, engineering, and survey stage, as well as in the licensing stage. Given these developments and efficiency effort in all operation lines, we are optimistic that Indonesia Power's performance will keep on improving. In response to these opportunities and challenges, we continue to implement three main targets, namely human capital excellence, operation & maintenance excellence, and business development excellence.

LAPORAN DIREKSI
REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS

Membangun *Human Capital Excellence*

Indonesia Power secara berkesinambungan menyesuaikan pengelolaan dan strategi pengembangan sumber daya manusia yang dapat menjawab tantangan serta menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan pasar, terutama dalam industri kelistrikan. Dalam hal pengelolaan sumber daya manusia, Indonesia Power terus berkomitmen menerapkan pengelolaan sistem *human capital* yang ekselen. Hal tersebut ditunjukkan dengan diperolehnya sejumlah penghargaan di bidang SDM antara lain *1st The Best Human Capital* 2017 Kategori *Subsidiary of State Owned Enterprise's Company, 3rd The Best Human Capital* 2017 Kategori *The Big 5 – Human Capital Company* 2017 dan *The Big 10 Human Capital Director* 2017 (Bapak Roikhan) yang diadakan oleh Majalah *Economic Review* bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Penghargaan tersebut menjadi motivasi Indonesia Power untuk terus meningkatkan pengelolaan SDM dengan praktik terbaik menuju *human capital excellence*. Yaitu dengan terus berupaya meningkatkan kualitas hidup pegawai Perusahaan dan menjamin seluruh hak-hak pegawai, termasuk memperoleh remunerasi yang layak, serta kesempatan untuk meniti karir dan mengembangkan diri mereka secara profesional.

Secara berkala Indonesia Power telah melakukan Survei *Human Resources Satisfaction Engagement* (HRSE) untuk mengetahui sejauh mana tingkat implementasi dan kepuasan pegawai serta efektivitas kebijakan SDM yang telah diterapkan. Untuk tahun 2017, tingkat kepuasan pegawai adalah sebesar 84,98% meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 80,29% yang dipengaruhi oleh adanya pencepatan karir, kesempatan untuk mutasi ke unit lain dan tingkat stabilitas unit dalam bekerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa pegawai juga merasakan Perusahaan lebih *care*. Sedangkan tingkat keterikatan pegawai tahun 2017 mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 84,26% dibandingkan tahun 2016 sebesar 84,55%, yang disebabkan adanya segmen pegawai yang masuk kerja di rentang tahun 2012-2017 sebanyak 38,67% dari total populasi pegawai mengalami penurunan skor.

Building Human Capital Excellence

Indonesia Power continuously adjusts human resources management and development strategy to be able to answer every challenge and quickly adapt to market change, particularly in electricity industry. As to human resource management, Indonesia Power is consistently committed to implement excellent human capital system management. This is indicated by achievement of several HR awards, such as 1st winner of The Best Human Capital 2017 in Subsidiary of State Owned Enterprise's Company Category, 3rd winner of The Best Human Capital 2017 in The Big 5 – Human Capital Company 2017 Category, and The Big 10 Human Capital Director 2017 (Mr. Roikhan) by Economic Review magazine, in cooperation with the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia. These awards are a motivation for Indonesia Power to keep on improving HR management through best practices towards human capital excellence. This is carried out by improving life quality of the Company's personnel and ensuring fulfillment of their rights, including providing proper remuneration and career opportunity in addition to professional self-development.

Indonesia Power regularly conducts Human Resources Satisfaction Engagement (HRSE) Survey to evaluate the implementation and effectiveness, as well as employee satisfaction, of the applied HR policy. In 2017, employee satisfaction rate was at 84.98%, increased from 2016 at 80.29% due to career acceleration, opportunity to move to other unit and unit's stability level during work. This indicates that personnel are also aware of the Company's improved care. Meanwhile, employee engagement rate in 2017 slightly decreased at 84.26% in comparison to the same in 2016 at 84.55% due to personnel hiring in 2012-2015 at 38.67% of the total population of personnel with declining score.

Kami meyakini bahwa pegawai yang kompeten, profesional, dan berdedikasi tinggi terhadap Indonesia Power merupakan mitra kerja yang terbaik bagi Perusahaan untuk dapat mengoptimalkan bisnisnya melalui inovasi dan kinerja unggul yang mereka tunjukkan. Kecukupan jumlah dan kualitas sumber daya manusia menjadi modal Perusahaan dalam memenangkan persaingan. Untuk itu, kami melakukan berbagai upaya seperti melakukan akselerasi pengembangan kompetensi, membangun *center of excellence* di bidang O&M, maupun mendirikan *safety academy*. Indonesia Power telah dan akan terus meningkatkan SDM yang ahli dan handal secara berkelanjutan guna mendukung pengembangan usaha di bidang pembangkitan maupun jasa O&M saat ini dan masa mendatang. Struktur organisasi juga telah dikaji ulang untuk menyesuaikan dengan dinamika bisnis yang terjadi, yaitu dengan membentuk organisasi yang membidangi riset dan teknologi, terutama terkait dengan industri kelistrikan dan jasa pendukungnya.

We believe that competent, professional, and dedicated personnel in Indonesia Power are the best work partners for the Company in order to optimize its business through innovation and their excellence performance. Human resources adequacy and quality are the Company's asset in winning the competition. Therefore, we made various efforts such as accelerating competence building, developing center of excellence in O&M, as well as establishing a safety academy. Indonesia Power has improved and will continue to improve its sophisticated and skilled human resources on a constant basis to sustain business development in the field of power generating as well as current and future O&M services. The organizational structure has also been reviewed to adapt to the business dynamics on the ground, by forming an agency in charge of research and technology, especially that relate to the electrical industry and its support services.

Dengan upaya-upaya tersebut, Direksi optimis bahwa Indonesia Power akan terus mengembangkan diri menjadi yang terbaik di tengah tantangan industri kelistrikan yang makin meningkat. Di masa mendatang, kami terus bertekad untuk membangun sumber daya manusia yang profesional, tangguh, berintegritas tinggi yang mampu mewujudkan visi dan misi Indonesia Power.

Through these efforts, the Board of Directors is optimistic that Indonesia Power will continue to develop to be the best amidst the increasing challenge in electricity industry. In the future, we are committed to build professional and tough personnel with high integrity, who are able to realize Indonesia Power vision and mission.

Implementasi Tata Kelola Perusahaan Berkelanjutan

Indonesia Power memandang praktik tata kelola perusahaan yang baik merupakan alat untuk menjaga kelangsungan usaha, menjaga kepercayaan *stakeholders*, dan menumbuhkan integritas perusahaan dalam jangka panjang. Dalam meningkatkan kualitas implementasi tata kelolanya, Indonesia Power melakukan berbagai inisiatif dengan mengembangkan dan menyempurnakan sistem yang dimiliki, internalisasi budaya Perusahaan, dan pengelolaan sumber daya manusia yang andal.

Implementation of Sustainable Corporate Governance

Indonesia Power sees good corporate governance practices as an asset to maintain business continuity, stakeholders' trust, and to build company integrity in the long run. In improving its corporate governance quality, Indonesia Power makes various initiatives by system development and perfection, internalization of Corporate Culture, and management of reliable human resources.

Untuk mengetahui tingkat implementasi GCG yang telah dilakukan, Indonesia Power melakukan penilaian GCG secara berkala minimal setahun sekali melalui kegiatan *assessment* GCG. Selain itu, implementasi GCG merupakan salah satu *Key Performance Indicator* (KPI) dalam Kontrak Manajemen Perusahaan, yaitu pada bagian Perspektif *Leadership* dalam bentuk

To discover the level of GCG implementation, Indonesia Power regularly conducts GCG assessment at least once a year. In addition, GCG implementation is one of the Key Performance Indicators (KPI) under Company Management Contract, i.e. in Leadership Perspective section, in the form of GCG assessment score. GCG Assessment is conducted with reference to the Decree

LAPORAN DIREKSI
REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS

pencapaian skor *assessment GCG*. *Assessment* GCG dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012. Untuk tahun buku 2017 telah dilakukan self assessment GCG yang merupakan evaluasi tindak lanjut hasil penilaian GCG tahun sebelumnya. Perolehan skor GCG sebesar 93,07 setara dengan 93,07% dan mendapatkan predikat Sangat Baik, di atas target yang ditetapkan yaitu sebesar 93. Selain itu, Perusahaan juga mengikuti rating GCG *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) tahun 2017 yang diselenggarakan oleh The Institute for Corporate Governance (IICG) untuk mengetahui persepsi *stakeholder* terhadap praktik GCG yang telah dilakukan mendapatkan predikat "*The Trusted Company*" dengan capaian skor 84,22 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 82,94.

of Secretary to Minister of SOE Number SK-16/S. MBU/2012 dated June 6, 2012. GCG Assessment for fiscal year 2017 was an evaluation of follow up of the GCG Assessment result in the previous year. The GCG score was 93.07, or equal to 93.07%, and was stated Excellent as it exceeded the specified target at 93. In addition, the Company also participated in the Corporate Governance Perception Index (CGPI) in 2017 that was held by the Institute of Corporate Governance (IICG) to find out stakeholders' perception on GCG practices that were implemented, which were stated "The Trusted Company" with a score of 84.22, increased from the previous year at 82.94.

Di tahun 2017, Indonesia Power telah berinisiatif untuk melakukan ASEAN *Corporate Governance Scorecard (ACGS)* yaitu mencakup 1) hak-hak pemegang saham, 2) perlakuan yang setara terhadap pemegang saham, 3) peran pemangku kepentingan, 4) pengungkapan dan transparansi serta 5) tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Hasil *assessment* ACGS tersebut mencapai skor sebesar 85,51, yang menunjukkan bahwa penerapan GCG Indonesia Power pada tahun 2017 telah mencapai kualifikasi "*Good*".

In 2017, Indonesia Power made an initiative to create ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), which includes 1) shareholders' rights, 2) equal treatment to shareholders, 3) stakeholders' role, 4) disclosure and transparency, and 5) responsibility of the Board of Commissioners and Board of Directors. ACGS Assessment resulted in a score of 85.51, which reflected "Good" implementation of GCG in Indonesia Power in 2017.

Implementasi etika Perusahaan sebagai unsur penting dalam menegakkan prinsip-prinsip GCG, dilakukan dengan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang berlaku bagi Direksi, penerapan program pengendalian gratifikasi sejalan dengan program IP Bersih dan penerapan kebijakan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistle Blowing System*) secara konsisten. Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Perusahaan (LHKPN) secara berkala dengan tepat waktu sesuai ketentuan. Penerapan kebijakan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System Policy*) juga dipandang cukup efektif dalam mengantisipasi adanya potensi pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan yang lebih besar. Selama tahun 2017, terdapat 10 laporan melalui sistem pelaporan pelanggaran dan seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti.

Implementation of the Company's code of conduct is an important part in the enforcement of GCG principles, which is carried out by submitting Report on Assets of State Officials (LHKPN) that applies to the Board of Directors, implementation of gratification control program in line with IP Bersih program, and consistent implementation of violation reporting system (Whistleblowing System). All members of the Board of Commissioners and Board of Directors have submitted Report on Assets of State Officials (LHKPN) on a regular basis and timely manner pursuant to the applicable regulations. Implementation of the Whistleblowing System Policy is also deemed effective in anticipating potential violation that may cause worse damage to the Company. Throughout 2017, there were 10 reports submitted through violation reporting system and all of them had been followed up.

Mekanisme kerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan atas dasar prinsip saling menghormati dan memahami tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-

Work mechanism of the Board of Commissioners and Board of Directors is carried out on the basis of mutual respect and understanding of duty, responsibility, and authority of the respective party in compliance with

undangan yang berlaku maupun Anggaran Dasar Perusahaan. Komitmen dan konsisten Indonesia Power dalam mengimplementasikan GCG telah diakui dan memperoleh penghargaan yaitu penghargaan *Good Corporate Governance* Terbaik ke-2 Kategori Anak Perusahaan BUMN dan Peringkat 1 Kategori Tata Kelola Perusahaan dalam ajang Anugerah BUMN ke-6.

Adapun terkait dengan penerapan manajemen risiko diarahkan untuk mengelola 3 (tiga) risiko utama yang mempengaruhi pencapaian kinerja Perusahaan. Yaitu (a) keandalan pembangkit, (b) efisiensi pembangkit serta (c) keamanan dan ketersediaan pasokan energi. Indonesia Power mengimplementasikan sistem manajemen risiko sesuai dengan *framework* ISO 31000 untuk menghasilkan praktik manajemen risiko dengan perspektif lebih luas, mudah dipahami, terukur serta mendukung koordinasi dan integrasi antar unit kerja di Perusahaan. Pada tahun 2017, Indonesia Power memperoleh penghargaan *Risk Champion dan Risk Manager of the Year* (Ibu Sripeni Inten Cahyani) dalam ajang ASEAN Risk Awards 2017 sebagai bukti manajemen pengelolaan risiko terbaik.

Komitmen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Sebagai perusahaan energi yang memiliki dampak langsung pada kehidupan masyarakat, Indonesia Power terus berupaya menyediakan produk dan jasa yang memenuhi harapan pelanggan dan ramah lingkungan. Yaitu dengan melakukan sinergi aktivitas bisnis dalam pengelolaan lingkungan hidup, ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, tanggung jawab terhadap pelanggan serta pengembangan sosial kemasyarakatan untuk mendorong peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan yang semakin baik. Kelestarian lingkungan dan alam selain menjamin kelancaran proses bisnis juga menjamin ketersediaan pasokan bahan baku produksi yang bersumber dari alam.

Dalam rangka mencapai keberlanjutan bisnis, Indonesia Power telah merumuskan dan menetapkan strategi Perusahaan ke dalam *Roadmap CSR* 2015-2019 yang merupakan *grand strategy* dan *milestone* implementasi CSR untuk mengintegrasikan strategi CSR ke dalam strategi Perusahaan. Selain itu, Indonesia Power senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan program-program keberlanjutan melalui kegiatan-kegiatan CSR dan serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk

the applicable laws and regulations, as well as with Company's Articles of Association. Indonesia Power's commitment and consistency in GCG implementation has been recognized and awarded with Best 2nd Good Corporate Governance in Subsidiary of SOE Category, and 1st Best Corporate Governance Category in the 6th SOE Award.

As to the implementation of risk management, it is directed towards management of 3 (three) ultimate risks that affect Company performance achievement. They are (a) power plant reliability, (b) power plant efficiency, and (c) security and availability of energy supply. Indonesia Power implements risk management system in accordance with ISO 31000 framework to produce risk management practices with a broader, easier to understand, and measurable perspective that supports coordination and integration between work units in the Company. In 2017, Indonesia Power was awarded with Risk Champion and Risk Manager of the Year (Mrs. Sripeni Inten Cahyani) in ASEAN Risk Awards 2017 as a proof of best risk management.

Commitment to Corporate Social Responsibility

As an energy company that brings direct impact on the life of the society, Indonesia Power continues to seek to provide product and service that meet customer expectation and are environmentally friendly. This is carried out by synergizing its business activities in environment, employment, occupational health and safety management, as well as responsibility to the customers and social development of the community to support improvement of life quality and better environment. Environment and nature sustainability guarantee smooth business process and ensure availability of raw materials supply that are sourced from the nature.

In order to achieve business continuity, Indonesia Power has formulated and implemented the Company's strategies into CSR Roadmap 2015-2019, which is the grand strategy and a milestone of CSR implementation to integrate CSR strategy into the Company's strategy. In addition, Indonesia Power is always committed to implement sustainability programs through CSR activities and a series of policies that aim to realize sustainable development. This commitment is

LAPORAN DIREKSI
REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS

mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Yaitu melalui kegiatan operasional yang ramah lingkungan (*Green Power Plant*) dan diperlukan oleh masyarakat (In-Power Care & Hijaunesia Power). Sebelum program CSR disusun, Indonesia Power melakukan pemetaan sosial (*social mapping*) yakni mengidentifikasi wilayah yang terdampak langsung dengan kegiatan operasional Perusahaan adalah dengan cara melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Green Power Plant dilakukan melalui pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan, efisiensi energi, efisiensi air dan pengelolaan limbah yang tepat, sedangkan untuk kegiatan pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati dijalankan melalui program Hijaunesia Power. Salah satu upaya pengelolaan lingkungan dilakukan melalui pelaksanaan Program Penilaian Kinerja Industri dalam pengelolaan lingkungan (PROPER) oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang dilakukan setiap tahun. Pada tahun 2017, Indonesia Power telah mendapatkan 9 PROPER Hijau dan 6 PROPER Biru. Program konservasi lingkungan di sekitar pembangkit juga terus dilakukan.

Adapun InPower-Care merupakan komitmen sekaligus wujud tanggung jawab sosial Indonesia Power untuk memperluas akses masyarakat dalam mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih baik sehingga menjadi lebih berdaya dan mandiri dengan kualitas dan kesejahteraan yang semakin baik. Realisasi anggaran CSR melalui kegiatan InPower-Care tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp28.384 juta dibandingkan tahun lalu sebesar Rp20.591 juta, yang mencakup kegiatan Bakti Pelayanan Masyarakat, Bakti Pembinaan Hubungan dan Bakti Pemberdayaan Masyarakat.

manifested through environmentally friendly operational activities (Green Power Plant) that are necessary for the community (In-Power Care & Hijaunesia Power). Prior to CSR program arrangement, Indonesia Power conduct social mapping by identifying areas that are directly affected by its operational activities, through Environmental Impact Analysis (EIA).

Green Power Plant is realized through development and utilization of new and renewable energy, energy efficiency, water efficiency, and proper waste management, and environment and biodiversity conservation is carried out through Hijaunesia Power program. One of environment management efforts is made through implementation of Industrial Performance Assessment Program (PROPER) by Ministry of Environment on annual basis. In 2017, Indonesia Power achieved 9 Green PROPER and 6 Blue PROPER. Environment conservation program around the power plants is also carried out.

As to InPower-Care, it is a commitment and social responsibility of Indonesia Power to enhance access for the community to get a better social, economic, and cultural condition in order to be more empowered and independent by having higher quality and welfare. Realization of CSR budget through InPower-Care in 2017 increased to Rp28,384 million in comparison to the same in previous year at Rp20,591 million, which included Community Service, Community Relation Development Service, and Community Empowerment Service.

Perubahan Komposisi Direksi

Sepanjang tahun 2017 tidak terjadi perubahan komposisi Direksi Indonesia Power sehingga jumlah dan komposisinya tetap berjumlah 6 (enam) orang. Komposisi dan jumlah anggota Direksi yang ditetapkan RUPS telah memperhatikan visi, misi, dan rencana strategis Perusahaan yang memungkinkan pengambilan keputusan dilakukan secara efektif.

Berdasarkan Keputusan RUPS Sirkuler tanggal 24 Januari 2018, terjadi perubahan komposisi Direksi yaitu mengangkat Sdr. M. Hanafi Nur Rifai sebagai

Change to the Composition of the Board of Directors

There was no change in the structure of the Board of Directors of Indonesia Power in 2017, by which the number and composition remained at 6 (six) people. Composition and number of Board of Directors members as specified by the GMS have taken into account Company vision, mission, and strategic plan that enable effective decision making.

In accordance with the Circular Resolution of the GMS dated January 24, 2018, there was a change of the composition of the Board of Directors where

PLT Direktur Operasi I dan Sdr. Okto Rinaldi Sagala sebagai PLT Direktur SDM dan Administrasi serta memberhentikan dengan hormat Sdr. Eri Prabowo sebagai Direktur Operasi I dan Sdr. Roikhan sebagai Direktur SDM dan Administrasi. Saya atas nama Direksi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya atas kontribusi yang sangat berharga selama menjabat sebagai Direksi Indonesia Power.

Komposisi Direksi saat ini diharapkan dapat terus solid dan mendorong peningkatan peran aktif setiap anggota Direksi dalam mencapai kinerja Perusahaan yang lebih baik di masa mendatang.

Mr. M. Hanafi Nur Rifai was appointed the Caretaker Operations Director I and Mr. Okto Rinaldi Sagala was appointed the Caretaker HR and Administration Director, in addition to honorable dismissal of Mr. Eri Prabowo from Operations Director I and Mr. Roikhan from HR and Administration Director On behalf of the Board of Directors, thank you for all members of the Board of Directors who have completed their term of office and your valuable contribution during your duty as the Directors of Indonesia Power.

The current composition of the Board of Directors is expected to remain solid and capable of encouraging active role of each member of the Board of Directors in achieving better Company performance in the future.

Apresiasi

Dukungan dari semua pihak menjadi landasan keberhasilan Indonesia Power untuk terus tumbuh dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan mendatang. Oleh karena itu, Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas arahan pemegang saham, Dewan Komisaris, dedikasi para pegawai serta mitra usaha atas kepercayaan, kontribusi dan dukungan yang telah diberikan.

Kami yakin bahwa dengan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki, diiringi dengan kerja keras dan semangat yang kuat oleh seluruh jajaran manajemen dan pegawai, Indonesia Power akan dapat terus memanfaatkan setiap peluang di depan dengan memberikan kinerja yang optimal. Bersama-sama, mari kita wujudkan visi Indonesia Power untuk “Menjadi perusahaan energi tepercaya yang tumbuh berkelanjutan” dan mencapai prospek usaha yang lebih baik bagi semua.

Appreciation

Support from all parties are the foundation of success for Indonesia Power to keeps growing and maintaining its sustainability in response to the future challenges. Therefore, kindly allow us to express greatest appreciation and thanks for the directions provided by shareholders, Board of Commissioners, and for personnel dedication, as well as to our business partners for your trust, contribution, and support.

We believe that by having these competencies and capabilities, in addition to hard work and great spirit of all members of the management board and personnel, Indonesia Power will be able to keep on taking advantage of every future chance through achieving optimum performance. Together, let’s realize Indonesia Power vision “To be a Trusted Energy Company with Sustainable Growth” and achieve a better business prospect for all.

Jakarta, 30 Mei 2018 | Jakarta, May 30, 2018
Atas Nama Direksi PT Indonesia Power
On behalf of the Board of Directors of PT Indonesia Power



Sripeni Inten Cahyani
Direktur Utama
President Director

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS





Keterangan foto (dari kiri ke kanan)
Photo caption (left to right)

1. **Hudiono**
   Direktur Keuangan
   Financial Director
2. **M. Hanafi Nur Rifai**
   Plt. Direktur Operasi I
   Acting of Operation Director I
3. **Sripeni Inten Cahyani**
   Direktur Utama
   President Director
4. **Adi Supriono**
   Direktur Pengembangan dan Niaga
   Development and Commerce Director
5. **Antonius RT Artono**
   Direktur Operasi II
   Operation Director II
6. **Okto Rinaldi Sagala**
   Plt. Direktur SDM dan Administrasi
   Acting of Human Resources and Administration Director

SURAT PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2017 PT INDONESIA POWER

STATEMENT FROM BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS ON ACCOUNTABILITY OVER ANNUAL REPORT 2017 PT INDONESIA POWER

Laporan Tahunan 2017 PT Indonesia Power menyajikan informasi mengenai kinerja Perusahaan, penerapan tata kelola perusahaan, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan informasi lainnya yang relevan dan signifikan bagi para pemangku kepentingan.

Kami, segenap Direksi dan Dewan Komisaris PT Indonesia Power yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan 2017 PT Indonesia Power.

Jakarta, 30 Mei 2018

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Bagus Setiawan
Komisaris Utama
President Commissioner

Ahmad Yani
Komisaris
Commissioner

Abdi Mustakim
Komisaris
Commissioner

Agus Hernawan
Komisaris
Commissioner

Munir Ahmad
Komisaris
Commissioner

Tri Setyo Nugroho
Komisaris
Commissioner

PT Indonesia Power Annual Report 2017 presents information on the Company's performance, implementation of corporate governance, implementation of corporate social responsibility, Financial Statements for the period ended on December 31, 2017, and other information relevant and significant for the stakeholders.

We, the undersigned,the entire Board of Directors and Board of Commissioners of PT Indonesia Power, declare full accountability for the accuracy of the content of PT Indonesia Power Annual Report 2017.

Jakarta, May 30, 2018

Direksi
Board of Directors



Sripeni Inten Cahyani
Direktur Utama
President Director



M. Hanafi Nur Rifai
Plt. Direktur Operasi I
Acting of Operation Director I



Antonius RT Artono
Direktur Operasi II
Operation Director II



Hudiono
Direktur Keuangan
Financial Director



Adi Supriono
Direktur Pengembangan dan Niaga
Development and Commerce Director



Okto Rinaldi Sagala
Plt. Direktur SDM dan Administrasi
Acting of Human Resources and Administration Director



02

PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE



“Sebagai perusahaan pembangkit listrik nasional, Indonesia Power terus mengokohkan pondasi untuk berperan dalam industri kelistrikan nasional dengan meraih pertumbuhan secara berkelanjutan.

As a national power generation company, Indonesia Power keeps on strengthening its foundation to engage in national electricity industry by securing a sustainable growth.”

IDENTITAS PERUSAHAAN
CORPORATE IDENTITY



Nama Perusahaan
PT Indonesia Power

Bidang Usaha
Penyediaan tenaga listrik dan jasa *Operation & Maintenance*

Status Perusahaan
Anak Perusahaan PT PLN (Persero)

Dasar Hukum Pendirian
1. Akta Pendirian PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I (PT PLN PJB I) tanggal 3 Oktober 1995
2. Akta Perubahan Nama dari PT PLN PJB I menjadi PT Indonesia Power dan telah disetujui melalui keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia tanggal 1 September 2000

Pemegang Saham
1. PT PLN (Persero) sebanyak 1 lembar Saham Seri 1 dan 5.215.647.598 lembar Saham Seri 2
2. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) sebanyak 1 lembar Saham Seri 2

Tanggal Pendirian
3 Oktober 1995

Name of Company
PT Indonesia Power

Business Sector
Provision of electricity and Operation & Maintenance Services

Corporate Status
Subsidiary of a PT PLN (Persero)

Legal Framework of Establishment
1. Deed of Establishment of PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I (PT PLN PJB I) dated October 3, 1995
2. Deed of Change of Name from PT PLN PJB I to PT Indonesia Power which was ratified by the Minister of Law and Legislation of the Republic of Indonesia dated September 1, 2000.

Shareholders
1. PT PLN (Persero) with 1 Share of Series 1 share and 5,215,647,598 Shares of Series 2 share
2. *Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan* of PT PLN (Persero) with 1 Share of Series 2 share

Date of Establishment
October 3, 1995

Modal Dasar
Rp10.000.000.000.000,- (Sepuluh triliun Rupiah)

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Rp2.607.823.800.000,- (Dua triliun enam ratus tujuh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

Wilayah Operasional
- 5 Unit Pembangkitan (UP)
- 3 Unit Pembangkitan dan Jasa Pembangkitan (UPJP)
- 13 Unit Jasa Pembangkitan (UJP) serta
- 1 Unit Jasa Pemeliharaan (UJH)

Jumlah Karyawan
4.209 orang

Anak Perusahaan
1. PT Cogindo DayaBersama (99,9%)
   Bidang usaha: *co-generation*, energi ketenagalistrikan, operasi dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik.
2. PT Artha Daya Coalindo (80%)
   Bidang usaha: penyediaan, transportasi, bongkar muat batubara, dan jasa pendukung kepelabuhanan.
3. PT Indo Ridlatama Power (90%)
   Bidang usaha: pembangkit tenaga listrik.
4. PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (95,20%)*
   Bidang usaha: pengusahaan tenaga panas bumi dan pembangkit tenaga listrik.
5. PT Putra Indotenaga (99,9%)
   Bidang usaha: pembiayaan proyek dan *participating interest.*

Kantor Pusat
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.18
Jakarta Selatan, Kode Pos 12950
Telp. : (62-21) 5267666 (Hunting)
Fax. : (62-21) 5251923, 5252623

Website www.indonesiapower.co.id

Email kontak-ip@indonesiapower.co.id

Contact Center
- Facebook: indonesiapower
- Instagram: @pt.indonesiapower

Authorized Capital
Rp10,000,000,000,000,- (Ten trillion Rupiah)

Issued Capital and Paid-in Capital
Rp2,607,823,800,000 (Two trillion six hundred seven billion eight hundred twenty-three million eight hundred thousand Rupiah)

Operational Areas
- 5 Generating Units (GU)
- 3 Generating and Generating Service Units (GGSU)
- 13 Generating Service Units (GSU) and
- 1 Maintenance Service Unit (MSU)

Number of Employees
4,209 people

Subsidiaries
1. PT Cogindo DayaBersama (99.9%)
   Business Sector: co-generation, electricity, power plant operation and maintenance.
2. PT Artha Daya Coalindo (80%)
   Business sector: supply, transportation, loading and unloading of coal, and ports support services.
3. PT Indo Ridlatama Power (90%)
   Business sector: power plant.
4. PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (95.20%)*
   Business sector: geothermal power and power plant.
5. PT Putra Indotenaga (99.9%)
   Business sector: project financing and participating interest.

Head Office
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.18
Jakarta Selatan, Post Code 12950
Ph. : (62-21) 5267666 (Hunting)
Fax. : (62-21) 5251923, 5252623

Website www.indonesiapower.co.id

Email kontak-ip@indonesiapower.co.id

Contact Center
- Facebook: indonesiapower
- Instagram: @pt.indonesiapower

* Sejak 7 November 2017 berubah nama menjadi PT Indo Tenaga Hijau dengan perubahan bidang usaha menjadi bergerak pada bidang energi baru dan/atau terbarukan.

* As of November 7, 2017, the name changed into PT Indo Tenaga Hijau (ITH) and business sector changed to new and/or renewable energy business.

INFORMASI WEBSITE PERUSAHAAN
COMPANY'S WEBSITE



Situs web resmi Indonesia Power dapat diakses di http://www.indonesiapower.co.id, tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. Situs web kami menyajikan informasi secara komunikatif dan *update* mengenai Indonesia Power yang diperlukan oleh segenap pemangku kepentingan maupun masyarakat umum sesuai dengan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi bagi publik.

Konten informasi pada situs web Indonesia Power mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Profil terdiri dari Sekilas Indonesia Power, Manajemen, Sejarah, Penghargaan & Sertifikasi, Kamus & Istilah, Keterbukaan Informasi Publik, Pertumbuhan Perusahaan, Kinerja Perusahaan, Testimoni *Stakeholder*.
2. Produk & Layanan terdiri dari Produk, Layanan dan Anak Perusahaan.
3. Tata Kelola terdiri dari Praktik Tata Kelola, Pedoman Tata Kelola, Pedoman Perilaku, Pedoman Dewan, Mekanisme Pengaduan, Pengendalian Gratifikasi, LHKPN, GCG Assessment, Informasi Pemegang Saham, Informasi RUPS.

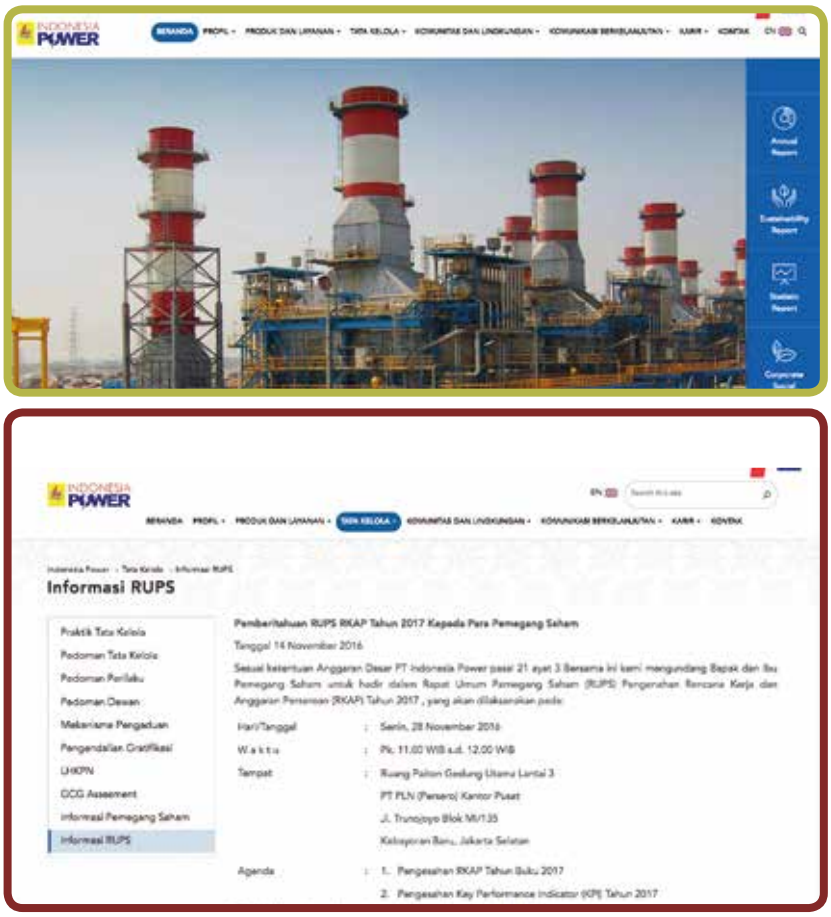
Indonesia Power's official website can be accessed at http://www.indonesiapower.co.id, available in both Indonesian and English. Company's website provides communicative and updated information on Indonesia Power that is needed by all stakeholders and the public, in accordance with transparency and information disclosure principles.

Information contained in Indonesia Power's website includes the followings:

1. Profile contains Indonesia Power in Brief, Management, History, Awards & Certifications, Glossary of Terms, Public Information Transparency, Company Growth, Company Performance, Testimony from Stakeholders.
2. Product & Service contains Product, Service and Subsidiaries
3. Corporate Governance consists of Corporate Governance Practices, Corporate Governance Guideline, Code of Conduct, Guideline for the Board of Directors, Complain Mechanism, Gratification Control, Reports on Assets of State Officials (LHKPN), GCG Assessment, Shareholders Information, GMS Information.

4. Komunitas & Lingkungan terdiri dari Program Ketaatan Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, *Corporate Social Responsibility*, Berita CSR.
5. Komunikasi Berkelanjutan terdiri dari Berita, Dokumentasi Video, Keterangan Pers, InPower Magz, *Reports*.
6. Karir terdiri dari Peluang Karir dan Rekrutmen.
7. Kontak.

4. Community & Environment consists of Environment Compliance Program, Occupational Health and Safety, Corporate Social Responsibility, CSR News.
5. Sustainable Communication consists of News, Video Documentation, Press Conference, InPower Magz, and Reports.
6. Career consists of Career Opportunity and Recruitment.
7. Contact.



Informasi tambahan dapat dilihat di bagian Akses Informasi dan Data Perusahaan pada Bab Tata Kelola Perusahaan.

Additional information is available in Company Information and Data Access section under Corporate Governance Chapter.

SEJARAH SINGKAT INDONESIA POWER

A BRIEF HISTORY OF INDONESIA POWER

Perjalanan lebih dari dua dasawarsa telah semakin memposisikan Indonesia Power sebagai perusahaan pembangkit listrik terpercaya dan andal.

A journey of more than 20 years long has led Indonesia Power to be a trusted and reliable power generation company.

PT Indonesia Power merupakan salah satu Anak Perusahaan PT PLN (Persero) yang sebelumnya bernama PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali I (PLN PJB I) dan didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995 sebagai langkah untuk memulai kemandirian bisnis sektor pembangkitan tenaga listrik di Indonesia.

PT Indonesia Power is a subsidiary of PT PLN (Persero), which previously was PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali I (PLN PJB I) and was established on October 3, 1995 as an effort to initiate business independence of power generation sector in Indonesia.

Pada tanggal 1 September 2000, nama PLN PJB I secara resmi berubah menjadi PT Indonesia Power sebagai penegasan atas tujuan Perusahaan menjadi Perusahaan pembangkit tenaga listrik independen yang berorientasi bisnis murni.

On September 1, 2000, PLN PJB I officially changed its name into PT Indonesia Power as an affirmation of Company's objective to become an independent power generation company that is purely business-oriented.

Pada tahun 2012 Indonesia Power melebarkan sayap ke seluruh Indonesia dengan mengembangkan portofolio melalui pengembangan Usaha Jasa *Operation & Maintenance* (O&M) di luar sistem Jawa dan Bali.

Kegiatan utama Indonesia Power saat ini yakni sebagai penyedia tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik dan sebagai penyedia jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik. Pembangkit yang tersebar mulai dari pulau Sumatera sampai dengan Papua, yang terdiri atas 5 (lima) Unit Pembangkitan (UP) dengan fungsi operasional penyediaan tenaga listrik, 3 (tiga) Unit Pembangkitan dan Jasa Pembangkitan (UPJP) yang menjalankan fungsi operasional penyediaan tenaga listrik serta pengelolaan Jasa O&M, 13 (tiga belas) Unit Jasa Pembangkitan (UJP) yang melakukan fungsi pengelolaan

In 2012, Indonesia Power expanded its business across Indonesia by building its portfolio through Operation & Maintenance (O&M) Service Business outside of Java and Bali system.

Today, Indonesia Power's main business is as electricity provider through power generation and power plant operation and maintenance service provider. Power generators are spread out from Sumatra to Papua, which include 5 (five) Power Generation Units (GU) for electricity supply, 3 (three) Power Generation Unit and Generation Service (GUGS) for electricity supply and O&M Service provision, 13 (thirteen) Power Generation Service Units (GSU) for O&M Service management, and 1 (one) Maintenance Service Unit (MSU) for maintenance function. Total installed capacity of power plant owned



Jasa O&M, dan 1 (satu) Unit Jasa Pemeliharaan (UJH) yang berfungsi melakukan fungsi pemeliharaan. Total kapasitas daya terpasang pembangkit yang dimiliki dan dikelola Indonesia Power adalah sekitar 14.903 MW. Selain mengelola Unit Pembangkit, Indonesia Power memiliki 5 Anak Perusahaan, 1 Perusahaan Patungan, 2 Perusahaan Asosiasi serta 3 Afiliasi dari Anak Perusahaan untuk mendukung strategi dan proses bisnis Perusahaan.

Guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Perusahaan, Indonesia Power menetapkan prinsip yang menjadi landasan dalam mengarahkan perilaku individu sesuai dengan budaya Perusahaan yang tercermin dalam "Indonesia Power Way" dengan tata nilai perusahaan yaitu "IP AkSi (Integritas, Profesional, Proaktif, Sinergi)".

Untuk mendukung terealisasinya tujuan tersebut, Indonesia Power dan seluruh unitnya telah berbenah diri menyempurnakan proses bisnis sesuai dengan standar terbaik melalui implementasi Indonesia Power-*Integrated Management System* (InPower-IMS) yang mengintegrasikan berbagai standar, sistem manajemen metode yang relevan berdasarkan *best practices* dan standar internasional yang terdiri dari ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan), ISO 9001 (Sistem Manajemen Mutu), OHSAS 18001 (Sistem Manajemen K3), ISO 28000 (Sistem Manajemen Keamanan Rantai Pasok), SMP (Sistem Manajemen Pengamanan), SMK3 (Sistem Manajemen K3), ISO 55001 (Sistem Manajemen Aset), ISO 50001 (Sistem Manajemen Energi), ISO 26000 (*Guideline on Social Responsibility*), ISO 31000 (*Risk Management-Principles and Guidelines*), Kriteria Baldrige, ISO 27001 (Sistem Manajemen Keamanan Informasi), serta ISO 22301 (Sistem Manajemen Keberlangsungan Bisnis).

and managed by Indonesia Power is nearly 14,903 MW. In addition to Power Generation Unit, Indonesia Power has 5 Subsidiaries, 1 Joint Venture Company, 2 Association Company and 3 Affiliates of the Subsidiaries to support Company business strategy and process.

To support achievement of Company Vision and Mission, Indonesia Power had set out its basic principles to direct the individual behavior in accordance with the Corporate Culture, as reflected in the "Indonesia Power Way", in addition to the corporate value of "IP AkSi (Integrity, Professional, Proactive, Synergy)".

To support attainment of the objectives, Indonesia Power and all its unit have started making improvement of its business process in accordance with the best standard through implementation of Indonesia Power-Integrated Management System (InPower-IMS) that integrates a series of standards, such as ISO 14001 (Environmental Management System), ISO 9001 (Quality Management System), OHSAS 18001 (OHS Management System), ISO 28000 (Supply Chain Security Management System), SMS (Security Management System), OHSMS (OHS Management System), ISO 55001 (Asset Management System), ISO 50001 (Energy Management System), ISO 26000 (Guideline on Social Responsibility), ISO 31000 (Risk Management-Principles and Guidelines), Baldrige Criteria, ISO 27001 (Information Security Management System), and ISO 22301 (Business Continuity Management System).

JEJAK LANGKAH
MILESTONE



2006-2010

- Pengembangan usaha di bidang penyediaan Jasa *Operation & Maintenance* (O&M) dimulai tahun 2009;
- Penetapan sasaran untuk perwujudan visi perusahaan, yaitu mempertahankan dan meningkatkan kapasitas dan kinerja jangka panjang untuk kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan dengan "LANDASAN YANG KUAT" dan penetapan target pencapaian 10% perusahaan pembangkit kelas dunia di tahun 2015;
- Pendirian anak perusahaan PT Indo Ridlatama Power (IRP) pada 28 September 2007;
- Pembentukan UJP (Unit Jasa Pembangkitan) Banten 2 Labuan pada 11 Januari 2010.

- Business development in the provision of Operation & Maintenance (O&M) Services, starting in 2009;
- Establishment of objectives for the realization of company's vision, i.e. to maintain and improve the long-term capacity and performance for the sustainability and growth with "A STRONG FOUNDATION" and the target to become the 10% world-class power generating company in 2015.
- Establishment of Subsidiary, PT Indo Ridlatama Power (IRP) on September 28, 2007;
- Establishment of Banten 2 Labuan GSU (Generating Service Unit) on January 11, 2010.

2001-2005

- Penajaman Misi Perusahaan untuk fokus pada bidang pembangkit tenaga listrik di tahun 2004;
- Pendirian Anak Perusahaan PT Indo Pusaka Berau (IPB) pada 12 Januari 2005.

- Company's mission sharpening to focus on electricity power generation sector in 2004;
- Establishment of Subsidiary, PT Indo Pusaka Berau (IPB) on January 12, 2005.

1996-2010

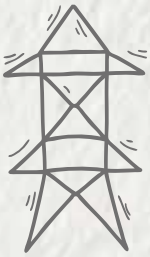
- Perubahan Nama PT PJB I menjadi PT Indonesia Power pada 1 September 2000;
- Mencanangkan Visi dan Misi Perusahaan;
- Pendirian Anak Perusahaan:
  - PT Artha Daya Coalindo (ADC) pada 21 Oktober 1997
  - PT Cogindo Dayabersama (CDB) pada 15 April 1998
  - PT Rekadaya Elektrika (RE) pada 20 Oktober 2000.

- Change of Name from PT PLN PJB I to PT Indonesia Power on 1 September 2000;
- Announcing Company's Vision and Mission;
- Establishment of Subsidiaries:
  - PT Artha Daya Coalindo (ADC) on October 21, 1997
  - PT Cogindo Dayabersama (CDB) on April 15, 1998
  - PT Rekadaya Elektrika (RE) on 20 October 2000.

1995

Pendirian PT PLN Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB I).

Establishment of PT PLN Pembangkit Tenaga Listrik Jawa-Bali I (PLN PJB I).





2011-2013

- Transformasi menuju *Operation and Maintenance* (O&M) *Exellence*;
- Penetapan target *World Class Services* (WCS) 2015;
- Pembentukan unit:
  - UJP Jabar 1 Palabuhan Ratu pada 21 Februari 2011.
  - UJP Jateng 2 Adipala pada 26 Juli 2013;
- Pengembangan Portofolio Usaha di tahun 2012;
- Penetapan pentahapan pencapaian Visi Perusahaan melalui *Destination Statement* di tahun 2012;
- Pelaksanaan Program Strategis dan Pengembangan Organisasi Perusahaan.
- Pendirian anak Perusahaan PT Putra Indotenaga pada 20 Desember 2013.
- Indonesia Power dan unit pembangkitnya telah menerapkan Indonesia Power-*Integrated Management System* (InPower IMS), yang mensinergikan berbagai standar meliputi: ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 28000, SMP, SMK3, PAS 55 dan Kriteria Baldrige di tahun 2013.

- Transformation towards Operation and Maintenance (O&M) Excellence;
- Target establishment of World Class Services (WCS) 2015;
- Establishment of new units:
  - Jabar 1 Palabuhan Ratu GSU on February 21, 2011.
  - Jateng 2 Adipala GSU on July 26, 2013;
- Business Portfolio Development in 2012;
- Determination of Phases to achieve Company's Vision through Destination Statement in 2012;
- Organization Strategy and Development Program.
- Establishment of Subsidiary, PT Putra Indotenaga on December 20, 2013.
- Indonesia Power and its Generating Units has implemented Indonesia Power-Integrated Management System (InPower IMS), and has synergized standards, consist of: ISO 14001 ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 28000, SMP, SMK3, PAS 55, and Baldrige Criteria in 2013.



2014

- Pembentukan UJP Pangkalan Susu pada 20 Januari 2014;
- Pembentukan unit baru:
  - UPJP Priok yang mengelola pembangkit milik Indonesia Power dan mengelola jasa O&M PLTGU Priok Blok 3;
  - UPJP Kamojang yang mengelola pembangkit milik Indonesia Power dan mengelola jasa O&M PLTP Ulumbu, NTT;
  - UPJP Bali yang mengelola pembangkit milik Indonesia Power dan mengelola jasa O&M di Indonesia Timur dari PLTU Barru; PLTU Jeranjang; PLTU Holtekamp; PLTU Ambon dan PLTU Sanggau.

- Establishment of Pangkalan Susu GSU on January 20, 2014;
- Establishment of new units:
  - Priok GGSU manages Indonesia Power's plants and manages O&M services at Priok Block 3 CCPP;
  - Kamojang GGSU manages Indonesia Power's plants and manages O&M services at Ulumbu GPP, East Nusa Tenggara;
  - Bali GGSU manages Indonesia Power's plants and manages O&M services in East Indonesia, i.e. Barru SPP; Jeranjang SPP; Holtekamp SPP; Ambon SPP, and Sanggau SPP.

2015-2016

- Pengoperasian PLTDG Pesanggaran 200 MW di Bali.
- Peletakan batu pertama pembangunan PLTM Lambur.
- Sertifikasi ISO 55001 dan implementasi ISO 26000.
- Pendirian Afiliasi dari Anak Perusahaan PT GCL Indotenaga pada 25 Februari 2016;
- Penambahan UJP PLTGU Cilegon ke Indonesia Power dari UPJB sejak tanggal 1 Januari 2016;
- Sertifikasi ISO 50001.

- Operations of the 200 MW Pesanggaran DGPP in Bali
- Laying of the first stone for the construction of Lambur MPP
- Certification of ISO 55001 and implementation of ISO 26000.
- Establishment of Affiliation of Subsidiaries, PT GCL Indotenaga on February 25, 2016;
- Adding Cilegon CCPP GSU to Indonesia Power from UPJB, since January 1, 2016;
- Certification of ISO 50001.

2017

- **Pendirian Afiliasi dari Anak Perusahaan yaitu PT Indo Raya Tenaga (IRT) pada tanggal 15 Maret 2017 dan PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLN SC) pada tanggal 16 Juni 2017.**
- **Sertifikasi ISO 27001 dan ISO 22301**
- **Indonesia Power melakukan Pencatatan Perdana sekuritisasi Efek Beragun Aset (EBA) dengan nama EBA Danareksa Indonesia Power PLN1-Piutang Usaha (EBA DIPP1) pada tanggal 20 September 2017.**
- ***Ground Breaking* PLTU IPP Jawa 9 dan 10 kapasitas 2.000 MW yang diresmikan oleh Presiden RI pada tanggal 5 Oktober 2017.**

- **Establishment of Affiliates from Subsidiary, i.e. PT Indo Raya Tenaga (IRT) on March 15, 2017, and PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLN SC) on June 16, 2017.**
- **ISO 27001 and ISO 22301 Certifications.**
- **Listing the First Asset Backed Securitization (EBA) under the name of EBA Danareksa Indonesia Power PLN1-Accounts Receivable (EBA DIPP1) on September 20, 2017.**
- **Ground Breaking of Steam Power Plant IPP Jawa 9 and 10, with 2,000 MW capacity, officiated by the President of the Republic of Indonesia on October 5, 2017.**





VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN
COMPANY VISION, MISSION AND CULTURE

Indonesia Power telah melakukan *review* secara berkala atas Visi, Misi dan Budaya Perusahaan guna memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan lingkungan bisnis serta tantangan yang dihadapi Perusahaan.

Indonesia Power has periodically reviewed the Vision, Mission, and Corporate Culture to ensure its compliance with the progress of business environment as well as the challenges for the Company.

VISI VISION

"Menjadi perusahaan energi tepercaya yang tumbuh berkelanjutan."

"To be a trusted energy company with sustainable growth."

Penjelasan Visi:

1) Mencapai *trust* dari pemegang saham melalui:
   - Kinerja operasional kelas dunia berdasarkan data pembanding NERC,
   - Tata kelola pembangkit yang ekselen yang diukur melalui pencapaian maturitas ISO 55001 *beyond compliance*
   - Penyelesaian proyek pengembangan tepat waktu melalui *execution excellence*.
2) Mengelola aset pembangkit yang *sustainable* dan kompetitif;
3) Mencapai pertumbuhan yang optimal dalam pengembangan pembangkit dan jasa terkait lainnya khususnya jasa O&M dan *Maintenance Repair Overhaul* (MRO) termasuk bisnis energi primer (transportasi gas, pengelolaan tambang batubara) dan *port management*.
4) Mencapai pertumbuhan yang optimal dalam pengembangan pembangkit dan jasa terkait lainnya khususnya jasa O&M dan MRO termasuk bisnis energi primer (transportasi gas, pengelolaan tambang batubara) dan *port management*.
5) Memiliki portofolio bisnis jasa O&M untuk pemenuhan O&M IPP dan afiliasi Indonesia Power.
6) Memiliki jasa O&M di luar negeri namun dalam lima tahun mendatang Indonesia Power masih akan memaksimalkan potensi pasar dalam negeri.

Explanation of Vision:

1) Gaining the trust of its shareholders through:
   - World class operational performance based on NERC comparative data,
   - Excellent power plant governance as measured by the maturity achievement of ISO 55001 beyond compliance, and
   - Timely completion of development project through execution excellence.
2) Managing sustainable and competitive power plant assets;
3) Achieving optimum growth in the development of power plant and other related services -particularly O&M service- and Maintenance Repair Overhaul (MRO), including primary energy business (gas transportation, coal mine management) and port management.
4) Achieving optimum growth in the development of power plant and other related services -particularly O&M service- and Maintenance Repair Overhaul (MRO), including primary energy business (gas transportation, coal mine management) and port management.
5) Maintaining O&M services business portfolio to meet the needs of O&M IPP and IP affiliates.
6) Owning O&M service abroad, but in the next five years Indonesia Power will keep on maximizing domestic market potential.



MISI MISSION

"Menyelenggarakan bisnis pembangkitan tenaga listrik dan jasa terkait yang bersahabat dengan lingkungan."

"Conducting the business of power generation and related services that are friendly to the environment."

Penjelasan Misi:

1) Bisnis utama Perusahaan adalah pembangkitan tenaga listrik.
2) Bisnis Perusahaan yang terkait pembangkitan tenaga listrik yaitu jasa O&M dan jasa yang terkait *supply* energi primer ke pembangkit dan jasa terkait lainnya.
3) Komitmen untuk mengurangi dampak atas proses produksi terhadap lingkungan dan masyarakat dan memastikan seluruh proses produksi sesuai baku mutu lingkungan serta menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat.

Explanation of Mission:

1) Company's main business is power generation.
2) Company's businesses related to power generation are O&M services and services related to supply of primary energy to power plants and other related services.
3) Commitment to reduce impacts from production process on the environment and society and ensure that all production processes comply with environment quality standards, as well as build a harmonious relationship with the society.

Persetujuan Dewan Komisaris dan Direksi atas Visi, Misi dan Nilai Perusahaan

Pernyataan Visi, Misi, nilai dan budaya Perusahaan ini telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan pengesahan RJPP 2014-2018. Adapun di tahun 2017 Indonesia Power telah melakukan perubahan terhadap penjelasan Visi Perusahaan sebagaimana tercantum dalam RJPP 2017-2021.

Approval from the Board of Commissioners and Board of Directors for Company Vision, Mission and Values

Declaration of Corporate Vision, Mission and Values has been approved by the Board of Commissioners and Board of Directors, in line with the approval for the Company's Long-Term Plan (LTP) 2014-2018. In 2017, Indonesia Power amended the explanation of Corporate Vision as set out in the LTP 2017-2021.

Kompetensi Inti Perusahaan
Corporate Core Competency

OPERASI DAN PEMELIHARAAN PEMBANGKIT
Power Plant Operation and Maintenance

Pengelolaan pembangkit dengan kekuatan pada pengoperasian dan pemeliharaan berdasarkan tata kelola sesuai **praktik terbaik *(best practice)*** dan **metode rekayasa *(engineering method)*** yang ekselen.

Power plant management with sound operation and maintenance under good governance, in accordance with the **best practices** and excellent **engineering method**.

PENGEMBANGAN PEMBANGKIT
Power Plant Development

Pengembangan bisnis pembangkit, energi dan jasa terkait, dengan kekuatan pada enjiniring dan prokurmen. (Enjiniring meliputi *basic design*, *engineering review*, *project supervision*, dan *project integrator*).

Development of power generation, energy and related service business with strong engineering and procurement. (Engineering includes basic design, engineering review, project supervision, and project integrator).

VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN

COMPANY VISION, MISSION AND CULTURE

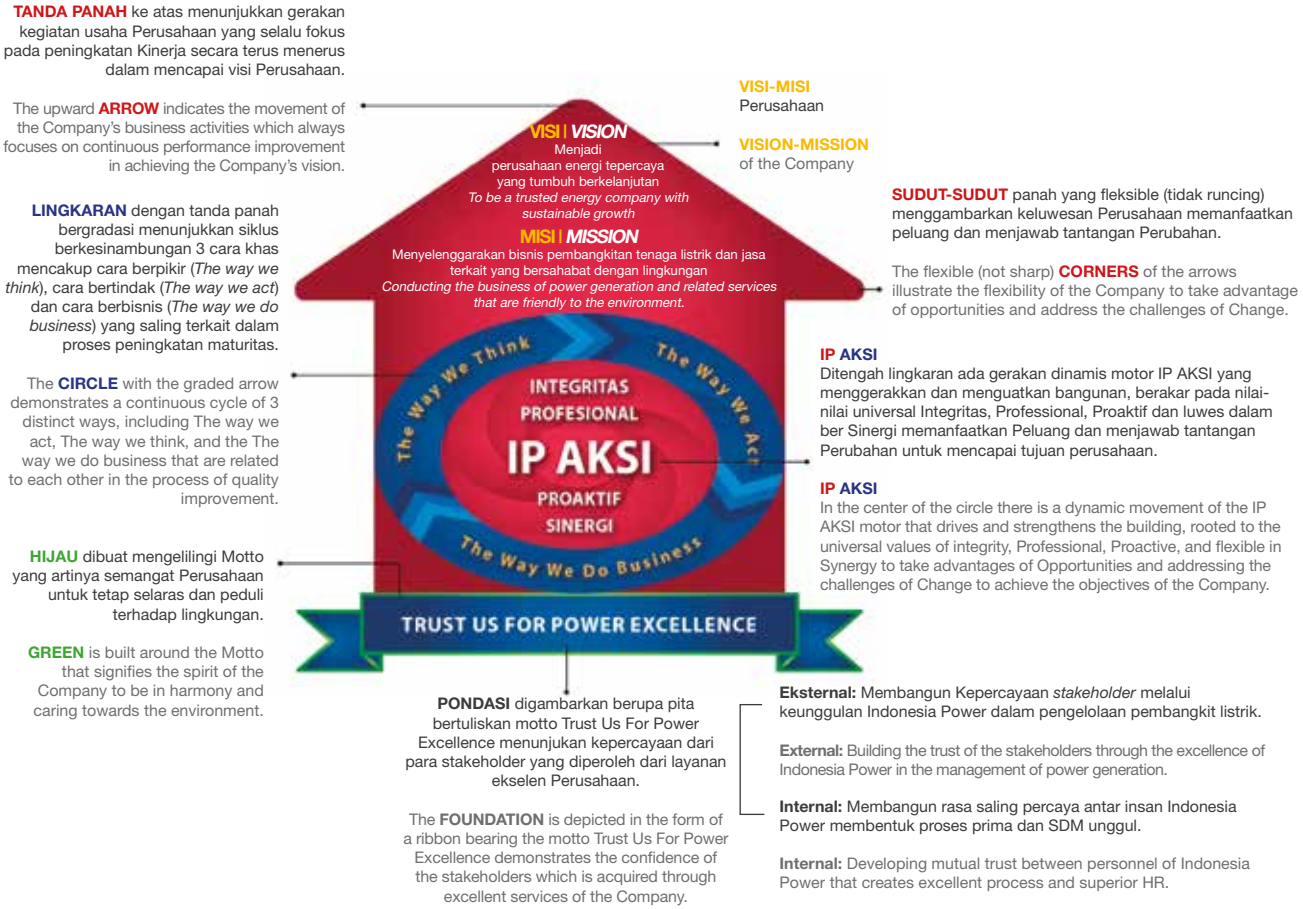
Budaya Perusahaan
Corporate Culture

Indonesia Power telah merumuskan pedoman tata nilai Perusahaan yang berperan dalam pembentukan karakter insan Indonesia Power yang disebut dengan **IP AkSi (Integritas, Profesional, Proaktif, Sinergi)**. Adapun pedoman cara berpikir (*The Way We Think*), cara bertindak (*The Way We Act*) dan cara berbisnis (*The Way We Do Business*) yang disebut **Indonesia Power Way**. Kedua pedoman tersebut berperan dalam pembentukan budaya Indonesia Power.

Sejalan dengan perkembangan bisnis, Perusahaan melakukan *review* dan transformasi nilai-nilai budaya yang mengedepankan strategi terutama pada sumber daya manusia dengan harapan lebih mudah dipahami, dimengerti dan diimplementasikan oleh seluruh Insan Indonesia Power.

Indonesia Power has formulated guidelines on the Company's values that play significant role in building Indonesia Power's character, namely **IP AkSi (Integrity, Professional, Proactive, Synergy)** since October 3, 2015. As to the way of thinking (*The Way We Think*), the way to act (*The Way We Act*), and the way to do business (*The Way We Do Business*) are called **Indonesia Power Way**. Both guidelines have their role in developing Indonesia Power culture.

In line with business growth, the Company conducts review and transformation of cultural values that promote strategy -particularly human resources strategy- in the hope that it will be perceived, understood and implemented more easily by all Indonesia Power's personnel.



Nilai-Nilai Perusahaan
Corporate Values



VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN

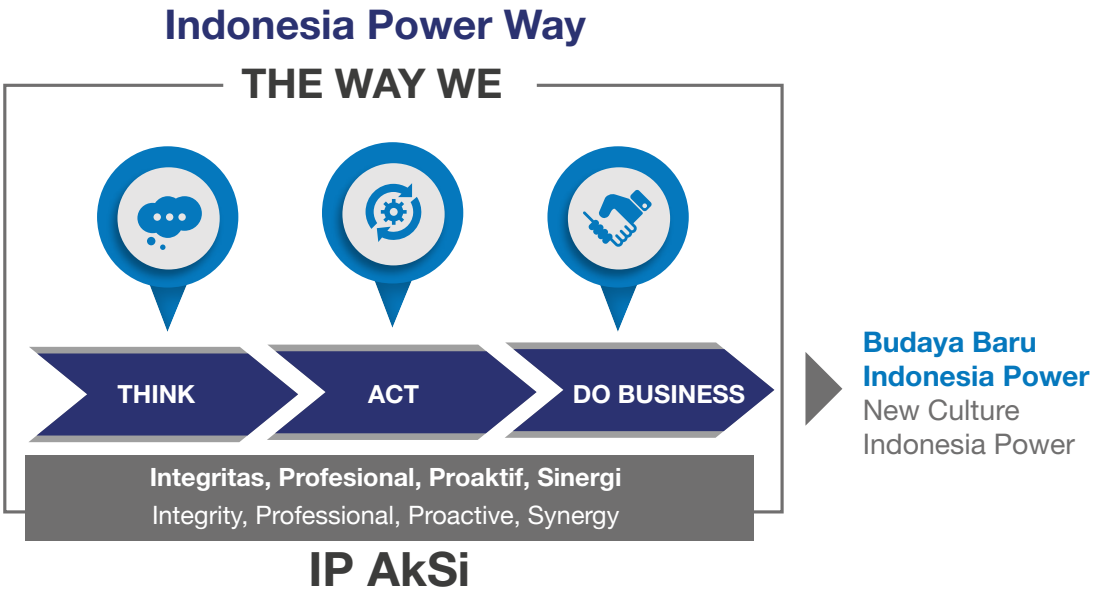
COMPANY VISION, MISSION AND CULTURE

Hubungan Indonesia Power Way, IP AkSi dan Budaya Perusahaan

Secara umum nilai-nilai yang dimiliki seseorang akan menentukan tingkah laku (*behaviour*) dan mempengaruhi pilihan atau keputusan yang dibuat. IP AkSi adalah nilai yang akan mewarnai perilaku, sudut pandang, keputusan dari semua insan Indonesia Power. Sedangkan Indonesia Power Way merumuskan pedoman cara berpikir, cara bertindak serta bersikap dan cara melakukan kegiatan bisnis dalam lingkungan Indonesia Power. Jika keduanya dijalankan bersama-sama akan saling mendukung dan melengkapi untuk pembentukan budaya Indonesia Power.

Relations Between Indonesia Power Way, IP AkSi and Corporate Culture

In general, the values of a person will determine his behaviors and influence his choices or decisions. IP AkSi consists of values which shall influence the behaviors, point of view, decisions of all Indonesia Power's professionals. While Indonesia Power Way formulates the guidelines on how to think, how to act, and how to do business within Indonesia Power. When both are simultaneously applied, they will support and complement each other in creating the culture of Indonesia Power.



Program Membumikan IP AkSi Merupakan Internalisasi Budaya Perusahaan

Indonesia Power telah menyusun formula internalisasi Indonesia Power Way dan IP AkSi dengan melakukan pembagian peran dan tugas yang ditetapkan dalam SK Budaya Perusahaan No.187.K/010.IP/2015. Direksi memberikan arah kebijakan dan mengawal ketat penerapan Indonesia Power Way dan IP AkSi yang dipimpin oleh Direktur Utama dibantu oleh *Learning Management* Tim atau Tim Budaya Perusahaan yang bersifat *ad hoc*. Adapun GM dan *Senior Leader* sebagai *learning champion* bertugas menanamkan dan menumbuhkan penerapan Indonesia Power Way

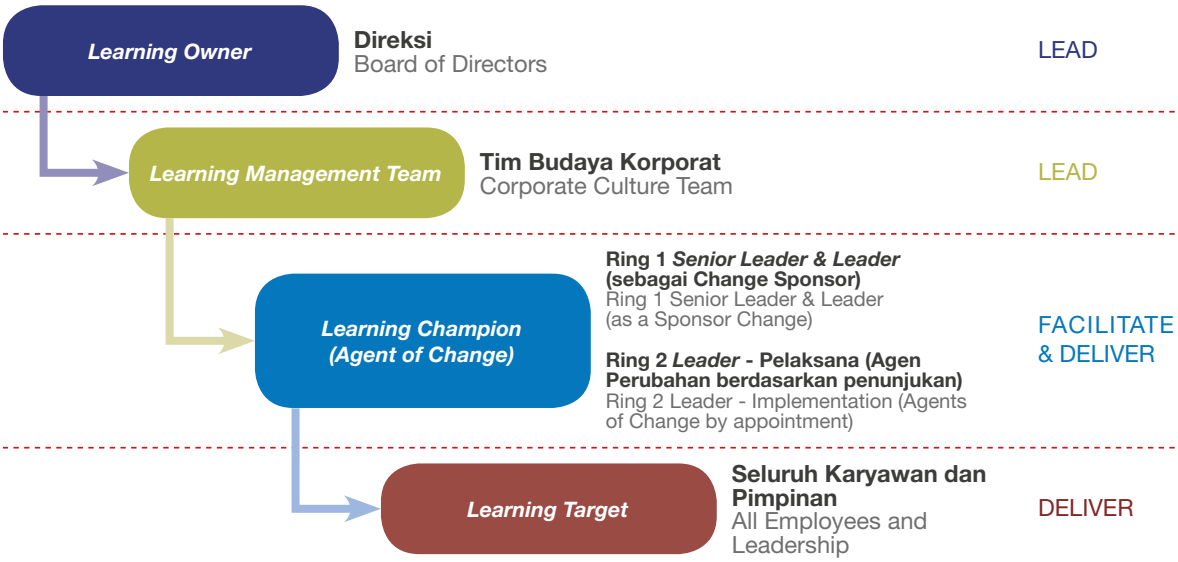
IP AkSi Embodies Corporate Culture Internalization

The Company has arranged internalization formulation of Indonesia Power Way and IP AkSi by dividing the roles and tasks as set out in the Decree on Corporate Culture No.187.K/010.IP/2015. The Board of Directors provides policy directives and closely control the implementation of Indonesia Power Way and IP AkSi that is led by President Director with assistance from the ad hoc Learning Management Team or Corporate Culture Team; As the Learning Champion, General Manager and Senior Leader are responsible for instilling and developing the implementation of Indonesia Power

dan IP AkSi di Unit, Satuan atau Divisi masing-masing. Para *Senior Leader* dibantu oleh Agen Perubahan yang ditunjuk oleh Perusahaan.

Way and IP AkSi in their respective Unit, Task Force or Division. Senior Leaders are assisted by Agent of Change as appointed by the Company.

Skema Internalisasi Budaya Perusahaan
Scheme of the Corporate Culture Internalization



Sejak Agustus 2016, Indonesia Power telah menerbitkan Kebijakan Budaya Perusahaan "Program Membumikan IP AkSi Dalam RKAP" melalui Keputusan Direksi Nomor 184.K/010/IP/2016 tanggal 23 Agustus 2016 dalam rangka mendorong percepatan proses mewujudkan visi Perusahaan pada aspek "*people system*". Program membumikan IP AkSi diperlukan untuk mendapatkan pemahaman nilai yang dapat dipraktikkan dan berimplikasi pada sikap kerja pegawai sehingga tercermin pada sikap dan perilaku yang dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjalankan tugas, peran dan kewaiiban di Perusahaan untuk melaksanakan program RKAP.

As of August 2016, Indonesia Power has issued Corporate Culture Policy on "IP AkSi Embodiment in the Work Plan & Budget (WP&B)" through Directors' Decree No. 184.K/010/IP/2016 dated August 23, 2016 in order to drive process acceleration in achieving Company vision for "people system" aspect. IP AkSI embodiment program is required to gain understanding on the values that are applicable and bring implication on personnel's work attitude, by which it will be reflected on their daily attitude and behavior, particularly in performing their duty, role and obligation in the Company to implement WP&B program.

Program Membumikan IP AkSi dilaksanakan melalui sosialisasi dan implementasi RKAP setiap tahun. Dalam prosesnya dibentuk tim percepatan program yang mengawal dan memonitor pelaksanaan internalisasi IP AkSi melalui pembentukan *Coach* yang terdiri dari *Central Coach* dan *Unit Coach* yang berperan mengawasi dan memonitor pelaksanaannya sehari-hari.

IP AkSi embodiment program is carried out through dissemination and implementation of WP&B every year. Program acceleration team was established to guide and monitor implementation of IP AkSi internalization through appointment of Coach, which consists of the Central Coach and Unit Coach that supervise and monitor daily implementation.

TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PERUSAHAAN
COMPANY OBJECTIVES, GOAL AND STRATEGY

Tujuan Perusahaan

Sesuai dengan Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perusahaan ini adalah:

"Untuk menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas."

Dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tersebut, Indonesia Power melaksanakan kegiatan usaha sesuai ruang lingkup bisnis Perusahaan dengan selalu berusaha memenuhi harapan *stakeholders*-nya.

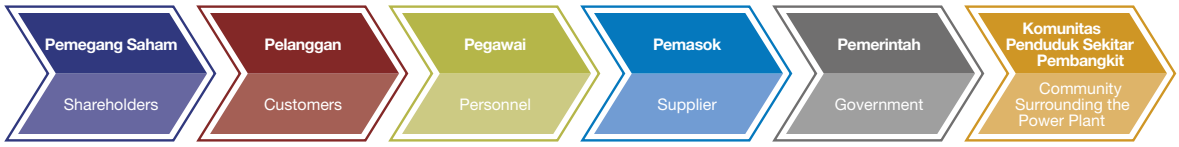
Company Objectives

Pursuant to the Articles of Association, the purpose and objectives of the Company is as follows:

"To engage in electricity business based on the principles of sound industry and trade by implementing Limited Liabilities Company principles."

In order to achieve the purpose and objectives, Indonesia Power conducts business activities in the scope of Company's business by always seeking to meet the expectations of the stakeholders.

Tabel *Stakeholders* Indonesia Power dengan Harapannya
Table: Indonesia Power Shareholders and Their Expectation



No.	Pemangku Kepentingan Stakeholders	Harapan Expectation	
1.	Pemegang Saham Shareholders	• Pemenuhan Kontrak Manajemen • Ketepatan penyelesaian proyek • Tingkat Kesehatan Perusahaan	• Fulfillment of Management Contract • Timeliness of Project Completion • Company Soundness Level
2.	Pelanggan | Customers: • Penyedia Tenaga Listrik untuk Pembangkit Grid (PLN melalui PLN P2B) Electricity Provider for Grid Power Plant (PLN through PLN P2B)	• Keandalan • Kesiapan pembangkit • Ketepatan jadwal pemeliharaan • Harga yang ekonomis	• Reliability • Power plant readiness • Timeliness of maintenance schedule • Economical price
	• Penyedia Tenaga Listrik untuk Pembangkit *Embedded* (PLN melalui PLN Distribusi Jateng & Yogyakarta) Electricity Provider for Embedded Power Plant (PLN through PLN Distribution in Central Java & Yogyakarta)	• Harga yang ekonomis • Kontinuitas Pasokan	• Economical price • Continuity of supply
	• Bisnis Pengelolaan Jasa O&M (PLN melalui PLN wilayah) O&M Service Management Business (PLN through Regional PLN)	Tahap *Supporting* • Pemenuhan *deployment* sebagai persyaratan dalam menjalankan O&M Pembangkit Tahap *Performance* • Pemenuhan Kinerja Pembangkit sesuai kontrak (keandalan, ketepatan waktu, dan lain-lain)	Supporting Stage • Deployment fulfillment as requirement in Power Plant O&M implementation Performance Phase • Fulfillment of power plant performance pursuant to the contract (reliability, timeliness, etc.)

No.	Pemangku Kepentingan Stakeholders	Harapan Expectation	
3.	Pegawai Personnel	Peningkatan kepuasan dan *engagement* pegawai	Improvement of personnel satisfaction and engagement
4.	Pemasok Supplier	• Transparasi & *fairness* • Kelangsungan bisnis jangka panjang	• Transparency and fairness, long-term business continuity • Long-term business continuity
5.	Pemerintah Local Government	Ketaatan atau kepatuhan terhadap perundangan Pemerintah	Adherence or compliance with Government laws and regulations
6.	Komunitas Penduduk Sekitar Pembangkit (Masyarakat di wilayah binaan, LSM Lokal & Internasional, tokoh masyarakat, institusi/ lembaga profesi, media) Local Community Surrounding the Power Plant (Community in development area, Local & International NGO, community leader, institution/professional association, media)	• Dukungan Perusahaan terhadap pemberdayaan masyarakat (ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keamanan) • Bebas dari pencemaran lingkungan • Informasi mengenai proses pembangkitan listrik serta dampaknya terhadap lingkungan • Informasi mengenai tata kelola perusahaan yang baik dan tanggung jawab sosial perusahaan. • Kebijakan peraturan dan prosedur yang berlaku • Kerjasama antar institusi • *Knowledge sharing* antar institusi	• Company support for community empowerment (economy, education, health and security) • Free of environment pollution • Information on power generation process and its impact on the environment • Information on good corporate governance and corporate social responsibility. • Applicable regulation and procedure • Inter-institution cooperation • Knowledge sharing between institutions

Pencapaian tujuan Indonesia Power dilakukan secara bertahap dan terencana guna meningkatkan nilai Perusahaan sehingga Indonesia Power dapat menjadi pelaku bisnis yang diperhitungkan dalam sektor ketenagalistrikan.

Achievement of the Company's objectives is conducted gradually and according to the plan to enhance Corporate values, by which Indonesia Power will be able to be a respected operator in electricity business.

TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PERUSAHAAN

CORPORATE'S OBJECTIVES, TARGET, AND STRATEGY

Sasaran Perusahaan

Sasaran yang ingin dicapai Perusahaan dalam rangka menuju Visi Perusahaan yang ditetapkan merupakan sasaran utama (*ultimate goal*) yang pencapaiannya dilakukan dengan tahapan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

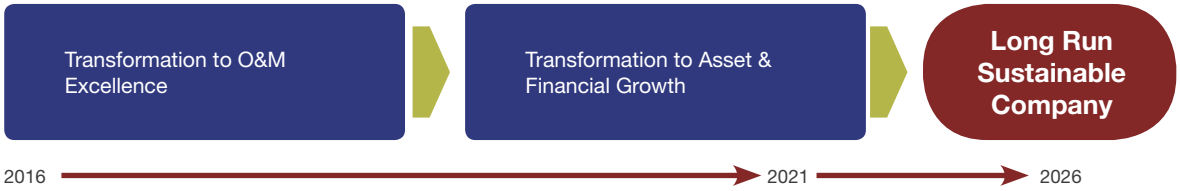
Adapun sasaran setiap tahun yang akan dicapai Indonesia Power dijabarkan lebih lanjut dalam *Roadmap* Menuju Visi Perusahaan, sebagaimana uraian sebagai berikut:

Company Goal

Goal that will be achieved by the Company to realize the specified Vision is the ultimate goal, which will be achieved through every stage in the Company's Long Term Plan.

Annual goal to be achieved by Indonesia Power is elaborated further in the Roadmap to Company Vision, as illustrated below:

Roadmap Menuju Visi Perusahaan
Roadmap Towards Company Vision



No.	Sasaran Utama Main Targets		2017	2021	2026
1	***Operational & Maintenance Excellence*** • EAF	**Operational & Maintenance Excellence** • EAF	• Top 10% NERC PLTU I SPP SLA • Q4 PLTU I SPP FTP 1 • Q2 PLTGU I CCPP	• D1 PLTU I SPP SLA • Q2 PLTU I SPP FTP 1 • Q1 NERC PLTGU I CCPP	• D1 PLTU I SPP SLA • D1 PLTU I SPP FTP 1 • D1 PLTGU I CCPP NERC
	• NPHR	• NPHR	• Q4	• Q3	• Q2
2	***Business Development Excellence*** • Total kapasitas pembangkit (eksisting dan pengembangan sendiri)	**Business Development Excellence** • Total generating capacity (existing and Indonesia Power-constructed plants)	• 8.766,64 MW	• 10.867,54 MW	• 10.867,54 MW
	• Total kapasitas pembangkit oleh anak perusahaan dan afiliasi	• Total generating capacity by subsidiaries and affiliates	• 55 MW	• 3.500,5 MW	• 6.677,35 MW
	• Total bisnis Jasa O&M	• Total business for O&M services	• 7.014 MW	• 11.164,5 MW	• 14.541,4
3	***Human Capital Excellence*** • *Human Capital Readiness* (HCR) dan *Organization Capital Readiness* (OCR)	**Human Capital Excellence** • Human Capital Readiness (HCR) and Organization Capital Readiness (OCR)	• 4,2	• 4,2	• 4,2
	• Produktivitas SDM	• HC Productivity	• 6,6 GWH/pegawai I employee	• 12,3 GWH/pegawai I employee	• 12,3 GWH/pegawai I employee
	• Implementasi *blueprint Human Capital Excellence* (*on budget, on time, on scope*)	• Implementation blueprint Human Capital Excellence (on budget, on time, on scope)	• 100%	• 100%	• 100%

Keterangan Q1: Top 25%, Q2: Top 50% NERC, Q3: Top 75% NERC, Q4: Top 100 NERC

Dalam *Roadmap* tersebut, tahapan awal RJPP 2017-2021 terutama masih fokus untuk mencapai O&M *Excellence* sedangkan pada tahun 2016 mulai menyiapkan pertumbuhan ke depan. Pada periode 5 (lima) tahun berikutnya diproyeksikan Indonesia Power telah memiliki landasan yang cukup baik dalam pengelolaan O&M, sehingga lebih fokus pada pertumbuhan kapasitas pembangkit dan peningkatan kinerja finansial termasuk kemampuan pendanaan Perusahaan yang dibutuhkan untuk tumbuh.

Sasaran utama Perusahaan di tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam RJPP 2017-2021 adalah:

1. *Operation & Maintenance Excellence*
   a) EAF:
      – Top 10% NERC PLTU SLA
      – Q4 PLTU FTP 1
      – Q2 PLTGU
   b) *Nett Plant Heat Rate* (NPHR) Q4
2. *Human Capital Excellence*
   a) Total kapasitas pembangkit (eksisting dan pengembangan sendiri): 8.766,64 MW
   b) Total kapasitas pembangkit oleh anak perusahaan dan afiliasi: 55 MW
   c) Total bisnis jasa O&M: 7.014 MW
3. *Business & Project Management Development*
   a) *Human Capital Readiness* (HCR) dan *Organization Capital Readiness* (OCR): 4,2
   b) Produktivitas SDM: 6,6 GWH/pegawai
   c) Implementasi *blueprint Human Capital Readiness* (*on budget, on time, on scope*): 100%

In the above Roadmap, the initial stage of the LTP 2017-2021 mainly focuses on the achievement of O&M Excellence, while the LTP 2016 was the preparation for future growth. In the next five years period, it is projected that Indonesia Power will have a sufficient foundation in O&M management, by which it can focus on the growth of power plant capacity and improvement of financial performance, including financial capability of the Company that is required to grow.

Company's ultimate goal in 2017 as specified in the LTP 2017-2021 is:

1. Operation & Maintenance Excellence
   a) EAF:
      – Top 10% NERC PLTU SLA
      – Q4 PLTU FTP 1
      – Q2 PLTGU
   b) Nett Plant Heat Rate (NPHR) Q4
2. Human Capital Excellence
   a) Total capacity of the power plant (existing and self-generation): 8,766.64 MW
   b) Total capacity of power plant owned by subsidiary and affiliates: 55 MW
   c) Total O&M service business: 7,014 MW
3. Business & Project Management Development
   a) Human Capital Readiness (HCR) dan Organization Capital Readiness (OCR): 4.2
   b) HR Productivity: 6,6 GWH/personnel
   c) Implementation of Human Capital Readiness blueprint (on budget, on time, on scope): 100%

TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PERUSAHAAN

CORPORATE'S OBJECTIVES, TARGET, AND STRATEGY

Strategi Perusahaan

Untuk mencapai sasaran di atas, berdasarkan hasil analisis *Strength, Weakness, Opportunity and Threat* (SWOT) yang dituangkan dalam matriks *Threat, Opportunity, Weakness, Strength* (TOWS) maka Indonesia Power menetapkan 7 (tujuh) strategi utama Perusahaan sesuai RJPP 2017-2021 yaitu:

Company Strategy

To achieve the above goal, Indonesia Power specified 7 (seven) Company key strategies in accordance with the LTP 2017-2021 based on Strength, Weakness, Opportunity and Threat (SWOT) analysis as follows:

1. 

Melakukan pengembangan pembangkit melalui skema kemitraaan strategis, baik pada lokasi baru maupun lokasi eksisting;
Power plant development through strategic partnership scheme, both at the new location and existing location;

2. 

Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas pembangkit *renewable energy*;
Capacity improvement and increase of renewable energy power plant;

3. 

Mengembangkan bisnis Jasa O&M di dalam dan di luar PLN;
O&M Service business development within and outside of PLN;

4. 

Meningkatkan ketersediaan, keandalan dan efisiensi termal pembangkit yang dikelola dan ramah lingkungan melalui modernisasi yang mengacu kepada investasi yang optimal;
Improve thermal availability, reliability and efficiency of power plants under its management and develop environmentally-friendly power plant through modernization, with reference to optimum investment;

5. 

Meningkatkan peran Anak Perusahaan sesuai dengan *value creation* yang ditetapkan, apakah sebagai sumber pendapatan atau sebagai enabler bisnis Perusahaan;
Increase Subsidiary's role in accordance with the specified value creation, either as a source of income or enabler for the Company;

6. 

Meningkatkan keamanan dan jumlah pasokan energi primer non-BBM dengan harga yang kompetitif; dan
Improve security and volume of non-oil fuel primary energy supply at a competitive price;

7. 

Mencapai *Human Capital Excellence*.
Achieving Human Capital Excellence.

BIDANG USAHA
BUSINESS SECTOR

Bidang Usaha Menurut Anggaran Dasar

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, bidang usaha Indonesia Power adalah menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan terbatas yang meliputi produk dan layanan sebagai berikut:

1. Penyediaan tenaga listrik yang ekonomis bermutu tinggi dan dengan keandalan yang baik.
2. Usaha yang berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik yang meliputi:
   a. Jasa survey, investigasi, disain, konstruksi/ pemasangan instalasi, operasi dan pemeliharaan, persewaan peralatan pembangkitan, serta pendidikan dan pelatihan;
   b. Produksi, perbaikan dan perdagangan dan peralatan tenaga listrik;
   c. Produksi, pengolahan, pengangkutan dan perdagangan batu bara, gambut, biomas dan gas alam;
   d. Produksi dan pengusahaan energi panas bumi;
   e. *Cogeneration*.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan Saat Ini

Adapun untuk kegiatan usaha Indonesia Power yang dijalankan saat ini sebagai berikut:

1. Penyediaan tenaga listrik yang ekonomis bermutu tinggi dan dengan keandalan yang baik, dan
2. Usaha penyediaan jasa operasi dan pemeliharaan.

Sedangkan kegiatan usaha lainnya seperti pengangkutan dan perdagangan batubara, *cogeneration* serta pengusahaan energi panas bumi dilakukan oleh Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan.

Business Sector According to the Articles of Association

Pursuant to article 3 of Company's Articles of Association, Indonesia Power's business sector is electricity business operation based on sound industry and trade principles, by implementing principles of a Limited Liability Company, which include the following product and service:

1. Provision of economical, high quality and reliable electricity.
2. Business operation that is related to provision of electricity, which includes:
   a. Survey, investigation, design, construction/ installation, operation and maintenance, power plant equipment rental, as well as education and training service;
   b. Production, repair and trade of electrical power devices;
   c. Production, management, transportation and trade of coal, peat, biomass and natural gases;
   d. Geothermal energy production and utilization;
   e. *Cogeneration*.

Current Business Activity

Current business activities that are carried out by Indonesia Power are as follows:

1. Provision of economical, high quality and reliable electricity, and
2. Operation and maintenance service provision.

Meanwhile, other business activities such as repair of electrical power devices, coal transportation and trade, natural gases transportation, co-generation and geothermal utilization are operated by Subsidiaries and Joint Venture Companies.

BIDANG USAHA
BUSINESS SECTOR

Produk dan Jasa

Indonesia Power memiliki segmen usaha utama sebagai penyediaan tenaga listrik dan penyediaan jasa operasi dan pemeliharaan (*Operation and Maintenance*/ O&M) pembangkit dengan mengelola pembangkit milik Perusahaan maupun bukan milik Perusahaan yang tersebar di Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi dan Papua. Dalam melakukan kegiatan usaha tersebut, Perusahaan telah membentuk unit kerja yang terdiri dari:

1. Lima (5) Unit Pembangkitan (UP) sebagai penyedia fungsi operasional penyediaan tenaga listrik dalam mengelola pembangkit milik Perusahaan;
2. Tiga (3) Unit Pembangkitan dan Jasa Pembangkitan (UPJP) sebagai penyedia fungsi operasional penyediaan tenaga listrik dalam mengelola pembangkit milik Perusahaan serta fungsi jasa pengelolaan O&M pembangkit bukan milik Perusahaan;
3. Tiga belas (13) Unit Jasa Pembangkitan (UJP) sebagai penyedia fungsi jasa pengelolaan O&M pembangkit bukan milik Perusahaan;
4. Unit Jasa Pemeliharaan (UJH) sebagai penyedia fungsi kegiatan pemeliharaan pembangkit;
5. Unit Proyek sebagai penyedia fungsi perencanaan dan pengendalian kegiatan proyek pembangkit;

Di samping itu, untuk mendukung usaha penyediaan tenaga listrik, Perusahaan juga melakukan pembelian tenaga listrik dalam memenuhi *supply* listrik di Area Bali. Selain itu, Perusahaan juga memiliki Pembangkit di Area Sumatera yang dikelola Anak Perusahaan.

Penyediaan tenaga listrik dilakukan melalui pembangkitan energi listrik dari pembangkit milik sendiri pada 5 UP dan 3 UPJP dengan total kapasitas terpasang sebesar 8.782,68 MW. Sedangkan dalam penyediaan jasa O&M pembangkit, Indonesia Power mengoperasikan dan memelihara pembangkit Program Percepatan Diversifikasi Energi (PPDE) 10.000 MW dan pembangkit luar Jawa pada 13 UJP dan 2 Jasa O&M pembangkit dengan total kapasitas terpasang sebesar 6.039 MW. Dalam mendukung usaha penyediaan tenaga listrik, Perusahaan melakukan pembelian tenaga listrik di Area Bali dengan total kapasitas terpasang sebesar 73 MW. Selain itu, Perusahaan juga memiliki Pembangkit di Area Sumatera dengan total kapasitas terpasang sebesar 81 MW.

Products and Service

The main business segment of Indonesia Power is provision of electricity and provision of power plant operation and maintenance service (O&M) through management of power plants that are owned both by the Company and by other party, which are located across Java, Bali, WNT, ENT, West Kalimantan, South Sulawesi, North Sumatra, South Sumatra, Jambi and Papua. In conducting these business activities, the Company has established work units that consist of:

1. Five (5) Generation Units (GU) as provider of electricity supply operational function in the management of Indonesia Power's power plants;
2. Three (3) Generation and Generation Service Units (GGSU) as the provider of electricity supply operational function in the management of Company's power plants, in addition to O&M management service for Company's power plants;
3. Thirteen (13) Generation Service Units (GSU) as the provider of O&M management service for power plants owned by other party;
4. Maintenance Service Unit (MSU) as the provider of power plant maintenance function;
5. Project Unit as the provider of power plant project planning and control function;

Besides, to support electricity supply business, the Company also makes purchase of electricity to meet electricity supply demand in Bali Area. In addition, the Company also has Power Plant in Sumatra Area that is managed by its Subsidiary.

Provision of electricity is carried out through power generation from its own power plant at 5 GUs and 3 GGSUs with installed capacity of 8,782.68 MW. As to provision of power plant O&M service, Indonesia Power operates and maintains power plant in the 10,000 MW Energy Diversification Acceleration Program (PPDE) Program and power plant outside of Java at 13 GSUs and 2 power plant O&M Services, with total installed capacity of 6,039 MW. In supporting provision of electricity, the Company makes purchase of electricity in Bali Area with total installed capacity of 73 MW. In addition, the Company also has Power Plant in Sumatra Area with installed capacity of 81 MW.

Unit Pembangkitan Indonesia Power meliputi:

Indonesia Power's Generation Unit includes:

Tabel Unit Pembangkitan
Table: Generation Unit

No	Unit	Jumlah Unit Number of Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Jenis Pembangkit Type of Power Generation	Lokasi Location
1	UP Suralaya | Suralaya GU	7	3.400	Thermal (Batubara | Coal)	Cilegon (Banten)
2	UP Saguling | Saguling GU	29	797,36	Hydro	Rajamandala - Bandung (Jabar)
3	UP Mrica | Mrica GU	25	309,74	Hydro	Banjarnegara (Jateng)
4	UP Semarang | Semarang GU	14	1.408,93	Thermal (Gas/Minyak | Oil)	Semarang (Jateng)
5	UP Bali | Bali GU	19	561,49	Thermal (Gas/Minyak | Oil)	Denpasar (Bali)

Unit Pembangkitan dan Jasa Pembangkitan Indonesia Power meliputi:

Indonesia Power's Generation and Generation Services Unit include:

Tabel Unit Pembangkitan dan Jasa Pembangkitan
Table: Generation and Generation Services Unit

No	Unit	Jumlah Unit Number of Unit	Unit Pembangkitan Power Generating Unit		Jasa Pembangkitan Power Generation Service		Lokasi Location
			Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Jenis Pembangkit Type of Power Generation	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Jenis Pembangkit Type of Power Generation	
1	UPJP | GGSU Priok	8	1.196,08	Thermal (Gas/ Minyak | Oil)	-	-	Tanjung Priok (Jakarta)
	Priok Blok 3 Priok Block 3	3	-	-	740	Thermal (Gas)	Tanjung Priok (Jakarta)
2	UPJP | GGSU Kamojang	6	345	Geothermal	-	-	Garut (Jabar)
	Ulumbu	4	-	-	9,60	Geothermal	Ulumbu (NTT)
3	UPJP | GGSU Perak Grati	7	764,08	Thermal (Gas/ Minyak | Oil)	-	-	Pasuruan (Jatim)
	Grati Blok 3*	3	-	-	450	Thermal (Gas)	Pasuruan (Jatim)

*) Untuk Jasa O&M yang tergabung dalam UPJP Perak Grati sebesar 450 MW belum termasuk dalam perhitungan kinerja tahun 2017.

*) O&M Services Units that are incorporated into Perak Grati GGSU with 450 MW capacity are excluded from the calculation of 2017 performance.

BIDANG USAHA
BUSINESS SECTOR

Unit Jasa Pembangkitan Indonesia Power meliputi:

Indonesia Power's Generation Services Unit includes:

Tabel Unit Jasa Pembangkitan
Table: Generation Services Unit

No	Unit	Jumlah Unit Number of Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Jenis Pembangkit Type of Power Generation	Lokasi Location
1	UJP PLTU I GSU SPP Banten 1 Suralaya	1	625	Thermal (Batubara I Coal)	Cilegon (Banten)
2	UJP PLTU I GSU SPP Banten 2 Labuan	2	600	Thermal (Batubara I Coal)	Pandeglang (Banten)
3	UJP PLTU I GSU SPP Banten 3 Lontar	3	945	Thermal (Batubara I Coal)	Tangerang (Banten)
4	UJP PLTU I GSU SPP Jawa Barat 2 Palabuhan Ratu	3	1.050	Thermal (Batubara I Coal)	Sukabumi (Jabar)
5	UJP PLTU I GSU SPP Jawa Tengah 2 Adipala	1	660	Thermal (Batubara I Coal)	Cilacap (Jateng)
6	UJP PLTU I GSU SPP Pangkalan Susu	2	440	Thermal (Batubara I Coal)	Medan (Sumut)
7	UJP PLTGU I GSU CCPP Cilegon	3	739,40	Thermal (Gas)	Cilegon (Banten)
8	UJP PLTU I GSU SPP Barru	2	100	Thermal (Batubara I Coal)	Barru (Sulsel)
9	UJP PLTU I GSU SPP Jeranjang	2	60	Thermal (Batubara I Coal)	Lombok Barat (NTB)
10	UJP PLTU I GSU SPP Sanggau	2	17	Thermal (Batubara I Coal)	Sanggau (Kalbar)
11	UJP PLTU I GSU SPP Holtekamp	2	24	Thermal (Batubara I Coal)	Jayapura (Papua)
12	UJP PLTU I GSU SPP Sintang	1	9	Thermal (Batubara I Coal)	Sintang (Kalbar)
13	UJP PLTA I GSU HPP Orya Genyem	2	20	Hydro	Jayapura (Papua)

Pembelian tenaga listrik di pembangkit Area Bali meliputi:

Purchase of Electricity in Bali Area includes:

Tabel Pembelian Tenaga Listrik
Table: Purchase of Electricity Power

Pembangkit Power Plant	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Jenis Pembangkit Type of Power Generation	Lokasi Location
Pesanggaran	65	Thermal (Minyak I Oil)	Denpasar (Bali)
Nusa Penida	8	Thermal (Minyak I Oil)	Klungkung (Bali)

Pembangkit milik perusahaan di Area Sumatera meliputi:

Power Plant unit owned by the Company in Sumatra Area includes:

Tabel Pembangkit Milik Indonesia Power di Sumatera
Table: Power Generating Unit owned by Indonesia Power in Sumatera

Pembangkit Power Plant	**Kapasitas Terpasang (MW)** Installed Capacity (MW)	**Jenis Pembangkit** Type of Power Plant	**Lokasi** Location
Keramasan	18	Thermal (Gas)	Palembang (Sumsel)
Jambi	18	Thermal (Gas)	Batanghari (Jambi)
Indralaya 1	45	Thermal (Gas)	Palembang (Sumsel)

Selain itu, Indonesia Power memiliki 5 Anak Perusahaan, 1 Perusahaan Patungan, 2 Perusahaan Asosiasi dan 3 Afiliasi dari Anak Perusahaan dalam menunjang kegiatan usaha yang dijalankannya, yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian Daftar Anak Perusahaan, Perusahaan Patungan dan Perusahaan Asosiasi dalam Bab ini.

In addition, Indonesia Power has 5 Subsidiaries, 1 Joint Venture Company, 2 Associate Companies, and 3 Affiliates of Subsidiary to support its business activity, which will be elaborated further in the List of Subsidiary, Associates and Joint Venture Company in this Chapter.

Mekanisme Distribusi Tenaga Listrik sampai kepada Pelanggan

Secara fisik, bisnis pembangkit tenaga listrik dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Tenaga listrik yang diperlukan oleh konsumen akhir dihasilkan oleh pembangkit, disalurkan melalui sistem penyaluran (transmisi) dan didistribusikan melalui jaringan distribusi.

Jumlah kapasitas terpasang Indonesia Power di Jawa-Bali sebesar 8.594,60 MW tersebut dioperasikan atas permintaan PLN Pusat Pengatur Beban (PLN P2B) untuk memenuhi kebutuhan sistem Jawa-Bali di tahun 2017.

Energi yang dihasilkan Unit Pembangkitan tersebut dijual/disalurkan melalui Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sistem Jawa-Bali yang dikelola oleh PLN dan didistribusikan kepada pelanggan *retail*.

Electricity Distribution Mechanism to the Customer

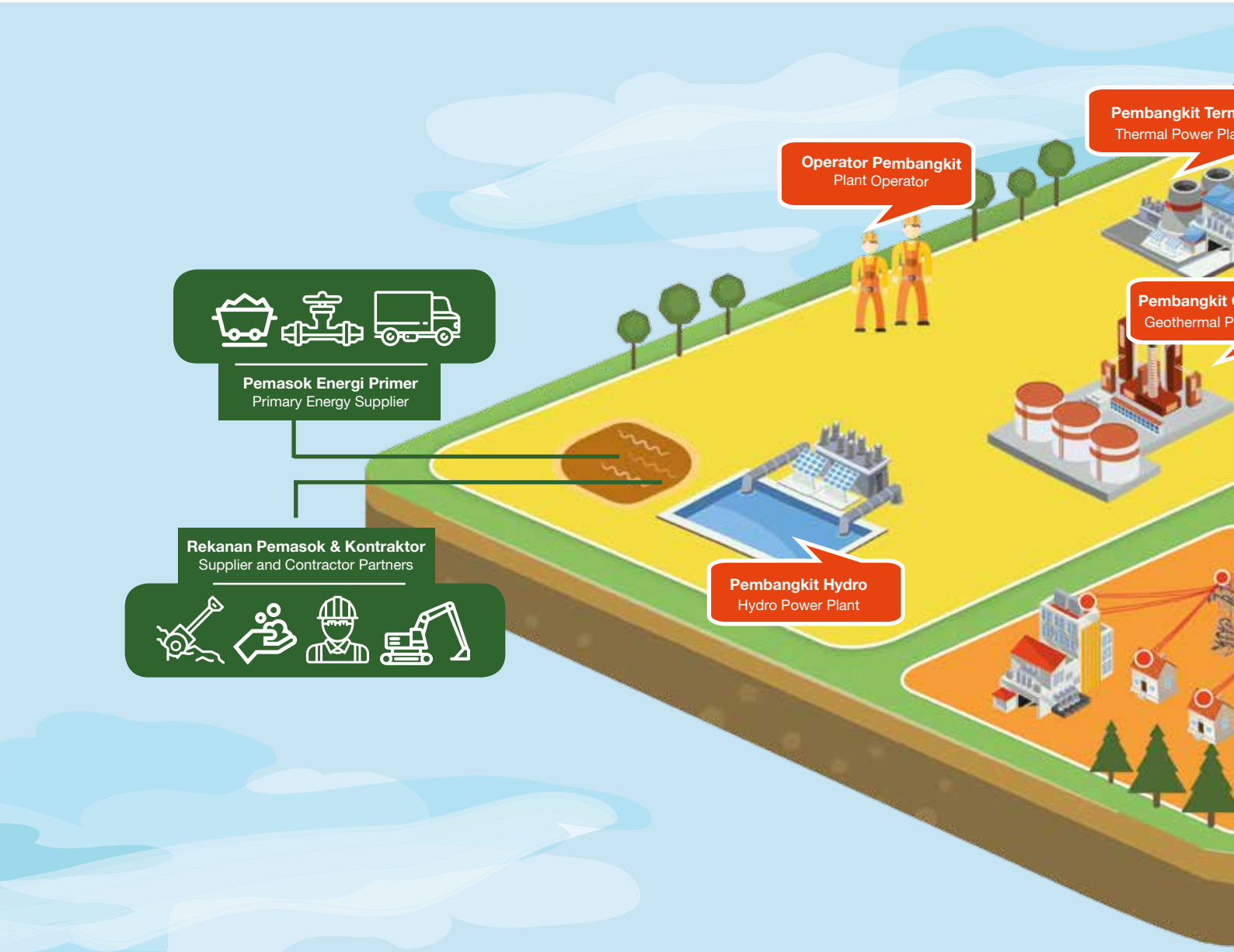
Physically, the electricity power business is divided into 3 (three) parts, i.e. power generation, transmission, and distribution. Electricity that is needed by end users is generated by power plant, transmitted by a transmission system, and will be distributed through a distribution network.

Indonesia Power's total installed capacity in Java-Bali Grid of 8,594.60 MW is operated upon request from PLN Pusat Pengatur Beban Jawa Bali (PLN P2B) to meet the demand of Java-Bali system in 2017.

The energy generated by this Power Generation Unit is sold/distributed through Java-Bali High Voltage Overhead Lines system, which is managed by PLN and distributed to retail customers.

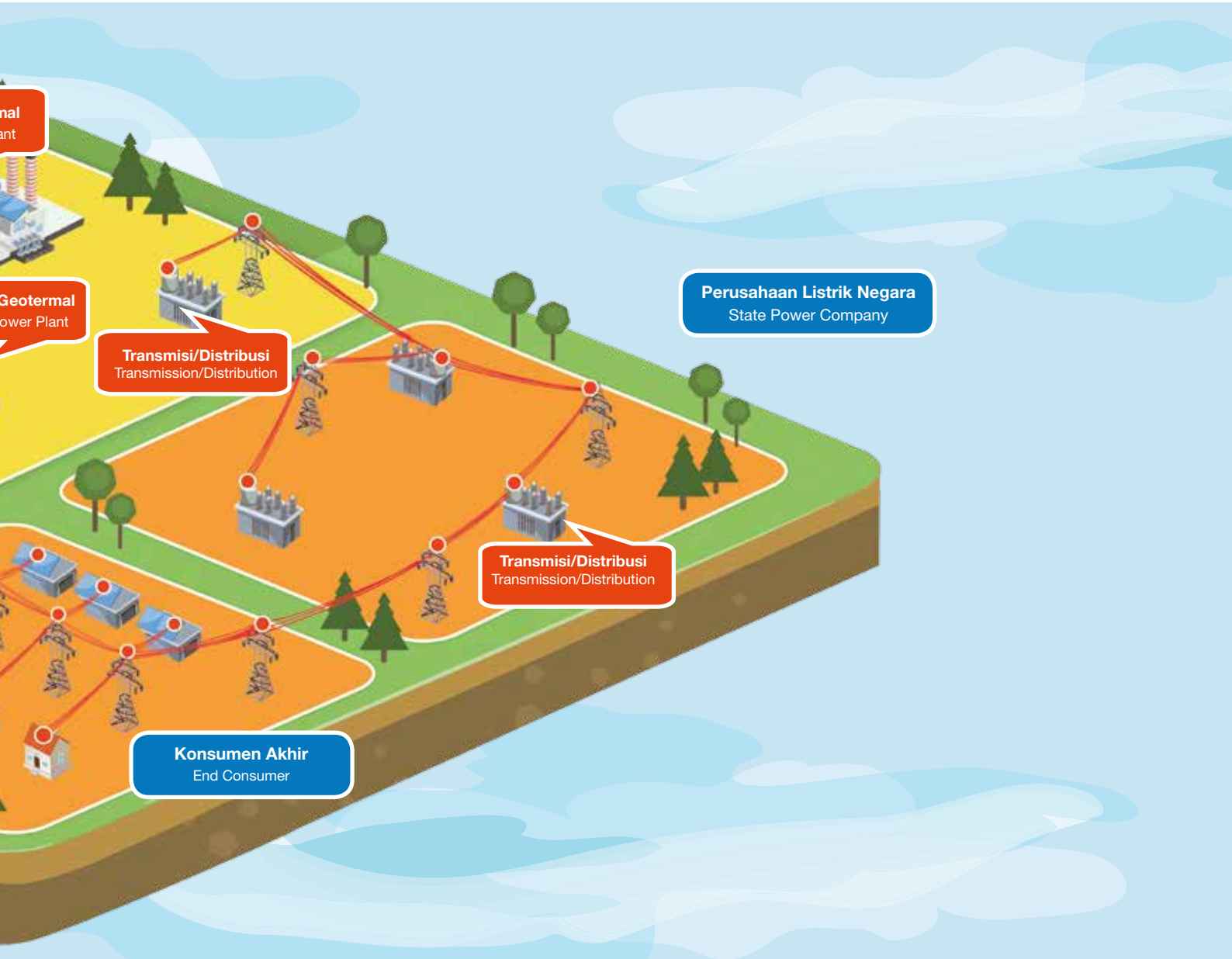
BIDANG USAHA
BUSINESS SECTOR

Skema Distribusi Tenaga Listrik sampai kepada Pelanggan
Mechanism of Electricity Distribution to Customer



Secara fisik, bisnis pembangkit tenaga listrik dibagi dalam tiga bagian, yaitu pembangkit, transmisi, dan distribusi. Tenaga listrik yang diperlukan oleh konsumen akhir dihasilkan oleh pembangkit, disalurkan melalui sistem penyaluran (transmisi) dan didistribusikan melalui jaringan distribusi.

Physically, the electricity power business divided into three parts namely generating, transmission and distribution. The electricity power required by the last consumer generated by a generator, circulated by a transmission system and distributed by a distribution network.



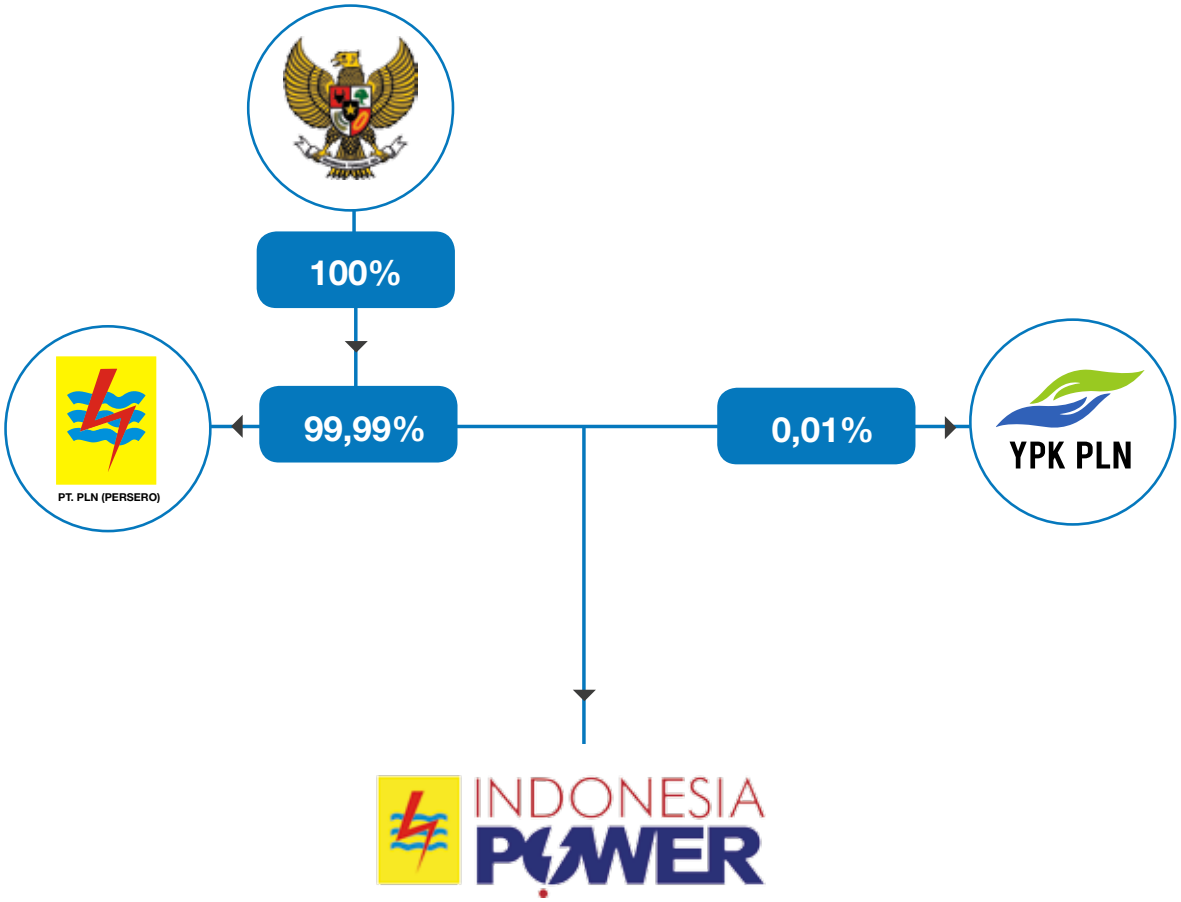
STUKTUR DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
SHAREHOLDERS STRUCTURE AND COMPOSITION

Pemegang saham Indonesia Power terdiri dari:
a. PT PLN (Persero) sebanyak 1 lembar Saham Seri 1 dan 5.215.647.598 lembar Saham Seri 2, dan
b. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) sebanyak 1 lembar Saham Seri 2.

Komposisi Saham Indonesia Power tidak ada yang dimiliki oleh Dewan Komisaris maupun Direksi Perusahaan. Adapun skema struktur dan komposisi pemegang saham sampai dengan pemegang saham pengendali akhir (*ultimate shareholder*) dapat dilihat pada skema berikut:

Indonesia Power shareholders consist of:
a. PT PLN (Persero) with 1 Share of Series 1 share and 5,215,647,598 Shares of Series 2 share
b. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan of PT PLN (Persero) with 1 Share of Series 2 share

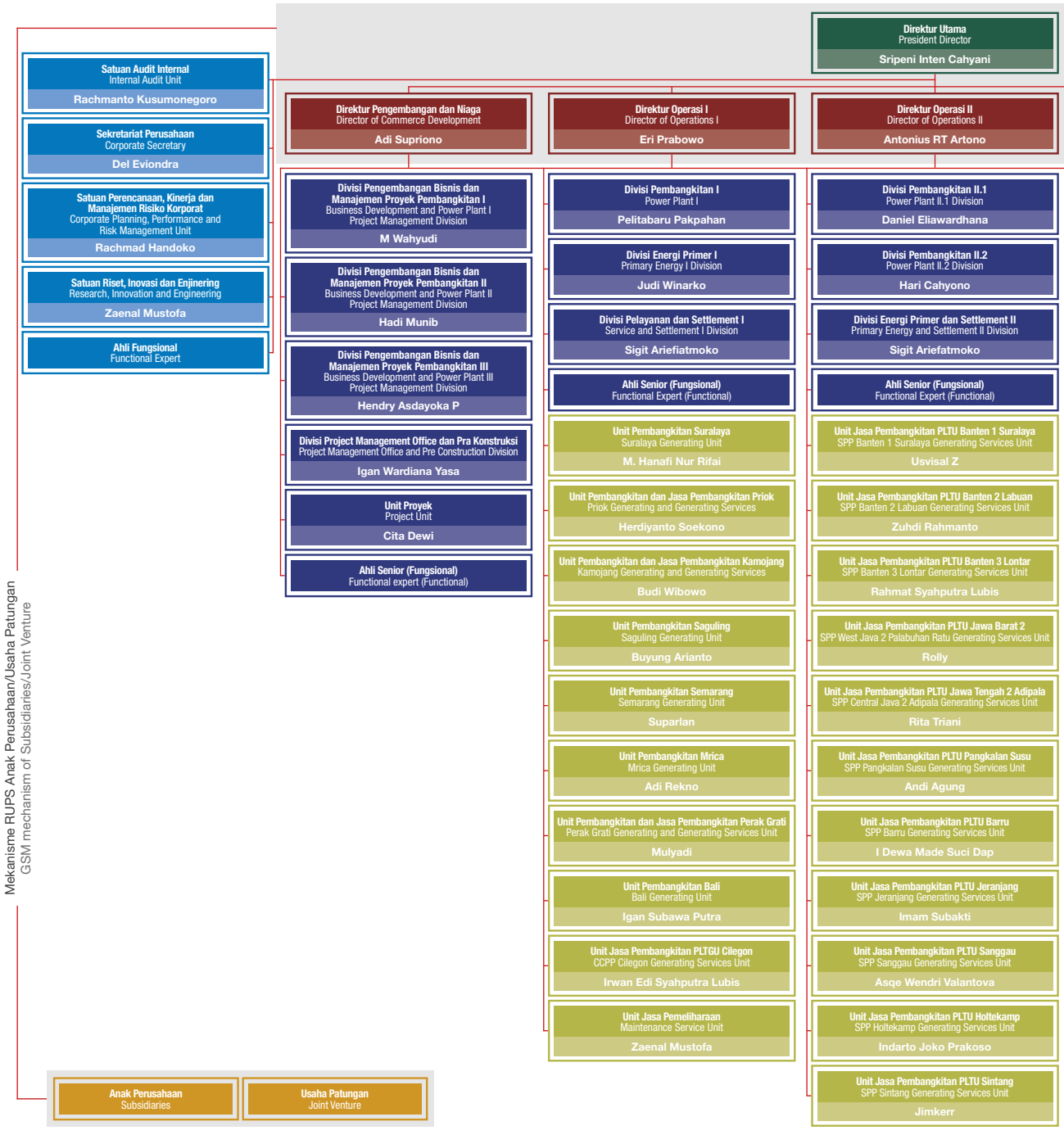
None of the Shares of Indonesia Power is held by the Board of Commissioners and Board of Directors. Shareholders structure and composition to the ultimate shareholder are shown in the scheme below:



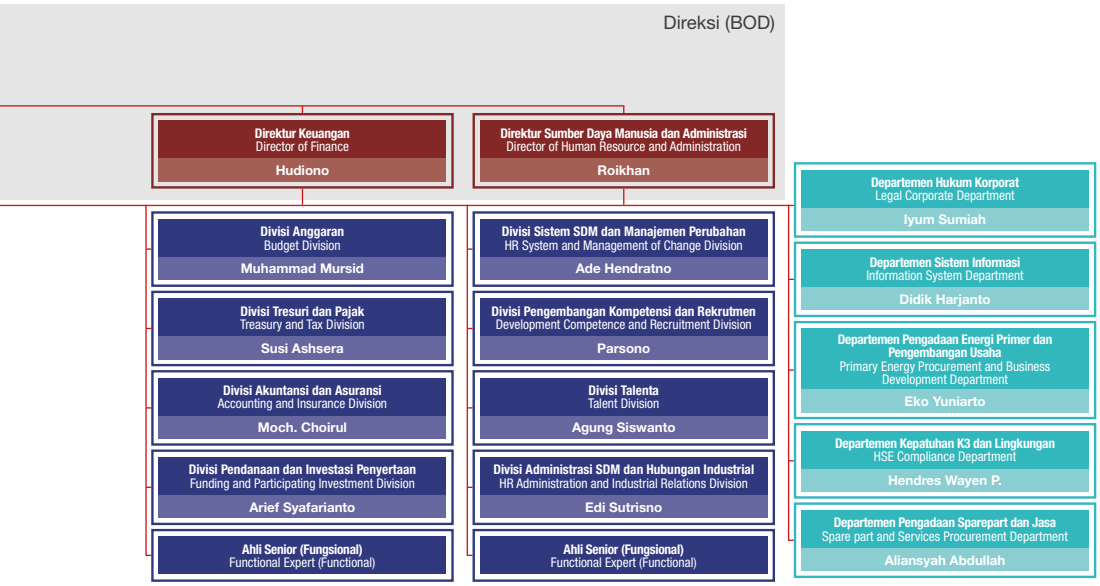


STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN
COMPANY'S ORGANIZATION STRUCTURE

Indonesia Power telah melakukan restrukturisasi organisasi yang selaras serta fokus pada eksekusi ekselen dan dapat memenuhi tantangan pengembangan Perusahaan yang berkelanjutan dengan dikeluarkannya Keputusan Direksi No.193.K/010/IP/2017 tentang Struktur Organisasi Indonesia Power tanggal 12 Oktober 2017 sebagai berikut:



Indonesia Power has restructured the organization aligned and focused on excellent execution and shall be able to face the Company's sustainable development challenges by issuing Directors' Decree No.193.K/010/IP/2017 on Organization Structure of Indonesia Power dated October 12, 2017 as follows:



IDENTITAS DAN RIWAYAT SINGKAT DEWAN KOMISARIS
IDENTITY AND BRIEF HISTORY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS



Bagus Setiawan
Komisaris Utama
President Commissioner

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bandung, berusia 51 tahun. Meraih gelar Magister Manajemen Bisnis dari University Of Missouri (2006) dan Sarjana Mesin dari ITB (1993).

Indonesian Citizen, domiciled in Bandung, 51 years old. He obtained his Master's Degree of Business Management from the University of Missouri (2006) and Bachelor's Degree of Mechanical of Engineering from ITB (1993).

Perjalanan Karir:
Selain menjabat sebagai Komisaris Utama Indonesia Power, beliau juga menjabat sebagai Kepala Divisi *Human Capital Management System* PT PLN (Persero) tahun 2015 - sekarang. Beberapa jabatan lain yang pernah dipegangnya adalah Kepala Divisi Pengembangan Sistem SDM PT PLN (Persero) (2013-2015), General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung (2010-2011), General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Maluku Dan Maluku Utara (2009-2010) serta Manajer Perencanaan Strategis Korporat PT PLN (Persero) (2009).

Training yang diikuti antara lain:
Beliau aktif mengikuti berbagai program *Leadership* antara lain *Directorship Program* (2017), dan *Project Management Office.*

Dasar Pengangkatan Pertama:
RUPS Sirkuler Penggantian dan Penambahan Anggota Dewan Komisaris tanggal 25 Agustus 2016.

Penugasan Khusus (jabatan lain):
- Kepala Divisi Human Capital Managemen System PT PLN (Persero)
- Dewan Pengawas Dana Pensiun PT PLN (Persero)

Career:
In addition to his position as the President Commissioner of Indonesia Power, he also serves as Head of Human Capital Management System Division of PT PLN (Persero) since 2015 - now. Several other positions to which he was assigned include the Head of HR System Development Division of PT PLN (Persero) (2013-2015), General Manager of PT PLN (Persero) Bangka Belitung Region (2010-2011), General Manager of PT PLN (Persero) Maluku and North Maluku Region (2009-2010), as well as Corporate Strategic Planning Manager of PT PLN (Persero) (2009).

Training attended:
He actively engaged in Leadership programs, such as Directorship Program (2017 and Project Management Office.

Basis of the First Appointment:
Circular Resolution of the GMS concerning Replacement and Addition of Members of Company's Board of Commissioners dated August 25, 2016.

Special Assignment (other position):
- Head of Human Capital Management System Division of PT PLN (Persero)
- Supervisory Board of Pension Fund of PT PLN (Persero)



Ahmad Yani
Komisaris
Commissioner

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, berusia 55 tahun. Meraih gelar Doktor dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung (2013), Magister Hukum dari Universitas Indonesia (2003), Sarjana Hukum dari Universitas Islam Jakarta (1988) dan Sarjana Muda Hukum dari Universitas Islam Jakarta (1986).

Indonesian Citizen, domiciled in Jakarta, 55 years old. He obtained his Doctorate from Faculty of Law of Universitas Padjadjaran Bandung (2013), Master's Degree of Law from Universitas Indonesia (2003), Bachelor's Degree of Law from Universitas Islam Jakarta (1988) and Diploma in Law from Universitas Islam Jakarta (1986).

Perjalanan Karir:
Sebelum menjabat sebagai Komisaris Indonesia Power, beliau menjabat sebagai Anggota DPR/MPR RI Periode 2009-2014. Beberapa jabatan lain yang pernah dipegangnya adalah Law Office Ahmad Yani & Associates sebagai Founder (2003-2009), Dosen Hukum Universitas Islam Atthariyah Jabatan Lektor Kepala (2000-2008), Law Firm DYT & Partner sebagai Managing Director (2003) dan Law Firm H.D.Y sebagai Senior Partner (1994-1996).

Training yang diikuti antara lain:
Beliau telah mengikuti program pelatihan diantaranya *Directorship Program* (2017), *International Law & The Law International Treates, International Human Rights Law Attorney Australia*, Pelatihan Penyusunan Rancangan Undang-undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis dan Pelatihan Perpu No. 1 Tentang Kepailitan.

Dasar Pengangkatan Pertama:
RUPS Sirkuler Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tanggal 2 Mei 2016.

Penugasan Khusus (jabatan lain): -

Career:
Prior to serving as the Commissioner of Indonesia Power, he served as the Member of the House of Representatives/People's Consultative Assembly (DPR/MPR) for 2009-2014 Period Several other positions to which he was assigned include the Founder of Ahmad Yani & Associates Law Firm (2003-2009), Head Lecturer of Law Professor in Universitas Islam Atthariyah (2000-2008), Managing Director of DYT & Partner Law Firm (2003), and Senior Partner of H.D.Y Law Firm (1994-1996).

Training attended:
He had attended numerous training programs, such as Directorship Program (2017), International Law & The Law International Treaties, International Human Rights Law Attorney Australia, Training on Bill Drafting in the Change of Democratic Society and Training of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 on Bankruptcy.

Basis of the First Appointment:
Circular Resolution of the GMS concerning Appointment of Members of Company's Board of Commissioners dated May 26, 2016.

Special Assignment (other position): -



Abdi Mustakim

Komisaris
Commissioner

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, berusia 41 tahun. Meraih gelar Magister of Business Administration dari Maastricht School Of Management (2006), Sarjana Ekonomi dari Universitas Mercu Buana (2004) dan Sarjana Muda Akuntansi dari STAN (1997).

Indonesian Citizen, domiciled in Jakarta, 41 years old. Obtained his Master's Degree of Business Administration from Maastricht School of Management (2006), Bachelor's Degree of Economics from Universitas Mercu Buana (2004) and Diploma in Accounting from STAN (1997).

Perjalanan Karir:
Selain menjabat sebagai Komisaris Indonesia Power, beliau juga menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Manajemen Kinerja tahun 2015 - sekarang. Beberapa jabatan lain yang pernah dipegangnya adalah Plt. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan (2014-2015), Kepala Sub Bagian Pelaporan (2013-2014), Kepala Sub Bagian Perencanaan (2010-2013) serta Plt. Kepala Sub Bidang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Usaha Perdagangan, Pergudangan, Distribusi dan Jasa Sertifikasi II (2006-2010).

Training yang diikuti antara lain:
Beliau telah mengikuti program pelatihan diantaranya *Directorship Program* (2017), *Strategy Management & Corporate Culture, Holding Company Management, Risk Management & Internal Control System* serta *Project Financing*.

Dasar Pengangkatan Pertama:
RUPS Sirkuler Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tanggal 10 November 2015.

Penugasan Khusus (jabatan lain):
Kepala Bagian Perencanaan dan Manajemen Kinerja Kementerian BUMN.

Career:
In addition to serving as the Commissioner of Indonesia Power, he is the Head of Performance Management and Planning Department of the Ministry of SOE from 2015-now. Several other positions in the Ministry of SOE to which he was assigned include the Caretaker Head of Planning and Finance Department (2014-2015), Head of Reporting Sub-Division, (2013-2014), Head of Planning Sub-Division (from 2010-now) and Caretaker Head of Trade, Warehousing and Distribution Business Risk and Governance and Certification Service II (2006-2010).

Training attended:
He had attended numerous trainings, including Directorship Program (2017), Strategy Management & Corporate Culture, Holding Company Management, Risk Management & Internal Control System as well as Project Financing.

Basis of the First Appointment:
Circular Resolution of the GMS concerning Dismissal and Appointment of Members of Company's Board of Commissioners dated November 10, 2015.

Special Assignment (other position):
Head of Performance Planning and Management of the Ministry of State-Owned Enterprises (SOE).



Agus Hernawan

Komisaris
Commissioner

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, berusia 57 tahun. Meraih gelar Magister Management dari Universitas Padjadjaran.

Indonesian Citizen, domiciled in Jakarta, 57 years old. Obtained his Master's Degree of Management from Universitas Padjadjaran.

Perjalanan Karir:
Sebelum menjabat sebagai Komisaris Indonesia Power, beliau menjabat sebagai Direktur Retail Business Banking Bank Bukopin tahun 2013-2015. Beberapa jabatan lain yang pernah dipegangnya adalah Direktur Pelayanan & Distribusi Bank Bukopin (2006-2013), Direktur Consumer Banking Bank Bukopin (2000-2006), Group Head Bisnis Bank Bukopin (1997-2000) dan Pemimpin Cabang Bank Bukopin (1988-1997).

Training yang diikuti antara lain:
Beliau telah mengikuti program pelatihan diantaranya *Directorship Program* (2017), Market Visit ke London (2017) dan *Project Management Office*.

Dasar Pengangkatan Pertama:
RUPS Sirkuler Penggantian dan Penambahan Anggota Dewan Komisaris tanggal 25 Agustus 2016.

Penugasan Khusus (jabatan lain): -

Career:
Prior to serving as a the Commissioner of Indonesia Power, he served as the Member of the House of Representatives/People's Consultative Assembly (DPR/MPR) for 2013-2015 Period Several other positions to which he was assigned include Service & Distribution Director of Bank Bukopin (2006-2013), Consumer Banking Director of Bank Bukopin (2000-2006), Group Head Business of Bank Bukopin (1997-2000) and Head of Branch Office of Bank Bukopin (1988-1997).

Training attended:
He had attended several training programs, including Directorship Program (2017), Market Visit to London (2017) and Project Management Office.

Basis of the First Appointment:
Circular Resolution of the GMS concerning Replacement and Addition of Members of Company's Board of Commissioners dated August 25, 2016.

Special Assignment (other position): -

IDENTITAS DAN RIWAYAT SINGKAT DEWAN KOMISARIS

IDENTITY AND BRIEF HISTORY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS



Munir Ahmad

Komisaris
Commissioner

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, berusia 56 tahun. Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Hasanudin (1987).

Indonesian Citizen, domiciled in Jakarta, 56 years old. Obtained his Bachelor's Degree of Electrical Engineering from Universitas Hasanudin (1987).

Perjalanan Karir:
Selain menjabat sebagai Komisaris Indonesia Power, beliau juga menjabat sebagai Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan tahun 2015 - Sekarang. Beberapa jabatan lain yang pernah dipegangnya adalah Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan (2014-2015), Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (2010-2014), Kepala Pusdiklat Ketenagalistrikan Dan Energi Baru Terbarukan (2010) serta Kepala Bidang Pelatihan dan Sarana – Pusdiklat KEBT (2006-2010).

Career:
In addition to serving as the Commissioner of Indonesia Power, he is the Electricity Engineering and Environment Director from 2015-now. Several other positions to which he was assigned include Electricity Program Coaching Director (2014-2015), Head of Electricity, New and Renewable Energy, and Energy Conservation Education and Training Centre, (2010-2014), Head of Electricity and New and Renewable Energy Training Centre (2010), and Head of Training and Facilities Department – KEBT Training (2006-2010).

Training yang diikuti antara lain:
Beliau telah mengikuti program pelatihan diantaranya *Directorship Program* (2017), *Indonesian Japan Technology and Introduction and Dialogue on Energy Mineral Resource, Clean Coal Technology* dan Pelatihan Teknis Penggunaan Alat-Alat Ukur Listrik.

Training attended:
He had attended several training programs, including Directorship Program (2017), Indonesian Japan Technology and Introduction and Dialogue on Energy Mineral Resource, Clean Coal Technology and Technical Training on the Use of Electrical Gauges..

Dasar Pengangkatan Pertama:
RUPS Sirkuler Penggantian dan Penambahan Anggota Dewan Komisaris tanggal 25 Agustus 2016.

Basis of the First Appointment:
Circular Resolution of the GMS concerning Replacement and Addition of Members of Company's Board of Commissioners dated August 25, 2016.

Penugasan Khusus (jabatan lain):
Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM.

Special Assignment (other position):
Electricity Engineering and Environment Director, Directorate General of Electricity, Ministry of Energy and Mineral Resources.



Tri Setyo Nugroho

Komisaris
Commissioner

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Depok, berusia 59 tahun. Meraih gelar Magister Terapan Project Management Dari PM Box Institute (2004), Sarjana Teknik Sipil Dari ISTA (1996) dan Sarjana Muda Teknik Sipil Dari Universitas Diponegoro (1981).

Indonesian Citizen, domiciled in Depok, 59 years old. Obtained his Master's Degree of Applied Project Management from PM Box Institute (2004), Bachelor's Degree of Civil Engineering from ISTA (1996) and Diploma in Civil Engineering from Universitas Diponegoro (1981).

Perjalanan Karir:
Selain menjabat sebagai Komisaris Indonesia Power, beliau juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Manajemen Proyek PT PLN (Persero tahun 2014-2017. Beberapa jabatan lain yang pernah dipegangnya adalah Kepala Divisi Pengadaan Strategis PT PLN (Persero) (2013-2014), Kepala Divisi Administrasi Konstruksi PT PLN (Persero) (2012-2013), Project Director Administrasi Investasi Pembangunan PT PLN (Persero) (2010-2012) serta Deputi Direktur Administrasi Konstruksi pada Direktorat Konstruksi Strategis (2008-2010).

Career:
In addition to his position as the Commissioner of Indonesia Power, he also served as Project Management Specialist of PT PLN (Persero) from 2014-2017. Several other positions to which he was assigned include Head of Strategic Procurement Division of PT PLN (Persero) (2013-2014), Project Director of Construction Investment Administration of PT PLN (Persero) (2010-2012), and Deputy Construction Administration Director in the Directorate of Strategic Construction (2008-2010).

Training yang diikuti antara lain:
Beliau telah mengikuti program pelatihan diantaranya *Directorship Program* (2017), *Market Visit* ke *London* (2017) dan *Project Management Office*.

Training attended:
Directorship Program (2017), Market Visit to London (2017) and Project Management Office.

Dasar Pengangkatan Pertama:
RUPS Sirkuler Penggantian dan Penambahan Anggota Dewan Komisaris tanggal 25 Agustus 2016.

Basis of the First Appointment:
Circular Resolution of the GMS concerning Replacement and Addition of Members of Company's Board of Commissioners dated August 25, 2016.

Penugasan Khusus (jabatan lain): -

Special Assignment (other position): -

IDENTITAS DAN RIWAYAT SINGKAT DIREKSI
IDENTITY AND BRIEF HISTORY OF THE BOARD OF DIRECTORS



Sripeni Inten Cahyani
Direktur Utama
President Director

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, berusia 49 tahun. Meraih gelar Magister Manajemen Keuangan dari STM PPM Jakarta (2001), Sarjana Teknik Kimia dari Universitas Diponegoro (1992), serta gelar Profesi Ajun Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAAIK).

Indonesian Citizen, domiciled in Jakarta, 49 years old. Obtained his Master in Finance Management from STM PPM Jakarta (2001), Bachelor's Degree of Chemical Engineering from Universitas Diponegoro (1992), Associate in General Insurance (AAAIK).

Perjalanan Karir:
Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama Indonesia Power, beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan Indonesia Power (2013-2016). Beberapa jabatan lain yang pernah dipegangnya adalah Eksekutif Utama Bidang Keuangan Indonesia Power yang ditugaskaryakan sebagai Senior Spesialis Keuangan Divisi Keuangan Korporat PLN (2013), Kepala Divisi Pendanaan dan Asuransi Indonesia Power (2010-2013), Vice President Indonesia Power (2009-2010) dan Manager Perencanaan & Administrasi Pendanaan (2007-2009).

Career:
Prior to serving as the President Director of Indonesia Power, she was the Finance Director of Indonesia Power (2013-2016). Several other positions to which she was assigned include Finance Executive of Indonesia Power who was assigned as the Senior Financial Specialist of Corporate Finance Division of PT PLN (2013), Head of Funding and Insurance of Indonesia Power (2010-2013), Vice President of Indonesia Power (2009-2010) and Funding Planning & Administration Manager (2007-2009).

Training yang diikuti antara lain:
Beliau aktif mengikuti berbagai program *Leadership* antara lain *Directorship Program* (2017), Workshop Strategi Eksekusi RKAP dan Rakor O&M Tahun 2017 (2017), *Enterprise Risk Management Certified Professional* (ERMCP) dan *Chartered Financial Analyst* (CFA) level 1, *Profesional Director Program* - IICD, *Certified Strategic Execution Profesional* (CSEP), *Mission – Vision Review and Core Competency Development, Program General Electric – Executive Leadership Training, Pricing and Settlement* Pembangkit, *Project Financing Modelling*, Perpajakan, *Trade Finance, Business Model, Negotiation skill, Enterprise Risk Management*, Asuransi dan Manajemen Risiko serta *Energy Modelling*, ISO 31000 *International Risk Management Standard* ERM *Fundamentals*, pelatihan ASEAN *Corporate Governance Scorecard, Strategic Leadership, GRC Best Practise and Board Governance, Introduction to Technical Risk Assessment Process* (TRAP), *Business Continuity Management System* (BCMS) *for Power Plants, Enterprise Value Mapping*, UU No. 40, *Commercial Dispute & Arbitration*, GCG, *Stakeholder Management, Board Duties, Responsibilities & Liabilities, Building Trust into Sustainable Business* dan *Project Management Office*.

Training attended:
She actively attended various Leadership programs, including Directorship Program (2017), Workshop on WP&B Execution Strategy and O&M Coordination Meeting 2017 (2017), Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP) and Chartered Financial Analyst (CFA) level 1, Professional Director Program - IICD, Certified Strategic Execution Professional (CSEP), Mission – Vision Review and Core Competency Development, General Electric – Executive Leadership Program Training, Power Plant Pricing and Settlement, Project Financing Modeling, Tax, Trade Finance, Business Model, Negotiation skill, Enterprise Risk Management, Insurance and Risk Management and Energy Modeling, ISO 31000 International Risk Management Standard ERM Fundamentals, ASEAN Corporate Governance Scorecard training, Strategic Leadership, GRC Best Practice and Board Governance, Introduction to Technical Risk Assessment Process (TRAP), Business Continuity Management System (BCMS) for Power Plants, Enterprise Value Mapping, Law No. 40, Commercial Dispute & Arbitration, GCG, Stakeholder Management, Board Duties, Responsibilities & Liabilities, Building Trust into Sustainable Business and Project Management Office.

Dasar Pengangkatan Pertama:
Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler tanggal 21 Maret 2016.

Basis of the First Appointment:
Circular Resolution of Shareholders dated March 21, 2016.

Penugasan Khusus (jabatan lain): -

Special Assignment (other position): -

IDENTITAS DAN RIWAYAT SINGKAT DIREKSI

IDENTITY AND BRIEF HISTORY OF THE BOARD OF DIRECTORS



Eri Prabowo

Direktur Operasi I

Director of Operations I

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, berusia 51 tahun. Meraih gelar Doctor of Philosophy (PhD) in Economics dari Universitas Airlangga (2010), Magister Information Technology dari Universitas Indonesia (1998) dan Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Indonesia (1990).

Indonesian Citizen, domiciled in Jakarta, 51 years old. Obtained his Doctor of Philosophy (PhD) in Economics from Universitas Airlangga (2010), Master's Degree of Information Technology from Universitas Indonesia (1998) and Bachelor's Degree of Mechanical Engineering from Universitas Indonesia (1990).

Perjalanan Karir:
Sebelum menjabat sebagai sebagai Direktur Operasi I, pernah menjabat sebagai Direktur Produksi Indonesia Power (2013-2016). Beberapa jabatan lain yang pernah dipegangnya adalah Sekretaris Perusahaan Indonesia Power (2012-2013), General Manager UBP Saguling Indonesia Power (2010-2012) serta Deputy General Manager Energi Primer UBP Suralaya Indonesia Power (2008-2010) dan Ahli Kajian Kelayakan Proyek Indonesia Power (2007-2008). Memiliki pengalaman kerja internasional sebagai Maintenance Team Leader untuk proyek Annual Inspection dan Steam Turbine and Generator Remaining Life Assessment di Rabegh Steam Power Plant, Saudi Arabia. Aktif di Chairman HAPUA Workgroup 1.

Training yang diikuti antara lain:
Beliau telah mengikuti program pelatihan diantaranya, *Directorship* Program (2017), *Workshop* Strategi Eksekusi RKAP (2017), *Leadership Capacity Building*, *Business Negotiation Skill*, *Financial Modelling For Project*, *Professional Director* Program, IHT Tata Kelola Batu Bara dan *Workshop Senior Leader Capacity Building* Manajemen Risiko, pelatihan ASEAN *Corporate Governance Scorecard*, *Strategic Leadership*, GRC *Best Practise* and *Board Governance*, *Introduction to Technical Risk* Assessment Process (TRAP), Business *Continuity Management System* (BCMS) *for Power Plants*, *Enterprise Value Mapping*, UU No. 40, *Commercial Dispute* & *Arbitration*, GCG, *Stakeholder Management*, *Board Duties, Responsibilities & Liabilities, Building Trust into Sustainable Business* dan *Project Management Office*.

Dasar Pengangkatan Pertama:
Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler tanggal 2 Januari 2015.

Penugasan Khusus (jabatan lain): -

Career:
Prior to serving as the Operations Director I, he was a Production Director of Indonesia Power (2013-2016). Several other positions to which he was assigned include Corporate Secretary of Indonesia Power (2012-2013), General Manager of Saguling GBU of Indonesia Power (2010-2012), and Deputy General Manager of Primary Energy of Suralaya GBU Indonesia Power (2008-2010) and Project Feasibility Specialist of Indonesia Power (2007-2008). His international work experiences include Maintenance Team Leader for Annual Inspection project and Steam Turbine and Generator Remaining Life Assessment project in Rabegh Steam Power Plant, Saudi Arabia. He is also active as the Chairman of HAPUA Workgroup 1.

Training attended:
He had attended numerous training programs, including Directorship Program (2017) Workshop on WP&B Execution Strategy (2017), Leadership Capacity Building, Business Negotiation Skill, Financial Modeling For Project, Professional Director Program, IHT on Coal Governance and Workshop on Risk Management Capacity Building for Senior Leader, Training on ASEAN Corporate Governance Scorecard, Strategic Leadership, GRC Best Practice and Board Governance, Introduction to Technical Risk Assessment Process (TRAP), Business Continuity Management System (BCMS) for Power Plants, Enterprise Value Mapping, Law No. 40, Commercial Dispute & Arbitration, GCG, Stakeholder Management, Board Duties, Responsibilities & Liabilities, Building Trust into Sustainable Business and Project Management Office.

Basis of the First Appointment:
Circular Resolution of Shareholders dated January 2, 2016.

Special Assignment (other position): -



Antonius RT Artono

Direktur Operasi II
Director of Operations II

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, berusia 54 tahun. Meraih gelar Magister of Business Administration dari University of Missouri St. Louis (2006), Sarjana Teknik Geothermal dari Institute University of Auckland (1995) dan Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Sepuluh November (1986).

Indonesian Citizen, domiciled in Jakarta, 54 years old. Obtained his Master's Degree of Business Administration from the University of Missouri St. Louis (2006), Bachelor's Degree of Geothermal Engineering from Institute University of Auckland (1995) and Bachelor of Chemical Engineering from the Institut Teknologi Sepuluh November (1986).

Perjalanan Karir:
Sebelum menjabat sebagai Direktur Operasi II, pernah menjabat sebagai Plt. Direktur Utama (2014-2015). Beberapa jabatan lain yang pernah dipegangnya adalah Direktur Pengembangan dan Niaga Indonesia Power (2012-2015), Ahli Utama Pengembangan Bisnis (2012), General Manager UBP Bali Indonesia Power (2010-2012) dan Vice President Pengembangan Usaha Pembangkit Besar (2008-2010).

Training yang diikuti antara lain:
Beliau telah mengikuti program pelatihan diantaranya *Directorship Program* (2017), Workshop Strategi Eksekusi RKAP dan Rakor O&M Tahun 2017 (2017), IICD *Board Leadership, Coaching Top Level Management, Workshop* Manajemen Risiko, Sosialisasi "Polis Asuransi 2012", *Check Point* 2LE4ECI, *Workshop* & Evaluasi LE4ECI, *Capacity Building For Non - OEM Turbine Hot Gas Path Parts & Super Alloy*, Seminar Nasional Bendungan Besar 2013, *Strategy Formulation with Balanced Scorecard* dan *Workshop* Visi, Misi dan Kompetensi Inti, IHT Tata Kelola Batu Bara, pelatihan ASEAN *Corporate Governance Scorecard, Strategic Leadership*, GRC *Best Practise and Board Governance, Introduction to Technical Risk Assessment Process* (TRAP), *Business Continuity Management System* (BCMS) *for Power Plants, Enterprise Value Mapping*, UU No. 40, *Commercial Dispute & Arbitration*, GCG, *Stakeholder Management, Board Duties, Responsibilities & Liabilities, Building Trust into Sustainable Business* dan *Project Management Office*.

Dasar Pengangkatan Pertama:
Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler tanggal 21 Maret 2016.

Penugasan Khusus (jabatan lain): -

Career:
Prior to serving as the Operations Director II, he was the Caretaker President Director (2014-2015). Several other positions to which he was assigned include Development and Commercial Director of Indonesia Power (2012-2015), Business Development Lead Specialist (2012), General Manager of Bali GBU of Indonesia Power (2010-2012).

Training attended:
He had attended numerous training programs, including Directorship Program (2017), Workshop on WP&B Execution Strategy and O&M Coordination Meeting 2017 (2017), IICD Board Leadership, Coaching Top Level Management, Workshop on Risk Management, Dissemination of "Insurance Policy2012", 2LE4ECI Check Point, 2LE4ECI Workshop & Evaluation, Capacity Building For Non - OEM Turbine Hot Gas Path Parts & Super Alloy, National Seminar on Large Dams 2013, Strategy Formulation with Balanced Scorecard and Workshop on Vision, Mission and Core Competency, IHT on Coal Governance, Training on ASEAN Corporate Governance Scorecard, Strategic Leadership, GRC Best Practice and Board Governance, Introduction to Technical Risk Assessment Process (TRAP), Business Continuity Management System (BCMS) for Power Plants, Enterprise Value Mapping, Law No. 40, Commercial Dispute & Arbitration, GCG, Stakeholder Management, Board Duties, Responsibilities & Liabilities, Building Trust into Sustainable Business and Project Management Office.

Basis of the First Appointment:
Circular Resolution of Shareholders dated March 21, 2016.

Special Assignment (other position): -

IDENTITAS DAN RIWAYAT SINGKAT DIREKSI

IDENTITY AND BRIEF HISTORY OF THE BOARD OF DIRECTORS



Hudiono

Direktur Keuangan
Finance Director

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, berusia 61 tahun. Meraih gelar Master Teknik dari ITB (1999), Sarjana Ekonomi Perusahaan dari Universitas Terbuka (1991) dan Sarjana Teknik Elektro dari ITB (1981).

Indonesian Citizen, domiciled in Jakarta, 61 years old. Obtained his Master's Degree of Engineering from ITB (1999), Bachelor's Degree in Economics from Universitas Terbuka (1991) and Bachelor's Degree in Electrical Engineering from ITB (1981).

Perjalanan Karir:
Sebelum menjabat sebagai Direktur Keuangan, pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Pembangkitan Jawa-Bali (2012-2016). Beberapa jabatan lain yang pernah dipegangnya adalah Kepala Divisi Perencanaan dan Pengendalian Anggaran PLN (2010-2012), Deputi Direktur Perencanaan Pengendalian Anggaran dan Kinerja PLN (2009-2010), General Manager PLN Wilayah Sumatera Barat (2008-2009) dan Manajer Bidang Niaga PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten (2000-2008).

Training yang diikuti antara lain:
Beliau telah mengikuti program pelatihan *Directorship Program* (2017), Workshop Strategi Eksekusi RKAP (2017), ASEAN Corporate Governance Scorecard, Strategic Leadership, GRC Best Practise and Board Governance, Introduction to Technical Risk Assessment Process (TRAP), Business Continuity Management System (BCMS) for Power Plants, Enterprise Value Mapping, UU No. 40, Commercial Dispute & Arbitration, GCG, Stakeholder Management, Board Duties, Responsibilities & Liabilities, Building Trust into Sustainable Business dan Project Management Office.

Dasar Pengangkatan Pertama:
Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler tanggal 21 Maret 2016.

Penugasan Khusus (jabatan lain): -

Career:
Prior to serving as the Finance Director, he was the Finance Director of PT Pembangkitan Jawa-Bali (2012-2016). Several other positions to which he was assigned include Head of Budget Planning and Control Division of PT PLN (2010-2012), Deputy Budget and Performance Planning and Control Director of PT PLN (2009-2010), General Manager of PLN West Sumatra Region (2008-2009), and Commercial Manager of PLN West Java and Banten Distribution (2000-2008).

Training attended:
He had attended numerous training programs, including Directorship Program (2017), Workshop on WP&B Execution Strategy (2017), ASEAN Corporate Governance Scorecard, Strategic Leadership, GRC Best Practice and Board Governance, Introduction to Technical Risk Assessment Process (TRAP), Business Continuity Management System (BCMS) for Power Plants, Enterprise Value Mapping, Law No. 40, Commercial Dispute & Arbitration, GCG, Stakeholder Management, Board Duties, Responsibilities & Liabilities, Building Trust into Sustainable Business and Project Management Office.

Basis of the First Appointment:
Circular Resolution of Shareholders dated March 21, 2016.

Special Assignment (other position): -



Adi Supriono

Direktur Pengembangan dan Niaga
Development and Commercial Director

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, berusia 58 tahun. Meraih gelar Master of Business Administration (MBA) di bidang Finance dari University of Missouri-Saint Louis (2006) dan Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung (1984).

Indonesian Citizen, domiciled in Jakarta, 58 years old. Obtained his Master's Degree of Business Administration (MBA) in Finance from the University of Missouri-Saint Louis (2006) and Bachelor's Degree of Engineering from Institute Teknologi Bandung (1984).

Perjalanan Karir:
Sebelum menjabat sebagai Direktur Pengembangan dan Niaga, pernah menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan PT PLN (Persero) (2012-2016). Beberapa jabatan lain yang pernah dipegangnya adalah Direktur Pengembangan dan Niaga PT Pembangkitan Jawa Bali (2010-2012), Direktur Sumber Daya Manusia dan Administrasi PT Pembangkitan Jawa Bali (2009-2010) dan Direktur Keuangan di PT Bajradaya Sentranusa (2003-2004).

Training yang diikuti antara lain:
Beliau telah mengikuti program pelatihan diantaranya pelatihan Directorship Program (2017), Workshop Strategi Eksekusi RKAP (2017), ASEAN *Corporate Governance Scorecard, Strategic Leadership*, GRC *Best Practise and Board Governance, Introduction to Technical Risk Assessment Process* (TRAP), *Business Continuity Management System* (BCMS) *for Power Plants, Enterprise Value Mapping*, UU No. 40, *Commercial Dispute & Arbitration*, GCG, *Stakeholder Management, Board Duties, Responsibilities & Liabilities, Building Trust into Sustainable Business* dan *Project Management Office*.

Dasar Pengangkatan Pertama:
Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler tanggal 21 Maret 2016.

Penugasan Khusus (jabatan lain): -

Career:
Prior to serving as the Development and Commercial Director, he was the Corporate Secretary of PT PLN (Persero) (2012-2016). Several other positions to which he was assigned include Development and Commercial Director of PT Pembangkitan Jawa Bali (2010-2012), Human Resources Director and Administration Director of PT Pembangkitan Jawa Bali (2009-2010) and Finance Director in PT Bajradaya Sentranusa (2003-2004).

Training attended, namely:
He had attended numerous training programs, including Directorship Program (2017), Workshop on WP&B Execution Strategy (2017), ASEAN Corporate Governance Scorecard, Strategic Leadership, GRC Best Practice and Board Governance, Introduction to Technical Risk Assessment Process (TRAP), Business Continuity Management System (BCMS) for Power Plants, Enterprise Value Mapping, Law No. 40, Commercial Dispute & Arbitration, GCG, Stakeholder Management, Board Duties, Responsibilities & Liabilities, Building Trust into Sustainable Business and Project Management Office.

Basis of the First Appointment:
Circular Resolution of Shareholders dated March 21, 2016.

Special Assignment (other position): -

IDENTITAS DAN RIWAYAT SINGKAT DIREKSI

IDENTITY AND BRIEF HISTORY OF THE BOARD OF DIRECTORS



Roikhan

Direktur SDM dan Administrasi
Director of Human Resources and Administration

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, berusia 58 tahun. Meraih gelar Master Teknik dari Institut Teknologi Bandung (1998) dan Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung (1986).

Indonesian Citizen, domiciled in Jakarta, 58 years old. Obtained his Master's Degree of Engineering from Institute Teknologi Bandung (1998) and Bachelor's Degree of Engineering from Institute Teknologi Bandung (1986).

Perjalanan Karir:
Sebelum menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan Administrasi, pernah menjabat sebagai Expert Manajemen SDM pada Direktorat SDM dan Umum PT PLN (2013). Beberapa jabatan lain yang pernah dipegangnya adalah Kepala Divisi Pengembangan SDM dan Talenta PT PLN (2010-2013), Deputi Direktur Pengembangan SDM dan Talenta PT PLN (2010), Asisten Deputi Direktur Pengelolaan Karir & Talenta PT PLN (2009), Manager Regional Jawa Timur & Bali PT PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (2008-2009) dan Manager Regional Jawa Tengah & DIY PT PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (2005-2008).

Career:
Prior to serving as the Human Resources and Administration Director, he was the HR Management Expert in the Directorate of HR and General Affair of PT PLN (2013). Several other positions to which he was assigned include Head of HR and Talent Development Division of PT PLN (2010-2013), Deputy Director of HR and Talent Development Division of PT PLN (2010) Assistant Deputy Career & Talent Management Director of PT PLN (2009), and Central Java & Yogyakarta Regional Manager of PT PLN Distribution and Load Control Centre (2005-2008).

Training yang diikuti antara lain:
Beliau telah mengikuti program pelatihan diantaranya Directorship Program (2017), Workshop Strategi Eksekusi RKAP dan Seminar HAPUA (2017), Diklat Manajemen Umum dan Pensiun, 5th Training and Development Summit 2013 dan Balancing Leader & Manager, Workshop Pembahasan Pembinaan Kompetensi dan Grade, Professional Director Program dan Workshop Senior Leader Capacity Building Manajemen Risiko, pelatihan ASEAN Corporate Governance Scorecard, Strategic Leadership, GRC Best Practise and Board Governance, Introduction to Technical Risk Assessment Process (TRAP), Business Continuity Management System (BCMS) for Power Plants, Enterprise Value Mapping, UU No. 40, Commercial Dispute & Arbitration, GCG, Stakeholder Management, Board Duties, Responsibilities & Liabilities, Building Trust into Sustainable Business dan Project Management Office.

Training attended:
He had attended numerous training programs, including Directorship Program (2017), Workshop on WP&B Execution Strategy and HAPUA Seminar (2017), General and Retirement Management Education and Training, 5th Training and Development Summit 2013 and Balancing Leader & Manager, Workshop on Competency Development and Grade, Professional Director Program and Workshop on Senior Leader Capacity Building, Risk Management, Training on ASEAN Corporate Governance Scorecard, Strategic Leadership, GRC Best Practice and Board Governance, Introduction to Technical Risk Assessment Process (TRAP), Business Continuity Management System (BCMS) for Power Plants, Enterprise Value Mapping, Law No. 40, Commercial Dispute & Arbitration, GCG, Stakeholder Management, Board Duties, Responsibilities & Liabilities, Building Trust into Sustainable Business and Project Management Office.

Dasar Pengangkatan Pertama:
Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler tanggal 2 Januari 2015.

Basis of the First Appointment:
Circular Resolution of Shareholders dated January 2, 2015.

Penugasan Khusus (jabatan lain): -

Special Assignment (other position): -

Terjadi perubahan komposisi Direksi pada tanggal 24 Januari 2018.

There was a change of composition of Directors on January 24, 2018.



M. Hanafi Nur Rifai

Pejabat Pelaksana Tugas (PLT)
Direktur Operasi I
Acting Director of Operations I

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, berusia 47 tahun. Meraih gelar Master Bidang Mesin (2012) Institut Teknologi Bandung dan Sarjana Mesin (1993) Institut Teknologi 10 November.

Indonesian Citizen, domiciled in Jakarta, 47 years old. He(/she) obtained his/her Master's in Engineering (2012) from the Institut Teknologi Bandung and a Bachelor's Degree in Engineering (1993) from the Institut Teknologi 10 November.

Perjalanan Karir:
Sebelum menjabat sebagai Direktur Operasi I Indonesia Power, beliau menjabat sebagai General Manager UP Suralaya (2015-2018), General Manager UBOH PLTU Banten 2 Labuan (2014-2015), General Manager UBOH PLTU 2 Jawa Tengah Adipala (2013-2014), General Manager UBP Kamojang (2011-2013), Deputy General Manager Bidang Teknik UBH (2010-2011), dan Manajer Operasi Unit 5-7 UBP Suralaya (2008-2010).

Training yang diikuti antara lain:
Beliau aktif mengikuti berbagai program Leadership antara lain *Workshop* Strategi Eksekusi RKAP Indonesia Power, *In House Training* & Sertifikasi Manajemen Risiko QRMP GM dan *Senior Leader* dan Pembimbing *face to face* tahap I *Executive Education Batch* 2&3.

Dasar Pengangkatan Pertama:
Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler tanggal 24 Januari 2018.

Penugasan Khusus (jabatan lain): -

Career:
Prior to serving as Operation Director I of Indonesia Power, he was the General Manager of Suralaya GU (2015-2018), General Manager of SPP OMBU Banten 2 Labuan (2014-2015), General Manager of SPP OMBU Central Java 2 Adipala (2013-2014), General Manager of GBU Kamojang (2011-2013), Deputy General Manager of Technical Department (2010-2011), and Operational Manager of GBU Suralaya 5-7 (2008-2010).

Training attended:
He actively attended numerous Leadership program, including Workshop on Indonesia Power WP&B Execution Strategy, In-House Training & Risk Management Certification for RMP GM, Senior Leader and face-to-face Coach, Stage 1 of Executive Education Batch 2&3.

Basis of the First Appointment:
Circular Resolution of Shareholders dated January 24, 2018.

Special Assignment (other position): -



Okto Rinaldi Sagala

Pejabat Pelaksana Tugas (PLT)
Direktur SDM dan Administrasi
Acting Director of Human Resources and Administration

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, berusia 54 tahun. Meraih gelar Magister Bidang Manajemen dari Universitas Syiah Kuala (2001) dan Sarjana Ekonomi dari STIE (1990).

Indonesian Citizen, domiciled in Jakarta, 54 years old. He obtained his Master's Degree of Management from Universitas Syiah Kuala (2001) and Bachelor's Degree of Economics from STIE (1990).

Perjalanan Karir:
Sebelum menjabat sebagai sebagai Direktur SDM dan Administrasi, pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Pengembangan Talenta PT PLN (Persero) (2016-2018), General Manager PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan (*Corporate University*) (2014-2016), Kepala Pusdiklat (*Chief Learning Officer*) PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan (*Corporate University*) (2014) dan Manajer Senior Manajemen Kinerja SDM PT PLN (Persero) (2013-2014).

Training yang diikuti antara lain:
Beliau telah mengikuti program pelatihan diantaranya, *Workshop Human Capital Management*, Pengelolaan Pengembangan Program Diklat-Level Advanced, Peningkatan *Quality* Pembelajaran, Asesor Kompetensi Personal, *Workshop Continuous Learning*.

Dasar Pengangkatan Pertama:
Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler tanggal 24 Januari 2018.

Penugasan Khusus (jabatan lain):
Komisaris PT Haleyora Power

Career:
Prior to serving as the HR and Administration Director, he was the Head of Talent Development Division of PT PLN (Persero) (2016-2018), General Manager of PT PLN (Persero), Corporate University Education and Training Centre (2014-2016), Head of Education and Training Centre (Chief Learning Officer) of PT PLN's Education and Training Centre (Corporate University) (2014) and Senior Manager of HR Performance Management of PT PLN (Persero) (2013-2014).

Training attended:
He had attended numerous training programs, including Workshop on Human Capital Management, Management of Advanced Level Education and Training Program, Learning Quality Improvement, Personal Competency Assessor, Workshop on Continuous Learning.

Basis of the First Appointment:
Circular Resolution of Shareholders dated January 24, 2018.

Special Assignment (other position):
Commissioner of PT Haleyora Power

PROFIL PEGAWAI PERUSAHAAN
COMPANY'S PERSONNEL PROFILE



Sejalan dengan transformasi dan pengembangan bisnis Indonesia Power, SDM berperan semakin strategis sebagai ujung tombak berjalannya usaha Perusahaan. Sifat bisnis Perusahaan yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan pelayanan, membutuhkan talenta, integritas dan profesionalitas SDM di semua unsur usaha Perusahaan. Pengelolaan yang baik terhadap aset manusia merupakan landasan untuk menciptakan peningkatan-peningkatan pada elemen organisasi, yang pada akhirnya akan menjadi rangkaian sinergi yang menggerakan kinerja Perusahaan untuk mencapai hasil yang diinginkan menjadi "Perusahaan Energi Tepercaya yang Tumbuh Berkelanjutan".

In line with Indonesia Power's business transformation and development, HR role becomes more strategic as the spearhead of Company's business operation. The nature of Company business that is related to trust and service requires talents, integrity and HR professionalism in every element of Company's business. Good human resources management is the foundation to make improvement on organizational elements, which in turn will be a series of synergy that drives Company performance to attain the desired result to be a "Trusted Energy Company with Sustainable Growth".

Komposisi Pegawai Komparatif Tahun 2015-2017

Prinsip kesetaraan dalam pengelolaan pegawai merupakan prinsip yang dipegang teguh oleh Indonesia Power. Karena itu, dalam setiap pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan, sertifikasi, penempatan serta promosi, Indonesia Power memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pegawai untuk terus bertumbuh dan berkembang bersama Perusahaan.

Comparison of Personnel Composition in 2015-2017

Indonesia Power firmly holds principles of equality in personnel management. Therefore, Indonesia Power provides equal opportunities to every personnel to grow and develop with the Company in personnel development, education and training, certification, placement and promotion.

Berdasarkan Jenis Kelamin

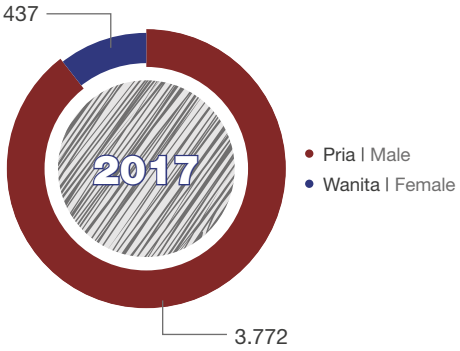
Berdasarkan jenis kelamin, komposisi pegawai Perusahaan didominasi oleh pegawai pria yaitu sebanyak 89,62% dan pegawai wanita sebanyak 10,38%. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

By Gender

Composition of Company's personnel by gender is dominated by male personnel that counts to 89.62% and female personnel at 10.38%. Below is the detail:

Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015-2017
Personnel Composition by Gender 2015-2017

Jenis Kelamin	Tahun | Year 2015	2016	2017	Gender
Pria	3.269	3.357	3.772	Male
Wanita	370	368	437	Female
Jumlah	**3.639**	**3.725**	**4.209**	**Total**

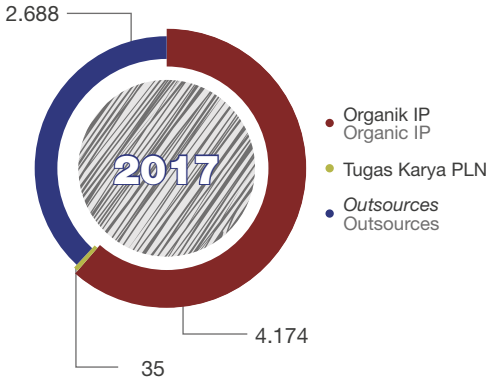


Berdasarkan Status Pegawai

By Employment Status

Komposisi Pegawai berdasarkan Status Pegawai Tahun 2015-2017
Personnel Composition by Employment Status 2015-2017

Status Pegawai	Tahun | Year 2015	2016	2017	Employment Status
Organik IP	3.538	3.357	4.174	Organic IP
Tugas Karya PLN	101	176	35	Tugas Karya PLN
Outsources	1.521	2.568	2.688	Outsources
Jumlah Pegawai	**5.160**	**5.715**	**6.897**	**Number of Personnel**



PROFIL PEGAWAI PERUSAHAAN

COMPANY'S PERSONNEL PROFILE

Berdasarkan Jenjang Jabatan

Pada tahun 2017, komposisi pegawai berdasarkan jenjang jabatan didominasi oleh pelaksana yang mencapai 2.061 pegawai atau 48,90% dari total keseluruhan pegawai Indonesia Power, di mana sebagian besar berada di UP Suralaya.

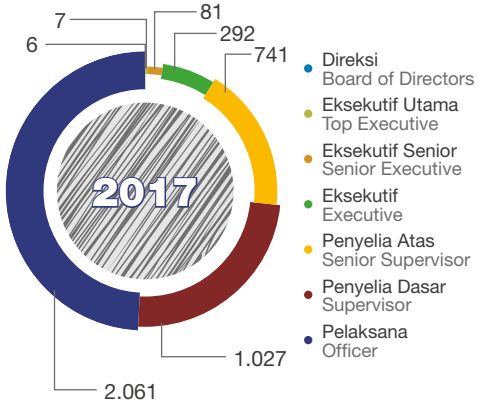
By Level of Position

In 2017, personnel composition by level of position was dominated by male personnel that count to 2,061 personnel, or 48.90% of the total personnel in Indonesia Power, which mostly work in Suralaya GU.

Komposisi Pegawai berdasarkan Jenjang Jabatan Tahun 2015-2017
Personnel Composition by Level of Position 2015-2017

Jenjang Jabatan	Tahun | Year			Position Level
	2015	2016	2017	
Direksi	4	6	6	Board of Directors
Eksekutif Utama	6	6	7	Top Executive
Eksekutif Senior	73	68	81	Senior Executive
Eksekutif	245	266	292	Executive
Penyelia Atas	629	678	741	Senior Supervisor
Penyelia Dasar	986	1.037	1.027	Supervisor
Pelaksana	1.700	1.670	2.061	Officer
Jumlah Pegawai	**3.643***	**3.731***	**4.215***	**Number of Personnel**

*) Termasuk Direksi | Including Board of Directors



Berdasarkan Tingkat Pendidikan

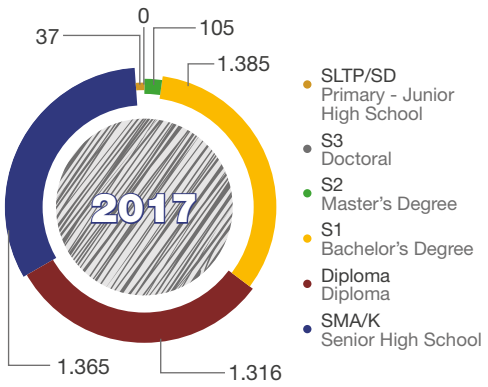
Sejumlah prestasi dan penghargaan yang diraih Indonesia Power merupakan implikasi langsung dari keberadaan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang sesuai dengan kebutuhan dan strategi bisnis Perusahaan. Indonesia Power memberikan perhatian besar dalam hal jenjang pendidikan dan pengembangan pegawai.

By Level of Education

A number of achievements and awards attained by Indonesia Power is the direct implication from availability of human resources with capacity and capability that suit Company's needs and business strategy. Indonesia Power put great concerns on personnel's level of education and development.

Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015-2017
Personnel Composition by Level of Education 2015-2017

Tingkat Pendidikan	Tahun | Year			Education
	2015	2016	2017	
S3	0	0	0	Doctoral
S2	88	83	105	Master's Degree (S2)
S1	990	992	1.385	Bachelor's Degree (S1)
Diploma	720	933	1.316	Diploma
SMA/K	1.778	1.669	1.365	Senior High School
SLTP/SD	63	48	37	Primary – Junior High School
Jumlah Pegawai	**3.639**	**3.725**	**4.209**	**Number of Personnel**



Berdasarkan Wilayah Kerja

Pada tahun 2017, jumlah pegawai di wilayah kerja UP Suralaya berjumlah 726 pegawai. Komposisi tersebut merupakan jumlah pegawai terbanyak dibandingkan dengan wilayah kerja lain. Hal ini terjadi mengingat UP Suralaya merupakan unit dengan kapasitas terpasang terbesar dibandingkan seluruh unit yang ada di Indonesia Power.

By Work Area

The number of personnel in Suralaya GU work area was 726 people in 2017. This is a composition with the highest number of personnel in comparison to the other work areas. This is because Suralaya GU has the highest installed capacity among the rest of the units in Indonesia Power.

Komposisi Pegawai berdasarkan Wilayah Kerja Tahun 2015-2017
Personnel Composition by Work Area in 2015-2017

Wilayah Kerja	Tahun | Year			Work Area
	2015	2016	2017	
Kantor Pusat	356	375	515	Head Office
UP Suralaya	722	711	762	Suralaya GU
UPJP Priok	308	302	319	Priok GGSU
UP Saguling	209	191	203	Saguling GU
UPJP Kamojang	247	231	255	Kamojang GGSU
UP Semarang	298	277	283	Semarang GU
UP Mrica	180	167	180	Mrica GU
UPJP Perak Grati	210	208	208	Perak Grati GGSU
UP Bali	351	223	209	Bali GU
UJH	210	234	281	MSU
UJP PLTU Banten 1 Suralaya	77	76	90	Banten 1 Suralaya GSU SPP
UJP PLTU Banten 2 Labuan	69	75	105	Banten 2 Labuan GSU SPP
UJP PLTU Banten 3 Lontar	124	147	169	Banten 3 Lontar GSU SPP
UJP PLTU Jawa Barat 2 Palabuhan Ratu	115	114	138	Jawa Barat 2 Palabuhan Ratu GSU SPP

PROFIL PEGAWAI PERUSAHAAN

COMPANY'S PERSONNEL PROFILE

Wilayah Kerja	Tahun | Year			Work Area
	2015	2016	2017	
UJP PLTU Jawa Tengah 2 Adipala	81	92	103	Jawa Tengah 2 Adipala GSU SPP
UJP PLTU Pangkalan Susu	82	90	108	Pangkalan Susu GSU SPP
UJP PLTGU Cilegon	-	79	110	Cilegon GSU CCPP
UJP PLTU Barru	-	70	77	Barru GSU SPP
UJP PLTU Jeranjang	-	56	83	Jeranjang GSU SPP
UJP PLTU Sanggau	-	1	2	Sanggau GSU SPP
UJP PLTU Sintang	-	-	3	Sintang GSU SPP
UJP PLTU Holtekamp	-	6	6	Holtekamp GSU SPP
Jumlah Pegawai	**3.639**	**3.725**	**4.209**	**Number of Personnel**



Berdasarkan Usia

Pada tahun 2017, komposisi pegawai Indonesia Power berdasarkan usia didominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu sebanyak 25,09% untuk usia 19-25 tahun. Berikut rincian jumlah pegawai berdasarkan usia dalam 3 tahun terakhir:

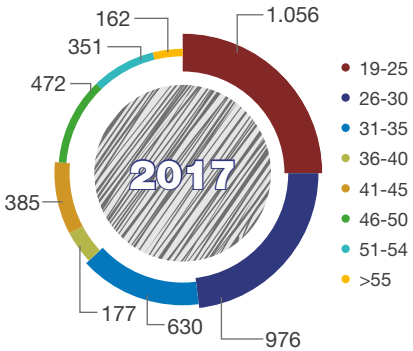
By Age

In 2017, the composition of Indonesia Power personnel by age was dominated by productive age group, i.e. 25.09% for 19-25 years old group. Below is detail of the number of personnel by age in the last three years:

Komposisi Pegawai berdasarkan Usia Tahun 2015-2017

Personnel Composition by Age in 2015-2017

Usia (Tahun) Age	Tahun | Year		
	2015	2016	2017
19-25	819	715	1.056
26-30	698	806	976
31-35	340	556	630
36-40	202	144	177
41-45	566	491	385
46-50	383	412	472
51-54	620	516	351
>55	11	85	162
Jumlah Pegawai Aktif Active Personnel	**3.639**	**3.725**	**4.209**

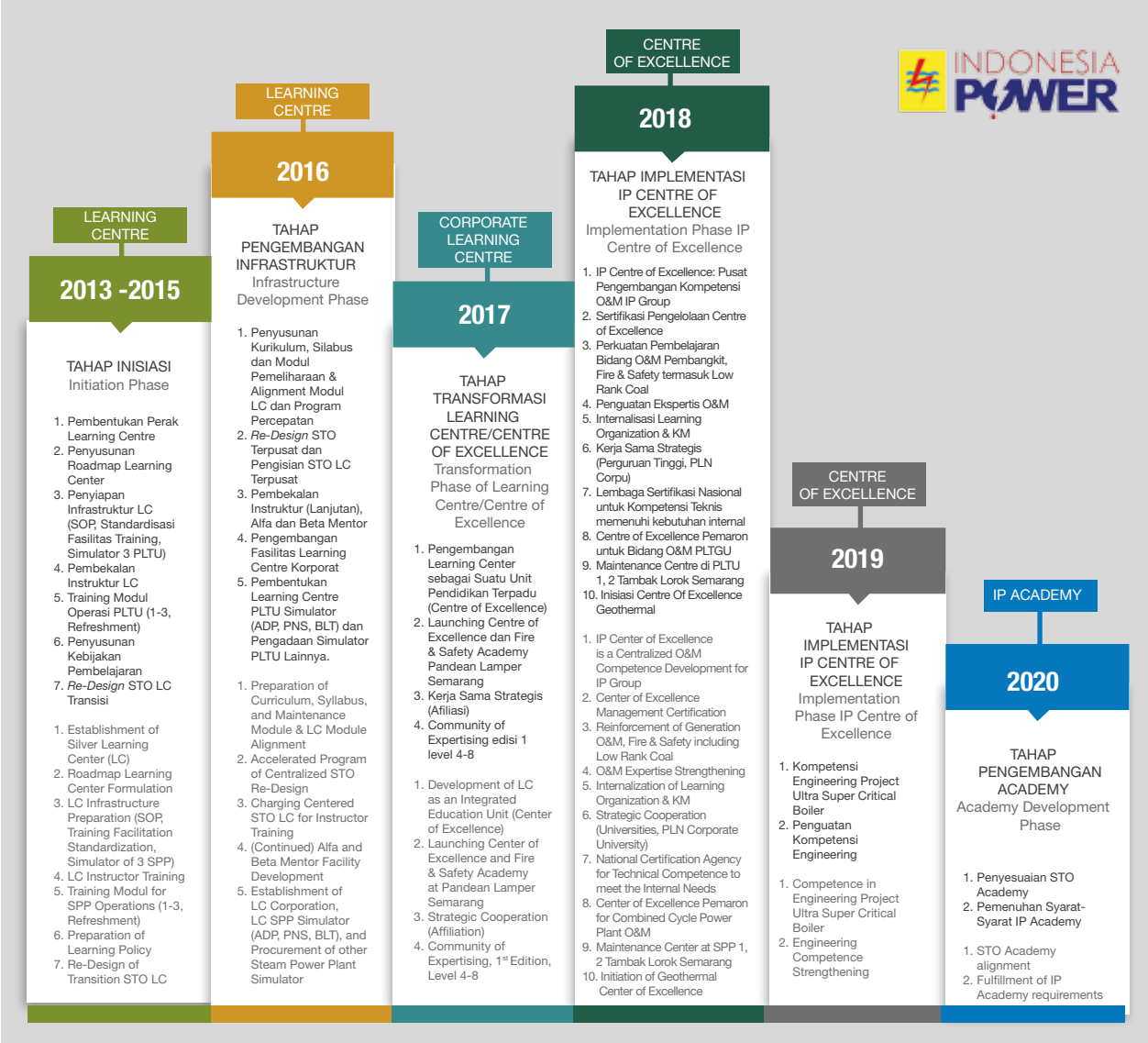


Pengembangan Kompetensi Pegawai

Centre of Excellence merupakan pusat pembelajaran untuk mempersiapkan kompetensi Pegawai Indonesia Power dalam mendukung kompetensi inti Perusahaan dan juga sebagai tempat untuk menintegrasikan dan mensinergikan sistem pembelajaran. *Roadmap Centre of Excellence* sebagai berikut:

Personnel Competency Development

Center of Excellence is a learning Center to build competencies of Indonesia Power's personnel in supporting Company's core competency, as well as to integrate and synergize learning systems. Below is the Centre of Excellence Roadmap:



Pada tahun 2017 telah diresmikan salah satu *Centre of Excellence* Indonesia Power yaitu *Fire Safety Academy* yang telah dibangun di Pandean Lamper Semarang. Hal ini dilatarbelakangi karena adanya program Pemerintah membangun pembangkit listrik 35.000 MW untuk memenuhi

In 2017, Indonesia Power officially launched one of its Centre of Excellence, namely Fire Safety Academy Centre of Excellence in Pandean Lamper Semarang. This is in line with Government's program to build 35,000 MW power generation unit to meet electricity demand,

PROFIL PEGAWAI PERUSAHAAN

COMPANY'S PERSONNEL PROFILE

kebutuhan listrik masyarakat Indonesia yang sebagiannya adalah Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan bahan bakar batu bara kalori rendah (*low rank coal*), dimana dalam pengoperasiannya, PLTU tersebut tak lepas dari risiko dan potensi bahaya kebakaran. Pentingnya aspek keselamatan kerja tersebut tercermin dari regulasi yang dibuat untuk menjamin keselamatan kerja Pegawai. Selain itu, di tahun 2017 dari 21 Unit kerja Indonesia Power, 18 Unit kerja mampu meraih penghargaan *Zero Accident* yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi. Hal ini menjadi bukti bahwa kesadaran Pegawai akan keselamatan kerja semakin meningkat dan salah satu cara meningkatkan kesadaran akan keselamatan kerja adalah dengan meningkatkan kompetensi pegawai dan sertifikasi di bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

which will be partially supplied by Steam Power Plant (SPP) using low rank coal fuel; SPP operation is exposed to fire risk and potential. The importance of occupational safety is reflected on the regulation that is set out to guarantee personnel' safety at work. In addition, 18 of the total 21 Work Units in Indonesia Power achieved Zero Accident award as stipulated in the Directors' Decree. This is an evidence that personnel's awareness of work safety is increasing, and one of the methods to build awareness of occupational safety is by enhancing personnel' competency and Occupational Health and Safety (OHS) certification.

Selain fokus untuk diklat dan sertifikasi bidang K3, di *Fire Safety Academy* juga dilaksanakan diklat untuk bidang Operasi dan Pemeliharaan dengan sasaran kompetensi jabatan Operator/Teknisi sampai dengan Operator Senior/Teknisi Senior.

In addition to focusing on OHS education, training and certification, Fire Safety Academy Centre of Excellence also provides education and training on Operation and Maintenance for Operator/Technician to Senior Operator/Senior Technician.

Program diklat pada *Fire Safety Academy* menggunakan miniatur peralatan umum yang ada di pembangkit antara lain adalah:

- *Fire ground* yang dilengkapi peralatan umum pembangkit seperti *bunker*, trafo, dan *smoke chamber*.
- Miniatur *coal handling*;
- *Simulator control room* PLTU batu bara kapasitas 400 MW;

Education and Training program in the Fire Safety Academy Centre of Excellence utilizes common equipment miniatures in power plants, such as:

- 400 MW coal-fuelled SPP Control room simulator;
- Coal handling simulator;
- Fire ground that is equipped with common equipment in power plant, such as bunker, transformer, and smoke chamber.

Kesempatan yang Sama Kepada Seluruh Pegawai

Indonesia Power menjamin persamaan kesempatan kepada seluruh pegawai dalam hal pengembangan kompetensi. Hal tersebut diatur dalam PKB Bab IV Pembinaan dan Pengembangan Pegawai pasal 22 tentang Pendidikan dan Pelatihan serta Surat Keputusan Direksi Nomor 50.K/010/IP/2011 tentang Sistem Pembelajaran Pegawai. Kebijakan atas pengembangan kompetensi pegawai disusun berdasarkan pertimbangan dan evaluasi profesional tanpa memandang ras, kepercayaan, warna kulit, agama, jenis kelamin, asal negara, keturunan, usia, status perkawinan, identitas *gender* dan sebagainya. Ini merupakan salah satu komitmen Indonesia Power untuk menghargai hak asasi manusia yang berlaku universal. Selain itu, Indonesia Power terus berupaya untuk memperkuat strategi sistem pengelolaan SDM, merekrut *talent* terbaik melalui serangkaian program pelatihan dan pengembangan yang komprehensif.

Equal Opportunity for All Personnel

Indonesia Power guarantees equal opportunity in competency development for all personnel. This is consistent with Directors' Decree No. 50.K/010/IP/2011 concerning personnel Learning System and Chapter IV of CLA on personnel Coaching and Development, in Article 22 - Education and Training. Policy on personnel competency development is made in accordance with the professional consideration and evaluation regardless of the race, beliefs, color, religion, sex, country of origin, descendant, age, marital status, gender identity, etc. This is Indonesia Power's commitment to respect human rights that applies universally. In addition, Indonesia Power keeps on strengthening its HR management system strategy, recruiting best talents through a series of comprehensive education training and development programs.

Program dan Tujuan Pengembangan Pegawai

Indonesia Power melakukan pengembangan dan inovasi untuk merancang program pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Kegiatan yang disusun senantiasa memperhatikan efektivitas, dampak dan tujuan yang ingin dicapai. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dilakukan dengan memperhatikan kualitas berdasarkan efisiensi dan efektivitas.

Perusahaan senantiasa mengembangkan kompetensi pegawai melalui berbagai program pendidikan, pelatihan dan pengembangan, yaitu untuk meningkatkan kemampuan keahlian dan pengetahuan pegawai dalam keahlian teknis, operasional, manajemen, *soft skills* dan kepemimpinan.

Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan untuk memastikan pegawai mampu melakukan pekerjaannya, yaitu untuk memenuhi kompetensi bidang sesuai Kebutuhan Kompetensi Jabatan (KKJ) yang diembannya sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif. Jenis diklat yang diselenggarakan terdiri dari:

1. Diklat Seleksi Pegawai Baru
   Untuk membina, memantau, mengevaluasi, dan menyeleksi tenaga kerja potensial yang mampu memenuhi persyaratan kompetensi minimum sebagai pegawai.
2. Diklat Pembidangan
   Untuk pembinaan Kompetensi Inti, Kompetensi Peran, dan Kompetensi Bidang sesuai tuntutan jabatan pegawai.
3. Diklat Penjenjangan
   Untuk pembinaan Kompetensi Inti, Kompetensi Peran, dan Kompetensi Bidang sesuai tuntutan jalur karir yang diproyeksikan bagi pegawai.
4. Diklat Penunjang
   Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses kerja melalui pengkayaan dan/atau penyegaran kompetensi pegawai.
5. Diklat Pembekalan Masa Purna Bakti
   Untuk memberikan pembekalan dan persiapan bagi pegawai dalam menghadapi masa purna bakti.

Personnel Development Program and Objectives

Indonesia Power carries out development and makes innovation to design personnel development program through continuous education and training. Such activity plan takes into consideration the effectiveness, impact and the desired objectives. Provision of education is carried out in consideration of the quality based on efficiency and effectiveness.

The Company develops personnel competency through various training and development programs to increase personnel' ability, expertise and knowledge in technical and operational aspects, management, soft skills and leadership.

Training

Training is provided to ensure that personnel are capable of performing their work, i.e. to meet area competency according to the Position Competency Requirement (KKJ) to build a conducive environment to work. Education and training that are provided include:

1. Education and Training on Selection of New Personnel
   Aims to develop, monitor, evaluate and select potential personnel who meet the minimum personnel competency requirements.
2. Education and Training on Job Description
   Aims to develop Core Competencies, Role Competencies and Area Competencies according to position requirements.
3. Education and Training on Job Grading
   Aims to develop Core Competencies, Role Competencies, and Area Competencies according to career path projection for the personnel.
4. Supporting Education and Training
   Aims to improve work process efficiency and effectiveness through personnel competency enrichment and/or refresh.
5. Post-Employment Education and Training
   Aims to equip and prepare personnel to face post-employment period.

PROFIL PEGAWAI PERUSAHAAN
COMPANY'S PERSONNEL PROFILE

Berikut ini disampaikan realisasi pelatihan di tahun 2017:

Below is the realization of trainings in 2017:

Rata-rata Jam Pelatihan berdasarkan Kategori Pegawai
Average Training Hours by Personnel Category

Jenis Pelatihan Type of Training	Durasi (Jam) Duration (Hour)			Jumlah Peserta (Orang) Average Participants (People)			Rata-rata Jam Pelatihan (Durasi/Orang) Average Training Hours (Duration/Person)		
	Manajemen Management	Staf Staff	Jumlah Total	Manajemen Management	Staf Staff	Jumlah Total	Manajemen Management	Staf Staff	Jumlah Total
Seleksi Pegawai Baru Selection of New Personnel	0	263.648	263.648	0	749	749	0	352	352
Program Pendidikan Formal Formal Education Program	0	12.800	12.800	0	8	8	0	1.600	1.600
Diklat Penjenjangan Education and Training on Job Grading	88.320	13.440	101.760	138	21	159	640	640	640
Program Akselerasi Kompetensi Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit*) Power Plant Operation and Maintenance Area Competency Acceleration Program*)	3.128	37.808	40.936	85	849	934	37	45	44
Jumlah | Total	**91.448**	**327.696**	**419.144**	**223**	**1.627**	**1.850**	**410**	**201**	**227**

*) Penjelasan terkait Program Akselerasi Kompetensi Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit akan dijelaskan pada bagian Akselerasi Percepatan Kompetensi Operasi Pemeliharaan

*) Explanation about Power Plant Operation and Maintenance Area Competency Acceleration Program will be explained in Maintenance and Operation Competency Acceleration section

Pada tahun 2017, Indonesia Power telah melaksanakan program diklat kepada 1.850 pegawai dengan jumlah jam pelatihan mencapai 419.144 jam sehingga rata-rata jam pelatihan mencapai 227 jam per pegawai. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelatihan, Perusahaan secara berkala melaksanakan *assessment Human Capital Readiness* (HCR). Hasil *assessment* HCR Semester II tahun 2017 untuk program dan realisasi diklat berada pada level 4,89 (program Diklat) dan 4,37 (realisasi diklat) dari skala maksimum 5.

In 2017, Indonesia Power delivered education and training program to 2,197 personnel in 1,655,296 training hours, which amounted to an average of 2,224 training hours per personnel. In order to improve training effectiveness, the Company regularly conducts Human Capital Readiness (HCR) assessment. Result of HCR assessment for Semester 2 of 2017 for education and training program and realization was 4.89 (Education and Training program) and 4.37 (realization of education and training) respectively of the maximum scale of 5.

Akselerasi Percepatan Kompetensi Operasi Pemeliharaan

Sejalan dengan Program 35.000 MW yang dicanangkan Pemerintah, Indonesia Power sebagai salah satu pemain dalam industri keternagalistrikan turut mempersiapkan tenaga ahli yang mampu mengoperasikan dan memelihara pembangkit-pembangkit baru, yaitu melalui penguatan kompetensi yang dilakukan dengan program akselerasi kompetensi di bidang operasi dan pemeliharaan pembangkit. Program ini telah di mulai sejak tahun 2016 dan di-*launching* pada tanggal 18 Januari 2017. Program akselerasi ini diyakini menjadi cara terbaik untuk membekali segenap pegawai Indonesia Power dengan kompetensi di bidang pembangkitan dalam waktu 2-3 tahun, lebih cepat dari waktu normal yang dibutuhkan untuk menguasai kompetensi pembangkitan tersebut yaitu sekitar 5-6 tahun.

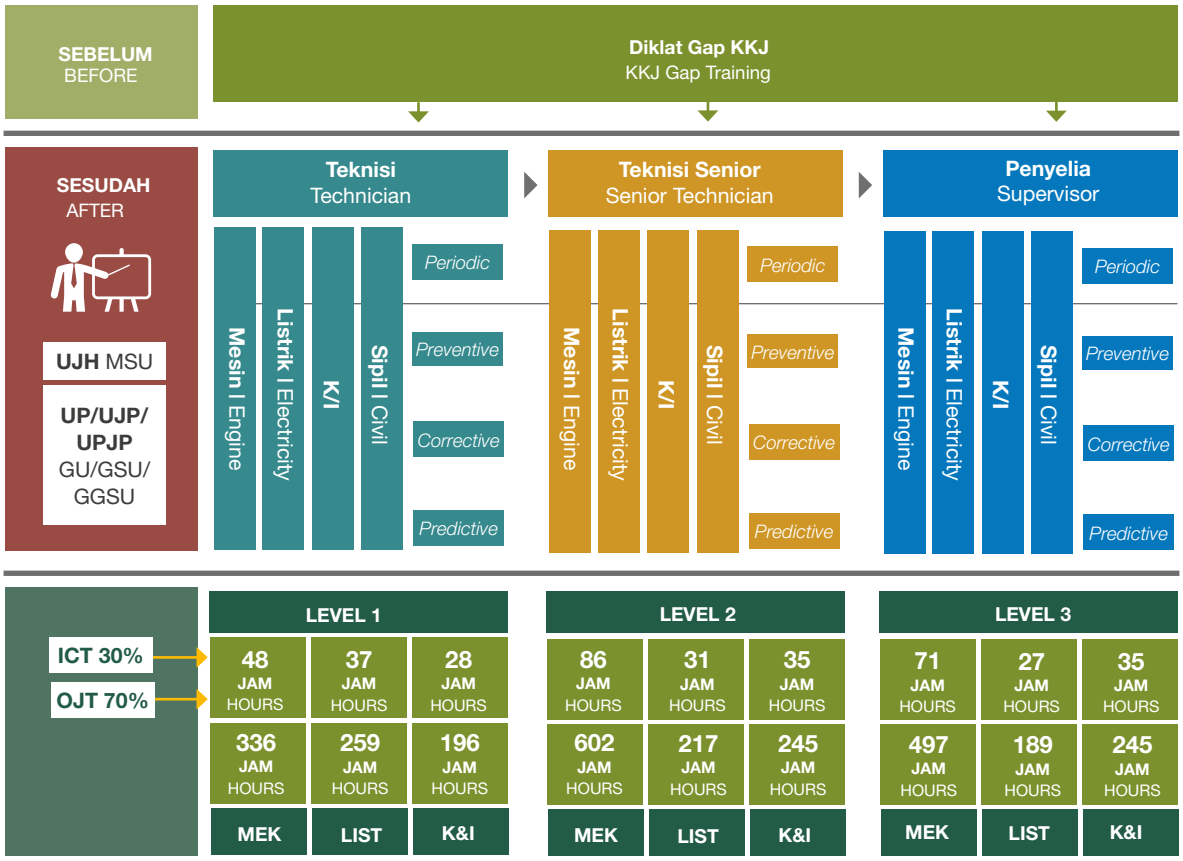
Maintenance and Operation Competency Acceleration

In line with the 35,000 MW program set out by the Government, Indonesia Power, as one of the companies engaged in electricity industry, also prepares experts who are capable of operation and maintenance of new power plants, i.e. through competency reinforcement through acceleration of competency in power plant operation and maintenance. This program was started in 2016 and launched on January 18, 2017. Acceleration program is deemed the best method to equip all personnel in Indonesia Power with competency in power generation area in 2-3 years of the average 5-6 years that are required to master such competency.

Adapun metode pembelajarannya yaitu *In Class Training* sebesar 30% dan *On The Job Training* sebesar 70%. Sistem pembelajaran akselerasi kompetensi bidang operasi dilaksanakan dengan 10 prinsip pembelajaran dan sistem pembelajaran akselerasi kompetensi bidang pemeliharaan dilaksanakan dengan 8 prinsip pembelajaran yang dijabarkan dalam bagan berikut ini:

The learning method consists of 30% In-Class Training and 70% On the Job Training. Competency acceleration learning system for operation area is implemented using 10 learning principles and the competency acceleration learning system for maintenance area is implemented using 8 learning principles as elaborated in the below chart:

Sistem Pembelajaran Akselerasi Kompetensi Pemeliharaan Pembangkit
Power Plant Maintenance Competency Acceleration Learning System



Prinsip Pembelajaran | Learning Principles

- Menerapkan prosedur
- Memperkenalkan fungsi kerja peralatan
- Memeriksa fungsi
- Mempersiapkan peralatan dan material (*consumable and spare part*)
- Memperbaiki fungsi, kondisi dan unjuk kerja peralatan
- Menganalisa, menanggulangi masalah dan memberikan usulan *improvement*
- Melakukan pengujian
- Membuat laporan

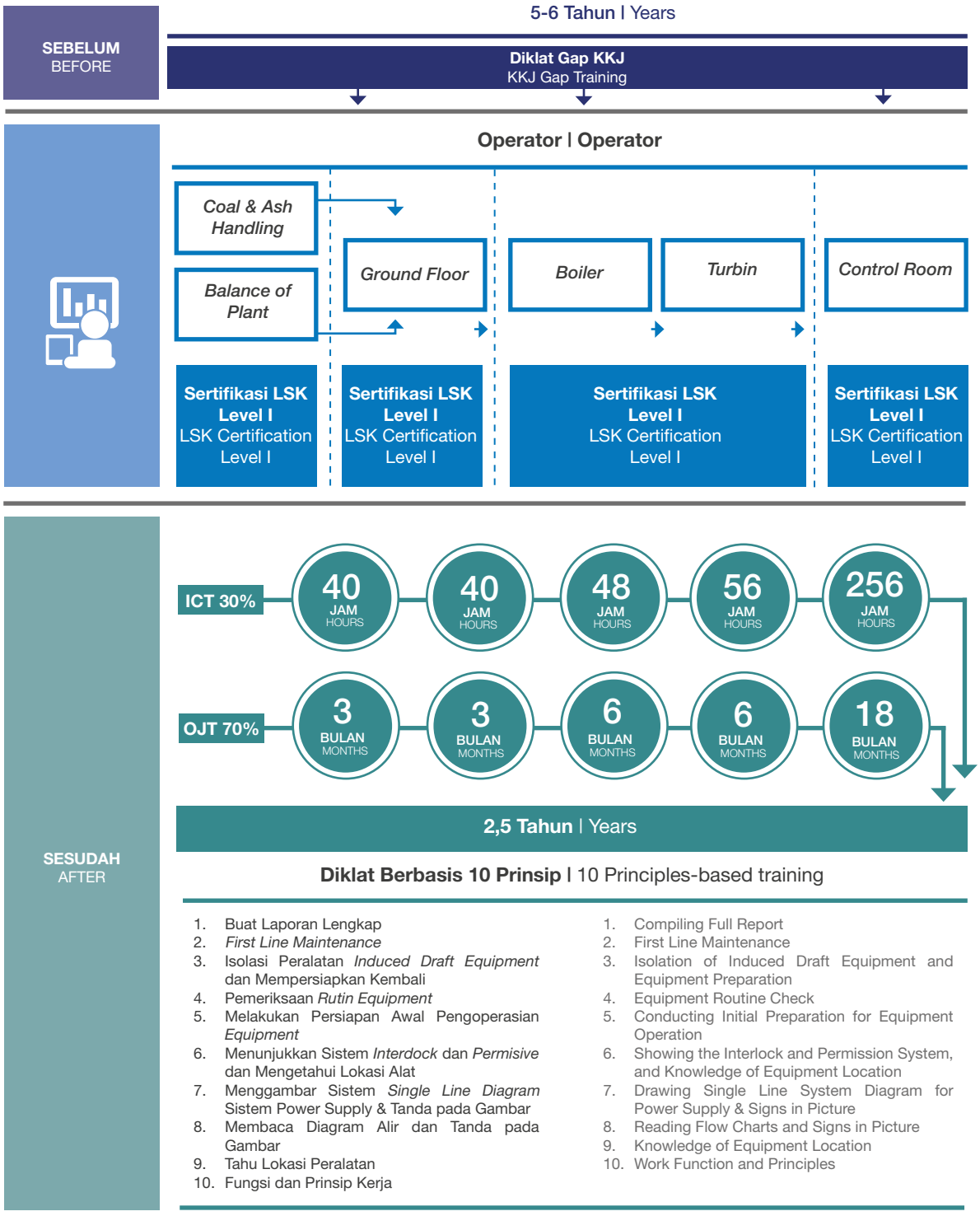
- Implementing procedure
- Introducing equipment work function
- Assessing function
- Preparing equipment and material (consumable and spare part)
- Improving function, condition and equipment performance
- Analyzing, problem solving and suggesting improvement ideas
- Conducting testing
- Reporting

PROFIL PEGAWAI PERUSAHAAN

COMPANY'S PERSONNEL PROFILE

Sistem Pembelajaran Akselerasi Kompetensi Operasi Pembangkit

Power Plant Operation Competency Acceleration Learning System



1. Buat Laporan Lengkap
2. *First Line Maintenance*
3. Isolasi Peralatan *Induced Draft Equipment* dan Mempersiapkan Kembali
4. Pemeriksaan *Rutin Equipment*
5. Melakukan Persiapan Awal Pengoperasian *Equipment*
6. Menunjukkan Sistem *Interdock* dan *Permisive* dan Mengetahui Lokasi Alat
7. Menggambar Sistem *Single Line Diagram* Sistem Power Supply & Tanda pada Gambar
8. Membaca Diagram Alir dan Tanda pada Gambar
9. Tahu Lokasi Peralatan
10. Fungsi dan Prinsip Kerja

1. Compiling Full Report
2. First Line Maintenance
3. Isolation of Induced Draft Equipment and Equipment Preparation
4. Equipment Routine Check
5. Conducting Initial Preparation for Equipment Operation
6. Showing the Interlock and Permission System, and Knowledge of Equipment Location
7. Drawing Single Line System Diagram for Power Supply & Signs in Picture
8. Reading Flow Charts and Signs in Picture
9. Knowledge of Equipment Location
10. Work Function and Principles

Program akselerasi bidang operasi maupun bidang pemeliharaaan terbagi menjadi 3 level. Fasilitas pembelajaran terdiri dari 132 modul yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, dengan komposisi 80 modul operasi dan 52 modul pemeliharaan, termasuk fasilitas 4 simulator PLTU (3 simulator *subcritical boiler* dan 1 simulator *supercritical boiler*) yang tersebar di 4 lokasi yang berbeda.

Acceleration program for operation and maintenance area is divided into 3 levels. Learning facility consists of 132 learning modules, which consist of 80 operation modules and 52 maintenance modules, including 4 SPP simulators (3 supercritical boiler simulators and 1 supercritical boiler simulator) across 4 different locations.

Faktor penting lainnya dalam mendukung proses pembelajaran adalah instruktur, yang saat ini telah berjumlah 618 orang Instruktur dengan komposisi 445 orang memiliki kompetensi di bidang operasi dan 173 orang di bidang pemeliharaan.

Another important factor to support the learning system is instructor, which comprises 618 instructors consisting of 445 instructors with operation competency and 173 instructors with maintenance competency.

Pendidikan Formal

Untuk membangun organisasi yang lebih profesional, Indonesia Power juga memfasilitasi pegawai untuk mendapatkan kualifikasi profesional melalui jalur pendidikan formal, misalnya di bidang teknik, keuangan, maupun sumber daya manusia. Sepanjang tahun 2017, Indonesia Power telah memberikan program pendidikan formal dengan rincian sebagai berikut:

1. Beasiswa di luar perusahaan di Universiti Teknologi Malaysia, Program *Master of Engineering* (*Mechatronics and Automatic Control*) sebanyak 1 (satu) orang;
2. Beasiswa di luar perusahaan di Delft University of Technology, Program Magister Teknik Elektro sebanyak 1 orang.
3. Beasiswa di luar perusahaan di Institut Teknologi Bandung, Program Magister Teknik Mesin sebanyak 1 (satu) orang.
4. Pendidikan S2 Penugasan Perusahaan kerjasama dengan Manajemen Gas di Universitas Indonesia sebanyak 2 (dua) orang.
5. Pendidikan S2 Penugasan Perusahaan kerjasama dengan Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada sebanyak 3 (tiga) orang.

Formal Education

To build a more professional organization, Indonesia Power also facilitates its personnel to attain professional qualification through formal education, such as education in engineering, finance, as well as human resources. Throughout 2017, Indonesia Power had provided formal education program with the following detail:

1. Scholarships program in Universiti Teknologi Malaysia, Master of Engineering, Mechatronics and Automatic Control program for 1 (one) person.
2. Scholarships program in Delft University of Technology, Master of Electrical Engineering program for 1 person.
3. Scholarships program in Institut Teknologi Bandung, Master of Mechanical Engineering program for 1 person.
4. Corporate Scholarships for Master program in cooperation with Gas Management program in Universitas Indonesia for 2 (two) people.
5. Corporate Scholarships for Master program in cooperation with Law program in Universitas Gadjah Mada for 3 (three) people.

PROFIL PEGAWAI PERUSAHAAN

COMPANY'S PERSONNEL PROFILE

Sertifikasi

Selain dengan pelatihan, program akselerasi kompetensi dan pendidikan formal di atas, Indonesia Power juga memastikan tersedianya tenaga kerja yang terampil dalam bidang ketenagalistrikan melalui program sertifikasi yang bekerjasama dengan lembaga sertifikasi. Jenis sertifikasi yang dilakukan selama tahun 2017 adalah:

1. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan meliputi Sertifikasi Baru dan Sertifikasi Perpanjangan Bidang Operasi dan Pemeliharaan
2. Sertifikasi Ahli K3 Umum
3. Sertifikasi Petugas Pemadam Kebakaran
4. Sertifikasi Petugas P3K
5. Sertifikasi *Corrosion Inspector*
6. Sertifikasi *Welding Inspector*
7. Sertifikasi Juru Las (*Welder*)
8. Sertifikasi Vibrasi Kategori II
9. Sertifikasi Fitter (Pipe Fitter)

Dari pelaksanaan sertifikasi di atas, Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan diwajibkan Perusahaan untuk setiap pegawai Operasi dan Pemeliharaan mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2016 pasal 25 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan bahwa setiap tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja pada usaha ketenagalistrikan wajib memiliki Sertifikat Kompetensi. Pelaksanaan program Sertifikasi Kompetensi di tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Certification

In addition to the above training, competency acceleration and formal education program, Indonesia Power also ensures availability of skilled employees in electricity area through certification program in cooperation with certification agency. Certifications that were obtained throughout 2017 include:

1. Certificate of Competency for Electrician Certification, which includes New and Renewal of Operation and Maintenance Certification.
2. General OHS Specialist Certification
3. Firefighters Certification
4. First Aid Personnel Certification
5. Corrosion Inspector Certification
6. Welding Inspector Certification
7. Welder Certification
8. Vibration Category II Certification
9. Pipe Fitter Certification

From the above certifications, Certificate of Competency for Electrician is obliged by the Company for all Operation and Maintenance personnel with reference to Article 25 of Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 10 of 2016 concerning Method of Electricity Accreditation and Certification, which sets out that personnel who works in electricity business must have Certificate of Competency. Implementation of other certification is non-mandatory. Implementation of Certification of Competency in 2017 is shown in the following table:

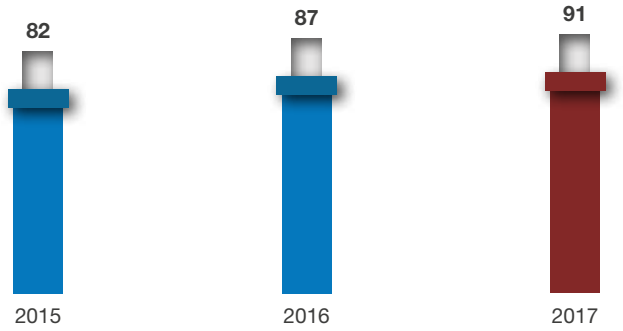
Tabel Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
Table: Implementation of Certification of Competency for Electricity Engineer

Program Sertifikasi Kompetensi Certification of Competency Program	Ukuran Unit	2016			2017		
		Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement
Sertifikasi Baru New Certification	Jumlah Pegawai Number of Personnel	840	912	109%	968	1.264	131%
	Jumlah Unit Kompetensi Number of Competency Units	990	913	92%	1.253	1.241	99%
Sertifikasi Perpanjangan Renewal Certification	Jumlah Pegawai Number of Personnel	103	186	181%	183	118	64%
	Jumlah Unit Kompetensi Number of Competency Units	131	192	147%	183	119	65%

Sampai dengan akhir tahun 2017, realisasi pegawai yang telah melakukan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebanyak 91% dari total pegawai O&M. Tren sertifikasi pegawai teknik operasi dan pemeliharaan unit sebagai berikut:

Until the end of 2017, realization of personnel who had taken Certification of Competency for Electricity Engineer was 91% of the total O&M personnel. Trend of certification for operation and maintenance unit personnel is illustrated below:

Grafik Prosentase Sertifikasi Kompetensi Pegawai (%)
Graph: Personnel Competency Certification Percentage (%)



Community of Expertise

Di tahun 2017, Indonesia Power telah menginisiasi untuk membangun sebuah komunitas keahlian pembangkitan di lingkungan Perusahaan yang disebut dengan *Community of Expertise* (ComEt). Dengan adanya kebutuhan Perusahaan untuk terus tumbuh dan berkembang, di tengah perkembangan teknologi dan kapasitas pembangkit maka perlu didukung dengan *Human Capital Excellence*.

Community of Expertise

In 2017, Indonesia power initiated establishment of a community of power generation expertise within the Company, namely the Community of Expertise (ComEt). In response to the increasing and growing needs of the Company, technology development and power plant capacity, Human Capital Excellence support is required.

Indonesia Power meyakini bahwa dengan transformasi *Human Resources* menjadi *Human Capital* yang berfokus pada *Community of Expertise* (ComEt) akan mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi kelistrikan yang sangat cepat di era VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity*), yang bisa menjadi suatu ancaman namun juga bisa menjadi sebuah peluang.

Indonesia Power believes that Human Resources transformation into Human Capital that focuses on the Community of Expertise (ComEt) will be able to address the challenge of rapid development of electricity technology amidst VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity) era, which may be a threat or an opportunity as well.

ComEt IP menjadi modal utama Indonesia Power dalam meraih "*Second Curve*" Perusahaan, sebagai penyokong bahkan mungkin akan menjadi *new backbone* Perusahaan di masa mendatang. Saat ini *backbone* Indonesia Power sebagai pengelola dan operator aset pembangkit milik PLN maupun milik sendiri. Dalam penyusunan dan perumusan standardisasi keahlian pembangkitan tersebut, Indonesia Power menggunakan referensi diantaranya Skema Sertifikasi Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia (SKKNI) mengacu pada Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012, Peraturan Menteri ESDM No. 46

IP ComEt is the ultimate weapon of IP in achieving Company's "Second Curve" as a driving factor or even the new backbone of the Company in the future. Currently, Indonesia Power's backbone is as the manager and operator of power plant assets owned by PLN or under its ownership. In the preparation and formulation of standardization of power generation expertise, Indonesia Power uses National Competency Qualification Certification Scheme (SKKNI) with reference to Presidential Regulation No. 8 of 2012, Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 46 of 2017 on Standardization of

PROFIL PEGAWAI PERUSAHAAN

COMPANY'S PERSONNEL PROFILE

Tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan serta berbagai direktori dan *benchmarking* dengan entitas lainnya yang sudah menerapkan standar SKKNI.

Saat ini Indonesia Power telah memiliki 87 orang Spesialis/Ahli di berbagai level yang terdiri dari: Spesialis/Ahli level 4 = 39 orang, Spesialis/Ahli level 5 = 23 orang, Spesialis/Ahli level 6 = 6 orang, Spesialis/Ahli level 7 = 18 orang dan Spesialis/Ahli level 8 = 1 orang.

Biaya Pengembangan Kompetensi Pegawai

Selama tahun 2017, Indonesia Power telah menyediakan anggaran pengembangan kompetensi pegawai untuk membiayai penyelenggaraan pelatihan, pelaksanaan sertifikasi serta pengembangan kompetensi dalam rangka meningkatkan *hard* dan *soft competency* termasuk pelatihan pengembangan *leadership*.

Pada tahun 2017, realisasi anggaran untuk pengembangan kompetensi pegawai sebesar Rp140,34 miliar mengalami penurunan sebesar 6% jika dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini disebabkan karena mulai aktifnya penggunaan fasilitas di *Centre of Excellence* untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan seleksi pegawai baru untuk angkatan 24 dan angkatan 25 yang dilaksanakan pada Semester 2 tahun 2017.

Electricity Engineer Competency and various other directories and benchmarking with other entities applying SKKNI standard.

Indonesia Power now has 87 Specialists/Experts at various levels, who comprise: Level 4 Specialist/Expert = 39 people, Level 5 Specialist/Expert = 23 people, Level 6 Specialist/Expert = 6 people, Level 7 Specialist/Expert = 18 people and Level 8 Specialist/Expert = 1 person.

Personnel Competency Development Cost

Throughout 2017, Indonesia Power has provided personnel competency development budget to fund provision of training, implementation of certification and competency development for hard competency and soft competency improvement, including leadership development training.

In 2017, budget realization for personnel competency development was Rp140.34 billion, decreased at 6% in comparison to the same in 2016. This is due to active utilization of facility in the Centre of Excellence for provision of education and training on selection of new personnel batch 24 and batch 25, which was carried out in Semester 2 of 2017.

	Tahun (Rp miliar) Year (Rp billion)		
	2015	2016	2017
Anggaran Pendidikan dan Pelatihan I Education and Training Budget	191,56	146,64	134,93
Anggaran Sertifikasi I Certification Budget		3,14	5,41
Jumlah Realisasi Anggaran I Total Budget Realization	**191,56**	**149,78**	**140,34**

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, DAN UNIT AUDIT INTERNAL

EDUCATION AND TRAINING FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, COMMITTEES, CORPORATE SECRETARY, AND INTERNAL AUDIT UNIT

Informasi mengenai pendidikan dan pelatihan bagi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal akan diuraikan lebih lanjut dalam Bab Tata Kelola Perusahaan.

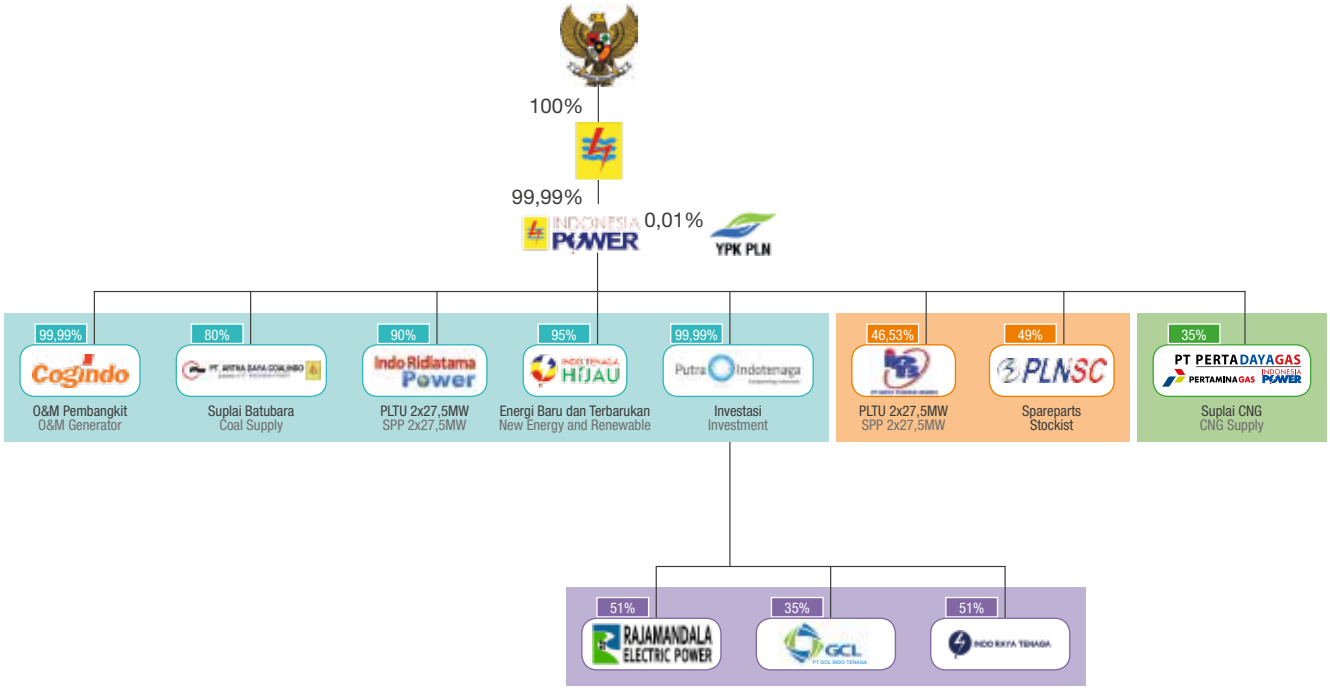
Information on education and training for the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit will be elaborated further in Corporate Governance Chapter.



STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN
CORPORATE GROUP STRUCTURE

Indonesia Power memiliki struktur grup Perusahaan yang terdiri dari 5 Anak Perusahaan, 1 Perusahaan Patungan (*Joint Venture Company*) dan 2 Perusahaan Asosiasi, dan sebagaimana tergambar dalam struktur di bawah ini:

Indonesia Power has a Corporate Group Structure that consists of 5 subsidiaries, 1 Joint Venture Company, as well as 2 Associate Companies and 3 Affiliates of the Subsidiary as illustrated in the structure below:

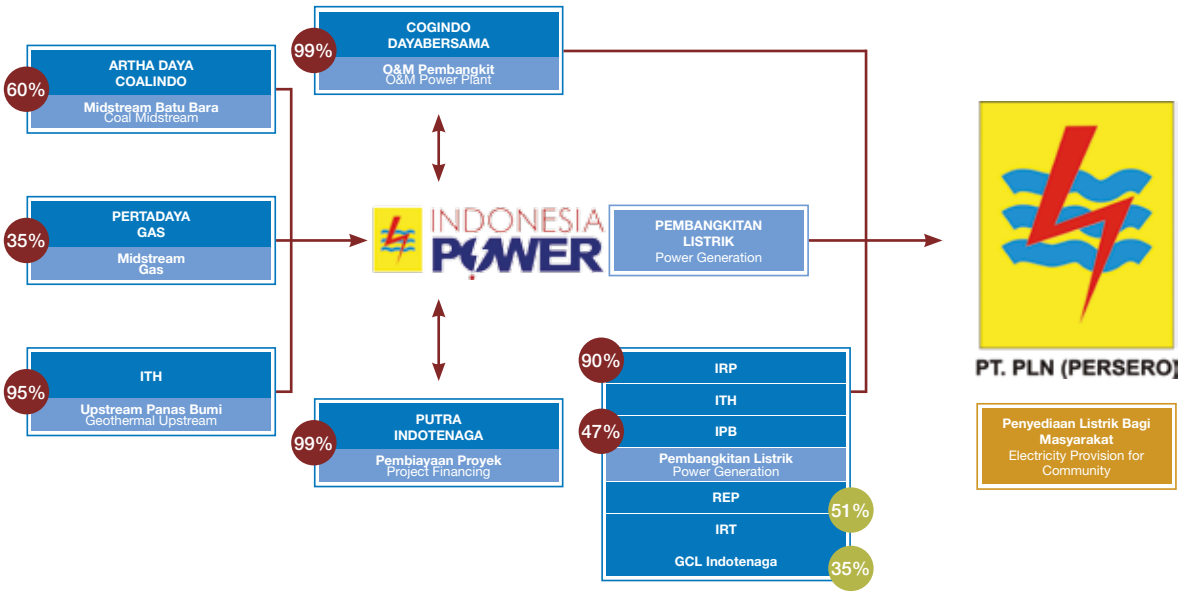


Anak Perusahaan Subsidiaries	CDB : Cogindo DayaBersama (1998) ADC : Artha Daya Coalindo (1997) IRP : Indo Ridlatama Power (2007) ITH : Indo Tenaga Hijau (2017) PIT : Putra Indotenaga (2013)
Perusahaan Asosiasi Associate Company	IPB : Indo Pusaka Berau (2005) PDG : Perta Daya Gas (2012)
Perusahaan Patungan Joint Venture Company	REP : Rajamandala Electric Power (2012) GCLIT : GCL Indotenaga (2016) IRT : Indo Raya Tenaga (2017)
Afiliasi Anak Perusahaan Affiliation of Subsidiaries Company	PLNSC : Prima Layanan Niaga Suku Cadang (2017)

Skema *Alignment* Anak Perusahaan Indonesia Power
Scheme: Alignment of Indonesia Power's Subsidiaries

Alignment Anak Perusahaan/Patungan/Afiliasi Indonesia Power
Alignment Subsidiaries/Joint Venture/Afiliated of Indonesia Power

Anak Perusahaan Indonesia Power beserta afiliasi, bersinergi bersama Perusahaan di dalam memberikan *value chain benefit* bagi PT PLN (Persero)
Indonesia Power's Subsidiaries and their affiliates synergize in providing value chain benefit for PT PLN (Persero).



Keterangan | Description:
IRP : Indo Ridlatama Power
IPB : Indo Pusaka Berau
REP : Rajamandala Electric Power
ITH : Indo Tenaga Hijau
IRT : Indo Raya Tenaga

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI TAHUN 2017
2017 AWARDS & CERTIFICATIONS

Penghargaan
Berbagai penghargaan telah diraih Indonesia Power sepanjang tahun 2017 merupakan bentuk pengakuan pihak eksternal terhadap bidang atau area yang menjadi *best practices* seperti terkait dengan proses bisnis, fungsi pendukung maupun kinerja organisasi sebagai berikut:

Awards
Various awards that were achieved by Indonesia Power throughout 2017 is a recognition from external parties for sectors or areas where it managed to implement its best practices, such as in business process, supporting function, or organizational performance as follows:



3 Februari 2017 | February 3, 2017

Nama Penghargaan
Inhouse Magazine Award
Golden dan Silver pada kategori *The Best of Private Company*

Badan Pemberi Penghargaan
Serikat Perusahaan Pers (SPS)

Award Name
Inhouse Magazine Award
Golden and Silver in The Best of Private Company Category

Conferring Institution
Serikat Perusahaan Pers (SPS)



14 Maret 2017 | March 14, 2017

Nama Penghargaan
Mitra Pembangunan Jawa Barat Melalui Program CSR Tahun 2016 untuk UP Saguling, UPJP Kamojang dan UJP Jabar 2 Palabuhan Ratu

Badan Pemberi Penghargaan
Gubernur Jawa Barat

Award Name
West Java Development Partner Through CSR 2016 for Saguling GU, Kamojang GGSU and Jabar 2 Palabuhan Ratu GSU

Conferring Institution
Governor of West Java Province



24 Maret 2017 | March 24, 2017

Nama Penghargaan
PR Award
kategori *Media Relation* Perusahaan Swasta non Tbk

Badan Pemberi Penghargaan
PR Indonesia

Award Name
PR Award
in Non-Public Listed Private Company Media Relation Category

Conferring Institution
PR Indonesia



5 April 2017 I April 5, 2017

Nama Penghargaan
Top CSR Award
1. Top Program CSR 2017 *On Green Healthy Vilage Development*
2. *Top CSR Leader* 2017 (Sripeni Inten Cahyani)

Badan Pemberi Penghargaan
Bisnis News Indonesia

Award Name
Top CSR Award
1. Top Program CSR 2017 On Green Healthy Vilage Development
2. Top CSR Leader 2017 (Sripeni Inten Cahyani)

Conferring Institution
Bisnis News Indonesia



28 April 2017 I April 28, 2017

Nama Penghargaan
Indonesian Human Capital Award
1. *1st The Best Human Capital* 2017 Kategori *Subsidiary of State Owned Enterprise's Company*
2. *3rd The Best Human Capital* 2017 Kategori *The Big 5 – Human Capital Company* 2017
3. *The Big 10 Human Capital Director* 2017 (Roikhan)

Badan Pemberi Penghargaan
Majalah Economic Review bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Award Name
Indonesian Human Capital Award
1. 1st The Best Human Capital 2017 in Subsidiary of State Owned Enterprise's Company Category
2. 3rd The Best Human Capital 2017 in The Big 5 – Human Capital Company 2017 Category
3. The Big 10 Human Capital Director 2017 (Roikhan)

Conferring Institution
Economic Review magazine in cooperation with the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia



19 Mei 2017 I May 19, 2017

Nama Penghargaan
Indonesia Most Admired Companies Award
Special Mention as The Most Popular Subsiadiary of State-Owned Enterprises Category Energy

Badan Pemberi Penghargaan
Warta Ekonomi

Award Name
Indonesia Most Admired Companies Award
Special Mention as The Most Popular Subsiadiary of State-Owned Enterprises Category Energy

Conferring Institution
Warta Ekonomi



22 Mei 2017 I May 22, 2017

Nama Penghargaan
Anugerah Perempuan Indonesia
Perempuan Inovatif (Sripeni Inten C.)

Badan Pemberi Penghargaan
Women Review & KPPA

Award Name
Anugerah Perempuan Indonesia
Innovative Woman (Sripeni Inten C.)

Conferring Institution
Women Review & KPPA

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI TAHUN 2017

2017 AWARDS & CERTIFICATIONS



6 Juni 2017 I June 6, 2017

Nama Penghargaan
Indonesia Green Company Award
Indonesia Green Company Achievement dan SRI Kehati Appreciation

Badan Pemberi Penghargaan
Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) dan Majalah SWA

Award Name
Indonesia Green Company Award
Indonesia Green Company Achievement and SRI Kehati Appreciation 2017

Conferring Institution
Keanekaragaman Hayati Indonesia Foundation (KEHATI) and SWA Magazine



8 Juni 2017 I June 8, 2017

Nama Penghargaan
Energy Management Leadership Award

Badan Pemberi Penghargaan
Energy Management Working Group Clean Energy Ministerial

Award Name
Energy Management Leadership Award

Conferring Institution
Energy Management Working Group Clean Energy Ministerial



19 Juli 2017 I July 19, 2017

Nama Penghargaan
Penganugerahan Penghargaan K3
1. Penghargaan *Zero Accident* oleh UP Suralaya, UP Semarang, UPJP Perak Grati, UP Mrica, UP Saguling, UP Bali, UPJP Priok, UPJP Kamojang, PLTP Darajat, UJP Banten 1 Suralaya, UJP Lontar, UJP Adipala, UJH
2. Penghargaan SMK3 oleh UP Suralaya, UP Perak Grati dan UP Bali
3. Penghargaan P2-HIV oleh UP Bali

Badan Pemberi Penghargaan
Kementerian Ketenagakerjaan

Award Name
Penganugerahan Penghargaan K3
1. Zero Accident Award by Suralaya GU, Semarang GU, Perak Grati GGSU, Mrica GU, Saguling GU, Bali GU, Priok GGSU, Kamojang GGSU, Darajat GPP, Banten 1 Suralaya GSU, Lontar GSU, Adipala GSU, MSU
2. OHSMS Award for Suralaya GU, GU Perak Grati, and Bali GU
3. P2-HIV Award for Bali GU

Conferring Institution
Ministry of Manpower



18 Agustus 2017 I August 18, 2017

Nama Penghargaan
1. *The Best Social Business Innovation*
2. *The Best Green CEO* (Sripeni Inten C.)

Badan Pemberi Penghargaan
Warta Ekonomi

Award Name
1. The Best Social Business Innovation
2. The Best Green CEO (Sripeni Inten C.)

Conferring Institution
Warta Ekonomi



23 Agustus 2017 I August 23, 2017

Nama Penghargaan
Anugerah Anak Perusahaan BUMN Indonesia
1. Juara Umum I kategori Anak Perusahaan BUMN Indonesia Terbaik 2017
2. *The Best CEO – Indonesian Subsidiary of SOE's Companies* I 2017 (Sripeni Inten C.)

Badan Pemberi Penghargaan
Economic Review

Award Name
Anugerah Anak Perusahaan BUMN Indonesia
1. 1st Winner of Best Indonesian Subsidiary of SOE 2017
2. The Best CEO – Indonesian Subsidiary of SOE's Companies I 2017 (Sripeni Inten C.)

Conferring Institution
Economic Review



23 Agustus 2017 I August 23, 2017

Nama Penghargaan
1. Apresiasi kategori Komitmen Pengembangan Kompetensi dan Profesionalisme Eksekutif
2. Anugerah Kadarman 2017

Badan Pemberi Penghargaan
PPM Manajemen

Award Name
1. Appreciation for Commitment to Competency Development and Executive Professionalism
2. Kadarman Award 2017

Conferring Institution
PPM Manajemen



15 September 2017 I September 15, 2017

Nama Penghargaan
Anugerah BUMN
1. Peringkat 1 Pada Kategori Tata Kelola Perusahaan
2. Peringkat 2 Kategori Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. CEO Anak Perusahaan BUMN Terbaik Kategori Visioner

Badan Pemberi Penghargaan
PPM Manajemen dan Majalah BUMN Track

Award Name
Anugerah BUMN
1. 1st Winner of Corporate Governance Category
2. 2nd Winner of Human Resources Development Category
3. Best CEO of Subsidiary of SOE - Visionary Category

Conferring Institution
PPM Manajemen and SOE's Track Magazine



27 September 2017 I September 27, 2017

Nama Penghargaan
Penghargaan Subroto
Kategori Manajemen Energi Pada Industri Besar Terbaik Ke-3

Badan Pemberi Penghargaan
Kementerian ESDM

Award Name
Subroto Award
3rd Best Energy Management in Large-Scale Industry

Conferring Institution
Ministry of Energy and Mineral Resources

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI TAHUN 2017

2017 AWARDS & CERTIFICATIONS



27 September 2017 | September 27, 2017

Nama Penghargaan
Dunamis Study
Appreciation of Human Capital Management Improvement

Badan Pemberi Penghargaan
Dunamis Organization Services

Award Name
Dunamis Study
Appreciation of Human Capital Management Improvement

Conferring Institution
Dunamis Organization Services



18 Oktober 2017 | October 18, 2017

Nama Penghargaan
Lomba Karya Inovasi Tigkat Nasional (LIKE) PLN
Juara 1 Kategori Bidang Pembangkitan - UP Suralaya

Badan Pemberi Penghargaan
PLN

Award Name
Lomba Karya Inovasi Tigkat Nasional (LIKE) PLN
1st Winner of Power Generation Category - Suralaya GU

Conferring Institution
PLN



31 Oktober 2017 | October 31, 2017

Nama Penghargaan
TOP IT Award
1. *TOP Leader in IT leadership* (Sripeni Inten C.)
2. *TOP IT Implementation on Electrical Energy Sector* 2017

Badan Pemberi Penghargaan
Majalah Itech dengan beberapa asosiasi TI TELCO (ASPEKTI, IKTII, AiTI dan MASTEL) dan didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

Award Name
TOP IT Award
1. TOP Leader in IT leadership (Sripeni Inten C.)
2. TOP IT Implementation on Electrical Energy Sector 2017

Conferring Institution
Itech magazine and some members of TI TELCO association (ASPEKTI, IKTII, AiTI and MASTELL) and supported by Ministry of Communication and Informatics



2 November 2017 | November 2, 2017

Nama Penghargaan
Indonesia Good Corporate Governance Award
Good Corporate Governance Terbaik ke-2 Kategori Anak Perusahaan BUMN

Badan Pemberi Penghargaan
Economic Review bekerja sama dengan Indonesia-Asia Institute, Sinergi Daya Prima dan IPMI *Business School*

Award Name
Indonesia Good Corporate Governance Award
2nd Best Good Corporate Governance in Subsidiary of SOE Category

Conferring Institution
Economic Review in cooperation with Indonesia-Asia Institute, Sinergi Daya Prima, IPMI Business School



6 November 2017 I November 6, 2017

Nama Penghargaan
Spotlight Award
1. *Annual Report*:
   a. *Silver Award*
   b. *Top 100 Communications Material Rangking # 73 Worldwide*
2. *Sustainability Report*:
   a. *Silver Award*
   b. *Top 100 Communications Material Rangking # 75 Worldwide*
3. *Other (Describe under 'Special Instructions')*:
   a. Silver Award
   b. *Top 100 Communications Material Rangking # 74 Worldwide*

Badan Pemberi Penghargaan
League of American Communication Professional (LACP)

Award Name
Spotlight Award
1. Annual Report:
   a. Silver Award
   b. Top 100 Communications Material Rangking # 73 Worldwide
2. Sustainability Report:
   a. Silver Award
   b. Top 100 Communications Material Rangking # 75 Worldwide
3. Other (Describe under 'Special Instructions'):
   a. Silver Award
   b. Top 100 Communications Material Rangking # 74 Worldwide

Conferring Institution
League of American Communication Professional (LACP)



23 November 2017 I November 23, 2017

Nama Penghargaan
Indonesia Best Electricity Award
1. *The Best Power Plant Company*
2. *The Best Power Plant* > 100 MW (UP Suralaya)
3. *The Best Power Plant CSR Electricity Company*

Badan Pemberi Penghargaan
Majalah Listrik Indonesia bekerja sama dengan Majalah SWA

Award Name
Indonesia Best Electricity Award
1. The Best Power Plant Company
2. The Best Power Plant > 100 MW (Suralaya GU)
3. The Best Power Plant CSR Electricity Company

Conferring Institution
Listrik Indonesia magazine, in cooperation with SWA magazine



5 Desember 2017 I December 5, 2017

Nama Penghargaan
CECT Sustainablity Awards
Kategori Holistic CSR Performance
Non Public Listed Company

Badan Pemberi Penghargaan
CECT (Center for Entrepreneurship, Change and Third Sector) Universitas Trisakti

Award Name
CECT Sustainablity Awards
Holistic CSR Performance 2017 in Non Public Listed Company Category

Conferring Institution
CECT (Center for Entrepreneurship, Change and Third Sector) Universitas Trisakti

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI TAHUN 2017

2017 AWARDS & CERTIFICATIONS



7 Desember 2017 | December 7, 2017

Nama Penghargaan
ASEAN Risk Award
1. ASEAN Risk Champion
2. Risk Manager of the Year

Badan Pemberi Penghargaan
ERMA (Enterprise Risk Management Academy)

Award Name
ASEAN Risk Award
1. ASEAN Risk Champion
2. Risk Manager of the Year

Conferring Institution
ERMA (Enterprise Risk Management Academy)



18 Desember 2017 | December 18, 2017

Nama Penghargaan
9 PROPER Hijau [UP Suralaya, UP Semarang, UPJP Priok, UPJP Kamojang (PLTP Darajat), UP Bali (PLTG Pesanggaran dan PLTG Gilimanuk), UJP Labuan, UJP Suralaya 8 dan UJP Cilegon]

Badan Pemberi Penghargaan
Kementerian Lingkungan Hidup

Award Name
9 Green PROPER [Suralaya GU, Semarang GU, Priok GGSU, Kamojang GGSU (Darajat GPP), Bali GU (Pesanggaran GTPP and Gilimanuk GTPP), Labuan GSU, Suralaya 8 GSU and Cilegon GSU]

Conferring Institution
Ministry of Environment



19 Desember 2017 | December 19, 2017

Nama Penghargaan
Corporate Governance Perception Index (CGPI)
Trusted Company

Badan Pemberi Penghargaan
The Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG) bekerjasama dengan Majalah SWA

Award Name
Corporate Governance Perception Index (CGPI)
Trusted Company

Conferring Institution
The Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG) in cooperation with SWA Magazine

Sertifikasi

Indonesia Power juga telah memperoleh sertifikasi sepanjang tahun 2017 sebagai berikut:



Nama Sertifikasi
Certification
ISO 9001:2015

1. Kantor Pusat | Head Office
2. UP | GU Suralaya
3. UPJP | GGSU Priok
4. UP | GU Saguling
5. UPJP | GGSU Kamojang
6. UP | GU Semarang
7. UP | GU Mrica
8. UPJP | GGSU Perak Grati
9. UP | GU Bali
10. UJH | MSU
11. UJP | GSU Suralaya 8
12. UJP | GSU Labuan
13. UJP | GSU Lontar
14. UJP | GSU Palabuhan Ratu
15. UJP | GSU Adipala
16. UJP | GSU Cilegon

Tanggal Perolehan
14 Februari 2017

Date Obtained
February 14, 2017

Badan Pemberi Sertifikasi
Sucofindo

Certifying Body
Sucofindo

Masa Berlaku Sertifikasi
13 Februari 2020

Expiry
February 13, 2020



Nama Sertifikasi
Certification
ISO 14001:2015

1. UP | GU Suralaya
2. UPJP | GGSU Priok
3. UP | GU Saguling
4. UPJP | GGSU Kamojang
5. UP | GU Semarang
6. UP | GU Mrica
7. UPJP | GGSU Perak Grati
8. UP | GU Bali
9. UJH | MSU
10. UJP | GSU Suralaya 8
11. UJP | GSU Labuan
12. UJP | GSU Lontar
13. UJP | GSU Palabuhan Ratu
14. UJP | GSU Adipala
15. UJP | GSU Cilegon

Tanggal Perolehan
14 Februari 2017

Date Obtained
February 14, 2017

Badan Pemberi Sertifikasi
Sucofindo

Certifying Body
Sucofindo

Masa Berlaku Sertifikasi
13 Februari 2020

Expiry
February 13, 2020

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI TAHUN 2017

2017 AWARDS & CERTIFICATIONS



Nama Sertifikasi
Certification
OHSAS 18001:2007

1. UP I GU Suralaya
2. UPJP I GGSU Priok
3. UP I GU Saguling
4. UPJP I GGSU Kamojang
5. UP I GU Semarang
6. UP I GU Mrica
7. UPJP I GGSU Perak Grati
8. UP I GU Bali
9. UJH I MSU
10. UJP I GSU Suralaya 8
11. UJP I GSU Labuan
12. UJP I GSU Lontar
13. UJP I GSU Palabuhan Ratu
14. UJP I GSU Adipala
15. UJP I GSU Cilegon

Tanggal Perolehan	**Date Obtained**
14 Februari 2017	February 14, 2017
Badan Pemberi Sertifikasi	**Certifying Body**
Sucofindo	Sucofindo
Masa Berlaku Sertifikasi	**Expiry**
13 Februari 2020	February 13, 2020



Nama Sertifikasi
Certification
ISO 28000:2007/SNI ISO 28000:2009

1. UP I GU Suralaya
2. UPJP I GGSU Priok
3. UP I GU Saguling
4. UPJP I GGSU Kamojang
5. UP I GU Semarang
6. UP I GU Mrica
7. UPJP I GGSU Perak Grati
8. UP I GU Bali

Tanggal Perolehan	**Date Obtained**
14 Februari 2017	February 14, 2017
Badan Pemberi Sertifikasi	**Certifying Body**
Sucofindo	Sucofindo
Masa Berlaku Sertifikasi	**Expiry**
13 Februari 2020	February 13, 2020



Nama Sertifikasi
Certification
ISO 55001:2014

1. Kantor Pusat I Head Office
2. UP I GU Suralaya
3. UPJP I GGSU Priok
4. UP I GU Saguling
5. UPJP I GGSU Kamojang
6. UP I GU Semarang
7. UP I GU Mrica
8. UPJP I GGSU Perak Grati
9. UP I GU Bali
10. UJH I MSU
11. UJP I GSU Suralaya 8
12. UJP I GSU Labuan
13. UJP I GSU Lontar
14. UJP I GSU Palabuhan Ratu
15. UJP I GSU Adipala
16. UJP I GSU Cilegon

Tanggal Perolehan	**Date Obtained**
27 Oktober 2015, Perluasan Ruang Lingkup: 31 Januari 2018	October 27, 2015, Expansion of Scope: January 31, 2018
Badan Pemberi Sertifikasi	**Certifying Body**
BSI	BSI
Masa Berlaku Sertifikasi	**Expiry**
26 Oktober 2018	October 26, 2018



Nama Sertifikasi
Certification
ISO 50001:2011

1. Kantor Pusat I Head Office
2. UP I GU Suralaya
3. UPJP I GGSU Priok
4. UP I GU Saguling
5. UPJP I GGSU Kamojang
6. UP I GU Semarang
7. UP I GU Mrica
8. UPJP I GGSU Perak Grati
9. UP I GU Bali
10. UJH I MSU
11. UJP I GSU Suralaya 8
12. UJP I GSU Labuan
13. UJP I GSU Lontar
14. UJP I GSU Palabuhan Ratu
15. UJP I GSU Adipala
16. UJP I GSU Cilegon
17. UJP I GSU Pangkalan Susu
18. UJP I GSU Jeranjang
19. UJP I GSU Barru

Tanggal Perolehan
25 Agustus 2016

Date Obtained
August 25, 2016

Badan Pemberi Sertifikasi
BSI

Certifying Body
BSI

Masa Berlaku Sertifikasi
24 Agustus 2019

Expiry
August 24, 2019



Nama Sertifikasi
Certification
ISO 27001:2013
(Departemen Sistem Informasi Kantor Pusat)
(Information System Department of the Head Office)

Tanggal Perolehan
18 Agustus 2017

Date Obtained
August 18, 2017

Badan Pemberi Sertifikasi
BSI

Certifying Body
BSI

Masa Berlaku Sertifikasi
17 Agustus 2020

Expiry
August 17, 2020



Nama Sertifikasi
Certification
ISO 22301:2012
(UPJP I GGSU Priok)

Tanggal Perolehan
05 Februari 2018

Date Obtained
February 05, 2018

Badan Pemberi Sertifikasi
BSI

Certifying Body
BSI

Masa Berlaku Sertifikasi
04 Februari 2021

Expiry
February 04, 2021

DAFTAR ANAK PERUSAHAAN, PERUSAHAAN PATUNGAN DAN PERUSAHAAN ASOSIASI

LIST OF SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATED ENTITIES

Anak Perusahaan merupakan suatu perusahaan yang dikendalikan oleh Indonesia Power, memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional anak perusahaan untuk memperoleh manfaat dari aktivitas Anak Perusahaan tersebut.

Subsidiary refers to a company that is controlled by Indonesia Power, of which Indonesia Power has an authority to regulate the financial and operational policy to get the benefits from the Subsidiary.

Perusahaan *Joint Venture* (Perusahaan Patungan) merupakan perusahaan bersama dimana para pihak mempunyai bagian partisipasi, dan diatur oleh persetujuan untuk berbagi pengendalian atas suatu aktivitas. Pada perusahaan ini, keputusan keuangan dan operasional strategis terkait dengan aktivitasnya, dipersyaratkan secara konsensus dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Joint Venture refers to a joint venture company where the parties have their own participating interest; it is regulated under an agreement on shared control of an activity. Strategic financial and operational decisions related to its activities are required to be taken through consensus by all parties sharing control.

Perusahaan Asosiasi merupakan suatu perusahaan dimana Indonesia Power mempunyai pengaruh signifikan, dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura bersama. Sedangkan definisi "Pengaruh Signifikan" adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional, tetapi tidak mengendalikan maupun mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Associated Entity refers to a company on which Indonesia Power has significant influence; it is not a subsidiary and does not have any participating interest in a joint venture company. As to "Significant Influence", it refers to the authority to participate in the decision of financial and operational policies, but not to control or jointly control such policies.

Berikut adalah daftar Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi Indonesia Power saat ini:

Below is the list of the current Subsidiaries, Joint Venture Companies, and Associate Companies of Indonesia Power:

No	Nama Perusahaan Name of Company	Tanggal Pendirian Date of Incorporation	Status Operasi Perusahaan Company's Operational Status	Alamat Perusahaan Address	Kepemilikan Saham Indonesia Power Participating Interest of Indonesia Power	Bidang Usaha Field of Business	
Anak Perusahaan | Subsidiaries							
1	PT Cogindo DayaBersama	15 April 1998 April 15, 1998	Beroperasi Active Operation	Gedung COGINDO Jalan Pasar Minggu No.190 Jakarta 12950 Telp. : (62 - 21) 2121798989 Fax : (62 - 21) 2121789990 Email: cogindo@cogindo.co.id Website: http://www.cogindo.co.id/	99,99%	*Co-generation*, energi ketenagalistrikan; operasi dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik, dengan kegiatan usaha: a. Penjualan Tenaga Listrik b. Jasa OM c. Sewa Genset d. *Maintenance, Repair and Overhaul* (MRO) dan *Stockiest*	Co-generation, electricity; power plant operation and maintenance, with the following business activities: a. Electricity Supply b. OM Service c. Generator Rental d. Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) and Stockist
2	PT Artha Daya Coalindo	21 Oktober 1997 October 21, 1997	Beroperasi Active Operation	Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta Selatan 12950 Telp. : (62-21) 5203725 (62-21) 5226447 Email: support@arthadayacoalindo.co.id Website: http://www.arthadayacoalindo.co.id/	80%	Perdagangan, penambangan, pengangkutan, bongkar muat, pemasaran dan keagenan batubara, dengan kegiatan usaha: a. Penjualan Batubara b. Jasa Transportasi Batubara c. *Port Management*	Trade, mining, transportation, loading and unloading coal marketing and agency, with the following business activities: a. Coal Sale b. Coal Transportation Service c. Port Management

No	Nama Perusahaan Name of Company	Tanggal Pendirian Date of Incorporation	Status Operasi Perusahaan Company's Operational Status	Alamat Perusahaan Address	Kepemilikan Saham Indonesia Power Participating Interest of Indonesia Power	Bidang Usaha Field of Business	
3	PT Indo Tenaga Hijau*	1 Oktober 2009 October 1, 2009	Beroperasi Active Operation	Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18 Lantai Dasar Jakarta Selatan 12950 Telp. : (6221) 526 7666 Fax : (6221) 525 3467 Email: - Website: -	95,2%	Pengusahaan energi baru dan/ atau terbarukan, Jasa Penunjang ketenagalistrikan dan Perdagangan dan jasa terkait ketenagalistrikan berbasis energi dan/ atau terbarukan.	New and/or renewable energy business, electricity and trade support service, and services related to electricity based on new and/or renewable energy.
4	PT Indo Ridlatama Power	28 September 2007 September 28, 2007	Beroperasi Active Operation	Kantor Pusat: Head Office: PT Indo Ridlatama Power Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18 Lantai 1 Jakarta Selatan 12950 Telp : (62 21) 29035409 Fax : (62 21) 29035410 Email: - Website: http://www.indoridlatamapower.com Kantor Pembangkit: Power Plant Office: Jalan Moh. Hatta RT 023 Handil II Muara Jawa Kutai Kartanegara – Kalimantan Timur	90%	Ketenagalistrikan, dengan kegiatan usaha pengembangan PLTU Muara Jawa 2x27,5 MW di Muara Jawa Kalimantan Timur	Electricity business, including development of SPP Muara Jawa 2x27.5 MW in Muara Jawa, East Kalimantan
5	PT Putra Indotenaga	20 Desember 2013 December 20, 2013	Beroperasi Active Operation	Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18 Lantai 1 Jakarta Selatan 12950 Telp. : (62 21) 526 7666 Fax : (62 21) 525 2623 Email: info@putraindotenaga.co.id Website: http://www.putraindotenaga.co.id/	99,99%	Participating interest - sebagai AP Indonesia Power yang ditetapkan *unrestricted terhadap Indenture Covenant Global Bond*, untuk keperluan Pendanaan proyek, dengan kegiatan usaha: a. Penyertaan pada PT Rajamandala Electric Power untuk pengembangan PLTA Rajamandala 47 MW b. Penyertaan pada PT GCL Indo Tenaga untuk pengembangan PLTU Kalbar-1 2x100 MW c. Penyertaan pada PT Indo Raya Tenaga untuk pengembangan PLTU Suralaya 9 - 10 2 x1000 MW	Participating Interest - as a Subsidiary of Indonesia Power that is defined as unrestricted to Global Indenture Bond Covenant for Project funding, with the following business activities: a. Equity participation in PT Rajamandala Electric Power for development of HPP Rajamandala 47 MW b. Equity participation in PT GCL Indo Tenaga for development of SPP West Kalimantan 1 2x100 MW c. Equity participation in PT Indo Raya Tenaga for development of SPP Suralaya 9 - 10 2 x1000 MW
Perusahaan Patungan | Joint Venture Companies							
6	PT Perta Daya Gas	26 April 2012 April 26, 2012	Beroperasi Active Operation	Renmark Building 1st Floor Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 25 Pekunden Semarang Tengah Semarang 50134 Telp. : (024) 764 43440 Fax : (024) 764 43441 Email: mail@pertadayagas.co.id Website: http://www.pertadayagas.co.id/	35%	LNG dan transportasi gas, kegiatan usaha: CNG Plant Tambak Lorok	LNG and gas transportation, business activities: CNG Plant Tambak Lorok

DAFTAR ANAK PERUSAHAAN, PERUSAHAAN PATUNGAN DAN PERUSAHAAN ASOSIASI

LIST OF SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATED ENTITIES

No	Nama Perusahaan Name of Company	Tanggal Pendirian Date of Incorporation	Status Operasi Perusahaan Company's Operational Status	Alamat Perusahaan Address	Kepemilikan Saham Indonesia Power Participating Interest of Indonesia Power	Bidang Usaha Field of Business	
Perusahaan Asosiasi | Associate Companies							
7	PT Indo Pusaka Berau	12 Januari 2005 January 12, 2005	Beroperasi Active Operation	Kantor Pusat: Head Office: Jalan Pemuda No. 356 Tanjung Redeb, Berau 77311 Kalimantan Timur Telp. : (62 554) 2021672 (62 554) 2021691 Fax : (62 554) 2027003 Email: secretary@ipb.co.id Website: http://www.ipb.co.id/ Kantor Perwakilan Jakarta | Jakarta Representative Office: Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta Selatan 12950 Telp : (62 21) 526 7666 ext 6446 Fax : (62 21) 525 0912	47%	Pembangkit tenaga listrik melalui pengoperasian PLTU Lati 3 x 7 MW di Tanjung Redeb, Berau Kalimantan Timur.	Power plant, through SPP Lati 3x7 MW operation in Tanjung Redeb, Berau, East Kalimantan.
8	PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang	16 Juni 2017 June 16, 2017	Beroperasi Active Operation	Recapital Building, 3rd Floor, Jalan Adityawarman No. 55, South Jakarta, Jakarta Selatan 12160 Telp : (62 21) 7246184 Fax : (62 21) 7398581 Email: email@pln.sc.co.id Website: www.plnsc.co.id	49%	Perdagangan barang dan jasa, reverse engineering, e-commerce dibidang supply chain, jasa konsultan, dan melakukan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha perseroan.	Product and service trading, reverse engineering, e-commerce in supply chain sector, consultant service, and business related to company's business.
Afiliasi dari Anak Perusahaan | Affiliate of the Subsidiary							
9	PT Rajamandala Electric Power	14 Februari 2012 February 14, 2012	Beroperasi Active Operation	Wisma PMI Lantai 2 Suite 202 Jalan Wijaya I No. 63 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12170 Telp. : (62 21) 7265145 Fax : (62 21) 7279370 Email: - Website: -	51% melalui PT Putra Indotenaga 51% through PT Putra Indotenaga	Pembangkit tenaga listrik melalui pengembangan PLTA Rajamandala 47 MW	Power plant, through development of HPP Rajamandala 47 MW
10	PT GCL Indotenaga	25 Februari 2016 February 25, 2016	Beroperasi Active Operation	Chase Plaza Lantai 9 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21 Jakarta Selatan 12920 Telp. : (62 21) 25989710 Fax : (62 21) 25989712 Email: - Website: -	35% melalui PT Putra Indotenaga 35% through PT Putra Indotenaga	Pembangkit tenaga listrik melalui pemgembangan PLTU Kalbar-1 2x100 MW	Power plant, through development of SPP West Kalimantan 1 2x100 MW
11	PT Indo Raya Tenaga	15 Maret 2017 March 15, 2017	Beroperasi Active Operation	Sentral Senayan II, 17th Floor Suite 217B Jalan Asia Afrika No.8, Gelora Bung Karno Jakarta Pusat 10270 Telp : (62 21) 57900202 Fax : (62 21) 57900208 Email: Website:	51% melalui PT Putra Indotenaga 51% through PT Putra Indotenaga	Pembangkit tenaga listrik melalui pemgembangan PLTU Jawa 9-10 2x1000 MW	Power plant, through development of SPP Java 9-10 2x1000 MW

* Sebelumnya merupakan PT Tangkuban Parahu Geothermal dan melakukan perubahan nama menjadi PT Indo Tenaga Hijau (ITH) berdasarkan Keputusan RUPS tanggal 10 Oktober 2017 dengan perubahan bidang usaha menjadi bergerak pada bidang energi baru dan/atau terbarukan.

* It was previously PT Tangkuban Parahu Geothermal and changed the name into PT Indo Tenaga Hijau (ITH) based on the GMS Resolution on October 10, 2017, with change of business sector into new and/or renewable energy business.

SEKILAS KINERJA ANAK PERUSAHAAN, PERUSAHAAN ASOSIASI DAN PERUSAHAAN PATUNGAN

PERFORMANCE OF SUBSIDIARIES, ASSOCIATED ENTITIES AND JOINT VENTURES IN BRIEF

Anak Perusahaan

Subsidiaries

PT Cogindo DayaBersama (CDB)

Profil Perusahaan

PT Cogindo DayaBersama (CDB) didirikan pada tanggal 15 April 1998 berdasarkan Akta No. 52 Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH dengan penyertaan saham saat ini adalah Indonesia Power sebesar 99,9% dan YPK-Indonesia Power sebesar 0,01%. CDB bergerak dalam bidang usaha pelayanan energi dengan konsep *Cogeneration* dan *Distributed generation*, jasa operasi & pemeliharaan (O&M) pembangkit, jasa *Maintenance, Repair and Overhaul* (MRO) dan *Stockiest*.

Company Profile

PT Cogindo DayaBersama (CDB) was established on April 15, 1998 under Notarial Deed No. 52 by Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., with current share ownership of 99.9% by Indonesia Power and 0.01% by YPK-Indonesia Power. CDB engages in energy service business in the form of Cogeneration and Distributed generation, power plant operation and maintenance (O&M) service, Maintenance, Repair and Overhaul (MRO), and Stockist.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2017

Structure of the Board of Commissioners in 2017

Jabatan Position		Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Komisaris Utama	President Commissioner	Ahmad Rofik*	5 Mei 2017 – 30 April 2020 May 5, 2017 – April 30, 2020
Komisaris	Commissioner	Agung Siswanto	

* Mengundurkan diri dari jabatannya sejak tanggal 22 Agustus 2017 berdasarkan Surat kepada Direktur Utama Indonesia Power selaku Pemegang Saham perusahaan tanggal 24 Juli 2017.

* Resigned from his position since August 22, 2017 by a Letter to President Director of Indonesia Power as Company's Shareholder, dated July 24, 2017.

Jabatan Position		Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama	President Director	Tri Tjahjono Putro	5 Mei 2017 – 30 April 2020 May 5, 2017 – April 30, 2020
Direktur Bisnis	Director of Business	Ria Tri Sakya	5 Mei 2017 – 30 April 2020 May 5, 2017 – April 30, 2020
Direktur Operasi	Director of Operation	Amlan	1 Agustus 2016 – 31 Juli 2018 August 1, 2016 – July 31, 2018
Direktur SDM merangkap Direktur Keuangan	Director of HR and Director of Finance	Asep Yanyan Herdiyana	1 Agustus 2016 – 31 Juli 2018 August 1, 2016 – July 31, 2018

SEKILAS KINERJA ANAK PERUSAHAAN, PERUSAHAAN ASOSIASI DAN PERUSAHAAN PATUNGAN

PERFORMANCE OF SUBSIDIARIES, ASSOCIATED ENTITIES AND JOINT VENTURES IN BRIEF

Kinerja Keuangan Tahun 2017 (Rp miliar)

Financial Performance in 2017 (Rp billion)

Keterangan Description		2015	2016	2017	Perubahan 2017 terhadap 2016 (%) Change from 2016 to 2017 (%)
Total Aset	Total Assets	779,98	899,01	1.041,33	15,83
Pendapatan Usaha	Revenues	459,67	608,85	762,83	25,29
Beban Usaha	Operating Expenses	(407,95)	(558,77)	(693,44)	24,10
Laba (Rugi) Usaha	Operating Profit (Loss)	51,72	50,08	69,39	38,56
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	Profit (Loss) for the year	31,52	39,46	46,98	19,06
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	Total Comprehensive Income for the Year	30,56	38,82	45,37	21,02

Realisasi Kinerja Tahun 2017 Terhadap Realisasi Tahun 2016

Total Aset CDB per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.041,33 miliar meningkat 15,83% dibandingkan tahun 2016, yaitu sebesar Rp899,01 miliar yang didorong oleh peningkatan piutang kepada Indonesia Power.

Realisasi pendapatan usaha tahun 2017 sebesar Rp762,83 miliar meningkat 25,29% dari realisasi tahun 2016 yaitu sebesar Rp608,85 miliar dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan dari segmen Jasa O&M dan Jasa Teknik lainnya yaitu *Stockist* dan *Jasa Maintenance Repair and Overhaul* (MRO).

Beban Usaha sebesar Rp693,44 miliar meningkat 24,10% dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar Rp558,77 miliar seiring dengan peningkatan pendapatan usaha yang disebabkan peningkatan Beban Pokok dari Segmen Jasa O&M dan Jasa Teknik Lainnya yaitu *Stockist* dan Jasa MRO.

Laba Usaha sebesar Rp69,39 miliar meningkat 38,56% dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar Rp50,08 miliar.

Laba Bersih per 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp45,37 miliar meningkat 21,02% dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar Rp39,46 miliar. Hal tersebut didorong oleh adanya peningkatan pendapatan dari Jasa O&M dan Jasa Teknik lainnya.

Performance Achievement in 2017 in Comparison to Achievement in 2016

CDB's Total Asset per December 31, 2017 was Rp1,041.33 billion, increased 15.83% from 2016 at Rp899.01 billion due to increase of receivables from Indonesia Power.

Realization of revenue in 2017 was Rp762.83 billion, increased 25.29% from the same in 2016 at Rp608.85 billion due to increase of revenue from O&M Service segment and other Technical Services, namely Stockist and Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) Service.

Operating Expenses of Rp693.44 billion increased at 24.10% in comparison to the same in 2016 at Rp558.77 billion, in line with the increase of operating revenue due to increase of Cost of Goods Sold from O&M Service Segment and other Technical Services, namely Stockist and MRO Service.

Operating Profit of Rp69.39 billion increased at 38.56% in comparison to the same in 2016 at Rp50.08 billion.

Net Operating Profit per December 31, 2017 was Rp45.37 billion, increased from the same in 2016 at Rp39.46 billion. This is due to increase of revenue from O&M Service and other Technical Services.

PT. ARTHA DAYA COALINDO
Subsidiary of PT. INDONESIA POWER

PT Artha Daya Coalindo (ADC)

Profil Perusahaan

PT Artha Daya Coalindo (ADC) didirikan pada tanggal 21 Oktober 1997 berdasarkan Akta No. 70 Notaris Machrani Moertolo Soenarto, SH, dengan kepemilikan saham saat ini adalah Indonesia Power sebesar 80%, PT Arthindo Utama sebesar 10% dan PT Desira Pratama Line sebesar 10%. ADC bergerak dalam bidang usaha *trading*, transportasi dan jasa pembongkaran batubara.

Company Profile

PT Artha Daya Coalindo (ADC) was established on October 21, 1997 under Notarial Deed No. 70 by Machrani Moertolo Soenarto, S.H., with current share ownership of 80% by Indonesia Power, 10% by PT Arthindo Utama and 10% by PT Desira Pratama Line ADC engages in trading, transportation, and coal unloading service business sector.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2017

Structure of the Board of Commissioners in 2017

Jabatan Position		Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Komisaris Utama	President Commissioner	Abdul Hakam*	13 Juni 2017 – 1 Juli 2020 June 13, 2017 – July 1, 2020
Komisaris	Commissioner	Seta Perdana	2 Agustus 2015 – 1 Agustus 2018 August 2, 2015 – August 1, 2018
Komisaris	Commissioner	Marco Rosihan Yakub	2 Agustus 2015 – 1 Agustus 2018 August 2, 2015 – August 1, 2018

* Diangkat sebagai Komisaris Utama sejak tangal 13 Juni 2017 menggantikan Sdr. Roikhan.

* Appointed as President Commissioner since June 13, 2017 to replace Roikhan

Jabatan Position		Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama	President Director	Slamet Riyanto	1 Agustus 2015 – 31 Juli 2018 August 1, 2015 – July 31, 2018
Direktur Operasi	Operation Director	Andy Adam*	5 Mei 2017 – 30 April 2020 May 5, 2017 – April 30, 2020
Direktur Keuangan dan Administrasi	Director of Finance and Administration	Rizaldi	1 Agustus 2015 – 31 Juli 2018 August 1, 2015 – July 31, 2018

* Diangkat sebagai Direktur Operasi sejak tanggal 5 Mei 2017 menggantikan Sdr. Rozano Faizal.

* Appointed as Operations Director since May 5, 2017 to replace Rozano Faizal.

SEKILAS KINERJA ANAK PERUSAHAAN, PERUSAHAAN ASOSIASI DAN PERUSAHAAN PATUNGAN

PERFORMANCE OF SUBSIDIARIES, ASSOCIATED ENTITIES AND JOINT VENTURES IN BRIEF

Kinerja Keuangan Tahun 2017 (Rp miliar)

Financial Performance in 2017 (Rp billion)

Keterangan Description		2015	2016	2017	Perubahan 2017 terhadap 2016 (%) Change from 2016 to 2017 (%)
Total Aset	Total Assets	103,81	171,56	397,21	131,53
Pendapatan Usaha	Revenues	380,35	408,32	602,79	47,63
Beban Usaha	Operating Expenses	(361,62)	(390,89)	(560,01)	43,27
Laba (Rugi) Usaha	Operating Profit (Loss)	18,73	17,43	42,78	145,44
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	Profit (Loss) for the year	13,72	10,68	26,60	149,06
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	Total Comprehensive Income for the Year	13,72	10,65	26,50	148,83

Total Aset ADC per 31 Desember 2017 sebesar Rp397,21 miliar meningkat 131,53% dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar Rp171,56 miliar dipengaruhi tingginya posisi piutang usaha ADC ke Indonesia Power untuk pekerjaan penjualan Batubara dan Port Management.

ADC's Total Asset per December 31, 2017 was Rp397.21 billion, increased at 131.53% in comparison to the same in 2016 at Rp171.5 billion due to high receivables from Indonesia Power to ADC for Coal sale and Port Management work.

Realisasi pendapatan tahun 2017 sebesar Rp602,79 miliar meningkat 47,63% dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar Rp408,32 miliar, antara lain disebabkan oleh peningkatan volume pasokan batu bara ADC ke Indonesia Power dari 518 ribu Mton pada tahun 2016 menjadi 619 ribu Mton pada tahun 2017 atau meningkat 19,50%, serta peningkatan volume pembongkaran batubara dari 3,14 juta MTon pada tahun 2016 menjadi 7,3 juta MTon pada tahun 2017 atau meningkat 133,95%.

Realization of revenue in 2017 was Rp602.79 billion, increased at 47.63% in comparison to the same in 2016 at Rp408.32 billion, due to increase of volume of coal supply from ADC to Indonesia Power from 518 thousand Mton in 2016 to 619 thousand Mton in 2017 or increased at 19.50%, and increase of coal unloading volume from 3.14 million Mton in 2016 to 7.3 million Mton in 2017 or increased at 133.95%.

Beban Usaha sebesar Rp560,01 miliar meningkat 43,27% dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar Rp390,89 miliar sejalan dengan peningkatan pendapatan.

Operating Expense of Rp560.01 billion increased at 43.27% in comparison to the same in 2016 at Rp390.89 billion, in line with the increasing revenue.

Laba usaha sebesar Rp42,78 miliar meningkat 145,44% dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar Rp17,43 miliar.

Operating Profit of Rp42.78 billion increased at 145.44% in comparison to the same in 2016 at Rp17.43 billion.

Posisi Laba bersih tahun berjalan dan jumlah laba komprehensif tahun 2017 tercatat sebesar Rp26,50 miliar meningkat sebesar 149,76% dibanding tahun 2016 sebesar Rp10,65 miliar.

Net Profit for the year and the amount of comprehensive profit in 20177 was Rp26.50 billion, increased at 149.76% in comparison to the same in 2016 at Rp10.65 billion.

PT Indo Ridlatama Power (IRP)

Profil Perusahaan

PT Indo Ridlatama Power didirikan pada tanggal 28 September 2007 berdasarkan Akta No. 211 Notaris Ingrid Lannywaty, SH dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-06299 HT.01.01-TH.2007 dengan kepemilikan saham saat ini adalah Indonesia Power sebesar 90% dan PT Ridlatama Bangun Mandiri sebesar 10%. IRP didirikan untuk mengembangkan PLTU Kaltim 2x27,5 MW di Muara Jawa, Kalimantan Timur.

Company Profile

PT Indo Ridlatama Power was established on September 28, 2007under Notarial Deed No. 211 by Ingrid Lannywaty, S.H., and Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. C-06299 HT.01.01-TH.2007, with current share ownership of 90% by Indonesia Power and 10% by PT Ridlatama Bangun Mandiri. IRP was established to develop SPP East Kalimantan 2x27.5 MW in Muara Jawa, East Kalimantan.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2017

Structure of the Board of Commissioners in 2017

Jabatan Position		Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Komisaris Utama	President Commissioner	Haryadi Krismiyanto*	5 Mei 2017 – 30 April 2020 May 5, 2017 – April 30, 2020
Komisaris	Commissioner	Doddy Sumantyawan	22 Juli 2016 s.d tercapainya target COD PLTU Kaltim July 22, 2016 until the COD Target in SPP Kaltim is achieved

* Diangkat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 5 Mei 2017, menggantikan Sdr. Antonius RTA.

* Appointed as President Commissioner since May 5, 2017 to replace Antonius RTA.

Jabatan Position		Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama	President Director	Makmur Marzuki	20 Mei 2016 s.d tercapainya target COD PLTU Kaltim May 20, 2016 until the COD Target in SPP Kaltim is achieved
Direktur Keuangan dan Administrasi	Director of Finance and Administration	Hardiman	
Direktur Operasi	Operation Director	R. Triyono Budi P.	

SEKILAS KINERJA ANAK PERUSAHAAN, PERUSAHAAN ASOSIASI DAN PERUSAHAAN PATUNGAN

PERFORMANCE OF SUBSIDIARIES, ASSOCIATED ENTITIES AND JOINT VENTURES IN BRIEF

Kinerja Keuangan Tahun 2017 (Rp miliar)

Financial Performance in 2017 (Rp billion)

Keterangan Description		2015	2016	2017	Perubahan 2017 terhadap 2016 (%) Change from 2016 to 2017 (%)
Total Aset	Total Assets	221,22	688,15	1.187,00	72,49
Pendapatan Usaha	Revenues	0	0	980,05	-
Beban Usaha	Operating Expenses	(4,78)	(5,86)	(980,05)	-
Laba (Rugi) Usaha	Operating Profit (Loss)	(478)	(5,86)	0	-
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	Profit (Loss) for the year	(2,33)	(5,13)	65,66	1.379,92

Total Aset IRP per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.187 miliar meningkat 72,49% dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar Rp688,15 miliar dikontribusi oleh setoran modal Indonesia Power sebesar Rp22,96 miliar serta *progress* pekerjaan proyek PLTU Kaltim 2x27,5 MW yang dibukukan sebagai Pekerjaan Dalam Pelaksanaan (PDP). Proyek PLTU Kaltim 2x27,5 MW diestimasikan COD pada bulan Juli tahun 2018.

IRP's Total Asset per December 31, 2017 was Rp1,187 billion, increased at 72.49% from the same in 2016 at Rp688.15 billion, which had included paid-in capital by Indonesia Power at Rp22.96 billion and progress of SPP East Kalimantan 2x27.5 MW that was booked as Work In Progress (WIP). COD estimation of SPP East Kalimantan 2x27.5 MW is in July 2018.

Peningkatan pendapatan, beban dan pendapatan luar usaha IRP tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 dipengaruhi oleh penerapan ISAK 16 Perjanjian Konsesi Jasa atas PJBTL dengan PT PLN (Persero) selama 25 tahun dan PSAK 34 tentang Kontrak Konstruksi.

Increase of operating revenue, expenses, and non-operating revenue of IRP in 2017, in comparison to the same in 2016, was affected by implementation of ISAK 16 on Service Concession Agreement on ESPA (PJBTL) with PT PLN (Persero) for 25 years and PSAK 34 on Construction Contract.

Laba bersih tahun berjalan sebesar Rp65,66 miliar.

Net profit for the year was Rp65.66 billion.

PT Indo Tenaga Hijau* (ITH)

Profil Perusahaan

Sebelumnya, Perusahaan bernama PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (TPGP) yang didirikan tanggal 1 Oktober 2009 berdasarkan Akta No. 2 Notaris Humberg Lie, SH dengan kepemilikan saham saat ini adalah Indonesia Power sebesar 95,2% dan Raser Technology Inc sebesar 4,8%. Raser Technology Inc selanjutnya berganti nama menjadi Cyrq Energy Inc berdasarkan Akta No. 2 Notaris Erni Rohaini, SH tanggal 3 April 2012. TPGP didirikan untuk mengoperasikan PLTP WKP Tangkuban Perahu di Jawa Barat. Pada tahun 2017 terjadi perubahan kepemilikan saham berdasarkan Akta Notaris Hasbullah Abdul Rasyid No.213 tanggal 26 Mei 2017 dimana kepemilikan saham dari Cyrq Energy Inc ke YPK Indonesia Power sebesar 4,8%. Selain itu, TPGP juga mengalami perubahan nama dan bidang usaha berdasarkan Keputusan RUPS tanggal 10 Oktober 2017 yaitu PT Indo Tenaga Hijau (selanjutnya disingkat ITH) dengan bidang usaha menjadi bergerak pada bidang energi baru dan/atau terbarukan, termasuk namun tidak terbatas pada bidang PLTP, PLTS, PLTM, PLTB, PLTGB, PLTBm, PLTBg, PLTSa dan energi terbarukan lainnya.

Company Profile

The Company was previously PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (PTPGP), which was established on October 1, 2009 under Notarial Deed No. 2 by Humberg Lie, S.H., with current share ownership of 95.2% by Indonesia Power and 4.8% and 4.8% by Raser Technology Inc. Raser Technology Inc., then changed its name into Cyrq Energy Inc., under Notarial Deed No. 2 by Erni Rohaini, S.H., dated April 3, 2012. TPGP was established to operate GPP Tangkuban Perahu CWA in East Java. In 2017, there was a change of share ownership under Notarial Deed by Hasbullah Abdul Rasyid No. 213 dated May 26, 2017 declaring transfer of 4.8% of share ownership from Cyrq Energy Inc., to YPK Indonesia Power. In addition, TPGP also changed its name and business sector pursuant to the GMS Resolution on October 10, 2017 where PT Indo Tenaga Hijau (hereinafter "ITH") that engages in new and/or renewable energy business sector, which includes but is not limited to GPP, SPP (Solar), MPP, WPP, CGPP, BmPP, BgPP, WEPP, and other renewable energy.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2017

Structure of the Board of Commissioners in 2017

Jabatan Position		Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Komisaris Utama	President Commissioner	Syah Darwin*	5 Mei 2017 – 30 April 2020 May 5, 2017 – April 30, 2020
Komisaris	Commissioner	Rachmad Handoko**	

* Diangkat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 5 Mei 2017, menggantikan Sdr. Antonius RTA.
** Diangkat sebagai Komisaris sejak tanggal 5 Mei 2017, menggantikan Sdri. Sripeni Inten Cahyani.

* Appointed as President Commissioner since May 5, 2017 to replace Antonius RTA.
** Appointed as Commissioner since May 5, 2017 to replace Sripeni Inten Cahyani.

Jabatan Position		Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama	President Director	Sugeng Triyono	29 Februari 2016 s.d 31 Januari 2019 February 29, 2016 until January 31, 2019
Direktur Operasi	Operation Director	Agoes Danarto	
Direktur Keuangan dan Administrasi	Director of Finance and Administration	Sjafvitri Sari Dewi	

SEKILAS KINERJA ANAK PERUSAHAAN, PERUSAHAAN ASOSIASI DAN PERUSAHAAN PATUNGAN

PERFORMANCE OF SUBSIDIARIES, ASSOCIATED ENTITIES AND JOINT VENTURES IN BRIEF

Kinerja Keuangan Tahun 2017 (USD)

Financial Performance in 2017 (USD)

Keterangan Description		2015	2016	2017	Perubahan 2017 terhadap 2016 (%) Change from 2016 to 2017 (%)
Total Aset	Total Assets	6.599.269	6.733.065	6.589.029	(2,14)
Pendapatan Usaha	Revenues	0	0	0	-
Beban Usaha	Operating Expenses	(531.514)	(153.376)	(223.120)	45,47
Laba (Rugi) Usaha	Operating Profit (Loss)	(546.680)	(304.429)	(215.276)	(29,29)
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	Profit (Loss) for the year	(546.680)	(304.429)	(215.276)	(29,29)

Total aset ITH per 31 Desember 2017 sebesar USD6.589.029 menurun sebesar 2,14% dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar USD6.733.065, dipengaruhi kegiatan usaha terkait dengan pengembangan WKP Tangkuban Parahu untuk sementara dihentikan dikarenakan pada akhir tahun 2016 Ijin atas WKP Tangkuban Parahu dikembalikan kepada Pemerintah.

Peningkatan beban usaha PT ITH menjadi 45,47% pada tahun 2017 sebesar USD223.120 dibandingkan tahun 2016 sebesar USD153.376 disebabkan sejak pengembalian Ijin Panas Bumi pembebanan atas honorarium Direksi yang sebelumnya masuk kedalam post pekerjaan dalam pelaksanaan menjadi dibebankan langsung pada periode berjalan.

Rugi sebelum Pajak Penghasilan tahun 2017 sebesar USD215.276 lebih baik dibandingkan tahun 2016 sebesar USD304.429 dengan upaya efisiensi untuk operasional ITH.

Posisi Rugi bersih tahun berjalan dan jumlah rugi komprehensif tahun berjalan tahun 2017 tercatat sebesar USD215.276.

ITH's total asset per December 31, 2017 was USD6,589,029, decreased at 2.14% in comparison to 2016 at USD6,733,065 due to temporary cessation of business activities related to the development of Tangkuban Parahu CWA as the License for Tangkuban Parahu CWA was returned to the Government in the end of 2016.

Operating expenses of PT ITH increased at 45.47% in 2017 to USD223,120 in comparison to the same in 2016 at USD153,376, as since the returning of Geothermal License imposition of honorarium for Directors, which was previously recorded into Work in Progress, was imposed directly on the current period.

Loss before Income Tax in 2017 was USD215,276, which is smaller than the same in 2016 at USD304,429 due to operational efficiency efforts by ITH.

Net Loss for the year and total amount of comprehensive loss for the year in 2017 were USD215,276.

PT Putra Indotenaga (PIT)

Profil Perusahaan

PT Putra Indotenaga (PIT) berdiri sejak 20 Desember 2013 berdasarkan Akta No. 24 Notaris Muhammad Hanafi, SH dengan kepemilikan saham saat ini adalah Indonesia Power sebesar 99,99% dan YPK Indonesia Power sebesar 0,01%.

Bidang usaha sesuai Anggaran Dasar antara lain menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang ketenagalistrikan, serta penyertaan saham dan kepemilikan participating interest di dalam maupun luar negeri. PIT merupakan anak perusahaan yang ditetapkan sebagai *unrestricted subsidiary* terhadap *indenture covenant global bond* PT PLN (Persero) dalam rangka mendukung pendanaan proyek, antara lain:

1. Penyertaan pada PT Rajamandala Electric Power untuk pengembangan PLTA Rajamandala 47 MW
2. Penyertaan pada PT GCL Indotenaga untuk pengembangan PLTU Kalbar-1 2x100 MW
3. Pernyertaan pada PT Indo Raya Tenaga dalam rangka pengembangan pembangkit di Suralaya PLTU Jawa 9-10 2x1.000 MW

Company Profile

PT Putra Indotenaga (PIT) was established on December 20, 2013 under Notarial Deed No. 24 by Muhammad Hanafi, S.H., with current share ownership of 99.99% by Indonesia Power and 0.01% and 0.01% by Raser Technology Inc.

Company's business sectors according to the Articles of Association include electricity business, share participation and ownership of participating interest both in Indonesia and abroad. PIT is defined as an unrestricted subsidiary to indenture covenant global bond of PT PLN (Persero) in order to support the funding, such as:

1. Equity participation in PT Rajamandala Electric Power for development of HPP Rajamandala 47 MW
2. Equity participation in PT GCL Indo Tenaga for development of SPP West Kalimantan 1 2x100 MW
3. Equity participation in PT Indo Raya Tenaga for power plant development of SPP Java 9-10 2x1,000 MW in Suralaya.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2017

Structure of the Board of Commissioners in 2017

Jabatan Position		Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Komisaris Utama	President Commissioner	Adi Lumakso*	8 Mei 2017 – 30 April 2020 May 8, 2017 – April 30, 2020
Komisaris	Commissioner	Cita Dewi	

* diangkat sebagai Komisaris sejak tanggal 8 Mei 2017, menggantikan Sdri. Sripeni Inten Cahyani.

* Appointed as President Commissioner since May 8, 2017 to replace Sripeni Inten Cahyani.

Jabatan Position		Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama merangkap Direktur Keuangan	President Director and Director of Finance	Hermanugroho	5 Mei 2017 – 30 April 2020 May 5, 2017 – April 30, 2020
Direktur Bisnis Komersial	Director of Business Commercial	Dadang Gumbira I.A	

SEKILAS KINERJA ANAK PERUSAHAAN, PERUSAHAAN ASOSIASI DAN PERUSAHAAN PATUNGAN

PERFORMANCE OF SUBSIDIARIES, ASSOCIATED ENTITIES AND JOINT VENTURES IN BRIEF

Kinerja Keuangan Tahun 2017 (Rp miliar)

Financial Performance in 2017 (Rp billion)

Keterangan Description		2015	2016	2017	Perubahan 2017 terhadap 2016 (%) Change from 2016 to 2017 (%)
Total Aset	Total Assets	273,44	411,99	710,66	72,49
Pendapatan Usaha	Revenues	25,58	10,58	20,79	51,53
Beban Usaha	Operating Expenses	(5,40)	(8,16)	(8,99)	(20,44)
Laba (Rugi) Usaha	Operating Profit (Loss)	20,18	2,42	11,80	387,60
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	Profit (Loss) for the year	15,55	0,94	8,96	853,19
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	Total Comprehensive Income for the Year	29,63	(2,02)	9,82	586,14

Total Aset PIT per 31 Desember 2017 sebesar Rp710,66 miliar meningkat sebesar 72,49% dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar Rp411,99 miliar dikarenakan peningkatan investasi pada ventura bersama yaitu adanya tambahan investasi kepada GCL Indotenaga untuk pengembangan PLTU Kalbar-1 2x100 MW, serta pengakuan piutang atas bunga *shareholder loan* (SHL) PIT kepada Rajamandala Electric Power.

Peningkatan pendapatan PT PIT tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 dipengaruhi oleh penambahan bunga atas SHL PT Rajamandala Electric Power.

Beban usaha atau bagian rugi bersih investasi serta beban lain-lain sebesar Rp8,99 miliar menurun 20,44% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp11,30 miliar dipengaruhi oleh oleh beban bunga SHL dari PT IP yang merupakan sumber pendanaan atas tambahan SHL ke PT Rajamandala Electric Power.

Laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp11,80 miliar meningkat 387,60% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp2,42 miliar.

Laba bersih tahun berjalan sebesar Rp9,82 miliar meningkat 586,14% dibandingkan tahun 2016 yang mengalami kerugian sebesar Rp2,02 miliar.

PIT's Total Asset per December 31, 2017 was Rp710.66 billion, increased at 72.49% in comparison to the same in 2016 at Rp411.99 billion due to increase of investment on joint venture entity, i.e. addition of investment on GCL Indotenaga for the development of SPP West Kalimantan 1 2x100 MW and recognition of shareholder loan (SHL) interest receivable of PIT to Rajamandala Electric Power.

Increase of revenue of PT PIT in 2017, in comparison to 2016, was affected by increase of interest from SHL of PT Rajamandala Electric Power.

Operating expenses or net loss from investment, as well other expenses was Rp8.99 billion, decreased at 20.44% in comparison to 2016 at Rp11.30 billion due to interest expense from SHL of PT IP, which is a source of funding for additional SHL to PT Rajamandala Electric Power.

Profit before income tax was Rp11.80 billion, increased at 387.60% in comparison to the same in 2016 at Rp2.42 billion.

Net profit for the year was Rp9.82 billion, increased at 586.14% in comparison to 2016, which was a loss of Rp2.02 billion.

Perusahaan Asosiasi

Associated Entities

PT Indo Pusaka Berau (IPB)

Profil Perusahaan

PT Indo Pusaka Berau (IPB) adalah perusahaan asosiasi PT Indonesia Power yang berdiri sejak 12 Januari 2005 berdasarkan Akta No.8 Notaris Sukawaty Sumadi, SH dengan kepemilikan saham Indonesia Power sebesar 47%, Pemkab Berau sebesar 49%, dan PT Pusaka Jaya Baru sebesar 4%. IPB memiliki bidang usaha pokok yaitu penyediaan tenaga listrik berupa kegiatan pembangkitan tenaga listrik melalui pengoperasian PLTU Lati 3x7 MW.

Company Profile

PT Indo Pusaka Berau is an associate company of PT Indonesia Power that was established on January 12, 2005 under Notarial Deed No. 8 by Sukawaty Sumadi, S.H., with share ownership of 47% by Indonesia Power, 49% by Government of Berau Regency, and 4% by PT Pusaka Jaya Baru. IPB's main business sector is supply of electricity power in the form of power generation through SPP Lati 3x7 MW operation.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2017

Structure of the Board of Commissioners in 2017

Jabatan Position		Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Komisaris Utama	President Commissioner	Mursalin*	5 Mei 2017 – 30 April 2020 May 5, 2017 – April 30, 2020
Komisaris	Commissioner	Mansyah Kelana**	20 Januari 2017 – 30 April 2019 January 20, 2017 – April 30, 2019

* Diangkat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 5 Mei 2017 menggantikan Sdr. Eri Prabowo.
** Diangkat sebagai Komisaris sejak tanggal 20 Januari 2017 menggantikan Sdr. Syamsul Abidin.

* Appointed as President Commissioner since May 5, 2017 to replace Eri Prabowo.
* Appointed as Commissioner since January 20, 2017 to replace Syamsul Abidin.

Jabatan Position		Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama	President Director	Najemuddin	29 April 2016 – 31 Maret 2019 April 29, 2016 – March 31, 2019
Direktur Operasi	Operation Director	Mulyono	
Direktur Keuangan dan Administrasi	Director of Finance and Administration	Edy Prasetyo	

SEKILAS KINERJA ANAK PERUSAHAAN, PERUSAHAAN ASOSIASI DAN PERUSAHAAN PATUNGAN

PERFORMANCE OF SUBSIDIARIES, ASSOCIATED ENTITIES AND JOINT VENTURES IN BRIEF

Kinerja Keuangan Tahun 2017 (Rp miliar)

Financial Performance in 2017 (Rp billion)

Keterangan Description		2015*)	2016	2017	Perubahan 2017 terhadap 2016 (%) Change from 2016 to 2017 (%)
Total Aset	Total Assets	302,88	286,04	321,63	12,44
Pendapatan Usaha	Revenues	102,59	105,41	97,53	(7,48)
Beban Usaha	Operating Expenses	(82,15)	(84,66)	(95,65)	12,98
Laba (Rugi) Usaha	Operating Profit (Loss)	20,44	20,75	1,88	(90,94)
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	Profit (Loss) for the year	11,94	13,16	13,34	1,37
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	Total Comprehensive Income for the Year	11,20	13,99	12,45	(11.01)

*) Laporan keuangan tahun 2015 disajikan kembali, sehubungan rekonsiliasi utang piutang dengan Berau Coal atas harga pembelian batubara yang dilakukan peninjauan kembali atas harga tahun 2012-2015.

*) The 2015 financial statement was restated due to debts reconciliation with Berau Coal for coal purchase with review on the 2012-2015 price.

Total Aset IPB per 31 Desember 2017 sebesar Rp321,63 miliar mengalami peningkatan 12,44% dibandingkan tahun 2016, yaitu sebesar Rp286,04 miliar yang dipengaruhi oleh peningkatan piutang usaha penjualan tenaga listrik ke PT Berau Coal dan PT PLN (Persero).

Pendapatan usaha sebesar Rp97,53 miliar menurun 7,48% dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar Rp105,41 miliar dipengaruhi oleh penurunan penjualan tenaga listrik dibandingkan tahun 2016.

Beban usaha sebesar Rp95,65 miliar meningkat sebesar 12,98% dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar Rp84,66 miliar dipengaruhi oleh peningkatan nilai Royalti Batubara PT Berau Coal.

Laba usaha sebesar Rp1,88 miliar menurun sebesar 90,94% dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar Rp20,75 miliar.

Laba bersih tahun berjalan tercatat sebesar Rp12,45 miliar menurun 11,01% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp13,99 miliar.

IPB's Total Asset per December 31, 2017 was Rp321.63 billion, increased at 12.44% in comparison to the same in 2016 at Rp286.04 billion due to increase of receivables from sale of electricity to PT Berau Coal and PT PLN (Persero).

The operating revenue was Rp97.53 billion, decreased at 7.48% in comparison to the same in 2016 at Rp105.41 billion due to decrease of sale of electricity in comparison to 2016.

The operating expense was Rp95.65 billion, increased at 12.98% in comparison to the same in 2016 at Rp84.66 billion due to increase of Coal Royalty from PT Berau Coal.

Operating Profit of Rp1.88 billion decreased at 90.94% in comparison to the same in 2016 at Rp20.75 billion.

Net profit for the year was Rp12.45 billion, decreased at 11.01% from the same in 2016 at Rp13.99 billion.

PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLNSC)

Profil Perusahaan

PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLNSC) merupakan perusahaan patungan yang didirikan oleh PT Pembangkitan Jawa Bali dan PT Indonesia Power yang berdasarkan Akta Pendirian No. 05 tanggal 16 Juni 2017 dihadapan Ny. Ni Putu Ayunita Waspuri Notaris di Surabaya, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Nomor AHU-0030040. AH.01.01 tanggal 14 Juli 2017. Kepemilikan PLNSC saat ini adalah PT Pembangkitan Jawa Bali sebesar 51% dan PT Indonesia Power sebesar 49%.

Bidang usaha sesuai Anggaran Dasar antara lain:

- Perdagangan barang dan jasa berhubungan ketenagalistrikan,
- Usaha bidang *reverse engineering* bidang industri ketenagalistrikan,
- Usaha dalam bidang jasa *e-commerce* di bidang *suply chain management* pada industri pembangkitan tenaga listrik,
- Usaha dalam bidang jasa konsultan berhubungan dengan ketenagalistrikan.

Company Profile

PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLNSC) is a joint venture company between PT Pembangkitan Jawa Bali and PT Indonesia Power, that was established under Notarial Deed No. 05 dated June 16, 2017 by Ni Putu Ayunita Waspuri, a Notary in Surabaya, and has obtained ratification from the Minister of Law and Human Rights as stated in Decree No. AHU-0030040. AH.01.01 dated July 14, 2017. PLNSC ownership is currently held by PT Pembangkitan Jawa-Bali with 51% shares and PT Indonesia Power with 49% shares.

Its business sector in accordance with the Articles of Association includes:

- Trading of goods and services related to electricity.
- Reverse engineering business in electricity industry,
- e-commerce service business in supply chain management in power generation industry,
- Consultant service business related to electricity.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2017

Structure of the Board of Commissioners in 2017

Jabatan Position		Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Komisaris	Commissioner	Sulaiman Daud	16 Juni 2017 – 16 Juni 2020 June 16, 2017 – June 16, 2020

Jabatan Position		Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama merangkap Direktur Keuangan	President Director and Director of Finance	Deni Susanto	16 Juni 2017 – 16 Juni 2020 June 16, 2017 – June 16, 2020
Direktur Enjineering & Layanan	Director of Engineering & Services	I Gusti Ngurah Agung Suryanegara	

SEKILAS KINERJA ANAK PERUSAHAAN, PERUSAHAAN ASOSIASI DAN PERUSAHAAN PATUNGAN

PERFORMANCE OF SUBSIDIARIES, ASSOCIATED ENTITIES AND JOINT VENTURES IN BRIEF

Kinerja Keuangan Tahun 2017 (Rp miliar)

Financial Performance in 2017 (Rp billion)

Keterangan Description		2016	2017	Perubahan 2017 terhadap 2016 (%) Change from 2016 to 2017 (%)
Total Aset	Total Assets	-	150,76	-
Pendapatan Usaha	Revenues	-	0,89	-
Beban Usaha	Operating Expenses	-	(0,13)	-
Laba (Rugi) Usaha	Operating Profit (Loss)	-	0,76	-
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	Profit (Loss) for the year	-	0,76	-

Total Aset pada tahun 2017 yang sebesar Rp150,76 miliar didominasi oleh modal saham ditempatkan dan disetor sejumlah Rp150 miliar, sedangkan sisanya merupakan saldo laba (akumulasi kerugian).

Pada tahun 2017, PLNSC membukukan pendapatan sebesar Rp885 juta yang berasal dari penghasilan bunga.

Beban usaha sebesar Rp126 juta merupakan beban administrasi dan umum.

Laba yang dibukukan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp759 juta.

Total Asset in 2017 was Rp150.76 billion, which was dominated by issued capital and paid-in capital of Rp150 billion and the remaining amount consisted of retained earnings (accumulation of losses).

In 2017, PLNSC gained revenue of Rp885 million from interest income.

Operating expenses of Rp126 million consisted of administration and general expenses.

Profit in 2017 was Rp759 million.

Perusahaan Patungan

Joint Venture Companies

PT Perta Daya Gas (PDG)

Profil Perusahaan

PT Perta Daya Gas (PDG) adalah perusahaan patungan (*joint venture*) antara Indonesia Power dengan PT Pertamina Gas yang didirikan berdasarkan Akta No. 60 Notaris Marianne Vincentia Hamdani SH tanggal 26 April 2012 dengan kepemilikan saham saat ini adalah Indonesia Power sebesar 35% dan PT Pertamina Gas sebesar 65%.

Bidang usaha sesuai Anggaran Dasar antara lain menjalankan usaha di bidang LNG, Penyimpanan dan regasifikasi, serta transportasi LNG. Kegiatan usaha PDG saat ini mengoperasikan CNG Plant Tambak Lorok Semarang. Berdasarkan keputusan RUPS tanggal 23 Oktober 2017 PDG mengalami perubahan kedudukan atau domisili, yang semula di Patra Office Tower Jakarta pindah ke Semarang dan operasional kantor efektif di awal tahun 2018.

Company Profile

PT Perta Daya Gas (PDG) is a joint venture company between Indonesia Power and PT Pertamina Gas, which was established under Notarial Deed No. 60 by Marianne Vincentia Hamdani S.H., on April 26, 2012 with current share ownership of 35% by Indonesia Power and 65% by PT Pertamina Gas.

Its business sector according to the Articles of Association includes LNG business, Storage and regasification, and LNG transportation. PDG currently engages in the operation business of Tambak Lorok CNG Plant in Semarang. In accordance with the GMS resolution on October 23, 2017, PDG had changed its domicile from Patra Office Tower Jakarta to Semarang, and the office begins its commercial operation in the beginning of 2018.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2017

Structure of the Board of Commissioners in 2017

Jabatan Position		Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Komisaris Utama	President Commissioner	Hot Martua Bakara*	4 Mei 2017 – 4 Mei 2020 May 4, 2017 – May 4, 2020
Komisaris	Commissioner	Amir Harahap**	30 Maret 2017 – 30 Maret 2020 March 30, 2017 – March 30, 2020

* Diangkat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 4 Mei 2017 menggantikan Sdr. Antonius RTA.
** Diangkat sebagai Komisaris sejak tanggal 30 Maret 2017 menggantikan Sdr. Ahmad Kudus.

* Appointed as President Commissioner since May 4, 2017 to replace Antonius RTA.
* Appointed as Commissioner since March 30, 2017 to replace Ahmad Kudus.

Jabatan Position		Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama	President Director	*Vacant*	–
Direktur Keuangan dan Administrasi	Director of Finance and Administration	Riyanto I.U. Siregar	1 Agustus 2015 – 31 Juli 2018 August 1, 2015 – July 31, 2018
Direktur Operasi	Operation Director	*Vacant*	–

SEKILAS KINERJA ANAK PERUSAHAAN, PERUSAHAAN ASOSIASI DAN PERUSAHAAN PATUNGAN

PERFORMANCE OF SUBSIDIARIES, ASSOCIATED ENTITIES AND JOINT VENTURES IN BRIEF

Kinerja Keuangan Tahun 2017 (USD)

Financial Performance in 2017 (USD)

Keterangan Description		2015	2016	2017	Perubahan 2017 terhadap 2016 (%) Change from 2016 to 2017 (%)
Total Aset	Total Assets	64.955.692	59.459.943	53.250.205	(10,44)
Pendapatan Usaha	Revenues	7.951.799	12.842.412	12.469.152	(2,91)
Beban Usaha	Operating Expenses	(5.670.187)	(8.525.314)	(8.275.516)	(2,93)
Laba (Rugi) Usaha	Operating Profit (Loss)	2.281.612	4.317.098	4.193.636	(2,86)
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	Profit (Loss) for the year	(1.643.445)	156.508	643.793	311,35

Total Aset PDG per 31 Desember 2017 sebesar USD53.250.205 menurun 10,44% dibandingkan 2016 yang sebesar USD59.459.944 dikarenakan depresiasi atas CNG Plant.

Pada tahun 2017, PDG membukukan pendapatan usaha sebesar USD12.469.152 juta menurun 2,91% dibandingkan tahun 2016 yang sebesar USD12.842.412 atas pendapatan CNG Plant Tambak Lorok untuk memasok kebutuhan gas PLTGU Tambak Lorok Semarang pada saat beban puncak.

Beban usaha sebesar USD8.275.516 menurun 2,93% dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar USD8.525.314 terutama dikontribusi oleh beban depresiasi atas CNG Plant.

Pada tahun 2017, PDG membukukan laba usaha sebesar USD4.193.636 karena peningkatan pendapatan.

PDG's Total Asset per December 31, 2017 was USD53,250,205, decreased at 10.44% from the same in 2016 at USD59,459,944 due to depreciation of CNG Plant.

In 2017, PDG gained operating revenue of USD12,469,152, decreased at 2.91% from the same in 2016 at USD12,842,412 as the revenue from Tambak Lorok CNG Plant was used to provide gas supply to GSPP Tambak Lorok in Semarang during its peak load.

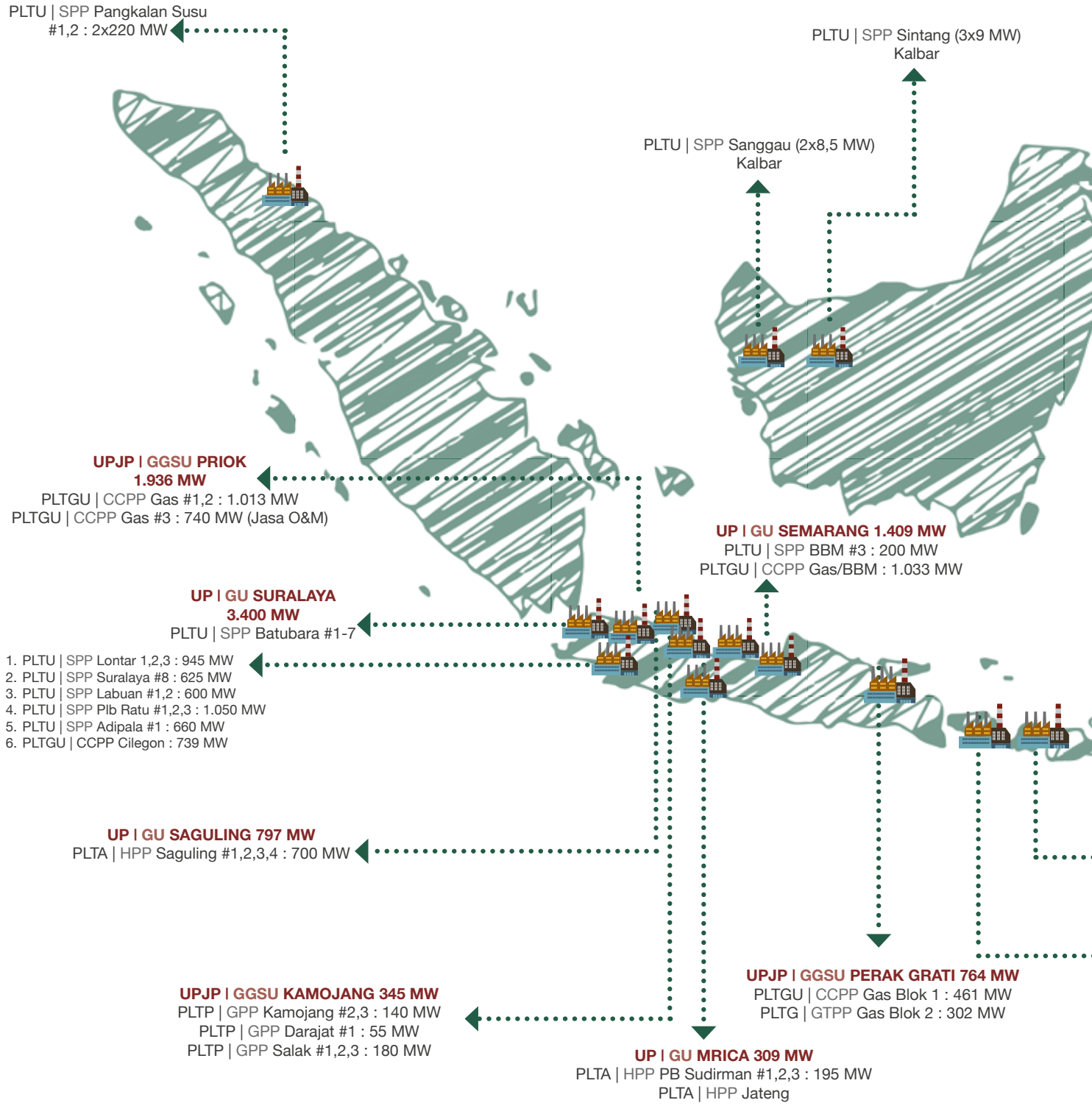
Operating expenses of USD8,275,516 decreased at 2.93% in comparison to the same in 2016 at USD8,523,314, mainly due to contribution of expense depreciation from the CNG Plant.

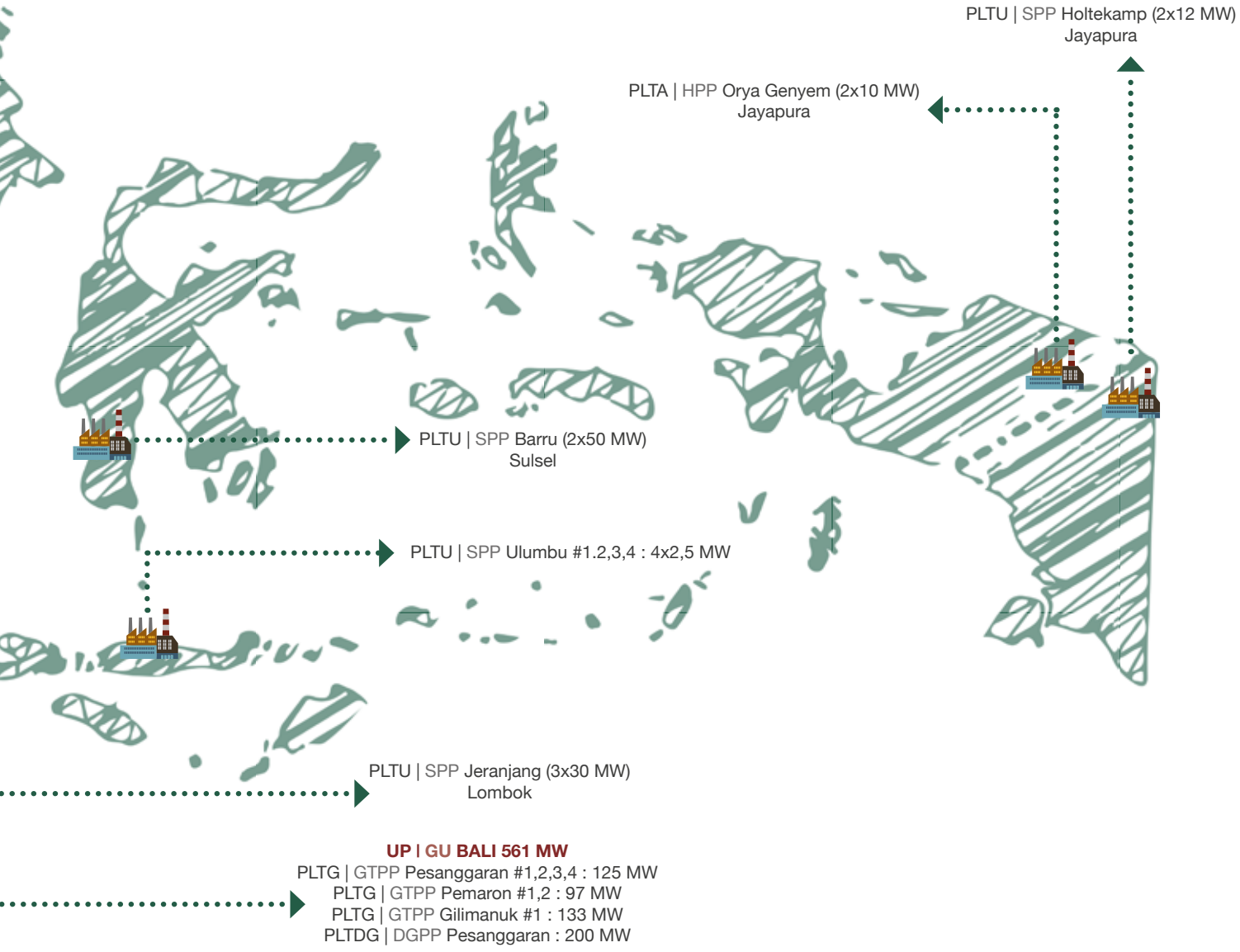
In 2017, PDG gained an operating revenue of USD4,193,636 due to increase of revenue.



PETA WILAYAH OPERASIONAL PERUSAHAAN

WORK AREA OF INDONESIA POWER




PLTU | SPP Holtekamp (2x12 MW)
Jayapura
PLTA | HPP Orya Genyem (2x10 MW)
Jayapura
PLTU | SPP Barru (2x50 MW)
Sulsel
PLTU | SPP Ulumbu #1.2,3,4 : 4x2,5 MW
PLTU | SPP Jeranjang (3x30 MW)
Lombok
UP I GU BALI 561 MW
PLTG | GTPP Pesanggaran #1,2,3,4 : 125 MW
PLTG | GTPP Pemaron #1,2 : 97 MW
PLTG | GTPP Gilimanuk #1 : 133 MW
PLTDG | DGPP Pesanggaran : 200 MW

PETA WILAYAH OPERASIONAL PERUSAHAAN

WORK AREA OF INDONESIA POWER

Daftar Alamat Unit Indonesia Power — Addresses of Indonesia Power Units

Unit Pembangkitan (UP) I Generating Unit (GU)	
Unit Pembangkitan Suralaya (UP SLA) Suralaya Generating Unit (SLA GU)	Jl. Raya PLTU Suralaya PO Box 15 Cilegon Banten 42439, Indonesia Telp : (62-254) 571 230, 571 240, 571 242 Faks : (62-254) 571 235
Unit Pembangkitan Saguling (UP SGL) Saguling Generating Unit (SGL GU)	Komplek PLN Cioray, Tromol Pos No. 7 Rajamandala, Kab. Bandung 40554 Kode pos 40754 Telp : (62-22) 690 3497, 6903489 Faks : (62-22) 690 3613
Unit Pembangkitan Mrica (UP MRC) Mrica Generating Unit (MRC GU)	Jl. Raya Banyumas KM. 8, Kotak Pos 38 Banjarnegara 53471, Indonesia Telp : (62-286) 597 081 Faks : (62-286) 597 044, 597 100
Unit Pembangkitan Semarang (UP SMG) Semarang Generating Unit (SMG GU)	Jl. Ronggowarsito,Komplek Pelabuhan Tanjung Emas Semarang 50127, Indonesia Telp : (62-24) 3518371 (Hunting) Faks : (62-24) 3546835
Unit Pembangkitan Bali (UP Bali) Bali Generating Unit (Bali GU)	Jl. Brigjen I.G. Ngurah Rai Pesanggaran, Denpasar 80001, Bali, Indonesia Telp : (62-361) 720 421, 720 422 Faks : (62-361) 720 519
Unit Pembangkitan dan Jasa Pembangkitan I Generating and Generating Service Unit	
Unit Pembangkitan dan Jasa Pembangkitan Priok (UPJP Priok) Priok Generating and Generating Service Unit (Priok GGSU)	Jl. Laks. R.E. Martadinata Jakarta 14310, Indonesia Telp : (62-21) 4353 9114 - 19 (Hunting) Faks : (62-21) 4393 6461
Unit Pembangkitan dan Jasa Pembangkitan Kamojang (UPJP KMJ) Kamojang Generating and Generating Service Unit (KMJ GGSU)	Jl. Komplek Perumahan, PLTP Kamojang Kotak Pos 125 Garut 44101, Indonesia Telp : (62-22) 780 5475 - 780 4478 Faks : (62-22) 7801013 - 7805469
Unit Pembangkitan dan Jasa Pembangkitan Perak Grati (UPJP PGT) Perak Grati Generating and Generating Service Unit (PGT GGSU)	Jl. Raya Surabaya – Probolinggo Km.73 PO BOX 11, Grati 67184, Desa Wates, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan Telp : (62-343) 413 582, 413 583 Faks : (62-343) 413 693, 413 524, 425 588

Unit Jasa Pembangkitan I Generating Services Unit	
Unit Jasa Pembangkitan PLTU Banten 1 Suralaya (UJP BSR) Banten 1 Suralaya Generating Service Unit SPP (BSR GSU)	Gedung Ex. Pengembangan Usaha Komplek PLTU Suralaya-PO. Box. 15 Cilegon, Merak Banten Telp : (62-254) 570 402 Faks : (62-254) 571 869
Unit Jasa Pembangkitan PLTU Banten 2 Labuan (UJP BLB) Banten 2 Labuan Generating Service Unit SPP (BLB GSU)	Jl. Laba Terusan Panimbang Desa Sukamaju Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang, Banten 42246 Telp : (62-253) 803 312, 805 015
Unit Jasa Pembangkitan PLTU Banten 3 Lontar (UJP BLT) Banten 3 Lontar Generating Service Unit SPP (BLT GSU)	Jl. Ir. Sutami Desa Lontar Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang, Banten Telp : (62-21) 5939 0660 Faks : (62-21) 5939 0659
Unit Jasa Pembangkitan PLTU Jawa Barat 2 Palabuhan Ratu (UJP JPR) Jawa Barat 2 Palabuhan Ratu Generating Service Unit SPP (JPR GSU)	Jalan Pelita Desa Jayanti, Kecamatan Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Telp : (62-266) 434 192 Faks : (62-266) 644 1111
Unit Jasa Pembangkitan PLTU Jawa Tengah 2 Adipala (UJP ADP) Jawa Tengah 2 Adipala Generating Service Unit SPP (ADP GSU)	Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53271 Telp : (62-282) 525 9647 Faks : (62-282) 526 4037
Unit Jasa Pembangkitan PLTU Pangkalan Susu (UJP PNS) Pangkalan Susu Generating Service Unit SPP (PNS GSU)	PLN Pangkalan Susu, Dusun 6, Desa Tanjung pasir, Kec Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara 20858
Unit Jasa Pembangkitan PLTU Barru (UJP BRU) Barru Generating Service Unit SPP (BRU GSU)	Dusun Bawasalo, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan
Unit Jasa Pembangkitan PLTU Jeranjang (UJP JRJ) Jeranjang Generating Service Unit SPP (JRJ GSU)	Jalan Raya PLTU Jeranjang, Dusun Jeranjang, Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat
Unit Jasa Pembangkitan PLTGU Cilegon (UJP CLG) Cilegon Generating Service Unit CCPP (CLG GSU)	Jalan Raya Bojonegara Salira Desa Margasari Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang Telp : (62-254) 575 1555, 575 1444 Faks : (62-254) 575 1501
Unit Jasa Pembangkitan PLTU Sanggau (UJP SGU) Sanggau Generating Service Unit SPP (SGU GSU)	Desa Sungai Batu, Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat
Unit Jasa Pembangkitan PLTU Haultekamp (UJP HTC) Holtekamp Generating Service Unit SPP (HTC GSU)	Jl. Hanurata KM. 9, Kampung Holtekamp, District Muaratami, Kota Jayapura, Papua
Unit Jasa Pemeliharaan I Maintenance Service Unit	
Unit Jasa Pemeliharaan (UJH) Maintenance Services Unit (MSU)	Jl. Aipda K.S. Tubun No. 8, Jakarta Pusat 11420 Telp : (62-21) 563 8666 Faks : (62-21) 563 8622

SINERGI DALAM GRUP INDONESIA POWER
SYNERGY IN INDONESIA POWER GROUP

Selama tahun 2017, Indonesia Power memiliki hubungan dengan sejumlah perusahaan afiliasi yaitu perusahaan yang berada di bawah grup Indonesia Power dan PT PLN (Persero). Adapun kerjasama dan penggunaan jasa diantara Anak Perusahaan, Perusahaan Patungan dan Perusahaan Asosiasi dalam Indonesia Power dan PLN Grup dapat dilihat pada tabel berikut:

In 2017 Indonesia Power was in established commitments with a number of affiliates, i.e. companies under the Indonesia Power and PT PLN (Persero) Group. The collaboration and utilization of services among the Subsidiaries, Joint Ventures, and Associates in Indonesia Power and PLN Group Power are shown in the following table:

No.	Nama Perusahaan Company Name	Bentuk Sinergi Synergy	
ANAK PERUSAHAAN | **SUBSIDIARY**			
1	PT Cogindo DayaBersama	Penyediaan tenaga listrik bagi PT PLN (Persero) melalui PLTD Batakan dan Sewa Genset, serta mendukung Indonesia Power dalam bidang jasa O&M, *Maintenance, Repair and Overhaul* (MRO) dan *Stockiest*.	Electricity supply for PT PLN (Persero) via DPP Batakan and Generator Rent, as well as supporting Indonesia Power in O&M Services; Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO); and Stockist
2	PT Artha Daya Coalindo	Penyediaan batubara serta pengelolaan *port management* bagi Indonesia Power	Coal supply and port management for Indonesia Power
3	PT Indo Ridlatama Power	Pengembangan PLTU mulut tambang 2x27,5 MW di Muara Jawa Kalimantan Timur	Development of SPP Mulut Tambang 2x2.75 MW in Muara Jawa, East Kalimantan
4	PT Putra Indotenaga	Mendukung Indonesia Power dalam mengembangkan pembangkit melalui *participating interest* – sebagai Anak Perusahaan yang ditetapkan *unrestricted* terhadap *Indenture Covenant Global Bond*, untuk keperluan pendanaan proyek, dengan kegiatan usaha: a. Penyertaan pada PT Rajamandala Electric Power untuk pengembangan PLTA Rajamandala 47 MW b. Penyertaan pada PT GCL Indo Tenaga untuk pengembangan PLTU Kalbar 2x100 MW c. Penyertaan pada PT Indo Raya Tenaga untuk pengembangan PLTU Jawa 9 dan 10 berkapasitas 2x1000 MW	Supporting Indonesia Power in developing power plants as participating interest - as an unrestricted Subsidiary toward Indenture Covenant Global Bond, for the funding of projects, with the lines of business: a. Investment in PT Rajamandala Electric Power for the development of HPP Rajamandala 47 MW b. Investment in PT GCL Indo Tenaga for the development of SPP West Kalimantan 2x100 MW c. Investment in PT Indo Raya Tenaga for the development of SPP Java 9 and 10 of capacity 2x1000 MW
5	PT Indo Tenaga Hijau	Mendukung Indonesia Power dalam mengembangkan bisnis energi baru dan terbarukan.	Supporting Indonesia Power in developing business in new and renewable energy.
PERUSAHAAN PATUNGAN | **JOINT VENTURE**			
6	PT Perta Daya Gas	Mendukung Indonesia Power dalam penyediaan CNG *Plant* Tambak Lorok	Supporting Indonesia Power in CNG supply for Plant Tambak Lorok
PERUSAHAAN ASOSIASI | **ASSOCIATED ENTITY**			
7	PT Indo Pusaka Berau	Kontrak penyediaan tenaga listrik PLTU Kaltim 3x7 MW dengan PT PLN (Persero) Wilayah Kaltimra sejak tahun 2005.	Electricity Supply Contract for SPP East Kalimantan 3x7 MW with PT PLN (Persero) Wilayah Kaltimra since 2005.
8	PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang	Penyediaan suku cadang dan *stockist* bagi pembangkit yang dikelola dan dimiliki oleh Indonesia Power	Spare parts supply and stockist for power plants managed and owned by Indonesia Power
AFILIASI DARI ANAK PERUSAHAAN | **AFFILIATE OF SUBSIDIARY**			
9	PT Rajamandala Electric Power	Mendukung pengembangan pembangkit Indonesia Power melalui pengembangan PLTA Rajamandala 47 MW	Supporting the development of Indonesia Power plants through the development of HPP Rajamandala 47 MW
10	PT GCL Indo Tenaga	Mendukung pengembangan pembangkit Indonesia Power melalui pengembangan PLTU Kalbar 2x100 MW	Supporting the development of Indonesia Power plants through the development of SPP West Kalimantan 2x100 MW
11	PT Indo Raya Tenaga	Mendukung pengembangan pembangkit Indonesia Power melalui pengembangan PLTU Jawa 9 dan 10 berkapasitas 2x1.000 MW	Supporting the development of Indonesia Power plants through the development of SPP Java 9 and 10 at the capacity of 2x1,000 MW

LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PERUSAHAAN
COMPANY-SUPPORTING PROFESSIONAL INSTITUTIONS

Kantor Akuntan Publik
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM)
RSM INDONESIA
Plaza ASIA Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia
Tel : +62 21 514 01340
Fax : +62 21 514 01350

Konsultan Hukum
Nah'r Murdono Law Office
Mitra Building Lantai 9 Suite 902
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21, Jakarta 12930
Tel : +62 21 522 00278
Fax : +62 21 522 0029

UMBRA Partnership
Telkom Landmark Tower, Tower 2, Lantai 49
Jl. Jend Gatot Subroto kav. 52, Jakarta

Prof. Oemar Senoadji
Jl. Tulodong Bawah Blok B3, Jakarta

Mulyana & Daroe
Gedung Graha Iskandarsyah Lantai 10
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Notaris
Lenny Janis Ishak, SH
Graha MIK Lantai 5
Jl. Hang Lekir IX No. 1, Jakarta 12120
Tel : +62 21 7221077
Fax : +62 21 7233855

Lembaga Pemerintah
Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (TP4P, TP4D dan Jamdatun)
Jl. Sultan Hasanuddin No.1
Kebayoran Baru Jakarta Selatan - Indonesia
Tel : +62 21 722 1269
Email : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id

Konsultan GCG
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Jl. Pramuka No 33 Jakarta Timur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13120

Komisi Pengawas
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)
Jl. Ir. H. Juanda 36
Jakarta 10120 Indonesia
Tel : +62 21 350 7015, 350 7016, 350 7043
Fax : +62 21 350 7008

Public Accounting Firm
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM)
RSM INDONESIA
Plaza ASIA Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia
Tel : +62 21 514 01340
Fax : +62 21 514 01350

Legal Consultant
Nah'r Murdono Law Office
Mitra Building 9th Floor Suite 902
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21, Jakarta 12930
Tel : +62 21 522 00278
Fax : +62 21 522 0029

UMBRA Partnership
Telkom Landmark Tower, Tower 2, 49th Floor
Jl. Jend Gatot Subroto kav. 52, Jakarta

Prof. Oemar Senoadji
Jl. Tulodong Bawah Blok B3, Jakarta

Mulyana & Daroe
Gedung Graha Iskandarsyah 10th Floor
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Notary
Lenny Janis Ishak, SH
Graha MIK 5th Floor
Jl. Hang Lekir IX No. 1, Jakarta 12120
Tel : +62 21 7221077
Fax : +62 21 7233855

Government Institutions
Assistant Attorney General for Civil and State Administrative Cases (TP4P, TP4D dan Jamdatun)
Jl. Sultan Hasanuddin No.1
Kebayoran Baru Jakarta Selatan - Indonesia
Tel : +62 21 722 1269
Email : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id

GCG Consultant
Finance and Development Supervision Body (BPKP)
Jl. Pramuka No 33 Jakarta Timur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13120

Supervisory Commission
Business Competition Supervisory Commission (KPPU)
Jl. Ir. H. Juanda 36
Jakarta 10120 Indonesia
Tel : +62 21 350 7015, 350 7016, 350 7043
Fax : +62 21 350 7008

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM
SHARE LISTING CHRONOLOGY

Sampai dengan tahun 2017, Indonesia Power belum pernah mencatatkan saham di Bursa Saham, sehingga tidak ada informasi terkait kronologis pencatatan, jenis tindakan korporasi (*corporate action*), perubahan jumlah saham, maupun nama bursa.

As of 2017, Indonesia Power has never listed its securities on the Stock Exchange, therefore there are no information regarding the listing chronology, corporate action, changes in security value, or the name of the stock exchange.



KRONOLOGIS PENCATATAN EFEK LAINNYA
OTHER SECURITIES LISTING CHRONOLOGY

Pada bulan September tahun 2017, Indonesia Power telah melakukan sekuritisasi Efek Beragun Aset (EBA) sehingga terdapat informasi terkait kronologis pencatatan efek, jenis tindakan korporasi, perubahan jumlah efek, nama bursa maupun peringkat efek.

Indonesia Power sebagai anak perusahaan PT PLN (Persero) ("PLN") yang bergerak dalam bidang pembangkitan tenaga listrik, melakukan sekuritisasi Efek Beragun Aset (EBA) dengan nama EBA Danareksa Indonesia Power PLN1-Piutang Usaha ("EBA DIPP1"). Pada tahap pertama, nilai EBA yang ditawarkan adalah sebesar Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah) dengan aset dasar disekuritisasi adalah aset keuangan yang merupakan bagian dari piutang penjualan ketenagalistrikan PLTU Suralaya Unit 1 - 4. Penerbitan EBA DIPP1 dilakukan seiring dengan rencana strategis Indonesia Power untuk melakukan sekuritisasi EBA sebanyak-banyaknya Rp10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun Rupiah), dan akan dilakukan secara bertahap, sebagai salah satu sumber pendanaan mendukung program 35.000 MW.

EBA DIPP 1 ini diterbitkan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif, sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Danareksa Indonesia Power PLN 1 - Piutang Usaha No. 78 Tanggal 25 April 2017 *Jis*. Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Danareksa Indonesia Power PLN 1 - Piutang Usaha No. 07 Tanggal 01 Agustus 2017 dan Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Danareksa Indonesia Power PLN 1 - Piutang Usaha No. 31 tanggal 14 September 2017, ketiganya dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta ("KIK-DIPP1"), antara PT Danareksa *Investment Management* selaku Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Bank Kustodian.

EBA DIPP 1 ini yang diagunkan adalah piutang PLN untuk komponen A atas Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) Suralaya Unit 1-4. Terdapat 2 (dua) nilai yang diterbitkan yaitu:
1. EBA kelas A senilai Rp3,688 triliun yang ditawarkan melalui Penawaran Umum, dan
2. EBA kelas B senilai Rp312 miliar yang ditawarkan melalui Penawaran Terbatas.

In September 2017 Indonesia Power has performed asset securitization (Asset-backed Securities), and therefore information on security listing chronology, corporate action, changes in security value, the name of the stock exchange, and the security rating are available.

Indonesia Power as the subsidiary of PT PLN (Persero) ("PLN") engaging in electricity generation performed asset securitization (Asset-backed Securities) entitled EBA Danareksa Indonesia Power PLN1-Piutang Usaha ("EBA DIPP1"). In the first phase, the offered EBA was amounting to Rp4,000,000,000,000 (four trillion Rupiah) with securitized financial asset as the part of electricity sale receivable of SPP Suralaya Units 1-4. The EBA DIPP1 was issued along with Indonesia Power's strategic plan to perform asset securitization at the maximum Rp10,000,000,000,000 (ten trillion Rupiah), which would be performed gradually, as a source of funding to support the 35,000 MW program.

EBA DIPP1 was issued according to Collective Investment Contract as contained in Deed of Collective Investment Contract Asset-backed Security Danareksa Indonesia Power PLN 1 - Trade Receivables No. 78 dated April 25, 2017 Jis. Deed of Addendum of Collective Investment Contract Asset-backed Security Danareksa Indonesia Power PLN 1 - Trade Receivables No. 7 dated August 1, 2017 and Deed of Addendum I of Collective Investment Contract Asset-backed Security Danareksa Indonesia Power PLN 1 - Trade Receivables No. 31 dated September 14, 2017, all made before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta ("KIK-DIPP1"), between PT Danareksa Investment Management as Investment Manager and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as Custodian.

PLN receivable for Component A for Electricity Sale and Purchase Agreement (PJBTL) Suralaya Unit 1-4 is collateralized in the EBA DIPP 1. There are two issued values, i.e.
1. EBA Class A amounting to Rp3.688 trillion offered through Public Offering, and
2. EBA Class B amounting to Rp312 billion offered through Limited Offering.

KRONOLOGIS PENCATATAN EFEK LAINNYA

CHRONOLOGY OF OTHER SECURITIES LISTING

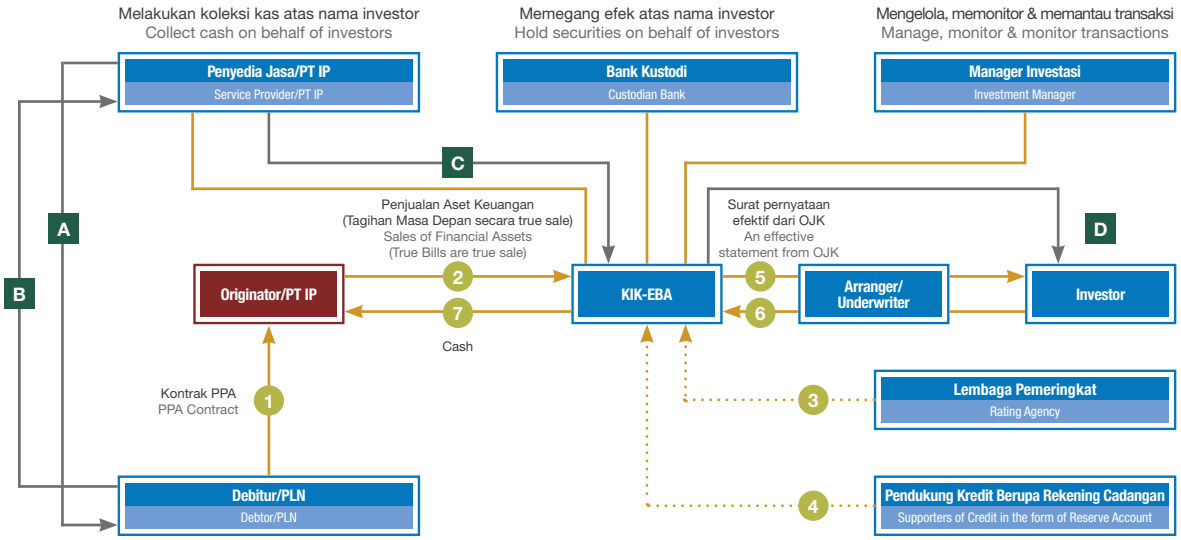
Jangka waktu EBA pada tahap pertama ini selama 5 tahun. Kupon yang diterbitkan untuk EBA ini sebesar 8,25%. Struktur pembayaran untuk EBA adalah skema *pass-through* yaitu seluruh pendapatan EBA akan dibayarkan ke investor berdasarkan urutan dalam Kontrak Investasi Kolektif (*waterfall*). Indonesia Power akan membayar pengembalian kepada KIK-EBA setiap bulan sekali, dan dari KIK-EBA akan membayar pengembalian kepada pihak investor setiap 3 bulan sekali.

The first EBA is valid for five years. The yield for this EBA is 8.25%. The EBA uses pass-through payment scheme where all EBA revenues are paid to investor according to the sequence in the Collective Investment Contract (waterfall). Indonesia Power will repay KIK-EBA once every month, and the KIK-EBA will repay the investor once every three months.

STRUKTUR I STRUCTURE		
Produk I **Product**	EBA DIPP (Danareksa Indonesia Power PLN) I	EBA DIPP (Danareksa Indonesia Power PLN) I
Underlying	Piutang Kompinen A PJBTL PLTU Suralaya 1-4	Receivables of Component A PJBTL SPP Suralaya 1-4
Nilai I **Value**	1. Kelas A: Rp3,688 triliun; dan 2. Kelas B: Rp312 miliar	1. Class A: Rp3.688 trillion; and 2. Class B: Rp312 billion
Tenor I **Tenure**	5 (lima) tahun	5 (five) years
Yield	8,25%	8.25%
Rating	idAAA (PEFINDO) untuk EBA Kelas A	idAAA (PEFINDO) for EBA Class A
Struktur Pembayaran **Payment Structure**	Skema *pass-through*, seluruh pendapatan EBA dibayarkan ke investor berdasarkan urutan dalam KIK (*waterfall*). Dibayarkan setiap 3 bulanan	Pass-through scheme, all EBA revenues paid to investor based on sequence in KIK (waterfall). Paid every three months
Alternatif Rencana Penggunaan Dana **Alternative Fund Use Plan**	1. PLTU Suralaya 2x1.000 MW; 2. Mobile Power Plant ; 3. PLTU Kaltim 3; 4. PLTU Jambi 2x300MW; dan 5. Proyek pengembangan usaha lainnya yang potensial dan ditetapkan Direksi	1. SPP Suralaya 2x1,000 MW; 2. Mobile Power Plant; 3. SPP East Kalimantan 3; 4. SPP Jambi 2x300MW; and 5. Other potential business development projects set by the Board of Directors
Tanggal Listing **Listing Date**	20 September 2017 di Bursa Efek Indonesia	September 20, 2017 on the Indonesia Stock Exchange

Berikut merupakan struktur Kontrak Investasi Kolektif - Efek Beragun Aset Indonesia Power:

The following is the structure of Collective Investment Contract - Asset-backed Security Indonesia Power:



Skema persiapan sampai dengan penerimaan pendanaan EBA Indonesia Power yaitu:

1. *Originator* yaitu Indonesia Power memiliki aset berupa piutang tagihan listrik ke PLN di masa depan.
2. Piutang tagihan listrik tersebut kemudian dijual sebagai *underlying asset* kepada KIK EBA yang dibentuk oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan metode *Discounted Cash Flow* secara *true sale*.
3. Pihak Lembaga Pemeringkat melakukan pemeringkatan atas KIK yang akan diterbitkan, beserta dengan kualitas *underlying asset* di dalamnya.
4. Pihak *Credit Enhancement* sebagai pihak yang memberikan nilai tambahan atas peringkat KIK.
5. KIK setelah memperoleh surat efektif dijual melalui *selling agents*, dan investor berhak atas bunga dan pokok yang akan dijanjikan.
6. Investor memberikan sejumlah dana dalam melakukan pembelian KIK melalui *sellling agents* untuk mendapatkan hak atas pembayaran bunga dan pokok yang akan dijanjikan.
7. KIK-EBA memberikan sejumlah dana kepada *originator* atas dana yang didapat dari investor melalui *selling agents*.

Penerimaan penjualan listrik sampai dengan penerusan kepada investor:

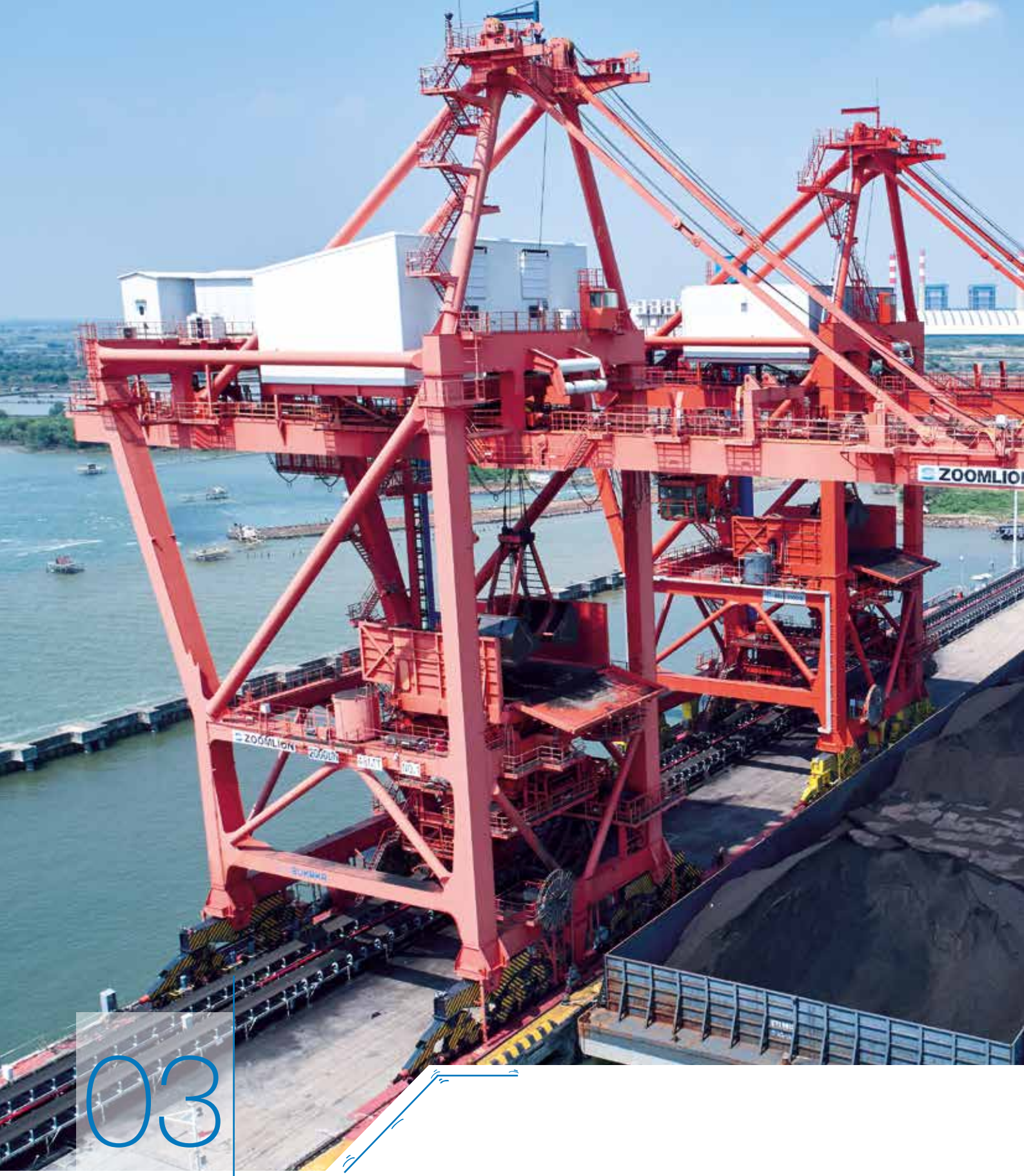
A. Penyedia Jasa (*servicer*) melakukan koleksi piutang tagihan listrik pelanggan, umumnya proses yang sama dengan *Originator* melakukan penagihan kepada Debitur.
B. PLN melakukan pembayaran atas piutang tagihan listrik kepada Penyedia Jasa.
C. Penyedia Jasa memberikan hasil penagihan kepada KIK untuk selanjutnya akan dijadikan sumber pembayaran kupon dan pokok.
D. KIK EBA membayar pengembalian pokok investasi dan pembayaran kupon kepada investor pada saat jatuh tempo.

Preparation scheme until the receipt of EBA Indonesia Power funding, i.e.

1. Indonesia Power as originator owns asset in the form of electricity bill receivable to PLN in the future.
2. The electricity bill receivable is then sold as underlying asset as KIK EBA which was formed by Investment Manager and Custodian with Discounted Cash Flow as true sale.
3. Rating Agency rates the KIK to be issued, including the underlying asset quality within.
4. Credit Enhancement Party serves as the party providing added value for KIK rating.
5. After obtaining effective letter, KIK is sold through selling agents, and investor reserves the right to the interest and principal to be promised.
6. Investor provides an amount of funding for KIK purchase through selling agents to gain rights on the payment of interest and principal to be promised.
7. KIK-EBA provides an amount of funding to originator for the fund obtained from investor through selling agents.

Revenue from electricity sale until the channeling to investor:

A. Servicer collects customer's electricity bill receivable, generally the same process with the Originator which collects receivables from Debtor.
B. PLN performs payment of electricity bill receivable to Servicer.
C. Servicer further provide the collected receivables to KIK to be further used as the source of payment of the yield and principal.
D. KIK EBA pays the principal investment repayment and yield payment to investor on the maturity period.



03

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS



“Berhasil Mengoptimalkan Kinerja Perusahaan dengan Membukukan Laba Tahun Berjalan 2017 sebesar Rp3.232.323 juta meningkat 11,97% dibandingkan dengan tahun 2016.

Amid economic recovery at the national level, the Company succeeded to optimize the Company’s performance by recording current profit of the year 2017 totalling Rp3,232,323 million, an increase of 11.97% compared to 2016.”

TINJAUAN INDUSTRI
INDUSTRY OVERVIEW



Pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut secara gradual, dengan stabilitas ekonomi yang semakin kuat. Dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 tercatat sebesar 5,07% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebesar 5,03%.

Indonesia's economic recovery continues to take place gradually, with increasingly robust economic stability. Viewed from the aspect of economic growth, in 2017 Indonesia managed to post a growth of 5.07% which was higher than the 2016's achievement at 5.03%.

Perekonomian Indonesia

Perekonomian Indonesia tahun 2017 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp13.588,8 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp51,89 juta atau USD3.876,8. Ekonomi Indonesia tahun 2017 tumbuh 5,07% lebih tinggi dibanding capaian tahun 2016 sebesar 5,03%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh

Indonesian Economy

The Indonesian economy in 2017 was measured by Gross Domestic Product (GDP) at current prices, reaching Rp13,588.8 trillion and GDP per capita at Rp51.89 million or US$3,876.8. The economy of Indonesia in 2017 grew by 5.07%, which was higher compared to in 2016 with 5.03%. In terms of production, the highest growth was recorded by Information and

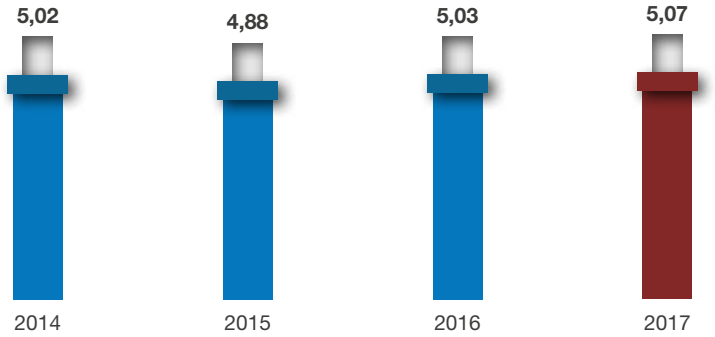
Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 9,81% sedangkan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas mencapai 1,54%. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 9,09%.

Communication sector, reaching 9.81%, while Electricity and Gas Procurement sector was at 1.54%. In terms of expenditure, the highest growth was recorded by Goods and Services Export sector by 9.09%.

(Sumber: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2017 No. 16/02/Th.XXI, 5 Februari 2018).

Source: Indonesian Economic Growth Q4 2017 No. 16/02/Th.XXI, February 5, 2018.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2014-2017 (%)
Indonesia Economic Growth Rate 2014-2017 (%)



Sumber: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Badan Pusat Statistik (BPS)
Source: Indonesia Economic Growth Rate Statistics Indonesia (BPS)

Tingkat inflasi Desember 2017 sebesar 0,71% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 131,28. Dari 82 kota IHK, seluruhnya mengalami inflasi. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok bahan makanan sebesar 2,26%; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,30%; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,17%; kelompok sandang sebesar 0,13%; kelompok kesehatan sebesar 0,18%; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga sebesar 0,07%; dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,75%. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Desember) 2017 dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2017 terhadap Desember 2016) masing-masing sebesar 3,61%.

As of December 2017, the inflation rate was at 0.71% with Consumer Price Index (CPI) at 131.28. All 82 CPI cities underwent the inflation. Inflation occurs due to the increase in prices as shown by the escalation in all expense group indexes, i.e. raw food by 2.26%; processed food, cigarette and tobacco by 0.30%; housing, water, electricity, gas, and fuel by 0.17%; clothing by 0.13%; health by 0.18%; education, recreation, and sports by 0.07%; and transportation, communication, and financial services by 0.75%. The inflation rates of calendar year (January-December) 2017 and on year-on-year basis (December 2017 vs. December 2016) are each 3.61%.

Sumber: Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi No. 01/01/Th. XXI, 2 Januari 2018.

Source: Consumer Index Price/Inflation Growth No. 01/01/Th. XXI, January 2, 2018.

Terkait nilai tukar mata uang, Rupiah terdepresiasi 0,37% terhadap Dolar Amerika pada Desember 2017 dengan nilai tukar sebesar Rp13.540,79 per dolar Amerika. Menurut provinsi, level terendah kurs tengah

Concerning currencies, Rupiah was depreciated by 0.37% against US Dollar in December 2017, at the exchange rate of Rp13,540.79 per US Dollar. On provincial level, the lowest middle rate took place in

TINJAUAN INDUSTRI
INDUSTRY OVERVIEW

terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai Rp13.667,50 per dolar Amerika pada minggu keempat Desember 2017.

Sumber: Perkembangan Nilai Tukar Eceran Rupiah Desember 2017 No. 09/01/ Th. XXI, 15 Januari 2018

South Sulawesi, reaching Rp13,667.50 per US Dollar in the fourth week of December 2017.

Source: Rupiah Retail Exchange Rate Growth of December 2017 No. 09/01/ Th. XXI, January 15, 2018

Kondisi Industri Listrik Indonesia

Sampai dengan November 2017, Kapasitas terpasang pembangkit di Indonesia adalah 54.577,9 MW yang terdiri atas pembangkit PLN 40.285,7 MW, pembangkit swasta 10.457 MW dan pembangkit sewa 3.835 MW. Sebagian besar pembangkit tersebut berupa PLTU batubara (45,1%), disusul PLTG/PLTGU/PLTMG sekitar 30,2%, PLTD sekitar 10%, PLTA/PLTM sekitar 8,1%, PLTU BBM sekitar 3,1%, PLTP sekitar 3,1% dan EBT lain sekitar 0,26%. Dengan jumlah pembangkit adalah 6.138 unit yang terdiri atas 5.176 unit pembangkit PLN, 261 unit pembangkit swasta dan 701 unit pembangkit sewa.

Realisasi bauran energi hingga November 2017 mencapai 231.149 TWh yang terdiri dari pembangkit PLN sebesar 154.108 TWh, pembangkit swasta sebesar 64.433 TWh dan pembangkit sewa sebesar 12.608 TWh. Bauran energi masih didominasi oleh batubara sebesar 58,3%. PLN telah berhasil menurunkan pemakaian BBM dari 23,7% pada tahun 2011 menjadi hanya 5,6% hingga November 2017, dengan beroperasinya beberapa PLTU batubara dan beberapa PLTU IPP. Selain itu PLN juga telah berhasil meningkatkan pemakaian bahan bakar gas dari 20,5% pada tahun 2011 menjadi 23,2% hingga November 2017. Sedangkan bauran energi dari energi baru dan terbarukan (EBT) mengalami sedikit peningkatan yaitu 12,2% pada tahun 2011 menjadi 12,9% hingga November 2017.

Sumber: RUPTL PT PLN (Persero) 2018-2027.

Condition of Indonesian Electricity Industry

Until November 2017, the installed capacity of Indonesian power plants was 54,577.9 MW, covering 40,285.7 MW for PLN, 10,457 MW for Independent Power Producers (IPP), and 3,835 MW for lease. The majority of the power plants are Coal Steam Power Plants (SPP) by 45.1%, followed by Gas/Gas and Steam/Gas Engine Power Plants (GTPP/CCPP/MHPP) by 30.2%, Diesel Power Plants (DPP) by 10%, Hydro/ Mini Hydro Power Plants (HPP/MPP) by 8.1%, Oil Fueled-Steam Power Plants (Oil-Fueled SPP) by 3.1%, Geothermal Power Plants (GPP) by 3.1%, and other New and Renewable Energies by 0.26%. These make up a total of 6,138 power plant units, comprising 6,138 PLN units, 261 IPP units, and 701 lease units.

The actual energy mix until November 2017 was 231,149 TWh, composed of PLN power plants by 154,108 TWh, IPP power plants by 64,433 TWh, and lease power plants by 12,608 TWh. The energy mix remains dominated by coal at 58.3%. PLN has successfully reduced oil fuel consumption from 23.7% in 2011 to 5.6% in November 2017 with the operation of several Coal Steam Power Plants and IPP Steam Power Plants. PLN has also managed to raise gas fuel consumption from 20.5% in 2011 to 23.2% in November 2017. Meanwhile the new and renewable energy mix slightly increased, from 12.2% in 2011 to 12.9% in November 2017.

Source: PT PLN (Persero) Electricity Supply Business Plan (RUPTL) 2018-2027.

Kontribusi Indonesia Power terhadap Industri Listrik Nasional

Indonesia Power berkontribusi dalam industri listrik nasional dalam bidang penyediaan tenaga listrik dan jasa *operation and maintenance* (O&M) pembangkit. Sebagai salah satu Perusahaan pengelola berbagai jenis pembangkit (PLTU, PLTGU, PLTG, PLTA, PLTD

Indonesia Power's Contribution towards National Electricity Industry

Indonesia Power contributes to the national electricity industry through the provision of electricity and power plant operation and maintenance (O&M) services. The Company's capability in managing various types of power plants (Steam, Gas and Steam, Gas, Hydro,

dan PLTP) di Indonesia menjadikan pengalaman tersebut sebagai modal dasar dalam meraih peluang. Keunggulan tersebut perlu dikelola dan diciptakan suatu strategi yang sesuai dalam menghadapi tantangan dan persaingan yang makin ketat dengan meninjau internal dan eksternal Perusahaan.

Dalam upaya memperkuat insfrastruktur kelistrikan yang mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia, Perusahaan turut mengambil peran dengan cara melakukan pengembangan pembangkit untuk menambah kapasitas pembangkit listrik yang tersedia pada sistem kelistrikan. Pengembangan pembangkit yang dilakukan melalui pembangkit thermal dan terbarukan. Perusahaan juga ikut berpartisipasi dalam pengembangan pembangkit 35.000 MW yang dicanangkan oleh pemerintah. Peran tersebut dilakukan melalui cara sebagai berikut:

1. Pemanfaatan area pembangkit existing untuk pembangunan pembangkit baru yang akan dimiliki oleh perusahaan,
2. Mengikuti *tender Independent Power Producer* (IPP) yang diselenggarakan oleh PLN, bekerjasama dengan *investor/developer* nasional maupun internasional.
3. Mengoptimalkan peran Anak Perusahaan dalam kontribusi pengembangan pembankit.

Dari pasokan (*supply*) energi listrik di Jawa Bali tahun 2017 (menurut data operasional Jawa Bali PLN Pusat Pengatur Beban (PLN P2B)) sebesar 179.250 GWh, Indonesia Power memasok energi listrik sebesar 22,53% atau 40.387 GWh dari total pasokan listrik Jawa-Bali. Jumlah pasokan energi listrik Indonesia Power didapat dari penjualan listrik pembangkit milik sendiri dan pembelian tenaga listrik.

Diesel, and Geothermal Power Plants) in Indonesia is among the Company's assets in grabbing opportunities. Such advantage needs to be managed with the proper strategies in order to face the increasingly fierce challenges and competition, by observing the Company internally and externally.

In the effort to strengthen the electricity infrastructure that supports Indonesian Economy, the Company participates in the power plant development for the expansion of capacity available in the electricity system. The development is sought through the renewable and thermal generation. The Company also participates in the development of 35,000 MW generation stipulated by the Government. The participation is evidenced through the following efforts:

1. Utilization of existing generation areas for the construction of the Company-owned power plant.
2. Participation in Independent Power Producer bidding held by PLN, in collaboration with national and international investors/developers.
3. Optimization of Subsidiaries' contribution to power plant development.

Out of a total of 179,250 GWh of Java-Bali electricity supply in 2017 (taken from PLN Pusat Pengatur Beban (PLN P2B) Java-Bali operational data), 22.53% or 40,387 GWh was supplied by Indonesia Power. The total electricity supplied by Indonesia Power is sourced from the sales of electricity from owned power plants and purchase of electricity.



ASPEK PEMASARAN DAN PANGSA PASAR
MARKETING ASPECT AND MARKET SHARE



Sampai saat ini hasil produksi listrik Indonesia Power hanya dijual kepada induk Perusahaan yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai *single buyer*. Mekanisme penjualan energi listrik melalui Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) periode lima tahunan. Dalam perjanjian tersebut, PLN membayar pasokan tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan dan entitas anak sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan formula pembayaran. Sehingga aspek pemasaran Indonesia Power ditujukan untuk mengelola dan meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan kepuasan pelanggan.

Until currently, the electricity produced by Indonesia Power is sold only to the parent company, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) as the single buyer. The sales of electricity are regulated in the Electricity Sale and Purchase Agreement (PJBTL) which is renewed every five years. The agreement sets that PLN shall pay for the electricity supplied by the Company and its subsidiaries at the amount specified in pursuant to the payment formulation. Therefore, the marketing aspect of Indonesia Power is aimed at managing and enhancing the shareholders' trust and customer satisfaction.

Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran yang dilaksanakan oleh Indonesia Power berlandaskan pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2017-2021. Untuk tahun 2017, strategi dan program pemasaran diantaranya adalah:

Marketing Strategies

The marketing strategies applied by Indonesia Power are based on the Company Long-Term Plan 2017-2021. The marketing strategies and programs for 2017 among others were:

1. **Meningkatkan ketersediaan, keandalan, dan efisiensi *thermal* pembangkit yang dikelola**
   Dalam mendukung tercapainya *operational excellence* yang merupakan salah satu pendorong utama peningkatan kepercayaan pemegang saham dan kepuasan pelanggan, maka Perusahaan perlu meningkatkan ketersediaan, keandalan dan efisiensi pembangkit. Untuk pembangkit saat ini, peningkatan kinerja diprioritaskan pada peningkatan efisiensi thermal. Sedangkan untuk pembangkit di Unit Jasa Pembangkitan (UJP) dan Unit Pembangkitan dan Jasa Pembangkitan (UPJP), program yang diprioritaskan peningkatan keandalan.

2. **Melakukan pengembangan pembangkit melalui skema kemitraaan strategis, baik pada lokasi baru maupun lokasi *existing***
   Adanya proyek 35 GW pemerintah merupakan peluang bagi Perusahaan untuk mencapai pertumbuhan dan *sustainability*. Karena itu Perusahaan akan mengembangkan pembangkit baik berskala besar maupun kecil. Ada dua kelompok pengembangan yang akan ditempuh oleh Perusahaan, yaitu pengembangan yang dilakukan sendiri dan pengembangan melalui anak perusahaan.

3. **Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas pembangkit *renewable energy***
   Salah satu strategi Perusahaan untuk mencapai *sustainability* adalah dengan meningkatkan porsi pengembangan pembangkit *renewable energy* karena kecenderungan pengembangan pembangkit di dunia saat ini adalah menggunakan energi terbarukan. Hal ini tercermin dari proses pinjaman yang lebih mudah untuk proyek-proyek pembangkit *renewable energy* dan ramah lingkungan. Selain itu, di masa yang akan datang, kebijakan pemenuhan aspek lingkungan akan semakin ketat sehingga Perusahaan perlu memperhatikan *competitiveness* pembangkit dari aspek kepatuhan terhadap kebijakan lingkungan.

4. **Mengembangkan bisnis Jasa O&M di dalam dan luar PLN**
   Tumbuhnya pembangkit-pembangkit baru merupakan peluang bagi Perusahaan untuk mengembangkan bisnis jasa O&M. Sebagai Perusahaan yang memiliki pengalaman dalam

1. **Improving supply, reliability, and thermal efficiency of the power plants managed**
   In supporting the achievement of operational excellence as a main supporter in the improvement of shareholder trust and customer satisfaction, the Company needs to enhance the supply, reliability, and efficiency of its plants. For current power plants, the enhancement of performance is prioritized for the improvement of thermal efficiency. Meanwhile, Generating Service Unit (GSU) and Generating and Generating Service Unit (GGSU) are prioritized for the improvement of reliability.

2. **Developing power plants through strategic partnership, both at new and existing locations**
   The Government's 35 GW project is an opportunity for the Company to attain growth and sustainability. This is why the Company strives to develop large and small-scale power plants. There are two development groups sought by the Company, i.e. internal development and development by subsidiaries.

3. **Developing and expanding the capacity of renewable energy power plants**
   To achieve sustainability, the Company among others applies the strategy to increase the portion for renewable energy power plant development, following to the global trend of renewable energy consumption. This is shown by easier loan process for renewable and environmentally friendly power plant projects. In the future, the policy for the compliance with environmental aspect will be increasingly stricter, and therefore the Company needs to take into account the competitiveness of the plants in terms of compliance with environmental policy.

4. **Developing O&M Services business inside and outside PLN**
   The emergence of new power plants opens an opportunity for the Company to develop the O&M Services business. As a Company with the experience in power plant operations, this highly

ASPEK PEMASARAN DAN PANGSA PASAR

MARKETING ASPECTS AND MARKET SHARE

mengoperasikan pembangkit, hal ini sangat menunjang dalam pengembangan bisnis Perusahaan ke arah bisnis O&M. Ke depan, Perusahaan akan menyasar proyek-proyek pemeliharaan yang padat teknologi, baik di dalam maupun luar negeri. Sedangkan untuk layanan jasa operasi dan pemeliharaan akan dilakukan dengan memaksimalkan peran anak perusahaan.

supports the Company's development toward O&M business. In the future, the Company will target advanced maintenance projects both domestically and abroad. The operation and maintenance services, on the other hand, will be provide by optimizing the roles of the subsidiaries.

5. **Meningkatkan keamanan dan jumlah pasokan energi primer non BBM dengan harga yang kompetitif**
   Untuk mendukung tercapainya target kinerja operasi, yaitu keandalan, ketersediaan dan efisiensi termal pembangkit, perlu dilakukan pengelolaan energi primer secara optimal. Untuk itu, Perusahaan memastikan ketersediaan energi primer melalui kontrak jangka panjang dengan para pemasok. Selain memastikan ketersediaan dan kecukupan, Perusahaan juga mengupayakan diperolehnya energi primer dengan harga yang lebih kompetitif sehingga harga kalor menjadi lebih rendah. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan merit order pembangkit sehingga dapat mendukung *sustainability* pembangkit dalam jangka panjang.

5. **Enhancing security and supply of non-oil fuel primary energy with competitive price**
   To support the achievement of operational performance target, i.e. reliability and thermal efficiency of power plants, optimal primary energy management is called for. Therefore, the Company ensures the availability of primary energy through long-term contracts with the vendors. Apart from ensuring the availability and sufficiency, the Company also strives to obtain primary energy in more competitive price to suppress the heat price. This is expected to contribute to the improvement of power plant merit order to support the sustainability of power plants in the long run.

6. **Melakukan *engagement* dengan pelanggan**
   Bagi Indonesia Power, pelanggan memiliki posisi penting dalam menunjang kesinambungan bisnis Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan senantiasa menjalin relasi dan komunikasi dengan pelanggan, baik secara formal maupun informal. Langkah tersebut dilakukan melalui berbagai macam cara, misalnya dalam bentuk rapat, *working group discussion*, maupun program mendengarkan suara pelanggan. Dengan strategi tersebut, diharapkan Indonesia Power dapat terus meningkatkan layanannya kepada pelanggan.

6. **Engaging with customers**
   For Indonesia Power, customers are crucial in maintaining the sustainability of the Company business. As a result, the Company always maintains relationship and communication with the customers, both in formal and informal settings. This can be done in various ways, such as during meetings, working group discussions, and listening to the customer's voice. These strategies are expected to help Indonesia Power improving its services to customers.

7. **Survei Pelanggan**
   Sebagai salah satu upaya dalam mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar, Perusahaan melakukan Survei Pelanggan yaitu Survei Kepuasan Pelanggan, Survei Ketidakpuasan Pelanggan, dan Survei Keterikatan Pelanggan. Survei tersebut dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan dan menilai persepsi pelanggan secara objektif terhadap kinerja produk dan jasa yang dihasilkan.

7. **Customer Surveys**
   As an effort in maintaining and expanding market share, the Company performs Customer Surveys, covering Customer Satisfaction Survey, Customer Dissatisfaction Survey, and Customer Engagement Survey. These surveys are performed to measure customers' satisfaction level and assess their objective perceptions toward the performance of the generated products and services.

Pangsa Pasar

Energi listrik wilayah Jawa-Bali dipasok oleh beberapa perusahaan yaitu Indonesia Power (IP), PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), Unit Pembangkitan Tanjung Jati B (Tanjung Jati B), Unit Jasa O&M yang dikelola Indonesia Power, Unit Jasa O&M yang dikelola Pembangkitan Jawa Bali, dan pembangkit listrik swasta (*Independent Power Producer*/IPP).

Realisasi pasokan energi listrik di Jawa Bali tahun 2017 menurut data operasional Jawa Bali PLN Pusat Pengatur Beban (PLN P2B) sebesar 179.250 GWh, meningkat 2,37% dibanding realisasi tahun lalu sebesar 175.094 GWh. Dari total pasokan di tahun 2017 tersebut, Indonesia Power memasok sebesar 22,53% atau sebesar 40.387 GWh. Jumlah pasokan energi listrik Indonesia Power didapat dari penjualan listrik pembangkit milik sendiri dan pembelian tenaga listrik yang tersambung dalam jaringan interkoneksi Jawa-Bali.

Market Share

Java-Bali electricity supplies are sourced from several companies, including Indonesia Power (IP), PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), GU Tanjung Jati B (Tanjung Jati B), O&M Services Unit under Indonesia Power management, O&M Services Unit under Pembangkitan Jawa Bali management, and Independent Power Producers (IPP).

The actual electricity supply for Java-Bali in 2017 according to Java-Bali operational data from PLN P2B was 179,250 GWh, which was an increase by 2.37% from the previous year's actual supply at 175,094 GWh. Out of the total supply in 2017, Indonesia Power contributed 22.53% or 40,387 GWh. The total electricity supplied by Indonesia Power is sourced from the sales of electricity linked up in the Java-Bali interconnection network.

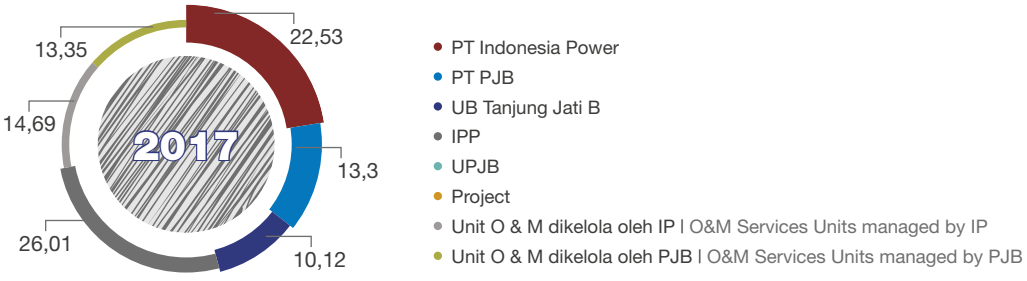
Tabel Pangsa Pasar Energi Listrik Jawa Bali Tahun 2015-2017
Table of Java-Bali Electricity Market Share in 2015-2017

No	Perusahaan	2015		2016		2017		Company
		GWh	%	GWh	%	GWh	%	
1	PT Indonesia Power	38.129	22,97	41.405	23,65	40.387	22,53	PT Indonesia Power
2	PT PJB	25.485	15,35	25.816	14,74	23.834	13,30	PT PJB
3	UB Tanjung Jati B	17.507	10,55	16.941	9,68	18.132	10,12	UB Tanjung Jati B
4	IPP*	41.275	24,87	43.542	24,87	46.625	26,01	IPP*
5	UPJB**	43.575	26,25	-	-	-	-	UPJB**
6	Proyek*	22	0,01	-	-	-	-	Project*
7	Unit Jasa O&M yang dikelola Indonesia Power**	-	-	25.480	14,55	26.335	14,69	O&M Services Units managed by Indonesia Power**
8	Unit Jasa O&M yang dikelola Pembangkitan Jawa Bali**	-	-	21.911	12,51	23.938	13,35	O&M Services Units managed by Pembangkitan Jawa Bali**
	Sistem Jawa Bali	**165.993**	**100,00**	**175.094**	**100,00**	**179.250**	**100,00**	**Jawa Bali System**

* Tahun 2017 telah masuk PLTU Banten (LBE) milik IPP.
** Unit-unit UPJB tahun 2016 dikelola oleh IP dan PJB sebagai *asset manager*.

* In 2017 GPP Banten (LBE) became an entity under IPP.
** In 2016 UPJB units were managed by IP and PJB as asset managers.

Grafik Pangsa Pasar Tahun 2017 (%)
Figure of the 2017 Market Share (%)



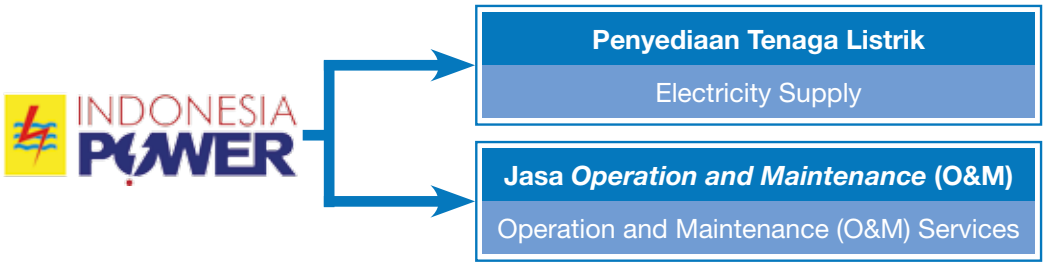
TINJAUAN KINERJA OPERASI PER SEGMEN
OPERATIONAL PERFORMANCE OVERVIEW BY SEGMENT



Indonesia Power merupakan badan usaha yang fokus sebagai penyedia listrik bagi PT PLN (Persero), yang merupakan Entitas Induk, untuk disalurkan kepada konsumen. Segmen usaha Perusahaan, secara umum dibagi menjadi dua, yaitu penyediaan tenaga listrik dan jasa *Operation and Maintenance* (O&M). Dua segmen usaha inilah yang menjadi lini bisnis Perusahaan.

As a business entity, Indonesia Power focuses on the provision of electricity for its parent entity, PT PLN (Persero), to be distributed to consumers. In general, the Company's business segments are distinguished into two, i.e. electricity supply and Operation and Maintenance (O&M) Services. Both segments make up the Company's line of business.

Segmen Operasi Indonesia Power
Indonesia Power Operational Segment



Penyediaan Tenaga Listrik

Dalam penyediaan tenaga listrik dilakukan melalui pembangkitan energi listrik dari pembangkit milik sendiri. Selain itu juga, untuk mendukung usaha penyediaan tenaga listrik, Perusahaan melakukan pembelian tenaga listrik di Area Bali. Hasil produksi listrik Indonesia Power hanya dijual kepada induk Perusahaan yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai *single buyer*. Mekanisme penjualan energi listrik melalui Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) periode lima tahunan.

Electricity Supply

The electricity supplied is sourced from self-owned power plants. In addition, to support the provision of electricity, the Company also purchases electricity in Bali Area. The electricity produced by Indonesia Power is sold only to the parent company, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) as the single buyer. The sales of electricity are regulated in the Electricity Sale and Purchase Agreement (PJBTL) which is renewed every five years.

Daya Terpasang Pembangkit (DTP)

Daya Terpasang Pembangkit (DTP) merupakan kapasitas atau daya suatu pembangkit yang tertera pada *nameplate* di setiap jenis pembangkit. Pada tahun 2017, Daya Terpasang Pembangkit yang berasal dari pembangkit milik sendiri pada sistem Jawa Bali sebesar 8.782,68 MW menurun 1,07% dibandingkan tahun 2016 sebesar 8.877,68 MW. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh PLTU Perak Unit 3 & 4 UPJP Perak Grati keluar sistem selama tahun 2017.

Pada tahun 2018 PLTP Kamojang Unit 1 UPJP Kamojang direncanakan akan masuk kembali ke dalam sistem, setelah *recovery* trafo. Hal ini sebagai upaya Perusahaan dalam meningkatkan DTP Perusahaan di tahun selanjutnya.

Generation Installed Capacity

Generation Installed Capacity is the capacity of a power plant as written on its nameplate. In 2017, the Generation Installed Capacity of the self owned power plant's in Java-Bali system was 8,782.68 MW, which declined by 1.07% from 8,877.68 MW in 2016. The decline was mainly caused by the outages of SPP Perak Unit 3 & 4 Perak Grati GGSU.

For 2018, GPP Kamojang Unit 1 Kamojang GGSU is planned to return to the system, following the transformer recovery. This is construed as IP's effort in expanding its Generation Installed Capacity for the next year.

Tabel Daya Terpasang Pembangkit Milik Sendiri Tahun 2013-2017 (MW)
Table of Self Owned Power Plant's Installed Capacity in 2013-2017 (MW)

Unit Pembangkit Plant Unit	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
UP I GU Suralaya	3.400	3.400	3.400,00	3.400,00	3.400,00	-
UPJP I GGSU Priok	1.348	1.348	1.348,08	1.196,08	1.196,08	-
UP I GU Saguling	797	797	797,36	797,36	797,36	-
UPJP I GGSU Kamojang	375	375	345	345	345,00	-
UP I GU Mrica	310	310	309,74	309,74	309,74	-
UP I GU Semarang	1.409	1.409	1.408,93	1.408,93	1.408,93	-
UPJP I GGSU Perak Grati	864	864	864,08	864,08	764,08	(11,57)
UP I GU Bali	433	398	556,49	556,49	561,49	0,90
Jumlah I Total	**8.936**	**8.901**	**9.029,72**	**8.877,68**	**8.782,68**	**(1,07)**

TINJAUAN KINERJA OPERASI PER SEGMEN
OPERATIONAL PERFORMANCE REVIEW PER SEGMENT

Untuk DTP pembelian listrik di Area Bali pada tahun 2017 sebesar 73 MW tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya.

The Generation Installed Capacity for purchase of electricity in Bali Area for 2017 at 73 MW did not change from the previous year.

Tabel Daya Terpasang Pembangkit dari Pembelian Listrik di Area Bali Tahun 2013-2017 (MW)
Table of Installed Capacity of Purchase of Electricity for Bali Area in 2013-2017 (MW)

Unit Pembangkit Plant Unit	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
PLTD I DPP Pesanggaran	205,10	261,69	216,10	65,00	65,00	-
PLTD I DPP Pemaron	132,80	132,80	-	-	-	-
PLTD I DPP Nusa Penida	-	4,80	4,80	8,00	8,00	-
Jumlah I Total	**337,90**	**399,29**	**220,90**	**73,00**	**73,00**	**-**

Produksi Tenaga Listrik

Indonesia Power melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan jumlah produksi listrik. Perhitungan Produksi Listrik dapat digambarkan menggunakan *Capacity Factor* dan jumlah energi listrik yang dihasilkan (GWh).

Capacity Factor adalah persentase dari besarnya jumlah penjualan selama waktu tertentu, dibagi dengan maksimum jumlah energi yang dikeluarkan pada masa periode yang sama. *Capacity Factor* Pembangkit milik Perusahaan pada tahun 2017 sebesar 58,54% meningkat 2,24% dibandingkan tahun 2016 sebesar 57,26%. Peningkatan ini dikontribusi oleh peningkatan *Capacity Factor* UP Suralaya sebesar 5,16% dipengaruhi adanya peningkatan kebutuhan sistem akibat dari adanya outage di pembangkit PLTU batubara lain.

Electricity Production

Indonesia Power makes the efforts to increase its electricity production. Electricity production can be illustrated using Capacity Factor and total electricity produced (GWh).

Capacity Factor is the percentage of the amount of sale for a certain period, divided by the maximum energy spent during the same period. The Company's own power plant Capacity Factor for 2017 was 58.54%, which was an increase by 2.24% from 57.26% in 2016. This was contributed by the rise in the capacity Factor of Suralaya GU by 5.16% due to the increase in system necessity as a result of outages in other Coal Steam Power Plants.

Tabel *Capacity Factor* Pembangkit Milik Sendiri Tahun 2013-2017 (%)
Table of Capacity Factor for Company's Own Power Plants in 2013-2017 (MW)

Unit Pembangkit Plant Unit	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
UP I GU Suralaya	80,29	75,98	78,93	75,99	79,91	5,16
UPJP I GGSU Priok	41,08	35,66	34,79	32,29	36,02	11,55
UP I GU Saguling	51,36	45,31	35,82	58,25	45,27	(22,28)
UPJP I GGSU Kamojang	91,58	87,36	96,44	92,17	92,78	0,66
UP I GU Mrica	36,23	32,24	32,77	45,11	42,53	(5,72)
UP I GU Semarang	1,10	3,25	24,89	49,80	48,30	(3,01)

Unit Pembangkit Plant Unit	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
UPJP I GGSU Perak Grati	46,82	39,59	32,83	43,56	43,63	0,16
UP I GU Bali	49,03	28,75	18,47	20,00	20,45	2,25
Jawa - Bali Grid & Embedded **Java - Bali Grid & Embedded**	**55,30**	**50,17**	**51,89**	**57,66**	**58,93**	**2,2**
Pembelian Energi listrik di area Bali Electricity Purchase in Bali Area	83,36	62,20	37,19	7,98	12,36	54,89
Jumlah *Capacity Factor* **Total Capacity Factor**	**56,00**	**50,66**	**51,56**	**57,26**	**58,54**	**2,24**

Jumlah produksi listrik pada tahun 2017 sebesar 42.220,40 GWh menurun 2,22% dibandingkan tahun 2016 sebesar 43.180,60 GWh. Penurunan tersebut terutama dikontribusi oleh penurunan produksi pembangkit PLTA karena variasi musim (tahun 2016 musim basah sementara tahun 2017 musim normal) dan penurunan pasokan gas ke Tambak Lorok di UP Semarang.

Total electricity production in 2017 at 42,220.40 GWh was a decline by 2.22% from 43,180.60 GWh in 2016. This was particularly contributed by the decline in Hydro Power Plant production due to seasonal variation (2016 was a wet season and 2017 was a normal season) in addition to declining gas supply to Tambak Lorok in Semarang GU.

Untuk menanggulangi hal tersebut, Perusahaan telah melakukan peningkatan keandalan dan *availability* PLTU Suralaya serta berkoordinasi aktif dengan PLN P2B untuk pengoperasian PLTP dalam rangka penyerapan TOP Panas Bumi UP Kamojang.

To overcome the issue, the Company has improved the reliability and availability at SPP Suralaya while actively coordinating with PLN P2B for the operation of Geothermal Power Plants for the geothermal Take or Pay (TOP) absorption at GU Kamojang.

Tabel Produksi Listrik Berdasarkan Unit Pembangkit Tahun 2013-2017 (GWh)
Table of Electricity Production by Plant Unit in 2013-2017 (GWh)

Unit Pembangkit Plant Unit	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
UP I GU Suralaya	23.911,17	22.596,76	23.528,45	22.786,10	23.894,44	4,86
UPJP I GGSU Priok	4.181,66	3.819,14	3.434,65	3.213,47	2.982,78	(7,18)
UP I GU Saguling	3.579,04	3.157,96	2.497,13	4.069,30	3.154,53	(22,48)
UPJP I GGSU Kamojang	2.970,89	2.842,56	2.892,87	2.777,15	2.781,27	0,15
UP I GU Mrica	990,41	882,42	897,87	1.237,77	1.164,18	(5,95)
UP I GU Semarang	125,34	346,72	2.562,61	5.158,05	4.267,08	(17,27)
UPJP I GGSU Perak Grati	3.473,18	2.953,00	2.452,32	2.972,37	2.967,35	(0,17)
UP I GU Bali	1.454,16	862,56	860,85	918,17	934,65	1,79

TINJAUAN KINERJA OPERASI PER SEGMEN

OPERATIONAL PERFORMANCE REVIEW PER SEGMENT

Unit Pembangkit Plant Unit	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
Jawa - Bali *Grid & Embedded* **Java - Bali Grid & Embedded**	**40.685,85**	**37.461,12**	**39.126,74**	**43.132,38**	**42.146,28**	**(2,29)**
Pembelian Energi Listrik di Area Bali Electricity Purchase in Bali Area	1.497,52	1.913,08	603,37	48,22	74,12	53,71
Jumlah Produksi Listrik **Total Electricity Production**	**42.183,37**	**39.374,20**	**39.730,11**	**43.180,60**	**42.220,40**	**(2,22)**

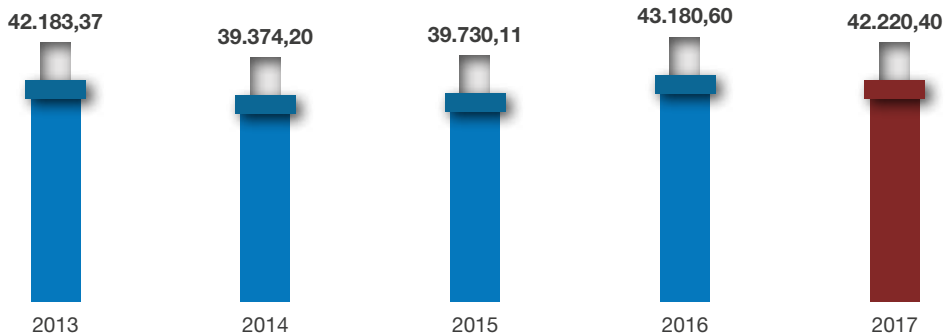
Tabel Produksi Listrik Berdasarkan Jenis Pembangkit Tahun 2013-2017 (GWh)

Table of Electricity Production by Plant Type in 2013-2017 (GWh)

Jenis Pembangkit Plant Type	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
PLTA I HPP	4.569,45	4.040,38	3.395,00	5.307,08	4.318,71	(18,62)
PLTU Batubara I Coal Based SPP	23.911,17	22.596,76	23.528,45	22.786,10	23.894,44	4,86
PLTU Bahan Bakar Minyak I Oil Fuel Based SPP	0,7	-	-	-	-	-
PLTGU Gas I Gas Based CCPP	6.930,70	6.605,99	8.242,04	11.080,18	9.949,29	(10,21)
PLTGU Bahan Bakar Minyak I Oil Fuel Based CCPP	517,88	281,15	29,94	49,62	3,94	(92,06)
PLTP I GPP	2.970,89	2.842,56	2.892,87	2.777,15	2.781.27	0,15
PLTG Bahan Bakar Minyak I Oil Fuel Based GTPP	1.394,64	863,06	443,68	34,16	4,34	(87,3)
PLTG Gas I Gas Based GTPP	324,18	222,74	172,05	210,25	263,97	25,55
PLTD Bahan Bakar Minyak I Oil Fuel Based DPP	66,24	8,48	422,71	101,59	30,57	(69,91)
PLTD Gas I Gas Based DPP	-	-	-	786,26	899,75	14,43
Jawa - Bali *Grid & Embedded* **Java - Bali Grid & Embedded**	**40.685,85**	**37.461,12**	**39.126,74**	**43.132,38**	**42.146,28**	**(2,29)**
Pembelian Energi Listrik di Area Bali Electricity Purchase in Bali Area	1.497,52	1.913,08	603,37	48,22	74,12	53,71
Jumlah Produksi Listrik **Total Electricity Production**	**42.183,37**	**39.374,20**	**39.730,11**	**43.180,60**	**42.220,40**	**(2,22)**

Grafik Produksi Listrik Tahun 2013-2017 (GWh)

Chart of Electricity Production in 2013-2017 (GWh)



Penjualan Tenaga Listrik

Jumlah penjualan tenaga listrik pada tahun 2017 sebesar 40.307,40 GWh menurun 2,40% dibandingkan tahun 2016 sebesar 41.299,01 GWh. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan produksi pembangkit PLTA karena variasi musim (tahun 2016 musim basah sementara tahun 2017 musim normal) dan penurunan pasokan gas ke Tambak Lorok di UP Semarang.

Untuk menanggulangi hal tersebut, Perusahaan telah melakukan peningkatan keandalan dan *availability* PLTU Suralaya serta berkoordinasi aktif dengan PLN P2B untuk pengoperasian PLTP dalam rangka penyerapan TOP Panas Bumi UP Kamojang.

Sale of Electricity

Total Sale of Electricity in 2017 at 40,307.40 GWh was a decline by 2.40% from 41,299.01 GWh in 2016. This was particularly affected by the decline in Hydro Power Plant production due to seasonal variation (2016 was a wet season and 2017 was a normal season) in addition to declining gas supply to Tambak Lorok in Semarang GU.

To overcome the issue, the Company has improved the reliability and availability at SPP Suralaya while actively coordinating with PLN P2B for the operation of Geothermal Power Plants for the geothermal Take or Pay (TOP) absorption at GU Kamojang.

Tabel Penjualan Listrik Berdasarkan Unit Pembangkit Tahun 2013-2017 (GWh)
Table of Sale of Electricity by Plant Unit in 2013-2017 (GWh)

Unit Pembangkit Plant Unit	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
UP I GU Suralaya	22.589,85	21.374,64	22.206,08	21.438,38	22.480,60	4,86
UPJP I GGSU Priok	4.081,36	3.743,78	3.366,03	3.132,86	2.909,22	(7,14)
UP I GU Saguling	3.571,19	3.150,71	2.490,67	4.061,53	3.148,00	(22,49)
UPJP I GGSU Kamojang	2.839,92	2.709,00	2.759,19	2.644,17	2.654,48	0,39
UP I GU Mrica	976,11	868,66	883,11	1.218,74	1.145,84	(5,98)
UP I GU Semarang	104,57	323,03	2.477,34	4.969,83	4.096,08	(17,58)
UPJP I GGSU Perak Grati	3.388,74	2.872,48	2.382,01	2.893,38	2.890,23	(0,11)
UP I GU Bali	1.435,14	850,11	843,94	893,85	911,49	1,97
Jawa - Bali *Grid & Embedded* **Java - Bali Grid & Embedded**	**38.986,88**	**35.892,42**	**37.408,37**	**41.252,76**	**40.235,94**	**(2,46)**
Pembelian Energi Listrik di Area Bali Electricity Purchase in Bali Area	1.496,93	1.912,53	602,74	46,25	71,46	54,51
Jumlah Produksi Listrik **Total Electricity Sales**	**40.483,81**	**37.804,95**	**38.011,11**	**41.299,01**	**40.307,40**	**(2,40)**

Tabel Penjualan Listrik Berdasarkan Jenis Pembangkit Tahun 2013-2017 (GWh)
Table of Sale of Electricity by Plant Type in 2013-2017 (GWh)

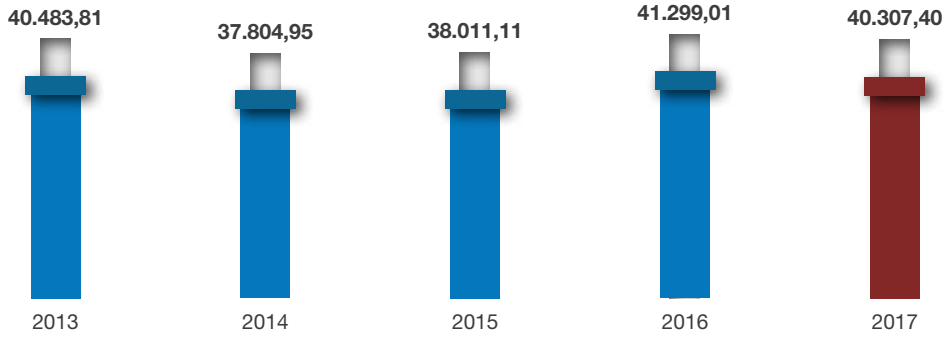
Jenis Pembangkit Plant Type	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
PLTA I HPP	4.547,30	4.019,37	3.373,79	5.280,28	4.293,84	(18,68)
PLTU Batubara I Coal Based SPP	22.589,85	21.374,64	22.206,08	21.438,38	22.480,60	4,86
PLTU Bahan Bakar Minyak I Oil Fuel Based SPP	(8,54)	(5,74)	(4,90)	(4,92)	(7,41)	50,61
PLTGU Gas I Gas Based CCPP	6.780,39	6.452,45	8.028,26	10.740,20	9.636,83	(10,27)
PLTGU Bahan Bakar Minyak I Oil Fuel Based CCPP	495,12	264,42	26,10	48,38	3,85	(92,04)

TINJAUAN KINERJA OPERASI PER SEGMEN

OPERATIONAL PERFORMANCE REVIEW PER SEGMENT

Jenis Pembangkit Plant Type	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
PLTP I GPP	2.839,92	2.709,00	2.759,19	2.644,17	2.654,48	0,39
PLTG Bahan Bakar Minyak I Oil Fuel Based GTPP	1.360,02	849,18	435,36	26,50	(2,27)	(108,57)
PLTG Gas I Gas Based GTPP	323,00	221,67	171,00	209,22	262,87	25,64
PLTD Bahan Bakar Minyak I Oil Fuel Based DPP	59,75	7,31	413,41	97,14	29,98	(69,14)
PLTD Gas I Gas Based DPP	-	-	-	773,40	883,17	14,19
Jawa - Bali Grid & Embedded **Java - Bali Grid & Embedded**	**38.986,88**	**35.892,42**	**37.408,37**	**41.252,76**	**40.235,94**	**(2,46)**
Pembelian Energi Listrik di Area Bali Electricity Purchase in Bali Area	1.496,93	1.912,53	602,74	46,25	71,46	54,51
Jumlah Produksi Listrik **Total Electricity Sales**	**40.483,81**	**37.804,95**	**38.011,11**	**41.299,01**	**40.307,40**	**(2,40)**

Grafik Penjualan Listrik Tahun 2013-2017 (GWh)
Chart of Sale of Electricity in 2013-2017 (GWh)



Pemakaian Sendiri

Selain untuk disalurkan ke pembeli, ada sebagian tenaga listrik yang dipakai oleh Perusahaan untuk fasilitas produksi. Pemakaian sendiri (PS) merupakan jumlah energi listrik yang digunakan untuk aktivitas operasional pembangkit serta *losses-losses* jaringan dan trafo yang ada sebelum didistribusikan ke pembeli. Semakin rendah nilai PS menunjukkan kinerja pembangkit semakin baik.

Pada tahun 2017, pemakaian sendiri sebesar 1.910,34 GWh meningkat 1,65% dibandingkan tahun 2016 sebesar 1.879,33 GWh. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan produksi PLTU Surabaya sebesar 4,86%, sehingga kebutuhan listrik untuk pemakaian sendiri mengalami peningkatan. Sedangkan untuk persentase Pemakaian Sendiri yang dihitung

Self-Consumption

Apart from being distributed to buyer, some of the electricity is utilized by the Company for production facility. Self-consumption covers the amount of electricity utilized for power plants' operation in addition to existing network and transformer losses prior to distribution to buyer. The lower the amount of Self-Consumption, the better the plant's performance.

In 2017 the amount of Self-Consumption was 1,910.34 GWh, which increased by 1.65% from 1,879.33 GWh in 2016. This was mainly caused by the increase in SPP Suralaya production by 4.86%, creating a surge in the self-consumption. The Self-Consumption percentage, measured from the total self-consumption divided by total production, increased by 3.21%. In 2017, the Self-

dari besarnya jumlah pemakaian sendiri dibagi total produksi, mengalami peningkatan 3,21%. Pada tahun 2017 persentase Pemakaian Sendiri sebesar 4,50% dibandingkan tahun 2016 sebesar 4,36%.

Consumption percentage was at 4.50% which was higher from 2016 of 4.36%.

Tabel Pemakaian Sendiri berdasarkan Unit Pembangkit Tahun 2013-2017
Table of Self-Consumption by Plant Unit in 2013-2017 (GWh)

Unit Pembangkit Plant Unit	2013		2014		2015		2016		2017		Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)	
	GWh	%PS	GWh	%PS	GWh	%PS	GWh	%PS	GWh	%PS	GWh	%PS
UP I GU Suralaya	1.321,32	5,53	1.222,12	5,41	1.322,37	5,62	1.347,71	5,91	1.413,84	5,92	4,91	0,17
UPJP I GGSU Priok	100,30	2,40	75,36	1,97	68,62	2,00	80,61	2,51	73,56	2,47	(8,75)	(1,59)
UP I GU Saguling	7,86	0,22	7,24	0,23	6,46	0,26	7,77	0,19	6,52	0,21	(16,09)	10,53
UPJP I GGSU Kamojang	130,98	4,41	133,57	4,70	133,68	4,62	132,98	4,79	126,79	4,56	(4,65)	(4,80)
UP I GU Mrica	14,30	1,44	13,76	1,56	14,75	1,64	19,03	1,54	18,35	1,58	(3,57)	2,60
UP I GU Semarang	20,77	16,57	23,69	6,83	85,27	3,33	188,22	3,65	171,00	4,01	(9,15)	9,86
UPJP I GGSU Perak Grati	84,43	2,43	80,52	2,73	70,31	2,87	78,99	2,66	77,13	2,60	(2,35)	(2,26)
UP I GU Bali	19,02	1,31	12,45	1,44	16,91	1,96	24,02	2,62	23,16	2,48	(3,58)	(5,34)
Jumlah I Total	**1.698,97**	**4,18**	**1.568,70**	**4,19**	**1.718,37**	**4,39**	**1.879,33**	**4,36**	**1.910,34**	**4,50**	**1,65**	**3,21**

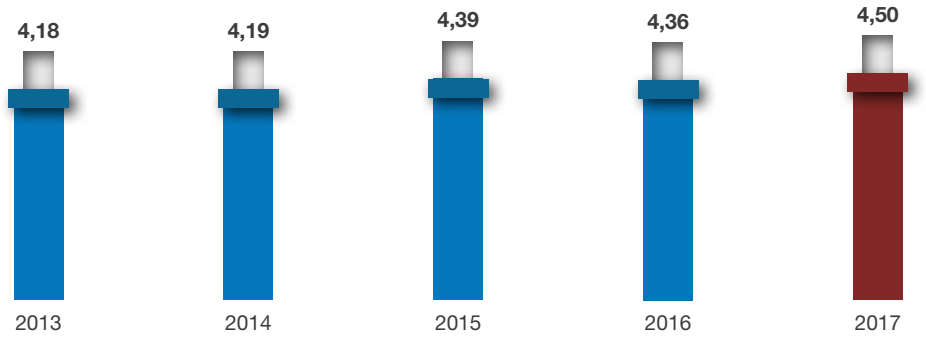
Tabel Pemakaian Sendiri berdasarkan Jenis Pembangkit Tahun 2013-2017
Table of Self-Consumption by Plant Type in 2013-2017 (GWh)

Jenis Pembangkit Plant Type	2013		2014		2015		2016		2017		Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)	
	GWh	%PS	GWh	%PS	GWh	%PS	GWh	%PS	GWh	%PS	GWh	%PS
PLTA I HPP	22,16	0,48	21,00	0,52	21,21	0,62	26,80	0,50	24,87	0,58	(7,20)	16,00
PLTU Batubara Coal Based SPP	1.321,32	5,53	1.222,12	5,41	1.322,37	5,62	1.347,71	5,91	1.413,84	5,92	4,91	0,17
PLTU Bahan Bakar Minyak Oil Fuel Based SPP	9,24	13,17	5,74	-	4,90	-	-	-	7,41	-	-	-
PLTGU Gas Gas Based CCPP	150,31	2,17	153,55	2,32	213,78	2,59	340,08	3,07	312,45	3,14	(8,12)	2,28
PLTGU Bahan Bakar Minyak Oil Fuel Based CCPP	22,76	4,39	16,73	5,95	3,85	12,84	1,24	2,51	0,09	2,31	(92,74)	(7,97)
PLTP I GPP	130,98	4,41	133,57	4,70	133,68	4,62	132,98	4,79	126,79	4,56	(4,65)	(4,80)
PLTG Bahan Bakar Minyak Oil Fuel Based GTPP	34,62	2,48	13,88	1,61	8,32	0,01	7,65	22,41	6,61	152,30	(13,59)	579,61
PLTG Gas Gas Based GTPP	1,19	0,37	1,06	0,48	1,05	0,61	1,04	0,49	1,11	0,42	6,73	(14,29)
PLTD Bahan Bakar Minyak Oil Fuel Based DPP	6,49	9,80	1,17	13,84	9,30	2,20	4,15	4,19	0,59	1,93	(85,78)	(53,94)
PLTD Gas Gas Based DPP	-	-	-	-	-	-	12,86	1,64	16,58	1,84	28,93	12,20
Jumlah I Total	**1.698,97**	**4,18**	**1.568,70**	**4,19**	**1.718,37**	**4,39**	**1.879,33**	**4,36**	**1.910,34**	**4,50**	**1,65**	**3,21**

TINJAUAN KINERJA OPERASI PER SEGMEN

OPERATIONAL PERFORMANCE REVIEW PER SEGMENT

Grafik Pemakaian Sendiri Tahun 2013-2017 (%)
Chart of Self-Consumption in 2013-2017 (%)



Kinerja Operasi dari Segmen Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Dalam melakukan operasinya untuk menyediakan tenaga listrik, banyak faktor yang menjadi indikator keberhasilan atau tingkat keandalan pembangkit Perusahaan. Hal tersebut dapat mempengaruhi jumlah produksi dan penjualan tenaga listrik, sehingga diperlukan monitor yang baik.

Faktor Ketersediaan

Faktor ketersediaan mesin pembangkit diukur berdasarkan indikator *Equivalent Availability Factor* (EAF) dan *Scheduled Outage Factor* (SOF).

Equivalent Availability Factor (EAF)

EAF menunjukkan tingkat kesiapan suatu pembangkit untuk beroperasi menghasilkan tenaga listrik. Nilai EAF berfungsi untuk mengetahui faktor ketersediaan pembangkit untuk beroperasi dengan Daya Mampu Netto (DMN) pada periode tertentu. Semakin tinggi nilai EAF menunjukkan tingkat kesiapan pembangkit lebih baik.

Pada tahun 2017, EAF Pembangkit Milik Sendiri sebesar 92,07% meningkat 1,39% dibandingkan tahun 2016 sebesar 90,81%. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan EAF pada UP Suralaya, UPJP Priok dan UP Saguling.

Perusahaan berencana melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan EAF pada tahun selanjutnya yaitu penggantian *rotor generator* dan *rewinding stator* pada 2019, *retrofit* penangkal petir PLTP Gunung Salak, *repair and balancing turbin* PLTP Darajat, penggantian sistem eksitasi, *retrofit ball cleaning* dan *debris filter condensor*.

Operational Performance by Electricity Supply Business Segment

In conducting the electricity supply operation, the Company is depending on a number of factors that indicate its success and reliability. They may affect the amount of electricity production and sales, and therefore proper monitoring is necessary.

Availability Factor

The availability of power plant engine is measured by the Equivalent Availability Factor (EAF) and Scheduled Outage Factor (SOF).

Equivalent Availability Factor (EAF)

EAF indicates the readiness of a power plant to operate and generate electricity. EAF value indicates the availability factor of a plant for the operation with Net Capacity in a certain period. The higher the EAF score, the better a power plant's readiness in generating electricity.

In 2017, the Self-Owned Power Plant's EAF was at 92.07%, which was an increase by 1.39% from 2016 at 90.81%. This was particularly influenced by the increase in EAF in Suralaya GU, Priok GGSU, and Saguling GU.

The Company plans to perform a number of activities to improve the next year's EAF, among others through generator rotor and rewinding stator replacements in 2019, GPP Gunung Salak lightning rod retrofitting, GPP Darajat turbine repair and balancing, excitation system replacement, and condenser ball cleaning and debris filter retrofitting.

Tabel EAF Pembangkit Milik Sendiri berdasarkan Unit Pembangkit Tahun 2013-2017 (%)
Table of Self-Owned Power Plant's EAF by Plant Unit in 2013-2017 (%)

Unit Pembangkit Plant Unit	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
UP I GU Suralaya	92,14	84,05	91,41	89,72	91,26	1,72
UPJP I GGSU Priok	91,53	87,48	90,81	90,98	93,61	2,89
UP I GU Saguling	93,38	97,30	92,26	91,06	96,35	5,81
UPJP I GGSU Kamojang	95,94	91,97	96,61	94,10	92,93	(1,24)
UP I GU Mrica	94,58	96,77	98,09	97,61	97,57	(0,04)
UP I GU Semarang	98,64	97,90	84,09	87,09	81,84	(6,03)
UPJP I GGSU Perak Grati	93,79	95,78	93,44	94,54	96,18	1,73
UP I GU Bali	91,04	91,78	90,51	92,76	97,65	5,27
Jumlah I Total	**93,04**	**89,88**	**90,85**	**90,81**	**92,07**	**1,39**

Tabel EAF Pembangkit Milik Sendiri berdasarkan Jenis Pembangkit Tahun 2013-2017 (%)
Table of Self-Owned Power Plant's EAF by Plant Type in 2013-2017 (%)

Jenis Pembangkit Plant Type	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
PLTA I HPP	94,85	97,47	93,89	92,90	96,69	4,08
PLTU Batubara I Coal Based SPP	92,14	84,05	91,41	89,72	91,26	1,72
PLTU Bahan Bakar Minyak I Oil Fuel Based SPP	100,00	100,00	100,00	-	-	-
PLTGU Gas I Gas Based CCPP	92,37	87,37	90,05	90,75	88,10	(2,92)
PLTGU Bahan Bakar Minyak I Oil Fuel Based CCPP	93,74	95,18	84,92	84,47	-	-
PLTP I GPP	95,94	91,97	96,61	94,10	92,93	(1,24)
PLTG Bahan Bakar Minyak I Oil Fuel Based GTPP	93,48	95,58	96,12	96,11	99,55	3,58
PLTG Gas I Gas Based GTPP	86,17	100,00	100,00	100,00	97,00	(3,00)
PLTD Bahan Bakar Minyak I Oil Fuel Based DPP	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
PLTD Gas I Gas Based DPP	-	-	-	92,50	94,31	1,96
Jumlah I Total	**93,04**	**89,88**	**90,85**	**90,81**	**92,07**	**1,39**

TINJAUAN KINERJA OPERASI PER SEGMEN

OPERATIONAL PERFORMANCE REVIEW PER SEGMENT

Scheduled Outage Factor (SOF)

SOF digunakan untuk mengukur tingkat pembangkit keluar sistem karena pemeliharaan terencana, yaitu *Planned Outage Hour* dan *Maintenance Outage Hour* yang sudah direncanakan sebelumnya. Semakin rendah nilai SOF menunjukkan ketepatan perencanaan pemeliharaan pembangkit yang lebih baik.

Pada tahun 2017, SOF Pembangkit Milik Sendiri sebesar 5,21% menurun 14,45% dibandingkan tahun 2016 sebesar 6,09%. Hal ini menunjukkan kinerja pembangkit Perusahaan semakin baik. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh percepatan pemeliharaan dan eksekusi *outage* sesuai dengan *planning* di unit Suralaya, Priok, Saguling, Kamojang, Perak Grati dan Bali.

Perusahaan berencana melakukan beberapa kegiatan untuk menurunkan SOF pada tahun selanjutnya, yaitu memperkuat *Outage Management* untuk memastikan kedatangan material pada waktu yang ditentukan, memperkuat proses *procurement* untuk memastikan *supply chain* material dan jasa untuk kebutuhan pemeliharaan, memperkuat analisis data *Predictive Maintenance* untuk memprediksi *spare part* yang diduga berpotensi besar menjadi temuan saat *overhaul* dan perencanaan pemeliharaan unit pembangkit yang tepat.

Scheduled Outage Factor (SOF)

SOF measures a power plant's outages due to scheduled maintenance, i.e. the Planned Outage Hour and Maintenance Outage Hour. The lower the SOF score, the more accurate plant maintenance planning that has been conducted.

In 2017, the Self-Owned Power Plant's SOF was at 5.21%, which was a decrease by 14.45% from 2016 at 6.09%. This shows improved performance of the Company's power plants. It was particularly affected by the acceleration of maintenance and outage execution according to the plan at Suralaya, Priok, Saguling, Kamojang, Perak Grati, and Bali units.

The company plans to perform SOF-reducing activities for the next year, by strengthening Outage Management to ensure timely arrival of materials, perform procurement process that smoothen the supply chain of the maintenance materials and services, improve the Predictive Maintenance data analysis for predicting potential problematic parts during overhaul, and properly plan the plant unit maintenance.

Tabel SOF Pembangkit Milik Sendiri berdasarkan Unit Pembangkit Tahun 2013-2017 (%)
Table of Self-Owned Power Plant's SOF by Plant Unit in 2013-2017 (%)

Unit Pembangkit Plant Unit	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
UP I GU Suralaya	5,45	4,93	5,26	7,22	6,78	(6,09)
UPJP I GGSU Priok	5,20	8,03	5,74	4,67	4,01	(14,13)
UP I GU Saguling	6,59	2,64	7,50	8,79	3,40	(61,32)
UPJP I GGSU Kamojang	3,43	1,69	2,76	4,90	2,30	(53,06)
UP I GU Mrica	4,75	2,04	1,88	1,53	2,42	58,17
UP I GU Semarang	1,31	2,08	8,32	5,58	7,87	41,04
UPJP I GGSU Perak Grati	5,35	2,38	5,29	3,97	2,81	(29,22)
UP I GU Bali	7,82	7,20	9,40	5,49	2,14	(61,02)
Jumlah I Total	**5,27**	**4,34**	**5,98**	**6,09**	**5,21**	**(14,45)**

Tabel SOF Pembangkit Milik Sendiri berdasarkan Jenis Pembangkit Tahun 2013-2017 (%)
Table of Self-Owned Power Plant's SOF by Plant Type in 2013-2017 (%)

Jenis Pembangkit Plant Type	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
PLTA I HPP	5,19	2,49	5,93	6,67	3,13	(53,07)
PLTU Batubara I Coal Based SPP	5,45	4,93	5,26	7,22	6,78	(6,09)
PLTU Bahan Bakar Minyak I Oil Fuel Based SPP	-	-	-	-	-	-
PLTGU Gas I Gas Based CCPP	5,25	8,10	8,26	5,74	5,91	2,96
PLTGU Bahan Bakar Minyak I Oil Fuel Based CCPP	5,88	2,84	7,35	-	-	-
PLTP I GPP	3,43	1,69	2,76	4,90	2,30	(53,06)
PLTG Bahan Bakar Minyak I Oil Fuel Based GTPP	5,71	3,88	2,49	-	0,44	-
PLTG Gas I Gas Based GTPP	12,42	-	-	3,74	2,39	(36,10)
PLTD Bahan Bakar Minyak I Oil Fuel Based DPP	-	-	-	-	-	-
PLTD Gas I Gas Based DPP	-	-	-	3,23	5,14	(59,13)
Jumlah I Total	**5,27**	**4,34**	**5,98**	**6,09**	**5,21**	**(14,45)**

Faktor Gangguan

Untuk mengetahui gangguan mesin pembangkit diukur berdasarkan indikator *Equivalent Forced Outage Rate* (EFOR), dan *Sudden Outage Frequency* (SdOF).

Equivalent Forced Outage Rate (EFOR)

EFOR untuk mengukur tingkat mesin pembangkit keluar paksa atau ketidaksiapan unit untuk beroperasi karena gangguan. Semakin rendah nilai EFOR menunjukkan penanganan gangguan semakin cepat (unit pembangkit lebih handal).

Pada tahun 2017, EFOR Pembangkit Milik Sendiri sebesar 2,75% menurun 6,46% dibandingkan tahun 2016 sebesar 2,94%. Hal tersebut menunjukkan penanganan gangguan semakin cepat. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan keandalan pembangkit di unit Suralaya, Priok, Mrica, dan Bali.

Perusahaan berencana melakukan beberapa kegiatan untuk menurunkan EFOR pada tahun selanjutnya, yaitu penggantian *rotor generator* dan *rewinding stator* pada 2019, *retrofit* penangkal petir PLTP Gunung Salak, *repair and balancing turbin* PLTP Darajat, penggantian sistem eksitasi, *retrofit ball cleaning* dan *debris filter condensor*, dan perbaikan peralatan *main transformer*.

Outage Factor

Disruptions in plant engine can be measured by Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) and Sudden Outage Frequency (SdOF).

Equivalent Forced Outage Rate (EFOR)

EFOR measures unit's forced outage rate or unit's unpreparedness for operation due to disruptions. The lower the EFOR score, the faster the disruption handling. (in other words, more reliable power plant).

In 2017, the Self-Owned Power Plant's EFOR was at 2.75%, which was a decrease by 6.46% from 2016 at 2.94%. This shows improvement in disruption handling. The decline was particularly triggered by improved reliability of Suralaya, Priok, Mrica, and Bali plant units.

The Company plans to perform a number of activities to decrease the next year's EFOR, among others through generator rotor and rewinding stator replacements in 2019, GPP Gunung Salak lightning rod retrofitting, GPP Darajat turbine repair and balancing, excitation system replacement, and condenser ball cleaning and debris filter retrofitting, and main transformer equipment repair.

TINJAUAN KINERJA OPERASI PER SEGMEN

OPERATIONAL PERFORMANCE REVIEW PER SEGMENT

Tabel EFOR Pembangkit Milik Sendiri berdasarkan Unit Pembangkit Tahun 2013-2017 (%)

Table of Self-Owned Power Plant's EFOR by Plant Unit in 2013-2017 (%)

Unit Pembangkit Plant Unit	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
UP I GU Suralaya	2,14	10,86	3,01	2,64	1,56	(40,91)
UPJP I GGSU Priok	2,41	4,52	3,97	3,81	1,00	(73,75)
UP I GU Saguling	0,05	0,1	0,45	0,20	0,42	110,00
UPJP I GGSU Kamojang	0,65	6,44	0,62	1,01	4,79	374,26
UP I GU Mrica	1,94	1,77	0,09	1,47	0,01	(99,32)
UP I GU Semarang	0,11	0,05	6,32	6,65	12,99	95,34
UPJP I GGSU Perak Grati	0,25	1,33	0,36	0,24	0,61	154,17
UP I GU Bali	1,71	2,62	13,22	6,77	0,90	(86,71)
Jumlah I Total	**1,66**	**7,16**	**3,16**	**2,94**	**2,75**	**(6,46)**

Tabel EFOR Pembangkit Milik Sendiri berdasarkan Jenis Pembangkit Tahun 2013-2017 (%)

Table of Self-Owned Power Plant's EFOR by Plant Type in 2013-2017 (%)

Jenis Pembangkit Plant Type	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
PLTA I HPP	0,06	0,09	0,35	0,51	0,30	(41,18)
PLTU Batubara I Coal Based SPP	2,14	10,86	3,01	2,64	1,56	(40,91)
PLTU Bahan Bakar Minyak I Oil Fuel Based SPP	-	-	-	-	-	-
PLTGU Gas I Gas Based CCPP	1,89	4,52	0,24	4,76	5,48	15,13
PLTGU Bahan Bakar Minyak I Oil Fuel Based CCPP	5,37	2,04	8,28	-	-	-
PLTP I GPP	0,65	6,44	0,62	1,01	4,79	374,26
PLTG Bahan Bakar Minyak I Oil Fuel Based GTPP	1,47	1,98	10,21	-	2,96	-
PLTG Gas I Gas Based GTPP	3,15	-	-	2,08	3,98	91,35
PLTD Bahan Bakar Minyak I Oil Fuel Based DPP	-	-	-	-	-	-
PLTD Gas I Gas Based DPP	-	-	-	6.51	0,87	(86,64)
Jumlah I Total	**1,66**	**7,16**	**3,16**	**2,94**	**2,75**	**(6,46)**

Sudden Outage Frequency (SdOF)

SdOF menunjukkan jumlah gangguan yang terjadi dalam periode tertentu, terutama frekuensi terjadinya gangguan yang berulang. Semakin rendah nilai SdOF maka semakin baik pengelolaan operasional Perusahaan dalam memitigasi gangguan.

Pada tahun 2017, SdOF Pembangkit Milik Sendiri sebesar 2,40 kali menurun 13,67% dibandingkan tahun 2016 sebesar 2,78 kali. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan keandalan pembangkit di unit Suralaya, Kamojang, Mrica, Perak Grati dan Bali.

Perusahaan berencana melakukan beberapa kegiatan untuk menurunkan SdOF pada tahun selanjutnya, yaitu penggantian sistem eksitasi, *retrofit ball cleaning* dan *debris filter condensor* dan perbaikan peralatan *main transformer*.

Sudden Outage Frequency (SdOF)

SdOF indicates the number of disruptions taken place in a certain period, particularly the frequency of repeated disruptions. The lower the SdOF score, the better the Company's operational management in mitigating disruptions.

In 2017, the Self-Owned Power Plant's SdOF was 2.40 times, which was a decrease by 13.67% from 2016 frequency at 2.78 times. The decline was particularly triggered by improved reliability of Suralaya, Kamojang, Mrica, Perak Grati, and Bali plant units.

The Company intends to perform a number of SdOF-reducing activities for the next year, by performing excitation system replacement, condenser ball cleaning and debris filter retrofitting, and main transformer equipment repair.

Tabel SdOF Pembangkit Milik Sendiri berdasarkan Unit Pembangkit Tahun 2013-2017 (kali)
Table of Self-Owned Power Plant's SdOF by Plant Unit in 2013-2017 (time)

Unit Pembangkit Plant Unit	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
UP I GU Suralaya	3,00	2,86	2,14	2,86	0,86	(69,93)
UPJP I GGSU Priok	4,14	3,14	1,36	1,71	5,29	209,36
UP I GU Saguling	0,45	0,41	0,45	0,45	0,69	53,33
UPJP I GGSU Kamojang	3,57	2,14	2,00	3,50	1,33	(62,00)
UP I GU Mrica	4,00	5,50	0,29	0,46	0,17	(63,04)
UP I GU Semarang	0,32	0,46	13,80	15,90	14,00	(11,95)
UPJP I GGSU Perak Grati	1,57	2,57	2,57	1,43	1,29	(9,79)
UP I GU Bali	4,14	3,14	0,89	3,89	1,89	(51,41)
Jumlah I Total	**1,89**	**1,83**	**2,00**	**2,78**	**2,40**	**(13,67)**

Tabel SdOF Pembangkit Milik Sendiri berdasarkan Jenis Pembangkit Tahun 2013-2017 (kali)
Table of Self-Owned Power Plant's SdOF by Plant Type in 2013-2017 (time)

Jenis Pembangkit Plant Type	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
PLTA I HPP	0,46	0,44	0,37	0,46	0,54	17,39
PLTU Batubara I Coal Based SPP	3,00	2,86	2,14	2,86	0,86	(69,93)
PLTU Bahan Bakar Minyak I Oil Fuel Based SPP	-	-	-	-	-	-
PLTGU Gas I Gas Based CCPP	7,25	5,50	2,75	8,26	8,61	4,24
PLTGU Bahan Bakar Minyak I Oil Fuel Based CCPP	3,50	5,58	18,50	-	-	-

TINJAUAN KINERJA OPERASI PER SEGMEN

OPERATIONAL PERFORMANCE REVIEW PER SEGMENT

Jenis Pembangkit Plant Type	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
PLTP | GPP	3,57	2,14	2,00	3,50	1,33	(62,00)
PLTG Bahan Bakar Minyak | Oil Fuel Based GTPP	3,38	2,55	2,20	-	-	-
PLTG Gas | Gas Based GTPP	6,00	-	-	1,70	0,67	(60,59)
PLTD Bahan Bakar Minyak | Oil Fuel Based DPP	-	-	-	-	-	-
PLTD Gas | Gas Based DPP	-	-	-	5,00	3,00	(40,00)
Jumlah | Total	**1,89**	**1,83**	**2,00**	**2,78**	**2,40**	**(13,67)**

Pemakaian Energi Primer

Dalam mengoperasikan pembangkit maka diperlukan bahan bakar untuk menjalankannya. Penggunaan bahan bakar yang efektif dan efisien akan mendorong kinerja pembangkitan yang semakin baik. Perusahaan terus berupaya meningkatkan tingkat efektivitas dan efisiensi Energi salah satunya dengan pemantapan program 5E (*Enhancing and Embedding Energy Efficiency Excellent*) serta berkoordinasi aktif dengan PLN P2B untuk mencari pola operasi yang optimal dengan kondisi sistem dan ketersediaan energi primer yang ada.

Efisiensi Thermal

Efisiensi Thermal menunjukkan tingkat energi listrik (*output*) yang dihasilkan dalam pemakaian bahan bakar (*input*) suatu pembangkit pada periode tertentu. Semakin tinggi nilai Efisiensi Thermal menunjukkan bahwa pembangkit tersebut semakin efisien.

Pada tahun 2017, Efisiensi Thermal Pembangkit Milik Sendiri sebesar 32,95% menurun 2,80% dibandingkan tahun 2016 sebesar 33,90%. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh *derating* dan gangguan *Steam Turbin* di UP Semarang, *derating* di UP Suralaya dan penurunan produksi PLTGU Priok karena *dispatch* rendah dan pengaturan pola operasi akibat kecukupan daya sistem.

Untuk menanggulangi hal tersebut Perusahaan telah aktif berkoordinasi dengan PLN P2B untuk mengoptimalisasi pengoperasian PLTGU *Combine Cycle* dan penguatan program 5E.

Primary Energy Consumption

Fuel is vital to operate power plants. Efficient and effective use of fuel encourages improvement in power plant performance. The Company continues the effort to enhance the energy efficiency and effectiveness, among others through 5E (Enhancing and Embedding Energy Efficiency Excellence) program and active coordination with PLN P2B to seek optimal operation pattern according to existing system condition and available primary energy.

Thermal Efficiency

Thermal Efficiency indicates the electricity generated (output) in the consumption of fuel (input) of a power plant in a certain period. The higher the Thermal Efficiency score, the more efficient the power plant.

In 2017, the Self-Owned Power Plant's Thermal Efficiency was at 32.95%, which was a decrease by 2.80% from 2016 at 33.90%. It was particularly triggered by derating and disturbance in the steam turbine of Semarang GU, derating in Suralaya GU, and decreased production in CCPP Priok due to low dispatch and operational arrangement due to system's power adequacy.

In overcoming the issue, the Company has actively coordinated with PLN P2B to optimize the Gas and Steam Power Plant Combined Cycle and implement the 5E program.

Tabel Efisiensi Thermal Pembangkit Milik Sendiri berdasarkan Unit Pembangkit Tahun 2013-2017 (%)
Table of Self-Owned Power Plant's Thermal Efficiency by Plant Unit in 2013-2017 (%)

Unit Pembangkit Plant Unit	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
UP I GU Suralaya	33,56	33,61	33,05	32,84	32,05	(2,41)
UPJP I GGSU Priok	38,23	38,28	38,82	37,53	36,67	(2,29)
UP I GU Semarang	21,69	26,27	35,68	34,92	32,77	(6,16)
UPJP I GGSU Perak Grati	36,43	34,70	34,03	35,86	36,20	0,95
UP I GU Bali	25,29	24,30	29,88	37,30	37,05	(0,67)
Jumlah I Total	**33,81**	**33,97**	**33,76**	**33,90**	**32,95**	**(2,80)**

Tabel Efisiensi Thermal Pembangkit Milik Sendiri berdasarkan Jenis Pembangkit Tahun 2013-2017 (%)
Table of Self-Owned Power Plant's Thermal Efficiency by Plant Type in 2013-2017 (%)

Jenis Pembangkit Plant Type	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
PLTU Batubara I Coal Based SPP	33,56	33,61	33,05	32,84	32,05	(2,41)
PLTU Bahan Bakar Minyak I Oil Fuel Based SPP	-	-	-	-	-	-
PLTGU Gas I Gas Based CCPP	38,37	37,27	36,93	36,36	35,35	(2,78)
PLTGU Bahan Bakar Minyak I Oil Fuel Based CCPP	34,93	31,53	32,35	42,59	38,38	(9,88)
PLTG Bahan Bakar Minyak I Oil Fuel Based GTPP	25,28	24,20	24,28	19,86	-	-
PLTG Gas I Gas Based GTPP	22,40	20,16	21,97	21,31	23,01	7,98
PLTD Bahan Bakar Minyak I Oil Fuel Based DPP	20,52	28,90	39,20	36,00	31,04	(13,78)
PLTD Gas I Gas Based DPP	-	-	-	38,51	37,66	(2,21)
Jumlah I Total	**33,81**	**33,97**	**33,76**	**33,90**	**32,95**	**(2,80)**

Tara Kalor Netto

Tara Kalor Netto mengukur efisiensi pemakaian bahan bakar dalam nilai kalori yang dibutuhkan untuk setiap kWh produksi netto yang dibangkitkan oleh unit pembangkit pada suatu periode. Semakin rendah nilai Tara Kalor Netto menunjukkan bahwa pembangkit tersebut semakin efisien.

Pada tahun 2017, Tara Kalor Netto Pembangkit Milik Sendiri sebesar 2.609,80 kCal/kWh meningkat 2,87% dibandingkan tahun 2016 sebesar 2.537,06 kCal/kWh. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan di tahun 2017 sebesar 72,74 kCal/kWh. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan Tara kalor dari UP Semarang akibat *derating* dan gangguan *Steam Turbin* di UP Semarang, *derating* di UP Suralaya

Net Heat Rate

Net Heat Rate measures in calorific value the efficiency of fuel consumed for each kWh of net production generated by a power plant in a period. The lower the Net Heat Rate, the more efficient the power plant.

In 2017, the Self-Owned Power Plant's Net Heat Rate was 2,609.80 kCal/kWh, which was an increase by 2.87% from 2016 at 2,537.06 kCal/kWh. This indicates an increase by 72.74 kCal/kWh in 2017. It was particularly triggered by the increase in Semarang's GU heat rate as the outcome from derating and disturbance in the steam turbine of Semarang GU, derating in Suralaya GU, and increased heat rate in Priok GGSU

TINJAUAN KINERJA OPERASI PER SEGMEN

OPERATIONAL PERFORMANCE REVIEW PER SEGMENT

dan peningkatan Tara Kalor dari UPJP Priok akibat penurunan produksi PLTGU Priok karena *dispatch* rendah dan pengaturan pola operasi dari kecukupan daya sistem.

Dalam menanggulangi hal tersebut, Perusahaan telah melakukan koordinasi aktif dengan PLN P2B untuk optimalisasi pengoperasian PLTGU *Combine Cycle* dan penguatan program 5E.

due to decreased production in CCPP Priok as a result of low dispatch and operational arrangement due to system's power adequacy.

In overcoming the issue, the Company has actively coordinated with PLN P2B to optimize the Gas and Steam Power Plant Combined Cycle and implement the 5E program.

Tabel Tara Kalor Netto Pembangkit Milik Sendiri berdasarkan Unit Pembangkit Tahun 2013-2017 (kCal/kWh)
Table of Self-Owned Power Plant's Net Heat Rate by Plant Unit in 2013-2017 (kCal/kWh)

Unit Pembangkit Plant Unit	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
UP I GU Suralaya	2.562,57	2.558,76	2.602,18	2.618,58	2.683,22	2,47
UPJP I GGSU Priok	2.249,54	2.246,60	2.215,46	2.291,73	2.345,07	2,33
UP I GU Semarang	3.964,96	3.273,70	2.409,99	2.462,49	2.624,41	6,58
UPJP I GGSU Perak Grati	2.360,69	2.478,39	2.527,54	2.398,03	2.375,42	(0,94)
UP I GU Bali	3.400,55	3.539,09	2.878,66	2.305,41	2.321,39	0,69
Jumlah I Total	**2.543,63**	**2.531,65**	**2.547,10**	**2.537,06**	**2.609,80**	**2,87**

Tabel Tara Kalor Netto Pembangkit Milik Sendiri berdasarkan Jenis Pembangkit Tahun 2013-2017 (kCal/kWh)
Table of Self-Owned Power Plant's Heat Rate by Plant Type in 2013-2017 (kCal/kWh)

Jenis Pembangkit Plant Type	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
PLTU Batubara I Coal Based SPP	2.562,57	2.558,76	2.602,18	2.618,58	2.683,22	2,47
PLTU Bahan Bakar Minyak I Oil Fuel Based SPP	-	-	-	-	-	-
PLTGU Gas I Gas Based CCPP	2.241,33	2.307,49	2.328,94	2.365,07	2.433,04	2,87
PLTGU Bahan Bakar Minyak I Oil Fuel Based CCPP	2.462,07	2.727,56	2.685,02	2.019,26	2.240,81	10,97
PLTG Bahan Bakar Minyak I Oil Fuel Based GTPP	3.401,90	3.553,72	3.541,34	4.329,61	-	-
PLTG Gas I Gas Based GTPP	3.839,29	4.265,87	3.913,55	4.035,83	3.737,35	(7,4)
PLTD Bahan Bakar Minyak I Oil Fuel Based DPP	4.191,03	2.975,78	2.193,73	2.388,57	2.770,26	15,98
PLTD Gas I Gas Based DPP	-	-	-	2.233,19	2.283,51	(2,13)
Jumlah I Total	**2.543,63**	**2.531,65**	**2.547,10**	**2.537,06**	**2.609,80**	**2,87**

Jasa *Operation and Maintenance* (O&M)

Selain menyediakan tenaga listrik, Perusahaan juga memiliki usaha jasa *Operation & Maintenance* (O&M) pembangkit. Dalam pengelolaan jasa O&M untuk pembangkit milik PLN (pemilik aset), Perusahaan memiliki peran sebagai pihak yang mengoperasikan aset tersebut. Dalam hubungan tersebut, ada dua macam kontrak jasa, yaitu:

1. *Asset Manager Contract* (AMC), yaitu kontrak pengelolaan jasa O&M antara PT Indonesia Power dengan PT PLN (Persero) untuk PLTU Banten 1 Suralaya, PLTU Banten 2 Labuan, PLTU Banten 3 Lontar, PLTU Jawa Barat 2 Palabuhan Ratu, PLTU Jawa Tengah 2 Adipala, PLTGU Priok Blok 3 dan PLTGU Cilegon.
2. Kontrak *supporting*, yaitu sebelum *Commercial Operation Date* (COD) atau sebelum pembangkit beroperasi secara komersial dan COD.

Operation and Maintenance (O&M) Services

In addition to supplying electricity, the Company also provides Operation and Maintenance (O&M) Services for power plants. In providing O&M Services for power plants owned by PLN (asset owner), the Company is also responsible to operate the assets. In the relationship, there are two types of services contract, i.e.

1. Asset Manager Contract (AMC), O&M Services contract between PT Indonesia Power and PT PLN (Persero) for SPP Banten 1 Suralaya, SPP Banten 2 Labuan, SPP Banten 3 Lontar, SPP West Java 2 Palabuhan Ratu, SPP Central Java 2 Adipala, CCPP Priok Block 3 and CCPP Cilegon.
2. Supporting Contract, prior to the Commercial Operation Date (COD).

Tabel Pembangkit Jasa O&M Tahun 2017
Table of O&M Power Plant in 2017

Nama Unit Name of Unit	Status Kontrak Status of Contract	Jasa yang Diberikan Provided Services
UJP PLTU I GSU SPP Banten 1 Suralaya	AMC	Perusahaan sebagai *Asset Manager*
UJP PLTU I GSU SPP Banten 2 Labuan	AMC	Perusahaan sebagai *Asset Manager*
UJP PLTU I GSU SPP Banten 3 Lontar	AMC	Perusahaan sebagai *Asset Manager*
UJP PLTU I GSU SPP Jawa Barat 2 Palabuhan Ratu	AMC	Perusahaan sebagai *Asset Manager*
UJP PLTU I GSU SPP Jawa Tengah 2 Adipala	AMC	Perusahaan sebagai *Asset Manager*
UJP PLTU I GSU SPP Pangkalan Susu	Kontrak *Supporting*	*Supporting* Jasa O&M I O&M Services
PLTGU I CCPP Priok Blok 3 (Jasa O&M UPJP Priok I Priok GGSU O&M Service)	AMC	Perusahaan sebagai *Asset Manager*
UJP PLTU I GSU SPP Barru	Kontrak *Supporting*	*Supporting* Jasa O&M I O&M Services
UJP PLTU I GSU SPP Jeranjang	Kontrak *Supporting*	*Supporting* Jasa O&M I O&M Services
UJP PLTU I GSU SPP Sanggau	Kontrak *Supporting*	*Supporting* Jasa O&M I O&M Services
PLTP I GPP Ulumbu (Jasa O&M UPJP Kamojang I Kamojang GGSU O&M Service)	Kontrak *Supporting*	*Supporting* Jasa O&M I O&M Services
UJP PLTGU I GSU CCPP Cilegon	AMC	Perusahaan sebagai *Asset Manager*
UJP PLTU I GSU SPP Holtekamp	Kontrak *Supporting*	*Supporting* Jasa O&M I O&M Services
UJP PLTU I GSU SPP Sintang	Kontrak *Supporting*	*Supporting* Jasa O&M I O&M Services
UJP PLTA I GSU HPP Orya Genyem	Kontrak *Supporting*	*Supporting* Jasa O&M I O&M Services

TINJAUAN KINERJA OPERASI PER SEGMEN
OPERATIONAL PERFORMANCE REVIEW PER SEGMENT

Daya Terpasang Pembangkit (DTP) Jasa O&M

Daya Terpasang Pembangkit yang pengelolaan O&M dilakukan oleh Perusahaan pada tahun 2017 sebesar 6.039 MW meningkat 1,39% dibandingkan tahun 2016 sebesar 5.956 MW. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penambahan kapasitas pembangkit Jasa O&M yang dikelola Perusahaan yaitu PLTU Holtekamp, PLTU Sintang, dan PLTA Orya Genyem.

Generation Installed Capacity O&M Services

The Generation Installed Capacity for the Company's O&M Services in 2017 was 6,039 MW, an increase by 1.39% from 2016 with 5,956 MW. The increase was mainly the expansion of capacity in O&M power plants under the Company's management, i.e. SPP Holtekamp, SPP Sintang and HPP Orya Genyem.

Tabel Daya Terpasang Pembangkit yang Pengelolaan O&M Dilakukan oleh Perusahaan Tahun 2013-2017 (MW)
Table of Generation Installed Capacity for the Company's O&M Services in 2013-2017 (MW)

Unit Pembangkit Plant Unit	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
UJP PLTU I GSU SPP Banten 1 Suralaya	625	625	625	625	625	-
UJP PLTU I GSU SPP Banten 2 Labuan	600	600	600	600	600	-
UJP PLTU I GSU SPP Banten 3 Lontar	945	945	945	945	945	-
UJP PLTU I GSU SPP Jawa Barat 2 Palabuhan Ratu	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	-
UJP PLTU I GSU SPP Jawa Tengah 2 Adipala	660	660	660	660	660	-
UJP PLTU I GSU SPP Pangkalan Susu	-	440	440	440	440	-
PLTGU I CCPP Priok Blok 3	-	740	740	740	740	-
UJP PLTU I GSU SPP Barru	-	100	100	100	100	-
UJP PLTU I GSU SPP Jeranjang	-	30	30	30	60	100
UJP PLTU I GSU SPP Sanggau	-	17	17	17	17	-
PLTP I GPP Ulumbu	-	9,60	9,60	9,60	9,60	-
UJP PLTGU I GSU CCPP Cilegon	-	-	-	739,40	739,40	-
UJP PLTU I GSU SPP Holtekamp	-	-	-	-	24	100
UJP PLTU I GSU SPP Sintang	-	-	-	-	9	100
UJP PLTA I GSU HPP Orya Genyem	-	-	-	-	20	100
Jumlah I Total	**3.880**	**5.216,6**	**5.216,6**	**5.956**	**6.039**	**1,39**

Produksi dan Penjualan Tenaga Listrik Jasa O&M

Pembangkit jasa O&M Indonesia Power tahun 2017 dibedakan menjadi dua yaitu antara pembangkit O&M Jawa dan pembangkit Luar Jawa.

Capacity Factor (CF) pembangkit jasa O&M Jawa pada tahun 2017 sebesar 60,38% meningkat 5,93% dibandingkan pada tahun 2016 sebesar 57,00%. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan kehandalan di UJP Banten 1 Suralaya dan UJP Jawa Barat 2 Palabuhan Ratu.

Electricity Production and Sales O&M Services

Indonesia Power's O&M Power Plants in 2017 were categorized into two, i.e. power plants in Java and power plants outside Java.

The Capacity Factor for O&M power plants in O&M Java in 2017 was 60.38%, or increased by 5.93% from 57.00% in 2016. This was resulted by a higher level of reliability at Banten 1 Suralaya GSU dan GSU West Java 2 Palabuhan Ratu.

Tabel *Capacity Factor* Unit Pembangkit Jasa O&M Jawa (%)
Table of Capacity Factor for O&M Power Plants in Java (%)

Unit Pembangkit Generating Unit	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
UJP PLTU I GSU SPP Banten 1 Suralaya	48,66	63,12	29,72
UJP PLTU I GSU SPP Banten 2 Labuan	76,14	64,32	(15,52)
UJP PLTU I GSU SPP Banten 3 Lontar	73,64	70,95	(3,65)
UJP PLTU I GSU SPP Jawa Barat 2 Palabuhan Ratu	44,02	59,60	35,39
UJP PLTU I GSU SPP Jawa Tengah 2 Adipala	12,14*	34,30	182,54
PLTGU I CCPP Priok Blok 3	54,70	50,57	(7,55)
UJP PLTGU I GSU CCPP Cilegon	90,40	77,27	(14,52)
Jumlah I Total	**57,00**	**60,38**	**5,93**

* UJP Jawa Tengah 2 Adipala sudah COD semenjak bulan September 2016, sehingga produksinya telah dicatatkan

* GSU Central Java 2 Adipala 2 had achieved the COD status as of September 2016, so its production was factored in.

Untuk CF Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa dapat dilihat pada table berikut ini:

The CF for O&M Power Plants outside Java is presented in the following table:

Tabel *Capacity Factor* Unit Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa (%)
Table of CF for O&M Power Plants outside Java (%)

Unit Pembangkit Generating Unit	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
UJP I GSU Pangkalan Susu	48,48	38,90	(19,76)
UJP I GSU Barru	55,92	46,20	(17,38)
UJP I GSU Jeranjang	67,68	31,38	(53,63)
UJP I GSU Sanggau	38,72	37,49	(3,18)
PLTP I GPP Ulumbu	38,26	45,08	17,83
Jumlah I Total	**50,98**	**39,58**	**(22,36)**

Seperti yang dijelaskan diatas mengenai lingkup usaha Jasa O&M, Perusahaan sebagai aset operator untuk pembangkit Jasa O&M dan aset manajer untuk pembangkit Jasa O&M Jawa milik Induk Perusahaan (dalam hal ini PLN) maka dari itu hasil produksi dan penjualan tenaga listrik dari pembangkit Jasa O&M tersebut tidak diakui oleh Perusahaan. Walaupun begitu, secara kinerja operasi dipantau dan dievaluasi secara berkesinambungan.

As previously explained about the business scope of O&M Services, Indonesia Power as the asset operator of all O&M service units and asset manager of O&M service units in Java owned by the Parent Company (in this case PLN), and therefore the results of production and sales of electricity from O&M power plants are not acknowledged by the Company. Nevertheless, their operational performances are continuously monitored and evaluated.

TINJAUAN KINERJA OPERASI PER SEGMEN
OPERATIONAL PERFORMANCE REVIEW PER SEGMENT

Kinerja Operasi dari Segmen Usaha Jasa O&M

Sejak tahun 2016, Indonesia Power mendapatkan kontrak pengelolaan jasa O&M secara menyeluruh (*asset manager contract*) untuk pembangkit di Pulau Jawa, dimana Indonesia Power bertanggung jawab terhadap kinerja pembangkit yang dikelola tersebut.

Kinerja pembangkit jasa O&M Indonesia Power tahun 2017 dibedakan menjadi dua yaitu antara pembangkit Jawa dan pembangkit Luar Jawa.

Kinerja Unit Pembangkit Jasa O&M Jawa

Equivalent Availability Factor (EAF)

EAF pembangkit jasa O&M Jawa pada tahun 2017 sebesar 77,77% meningkat 2,33% dibandingkan pada tahun 2016 sebesar 76,00%.

Tabel EAF Unit Pembangkit Jasa O&M Jawa (%)
Table of EAF for O&M Power Plants in Java (%)

Unit Pembangkit Plant Unit	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
UJP PLTU I GSU SPP Banten 1 Suralaya	61,17	70,89	15,89
UJP PLTU I GSU SPP Banten 2 Labuan	85,96	70,66	(17,80)
UJP PLTU I GSU SPP Banten 3 Lontar	83,37	78,89	(5,37)
UJP PLTU I GSU SPP Jawa Barat 2 Palabuhan Ratu	52,29	83,39	59,48
UJP PLTU I GSU SPP Jawa Tengah 2 Adipala	-	56,24	-
PLTGU I CCPP Priok Blok 3	89,94	83,25	(7,44)
UJP PLTGU I GSU CCPP Cilegon	91,02	94,32	3,63
Jumlah I Total	**76,00**	**77,77**	**2,33**

Equivalent Forced Outage Rate (EFOR)

EFOR pembangkit jasa O&M Jawa pada tahun 2017 sebesar 10,52% menurun 25,71% dibandingkan pada tahun 2016 sebesar 14,16%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh Penurunan EFOR di PLTU Suralaya 8 dan PLTU Palabuan Ratu, dimana pada tahun 2017 tidak terdapat gangguan yang signifikan.

Operational Performance by O&M Services Business Segment

Since 2016, Indonesia Power secured the contract for comprehensive O&M Services (Asset Management Contract) for power plants in Java, where the Company is responsible for the performance of the power plants under its management.

The performances of Indonesia Power's O&M Power Plants in 2017 were categorized into two, i.e. power plants in Java and power plants outside Java.

Performance of O&M Power Plants in Java

Equivalent Availability Factor (EAF)

The EAF for O&M power plants in Java in 2017 was 77.77%, increasing by 2.33% from 76.00% in 2016.

Equivalent Forced Outage Rate (EFOR)

The EFOR for O&M power plants in Java in 2017 was 10.52%, decreasing by 25.71% from 14.16% in 2016. It was particularly caused by the decline in EFOR in SPP Suralaya 8 and SPP Palabuhan Ratu, where there were no significant disruptions in 2017.

Tabel EFOR Unit Pembangkit Jasa O&M Jawa Tahun 2017 (%)
Table of EAF for O&M Power Plants in Java (%)

Unit Pembangkit Plant Unit	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
UJP PLTU I GSU SPP Banten 1 Suralaya	26,09	9,77	(62,55)
UJP PLTU I GSU SPP Banten 2 Labuan	3,15	6,01	90,79
UJP PLTU I GSU SPP Banten 3 Lontar	8,49	4,48	(47,23)
UJP PLTU I GSU SPP Jawa Barat 2 Palabuhan Ratu	39,67	6,39	(83,89)
UJP PLTU I GSU SPP Jawa Tengah 2 Adipala	-	38,91	-
PLTGU I CCPP Priok Blok 3	0,94	12,28	1.206,38
UJP PLTGU I GSU CCPP Cilegon	0,85	0,39	(54,12)
Jumlah I Total	**14,16**	**10,52**	**(25,71)**

Scheduled Outage Factor (SOF)
SOF pembangkit jasa O&M Jawa pada tahun 2017 sebesar 12,38% meningkat 19,61% dibandingkan pada tahun 2016 sebesar 10,35%. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya perpanjangan pemeliharaan di UJP PLTU Banten 2 Labuan dan UJP PLTU Banten 3 Lontar.

Scheduled Outage Factor (SOF)
The SOF for O&M power plants in Java in 2017 was 12.38%, increasing by 19.61% from 10.35% in 2016. It was caused by extended maintenance in GSU SPP Banten 2 Labuan and GSU SPP Banten 3 Lontar.

Tabel SOF Unit Pembangkit Jasa O&M Jawa Tahun 2017 (%)
Table of SOF for O&M Power Plants in Java in 2017 (%)

Unit Pembangkit Plant Unit	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
UJP PLTU I GSU SPP Banten 1 Suralaya	17,57	3,51	(80,02)
UJP PLTU I GSU SPP Banten 2 Labuan	8,90	22,96	157,98
UJP PLTU I GSU SPP Banten 3 Lontar	8,13	16,77	106,27
UJP PLTU I GSU SPP Jawa Barat 2 Palabuhan Ratu	13,25	10,40	(21,51)
UJP PLTU I GSU SPP Jawa Tengah 2 Adipala	-	27,56	-
PLTGU I CCPP Priok Blok 3	7,36	3,87	(47,42)
UJP PLTGU I GSU CCPP Cilegon	6,95	3,81	(45,18)
Jumlah I Total	**10,35**	**12,38**	**19,61**

TINJAUAN KINERJA OPERASI PER SEGMEN

OPERATIONAL PERFORMANCE REVIEW PER SEGMENT

Sudden Outage Frequency (SdOF)

SdOF pembangkit jasa O&M Jawa pada tahun 2017 sebesar 2,75 kali menurun 26,27% dibandingkan pada tahun 2016 sebesar 3,73 kali. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kehandalan pembangkit di PLTU Suralaya 8, PLTU Lontar, PLTU Palabuhan Ratu, dan PLTGU Priok Blok 3.

Sudden Outage Frequency (SdOF)

The SdOF for O&M power plants in Java in 2017 was 2.75 times, decreasing by 26.27% from 3.73 times in 2016. It was particularly triggered by improved reliability of SPP Suralaya 8, SPP Lontar, SPP Palabuhan Ratu and CCPP Priok Block 3 plants.

Tabel SdOF Unit Pembangkit Jasa O&M Jawa Tahun 2017 (kali)
Table of SdOF for O&M Power Plants in Java in 2017 (time)

Unit Pembangkit Plant Unit	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
UJP PLTU I GSU SPP Banten 1 Suralaya	10,00	6,00	(40,00)
UJP PLTU I GSU SPP Banten 2 Labuan	1,50	4,00	166,67
UJP PLTU I GSU SPP Banten 3 Lontar	6,00	3,00	(50,00)
UJP PLTU I GSU SPP Jawa Barat 2 Palabuhan Ratu	5,67	3,00	(47,09)
UJP PLTU I GSU SPP Jawa Tengah 2 Adipala	-	6,00	-
PLTGU I CCPP Priok Blok 3	1,33	0,67	(49,62)
UJP PLTGU I GSU CCPP Cilegon	1,33	1,33	0,00
Jumlah I Total	**3,73**	**2,75**	**(26,27)**

Tara Kalor Netto

Tara Kalor Netto pembangkit jasa O&M Jawa pada tahun 2017 sebesar 2.494,50 kCal/kWh meningkat 0,90% dibandingkan pada tahun 2016 sebesar 2.472,28 kCal/kWh.

Net Heat Rate

Heat Rate for O&M power plants in Java in 2017 was 2,494.50 kCal/kWh, increasing by 0.90% from 2,472.28 kCal/kWh in 2016.

Tabel Tara Kalor Neto Unit Pembangkit Jasa O&M Jawa Tahun 2017 (kCal/kWh)
Table of Net Heat Rate for O&M Power Plants in Java in 2017 (kCal/kWh)

Unit Pembangkit Plant Unit	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
UJP PLTU I GSU SPP Banten 1 Suralaya	2.999,80	2.911,86	(2,93)
UJP PLTU I GSU SPP Banten 2 Labuan	2.913,05	2.832,63	(2,76)
UJP PLTU I GSU SPP Banten 3 Lontar	2.769,37	2.771,96	0,09
UJP PLTU I GSU SPP Jawa Barat 2 Palabuhan Ratu	2.740,62	2.702,47	(1,39)
UJP PLTU I GSU SPP Jawa Tengah 2 Adipala	-	2.489,36	-
PLTGU I CCPP Priok Blok 3	1.832,97	1.840,95	0,44
UJP PLTGU I GSU CCPP Cilegon	1.825,63	1.859,87	1,88
Jumlah I Total	**2.472,28**	**2.494,50**	**0,90**

Kinerja Unit Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa

Sedangkan, berikut adalah kinerja Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa pada tahun 2017:

Performance of O&M Power Plants Outside Java

The following tables indicate the performance of O&M Power Plants outside Java in 2017:

Tabel EAF Unit Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa (%)
Table of EAF for O&M Power Plants Outside Java (%)

Unit Pembangkit Plant Unit	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
UJP I GSU Pangkalan Susu	79,47	54,15	(31,86)
UJP I GSU Barru	60,66	49,82	(17,87)
UJP I GSU Jeranjang	77,96	75,19	(3,55)
UJP I GSU Sanggau	70,81	69,08	(2,44)
PLTP I GPP Ulumbu	68,54	83,93	22,45
Jumlah I Total	**76,00**	**56,16**	**(26,11)**

Tabel EFOR Unit Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa (%)
Table of EFOR for O&M Power Plants Outside Java (%)

Unit Pembangkit Plant Unit	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
UJP I GSU Pangkalan Susu	8,19	39,92	387,42
UJP I GSU Barru	25,68	8,53	(66,78)
UJP I GSU Jeranjang	4,57	4,23	(7,44)
UJP I GSU Sanggau	7,48	4,16	(44,39)
PLTP I GPP Ulumbu	3,31	1,42	(57,10)
Jumlah I Total	**14,16**	**29,69**	**109,68**

Tabel SOF Unit Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa (%)
Table of SOF for O&M Power Plants Outside Java (%)

Unit Pembangkit Plant Unit	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
UJP I GSU Pangkalan Susu	13,44	13,15	(2,16)
UJP I GSU Barru	12,25	24,13	96,98
UJP I GSU Jeranjang	17,48	14,72	(15,79)
UJP I GSU Sanggau	23,48	27,99	19,21
PLTP I GPP Ulumbu	29,18	14,89	(48,97)
Jumlah I Total	**10,35**	**15,66**	**51,30**

TINJAUAN KINERJA OPERASI PER SEGMEN

OPERATIONAL PERFORMANCE REVIEW PER SEGMENT

Tabel SdOF Unit Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa (kali)

Table of SdOF for O&M Power Plants Outside Java (time)

Unit Pembangkit Plant Unit	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
UJP I GSU Pangkalan Susu	2,50	11,00	340,00
UJP I GSU Barru	10,00	4,00	(60,00)
UJP I GSU Jeranjang	-	4,50	-
UJP I GSU Sanggau	32,50	3,50	(89,23)
PLTP I GPP Ulumbu	10,00	10,75	7,50
Jumlah I Total	**3,73**	**9,00**	**141,29**

Tabel Tara Kalor Unit Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa (kCal/kWh)

Table of Heat Rate for O&M Power Plants Outside Java (kCal/kWh)

Unit Pembangkit Plant Unit	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
UJP I GSU Pangkalan Susu	2.411,10	3.055,75	26,74
UJP I GSU Barru	3.571,84	3.270,51	(8,44)
UJP I GSU Jeranjang	3.564,33	3.634,07	1,96
UJP I GSU Sanggau	5.567,18	5.589,35	0,40
PLTP I GPP Ulumbu	-	-	-
Jumlah I Total	**2.812,14**	**3.220,59**	**14,52**

PROFITABILITAS PER SEGMEN
PROFITABILITY BY SEGMENT



Pendapatan Operasi Per Segmen

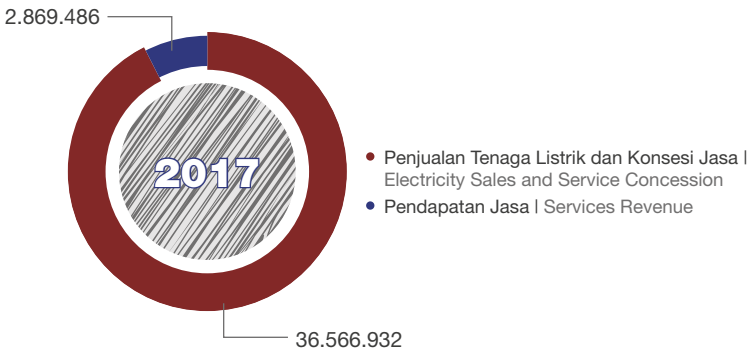
Pendapatan usaha tahun 2017 adalah sebesar Rp39.436.418 juta meningkat 7,44% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp36.705.954 juta. Dari jumlah pendapatan tersebut, pendapatan usaha dari segmen usaha penyediaan tenaga listrik masih mendominasi dengan jumlah kontribusi sebesar Rp36.566.932 juta atau 92,72%. Dimana di tahun 2017, pendapatan usaha dari segmen usaha penyediaan tenaga listrik terdiri dari pendapatan usaha penjualan tenaga listrik dan konsesi jasa. Pendapatan usaha dari konsesi jasa sendiri atas PJBTL PLTU Suralaya 1-7 dan PT IRP selama 30 tahun yang memenuhi kriteria ISAK 16. Sedangkan pendapatan usaha dari segmen usaha jasa O&M adalah sebesar Rp2.869.486 juta atau 7,28%.

Revenues by Segment

In 2017, the Revenues amounting to Rp39,436,418 million was an increase by 7.44% from Rp36,705,954 million in 2016. From the total Revenues, electricity supply remains dominating with the contribution amounting to Rp36,566,932 million or 92.72%. Where, in 2017, Revenues from electricity supply is sourced from Sale of Electricity and service concession. Revenues from service concession covers the Electricity Sale and Purchase Agreement (PJBTL) of SPP Suralaya 1-7 and PT IRP which, for 30 years, has met the ISAK 16 criteria. From O&M Services, the Revenues are recorded at the amount of Rp2,869,486 million or 7.28%.

PROFITABILITAS PER SEGMEN
PROFITABILITY BY SEGMENT

Komposisi Pendapatan Usaha Per Segmen Tahun 2017 (Rp juta)
Composition of Revenues by Segment in 2017 (Rp million)



Kontribusi Kinerja Keuangan dari Anak Perusahaan

Laba komprehensif Indonesia Power juga dikontribusi dari kinerja Anak Perusahaan. Berikut merupakan profitabilitas Anak Perusahaan Indonesia Power tahun 2017:

Contribution of Performances by Subsidiaries and Associates

Indonesia Power's comprehensive income is also contributed by the performances of the Subsidiaries and Associates. The following table presents the profitability of Indonesia Power Subsidiaries in 2017:

Tabel Laba Anak Perusahaan Tahun 2017
Table of Profit (Loss) of Subsidiaries and Associates in 2017

No	Nama Anak Perusahaan Name of Subsidiary	Jumlah Laba Total Profit
1	PT Artha Daya Coalindo (Rp miliar) I (Rp billion)	26,60
2	PT Cogindo DayaBersama (Rp miliar) I (Rp billion)	46,98
3	PT Indo Ridlatama Power (Rp miliar) I (Rp billion)	65,66
4	PT Indo Tenaga Hijau (USD)	(215.276)
5	PT Putra Indo Tenaga (Rp miliar) I (Rp billion)	8,96

Uraian singkat mengenai kinerja Anak Perusahaan telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya pada bab Profil Perusahaan bagian Sekilas Kinerja Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi dan Perusahaan Patungan dalam Laporan Tahunan ini.

Brief description of the Subsidiaries' performances is presented in the previous sub-chapter in the chapter Company Profile, section Performance Overview of Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures of this Annual Report.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW



Laporan Posisi Keuangan

Pada tahun 2017 Perusahaan mengelola total aset sebesar Rp218.339.042 juta, Liabilitas sebesar Rp9.208.877 juta serta Ekuitas sebesar Rp209.130.165 juta.

Financial Position Statements

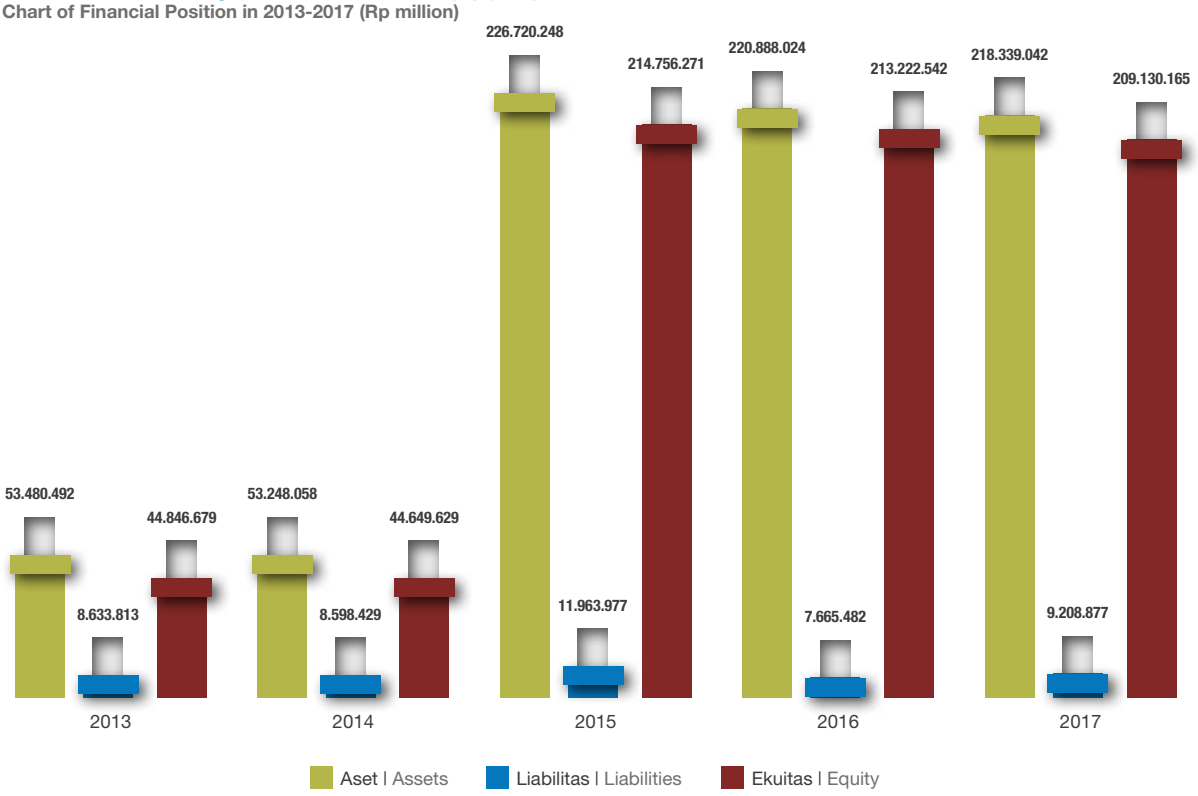
In 2017, the Company managed total assets adding up to Rp218,339,042 million, Liabilities amounting at Rp9,208,877 million, and Equity amounting at Rp209,130,165 million.

Tabel Posisi Keuangan Tahun 2013-2017 (Rp juta)
Table of Financial Position in 2013-2017 (Rp million)

Uraian Description	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
Aset I Assets	53.480.492	53.248.058	226.720.248	220.888.024	218.339.042	(1,15)
Liabilitas I Liabilities	8.633.813	8.598.429	11.963.977	7.665.482	9.208.877	20,13
Ekuitas I Equity	44.846.679	44.649.629	214.756.271	213.222.542	209.130.165	(1,92)

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW

Grafik Posisi Keuangan Tahun 2013-2017 (Rp juta)
Chart of Financial Position in 2013-2017 (Rp million)



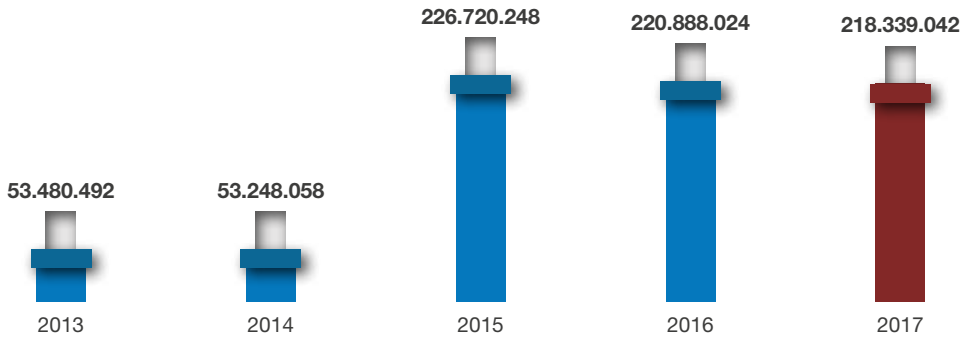
Aset
Aset Perusahaan tahun 2017 sebesar Rp218.339.042 juta menurun 1,15% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp220.888.024 juta. Penurunan dipengaruhi oleh proses depresiasi aset tetap selama tahun 2017.

Assets
The Company's Asset in 2017 was amounted to Rp218,339,042 million, a decline by 1.15% from Rp220,888,024 million in 2016. This was affected by Depreciation of Property, Plant, and Equipment throughout 2017.

Tabel Aset Tahun 2013-2017 (Rp juta)
Table of Assets in 2013-2017 (Rp million)

Uraian Description	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
Aset Lancar I Current Assets	25.593.614	25.756.099	28.125.821	26.032.438	35.030.296	34,56
Aset Tidak Lancar I Non-current Assets	27.886.878	27.491.959	198.594.427	194.855.586	183.308.746	(5,93)
Jumlah Aset I Total Assets	**53.480.492**	**53.248.058**	**226.720.248**	**220.888.024**	**218.339.042**	**(1,15)**

Grafik Aset Tahun 2013-2017 (Rp juta)
Graph: Assets 2013-2017 (Rp million)



Aset Lancar

Aset lancar tahun 2017 sebesar Rp35.030.296 juta meningkat 34,56% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp26.032.438 juta. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh penerimaan kas setara kas dari skema EBA, piutang usaha atas PJBTL, peningkatan pajak di bayar dimuka.

Current Assets

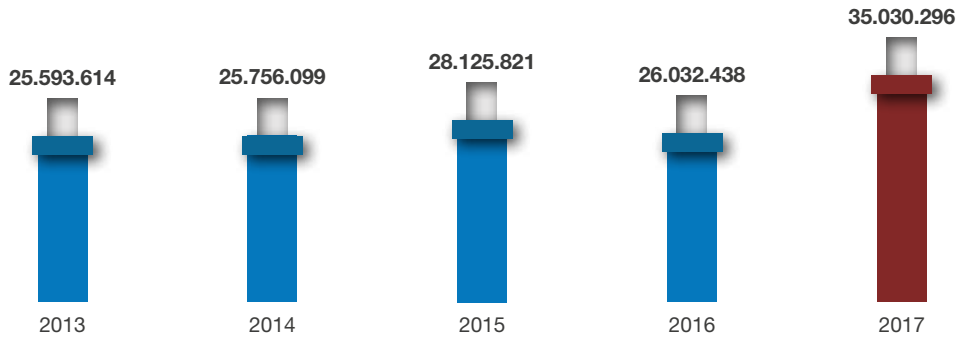
Current Assets in 2017 amounting to Rp35,030,296 million, was an increase by 34.56% from Rp26,032,438 million in 2016. This was particularly triggered by the receipt of Cash and Cash Equivalents from Asset-backed Securities, Trade Receivables from PJBTL, increase in Prepaid Taxes of Income Tax 22 and VAT In.

Tabel Aset Lancar Tahun 2013-2017 (Rp juta)
Table of Current Assets in 2013-2017 (Rp million)

Uraian Description	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalent	972.149	445.617	896.378	1.500.820	4.841.012	222,56
Piutang Usaha I Trade Receivables	22.090.394	22.730.008	24.493.692	21.666.641	25.646.705	18,37
Piutang Lain-lain I Other Receivables	353.271	23.547	13.091	12.025	15.428	28,30
Persediaan I Inventories	1.825.219	2.088.197	2.203.016	1.963.398	1.975.340	0,61
Piutang Pihak Berelasi Receivables from Related Party	88.292	114.867	83.371	42.134	35.092	(16,71)
Pajak Dibayar Di Muka I Prepaid Taxes	55.188	113.627	166.710	660.545	1.130.507	71,15
Biaya Dibayar Di Muka dan Uang Muka Prepaid Expenses and Advances	209.101	240.236	269.563	186.875	282.230	51,03
Aset Keuangan dari Proyek Konsesi Financial Assets from Service Concession	-	-	-	-	1.103.982	-
Jumlah Aset Lancar **Total of Current Assets**	**25.593.614**	**25.756.099**	**28.125.821**	**26.032.438**	**35.030.296**	**34,56**

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW

Grafik Aset Lancar Tahun 2013-2017 (Rp juta)
Chart of Current Assets in 2013-2017 (Rp million)



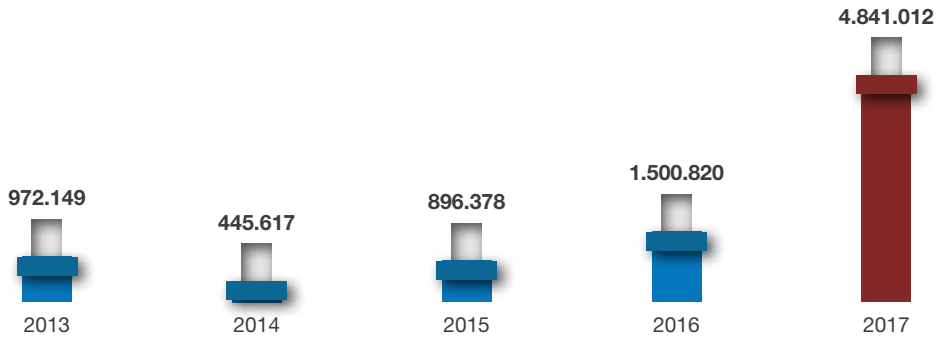
Kas dan Setara Kas
Kas dan Setara Kas Perusahaan tahun 2017 adalah sebesar Rp4.841.012 juta meningkat 222,56% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp1.500.820 juta. Peningkatan dipengaruhi penerimaan atas pendanaan dari skema EBA.

Cash and Cash Equivalents
The Company's Cash and Cash Equivalents in 2017 was amounting to Rp4,841,012 million which was an increase by 222.56% from Rp1,500,820 million in 2016. The increase was affected by receipt of financing from Asset-backed Securities.

Tabel Kas dan Setara Kas Tahun 2013-2017 (Rp juta)
Table of Cash and Cash Equivalents in 2013-2017 (Rp million)

Uraian Description	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
Kas | Cash on hand	1.212	380	290	337	344	(0,89)
Bank | Cash in banks						
Pihak Berelasi | Related Parties	663.109	350.113	513.203	1.110.685	2.653.422	138,90
Pihak Ketiga | Third Parties	53.978	13.274	50.635	57.248	63.287	10,55
Jumlah Kas dan Bank **Total Cash and Bank**	**718.299**	**363.767**	**563.838**	**1.168.270**	**2.717.053**	**132,57**
Setara Kas - Deposito Berjangka Cash Equivalent - Time Deposits						
Pihak Berelasi | Related Parties	251.350	79.350	329.750	330.050	2.123.959	543,53
Pihak Ketiga | Third Parties	2.500	2.500	2.500	2500	-	-
Jumlah Setara Kas **Total Cash Equivalent**	**253.850**	**81.850**	**332.250**	**332.550**	**2.123.959**	**(538,69)**
Jumlah Kas dan Setara Kas **Total of Cash and Cash Equivalent**	**972.149**	**445.617**	**896.378**	**1.500.820**	**4.841.012**	**222,56**

Grafik Kas dan Setara Kas Tahun 2013-2017 (Rp juta)
Chart of Cash and Cash Equivalents in 2013-2017 (Rp million)



Piutang Usaha

Piutang Usaha Perusahaan tahun 2017 sebesar Rp25.646.705 juta meningkat 18,37% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp21.666.641 juta. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh penambahan piutang atas PJBTL.

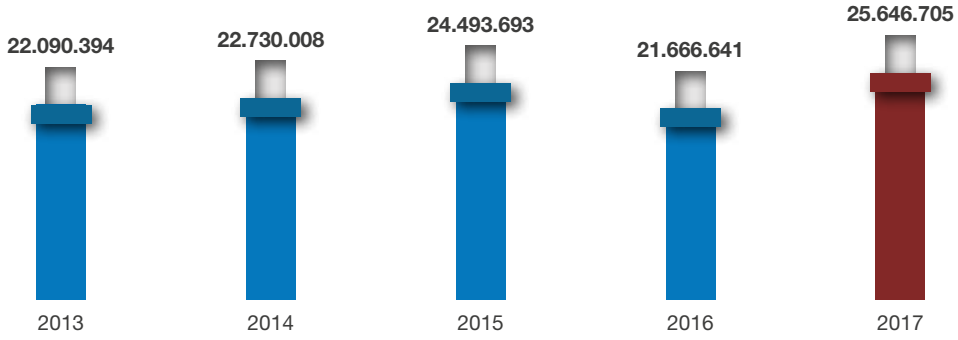
Trade Receivables

The Company's Trade Receivables in 2017 amounting to Rp25,646,705 million was an increase by 18.37% from Rp21,666,641 million in 2016. This was particularly affected by the increase in receivables from PJBTL.

Tabel Piutang Usaha Tahun 2013-2017 (Rp juta)
Table of Trade Receivables in 2013-2017 (Rp million)

Uraian Description	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
Pihak Berelasi - PT PLN Related Parties - PT PLN	22.051.088	22.677.861	24.442.578	21.615.875	25.617.750	18,51
Pihak Ketiga I Third Parties	46.857	61.927	65.317	61.957	59.386	(4,15)
Cadangan kerugian penurunan nilai Allowance for impairment losses	(7.551)	(9.780)	(14.203)	(11.191)	(30.431)	171,92
Pihak Ketiga - Bersih I Third Parties - Net	39.306	52.147	51.114	50.766	28.955	(42,96)
Jumlah Piutang Usaha **Total of Trade Receivable**	**22.090.394**	**22.730.008**	**24.493.693**	**21.666.641**	**25.646.705**	**18,37**

Grafik Piutang Usaha Tahun 2013-2017 (Rp juta)
Chart of Trade Receivables in 2013-2017 (Rp million)



TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW

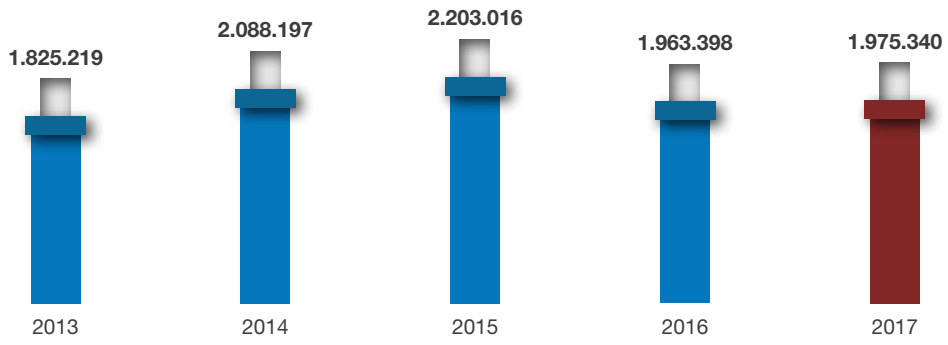
Persediaan
Persediaan tahun 2017 sebesar Rp1.975.340 juta meningkat 0,61% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp1.963.398 juta yang merupakan dampak penggeseran jadwal Pemeliharaan Pembangkit ke tahun 2018 karena kebutuhan sistim kelistrikan.

Inventories
Inventories in 2017 at Rp1,975,340 million was an increase by 0.61% from Rp1,963,398 million in 2016, due to the impact of the reschedule of Power Plant Maintenance to 2018 due to the needs in electricity system.

Tabel Persediaan Tahun 2013-2017 (Rp juta)
Table of Inventories in 2013-2017 (Rp million)

Uraian Description	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
Bahan Bakar dan Pelumas Fuel and Lubricant	1.682.275	1.955.801	2.058.563	1.668.968	1.722.208	3,19
Material Pemeliharaan Maintenance Materials	166.837	152.043	165.973	315.833	273.059	(13,54)
Penyisihan Penurunan Nilai Allowance for Decline in Value	(23.893)	(19.647)	(21.520)	(21.403)	(19.927)	(6,9)
Jumlah Persediaan | Total of Inventories	**1.825.219**	**2.088.197**	**2.203.016**	**1.963.398**	**1.975.340**	**0,61**

Grafik Persediaan Tahun 2013-2017 (Rp juta)
Chart of Inventories in 2013-2017 (Rp million)



Pajak Dibayar di Muka
Pajak Dibayar di Muka tahun 2017 adalah sebesar Rp1.130.507 juta meningkat 71,15% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp660.545 juta. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan PPh 22 atas PJBTL, PPN Masukan atas pengadaan barang dan jasa.

Prepaid Taxes
Prepaid Taxes in 2017 amounting to Rp1,130,507 million was an increase by 71.15% from Rp660,545 million in 2016. This was particularly affected by the increase in Income Tax 22 for PJBTL, VAT In for goods and services procurement.

Aset Tidak Lancar

Aset Tidak Lancar tahun 2017 sebesar Rp183.308.746. juta menurun 5,93% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp194.855.586 juta. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh proses depresiasi aset tetap meskipun terdapat penambahan aset tetap operasi maupun aset dalam konstruksi sebagai peningkatan kehandalan pembangkit dan pengembangan pembangkit.

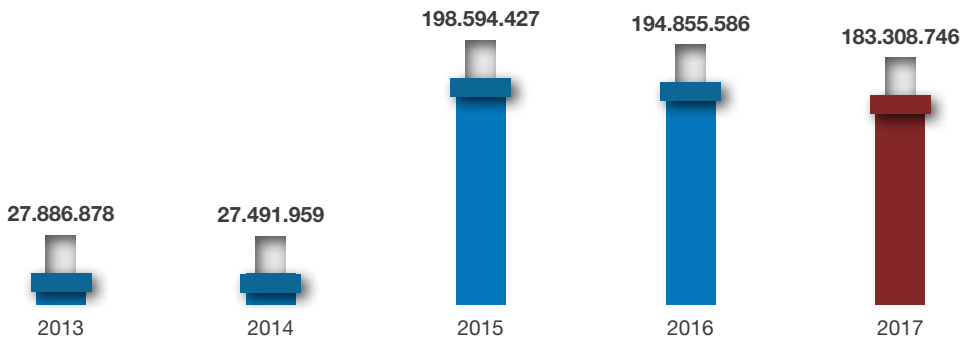
Non-Current Assets

Non-Current Assets in 2017 amounting to Rp183,308,746 million was a decline by 5.93% from Rp194,855,586 million in 2016. It was particularly due to Depreciation of Property, Plant, and Equipment, albeit the Addition of Property, Plant, and Equipment for operation and construction for power plant development and reliability improvement.

Tabel Aset Tidak Lancar Tahun 2013-2017 (Rp juta)
Table of Non-Current Assets in 2013-2017 (Rp million)

Uraian Description	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
Aset Tetap | Fixed Assets	27.430.075	26.804.482	196.745.124	193.520.890	135.092.818	(30,19)
Properti Investasi | Investment Properties	-	-	-	-	183.637	-
Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment on Association Entity and Joint Ventures	168.850	198.540	203.696	267.047	618.394	131,57
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	81	27	1.088.283	1.212	2.404	98,35
Piutang Pihak Berelasi Receivables from Related Party	160.401	302.662	395.387	481.336	477.644	(0,77)
Piutang Lain-lain Other Receivables	26.657	21.765	30.631	34.116	31.546	(7,53)
Biaya Dibayar di Muka Prepaid Expenses	-	46.911	20.368	17.366	14.367	(17,27)
Aset Keuangan dari Konsesi Jasa Financial Assets from Service Concession	-	-	-	-	46.487.520	-
Aset Tidak Lancar Lain Other Non-Current Assets	100.814	117.572	110.938	533.619	400.416	(24,96)
Jumlah Aset Tidak Lancar Total of Non-Current Assets	**27.886.878**	**27.491.959**	**198.594.427**	**194.855.586**	**183.308.746**	**(5,93)**

Grafik Aset Tidak Lancar Tahun 2013-2017 (Rp juta)
Chart of Non-Current Assets in 2013-2017 (Rp million)



TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW

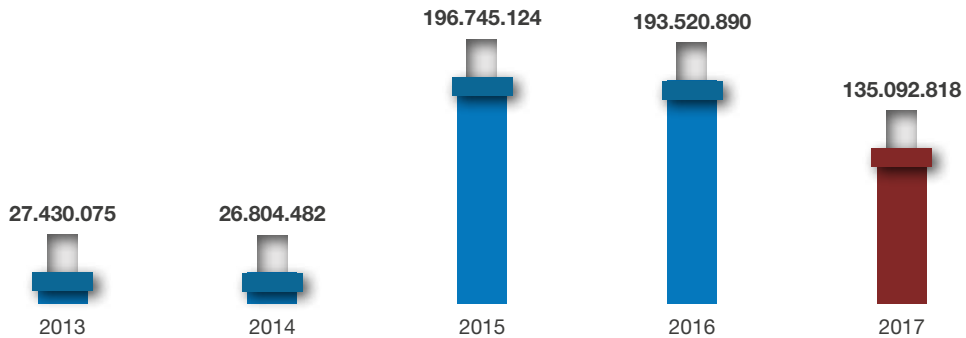
Aset Tetap
Aset Tetap Perusahaan tahun 2017 sebesar Rp135.092.818 juta menurun 30,19% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp193.520.890 juta. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh reklasifikasi Aset Tetap Operasi PLTU Suralaya 1-7 ke Piutang Leasing sehubungan dengan PJBTL 30 tahun yang memenuhi kriteria ISAK 16 serta proses depresiasi normal selama tahun 2017.

Fixed Assets
The Company's fixed assets in 2017 amounting to Rp135,092,818 million declined by 30.19% compared to the year before which totalled Rp193,520,890 million. This was mainly affected by the reclassification of Operational Property, Plant, and Equipment of SPP Suralaya 1-7 to Receivables from Leasing in connection to PJBTL which has met the ISAK 16 criteria for 30 years, and normal depreciation throughout 2017.

Tabel Aset Tetap Tahun 2013-2017 (Rp juta)
Table of Fixed Assets in 2013-2017 (Rp million)

Uraian Description	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
Tanah | Land	2.520.227	2.524.289	16.313.124	16.313.495	16.151.970	(0,99)
Bangunan, Waduk, dan Prasarana Buildings, Reservoir and Infrastructure	4.352.764	4.205.647	6.810.717	6.653.919	5.892.119	(11,45)
Instalasi dan Mesin Pembangkit Installation and Generators	17.045.356	15.340.242	166.829.110	162.949.096	105.426.382	(35,30)
Peralatan Transmisi Transmission Equipment	2.592.576	2.540.106	5.829.775	6.188.542	5.018.124	(18,91)
Instalasi Telekomunikasi Telecommunication Installation	31.142	56.262	36.716	39.035	57.689	47,79
Peralatan Umum | General Equipment	126.462	64.397	159.234	160.644	177.329	10,39
Kendaraan Bermotor | Vehicle	7.952	5.314	3.021	14.870	12.542	(15,66)
Material Cadang | Spare Parts	148.302	181.712	164.709	149.117	119.590	(19,80)
Lain-lain | Others	3.534	10.627	-	-	-	-
Instalasi Mesin Pembangkit Generator Installation	316.875	-	194.215	132.884	71.553	(46,15)
Pekerjaan dalam Pelaksanaan Work in Progress	279.056	1.851.013	331.041	872.324	1.979.630	126,94
Aset Tidak Digunakan dalam Operasi Unutilized Asset in Operations	5.829	24.874	73.462	46.964	185.890	295,81
Jumlah Aset Tetap **Total of Fixed Assets**	**27.430.075**	**26.804.482**	**196.745.124**	**193.520.890**	**135.092.818**	**(30,19)**

Grafik Aset Tetap Tahun 2013-2017 (Rp juta)
Chart of Fixed Assets in 2013-2017 (Rp million)



Properti Investasi

Properti Investasi tahun 2017 adalah sebesar Rp183.637 juta yang berupa tanah dengan potensi menghasilkan pendapatan yang berlokasi di Bali, Semarang, Kamojang dan Grati.

Investment Properties

Investment Properties in 2017 amounting to Rp183,637 million comprise land with potential revenue located in Bali, Semarang, Kamojang, and Grati.

Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tahun 2017 adalah sebesar Rp618.394 juta meningkat 131,57% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp267.047 juta yang dipengaruhi oleh penambahan penyertaan pada Afiliasi dari Anak Perusahaan yaitu PT GCL Indotenaga, PT Prima Layanan Niaga dan PT Indo Raya Tenaga.

Investment in Associates and Joint Ventures

Investment in Associates and Joint Ventures in 2017 amounting to Rp618,394 million was an increase by 131.57% from Rp267,047 million in 2016, due to the increase in share ownership of Subsidiaries' Affiliates, i.e. PT GCL Indotenaga, PT Prima Layanan Niaga, and PT Indo Raya Tenaga.

Tabel Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama (Rp juta)

Table of Investment in Associates and Joint Ventures (Rp million)

Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Associated Entities and Joint Ventures	2017					
	Awal Tahun 2017 Early 2017	**Penambahan** Addition	**Dividen** Dividend	**Bagian atas Laba (Rugi) Bersih** Net Top of Profit (Loss)	**Bagian atas Pendapatan Komprehensif** Share of Comprehensive Income	**Akhir Tahun 2017** The End of 2017
Entitas Asosiasi Associated Entity						
PT Indo Pusaka Berau	111.598	-	(1.163)	1.220	-	111.655
PT Prima Layanan Niaga	-	73.500	-	372	-	73.872
Entitas Ventura Bersama Joint Venture Entity						
PT Rajamandala Electric Power	114.807	-	-	(21.127)	14.893	108.573
PT Perta Daya Gas	-	-	-	3.016	113	3.129
PT GCL Indotenaga	40.642	280.622	-	(47)	-	320.845
PT Indo Raya Tenaga	-	510	-	(190)	-	320
Jumlah I Total	**267.047**	**354.632**	**(1.163)**	**(17.128)**	**15.006**	**618.394**

Piutang Pihak Berelasi

Piutang Pihak Berelasi tahun 2017 adalah sebesar Rp477.644 juta menurun 0,77% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp481.336 juta sejalan dengan membaiknya periode penagihan terhadap piutang pihak berelasi untuk PT REP dan PT PDG.

Receivables from Related Parties

Receivables from Related Parties in 2017 amounting to Rp477,644 million was a decline by 0.77% from Rp481,336 million in 2016, along with the improvement in the collection period of related parties for PT REP and PT PDG.

Aset Keuangan dari Konsesi Jasa

Aset keuangan dari konsesi jasa tahun 2017 adalah sebesar Rp46.487.520 juta. Aset keuangan dari konsesi jasa tahun 2017 adalah atas PJBTL PLTU Suralaya 1-7 dan PT IRP selama 30 tahun yang memenuhi kriteria ISAK 16.

Financial Assets from Service Concession

Financial Assets from Service Concession in 2017 was amounting to Rp46,487,520 million. Financial Assets from Service Concession in 2017 was from the Electricity Sale and Purchase Agreement (PJBTL) of SPP Suralaya 1-7 and PT IRP which, for 30 years, has met the ISAK 16 criteria.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW

Aset Tidak Lancar Lain
Aset Tidak Lancar Lain tahun 2017 adalah sebesar Rp400.416 juta menurun 24,96% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp533.619 juta yang dipengaruhi oleh reklasifikasi biaya ditangguhkan ke pos pekerjaan dalam konstruksi.

Other Non-Current Assets
Other Non-Current Assets in 2017 amounting to Rp400,416 million was a decline by 24.96% from Rp533,619 million in 2016, which was triggered by the reclassification of deferred expenses to Construction in Progress.

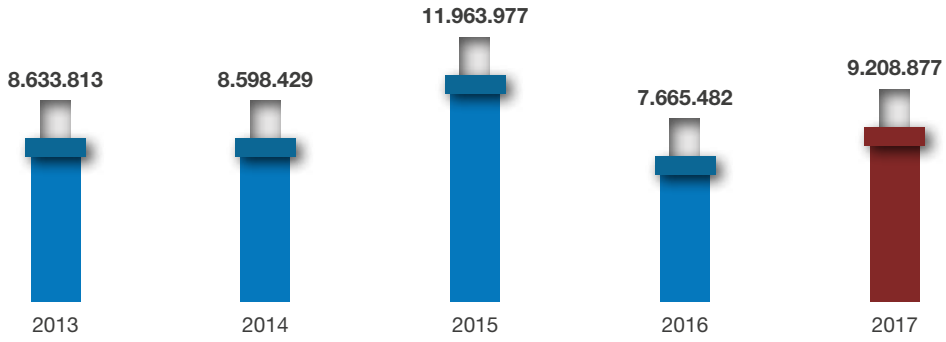
Liabilitas
Liabilitas Perusahaan tahun 2017 sebesar Rp9.208.877 juta meningkat 20,13% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp7.665.482 juta. Peningkatan terutama dipengaruhi oleh kenaikan pada pos hutang usaha pengadaan energi primer atas kenaikan harga di tahun 2017 dan peningkatan hutang pajak tangguhan serta liabilitas manfaat pekerja atas penambahan 492 pegawai di tahun 2017.

Liabilities
The Company's Liabilities in 2017 amounting to Rp9,208,877 million was an increase by 20.13% from Rp7,665,482 million in 2016. This was mainly caused by the increase in Trade Payables from primary energy procurement for the price increase in 2017 and the increase in deferred tax payables and employee benefits liabilities for the addition of 492 employees in 2017.

Tabel Liabilitas Tahun 2013-2017 (Rp juta)
Table of Liabilities in 2013-2017 (Rp million)

Uraian Description	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
Liabilitas Jangka Pendek Short-term Liabilities	3.890.560	3.244.923	9.206.379	4.554.447	5.535.313	21,54
Liabilitas Jangka Panjang Long-term Liabilities	4.743.253	5.353.506	2.757.598	3.111.035	3.673.564	18,08
Jumlah Liabilitas | Total Liabilities	**8.633.813**	**8.598.429**	**11.963.977**	**7.665.482**	**9.208.877**	**20,13**

Grafik Liabilitas Tahun 2013-2017 (Rp juta)
Chart of Liabilities in 2013-2017 (Rp million)



Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas Jangka Pendek tahun 2017 sebesar Rp5.535.313 juta meningkat 21,54% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp4.554.447 juta, yang dipengaruhi oleh peningkatan hutang energi primer sebagai dampak kenaikan harga, dan peningkatan transaksi kepada PT PLN Group untuk pengadaan jasa pengangkutan bahan bakar, pengadaan *spare part* pembangkit dan pelayanan di bidang IT (PT BAG, PJB Stockist, ICON+),

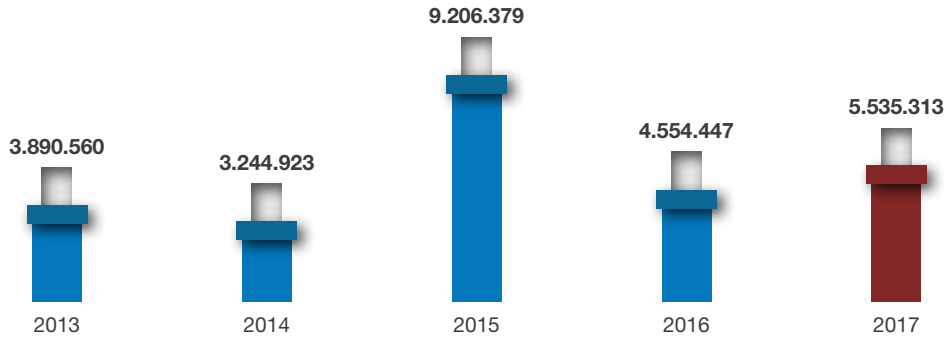
Current Liabilities

Total Current Liabilities in 2017 amounting to Rp5,535,313 million was an increase by 21.54% from Rp4,554,447 million in 2016, due to the increase in primary energy payables as a result of price increase, and increased transactions to PT PLN Group for fuel transport service procurement, plant spare parts procurement, and IT services (PT BAG, PJB Stockist, ICON+).

Tabel Liabilitas Jangka Pendek Tahun 2013-2017 (Rp juta)
Table of Current Liabilities in 2013-2017 (Rp million)

Uraian Description	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
Utang Usaha | Trade Payable	3.295.894	2.798.263	3.098.851	3.336.147	3.864.323	15,83
Utang Sewa Pembiayaan Lease Liabilities	66.001	-	95.377	106.991	145.807	36,28
Utang Lain-lain | Other Payables	6.736	9.026	8.435	3.822	-	-
Utang Pajak | Tax Payables	220.760	157.649	5.306.516	251.758	318.084	26,35
Biaya Masih Harus Dibayar Accrued Expenses	145.931	134.945	425.995	555.569	951.415	71,25
Utang Pihak Berelasi Payable to Related Parties	9.339	18.435	65.074	37.796	16.564	(56,18)
Liabilitas Imbalan Kerja Employee Benefits Liabilities	145.899	126.605	206.131	262.364	239.120	(8,86)
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek **Total of Short-Term Liabilities**	**3.890.560**	**3.244.923**	**9.206.379**	**4.554.447**	**5.535.313**	**21,54**

Grafik Liabilitas Jangka Pendek Tahun 2013-2017 (Rp juta)
Chart of Current Liabilities in 2013-2017 (Rp million)



TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW

Utang Usaha
Utang Usaha Perusahaan tahun 2017 sebesar Rp3.864.323 juta meningkat 15,83% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp3.336.147 juta. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan hutang BBM dan hutang pada PLN Grup (BAG, PJB Stockist, ICON+).

Utang Pajak
Utang Pajak tahun 2017 sebesar Rp318.084 juta meningkat 26,35% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp251.758 juta yang dipengaruhi peningkatan atas pengadaan barang dan jasa.

Biaya Masih Harus Dibayar
Biaya yang masih harus dibayar tahun 2017 sebesar Rp951.415 juta meningkat 71,25% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp555.569 juta dipengaruhi oleh peningkatan hutang biaya yang terdiri dari hutang kepegawaian untuk akrual bonus kepada karyawan, biaya sewa, biaya pengobatan, biaya pemeliharaan gedung.

Utang Sewa Pembiayaan
Utang Sewa Pembiayaan tahun 2017 sebesar Rp145.807 juta meningkat 36,28% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp106.991 juta adalah merupakan pengadaan PLTD Pesanggran 50 MW yang memenuhi kriteria ISAK 8.

Liabilitas Imbalan Kerja
Liabilitas Imbalan Kerja tahun 2017 sebesar Rp239.120 juta menurun 8,86% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp262.364 juta. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan cadangan aktuaria karena penambahan 802 pegawai di tahun 2017.

Trade Payables
The Company's Trade Payables in 2017 amounting to Rp3,864,323 million was an increase by 15.83% from Rp3,336,147 million in 2016. This was particularly caused by the increase in fuel liabilities and payables to PLN Group (BAG, PJB Stockist, ICON+).

Tax Payables
Tax Payables in 2017 amounting to Rp318,084 million was an increase by 26.35% from Rp251,758 million in 2016, due to the increase in goods and services procurement.

Accrued Expenses
Accrued Expenses in 2017 amounting to Rp951,415 million was an increase by 71.25% from Rp555,569 million in 2016. It was particularly influenced by the increase in liabilities, covering personnel expenses for accrual bonus for employees, lease expenses, medical treatment expenses, and building maintenance expenses.

Lease Liabilities
Lease Expenses in 2017 amounting to Rp145,807 million was an increase by 36.28% from Rp106,991 million in 2016, resulted from the procurement of DPP Pesanggaran 50 MW which has met the ISAK 8 criteria.

Employee Benefits Liabilities
Employee Benefits Liabilities in 2017 amounting to Rp239,120 million was a decline by 8.86% from Rp262,364 million in 2016. This was mainly due to the increase in actual reserves from the addition of 802 employees in 2017.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang tahun 2017 sebesar Rp3.673.564 juta meningkat 18,08% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp3.111.035 juta. Peningkatan ini dipengaruhi oleh liabilitas Pajak tangguhan dan peningkatan cadangan jangka panjang Imbalan Kerja.

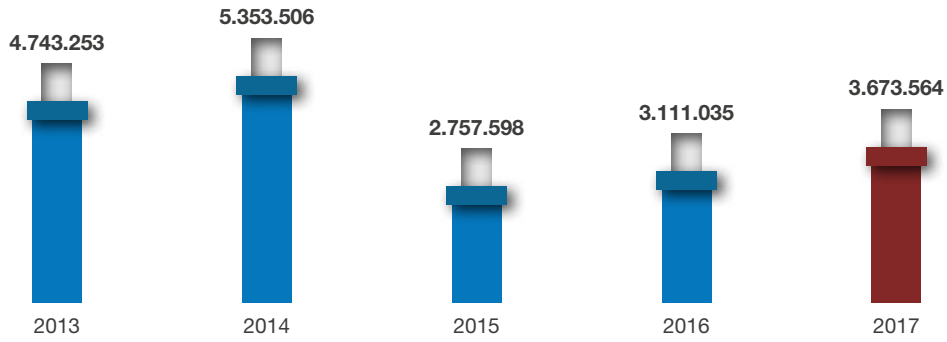
Non-Current Liabilities

Non-Current Liabilities in 2017 amounting to Rp3,673,564 million was an increase by 18.08% from Rp3,111,035 million in 2016. This was affected by deferred tax liabilities and the increase in reserve for Long-term Employee Benefits.

Tabel Liabilitas Jangka Panjang Tahun 2013-2017 (Rp juta)
Table of Non-Current Liabilities in 2013-2017 (Rp million)

Uraian Description	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
Liabilitas Pajak Tangguhan Deferred Tax Liabilities	2.689.532	2.385.788	30.389	413.167	847.476	105,12
Utang Sewa Pembiayaan Lease Liabilities	398.391	-	256.731	144.949	-	-
Utang Pihak Berelasi Payable to Related Parties	5.433	3.526	2.717	-	-	-
Liabilitas Imbalan Kerja Allowance for Employee Benefits	1.649.897	2.964.192	2.467.761	2.552.919	2.826.088	10,70
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang **Total of Long-Term Liabilities**	**4.743.253**	**5.353.506**	**2.757.598**	**3.111.035**	**3.673.564**	**18,08**

Grafik Liabilitas Jangka Panjang Tahun 2013-2017 (Rp juta)
Chart of Non-Current Liabilities in 2013-2017 (Rp million)



TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW

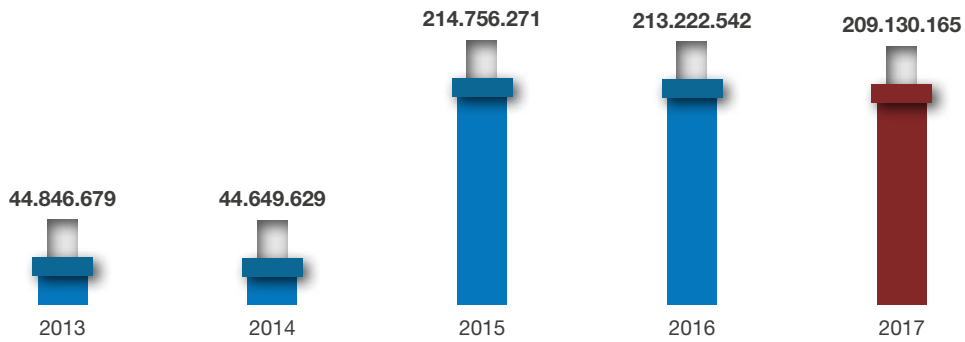
Ekuitas
Total Ekuitas Perusahaan tahun 2017 sebesar Rp209.130.165 juta menurun 1,92% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp213.222.542 juta. Penurunan Ekuitas ini terutama dipengaruhi oleh pembayaran dividen kepada pemegang saham dan penurunan ekuitas atas penghasilan komprehensif lain dari surplus revaluasi atas pembangkit yang keluar sistem.

Equity
The Company's Equity in 2017 amounting to Rp209,130,165 million was a decline by 1.92% from Rp213,222,542 million in 2016. This was mainly caused by dividend payment to shareholders and decline in equity from other comprehensive incomes from power plant outage revaluation surplus.

Tabel Ekuitas Tahun 2013-2017 (Rp juta)
Table of Equity in 2013-2017 (Rp million)

Uraian Description	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
Modal | **Capital**						
Modal Ditempatkan dan Disetor Issued Capital and Paid-Up Capital	2.607.824	2.607.824	2.607.824	2.607.824	2.607.824	-
Tambahan Modal Disetor Additional Paid-Up Capital	5.503.726	5.503.726	5.503.726	5.513.843	5.513.843	-
Saldo Laba | **Retain Earnings**						
Ditentukan Penggunaannya Appropriated	2.122.213	2.122.213	2.122.213	2.122.213	2.122.213	-
Tidak Ditentukan Penggunaannya Not Appropriated	34.577.245	35.224.144	38.313.162	36.990.310	37.325.468	0,91
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	-	(848.223)	166.166.282	165.944.572	161.487.658	(2,69)
Ekuitas yang dapat diatribusikan **Equity attributable**						
Kepada pemilik entitas induk To owners of the parent	44.811.008	44.609.684	214.731.207	213.178.762	209.057.006	(1,93)
Kepentingan Non Pengendali Non-controlling Interests	35.671	39.945	43.064	43.780	73.159	67,11
Jumlah Ekuitas | **Total Equity**	**44.846.679**	**44.649.629**	**214.756.271**	**213.222.542**	**209.130.165**	**(1,92)**

Grafik Ekuitas Tahun 2013-2017 (Rp juta)
Chart of Equity in 2013-2017 (Rp million)



Modal Ditempatkan dan Disetor

Modal Ditempatkan dan Disetor Perusahaan tahun 2017 sebesar Rp2.607.824 juta tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

Tambahan Modal Disetor

Tambahan Modal Disetor Perusahaan tahun 2017 sebesar Rp5.513.843 juta tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

Saldo Laba

Saldo laba telah ditentukan penggunaannya tahun 2017 sebesar Rp2.122.213 juta tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk tahun 2017 sebesar Rp209.057.006 juta menurun 1,93% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp213.178.762 juta.

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepentingan Non Pengendali

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepentingan Non Pengendali tahun 2017 sebesar Rp73.159 juta mengalami peningkatan sebesar 67,11% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp43.780 juta, kenaikan dipengaruhi oleh penambahan laba tahun berjalan Anak Perusahaan tahun berjalan.

Subscribed and Paid up Capital

The Company's Subscribed and Paid up Capital in 2017 amounting to Rp2,607,824 million did not change from the previous year.

Additional Paid-in Capital

The Company's Additional Paid-in Capital in 2017 amounting to Rp5,513,843 million did not change from the previous year.

Retained Earnings

The Company's Appropriated Retained Earnings in 2017 amounting to Rp2,122,213 million did not change from the previous year.

Equity Attributable to Owners of the Parent

Equity Attributable to Owners of the Parent in 2017 amounting to Rp209,057,006 million was a decline by 1.93% from Rp213,178,762 million in 2016.

Equity Attributable to Non-Controlling Interest

Equity Attributable to Non-Controlling Interest in 2017 amounting to Rp73,159 million was an increase by 67.11% from Rp43,780 million in 2016, due to the increase in Income for the Year for Subsidiaries.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW

Laba Rugi Komprehensif

Pada tahun 2017 Perusahaan membukukan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp3.232.323 juta meningkat 11,97% dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp2.886.704 juta yang dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan jasa O&M dan efisiensi biaya pemeliharaan dan biaya kepegawaian.

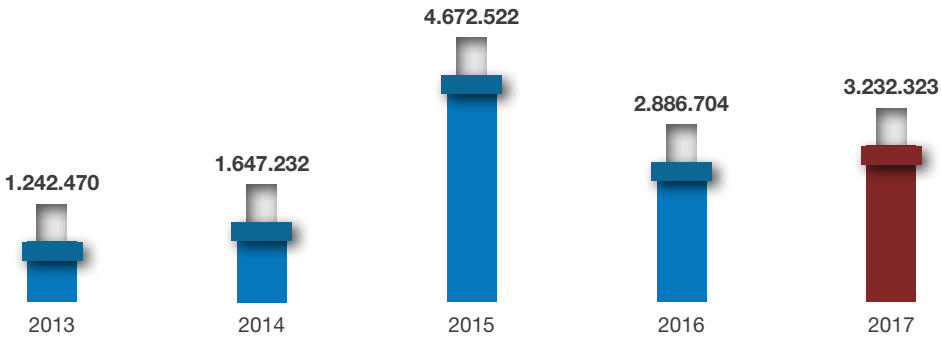
Statements of Profit or Loss

The Company recorded Comprehensive Income amounting to Rp3,232,323 million in 2017, an increase by 11.97% from Rp2,886,704 million in 2016 which was influenced by increased O&M services revenue along with efficiency of both maintenance and personnel costs.

Tabel Laba Rugi Tahun 2013-2017 (Rp juta)
Table of Income Statements in 2013-2017 (Rp million)

Uraian Description	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
Pendapatan Usaha I Revenues	33.531.493	35.723.617	32.020.186	36.705.954	39.436.418	7,44
Beban Usaha I Operating Expenses	31.514.317	33.527.047	29.895.661	32.610.030	35.069.946	7,54
Laba Usaha I Operating Income	2.017.176	2.196.570	2.124.525	4.095.924	4.366.472	6,61
Laba Sebelum Pajak I Income Before Tax	1.887.226	2.270.451	2.098.543	4.095.753	3.730.407	(8,92)
Beban Pajak Tax Expense	(644.756)	(623.219)	2.582.979	(1.209.049)	(498.084)	(58,80)
Laba Tahun Berjalan **Income for the Year**	**1.242.470**	**1.647.232**	**4.672.522**	**2.886.704**	**3.232.323**	**11,97**
Laba yang Dapat Diatribusikan kepada: Income for the Year Attributable to:						
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent	1.240.108	1.642.422	4.668.403	2.885.017	3.220.175	11,62
Kepentingan Non Pengendali Non-controlling Interests	2.362	4.810	4.119	1.687	12.148	620,09
Laba Tahun Berjalan **Income for the Year**	**1.242.470**	**1.647.232**	**4.672.522**	**2.886.704**	**3.232.323**	**11,97**
Total Penghasilan Komprehensif Lain yang Dapat Diatribusikan Kepada: Other Comprehensive Income Attributable to:						
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent	1.240.108	1.472.715	171.682.908	2.663.307	**(1.236.739)**	**(146,44)**
Kepentingan Non Pengendali Non-controlling Interests	2.362	4.810	4.119	1.687	**12.148**	**620,09**
Penghasilan Komprehensif Lain **Other Comprehensive Income**	**-**	**1.477.525**	**171.687.027**	**2.663.307**	**(1.224.591)**	**(145,95)**
Laba Per Lembar Saham **Earnings per Share**	**238**	**315**	**895**	**553**	**617**	**11,57**

Grafik Laba Tahun Berjalan Tahun 2013-2017 (Rp juta)
Chart of Income for the Year in 2013-2017 (Rp million)



Pendapatan Usaha

Pendapatan Usaha pada tahun 2017 sebesar Rp39.436.418 juta, meningkat 7,44% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp35.705.954 juta. Peningkatan Pendapatan Usaha ini terutama dipengaruhi oleh penambahan segmen usaha di Jasa O&M, Pendapatan Konsesi Jasa PT IRP, kenaikan unsur pendapatan dari energy primer (komponen C).

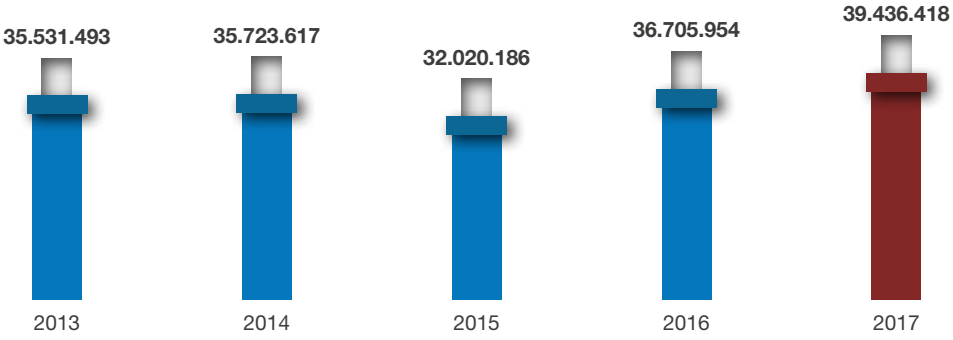
Revenues

In 2017, the Revenues amounting to Rp39,436,418 million was an increase by 7.44% from Rp35,705,954 million in 2016. The increase seen in Operating Revenues was mainly influenced by additional business segments in O&M Services, Revenue from PT IRP Service Concession and increased income from primary energy (component C).

Tabel Pendapatan Usaha Tahun 2013-2017 (Rp juta)
Table of Revenues in 2013-2017 (Rp million)

Uraian Description	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
Penjualan Tenaga Listrik | Electricity Sales	32.933.050	34.828.754	30.680.909	34.504.119	20.974.180	(39,21)
Pendapatan dari Konsesi Jasa Revenues from Service Concession	-	-	-	-	15.592.752	-
Pendapatan Jasa | Services Revenues	598.443	894.863	1.339.277	2.201.835	2.869.486	30,32
Jumlah Pendapatan Usaha **Total Revenues**	**33.531.493**	**35.723.617**	**32.020.186**	**36.705.954**	**39.436.418**	**7,44**

Grafik Pendapatan Usaha Tahun 2013-2017 (Rp juta)
Chart of Revenues in 2013-2017 (Rp million)



TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW

Beban Usaha

Beban Usaha tahun 2017 adalah sebesar Rp35.069.946 juta meningkat 7,54% dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp32.610.030 juta. Peningkatan ini dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan bakar baik batu bara maupun gas, beban pengelolaan Jasa Investasi pada segmen Jasa O&M, serta Beban Konsesi Jasa PT IRP.

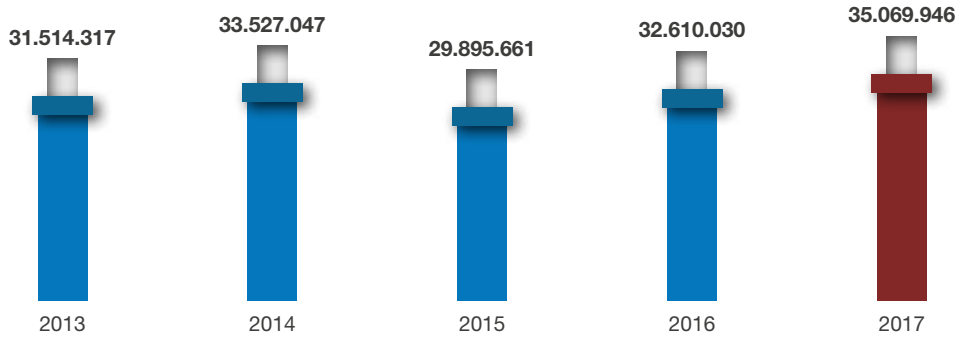
Operating Expenses

In 2017, the Operating Expense amounting to Rp35,069,946 million was an increase by 7.54% from Rp32,610,030 million in 2016. This increase was owing to the rise in coal and gas prices, investment management fees in the O&M Services segment and PT IRP Service Concession Fee.

Tabel Beban Usaha Tahun 2013-2017 (Rp juta)
Table of Operating Expenses in 2013-2017 (Rp million)

Uraian Description	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
Bahan Bakar dan Pelumas Fuel and Lubricants	24.688.326	26.543.914	22.431.963	21.987.360	13.977.467	(36,43)
Konsesi Jasa I Service Concession	-	-	-	-	11.722.323	-
Penyusutan Aset Tetap Depreciation of Fixed Assets	2.726.082	2.674.160	2.789.803	4.807.373	3.688.555	(23,27)
Pemeliharaan I Maintenance	2.112.624	2.080.842	2.441.127	3.687.470	2.994.122	(18,80)
Kepegawaian I Employment	1.380.156	1.337.719	1.760.602	1.741.670	2.274.026	30,57
Sewa I Lease	321.143	612.366	113.865	32.789	17.919	(45,35)
Lain-lain I Others	285.986	278.046	358.301	353.368	395.534	289,28
Jumlah Beban Usaha Total Operating Expenses	**31.514.317**	**33.527.047**	**29.895.661**	**32.610.030**	**35.069.946**	**7,54**

Grafik Beban Usaha Tahun 2013-2017 (Rp juta)
Chart of Operating Expenses in 2013-2017 (Rp million)



Laba Sebelum Pajak

Laba Sebelum Pajak tahun 2017 sebesar Rp3.730.407 juta menurun 8,92% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp4.095.753 juta. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan beban keuangan atas skema pendanaan EBA.

Income before Tax

Income before Tax in 2017 amounting to Rp3,730,407 million was a decline by 8.92% from Rp4,095,753 million in 2016. This was particularly caused by the increase in financial cost for EBA funding scheme.

Beban Pajak

Beban Pajak tahun 2017 Laba sebesar Rp(498.084) juta turun 58,80% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp(1.209.049) juta yang dipengaruhi oleh naiknya beban pajak tangguhan.

Tax Expenses

Tax Expenses in 2017 amounting to Rp(498,084) was a decline by 58.80% from Rp(1,209,049) in 2016 which was due to increased deferred tax liabilities.

Laba Per Saham

Laba per saham tahun 2017 sebesar Rp617 meningkat 11,57% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp553 dipengaruhi peningkatan laba rugi tahun berjalan

Earnings per Share

Earnings per Share in 2017 was Rp617, an increase by 11.57% from Rp553 in 2016. This was particularly triggered by the increase in Profit or Loss for the Year.

Laporan Arus Kas

Arus Kas terdiri dari aktivitas operasional, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Kas dan setara kas Perusahaan pada tahun 2017 sebesar Rp4.841.012 mengalami peningkatan sebesar 222,56% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp1.500.820 juta. Peningkatan ini dipengaruhi oleh penerimaan dana dari skema EBA atas Sekuritisasi Piutang PJBTL PLTU Suralaya.

Statements of Cash Flows

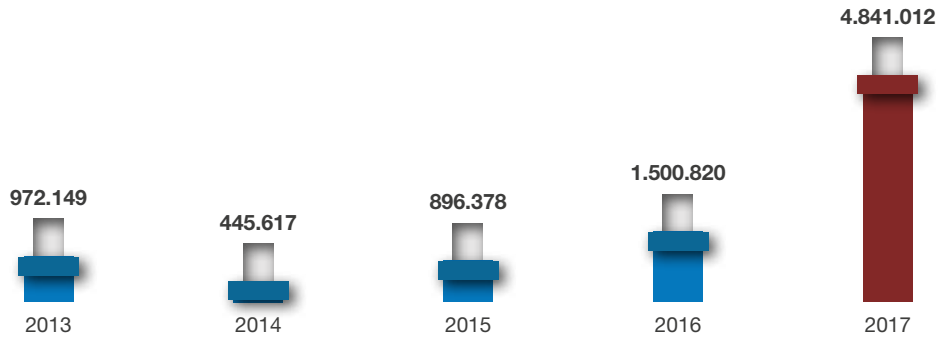
Cash Flows consist of Operating, Investing, and Financing Activities. The Company's Cash and Cash Equivalents in 2017 was amounting to Rp4,841,012 million which was an increase by 222.56% from Rp1,500,820 million in 2016. This was caused by the receipt of financing from Asset-backed Securities for Receivables from SPP Suralaya PJBTL.

Tabel Arus Kas Tahun 2013-2017 (Rp juta)
Table of Cash Flows in 2013-2017 (Rp million)

Uraian Description	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Net Cash Flow from Operating Activities	1.301.994	1.930.218	1.851.031	2.747.954	2.588.180	(5,81)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Net Cash Flow from Investing Activities	(1.122.531)	(2.456.150)	(1.324.078)	(2.057.923)	(3.159.551)	53,53
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Net Cash Flow from Financing Activities	(600)	(600)	(77.855)	(85.048)	3.911.098	4.698,69
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas Increase of Net Cash and Cash Equivalents	178.863	(526.532)	449.098	604.983	3.339.727	452,05
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents Balance in the Beginning of the Year	**820.279**	**972.149**	**445.617**	**896.378**	**1.500.820**	**67,43**
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents Balance at the End of the Year	**972.149**	**445.617**	**896.378**	**1.500.820**	**4.841.012**	**222,56**

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW

Grafik Saldo Kas dan Setara Kas Tahun 2013-2017 (Rp juta)
Chart of Cash and Cash Equivalents at End of Year in 2013-2017 (Rp million)



Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi
Kas Neto yang diperoleh dari Aktivitas Operasi tahun 2017 sebesar Rp2.588.180 juta menurun 5,81% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp2.747.954 juta. Penurunan ini terutama dipengaruhi pembayaran kepada pemasok dan karyawan, serta pembayaran pajak penghasilan.

Net Cash Provided by Operating Activities
Net Cash provided by Operating Activities in 2017 amounting to Rp2,588,180 million was a decline by 5.81% from Rp2,747,954 million in 2016. This was mainly caused by the Cash Paid to Suppliers and Employees and Income Tax Paid.

Tabel Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2013-2017 (Rp juta)
Table of Cash from Operating Activities in 2013-2017 (Rp million)

Uraian Description	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
Penerimaan dari Pelanggan Cash receipts from Customer	18.036.733	17.142.998	20.466.429	23.003.563	24.171.240	5,08
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan Cash paid to suppliers and employees	(16.017.699)	(14.391.514)	(17.956.628)	(19.879.618)	(21.365.075)	7,47
Kas dihasilkan dari operasi Cash provided by operating activities	**2.019.034**	**2.751.484**	**2.509.801**	**3.123.945**	**2.806.165**	**(10,17)**
Penerimaan bunga I Interest received				56.329	83.548	48,32
Pembayaran Pajak Penghasilan Income Tax Paid	(717.040)	(821.266)	(658.770)	(432.109)	(301.533)	(30,22)
Penerimaan Restitusi Pajak Penghasilan Recovered from Income Tax	-	-	-	(211)	-	-
Total Kas dari Aktivitas Operasi Total Cash by Operating Activities	**1.301.994**	**1.930.218**	**1.851.031**	**2.747.954**	**2.588.180**	**(5,81)**

Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Kas netto yang digunakan untuk aktivitas investasi tahun 2017 sebesar Rp(3.159.551) juta meningkat 53,53% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp(2.057.923) juta. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh penambahan aset tetap operasi, Investasi pada perusahaan asosiasi, Investasi EBA Seri B, dan Dividen dari PT IPB.

Net Cash Used for Investing Activities

Net Cash used for Investing Activities in 2017 amounting to Rp(3,159,551) million was an increase by 53.53% from Rp(2,057,923) million in 2016. This was mainly affected by the Addition of Property, Plant, and Equipment for operation, Investment in Associates, Investment in Series B Asset-backed Securities, and Dividend from PT IPB.

Tabel Kas Digunakan untuk Aktivitas Investasi Tahun 2013-2017 (Rp juta)
Table of Cash Used for Investing Activities in 2013-2017 (Rp million)

Uraian Description	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
Perolehan aset tetap Acquisition of property, plant and equipment	(951.913)	(2.411.931)	(1.357.788)	(1.965.818)	(2.525.201)	28,46
Penyertaan modal pada entitas inventura bersama Capital Subscription in Joint Ventures	-	-	-	(42.355)	(354.632)	737,28
Perolehan investasi efek beragunan aset Purchase of Investment in Asset-backed Securities	-	-	-	-	(312.000)	-
Penerimaan kembali atas piutang pihak berelasi Receipt of Payments from Receivables from Related Parties	-	-	31.383	40.424	31.119	(23,02)
Penempatan investasi kepada entitas asosiasi Investment in Associates	(44.586)	(36.460)	-	-	-	-
Penerimaan bunga | Interest received	29.725	28.718	-	-	-	-
Perolehan dividen dari entitas asosiasi Proceeds from Dividend of Associates	-	2.060	2.327	-	1.163	-
Pemberian piutang pihak berelasi Addition of Receivables from Related Parties	(155.757)	(38.537)	-	(90.174)	-	-
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi **Net Cash Used for Investing Activities**	**(1.122.531)**	**(2.456.150)**	**(1.324.078)**	**(2.057.923)**	**(3.159.551)**	**53,53**

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW

Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tahun 2017 sebesar 3.911.098 juta meningkat 4.698,69% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp(85.048) juta. Peningkatan ini dipengaruhi penerimaan dana dari skema EBA atas Sekuritisasi Piutang PJBTL PLTU Suralaya.

Net Cash Provided by Financing Activities

Net Cash provided by Financing Activities in 2017 amounting to Rp3,911,098 million was an increase by 4,698.69% from Rp85,048 million in 2016. This was particularly affected by the receipt of funds from the EBA scheme on Securitization for Receivables of PJBTL SPP Suralaya.

Tabel Kas Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2013-2017 (Rp juta)
Table of Cash Provided by Financing Activities in 2013-2017 (Rp million)

Uraian Description	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
Penerimaan penjualan aset keuangan dari konsesi jasa Proceeds from Sales of Financial Assets from Service Concession	-			-	4.000.000	-
Pembayaran dividen kepada kepentigan non-pengendali Payment of Dividends to Non-Controlling Interest	(600)	(600)	(1.000)	(1.098)	(1.102)	0,36
Pembayaran utang sewa pembiayaan Payment of lease liabilities	-	-	(76.855)	(83.950)	(106.133)	26,42
Perolehan penyertaan modal dari pihak non-pengendali Proceeds from Non-Controlling Party for Capital Subscription	-	-	-	-	18.333	-
Kas bersih dari Aktivitas Pendanaan **Net Cash in Financing Activities**	**(600)**	**(600)**	**(77.855)**	**(85.048)**	**3.911.098**	**4.698,69**

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG, KOLEKTIBILITAS PIUTANG DAN RASIO KEUANGAN LAINNYA

SOLVENCY, RECEIVABLES COLLECTABILITY, AND OTHER FINANCIAL RATIOS



Kemampuan Membayar Utang

Penilaian atas kemampuan Perusahaan dalam membayar utangnya dapat ditunjukan dengan indikator rasio solvabilitas dan likuiditas sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

Solvency

The Company's ability to settle its payables is indicated by solvency and liquidity ratios as explained below.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG, KOLEKTIBILITAS PIUTANG DAN RASIO KEUANGAN LAINNYA

SOLVENCY, RECEIVABLES COLLECTABILITY, AND OTHER FINANCIAL RATIOS

Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan Perusahaan membayar kewajiban jangka panjang maupun seluruh utangnya. Rasio ini terdiri dari *Debt to Total Assets Ratio* (Rasio Utang) dan *Debt to Total Equity Ratio* (Rasio Utang terhadap Modal). Semakin kecil nilai rasionya menunjukkan semakin kecil kewajiban yang harus dipenuhi oleh Perusahaan kepada pihak lain. Rasio solvabilitas Perusahaan ditunjukkan dalam tabel berikut.

Solvency Ratios

Solvency ratios indicate the Company's ability to pay either its non-current liabilities or the entire payables. The ratios cover Debt to Total Assets Ratio (DAR) and Debt to Total Equity Ratio (DER). The smaller the ratios, the less liabilities the Company must settle to other parties. The Company's solvency ratios are shown in the following table.

Tabel Rasio Solvabilitas Tahun 2013-2017 (%)
Table of Solvency Ratios in 2013-2017 (%)

Uraian Description	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
Rasio Utang terhadap Aset (DAR) Debt to Total Assets Ratio (DAR)	16,21	16,15	5,13	3,47	4,22	21,54
Rasio Utang terhadap Modal (DER) Debt to Total Equity Ratio (DER)	19,80	19,26	5,40	3,59	3,47	22,49

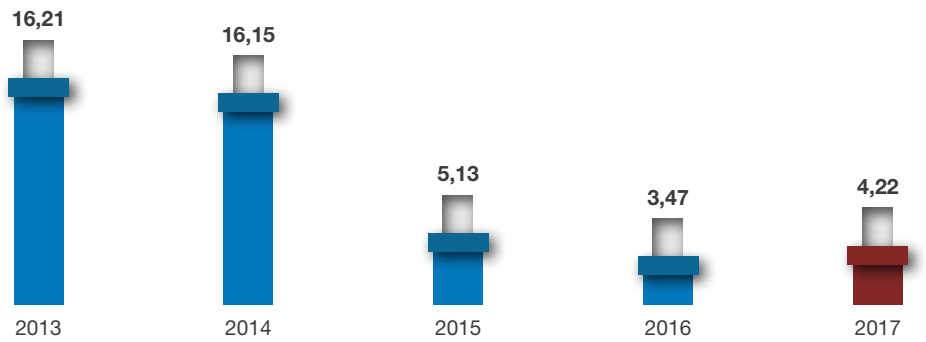
Rasio Utang terhadap Aset (*Debt to Asset Ratio*)

Rasio ini digunakan untuk mengukur bagian aset yang digunakan dalam menjamin keseluruhan kewajiban atau utang. Nilai rasio utang terhadap Aset Perusahaan tahun 2017 sebesar 4,22 lebih tinggi 21,54% dibandingkan tahun 2016 sebesar 3,47%. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan hutang usaha akibat kenaikan harga pengadaan energi primer di tahun 2017 dan peningkatan liabilitas manfaat pekerja akibat penambahan 402 pegawai di tahun 2017. Selain itu terdapat penurunan total aset yang di sebabkan depresiasi aset tetap.

Debt to Asset Ratio

This ratio measures the portion of assets used to cover the entire liabilities. The Company's Debt to Asset Ratio in 2017 was 4.22%, which was higher by 21.54% compared to in 2016 at 3.47%. This was particularly due to the increase in Trade Payables from primary energy procurement as a result of price increase in 2017 and the increase in employee benefits liabilities for the addition of 402 employees in 2017. The ratio was also affected by the decline in total assets due to Depreciation of Property, Plant, and Equipment.

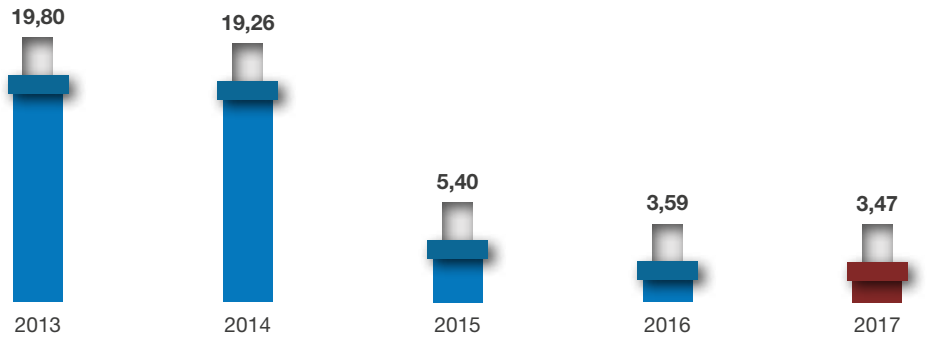
Grafik Rasio Utang terhadap Aset Tahun 2013-2017 (%)
Chart of Debt to Asset Ratio in 2013-2017 (%)



Rasio Utang terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*)

Debt to Equity Ratio

Grafik Rasio Utang terhadap Modal Tahun 2013-2017 (%)
Chart of Debt to Equity Ratio in 2013-2017 (%)



Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya yang terdiri dari *Cash Ratio* (Rasio Kas), *Quick Ratio* (Rasio Cepat) dan *Current Ratio* (Rasio Lancar). Semakin tinggi nilai dari rasio-rasio tersebut, maka mengindikasikan bahwa Perusahaan mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya yang akan jatuh tempo. Rasio likuiditas Perusahaan ditunjukkan dalam tabel berikut

Liquidity Ratios

Liquidity ratios measure the Company's ability to settle its current liabilities. The ratios include Cash Ratio, Quick Ratio, and Current Ratio. The higher the ratios, the better the Company's ability in meeting its maturing liabilities. The Company's liquidity ratios are shown in the following table.

Tabel Rasio Likuiditas Tahun 2013-2017 (%)
Table of Liquidity Ratios in 2013-2017 (%)

Uraian Description	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
Rasio Kas I Cash Ratio	25,23	13,96	9,85	32,09	86,10	161,29
Rasio Cepat I Quick Ratio	585,84	696,07	268,31	455,60	516,07	1,22
Rasio Lancarl Current Ratio	712,66	794,87	308,69	554,16	609,21	9,93

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG, KOLEKTIBILITAS PIUTANG DAN RASIO KEUANGAN LAINNYA

SOLVENCY, RECEIVABLES COLLECTABILITY, AND OTHER FINANCIAL RATIOS

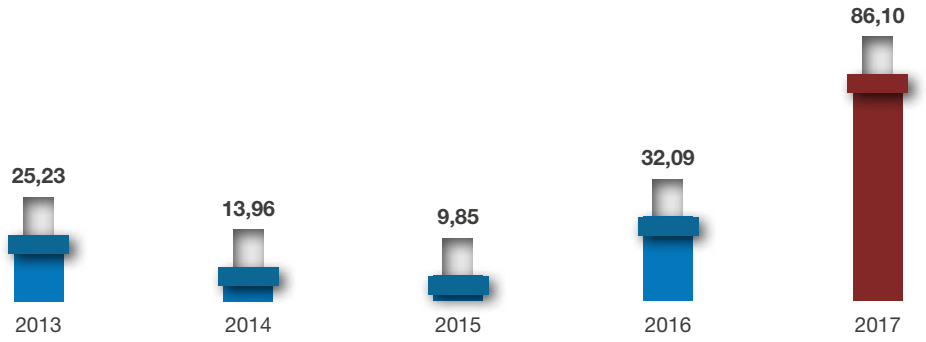
Rasio Kas

Rasio kas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan kas. Nilai rasio kas tahun 2017 sebesar 86,10% lebih tinggi 161,29% dibandingkan tahun 2016 sebesar 32,09%. Peningkatan ini dipengaruhi oleh peningkatan kas dan setara kas atas penerimaan dana EBA.

Cash Ratio

Cash Ratio measures the Company's ability to meet its current liabilities using cash on hand. The Company's Cash Ratio in 2017 was 86.10%, which was higher by 161.29% compared to in 2016 at 32.09%. This was influenced by the addition of cash and cash equivalent from the financing from Asset-backed Securities.

Grafik Rasio Kas Tahun 2013-2017 (%)
Chart of Cash Ratio in 2013-2017 (%)



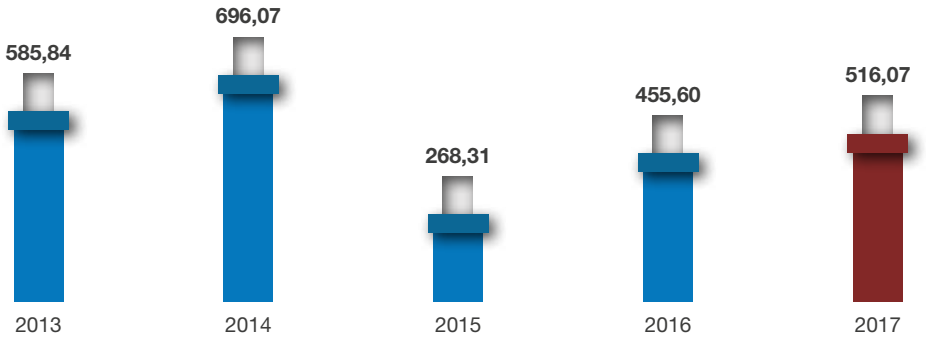
Rasio Cepat

Kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya melalui aset lancar Perusahaan di luar persediaan diukur menggunakan rasio cepat. Nilai rasio cepat tahun 2017 adalah 516,07% lebih tinggi 1,22% dibandingkan tahun 2016 sebesar 455,60%. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan kas dan setara kas yang di sebabkan penambahan dana EBA.

Quick Ratio

Quick Ratio measures the Company's ability to meet its current liabilities using the Company's current assets other than inventories. The Company's Quick Ratio in 2017 was 516.07%, which was higher by 1.22% compared to in 2016 at 455.60%. This was particularly influenced by the addition of cash and cash equivalent from the financing from Asset-backed Securities.

Grafik Rasio Cepat Tahun 2013-2017 (%)
Chart of Quick Ratio in 2013-2017 (%)



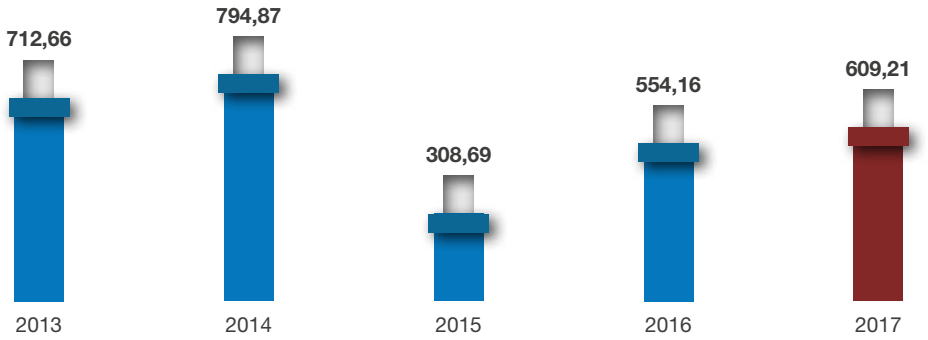
Rasio Lancar

Kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya melalui seluruh aset lancar yang dimilikinya diukur menggunakan rasio lancar. Nilai rasio lancar di tahun 2017 adalah 609,21% lebih tinggi 9,93% dibandingkan tahun 2016 sebesar 554,16%. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan aset lancar yang disebabkan adanya penambahan dana EBA di tahun 2017.

Current Ratio

Current Ratio measures the Company's ability to meet its current liabilities using the entire current assets held. The Company's Current Ratio in 2017 was 609.21%, which was higher by 9.93% compared to in 2016 at 554.16%. This was mainly caused by the addition of current assets from the financing from Asset-backed Securities in 2017.

Grafik Rasio Lancar Tahun 2013-2017 (%)
Chart of Current Ratio in 2013-2017 (%)



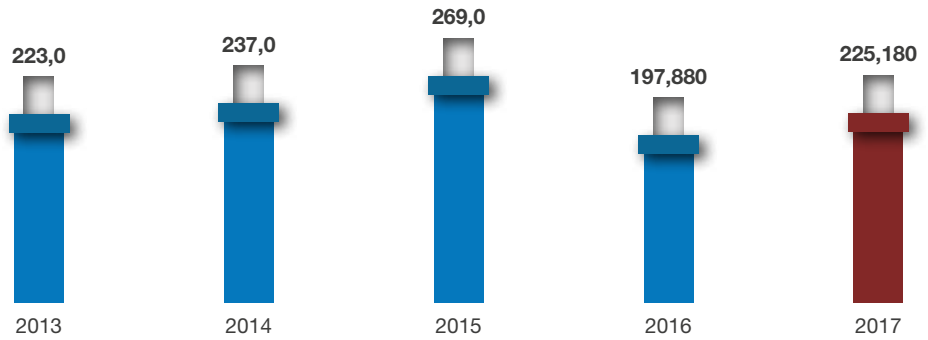
Kolektibilitas Piutang

Tingkat kolektibilitas piutang (periode penagihan) digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan piutang. Nilai periode penagihan di tahun 2017 sebesar 225,18 hari lebih lama dibandingkan tahun 2016 yaitu 197,88 hari.

Collectability

The collectability rate (collection period) measures the Company's ability in collecting its receivables. The Company's collection period in 2017 was 225.18 days, which was longer compared to in 2016 with 197.88 days.

Grafik Periode Penagihan Tahun 2013-2017 (hari)
Chart of Collection Periods in 2013-2017 (day)



KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG, KOLEKTIBILITAS PIUTANG DAN RASIO KEUANGAN LAINNYA

SOLVENCY, RECEIVABLES COLLECTABILITY, AND OTHER FINANCIAL RATIOS

Rasio Keuangan Lainnya

Selain kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban dan kemampuan dalam periode penagihan piutang, terdapat rasio-rasio keuangan penting lainnya sebagai berikut:

Other Financial Ratios

In addition to the solvency and collectability, the following ratios also measure the Company's ability in settling its liabilities and collecting receivables.

Rasio Profitabilitas

Kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan laba diukur menggunakan rasio-rasio profitabilitas yang terdiri dari *Return on Equity* (tingkat pengembalian modal), *Return on Investment* (tingkat pengembalian investasi) *Operating Profit Margin* (margin operasi), dan *Net Profit Margin* (margin laba bersih). Rasio profitabilitas Perusahaan ditunjukkan dalam tabel berikut.

Profitability Ratios

The Company's ability in generating profits is measured using profitability ratios which consist of Return on Equity, Return on Investment, Operating Profit Margin, and Net Profit Margin. The Company's profitability ratios are shown in the following table.

Tabel Rasio Profitabilitas Tahun 2013-2017 (%)
Table of Profitability Ratios in 2013-2017 (%)

Uraian Description	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
Margin Operasi I Operating Profit Margin	6,02	6,15	6,53	11,16	13,19	18,16
Margin Laba Bersih I Net Profit Margin	3,71	4,61	14,60	7,86	8,20	4,28
Tingkat Pengembalian Modal Return on Equity	2,84	3,74	2,22	1,37	1,57	14,59
Tingkat Pengembalian Investasi Return on Investment	8,77	9,62	2,13	4,05	4,79	18,32

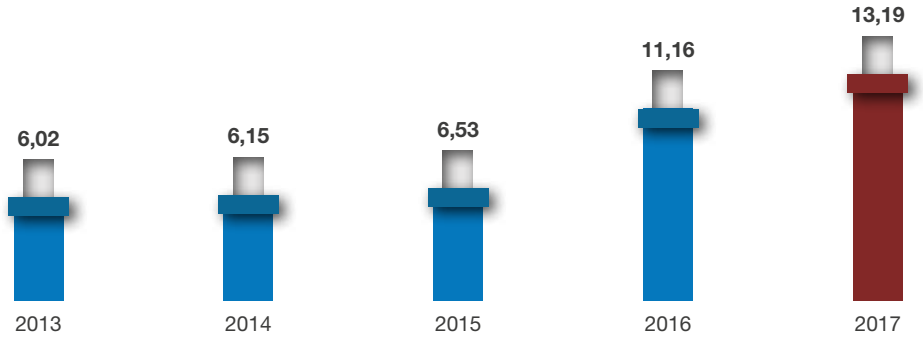
Margin Operasi

Merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasi yang dihasilkan dari penjualannya. Margin operasi di tahun 2017 sebesar 13,19% lebih tinggi 18,16% dibandingkan tahun 2016 yaitu 11,16%.

Operating Margin

Operating Margin measures the Company's ability in generating operating income from its sales. The Company's Operating Margin in 2017 was 13.19%, which was higher by 18.16% compared to in 2016 at 11.16%.

Grafik Margin Operasi Tahun 2013-2017 (%)
Chart of Operating Margin in 2013-2017 (%)



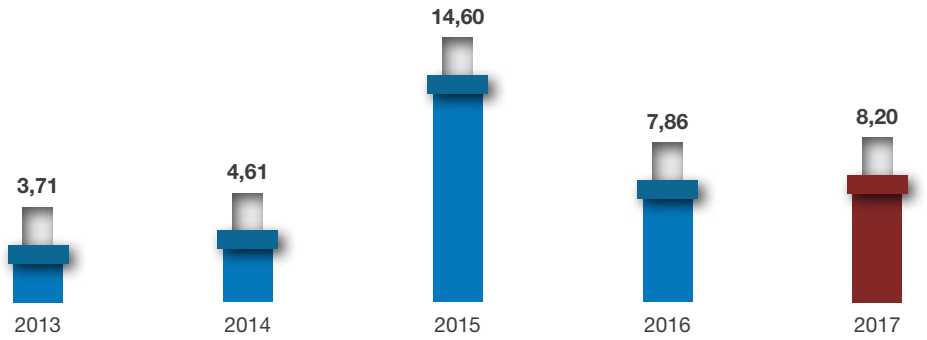
Margin Laba Bersih

Merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih yang dihasilkan dari penjualannya. Margin laba bersih di tahun 2017 sebesar 8,20% lebih tinggi 4,28% dibandingkan tahun 2016 yaitu 7,86%.

Net Profit Margin

Net Profit Margin measures the Company's ability in generating net income from its sales. The Company's Net Profit Margin in 2017 was 8.20%, which was higher by 4.28% compared to in 2016 at 7.86%.

Grafik Margin Laba Bersih Tahun 2013-2017 (%)
Chart of Net Profit Margin in 2013-2017 (%)



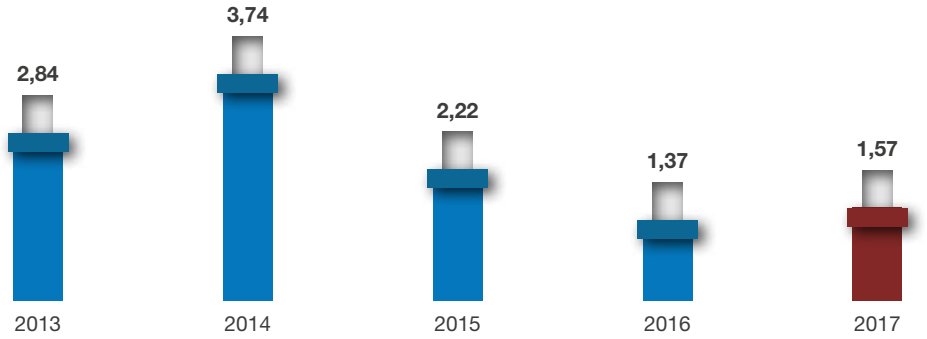
Tingkat Pengembalian Modal

Rasio yang memperlihatkan sejauh manakah Perusahaan mengelola modal sendiri secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau Pemegang Saham. Nilai tingkat pengembalian modal (*Return on Equity*) Perusahaan tahun 2017 sebesar 1,57% lebih tinggi 14,59% dibandingkan tahun 2016 sebesar 1,37%. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan laba bersih.

Return on Equity

This ratio indicates to which extent the Company can manage its own equity effectively, measuring the profit from investment performed by capital owner or Shareholders. The Company's Return on Equity in 2017 was 1.57%, which was higher by 14.59% compared to in 2016 at 1.37%. This was mainly affected by the addition of net income.

Grafik Tingkat Pengembalian Modal Tahun 2013-2017 (%)
Chart of Return on Equity in 2013-2017 (%)



KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG, KOLEKTIBILITAS PIUTANG DAN RASIO KEUANGAN LAINNYA

SOLVENCY, RECEIVABLES COLLECTABILITY, AND OTHER FINANCIAL RATIOS

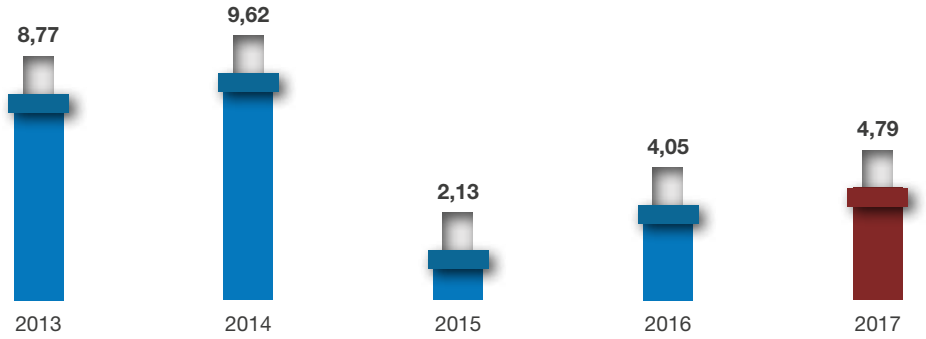
Tingkat Pengembalian Investasi

Merupakan kemampuan Perusaahaan secara keseluruhan dalam memperoleh Keuntungan dengan jumlah Aset yang tersedia didalam Perusahaan. Nilai tingkat pengembalian investasi Perusahaan tahun 2017 sebesar 4,79% lebih tinggi 18,32% dibandingkan tahun 2016 sebesar 4,05%.

Return on Investment

Return on Investment indicates the Company's overall ability to gain Profit with the amount of Assets available in the Company. The Company's Return on Investment in 2017 was 4.79%, which was higher by 18.32% compared to in 2016 at 4.05%.

Grafik Tingkat Pengembalian Investasi Tahun 2013-2017 (%)
Chart of Return on Investment in 2013-2017 (%)



Rasio Aktivitas

Merupakan rasio-rasio yang menunjukkan keefektifan sebuah perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya.

Activity Ratios

These ratios indicate the effectiveness of a company in utilizing the assets on hand.

Tabel Rasio Aktivitas Tahun 2013-2017 (%)
Table of Activity Ratios in 2013-2017 (%)

Uraian Description	2013	2014	2015	2016	2017	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)
Perputaran Persediaan I Inventory Turn Over	20,00	21,00	25,00	19,52	19,28	(1,23)
Perputaran Aset I Total Assets Turn Over	60,63	63,80	14,16	16,68	23,46	40,62

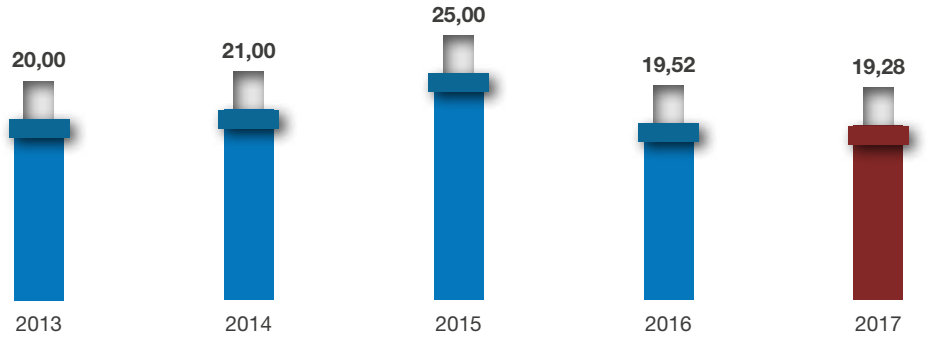
Perputaran Persediaan

Rasio yang mengukur seberapa sering persediaan barang dagang terjual dalam waktu satu periode. Perputaran persediaan di tahun 2017 sebesar 19,28% lebih rendah 1,23% dibandingkan tahun 2016 sebesar 19,52%. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan usaha akibat peningkatan pendapatan jasa O&M.

Inventory Turnover

This ratio measures the frequency of inventoried goods sold in one period. The Company's Inventory Turnover in 2017 was 19.28%, which was lower by 1.23% compared to in 2016 at 19.52%. This was mainly affected by the addition of revenues from O&M Services.

Grafik Perputaran Persediaan Tahun 2013-2017 (%)
Chart of Inventory Turnover in 2013-2017 (%)



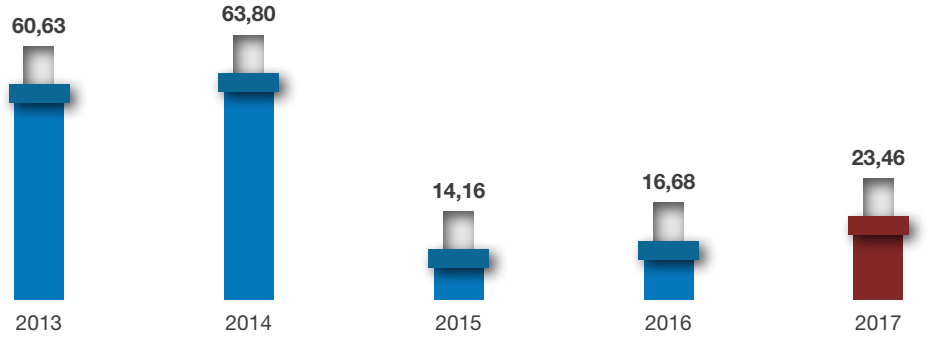
Perputaran Aset

Merupakan rasio untuk mengukur kemampuan aset perusahaan untuk memperoleh pendapatan, semakin cepat aset perusahaan berputar makin besar pendapatan perusahaan tersebut. Perputaran aset di tahun 2017 sebesar 23,46% lebih tinggi 40,62% dibandingkan tahun 2016 sebesar 16,68%. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh penurunan total aset akibat depresiasi aset tetap selama tahun 2017 tidak mempengaruhi peningkatan penjualan.

Asset Turnover

This ratio measures the ability of a Company's assets to generate revenue; the faster the turnover, the higher the company's revenue. The Company's Asset Turnover in 2017 was 23.46%, which was higher by 40.62% compared to in 2016 at 16.68%. This was mainly caused by the decline in total assets due to depreciation of property, plant, and equipment in 2017 which did not affect the increase of sales.

Grafik Perputaran Aset Tahun 2013-2017 (%)
Chart of Asset Turnover in 2013-2017 (%)



STRUKTUR MODAL
CAPITAL STRUCTURE



Struktur Modal

Struktur modal Perusahaan pada tahun 2017 terdiri atas 4,22% dari Liabilitas sebesar Rp9.208.876 juta lebih besar dibandingkan tahun 2016 sebesar 3,47% atau Rp7.655.482 juta. Adapun yang diabiayai oleh Ekuitas sebesar 95,78% atau Rp209.130.165 juta lebih rendah dibandingkan tahun 2016 sebesar 96,53% atau Rp213.222.542 juta.

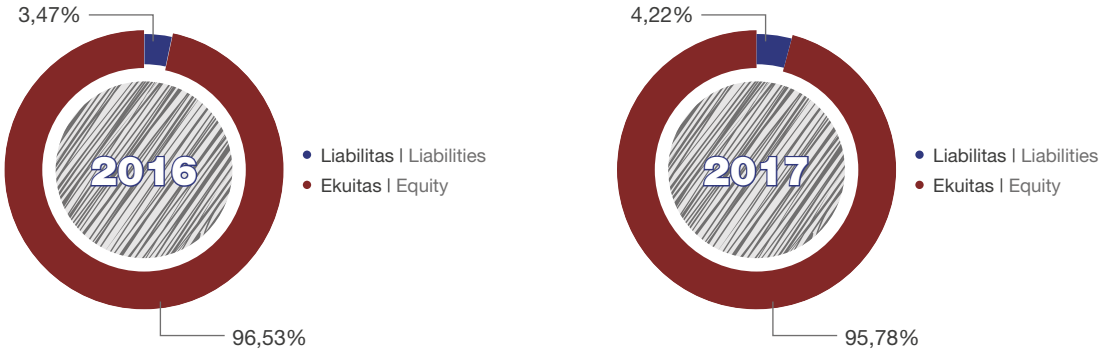
Capital Structure

The Company's Capital Structure in 2017 consisted of Liabilities amounting to Rp9,208,876 million or 4.22%, which was higher than in 2016 at Rp7,655,482 million or 3.47%, and Equity amounting to Rp209,130,165 million or 95.78%, which was lower than in 2016 at Rp213,222,542 million or 96.53%.

Tabel Struktur Modal Tahun 2013-2017 (%)
Table of Capital Structure in 2013-2017

Uraian Description	2013	2014	2015	2016		2017	
	Rp juta Rp million	Rp juta Rp million	Rp juta Rp million	Rp juta Rp million	%	Rp juta Rp million	%
Liabilitas I Liabilities	**8.633.813**	**8.598.429**	**11.963.977**	**7.655.482**	**3,47**	**9.208.876**	**4,22**
Liabilitas Jangka Pendek Short-Term Liabilities	3.890.560	3.244.923	9.206.379	4.554.447	59,42	5.535.311	60,11
Liabilitas Jangka Panjang Long-Term Liabilities	4.743.253	5.353.506	2.757.598	3.111.035	40,68	3.673.565	39,89
Ekuitas I Equity	**44.846.679**	**44.649.629**	**214.874.692**	**213.222.542**	**96,53**	**209.130.165**	**95,78**
Jumlah Aset I Total Assets	**53.480.492**	**53.248.058**	**226.720.248**	**220.888.024**	**100**	**218.339.042**	**100**

Grafik Struktur Modal Tahun 2016 dan 2017 (%)
Chart of Capital Structure in 2016-2017 (%)



STRUKTUR MODAL
CAPITAL STRUCTURE

Kebijakan dan Mekanisme *Review* Struktur Modal

Kondisi struktur modal yang optimal dicapai dengan modal rata-rata tertimbang (*Weighted Average Cost of* Capital/WACC) yang minimal. Penggunaan utang yang bertambah akan meminimalkan WACC sebab biaya utang (*cost of debt*) lebih murah dari biaya modal sendiri (*cost of equity*). Di samping itu, penggunaan utang juga akan mengurangi biaya kena pajak sehingga akan terjadi penghematan pajak. Meskipun demikian, peningkatan utang yang dilakukan Perusahaan akan meningkatkan biaya beban bunga yang selanjutnya akan mengurangi nilai Perusahaan secara keseluruhan. Untuk itu, Perusahaan mengelola penggunaan utang dan modal sehingga diperoleh kondisi yang optimum.

Capital Structure Review Mechanism and Policy

An optimal capital structure is obtained by minimum Weighted Average Cost of Capital (WACC). The addition of payables will minimize WACC, because the cost of debt is lower than the cost of equity. The utilization of payables will also reduce taxable costs, which eventually results in tax saving. Nevertheless, the addition of Company's payables will increase interest expense which eventually reduces the Company's value as a whole. This is why the Company needs to manage its payables and capital in order to obtain an optimal condition.

Tingkat Likuiditas Perusahaan

Perusahaan senantiasa melakukan *monitoring* terhadap rasio likuiditas, rasio ini mengindikasikan kemampuan Perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi rasio likuiditas maka struktur modal akan semakin optimal. Rasio likuiditas Perusahaan dicerminkan oleh rasio kas, rasio cepat dan rasio lancar.

Pada tahun 2017, rasio kas sebesar 86,10% meningkat 161,29% lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 sebesar 32,09%. Rasio cepat sebesar 516,07% meningkat 1,22% lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 sebesar 455,60% dan rasio lancar sebesar 609,21% meningkat 9,93% lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 sebesar 554,16%.

Company's Liquidity Ratio

The Company constantly monitors the liquidity ratio which indicates its ability in meeting its current liabilities. The higher the liquidity ratio, the more optimal the capital structure. The Company's liquidity ratios are indicated by cash ratio, quick ratio, and current ratio.

In 2017, the cash ratio at 86.10% was an increase by 161.29% from 32.09% in 2016. Quick ratio at 516.07% was an increase by 1.22% from 455.60% in 2016, while current ratio at 609.21% was an increase by 9.93% from 554.16% in 2016.

KONTRIBUSI KEPADA NEGARA
CONTRIBUTION TO THE COUNTRY



Membayar pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Selama tahun 2017 Indonesia Power tidak pernah melakukan keterlambatan pembayaran kewajiban pajak. Baik PPh Karyawan, PPh Badan, PPN Masa dan Rampung serta PBB, tidak pernah melakukan keterlambatan penyampaian dokumen kewajiban perpajakan (SPT tahunan maupun bulanan), serta tidak terdapat keterlambatan penyampaian dokumen kewajiban pada lembaga *regulator*.

Paying taxes is the realization of the obligation to the country and the role of every taxpayer to directly and jointly carry out their tax obligation for the financing of the country and the national development.

Throughout 2017, Indonesia Power has always been punctual in meeting its tax payment obligation. The punctuality was also applied in the submission of tax documents (annual and monthly tax returns) for Employee Income Tax, Corporate Income Tax, Periodic and Completed Value Added Tax, and Land and Building Tax as well as other obligatory documents to regulator.

KONTRIBUSI KEPADA NEGARA

CONTRIBUTION TO THE COUNTRY

Pembayaran pajak pada tahun 2017 adalah sebesar Rp903.472 juta menurun dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp924.503 juta. Pada tahun 2017 Indonesia Power mendapatkan fasilitas pembebasan pajak hingga Rp426.251 juta. Pembebasan tersebut berdasarkan pada Kebijakan pengajuan pembebasan (PPh 22 Impor/PPN Impor/PPh 22/PPh 23) untuk memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 268/PMK.03/2015 & PER - 1/PJ/2011 jo PER - 21/PJ/2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain serta PMK Nomor 268/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang telah Dibebaskan serta Pengenaan Sanksi.

The tax payment amounting to Rp903,472 million in 2017 was a decline from Rp924,503 million in 2016. In 2017 Indonesia Power received tax exemption to the amount of Rp426,251 million. The exemption was in accordance with the Policy on Application of Exemption (Import Income Tax 22/Import VAT/Income Tax 22/ Income Tax 23) for the utilization of facility provided by the Directorate General of Taxes in pursuant to Minister of Finance Regulation No. 268/PMK.03/2015 & PER-1/PJ/2011 in conjunction with PER-21/PJ/2014 on Procedure for the Application of Exemption from Income Tax Withholding/Collection by Other Parties and Minister of Finance Regulation No. 268/PMK.03/2015 on Procedure for the Provision of Exemption of Value-Added Tax for Imports and/or Submission of Strategic Certain Taxable Objects and Procedure for the Payment of Value-Added Tax for Exempted Strategic Certain Taxable Objects and Imposition of Sanction.

Tabel Pembayaran Pajak Tahun 2013-2017 (Rp juta)

Table of Tax Payment in 2013-2017 (Rp million)

Uraian Description	2013	2014	2015	2016	2017
PPN Pungut | Collected VAT	-	-	237.248	427.005	613.801
PPN Impor | VAT on Import	94.108	47.529	29.1780	65.387	28.081
Bea Masuk | Import Duty	44.967	92.517	15.586	31.204	58.947
PPH 21 | Income Tax 21	74.576	64.591	107.666	176.186	165.501
Pajak Badan | Corporate Income Tax	649.846	668.544	668.802	199.568	0
PBB, Materai dan Retribusi Land and Building Tax, Stamp Duty and Retribution	16.944	18.869	23.016	25.153	37.142
Jumlah Pajak | Total Tax	**880.441**	**892.050**	**1.081.498**	**924.503**	**903.472**

PERBANDINGAN ANTARA TARGET 2017, REALISASI 2017 DAN TARGET 2018

COMPARISON OF 2017 TARGET AND ACTUAL AND 2018 TARGET



Perbandingan antara Target dan Realisasi 2017 serta Target 2018 dari Kinerja Operasional

Kegiatan operasional menjadi salah satu faktor penting keberlangsungan usaha suatu Perusahaan. Oleh sebab itu, Perusahaan senantiasa melakukan evaluasi terhadap kinerja operasional Perusahaan. Berikut adalah tabel perbandingan kinerja operasi Perusahaan terhadap target di tahun 2017 serta proyeksi tahun 2018.

Perbandingan Target dan Realisasi 2017 serta Target 2018 Kinerja Pembangkit

Indikator Kinerja Pembangkit Perusahaan Tahun 2017 dan 2018 merupakan kinerja pembangkit milik sendiri dan pembangkit jasa O&M Jawa.

Comparison of 2017 Target and Actual and 2018 Target by Operational Performance

Operational performance is among the crucial factors for the business sustainability of the Company. Therefore, the Company frequently monitors its operational performance. The following table presents the comparison of the Company's 2017 target and actual operational performance and 2018 projection.

Comparison of 2017 Target and Actual and 2018 Target by Power Plant Performance

The Company's power plant performance in 2017 combines the performances of self-owned power plants and O&M power plants in Java.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET 2017, REALISASI 2017 DAN TARGET 2018

COMPARISON OF 2017 TARGET AND ACTUAL AND 2018 TARGET

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Pembangkit Tahun 2017 dan Proyeksi Tahun 2018
Table of Comparison of Target and Actual Power Plant Performance in 2017 and 2018 Target

Uraian Description	Realisasi 2017 Realization of 2017	Target RKAP 2017 RKAP Target of 2017	Pencapaian (%) Achievements (%)	Proyeksi 2018 2018 Projections
EAF (%)	86,55	88,20	98,13	87,25
EFOR (%)	5,95	4,50	67,78	4,05
SdOF (kali | times)	2,45	1,81	65,05	3,45
SOF (%)	8,01	6,44	75,68	8,72
Efisiensi Thermal (%) Thermal Efficiency	33,61	34,47	97,50	34,47
Tara Kalor (Kcal/KWh) Heat Rate (Kcal/KWh)	2.558,74	2.495,00	97,45	2.495,00

*) Pengukuran pencapaian menggunakan polarisasi Maximize dan Minimize sesuai dengan Pedoman Penilaian Kinerja Unit PT Indonesia Power

*) The progress is measured using Maximize and Minimize polarizations according to the Guidelines of Unit Performance Assessment of PT Indonesia Power.

Realisasi EAF Perusahaan sebesar 86,55% dengan pencapaian 98,13% dari target RKAP 2017. EAF pada tahun 2017 tidak tercapai karena adanya beberapa gangguan eksitasi di unit Semarang, Planned Outage Extension Priok Blok 3 dan Pekerjaan Rewinding Generator Suralaya #3. Selain itu ada beberapa gangguan Condensor Suralaya #8, Generator failure Labuan #1, Planned Outage Extension Lontar #3 dan gangguan APH Adipala. Selanjutnya pada tahun 2018 EAF ditargetkan sebesar 87,25% dengan dasar asumsi adanya peningkatan jam Planned Outage (POH) kurang lebih > 532 jam dibanding POH tahun 2017.

The actual EAF in 2017 was 86.55%, at the progress of 98.13% of the WP&B 2017 target. The target for EAF in 2017 was not achieved due to excitation trouble at Semarang unit, Planned Outage Extension for Priok Block 3 and Suralaya #3's Generator Rewinding Work. In addition, there were several troubles with Suralaya #8's condensor, generator failure at Labuan # 1, Planned Outage Extension for Lontar #3 and APH issue at Adipala. As for 2018, the EAF is targeted at 87.25% based on the assumption of increased Planned Outage (POH) hours of approximately > 532 hours compared to that of 2017.

Realisasi EFOR Perusahaan sebesar 5,95% dengan pencapaian 67,78% dari target RKAP 2017. EFOR tidak tercapai karena adanya gangguan Variable Speed Drive Gunung Salak #3, gangguan Axial Semarang ST 1.0, Derating Priok Blok 3 akibat Fuel Gas Compressor, Derating Suralaya #8 akibat Condensor bocor dan gangguan APH & Boiler Adipala. Selanjutnya, pada tahun 2018 EFOR ditargetkan sebesar 4,05% dengan dasar asumsi potensi gangguan yang masih terjadi di PLTU UJP, PLTGU Blok 3 dan Gangguan di UP Semarang.

The actual EFOR in 2017 was 5.95%, at the progress of 67.78% of the WP&B 2017 target. The EFOR target could not be attained owing to the Variable Speed Drive trouble with Gunung Salak #3, axial problem at Semarang ST 1.0, derating of Priok Block 3 because of Fuel Gas Compressor, derating at Suralaya #8 due to condensor leak and APH & boiler troubles in Adipala. For the year 2018, EFOR is targeted at 4.05% on the basis of the assumption that there remains potential troubles with GSU SPPs, CCPP Block 3 and Semarang GU.

Realisasi SdOF Perusahaan sebesar 2,45 kali dengan pencapaian 65,05% dari target RKAP 2017. SdOF tidak tercapai karena banyaknya gangguan di unit Semarang (Forced Outage) karena sinyal fire fighting akibat temp compartment load di Gas Turbin dan Gangguan PLTU Tambaklorok 3 masalah kontrol instrument khususnya untuk Control gas. Selanjutnya, pada tahun 2018 SdOF ditargetkan sebesar 3,45% kali dengan dasar asumsi ada peningkatan keandalan di UP Semarang dan PLTU UJP.

The actual SdOF in 2017 was 2.45 times, at the progress of 65.05% of the WP&B 2017 target. The SdOF target was not achieved due to the many troubles (Forced Outage) at Semarang unit caused by fire fighting signal set off by temp compartment load in the gas turbine and instrument control troubles in SPP Tambak Lorok 3, especially for gas control. In 2018, the SdOF is targeted at 3.45% times with the underlying assumption that the reliability of Semarang GU and GSU SPPs will improve.

Realisasi SOF Perusahaan sebesar 8,01% dengan pencapaian 75,68% dari target RKAP 2017. SOF tidak tercapai karena Plan Extention (PE) di PLTGU Priok Blok 3 selama 29 hari dan banyaknya gangguan di UP Semarang yang menyebabkan banyak Maintenance Outage (MO). Selanjutnya, pada tahun 2018 SOF ditargetkan sebesar 8,72% dengan dasar asumsi PLTU Adipala ada program First Inspection (FI) selama 90 hari, OH PLTGU sejumlah 4 unit, Suralaya ada OH sebanyak 4 buah diantaranya SE sejumlah 2 unit dan UP Perak Grati ada 3 OH.

The actual SOF in 2017 was 8.01%, at the progress of 75.68% of the WP&B 2017 target. The targeted SOF was not achieved because of Plan Extention (PE) in CCPP Priok Block 3 for 29 days and a number of troubles at Semarang GU causing Maintenance Outage (MO). Furthermore, in 2018 the SOF is targeted at 8.72% using the base assumption that SPP Adipala will have a First Inspection (FI) program for 90 days, with 4 OHs at CCPPs, OH at 4 units of Suralaya GU in which two of them will be 2 SE units and 3 OHs at GU Perak Grati.

Realisasi Efisiensi Thermal Perusahaan sebesar 33,61% dengan pencapaian 97,50% dari target RKAP 2017. Efisiensi Thermal tidak tercapai karena gangguan steam turbin PLTGU Tambak Lorok, *derating* Suralaya dan penurunan *dispatch* PLTDG Pesanggaran. Selanjutnya, pada tahun 2018 Efisiensi Thermal ditargetkan sebesar 34,47% dengan dasar asumsi peningkatan CF PLTU Suralaya dan optimalisasi pola operasi PLTGU.

The actual Thermal Efficiency in 2017 was 33.61%, at the progress of 97.50% of the WP&B 2017 target. The Thermal Efficiency was unmet because of steam turbine trouble at CCPP Tambak Lorok, derating at Suralaya and decreasing dispatch in DGPP Pesanggaran. Further, the Thermal Efficiency is targeted at 34.47% in 2018, with the assumption of increased CF at SPP Suralaya and optimized CCPP operational methods.

Sedangkan Realisasi Tara Kalor Neto Perusahaan sebesar 2.558,74 Kcal/KWh dengan pencapaian 97,45% dari target RKAP 2017. Tara Kalor Neto Perusahaan tidak tercapai dikarenakan gangguan steam turbin PLTGU Tambak Lorok, *derating* Suralaya dan penurunan *dispatch* PLTDG Pesanggaran. Selanjutnya, pada tahun 2018 Tara Kalor Neto ditargetkan sebesar 2.495,00 Kcal/KWh dengan dasar asumsi peningkatan CF PLTU Suralaya dan optimalisasi pola operasi PLTGU.

The actual Net Heat Rate in 2017 was 2,558.74 Kcal/kWh, at the progress of 97.45% of the WP&B 2017 target. The Heat Rate was unmet because of steam turbine trouble at CCPP Tambak Lorok, derating at Suralaya and decreasing dispatch in DGPP Pesanggaran. Further, the Heat Rate is targeted at 2,495.00 Kcal/kWh in 2018, with the assumption of increased CF at SPP Suralaya and optimized CCPP operational methods.

Perbandingan Target dan Realisasi 2017 serta Target 2018 Produksi Listrik

Comparison of 2017 Target and Actual and 2018 Target by Electricity Production

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Produksi Listrik Tahun 2017 serta Target Tahun 2018 (GWh)
Table of Comparison of Target and Actual Electricity Production in 2017 and 2018 Target (GWh)

Uraian Description	Realisasi 2017 Realization of 2017	Target RKAP 2017 RKAP Target of 2017	Pencapaian (%) Achievements (%)	Proyeksi 2018 2018 Projections
Jawa Bali *Grid & Embedded* Java Bali Grid & Embedded	42.146,28	41.488,30	101,59	41.537,44
Pembelian Listrik di Area Bali Bali Area Electricity Purchases	74,12	91,50	81,01	56,83
Jumlah | Total	**42.220,40**	**41.579,79**	**101,54**	**41.594,27**

PERBANDINGAN ANTARA TARGET 2017, REALISASI 2017 DAN TARGET 2018

COMPARISON OF 2017 TARGET AND ACTUAL AND 2018 TARGET

Realisasi produksi tenaga listrik Perusahaan sebesar 42.220,40 GWh dengan pencapaian 101,54% dari target RKAP 2017. Pencapaian ini terutama disebabkan oleh Pencapaian CF PLTU Suralaya dikarenakan kebutuhan sistem dan optimalisasi pengoperasian PLTP dan UP Saguling.

The actual electricity production in 2017 was 42,220.40 GWh, at the progress of 101.54% of the WP&B 2017 target. This was particularly resulted from the progress of CF for SPP Suralaya due to the system necessity and optimization of Saguling Geothermal Power Plant and Plant Unit.

Perbandingan Target dan Realisasi 2017 serta Target 2018 Penjualan Listrik

Comparison of 2017 Target and Actual and 2018 Target by Sales of Electricity

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Penjualan Listrik Tahun 2017 serta Target Tahun 2018 (GWh)
Table of Comparison of Target and Actual Sales of Electricity in 2017 and 2018 Target (GWh)

Uraian Description	Realisasi 2017 Realization of 2017	Target RKAP 2017 RKAP Target of 2017	Pencapaian (%) Achievements (%)	Proyeksi 2018 2018 Projections
Jawa Bali *Grid & Embedded* Java Bali Grid & Embedded	40.235,94	39.618,92	101,56%	39.595,86
Area Bali | Bali Area	71,46	90,39	79,05%	56,83
Jumlah | Total	**40.307,40**	**39.709,31**	**101,51%**	**39.652,68**

Realisasi penjualan tenaga listrik Perusahaan sebesar 40.307,40 GWh dengan pencapaian 101,56% dari target RKAP 2017. Pencapaian ini terutama disebabkan oleh Pencapaian CF PLTU Suralaya dikarenakan kebutuhan sistem dan optimalisasi pengoperasian PLTP dan UP Saguling.

The actual sales of electricity in 2017 was 40,307.40 GWh, at the progress of 101.56% of the WP&B 2017 target. This was particularly resulted from the progress of CF for SPP Suralaya due to the system necessity and optimization of Saguling Geothermal Power Plant and Plant Unit.

Perbandingan Target dan Realisasi 2017 serta Target 2018 Pemakaian Sendiri

Comparison of 2017 Target and Actual and 2018 Target by Self-Consumption

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pemakaian Sendiri Tahun 2017 serta Target Tahun 2018
Table of Comparison of Target and Actual Self-Consumption in 2017 and 2018 Target

Uraian Description	Realisasi 2017 Realization of 2017		Target RKAP 2017 RKAP Target of 2017		Pencapaian (%) Achievements (%)	Proyeksi 2018 2018 Projections	
	GWh	% PS	GWh	% PS		GWh	% PS
Pemakaian Sendiri Self-Consumption	1.910,34	4,50	1.715,34	4,15	91,44%	1.714,37	4,15

*) Pengukuran pencapaian menggunakan polarisasi *Minimize* sesuai dengan Pedoman Penilaian Kinerja Unit PT Indonesia Power

*) The progress is measured using Minimize polarizations according to the Guidelines of Unit Performance Assessment of PT Indonesia Power.

Realisasi Pemakaian Sendiri tenaga listrik Perusahaan sebesar 1.910,34 GWh dengan pencapaian 91,44% dari target RKAP 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh derating di PLTU Suralaya dan PLTGU Tambak Lorok, peningkatan bauran PLTU batu bara serta penurunan CF PLTGU akibat penurunan pasokan gas.

The actual self-consumption in 2017 was 1,910.34 GWh, at the progress of 91.44% of the WP&B 2017 target. This was mainly caused by the derating in SPP Suralaya and CCPP Tambak Lorok, increased energy mixes at coal steam power plants and declining CF at CCPP due to cutback of gas supply.

Perbandingan antara Target dan Realisasi 2017 serta Target 2018 dari Kinerja Keuangan

Comparison of 2017 Target and Actual and 2018 Target by Financial Performance

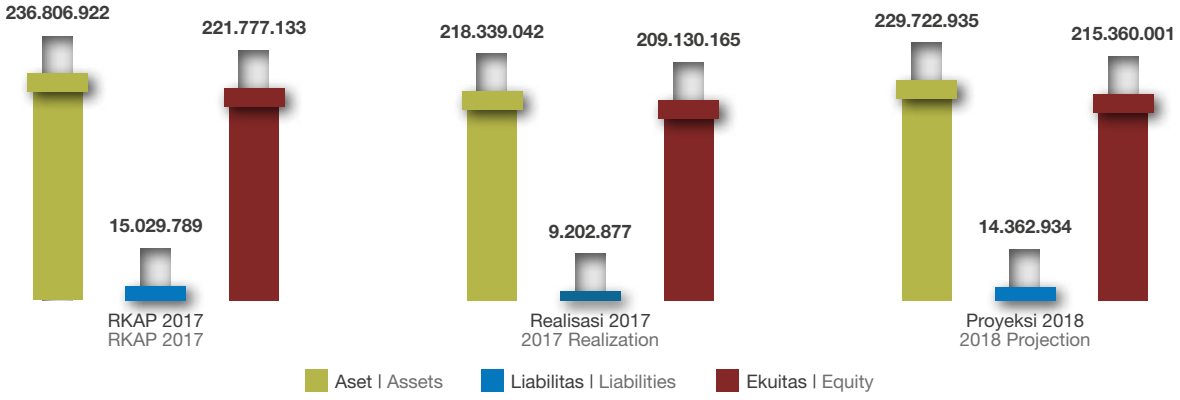
Perbandingan Target dan Realisasi 2017 serta Target 2018 Posisi Keuangan

Comparison of 2017 Target and Actual and 2018 Target by Financial Position

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Posisi Keuangan Tahun 2017 serta Target Tahun 2018 (Rp juta)
Table of Comparison of Target and Actual Financial Position in 2017 and 2018 Target (Rp million)

Uraian Description	Realisasi 2017 Realization of 2017	Target RKAP 2017 RKAP Target of 2017	Pencapaian (%) Achievements (%)	Proyeksi 2018 2018 Projections
Aset Lancar I Current Assets	35.030.296	34.142.860	102,60	34.934.726
Aset tidak lancar I Non-current Assets	183.308.746	202.664.062	90,45	194.788.269
Jumlah Aset I Total Assets	**218.339.042**	**236.806.922**	**92,20**	**229.722.935**
Liabilitas Jangka Pendek Short-term Liabilities	**5.535.313**	**10.710.123**	**51,68**	**5.350.598**
Liabilitas Jangka Panjang Long-term Liabilities	**3.673.564**	**4.319.666**	**85,04**	**9.012.336**
Jumlah Liabilitas I Total Liabilities	**9.208.877**	**15.029.789**	**61,23**	**14.362.934**
Jumlah Ekuitas I Total Equity	**209.130.165**	**221.777.133**	**94,30**	**215.360.001**

Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Posisi Keuangan Tahun 2017 serta Target Tahun 2018 (Rp juta)
Chart of Comparison of Target and Actual Financial Position in 2017 and 2018 Target (Rp million)



Realisasi Aset Perusahaan tahun 2017 sebesar Rp218.339.042 juta dengan pencapaian 92,20% dari target RKAP 2017 sebesar Rp236.806.922 juta. Selanjutnya, pada tahun 2018 Total Aset ditargetkan sebesar Rp229.722.935 juta yaitu lebih tinggi 5,21% dari realisasi tahun 2017. Proyeksi tersebut didasarkan pada pendirian pembangkit baru di Muara Jawa, Kalimantan Timur 2x27,5 MW yang diestimasikan COD *(Commercial Operation Date)* pada pertengahan 2018 dan penyertaan modal untuk anak perusahaan.

The actual Assets in 2017 were amounting at Rp218,339,042 million, at the progress of 92.20% of the WP&B 2017 target at Rp236,806,922 million. Further, the Total Assets is targeted at Rp229,722,935 million in 2018, which is higher by 5.21% than the 2017 actual. The projection is based on the investment in subsidiaries and the establishment of new power plants in Muara Jawa, East Kalimantan at the capacity of 2xx27.5 MW whose Commercial Operation Date (COD) is expected in mid-2018.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET 2017, REALISASI 2017 DAN TARGET 2018

COMPARISON OF 2017 TARGET AND ACTUAL AND 2018 TARGET

Realisasi Liabilitas Perusahaan tahun 2017 sebesar Rp9.208.877 juta dengan pencapaian 61,23% dari target RKAP 2017 sebesar Rp15.029.789 juta. Selanjutnya, pada tahun 2018 Liabilitas ditargetkan sebesar Rp14.362.934 juta yaitu lebih tinggi 56,07% dari realisasi tahun 2017. Proyeksi tersebut didasarkan dampak dari securitisasi aset PLTU Suralaya sehingga adanya pengakuan hutang jangka panjang.

The actual Liabilities in 2017 were amounting at Rp9,208,877 million, at the progress of 61.23% of the WP&B 2017 target at Rp15,029,789 million. Further, the Liabilities are targeted at Rp14,362,934 million in 2018, which is higher by 56.07% than the 2017 actual. The projection is based on the impact of asset securitization of SPP Suralaya which resulted in the acknowledgment of long-term indebtedness.

Realisasi Ekuitas Perusahaan tahun 2017 sebesar Rp209.130.165 juta dengan pencapaian 94,30% dari target RKAP 2017 sebesar Rp221.777.133 juta. Selanjutnya, pada tahun 2018 Ekuitas ditargetkan sebesar Rp215.360.001 juta yaitu lebih tinggi 2,98% dari realisasi tahun 2017.

The actual Equity in 2017 were amounting at Rp209,130,165 million, at the progress of 94.30% of the WP&B 2017 target at Rp221,777,133 million. Further, the Equity are targeted at Rp215,360,001 million in 2018, which is higher by 2.98% than the 2017 actual.

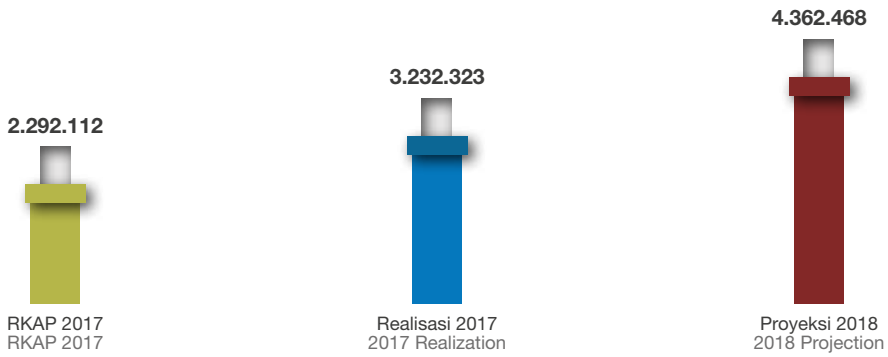
Perbandingan Target dan Realisasi 2017 serta Target 2018 Laba Rugi

Comparison of 2017 Target and Actual and 2018 Target by Profit or Loss

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Laba Rugi Tahun 2017 serta Target Tahun 2018 (Rp juta)
Table of Comparison of Target and Actual Profit or Loss in 2017 and 2018 Target (Rp million)

Uraian Description	Realisasi 2017 Realization of 2017	Target RKAP 2017 RKAP Target of 2017	Pencapaian (%) Achievements (%)	Proyeksi 2018 2018 Projections
Pendapatan Usaha | Revenues	39.436.418	42.292.279	93,25	43.913.688
Beban Usaha | Operating Expenses	35.069.946	39.180.066	89,51	37.468.060
Pendapatan (Beban) Lain-lain Other Income (Expenses)	(636.065)	(26.042)	2.342,46	(378.356)
Laba Sebelum Pajak Income Before Tax	3.730.407	3.086.170	120,87	6.067.272
Beban Pajak | Tax Expense	(498.084)	(794.058)	62,73	(1.704.804)
Laba Tahun Berjalan | Income for The Year	**3.232.323**	**2.292.112**	**141,02**	**4.362.468**

Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Laba Komprehensif Tahun Berjalan Tahun 2017 serta Target Tahun 2018 (Rp juta)
Chart of Comparison of Target and Actual Comprehensive Income in 2017 and 2018 Target (Rp million)



Realisasi Pendapatan Usaha Perusahaan tahun 2017 Rp39.436.418 juta dengan pencapaian 93,25% dari target RKAP 2017 sebesar sebesar Rp42.292.279 juta. Selanjutnya, pada tahun 2018 Pendapatan Usaha

The actual Revenues in 2017 were Rp39,436,418 million, at the progress of 93.25% of the WP&B 2017 target at Rp42,292,279 million. Further, the Revenues are targeted at Rp43,913,688 million in 2018. The

ditargetkan sebesar Rp43.913.688 juta. Proyeksi tersebut didasarkan peningkatan *dispatch* pembangkit milik sendiri.

projection is based on the increase in the self-owned power plant dispatch.

Realisasi Beban Usaha Perusahaan tahun 2017 Rp35.069.946 juta dengan pencapaian 89,51% dari target RKAP 2017 sebesar sebesar Rp39.180.066 juta. Selanjutnya, pada tahun 2017 Beban Usaha ditargetkan sebesar Rp37.468.060 juta. Proyeksi tersebut didasarkan pada penurunan pos beban pengeluaran yang terdiri dari bahan bakar, biaya pemeliharaan dan beban kepegawaian.

The actual Operating Expenses in 2017 were Rp35,069,946 million, at the progress of 89.51% of the WP&B 2017 target at Rp39,180,066 million. Further, the Operating Expenses are targeted at Rp37,468,060 million in 2018. The projection is based on the decline in expenses comprising fuel, maintenance, and personnel expenses.

Realisasi Laba tahun berjalan Perusahaan tahun 2017 sebesar Rp3.232.323 juta dengan pencapaian 141,02% dari target RKAP 2017 sebesar Rp2.292.112 juta. Selanjutnya, pada tahun 2018 Laba tahun berjalan diproyeksikan sebesar Rp4.362.468 juta. Proyeksi tersebut didasarkan pada manfaat kompensasi pajak tangguhan sesuai dengan proyeksi laba 2017-2022. Hal tersebut mempengaruhi kenaikan laba tahun berjalan serta total ekuitas Perusahaan.

The actual Income for the Year in 2017 was amounting at Rp3,232,323 million, at the progress of 141.02% of the WP&B 2017 target at Rp2,292,112 million. Further, the Income for the Year is targeted at Rp4,362,468 million in 2018. The projection is based on the benefit of deferred tax compensation according to the projection of income 2017-2022. This brings impact to the increase in Income for the Year and Total Equity.

Perbandingan Target dan Realisasi 2017 serta Target 2018 Struktur Modal

Comparison of 2017 Target and Actual and 2018 Target by Capital Structure

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Struktur Modal Tahun 2017 serta Target Tahun 2018 (Rp juta)
Table of Comparison of Target and Actual Capital Structure in 2017 and 2018 Target (Rp million)

Uraian Description	Realisasi 2017 Realization of 2017		Target RKAP 2017 RKAP Target of 2017		Pencapaian (%) Achievements (%)	Proyeksi 2018 2018 Projections	
	Rp Juta Rp Million	%	Rp Juta Rp Million	%		Rp Juta Rp Million	%
Liabilitas I Liabilities	9.208.877	4,22	15.029.789	6,35	61,23	14.362.934	6,25
Ekuitas I Equity	209.130.165	95,78	221.777.133	93,65	94,30	215.360.001	93,75
Aset I Assets	218.339.042	100,00	236.806.922	100,00	92,20	229.722.935	100,00

Pada tahun 2017 Aset yang dibiayai oleh liabilitas sebesar 4,22% lebih rendah target RKAP 2017 sebesar 6,54%. Sementara itu, Aset yang dibiayai oleh ekuitas sebesar 95,78%, hal ini telah melampaui target RKAP 2018 sebesar 93,46%. Selanjutnya, Perusahaan memproyeksikan perbandingan liabilitas dan ekuitas terhadap Aset tahun 2018 masing-masing sebesar 6,25% dan 93,75%. Proyeksi tersebut didasarkan pada manfaat kompensasi pajak tangguhan sesuai dengan proyeksi laba 2017-2022. Hal tersebut mempengaruhi kenaikan laba tahun berjalan serta total ekuitas Perusahaan.

In 2017, the Assets financed by Liabilities was 4.22%, which was lower than the WP&B 2017 target at 6.54%. Meanwhile, the Assets financed by Equity at 95.78% has met exceeded the WP&B 2017 target at 93.46%. Further, the Company projects the comparison of Liabilities and Equity against Assets in 2018 at respectively 6.25% and 93.75%. The projection is based on the benefit of deferred tax compensation according to the projection of income 2017-2022. This brings impact to the increase in Income for the Year and Total Equity.

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN DAN PENCAPAIAN KPI

COMPANY SOUNDNESS LEVEL AND KPI ACHIEVEMENT



Tingkat Kesehatan Perusahaan

Tingkat kesehatan merupakan kriteria atau indikator yang digunakan Perusahaan dalam menilai tingkat kesehatan perusahaan yang ditetapkan dalam RKAP tahun buku 2017.

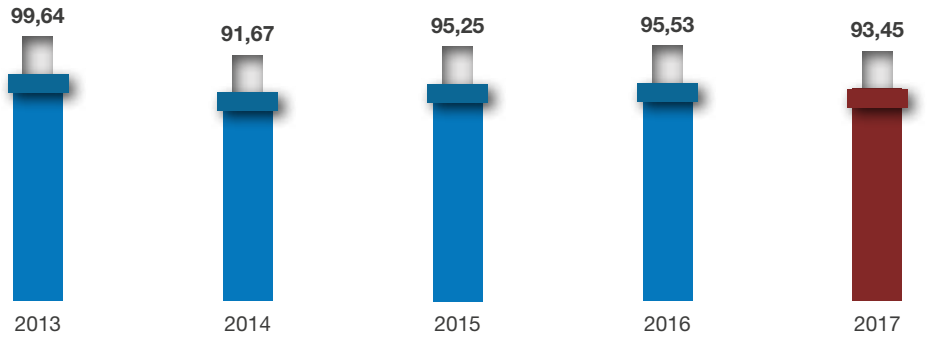
Tingkat Kesehatan Perusahaan tahun 2017 berada pada level “AA” yang termasuk dalam kategori “SEHAT” dengan Skor 93,45.

Company Soundness Level

Soundness level is an indicator used by the Company in assessing the Company’s condition as set in WP&B 2017.

The Company soundness level in 2017 was at the level of “AA” in the “SOUND” category, with the score 93.45. Chart of Company Soundness Level in 2013-2017.

Grafik Pencapaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2013-2017
Graph: Achievement of Company's Soundness Level 2013-2017



Pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI)

Salah satu indikator untuk menilai tingkat pencapaian kinerja Perusahaaan adalah dengan melihat pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Perusahaan. KPI merupakan suatu ukuran kinerja yang bersifat kuantitatif, yang disetujui sebelumnya oleh Manajemen dan merupakan cerminan faktor-faktor penentu keberhasilan Perusahaan. Perusahaan tentu memiliki tujuan yang ingin diraih. Terkait dengan hal tersebut, Perusahaan menggunakan KPI sebagai cerminan dari target, *progress* dan pencapaian tujuan.

KPI tahun buku 2017 dilaksanakan sesuai dengan keputusan risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 10 Januari 2017.

Key Performance Indicators (KPI) Achievement

Key Performance Indicators measure the Company's performance achievement. Previously approved by the Management, the KPI are quantitative in nature. They represent certain factors that determine the success of the Company. The Company obviously has its own goals to achieve. Therefore, the KPI exist to measure the target, progress and actual achievement of these goals.

The KPI in 2017 were performed according to the resolutions of the General Meeting of Shareholders dated January 10, 2017.

Tabel Pencapaian KPI Tahun 2017
Table of KPI Performance in 2017

No	Indikator Kinerja Performance Indicator		Satuan Unit	Bobot Integrity	Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	Nilai Score
1	2		3	4	5	6	7	8
I	**Fokus Pelanggan** I Customer Focus			**6**				**4,07**
1	EFOR Korporat I Corporate EFOR	↓	%	6	4,50	5,95	67,78%	4,07
II	**Efektivitas Produk dan Proses** **Effectivity of Products and Process**			**37**				**35,68**
2	EAF Pembangkit (Di luar OMC) Power Plant EAF (Outside OMC)							
	a. Korporat I Corporate	↑	%	5	88,20	86,55	98,13%	4,91
	b. PLTU Batubara Coal Based SPP	↑	%	5	90,74	91,26	100,57%	5,00

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN DAN PENCAPAIAN KPI

COMPANY SOUNDNESS LEVEL AND KPI ACHIEVEMENT

No	Indikator Kinerja Performance Indicator		Satuan Unit	Bobot Integrity	Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	Nilai Score
	c. PLTU Batubara FTP-1 Coal Based SPP FTP-1	↑	%	5	81,10	73,78	90,98%	4,55
3	Tara Kalor Netto Korporat Corporate Net Plant Heat Rate	↓	kcal/kWh	10	2.495,00	2.558,74	97,45%	9,74
4	Pemakaian Sendiri Pembangkit Generator's Self-Consumption	↓	%	6	4,15	4,50	91,44%	5,48
5	Umur Persediaan Batubara Coal Reserves Age	↓	Hari Day	6	18	6,10	166,11%	6,00
III	**Fokus Tenaga Kerja** **Employment Focus**			**6**				**5,99**
6	*Human Capital Readiness* (HCR)		Level	3	4,27	4,27	100,0%	3,00
7	*Organizational Capital Readiness* (OCR)		Level	3	4,27	4,25	99,53%	2,99
IV	**Keuangan dan Pasar** **Financial and Market**			**36**				**32,86**
8	Biaya Pokok Penyediaan Pembangkit Cost of Generator Provision	↓	Rp/kWh	5	813,82	811,05	100,36%	5,00
9	Efisiensi Biaya Pemeliharaan Maintenance Cost Efficiency	↓	%	5	0,79	0,68	113,60%	5,00
10	Perputaran Material Non Bahan Bakar Non-Fuel Material Cycle	↑	kali time	6	5,00	5,09	101,80%	6,00
11	Pencapaian Investasi Achievement of Investment	↑	Rp Miliar Rp Billion	10	4.834,84	3.318,22	68,63%	6,86
12	Penerimaan dividen (AP dan Afiliasi) Dividends received (AP and Affiliate)	↑	Rp Miliar Rp Billion	5	5,33	21,90	410,84%	5,00
13	Sinergi dengan Anak Perusahaan Lain Synergizing with other Subsidiaries	↑	Rp Miliar Rp Billion	5	1.097,43	2.397,16	218,43%	5,00
V	**Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung jawab Kemasyarakatan** **Leadership, Governance, and Social Responsibility**			**15**				**14,85**
14	Skor KPKU I KPKU Score	↑	Score	3	615	584	94,96%	2,85
15	Penerapan GCG GCG Implementation	↑	Score	3	93,00	93,07	100,08%	3,00
16	Enterprise Risk Management Enterprise Risk Management	↑	Level	3	3,60	3,86	107,22%	3,00
17	Tingkat Proper Unit (Hijau/Emas) Unit's Proper Level (Green/Gold)	↑	Jumlah Unit Total Unit	3	4,00	9,00	225,00%	3,00
18	Penyelesaian Temuan Auditor Settlement of Auditor's Findings	↑	Score	3	100,00	100,00	100,00%	3,00
19	Kepatuhan pada K3L (Kesehatan, Keselamatan Kerja & Lingkungan Hidup) Compliance with K3L (Health, Occupational Health, and Environment)	↓		Max-10				
	TOTAL BOBOT I WEIGHT TOTAL			**100**				**93,45**

KEBIJAKAN DIVIDEN
DIVIDEND POLICY



Kebijakan Pembagian Dividen

Kebijakan Dividen perusahaan telah mempertimbangkan peraturan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan apabila saldo laba positif sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. Pembagian dividen dilaksanakan sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dividend Payout Policy

The Dividend Policy at the Company has considered the applicable regulation in accordance with Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, stating that the Company shall set aside a certain amount of the net income of each fiscal year as allowance in the event where the positive retained earnings until the to the allowance reaches at least 20% of the issued and paid-up capital. Dividend payout is performed according to the resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS).

KEBIJAKAN DIVIDEN
DIVIDEND POLICY

Rincian Pembagian Dividen
Sesuai dengan hasil Keputusan RUPS Tahunan Perusahaan pada tanggal 24 Mei 2017 memutuskan bahwa pembagian dividen tunai Perusahaan sebesar Rp2.855.017 juta atau 100% dari laba periode berjalan tahun buku 2016 sebesar Rp2.855.017 juta.

Details of Dividend Payout
In accordance with the Annual GMS Resolutions dated May 24, 2017, the distribution of the Company's cash dividend was amounted to Rp2,855,017 million or 100% of current period's income in fiscal year 2016 amounted to Rp2,855,017 million.

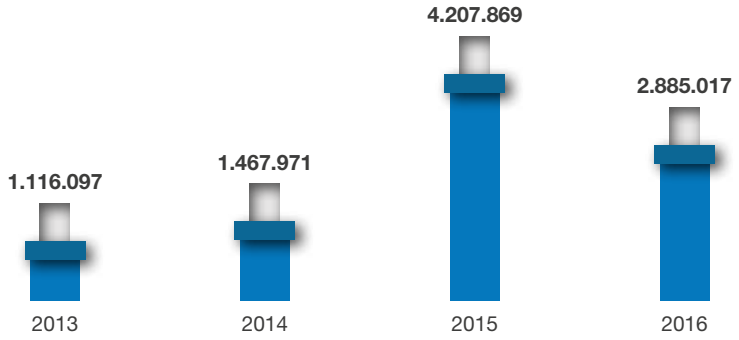
Tabel Pembayaran Dividen Tahun Buku 2013-2017
Table of Dividend Payout in 2013-2017

Uraian Description	Tahun Buku 2013 Fiscal Year 2013	Tahun Buku 2014 Fiscal Year 2014	Tahun Buku 2015 Fiscal Year 2015	Tahun Buku 2016 Fiscal Year 2016	Tahun Buku 2017 Fiscal Year 2017
Laba Bersih (Rp juta) I Net Profit (Rp million)	1.240.108	1.631.079	4.668.403	2.885.017	3.232.323
Persentase Dividen (%) Dividend Percentage (%)	90%	90%	90%	100%	*
Dividen yang Dibagikan (Rp juta) Appropriated Dividend (Rp million)	1.116.097	1.467.971	4.207.869	2.885.017	*
Dividend Pay Out Ratio Dividend Pay Out Ratio	90:10	90:10	90:10	100:1	*
Tanggal Pengumuman Pembayaran Date of Payment Announcement	20 November 2014 November 20, 2014	9 Oktober 2015 October 9, 2015	1 Desember 2016 December 1, 2016	13 Juli 2017 July 13, 2017	*
Tanggal Realisasi Pembayaran Dividen Kas Date of Cash Dividend Payment Completed	25 November 2014 November 25, 2014	20 Oktober 2015 October 20, 2015	21 Desember 2016 December 21, 2016	31 Agustus 2017 August 31, 2017	*

* Pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2017 dilaksanakan sesuai dengan hasil keputusan RUPS yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2018

* Dividend payout for fiscal year 2017 is carried out according to the GMS resolutions and will be executed in May 2018.

Tabel Dividen yang Dibagikan Tahun Buku 2013-2016 (Rp juta)
Table of Appropriated Dividends in Fiscal Years 2013-2016 (Rp million)



INFORMASI IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

INFORMATION ON MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL INVESTMENT



Dalam melakukan investasi barang modal, Perusahaan adakan sejumlah perikatan material, baik dengan pihak berelasi maupun pihak ketiga.

In performing capital investment, the Company establishes a number of material commitments, both with related parties and third parties.

Tabel Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal Tahun 2017
Table of Material Commitments for Capital Investment in 2017

Jenis Ikatan Type of Commitment	Nama Pihak yang Melakukan Ikatan Party under Commitment	Tujuan dari Ikatan Tersebut Purpose of Commitment	Sumber Dana Source of Fund	Mata Uang yang Menjadi Denominasi Base Currency
Kontrak *Long Term Services Agreement* (LTSA) UPJP Priok Priok GGSU Long-term Service Agreement (LTSA)	PT Alstom Power Energy Systems Indonesia	Kebutuhan *sparepart* kapitalisir untuk *Major Overhoul* Spare Parts Capitalization for Major Overhaul	Dana Internal Internal Funding	EUR
Kontrak LTSA UPJP Perak Grati GGSU Perak Grati LTSA	PT Poeser Indonesia	Kebutuhan *sparepart* kapitalisir untuk Major *Overhoul* Spare Parts Capitalization for Major Overhaul	Dana Internal Internal Funding	JPY

INFORMASI IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

INFORMATION ON MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL INVESTMENT

Jenis Ikatan Type of Commitment	Nama Pihak yang Melakukan Ikatan Party under Commitment	Tujuan dari Ikatan Tersebut Purpose of Commitment	Sumber Dana Source of Fund	Mata Uang yang Menjadi Denominasi Base Currency
Kontrak *Engineering Procurement and Construction* (EPC) Engineering Procurement and Construction (EPC) Contract	Konsorsium Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Consortium	Pekerjaan EPC PLTGU Grati Add On Blok 2 CCPP Grati Add-on Block 2 EPC Work	Dana Internal Internal Funding	USD EUR
Kontrak EPC EPC Contract	Konsorsium GE Global Parts & Products GmbH - Marubeni Corporation - PT Hutama Karya GE Global Parts & Products GmbH-Marubeni Corporation - PT Hutama Karya Consortium	Pekerjaan EPC PLTGU Tambak Lorok Blok 3 CCPP Tambak Lorok Block 3 EPC Work	Dana Internal Internal Funding	USD EUR JPY
Kontrak EPC EPC Contract	Konsorsium Wartsila Finland OY - PT PP Tbk - PT Wartsila Indonesia Wartsila Finland OY-PT PP Tbk - PT Wartsila Indonesia Consortium	Pekerjaan EPC PLTD Senayan DPP Senayan EPC Work	Dana Internal Internal Funding	EUR
Kontrak EPC EPC Contract	Konsorsium PT Hutama Karya (Persero) - WWS Wasserkraft GMBH & CO KG PT Hutama Karya (Persero)-WWS Wasserkraft GMBH & CO KG Consortium	Pekerjaan EPC PLTMH Gunung Wugul MHPP Gunung Wugul EPC Work	Dana Internal Internal Funding	EUR

Langkah Perlindungan Risiko terhadap Posisi Mata Uang Asing

Untuk mengurangi risiko fluktuasi kurs mata uang asing Indonesia Power menggunakan penetapan sensitivitas kurs valas pada batas nilai maksimum tertentu, di mana apabila terlewati semua proses pengadaan barang/jasa harus mendapatkan persetujuan tertulis dahulu dari Direksi.

Selain itu, langkah yang ditempuh adalah penggunaan mata uang Rupiah untuk transaksi, sesuai dengan PBI (Peraturan Bank Indonesia) yang diundangkan per tanggal 31 Maret 2015 yang mewajibkan penggunaan mata uang Rupiah di wilayah Republik Indonesia, mengatur bahwa khusus untuk pengadaan spareparts

Protection against Foreign Currency Risk

To reduce the risk of fluctuating foreign currency rate, Indonesia Power determines foreign currency rate sensitivity at certain maximum value where, if such value is exceeded, goods/services procurement must obtain prior written approval from the Board of Directors.

Another measure taken is the use of Rupiah for transactions, in accordance with Bank Indonesia Regulation dated March 31, 2015 which requires the use of Rupiah as the currency in the territory of the Republic of Indonesia, stating that for the procurement of imported spare parts traded in Indonesia, the

impor yang telah di perjualbelikan di Indonesia, ikatan perjanjian/kontrak Perusahaan dan *vendor* wajib menggunakan mata uang Rupiah. Dalam ikatan ini, Indonesia Power menggunakan kebijakan sistem *Floating Rate* yang dihitung dengan menggunakan formula nilai Kurs Tengah Transaksi EUR - Bank Indonesia.

agreement/contract between the Company and vendor must be in Rupiah. In the commitment, Indonesia Power uses floating rate which is calculated using the EUR-Bank Indonesia transaction middle rate.

Ikatan Material Tahun 2017

Berikut merupakan uraian mengenai perikatan material berupa ikatan dan kontinjensi yang dilakukan Perusahaan pada tahun 2017.

Material Commitments in 2017

The followings are details of material commitments and contingencies made by the Company in 2017.

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Perusahaan dan entitas anak memiliki sejumlah Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dengan PLN. Dalam perjanjian tersebut, PLN membayar pasokan tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan dan entitas anak sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan formula pembayaran. Pembayaran tersebut mencakup komponen biaya kapasitas, energi, operasional dan pemeliharaan yang tergantung pada tingkat pasokan energi serta variabel lain yang ditentukan dalam perjanjian.

Electricity Sale and Purchase Agreement

The Company and its subsidiaries have established a number of Electricity Sale and Purchase Agreements (PJBTL) with PLN. The agreements set that PLN shall pay for the electricity supplied by the Company and its subsidiaries at the amount specified in pursuant to the payment formulation. The payment covers the costs of capacity, energy, operation, and maintenance which are depended on the energy supply and other variables specified in the agreements.

Perjanjian Pasokan Bahan Bakar

Fuel Supply Agreement

Perjanjian Pasokan Gas

Gas Supply Agreement

Tabel Pasokan Bahan Bakar Gas Tahun 2017
Table of Fuel Supply in 2017

No	Sektor Sector	Pemasok Supplier	No. Perjanjian No. of Agreement	Periode Period	Satuan Unit	Yang Disepakati* Agreed*
1	Tanjung Priok	PT Perusahaan Gas Negara ("PGN")	002701. Amd/HK.02/ COD/2017	2017	BBTUD	27.27-30
			0135-2.PJ/ EPI.03.02/ DITDAN20	2017	BBTUD	30-36
2	Muara Karang dan Tanjung Priok Muara Karang and Tanjung Priok	Pertamina Hulu Energi ONJW Ltd.: Itochu Oil Inpex Jawa Ltd.: CNOOC ONJW Ltd.: dan | and Talisman Resources (North West Java) Ltd.	0198-2j/ EPI.03.02/ DITDAN/20	2017-2022	BBTUD	110
		PT Nusantara Regas. Perusahaan patungan antara | Joint Venture of PT Pertamina (Persero) dengan | and PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	273.PJ/041/ DIR/2012	2012-2022	Juta Ton LNG	11.03

INFORMASI IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

INFORMATION ON MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL INVESTMENT

No	Sektor Sector	Pemasok Supplier	No. Perjanjian No. of Agreement	Periode Period	Satuan Unit	Yang Disepakati* Agreed*
3	Grati	Santos (Sampang) Pty Ltd., Singapore Petroleum Sampang Ltd dan I and Cue Sampang Pty Ltd.	-	2009-2020*	TBTU	114
			115.PJ.061/ IP/2010	2012-2020	TBTU	106
4	Tambak Lorok	PT Sumbar Petrindi Perkasa	97.PJ/061/ IP/2007	2014-2029	TBTU	219
		PC Muriah Ltd	107.PJ/061/ IP/2012	2015-2026	Bcf	354
5	Bali	PT Pertamina (Persero), Total E&P Indonesia	018888.PJ/ EPI.01.02/ DIR/2016	2016-2017	m^3	424.603

Catatan I Remarks:
*) Dalam angka penuh I In full value

Perjanjian Pasokan Batubara

Gas Supply Agreement

Tabel Pasokan Bahan Bakar Batubara Tahun 2017
Table of Coal Supply in 2017

No	Pemasok Supplier	Nomor Kontrak Contract Number	Jumlah dalam Metrik ton* Amount in ton Metric*	Periode Period
1	PT Bukit Asam (Persero) Tbk	12.PJ/061/IP/2013	3.400.000	2013 - 2022
2	PT Eksploitasi Energi Indonesia	04/PJ/061/IP/2006	480.000	2006 - 2018
3	PT Oktasan Baruna Persada	13.PJ/061/IP/2006	660.000	2006 - 2019
4	PT Berau Coal	84.PJ/061/IP/2008	2.500.000	2009 - 2018
5	PT Kideco Jaya Agung	85.PJ/061/IP/2008	1.500.000	2009 - 2018
6	PT Adaro Indonesia	117.PJ/061/IP/2014	1.500.000	2014 - 2023

*) Dalam angka penuh I In full value

Harga pembelian batubara berkisar antara Rp716.000 (angka penuh) dan Rp1.068.863 (angka penuh) per ton sebelum penyesuaian spesifikasi batubara.

The coal purchase price ranges between Rp716,000 (full value) and Rp1,068,863 (full value) per ton before coal specification adjustment.

Perjanjian Pasokan Bahan Bakar Minyak

Perusahaan melalui PLN dan PT Pertamina (Persero) (“Pertamina”) mengadakan Perjanjian Payung Jual Beli Bahan Bakar Minyak No. 071.PJ/060/DIR/2001 tanggal 8 Oktober 2001. Perjanjian ini telah diadendum tanggal 16 Mei 2007 dimana PLN dan Pertamina menyepakati antara lain:

(i) penggunaan harga bahan bakar bulanan ditetapkan oleh Pertamina untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 April 2007 dan harga bahan bakar 109,5% dari Mean Oil Platts Singapore (”MOPS”) ditambah Pajak Pertambahan Nilai untuk periode 1 Mei 2007 sampai dengan 31 Desember 2007;

Oil Fuel Supply Agreement

The Company, through PLN and PT Pertamina (Persero) (“Pertamina”) established an Umbrella Agreement for the Sale and Purchase of Oil Fuel No. 071.PJ/060/DIR/2001 dated October 8, 2001. The agreement was amended with addendum dated May 16, 2007, where PLN and Pertamina agreed upon the followings:

(i) the utilization of annual fuel price set by Pertamina for the period of January 1 to April 30, 2007 and fuel price 109.5% of the Mean of Platts Singapore (“MOPS”) plus Value Added Tax for the period from May 1, 2007 to December 31, 2007;

(ii) harga bahan bakar setelah tanggal 31 Desember 2007 akan ditetapkan oleh kedua belah pihak setiap tahun;
(iii) jangka waktu pembayaran berikut pengenaan denda keterlambatan pembayaran sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia bulanan ditambah 1,3%;
(iv) efektif mulai 1 Mei 2007, saldo utang yang belum dibayar atas pembelian bahan bakar sampai dengan 30 April 2007 dikenakan bunga sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia per tahun ditambah 1,3%, sampai diselesaikan dengan menerbitkan obligasi PLN selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2007;
(v) utang kepada Pertamina, termasuk obligasi yang akan diterbitkan maksimum sebesar Rp18 triliun; dan
(vi) perjanjian ini berlaku untuk lima tahun sejak 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2011.

Berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 16 Mei 2007, PT Sucofindo (Persero) ditunjuk sebagai *independent surveyor*.

Berdasarkan Addendum III Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak tanggal 7 November 2011, PLN dan Pertamina menyepakati dalam tahun 2011 sebagai berikut:

***a. High Speed Diesel* ("HSD")**
- Harga pembelian HSD sampai dengan 2.537.161 kiloliter (kl) di 18 titik penyerahan Pertamina adalah 105% dari MOPS.
- Harga pembelian HSD sampai dengan 480.487 kl di titik penyerahan Pertamina Terminal Transit Manggis adalah 108% dari MOPS.
- Harga pembelian HSD sampai dengan 2.978.360 kl di titik penyerahan di Instalasi Tanjung Priok dan Instalasi Surabaya Group adalah 108,5% dari MOPS.
- Harga pembelian HSD diatas 5.996.008 kl atau yang diserahkan diluar 21 titik penyerahan yang ditetapkan Pertamina adalah 109,5% dari MOPS.

b. Harga pembelian Industrial Diesel Oil ("IDO") sampai dengan 3.933 kl di titik penyerahan di Kilang Plaju adalah 105% dari MOPS dan pembelian diatas 3.933 kl atau yang diserahkan diluar titik penyerahan Kilang Plaju adalah 109,5% dari MOPS.

(ii) the fuel price after December 31, 2007 will be set by both parties on an annual basis;

(iii) the period of payment and the imposition of fine for late payment shall be at the interest rate based on monthly Bank Indonesia Certificate plus 1.3%;

(iv) effective since May 1, 2007, the outstanding payables for the purchase of fuel until April 30, 2007 shall be subject to interest at the rate based on annual Bank Indonesia Certificate plus 1.3%, until their settlement with the issuance of PLN bonds no later than August 31, 2007;

(v) payables to Pertamina, including bonds to be issued, shall be at maximum Rp18 trillion; and

(vi) this agreement shall be effective for five years from January 1, 2007 to December 31, 2011.

Pursuant to a Memorandum of Understanding dated May 16, 2007, PT Sucofindo (Persero) is appointed as the independent surveyor.

In pursuant to Addendum III of the Oil Fuel Purchase and Sale Agreement dated November 7, 2011, PLN and Pertamina agreed upon as follows for 2011:

a. High Speed Diesel ("HSD")
- The purchase price of HSD until 2,537,161 kiloliter (kl) at 18 Pertamina handover points is 105% of the MOPS.
- The purchase price of HSD until 480,487 kl at Pertamina Terminal Transit Manggis handover point is 108% of the MOPS.
- The purchase price of HSD until 2,978,360 kl at Tanjung Priok Installation and Surabaya Group Installation handover points is 108.5% of the MOPS.
- The purchase price of HSD above 5,996,008 kl or handed over outside 21 handover points specified by Pertamina is 109.5% of the MOPS.

b. The purchase price of Industrial Diesel Oil ("IDO") until 3,933 kl at Plaju Refinery handover point is 105% of the MOPS and the purchase above 3,933 kl or handed over outside Plaju Refinery handover point is 109.5% of the MOPS.

INFORMASI IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

INFORMATION ON MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL INVESTMENT

c. Harga pembelian Marine Fuel Oil ("MFO") sampai dengan 1.193.166 kl di titik penyerahan di Kilang Cilacap adalah 105% dari MOPS dan pembelian diatas 1.193.166 kl atau yang diserahkan diluar titik penyerahan di Kilang Cilacap adalah 109,5% dari MOPS.

Tahun 2013, PLN dan Pertamina sepakat untuk menggunakan harga tahun 2011, karena amandemen Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak belum diselesaikan.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-74/MK.02/2015 kepada Menteri ESDM mengenai rekomendasi penetapan harga jual beli HSD dan MFO antara PLN dan Pertamina tahun 2014 tanggal 30 Januari 2015, pokok-pokok kesepakatan antara Pertamina dan Perusahaan antara lain:

a. Harga jual tahun 2014 menggunakan harga berdasarkan evaluasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan sebesar HSD: MOPS + 9,19% dan MFO: MOPS + 11,94%;
b. Dalam rangka efisiensi biaya pembelian di tahun 2015, PLN diperkenankan untuk mencari sumber Bahan Bakar Minyak ("BBM") selain Pertamina, dengan tetap menjaga keamanan pasokan BBM.

PLN telah mencatat pembelian HSD dan MFO tahun 2014 berdasarkan harga tersebut.

Dalam rangka penyelesaian harga jual Bahan Bakar Minyak (HSD dan MFO) Pertamina kepada PLN, telah dilakukan pembahasan harga jual beli bahan bakar minyak (HSD dan MFO) antara Pertamina dan Perusahaan tahun 2015 di Kantor Kementerian BUMN, difasilitasi oleh Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, untuk menentukan harga transaksi BBM di tahun 2015.

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Harga Jual Beli Bahan Bakar Minyak (HSD dan MFO) antara Pertamina dan PLN tanggal 9 Februari 2016 dengan hasil sebagai berikut:

a. Harga transaksi HSD tahun 2015:
   - Januari sampai dengan September 2015 adalah 107% dari MOPS

c. The purchase price of Marine Fuel Oil ("MFO") until 1,193,166 kl at Cilacap Refinery handover point is 105% of the MOPS and the purchase above 1,193,166 kl or handed over outside Cilacap Refinery handover point is 109.5% of the MOPS.

In 2013 PLN and Pertamina agreed to use the 2011 price, as the amendment to Oil Fuel Purchase and Sale Agreement was unfinished.

In accordance with the Letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. S-74/MK.02/2015 to the Minister of Energy and Mineral Resources concerning recommendation for the establishment of HSD and MFO sale and purchase price between PLN and Pertamina for 2014 dated January 30, 2015, the points of agreement between Pertamina and the Company are as follows:

a. The sale price for 2014 is based on the price resulted from the evaluation of the Finance and Development Supervisory Agency, for HSD: MOPS + 9.19% and for MFO: MOPS + 11.94%.
b. For the sake of efficiency of cost of purchase in 2015, PLN is allowed to seek oil fuel from outside Pertamina, by maintaining the sufficiency of the oil fuel supply.

PLN has recorded the purchase of HSD and MFO in 2014 according to the price.

For the settlement of oil fuel (HSD and MFO) sale price from Pertamina to PLN, discussions to determine the oil fuel (HSD and MFO) sale and purchase price occurred between Pertamina and the Company in 2015, located at the Office of the Ministry of SOE, with facilitation from the Deputy for Energy, Logistics, Regions and Tourism of the Ministry of SOE.

In accordance with the Minutes of Oil Fuel (HSD and MFO) Sale and Purchase Price Agreement between Pertamina and PLN dated February 9, 2016, the following results were obtained:

a. HSD transaction price for 2015:
   - January to September 2015 is 107% of the MOPS.

- Oktober sampai dengan Desember 2015 adalah 105% dari MOPS

b. Harga transaksi MFO tahun 2015 adalah 109,5% dari MOPS.

PLN telah mencatat pembelian HSD dan MFO tahun 2015 berdasarkan harga tersebut.

Berdasarkan Addendum IV Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak tanggal 16 Mei 2017, Pertamina dan PLN menyepakati perpanjangan jangka waktu pasokan hingga tahun 2020.

Berdasarkan Addendum V, kesepakatan harga jual beli bahan bakar minyak (HSD dan MFO) antara Pertamina dan PLN tanggal 17 Oktober 2017, adalah sebagai berikut:

a. Harga transaksi HSD tahun 2017:
   - Januari sampai dengan Juni 2017 adalah 107% dari MOPS.
   - Juli sampai dengan Desember 2017 adalah 104,58% dari MOPS.

b. Harga transaksi MFO tahun 2017:
   - Januari sampai dengan Juni 2017 adalah 109,5% dari MOPS.
   - Juli sampai dengan Desember 2017 adalah 109,1% dari MOPS.

PLN telah mencatat pembelian HSD dan MFO tahun 2017 berdasarkan harga tersebut.

Perjanjian Pasokan Uap Panas Bumi

Melalui PLN, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Pertamina untuk pengadaan uap panas bumi untuk daerah Kamojang selama 30 tahun yang berakhir tahun 2012 dan telah melalui Amandemen I Surat Perjanjian antara Pertamina dan PLN PLTP Unit 1,2,3 di Kamojang.

Sampai tahun 2015, perjanjian masih menggunakan Amandemen V Perjanjian Interim antara PT Pertamina Geothermal Energy, PLN dan IP. Pada tanggal 11 Februari 2016, dilakukan amandemen secara keseluruhan dan pernyataan kembali atas perjanjian induk, yang berlaku mulai 1 Agustus 2012 sampai dengan 31 Desember 2040. Untuk PLTP Gunung Salak perjanjian selama masa 30 tahun yang berakhir tahun 2030.

- October to December 2015 is 105% of the MOPS.

b. MFO transaction price for 2015 is 109.5% of the MOPS.

PLN has recorded the purchase of HSD and MFO in 2015 according to the price.

In pursuant to Addendum IV of the Oil Fuel Purchase and Sale Agreement dated May 16, 2017, Pertamina and PLN agreed upon the extension of supply period until 2020.

In accordance with Addendum V, the agreed oil fuel (HSD and MFO) sale and purchase price between Pertamina and PLN dated October 17, 2017 is as follows:

a. HSD transaction price for 2017:
   - January to June 2017 is 107% of the MOPS.
   - July to December 2017 is 104.58% of the MOPS.

b. MFO transaction price for 2017:
   - January to June 2017 is 109.5% of the MOPS.
   - July to December 2017 is 109.1% of the MOPS.

PLN has recorded the purchase of HSD and MFO in 2017 according to the price.

Geothermal Steam Supply Agreement

Through PLN, the Company made an agreement with Pertamina for the procurement of geothermal steam for Kamojang area for 30 years which ended in 2012. The Agreement has the Amendment I on Letter of Agreement between Pertamina and PLN GPP Units 1, 2, and 3 in Kamojang.

Until 2015, the Agreement used Amendment V on Interim Agreement between PT Pertamina Geothermal Energy, PLN, and IP. On February 11, 2016, comprehensive amendment and restatement were made to the master agreement, which is effective from August 1, 2012 to December 31, 2040. For GPP Gunung Salak, the 30-year agreement will expires in 2030.

INFORMASI IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

INFORMATION ON MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL INVESTMENT

Perjanjian Lainnya

Perjanjian Transportasi Gas Pembangkit Listrik Tambak Lorok

Pada tanggal 10 Desember 2012, Perusahaan melalui PLN menandatangani surat perjanjian kerjasama no. 278-1.PJ/041/DIR/2012 terkait transportasi gas PC Muriah Ltd. dengan PT Bakrie & Brothers Tbk untuk pembangkit listrik Tambak Lorok. Perjanjian transportasi gas tersebut kemudian dialihkan melalui novasi dan perubahan perjanjian pengangkutan gas melalui pipa yang ditandatangani tanggal 22 Februari 2016 oleh PT Bakrie & Brothers Tbk, PC Muriah Ltd., PLN, Saka Energi Muriah Ltd., dan PT Kalimantan Jawa Gas sebagai *transporter*. Perjanjian transportasi gas akan tetap berlangsung selama perjanjian penyaluran gas berlangsung.

Perjanjian Jasa Pengurusan Pengapalan, Perjanjian Fasilitas Penyimpanan Liquid Natural Gas (LNG) dan Perjanjian Terminal LNG untuk PLTDG Pesanggaran

Pada tanggal 8 Desember 2015, Perusahaan dan PT Pelindo Energi Logistik menandatangani masing-masing Perjanjian Jasa Pengurusan Pengapalan, Perjanjian Fasilitas Penyimpanan LNG dan Perjanjian Terminal LNG untuk PLTDG Pesanggaran.

Perjanjian Jasa Pengurusan Pengapalan dan Perjanjian Jasa Fasilitas LNG berlaku selama 7 tahun berdasarkan kontrak No. 187.PJ/061/IP/2015 dan 188.PJ/061/IP/2015, sedangkan Perjanjian Jasa Terminal LNG berlaku selama 5 tahun berdasarkan kontrak No. 189.PJ/061/IP/2015.

Pada tanggal 27 Desember 2017, Perusahaan dan PT Pelindo Energi Logistik menandatangani addendum perjanjian atas Perjanjian Jasa Pengurusan Pengapalan, Perjanjian Jasa Fasilitas Penyimpanan LNG dan Perjanjian Jasa Terminal LNG melalui Perjanjian Jasa Fasilitas Midstream LNG Benoa Bali No. 307.PJ/061/IP/2017 yang berlaku sampai dengan 28 Februari 2023.

Stand By Letter of Credit (''SBLC")Perusahaan memliki fasilitas Non Cash Loan sebagai SBLC dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang digunakan untuk jaminan perjanjian jual beli gas dengan Santos Sampang Pty. Ltd. Dengan nominal sebesar US$25.008.353,81 (nilai penuh) atau setara dengan Rp336.012 juta per 31 Desember 2016, dengan jangka waktu 25 Januari 2016 sampai dengan 24 Januari 2017 dan diperpanjang

Other Agreements

Gas Transport Agreement for Tambak Lorok Power Plant

On December 10, 2012, the Company through PLN signed Agreement No. 278-1.PJ/041/DIR/2012 on PC Muriah Ltd. gas transport with PT Bakrie & Brothers Tbk for Tambak Lorok power plant. The gas transport agreement was then transferred by novation and amendment to gas transport agreement via pipeline, signed on February 22, 2016 by PT Bakrie & Brothers Tbk, PC Muriah Ltd., PLN, Saka Energi Muriah Ltd., and PT Kalimantan Jawa Gas as transporter. The gas transport agreement will continue as long as the gas distribution agreement exists.

Shipping Administration Service Agreement, Liquid Natural Gas Storage Facility Agreement, and LNG Terminal Agreement for DGPP Pesanggaran

On December 8, 2015, the Company and PT Pelindo Energi Logistic each signed the Shipping Administration Service Agreement, LNG Storage Facility Agreement, and LNG Terminal Agreement for DGPP Pesanggaran

The Shipping Administration Service Agreement and LNG Storage Facility Agreement both are valid for seven years under contracts No. 187.PJ/061/IP/2015 and 188.PJ/061/IP/2015, while LNG Terminal Service Agreement is valid for five years under contract No. 189.PJ/061/IP/2015.

On December 27, 2017, the Company and PT Pelindo Energi Logistic signed the addendum to Shipping Administration Service Agreement, LNG Storage Facility Agreement, and LNG Terminal Agreement under Benoa Bali LNG Midstream Facility Service Agreement No. 307.PJ/061/IP/2017 which is valid through February 28, 2023.

The Company has Standby Letter of Credit (''SBLC"), a Non-Cash Loan facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, which is used as collateral for the gas sale and purchase agreement with Santos Sampang Pty. Ltd. The agreement is valued US$25,008,353.81 (full value) or equal to Rp336,012 million per December 31, 2016, with the period from January 25, 2016 to January 24, 2017, which was extended with the value

dengan nominal sebesar US$19.996.848,40 (nilai penuh) atau setara dengan Rp268.678 juta dengan jangka waktu 25 Januari 2017 sampai dengan 24 Januari 2018.

of US$19,996,848.40 (full value) or equal to Rp268,678 million with the period from January 25, 2017 to January 24, 2018.

Permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya atas Perkara Arbitrase No. 18/ ARB/BANI-SBY/VI/2015 antara konsorsium PT Boma Bisma Indra - PT Indosurya Persada dengan PT Indonesia Power Unit Pembangkitan Semarang

Yusuf Subiantoro, selaku penanggung jawab finansial pimpinan kerjasama konsorsium PT Boma Bisma Indra – PT Indosurya Persada ("BBIISP"), mengajukan permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") Perwakilan Surabaya kepada Pengadilan Negeri Semarang atas Perkara Arbitrase No. 18/ARB/BANI-SBY/VI/2015 yang telah dibacakan pada Selasa 17 Mei 2016, yang putusannya berisi tidak terbuktinya PT Indonesia Power Unit Pembangkitan Semarang melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Konsorsium BBIISP sebesar Rp7,67 miliar ditolak oleh BANI.

Application for the Annulment of Decision of the BANI Arbitration Center Surabaya for Arbitration Case No. 18/ARB/BANI-SBY/ VI/2015 between PT Boma Bisma Indra - PT Indosurya Persada Consortium and PT Indonesia Power Unit Pembangkitan Semarang

Yusuf Subiantoro, as the financial guarantor of the PT Boma Bisma Indra - PT Indosurya Persada ("BBIISP") Consortium, applied for the annulment of decision of the BANI Arbitration Center ("BANI") Surabaya to the District Court of Semarang for Arbitration Case No. 18/ ARB/BANI-SBY/VI/2015 which was read on Tuesday, May 17, 2016, the decision stated that PT Indonesia Power Unit Pembangkitan Semarang is not proven guilty of committing acts against the law, and therefore the claim for compensation filed by BBIISP Consortium amounting to Rp7.67 billion was denied by BANI.

Atas tuntutan perkara tersebut, pada tanggal 29 November 2016 Pengadilan Negeri Semarang memutuskan untuk membatalkan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Surabaya No. 18/ARB/BANI-SBY/VI/2015, dan menghukum PT Indonesia Power untuk membayar kepada Konsorsium atas kekurangan pembayaran sesuai Progres Laporan Kemajuan Pekerjaan senilai 26% atau sebesar Rp2,6 miliar.

For the claim, on November 29, 2016 the District Court of Semarang decided to annul the Arbitration Decision of the BANI Arbitration Center Surabaya No. 18/ARB/ BANI-SBY/VI/2015, and punish PT Indonesia Power to make a payment for the Consortium for the deficiency of payment according to the Work Progress Report, amounting to 26% or Rp2.6 billion.

Pada tanggal 20 Desember 2016, PT Indonesia Power melalui kuasa hukumnya Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Agung mengajukan Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam Perkara Perdata No. 01/Arbitrase/2016/PN.SMG Tanggal 29 November 2016 kepada Ketua Mahkamah Agung RI. Pada tanggal 31 Desember 2017, kasus ini masih dalam proses di Mahkamah Agung.

On December 20, 2016 PT Indonesia Power through its proxy the State Attorney from the Attorney General's Office filed an Appeal Brief against the Decision of the District Court of Semarang in a Civil Case No. 01/ Arbitrase/2016/PN.SMG dated November 29, 2016 to the Chairman of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. Until December 31, 2017, the case was under the proceeding of the Supreme Court.

INVESTASI BARANG MODAL
CAPITAL INVESTMENT



Investasi merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh Perusahaan untuk membeli Aset Tetap atau menambah nilai Aset Tetap yang telah dimiliki dengan tujuan akan memberikan nilai manfaat di masa yang akan datang. Nilai investasi Barang Modal Perusahaan tahun 2017 sebesar Rp4.624.523 juta meningkat 135,09% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp1.967.062 juta. Rincian investasi barang modal tahun 2017 ditunjukkan dalam tabel berikut.

Investment is the Company's expenditure to purchase property, plant, and equipment or to increase the value of existing property, plant, and equipment with the purpose to gain the value of benefits in the future. The Company's capital investment in 2017 was Rp4,624,523 million, which was an improvement by 135.09% from Rp1,967,062 million in 2016. The details of the capital investment in 2017 are shown in the table below.

Tabel Investasi Barang Modal
Table of Capital Investment in 2013-2017 (Rp million)

No	Jenis Investasi Investment Type	2013	2014	2015	2016	2017	Kebijakan Belanja Modal Tahun 2017 Capital Expenditure Policy 2017
1	Bangunan, Waduk dan Prasarana Building, Reservoirs, and Infrastructures	2.074	2.704	7.099	94.221	83.266	Tujuan Investasi: Keandalan & Efisiensi pembangkit Purpose of Investment Power Plant Reliability and Efficiency
							Sumber dana: Anggaran Investasi (Internal) Source of Fund: Investment Budget (Internal)
							Mata Uang: Rupiah Currency: Rupiah
							Langkah Perlindungan Risiko: Asuransi untuk bangunan pembangkit dan pemeliharaan sesuai prosedur untuk waduk dan prasarana non pembangkit Risk Protection Measure: Insurance for generator building and maintenance according to procedure for reservoir and non-generator infrastructure
2	Instalasi dan Mesin Pembangkit Installations and Power Plant	274.287	518.951	258.923	482.238	1.131.198	Tujuan Investasi: Keandalan & Efisiensi pembangkit Purpose of Investment Power Plant Reliability and Efficiency
							Sumber dana: Anggaran Investasi (Internal) Source of Fund: Investment Budget (Internal)
							Mata Uang: Rupiah dan Valas (JPY & EUR) Currency: Rupiah and Foreign Currency (EUR & JPY)
							Langkah Perlindungan Risiko: Pemeliharaan sesuai prosedur & Asuransi pembangkit Risk Protection Measure: Maintenance according to procedure and insurance for generator
3	Peralatan Transmisi Transmission Equipment	6.005	31.83	16.133	300.323	83.893	Tujuan Investasi: Keandalan & Efisiensi pembangkit Purpose of Investment Power Plant Reliability and Efficiency
							Sumber dana: Anggaran Investasi (Internal) Source of Fund: Investment Budget (Internal)
							Mata Uang: Rupiah Currency: Rupiah
							Langkah Perlindungan Risiko: Pemeliharaan sesuai prosedur & Asuransi pembangkit Risk Protection Measure: Maintenance according to procedure and insurance for generator

INVESTASI BARANG MODAL

CAPITAL INVESTMENT

No	Jenis Investasi Investment Type	2013	2014	2015	2016	2017	Kebijakan Belanja Modal Tahun 2017 Capital Expenditure Policy 2017
4	Instalasi Telekomunikasi Telecommunication Installations	11.126	5.202	5.584	11.126	17.964	Tujuan Investasi: Mendukung Kinerja operasional perusahaan Purpose of Investment Supporting the Company's operational performance
							Sumber dana: Anggaran Investasi (Internal) Source of Fund: Investment Budget (Internal)
							Mata Uang: Rupiah Currency: Rupiah
							Langkah Perlindungan Risiko: Pemeliharaan sesuai prosedur Risk Protection Measure: Maintenance according to procedure
5	Peralatan Umum General Equipment	29.032	13.419	41.257	50.988	53.469	Tujuan Investasi: Mendukung Kinerja operasional perusahaan Purpose of Investment Supporting the Company's operational performance
							Sumber dana: Anggaran Investasi (Internal) Source of Fund: Investment Budget (Internal)
							Mata Uang: Rupiah Currency: Rupiah
							Langkah Perlindungan Risiko: Pemeliharaan sesuai prosedur Risk Protection Measure: Maintenance according to procedure
6	Kendaraan Bermotor Motor Vehicles	3.609	-	-	13.618	20	Tujuan Investasi: Mendukung Kinerja operasional perusahaan Purpose of Investment Supporting the Company's operational performance
							Sumber dana: Anggaran Investasi (Internal) Source of Fund: Investment Budget (Internal)
							Mata Uang: Rupiah Currency: Rupiah
							Langkah Perlindungan Risiko: Pemeliharaan sesuai prosedur Risk Protection Measure: Maintenance according to procedure
7	Material Cadang Spare Parts	194.394	461.005	196.051	-	-	Tujuan Investasi: Menjamin ketersediaan material cadang Purpose of Investment Ensuring availability of spare parts
							Sumber dana: Anggaran Investasi (Internal) Source of Fund: Investment Budget (Internal)
							Mata Uang: Rupiah Currency: Rupiah
							Langkah Perlindungan Risiko: Pemakaian dan Penyimpanan sesuai prosedur Risk Protection Measure: Utilization and storage according to procedure

No	Jenis Investasi Investment Type	2013	2014	2015	2016	2017	Kebijakan Belanja Modal Tahun 2017 Capital Expenditure Policy 2017
8	Lain lain Others	-	-	-	-	-	Tujuan Investasi: Mendukung Kinerja operasional perusahaan Purpose of Investment Supporting the Company's operational performance
							Sumber dana: Anggaran Investasi (Internal) Source of Fund: Investment Budget (Internal)
							Mata Uang: Rupiah Currency: Rupiah
							Langkah Perlindungan Risiko: Pemeliharaan sesuai prosedur Risk Protection Measure: Maintenance according to procedure
9	Tanah Land	8.113	5.222	4.528	371	16.792	Tujuan Investasi: Modal utama membangun pembangkit Purpose of Investment Main capital for constructing generator
							Sumber dana: Anggaran Investasi (Internal) Source of Fund: Investment Budget (Internal)
							Mata Uang: Rupiah Currency: Rupiah
							Langkah Perlindungan Risiko: Pemeliharaan sesuai prosedur & kepemilikan sesuai peraturan Risk Protection Measure: Maintenance according to procedure and ownership according to regulation
10	Pekerjaan Dalam Pelaksanaan Construction in Progress	423.273	1.867.234	866.719	1.027.814	2.877.921	Tujuan Investasi: Keandalan & Efisiensi pembangkit Purpose of Investment Power Plant Reliability and Efficiency
							Sumber dana: Anggaran Investasi (Internal) Source of Fund: Investment Budget (Internal)
							Mata Uang: Rupiah dan Valas (JPY. EUR & USD) Currency: Rupiah and Foreign Currencies (JPY, EUR, and USD)
							Langkah Perlindungan Risiko: Pemeliharaan sesuai prosedur & Asuransi pembangkit Risk Protection Measure: Maintenance according to procedure and insurance for generator
11	Apabila ada investasi lain (sebutkan) Other Investments (mention, if any)	-	-	-	-	-	
Jumlah Belanja Modal **Total Capital Expenditure**		**951.913**	**2.905.567**	**1.396.294**	**1.967.062**	**4.264.523**	
Arus Kas Pembayaran Untuk Belanja Modal **Cash Flows of Payment for Capital Expenditure**		**951.913**	**2.411.931**	**1.357.788**	**1.965.818**	**2.525.201**	

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU DENGAN PIHAK AFILIASI/BERELASI

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICT OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATES/RELATED PARTIES



Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2017, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, sehingga tidak terdapat informasi yang diungkapkan.

Material Transactions Containing Conflicts of Interest

Throughout 2017, there were no transactions containing conflicts of interest, and therefore there are no disclosed information.

Transaksi Material dengan Pihak Afiliasi/Berelasi

Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan dan entitas anak (entitas pelapor):

a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;

Material Transactions with Affiliates/Related Parties

Related Parties

Related parties are people or entities related to the Company and subsidiaries (reporting entity):

a. Any person or his/her immediate family member(s) is related to the reporting entity when he/she:
   i. has the control or joint control over the reporting entity;

ii. memiliki pengaruh signifikan atas pelapor atau entitas pelapor; atau
iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
   vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
   vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
c. Entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia yang merupakan pemegang saham dari Perusahaan.

Seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

ii. has significant impact on the reporter or reporting entity; or
iii. serves as the member of key management personnel at the reporting entity or the parent entity of the reporting entity.

b. An entity is related to the reporting entity when meeting one of the following criteria:
   i. The entity and the reporting entity are members of the same business group (which means that the parent entity, subsidiary, and the next entities are related to another entity);
   ii. One entity is the associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture which is a member of a business group, in which the other entity is also a member);
   iii. Both entities are joint ventures of the same third party;
   iv. One entity is the joint venture of the third entity and the other entity is the associate of the third entity;
   v. The entity is a post-employment benefit program for the employment benefit of one of the reporting entity or entity related to the reporting entity. In the case where the reporting entity is the entity holding such a program, therefore the sponsor entity is also related to the reporting entity;
   vi. The entity controlled or jointly controlled by a person identified in letter (a); or
   vii. The person identified in letter (a) (i) has significant impact over the entity or is a member of key management personnel of the entity (or the parent entity of the entity).
c. The entity controlled, jointly controlled, or significantly influenced by the government. The government in this case is the Minister of Finance of the Republic of Indonesia as the shareholder of the Company.

All transactions made with related parties, either performed with or without the same terms and conditions as performed with the third parties, are disclosed in the consolidated financial statements.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU DENGAN PIHAK AFILIASI/BERELASI

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICT OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATES/RELATED PARTIES

Sifat Hubungan Pihak Berelasi

Berikut adalah sifat hubungan pihak berelasi:

a. Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham PT PLN (Persero) dan Badan Usaha Milik Negara,
b. PT PLN (Persero) dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) merupakan pemegang saham Perusahaan,
c. Perusahaan dan entitas anak mempunyai pengaruh signifikan atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama
d. PT Pembangkitan Jawa-Bali ("PJB"), PT Pelayanan Listrik Nasional Batam ("PLN Batam"), PT PLN Batubara, dan PT Indonesia Comnets Plus merupakan perusahaan yang pemegang sahamnya sama dengan pemegang saham utama Perusahaan dan atau sebagian pengurusnya sama dengan Perusahaan.
e. Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Perusahaan.

Nature of Relationship with Related Parties

The following is the nature of the relationship with the related parties:

a. The Government of the Republic of Indonesia is the shareholder of PT PLN (Persero) and State-Owned Enterprises,
b. PT PLN (Persero) and Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) are the Company's shareholders,
c. The Company and its subsidiaries have significant impact over investment in associates or joint ventures
d. PT Pembangkitan Jawa-Bali ("PJB"), PT Pelayanan Listrik Nasional Batam ("PLN Batam"), PT PLN Batubara, and PT Indonesia Comnets Plus share the same shareholder and or management personnel with the Company.
e. The Board of Commissioners and the Board of Directors are the key management personnel of the Company.

Nama Pihak yang Bertransaksi

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Perusahaan:

Names of Transacting Parties

The following table lists the related parties having transactions with the Company:

Tabel Nama Pihak Berelasi Tahun 2017
Table of Name of Related Parties in 2017

Pihak-pihak berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of the Relationship	Sifat Transaksi Nature of the Transaction
PLN dan Yayasan Pendidikan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN and Yayasan Pendidikan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan	Pemegang saham Perusahaan Shareholders of the Company	Transaksi pembelian tenaga listrik Purchase of electricity
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Bank Rakyat Indonesia)	Pengendalian melalui Pemerintah Control through the Government	Penempatan kas dan setara kas, dan investasi jangka pendek Placement of cash and cash equivalents and short-term investment
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri)	Pengendalian melalui Pemerintah Control through the Government	Penempatan kas dan setara kas, dan investasi jangka pendek Placement of cash and cash equivalents and short-term investment
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Bank Negara Indonesia)	Pengendalian melalui Pemerintah Control through the Government	Penempatan kas dan setara kas, dan investasi jangka pendek Placement of cash and cash equivalents and short-term investment
PT Pertamina Geothermal Energy	Pengendalian melalui Pemerintah Control through the Government	Transaksi pembelian tenaga listrik Purchase of electricity
PT Wijaya Karya - Mirlindo Padu Kencana	Pengendalian melalui Pemerintah Control through the Government	Transaksi pembelian tenaga listrik Purchase of electricity

Pihak-pihak berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of the Relationship	Sifat Transaksi Nature of the Transaction
PT Pertamina (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Control through the Government	Transaksi pembelian bahan bakar dan minyak pelumas Purchase of fuels and lubricants
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Control through the Government	Transaksi pembelian bahan bakar Purchase of fuels
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan PT Nusantara Regas	Pengendalian melalui Pemerintah Control through the Government	Transaksi pembelian bahan bakar Purchase of fuels
PT Wijaya Karya	Pengendalian melalui Pemerintah Control through the Government	Transaksi jasa konstruksi Construction services
PT Surveyor Indonesia dan PT Sucofindo (Persero) PT Surveyor Indonesia and PT Sucofindo (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Control through the Government	Transaksi pelayanan teknik, survei dan pengukuran batubara Technical services, survey, and coal measurement
PT Asuransi Jasa Indonesia	Pengendalian melalui Pemerintah Control through the Government	Asuransi bangunan, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi serta kapal milik Perusahaan Insurance services for Company buildings, installations and power plants, transmission equipment, and vessels
Perum Jasa Tirta	Pengendalian melalui Pemerintah Control through the Government	Transaksi pembelian tenaga listrik Purchase of electricity
PDG dan REP PDG and REP	Ventura Bersama Joint Ventures	Pemberian pinjaman jangka panjang Issuance of long-term loan
Dana pensiun PLN PLN retirement fund	Program Imbalan Pasca Kerja Post-employment benefit plan	Pembayaran kontribusi program manfaat pasti Payment of contribution for defined benefit plan

Tujuan Transaksi Pihak Berelasi

Tujuan utama dilakukannya transaksi dengan pihak berelasi secara umum adalah salah satu bentuk dukungan kepada kelancaran dan keberlanjutan bisnis Perusahaan.

Purpose of Transactions with Related Parties

The main purpose of the transactions with related parties is to show support to the continuity and sustainability of Company business.

Nilai Transaksi Pihak Berelasi

Berikut adalah nilai transaksi dengan pihak berelasi pada tahun 2016 dan 2017:

Value of Transactions with Related Parties

The following table shows the value of transactions with related parties in 2016 and 2017:

Tabel Nilai Transaksi Pihak Berelasi Tahun 2016-2017 (Rp juta)
Table of Value of Transactions with Related Parties in 2016-2017 (Rp million)

Pihak Berelasi Related Parties	2016	2017
Piutang Pihak Berelasi I **Receivables from Related Parties**		
PT Perta Daya Gas	260.085	224.742
PT Rajamandala Bectric Power	236.374	263.351
Lain-lain I Others	27.011	24.643
Sub jumlah I **Subtotal**	**523.470**	**512.736**
Kas dan Setara Kas I **Cash and Cash Equivalents**		
PT Bank Negara Indonesia	962.769	1.399.680

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU DENGAN PIHAK AFILIASI/BERELASI

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICT OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATES/RELATED PARTIES

Pihak Berelasi Related Parties	2016	2017
PT Bank Rakyat Indonesia	63.984	2.795.715
PT Bank Mandiri	413.982	581.986
Sub Jumlah | Subtotal	**1.440.735**	**4.777.381**
Aset keuangan dari Konsesi Jasa | Financial Assets from Service Concession		
PT PLN (Persero)	**-**	**46.487.520**
Piutang Usaha | Trade Receivable		
PT PLN (Persero)	21.615.875	25.617.750
Jumlah | Total	**23.580.080**	**77.395.387**
Utang Usaha | Trade Payables		
PT Pertamina	87.169	90.082
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	430.811	966.765
PT Nusantara Regas	92.815	-
PT Perusahaan Gas Negara	117.718	-
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna	17.034	1.165
Lain-lain | Others	209.866	121.167
Sub Jumlah | Subtotal	**955.413**	**1.179.179**
Utang Pihak Berelasi | Payables to Related Parties		
PT PLN (Persero)	24.670	-
PT Indonesia Comnets Plus	9.238	-
PT Pembangkit Jawa Bali	-	16.564
Dana Pensiun PLN | PLN Retirement Fund	-	-
PT Haleyora Power	3.888	-
Sub Jumlah | Subtotal	**37.796**	**16.564**
Jumlah | Total	**993.209**	**1.195.743**
Penjualan Tenaga Listrik | Sale of Electricity		
PT PLN (Persero)	34.504.119	20.974.180
Pendapatan Konsesi Jasa | Revenues from Service Concession		
PT PLN (Persero)	-	15.592.753
Pendapatan Jasa | Service Revenues		
PT PLN (Persero)	2.179.956	6.837.108
Jumlah | Total	**36.684.075**	**39.436.418**
Beban Bahan Bakar dan Pelumas | Fuel and Lubricants Expenses		
PT Pertamina (Persero)	766.551	766.551
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	2.364.553	2.364.553
PT Perusahaan Gas Negara	1.525.235	1.525.235
PT Nusantara Regas	4.349.006	4.349.006
Lain-lain | Others	201.430	201.430
Sub Jumlah | Sub Total	**9.206.775**	**9.206.775**

Pihak Berelasi Related Parties	2016	2017
Beban Usaha Lain-lain | Other Operating Expenses		
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	108.302	108.302
Sub Jumlah | Subtotal	**108.302**	**108.302**
Jumlah | Total	**9.315.077**	**9.315.077**
Beban Keuangan | Financial Cost		
Penerusan pinjaman | Two-step loan	52	52

Jumlah kompensasi yang dibayarkan kepada Direksi dan Komisaris Perusahaan tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp53.207 juta dan Rp29.430 juta.

Kewajaran Transaksi Pihak Berelasi

Kewajaran seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan, telah sesuai dengan standar PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.

Mekanisme *Review* dan Pemenuhan Peraturan Transaksi Pihak Berelasi

Mekanisme *review* atas transaksi dengan pihak berelasi melalui proses audit baik yang dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Sebagai upaya untuk memastikan tingkat kewajaran transaksi dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, laporan transaksi afiliasi di atas telah diaudit oleh Auditor. Salah satu tujuan pengungkapan transaksi pihak berelasi adalah upaya pemenuhan PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.

The amounts of compensation paid to the Board of Directors and the Board of Commissioners in 2017 and 2016 were consecutively amounting to Rp53,207 million and Rp29,430 million.

Fairness of Transactions with Related Parties

The fairness of transactions with related parties, whether or not performed with the terms and condition with the third parties, as disclosed in the financial statements, has met the PSAK 7: Disclosure of Related Parties.

Mechanism of Review and Compliance with Regulations for Transactions with Related Parties

The review of transactions with related parties is performed by audit either by internal or external auditor. As the effort to ensure the fairness of transactions and compliance with the accounting standards generally applied in Indonesia, the report of transactions with affiliates has been audited by Auditor. One of the purposes of the disclosure of related parties is to comply with PSAK 7: Disclosure of Related Parties.

INFORMASI MATERIAL TERKAIT INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI DAN RESTRUKTURISASI

MATERIAL INFORMATION ON INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, ACQUISITION AND RESTRUCTURING



Sebagai bentuk langkah strategis, Indonesia Power melakukan beberapa *corporate action* untuk mendukung kelancaran operasi Perusahaan untuk memaksimalkan kinerja operasional dan nilai Perusahaan.

As a strategic measure, Indonesia Power performed a number of corporate actions to facilitate the Company's operations and optimize the Company's operational performance and value.

Informasi Investasi

Terkait dengan kegiatan investasi, Indonesia Power melakukan tiga kegiatan penyertaan yaitu diantaranya adalah Investasi Pembangkit Eksisting, Pengembangan Usaha dan Penyertaan; Investasi Penyertaan Saham pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama; serta Investasi Penyertaan Saham Pada Entitas Anak. Berikut adalah penjelasan singkatnya:

Information on Investment

Indonesia performed three investing activities, i.e. Investment in Existing Power Plants, Business Development and Inclusion; Share Investment in Associates and Joint Ventures; and Share Investment in Subsidiaries. The brief details are presented below:

Investasi Pembangkit Eksisting, Pengembangan Usaha dan Penyertaan

Investasi ini dilakukan Indonesia Power dengan tujuan untuk keandalan dan efisiensi pembangkit eksisting dan pengembangan pembangkit baru serta usaha terkait lainnya, dengan menggunakan dana dari internal.

Realisasi investasi pada pembangkit eksisting, pengembangan usaha dan penyertaan disajikan pada tabel berikut:

Investment in Existing Power Plants, Business Development, and Inclusion

The investment was made to improve the reliability and efficiency of existing power plants and develop new power plants, in addition to other relevant businesses, using internal funding.

The actual investment in existing power plants, business development, and inclusion are shown in the table below:

Tabel Investasi Pembangkit Eksisting, Pengembangan Usaha dan Penyertaan (Rp miliar)
Table of Investment in Existing Power Plants, Business Development, and Inclusion (Rp billion)

Uraian Description	2013	2014	2015	2016	2017
Program Investasi Pembangkit Eksisting **Existing Power Plants Investment Program**					
Program Keandalan Pembangkit Plants Reliability Program	811,85	702,35	374,40	836,54	973,20
Program Efisiensi Pembangkit Plants Efficiency Program	12,49	2,71	8,96	111,86	54,665
Program Peningkatan Kapasitas Pembangkit Plants Capacity Improvement Program	-	-	-	-	-
Program Pelestarian Lingkungan Environmental Conservation Program	7,22	6,27	2,04	-	1,43
Program Sarana Fasilitas Penunjang Supporting Facilities Program	59,28	36,63	29,89	115,06	119,02
Sub Jumlah I **Subtotal**	**890,84**	**747,96**	**415,29**	**1.063,46**	**1.148,32**
Program Pengembangan Usaha **Business Development Program**					
Pengembangan Pembangkit Baru Business Development Program	641,04	1,623,30	535,84	830,69	2.044,95
Studi Jasa Konsultan Consultant Service Study	3,29	0,71	19,96	133,85	14,32
Pengembangan Usaha Lainnya Participation	278,71	62,27	65,00	300,00	110,16
Sub Jumlah I **Subtotal**	**923,04**	**62,98**	**620,80**	**1.264,54**	**2.169,88**
Jumlah I **Total**	**1.813,88**	**2.434,23**	**1.036,09**	**2.328,00**	**3.318,21**

Investasi Penyertaan Saham pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Investasi ini dilakukan Indonesia Power dengan tujuan untuk pengembangan pembangkit baru dan usaha terkait lainnya dengan menggunakan dana dari internal.

Investment in Associates and Joint Ventures

The investment was made to develop new power plants, in addition to other relevant businesses, using internal funding.

INFORMASI MATERIAL TERKAIT INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI DAN RESTRUKTURISASI

MATERIAL INFORMATION ON INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, ACQUISITION AND RESTRUCTURING

Realisasi investasi penyertaan saham pada entitas asosiasi dan ventura bersama disajikan pada tabel berikut:

The actual share investment in associates and joint venture are shown in the following table:

Tabel Penyertaan Saham pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
Table of Investment in Associates and Joint Ventures

Entitas Entity	Nama Perusahaan Company's Name	Jenis Usaha Type of Business	Tahun Operasi Year of Operation	Penyertaan (%) Investment (%)	
				2016	2017
Asosiasi Associate	PT Indo Pusaka Berau	Penyediaan Tenaga Listrik PLTU Lati 2x7 MW SPP Lati 2x7 MW Electricity Supply	2005	46,80	46,53
Ventura Bersama Joint Venture	PT Petra Daya Gas	Fasilitas Transportasi Gas CNG/LNG CNG/LNG Transport Facility	2012	35	35
Asosiasi Associate	PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang	Perdagangan barang dan jasa, *reverse engineering*, *e-commerce* di bidang *supply chain* Goods and services trading reverse engineering, supply chain e-commerce	2017	-	49
Ventura Bersama Joint Venture	PT Rajamandala Electric Power	Pembangkit Listrik Tenaga Air Rajamandala 1x47 MW Hydro Power Plant Rajamandala 1x47 MW	2012	51	51
Ventura Bersama Joint Venture	PT GCL Indotenaga	Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalbar-1 2x100 MW Steam Power Plant Kalbar-1 2x100 MW	2016	35	35
Ventura Bersama Joint Venture	PT Indo Raya Tenaga	Pembangkit Listrik Tenaga Uap 2x1000 MW Steam Power Plant 2x1000 MW	2017	-	51

Investasi Penyertaan Saham Pada Entitas Anak

Investasi ini dilakukan Indonesia Power dengan tujuan untuk pengembangan pembangkit baru dan usaha terkait lainnya dengan menggunakan dana dari internal.

Realisasi investasi saham pada entitas anak disajikan pada tabel berikut:

Share Investment in Subsidiaries

The investment was made to develop new power plants, in addition to other relevant businesses, using internal funding.

The actual share investment in subsidiaries are shown in the following table:

Tabel Penyertaan Saham pada Entitas Anak
Table of Share Investment in Subsidiaries

Entitas Anak Subsidiaries	Jenis Usaha Type of Business	Tahun Operasi Year of Operation	Penyertaan (%) Investment (%)	
			2016	2017
PT Cogindo DayaBersama	Penyediaan Tenaga Listrik: PLTD Batakan 45 MW, Jasa O&M Pembangkit Tenaga Listrik: PLTU FTP-1 dan Penyediaan/Sewa Co-generation Electricity Supply: DPP Batakan 45 MW, Power Plant O&M Services: SPP FTP-1 and Co-generation Supply/Lease	1998	99,99	99,99
PT Artha Daya Coalindo	*Supply* Batu Bara, Perdagangan Batu Bara, Pembongkaran Batu Bara dan *Port Management* Coal Supply, Coal Trading, Coal Unloading, and Port Management	1997	80	80
PT Indo Ridlatama Power	Penyediaan Tenaga Listrik PLTU Kaltim 2x27,5 MW SPP Kaltim 2x27,5 MW Electricity Supply	2007	93,96	90
PT Indo Tenaga Hijau	Penyediaan Tenaga Listrik PLTP Tangkuban Parahu 2x55 MW GPP Tangkuban Parahu 2x55 MW Electricity Supply	2009	95,21	95,21
PT Putra Indotenaga	Pembiayaan (*Participating Interest*) Proyek Project Participating Interest	2013	99,99	99,99

Informasi Ekspansi

Pada tahun 2017 tidak ada kegiatan ekspansi sehingga tidak ada informasi terkait tujuan, nilai atau jumlah transaksi, sumber dana, dari hasil kegiatan ekspansi.

Information on Expansion

In 2017 there were no expansion activities, and therefore no information are available on the purpose, transactional value or amount, source of fund, and result of the expansion.

Informasi Divestasi

Pada tahun 2017 tidak ada kegiatan divestasi sehingga tidak ada informasi terkait tujuan, nilai atau jumlah transaksi, sumber dana, hasil kegiatan divestasi.

Information on Divestment

In 2017 there were no divestment activities, and therefore no information are available on the purpose, transactional value or amount, source of fund, and result of the divestment.

Informasi Akuisisi

Pada tahun 2017 tidak ada kegiatan akuisisi sehingga tidak ada informasi terkait tujuan, nilai atau jumlah transaksi, sumber dana, dari hasil kegiatan akuisisi.

Information on Acquisition

In 2017 there were no acquisition activities, and therefore no information are available on the purpose, transactional value or amount, source of fund, and result of the acquisition.

Informasi Restrukturisasi Utang atau Modal

Pada tahun 2017 tidak terjadi restrukturisasi hutang/ modal sehingga tidak ada informasi terkait tujuan, nilai atau jumlah transaksi, sumber dana, dari hasil kegiatan restrukturisasi.

Information on Debt or Capital Restructuring

In 2017 there were no debt/capital restructuring activities, and therefore no information are available on the purpose, transactional value or amount, source of fund, and result of the restructuring.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

ACTUAL USE OF FUNDS FROM PUBLIC OFFERING



Sampai dengan tahun 2017, IP belum menjadi perusahaan terbuka (*go public*) atau belum melakukan Penawaran Umum di bursa efek, sehingga tidak ada informasi terkait dengan total perolehan dana, rencana penggunaan dana, rincian penggunaan dana, saldo dana dan tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas perubahan penggunaan dana.

Until 2017, IP has neither sold its stock to the public (go public) nor performed Public Offering at the stock exchange. Therefore, there are no information on the total acquisition of fund, planned use of fund, details of the use of fund, balance of fund, and date of General Meeting of Shareholders (GMS) approval for the change in the use of fund.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (MSOP/ESOP)

MANAGEMENT/EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN (MSOP/ESOP)



Sampai akhir tahun 2017, saham IP 99,99% dimiliki oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan 0,01% dimiliki oleh Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan (YPK) PLN. Oleh karena itu, tidak ada kepemilikan saham oleh karyawan atau *Employee Stock Option Program* (ESOP) dan tidak ada kepemilikan saham oleh manajemen atau *Management Stock Option Program* (MSOP). Sehingga tidak ada informasi terkait jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak serta harga *exercise*.

Until 2017, 99.99% of IP shares are held by PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) and the remaining 0.01% are held by Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan (YPK) PLN. Therefore, there are no implementations of the Management/Employee Stock Ownership Plan (MSOP/ESOP). This means there are no information on the number of ESOP/MSOP shares and their realization, period, requirements for eligible employees and/or management, and exercise price.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

INFORMATION AND MATERIAL FACTS AFTER ACCOUNTANT'S REPORTING DATE



Pada tahun 2017, tidak terdapat informasi dan fakta material atau kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, sehingga tidak terdapat informasi mengenai dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.

In 2017, there were no information and material facts or significant events after accountant's reporting date, and therefore there are no information on their impacts on the Company's business performance and risk in the future.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES AND THEIR IMPACTS ON THE COMPANY



Pernyataan Kepatuhan Kebijakan Akuntansi

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK-IAI) Ikatan Akuntan Indonesia.

Statement of Compliance with Accounting Policies

The consolidated financial statements were prepared according to the Indonesian Financial Accounting Standards which covers Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board - Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK-IAI).

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES AND THEIR IMPACTS ON THE COMPANY

Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya terhadap Perusahaan

PSAK Baru dan Revisi, serta ISAK yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017

Pengesahan amandemen dan penyesuaian atas PSAK dan ISAK yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI"), berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017, adalah sebagai berikut:

- PSAK 1 (Amandemen): Penyajian Laporan Keuangan, tentang petunjuk untuk materialitas dan penggabungan, penyajian sub total, struktur dari laporan keuangan dan pengungkapan kebijakan akuntansi.
- PSAK 3 (Amandemen): Laporan Keuangan Interim, tentang klarifikasi apa yang dimaksud dengan acuan dalam standar terhadap informasi yang diungkapkan di tempat lain di laporan keuangan interim.
- PSAK 24 (Amandemen): Imbalan Kerja, tentang klarifikasi penentuan tingkat diskon untuk imbalan pascakerja, bahwa mata uang yang mendenominasi kewajiban tersebut yang menentukan, bukan negara dimana kewajiban tersebut timbul.
- PSAK 58 (Amandemen): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan, tentang klarifikasi bahwa ketika sebuah aset (atau kelompok lepasan) direklasifikasi dari dimiliki untuk dijual ke dimiliki untuk didistribusikan, atau sebaliknya, tidak merupakan perubahan rencana untuk menjual atau mendistribusikan, dan tidak perlu dicatat seperti tersebut.
- PSAK 60 (Amandemen): Instrumen Keuangan: Pengungkapan, tentang apa yang dimaksud dengan keterlibatan berkelanjutan dalam konteks ini.
- ISAK 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK No. 13 Properti Investasi.
- ISAK 32: Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

Changes in Accounting Policies and Their Impacts on the Company

New and Revised PSAK and ISAK effective for the fiscal year beginning on or after January 1, 2017

The ratifications of amendment and improvement to PSAK and ISAK issued by the Financial Accounting Standards Board - Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK-IAI) effective for the fiscal year beginning on or after January 1, 2017 are as follows:

- PSAK 1 (Amendment): Presentation of Financial Statements regarding the guidance on materiality and aggregation, the presentation of subtotals, the structure of financial statements, and the disclosure of accounting policies.
- PSAK 3 (Amendment): Interim Financial Statements, regarding clarification on the reference in the standard to information disclosure elsewhere in the interim financial report.
- PSAK 24 (Amendment): Employee Benefits, regarding clarification on when determining the discount rate for post-employment benefit obligations, it is the currency that the liabilities are denominated in that is important, and not the country where they arise.
- PSAK 58 (Amendment): Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations, regarding clarification on when an asset (or disposal group) is reclassified from 'held-to-sale' to 'held-for-distribution', or vice versa, this does not constitute a change to a plan of sale or distribution, and it does not have to be accounted for as such.
- PSAK 60 (Amendment): Financial Instruments: Disclosure, regarding guidance on what is meant by continuing involvement in this context.
- ISAK 31: Interpretation of PSAK No. 13: Investment Properties.
- ISAK 32: Definition and Hierarchy of Financial Accounting Standards.

The implementation of the above standards had no significant impact on the amounts reported for the current period or prior financial years.

PSAK Baru dan Revisi, serta ISAK yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018 dan setelahnya

Amandemen standar dan interpretasi berikut ini efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu:

- PSAK 2 (Amandemen): Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan, yang mensyaratkan entitas untuk menjelaskan perubahan pada kewajibannya untuk arus kas yang telah, atau yang akan di klasifikasi sebagai aktivitas pembiayaan pada laporan arus kas.
- PSAK 13 (Amandemen): Properti Investasi tentang pengalihan properti investasi.
- PSAK 15 (Penyesuaian): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, tentang kepentingan jangka panjang pada entitas asosiasi dan ventura bersama.
- PSAK 16 (Amandemen): Aset Tetap-Agrikultur: Tanaman Produktif, tentang klarifikasi atas aset biologis yang memenuhi definisi dari tanaman produksi dicatat sebagai aset tetap.
- PSAK 46 (Amandemen): Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi, tentang klarifikasi persyaratan untuk mengakui aset pajak tangguhan atas rugi yang belum terealisasi.
- PSAK 53 (Amandemen): Pembayaran Berbasis Saham, tentang klasifikasi dan pengukuran transaksi pembayaran berbasis saham.
- PSAK 67 (Amandemen): Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain, tentang kepentingan di entitas yang dikategorikan sebagai dimiliki untuk dijual kecuali untuk ringkasan informasi keuangan.
- PSAK 69: Agrikultur.
- PSAK 111: Akuntansi Wa'ad.

New and Revised PSAK and ISAK effective for the fiscal year beginning on or after January 1, 2018 and onwards

The following amendments and interpretation of standards are effective for the year beginning on or after January 1, 2018, with early implementation is allowed:

- PSAK 2 (Amendment): Statement of Cash Flows about Disclosure Initiative which requires entities to explain changes in their liabilities for which cash flows have been, or will be classified as financing activities in the statement of cash flows.
- PSAK 13 (Amendment): Investment Properties, regarding transfer of investment properties.
- PSAK 15 (Improvement): Investments in Associates and Joint Ventures, regarding long-term interest in associates and joint ventures
- PSAK 16 (Amendment): Property, Plant, and Equipment-Agriculture: Bearer Plants, regarding clarification on biological assets that meet the definition of bearer plants are accounted for as fixed assets.
- PSAK 46 (Amendment): Income Tax: Recognition on Deferred Tax Assets for Unrealized Losses, regarding the requirements for recognizing deferred tax assets for unrealized losses.
- PSAK 53 (Amendment): Share-based Payment, regarding classification and Measurement of share-based payment transactions.
- PSAK 67 (Amendment): Disclosures of Interest in Other Entities, regarding interests in entities classified as held-for-sale, except for summarized financial information.
- PSAK 69: Agriculture.
- PSAK 111: Wa'ad Accounting.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES AND THEIR IMPACTS ON THE COMPANY

Interpretasi standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019, dengan penerapan dini diperkenankan

- ISAK 33, Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka.

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan

- PSAK 15 (Amandemen): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama.
- PSAK 62 (Amandemen): Kontrak Asuransi - Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi
- PSAK 71: Instrumen Keuangan.
- PSAK 71 (Amandemen): Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK 73: Sewa.

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan dan entitas anak masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen standar, dan interpretasi atas standar serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak.

The following interpretations of standards are effective for the period beginning on or after January 1, 2019, with early implementation is allowed:

- ISAK 33: Foreign Currency Transactions and Advance Consideration.

The following standards and amendments to standards are effective for the period beginning on or after January 1, 2020, with early implementation is allowed:

- PSAK 15 (Amendment): Investments in Associates and Joint Ventures.
- PSAK 62 (Amendment): Insurance Contract: Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contracts.
- PSAK 71: Financial Instruments.
- PSAK 71 (Amendment): Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation.
- PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers.
- PSAK 73: Lease.

As of the authorization date of these consolidated financial statements, the Company and subsidiaries are still evaluating the potential impact of these new standards, amendments, and interpretations of standards to the Company and subsidiaries' consolidated financial statements.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SIGNIFIKAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN

SIGNIFICANT REGULATORY CHANGES AND THEIR IMPACTS ON THE COMPANY



Bentuk komitmen Indonesia Power terhadap aspek kepatuhan ditunjukkan pada pemenuhannya terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap operasi Perusahaan. Bentuk implementasi dari upaya pemenuhan tersebut, Indonesia Power senantiasa melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang baru terbit maupun yang terjadi perubahan.

Indonesia Power shows its commitment by complying with all laws and regulations relevant to the Company operations. As the evidence of the compliance, Indonesia Power consistently reviews the newly established or amended laws and regulations.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SIGNIFIKAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN

SIGNIFICANT REGULATORY CHANGES AND THEIR IMPACTS ON THE COMPANY

Tabel Peraturan Baru dan Perubahan Peraturan Tahun 2017

Table of New and Amended Regulations in 2017

No	Nama Peraturan Name of Regulation	Faktor Pendukung Supporting Factor	Tindak Lanjut dari Perusahaan Follow-up of the Company	
1	Peraturan Menteri Perdagangan No. 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir (API) diberikan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) Minister of Trade Regulation No. 70/M-DAG/PER/9/2015 on Importer Identification Numbers (API) provided with Producer Importer Identification Numbers (API-P)	Pengembangan bidang usaha Perusahaan di bidang jasa *stockist* Development of Company business in stockist services.	1. Melaporkan kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan kepada Direktur Impor dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat selambat-lambatnya 30 hari sejak: • Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun; • Perubahan mengenai setiap perubahan badan usaha, pengurus/Direksi dan alamat perusahaan. 2. Melaporkan realisasi impor baik terealisasi maupun tidak terealisasi sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta juga melaporkan melalui *website* http://api.kemendag.go.id	1. Reporting to the Head of One-Stop Integrated Service Agency of Jakarta Special Capital Region with carbon copy to the Director of Import and Head of local District/Subdistrict Departments no later than 30 days since: • The change of the business activities for once in a year; • The change of business entity, management/Board of Directors, and address of the Company. 2. Reporting the actual realized and non-realized import every quarter to the Head of One-Stop Integrated Service Agency of Jakarta Special Capital Region and to the website http://api.kemendag.go.id.
2	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan dan memenuhi kewajiban selaku pemagang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan umum (IUKU) No. 5192/40/MEM.L/2000. Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 35 of 2013 on Procedure for Permit for Electricity Business and complying with the obligations as the holder of Electricity Business Permit for Public Interest (IUKU) No. 5192/40/MEM.L/2000.	*Updating* izin usaha Perusahaan Updating the Company's business permit.	Melakukan pelaporan berkala atas penyediaan kegiatan tenaga listrik yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.	Submitting periodical report for the provision of electricity to the Directorate General of Electricity.

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

FINANCIAL INFORMATION CONTAINING EXTRAORDINARY AND RARE EVENTS



Sepanjang tahun 2017, tidak informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi. Sehingga tidak terdapat analisis lebih lanjut terkait dampak terhadap perusahaan.

No financial information reported in 2017 contained extraordinary and rare events. Therefore, there are no further analyses on their impacts on the Company.

DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN

IMPACT OF PRICE CHANGES TO COMPANY PERFORMANCE



Perubahan Harga Energi Primer

Untuk mendukung tercapainya target kinerja operasi, yaitu keandalan, ketersediaan dan efisiensi termal pembangkit serta untuk memenuhi *Strategic Mission Optimizing Cost Efficiency*, maka perlu dilakukan pengelolaan energi primer secara optimal. Untuk itu, Perusahaan memastikan ketersediaan energi primer melalui kontrak jangka panjang dengan para pemasok. Selain memastikan ketersediaan dan kecukupan, Perusahaan juga mengupayakan diperolehnya energi primer dengan harga yang lebih kompetitif sehingga harga satuan kalor menjadi lebih rendah. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan *merit order* pembangkit sehingga dapat mendukung *sustainability* pembangkit dalam jangka panjang.

Change in Primary Energy Price

To support the achievement of operational performance target, i.e. reliability and thermal efficiency of power plants and to meet the Strategic Mission Optimizing Cost Efficiency, optimal primary energy management is called for. Therefore, the Company ensures the availability of primary energy through long-term contracts with the vendors. Apart from ensuring the availability and sufficiency, the Company also strives to obtain primary energy in more competitive price to suppress the heat unit price. This is expected to contribute to the improvement of power plant merit order to support the sustainability of power plants in the long run.

Perubahan Harga Jual Energi Listrik

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan yang mengatur harga pembelian listrik oleh PLN sebagai upaya mengendalikan tarif listrik ke konsumen agar semakin murah. Untuk PLTS dan PLTB misalnya, sesuai Peraturan Menteri No. 50 tahun 2017, harga pembelian listrik maksimal sebesar 85% dari BPP setempat bila BPP setempat diatas Biaya Pokok Penyediaan (BPP) rata-rata nasional, atau sesuai kesepatakan para pihak bila dibawah BPP rata-rata nasional. Harga pembelian listrik tertinggi untuk PLTU mulut tambang berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 19 tahun 2017 adalah 75% dari BPP Pembangkitan setempat bila BPP setempat sama atau lebih rendah dari BPP rata-rata Nasional. Bila BPP setempat diatas BPP rata-rata Nasional, maka harga patokan tertinggi sebesar 75% dari BPP rata-rata nasional.

Change in Electricity Sale Price

The Government has published several regulations for the electricity purchase price by PLN, in order to control electricity tariff to customers. For Solar Power Plant and Wind Power Plant for example, according to a ministerial regulation under issuance number 50 of 2017, the maximum electricity purchase price is 85% of the local Cost of Supply if it is above the national average, or according to agreement of both parties for Cost of Supply under the national average. The highest electricity purchase price for SPP Mulut Tambang according to Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 19 of 2017 is 75% of the local Cost of Supply if it is the same or lower than the national average. For local Cost of Supply above the national average, the highest benchmark price is 75% of the national average.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA
INFORMATION ON BUSINESS SUSTAINABILITY



Kelangsungan Usaha

Dalam menjalankan bisnis dan operasinya, Indonesia Power tidak mengalami hambatan signifikan terkait kelangsungan usaha. Terkait dengan kewajiban, Indonesia Power mampu memenuhi seluruh kewajiban baik kewajiban dalam aspek keuangan maupun non-keuangan. Secara keuangan, penilaian kelangsungan usaha dapat dibuktikan dengan opini auditor independen KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM) atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 yaitu "wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana dalam laporannya Nomor R/179.AGA/sat.2/2018.

Business Sustainability

In running its business and operations, Indonesia Power did not encounter significant obstacles in the sustainability of its business. Indonesia Power successfully met its obligations both in financial and non-financial aspects. The assessment of the Company's business sustainability is proven by the opinion of independent auditor from Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partner (RSM), that the statements were presented "unqualified in all material respects" as written in report "No. R/179. AGA/sat.2/2018".

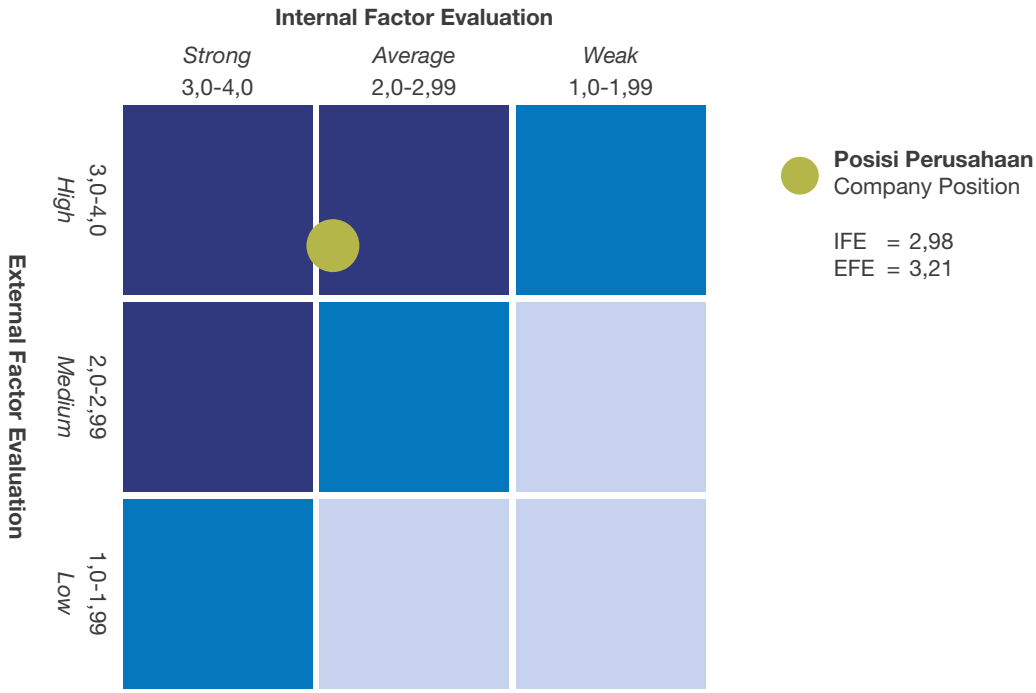
Asumsi Kelangsungan Usaha

Kelangsungan usaha Indonesia Power dipertimbangkan atas dasar kemampuan internal dan faktor-faktor eksternal yang signifikan. Dalam perkembangannya, Indonesia Power memiliki posisi dimana Perusahaan sangat prospektif untuk dikembangkan. Hal tersebut dianalisis berdasarkan penilaian analisis *Strength, Weakness, Opportunity, and Threats* (SWOT) yaitu Matrix IE yang menunjukkan bahwa Indonesia Power perlu menerapkan strategi *Grow and Build* sebagai berikut:

Assumptions on Business Sustainability

The sustainability of Indonesia Power's business is considered on the basis of internal capabilities and significant external factors. In its development, Indonesia is in a highly prospective position for development. The fact is a result of the Strength, Weakness, Opportunity, and Threats (SWOT) analysis, i.e. IE Matrix which recommends that Indonesia Power needs to implement the following Grow and Build strategy:

Matriks Evaluasi Faktor Internal dan Eksternal
Matrix of Internal and External Factors Evaluation



Grow and Built	Hold & Maintain	Harvest or Divest
Market Penetration Market Development Product Development Backward Integration Forward Integration Horizontal Integration	Market Penetration Product Development	Divestiture Liquidation

Sumber: David, Fred R (1999), Strategic Management Concepts (7th ed). Upper Saddle River, NJ:Prentice-Hall, Inc.,p.191

Source: David, Fred R (1999), Strategic Management Concepts (7th ed). Upper Saddle River, NJ:Prentice-Hall, Inc.,p.191

PROSPEK USAHA
BUSINESS OUTLOOK



Kelangsungan usaha Indonesia Power didukung dengan semakin kondusifnya kondisi perekonomian global dan nasional serta industri ketenagalistrikan. Dengan dukungan faktor eksternal, seluruh sumber daya internal Indonesia Power dapat dimaksimalkan dalam rangka optimalisasi kinerja operasional dan kinerja keuangan.

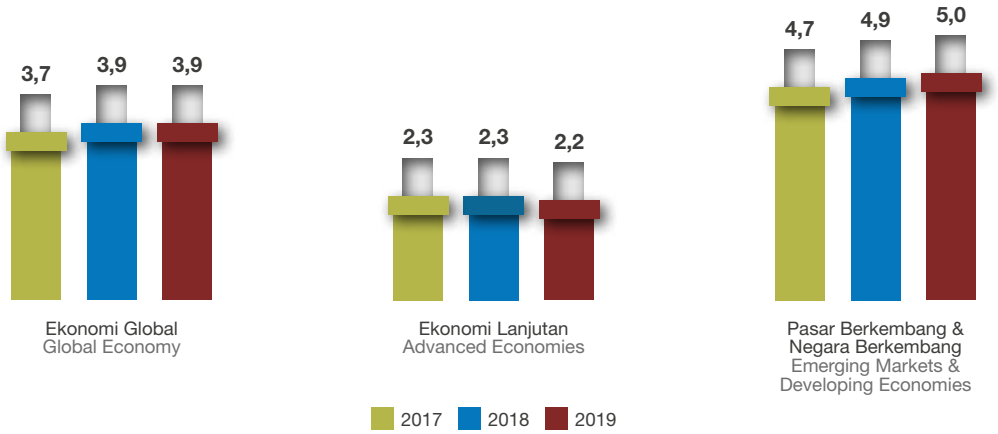
The sustainability of business at Indonesia Power is backed by the increasingly conducive global and national economy and favorable electricity industry. Supporting by external factors, all internal resources at the Company can be optimized to improve the operational and financial performances.

Prospek Perekonomian Global

Global Economic Outlook

Brighter Prospects Global Economic Activity Continues to Firm Up

Brighter Prospects Global Economic Activity Continues to Firm Up



Sumber: *World Economics Outlook* (WEO) Update, 22 Januari 2018
Source: World Economics Outlook (WEO) Update, 22 January 2018

Berdasarkan proyeksi WEO, yang dirilis oleh IMF pada bulan Januari 2018, pertumbuhan ekonomi global tahun 2017 diestimasi sebesar 3,7%. Sedangkan untuk tahun 2018 dan 2019 diproyeksikan meningkat dari tahun 2017 dengan nilai masing-masing sebesar 3,9%.

The WEO published by the IMF in January 2018 discloses the estimation of global economic growth 2017 at 3.7%. The figure is predicted to increase in 2018 and 2019, at 3.9% for each of the years.

Prospek Kondisi Ekonomi Nasional

Perekonomian nasional tahun 2018 diperkirakan tumbuh lebih baik dengan dukungan sisi eksternal dan internal. Perekonomian global yang diperkirakan membaik pada tahun 2018 diharapkan mampu mendorong kinerja investasi dan perdagangan. Meskipun demikian, perbaikan ekonomi akan menghadapi sejumlah risiko seperti keberlanjutan *rebalancing* ekonomi Tiongkok, kebijakan perdagangan AS dan masih lemahnya harga komoditas. Pada tahun 2018 diperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,4%. (Sumber: NK RAPBN 2018)

National Economic Outlook

The national economic growth in 2018 is predicted to improve thanks to external and internal supports. The estimated improvement in global economy is expected to boost performances in investment and commerce. Nevertheless, such an economic improvement will face a number of risks, such as the continuation of China's economic rebalancing, US trade policy, and low commodity price. The Indonesian economy for 2018 is predicted to grow at 5.4%. (Source: Financial Notes of Draft National Budget 2018)

PROSPEK USAHA
BUSINESS OUTLOOK

Outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Indonesian economic growth outlook for 2018 is presented in the following table:

Tabel *Outlook* Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2018 (%, yoy)
Indonesian Economic Growth Outlook in 2018 (%, yoy)

	2018*
Pertumbuhan Ekonomi I **Economic Growth**	**5,4**
Penggunaan I **Utilization**	
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT I Household and Non-Profit Institutions Serving Households Consumptions	5,1
Konsumsi Pemerintah I Government Consumptions	3,8
PMTB I Gross Fixed Capital Formation	6,3
Ekspor Barang dan Jasa I Goods and Services Export	5,1
Impor Barang dan Jasa I Goods and Services Import	4,5
Lapangan Usaha: I **Business Sector**	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan I Agriculture, Forestry, and Fishery	3,7
Pertambangan dan Penggalian I Mining and Excavation	1,0
Industri Pengolahan I Processing Industry	4,9
Pengadaan Listrik dan Gas I Electricity and Gas Procurement	5,7
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang I Water Procurement; Garbage and Waste Treatment and Recycling	5,4
Konstruksi I Construction	6,9
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor I Wholesale and Retail; Car and Motorcycle Repairs	5,7
Transportasi dan Pergudangan I Transportation and Warehousing	8,3
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum I Provision of Accommodation and Food and Beverages	5,4
Informasi dan Komunikasi I Information and Communication	11,0
Jasa Keuangan dan Asuransi I Financial Services and Insurance	9,4
Real Estate I Real Estate	5,4
Jasa Perusahaan I Company Services	7,6
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib I Government Administration, Defense, and Obligatory Social Security	4,0
Jasa Pendidikan I Education Services	4,4
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial I Health Services and Social Services	5,7
Jasa Lainnya I Other Services	8,2

* Angka Perkiraan I Estimated figure
Sumber: Bappenas dan Kemenkeu I Source: Bappenas and Ministry of Finance

Prospek Industri Kelistrikan Nasional

Prospek industri listrik kedepan diproyeksikan mengalami peningkatan baik dari sisi operasional produksi maupun penjualan listrik. Peningkatan tersbeut harus diiringi dengan kemampuan penyediaan listrik, sehingga perusahaan pembangkit harus meningkatkan kapasitas pembangkit yang optimal.

National Electricity Industry Outlook

In the future, the electricity industry is predicted to rise, both in production and sales. The improvement must by balanced by the capacity to supply electricity, and therefore generation companies must expand its power plants to optimal capacities.

Strategi dan Renacana Pengembangan Kapasitas Pembangkit

Pengembangan kapasitas pembangkit tenaga listrik diarahkan untuk memenuhi pertumbuhan beban, dan pada beberapa wilayah tertentu diutamakan untuk memenuhi kekurangan pasokan tenaga listrik. Pengembangan kapasitas pembangkit juga dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan pasokan yang diinginkan, dengan mengutamakan pemanfaatan sumber energi setempat, terutama energi terbarukan. Pengembangan kapasitas pembangkit tenaga listrik dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pemerintah, misalnya dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), serta program 35.000 MW. Pengembangan pembangkit diupayakan secara optimal dengan prinsip biaya penyediaan listrik terendah (*least cost*), dengan tetap memenuhi kecukupan daya dan tingkat keandalan yang wajar dalam industri tenaga listrik.

Untuk sistem tenaga listrik Jawa-Bali, PLN telah merencanakan PLTU batubara kelas 1.000 MW dengan teknologi *ultra super critical* (*clean coal technology*) untuk memperoleh efisiensi yang lebih baik dan emisi CO_2 yang lebih rendah. Penggunaan ukuran unit sebesar ini dimotivasi oleh manfaat *economies of scale* dan didorong oleh semakin sulitnya memperoleh lahan untuk membangun pusat pembangkit skala besar di pulau Jawa. Pertimbangan lainnya adalah ukuran sistem Jawa Bali telah cukup besar untuk mengakomodasi unit pembangkit kelas 1.000 MW.

Rencana penambahan kapasitas pembangkit selama 10 tahun mendatang untuk seluruh Indonesia adalah 55 GW atau pertambahan kapasitas rata-rata mencapai 5,6 GW per tahun. PLTU batubara akan mendominasi jenis pembangkit yang akan dibangun yaitu mencapai 26,8 GW atau 47,8%, sementara PLTGU dengan kapasitas 10,4 GW atau 18,6% dan PLTG/MG sebesar 3,8 GW atau 6,8%. Untuk energi baru dan terbarukan (EBT) yang terbesar adalah PLTA sebesar 8,3 GW atau 14,8% dari kapasitas total disusul PLTP sebesar 4,6 GW atau 8,2%. Sedangkan EBT lainnya sebesar 2,1 GW atau 3,7% berupa PLTS, PLTB, PLTSa, PLTBg dan PLTBm.

Power Plant Capacity Expansion Plan and Strategy

The expansion of power plant capacity is aimed at meeting the growing loads, and in certain areas is particularly aimed at covering the lack of electricity supply. The capacity expansion also has the purpose to enhance the desired supply reliability by prioritizing local sources of energy, particularly from renewable energy. The power plant capacity expansion is performed according to the Government's policy, e.g. in the frameworks of new and renewable energy development and 35,000 MW program. This effort is sought optimally by implementing least cost principle, while maintaining adequate capacity and reasonable reliability level in electricity industry.

For Java-Bali electricity system, PLN has planned coal Steam Power Plant at 1,000 MW capacity with ultra-super critical (clean coal) technology for better efficiency and lower CO2 emission. The utilization of such a large capacity is motivated by the benefit of the economies of scale and encouraged by the growing difficulty in obtaining land for building large-scale generation center in Java. Another consideration is that the Java-Bali system is at an adequate scale to accommodate the 1,000 MW plant unit.

For the next 10 years, the capacity expansion is planned to reach a total of 55 GW for the whole areas in Indonesia, with average capacity expansion 5.6 GW per annum. Coal Steam Power Plant will be dominating with the capacity of 26.8 GW or 47.8% of the total capacity, followed by Gas and Steam Power Plant with 10.4 GW or 18.6%, and Gas/Gas Engine Power Plant with 3.8 GW or 6.8%. In the category of new and renewable energy, Hydro Power Plant will dominate with 8.3 GW or 14.8% of the total capacity, followed by Geothermal Power Plant with 4.6 GW or 8.2%. The remaining new and renewable energy at the capacity of 2.1 GW or 3.7% of the total capacity will cover Solar Power Plant (SoPP), Wind Power Plant (WPP), Waste to Energy Power Plant (WEPP), Biogas Power Plant (BgPP), and Biomass Power Plant (BmPP).

PROSPEK USAHA
BUSINESS OUTLOOK

Tabel Proyeksi Kebutuhan Tambahan Pembangkit Indonesia (MW)
Table of Projection of Indonesian Power Plant Additional Needs (MW)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PLN	2.889	4.308	1.561	756	1.059	1.354	1.468	1.023	1.423	729
IPP	758	1.218	7.550	6.207	5.249	3.560	3.489	3.353	400	275
Kerjasama antar Wilus Inter-Business Area Cooperation	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-
Unallocated	-	-	9	353	491	646	295	3.900	1.075	325
Jumlah | **Total**	**3.647**	**5.827**	**9.120**	**7.316**	**6.779**	**5.560**	**5.252**	**5.276**	**2.898**	**1.329**

Sumber: RUPTL PLN Tahun 2018 s.d 2027 | Source: PT PLN (Persero) Electricity Supply Business Plan (RUPTL) 2018-2027

Proyeksi Penjualan Listrik

Dengan menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi sepuluh tahun mendatang rata-rata 6,3% per tahun dan bergerak dari realisasi kebutuhan tenaga listrik tahun 2016 dan estimasi realisasi penjualan 2017, proyeksi penjualan tenaga listrik pada tahun 2027 diperkirakan akan mencapai 434 TWh, atau mengalami pertumbuhan rata-rata 6,86% selama 10 tahun mendatang.

Sales of Electricity Projection

Assuming that the economic growth for the next 10 years is averagely 6.3% per annum and moving from the actual electricity requirement for 2016 and estimated actual sales for 2017, the sales of electricity for 2027 is predicted to reach 434 TWh or growing averagely by 6.86% every year for the next 10 years.

Tabel Proyeksi Penjualan Tenaga Listrik Nasional Berdasarkan Sektor (GWh)
Table of National Sales of Electricity Projection by Sector (GWh)

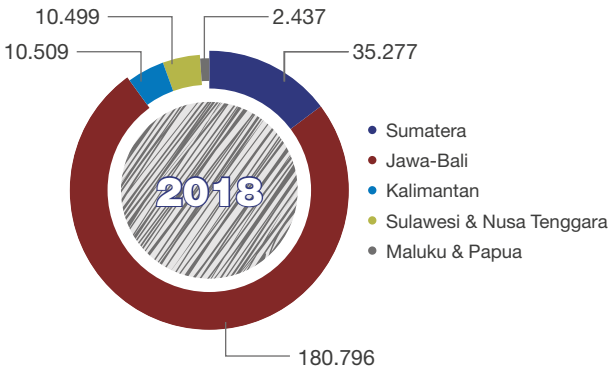
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rumah Tangga | Households	102.697	109.335	116.074	123.970	132.293	141.122	150.513	160.421	171.681	183.605
Bisnis | Business	44.318	47.509	51.633	55.703	60.076	64.762	69.825	75.304	81.579	88.378
Publik | Public	15.685	16.781	17.899	19.177	20.541	21.973	23.485	25.099	26.950	28.931
Industri | Industry	76.565	82.307	90.339	97.665	103.884	109.377	115.568	120.874	126.631	132.937
Jumlah | **Total**	**239.265**	**255.932**	**275.945**	**296.515**	**316.793**	**337.234**	**359.390**	**381.698**	**406.841**	**433.852**

Sumber: RUPTL PLN Tahun 2018 s.d 2027 | Source: PT PLN (Persero) Electricity Supply Business Plan (RUPTL) 2018-2027

Jika proyeksi penjualan listrik terbagi pada wilayah penjualan, Wilayah Jawa-Bali memiliki kontribusi penjualan listrik terbesar di Indonesia. Hal ini menjadi peluang bagi Indonesia Power untuk memaksimalkan operasional produksi dan pasokan listrik.

If the sales of electricity projection is divided by sales area, Java Bali will have the largest electricity sale contribution for Indonesia. This opens an opportunity for Indonesia Power to optimize the production operation and electricity supply.

Grafik Proyeksi Penjualan Tenaga Listrik Nasional Berdasarkan Wilayah Tahun 2018 (GWh)
Chart of National Sales of Electricity Projection by Area in 2018 (GWh)



Sumber: RUPTL PLN Tahun 2018 s.d 2027 | Source: PT PLN (Persero) Electricity Supply Business Plan (RUPTL) 2018-2027

Proyeksi Jumlah Pelanggan

Jumlah pelanggan diproyeksikan terus meningkat dari tahun ke tahun yaitu di tahun 2018 mencapai 71.046 pelanggan dan 92.974 pelanggan di tahun 2027.

Customer Count Projection

The number of customers is projected to continuously increase from year to year, reaching 71,046 customers in 2018 and 92,974 customers in 2027.

Tabel Proyeksi Penjualan Tenaga Listrik Nasional Berdasarkan Sektor (GWh)
Table of National Customer Count Projection by Sector (GWh)

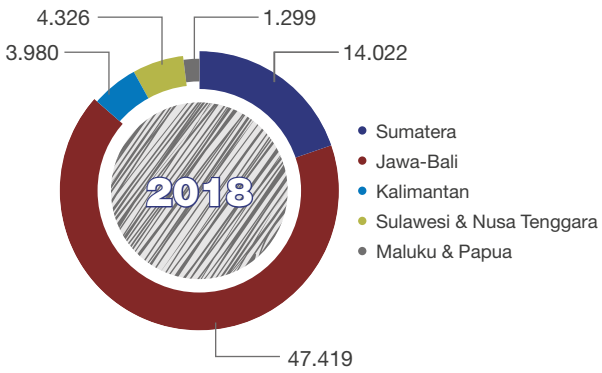
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rumah Tangga | Households	65.228	68.035	70.373	72.347	74.094	75.793	77.407	78.969	80.547	82.113
Bisnis | Business	3.745	3.988	4.241	4.546	4.871	5.220	5.597	6.005	6.479	7.002
Publik | Public	1.995	2.124	2.260	2.419	2.592	2.779	2.980	3.201	3.456	3.738
Industri | Industry	78	81	84	88	92	97	102	108	114	122
Jumlah | Total	**71.046**	**74.227**	**76.958**	**79.400**	**81.650**	**83.890**	**86.086**	**88.283**	**90.597**	**92.974**

Sumber: RUPTL PLN Tahun 2018 s.d 2027 | Source: PT PLN (Persero) Electricity Supply Business Plan (RUPTL) 2018-2027

Jika dikelompokkan berdasarkan sebaran wilayah, di wilayah Jawa-Bali memiliki komposisi jumlah pelanggan yang terbesar di tahun 2017.

When grouped according to area distribution, Java-Bali has the largest customer composition in 2017.

Grafik Proyeksi Jumlah Pelanggan Berdasarkan Wilayah Tahun 2018 (GWh)
Chart of Customer Count Projection by Area in 2018 (GWh)



Sumber: RUPTL PLN Tahun 2018 s.d 2027 | Source: PT PLN (Persero) Electricity Supply Business Plan (RUPTL) 2018-2027



04

TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

BUSINESS SUPPORT REVIEW



> Keandalan aspek pendukung bisnis memberikan kontribusi yang signifikan kepada kinerja operasional sehingga Perusahaan berhasil memenangkan persaingan dengan memberikan kinerja yang optimal.

The reliability of business support aspects ensures significant operational contribution so that the Company managed to overcome the competition through optimal performance.

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES



Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal menjadi *enabler* dan kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi, rencana jangka panjang, serta kinerja yang berkelanjutan. Indonesia Power memberikan fokus terhadap pengelolaan dan pengembangan kompetensi SDM agar mampu mendukung kinerja operasional secara maksimal dan menjadi *competitive advantage* Perusahaan.

Reliable Human Resources (HR) is the enabler and success key in realizing its vision and mission, long-term plan and sustainable performance. Indonesia Power focuses on the management and development of HR competencies to optimally support operational performance and become Company's competitive advantage.

Penyusunan Kebijakan Pengelolaan SDM

Sebagai bentuk komitmen manajemen dalam pengelolaan SDM, telah disusun dan disahkan beberapa Keputusan Direksi terkait pengelolaan SDM dalam bentuk Surat keputusan (SK) sebagai berikut:

Preparation of HR Management Policy

As the Company's commitment to HR management, several Decisions of Directors concerning HR management had been prepared and legalized in the form of Decree as follows:

Tabel SK Direksi terkait Pengelolaan SDM Tahun 2017
Table: Decree of the Board of Directors concerning HR Management

No	Nomor SK Decree Number	Perihal SK Subject		Tanggal Terbit Date of Issuance	Tanggal Berlaku Effective Date
1	38.K/010/IP/2009	Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi (MSDM-BK)	Competency-Based Human Resources Management System (CB HRMS)	7 Mei 2009 May 7, 2009	1 Januari 2009 January 1, 2009
2	63.K/010/IP/2009	Sistem Penghargaan Pegawai	Employee Reward System	30 Juni 2009 June 30, 2009	30 Juni 2009 June 30, 2009
3	50.K/010/IP/2011	Sistem Pembelajaran Pegawai	Employee Learning System	20 Mei 2011 May 20, 2011	20 Mei 2011 May 20, 2011
4	80.K/010/IP/2012	Sistem Manajemen Kinerja Pegawai	Employee Performance Management System	4 Juni 2012 June 4, 2012	4 Juni 2012 June 4, 2012
5	85.K/010/IP/2012	Sistem Rekrutmen Pegawai	Employee Recruitment System	19 Juni 2012 June 19, 2012	19 Juni 2012 June 19, 2012
6	186.K/010/IP/2012	Perubahan atas Keputusan Direksi No. 38.K/010/IP/2009 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi (MSDM-BK)	Amendment to Decree of the Board of Directors No. 38.K/010/IP/2009 concerning Competency-Based Human Resources Management System (CB HRMS)	21 November 2012 November 21, 2012	21 November 2012 November 21, 2012
7	48.K/010/IP/2013	Sistem Tugas Karya	Work Assignment System	28 Februari 2013 February 28, 2013	28 Februari 2013 February 28, 2013
8	84.K/010/IP/2015	Sistem Pembinaan Kompetensi dan Karir Pegawai	Employee Competency and Career Development System	25 Mei 2015 May 25, 2015	25 Mei 2015 May 25, 2015
9	116.K/010/IP/2016	Masa Persiapan Pensiun	Retirement Preparation Period	26 Mei 2016 May 26, 2015	26 Mei 2016 May 26, 2015
10	102.K/010/IP/2017	Diklat Pembekalan Masa Purna Bakti	Post-Employment Debriefing and Training	4 Mei 2017 May 4, 2017	4 Mei 2017 May 4, 2017
11	111.K/010/IP/2017	Diklat Prajabatan	Pre-Placement Course	2 Juni 2017 June 2, 2017	1 Juli 2017 July 1, 2017

Pelaksanaan Rekrutmen

Perusahaan menyelenggarakan rekrutmen pegawai yang dilakukan secara terbuka dengan tujuan menjaring calon atau kandidat dari seluruh latar belakang yang terbaik dan *qualified*. Indonesia Power menetapkan syarat yang disesuaikan dengan fungsi yang dibutuhkan sampai pada proses diklat persiapan atau yang disebut *on the job training* (OJT).

Proses rekrutmen diharapkan dapat menghasilkan pegawai yang kompeten, dapat dikembangkan serta terikat pada Perusahaan. Perusahaan berusaha menempatkan orang yang tepat pada fungsi yang tepat, sehingga tercipta sumber daya manusia berkualitas yang akan terus tumbuh dalam jangka waktu yang panjang.

Untuk metode Rekrutmen dilakukan melalui metode Rekrutmen Umum dan Rekrutmen Khusus (*Direct Shopping*):

Recruitment

The Company implements open recruitment of employees in order to screen potential or candidate employees from all best and qualified background. Indonesia Power determines the requirement in accordance with the required functions until the preparation course process, which is known as On the Job Training (OJT).

Recruitment process is expected to produce competent employees who are able to develop and loyal to the Company. The Company seeks to assign the right person to the suitable position, by which qualified human resources will be produced for a long-term development.

Recruitment is carried out using Regular Recruitment and Specialized Recruitment (Direct Shopping) methods as follows:

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES

1. Rekrutmen Umum/regular, dibuka tiga tahap, diperuntukkan untuk seluruh pelamar luas yang sesuai dengan kualifikasi yang telah di tetapkan oleh Perusahan,
2. Rekrutmen Khusus, Indonesia Power melaksanakan Rekrutmen khusus melalui *direct shopping* dimana melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan STT PLN dan Sekolah Vokasi UGM untuk Rekrutmen Tingkat D3 (Diploma III) serta rekrutmen tingkat akhir untuk mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Semarang, Politeknik Negeri Malang dan Politeknik Negeri Pontianak.

1. Regular Recruitment, which opens in three stages, is intended for all applicants who meet the qualification specified by the Company,

2. As to Specialized Recruitment, Indonesia Power carries out this recruitment through direct shopping approach by collaborating with educational institution, such as STT PLN and UGM Vocational School, for D3 (Diploma III) students and recruitment of last year students in Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Semarang, Politeknik Negeri Malang and Politeknik Negeri Pontianak.

Tabel Rekrutmen (pegawai)
Table: Recruitment (Employee)

Tahun Year	Tingkat Pendidikan Level of Education		Jumlah Number
	S1 I Bachelor's Degree (S1)	**D3** I Associate Degree (D3)	
2017	-	241	241
2016	361	450	811
2015	10	221	231

Komposisi Pegawai
Pada tahun 2017, pegawai Indonesia Power berjumlah 4.209 pegawai meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak 3.725 pegawai. Komposisi pegawai secara lebih rinci telah dijelaskan pada Bab Profil Perusahaan Bagian Profil Pegawai Perusahaan.

Employee Composition
The number of Indonesia Power employees was 4,209 in 2017, which was an increase in comparison to 2016 at 3,725 employees. A more detailed employee composition has been explained in Company Profile chapter, Employee Profile section.

Pelatihan dan Pengembangan
Sebagai langkah pemutakhiran dan peningkatan kemampuan serta *skill* pegawai, Indonesia Power secara berkala melakukan pengembangan kepada seluruh pegawainya sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas. Bentuk pengembangannya adalah berupa pendidikan, pelatihan, *training work station* atau simulasi, dan sertifikasi yang secara lebih rinci telah dijelaskan pada Bab Profil Perusahaan Bagian Profil Pegawai Perusahaan.

Training and Development
In its effort to update and enhance employees' ability and skill, Indonesia Power periodically carries out development program for all employees, in accordance with its needs and priority. The development consists of education, training, work station training or simulation and certification, which will be explained in detail in Company Profile chapter, Employee Profile section.

Internalisasi Budaya Perusahaan
Sejalan dengan perkembangan bisnis, Indonesia Power melakukan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai budaya yang mengedepankan strategi, terutama pada sumber daya manusia dengan harapan lebih mudah dipahami, dimengerti dan diimplementasikan oleh seluruh Insan

Corporate Culture Internalization
In line with business growth, Indonesia Power conducts dissemination and internalization of cultural values that promote strategy -particularly human resources strategy- in the hope that it will be perceived, understood and implemented more easily by all Indonesia Power's

Indonesia Power dalam Laporan Tahunan. Internalisasi dilaksanakan dengan pembagian peran dari pejabat level atas sampai bawah sebagai berikut:

1. Direksi memberikan arah kebijakan dan mengawal secara ketat penerapannya yang dipimpin oleh Direktur Utama dibantu oleh *Learning Management* Team atau Tim Budaya Perusahaan yang bersifat *ad hoc*;
2. General Manager dan *Senior Leader* sebagai *Learning Champion* bertugas menanamkan dan menumbuhkan penerapan Indonesia Power Way dan IP AkSi di Unit, Satuan atau Divisinya masing-masing. Para *Senior Leader* dibantu oleh Agen Perubahan yang ditetapkan oleh Perusahaan;
3. Seluruh pegawai dan Pemimpin sebagai *Learning Target* menerapkan Indonesia Power Way dan IP AkSi dalam kegiatannya sehari-hari.

Program Budaya Perusahaan

Implementasi internalisasi budaya dilaksanakan melalui beberapa program yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 sebagaimana dalam tabel berikut:

employees in Annual Report. Internalization is executed through division of roles from high management executives to employees at lower level, as described below:

1. Board of Directors provides policy directives and closely control the implementation that is led by President Director with assistance of the ad hoc Learning Management Team or Corporate Culture Team;
2. As the Learning Champion, General Manager and Senior Leader are responsible for instilling and developing the implementation of Indonesia Power Way and IP AkSi in their respective Unit, Task Force or Division. Senior Leaders are assisted by Agent of Change as appointed by the Company;
3. As the Learning Target, all employees and Leaders implement Indonesia Power Way and IP AkSi in their daily activities.

Corporate Culture Program

Corporate Culture internalization is implemented through several programs that were held in 2017 as described in this following table:

Tabel Program Budaya Perusahaan Tahun 2017
Table: Cultural Internalization Program 2017

Program	Penjelasan Description	
Internalisasi Nilai Perusahaan: Integritas-Profesional-Proaktif-Sinergi (IP AkSi) Corporate Culture Internalization	Ritual untuk membangun budaya yang dilaksanakan secara terencana dan rutin, dengan tujuan: 1. Membangun budaya komunikasi terbuka, seperti: Coffee *Morning*, Direksi Menjawab, BOD Note, dll, 2. Menginternalisasi Visi, Misi, Strategi dan Nilai Perusahaan, seperti: Pemutaran Audio Budaya Perusahaan, Kuis Budaya, dan Penetapan Tema Budaya.	Efforts to develop a culture that are made according to the plan and regularly, with the aim to: 1. Develop an open communication culture, such as: Coffee Morning, Answer from the Directors, BOD Note, etc. 2. Internalization of the Company's Vision, Mission, Strategy and Values, such as: Corporate Culture Audio Material Playback, Culture Quiz, and Determination of Cultural Theme.
Agen Perubahan Agent of Change	Dalam rangka memastikan agar proses perubahan di Indonesia Power berjalan secara efektif, maka diperlukan adanya pegawai yang berperan sebagai katalisator perubahan, maka dilakukan Agen Perubahan di seluruh Unit Kerja Indonesia Power melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Agen Perubahan juga diberikan pembekalan yang diharapkan mampu mendukung Agen tersebut dalam menjalankan perannya, yaitu sebagai sosialisator, internal ambasador, *role model* dan pelaku *quick wins*. Pembekalan Agen Perubahan dilakukan pada Triwulan II tahun 2017.	To ensure the effectiveness of transformation process in Indonesia Power, employees who serve as the catalyst for change are required; therefore, Agent of Change has been assigned to all Work Units of PT Indonesia Power through a mechanism as specified by the Company. Agent of Change has been equipped with supporting knowledge and skill for performance of the role, i.e. as the disseminator, internal ambassador, role model, and quick wins player. Debriefing for Agent of Change had been carried out in Quarter 2 of 2017.
Asesmen Budaya Cultural Assessment	Asesmen dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Indonesia Power Way telah diinternalisasi di dalam keseharian pegawai dan menjadi kebiasaan. Tahun 2017 pertama kalinya Asesmen Budaya dilakukan dengan bekerja sama dengan Tim Sistem Informasi IP dengan membangun aplikasi survei secara daring yang dapat diakses oleh seluruh pegawai dan memadukan dengan metode observasi lintas Unit. Asesmen Budaya dilaksanakan pada tanggal 17 Mei sampai 2 Juni 2017.	Assessment was conducted to find out how Indonesia Power Way has been internalized in employees' daily activities and adopted as a behavior. 2017 was the first implementation of Cultural Assessment in collaboration with IP's Information System Team, by developing an online survey app that is accessible by all employees and combining it with cross-units observation method. Cultural Assessment was conducted on May 17 to June 2, 2017.

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES

Program	Penjelasan Description	
Leadership Excellence dan Pegawai Teladan Leadership Excellence and Employee of the Year	Perusahaan memandang diperlukan pegawai-pegawai teladan yang menjadi panutan pegawai lainnya dalam proses internalisasi budaya perusahaan sesuai dengan kaidah dan harapan, oleh karena itu penghargaan kepada Pegawai yang telah berkontribusi dan dianggap patut dijadikan teladan dilaksanakan dalam agenda tahunan HUT PT Indonesia Power. Terdapat dua kategori: 1. *Leadership Excellence* (Level Eksekutif ke atas), 2. Pegawai Teladan Budaya IP AkSi (Level Penyelia ke bawah). Pelaksanaan *Leadership Excellence* dan Pegawai Teladan sebagai berikut: 1. Seleksi Unit: 10-14 Juli 2017, 2. Seleksi Korporat: 28 Juli-11 Agustus 2017, 3. Survei dan Wawancara: 11 Agustus-9 September 2017, 4. *Workshop* dan Audisi: 18-20 September 2017.	Company believes that model employees are required for other employees to look up to throughout corporate culture internalization process in accordance with the specified principles and expectations. Therefore, award is granted in the annual agenda of PT Indonesia Power Anniversary to Employee who makes significant contribution and is deemed eligible for a role model. There are two award categories: 1. Leadership Excellence (for employees at Executive Level and higher), 2. IP AkSi Culture Employee of the Year (for employees at Managerial Level and lower). Leadership Excellence and Employee of the Year awarding was carried out through the following stages: 1. Unit Selection: July 10-14, 2017, 2. Corporate Selection: July 28-August 11, 2017, 3. Survey and Interview: August 11-September 9, 2017, 4. Workshop and Audition: September 18-20, 2017
Semesta Budaya Cultural Festival	Semesta Budaya IP (Semangat Bersama Implementasi Budaya Indonesia Power) adalah sebuah Festival Budaya dengan agenda kompetisi yang menampilkan presentasi serta video singkat yang menjelaskan proses internalisasi budaya yang dilaksanakan di masing-masing unit kerja. Semesta Budaya dilaksanakan pada tanggal 9 November 2017	Indonesia Power's *Semesta Budaya* (Common Spirit of Indonesia Power Culture Implementation) is a Cultural Festival with competition agenda, in which presentation and short video are presented to explain culture internalization process in each work unit. *Semesta Budaya* was held on November 9, 2017.
Survei HRSE (*Human Resources Satisfaction & Engagement*) HRSE (Human Resources Satisfaction & Engagement) Survey	Dalam mengukur kepuasan dan *engagement* Pegawai yang yang merupakan salah satu faktor dari *Organization Capital Readiness*, maka dilaksanakan kegiatan pengukuran dan tindak lanjut atas pengukuran tersebut. Untuk mengukur atau memetakan aspek-aspek yang perlu ditingkatkan, maka Survei HRSE dilakukan setiap tahunnya untuk memastikan program-program yang sudah diimplementasikan berjalan sesuai dengan tujuannya dan juga untuk menggali harapan dan keinginan pegawai. Survei HRSE tahun 2017 didampingi oleh konsultan yang kompeten di bidang SDM. Pelaksanaan dilakukan dengan dua tahap yaitu: 1. Tahap 1: HRSE, yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni-7 Juli 2017 dengan total responden 95% dari total pegawai, 2. Tahap 2: Pemahaman, yang dilaksanakan pada tanggal 4-15 September 2017 dengan total responden 90% dari total pegawai. Survei HRSE juga dilakukan dengan target Non Pegawai, SDM non organik Indonesia Power yang terlibat dalam aktivitas perusahaan yang diselenggarakan secara terpisah dengan metode yang lebih sederhana.	In order to measure Employee satisfaction and engagement as one of the Organization Capital Readiness (OCR) factors, assessment and follow up are carried out. To assess or map aspects that need improvement, HRSE (Human Resources Satisfaction & Engagement) Survey is conducted every year to ensure consistency of programs implementation with the specified objectives and to discover employees' expectation and desire. Competent HR consultant assisted the HRSE survey in 2017. It was carried out through two stages as follows: 1. Stage 1: HRSE survey on June 12-July 7, 2017, with total respondents of 95% of the total number of employees. 2. Stage 2: Comprehension course on September 4-15, 2017, with total respondents of 90% of the total number of employees. A separate HRSE Survey using simpler method was also conducted to Non-Staff employees and non-organic HR of Indonesia Power who are engaged in company's activities.

Assessment Budaya Perusahaan

Assessment Budaya Perusahaan dilaksanakan untuk mengukur implementasi internalisasi Indonesia Power Way dan menyusun *action plan* sebagai upaya peningkatan implementasi tersebut. *Assessment* dilaksanakan dengan metode observasi dan kuesioner secara mandiri yang dijalankan oleh Divisi Sistem SDM dan Manajemen Perubahan. Hasil *assessment* budaya yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei sampai 2 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

Corporate Culture Assessment

Corporate Culture Assessment is conducted to measure implementation of Indonesia Power Way implementation and prepare an action plan for improvement of the implementation. Assessment is conducted through observation and independent questionnaire provided by HR System and Change Management Division. Result of culture assessment on May 17 to June 2, 2017 is as indicated below:

Tabel *Assessment* Budaya Perusahaan Tahun 2017
Table: Corporate Culture Assessment 2017

No	Indikator Indicators	Hasil Pengukuran (%) Measurement Result (%)	
1.	**Responden & Demografi** **Respondent & Demography**	a. Jumlah responden 2.920 pegawai atau 29% melebihi target minimal, b. Tingkat partisipatif dalam pengisian aplikasi cukup tinggi, dapat dilihat dari partisipasi dengan jumlah responden rata-rata 70%, baik berdasarkan jenis kelamin, jenjang jabatan maupun masa kerja.	a. The number of respondents was 2,920 employees, 29% higher than the minimum target, b. Participation rate in form completion was high as indicated by the average number of respondents at 70%, both by sex, level of position and period of service.
2.	**Implementasi IP AkSi** **IP AkSi Implementation**	Nilai persentase rata-rata secara umum IP AkSi adalah 83,39%, a. Nilai Sinergi 90,11%, b. Nilai Integritas 88,44%, c. Nilai Proaktif 81,70%, d. Nilai Profesional 73,33%.	The average percentage score of IP AkSi was 83.39%, a. Synergy score was 90.11%, b. Integrity score was 88.44%, c. Proactiveness score was 81.70%, d. Professionalism score was 73.33%,
3.	**ADKAR (*Awareness Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement*)**	Berdasarkan hasil pengukuran ADKAR, proses perubahan dan implementasi nilai-nilai perusahaan, kesadaran terhadap adanya nilai-nilai Perusahaan (*Awareness*) berada pada skala tertinggi disusul *Desire*, dan *Knowledge*. Hal ini cukup sejalan dengan proses siklus ADKAR itu sendiri.	Based on the result of ADKAR measurement, change process and corporate culture implementation, awareness of the existence of Corporate values (Awareness) was on the highest scale, followed by Desire and Knowledge. This is consistent with ADKAR cycle.
4.	**Observasi Lintas Unit** **Cross-Unit Observation**	a. Hampir di semua Unit mencapai angka 100% tampak indikator *awareness*, b. Hasil Uji Petik adalah rata-rata 96% responden memahami program perusahaan.	a. Almost all units reached 100% for awareness indicator, b. Sampling result indicated that an average of 96% respondents understand company's programs.

Pembinaan Karir

Pembinaan karir dilakukan diatur dalam kebijakan Surat Keputusan Direksi Nomor: 84.K/010/IP/2015 tentang Sistem Pembinaan Kompetensi dan Karir Pegawai. Proses pengembangan karir pegawai dilakukan melalui peningkatan kompetensi (pembinaan level kompetensi dan grade pegawai) dan jenjang jabatan (peningkatan tuntutan pengetahuan, kompleksitas masalah, dan tanggung jawab pada suatu jabatan).

Pengembangan kompetensi pegawai dan kesiapan organisasi sesuai dengan sasaran strategi Perusahaan dilakukan melalui lima tahap pembinaan karir, yaitu:

Career Development

Career development is conducted in accordance with the policy set out in Directors' Decree No. 84.K/010/IP/2015 concerning Employee Competency and Career Development System. Employee career development process is carried out through improvement of competencies (employee competency level and grade development) and level of position (enhancement of knowledge requirement, complexity of problem and responsibility to particular position).

Development of employee competency and organizational readiness in accordance with Company's strategy objective are carried out through five stages of career development, namely:

Tabel Tahap Pembinaan Karir
Table: Career Development Stages

Tahap Pembinaan Karir Career Development Stages	Penjelasan Description	
Rekrutmen Recruitment	Proses rekrutmen didasarkan pada standar minimum aspek psikologis (kemampuan intelektual, kepribadian dan sikap kerja) dan kompetensi yang mengacu pada Kebutuhan Kompetensi Jabatan (KKJ) yang berlaku di Perusahaan.	Recruitment process is based on the minimum standard of psychological aspect (intellectual capability, personality and work attitude) and competency that is adjusted to the applicable Role Competency Requirement (KKJ) in the Company.

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES

Tahap Pembinaan Karir Career Development Stages	Penjelasan Description	
Penempatan pada Jabatan Position Assignment	Penempatan pegawai pada jabatan didasarkan pada hasil asesmen kompetensi pegawai yang bersangkutan pada proses diklat prajabatan.	Assignment of employees to certain position based on the result of competency assessment during the period of pre-service training.
Penilaian Kinerja Performance Assessment	Penilaian Kinerja dilakukan melalui proses *cascading* KPI Manajemen yang diturunkan ke KPI bawahannya, dan pemenuhan *gap* kompetensi pegawai terhadap jabatan saat ini maupun jabatan proyeksi pegawai tersebut. Penilaian Kinerja dilakukan secara berulang pada pegawai di tiap semester.	Performance Assessment is carried out through Management KPI cascading to the sub-KPI, filling of competency gap between current position and projected position for the employees. Performance Assessment is carried out on recurring basis for every employee in each semester.
Pembinaan Karir Career Development (Employee Mutation)	Pembinaan Karir Pegawai didasarkan pada seluruh penilaian kinerja pegawai yang dilakukan secara berulang di tiap semester.	Employee Mutation is based on all employee performance assessments that are carried out on recurring basis in each semester.
Persiapan Pensiun Retirement Preparation	Persiapan pensiun dilakukan melalui pembekalan pegawai pra purna bakti melalui persiapan mental, pengelolaan keuangan dan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai Pensiun.	Retirement preparation is carried out through pre-retirement debriefing for employees in the form of mental preparation, financial management and health care for Retired employees.

Indikator seorang pegawai untuk promosi didasarkan pada kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta ketepatan waktu. Prestasi kerja dipengaruhi oleh tiga faktor lain, yaitu kemampuan dan minat seorang pekerja, kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas dan peran, serta tingkat motivasi yang dimilikinya.

Pada tahun 2017, Indonesia Power telah melaksanakan promosi terhadap 162 pegawai pada level Eksekutif Senior sebanyak 2 pegawai, level Eksekutif sebanyak 20 pegawai, level Penyelia sebanyak 105 pegawai, dan level Pelaksana sebanyak 35 pegawai.

Metode pengukuran yang dilakukan Perusahaan untuk penentuan dalam pengembangan kompetensi dan karir Pegawai melalui Assesmen Pegawai. *Feedback* hasil asesmen disampaikan Pegawai dan Atasan Pegawai. Didalam pembinaan kompetensi pegawai, Perusahaan melakukan pengukuran kompetensi pegawai sesuai dengan Kebutuhan Kompetensi Jabatan (KKJ) melalui Uji Portofolio Kompetensi (UPK) dengan jenis UPK sebagai berikut:

1. UPK Keahlian: Uji Portofolio Kompetensi yang diberlakukan untuk pegawai pada *grade* tertinggi dan akan naik level Kompetensi yang telah diusulkan untuk mengikuti Diklat Penjenjangan tetapi dalam kurun waktu enam bulan sejak tanggal diusulkan tidak diselenggarakan Diklat Penjenjangan untuk yang bersangkutan. UPK Keahlian memuat materi uji yang mengukur Kompetensi teknis berdasarkan Kebutuhan Kompetensi Jabatan (KKJ).
2. UPK Manajerial: Uji Portofolio Kompetensi yang diberlakukan untuk Pejabat PLT yang dalam kurun waktu enam bulan sejak menjabat PLT tidak tersedia Diklat Penjenjangan bagi yang bersangkutan. UPK Manajerial memuat materi uji yang mengukur Kompetensi teknis berdasarkan KKJ dan Kompetensi *leadership* menggunakan metode *assessment*.

Indicator of employee's eligibility for promotion is based on proficiency, experience, and earnestness, as well as punctuality. Work achievement is determined by three other factors, i.e. ability and interest of an employee, ability and acceptance on task and role delegation, and the level of motivation.

In 2017, Indonesia Power had carried out promotion of 162 employees, which consisted of 2 employees at Senior Executive level, 20 employees at Executive level, 105 employees at Supervisor level and 35 employees at Operator level.

Employee Assessment method was used by the Company in determining Employee competency and career development. Feedback on the assessment result was then submitted by Employee and the Superior. In developing employee competency, the Company carried out employee competency assessment in accordance with the KKJ through Competencies Portfolio Test (UPK), which consisted of the following UPK:

1. Expertise UPK: Competencies Portfolio Test that applies to employees at the highest grade who will upgrade their level of Competencies, who have been promoted for Job Grading Training but such Job Grading Training is not provided within six months following the promotion date. Expertise UPK contains test materials that measure Technical competency based on the KKJ.

2. Managerial UPK: Competencies Portfolio Test that applies to Caretaker Staff who, within six months as of being appointed the Caretaker, has not provided with Job Grading Training. Managerial UPK contains test materials that measure Technical competency based on KKJ and Leadership competency using assessment method.

Pengukuran *Maturity* Kinerja SDM

Kinerja SDM diukur berdasarkan KPI yang telah ditetapkan Indonesia Power yaitu melalui *Human Capital Readiness* (HCR) dan *Organizational Capital Readiness* (OCR) merupakan target pencapaian aspek *Learning & Growth*.

Human Capital Readiness (HCR)

HCR adalah pengukuran kesiapan SDM berdasarkan dua aspek, yaitu peningkatan kompetensi dan pemenuhan kebutuhan SDM yang optimal agar dapat mengimplementasikan strategi Perusahaan. Formulasi yang digunakan untuk mengukur HCR menggunakan skala 1-5 yang didapatkan dari hasil *assessment*, yaitu *self-assessment* dan *assessment* oleh Kantor Pusat kepada unit setiap triwulan. Selain proses *assessment* tersebut, proses pembinaan dilakukan oleh bidang terkait dalam bentuk sosialisasi kepada pengelola SDM unit, *monitoring* dan *feedback* bulanan.

Pada tahun 2017, HCR adalah sebesar 4,27% meningkat jika dibandingkan tahun 2016 sebesar 4,25%. Terkait dengan kesiapan kompetensi pegawai dalam menjalankan strategi Perusahaan, dilakukan melalui ukuran proses dan hasil:

HR Performance Maturity Measurement

HR performance is measured based on the KPI as specified by Indonesia Power, i.e. through Human Capital Readiness (HCR) and Organizational Capital Readiness (OCR), which comprise the achievement target of Learning & Growth.

Human Capital Readiness (HCR)

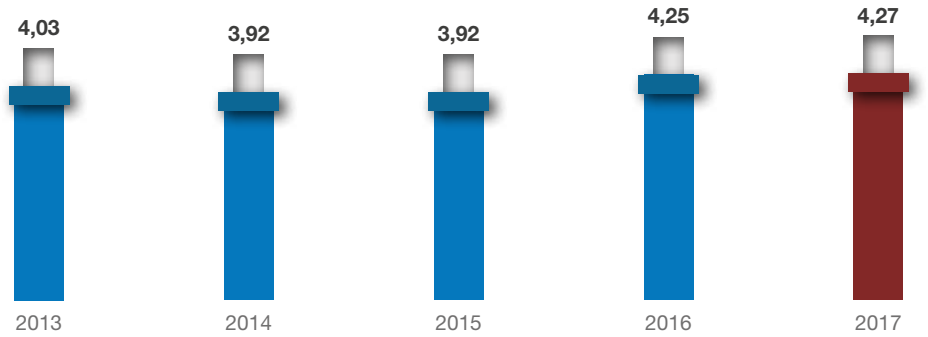
HCR is an assessment of HR readiness based on two aspects, namely competency improvement and optimized fulfillment of HR demand in order to be able to implement Company's strategy. HCR measurement uses 1-5 scale formulation that is obtained from assessment results, namely self-assessment and quarterly unit assessment by Head Office. In addition to assessment process, coaching process is carried out by relevant area in the form of dissemination to unit HR manager, monthly monitoring and feedback.

In 2017, the HCR was at 4.27%, increased from the same in 2016 at 4.25%. With regard to employee competencies in executing Company's strategy, the following process and result were measured:

Tabel Aspek Pengukuran Kesiapan SDM
Table: HR Readiness Measurement Aspects

Aspek Aspect		Proses/*Maturity* Process/Maturity	Hasil/KPI Result/KPI
Peningkatan Kompetensi	Competency Improvement	3,67	5,00
Pemenuhan Kebutuhan SDM	Fulfillment of HR Demand	3,67	5,00

Grafik HCR Tahun 2013-2017 (%)
HCR Chart in 2013-2017 (in %)



SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES

Organizational Capital Readiness (OCR)

OCR merupakan pengukuran kesiapan organisasi berdasarkan empat aspek, yaitu budaya kerja, kepemimpinan, *alignment* dan *teamwork*. Formulasi yang digunakan untuk mengukur OCR adalah dengan menggunakan skala 1-5 yang didapatkan dari hasil *assessment*.

Pada tahun 2016, OCR adalah sebesar 4,25% dengan capaian sasaran yang dilakukan melalui:

Organizational Capital Readiness (OCR)

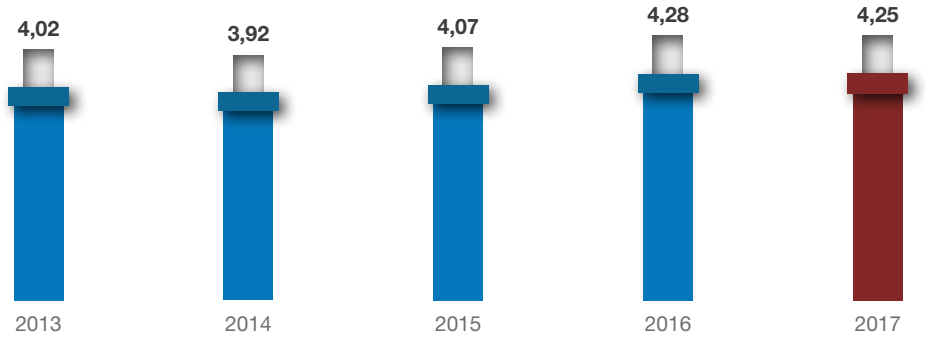
OCR is an assessment of organizational readiness based on four aspects, i.e. work culture, leadership, alignment and teamwork. Scale 1-5 formulation obtained from assessment result is used to measure OCR.

In 2016, the OCR was at 4.5% with target that was achieved through:

Tabel Aspek Pengukuran Kesiapan Organisasi
Table: Organizational Readiness Assessment Aspects

Aspek Aspect		Proses/*Maturity* Process/Maturity	Hasil/KPI Result/KPI
Budaya Kerja	Work Culture	3,33	5,00
Kepemimpinan	Leadership	3,67	5,00
Alignment	Alignment	3,67	5,00
Team Work	Team Work	3,67	5,00

Grafik OCR Tahun 2013-2017 (%)
OCR Chart in 2013-2017 (in %)



Penilaian Kinerja

Indonesia Power melakukan penilaian atas pencapaian yang telah diberikan terhadap para pegawainya untuk mengevaluasi produktivitas kinerja mereka. Sebagai dasar pengukuran pencapaian kinerja pegawai dalam mencapai tujuan Perusahaan secara efektif dan efisien, Perusahaan telah menetapkan Sistem Manajemen Kinerja dengan menggunakan aplikasi Sistem manajemen Kinerja Pegawai (SIMKP).

Aturan mengenai Sistem Manajemen Kinerja Pegawai ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor: 80.K/010/IP/2012 tanggal 4 Juni 2012 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai. Dalam pelaksanaannya, pengukuran kinerja pegawai dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

Performance Assessment

Indonesia Power conducts assessment of performance and accomplishment of its employees to evaluate their performance productivity. As the basis of employee's achievement assessment in achieving the Company's objectives effectively and efficiently, the Company has specified a Performance Management System by using Employee Performance Management System (SIMKP) application.

The regulation on Employee Performance Management System is set out in Directors' Decree No. 80.K/010/IP/2012 dated June 4, 2012 concerning Employee Performance Management System In the implementation, employee performance assessment was carried out through several stages as follows:

Tabel Tahap Penilaian Kinerja Pegawai
Table: Employee Performance Assessment Stages

Tahap Stage	Kegiatan Activity	
Perencanaan Kinerja Pegawai Employee Performance Planning	Perencanaan Kinerja Tahun 2017 dilaksanakan pada 19 Juni sampai 7 Juli 2017 untuk dua semester. Perencanaan dimulai dari Inisiasi KPI Atasan kepada bawahan melalui aplikasi SIMKPNAS.	Employee Performance Planning 2017 was conducted on June 19 to July 17, 2017 for two semesters. Planning started with KPI Initiation from Superior to subordinates through SIMKPNAS application.
Pemantauan Kinerja Pegawai Employee Performance Monitoring	Pemantauan Kinerja dilaksanakan secara *offline* berupa CMC Atasan Bawahan dan secara *online* melalui Periode Revisi Perencanaan Manajemen Kinerja di Aplikasi SIMKPNAS pada 9 sampai 17 November 2017 untuk Semester 2 Tahun 2017.	Performance Monitoring was carried out offline through CMC between Superior and Subordinate and online through Performance Management Planning Revision Period on the SIMKPNAS application during October 24 to November 6, 2017 for the second semester of 2017.
Pengukuran Kinerja Pegawai Employee Performance Assessment	Pengukuran Kinerja dilaksanakan per semester. Periode ini Setiap Pegawai mengisikan realisasi kinerja selama 1 semester yang kemudian disetujui oleh Atasan melalui Aplikasi SIMKPNAS. Periode Semester I pada 24 Juli sampai 7 Agustus 2017 dan Periode Semester II pada 22 Januari sampai 2 Februari 2018.	Performance Assessment was carried out every semester. During this period, employee filled in performance realization for one semester, after which approval by Superiors was given through SIMKPNAS application. The First Semester period fell on July 24 to August 7, 2017, and the Second Semester period fell on January 22 to February 2, 2017.

Tabel Kompetensi yang Dinilai dalam Penilaian Pegawai
Table: Assessed Competencies in Employee Assessment

Jenis Kompetensi Type of Competency	Penjelasan Description	
Hard Compentency	Diukur berdasarkan pencapaian Target KPI Exact, KPI Proxy dan KPI Activity.	Hard Competency is measured based on KPI Exact, KPI Proxy and KPI Activity Targets.
Soft Competency	Diukur melalui Kuesioner Kompetensi yang dinilai oleh Atasan langsung dari pegawai. Kuesioner berkaitan dengan Kompetensi Utama dan Kompetensi Peran dalam Direktori Kompetensi PT Indonesia Power.	Soft Competency is measured using Competency Questionnaire by direct Superior of relevant employees. The questionnaire is related to the Core Competency and Role Competency in the Directory of Competencies of PT Indonesia Power.

Penilaian kinerja dilakukan secara berkala dalam rentang waktu satu periode penilaian yaitu setiap enam bulan sekali. Penilaian ini dilakukan oleh atasan langsung. Hasil penilaian menjadi dasar pertimbangan untuk pemberian *reward* dan pengembangan karir pegawai seperti promosi, rotasi, peningkatan remunerasi dan sebagainya, juga menjadi dasar pemberian *punishment* seperti surat peringatan, penundaan kenaikan pangkat, demosi, mutasi sampai pemutusan hubungan kerja.

Performance assessment is carried out regularly within one assessment period, which is once in six months. This assessment is conducted by the direct superior. Assessment result is used as the basis for consideration of reward provision and employees' career development, such as career promotion, rotation, remuneration increase, etc. In addition, it will also be used as a basis for punishment, such as memorandum, promotion delay, demotion, mutation and termination of employment.

Strategi Remunerasi

Dalam implementasi strategi remunerasi, Indonesia Power telah melaksanakan *salary survey*. Remunerasi yang ada dievaluasi untuk mengetahui posisi remunerasi Perusahaan dibanding harga Pasar dengan tujuan meningkatkan daya kompetitif. Perusahaan merencanakan adanya penyesuaian remunerasi untuk menyesuaikan dengan harga pasar secara bertahap termasuk penyesuaian.

Remuneration Strategy

In implementing remuneration strategy, Indonesia Power has conducted salary survey. The existing remuneration is evaluated to find out Company's remuneration position in comparison to the market price to increase competitive value. The Company plans to gradual remuneration adjustment to market price.

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES

Bentuk remunerasi yang diberikan Indonesia Power berupa kompensasi dan manfaat pegawai. Kebijakan terkait sistem remunerasi Indonesia Power telah tercantum di dalam PKB Bab VI tentang Penghargaan.

Remuneration given by Indonesia Power is in the form of pays and employee benefits. Policy on remuneration system in Indonesia Power is set out in the Collective Labor Agreement (CLA) Chapter VI concerning Rewards.

Remunerasi berupa Kompensasi
Remuneration in the form of Pays

- Pay for Person (P1).
- Pay for Position (P2) dan Tunjangan lainnya.
- Pay for Performance (P3).

- Pay for Person (P1).
- Pay for Position (P2) and Other allowances.
- Pay for Performance (P3).

Remunerasi berupa Manfaat Pegawai
Remuneration in the form of Employee Benefits

- Fasilitas
- Benefit

- Facilities
- Benefits

Survei Kepuasan dan Keterikatan Pegawai

Indonesia Power secara berkala rutin melaksanakan *Human Resources Satisfaction & Engagement* (HRSE) yaitu *Employee Satisfaction Survey* dan *Employee Engagement Survey*. Hasil dari survei kepuasan dan keterikatan pegawai bermanfaat untuk mengukur dan memetakan aspek-aspek yang perlu ditingkatkan di periode selanjutnya.

Pelaksanaan survei HRSE pada tahun 2017 dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner daring berbahasa Indonesia. Adapun aspek-aspek yang dinilai dalam survei HRSE adalah:
1. Kepuasan Bekerja,
2. Penempatan/Promosi Pegawai,
3. Proses Penilaian Kinerja,
4. Pendidikan dan Pelatihan,
5. Minat dan Kompetensi,
6. Arahan Atasan Langsung.

Pada tahun 2017, tingkat kepuasan pegawai adalah sebesar 84,98% meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 80,29% yang dipengaruhi oleh adanya pencepatan karir, kesempatan untuk mutasi ke unit lain dan tingkat stabilitas unit dalam bekerja. Pegawai juga merasakan perusahaan lebih *care* terhadap pegawai dikarenakan respon cepat terhadap permintaan.

Employee Satisfaction and Engagement Survey

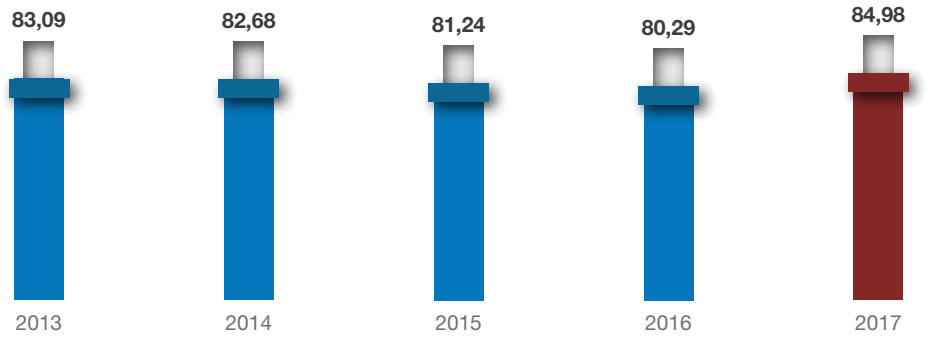
Indonesia Power regularly conducts Human Resources Satisfaction & Engagement (HRSE) activity, namely Employee Satisfaction Survey and Employee Engagement Survey. Result of employee satisfaction and engagement survey is useful to measure and map aspects that need improvement in next period.

HRSE survey in 2017 was conducted by distributing online questionnaire in Indonesian language. Aspects that were assessed in the HRSE survey consisted of:

1. Work Satisfaction,
2. Employee Placement/Promotion,
3. Performance Assessment Process,
4. Education and Training,
5. Interest and Competency,
6. Guidance from Direct Superior.

In 2017, employee satisfaction rate was at 84.98%, increased from 2016 at 80.29% due to career acceleration, opportunity to move to other unit and unit's stability level during work. Employee also thought that the Company gave better care for them, as indicated by quick response to their demand.

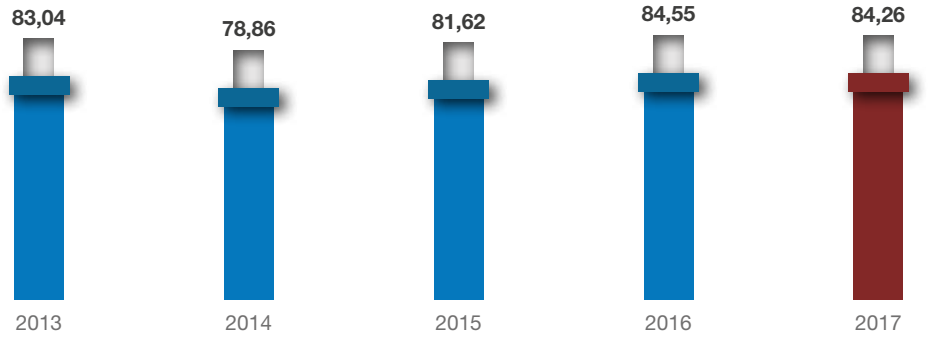
Grafik *Employee Satisfaction Index* (ESI) Tahun 2013-2017 (%)
Chart: Employee Satisfaction Index (ESI) in 2013-2017 (%)



Tingkat keterikatan pegawai tahun 2016 sebesar 84,55% menjadi sebesar 84,26% di tahun 2017 sedikit mengalami penurunan. Hasil tersebut ditunjukkan dari perbandingan segmen pegawai yang masuk kerja di rentang tahun 2012-2017 memiliki penurunan score dari 83,48% di tahun 2016 menjadi 82,80% di tahun 2017. Adapun segmen tersebut populasinya adalah sebesar 38,67% dari total populasi pegawai.

Employee engagement rate in 2016 was at 84.55%, slightly decreased to 84.26% in 2017. This was indicated by employee segments who were recruited during 2012-2017, where the scored decreased from 83.48% in 2016 to 82.80% in 2017. Segment population was 38.67% of the total employee population.

Grafik *Employee Engagement Index* (EEI) Tahun 2013-2017 (%)
Graph: Employee Engagement Index (EEI) 2013-2017 (%)



Data survei tersebut mengambil kesimpulan bahwa secara garis besar turunnya nilai *Employee Engagement Index* (EEI) pegawai PT Indonesia Power dikarenakan banyaknya pegawai baru di Perusahaan, sehingga walaupun tidak signifikan penurunannya sebesar 0,29%, namun secara agregat menurunkan total indeks EEI.

Survey data concluded that the decrease of Employee Engagement Index (EEI) of PT Indonesia Power employees was basically due to recruitment of new employees in the Company, by which the insignificant decrease of 0.29% also decreased the EEI total aggregate.

Setelah pelaksanaan survey HRSE dilakukan, dilanjutkan dengan tahap FGD (*Focus Group Discussion*) guna memvalidasi hasil yang diperoleh dari Survey HRSE 2017 dan melakukan penelusuran/*inquiry* yang lebih mendalam mengenai latar belakang dari temuan yang diperoleh melalui Survei HRSE 2017. Dengan dilakukannya tahap FGD (*Focus Group Discussion*)

Following the completion of HRSE survey, FGD (Focus Group Discussion) was carried out to validate the result of HRSE Survey 2017 and to make deeper inquiry on the background of findings from HRSE Survey 2017. Through FGD (Focus Group Discussion), it is expected that the next stage, i.e. preparation of action plan for improvement of aspects measured in HRSE survey

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES

diharapkan pada tahap selanjutnya yaitu penyusunan *action plan* guna perbaikan pada aspek-aspek yang diukur dalam survei HRSE 2017 dapat diperoleh *action plan* Survei HRSE 2017 yang tepat dan komprehensif serta sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

2017, will result in the appropriate and comprehensive action plan for HRSE Survey 2017, as well as suitable for the needs of the Company.

Kebijakan dan Masa Persiapan Pensiun

Indonesia Power memiliki kebijakan memberikan hak kepada pegawai untuk menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama satu tahun sebelum memasuki usia pensiun (56 tahun). Untuk itu Direktorat SDM telah mempersiapkan strategi sebagai berikut:

1. Rekrutmen *Fresh Graduate* melalui *job fair*, beasiswa ikatan dinas, *Cooperative Education*, pengumpulan *database* calon pelamar di dalam *website* Indonesia Power,
2. Rekrutmen profesional,
3. Persiapan kader dan *talent* melalui program pengembangan kompetensi intensif.

Sedangkan bagi yang akan memasuki masa pensiun, Perusahaan telah meyiapkan sejumlah program, yaitu:

1. Sebelum mengikuti pembekalan pra-purna bhakti untuk menyiapkan psikologis, terkait dengan pengelolaan keuangan dan kesehatan yang diberikan minimal tiga tahun sebelum pegawai memasuki masa pensiun,
2. Pembekalan diklat purna bhakti yang diberikan dua tahun sebelum pegawai memasuki masa pensiun, dengan pilihan: kewirausahaan, sertifikasi, serta pembekalan rohani.

Retirement Policy and Retirement Preparation Period

Indonesia Power maintains a policy that provides its employees with the right to enter into one year-Retirement Preparation Period (MPP) entering retirement age (56). Therefore, HR Directorate had prepared the following strategies:

1. Fresh Graduate Recruitment through job fair, Scholarships with employment bond, Cooperative Education, potential applicants database development on Indonesia Power's website,
2. Professional recruitment,
3. Candidates and talents preparation through intensive competency development program.

As to employees who enter retirement period, the Company had prepared several programs, such as:

1. Pre-retirement debriefing for psychological readiness preparation, with regard to financial management and health care that are provided at a minimum three years prior to the retirement period,

2. Education and training related to retirement that will be given two years prior to entering retirement period, which consists of these options: entrepreneurship, certification, and spiritual guidance.

Hubungan Industrial

Indonesia Power memberikan kebebasan kepada pegawainya untuk berpendapat dan berserikat. Hal tersebut sekaligus dalam rangka mematuhi Undangundang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 dan Pasal 102, Perusahaan juga berpartisipasi dalam melaksanakan hubungan industrial dengan Serikat Pekerja yang bertujuan sebagai sarana penyampaian aspirasi pegawai kepada manajemen. Serikat Pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja, baik di Perusahaan maupun di luar Perusahaan, guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Industrial Relations

Indonesia Power provides its employees with freedom of opinion and association. This also comprises a compliance with Indonesian Labor Law No. 13 of 2003, Article 1 and Article 102. The Company also participates in maintaining industrial relation with Labor Union with the intention of facilitating its employees to express their aspirations to the management. Labor Union is an organization that is established from, by, and for the workers, both inside and outside of the Company, to plead, defend and protect all employees' rights and interests, and to improve the welfare of the employees and their family. Furthermore, Labor Union and the Management had agreed and entered into a CLA as

Untuk selanjutnya Serikat Pekerja dan Manajemen bersepakat dan menghasilkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja dengan Manajemen yang berisi syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Dalam menjalin hubungan yang baik antara pegawai dan manajemen Indonesia Power, Indonesia Power memiliki serikat pekerja yang bernama Persatuan Pegawai PT Indonesia Power (PP-IP), yang telah terdaftar di Kantor Kemenakertrans RI dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP.413/M/8W1999 tanggal 5 November 1999 dan telah dicatalkan ulang berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 16/MEN/2001 tanggal 15 Februari 2001 dengan nomor bukti pencatatan Nomor 165/V/P/X/2001 tanggal 09 Oktober 2001 di Kemenakertrans RI Kodya Jakarta Selatan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab untuk memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan Pegawai, meningkatkan kesejahteraan pegawai dan keluarganya serta menjadi mitra dalam mengelola Perusahaan.

Selanjutnya antara PT Indonesia Power dengan Persatuan Pegawai PT Indonesia Power membentuk perjanjian yaitu Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Pembaruan PKB dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2016 yaitu PKB Periode tahun 2017-2018.

Agenda hubungan industrial yang dilaksanakan tahun 2017:

1. Pertemuan dalam membahas perkembangan Hubungan Industrial di Lingkungan Indonesia Power dan Sosialisasi Perjanjian Kerja Bersama Periode 2017-2018 di beberapa Unit Kerja,
2. Pertemuan antara Manajemen dengan perwakilan PP-IP dalam rangka sosialisasi Perjanjian Kerja Bersama Periode 2017-2018 dan sosialisasi kebijakan-kebijakan Perusahaan, diskusi *draft* Surat Keputusan ratifikasi PT PLN (Persero), serta penyampaian permasalahan-permasalahan Unit,
3. Peneguran atas dugaan pelanggaran disiplin Pegawai termasuk mengingatkan atas tingkat kehadiran terkait ketaatan jam kerja,
4. Melakukan *review* kebijakan peraturan disiplin pegawai,
5. *Workshop* KP2DP,
6. Menampilkan data keterlambatan Pegawai dalam bentuk *visual management*.

the result of discussion between the Labor Union and Management, which contains work conditions, rights and obligations of both parties.

In building a good relation between employees and Company's management, Indonesia Power had established a labor union called Indonesia Power Labor Union (PP-IP), which was registered to the Ministry of Manpower under Minister of Manpower Decree No. KEP.413/M/8W1999 dated November 5, 1999, and had been re-registered in accordance with Minister of Manpower and Transmigration Decree No. KEP.16/MEN/2001 dated February 15, 2001, under receipt of registry Number 165/V/P/X/2001 dated October 9, 2001 in the Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia, South Jakarta Municipality Office. The Union is free, open, independent, democratic and responsible to plead, defend and protect employees' rights and interests, increase the welfare of the employees and their family, as well as serve as a partner in managing the Company.

Furthermore, PT Indonesia Power and the Labor Union entered into a CLA. Amendment to the CLA was made on December 29, 2016, namely the 2017-2018 CLA.

Industrial Relation agenda in 2017 was as follows:

1. Meeting for discussion on the development of Industrial Relation in Indonesia Power and Dissemination of Collective Labor Agreement 2017-2018 in several Work Units,
2. Meeting between the Management and PP-IP representatives for dissemination of Collective Labor Agreement 2017-2018 and dissemination of Company's policies, discussion on draft Decree of Ratification by PT PLN (Persero) and problems in the Units.
3. Warning for disciplinary violation suspect by Employees, including warning for presence rate with regard to working hours adherence,
4. Conducted review on employee disciplinary policy and regulation,
5. KP2DP Workshop,
6. Disclosure of Employee late presence data in the form of visual management.

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY



Teknologi informasi (TI) memiliki pengaruh signifikan terhadap kelancaran proses bisnis yang efektif dan efisien. Hal ini mendorong Indonesia Power untuk memiliki perangkat kebijakan dan prosedur sistem informasi berupa Tata Kelola Teknologi Informasi Perusahaan (PROGEN), *Master Plan* Teknologi Informasi (MPTI), Kebijakan Keamanan Informasi, Pengaturan penggunaan hak akses jaringan, *email*, dan *internet* di lingkungan Indonesia Power serta Kebijakan Pembentukan Komite Sistem Teknologi Informasi. Selain itu, inisiatif perbaikan senantiasa dilakukan untuk menjaga kualitas layanan dan sebagai langkah prefentif dalam menghadapi risiko reputasi dan operasional terkait dengan penyusunan dokumen-dokumen kebijakan internal perusahaan yang berhubungan dengan *IT Governance.*

Information Technology (IT) has a significant influence on the smoothness of effective and efficient business process. This urges Indonesia Power to maintain policy instrument and information system procedure in the form of Corporate Information Technology Governance (PROGEN), Information Technology Master Plan (MPTI), Information Security Policy, network access right setting, email and the internet in Indonesia Power, as well as Policy on the Establishment of Information Technology Committee. In addition, corrective initiatives are always made to maintain service quality and as preventive effort in dealing with reputational and operational risk with regard to the preparation of company's internal policy documents related to IT Governance.

Visi Sistem Informasi Indonesia Power

"Memiliki Sistem Teknologi Informasi Terpadu yang *excelent*."

Misi Sistem Informasi Indonesia Power

"Membangun dan mengembangkan Sistem Teknologi Informasi Perusahaan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis serta menunjang daya saing Perusahaan."

Indonesia Power juga menyusun dan mengesahkan kebijakan *Disaster Recovery Plan* (DRP) sebagai standardisasi dalam pelaksanaan jika terjadi kondisi bencana. Dengan kelengkapan perangkat kebijakan dan prosedur sistem informasi yang dimiliki, Indonesia Power mampu menjalankan bisnis dengan proses pengambilan keputusan yang transparan, cepat dan akurat sehingga menunjang pencapaian tujuan jangka panjang Perusahaan.

Indonesia Power's Information System Vision

"To maintain excellent Integrated Information System Technology."

Indonesia Power's Information System Mission

"To build and develop Corporate Information Technology System that is capable of improving efficiency and effectiveness of business process and supporting Company's competitiveness."

Indonesia Power also prepared and ratified policy on Disaster Recovery Plan (DRP) as an implementation standard in the event of disaster. With policy instrument and information system procedure, Indonesia Power is capable of operating business with transparent, fast and accurate decision making, which will support the achievement of Company's long-term objectives.

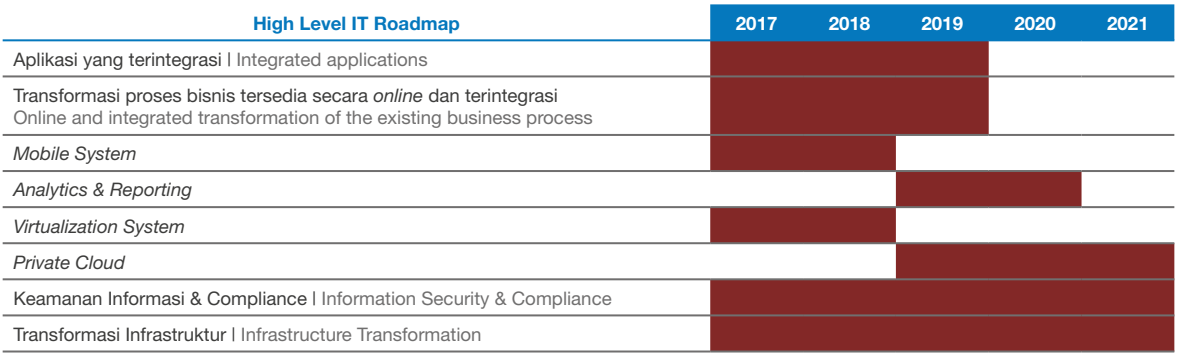
Master Plan Teknologi Informasi

Sebagai bentuk komitmen terhadap pengembangan TI, Indonesia Power menyusun *Master Plan* Teknologi Informasi (MPTI) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 163.K/061/IP/2017, merupakan dokumen yang disusun sebagai hasil *review* dari dokumen Rencana Strategis Sistem Informasi (RSTI) PT Indonesia Power tahun 2012-2016. Dokumen MPTI ini disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 96.K/010/IP/2014 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Perusahaan (PROGEN), yang secara lebih rinci untuk memberikan arahan kegiatan pengembangan TI di Perusahaan sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT Indonesia Power tahun 2017-2021.

Information Technology Master Plan

As its commitment to IT development, Indonesia Power has arranged an Information Technology Master Plan (MPTI) as specified in Directors' Decree No. 163.K/061/IP/2017, which is a document resulted from review on Information System Strategic Plan (RSTI) 2012-2016 document of PT Indonesia Power. MPTI document is prepared as an inseparable part of Directors' Decree No. 96.K/010/IP/2014 concerning Corporate Information Technology Governance (PROGEN), which provides detailed direction for IT development activities in the Company, in accordance with Company's Long-Term Strategic Plan (RJPP) 2017-2021 of PT Indonesia Power.

Master Plan Teknologi Informasi Tahun 2017-2021
Information Technology Master Plan 2017-2021



TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

Melalui dokumen ini diharapkan seluruh kegiatan pengembangan TI di perusahaan searah dan selaras dengan Visi, Misi dan Strategi perusahaan serta tren TI di dunia. Di dalam MPTI mencakup kegiatan strategi perusahan sebagai berikut:

1. Standardisasi, optimalisasi serta integrasi aplikasi-aplikasi bisnis,
2. Peningkatan dukungan STI terhadap fungsi-fungsi bisnis yang kritikal untuk perusahaan,
3. Mengadopsi teknologi terkini seperti *mobility, analytics* dan *cloud.*

Through this document, it is expected that all IT development activities in the Company are aligned and in line with Company Vision, Mission and Strategy, as well as with global IT trend. MPTI covers strategic activities by the Company as follows:

1. Standardization, optimization and integration of business applications,
2. Enhancement of ITS support to business functions that are critical to the Company,
3. Adoption of the latest technology, such as mobility, analytics and cloud.

Program Teknologi Informasi

Program dilaksanakan oleh Departemen Sistem Informasi yang bertugas memastikan seluruh proses bisnis Perusahaan menggunakan Sistem Teknologi Informasi yang terpadu sehingga keseluruhan Proses Bisnis Perusahaan menjadi sangat aman, andal, efisien, kompetitif (mengikuti perkembangan teknologi) untuk melayani pelanggan, mitra, Pemegang Saham dan *stakeholders* lainnya serta memaksimalkan kinerja keuangan dan kinerja perusahaan sesuai manajemen risiko dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Program kerja TI terdiri dari pemeliharaan rutin dan pengembangan/investasi. Pemeliharaan rutin maupun pengembangan/investasi yang dilakukan di tahun 2017 antara lain:

Program Pemeliharaan Aplikasi

1. *Maintenance* & ATS ERP: kegiatan untuk *Support* dan *Maintenance* aplikasi *Enterprises Resource Planning* Perusahaan menggunakan Oracle,
2. *Maintenance* & ATS EAM: kegiatan untuk *Support* dan *Maintenance* aplikasi *Enterprise Asset Management* Perusahaan yang menggunakan Maximo,
3. *Maintenance Website*: kegiatan untuk *maintenance website* perusahaan yang menggunakan *software share point*,
4. *Maintenance* Aplikasi Prodin: kegiatan pemeliharaan aplikasi perjalanan dinas,
5. *Maintenance* Aplikasi ProRBA: kegiatan pemeliharaan aplikasi manajemen risiko dan audit,
6. *Maintenance* Aplikasi ETMC, AMR: kegiatan pemeliharaan aplikasi ETMC dan AMR,
7. *Helpdesk* Aplikasi: kegiatan *helpdesk* Aplikasi.

Information Technology Program

This program is carried out by Information System Department that is responsible for ensuring all business process in the Company utilizes integrated Information Technology System, by which Company Business Process become highly safe, reliable, efficient and competitive (keep abreast of technology development) in providing service to customer, partner, Shareholders and other stakeholders, and maximizing financial performance and company performance according to risk management and Good Corporate Governance principles. IT work program consists or regular maintenance and development/investment. Regular maintenance and development/investment that were carried out in 2017 included:

Application Maintenance Program

1. Maintenance & ATS ERP: Support and Maintenance of Company's Enterprises Resource Planning app using Oracle,
2. Maintenance & ATS EAM: Support and Maintenance of Company's Enterprise Asset Management app using Maximo,
3. Website Maintenance: maintenance of company's website using share point software,
4. Prodin Application Maintenance: maintenance of business travel application,
5. ProRBA Application Maintenance: maintenance of risk and audit management application,
6. ETMC and AMR Application Maintenance: maintenance of ETMC and AMR application,
7. Application Help Desk: Implementation of Help Desk for Application.

Program Pemeliharaan Infrastruktur & Security

1. *Service Maintenance & Enterprise Agreement Microsoft*: kegiatan *maintenance support* dan pembayaran *enterprise agreement* Microsoft,
2. Extended Warranty SAN, License VMWare, License Veritas, dan *Maintenance Services*: pemeliharaan dan *maintenance* NAS SAN,
3. Pemeliharaan LAN/WAN dan *bandwidth management*: pemeliharaan dan *maintenance Bandwith Management*,
4. Pemeliharaan *Data Center* dan *Server* Kantor Pusat: pemeliharaan *server* dan *data center* perusahaan,
5. Pekerjaan *Helpdesk* dan *Desktop Support*: kegiatan Helpdesk IT,
6. Pemeliharaan *Enterprise Infrastructure Management* dan *Helpdesk System*: kegiatan pemeliharaan *enterprise infrastructure management* dan *Helpdesk system*,
7. Operasional Penambahan *Tape* dan *Disk*: kegiatan penambahan *tape* dan *disk* untuk perangkat TI,
8. Pemeliharaan dan *License* Perangkat Sekuriti Jaringan: kegiatan pemeliharaan dan lisensi perangkat *security* dan jaringan,
9. Pemeliharaan DRC (*Disaster Recovery Center*): kegiatan pemeliharaan DRC,
10. Sewa Jaringan WAN, internet dan VCON: sewa jalur WAN, internet dan VCON untuk komunikasi data dan suara,
11. Sewa *backup* akses Internet: sewa *backup* akses internet untuk keandalan jalur komunikasi.

Infrastructure Maintenance & Security Program

1. Service Maintenance & Microsoft Enterprise Agreement: maintenance support and payment of Microsoft Enterprise Agreement,
2. NAS Extended Warranty, VMWare License, Veritas License, and Maintenance Services: NAS maintenance and service,
3. LAN/WAN maintenance and bandwidth management: Bandwidth Management maintenance and service,
4. Data Service and Head Office Server maintenance: maintenance of company's server and data center,
5. Help Desk and Desktop Support work: IT Help Desk activity,
6. Enterprise Infrastructure Management and Help Desk System maintenance: maintenance of enterprises infrastructure management and Help Desk system,
7. Tape and Disk Addition operation: addition of tape and disk for IT devices,
8. Network Security Devices Maintenance and Licensing: maintenance and licensing of network security devices,
9. DRC (Disaster Recovery Center) maintenance: maintenance of DRC,
10. WAN, internet and VCON network subscription: subscription of WAN, internet and VCON network for data and sound communication,
11. Internet access backup service subscription: subscription of internet access backup service for reliability of communication line.

Investasi di Bidang TI

Program Investasi/Pengembangan TI di tahun 2017 antara lain:

1. Pekerjaan Implementasi ERP: melakuan perkuatan dan *upgrade* sistem aplikasi ERP perusahaan,
2. Pengadaan *Data Center Infrastructure Management* dan Perangkat *Firewall Data Center*; melakukan pengadaan perangkat dan *software* untuk *monitoring management Data center* dan Pengadaan Firewall,
3. Penggantian perangkat WAN Unit: melakukan penggantian perangkat jaringan di unit Indonesia Power yang sudah *absolute* dan tidak sesuai dengan kebutuhan,
4. *Upgrade Security System* IT PT Indonesia Power: *upgrade* perangakat *security* perusahaan baik di Kantor Pusat maupun di unit,
5. Pengembangan *Office Automation*,
6. Implementasi *Enterprise Project Management*.

IT Investment

IT Investment/Development program in 2017 consisted of:

1. ERP Implementation: strengthening and upgrade of company's ERP application system,
2. Procurement of Data Center Infrastructure Management and Firewall Data Center Devices; procurement of devices and software for Data center management monitoring and procurement of Firewall,
3. WAN Unit device replacement: replacement of network devices in Indonesia Power units that had been obsolete and unsuitable to meet the requirements,
4. IT System Security Upgrade: upgrade of company's security devices, both in the Head Office and in units,
5. Office Automation development,
6. Enterprise Project Management implementation.

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

Alokasi dana untuk investasi di bidang TI pada tahun 2017 adalah *disburse* sebesar Rp31.054.807.000.

Fund allocation for IT investment in 2017 was Rp31,054,807,000.

Tabel Investasi TI Tahun 2017 (Rp ribu)
Table: IT Investment in 2017 (Rp thousand)

Pekerjaan Investasi Work		Nilai Investasi (Rp ribu) Amount (Rp thousand)
Pengadaan *Data Center Infrastructure Management* dan Perangkat *Firewall Data Center*	Procurement of Data Center Infrastructure Management and Firewall Data Center devices	2.060.340
Penggantian-Pengembangan perangkat WAN Unit Pembangkit PT Indonesia Power	Replacement-Upgrade of WAN devices in Power Plant Unit of PT Indonesia Power	5.948.611
Pengadaan Jasa Implementasi *Enterprise Resource Planning* (ERP) PT Indonesia Power	Procurement of Enterprise Resource Planning (ERP) implementation service for PT Indonesia Power	10.683.333
Upgrade Security System IT PT Indonesia Power	PT Indonesia Power IT System Security upgrade	3.691.224
Pengembangan *Office Automation* PT Indonesia Power	Office Automation development in PT Indonesia Power	5.335.549
Pekerjaan Implementasi *Enterprise Project Management*	Enterprise Project Management implementation	3.335.750
Jumlah Investasi	**Total Investment**	**31.054.807**

Pengembangan Kompetensi SDM bagian TI

Pada tahun 2017 terdapat pelatihan dan pengembangan SDM di bidang TI untuk meningkatkan keandalan operator TI yang selanjutnya dapat meningkatkan keandalan TI Perusahaan. Berikut adalah sertifikasi SDM bagian TI di tahun 2017:

Human Resource Development in IT Department

HR training and development for IT department were conducted in 2017 to increase IT operator reliability, which eventually would increase IT reliability in the Company. Below are HR certifications in IT department throughout 2017:

Tabel Sertifikasi SDM bidang TI
Table: IT Department HR Certification

No	Nama Sertifikasi Name of Certification	Jabatan Position		Jumlah Pegawai Number of employee
1.	Certified Ethical Hacker	SPS Operasional Infrastruktur	SPS Infrastructure Operation	4
		Ahli Muda Perencanaan Sistem Informasi	Information System Planning Junior Expert	
		Ahli Muda Operasional Infrastruktur	Infrastructure Operation Junior Expert	
		Ahli Muda Sistem Informasi UJH	MSU Information System Junior Expert	
2.	Oracle SOA Suite 12c Certified Implementation Specialist	SPS EAM	SPS EAM	2
		Ahli Muda ERP	ERP Junior Expert	
3.	IBM Certified Deployment Professional - Maximo Asset Management v7.6 Functional Analyst	SPS EAM	SPS EAM	2
		Ahli Muda EAM	EAM Junior Expert	

No	Nama Sertifikasi Name of Certification	Jabatan Position		Jumlah Pegawai Number of employee
4.	Citrix Certified Associate Virtualization	SPS Operasional Infrastruktur	SPS Infrastructure Operation	4
		Ahli Muda Operasional Infrastruktur	Infrastructure Operation Junior Expert	
		Ahli Madya Perencanaan Sistem Informasi	Information System Planning Intermediate Expert	
5.	ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management	Manajer Operasional Sistem Informasi Ahli Madya Perencanaan Sistem Informasi	Information System Operation Manager Information System Planning Intermediate Expert	17
		Ahli Muda Perencanaan Sistem Informasi	Information System Planning Junior Expert	
		Ahli Muda ERP	ERP Junior Expert	
		SPS EAM	SPS EAM	
		Ahli Muda Sistem Informasi UJH	MSU Information System Junior Expert	
		Ahli Muda Sistem Informasi UP Bali	Information System Junior Expert – Bali GU	
		Ahli Muda Sistem Informasi UJP Palabuhan Ratu	Information System Junior Expert – Palabuhan Ratu GSU	
		Ahli Muda Sistem Informasi UPJP Priok	Information System Junior Expert – Priok GGSU	
		Ahli Muda Sistem Informasi UP Suralaya	Information System Junior Expert – Suralaya GU	
		Ahli Muda Sistem Informasi UP Grati	Information System Junior Expert – GU Grati	
		Ahli Muda Sistem Informasi UP Semarang	Information System Junior Expert – Semarang GU	
		Ahli Muda Sistem Informasi UP Bali	Information System Junior Expert – Bali GU	
		Ahli Muda Oprasional Aplikasi	Application Operation Junior Expert	
		SPS Sistem Informasi UJP Adipala	Information System SPS – Adipala GSU	
		Ahli Muda Office Automation	Office Automation Junior Expert	

Pengukuran *Maturity* Proses TI

Pengelolaan aset informasi sangat penting agar data-data yang dapat disediakan secara tepat, akurat dan cepat sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Untuk pemanfaatan sistem informasi yang optimal, IT melakukan pengukuran proses *maturity assessment* dan kinerja *Information Capital Readiness* (ICR) yang terdiri dari:

1. **Pengukuran *Maturity* Bisnis Proses**
   Merupakan mekanisme *assessment* tata kelola IT untuk mengevaluasi tingkat kematangan penerapan tata kelola IT dalam suatu perusahaan. Hasil pengukuran *maturity* bisnis proses tahun 2017 adalah 3,86.

Measurement of IT Process Maturity

Information asset management is highly important to provide appropriate, accurate and prompt data for consideration in decision making. For optimum utilization of information system, IT department conducted maturity assessment process and Information Capital Readiness (ICR) performance assessment which consisted of:

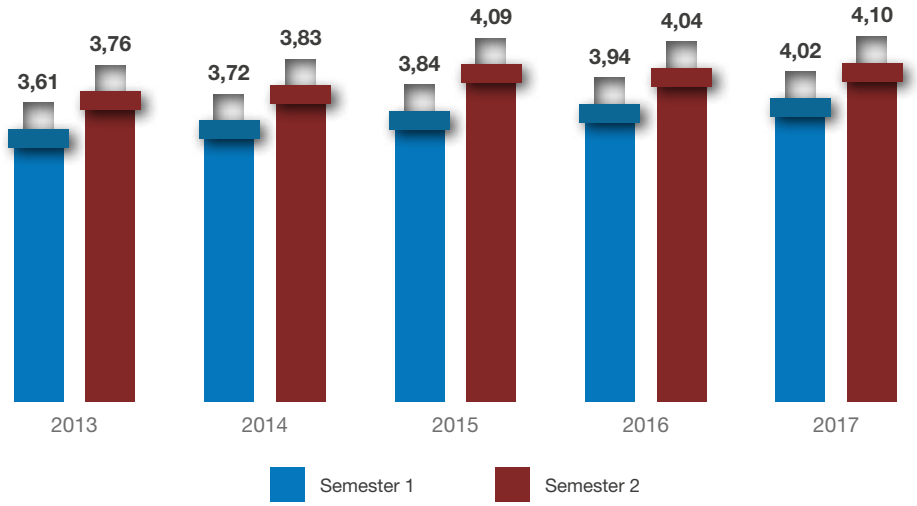
1. **Measurement of Business Process Maturity**
   This is an assessment mechanism for IT governance to evaluate the maturity of IT governance implementation in a company. Result of measurement of business process maturity in 2017 was 3.86.

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

2. **Pengukuran *Key Performance Indicator* (KPI)**
Merupakan pengukuran indikator KPI kinerja hasil pada kriteria Infrastruktur (jaringan, *Server, Security*) dan KPI pemanfaatan aplikasi bisnis. Metode pelaksanaan *assessment* dilakukan melalui survei terhadap para pelaku kontrol, pemilik proses, pengelola TI, maupun pengelola kebijakan TI. Hasil pengukuran KPI tahun 2017 adalah 4,34. Pada tahun 2017 diperoleh pencapaian skor ICR secara keseluruhan sebesar 4,02 di semester 1 dan 4,10 di semester 2.

2. **Key Performance Indicator (KPI) measurement**
This is a measurement of the performance of Infrastructure KPI criterion (network, Server, Security) and business application utilization KPI. Assessment was conducted using survey method to controllers, process owner, IT manager, and IT policy manager. The result of KPI measurement in 2017 was 4.34. In 2017, the overall ICR score was 4.02 in the first semester and 4.10 in the second semester.

Tabel Sertifikasi SDM bidang TI
ICR Maturity Level 2013-2017



Implementasi ISO/IEC 27001:2013 *Information Security Management System*

Indonesia Power sebagai perusahaan energi terpercaya yang tumbuh berkelanjutan senantiasa berusaha untuk melakukan perbaikan dalam tata kelola perusahaan. Salah satu yang menjadi perhatian utama dalam perbaikan proses bisnis adalah terkait sistem manajemen keamanan Informasi. Setelah melalui proses implementasi dan persiapan sertifikasi, pada tanggal 18 Agustus 2017, Indonesia Power berhasil mendapatkan sertifikat *International Organization for Standardization* (ISO) 27001:2013 untuk *Information Security Management System* (ISMS) atau Sistem Manajemen Keamanan Informasi dengan lingkup Departemen Sistem Informasi.

Implementation of ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management System

As a reliable energy company with sustainable growth, Indonesia Power always puts best efforts to make improvement of corporate governance. One of its main concerns in business process improvement is related to Information security management system. Following the implementation process and preparation for certification, on August 18, 2017 Indonesia Power managed to obtain International Organization for Standardization (ISO) 27001:2013 certificate for Information Security Management System (ISMS) in the Information System Department.



bsi.

By Royal Charter

Certificate of Registration

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO/IEC 27001:2013

This is to certify that:

PT INDONESIA POWER
Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta Selatan
Indonesia 12950

Holds Certificate No: **IS 675766**

and operates an Information Security Management System which complies with the requirements of ISO/IEC 27001:2013 for the following scope:

The Management of Information Security in the provision Department of Information System.
This is in accordance to the Statement of Applicability 13.03.04 version 3.0 dated 6 July 2017

For and on behalf of BSI:

Chris Cheung, Head of Compliance & Risk - Asia Pacific

Original Registration Date: 2017-08-18
Latest Revision Date: 2017-08-18

Effective Date: 2017-08-18
Expiry Date: 2020-08-17

Page: 1 of 2

...making excellence a habit.

Pencapaian ISO 27001:2013 memberi arti besar bagi Indonesia Power, karena standardisasi seperti ini selain mampu meningkatkan kepercayaan *stakeholder*, juga memperkuat proses bisnis dan perbaikan-berkelanjutan (*continuous improvement*), serta meningkatkan pengamanan teknologi informasi. Dengan demikian, citra organisasi dan daya saing juga meningkat, sehingga membuka peluang untuk pengembangan organisasi di masa mendatang.

Obtaining ISO 27001:2013 has a significant meaning for Indonesia Power as such standardization will build stakeholders confidence, in addition to strengthen business process and continuous improvement, as well as will enhance information technology security. Therefore, corporate image and competitiveness will also increase, which eventually will open opportunities for organizational development in the future.

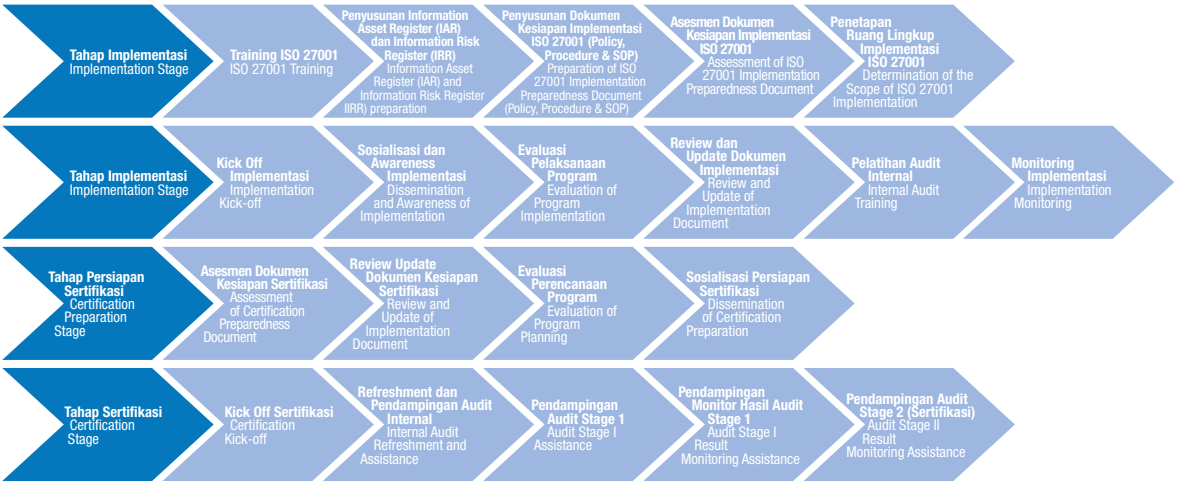
Melindungi informasi berarti menjaga kerahasiaan, yaitu memastikan informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki wewenang. Juga menjaga integritas, memastikan bahwa informasi tetap akurat dan lengkap, serta informasi tersebut tidak dimodifikasi tanpa otorisasi yang jelas. Dan terakhir, memastikan bahwa informasi dapat diakses oleh pihak yang memiliki wewenang ketika dibutuhkan.

Protecting information means keeping the confidentiality, i.e. ensuring that information can only be accessed by authorized party. This also includes keeping integrity, ensuring accuracy and completeness of the information, and prevention of modification without proper authorization. Finally, ensure that information is accessible for authorized party whenever necessary.

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

Adapun tahapan yang telah dilalui Indonesia Power untuk mendapatkan sertifikasi adalah sebagai berikut:

There are stages completed by Indonesia Power in obtaining the certification, as illustrated below:



INOVASI DAN TEKNOLOGI PEMBANGKITAN

POWER GENERATION INNOVATION AND TECHNOLOGY



Keandalan pembangkit menjadi salah satu tujuan dalam operasional Indonesia Power dalam penyediaan energi listrik. Oleh karena itu, Indonesia Power memberikan perhatian besar pada teknologi yang tepat sasaran dan ramah lingkungan. Pemanfaatan teknologi pembangkitan yang mutakhir dan tepat guna sangat vital, mengingat bidang usaha yang dijalankan Perusahaan terutama memproduksi energi listrik. Bahkan di bidang jasa, Perusahaan juga mengoperasikan dan melakukan perawatan pembangkit.

Power generation reliability has become one of the objectives of Indonesia Power operation in the provision of electricity. Therefore, Indonesia Power put great concern on the efficient and environmentally friendly technology. Utilization of the latest and efficient power generation technology is vital, since Company's main business operation is electrical energy production. In addition, the Company also provides power generator operation and maintenance service.

INOVASI DAN TEKNOLOGI PEMBANGKITAN

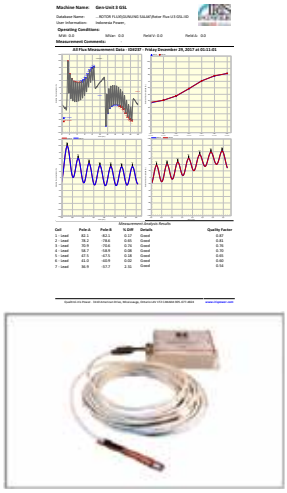
POWER GENERATION INNOVATION AND TECHNOLOGY

Investasi Teknologi Pembangkitan

Teknologi pembangkitan memiliki tujuan dan manfaat dalam upaya optimalisasi produksi energi listrik melalui efisiensi penggunaan bahan bakar. Oleh karena itu, pemutakhiran teknologi pembangkitan senantiasa dilakukan. Untuk mendukung pemutakhiran tersebut diperlukan investasi dalam teknologi pembangkitan. Investasi pada teknologi pembangkitan pada tahun 2017 berupa pengadaan dan pembiayaan pemeliharaan diantaranya sebagai berikut:

Power Generation Technology Investment

Power generation technology has its purpose and brings benefit in the optimization of electrical energy production through fuel efficiency. Therefore, the Company continuously seeks for update of power generation technology. To support such technology update, investment in power generation technology is required. Investment in power generation technology in 2017 was made in the form of procurement and maintenance funding as described below:



Rotor Flux Generator

Memantau kondisi *generator real time* secara *online* untuk mempercepat deteksi degradasi kinerja.

Online, real time generator condition monitoring for faster detection of performance degradation.



Automatic Measuring Machine

Mengukur secara presisi *part* dalam format data digital untuk QC dan *reverse engineering.*

Precisely measures parts in digital data format for QC and reverse engineering.



Insitu Low Speed Balancing

Mempermudah proses *balancing* peralatan *rotary* tanpa perlu dibawa ke *workshop.*

Facilitates balancing of rotary devices without moving them to the workshop

Teknologi dimanfaatkan untuk mempercepat proses identifikasi permasalahan unit, proses QC, *reverse engineering* dan proses *overhaul* insitu. Dengan penggunaan teknologi baru, sekaligus meningkatkan kapabilitas dan kompetensi personil dalam rangka *Operation and Maintenance Excellence* dan mendukung *Business Development Excellence*.

Technology is utilized to accelerate identification of unit problems, QC process, reverse engineering and on-site overhaul process. Utilization of new technology simultaneously increases personnel capability and competency for Operation and Maintenance Excellence and supports Business Development Excellence.

Program Pengembangan Teknologi Pembangkitan

Indonesia Power melakukan pengelolaan teknologi pembangkitan secara berkesinambungan dan berkala. Pada tahun 2017 Indonesia Power menyusun program pengembangan teknologi pembangkitan diantaranya adalah sebagai berikut:

Power Generation Technology Development Program

Indonesia Power continuously and periodically performs power generation technology management. In 20177, Indonesia Power developed power generation technology development program, which among other things included:

Tabel Program Pengembangan Teknologi Pembangkitan Tahun 2017
Table: Power Generation Technology Development Program 2017

No	Program/Kegiatan Program/Activity	Lokasi Location	Penjelasan Program Beserta Tujuan Program Program Description and Objectives	
1.	Automatic Measuring Machine	Tanjung Priok	Proses QC pada penerimaan material GT pada overhaul memerlukan ketepatan dan kecepatan karena jumlahnya yang cukup banyak. Alat ini dapat memberikan data hasil pengukuran secara digital dengan sangat presisi dalam waktu singkat, sehingga mempercepat proses QC fisik dan berpotensi untuk kegiatan *reverse engineering*.	QC process during receipt of GT material in overhaul requires accuracy and speed in consideration of the large number of materials. This device is capable of providing digital measurement result data precisely and promptly, which expedites physical QC process and has great potential for reverse engineering activity.
2.	Pengadaan *Oil Analyzer Portable* Procurement of Portable Oil Analyzer	Suralaya	Jumlah peralatan yang harus dimonitor kualitas pelumas sangat banyak, parameter yang dimonitor pun tidak sedikit. Alat ini mempercepat proses pengambilan data tribology pelumas dan mempermudah proses pengambilan keputusan terkait kondisi peralatan.	There are a large number of devices with lubricant that needs to be monitored, in addition to monitoring of numerous parameters. This device speeds up lubricant tribology data collection and facilitates decision making process related to device condition.
3.	*Upgrade* MPC *Coal Feeder* Unit 1-4	Suralaya	*Controller Coal Feeder* sudah *obsolete* dari pabrikan dan issue kompatibilitas menjadi kendala jika diganti dengan *controller* lain yang sekelas. Program ini untuk menjaga kandalan sistem *coal feeder*.	Coal Feeder Controller had been obsolete from the manufacturer and compatibility issue arose when replacing it with other controller in the class. This program aimed to maintain reliability of the coal feeder system.
4.	Pengadaan Rotor Flux Generator Unit 3 Procurement of Rotor Flux Generator Unit 3	Kamojang	Degradasi insulasi *rotor winding generator* dapat menjadi salah satu indikator penurunan kinerja generator. Alat ini dapat menjadi metode online untuk memonitor *flux* yag merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan informasi *real time*.	Degraded rotor winding generator insulation may be one of the indicators of generator performance decline. This device can be an online method to monitor the flux, an indicator that provides real time information.
5.	Retrofit DCS Unit 1 PLTP Gunung Salak	Kamojang	DCS sudah obsolete dari pabrikan dan issue kompatibilitas menjadi kendala jika diganti dengan *controller* lain yang sekelas. Program ini untuk menjaga kandalan pembangkit.	DCS had been obsolete from the manufacturer and compatibility issue arose when replacing it with other controller in the class. This program aimed to maintain power generator reliability.
6.	Retubing HP economizer, LP Superheater, HP Evaporator HRSG 1.1 dan 2.3	Semarang	Persentase tube HRSG yang di-plug mempengaruhi efektivitas perpindahan panas dan mengakibatkan *derating* ST. Program ini untuk mengembalikan kinerja HRSG.	The percentage of plugged HRSG affects heat transfer effectiveness and causes ST derating. This program aimed to restore HRSG performance.
7.	*Dredger* Untuk Penanganan Sedimentasi di Kanal Water Intake PLTGU Grati Dredger for Sedimentation Management at Water Intake Channel of CCPP Grati	Perak Grati	Sedimentasi *water intake* menjadi masalah tahunan, sementara proses pengadaan jasa *dredging* memakan waktu cukup panjang. Program ini mempermudah proses penjadwalan kegiatan *dredging* dan mengurangi potensi derating ST.	Water intake sedimentation is a recurring problem every year, but procurement of dredging service is lengthy. This program facilitates scheduling of dredging activity and reduces ST derating potential.

INOVASI DAN TEKNOLOGI PEMBANGKITAN

POWER GENERATION INNOVATION AND TECHNOLOGY

No	Program/Kegiatan Program/Activity	Lokasi Location	Penjelasan Program Beserta Tujuan Program Program Description and Objectives	
8.	*On-site Low Speed Balancing Machine & Accessories*	Unit Jasa Pemeliharaan Maintenance Service Unit	Jumlah *rotating equipment* yang harus dipelihara pada periode *overhaul* cukup banyak, salah satu pekerjaan yang dapat dilakukan pada periode tersebut adalah *balancing* untuk memastikan keandalan peralatan. Program ini membantu mempercepat proses *overhaul* tanpa ketergantungan pihak lain dan meningkatkan *skill* personil UJH.	There are great numbers of rotating equipment that need maintenance in the overhaul period. One of the works that can be carried out during this period is balancing, to ensure device reliability. This program expedites overhaul process without dependence to other party and increases MSU personnel's skill.
9.	*Simulator* PLTU Banten 3 Lontar SPP Banten 3 Lontar Simulator	Banten Lontar	Rotasi operator yang cukup cepat sesuai kebutuhan organisasi memerlukan penyiapan pengganti, sementara sebagian kompetensi operator hanya didapt dari pengalaman operasional. Program ini mempercepat peningkatan keahlian dan pengalaman operator pembangkit.	Rapid operator rotation in response to the demand from the organization requires preparation of replacement operator, while some operators achieved their competencies only through operational experience. This program expedites enhancement of power generator operators' skill and experience.

Inovasi Teknologi Pembangkitan

Sebagai salah satu Perusahaan di industri pembangkitan, Indonesia Power melakukan inovasi dalam upaya meningkatkan keandalan pembangkit yang dimiliki dan dikelola. Inovasi teknologi pembangkitan diharapkan memberikan manfaat positif berupa peningkatan keandalan, mutu, efektivitas, dan efisiensi pembangkitan. Peningkatan keandalan pembangkit merupakan kunci terjaganya keberlangsungan Indonesia Power sebagai perusahaan pembangkitan, baik di industri nasional maupun internasional.

Power Generation Technology Innovation

As one of power plant companies in the country, Indonesia Power makes innovation in order to improve the reliability of power plants under its ownership and management. Power generation technology innovation is expected to bring benefits in the form of improvement of power generation reliability, quality, effectiveness and efficiency. Improved reliability of power generation is the key factor in maintaining Indonesia Power's continuity as a power generation company, both in national and international industry.

Bidang Inovasi yang dikembangkan Innovation Development Area	Pembangkitan, *Technical Supporting, Non Technical Supporting Aplication, and Non Technical Supporting Management*	Power generation, Technical Supporting, Non Technical Supporting Application, and Non Technical Supporting Management
Judul Inovasi yang dikembangkan Name of Innovation Development Area	Inovasi Strategis: 5E (Program 5E: *Enhancing & Embedding Energy Efficiency Excellence*) atau Pembudayaan & Peningkatan Manajemen Efisiensi Energi (PPE)	Strategic Innovation: 5E (5E Program: Enhancing & Embedding Energy Efficiency Excellence
Tujuan Inovasi tersebut bagi Perusahaan Purpose of the Innovation for the Company	Menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Perusahaan	To reduce Cost of Supply (COS)
Dampak dari penerapan Inovasi tersebut Impact of Innovation	**Tabel Efisiensi 5E** I **Table: 5E Efficiency**	

	Rupiah (miliar) Billion Rupiah	Kcal/Kwh
2017	287,75	660,28
2018	671,027	1614,69

Tahun 2017, Indonesia Power mengikuti Seleksi Penghargan Karya Inovasi (SPKI) tingkat nasional PT PLN (Persero) dan meraih juara 1 untuk kategori Pembangkitan dengan judul makalah "Re-engineering Gland Washer dan Gland Follower PCV Reheat Spray untuk Mencegah Derating Unit 1-4 PLTU Suralaya"

In 2017, Indonesia Power participated in national level of "Seleksi Penghargan Karya Inovasi (SPKI)" PT PLN Persero and won 1st place for Power Generator category with paper "Re-engineering Gland Washer and Gland Follower PCV Reheat Spray for Prevent Derating of Unit 1-4 Suralaya SPP"

SISTEM MANAJEMEN INDONESIA POWER (INPOWER IMS)

INDONESIA POWER MANAGEMENT SYSTEM (INPOWER IMS)



Indonesia Power merancang Indonesia Power - *Integrated Management System* (InPower IMS) yang merupakan integrasi dari berbagai standar, sistem manajemen, metode yang relevan berdasarkan *best ractice* dan standar internasional. InPower IMS telah diterapkan sejak tahun 2013.

InPower IMS yang merupakan sistem terintegrasi berbagai standar/sistem/metode, yaitu:

1. Sistem Manajemen K3 OHSAS 18001:2007,
2. Sistem Manajemen Energi ISO 50001:2011,
3. Sistem Manajemen Aset ISO 55001:2014,
4. Societal Security Business Continuity Management Systems ISO 22301: 2012,
5. Information Security Management ISO 27001:2013,
6. Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015,
7. *Risk Management-Principles and Guidelines* ISO 31000:2009 (tidak dilakukan sertifikasi),
8. Sistem Manajemen Kemanan Rantai Pasok ISO 28000:2007,

Indonesia Power designed “Indonesia Power Integrated Management System” (InPower IMS) that is an integration of various standards, management systems, and relevant methods based on the best practice and international standard. InPower IMS has been implemented since 2013.

InPower IMS is a system that integrates various standards/systems/methods, namely:

1. OHSAS 18001:2007 OHS Management System,
2. ISO 50001:2011 Energy Management System,
3. ISO 55001:2014 Asset Management System,
4. Societal Security Business Continuity Management Systems ISO 22301: 2012,
5. Information Security Management ISO 27001:2013,
6. ISO 14001:2015 Environment Management System,
7. Risk Management-Principles and Guidelines ISO 31000:2009 (not certified),
8. ISO 28000:2007 Supply Chain Security Management System,

SISTEM MANAJEMEN INDONESIA POWER (INPOWER IMS)

INDONESIA POWER MANAGEMENT SYSTEM (INPOWER IMS)

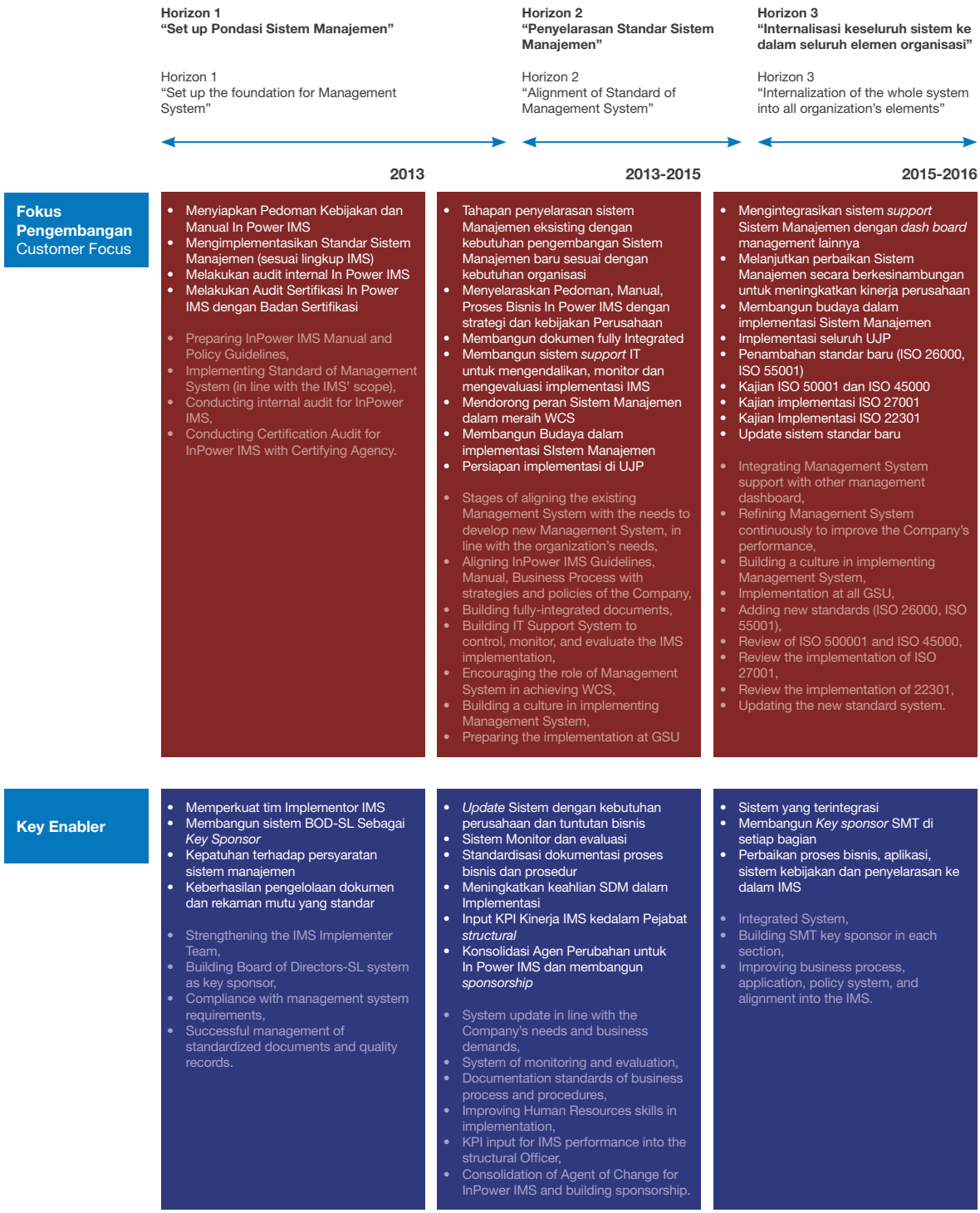
9. Sistem Manajemen Pengamanan (Peraturan Kapolri No. 24 Tahun 2007),
10. Kriteria *Baldrige* (tidak dilakukan sertifikasi),
11. *Guideline on Social Responsibility* ISO 26000:2010 (tidak dilakukan sertifikasi),
12. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012),
13. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.

9. Security Management System (Regulation of the Head of Indonesian National Police No. 24 of 2007),
10. Balridge criteria (no certification),
11. ISO 26000:2010 Guideline on Social Responsibility (not certified),
12. Occupational Health and Safety Management System (Government Regulation No. 50 of 2012),
13. ISO 9001:2015 Quality Management System,



Secara lebih rinci, perjalanan implementasi InPower IMS dapat digambarkan sebagai berikut:

Detailed InPower IMS implementation is illustrated below:



SISTEM MANAJEMEN INDONESIA POWER (INPOWER IMS)

INDONESIA POWER MANAGEMENT SYSTEM (INPOWER IMS)

Perancangan implementasi InPower IMS dimulai pada bulan November 2012 sampai dengan bulan April 2013, fokus kepada 6 (enam) sistem manajemen (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 28000, SMP, SMK3) dan mendapat sertifikat dari PT Sucofindo pada tanggal 22 Desember 2013. Pada tahun 2015 dimulai perencanaan implementasi ISO 55001:2014 Sistem Manajemen Aset, sebagai pengganti PAS 55:2012 yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi dan implementasi ISO 26000 dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). Pada awal tahun 2016 dirancang implementasi ISO 50001:2011 Sistem Manajemen Energi.

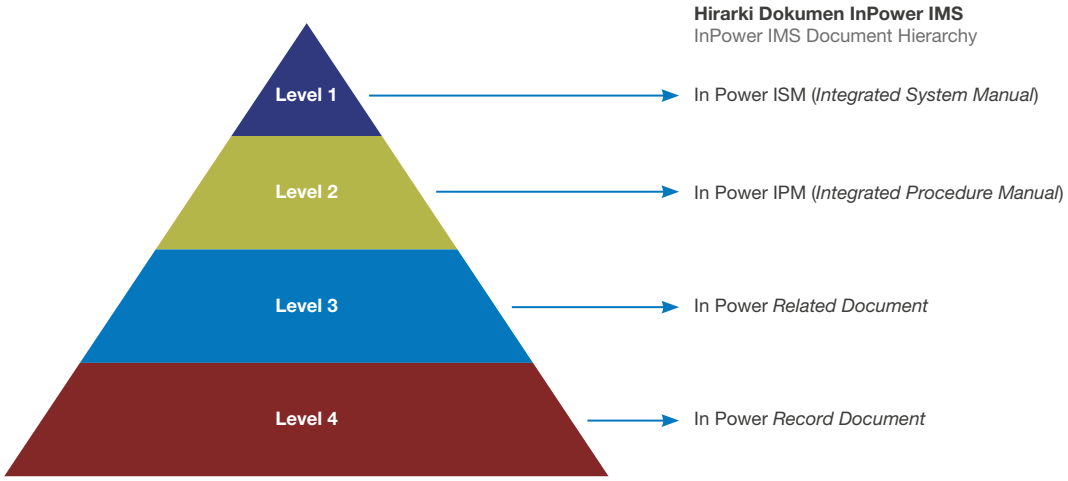
InPower IMS implementation plan started on November 2012 to April 2013, with focus on 6 (six) management systems (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 28000, SMP, SMK3) and resulted in a certificate issued by PT Sucofindo on December 22, 2013. ISO 55001:2014 Asset Management System implementation planning started in 2015 to replace PAS 55:2012 that had been declared inapplicable and implementation of ISO 26000 in CSR (Corporate Social Responsibility) execution. Implementation of ISO 50001: 2011 Energy Management System was planned in the beginning of 2016.

Hirarki Dokumen InPower IMS

Hirarki Dokumen InPower IMS disusun ke dalam empat level yang digambarkan sebagai berikut:

InPower IMS Document Hierarchy

InPower IMS Document Hierarchy consists of four levels as illustrated below:



Level 1: Indonesia Power *Integrated System Manual* (InPower ISM)

Merupakan dokumen yang berisi:

a. Lembar kendali/lembar pengesahan dokumen,
b. *Cross Reference*: merupakan tabel keterkaitan antar standar,
c. Bab Pendahuluan: berisi penjelasan awal mengenai InPower IMS,
d. Bab Profil Organisasi: berisi penjelasan mengenai profil Indonesia Power dan kaitannya dengan implementasi InPower IMS,
e. Proses Bisnis: berisi gambaran proses bisnis baik secara korporat, maupun proses bisnis unit,
f. Kewenangan dan Tanggung Jawab.

Level 1: Indonesia Power Integrated System Manual (InPower ISM)

This includes documents containing:

a. Control sheet/document approval sheet,
b. Cross Reference: table containing interdependence between standards,
c. Introduction: contains preliminary description of InPower IMS,
d. Organizational Profile: description of Indonesia Power profile and its relation to implementation of InPower IMS,
e. Business Process: description of business process at corporate and unit level,
f. Authority and Responsibility.

Level 2: Indonesia Power *Integrated Procedure Manual* (InPower IPM)
Merupakan dokumen yang berisi sekumpulan rincian prosedur beserta lampirannya sebagai bukti dari implementasi kebijakan.

Level 3: *Indonesia Power Related Document*
Dokumen yang digunakan sebagai petunjuk dalam melaksanakan sebuah proses kerja termasuk di dalamnya antara lain surat keputusan, surat edaran, Instruksi Kerja/Petunjuk Teknis, Prosedur Tetap (PROTAP), *manual book,* gambar, dan lain-lain.

Level 4: *Indonesia Power Record Document*
Dokumen yang berisikan formulir dan dokumen sejenis sebagai bukti bahwa suatu aktivitas dilaksanakan. Untuk memastikan kesesuaian proses kerja actual dengan dokumentasi InPower IMS yang tersedia, Indonesia Power mengkaji ulang isi dokumen InPower IMS ini secara berkala setiap satu tahun sekali. Kaji ulang mencakup kaji ulang dokumen, audit sistem dan tinjauan manajemen dengan lingkup kebijakan, sasaran dan proses-proses di dalamnya untuk menjamin efektivitas dan konsistensi kebijakan dan rencana bisnis perusahaan, dan merespon terhadap perubahan harapan pelanggan, perundangan dan persyaratan lainnya, tata kelola perusahaan serta dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk relevansi dan konsistensi terhadap perencanaan strategi Perusahaan

Sertifikasi Manajemen Energi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat dari tahun ke tahun biasanya diiringi dengan kebutuhan akan pasokan energi listrik yang juga terus bertambah setiap tahunnya. Indonesia Power sebagai perusahaan pembangkit energi listrik, tentu saja dengan meningkatnya kebutuhan energi listrik tersebut akan meningkatkan pendapatan bagi perusahaan, namun disisi lain peningkatan kapasitas produksi juga akan menguras energi yang begitu besar dan juga akan meningkatkan emisi gas rumah kaca.

Untuk itulah *The International Organization for Standardization* (ISO) mengeluarkan ISO 50001 Sistem Manajemen Energi. Standar ini adalah standar yang digunakan untuk mengelola kinerja energi termasuk efisiensi dan konsusmsi energi. Konsep ISO 50001 ini menggunakan model Sistem Manajemen dengan pendekatan siklus *Plan, Do, Check, Action* untuk perbaikan berkelanjutan.

Level 2: Indonesia Power Integrated Procedure Manual (InPower IPM)
This is a document that consists of a set of procedure detail and the attachment thereto as a proof of policy implementation.

Level 3: Indonesia Power Related Document
Documents that are used as guidelines in performing work process, including decrees, circulars, Work Instruction/Technical Guidelines, Standard Operating Procedure (SOP), manual book, images, etc.

Level 4: Indonesia Power Record Document
This includes documents containing forms and similar documents as a proof that an activity has been carried out. To ensure consistency between the actual work process and the available InPower IMS documentation, Indonesia Power reviews the contents of InPower IMS documents regularly on annual basis. Review includes document reviews, system audit, and management review that covers policies, targets, and process therein to ensure effectiveness and consistency between policy and company's business plan, and to respond to changes of customer expectation, laws and regulations and other requirements, corporate governance, as well as the development of science and technology with regard to the relevance to and consistency with Company's strategic planning.

Energy Management Certification

The increasing growth of Indonesian economic year over year is usually accompanied by increasing demand for electricity supply. With the increasing demand for electricity, Indonesia Power as a power generator company will have its revenue increase as well. On the other hand, increase in production capacity requires a great amount of energy and increase greenhouse gas emission.

Therefore, The International Organization for Standardization (ISO) issues ISO 50001 Energy Management System. This is the standard used to manage the energy performance, including efficiency and energy consumption. The idea behind ISO 50001 uses Management System model with an approach to Plan, Do, Check, Action cycle for improvement of sustainability.

SISTEM MANAJEMEN INDONESIA POWER (INPOWER IMS)

INDONESIA POWER MANAGEMENT SYSTEM (INPOWER IMS)

Indonesia Power sebagai perusahaan yang membutuhkan sumber energi yang besar, sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 3, maka diwajibkan untuk menerapkan Manajemen Energi. Untuk itulah PT Indonesia Power berkomitmen untuk menerapkan manajemen energi berpedoman pada standar ISO 50001 Sistem Manajemen Energi.

Kebutuhan penerapan standar sistem manajemen tersebut didorong oleh dua faktor diantaranya:

1. Harapan dan tuntutan *stakeholders* terhadap kinerja Indonesia Power yang senantiasa meningkat dan efisien,
2. Pengelolaan Manajemen Energi yang bertujuan melakukan efisiensi terhadap penggunaan energi yang komprehensif, sistematis berorientasi pada tujuan dan sasaran yang berkelanjutan.

Seperti halnya untuk sertifikasi implementasi Sistem Manajemen berbasis ISO yang lainnya maka audit yang dilakukan haruslah dilakukan oleh Badan Audit Sertifikasi baik dalam negeri maupun luar negeri independen, kompeten dan terakreditasi baik secara nasional atau internasional.

Pelaksanaan audit sertifikasi ISO 55001 ini yang keseluruhan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh PT BSI Group Indonesia dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan antara lain:

1. *Gap Assessment* bertujuan untuk memetakan kebutuhan dan kecukupan dokumen serta implementasi di lapangan guna memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan standar.
2. *Gap Assessment* dilaksanakan pada tanggal 11-15 April 2016 dengan *sampling* Kantor Pusat, UP Suralaya, UJP Palabuhan Ratu,
3. *Audit Stage* I bertujuan untuk memastikan kesiapan *auditee* dalam menerapkan sistem manajemen yang akan digunakan dilaksanakan pada tanggal 9-11 April 2017 dilakukan di Kantor Pusat dan UP Saguling,
4. *Audit Stage* II bertujuan untuk melihat kesesuaian antara penerapan standar dilingkungan organisasi *auditee* dengan persyaratan standar sistem manajemen yang digunakan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei s.d 10 Juni 2017 dilaksanakan di Kantor Pusat, UPJP Kamojang, UJP Palabuhan Ratu, UP Suralaya, dan UP Perak Grati, dengan memeriksa secara bersamaan terhadap performa energi yang dikelola oleh UJH.

Pursuant to Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 14 of 2002, Article 3, it is mandatory for Indonesia Power -as a company that consumes a large energy source- to implement Energy Management. Therefore, PT Indonesia Power is committed to implement the energy management according to ISO 50001 Energy Management System standard.

The need to implement management system standard is driven by two factors, i.e.:

1. Stakeholders' expectations and demands for the increasing and efficient performance of Indonesia Power.
2. Energy Management that aims at efficiency in comprehensive, systematic energy utilization that is oriented towards sustainable goals and objectives.

Similar to any other ISO-based Management System certification implementation, audit should be conducted by Certification Audit Agency, both domestic and international, which is independent, competent, and well accredited nationally or internationally.

ISO 55001 certification audit activities were carried out by PT BSI Group Indonesia through several stages of activities, such as:

1. Gap Assessment, which aims to map needs, document adequacy and field implementation to meet the standard requirements.
2. Gap Assessment was conducted on April 11-15, 2016, with sampling from Head Office, Suralaya GU, Palabuhan Ratu GSU,
3. Audit Stage I aims to ensure preparedness of the auditee in implementing management system that will be used; audit was conducted on April 9-11, 2017, in the Head Office and Saguling GU,
4. Audit Stage II aims to observe consistency between implementation of the standard in auditee's organization and the standard requirement of the management system used; audit stage II was conducted on May 30-June 10, 2017, in the Head Office, Kamojang GGSU, Palabuhan Ratu GSU, Suralaya GU and GU Perak Grati, by concurrently examining energy performance managed by MSU.

Pada saat *Closing Audit* yang dilaksanakan tanggal 10 Juni 2016 di Kantor Pusat, Auditor BSI menyatakan Indonesia Power direkomendasikan untuk memperoleh sertifikat ISO 50001:2011 Sistem Manajemen Energi. Pada Tanggal 25 Agustus 2016 terbitlah Sertifikat ISO 50001 Sistem Manajemen Energi yang berlaku selama tiga tahun, hingga 24 Agustus 2019.

During the Closing Audit on June 10, 2016 in Head Office, Auditor from BSI stated that Indonesia Power is recommended to obtain ISO 50001:2011 Energy Management System certification. On August 25, 2016, ISO 50001 Energy Management System certificate was issued and declared valid for three years, until August 24, 2019.

Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Informasi yang dimiliki suatu perusahaan merupakan aset yang sangat berharga sehingga keberadaannya mesti diamankan jangan sampai jatuh ke pihak yang tidak berkepentingan atau yang tidak berhak mendapatkannya. Oleh karena itu keamanan dalam mengelola data dan informasi menjadi bagian yang penting dan tidak terpisahkan dalam pengelolaan organisasi agar bisa berkembang dan *sustain* menghadapi tantangan global yang semakin sulit dan kompetitif.

Information Security Management System

Information owned by a company is a highly valuable asset that protection is required to avoid disclosure to unauthorized or ineligible party. Therefore, data and information management security become an important and inseparable part to organization management to grow and sustain in facing the increasingly tight and competitive global challenge.

Sejalan dengan penjelasan diatas, pemerintah melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan peraturan menteri Nomor 04 tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi. Di dalam peraturan tersebut bagi Perusahaan pelayanan publik seperti Indonesia Power yang berdasarkan asas risiko termasuk kategori penyelenggara Sistem Elektronik tinggi maka diharuskan menerapkan ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Untuk memenuhi perturan perundangan tersebut di atas serta untuk tujuan yang lebih strategis seperti yang diuraikan di awal maka Indonesia Power bertekad untuk mengimplementasikan dan melakukan sertifikasi ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi secara bertahap dengan dimulai diimplementasikan pada lingkup kegiatan terkait Infrastruktur dan aplikasi yang ditangani oleh Departemen Sistem Informasi Kantor Pusat.

In line with the above explanation, the government through the Ministry of Communication and Information issued a ministerial regulation under issuance number 04 of 2016 which governs Information Security Management System. The regulation sets out that a public company like Indonesia Power, which is classified as advanced Electronic System provider based on its risk principle, is required to implement ISO 27001 Information Security Management System. To comply with the above regulation and for a more strategic purpose as elaborated earlier, Indonesia Power is committed to gradually implement and conduct ISO 27001 Information Security Management System certification, starting from implementation in activities that are related to infrastructure and application under the management of Information System Department in the Head Office.

Pelaksanaan sertifikasi ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi ini rencananya dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan antara lain:

1. *Gap Assessment*: Untuk memetakan kebutuhan dan kecukupan dokumen serta implementasi di lapangan guna memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan standar,
2. Audit *Stage* I: Untuk memastikan kesiapan *auditee* dalam menerapkan sistem manajemen yang akan digunakan,

Implementation of ISO 27001 Information Security Management System certification is planned to be carried out through several stages as follows:

1. Gap Assessment: This stage aims to map needs, document adequacy and field implementation to meet the standard requirements.

2. Audit Stage I: This stage ensures preparedness of the auditee in implementing management system that will be used,

SISTEM MANAJEMEN INDONESIA POWER (INPOWER IMS)

INDONESIA POWER MANAGEMENT SYSTEM (INPOWER IMS)

3. Audit *Stage* II: Untuk melihat kesesuaian antara penerapan standard dilingkungan organisasi *auditee* dengan persyaratan standar sistem manajemen yang digunakan.

Kegiatan *Gap Assessment* ISO 27001, merupakan rangkaian persiapan menuju sertifikasi ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan pemetaan hal-hal apa saja yang sudah ada serta yang perlu dipersiapkan karena belum tersedia, berdasarkan pada persyaratan yang diminta oleh standar Sistem manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2013. *Gap Assessment* ini dilaksanakan satu hari, pada tanggal 31 Mei 2017, dengan Asesor Ibu Natalia Evianti dari PT BSI Group Indonesai. Area yang dilakukan audit/asesmen adalah Departemen Sistem Informasi Kantor Pusat, disesuaikan dengan rencana ruang lingkup sertifikasi di tahun 2017 ini.

Setelah dilaksanakan *Gap Assessment*, sebagai rangkaian sertifikasi ISO 27001 maka tahap selanjutnya adalah kegiatan audit sertifikasi ISO 27001, yang dibagi dalam dua tahap yaitu audit Stage I, yang bertujuan untuk memeriksa kesiapan secara dokumentasi agar bisa dilanjutkan pada audit sertifikasi secara komplet, dan Stage II sebagai audit sertifikasi yang lengkap menyeluruh. Ruang Lingkup sertifikasi untuk tahun 2017 ini adalah Departemen Sistem Informasi Kantor Pusat. Audit Stage I dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2017, sedangkan Stage II dilaksanakan tanggal 31 Juli s.d 02 Agustus 2017. Dari hasil audit tersebut terdapat temuan 9 temuan Minor dan 2 OFI (*Opportunity For Improvement*), dan dinyatakan Indonesia Power berhak menerima sertifikat ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi, dengan bukti sertifikat bertanggal 18 Agustus 2017.

3. Audit Stage II: This stage aims to observe consistency between implementation of the standard in auditee organization and the standard requirement of the management system used;

Gap Assessment for ISO 27001 is a series of preparations for ISO 27001 certification Information Security Management System. This activity is intended to map the existing conditions and aspects that need preparation due to their unavailability, according to the requirement specified by the Information Security Management System standard as set out in ISO 27001:2013. Gap Assessment was conducted in one day on May 31, 2017, with Mrs. Natalia Evianti from PT BSI Group Indonesia as the assessor. The audited/assessed area was the Information System Department of the Head Office, with adjustment to the scope of certification plan in 2017.

Following the Gap Assessment, the next stage was ISO 27001 certification audit that was divided into two stages, i.e. Audit Stage I that aimed to examine documentation preparedness to proceed to the complete certification audit, and Audit Stage II as the comprehensive certification audit. The scope of certification in 2017 was the Information System Department of the Head Office. Audit Stage I was conducted on July 18, 2017, while Audit Stage II was conducted on July 31 to August 2, 2017. The audit resulted in 9 Minor findings and 2 OFI (Opportunity for Improvement) and Indonesia Power was declared eligible for ISO 27001 Information Security Management System certificate, as evidenced by a certificate dated August 18, 2017.

Sistem Manajemen Keberlangsungan Bisnis

Sebagai wujud antisipatif terhadap kemungkinan timbulnya gangguan yang menghambat keberlangsungan perjalanan bisnis perusahaan, Indonesia Power secara bertahap menerapkan Sistem Manajemen Keberlangsungan Bisnis atau yang lebih familiar dalam istilah bahasa Inggris nya BCMS (*Business Continuity Management Plan*) ISO 22301. Proses set up sudah dilakukan mulai dari akhir tahun 2016 hingga pertengahan tahun 2017 di tiga unit terpilih yaitu UP Suralaya, UPJP Priok dan UPJP Perak Grati dengan dibimbing oleh konsultan dari

Business Continuity Management System

As an anticipative measure with regard to issues that may hamper the continuity of Company's business, Indonesia Power gradually implement Business Continuation Management System (BCMS) as set out in ISO 22301. Set up process had been initiated in the end of 2016 to mid-2017 at three selected units, namely Suralaya GU, Priok GGSU and Perak Grati GGSU under guidance from PT Marsh Indonesia. The initial stage of certification and gap assessment only covered Priok GGSU and Head Office. Gap Assessment was conducted to examine preparedness and weakness

PT Marsh Indonesia. Untuk tahap awal sertifikasi dan gap asesmen ini sementara lingkupnya hanya untuk UPJP Priok dan Kantor Pusat. *Gap Assessment* dilaksanakan dengan tujuan untuk melihat kesiapan dan apa saja kekurangan yang harus dipenuhi sebelum dilanjutkan kedalam tahapan sertifikasi. Kegiatan *Gap Assessment* ini dilaksanakan pada tanggal 07 November 2017 di Kantor Pusat dan Tanggal 17 November 2017 di UPJP Priok, dengan lembaga audit dari PT BSI Group Indonesia, dan asesor adalah Ibu Dewi Sari. Hasil *Gap Assessment* dituangkan dalam bentuk laporan dan rincian proses yang harus ditindaklanjuti sesuai dengan persyaratan sistem manajemen ISO 22301, untuk dapat sukses melalui audit sertifikasi di waktu berikutnya.

that need improvement prior to proceeding to the certification stage. Gap Assessment was conducted on November 7, 2017 at the Head Office and on November 17, 2017 at Priok GGSU by audit institution from PT BSI Group Indonesia and Ms. Dewi Sari as the auditor. Gap Assessment result was presented in a report and process detail that must be followed up in accordance with ISO 22301 management system in order to succeed in the subsequent certification audit.

Sebagai kelanjutan tahapan sertifikasi setelah dilaksanakan *Gap Assessment*, maka untuk mendapatkan sertifikat ISO 22301 BCMS, harus dilakukan audit sertifikasi yang dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu Audit Stage I sebagai audit pendahuluan pemeriksaan dokumen untuk memastikan kesiapan untuk sertifikasi, dan Audit Stage II adalah audit sertifikasi penuh. Audit Stage I dilaksanakan di UPJP Priok pada tanggal 28 November 2017. Dari hasil Audit Stage I disimpulkan bahwa secara pemeriksaan dokumen PT Indonesia Power Kantor Pusat dan UPJP Priok dinyatakan siap untuk menghadapi Audit Sertifikasi Stage II. Audit Stage II sendiri dilaksanakan pada tanggal 04-06 Desember 2017, dengan rincian Tanggal 04 dilakukan di Kantor Pusat dan tanggal 05-06 dilaksanakan di UPJP Priok. Hasil Audit menyatakan bahwa PT Indonesia direkomendasikan untuk memperoleh Sertifikat ISO 22301 BCMS. Untuk sertifikat akan diserahkan sekitar bulan Januari 2018, setelah dilakukan *review* oleh BSI Asia Pasifik.

The next certification stage following Gap Assessment and in order to obtain ISO 22301 BCMS certification, certification audit is required; this stage is divided into two stages, namely Audit Stage I as a preliminary audit for document examination to ensure preparedness for certification, and Audit Stage II as the comprehensive audit. Audit Stage I was conducted at Priok GGSU on November 28, 2017. According to the result of Audit Stage I, it can be concluded that documents in the Head Office of PT Indonesia Power and Priok GGSU were ready for Certification Audit Stage II. As to Audit Stage II, it was conducted on December 4 at the Head Office and on December 6 at Priok GGSU respectively. Audit Result suggested that PT Indonesia Power was recommended eligible for ISO 22301 BCMS Certificate. The certificate will be granted in January 2018 after a review from BSI Asia-Pacific.


bsi.
Certificate of Registration

ISO 27001:2013
(Departemen Sistem Informasi Kantor Pusat)
(Information System Department of the Head Office)


bsi.
Certificate of Registration

ISO 22301:2012
(UPJP I GGSU Priok)



05

TATA KELOLA PERUSAHAAN

CORPORATE GOVERNANCE



Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada setiap aspek tata kelola Indonesia Power terus dikembangkan sebagai keteladanan dalam mewujudkan integritas, budaya patuh dan memberikan nilai tambah kepada segenap *stakeholders*.

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles in every aspect of management at Indonesia Power continues to evolve into an exemplary practice in establishing integrity, instituting compliance culture and providing added values to all stakeholders.

PENDAHULUAN
INTRODUCTION

Sepanjang tahun 2017 Indonesia Power terus meningkatkan implementasi tata kelola dengan praktik terbaik yang dibuktikan dengan perolehan berbagai penghargaan terkait implementasi GCG sebagai bukti komitmen Perusahaan dalam penerapan GCG.

Throughout 2017 Indonesia Power continued to improve GCG implementation by conducting best practices and it is proven by achievement of awards for the GCG implementation as evidence of the Company's commitment to it.



Peringkat 1 Kategori Tata Kelola Perusahaan
Dalam ajang Anugerah BUMN ke-6

1st Place in the GCG Category
at the 6th BUMN Awards



Good Corporate Governance Terbaik ke-2 Kategori Anak Perusahaan BUMN
Dalam ajang yang diselenggarakan oleh Economic Review bekerja sama dengan Indonesia-Asia Institute, Sinergi Daya Prima dan IPMI Business School

2nd Place in the GCG Category for BUMN Subsidiaries
In the event organized by the Economic Review in collaboration with the Indonesia-Asia Institute, Sinergi Daya Prima and IPMI Business School



ASEAN Risk Champion
Penyelenggara ERMA (Enterprise Risk Management Academy)

ASEAN Risk Champion
Organized by the Enterprise Risk Management Academy (ERMA)



Risk Manager of the Year
Penyelenggara ERMA (Enterprise Risk Management Academy)

Risk Manager of the Year
Organized by ERMA



Trusted Company
The Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG) bekerjasama dengan Majalah SWA

Trusted Company
The Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG) in collaboration with SWA magazine

Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) menjadi gagasan yang mutlak harus dikembangkan suatu entitas bisnis dalam merespon perkembangan dunia bisnis sesuai dengan jati diri dan nilai-nilai yang berkembang di lingkungan bisnis yang dijalankan. Indonesia Power berupaya mengaktualisasikan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Perusahaan mengacu pada perkembangan *best practices* yang sejalan dengan budaya Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagi Indonesia Power, GCG merupakan praktik yang dinamis dan terus berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, Indonesia Power tidak pernah berhenti mengembangkan implementasi GCG untuk penciptaan nilai tambah bagi Perusahaan dan *stakeholder* baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan.

Dasar Kebijakan Penerapan Tata Kelola

Pratik tata kelola Indonesia Power mengacu pada peraturan perundangan maupun pedoman *best practices* penerapan GCG antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara PER-10/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
5. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-103/MBU/2002 tentang Pembentukan Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara.
6. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia Tahun 2006.
7. Anggaran Dasar Indonesia Power.

Good Corporate Governance (GCG) has become an idea that is absolutely necessary for a business to develop in response to the progress of the business world according to the identity and values that evolve in its day-to-day businesses. Indonesia Power seeks to actualize the GCG principles in corporate environment in reference to development of best practices which go in harmony with the Company's culture as well as the applicable laws and regulations.

For Indonesia Power, GCG is a dynamic practice that continues to evolve in keeping with economic and social dynamics. Therefore, Indonesia Power never ceases to develop its GCG implementation for creating added values to the Company and its stakeholders both economically, socially and environmentally.

Basic Policy Framework for Governance

Indonesia Power governance practices refer to the following laws and regulations as well as best practices guidance on GCG implementation which, among other things, include:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Company.
2. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (SOE) PER-01/MBU/2011 on Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.
3. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises PER-09/MBU/2012 on Amendment to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises PER-01/MBU/2011 on Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.
4. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises PER-10/MBU/2012 on Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Agency of the State-Owned Enterprises (SOEs).
5. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. KEP-103/MBU/2002 on Audit Committee Establishment of State-Owned Enterprises.
6. Indonesia GCG General Guidelines of 2006.
7. Indonesia Power's Articles of Association.

PENDAHULUAN
INTRODUCTION

Berbagai ketentuan tesebut secara sederhana dirangkum ke dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*GCG Code*) yang sesuai dengan nilai-nilai Perusahaan. Sehingga diharapkan dapat mempermudah setiap unsur yang ada di Indonesia Power untuk memahami dan menerapkan GCG dengan baik.

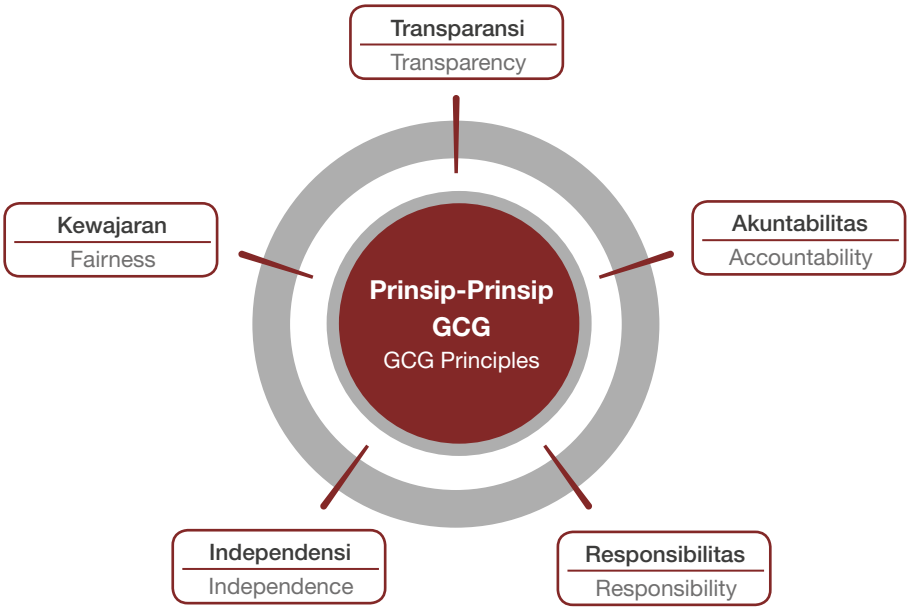
Those regulations are summarized into a Good Corporate Governance Code which is consistent with the spirit and letter of the Company values. Thus, the Code is expected to provide clear picture of GCG implementation for each and every part of the Company so that they are capable of fully recognizing and putting GCG into practice.

Penerapan Prinsip Tata kelola Perusahaan

Prinsip GCG yang mencakup aspek Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan *Fairness* (TARIF) diupayakan untuk senantiasa mengiringi setiap proses bisnis Indonesia Power dan didesain sejalan dengan budaya Perusahaan.

Corporate Governance Principles Implementation

The Company strives to always do every single business process with the principles of GCG covering the aspects of Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness (TARIF) which are designed pursuant to its corporate culture.



Pernyataan Penerapan Prinsip Tata kelola Perusahaan yang Baik
Statement on Good Corporate Governance Principles Implementation

Direksi dan Dewan Komisaris berserta segenap jajaran Perusahaan telah menerapan prinsip-prinsip GCG Perusahaan sejalan dengan pedoman corporate governance diantaranya GCG Code, Code of Conduct, Board Manual, Pengendalian Gratfiikasi serta Pelporan LHKPN secara optimal sepanjang tahun 2017, yang secara khusus tercermin dalam uraian pada sub-sub bab Tata Kelola Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

The Board of Directors and Board of Commissioners along with the Company's personnel have implemented the GCG principles in line with the Corporate Governance Guidelines such as GCG Code, Code of Conduct, Board Manual, Gratification Control and LHKPN Reporting throughout 2017, which is further elaborated in the sub-sections of the Good Corporate Government chapter of this Annual Report.



Bagus Setiawan
Komisaris Utama
President Commissioner

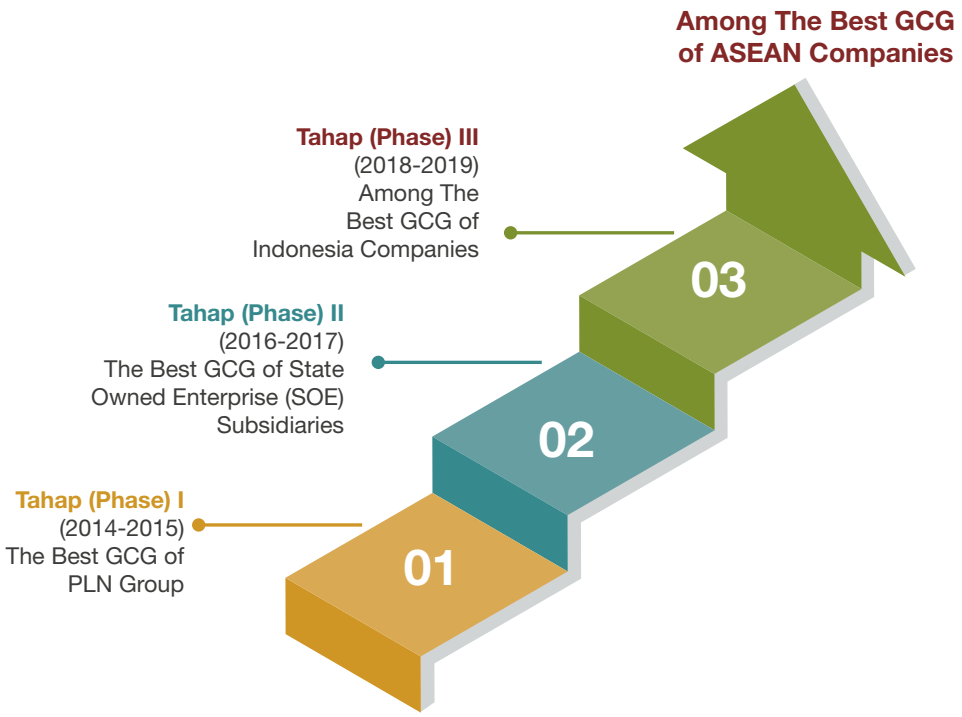


Sripeni Inten Cahyani
Direktur Utama
President Director

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP

Roadmap GCG menjadi *grand strategy* dan *millestone* implementasi GCG Perusahaan dari tahun ke tahun. Berdasarkan *Roadmap* GCG Periode 2014-2019, saat ini Indonesia Power telah memasuki akhir tahap kedua dan bersiap memasuki tahap ketiga dalam mewujudkan praktik terbaik GCG Perusahaan. Seiring dengan perkembangan usaha Indonesia Power telah mengevaluasi *Roadmap* GCG dan sedang melakukan penyusunan *roadmap* GCG 2018-2023. Dengan tetap menjadikan target Implementasi GCG sesuai standar ASEAN, Indonesia Power berharap dapat menjadi 10 Perusahaan terbaik ASEAN dalam penerapan GCG.

GCG Roadmap has become the grand strategy and milestone for the GCG implementation of Indonesia Power over the years. Based on the Roadmap for the period 2014-2019, Indonesia Power is now in the second phase and currently gearing towards the third phase of conducting GCG best practices across the Company. Along with its business development, Indonesia Power has evaluated the Roadmap and is currently preparing the 2018-2023 GCG Roadmap. By keeping GCG Implementation targets in line with the relevant ASEAN standards, Indonesia Power aims to get to the Top 10 ASEAN Companies for GCG implementation.



Selama perjalanan implementasi GCG sesuai *Roadmap* yang ditetapkan, Indonesia Power telah mencatat beberapa manfaat signifikan atas dilaksanakannya inisiatif GCG, salah satunya adalah meningkatnya kepercayaan kepada Perusahaan dari para pemangku kepentingan sesuai dengan tagline Indonesia Power yakni "*Trust us for Power Excellence*". Berikut capaian yang diperoleh Indonesia Power berdasarkan tahapan *roadmap* GCG 2014-2019:

1. Tahun 2014-2015
   a. Meraih Kedua Terbaik dalam *Assessment* Program Indonesia Power Bersih tahun 2015 dengan skor 3,8 dari sekala maksimal 5.
   b. Meraih kedua Terbaik dalam *Assessment* GCG Tahun 2014-2015 dengan skor 90,06 dan 91,19.

2. Tahun 2016-2017
   a. *Assessment* GCG Tahun 2017 dengan Score 93,07
   b. *Corporate Governance Perceptions Index* tahun 2017 dengan skor 84,22 meraih Predikat *Trusted Company.*
   c. Best 20 Perusahaan dengan Implementasi GCG Terbaik di Indonesia dengan skore 93,45.
   d. Peringkat 1 Kategori Tata Kelola (GCG) dalam ajang Anugerah BUMN Ke 6 (enam).

Indonesia Power menyadari bahwa dalam mendukung pencapaian target tersebut diperlukan pemahaman dan *awareness* segenap unsur yang ada di lingkungan Indonesia Power oleh karena itu Perusahaan telah melaksanakan sejumlah program yang mendukung penerapan GCG Perusahaan sepanjang tahun 2017, antara lain melakukan sosialisasi GCG kepada seluruh *stakeholder* Perusahaan; melakukan *assessment* penerapan GCG untuk Korporat, Anak Perusahaan maupun Unit Perusahaan; implementasi Indonesia Power Bersih serta mengikutsertakan Dewan Komisaris dan Direksi dalam kegiatan pelatihan terkait GCG untuk menambah wawasan sehingga dapat meningkatkan peran Dewan Komisaris dan Direksi terhadap implementasi GCG. Indonesia Power juga secara rutin mengikuti program riset dan pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) *Award* yang diselenggarakan oleh The Institute for Corporate Governance (IICG) sebagai bentuk komitmen Indonesia Power dalam penerapan GCG di Perusahaan.

During the journey towards GCG implementation according to the Roadmap, Indonesia Power has enjoyed significant benefits from GCG initiatives, one of them being increased trust placed by the Company in its stakeholders which goes consistently with Indonesia Power's tagline, i.e. "Trust us for Power Excellence". Below are our achievements based on the GCG Roadmap for the period 2014-2019:

1. 2014-2015
   a. Coming Second Best in the Assessment Program of Indonesia Power Bersih in 2015 with a score of 3.8 from a maximum of 5.
   b. Second Place at GCG Assessment for two years in a row in 2014-2015 with the scores of 90.06 and 91.19 respectively.

2. 2016-2017
   a. Scoring 93.07 in GCG Assessment for the Year 2017.
   b. Earning Trusted Company title with a score of 84.22 in the Corporate Governance Perceptions Index 2017.
   c. Best 20 Companies with the Best GCG Implementation in Indonesia with a score of 93.45.
   d. Ranking 1st in GCG Category in the 6th BUMN Awards.

Indonesia Power recognizes that to support the achievement of such targets, all elements of Indonesia Power need to have the necessary understanding and awareness. Therefore, the Company carried out a number of programs that supported the implementation of company-wide GCG in 2017 which, among others, included disseminating GCG to all the stakeholders; undertaking an assessment of GCG implementation for the Corporate, Subsidiaries or Business Units; conducting Indonesia Power Bersih program and including the Board of Commissioners and the Board of Directors in GCG-related training to widen the horizon so as to enhance their roles in GCG implementation. Indonesia Power also regularly participates in the Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award research and rating programs organized by the Institute for Corporate Governance (IICG) as a commitment to GCG implementation throughout the Company.

KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN

COMMITMENT TO SUSTAINABLE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Komitmen Indonesia Power dalam menerapkan GCG secara berkelanjutan diwujudkan melalui kebijakan dan program pendukung implementasi GCG. Perusahaan berupaya menyempurnakan perangkat pendukung GCG baik dari segi kebijakan maupun program-program yang dijalankan secara berkesinambungan.

Indonesia Power upholds its commitment to continuously implement corporate governance by laying down policies and setting up programs that sustain GCG implementation. The Company uses its best efforts to improve GCG support tools both in terms of the policies in place and programs that are conducted in a sustainable manner.

Tanggung Jawab Pelaksanaan GCG

Indonesia Power telah menunjuk Direktur Keuangan sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di Perusahaan berdasarkan rapat Direksi tanggal 10 Maret 2015 dengan uraian tugas antara lain: (1) menyusun rencana kerja yang diperlukan untuk memastikan Perusahaan memenuhi GCG Code Perusahaan dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik; (2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku; serta (3) memantau dan menjaga kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga. Kemudian sejalan dengan uraian Kerja Sekretaris Perusahaan sesuai SK No. 193.K/010/IP/2017 tanggal 12 Oktober 2017, Indonesia Power telah menunjuk Sekretaris Perusahaan sebagai pelaksana tugas dalam penerapan dan pemantauan GCG.

GCG Implementation Responsibility

Indonesia Power has appointed its Financial Director as the person in charge (PIC) of GCG implementation and monitoring in the Company through the Board of Directors meeting on March 10, 2015. The PIC has the following duties: (1) compiling work program needed to ensure that the Company fulfills the GCG Code along with others laws and regulations in order to carry out good corporate governance principles; (2) monitoring and maintaining the Company's business activity so as to not deviate from the prevailing regulations; and (3) monitoring and maintaining the Company's compliance with every agreement and commitment that has been made with third parties. Moreover, according to the description of its duties outlined in Decree No. 193.K/010/IP/2017 dated October 12, 2017, Indonesia Power assigned the Corporate Secretary as the PIC for implementing and monitoring GCG.

Penyempurnaan Perangkat GCG

Indonesia Power berupaya menjaga efektivitas penerapan GCG secara berkelanjutan diantaranya pada tahun 2017 Indonesia Power melakukan peninjauan kembali *soft structure* GCG yaitu terkait LHKPN yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor 235.K/010/IP/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara negara (LHKPN) di lingkungan PT Indonesia Power. Selain itu, khusus Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board manual*) juga dilakukan peninjauan kembali dan dipandang masih relevan di tahun 2017 dan direncanakan akan dimutakhirkan pada tahun 2018. Peninjauan kembali *Board Manual* dimaksudkan agar pelaksanaan fungsi pengelolaan dan pengawasan Perusahaan memiliki pedoman yang sejalan dengan perkembangan *best practices* GCG terkini.

GCG Tools Refinement

Indonesia Power maintains to ensure the effectiveness of sustainable GCG implementation. In 2017, this included reviewing GCG soft structure associated with the State Official Wealth Report (LHKPN) as set forth in Directors' Decree No. 235.K/010/IP/2017 dated December 11, 2017 on the LHKPN in PT Indonesia Power. Further, the Board Manual for Board of Commissioners and Directors was also put under review and deemed to remain relevant for the year 2017, and Indonesia Power planned to update it the following year. The Board Manual review aimed to ensure that the implementation of corporate management and monitoring functions has a guideline that is aligned with current GCG best practices.

Sosialisasi GCG

Sosialisasi GCG kepada *stakeholder* Perusahaan dilaksanakan melaui berbagai metode diantaranya tatap muka, media internal maupun media informasi dan sosial lainnya. Untuk pegawai Perusahaan, sosialisasi dilakukan melalui *Coffee Morning*, Majalah, Buletin, Visual Manajemen (TV Wall), dan sosialisasi oleh Agen Perubahan. Untuk mitra kerja dilakukan melalui *email*, penjelasan langsung pada saat proses pengadan Barang/Jasa (*Anwijzing*) serta *Vendor Meeting*. Sedangkan untuk Publik, sosialisasi GCG dilakukan melalui *Website*, Majalah serta *social media*. Berikut pelaksanaan sosialisasi GCG sepanjang tahun 2017:

Dissemination of GCG Information

GCG information is disseminated to all the stakeholders through various methods which include face-to-face meetings and internal media as well as other information channels and social media handles. For the Company's employees, such dissemination is conducted through Coffee Morning, Magazine, Bulleting, Visual Management (TV Wall) and dissemination by the Agent of Change. For vendors, it is carried out through email, direct explanation during Procurement Process for Goods/Services (Aanwijzing) and Vendor Meeting. As for the public at large, GCG dissemination is organized through website, magazine and social media. Dissemination of GCG information during the course of 2017 is detailed below:

Penerima Informasi Recipient	**Saluran Komunikasi** Communication Channel	**Pelaksanaan di 2017** Implementation in 2017	
Kalangan internal (Pegawai IP) Internal (IP employees)	a. Coffee Morning b. Majalah I Magazine c. Buletin I Bulletin d. Visual Manajemen (TV *Wall*) Visual Management (TV Wall) e. Sosialisasi oleh Agen Perubahan Dissemination by the Agent of Change	*Coffee Morning* dengan Tema Bulanan Integritas (tanggal 12 April 2017); Buletin (edisi 17 tahun 2017); Visual Manajemen (Pengendalian Gratifikasi, ELHKPN dan GCG); Sosialisasi melalui agen perubahan (Pengendalian Gratifikasi, ELHKPN dan GCG)	Coffee Morning with the Monthly Theme of Integrity (on April 12, 2017); Bulletin (the 17th edition for the year 2017); Visual Management (Gratification Control, ELHKPN and GCG); Dissemination by the Agent of Change (Gratification Control, ELHKPN and GCG)
Mitra kerja Work partners	a. *Email* b. Penjelasan langsung pada saat penjelasan proses pengadan barang/ jasa (*Aanwijzing*) Direct explanation during procurement process for goods/services (Aanwijzing) c. *Vendor Meeting*	Email pada saat menjelang Hari raya keagamaan; Penjelasan langsung pada saat penjelasan proses pengadan barang/jasa (*Aanwijzing*) dan *Vendor Meeting* pada 4 Desember 2017	Emails sent ahead of religious festive seasons; Direct account when explaining procurement process of goods/services (Aanwijzing); and Vendor Meeting on December 4, 2017
Publik (Masyarakat umum) Public	a. *Website* b. Majalah I Magazine c. *Social media*	*Update* informasi terkait GCG pada Website; Instagram dan Facebook.	Information update regarding GCG on he website as well as Instagram and Facebook accounts.

Implementasi Praktik Anti Korupsi Indonesia Power

Program anti korupsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam implementasi GCG Perusahaan. Sebagai bagian dalam mendukung praktik anti korupsi, Indonesia Power berupaya meningkatkan pemahaman dan kepedulian segenap unsur yang ada di lingkungan Perusahaan terkait praktik anti korupsi melalui program pendukung diantaranya Indonesia Power Bersih (IP Bersih) dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemahaman anti korupsi melalui pelatihan Pengendalian Gratifikasi dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Agen Perubahan dan Pengelola GCG di seluruh Unit Kerja perusahaan.

Anti-Corruption Practices in Indonesia Power

Anti-corruption program has become an integral part of the Company's GCG implementation. As part of its support to establishing anticorruption practices, Indonesia Power seeks to improve understanding and awareness of such practices among all the Company elements by running supporting programs such as Indonesia Power Bersih (IP Bersih) with the following activities:

1. Strengthening awareness of anti-corruption by delivering training on Gratification Control and State Official Wealth Report for the Agents of Change and GCG Managers in all work units.

KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN

COMMITMENT TO SUSTAINABLE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

2. Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi melalui penyusunan laporan Penerimaan dan Penolakan Gratifikasi dari seluruh unit kerja perusahaan.
3. Pengelolaan Pelaporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada pegawai tingkat eksekutif, eksekutif senior dan eksekutif utama yang menjadi wajib Lapor.
4. Penyelenggaraan *Vendor Meeting* untuk membangun komunikasi kebijakan anti korupsi perusahaan dengan mitra kerja.

Pengendalian Gratifikasi: Indonesia Power Bersih Menuju Tata Kelola Perusahaan yang Baik

"Indonesia Power Bersih (IP Bersih)" yang dilaksanakan sejak tahun 2014, mengacu pada program yang dikeluarkan oleh PT PLN (Persero) sebagai entitas induk, yaitu: "PLN Bersih" dan menjadi momentum program pengendalian gratifikasi Indonesia yang terus dikembangkan hingga saat ini. Untuk mendukung hal tersebut, Indonesia Power telah menyusun pedoman terkait gratifikasi melalui Keputusan Direksi No. 165.K/1010/IP/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Perusahaan.

2. Gratification Control management through preparation of reports on Gratification Control by all the Company work units.
3. LHKPN reporting management for executives, senior executives and top executives at the Company who are required to report it.
4. Organizing Vendor Meeting to build communications with vendors on Indonesia Power anti-corruption policy.

Gratification Control: Indonesia Power Bersih Towards Good Corporate Governance

Conducted since 2014, "IP Bersih" refers to the program established by PT PLN (Persero) as Indonesia Power's parent company, namely "PLN Bersih", and marks the momentum of the Company's gratuity control program which continues to develop up to the present. To support this program, Indonesia Power developed a guidance on gratification through Directors' Decree No. 165.K/1010/IP/2014 dated October 10, 2014 on Guidelines for Gratification Control within the Company.

Gambar Kebijakan Indonesia Power Bersih
Figure: Indonesia Power Bersih Policy



Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Perusahaan (LHKPP)

Management Wealth Report (LHKPP)



Larangan bagi Direksi/Pegawai/Keluarga Inti Direksi/Pegawai melakukan kegiatan usaha terkait IP

Prohibition of Directors/Employee Family of Directors/Employee to conduct business related to IP



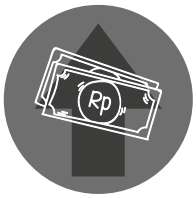
Larangan menjadi Direksi/Manajer di Koperasi Pegawai IP/Anak Koperasi IP/ Yayasan yang mempunyai hubungan kegiatan usaha dengan IP

Prohibition to be Directors/Manager in IP's Cooperative Employee/Foundation that has a business relationship with IP



Direksi/Pegawai mendaftarkan kepemilikan nomor rekening Bank kepada IP

The Board of Directors/Employee register their Bank Account to IP



Pelaporan transaksi lewat batas transfer 100 juta dan transaksi cash >20 juta

Reporting transaction of transfer (>100 million) and cash (>20 million)



Pelaporan Pengendalian Gratifikasi

Gratification Report

Kegiatan Program dan Implementasi Pengendalian Gratifikasi 2017 yang dijalankan Indonesia Power antara lain:

1. *Workshop* PLN Bersih mengenai LHKPN dan Pengendalian Gratifikasi tanggal 21 Juni 2017 di Pusdiklat PLN.
2. *Workshop* Lanjutan: TOT Pengendalian Gratifikasi PLN tanggal 3-4 Agustus 2017 di Bali
3. *Workshop* Ratifikasi SK Gratifikasi tanggal 10 November 2017 di Malang
4. Forum dilaksanakan bersamaan dengan TOT Pengendalian Gratifikasi tanggal 14-15 Agustus 2017

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

Indonesia Power berkomitmen terhadap kepatuhan penyampaian LHKPN yang dipertegas melalui Keputusan Direksi Nomor 173.K/010/IP/2013 tanggal 22 Oktober 2013 tentang Laporan Harta Kekayaan Pejabat Perusahaan (LHKPP) di lingkungan PT Indonesia Power yang dimutakhirkan dengan Keputusan Direksi Nomor 235.K/010/IP/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara negara (LHKPN) di lingkungan PT Indonesia Power dan Keputusan Direksi Nomor 161.K/020/IP/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pedoman Indonesia Power Bersih. Perusahaan juga mengacu pada instruksi pemegang saham yang dikeluarkan oleh PT PLN (Persero) dalam Peraturan Direksi Nomor 0060.K/DIR/2014 tentang Pedoman PLN Bersih. Sepanjang tahun 2017, Indonesia Power melakukan internalisasi LHKPN diantaranya melalui sosialisasi LHKPN untuk pengelola LHKPN pada bulan Juni 2017 di Pusdiklat PLN Ragunan; sosialisasi LHKPN kepada Pejabat Perusahaan (Jenjang Eksekutif, Eksekutif Senior dan Eksekutif Utama Kantor Pusat dan Unit) pada tanggal 11 Juli 2017. Berikut rekapitulasi penyampaian LHKPN sepanjang tahun 2017:

In 2017, activities under the program and in gratification control that Indonesia Power managed were as follows:

1. PLN Bersih Workshop on LHKPN and Gratification Control taking place on June 21, 2017 at PLN Training Center (Pusdiklat PLN).
2. Advanced Workshop: TOT on Gratification Control at PLN on August 3-4, 2017 in Bali.
3. Workshop on Ratification of Gratification Decree on November 10, 2017 in Malang.
4. The Forum was held in conjunction with the TOT on Gratification Control taking place on August 14-15, 2017.

State Official Wealth Report (LHKPN) Submission

Indonesia Power is committed to compliance in the LHKPN submission as stipulated with the issuance of Directors' Decree No. 173.K/010/IP/2013 dated October 22, 2013 on Management Wealth Report (LHKPP) in PT Indonesia Power, as amended by Directors' Decree No. 235.K/010/IP/2017 dated December 11, 2017 on Management Wealth Report (LHKPP) in PT Indonesia Power, and Directors' Decree No. 161.K/020/IP/2014 dated October 7, 2014 on Indonesia Power Bersih Guidelines. The Company also refers to the shareholders' instruction that PT PLN (Persero) published through Directors' Regulation No. 0060.K/DIR/2014 on PLN Bersih Guidelines. Throughout 2017, Indonesia Power conducted LHKPN internalization by, among others, disseminating information regarding LHKPN to its responsible person in June 2017 at Pusdiklat PLN Ragunan and disseminating such information to Company officials (executives, senior executives and top executives at both Head and Unit Offices) on July 11, 2017. Below is a recap of LHKPN submission during the year 2017:

Tabel Rekapitulasi Penyampaian LHKPN
Table: Recapped LHKPN Submission

No	Jabatan Position	Jumlah Wajib LHKPN Required to Submit LHKPN	Jumlah yang Telah Melaporkan Kekayaan Had Submitted LHKPN		Jumlah yang Belum Melaporkan Kekayaan Had Not Submitted LHKPN Yet	
			Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
1	Dewan Komisaris I Board of Commissioner	6	3	50%	3	50%
2	Direksi I Board of Directors	6	6	100%	0	0
3	*Senior Leader*	375	373	99,47%	2	0,53%

KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN

COMMITMENT TO SUSTAINABLE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

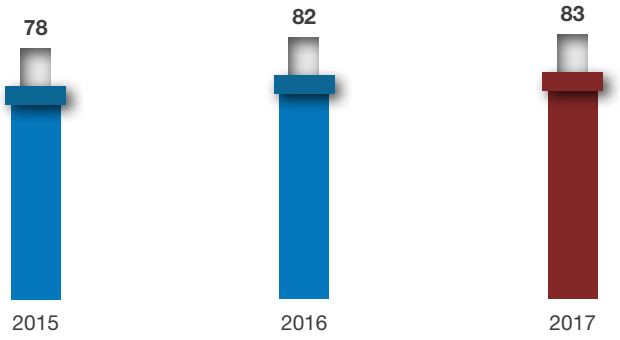
Pelaksanaan Survei Perilaku Etis

Indonesia Power melakukan Survei Perilaku Etis untuk mengukur pemahaman, kesadaran dan komitmen pemangku kepentingan terhadap kebijakan Perusahaan sebagai upaya mendukung program IP Bersih. Survei perilaku etis dilakukan oleh Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia tahun 2017, Indonesia Power meraih index 83% atau meningkat 1% dari tahun lalu dengan index 82%. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa berbagai tindakan perbaikan yang dilakukan sebagai tindak lanjut survei tahun 2016 berhasil mendorong munculnya perilaku etis insan Indonesia Power.

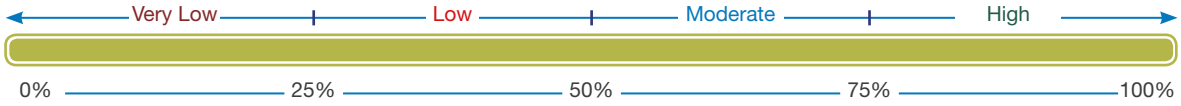
Ethical Behavior Survey

Indonesia Power conducts the Ethical Behavior Survey to measure its stakeholders' understanding and awareness of as well as commitment to the Company's policy as an effort to support IP Bersih program. In 2017 this survey was carried out by the Applied Psychology Department of Universitas Indonesia, where Indonesia Power achieved an index of 83% or an increase by 1% from the year before which stood at 82%. The increase indicated that numerous corrective actions as follow-ups on the 2016's survey managed to encourage creation of ethical behavior among Indonesia Power personnel.

Hasil Survei Perilaku Etis Tahun 2015-2017 (%)
The Result of Ethical Behavior Survey in 2015-2017 (%)



Indeks Perilaku Etis Indonesia Power | Indonesia Power Ethical Behavior Index



Program Peningkatan Kualitas GCG

Indonesia Power melaksanakan *assessment* penerapan GCG secara berkala yang dilakukan pada level Korporat, Anak Perusahaan dan Unit Perusahaan. *Assessment* GCG pada level Korporat dan Anak Perusahaan menggunakan kriteria berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Menteri BUMN SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter penialain dan evaluasi atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Sedangkan *assessment* GCG Unit dilakukan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 71.K/010/IP/2016 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit. *Assessment* GCG Unit dilaksanakan 2 kali setahun, dengan siklus *assessment*

GCG Quality Improvement Program

Indonesia Power conducts assessment on the GCG implementation periodically at the levels of Corporate, Subsidiaries and Company's Business Units. The GCG assessment with Corporate and Subsidiaries refer to the criteria set out based on Decree of Secretary to the Minister of State-Owned Enterprises SK-16/S.MBU/2012 on Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation on Good Corporate Governance Implementation at State-Owned Enterprises. GCG assessment on units is conducted based on Directors' Decree No. 71.K/010/IP/2016 on Unit Performance Assessment Guidelines. Unit GCG Assessment is conducted two times a year, with assessment in the first and second half of 2017. In 2017,

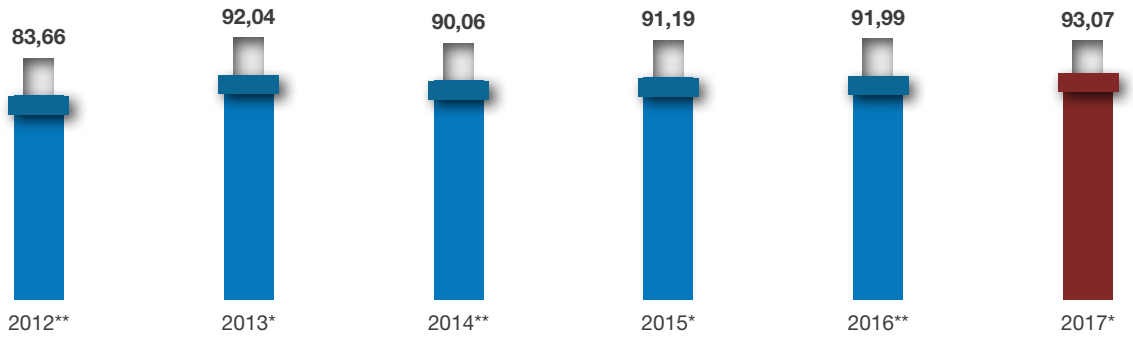
oleh Kantor Pusat di semester I dan II. Hasil *assessment* Unit tahun 2017 dilakukan pada tanggal 2-12 Januari 2018.

Unit assessment results were presented on 2-12 January 2018.

Komitmen Indonesia Power dalam meningkatkan kualitas penerapan GCG tercermin dari peningkatan skor *assessment* GCG dalam beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan adanya kesungguhan Indonesia Power untuk senantiasa memperbaiki implementasi tata kelola Perusahaan.

Indonesia Power's commitment on improving the quality of GCG implementation is proven by the increase of GCG assessment scores in the last few years, which demonstrates the Company's seriousness to continuously improve its corporate governance implementation.

Trend Pencapaian Skor _Asessment_ GCG Tahun 2012-2017
Trend of GCG Assessment Scores in 2012-2017



* Self Assessment GCG
** Assessment GCG

Assessment GCG 2017

Penilaian implementasi GCG Indonesia Power tahun buku 2017 dilakukan secara *self assessment* sekaligus evaluasi tindak lanjut hasil penilaian GCG tahun buku 2016. *Self assessment* GCG dilaksanakan di tahun 2018 pada tanggal 1 Januari sampai dengan 28 Februari 2018.

Kriteria Penilaian GCG

Penilaian penerapan implementasi GCG dilakukan dengan menggunakan kriteria berdasarkan parameter penilaian Kementerian BUMN yaitu SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara yang meliputi aspek antara lain: (1) Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan; (2) Pemegang Saham/RUPS; (3) Dewan Komisaris; (4) Direksi; (5) Pengungkapan Informasi dan Transparansi; dan (6) Aspek Lainnya.

GCG Assessment in 2017

Assessments carried out on GCG implementation for the fiscal year (FY) 2017 included self-assessment and evaluation of the follow-up on the results of GCG assessments in FY 2016. GCG self-assessment was carried out on January 1-February 28, 2018.

GCG Assessment Criteria

The assessments were conducted using the assessment parameters from the Ministry of State-Owned Enterprises, i.e. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 on Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation on Good Corporate Governance Implementation at State-Owned Enterprises, which includes the following aspects: (1) Commitment to Sustainable Good Corporate Governance Implementation; (2) Shareholders/GMS; (3) Board of Commissioners; (4) Board of Directors; (5) Disclosure of Information and Transparency; and (6) Other Aspects.

KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN

COMMITMENT TO SUSTAINABLE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian implementasi GCG Indonesia Power dilakukan oleh tim internal yang ditunjuk melalui Keputusan Direksi No. 166.K/020/IP/2017 tentang Tim *Self-Assessment* Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2017.

Skor *Assessment* GCG Tahun 2017

Pada tahun buku 2017, total nilai *Assessment* GCG yang diperoleh Indonesia Power adalah sebesar 93,07 yang setara dengan 93,07% dari total nilai maksimal sebesar 100,00 sehingga secara keseluruhan, kualitas implementasi GCG Perusahaan tahun 2017 berada pada klasifikasi **"Sangat Baik".** Skor yang diperoleh ini lebih tinggi dari tahun 2016 dengan skor 91,99.

Parties Conducting the Assessment

GCG implementation assessment in Indonesia Power was carried out by an internal team appointed by Directors' Decree No. 166.K/020/IP/2017 on the Team for Self-Assessment of Good Corporate Governance Implementation in 2017.

GCG Assessment Score in 2017

In the fiscal year 2017, Indonesia Power obtained 93.07, equivalent to 93.07%, out of the maximum 100.00 for GCG Assessment score, making the quality of the Company's GCG implementation in 2017 belong to the "Very Good" category. The score obtained exceeded that of 2016, which was 91.99.

Tabel Skor Penilaian *Assessment* GCG Tahun 2017
Table: GCG Assessment Scoring Table for 2017

No	Aspek Pengujian/Indikator Parameter Tested Aspect/Parameter Indicator	Bobot Weight	Capaian Tahun 2017 Achievement 2017		Penjelasan Description
			Skor Score	% Capaian % Achieved	
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment on Implementing Sustainable Good Corporate Governance	7	6,58	93,93	Sangat Baik Very Good
II	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owners	9	7,75	86,14	Sangat Baik Very Good
III	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Agency	35	32,87	93,93	Sangat Baik Very Good
IV	Direksi I Board of Directors	35	32,78	93,66	Sangat Baik Very Good
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Disclosure of Information and Transparency	9	8,09	89,85	Sangat Baik Very Good
VI	Aspek Lainnya I Other Aspects	5	5,00	100,00	Sangat Baik Very Good
	Skor Keseluruhan I Overall Score	**100**	**93,07**		**Sangat Baik** Very Good
	Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG **Classification of GCG Implementation Quality**		**Sangat Baik** Very Good		

Rekomendasi Hasil Penilaian

Berdasarkan *assessment* GCG yang telah dilakukan menghasilkan 31 rekomendasi penyempurnaan implementasi GCG di Perusahaan. Rekomendasi tersebut mencakup seluruh aspek/parameter penilaian. Hasil rekomendasi tersebut senantiasa ditindaklanjuti oleh Perusahaan agar implementasi GCG sejalan dengan *best practices.*

Recommendation on the Assessment Result

Based on the GCG assessment conducted, there are 31 items of recommendations for improving GCG implementation in the Company. The recommendations cover all aspects/parameters of the assessment. Indonesia Power continuously follows up the recommendations in order to ensure that GCG implementation is consistent with the best practices.

Penilaian dan Tindak Lanjut Atas *Assessment* GCG Tahun 2016

Penilaian penerapan implementasi GCG tahun 2016 dilakukan oleh pihak independen yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DKI Jakarta dengan menggunakan kriteria parameter penilaian Kementerian BUMN yaitu SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Indonesia Power berupaya menindaklanjuti rekomendasi dari hasil *assessment* GCG yang telah dilakukan pada tahun 2016. Berikut adalah aspek rekomendasi aspek Dewan Komisaris dan aspek Direksi dari hasil penilaian penerapan GCG tahun 2016:

Assessment and Follow-Up on the GCG Assessment of 2016

GCG implementation assessment in 2016 was carried out by an independent party, i.e. the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) of DKI Jakarta using the assessment criteria set forth by the Ministry of State-Owned Enterprises, i.e. SK-16/S.MBU/2012 on Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation on Good Corporate Governance Implementation at State-Owned Enterprises.

Indonesia Power seeks to follow up recommendations based on the results of GCG assessment conducted in 2016. The following are recommendations on the aspects of the Board of Commissioners and Board of Directors resulted from the assessment of GCG implementation in 2016:

Tabel Rekomendasi *Assessment* GCG Tahun 2016 dan Tindak Lanjutnya
Table: Recommendations from GCG Assessment in 2016 and Its Follow-Up

Rekomendasi Recommendation		**Tindaklanjut atas Rekomendasi** Follow-Up on the Recommendation
Menandatangani/mengesahkan RKA Dewan Komisaris dan KPI Dewan Komisaris yang memuat indikator kinerja utama dan target-targetnya yang mencerminkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dalam penyusunan Rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan Dewan Komisaris.	Signing off/ratifying the Board of Commissioners' Work Plan and Budget (RKA) and Key Performance Indicators (KPI) which includes both key targets and performance indicators reflecting the measures of successful implementation of the supervisory and advisory duties in preparing the annual RKA for the Board activities.	PLN belum menetapkan formulasi KPI untuk Dewan Komisaris, akan dilakukan di tahun 2018 PLN has yet to determine the formulation of KPI for the Board of Commissioners, pending 2018.
Dewan Komisaris agar lebih tepat waktu dalam memberikan telaah/tanggapan atas rancangan RJPP yang di sampaikan oleh Direksi.	The Board of Commissioners should be more punctual in providing reviews of/responses to the draft Long Term Corporate Plan (RJPP) that the Board of Directors submits.	Dalam progres In progress
Belum semua Dewan Komisaris membuat laporan tentang kepemilikan saham pada perusahaan tersebut dan perusahaan lainnya oleh komisaris dan anggota keluarga di Daftar Khusus yang diadministrasikan Sekretaris Perusahaan.	Not all members of the Board of Commissioners have completed reports on the ownership of shares in both the company and other companies by the commissioners and their family members, as recorded in the Special Register administered by the Corporate Secretary.	Dewan Komisaris telah menyusun Daftar Khusus (100%) The Board of Commissioners has completed the Special Register (100%)
Perusahaan agar membuat laporan berkala tentang perkembangan pemenuhan kewajiban penyampaian LHKPN kepada KPK atau menyampaikan LHKPP kepada PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham.	The Company should prepare periodic reports on the progress of its fulfillment of obligation for submitting LHKPN to KPK or submitting LHKPP with PT PLN (Persero) as its Shareholder.	Indonesia Power membuat Laporan berkala kepada PLN mengenai implementasi e-LHKPN setiap akhir tahun sesuai SK LHKPN PLN dan Indonesia Power 2017 (100%) Indonesia Power writes periodic reports to PLN regarding the implementation of e-LHKPN at the end of each year according to LHKPN Decree for PLN and Indonesia Power in 2017 (100%)
Perusahaan agar membuat kebijakan tentang pemberian teguran/sanksi bagi Pejabat yang ditetapkan wajib menyampaikan LHKPN/ LHKPP sesuai ketentuan yang berlaku namun belum/tidak menyampaikan LHKPN/LHKPP serta melaksanakan penegasan sanksi atas kelalaian.	The Company should put in place a policy for issuing a warning/handing down a sanction to Officials who fail to meet their obligations to submit LHKPN/LHKPP in accordance with applicable regulations and enforce sanction for negligence.	Penentuan Sanksi pejabat terkait LHKPN distate dalam SK LHKPN 2017 (100%) Determining sanctions to officials in relation to LHKPN was stated in LHKPN Decree of 2017 (100%)

KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN

COMMITMENT TO SUSTAINABLE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Rekomendasi Recommendation		**Tindaklanjut atas Rekomendasi** Follow-Up on the Recommendation
Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.	All provisions and information on procurement of goods/services are open to the procurement participants that are interested in the process and to the public in general.	SK Pengadaan Barang dan Jasa di-*upload* ke dalam website IP dan di sosialisasikan saat *Anwijzing* dan *Vendor Meeting* (100%) Decree on Goods and Services Procurement is uploaded to the website and was disseminated during *Anwijzing* and Vendor Meeting (100%)
Pembayaran kepada pemasok tepat waktu sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian/kontrak.	Payment to suppliers are on time in accordance with the terms of agreements/contracts.	Dalam progres In progress
Penyusunan program kerja pengawasan tahunan/PKPT (Rencana Audit Tahunan) dilakukan dengan pendekatan risiko (*risk based auditing*).	Preparation of the Annual Audit Plan (PKPT) is undertaken using risk-based auditing approach.	Dalam progres In progress
SPI sebagai penanggung jawab fungsi Audit Internal belum memiliki pedoman untuk memantau tindak-lanjut hasil pengawasan intern maupun pengawasan ekstern (BPK, KAP dll).	The Internal Audit Unit (SPI) as the party in charge of Internal Audit function has not had a guideline yet to monitor the follow-ups on both internal and external supervision (with the Supreme Audit Agency or BPK, a Certified Public Accountant or KAP, etc.).	Dalam progres In progress
SPI Memberi masukan atas konsistensi hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan dan program dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan kepada manajemen.	SPI provides the management with feedbacks on the consistency of the results obtained from activities and programs against the objectives and targets that have been set.	Dalam progres In progress
SPI Memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan pengendalian intern kepada perusahaan.	SPI gives maximum contribution to the improvement of risk management and internal control in the Company.	Dalam progres In progress
SPI Memberi kontribusi maksimal terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan pengendalian intern kepada perusahaan.	SPI gives maximum contribution to the improvement of risk management and internal control in the Company.	Dalam progres In progress
Agar sekretaris perusahaan meningkatkan pengalaman professional dan kompetensi yang dimiliki mencakup hukum, pasar modal, manajemen keuangan, dan komunikasi perusahaan.	The Corporate Secretary needs to enhance its professional experience and competencies including in the fields of law, capital market, financial management and corporate communications.	Dalam progres In progress
Agar uraian Tugas Sekretaris perusahaan mencakup hal-hal *substantive* diantaranya memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.	The Corporate Secretary's roles need to encompass substantive matters including providing information required by the Board of Directors and the Board of Commissioners/Supervisory Board on a regular basis and/or at any time if requested.	Uraian Tugas SEKPER ada di Board Manual diantaranya memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta. Description of the Corporate Secretary's roles can be found in the Board Manual which includes providing information required by the Board of Directors and Board of Commissioners/Supervisory Board on a regular basis and/or at any time if requested.
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal agar menetapkan ketentuan mengenai jumlah jabatan yang boleh dirangkap anggota Direksi, bila tidak konflik kepentingan.	Shareholders/GMS/Capital Owners should stipulate provisions on the number of offices that may be held by members of the Board of Directors, lest conflicts of interest occur.	Belum Not yet
RUPS/Pemilik modal agar menetapkan anggota Dewan Komisaris Independen paling sedikit 20% dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara eksplisit dalam keputusan pengangkatannya. Komisaris Independen memiliki kompetensi dibidang *auditing*, keuangan dan akuntansi.	GMS/Capital Owners should appoint members of the Board of Commissioners in a way that at least 20% of the Board of Commissioners/Supervisory Agency consist of Independent Commissioners and it should be explicitly specified in the decision regarding such appointment. The Commissioners are to have competencies in auditing, finance and accounting.	Dalam progres In progress

Rekomendasi Recommendation		Tindaklanjut atas Rekomendasi Follow-Up on the Recommendation
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal agar melakukan pembahasan/pengkajian terhadap rancangan RJPP atau Revisi RJPP.	Shareholders/GMS/Capital Owners should hold discussions/reviews of draft or revised RJPP.	Belum Not yet
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal agar memberikan pengesahan/persetujuan terhadap rancangan RJPP atau Revisi RJPP.	Shareholders/GMS/Capital Owners should give authorization/approval for the draft or revised RJPP.	Belum Not yet
Pengesahan/persetujuan rancangan RJPP atau Revisi RJPP agar dilaksanakan tepat waktu.	Authorization/approval of draft or revised RJPP should be implemented on time.	Belum Not yet
Pemegang Saham agar menetapkan sistem/pedoman penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris (majelis), yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan.	Shareholders should establish a system/guidance for the performance assessment of the Board of Directors and Board of Commissioners (assemblies), containing at least key performance indicators and success criteria.	Dalam progres In progress
Menetapkan formulasi perhitungan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan pendapatan, aktiva, tingkat inflasi, serta mempertimbangkan sektor industri sejenis yang terukur (*benchmark*), kondisi persaingan usaha (*competitiveness*) atau kompleksitas usaha, dan kelangkaan Sumber Daya Manusia.	The salary/honorarium, benefits and facilities of the Board of Directors and Board of Commissioners should be calculated by taking into account the income, assets, inflation rate and in view of similar industry sectors (benchmark), competitiveness or business complexity, and scarcity of Human Resources.	Belum Not yet
Menetapkan formulasi perhitungan tantiem/insentif kinerja Direksi dan Dewan Komisaris, dengan mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat kesehatan, dan faktor-faktor lain yang relevan (*merit system*).	Establishing the formula for calculating tantiem/incentives for the performance of the Board of Directors and Board of Commissioners, taking into account target achievement, health level and other relevant factors (merit system).	Belum Not yet
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal agar menetapkan pedoman penunjukan audit eksternal.	Shareholders/GMS/Capital Owners should establish a guideline for appointing external audits.	Dalam progres In progress
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal agar melibatkan Dewan Komisaris dalam memutuskan penunjukan Auditor Eksternal yang akan mengaudit laporan keuangan perusahaan, dan dalam menetapkan besarnya honorarium/imbal jasa untuk auditor eksternal tersebut Risalah RUPS jika dilakukan RUPS Fisik, Surat Keputusan jika dilakukan RUPS bukan Fisik).	Shareholders/GMS/Capital Owners should involve the Board of Commissioners in deciding the appointment of External Auditor that will audit the Company's financial statements, and in determining the amount of honoraria/fees for such auditor. (Minutes of GMS if the physical meeting is held, a Decree if the GMS is nonphysical).	Belum Not yet
Pemegang Saham agar melakukan upaya-upaya menindaklanjuti *area of improvement* yang dihasilkan dari *assessment* atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada perusahaan yang bersangkutan.	Shareholders should make efforts to follow up on the area of improvement as a result of an assessment of GCG practices in the Company.	Dalam progres In progress

Pada tahun 2017, Perusahaan juga mengikuti *Assessment* GCG untuk menilai praktik *corporate governance* (CG) berdasarkan ASEAN CG *Scorecard*. ASEAN *Corporate Governance Scorecard* merupakan inisiatif dari ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF) untuk melakukan penilaian penerapan GCG dengan mengacu pada prinsip-prinsip GCG yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), yaitu mencakup:

1. Hak-hak Pemegang Saham
2. Perlakuan yang setara terhadap Pemegang Saham
3. Peran Pemangku Kepentingan

In 2017, the Company also took a GCG assessment to evaluate its implementation against the ASEAN Corporate Governance Scorecard, which is an initiative of the ASEAN Capital Market Forum (ACMF). The ACMF functions to appraise GCG implementation in reference to the GCG principles developed by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), including:

1. Rights of Shareholders
2. Equitable Treatment of Shareholders
3. Role of Stakeholders

KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN

COMMITMENT TO SUSTAINABLE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

4. Pengungkapan dan Transparansi
5. Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi

Hasil *assessment* penerapan GCG Indonesia Power tahun 2017 mencapai total skor sebesar 85,51.Hal ini menunjukkan bahwa penerapan GCG Indonesia Power pada tahun 2017 telah mencapai kualifikasi ***GOOD***. Skor masing-masing komponen *Scorecard* sebagai berikut:

4. Disclosure and Transparency
5. Responsibilities of the Board of Commissioners and Directors

The result of the GCG assessment in 2017 showed that Indonesia Power managed to reach 85.51 point in total. The score showed that Indonesia Power's GCG implementation in 2017 fell under **GOOD** category. Each Scorecard component's score is as follows:

Area	Bobot Weight	Capaian Tahun 2017 Evaluation in 2017	
		Skor Score	% Capaian % Achieved
Level 1			
A Rights of Shareholders	10,00	5,88	58,82
B Equitable Treatment of Shareholders	15,00	12,50	83,33
C Role of Stakeholders	10,00	9,23	92,31
D Disclosure and Transparency	25,00	19,64	78,57
E Responsibilities of The Board	40,00	31,25	78,13
Level 1 Sub-Total	100,00	**78,51**	78,51
Level 2			
Bonus	30,00	7,00	
Penalty	(65,00)	0,00	
Level 2 Sub-Total	30,00	7,00	
Skor Keseluruhan | Total Score	130,00	**85,51**	
Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG **Classification of the Quality of GCG Implementation**		**GOOD**	

Corporate Governance Perception Index (CGPI)

Indonesia Power secara aktif mengikuti Program Riset dan Pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) sebanyak 4 (empat) kali yaitu tahun 2012, 2013, 2016 dan 2017. Pada tahun 2017, dilaksanakan CGPI untuk penilaian tahun 2016. Penilaian CGPI meliputi beberapa tahapan antara lain: (1) *Self assessment*; (2) Kelengkapan dokumen; (3) Penyusunan makalah; dan (4) Observasi. Berdasarkan tahapan penilaian CGPI Tahun Penilaian 2016 yang dilaksanakan pada tahun 2017 sebagaimana tersebut di atas, Indonesia Power berhasil memperoleh peringkat PERUSAHAAN TERPERCAYA dengan skor 84,22.

Corporate Governance Perception Index (CGPI)

Indonesia Power actively involves in the Corporate Governance Perception Index (CGPI) Research and Rating Program held by the Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) for four times, in 2012, 2013, 2016, and 2017. The CGPI 2017 was held for assessing the performance in 2016. The CGPI assessment covers several stages: (1) Self-assessment; (2) Document integrity; (3) Paper preparation; and (4) Observation. The CGPI 2016 assessment held in 2017 as mentioned above earned the rating TRUSTED for Indonesia Power, at the score 84.22.

Tabel Hasil CGPI Perusahaan Tahun 2017
Table: CGPI in 2017

Aspek & Indikator Aspect & Indicator	Bobot Weight	Skor Score
Struktur Tata Kelola | Governance Structure	32,72	27,65
Proses Tata Kelola | Governance Process	33,64	28,89

Aspek & Indikator Aspect & Indicator	Bobot Weight	Skor Score
Hasil Tata Kelaola I Governance Outcome	33,64	27,68
Skor Penilaian I Assessment Score	**100**	**84,22**
Rating CGPI I CGPI Rating	**Terpercaya I Trusted**	

Sinergi Tata Kelola Perusahaan Dengan Anak Perusahaan

Sebagai salah satu bentuk sinergi dengan anak perusahaan, Indonesia Power melakukan proses penyelarasan proses penerapan GCG pada Anak Perusahaan yaitu PT Cogindo DayaBersama (CDB), PT Artha Daya Coalindo (ADC) dan PT Indo Pusaka Berau (IPB) agar sejalan dengan pelaksanaan GCG Indonesia Power. Salah satu bentuk implementasinya adalah dengan menjadikan hasil penilaian implementasi GCG sebagai bagian dari *Key Performance Indicator* (KPI) Anak Perusahaan. Berikut skor penilaian GCG masing-masing anak Perusahaan pada tahun 2017:

Company-Subsidiary Governance Synergy

To create synergy with the subsidiaries, Indonesia Power aligns its GCG implementation at the subsidiaries PT CogindoDaya Bersama (CDB), PT Artha Daya Coalindo (ADC), and PT Indo Pusaka Berau (IPB) with the Indonesia Power GCG implementation. This is among others performed by including GCG implementation assessment as a part of the Subsidiaries' Key Performance Indicators (KPI). The table below presents GCG assessment score at the Subsidiaries in 2017:

Tabel Skor Penilaian GCG Anak Perusahaan Tahun 2017
Table: GCG Assessment Score at Subsidiaries in 2017

No	Aspek Pengujian Assessment Aspects	ADC		CDB		IPB	
		Skor Score	Capaian Progress (%)	Skor Score	Capaian Progress (%)	Skor Score	Capaian Progress (%)
1	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Good Corporate Governance Implementation	6,83	98	6,77	96,74	4,91	70,10
2	Pemegang Saham dan RUPS Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owner	8,57	95	8,08	89,78	8,56	95,15
3	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Board	30,36	92	31,65	90,43	28,91	86,32
4	Direksi I Board of Directors	30,21	86	31,88	91,07	30,50	88,71
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	5,41	60	6,82	75,80	5,04	56,09
6	Aspek Lainnya I Other Aspects	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Skor Keseluruhan I Overall Score		**81,40**	**83**	**85,20**	**85,20**	**77,92**	**79,27**
Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG Classification of GCG Implementation Quality		**Baik Good**		**Sangat Baik Very Good**		**Baik Good**	

Indonesia Power terus melakukan pemantauan terhadap peningkatan implementasi GCG Anak Perusahaan diantaranya melalui pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil *assessment* yang telah dilakukan. Dengan begitu, Indonesia Power berharap implementasi praktik GCG di Perusahaan baik di tingkat Korporat, Anak Perusahaan serta Unit Perusahaan dapat ditingkatkan sesuai dengan *best practice* tata kelola perusahaan.

Indonesia Power performs constant monitoring to GCG implementation improvement at Subsidiaries, among others by monitoring the follow-up on the recommendations from the assessment performed. Therefore, Indonesia Power hopes that the GCG implementations at the Corporate, Subsidiary, and Unit levels are enhanced according to the corporate governance best practices.

STRUKTUR, KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE, POLICY AND MECHANISM



Tata kelola Indonesia Power didukung dengan perangkat implementasi baik struktur organ maupun kebijakan sesuai dengan skala organisasi dan lingkup bisnis yang dijalankan. Perangkat pendukung tersebut dievaluasi secara berkala agar senantiasa relevan dengan perkembangan Perusahaan.

Indonesia Power governance is supported by the implementation of organizational structure and policy, in accordance with the Company scale and business scope. These supporting organs are periodically evaluated to maintain their relevance with the Company development.

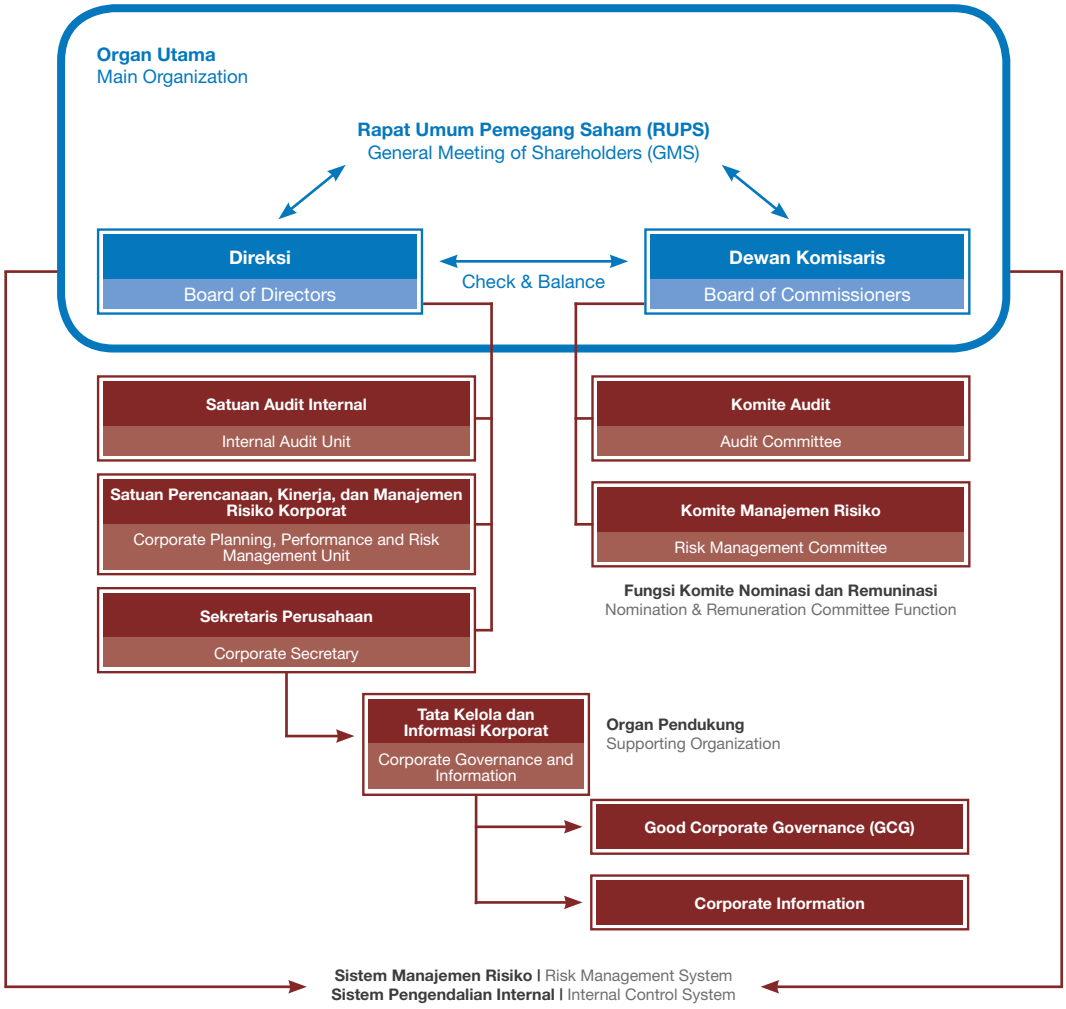
Struktur Tata Kelola Perusahaan

Struktur tata kelola Indonesia Power terdiri dari Organ Utama dan Organ Pendukung. Organ Utama Perusahaan meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Adapun Organ Pendukung perusahaan meliputi Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, Sekretaris Perusahaan, Satuan Audit Internal dan Satuan Perencanaan, Kinerja, dan Manajemen Risiko Korporat.

Corporate Governance Structure

Indonesia Power governance structure consists of Main and Supporting Organs. The Main Organs cover General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, and Board of Directors. The Supporting Organs include Audit Committee, Risk Management Committee, Corporate Secretary, Internal Audit Unit, and Corporate Planning, Performance, and Risk Management Unit.

Gambar Struktur Tata Kelola Perusahaan
Figure: Corporate Governance Structure



Kebijakan Pendukung Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Kebijakan Pendukung Penerapan GCG Perusahaan merupakan perangkat ketentuan dan prosedur yang menjadi pedoman dalam menunjang implementasi GCG di lingkungan Perusahaan. Kebijakan tersebut dirancang sesuai dengan ketentuan dan kondisi Perusahaan serta ditinjau secara berkala untuk dilakukan pemutakhiran seiring dengan perkembangan Perusahaan dan peraturan yang berlaku. Perangkat kebijakan tata kelola perusahaan Indonesia Power terdiri dari 5 (lima) level kebijakan sebagai berikut:

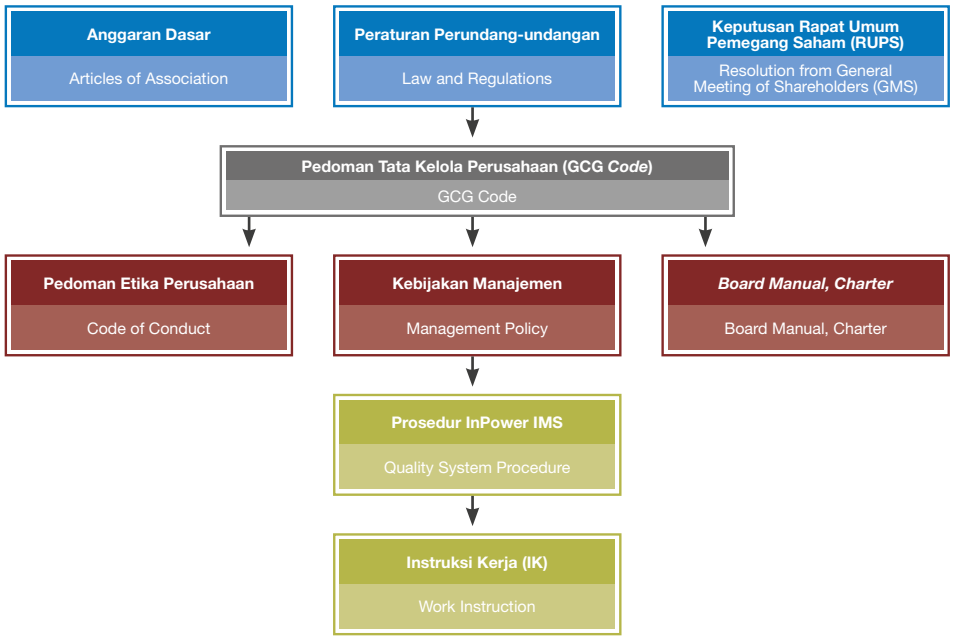
Supporting Policy for Corporate Governance Implementation

GCG Implementation Supporting Policy contains the provisions and procedures that serve as the guidelines in supporting GCG implementation within the Company. The policy is designed according to the Company's terms and conditions and periodically reviewed to keep up with the Company's development and applicable Regulations. Indonesia Power Corporate Governance Policy consists of five policy levels as follows:

STRUKTUR, KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE, POLICY AND MECHANISM

Gambar Tata Urutan Kebijakan Perusahaan
Figure: Corporate Governance Policy Sequence



Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*GCG Code*)

Indonesia Power telah memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*GCG Code*) yang merupakan arahan strategis Direksi dan Dewan Komisaris dalam penerapan prinsip-prinsip GCG, nilai-nilai Perusahaan, Visi dan Misi yang menjadi acuan bagi Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen dan Pegawai dalam mengelola Perusahaan. GCG *Code* pertama kali disusun pada tahun 2002, yang kemudian mengalami penyempurnaan pada tahun 2013 dan 2016 untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 242.K/010/IP/2016 dan Nomor 16.K/DEKOM-IP/2016 tanggal 16 Desember 2016. Pedoman ini merupakan panduan GCG yang diperluas, yang menjadi aspek pengujian dalam menyusun dan mengeluarkan keputusan dan peraturan yang diperlukan, bersifat *living document* yang perlu terus dikaji secara berkala yang disesuaikan dengan perkembangan dan isu-isu internal serta eksternal Perusahaan.

Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*)

Perusahaan memandang bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan GCG perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Pedoman

GCG Code

Indonesia Power owns a GCG Code which provides strategic directives from the Board of Directors and the Board of Commissioners in implementing GCG principles, Company Values, and Vision and Mission as the reference for the Board of Commissioners, Board of Directors, Management, and the Employees in managing the Company. The GCG Code was first established in 2002, and amended in in 013 and 2016, to be further determined in Joint Decree of the Board of Directors and the Board of Commissioners No. 242.K/010/IP/2016 and 16.K/DEKOM-IP/2016 dated December 16, 2016. The Code is an extended GCG guideline which contains the aspect for the assessment of the preparation and issuance of necessary decrees and regulations. As a living document, it needs periodical review and adjustment with the latest internal and external issues.

Code of Conduct

The Company believes that in order to secure long-term success, GCG needs to be implemented with high integrity. The Code of Conduct serves as a

Etika Perusahaan merupakan acuan dalam melakukan interaksi di antara manajemen, pegawai serta para pemangku kepentingan (*stakeholder*) sesuai dengan nilai dan budaya perusahaan yang diharapkan serta prinsip-prinsip GCG. Penerapan *Code of Conduct* merupakan bagian terpenting dalam implementasi tata kelola perusahaan yang sehat serta penguatan nilai dan budaya yang dimiliki Perusahaan.

Uraian lebih lengkap mengenai Pedoman Etika Perusahaan dijelaskan pada bab **Tata Kelola Perusahaan** bagian **Pedoman Etika Perusahaan** dalam Laporan Tahunan ini.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*)

Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ utama Perusahaan memerlukan pedoman kerja yang mengatur tugas dan tanggung jawab masing-masing beserta hubungan kerja keduanya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Indonesia Power Nomor 178.K/010/IP/2013 dan Nomor 006.SK/DEKOMIP/2013 dan tanggal 21 November 2013. Sampai dengan 31 Desember 2017, *Board Manual* sedang dalam proses pemutakhiran yang akan ditetapkan pada tahun 2018. *Board Manual* merupakan dokumen yang menjelaskan secara garis besar hak, kewajiban, tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ utama Perusahaan serta proses hubungan dan fungsi antara kedua organ tersebut. *Board Manual* ini merupakan salah satu *soft structure Good Corporate Governance*, sebagai penjabaran dari Pedoman GCG yang mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan *Whistle Blowing System* (WBS)

Dalam rangka memastikan praktik bisnis yang beretika, sehat dan berintegritas, Indonesia Power telah memiliki dan menerapkan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor 136.K/020/IP/2011 dan Nomor 011.SK/DEKOM-IP/2011 tentang Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistle-Blowing System*/WBS) Indonesia Power. Kebijakan WBS menjadi bagian dari kerangka kebijakan pendukung GCG Perusahaan. Adapun lingkup Kebijakan WBS mengatur mulai dari mekanisme penyampaian laporan (pihak yang bertanggung jawab

reference for interactions between the management, the employees, and the stakeholders according to the desired company values and culture and the GCG principles. The implementation of the Code of Conduct is vital to a sound corporate governance, to strengthen the Company's values and culture.

Detailed information on the Code of Conduct is provided in the chapter **Corporate Governance**, section **Code of Conduct** of this Annual Report.

Board Manual

As the Company's main organs, the Board of Commissioners and the Board of Directors requires a manual to regulate their duties and responsibilities as well as the work relationship between both organs according to GCG principles. The Board Manual was ratified by Joint Decree of the Board of Directors and the Board of Commissioners No. 178.K/010/IP/2013 and No. 006.SK/DEKOMIP/2013 respectively dated November 21, 2013. Until December 31, 2017, the Board Manual was in the updating process, and will be stipulated in 2018. The Board Manual explains in general the rights, obligations, duties, and authorities of the Board of Commissioners and the Board of Directors as the Company's main organs, along with the relationship and function between both organs. The Manual is construed as a Good Corporate Governance soft structure which elaborates the GCG Code that refers to the Company's Articles of Association and the applicable Laws and Regulations.

Whistle Blowing System (WBS) Policy

To ensure ethical, sound, and honorable business practices, Indonesia Power has owned and implemented the Whistle Blowing System Policy since 2011 in accordance with Joint Decree of the Board of Directors and the Board of Commissioners Numbers 136.K/020/IP/2011 and 011.SK/DEKOM-IP/2011 on Indonesia Power Whistle Blowing System (WBS) Policy. WBS Policy is an integral part of the Company's GCG supporting policy. The WBS Policy scope covers from whistle blowing mechanism (party responsible of receiving tip-off, whistle blower confidentiality and protection, communication with whistle blower),

STRUKTUR, KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE, POLICY AND MECHANISM

menerima laporan, kerahasiaan dan perlindungan pelapor, komunikasi dengan pelapor), pelaksanaan verifikasi dan investigasi, sampai dengan laporan status perkembangan laporan yang telah disampaikan serta apresiasi dan sanksi bagi pelakunya.

verification and investigation, to progress report, not to mention the appreciation and sanction for the performers.

Pedoman Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah suatu keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomi Perusahaan dengan kepentingan ekonomi pribadi Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham. Pada dasarnya Perusahaan mengatur ketentuan benturan kepentingan dengan disusunnya Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) yang disahkan melalui Keputusan Direksi Nomor 166.K/10/IP/2014 tanggal 10 Oktober 2014. Pedoman tersebut bertujuan agar potensi benturan kepentingan tersebut ditangani sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sehingga tetap menjunjung tinggi etika dan praktik bisnis yang sehat dan mencegah kecurangan serta penyimpangan perilaku lainnya.

Conflict of Interest Code

Conflict of Interest is a circumstance in which a conflict occurs between the Company's economic interest and the personal interests of the Board of Directors, Board of Commissioners, and the Shareholders. Essentially, the Company sets the provision on the conflict of interest under the Conflict of Interest Code which was ratified by Directors' Decree No. 166.K/10/IP/2014 dated October 10, 2014. The Code aims to address potential conflicts of interest in accordance with Good Corporate Governance principles thus maintaining ethical and sound business practices while preventing fraud and other deviant behaviors.

Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Untuk menghindari terjadinya tindakan dan praktik yang mengarah pada tindak pidana suap, Indonesia Power telah menetapkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi serta prosedur pelaporan kemungkinan adanya Gratifikasi yang disahkan melalui Keputusan Direksi Nomor 165.K/1010/IP/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Perusahaan. Program ini merupakan tindak lanjut dari deklarasi "Indonesia Power Bersih" yang dilaksanakan pada tahun 2014. Sedangkan acuan IP Bersih adalah program yang dikeluarkan oleh PT PLN (Persero) sebagai entitas induk, yaitu: "PLN Bersih". Pedoman Pengendalian Gratifikasi terdiri dari landasan hukum pengaturan Gratifikasi, cara mengidentifikasi Gratifikasi, penerimaan, pemberian, penolakan, pelaporan, pemantauan dan sanksi atas penyimpangan ketentuan Gratifikasi. Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini mengikat dan mengatur segenap insan Indonesia Power dalam menjalankan kegiatan usaha, sehingga diharapkan dengan adanya pedoman tersebut dapat membentuk lingkungan Perusahaan yang terkendali dalam penanganan Gratifikasi sehingga prinsip-prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dapat terlaksana dengan baik.

Gratification Control Guidelines

To avoid the actions and practices that lead to bribery, Indonesia Power has set the Gratification Control Guidelines and the procedure for potential gratification reporting as ratified by Directors' Decree No. 165.K/1010/IP/2014 dated October 10, 2014 on Guidelines for Gratification Control in the Company. The program is the continuation of "Indonesia Power Bersih" declaration made in 2014. IP Bersih implementation refers to "PLN Bersih" program established by PT PLN (Persero) as the parent entity. The Gratification Control Guidelines consist of the legal basis for gratification control; how to identify gratification; receipt, provision, refusal, reporting, monitoring of gratification; and sanction imposed on violation to the Gratification Control Guidelines. The Gratification Control Guidelines bind and regulate all Indonesia Power personnel in running the business, and are expected to create a controlled environment in terms of gratification controlling, so that the transparency and accountability principles are well implemented.

Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Indonesia Power telah memiliki kebijakan tentang kepatuhan terhadap penyampaian LHKPN yang tertuang dalam Keputusan Direksi Nomor 173.K/010/IP/2013 tanggal 22 Oktober 2013 tentang Laporan Harta Kekayaan Pejabat Perusahaan (LHKPP) di lingkungan PT Indonesia Power sebagaimana telah mengalami perubahan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 235.K/010/IP/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan PT Indonesia Power. Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 235.K/010/IP/2017, yang menjadi wajib lapor LHKPN terdiri dari pegawai pada jenjang jabatan eksekutif utama, eksekutif senior dan eksekutif pada jenis jabatan struktural dan fungsional serta jabatan lainnya yang ditunjuk oleh Direksi dalam rapat Direksi.

State Officials Wealth Report (LHKPN) Guidelines

Indonesia Power is equipped with the policy on the compliance with State Officials Wealth Report (LHKPN) submission as written in Directors' Decree No. 173.K/010/IP/2013 dated October 22, 2013 on State Officials Wealth Report (LHKPN) in PT Indonesia Power which was amended by Directors' Decree No. 235.K/010/IP/2017 dated December 11, 2017 on State Officials Wealth Report (LHKPN) in PT Indonesia Power. Pursuant to Directors' Decree No. 235.K/010/IP/2017, the parties obliged to submit the LHKPN are employees at main executive level, senior executives, executives at structural and functional positions, and other positions assigned by the Board of Directors in the Board of Directors meetings.

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Indonesia Power menerapkan GCG dalam berbagai proses mulai dari rekrutmen, sistem pengendalian internal, pengelolaan risiko, evaluasi kinerja, pengambilan keputusan sampai dengan sistem *reward* dan *punishment*. Indonesia Power senantiasa melakukan perbaikan dan meminta masukan dari pihak eksternal dengan melakukan *assessment* GCG secara independen sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG. Secara keseluruhan, mekanisme penerapan tata kelola di Perusahaan telah berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar tata kelola yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*) serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).

Corporate Governance Mechanism

Indonesia Power implements GCG in a number of processes, from recruitment, internal control system, risk management, performance evaluation, decision making, to reward and punishment system. Indonesia Power constantly makes improvements and asks for inputs from external parties through independent GCG assessment in order to improve the quality of GCG implementation. As a whole, the mechanism of governance implementation at the Company is based on the basic governance principles, i.e. transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness.

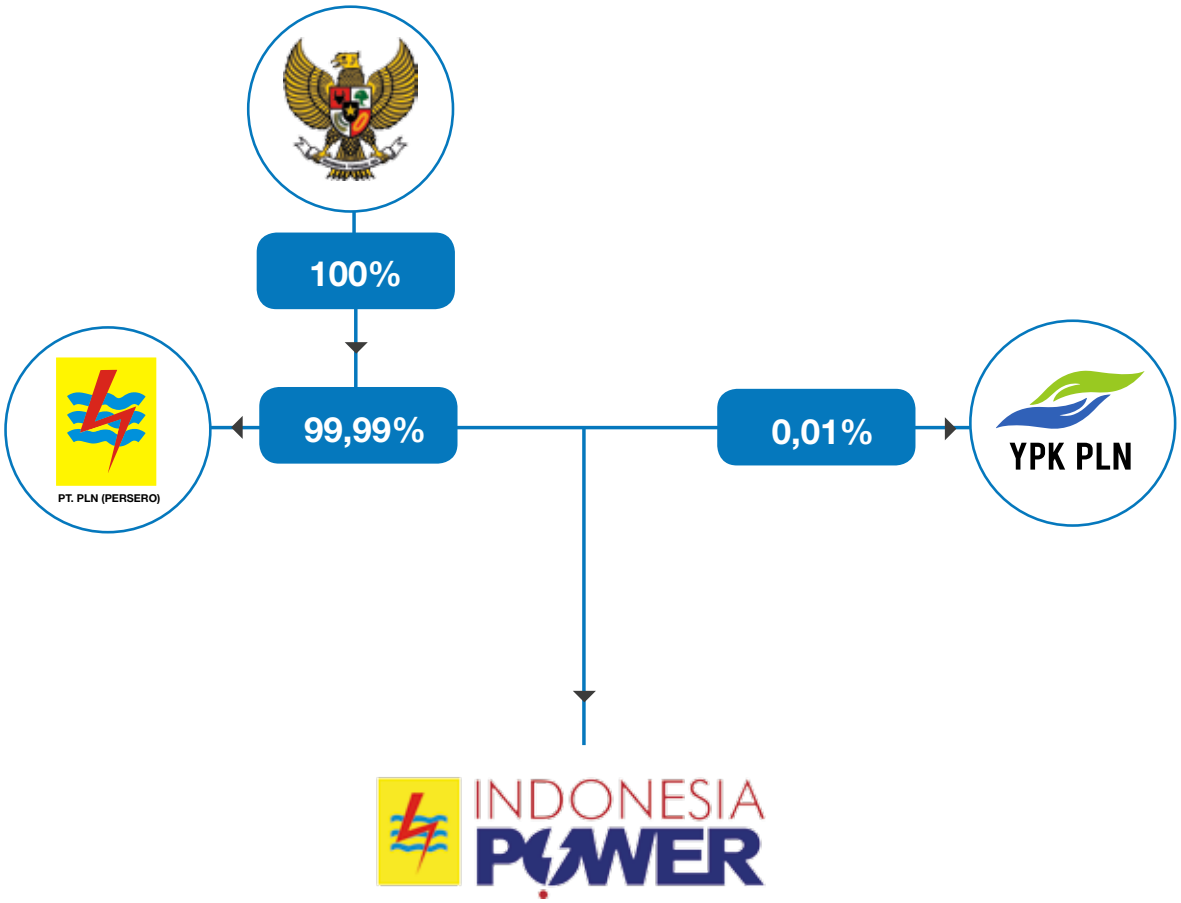
INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

INFORMATION ON MAJOR AND CONTROLLING SHAREHOLDERS

PT PLN (Persero) merupakan pemegang saham utama dan pengendali Indonesia Power dengan kepemilikan saham yang terdiri dari 1 lembar Saham Seri 1 dan 5.215.647.598 lembar Saham Seri 2. Pemegang saham utama dan pengendali diwakili oleh Direktur Utama PT PLN (Persero), yang secara teknis berada di bawah Sekretaris Perusahaan cq. Fungsi Hubungan Investor. Adapun skema pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan adalah sebagai berikut:

PT PLN (Persero) is the major and controlling shareholder of Indonesia Power, with the shareholding covering 1 Series A share and 5,215,647,598 Series 2 shares. The major and controlling shareholder is represented by PT PLN (Persero) President Director and technically handled by the Corporate Secretary c.q. Investor Relation Function. Whereas the scheme of major and controlling shareholder are as follows:

Skema Pemegang Saham Utama dan Pengendali Perusahaan
Scheme: Major and Controlling Shareholders



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)



RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang atau anggaran dasar. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, penyelenggaraan RUPS terdiri dari:

1. **RUPS Tahunan**
   Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan setiap tahun untuk pengesahan RKAP, RJPP dan Laporan Tahunan yang telah disusun oleh Direksi;

2. **RUPS Luar Biasa**
   Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan apabila: (a) Setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan sesuai Pasal 22 Anggaran Dasar; (b) Dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; (c) RUPS Luar Biasa dapat dilakukan secara *on paper* (Sirkuler) yaitu pengambilan putusan oleh Pemegang Saham tanpa melakukan rapat secara fisik.

GMS is a Company organ with special authority not given to the Board of Directors or the Board of Directors, within the limit specified in the laws or articles of association. According to the Company's Articles of Association, GMS consists of:

1. **Annual GMS**
   The General Meeting of Shareholders performed on annual basis for the ratification of the WP&B, Company Long-term Plan, and Financial Statements prepared by the Board of Directors;

2. **Extraordinary GMS**
   The General Meeting of Shareholders is held when: (a) Anytime necessary for the interest of the Company according to Article 22 of the Articles of Association; (b) Considered necessary by the Board of Directors and/or the Board of Commissioners and/or the Shareholders which communally represent 1/10 (one-tenth) or more of the total shares with voting rights, unless the Articles of Association specifies a smaller number; (c) Extraordinary GMS can be held on paper (Circular), where decision making by the Shareholders is performed without face-to-face meeting.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

Hak dan Wewenang RUPS

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, meliputi:

1. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
2. Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi
3. Menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
4. Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar
5. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan
6. Menetapkan alokasi penggunaan laba
7. Menunjuk akuntan publik
8. Menetapkan jumlah dan jenis kompensasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan.

Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha Perusahaan. RUPS dan/atau Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Termasuk dalam wewenang itu, melakukan penggantian atau pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi.

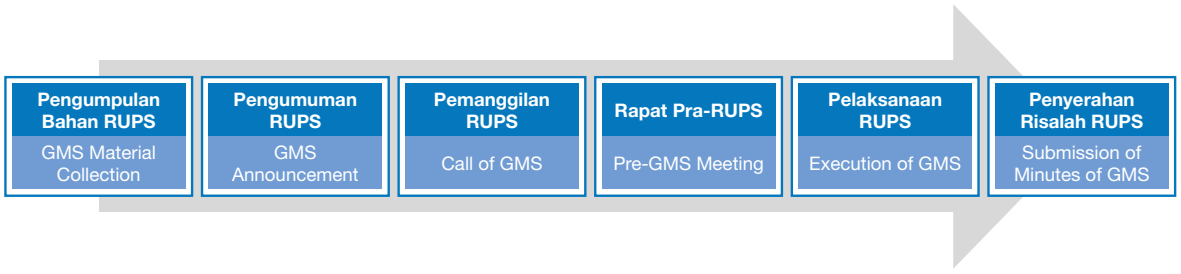
Rights and Authorities of GMS

Pursuant to the provision of the Articles of Association, the General Meeting of Shareholders (GMS) has the authority not given to the Board of Directors and the Board of Commissioners, which include:

1. Appointing and dismissing the Board of Commissioners and Board of Directors members.
2. Evaluating the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors
3. Determining provisions on dual position for the Board of Commissioners and the Board of Directors members.
4. Ratifying the amendment to the Articles of Association.
5. Providing approval for the annual report.
6. Determining the allocation for Company's profit utilization.
7. Appointing public accountant.
8. Determining the amount and type of compensation for the Board of Commissioners and the Board of Directors.

The resolutions made in the GMS must be based on the Company's business interest. GMS and/or the Shareholders cannot intervene the duties, functions, and authorities of the Board of Commissioners and the Board of Commissioners without prejudice to GMS authority to execute its rights according to the Articles of Association and the laws and regulations. Included in the authorities are the replacement or dismissal of the members of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors.

Tahapan Pelaksanaan RUPS
Implementation Phase of GMS



Pelaksanaan RUPS Tahun 2017

Sepanjang tahun 2017, Perusahaan telah menyelenggarakan 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan 14 (empat belas) kali RUPS Luar Biasa (Sirkuler). Berikut uraian sepanjang tahun RUPS tahun 2017 yang dilaksanakan Perusahaan.

GMS in 2017

The Company held 2 (two) Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and 14 (fourteen) Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS). The followings are the details of GMS 2017 at the Company.

Tabel Penyelenggaran RUPS Tahunan Tahun 2017
Table: Annual GMS in 2017

RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2017
GMS on Ratification of Work Plan and Budget (WP&B) 2017

Waktu Pelaksanaan: 10 Januari 2017 I Date: January 10, 2017
Tanggal Pengumuman RUPS: 14 November 2016 I Date of GMS Announcement: November 14, 2016
Tanggal Pemanggilan RUPS: 14 November 2016 I Date of GMS Summons: November 14, 2016
Tanggal Risalah RUPS: 10 Januari 2017 I Date of GMS Minutes: January 10, 2017

Agenda: Agenda:	**Keputusan:** Resolutions:	
1. Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2017 Approval and Ratification of Work Plan and Budget (WP&B) 2017	RUPS memutuskan menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2017 dengan pokok-pokok sasaran sebagai berikut: 1. Laba (Rugi) setelah Pajak Tahun Buku 2017 dianggarkan sebesar 2.292,11 Miliar; 2. Neraca per 31 Desember 2016 dianggarkan ditutup dengan jumlah Aktiva/Pasiva masing-masing sebesar 236.806,92; 3. Saldo Kas Per Desember 2017 dianggarkan sebesar 1.126,35 Miliar; 4. Investasi Tahun Buku 2017 dianggarkan sebesar 44.137,43 Miliar dengan Disburse sebesar 7.421,19 Miliar.	GMS decided to approve and ratify the Company Work Plan and Budget (WP&B) 2017 with the core targets as follows: 1. The Income (Loss) after Fiscal Year 2017 was allocated at 2,292.11 billion; 2. Balance Sheet per December 31, 2016 was allocated to be closed with the amount of Assets/Liabilities at each 236,806.92; 3. Cash Balance per December 2017 was allocated at 1,126.35 billion; 4. Investment for 2017 was allocated at 44,137.43 billion at the disbursement of 7,421.19 billion.
2. Persetujuan dan Pengesahan *Key Performance Indicator* (KPI) Tahun 2017 Approval and Ratification of Key Performance Indicators (KPI) 2017	RUPS menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen/*Key Performance Indicator* (KPI) 2017 antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham PT Indonesia Power. Kontrak Manajemen/Key Performance Indicator (KPI) 2017 PT Indonesia Power merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah ini.	The GMS approved and ratified the Management Contract/Key Performance Indicators (KPI) 2017 between the Board of Commissioners and the Shareholders of PT Indonesia Power. PT Indonesia Power Management Contract/Key Performance Indicators (KPI) 2017 is an integral part of the Minutes.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016

GMS on Approval of Annual Report and Ratification of Financial Statements 2016

Waktu pelaksanaan: 24 Mei 2017 I Date: May 24, 2017
Tanggal Pengumuman RUPS: 10 Mei 2017 I Date of GMS Announcement: May 10, 2017
Tanggal Pemanggilan RUPS: 10 Mei 2017 I Date of GMS Summons: May 10, 2017
Tanggal Risalah RUPS: 24 Mei 2017 I Date of GMS Minutes: May 24, 2017

Agenda: Agenda:	**Keputusan:** Resolutions:	
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2016 Approval and Ratification of Financial Statements 2016 and Report of Board of Commissioners Supervisory Duty Implementation 2016	1. RUPS menyetujui dan menerima Laporan Tahunan mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2016 yang terdiri atas Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan. 2. RUPS menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2016. 3. RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian, Laporan Arus Kas Konsolidasian dan Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Yusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" sebagaimana dimaksud dalam laporannya Nomor R/231.AGA/sat.1/2017, Tanggal 24 Maret 2017. 4. RUPS memberikan pembebasan sepenuhnya (Volledig Acquit Et De Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan dalam bidang masing-masing yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta termuat dalam Laporan Keunagna yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Yusuf, Aryanto, Mawar & Rekan. Pengesahan dan pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab hukum terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris apabila Laporan yang diungkapkan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan/atau ternyata dikemudian hari terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan/atau merugikan Perseroan.	1. The GMS approved and accepted the Annual Report on the Condition and the Course of the Company in Fiscal Year 2016, which consisted of the Financial Report, Performance Assessment Report and Compliance Report. 2. The GMS approved and accepted the Report of Board of Commissioners Supervisory Duty Implementation 2016. 3. The GMS ratified the Financial Statements 2016 which contains Consolidated Statements of Financial Position, Consolidated Statements of Comprehensive Profit or Loss, Consolidated Statements of Cash Flows, and Consolidated Statements of Changes in Equity and their explanations, which have been audited by Public Accounting Firm Amir Abadi Yusuf, Aryanto, Mawar & Partners with the opinion "Unqualified" as intended in the report Number R/231.AGA/sat.1/2017 dated March 24, 2017. 4. The GMS granted full discharge (*Volledig Acquit Et De Charge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision according to the responsibilities and actions in their respective fields run throughout fiscal year 2016, provided that the actions did not contradict the applicable laws and regulations and contained in the Financial Statements audited by Public Accounting Firm Amir Abadi Yusuf, Aryanto, Mawar & Partners. The ratification and full discharge do not waive the legal liabilities on the part of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners in case the disclosed Reports/Statements has been proven to violate the legal provisions and procedure and/or is proven to contain any irregular or damaging actions in the future.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2016 Determination of the Utilization of Net Profit from Fiscal Year 2016	RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2016.	The GMS authorized the major shareholder to determine the utilization of net profit from Fiscal Year 2016.
3. Persetujuan Tantiem Tahun Buku 2016 dan Remunerasi Tahun Buku 2017 Bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta Bonus Karyawan Tahun Buku 2016. Approval for *Tantiem* for Fiscal Year 2016 and Remuneration for Fiscal Year 2017 for the Board of Directors and the Board of Commissioners and Employee Bonus for Fiscal Year 2016.	RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Tantiem Tahun Buku 2016 dan Remunerasi Tahun Buku 2017 bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus bagi karyawan untuk Tahun Buku 2016.	The GMS authorized the major shareholder to determine the *tantiem* for fiscal year 2016 and remuneration for fiscal year 2017 for the Board of Directors and the Board of Commissioners and Employee bonus for fiscal year 2016.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk Mengaudit Perhitungan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 Appointment of Public Accountant to Audit the Company's Annual Accounting for Fiscal Year 2017	RUPS memberi kuasa kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan untuk Tahun Buku 2017.	GMS authorized the major shareholder to determine the appointment of Public Accounting Firm as the auditor of the Company's Financial Statements, Performance Assessment Report, and Compliance Report for the Fiscal Year 2017.

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
GMS resolutions are taken with deliberation and consensus.

Tabel RUPS Sirkuler Tahun 2017
Table: Circular GMS in 2017

Tanggal Date	Tentang Subject	
9 Januari 2017 January 9, 2017	Penetapan Batas Pagu Pelimpahan Kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Determination of Limit for the Delegation of Authority of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
9 Januari 2017 January 9, 2017	Penugasan pengembangan PLTU Mulut Tambang 2x300 MW Jambi.	Assignment of SPP Mulut Tambang 2xx300 MW Development in Jambi.
17 Februari 2017 February 17, 2017	Persetujuan Pendirian Anak Perusahaan Penyediaan *Sparepart*.	Approval for the Establishment of Subsidiary for Spare Parts Supply.
27 Februari 2017 February 27, 2017	Persetujuan pendirian anak perusahaan penyediaan *sparepart*.	Approval for the Establishment of Subsidiary for Spare Parts Supply.
20 Maret 2017 March 20, 2017	Penghapusan ATTB atas Unit Pembangkitan Suralaya.	Disposal of Non-Operating Fixed Assets at Suralaya Generating Unit.
20 Maret 2017 March 20, 2017	Persetujuan Penghapusan ATTB atas Unit Pembangkitan Saguling, Priok, Semarang dan Bali.	Approval for the Disposal of Non-Operating Fixed Assets at Saguling, Priok, Semarang, and Bali Generating Units.
20 Maret 2017 March 20, 2017	Persetujuan Penghapusan dan Pemusnahan Aset Tetap Tidak Beroperasi Unit Jasa Pemeliharaan.	Approval and Destruction of Non-Operating Fixed Assets at Maintenance Service Unit.
15 Mei 2017 May 15, 2017	Persetujuan Perubahan/Penyesuaian dan Penambahan Penugasan kepada Perseroan untuk dapat berperan serta dalam proses pengadaan pembelian tenaga listrik proyek IPP	Approval for Amendment/Adjustment and Addition of Assignment to the Company to participate in IPP project electricity purchase provision.
23 Mei 2017 May 23, 2017	Persetujuan Penandatanganan Kontrak EPC Proyek termasuk Pinjaman dengan Skema Export Credit Agency (ECA) dan/atau Commercial Bank oleh perseroan	Approval for Project EPC Contract Signing, including Loan under Export Credit Agency Scheme and/or Commercial Bank by the Company.
12 Juni 2017 June 12, 2017	Persetujuan Wakil Perseroan di Perusahaan Afiliasi.	Approval for the Company's Representatives at Affiliates.
7 Juli 2017 July 7, 2017	Penugasan pengembangan pembangkit senayan 100 MW.	Assessment for Senayan Power Plant 100 MW Development.
14 Agustus 2017 August 14, 2017	Persetujuan penghapusan ATTB PLTGU Tambak Lorok Semarang milik perseroan.	Approval for the disposal of Non-Operating Fixed Assets at the Self-Owned CCPP Tambak Lorok Semarang.
6 Oktober 2017 October 6, 2017	Ratifikasi/Penegasan terkait pemberian persetujuan terhadap tindakan penandatanganan dan pelaksanaan amandemen PJBTL PLTU Suralaya 1 sd 7 Tanggal 22 Agustus 2017 oleh Direksi Perseroan	Ratification/Confirmation of Approval for the Signing and Execution of SPP Suralaya 1-7 Electricity Sale and Purchase Agreement dated August 22, 2017 by the Board of Directors.
16 November 2017 November 16, 2017	Persetujuan penetapan nilai Kinerja organisasi anak perusahaan semester 1 tahun 2017.	Approval for the determination of organizational performance score of subsidiaries in the first half of 2017.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

Realisasi dan Tindak Lanjut Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya

Indonesia Power telah merealisasikan hasil keputusan RUPS yang diselenggarakan untuk tahun 2016, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Realization of and Follow-up on Resolutions of GMS in the Previous Year

Indonesia Power had completed the result of the resolutions from the GMS performed in 2016 as described in the following table:

Tabel Realisasi dan Tindak Lanjut Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya
Table: Realization of and Follow-up on GMS Resolutions in the Previous Year

Tanggal Pelaksanaan RUPS Date of GMS Implementation	Keputusan RUPS GMS Resolutions		Status		
			Realisasi Hasil RUPS Realization of GMS Result	Persentase Progress Progress	Alasan Keputusan RUPS yang Belum di Realisasikan Reason for Unrealized GMS Resolutions
RUPS Tahunan Annual GMS					
19 Januari 2016 January 19, 2016	1. RUPS memutuskan menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016 dengan pokok-pokok sasaran sebagai berikut: a. Laba (Rugi) setelah Pajak Tahun Buku 2016 dianggarkan sebesar Rp1.971,91 Miliar. b. Neraca per 31 Desember 2016 dianggarkan ditutup dengan jumlah Aktiva/Pasiva masing-masing sebesar Rp54.985,26 Miliar. c. Investasi Tahun Buku 2016 dianggarkan sebesar Rp20.488,14 Miliar dengan Disburse sebesar Rp3.504,93 Miliar. 2. RUPS menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen/ *Key Performance Indicator* (KPI) 2016 antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham PT Indonesia Power.	1. GMS decided to approve and ratify the Company Work Plan and Budget (WP&B) 2016 with the core targets as follows: a. The Income (Loss) after Fiscal Year 2016 was allocated at Rp1,971.91 billion. b. Balance Sheet per December 31, 2016 was allocated to be closed with the amount of Assets/Liabilities at each Rp54,985.26 billion; c. Investment for 2016 was allocated at Rp20,488.14 billion at the disbursement of Rp3,504.93 billion. 2. The GMS approved and ratified the Management Contract/ Key Performance Indicators (KPI) 2016 between the Board of Commissioners and the Shareholders of PT Indonesia Power.	Telah Ditindaklanjuti Follow-up completed	100%	-
7 Juni 2016 June 7, 2016	1. RUPS menyetujui dan menerima Laporan Tahunan mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2015 yang terdiri atas Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan. 2. RUPS menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015. 3. RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian, Lporan Arus Kas Konsolidasian dan Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" sebagaimana dimaksud dalam laporannya Nomor A160414006/DC2/HSH/2016, Tanggal 14 April 2016.	1. The GMS approved and accepted the Annual Report on the Condition and the Course of the Company in Fiscal Year 2015, which consisted of the Financial Report, Performance Assessment Report and Compliance Report. 2. The GMS approved and accepted the Report of Board of Commissioners Supervisory Duty Implementation 2015. 3. The GMS ratified the Financial Statements 2015 which contains Consolidated Statements of Financial Position, Consolidated Statements of Comprehensive Profit or Loss, Consolidated Statements of Cash Flows, and Consolidated Statements of Changes in Equity and their explanations, which have been audited by Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners with the opinion "Unqualified" as intended in the report Number A160414006/DC2/ HSH/2016 dated April 14, 2016.	Telah Ditindaklanjuti Follow-up completed	100%	-

Tanggal Pelaksanaan RUPS Date of GMS Implementation	Keputusan RUPS GMS Resolutions		Status		
			Realisasi Hasil RUPS Realization of GMS Result	Persentase Progress Progress	Alasan Keputusan RUPS yang Belum di Realisasikan Reason for Unrealized GMS Resolutions
	4. RUPS memberikan pembebasan sepenuhnya (*Volledig Acquit Et De Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan dalam bidang masing-masing yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta termuat dalam Laporan Keunagna yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan. Pengesahan dan pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab hukum terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris apabila Laporan yang diungkapkan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan/atau ternyata dikemudian hari terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan/atau merugikan Perseroan.	4. The GMS granted full discharge (*Volledig Acquit Et De Charge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision according to the responsibilities and actions in their respective fields run throughout fiscal year 2015, provided that the actions did not contradict the applicable laws and regulations and contained in the Financial Statements audited by Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners. The ratification and full discharge do not waive the legal liabilities on the part of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners in case the disclosed Reports/Statements has been proven to violate the legal provisions and procedure and/or is proven to contain any irregular or damaging actions in the future.			
	5. RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2015. 6. RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Tantiem Tahun Buku 2015 dan Remunerasi Tahun Buku 2016 bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus bagi karyawan untuk Tahun Buku 2015 selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2016. 7. RUPS memberi kuasa kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan untuk Tahun Buku 2016.	5. The GMS authorized the major shareholder to determine the utilization of net profit from Fiscal Year 2015. 6. The GMS authorized the major shareholder to determine the tantiem for fiscal year 2015 and remuneration for fiscal year 2016 for the Board of Directors and the Board of Commissioners and Employee bonus for fiscal year 2015 no later than August 31, 2016. 7. GMS authorized the major shareholder to determine the appointment of Public Accounting Firm as the auditor of the Company's Financial Statements, Performance Assessment Report, and Compliance Report for the Fiscal Year 2016.			
RUPS Sirkuler Circular GMS					
26 Januari 2016 January 26, 2016	Penyesuaian Struktur Organisasi Perseroan.	Adjustment to the Company's Organizational Structure.	Telah Ditindaklanjuti Follow-up completed	100%	-
28 Maret 2016 March 28, 2016	Persetujuan Pembuatan Akta Pernyataan Tentang Kesanggupan Pemenuhan Kewajiban Sesuai Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pembangunan PLTGU Tanjung Priok 800 MW Oleh PT PLN (Persero).	Approval for the Preparation of Deed of Declaration of Compliance with Obligations According to Land Use Permit (SIPPT) for the Execution of CCPP Tanjung Priok 800 MW Project by PT PLN (Persero).	Telah Ditindaklanjuti Follow-up completed	100%	-
2 Mei 2016 May 2, 2016	Pengangkatan Komisaris Ahmad Yani.	Appointment of Ahmad Yani as Commissioner.	Telah Ditindaklanjuti Follow-up completed	100%	-
14 Juli 2016 July 14, 2016	Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perseroan.	Appointment and Dismissal of the Board of Directors.	Telah Ditindaklanjuti Follow-up completed	100%	-

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

Tanggal Pelaksanaan RUPS Date of GMS Implementation	Keputusan RUPS GMS Resolutions		Status		
			Realisasi Hasil RUPS Realization of GMS Result	Persentase Progress Progress	Alasan Keputusan RUPS yang Belum di Realisasikan Reason for Unrealized GMS Resolutions
15 Agustus 2016 August 15, 2016	Penugasan Pembangunan Pembangkit *Barge Maunted Power Plant* (BMPP), Pembentukan JVC dan Persiapan Proyek Kerjasama.	Assignment of Barge Mounted Power Plant (BMPP) Construction, JVC Establishment, and Cooperation Project Preparation.	Telah Ditindaklanjuti Follow-up completed	100%	-
25 Agustus 2016 August 25, 2016	Pergantian dan Penambahan Dewan Komisaris Perseroan.	Replacement and Addition of the Board of Commissioners.	Telah Ditindaklanjuti Follow-up completed	100%	-
14 November 2016 November 14, 2016	Persetujuan Penugasan Perseroan untuk dapat Berperan Serta dalam Proses Pengadaan Pembelian Tenaga Listrik Proyek IPP sebagai Mandatory Partner.	Approval for Company Assignment to Participate in IPP Project Electricity Purchase Provision as Mandatory Partner.	Telah Ditindaklanjuti Follow-up completed	100%	-
30 November 2016 November 30, 2016	Persetujuan Penambahan Penyetoran Modal Perseroan Kepada PT IRP.	Approval for Addition of the Company's Capital Deposit to PT IRP.	Telah Ditindaklanjuti Follow-up completed	100%	-
30 November 2016 November 30, 2016	Persetujuan Penugasan Pengembangan PLTGU Grati Add-On Blok 2 (Kapasitas 150 MW).	Approval for the Assignment of CCPP Grati Add-On Block 2 Development (at 150 MW Capacity).	Telah Ditindaklanjuti Follow-up completed	100%	-
30 Desember 2016 December 30, 2016	Penugasan Pengembangan PLTU Mulut Tambang 2x300 MW di Jambi.	Assignment of SPP Mulut Tambang 2xx300 MW Development in Jambi.	Telah Ditindaklanjuti Follow-up completed	100%	-
30 Desember 2016 December 30, 2016	Penetapan Batas Pagu Pelimpahan Kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris.	Determination of Limit for the Delegation of Authority of the Board of Directors and the Board of Commissioners.	Telah Ditindaklanjuti Follow-up completed	100%	-

Arahan RUPS dan Tindak Lanjutnya

Sepanjang tahun 2017, Pemegang Saham Perusahaan juga memberikan arahan dalam RUPS. Indonesia Power senantiasa melakukan tindak lanjut dan *monitoring* berkala atas seluruh arahan dalam RUPS untuk kemudian dilaporkan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris dalam bentuk penyajian Laporan Manajemen. Seluruh arahan RUPS tahunan telah selesai ditindaklanjuti oleh Perusahaan, sebagaimana tabel berikut.

GMS Directives and Their Follow-ups

In 2017, the Shareholders also provided their directives during the GMS. Indonesia Power constantly performs the follow-up and regular monitoring of the entire directives in the GMS to be further reported to the Shareholders and the Board of Commissioners as the Management Report. All of the directives given in the Annual GMS were followed-up by the Company, as shown in the table below:

Tabel Tindak Lanjut Arahan Pemegang Saham Tahun 2017
Table: Follow-up on Shareholders' Directives in 2017

No	Arahan Pemegang Saham Shareholders' Directives		Tindak Lanjut Follow-up		Prosentase Progress Progress
1.	Direksi Perseroan diminta untuk mengacu pada Peraturan Direksi PT PLN (Persero) tentang Pedoman Penugasan kepada Anak Perusahaan dalam melaksanakan penugasan dari Pemegang Saham	The Board of Directors is required to refer to the Regulation of PT PLN (Persero) Board of Directors on Guidelines for Assignments to Subsidiaries in the performance of assignment from the Shareholders.	Penugasan telah mengacu pada Peraturan Direksi PT PLN (Persero) tentang Pedoman Penugasan kepada Anak Perusahaan. Penugasan dari Pemegang Saham antara lain Pengembangan Proyek IPP PLTU MT Kaltim-3 (2 x100 MW), PLTU MT Kaltim-5 (2x100 MW), PLTU MT Kaltim-6 (2 x 100 MW), PLTU Kalbar (2 x 100 MW) dan PLTU MT Jambi 1 (2 x 300 MW).	The assignments were performed with reference to the Regulation of PT PLN (Persero) Board of Directors on Guidelines for Assignments to Subsidiaries. The Assignments from the Shareholders among others include Developments of IPP SPP MT Kaltim-3 (2 x100 MW), SPP MT Kaltim-5 (2x100 MW), SPP MT Kaltim-6 (2 x 100 MW), SPP Kalbar (2 x 100 MW), and SPP MT Jambi 1 (2 x 300 MW) Projects.	100%
2.	Direksi Perseroan diminta untuk menyusun strategi dan *action plan* eksekusi setiap program/proyek penugasan dari Pemegang Saham dan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah terbitnya penugasan	The Board of Directors is required to prepare the strategy and action plan for the implementation of every assignment program/project from the Shareholders which must be submitted no later than one (1) month since the issuance of the assignment.	Telah dilaksanakan pembahasan dengan Tim Portofolio PLN.	Discussions with PLN Portfolio Team were held.	100%
3.	Direksi Perseroan diminta untuk mencapai target penurunan BPP yang telah ditetapkan.	The Board of Directors is required to reach the determined target of Cost of Supply efficiency.	Realisasi pecapaian Effisiensi BPP s.d Desember 2017 mencapai Rp2,19 miliar atau 164% dari target tahun 2017 sebesar Rp1,34 triliun dengan Program/langkah kerja yang telah dilakukan sbb: 1. Renegosiasi harga PGN telah disepakati dengan harga $7,9/mmbtu (per April 2017) 2. Negosiasi harga midstream LNG Benoa menjadi $3,5/mmbtu per Mei 2017 sehingga total harga gas Bali menjadi $9,5/mmbtu 3. Pengoptimalisasian pengoperasian CF PLTA di saat memiliki ketersediaan air 4. *Backloading* BBM 5. Optimalisasi angkutan batubara berdasarkan kapasitas *jetty* PLTU: a. Penggunaan tongkang dengan kapasitas > 300 ft b. Penggunaan armada *vessel* (*handymax* dan panama) untuk PLTU Suralaya 8 6. Penghapusan biaya *hauling* batubara untuk pasokan batubara PT Bukit Asam untuk pasokan tahun 2017.	The actual Cost of Supply efficiency until December 2017 reached Rp2.19 billion or 164% of the 2017 target at Rp1.34 trillion with the implemented work programs as follows: 1. PGN price renegotiation has reached the price of US$7.9/mmbtu (per April 2017). 2. LNG Benoa midstream price renegotiation reached the price of US$3.5/mmbtu per May 2017, and therefore the total Bali gas price is US$9.5/mmbtu. 3. Optimization of Hydro Power Plant CF operation during available water supply. 4. Fuel Backloading 5. Optimization of coal hauling according to Hydro Power Plant's jetty capacity: a. Utilization of 300 ft barge. b. Utilization of vessel fleet (Handymax and Panama) for SPP Suralaya 8 6. Disposal of coal hauling for PT Bukit Asam coal supply for 2017.	100%

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

No	Arahan Pemegang Saham Shareholders' Directives		Tindak Lanjut Follow-up		Prosentase Progress Progress
4	Direksi Perseroan diminta untuk melakukan evaluasi terhadap hasil *audited* 2016 dibandingkan dengan prognosa 2016 yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKAP 2017. Apabila terjadi perbedaan signifikan (>10%), maka perlu dikoordinasikan untuk dilakukan revisi RKAP 2017 dan KPI Manajemen.	The Board of Directors is required to compare the result of 2016 audited with the 2016 prognosis used as the reference in the preparation of WP&B 2017. In the event of significant difference (>10%), a coordination is required to revise the WP&B 2017 and Management's KPI.	Tidak ada perbedaan yg signifikan di Beban usaha antara Prognosa dan *Audited* 2016. Sudah diajukan Revisi RKAP 2017 dengan kesimpulan bahwa usulan tersebut tidak disetujui namun dengan kesepakatan sbb: 1. Hal yang berbeda antara realisasi dengan RKAP agar dijelaskan dalam RUPS LPT 2017 2. Perhitungan realisasi KPI akan dilakukan kalibrasi penilaian KPI untuk kinerja realisasi kinerja investasi sepanjang IP dapat menunjukkan *evidence* bahwa hal tsb di luar kendali Perusahaan.	There were no significant differences of the Operating Expenses contained in the Prognosis and Audited Statements 2016. Revision to WP&B 2017 was submitted with the conclusion that such proposal was not approved, with the following agreements: 1. The differences between the Actual Statements and the WP&B must be explained in EGMS 2017. 2. The calculation of actual KPI will be calibrated using KPI assessment for actual investment performance with the condition that IP can show evidence that it is beyond the control of the Company.	100%
5	Direksi Perseroan diminta untuk terus meningkatkan pengelolaan K3L sehingga Pembangkit Perseroan dapat memperoleh Proper hijau.	The Board of Directors is required to continue improving the Occupational Health, Safety, and Environment management to realize Proper Green for the Company's Power Plants.	1. Menggandeng Tim ITS dan UGM untuk verifikasi kelengkapan Dokumen Proper dari UP/UJP dan tindak lanjutnya 2. Melakukan *workshop* verifikasi kelengkapan dokumen proper oleh KP-ITS-UGM-UP/UJP 3. Pendampingan KP kepada UP/UJP dan tinjauan ke lapangan 4. Melakukan kordinasi dengan bidang terkait (BidKom dan DivEng)	1. Approaching Teams from ITS and UGM for verifying the integrity of Proper Documents from Generating Unit/Generating Service Unit and the follow-up. 2. Conducting workshop to verify Proper Documents integrity by Head Office-ITS-UGM-Generating Unit/ Generating Service Unit. 3. Head Office's assistance to Generating Unit/Generating Service Unit and site visit. 4. Coordinating with relevant sections (Communication Department and Engineering Division).	100%
6	Direksi Perseroan diminta untuk meningkatkan performa pembangkit existing dengan mengintensifkan *maintenance capex* guna meningkatkan efisiensi agar dapat bersaing dengan IPP terkait ketatnya *merit order*.	The Board of Directors is required to improve the performance of existing power plants by intensifying CAPEX maintenance for efficiency enhancement to be able to compete with IPP pertaining to merit order.	1. Pendataan peralatan investasi 2017 (telah tersedia daftar investasi) 2. Pendataan ketersediaan *Maintenance Strategy* atas investasi 2017 (MS sudah tersedia dalam dokumen LCM saat pengajuan investasi) 3. Pemastian eksekusi *Maintenance Strategy* (MS dilaksanakan setelah investasi direalisasikan) 4. Pada workshop UAI 2017 tanggal 23-27 Oktober 2017) Komite Investasi telah memverifikasi kelengkapan dokumen (terrmasuk didalamnya ketersediaan *Maintenance Strategy* (MS)	1. Inventorying investment equipment 2017 (available in investment list). 2. Inventorying available Maintenance Strategy (MS) for investment in 2017 (MS available in LCM document during investment proposal). 3. Ensuring the implementation of Maintenance Strategy (MS implemented after investment is realized). 4. During the UAI 2017 workshop on October 23-27 2017, Investment Committee has verified the integrity of documents (including the availability of Maintenance Strategy).	100%
7	Direksi Perseroan diminta untuk terus meningkatkan kinerja jasa O&M khususnya biaya O&M agar dapat berkontribusi terhadap penurunan BPP dan dilakukan *monitoring* secara berkala	The Board of Directors is required to improve the O&M Services performance, particularly cost performance, to contribute to Cost of Supply efficiency and to perform periodical monitoring.	Optimalisasi biaya pemeliharaan sebesar 35% melalui prioritisasi program pemeliharaan	Optimization of maintenance cost by 35% by prioritizing maintenance program.	100%

No	Arahan Pemegang Saham Shareholders' Directives		Tindak Lanjut Follow-up		Prosentase Progress Progress
8	Direksi Perseroan diminta untuk terus mengupayakan perbaikan *Net Plant Heat Rate* (NPHR) yang disertai dengan pendokumentasian dan standardisasi proses bisnis	The Board of Directors is required to seek improvement of Net Plant Heat Rate (NPHR) along with business process documentation and standardization.	1. Mendorong percepatan rehabilitasi peralatan yang sudah banyak mengalami degradasi, antara HRSG tubing UP Semarang. Sebagian usulan sudah dimasukkan dalam AI 2017 dan UAI 2018. 2. Mendorong penggunaan peralatan yang dapat meningkatkan efisiensi thermal, misalnya HEPA *filter*, *power augmentation* ataupun *upgrade* HGP Parts. Pekerjaan *Power Augmentation* sedang dilakukan dibantu konsultan dan untuk *Upgrade* HGP *Parts* Tambak Lorok Blok 1 & 2 sudah dilakukan kajian belum Feasible 3. Melakukan *performance test* pada beberapa jenis nilai kalor batu bara untuk mendapatkan pola operasi yang optimal (PLTU Suralaya) 4. Program berkelanjutan: a. Menjaga kondisi *equipment* pada kondisi bersih & efisien, antara lain dengan menjalankan *compressor washing* & HRSG *cleaning* & *Condensor cleaning* b. Menjalankan peralatan yang mendukung pada peningkatan efisiensi, antara lain sistem *compressor washing* secara konsisten c. Mendorong eksekusi *ideas* yang masih, *delayed*, masih L3 ataupun L2 d. Mengoptimalkan pola operasi pembangkit PLTGU pada pola *part-load* e. Memastikan setiap *equipment degradation* & *losses* ada *idea* yang diusulkan & dibahas dalam proses *idea generation* f. Meningkatkan pelaksanaan manajemen efisiensi, antara lain pada aspek *performance test* rutin, *idea generation, idea tracking* & *energy audit*.	1. Encouraging the acceleration of degraded equipment rehabilitation, between HRSG tubing of UP Semarang. Some of these proposals were included in AI 2017 and UAI 2018. 2. Encouraging the use of equipment that may enhance thermal efficiency, such as HEPA filter, power augmentation, and HGP Parts upgrade. Power Augmentation work is currently ongoing with the help from consultant. Meanwhile, HGP Parts upgrade for Tambak Lorok Blocks 1 & 2 were studied, but are currently unfeasible. 3. Conducting performance test on several coal heat values to gain optimal operational pattern (SPP Suralaya). 4. Sustainable programs: a. Maintaining cleanliness and efficiency of equipment, among others by conducting compressor washing, HRSG cleaning, and condenser cleaning. b. Consistently running efficiency-supporting equipment, such as compressor washing. c. Encouraging the implementation of ongoing, delayed ideas at L3 and L2 stages. d. Optimizing Gas and Steam Power Plant operations using part-load pattern. e. Ensuring the proposal and discussion of ideas for equipment degradation and losses during idea generation process. f. Improving the implementation of efficiency management in routine performance test, idea generation, idea tracking, and energy audit.	100%

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS



Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pengurus dan jalannya kepengurusan Perusahaan oleh Direksi serta memastikan operasional perusahaan telah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

The Board of Commissioners, as specified in Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, is a Company organ which is in charge of and responsible for the supervision of the Management policy and the course of Company Management by the Board of Directors and ensures the Company's operations were performed according to good corporate governance principles at all organizational levels.

Komposisi Dewan Komisaris

Setiap anggota Dewan Komisaris di lingkungan Indonesia Power harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan regulasi yang berlaku ataupun ketentuan dari Pemegang Saham. Diantara persyaratan dimaksud, setiap calon Dewan Komisaris harus memiliki pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya serta berpengalaman di bidang usaha yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan dan/atau lainnya. Persyaratan Dewan Komisaris telah diatur dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual* Perusahaan.

Seluruh calon anggota Dewan Komisaris Indonesia Power wajib mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) yang dilakukan oleh Pemegang Saham sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya. Seluruh anggota Dewan Komisaris Indonesia Power yang menjabat pada periode tahun 2017 telah lulus *fit and proper* yang mengindikasikan bahwa setiap Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

Calon anggota Dewan Komisaris yang lulus *fit and proper test* diangkat melalui RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar, ketentuan Pemegang Saham dan pedoman internal yang telah ditetapkan. Penetapan anggotan Dewan Komisaris selambat-lambatnya 30 hari sejak masa jabatan tersebut berakhir dan tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.

Dewan Komisaris Indonesia Power berjumlah enam orang yang terdiri dari satu orang Komisaris Utama, tiga orang Komisaris Independen, dan dua orang Komisaris untuk periode tahun 2017.

Board of Commissioners Composition

Every member of the Board of Commissioners at Indonesia Power must meet the provisions set in the applicable regulation and provisions of the Shareholders. The provisions among others state that all candidates for the Board of Commissioners shall have proper and relevant knowledge with their position and are experienced in the business lines that are relevant to the Company's activities and/or others. The requirements for the Board of Commissioners are contained in the Articles of Association and the Board Manual.

All candidates for Indonesia Power Board of Commissioners shall take Fit and Proper Test provided by the Shareholders prior to implementing their positional duties and functions. All members of the Board of Commissioners serving at Indonesia Power in 2017 have passed the fit and proper test, which indicates that each of the Commissioners has proper integrity, competency, and financial reputation.

Board of Commissioners candidates passing the fit and proper test were appointed by GMS according to the Articles of Association, Shareholders' provisions, and specified internal guidelines. The determination of the Board of Commissioners members shall be performed at least 30 days since the expiry of the position and shall not coincide with the appointment of the Board of Directors.

Indonesia Power Board of Commissioners consists of six personnel, i.e. one President Commissioner, three Independent Commissioners, and two Commissioners for 2017 period.

Tabel Komposisi dan Susunan Dewan Komisaris Periode Tahun 2017
Table: Board of Commissioners Composition in 2017

Nama Name	**Jabatan** Position	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment		**Periode Jabatan** Term of Office
Bagus Setiawan	Komisaris Utama President Commissioner	RUPS Sirkuler Penggantian dan Penambahan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tanggal 25 Agustus 2016	Circular GMS on Replacement and Addition of Board of Commissioners Members dated August 25, 2016	4 Tahun 4 Years
Ahmad Yani	Komisaris (Independen) Commissioner (Independent)	RUPS Sirkuler Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tanggal 2 Mei 2016	Circular GMS on Appointment of Board of Commissioners Members dated May 2, 2016	4 Tahun 4 Years

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment		Periode Jabatan Term of Office
Abdi Mustakim	Komisaris Commissioner	RUPS Sirkuler Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Perseroan tanggal 10 November 2015	Circular GMS on Dismissal and Appointment of Board of Commissioners Members dated November 10, 2015	4 Tahun 4 Years
Agus Hernawan	Komisaris (Independen) Commissioner (Independent)	RUPS Sirkuler Penggantian dan Penambahan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tanggal 25 Agustus 2016	Circular GMS on Replacement and Addition of Board of Commissioners Members dated August 25, 2016	4 Tahun 4 Years
Munir Ahmad	Komisaris Commissioner	RUPS Sirkuler Penggantian dan Penambahan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tanggal 25 Agustus 2016	Circular GMS on Replacement and Addition of Board of Commissioners Members dated August 25, 2016	4 Tahun 4 Years
Tri Setyo Nugroho	Komisaris (Independen) Commissioner (Independent)	RUPS Sirkuler Penggantian dan Penambahan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tanggal 25 Agustus 2016	Circular GMS on Replacement and Addition of Board of Commissioners Members dated August 25, 2016	4 Tahun 4 Years

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (*Board Manual*)

Dewan Komisaris dilengkapi dengan pedoman kerja (*Board Manual*) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Indonesia Power Nomor 006.SK/DEKOM-IP/2013 dan Nomor 178.K/010/IP/2013 tanggal 21 November 2013. Indonesia Power melakukan *review* dan penyempurnaan secara berkala sesuai dengan kebutuhan Perusahaan yang didasarkan atas perkembangan regulasi serta praktis bisnis terbaik. Pedoman dan tata kerja Dewan Komisaris (*Board Manual*) mengatur aspek, antara lain:

1. Persyaratan dan komposisi Dewan Komisaris.
2. Ketentuan rangkap jabatan.
3. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris termasuk masa jabatannya.
4. Program pengenalan dan pelatihan.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
6. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, termasuk terkait persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP, tugas arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, terkait Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG).
7. Rapat Dewan Komisaris serta pengambilan keputusan di luar Rapat Dewan Komisaris.
8. Penetapan Kebijakan Pengawasan Perusahaan.
9. Etika Jabatan.
10. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.
11. Evaluasi Kinerja.
12. Organ Pendukung Dewan Komisaris.
13. Remunerasi Dewan Komisaris.

Board Manual

The Board of Commissioners is equipped with Board Manual, a work guideline determined under Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners No. 006.SK/DEKOM-IP/2013 and No. 178.K/010/IP/2013 dated November 21, 2013. Indonesia Power periodically reviews and improves the Charter according to the Company's needs and based on regulatory development and the best business practices. The Board Manual covers the following aspects:

1. Requirements and Composition of the Board of Commissioners
2. Provision on Dual Position
3. Appointment and Dismissal of the Board of Commissioners Including the Term of Office
4. Orientation and Training Programs
5. Work Plan and Budget of the Board of Commissioners
6. Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners, Including Approval for Draft Company Long-term Plan and WP&B, Assignment and Directives and Supervision of the Board of Commissioners, Pertaining to Good Corporate Governance Practices
7. Board of Commissioners Meetings and decision making outside Board of Commissioners Meetings
8. Determination of Company Supervisory Policy
9. Ethics of Position
10. Reporting and Accountability
11. Performance Evaluation
12. Supporting Organs for the Board of Commissioners
13. Remuneration for the Board of Commissioners

Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

Tanggung Jawab Dewan Komisaris, meliputi:

1. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan
2. Setiap Anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
3. Setiap Anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya
4. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) Anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 3 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap Anggota Dewan Komisaris
5. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada poin 3 apabila dapat membuktikan: (a) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; (b) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan (c) Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut
6. Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat Anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri
7. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap Anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan Anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi
8. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 1 berlaku juga bagi Anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Responsibilities and Authorities of the Board of Commissioners

The responsibilities of the Board of Commissioners cover:

1. The Board of Commissioners is responsible for the supervision of the Company.
2. Every member of the Board of Commissioners shall, in good faith, with caution and responsibility, implement the supervisory and advisory duties to the Board of Directors for the interest and according to the intents and purposes of the Company.
3. Every member of the Board of Commissioners holds personal responsibility for the Company's losses in the event where such a member is mistakenly or negligently implementing his/her duties.
4. In the case where the Board of Commissioners consists of two or more members, the responsibility as specified in point 3 shall be jointly taken by all Board of Commissioners members.
5. The Board of Commissioners members shall hold no accountability for the losses as specified in point 3, if they are able to prove that: (a) They have performed the supervision in good faith and cautiously for the interest and according to the intents and purposes of the Company; (b) They do not have personal interest both directly and indirectly for the loss-inflicting management of the Board of Directors; (c) They have provided the advice for the Board of Directors to prevent the occurrence or continuation of the losses.
6. On behalf of the Company, the shareholder which represents at least 1/10 (one-tenth) o the entire shares with voting right may contest the Board of Commissioners which, due to its mistake or negligence, inflicts loss to the Company to the District Court.
7. In the event of bankruptcy due to the mistake or negligence of the Board of Commissioners in performing the supervisory duty of the management by the Board of Directors and the Company's wealth is insufficient to settle the entire liabilities due to such bankruptcy, every member of the Board of Commissioners shall jointly take responsibility together with the Board of Directors for the outstanding liabilities.
8. The liabilities as specified in point 1 shall also apply to the members of the Board of Commissioners who are no longer serving their position up to five (5) years prior to the announcement of bankruptcy.

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

9. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada poin 1 apabila dapat membuktikan: (a) Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; (b) Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; (c) Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan (d) Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan
10. Ketentuan mengenai tanggung jawab Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Hukum Pidana.

9. The Board of Commissioners members shall hold no accountability for the losses as specified in point 1, if they are able to prove that: (a) The bankruptcy is not resulted from their mistake or negligence; (b) They have performed the supervisory duty in good faith and cautiously for the interest and according to the intents and purposes of the Company; (c) They do not have personal interest both directly and indirectly for the bankruptcy-inflicting managerial actions performed by the Board of Directors; (c) They have provided the advice for the Board of Directors to prevent the bankruptcy.
10. Provision on the Board of Commissioners' responsibility for its mistake and negligence specified in the law does not waive the provisions set in the Penal Code.

Wewenang Dewan Komisaris, meliputi:
1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala Persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu
7. Memberhentikan sementara Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini
8. Membentuk komite-komite lain selain komite audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu
10. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandanganpandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan

The authorities of the Board of Commissioners cover:
1. Reviewing books, letters, and other documents; checking cash for verification; and checking other securities and Company's wealth.
2. Entering the yards, buildings, and offices used by the Company.
3. Asking for explanation from the Board of Directors and/or other officials pertaining to every issue on the Company management.
4. Acknowledging all policies and actions performed or to be performed by the Board of Directors.
5. Requesting the presence of the Board of Directors and/or other officials under and with the acknowledgment of the Board of Directors, in the Board of Commissioners meetings.
6. Appointing and dismissing the Secretary to the Board of Commissioners, if considered necessary.
7. Suspending members of the Board of Directors in accordance with the provision of the Articles of Association.
8. Establishing other committees apart from the Audit Committee, if considered necessary, by taking into account the Company's capability.
9. Using experts for certain issues in a certain period at the expense of the Company, if considered necessary.
10. Performing Company management in a certain condition for a certain period in accordance with the provisions of the Articles of Association.
11. Attending Board of Directors meetings and providing inputs on the matters discussed.

12. Melasanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.

Akses Informasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi Perusahaan sesuai kewenangannya, meliputi:

1. Terdapat kebijakan/pedoman Dewan Komisaris tentang informasi yang harus disediakan oleh Direksi dan Kebijakan tersebut disampaikan kepada Direksi
2. Substansi kebijakan/pedoman diantaranya memuat bentuk informasi yang disampaikan baik yang berkala maupun insidentil, standar waktu penyampaiannya dan mekanisme penyampaian informasi tersebut oleh Direksi
3. Jika Direksi tidak memenuhi kewajiban penyediaan informasi kepada Dewan Komisaris, terdapat upaya komunikasi dengan Direksi untuk meminta informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugasnya.

Pembagian Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Indonesia Power telah melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai yang telah ditetapkan dalam Berita Acara Kesepakatan Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Indonesia Power tanggal 20 September 2016 sebagaimana pada tabel berikut:

12. Performing other supervisory authorities provided that they do not conflict with the laws and regulations, Articles of Association, and/or GMS Resolutions.

Access to Information for the Board of Commissioners

The Board of Commissioners receives the access to Company information according to its authorities, such as:

1. There are policies/guidelines for the Board of Commissioners on the information that must be provided by the Board of Directors and the policies were submitted to the Board of Directors.
2. The substance of the policies/guidelines is among others containing the form of information to be submitted periodically or accidentally, the standard timing of submission, and the mechanism of information submission by the Board of Directors.
3. In case the Board of Directors fails to meet its obligation of providing information to the Board of Commissioners, a communication effort will be performed to the Board of Directors to request the information necessary for the implementation of the duties.

Description of the Board of Commissioners' Supervisory Duties

The Board of Commissioners of Indonesia Power describes its duties and responsibilities according to the Minutes of Agreement of the Description of Duties for the Board of Commissioners of PT Indonesia Power dated September 20, 2016 as shown in the following table:

Tabel Pembagian Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Table: Description of Supervisory Duties for the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Pembagian Tugas Description of Duties	
Bagus Setiawan	Komisaris Utama President Commissioner	Pengawasan Keseluruhan Bidang	Supervision of All Fields
Ahmad Yani	Komisaris I Commissioner	Pengawasan bidang Manajemen Risiko, Nominasi dan Remunerasi dan SDM & Organisasi	Supervision of Risk Management, Nomination and Remuneration, and HR and Organization
Abdi Mustakim	Komisaris I Commissioner	Pengawasan Bidang Audit dan GCG	Supervision of Audit and GCG
Agus Hernawan	Komisaris I Commissioner	Pengawasan Bidang Audit dan GCG	Supervision of Audit and GCG
Munir Ahmad	Komisaris I Commissioner	- Pengawasan Bidang Audit dan GCG - Pengawasan bidang Manajemen Risiko, Nominasi dan Remunerasi dan SDM & Organisasi	- Supervision of Audit and GCG - Supervision of Risk Management, Nomination and Remuneration, and HR and Organization
Tri Setyo Nugroho	Komisaris Commissioner	Pengawasan bidang Manajemen Risiko, Nominasi dan Remunerasi dan SDM & Organisasi	Supervision of Risk Management, Nomination and Remuneration, and HR and Organization

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Komisaris Independen dan Independensi Dewan Komisaris

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dan telah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berpedoman pada prinsip-prinsip GCG. Sampai dengan 31 Desember 2017, Indonesia Power memiliki tiga orang Komisaris yang berasal dari pihak independen, yaitu Sdr. Ahmad Yani, Sdr. Agus Hernawan dan Tri Setyo Nugroho.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Kriteria penentuan Komisaris Independen mencakup: (1) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan, komisaris, direksi atau pemegang saham Utama perusahaan; (2)Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan usaha perusahaan; (3) Tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan; (4) Tidak bekerja rangkap sebagai Direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan.

Pernyataan tentang Independensi Komisaris Independen

Untuk menjamin kepastian independensi, setiap anggota Dewan Komisaris di lingkungan Indonesia Power membuat pernyataan independensi dan bebas benturan kepentingan setiap tahun. Dalam pernyataan tersebut disebutkan:

1. Tidak memiliki saham di Perusahaan
2. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi maupun Pemegang Saham Pengendali
3. Menghindari situasi yang memiliki potensi benturan kepentingan.

Independent Commissioners and Board of Commissioners Independence

Independent Commissioners are the members of the Board of Commissioners who do not have any financial, managerial, shareholding, and/or familial relationship with other members of the Board of Commissioners, the members of the Board of Directors, and/or the Controlling Shareholder or any relationships that may affect their capability to act independently and have met the requirements as the Independent Commissioners according to applicable laws and regulations and the GCG principles. Until December 31, 2017, Indonesia Power owned three Commissioners from independent parties, i.e. Mr. Ahmad Yani, Mr. Agus Hernawan, and Mr. Tri Setyo Nugroho.

Criteria for Determination of Independent Commissioners

The criteria for the determination of Independent Commissioners are: (i) Not affiliated with the Company, commissioners, directors, or major shareholders of the Company; (2) Not having direct or indirect business relations with the Company's business; (3) Not holding direct or indirect shares in the Company; (4) Not serving dual position as Directors at other companies affiliated with the Company.

Statement of Independence of the Board of Commissioners

To ensure their independence, every member of the Board of Commissioners in Indonesia Power make the statement of independence and free from conflict interest on an annual basis. The statement must clarify:

1. No shareholding in the Company.
2. No familial relationship to the second degree with other members of the Board of Commissioners and the members of the Board of Directors and the Controlling Shareholders.
3. The avoidance of any situation potential to creating conflict of interest.

Surat Pernyataan Independensi
Statement of Independence



Komisaris Independen Perusahaan telah menandatangani surat pernyataan bebas benturan kepentingan yang menyatakan tidak adanya hubungan afiliasi dengan anggota Direksi maupun anggota Komisaris lainnya. Pada praktiknya, seluruh Komisaris Independen Perusahaan telah memenuhi aspek independensi lainnya mencakup kepemilikan saham dan rangkap jabatan.

Independent Commissioners have signed the statement of free from conflict of interest which clarifies the absence of affiliation with the members of the Board of Directors and other members of the Board of Commissioners. In fact, all Independent Commissioners have met the other independence aspects pertaining to shareholding and dual position.

Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2017, Dewan Komisaris Perusahaan telah melakukan berbagai kegiatan, diantaranya:

1. Rapat Internal Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali serta rapat khusus bila diperlukan/sesuai kebutuhan.
2. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali serta rapat khusus bila diperlukan/sesuai kebutuhan.
3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.
4. Kunjungan lapangan ke seluruh Unit Pembangkitan Indonesia Power.
5. Rapat Komite Dewan Komisaris, dengan aktivitas pengawasan sesuai bidang tugas Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko.
6. Kegiatan lain: studi banding, mengikuti seminar-seminar dan pertemuan ilmiah, pembentukan Komite-Komite Dewan Komisaris dan penyusunan Piagam serta Program Kerja Komite.
7. Mendorong dan Mendukung Implementasi *Indonesia Power Way* dan Nilai-nilai Integritas, Profesional, Proaktif, dan Sinergi (IP AkSi) untuk terbangunnya budaya baru Indonesia Power.

Report on the Implementation of Board of Commissioners' Duties

Throughout 2017 the Board of Commissioners has performed the following activities:

1. Periodical Board of Commissioners-Board of Directors meetings at least once a month and special meetings if necessary/as required.
2. The Board of Commissioners' Internal Meeting that is organized at least once a month and special meeting that is held occasionally/as necessary.
3. Annual General Meeting of Shareholders (GMS).
4. Site visit to all Indonesia Power Generating Units.
5. Board of Commissioners Committee meetings, with the supervisory activities according to the line of duty of the Audit Committee and the Risk Management Committee.
6. Other Activities: Field Trip, attending scientific seminars and symposium and the establishment of committees under the Board of Commissioners and preparation of the Committees' Work Plans and Charters.
7. Encouraging and supporting the implementation of Indonesia Power Way and the Values of Integrity, Professionalism, Proactiveness, and Synergy (IP AkSi) to build new Indonesia Power culture.

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Fokus Pengawasan Tugas Dewan Komisaris

Fokus pengawasan tugas Dewan Komisaris tahun 2017, mencakup:

Focus of the Board of Commissioners' Supervisory Duties

The focus of the Board of Commissioners' Supervisory Duties covers:

Nama Name	Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Implementation of the Board of Commissioners' Duties	
Bagus Setiawan	Keseluruhan Bidang & SDM	All Fields and HR
Agus Hernawan	Keuangan	Finance
Abdi Mustakim	Perencanaan	Planning
Ahmad Yani	Hukum	Legal
Munir Ahmad	Lingkungan	Environment
Tri Setyo Nugroho	Konstruksi	Construction

Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Sebagai wujud pelaksanaan pembelajaran secara berkelanjutan, Dewan Komisaris setiap tahunnya melakukan program pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan/ kompetensi Dewan Komisaris. Selama tahun 2017 peningkatan kapabilitas yang pernah diikuti Dewan Komisaris Indonesia Power adalah sebagai berikut:

Competency Building Program for the Board of Commissioners

To promote sustainable learning, the Board of Commissioners performs competency building program on an annual basis, aiming to develop the knowledge/ competency of the Board of Commissioners. In 2017, the capacity building programs attended by the Commissioners were as follows:

Nama Dewan Komisaris Name of Board of Commissioner	Nama Diklat Name of Education and Training		Tanggal Pelaksanaan dan Lokasi Date and Location
Bagus Setiawan	Program *Directorship* Dewan Komisaris Tahun 2017	PT IP Board of Commissioners Directorship Program 2017	28 November 2017, Bogor November 28, 2017, Bogor
Agus Hernawan	1. *Capacity Building* Dewan Komisaris untuk *Market Visit* ke London 2017 2. Program *Directorship* Dewan Komisaris Tahun 2017	1. Board of Commissioners Capacity Building for Market Visit to London 2017 2. PT IP Board of Commissioners Directorship Program 2017	1. 25 Oktober sampai 2 November 2017, London October 25, to November 2, 2017, London 2. 28 November 2017, Bogor November 28, 2017, Bogor
Tri Setyo Nugroho	1. *Capacity Building* Dewan Komisaris untuk *Market Visit* ke London 2017 2. Program *Directorship* Dewan Komisaris Tahun 2017	1. Board of Commissioners Capacity Building for Market Visit to London 2017 2. PT IP Board of Commissioners Directorship Program 2017	1. 25 Oktober sampai 2 November 2017, London October 25, to November 2, 2017, London 2. 28 November 2017, Bogor November 28, 2017, Bogor
Ahmad Yani	*Capacity Building* Dewan Komisaris untuk *Market Visit* ke London 2017	Board of Commissioners Capacity Building for Market Visit to London 2017	25 Oktober sampai 2 November 2017, London October 25, to November 2, 2017, London
Abdi Mustakim	Program *Directorship* Dewan Komisaris Tahun 2017	PT IP Board of Commissioners Directorship Program 2017	28 November 2017, Bogor November 28, 2017, Bogor
Munir Ahmad	Program *Directorship* Dewan Komisaris Tahun 2017	PT IP Board of Commissioners Directorship Program 2017	28 November 2017, Bogor November 28, 2017, Bogor

Program Orientasi Bagi Komisaris Baru

Anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kalinya diberikan program orientasi/pengenalan mengenai Perusahaan. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang visi, misi dan nilai-nilai Perusahaan, kode etik dan pedoman tingkah laku, struktur organisasi, serta pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris. Indonesia Power telah memiliki panduan atau *manual* terkait dengan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru yang tercantum dalam *Board Manual*, yaitu mencakup:

1. Kepada Anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan Program Pengenalan mengenai Perusahaan
2. Tanggung jawab untuk mengadakan Program Pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan
3. Materi Program Pengenalan meliputi: (a) Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan; (b) Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya; (c) Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit; (d) Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan
4. Program Pengenalan Perseroan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perseroan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perseroan dimana program tersebut dilaksanakan
5. Mekanisme penerapan pogram pengenalan dan pendalaman bagi Dewan Komisaris yaitu: (a) Dewan Komisaris menyampaikan kepada Direksi untuk diadakan program pengenalan bagi Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat; (b) Laporan terkait tingkat kehadiran/keaktifan Anggota Dewan Komisaris dalam mengikuti program pengenalan Perseroan.

Selama tahun 2017, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris baru sehingga tidak terdapat program pengenalan Dewan Komisaris baru.

Orientation Program for New Commissioners

Newly appointed member of the Board of Commissioners will receive orientation/introductory program on the Company. The program aims to provide understanding on the Company vision, mission, values, code of ethics and conduct, organizational structure, and Board Manual. Indonesia Power owns a guideline pertaining to the orientation program for new Board of Commissioners members which is contained in the Board Manual, which contains:

1. Newly appointed member of the Board of Commissioners must receive orientation/introductory program on the Company.
2. The responsibility to provide the orientation program is held by the Corporate Secretary or any party performing the function as the Corporate Secretary.
3. The orientation program presents the following materials: (a) Implementation of GCG principles by the Company; (b) Description of the Company pertaining to the purpose, nature, scope of activity, financial and operational performances, strategies, long-term and short-term business plans, competitive position, risks, and other strategic issues; (c) Explanation on delegated authorities, internal and external audit, internal control system and policy, including Audit Committee; (d) Explanation on duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors and restrictions.
4. The orientation program may be presented through presentation, meeting, visit to the Company, and review of documents or other programs considered in accordance with the Company where the programs are implemented.
5. The mechanism of the orientation and in-depth study for the Board of Commissioners is as follows: (a) the Board of Commissioners requests to the Board of Directors for the implementation of orientation program for newly appointed members of the Board of Commissioners; (b) Report on the attendance/engagement of the Board of Commissioners members in attending the orientation program.

There were no new Board of Commissioners members in 2017, and therefore the orientation program was not held.

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Penilaian atas Kinerja Masing-Masing Komite di Bawah Dewan Komisaris

Penilaian Kinerja terhadap Komite Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam Piagam Komite dan Program Kerja Komite. Kinerja Komite Audit dievaluasi oleh Dewan Komisaris setiap akhir tahun berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Komite Audit. Parameter penilaian meliputi:

1. Kontribusi terhadap pencapaian target Tim
2. Jumlah Kajian, Analisis, Rekomendasi
3. Tingkat keaktifan dalam kegiatan Tim
4. Kerjasama dalam Tim
5. Mutu dan Kualitas Konsep

Uraian lengkap mengenai Komite di Bawah Dewan Komisaris dijelaskan tersendiri pada Bagian Komite Di Bawah Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Organ Pendukung Dewan Komisaris

Dewan Komisaris selalu mengawasi kebijakan yang diambil Direksi berdasarkan laporan yang diterima atau temuan langsung di lapangan. Untuk membantu tugas-tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan penerapan kebijakan tata kelola tersebut, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, dan Komite Manajemen Risiko yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris dengan tugasnya adalah melakukan pemantauan, evaluasi, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Performance Assessment of Committees under the Board of Commissioners

The assessment of performance of the Board of Commissioners Committees is determined based on the duties and responsibilities contained in the Committee Charter and Committee Work Program. The performance of the Audit Committee is evaluated by the Board of Commissioners at every end of year based on the actual and completed work programs as contained in the Audit Committee Work Plan and Budget. The assessment parameters are as follows:

1. Contribution to Team target achievement
2. Number of Reviews, Analyses, and Recommendations
3. Engagement in Team
4. Collaboration in Team
5. Quality of Concept

Detailed information on Committees under the Board of Commissioners is presented separately in the Section Committees under the Board of Commissioners of this Annual Report.

Board of Commissioners Supporting Organs

The Board of Commissioners always monitors the policies made by the Board of Directors based on the report received or direct finding on site. To assist the implementation of the Board of Commissioners' duties in implementing the governance policy, the Board of Commissioners has established Audit Committee and Risk Management Committee set in the Board of Commissioners Decree. These Committees function to monitor, evaluate, and provide recommendations to the Board of Commissioners.

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS



Direksi berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugas dan secara kolektif melakukan pengelolaan Perusahaan serta memastikan pelaksanaan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

The Board of Directors holds the authority and responsibility for the Company management according to the Articles of Association and applicable laws and regulations. Each of the members of the Board of Directors performs their duties according to the Description of Duties, while collectively managing the Company and ensuring the implementation of a Good Corporate Governance at all organizational levels.

Komposisi Direksi

Setiap anggota Direksi di lingkungan Indonesia Power harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan regulasi yang berlaku ataupun ketentuan dari Pemegang Saham. Seluruh calon anggota Direksi Perusahaan wajib memenuhi persyaratan integritas,

Board of Directors Composition

Every member of the Board of Directors at Indonesia Power must meet the provisions set in the applicable regulation and provisions of the Shareholders. All candidates of the Board of Directors must meet the requirements of integrity, competency, and financial

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

kompetensi dan reputasi keuangan yang terdiri dari Persyaratan formal, Persyaratan materiil dan Persyaratan lainnya. Persyaratan Dewan Komisaris telah diatur dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual* Perusahaan.

Semua anggota Direksi Perusahaan telah melakukan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang diselenggarakan oleh Pemegang Saham dalam rangka pengangkatan anggota Direksi Perusahaan. Kegaiatan tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Seluruh anggota DIreksi Indonesia Power yang menjabat pada periode tahun 2017 telah lulus *fit and proper* yang mengindikasikan bahwa setiap anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi Perusahaan dilakukan melalui Keputusan RUPS/ Pemegang Saham. Pengangkatan Direksi telah melalui proses *fit and proper test* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam *Board Manual*. Setelah itu, dilakukan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.

Komposisi dan jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan kebutuhan Perusahaan berdasarkan skala usaha dan ukuran organisasi. Susunan dan komposisi anggota Direksi Perusahaan tahun 2017 berjumlah enam orang sebagai berikut:

reputation consisting of formal, material, and other requirements. The requirements for the Board of Directors are contained in the Articles of Association and the Board Manual.

All members of the Board of Directors have taken the fit and proper test provided by the Shareholders before their appointments. This is performed transparently and accountably by complying with applicable laws and regulations. All members of the Board of Directors serving at Indonesia Power in 2017 have passed the fit and proper test, which indicates that each of the Directors has proper integrity, competency, and financial reputation.

The appointment and dismissal of the Board of Directors members are performed through GMS/Shareholders' Resolutions. The appointed Board of Directors has taken the fit and proper test according to the applicable laws and regulations and the provisions contained in the Board Manual.

The composition and number of the Board of Directors members are determined by GMS by taking into account the Company's requirements based on the business and organizational scales. The Board of Commissioners consisted of six personnel in 2017:

Tabel Komposisi dan Susunan Direksi Periode Tahun 2017
Table: Board of Directors Composition in 2017

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Penunjukan Pertama Kali Legal Basis for the First Appointment		Periode Jabatan Term of Office
Sripeni Inten Cahyani	Direktur Utama President Director	RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 21 Maret 2016	Circular GMS on Shareholders dated March 21, 2016	2016-2020
Eri Prabowo	Direktur Operasi I Operation Director I	RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 2 Januari 2015	Circular GMS on Shareholders dated January 2, 2015	2014-2018
Antonius RT Artono	Direktur Operasi II Operation Director II	RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 21 Maret 2016	Circular GMS on Shareholders dated March 21, 2016	2016-2020
Hudiono	Direktur Keuangan Financial Director	RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 21 Maret 2016	Circular GMS on Shareholders dated March 21, 2016	2016-2020
Adi Supriono	Direktur Pengembangan dan Niaga Director of Development and Commerce	RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 21 Maret 2016	Circular GMS on Shareholders dated March 21, 2016	2016-2020
Roikhan	Direktur Sumber Daya Manusia dan Administrasi Director of Human Resources	RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 2 Januari 2015	Circular GMS on Shareholders dated January 2, 2015	2014-2018

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (*Board Manual*)

Direksi Indonesia Power dilengkapi Pedoman Kerja (*Board Manual*) dalam melaksanakan fungsi pengelolaan Perusahaan. Pedoman Kerja ini yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor 178.K/010/IP/2013 dan Nomor 006.SK/DEKOM-IP/2013. Pedoman dan tata kerja Direksi dalam *Board Manual* tersebut mengatur aspek, antara lain:

1. Pengertian, persyaratan dan komposisi Direksi
2. Pengaturan rangkap jabatan
3. Program pengenalan dan pelatihan
4. Tugas Direksi, termasuk terkait kebijakan operasional dan standar operasional baku (SOP), manajemen risiko, pengendalian intern, informasi kepada *stakeholder*, pemenuhan target kinerja, mutu produk dan pelayanan, SDM maupun terkait praktik GCG.
5. Rapat Direksi
6. Etika Jabatan
7. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
8. Evaluasi Kinerja
9. Organ Pendukung Direksi
10. Hubungan kerja dengan Anak Perusahaan. Selain itu, *Board Manual* juga mengatur aspek terkait dengan kewajiban mengkaji ulang ketentuan tersebut sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan perkembangan regulasi yang berlaku.

Board Manual

The Board of Directors is guided by the Board Manual in performing its managerial function. The manual is set by Joint Decree of the Board of Directors and the Board of Commissioners No. 178.K/010/IP/2013 and No. 006.SK/DEKOM-IP/2013 respectively. The Board Manual covers the following aspects:

1. Definition, Requirements, and Composition of the Board of Directors
2. Provision on Dual Position
3. Orientation and Training Programs
4. Duties of the Board of Directors, including operational policies and Standard Operating Procedures (SOP), Risk Management, Internal Control, Information to Stakeholders, Compliance with Performance Targets, Product and Service Quality, HR, and GCG Practices.
5. Board of Directors Meeting
6. Ethics of Position
7. Reporting and Accountability
8. Performance Evaluation
9. Directors Supporting Organ
10. Work Relationship with Subsidiaries The Board Manual also sets the obligation to review these provisions according to Company needs and development of applicable regulations.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Berdasarkan *Board Manual*, tanggung jawab Direksi meliputi:

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan
2. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan Perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan dan memastikan kesinambungan Perusahaan
3. Pengurusan sebagaimana dimaksud pada poin 1, wajib dilaksanakan setiap Anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
4. Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 3

Duties and Responsibilities of the Directors

According to the Board Manual, the Board of Directors holds the following responsibilities:

1. In performing its duties, the Board of Directors holds full responsibility for the Company management for the interest and goals of the Company, while representing the Company inside and outside the courtroom.
2. The Board of Directors is responsible for the Company management in order to generate profit and ensure the Company's sustainability.
3. The management as referred to in point 1 shall be performed by each member of the Board of Directors in good faith and with full responsibility.
4. Each member of the Board of Directors holds full and personal responsibility for the loss of the Company in the event where such a member is mistakenly or negligently implementing his/her duties according to the provision of point 3.

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

5. Dalam hal Direksi terdiri atas dua anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 4 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi
6. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada poin 4 apabila dapat membuktikan:
   a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
   b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan
   c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian
   d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 6 tidak mengurangi hak Anggota Direksi lain dan/ atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perusahaan
8. Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam undangundang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Hukum Pidana.
9. Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap Anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut
10. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 9 berlaku juga bagi Anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai Anggota Direksi dalam jangka waktu lima tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan
11. Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada poin 9 apabila dapat membuktikan:
    a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
    b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan
    c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan
    d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan

5. In the case where the Board of Directors consists of two or more members, the responsibility as specified in point 4 shall be jointly taken by all Board of Directors members.
6. The Board of Directors members shall hold no accountability for the losses as specified in point 4, if they are able to prove that:
   a. The loss is not resulted from their mistake or negligence.
   b. They have performed the supervisory duty in good faith and cautiously for the interest and according to the intents and purposes of the Company.
   c. They do not have personal interest both directly and indirectly for the loss-inflicting managerial actions.
   d. They have taken the measures to prevent the occurrence or the continuation of the loss.
7. The provision of point 6 does not waive the rights of the other members of the Board of Directors and/ or members of the Board of Commissioners to file a lawsuit on behalf of the Company.
8. Provision on the Board of Directors' responsibility for its mistake and negligence specified in the law does not waive the provisions set in the Penal Code.
9. In the event of bankruptcy due to the mistake or negligence of the Board of Directors and the Company's wealth is insufficient to settle the entire liabilities due to such bankruptcy, every member of the Board of Directors shall jointly take responsibility for the outstanding liabilities.
10. The liabilities as specified in point 9 shall also apply to the mistaken or negligent members of the Board of Directors who have served their position within the period of five (5) years prior to the announcement of bankruptcy.
11. The Board of Directors members shall hold no accountability for the bankruptcy as specified in point 9, if they are able to prove that:
    a. The bankruptcy is not resulted from their mistake or negligence.
    b. They have performed the supervisory duty in good faith and cautiously for the interest and according to the intents and purposes of the Company.
    c. They do not have personal interest both directly and indirectly for the bankruptcy-inflicting managerial actions.
    d. They have taken the measure to prevent such a bankruptcy.

12. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 9, poin 10, dan poin 11 berlaku juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

Sedangkan wewenang yang dimiliki Direksi, meliputi:
1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu
3. Mengatur kebijakan kepegawaian termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku
4. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan
6. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS
7. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila terjadi perkara di pengadilan antara Perusahaan dengan Anggota Direksi yang bersangkutan, atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.
8. Yang berhak mewakili Perusahaan adalah Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan; Dewan Komisaris dalam hal seluruh Anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan; Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh Anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan
9. Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perusahaan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam undangundang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
10. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perusahaan dalam kepailitan tersebut, setiap Anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

12. The provisions of points 9, 10, and 11 shall also apply to the Board of Directors announced as bankrupt according to claim from third party.

The Board of Directors has the following authorities:
1. Determining the Company managerial policy
2. Arranging the delegation of Board of Directors authority to represent the Company inside and outside the courtroom to a person or several members of the Board of Directors specially appointed for such purpose.
3. Arranging the policy for personnel, including the determination of salary, retirement, or old-age security and other incomes for the employees according to applicable laws and regulations.
4. Appointing and dismissing employees according to applicable laws and regulations.
5. Appointing a Corporate Secretary.
6. Performing all actions and other activities pertaining to Company management, binding the Company with other parties and/or other parties with the Company, and representing the Company inside and outside the courtroom concerning all matters and events as set in the laws and regulations, Articles of Association, and/or GMS Resolutions.
7. A member of the Board of Directors has no authority to represent the Company in the event where the Company and the relevant Board of Directors member are against each other in the courtroom, or the relevant member of the Board of Directors has a conflict of interest with the Company.
8. The persons having the right to represent the Company are other members of the Board of Directors who have no conflict of interest with the Company; the Board of Commissioners in the case where all members of the Board of Directors have a conflict of interest with the Company; other parties appointed by the GMS in case all members of the Board of Directors or the Board of Commissioners have a conflict of interest with the Company.
9. The Board of Directors do not have the right to apply for bankruptcy for the Company to the Commercial Court prior to obtaining approval from GMS, without prejudice to the provisions set in the Bankruptcy Law and Suspension of Payment Obligations.
10. In the event of bankruptcy due to the mistake or negligence of the Board of Directors and the Company's wealth is insufficient to settle the entire liabilities due to such bankruptcy, every member of the Board of Directors shall jointly take responsibility for the outstanding liabilities.

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Pembidangan Tugas Direksi

Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 193.K/010/IP/2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang tentang organisasi di Indonesia Power. Pembidangan tugas Direksi Indonesia Power adalah sebagai berikut:

Description of the Board of Directors Duties

The duties and responsibilities of each member of the Board of Directors are set according to Directors' Decree No. 193.K/010/IP/2017 dated October 12, 2017 on Organization at Indonesia Power. The Description of Duties for the Board of Directors at Indonesia power is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Pembagian Tugas Description of Duties	
Sripeni Inten Cahyani	Direktur Utama President Director	Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Direktur Utama membawahi Satuan Audit Internal, Sekretariat Perusahaan, Satuan Perencanaan, Kinerja dan Manajemen Risiko Korporat dan Satuan Riset, Inovasi dan Enjiniring, Ahli Utama.	Performing all actions relevant to the Company management for the Company's interest and according to the intents and purposes of the Company and representing the Company inside and outside the courtroom as set in the laws and regulations, Articles of Association, and/or GMS Resolutions. The President Director heads the Internal Audit Unit; Corporate Secretary; Corporate Risk Management and Performance Unit; Research, Innovations, and Engineering Unit; and Main Experts.
Eri Prabowo	Direktur Operasi I Operation Director I	Memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam memimpin dan menerjemahkan kebijakan strategi Perusahaan di unit pembangkit existing bidang operasi dan pemeliharaan serta jasa pemeliharaan pembangkit ke dalam proses bisnis, prosedur dan aturan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit, kegiatan jasa pemeliharaan, perencanaan energi primer, manajemen energi, komersial, *settlement*, transaksi dan hubungan pelanggan serta melakukan koordinasi sesuai dengan fungsi utama dengan pihak internal dan eksternal.	Having the duties, responsibilities, and authorities to lead and interpret Company strategic policy in existing generating units of operation and maintenance and power plant maintenance services into the business process, procedures and rules, to implement the guidance and supervision of power plant operation and maintenance, maintenance services, primary energy planning, energy management, commerce, settlement, transactions, and customer relations, while performing coordination with internal and external parties according to its main functions.
Antonius RT Artono	Direktur Operasi II Operation Director II	Memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam memimpin dan menerjemahkan kebijakan strategi Perusahaan di unit jasa pembangkitan bidang operasi dan pemeliharaan ke dalam proses bisnis, prosedur dan aturan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit, perencanaan energi primer, manajemen energi, komersial, *settlement*, transaksi dan hubungan pelanggan serta melakukan koordinasi sesuai dengan fungsi utama dengan pihak internal dan eksternal.	Having the duties, responsibilities, and authorities to lead and interpret Company strategic policy in generating service units of operation and maintenance into the business process, procedures and rules, to implement the guidance and supervision of power plant operation and maintenance, primary energy planning, energy management, commerce, settlement, transactions, and customer relations, while performing coordination with internal and external parties according to its main functions.
Hudiono	Direktur Keuangan Financial Director	Memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam memimpin dan menerjemahkan kebijakan dan strategi Perusahaan di bidang keuangan ke dalam proses bisnis, prosedur dan aturan; melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan pendanaan, investasi penyertaan, anggaran, tresuri, perpajakan, akuntansi, asuransi, pembinaan Anak Perusahaan dan Afiliasi, serta melakukan koordinasi sesuai fungsi utama dengan pihak internal maupun eksternal perusahaan.	Having the duties, responsibilities, and authorities to lead and interpret Company strategies and policy in finance into the business process, procedures and rules, to implement the guidance and supervision of funding, investment, budgeting, treasury, taxation, accounting, insurance, guidance for Subsidiaries and Affiliates, while performing coordination with internal and external parties according to its main functions.
Adi Supriono	Direktur Pengembangan dan Niaga Director of Development and Commerce	Memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam memimpin dan menerjemahkan kebijakan dan strategi Perusahaan di bidang Pengembangan dan Niaga ke dalam proses bisnis, prosedur dan aturan; melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal Perusahaan terkait kegiatan pengembangan usaha dan pelaksanaan proyek pembangkit.	Having the duties, responsibilities, and authorities to lead and interpret Company strategies and policy in Development and Commerce into the business process, procedures and rules, to implement the guidance and supervision and to coordinate with internal and external parties pertaining to business development and power plant project implementation.
Roikhan	Direktur Sumber Daya Manusia dan Administrasi Director of Human Resources & Administration	Memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam memimpin dan menerjemahkan kebijakan dan strategi Perusahaan di bidang sumber daya manusia ke dalam proses bisnis, prosedur dan aturan; melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan pengembangan sistem SDM, pengadaan SDM, pengembangan SDM, administrasi SDM, pengelolaan hubungan industrial, pengelolaan budaya perusahaan serta melakukan koordinasi sesuai fungsi utama dengan pihak internal maupun eksternal perusahaan.	Having the duties, responsibilities, and authorities to lead and interpret Company strategies and policy in human resources into the business process, procedures and rules, to implement the guidance and supervision of HR system development, HR procurement, HR development, HR administration, industrial relations management, company culture management, while performing coordination with internal and external parties according to its main functions.

Independensi Direksi

Setiap anggota Direksi bertindak secara independen dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya baik secara individual maupun kolegial. Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pelaksanaan GCG. Pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan ditandatangani pada awal pengangkatan sebagai Direktur dan diperbaharui setiap awal tahun. Pada tahun 2017, bersama dengan seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi Indonesia Power telah menandatangani Surat Pernyataan Benturan Kepentingan sebagai pernyataan bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun keluarganya tidak mempunyai kepemilikan saham maupun menjadi pengurus pada perusahaan maupun kegiatan usaha yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan bidang usaha Perusahaan.

Board of Directors Independence

Every member of the Board of Directors acts independently in performing his/her functions and duties both individually and collectively. All members of the Board of Directors do not serve dual position prohibited by the applicable laws and regulations on GCG implementation. The statement of free from conflict of interest is signed at the beginning of the Directors' appointment and renewed at every beginning of year. In 2017, together with all Board of Commissioners members, Indonesia Power Board of Directors has signed the Statement of Free from Conflict of Interest which indicates that the members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and their families do not have any shareholding at the Company nor serving in the Company management or business activities directly or indirectly related to the Company's line of business.

Program Pengembangan Kompetensi Direksi

Selama tahun 2017 anggota Direksi Indonesia Power telah mengikuti berbagai pelatihan dan seminar guna meningkatkan kapabilitas Direksi. Selama tahun 2017 anggota Direksi telah mengikuti kegiatan pelatihan dan seminar sebagai berikut:

Competency Development Programs for the Board of Directors

In 2017, the members of the Board of Directors have attended trainings and seminars to improve their capabilities. Throughout 2017, Audit Committee members had participated in trainings and seminars as follows:

Tabel Pengembangan Kompetensi Direksi Tahun 2017
Table: Board of Directors Competency Building in 2017

Nama Direksi Name of Board of Director's	Nama Diklat Name of Education and Training	Tanggal Date	Lokasi Location
Sripeni Inten Cahyani	Directorship Program	28 November 2017 I November 28, 2017	Bogor
Eri Prabowo	Directorship Program	28 November 2017 I November 28, 2017	Bogor
Antonius RT Artono	Directorship Program	28 November 2017 I November 28, 2017	Bogor
Hudiono	Directorship Program	28 November 2017 I November 28, 2017	Bogor
Adi Supriono	Directorship Program	28 November 2017 I November 28, 2017	Bogor
Roikhan	Directorship Program	28 November 2017 I November 28, 2017	Bogor

Program Orientasi bagi Direksi Baru

Bagi anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya diberikan program orientasi/pengenalan mengenai Perusahaan. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang visi, misi dan nilai-nilai Perusahaan, kode etik dan pedoman tingkah laku, struktur organisasi, serta pedoman dan tata tertib kerja Direksi. Indonesia Power telah memiliki panduan atau *manual* terkait

Orientation Program for New Directors

Newly appointed member of the Board of Directors will receive orientation/introductory program on the Company. The program aims to provide understanding on the Company vision, mission, values, code of ethics and conduct, organizational structure, and Board Manual. Indonesia Power owns a guideline pertaining to the orientation program for new Board of Directors

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

dengan program pengenalan bagi anggota Direksi yang baru yang tercantum dalam *Board Manual*.

Adapun materi program pengenalan, meliputi:
1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan
2. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Selama tahun 2017, tidak terdapat anggota Direksi baru sehingga tidak terdapat program Orientasi bagi Direksi baru.

members which is contained in the Board Manual, which contains:

The orientation program presents the following materials:
1. Implementation of GCG principles by the Company.
2. The introduction of the Company regarding the goals, nature, and scope of activities, financial and operational performances, strategies, short-term and long-term business plan, competitive position, risks, and other strategic issues.
3. Description related to delegated authorities, internal and external audit, internal control system and policy, including Audit Committee.
4. The information on the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as prohibited matters.

There were no new Board of Directors members in 2017, and therefore the orientation program was not held.

Komite-Komite Di Bawah Direksi

Sampai dengan tahun 2017, Direksi Indonesia Power belum membentuk Komite di bawah Direksi. Namun dalam rangka kelancaran tugasnya, Direksi Indonesia Power telah membentuk organ pendukung Direksi yang terdiri dari Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, dan Unit Manajemen Risiko. Direksi belum memerlukan komite-komite khusus untuk membantu kelancaran tugas Direksi, dengan pertimbangan:
1. Organ-organ pendukung Direksi masih dapat dimaksimalkan.
2. Jenis usaha Perusahaan tidak memiliki variasi yang sangat beragam, sehingga masih dapat dijalankan dengan organisasi yang ada.
3. Sistem yang sudah berjalan sekarang sangat efektif dan efisien.

Committees under the Board of Directors

Until 2017, the Board of Directors has not established any Committees. Nevertheless, to streamline its duties, the Board of Directors has established Board of Directors supporting organs, consisting of Corporate Secretary, Internal Audit Unit, and Risk Management Unit. The Board of Directors currently does not need any special committees to help implementing its duties, with the following considerations:
1. The Board of Directors supporting organs can still be optimized.
2. The Company business is not highly varied, and therefore can still be run with the existing organization.
3. The system currently run is still effective and efficient.

Penilaian atas Kinerja Masing-Masing Komite Di bawah Direksi

Sampai dengan tahun 2017, Direksi Indonesia Power belum membentuk Komite di bawah Direksi untuk membantu melaksanakan tugasnya sehingga tidak terdapat informasi mengenai Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Direksi berikut dasar penilaiannya.

Performance Assessment of the Committees under the Board of Directors

Until 2017 the Board of Directors has not established the Committees under the Board of Directors to assist in the implementation of its duties, and therefore there are no information on the assessment of performance of each committee under the Board of Directors and the basis of assessment.

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

POLICY ON THE DIVERSITY IN THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi merupakan bagian dari upaya Indonesia Power untuk mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih obyektif, komprehensif dan optimal. Keberagaman ini diharapkan dapat memperkaya sudut pandang dan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan di tubuh manajemen, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan Perusahaan.

The diversity in the Board of Commissioners and the Board of Directors composition is a part of Indonesia Power's effort to promote a more objective, comprehensive, and optimal decision making. The diversity is expected to enrich the perspectives and interests in the decision-making process of the management, so that they are able to provide added value for the implementation of Corporate Governance in the Company.

Indonesia Power berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap pegawai, termasuk pemilihan jajaran Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kesempatan yang sama di dalam Perusahaan. Setiap keputusan dalam melakukan perekrutan didasarkan semata-mata pada kriteria yang objektif sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dengan tetap mengacu pada Peraturan Menteri BUMN PER-03/MBU/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggora Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

Komposisi Dewan komisaris dan Direksi Perusahaan telah mencerminkan keberagaman baik dari segi aspek keahlian, kualifikasi pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Indonesia Power dapat dilihat pada tabel berikut:

Indonesia Power is committed to ensure that every employee, including in the selection of the Board of Directors and the Board of Commissioners, has equal opportunity in the Company. Every decision during recruitment is solely based on objective criteria according to Company requirements, by still referring to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-03/MBU/2012 dated March 29, 2012 on Guidelines for the Appointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners Members of the Subsidiaries of State-Owned Enterprises.

The composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors has shown the diversity in the expertise, education, work experience, age, and gender. The diversity in the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors at Indonesia Power is shown in the table below:

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

POLICY ON THE DIVERSITY IN THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Tabel Keberagaman Dewan Komisaris Indonesia Power Tahun 2017

Table: Diversity in Indonesia Power Board of Commissioners for 2017

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Latest Education	Pengalaman Kerja Work Experience		Keahlian Expertise
Bagus Setiawan	Komisaris Utama President Commissioner	51	Laki-laki Male	– Magister Bidang Manajemen Bisnis dari University of Missouri pada tahun 2006 Master of Business Management, University of Missouri, 2006 – Sarjana Mesin dari ITB pada tahun 1993 Bachelor of Engineering, ITB, 1993	– Kepala Divisi Human Capital Management System PT PLN (Persero) tahun 2015-sekarang – Kepala Divisi Pengembangan Sistem SDM PT PLN (Persero) tahun 2013-2015 – General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung tahun 2010-2011 – General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara tahun 2009-2010	– Head of PT PLN (Persero) Human Capital Management System Division, 2015-currently – Head of PT PLN (Persero) HR System Development Division, 2013-2015 – PT PLN (Persero) Bangka Belitung Area General Manager in, 2010-2011 – PT PLN (Persero) Bangka Belitung Maluku and North Maluku General Manager, 2009-2010	Sumber Daya Manusia Human Resources
Ahmad Yani	Komisaris Commissioner	55	Laki-laki Male	– Doktor Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2013 Doctor of Law, Universitas Padjadjaran Bandung, 2013 – Magister Hukum dari Universitas Indonesia Tahun 2003 Master of Law, Universitas Indonesia, 2003 – Sarjana Hukum dari Universitas Islam Jakarta Tahun 1988 Bachelor of Law, Universitas Islam Jakarta, 1988 – Sarjana Muda Hukum dari Universitas Islam Jakarta Tahun 1986 Diploma of Law, Universitas Islam Jakarta, 1986	– Anggota DPR/MPR RI Periode 2009 -. 2014 – Law Office Ahmad Yani & Associates sebagai Founder Tahun 2003 -. 2009 – Dosen Hukum Universitas. Islam Atthariyah Jabatan Lektor Kepala Tahun 2000 - 2008 – Dosen Hukum Universitas Nasional Jabatan Lektor Kepala Tahun 2000 - 2008 – Law Firm DYT & Partner sebagai Managing Director Tahun 2003 – Law Firm H.D.Y sebagai Senior Patner Tahun 1994 - 1996.	– Member of the House of Representatives/ People's Consultative Assembly, 2009-2014 – Law Office Ahmad Yani & Associates as Founder, 2003-2009 – Lecturer of Law, Universitas Islam Atthariyah, Head Lecturer, 2000-2008 – Lecturer of Law, Universitas Nasional, Head Lecturer, 2000-2008 – Law Firm DYT & Partner as Managing Director, 2003 – Law Firm H.D.Y as Senior Partner, 1994-1996.	Hukum Legal
Abdi Mustakim	Komisaris Commissioner	41	Laki-laki Male	– Magister of Business Administration dari Maastricht School Of Management tahun 2006 Master of Business Administration, Maastricht School Of Management, 2006 – Sarjana Ekonomi dari Universitas Mercu Buana tahun 2004 Bachelor of Economics, Universitas Mercu Buana, 2004 – Sarjana Muda Akuntansi dari STAN Tahun 1997 Diploma of Accounting, STAN, 1997	– Kepala Bagian Perencanaan dan Manajemen Kinerja Kementerian BUMN tahun 2015 - sekarang – Plt. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Kementerian BUMN tahun 2014-2015 – Kepala Sub Bagian Pelaporan Kementerian BUMN tahun 2013-2014 – Kepala Sub Bagian Perencanaan Kementerian BUMN tahun 2010-2013 – Plt. Kepala Sub Bidang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Usaha Perdagangan, Pergudangan, Distribusi dan Jasa Sertifikasi II Kementerian BUMN tahun 2006-2010	– Head of Management Planning and Performance, Ministry of State - Owned Enterprises Department, 2015-current – Acting Head of Financial Planning and Performance Department, Ministry of State-Owned Enterprises, 2014-2015 – Head of Reporting Sub-Department, Ministry of State-Owned Enterprises, 2013-2015 – Head of Planning Sub-Department, Ministry of State-Owned Enterprises, 2010-2013 – Acting Head of Sub-Department of Risk Governance and Management of Commerce, Warehousing, Distribution, and Certification Services II, Ministry of State-Owned Enterprises, 2006-2010	Manajemen Perencanaan Strategic Management

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Latest Education	Pengalaman Kerja Work Experience		Keahlian Expertise
Agus Hernawan	Komisaris Commissioner	57	Laki-laki Male	– Magister Management dari Universitas Padjadjaran Master of Management, Universitas Padjadjaran	– Direktur Retail Business Banking Bank Bukopin tahun 2013-2015 – Direktur Pelayanan & Distribusi Bank Bukopin tahun 2006-2013 – Direktur Consumer Banking Bank Bukopin tahun 2000-2006 – Group Head Bisnis Bank Bukopin tahun 1997-2000 – Pemimpin Cabang Bank Bukopin tahun 1988-1997	– Director of Retail Business Banking, Bank Bukopin, 2013-2015 – Director of Services & Distribution, Bank Bukopin, 2006-2013 – Director of Consumer Banking, Bank Bukopin, 2000-2006 – Business Group Head, Bank Bukopin, 1997-2000 – Branch Head, Bank Bukopin, 1988-1997	Keuangan dan Perbankan Finance and Banking
Munir Ahmad	Komisaris Commissioner	56	Laki-laki Male	– Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Hasanudin tahun 1987 Bachelor of Electrical Engineering, Universitas Hasanuddin, 1987	– Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan tahun 2015 - Sekarang – Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan (2014-2015) – Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (2010-2014) – Kepala Pusdiklat Ketenagalistrikan Dan Energi Baru Terbarukan (2010) – Kepala Bidang Pelatihan dan Sarana - Pusdiklat KEBT (2006-2010).	– Director of Electricity Engineering and Environment, 2015 - current – Director of Electricity Program Management, 2014-2015 – Head of Center for Education and Training of Electricity, New and Renewable Energy, and Energy Conservation, 2010-2014 – Head of Center for Education and Training of Electricity, New and Renewable Energy, 2010 – Head of Training and Facility Department of the Center for Education and Training of Electricity, New and Renewable Energy, 2006-2010	Ketenaga-listrikan Electricity
Tri Setyo Nugroho	Komisaris Commissioner	59	Laki-laki Male	– Magister Terapan Project Management Dari PM Box Institute Tahun 2004 Master of Applied Project Management, PM Box Institute, 2004 – Sarjana Teknik Sipil Dari ISTA Tahun 1996 Bachelor of Civil Engineering, ISTA, 1996 – Sarjana Muda Teknik Sipil Dari Undip Tahun 1981 Diploma of Civil Engineering, Universitas Diponegoro, 1981	– Tenaga Ahli Manajemen Proyek PT PLN (Persero) tahun 2014- 2017 – Kepala Divisi Pengadaan Strategis PT PLN (Persero) Tahun 2013-2014 – Kepala Divisi Administrasi Konstruksi PT PLN (Persero) Tahun 2012-2013 – Project Director Administrasi Investasi Pembangunan PT PLN (Persero) tahun 2010-2012 – Deputi Direktur Administrasi Konstruksi Pada Direktorat Konstruksi Strategis Tahun 2008-2010	– Expert Staff of PT PLN (Persero) Project Management, 2014-2017 – Head of PT PLN (Persero) Strategic Procurement Division, 2013-2014 – Head of PT PLN (Persero) Construction Administration Division, 2012-2013 – Head of PT PLN (Persero) Development Investment Administration Division, 2010-2012 – Deputy Director of Construction Administration at the Directorate of Strategic Construction, 2008-2010	Manajemen Proyek Project Management

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

POLICY ON THE DIVERSITY IN THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Tabel Keberagaman Direksi Indonesia Power Tahun 2017

Table: Diversity in Indonesia Power Board of Directors for 2017

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Latest Education	Pengalaman Kerja Work Experience		Keahlian Expertise
Sripeni Inten Cahyani	Direktur Utama President Director	49	Perempuan Female	- Magister Manajemen Keuangan dari STM PPM Jakarta (2001) Master of Financial Management, STM PPM Jakarta (2001 - Sarjana Teknik Kimia dari Universitas Diponegoro (1992) Bachelor of Chemical Engineering, Diponegoro University (1992) - Gelar Profesi Ajun Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAAIK). Professional title of *Ahli Asuransi Indonesia Kerugian* (AAAIK) - Certified in General Insurance	- Direktur Keuangan Indonesia Power (2013 - 2016). - Eksekutif Utama Bidang Keuangan Indonesia Power yang ditugaskaryakan sebagai Senior Spesialis Keuangan Divisi Keuangan Korporat PT PLN (2013) - Kepala Divisi Pendanaan dan Asuransi Indonesia Power (2010-2013) Vice President Indonesia Power (2009-2010) - Manager Perencanaan & Administrasi Pendanaan (2007-2009)	- Director of Finance at Indonesia Power, 2013-2016 - Main Executive of Indonesia Power Finance Department assigned as Senior Financial Specialist of PT PLN Corporate Finance Division, 2013 - Head of Indonesia Power Funding and Insurance Division, 2010-2013 Indonesia Power Vice President, 2009-2010 - Manager of Funding Planning and Administration, 2007-2009	Keuangan Finance
Eri Prabowo	Direktur Operasi I Operation Director I	51	Laki-laki Male	- Doctor of Philosophy (PhD) in Economics dari Universitas Airlangga (2010) Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Universitas Airlangga, 2010 - Magister Information Technology dari Universitas Indonesia (1998) Master of Information Technology, Universitas Indonesia, 1998 - Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Indonesia (1990) Bachelor of Mechanical Engineering, Universitas Diponegoro, 1990	- Direktur Produksi Indonesia Power (2013-2016) - Sekretaris Perusahaan Indonesia Power (2012-2013) - General Manager UBP Saguling Indonesia Power (2010-2012) - Deputy General Manager Energi Primer UBP Suralaya Indonesia Power (2008-2010) - Ahli Kajian Kelayakan Proyek Indonesia Power (2007-2008)	- Director of Production at Indonesia Power, 2013-2016 - Indonesia Power Corporate Secretary, 2012-2013 - Indonesia Power UBP Saguling General Manager, 2010-2012 - Indonesia Power UBP Suralaya Primary Energy Deputy General Manager, 2008-2010 - Expert on Project Feasibility Study at Indonesia Power, 2007-2008	Pembangkitan Listrik Power Plant
Antonius R.T Artono	Direktur Operasi II Operation Director II	54	Laki-laki Male	- Magister of Business Administration dari University of Missouri St. Louis. Master of Business Administration, University of Missouri St. Louis - Sarjana Teknik Geothermal dari Institute University of Auckland (1995) Bachelor of Geothermal Engineering, The University of Auckland, 1995 - Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Sepuluh November (1986) Bachelor of Chemical Engineering, Institut Teknologi Sepuluh November, 1986	- PLT Direktur Utama (2014-2015) - Direktur Pengembangan dan Niaga Indonesia Power (2012-2014) - Ahli Utama Pengembangan Bisnis (2012) - General Manager UBP Bali Indonesia Power (2010-2012) - Vice President Pengembangan Usaha Pembangkit Besar (2008-2010).	- Acting President Director, 2014-2015 - Director of Development and Commerce at Indonesia Power, 2012-2014 - Business Development Main Expert, 2012 - Indonesia Power UBP Bali General Manager, 2010-2012 - Vice President of Large Power Plant Business Development, 2008-2010	Pembangkitan Listrik Power Plant

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Latest Education	Pengalaman Kerja Work Experience		Keahlian Expertise
Hudiono	Direktur Keuangan Financial Director	61	Laki-laki Male	- Master Teknik dari ITB (1999). Master of Engineering, ITB, 1999 - Sarjana Ekonomi Perusahaan dari Universitas Terbuka (1991) Bachelor of Corporate Economics, Universitas Terbuka, 1991 - Sarjana Teknik Elektro dari ITB (1981) Bachelor of Electrical Engineering, ITB, 1981	- Direktur Keuangan PT Pembangkitan Jawa-Bali (2012-2016) - Kepala Divisi Perencanaan dan Pengendalian Anggaran PLN (2010-2012) - Deputi Direktur Perencanaan Pengendalian Anggaran dan Kinerja PLN (2009-2010) - General Manager PLN Wilayah Sumatera Barat (2008-2009) - Manajer Bidang Niaga PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten (2001-2008).	- Director of Finance at PT Pembangkitan Jawa-Bali, 2012-2016 - Head of PLN Budget Planning and Control Division, 2010-2012 - Deputy Director of PLN Budget Planning and Control and Performance, 2009-2010 - PLN West Sumatra Area General Manager, 2008-2009 - Manager of Commerce Department of PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten, 2001-2008	Keuangan Finance
Adi Supriono	Direktur Pengembangan dan Niaga Director of Development and Commerce	58	Laki-laki Male	- Master Master of Business Administration (MBA) di bidang Finance dari University of Missouri-Saint Louis (2006). Master of Business Administration (MBA) in Finance, University of Missouri-Saint Louis, 2006 - Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung (1984) Bachelor of Engineering, Institut Teknologi Bandung, 1984	- Sekretaris Perusahaan PT PLN (Persero) (2012-2016) - Direktur Pengembangan dan Niaga PT Pembangkitan Jawa Bali (2010-2012) - Direktur Sumber Daya Manusia dan Administrasi PT Pembangkitan Jawa Bali (2009-2010) - Direktur Keuangan di PT Bajradaya Sentranusa (2003-2004).	- PT PLN (Persero) Corporate Secretary, 2012-2016 - Director of Development and Commerce at PT Pembangkitan Jawa Bali, 2010-2012 - Director of Human Resources and Administration at PT Pembangkitan Jawa Bali, 2009-2010 - Director of Finance at PT Bajradaya Sentranusa, 2003-2004	Ketenaga-listrikan Electricity
Roikhan	Direktur Sumber Daya Manusia dan Administrasi Director of Human Resources & Administration	58	Laki-laki Male	- Magister di Bidang Industri di Institut Teknologi Bandung (1998). Master's Degree in Industrial Technology, Institut Teknologi Bandung, 1998 - Sarjana Listrik dari Institut Teknologi Bandung (1986) Bachelor of Electrical Engineering, Institut Teknologi Bandung, 1986	- Expert Manajemen SDM pada Direktorat SDM dan Umum PT PLN (2013) - Kepala Divisi Pengembangan SDM dan Talenta PT PLN (2010-2013) - Asisten Deputi Direktur Pengelolaan Karir & Taleta PT PLN (2009) - Manager Regional Jawa Timur & Bali PT PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (2008-2009) Manager Regional Jawa Tengah & DIY PT PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (2005-2008).	- HR Management Expert at the Directorate of HR and General Affairs of PT PLN, 2013 - Head of HR Development and Talent Division of PT PLN, 2010-2013 - Assistant Deputy Director of Career and Talent Development of PT PLN, 2009 - PT PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban East Java & Bali Regional Manager, 2008-2009 PT PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Central Java & DIY Regional Manager, 2005-2008	Sumber Daya Manusia Human Resources



HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI

AFFILIATIONS BETWEEN MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS AND MAJORITY AND/OR CONTROLLING SHAREHOLDERS

Hubungan afiliasi antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama atau Pengendali dapat dilihat dari sifat hubungan keluarga, keuangan, kepemilikan saham dan kepengurusan di Perusahaan lain (rangkap jabatan) yang menimbulkan benturan kepentingan.

The affiliation of members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Majority or Controlling Shareholders can be traced from the nature of relationship, such as familial, financial, shareholding, and managerial relationships (dual position) which inflict a conflict of interest.

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Hubungan afiliasi Dewan Komisaris meliputi hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Direksi dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali. Dewan Komisaris Indonesia Power melaksanakan tugasnya secara independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk menghindari benturan kepentingan dengan pihak manapun.

Affiliations of the Board of Commissioners with Members of the Board of Directors and Majority and/or Controlling Shareholders

The affiliation of the Board of Commissioners covers relationship between the Board of Commissioners members and the Board of Director and the Major and/or Controlling Shareholders. Indonesia Power Board of Directors performs its duties independently according to the laws and regulations, including avoiding any conflict of interest with any parties.

Tabel Hubungan Keluarga dan Keuangan Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama/Pengendali

Table: Familial and Financial Relationships of the Board of Commissioners with Members of the Board of Directors and Majority and/or Controlling Shareholders

Nama Name	Hubungan Keluarga Dengan Familial Relation with						Hubungan Keuangan Sebagai Financial Relation as					
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholder		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Bagus Setiawan	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Ahmad Yani	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Abdi Mustakim	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Agus Hernawan	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Munir Ahmad	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Tri Setyo Nugroho	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Sampai dengan 31 Desember 2017, Dewan Komisaris telah mengungkapkan Kepemilikan sahamnya baik di Perusahaan maupun perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Kepemilikan saham Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Shareholding by the Board of Commissioners

Until December 31, 2017, the Board of Commissioners has disclosed its shareholding at the Company and other companies located inside and outside the country. The shareholding by the Board of Commissioners is presented in the table below:

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Tahun 2017
Table: Board of Commissioners Shareholding in 2017

Nama Name	Kepemilikan Saham di Perusahaan Shareholding in the Company	Kepemilikan Saham di Perusahaan Lain Shareholding in Other Companies
Bagus Setiawan	Tidak Ada I None	Tidak Ada I None
Ahmad Yani	Tidak Ada I None	Tidak Ada I None
Abdi Mustakim	Tidak Ada I None	Tidak Ada I None
Agus Hernawan	Tidak Ada I None	Tidak Ada I None
Munir Ahmad	Tidak Ada I None	Tidak Ada I None
Tri Setyo Nugroho	Tidak Ada I None	Tidak Ada I None

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Mengacu pada Undang-undang Nomor 5 tahun 2009, tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terkait dengan Pasal 26 yang membahas mengenai Jabatan Rangkap, seluruh anggota Dewan Komisaris Indonesia Power tidak merangkap jabatan pada perusahaan yang termasuk diantaranya: (1) Berada dalam pasar bersangkutan yang sama dengan Perusahaan; (2) Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; dan (3) Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Dual Position Held by the Board of Commissioners

Referring to Article 26 of Law No. 5 of 2009 on Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Competition which discusses Dual Position, all members of the Board of Commissioners at Indonesia Power do not serve dual position at the Company, including, among others: (1) Being in the same relevant market with the Company; (2) Having strong connection in the business line or type; and (3) Communally able to dominate the market share of certain goods and/or services that may result in monopoly practices or unfair competition.

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI

AFFILIATIONS BETWEEN MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS AND MAJORITY AND/OR CONTROLLING SHAREHOLDERS

Adapun jabatan lain yang dirangkap oleh Dewan Komisaris Indonesia Power, adalah sebagai berikut:

Other positions concurrently held (dual position) by the Board of Commissioners of Indonesia Power are as follows:

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Tahun 2017
Table: Board of Commissioners Dual Position in 2017

Nama Name	Jabatan di Indonesia Power Position at Indonesia Power	Jabatan di Perusahaan Lain Position at Other Companies	
Bagus Setiawan	Komisaris Utama President Commissioner	Kepala Divisi Human Capital Management System PT PLN (Persero)	Head of PT PLN (Persero) Human Capital Management System Division
Ahmad Yani	Komisaris I Commissioner	-	-
Abdi Mustakim	Komisaris I Commissioner	Kepala Bagian Perencanaan dan Manajemen Kinerja BUMN, Kementerian BUMN	Head of State-Owned Enterprises Performance Planning and Management Department, Ministry of State-Owned Enterprises
Agus Hernawan	Komisaris I Commissioner	-	-
Munir Ahmad	Komisaris I Commissioner	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Ditjen Ketenagalistrikan	Director of Electricity Engineering and Environment, Directorate General of Electricity
Tri Setyo Nugroho	Komisaris I Commissioner	-	-

Hubungan Afiliasi Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali, yang meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Affiliations of the Board of Directors with Members of the Board of Commissioners and Majority and/or Controlling Shareholders

The affiliation of members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Majority and/or Controlling Shareholders covers:

1. Affiliation between a Board of Directors member and other Board of Directors member(s).
2. Affiliation between a Board of Directors member and Board of Commissioners member(s).
3. Affiliation of between a Board of Directors member and Majority and/or Controlling Shareholders.

Berikut tabel Hubungan Keluarga dan Keuangan anggota Direksi dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama/Pengendali Indonesia Power:

The following table shows the familial and financial relationships of the Board of Directors members with the Board of Commissioners and/or Controlling Shareholders:

Tabel Hubungan Keluarga dan Keuangan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama/Pengendali
Table: Familial and Financial Relationships of the Board of Directors with Members of the Board of Commissioners and Majority and/or Controlling Shareholders

Nama Name	Hubungan Keluarga Dengan Familial Relation with						Hubungan Keuangan Sebagai Financial Relation as					
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholder		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Sripeni Inten Cahyani	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Eri Prabowo	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Antonius RT Artono	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Hudiono	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Adi Supriono	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Roikhan	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, tidak terdapat anggota Direksi Indonesia Power yang memiliki saham Indonesia Power mencapai 5% maupun pada perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri. Direksi telah mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Indonesia Power maupun pada perusahaan lain yang dituangkan dalam Daftar Khusus Direksi dan senantiasa diperbaharui setiap tahunnya.

Shareholding by the Board of Directors Members

Until December 31, 2017, there were no members of the Board of Directors with a shareholding of up to 5% at Indonesia Power or other companies inside or outside the country. The Board of Directors has disclosed its shareholding at Indonesia Power and other companies in the Board of Directors Register which is updated annually.

Tabel Kepemilikan Saham Anggota Direksi Tahun 2017
Table: Board of Directors Shareholding in 2017

Nama Name	Kepemilikan Saham di Perusahaan Lain Shareholding in Other Companies
Sripeni Inten Cahyani	Nihil I Zero
Eri Prabowo	Nihil I Zero
Antonius RT Artono	Nihil I Zero
Hudiono	Nihil I Zero
Adi Supriono	Nihil I Zero
Roikhan	Nihil I Zero

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI

AFFILIATIONS BETWEEN MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS AND MAJORITY AND/OR CONTROLLING SHAREHOLDERS

Rangkap Jabatan Direksi

Sampai dengan akhir tahun 2017, seluruh anggota Direksi Indonesia Power tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

Dual Position Held by the Board of Directors

By the end of 2017, all members of the Board of Directors did not serve dual position at other companies, as shown in the following table.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi Tahun 2017
Table: Board of Directors Dual Position in 2017

Nama Name	Jabatan di Perusahaan Lain Position at Other Company
Sripeni Inten Cahyani	Tidak Ada I None
Eri Prabowo	Tidak Ada I None
Antonius RT Artono	Tidak Ada I None
Hudiono	Tidak Ada I None
Adi Supriono	Tidak Ada I None
Roikhan	Tidak Ada I None

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

FREQUENCY AND ATTENDANCE OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris secara rutin mengadakan rapat, baik secara internal maupun rapat gabungan dengan Direksi dalam rangka mengkoordinasikan seluruh kegiatan bisnis Perusahaan. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara setuju terbanyak. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka Pimpinan Rapat yang menentukan dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan melalui rapat formal.

Board of Commissioners Meeting

The Board of Commissioners routinely holds internal and joint meetings with the Board of Directors to coordinate all of the Company's business activities. Meeting resolutions are taken with deliberation and consensus. In the event that consensus is not reached, then decision is taken by majority vote. In the case where the number of affirmative and negative votes is equal, Meeting Chairman will make the decision by prioritizing the provision of accountability. The Board of Commissioners can also make valid and binding decisions without holding a Board of Commissioners Meeting, provided that all members of the Board of Commissioners have approved the proposal submitted in writing and signed the agreement. The decisions taken have the same power with the decisions taken by formal meetings.

Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris

Selama tahun 2017, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 17 kali rapat yang terdiri dari 3 kali rapat internal dan 14 kali rapat gabungan dengan Direksi. Tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat internal dan gabungan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Frequency and Attendance Rate of the Board of Commissioners Meeting

The Board of Commissioners held 17 meetings in 2017, consisting of 3 internal meetings and 14 joint meetings with the Board of Directors. The attendances of the Board of Commissioners in the internal and joint meetings are shown in the table below:

Tabel Rapat Internal Dewan Komisaris Tahun 2017
Table: Board of Commissioners Internal Meetings in 2017

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Attendance	Persentase (%) Percentage (%)
Bagus Setiawan	Komisaris Utama I President Commissioner	3	2	67
Agus Hernawan	Komisaris I Commissioner	3	3	100
Abdi Mustakim	Komisaris I Commissioner	3	3	100
Ahmad Yani	Komisaris I Commissioner	3	3	100
Munir Ahmad	Komisaris I Commissioner	3	2	67
Tri Setyo Nugroho	Komisaris I Commissioner	3	3	100

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

FREQUENCY AND ATTENDANCE OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Internal Dewan Komisaris

Agenda, Date and Participant of the Board of Commissioners Internal Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	
1.	10 Januari 017 January 10, 2017	Evaluasi 100 Hari Kerja Dewan Komisaris	Evaluation of PT IP Board of Commissioners 100 Working Days
2.	9 Mei 2017 I May 9, 2017	Issue Strategis Perusahaan	Company Strategic Issues
3.	13 Desember 2017 December 13, 2017	*Strategic Partnership* dalam Pengelolaan Jasa OM	Strategic Partnership in O&M Services Management

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2017

Table: Board of Commissioners-Board of Directors Joint Meetings in 2017

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase (%) Percentage (%)
Bagus Setiawan	Komisaris Utama I President Commissioner	14	10	71
Agus Hernawan	Komisaris I Commissioner	14	13	93
Abdi Mustakim	Komisaris I Commissioner	14	12	86
Ahmad Yani	Komisaris I Commissioner	14	14	100
Munir Ahmad	Komisaris I Commissioner	14	10	71
Tri Setyo Nugroho	Komisaris I Commissioner	14	13	93
Sripeni Inten Cahyani	Direktur Utama I President Director	14	13	93
Eri Prabowo	Direktur Operasi I I Operation Director I	14	11	79
Antonius RT Artono	Direktur Operasi II I Operation Director II	14	12	86
Hudiono	Direktur Keuangan I Financial Director	14	13	93
Adi Supriono	Direktur Pengembangan dan Niaga Director of Development and Commerce	14	12	86
Roikhan	Direktur Sumber Daya Manusia dan Administrasi Director of Human Resources & Administration	14	12	86

Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Gabungan Dewan Komisaris-Direksi

Agenda, Date and Participant of the Board of Commissioners-Board of Directors Joint Meetings

No	Tanggal Pelaksanaan Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	
1.	25 Januari 2017 January 25, 2017	- Strategi Eksekusi RKAP Tahun 2017. - Program Kerja Tahun 2017 DIROP I. - Program Kerja Tahun 2017 DIROP II. - Lain-lain.	- WP&B 2017 Execution Strategy - Director of Operations I Work Program 2017 - Director of Operations II Work Program 2017 - Misc.
2	16 Februari 2017 February 16, 2017	- Program Kerja Tahun 2017 DIRAGA & DIRKEU. (Terkait dengan penugasan dari PT PLN (persero)) - Ijin Prinsip Dewan Komisaris untuk pelaksanaan kontrak LTSA PLTGU Cilegon & PLTGU Priok Blok 3. - Lain-lain.	- Director of Development and Commerce and Director of Finance Work Program 2017 (On assignment from PT PLN (Persero)) - Board of Commissioners Principle Permit for the Implementation of LTSA of CCPP Cilegon and CCPP Priok Block 3 - Misc.

No	Tanggal Pelaksanaan Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	
3.	9 Maret 2017 March 9, 2017	- Rencana Kerja dalam rangka penurunan Biaya Pokok Produksi (BPP) RKAP Tahun 2017 PT Indonesia Power. - Kinerja Korporat per Februari Tahun 2017.	- Work Plan for PT Indonesia Power WP&B 2017 Cost of Supply efficiency - Corporate Performance per February 2017
4.	10 April 2017 April 10, 2017	- *Issue* Strategis Perusahaan s.d Maret 2017 - *Strategic* Program Penurunan BPP	- Company Strategic Issues until March 2017 - Cost of Supply Efficiency Strategic Program
5.	15 Mei 2017 May 15, 2017	Persiapan RUPS LPT Tahun 2016.	Preparation of GMS 2016 on Annual Calculation Report
6.	13 Juni 2017 June 13, 2017	Skenario Produksi dan Penjualan Tenaga Listrik Tahun 2016 PT Indonesia Power.	PT Indonesia Power Electricity Production and Sales Scenario
7.	20 Juni 2017 June 20, 2017	Evaluasi Status Kegiatan Pengembagan Usaha PT Indonesia Power.	Evaluation of PT Indonesia Power Business Development Activity Status
8.	28 Juli 2017 July 28, 2017	Pambahasan RKAP Tahun 2018 PT Indonesia Power.	Discussion of PT Indonesia Power WP&B 2018
9.	22 Agustus 2017 August 22, 2017	- Usulan Direksi untuk Mitra Strategis PLTU Kaltim. - Struktur Organisasi PT Indonesia Power.	- Board of Directors Proposal for East Kalimantan SPP Strategic Partner - PT Indonesia Power Organizational Structure
10.	6 Oktober 2017 October 6, 2017	Issue Strategis Perusahaan s.d September 2017.	Company Strategic Issues until September 2017
11.	20 Oktober 2017 October 20, 2017	Pembahasan RJP PT Indonesia Power Tahun 2018-2022.	Discussion of PT Indonesia Power Long-term Plan 2018-2022
12.	28 November 2017 November 28, 2017	- Tindak lanjut Direksi atas Tanggapan Dewan Komisaris pada: Hasil Rapat Dewan Komisaris - Direksi; serta Surat Rekomendasi Persetujuan Dewan Komisaris, - Tindak lanjut hasil Audit BPK RI dan SPI-PLN di PT Indonesia Power.	- Board of Directors' Follow-up on Board of Commissioners' Response on: Result of Board of Commissioners-Board of Directors Meetings and Recommendation Letter for Board of Commissioners Approval - Follow-up on audit findings from Supreme Audit Agency and Internal Control Unit-PLN to PT Indonesia Power
13.	7 Desember 2017 December 7, 2017	- Sinergi Partner Kinerja PLTU *Fast Track Program* (FTP). - Hasil Pembahasan Pra RUPS RKAP2018.	- Partner Synergy on Fast Track Program (FTP) SPP Performance - Result of discussion on WP&B 2018 pre-GMS
14	22 Desember 2017 December 22, 2017	Penjelasan Direksi Perihal Usulan Pemenang Partner Surat No. 932/150/IP/2017-R.	Board of Directors' explanation on Proposal of Winning Partner, Letter No. 932/150/IP/2017-R

Rapat Direksi

Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual* Direksi secara rutin mengadakan rapat, baik secara internal maupun rapat gabungan dengan Direksi dalam rangka mengkoordinasikan seluruh kegiatan bisnis Perusahaan. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Direksi telah memberikan persetujuan atas usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan melalui rapat formal.

Board of Directors Meeting

As specified in the Articles of Association and the Board Manual, the Board of Directors routinely holds internal and joint meetings with the Board of Directors to coordinate all of the Company's business activities. Meeting resolutions are taken with deliberation and consensus. The Board of Directors can also make valid and binding decisions without holding a Board of Directors Meeting, provided that all members of the Board of Directors have approved the proposal submitted in writing and signed the agreement. The decisions taken have the same power with the decisions taken by formal meetings.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

FREQUENCY AND ATTENDANCE OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Direksi

Selama tahun 2017, Direksi Indonesia Power telah menyelenggarakan 39 kali rapat internal dan 14 kali rapat gabungan dengan Dewan Komisaris. Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat internal dan gabungan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Frequency and Attendance Rate of the Board of Directors Meeting

In 2017 the Board of Directors has held 93 internal meetings and 14 joint meetings with the Board of Commissioners. The attendances of the Board of Directors in the internal and joint meetings are shown in the table below:

Tabel Kehadiran Direksi Dalam Rapat Internal Tahun 2017

Table: Board of Directors Attendance in Internal Meetings in 2017

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase (%) Percentage (%)
Sripeni Inten Cahyani	39	34	87
Eri Prabowo	39	36	92
Antonius RT Artono	39	38	97
Hudiono	39	38	97
Adi Supriono	39	37	95
Roikhan	39	37	95

Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Internal Direksi

Agenda, Date and Participant of the Board of Directors Internal Meetings

No	Tanggal Pelaksanaan Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	
1	3 Januari 2017 January 3, 2017	- Evaluasi Tahun 2016 - Rencana Strategi Eksekusi RKAP 2017 dan Mencapai Target 2017 - Laporan Tender Progres Proyek Tambak Lorok Blok 3	- 2016 Evaluation - Strategic Plan on WP&B Execution and Achieving 2017 Targets - Bidding Report of Tambak Lorok Block 3 Project Progress
2	25 Januari 2017 January 25, 2017	- *Review* Radir Sebelumnya dan info lain-lain - Paparan Hasil Studi Asesmen Komunikasi Korporat oleh Konsultan Komunikasi Kiroyan & Partner - Paparan Proses Bisnis PLTU *Fast Track Program* 1 (FTP 1) Luar Jawa - Paparan Realisasi Kinerja s.d Desember 2016 dan Kontrak Manajemen 2017	- Review of Previous Board of Directors Meetings and other information - Explanation of Corporate Communication Assessment Study Results by Communication Consultant Kiroyan & Partner - Explanation of Fast Track Program (FTP) 1 outside Java SPP Business Process - Explanation of Actual Performance until December 2016 and Management Contract 2017
3	27 Januari 2017 January 27, 2017	- *Review* Radir Sebelumnya dan info lain-lain - Paparan Realisasi Kinerja s.d Desember 2016 dan Kontrak Manajemen 2017	- Review of Previous Board of Directors Meetings and other information - Explanation of Actual Performance until December 2016 and Management Contract 2017
4	16 Februari 2017 February 16, 2017	- *Review* Radir sebelumnya dan info lain-lain - Penyampaian Hasil Forum Bisnis 2017	- Review of Previous Board of Directors Meetings and other information - Submission of Business Forum 2017 Result

No	Tanggal Pelaksanaan Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	
5	21 Februari 2017 February 21, 2017	- *Review* Radir Sebelumnya dan info lain-lain - Progress Report Suralaya 2x1000 MW - Rencana akuisisi PT Perta Daya Gas dalam rangka efiensi fasilitas Compressed Natural Gas (CNG) di Tambak Lorok - Perpanjangan Kontrak PGN - Pembayaran Tagihan Batubara PT Bukit Asam - Penandatanganan Settlement *Agreement* Penyelesaian Kontrak antara IP dengan Konsorsium Wartsila-PP	- Review of Previous Board of Directors Meetings and other information - Suralaya 2x1000 MW Progress Report - PT Perta Daya Gas acquisition plan for Compressed Natural Gas (CNG) facility efficiency in Tambak Lorok - PGN Contract Extension - Payment of PT Bukit Asam Coal Invoice - The Signing of Settlement Agreement for the Completion of Contract between IP and Wartsila-PP Consortium
6	27 Februari 2017 February 27, 2017	- *Review* Radir Sebelumnya dan info lain-lain - Pembahasan Pasokan Gas Bali - Pembentukan Anak Perusahaan - Penandatanganan MoU HOA PLTU Mulut tambang - Progress Project Suralaya 9-10 - Penandatanganan *Non Disclosure Aggrement* - RJPP	- Review of Previous Board of Directors Meetings and other information - Discussion on Bali Gas Supply - Establishment of Subsidiaries - The Signing of HOA MoU for SPP Mulut Tambang - Suralaya 9-10 Project Progress - The Signing of Non-Disclosure Agreement - Company Long-term Plan
7	28 Februari 2017 February 28, 2017	- *Review* Radir Sebelumnya dan info lain-lain - Pembahasan Pasokan Gas Bali	- Review of Previous Board of Directors Meetings and other information - Discussion on Bali Gas Supply
8	2 Maret 2017 March 2, 2017	- *Review* Radir Sebelumnya dan info lain-lain - Program Penurunan Biaya Pokok Produksi (BPP)	- Review of Previous Board of Directors Meetings and other information - Cost of Supply Efficiency Program
9	8 Maret 2017 March 8, 2017	- *Review* Radir Sebelumnya dan info lain-lain - Program Penurunan BPP - Program Kinerja sampai bulan Februari 2017 dan Persiapan Rapat ALCO 15 Maret 2017 - Kebijakan Pengosongan Rumah Dinas SIP lokasi project Suralaya #9-10 - Laporan adanya SP3 atas Laporan dugaan pidana pembangunan Jembatan oleh PT BI tanpa ijin/ tanpa hak - Mitigasi Risiko Hukum Atas Permasalahan Tanah UP Saguling - Penjelasan Efek Beragun Aset (EBA)	- Review of Previous Board of Directors Meetings and other information - Cost of Supply Efficiency Program - Performance program until February 2017 and preparation of ALCO Meeting on March 15, 2017 - Policy on the emptying of SIP company house in Suralaya 9-10 Project Site - Report of Third Warning Letter for the Report of alleged crime in unlicensed bridge construction by PT BI - Legal risk mitigation for Saguling GU land dispute - Explanation on Asset-backed Securities
10	22 Maret 2017 March 22, 2017	- *Review* Radir Sebelumnya dan info lain-lain - Alignment Business Portofolio Strategi PT PLN (Persero) dan IP - Laporan YPK Tentang Diklat dan *Fly Ash and Bottom Ash* (FABA) - Laporan Tim *Maintenance*, *Repair* dan *Overhaul* (MRO)	- Review of Previous Board of Directors Meetings and other information - Alignment of PT PLN (Persero) and IP Strategy Business Portfolio - YPK Report on Education and Training and Fly Ash and Bottom Ash (FABA) - Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) Team Report
11	3 April 2017 April 3, 2017	- *Review* Radir Sebelumnya dan info lain-lain - Pasokan Batubara PT Bukit Asam dan Aspek Kontraktual - Coal Terminal - Alokasi Anggaran FTP1 - Usulan Perubahan Visi - Klaim Asuransi atas PLTP Kamojang Unit 1 - Progres *Enterprise Resource Planning* (ERP) - Progres EBA	- Review of Previous Board of Directors Meetings and other information - PT Bukit Asam Coal Supply and Contractual Aspect - Coal Terminal - FTP-1 Budget Allocation - Proposal for the Change in Vision - Insurance Claim for GPP Kamojang Unit 1 - Progress of Enterprise Resource Planning (ERP) - EBA Progress
12	6 April 2017 April 6, 2017	- Pembayaran PT PEL Periode 5-28 Februari 2017	- PT PEL Payment for February 5-28, 2017

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

FREQUENCY AND ATTENDANCE OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

No	Tanggal Pelaksanaan Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	
13	12 April 2017 April 12, 2017	- *Review* Radir Sebelumnya dan info lain-lain - Status Progres Capex - Strategy *partnership* FTP-1 - Paparan Opsi Strategi PDG - Paparan Evaluasi Kinerja dan Kontrak Manajemen	- Review of Previous Board of Directors Meetings and other information - CAPEX progress status - FTP-1 partnership strategy - Explanation of PDG Strategy Options - Explanation of Performance Evaluation and Management Contract
14	18 April 2017 April 18, 2017	- *Review* Radir Sebelumnya dan info lain-lain - Program Penurunan BPP Sesuai Rekomendasi DEKOM - Manajemen Jetty - Draft Keputusan Anggaran Sementara UJP/PRK - Progres Implementasi ERP - Strategi Pengendalian Korupsi	- Review of Previous Board of Directors Meetings and other information - Cost of Supply Efficiency Program according to the Board of Directors' Recommendations - Jetty Management - Draft UJK/PRK Temporary Budget Decision - Progress of ERP implementation - Corruption Control Strategy
15	25 April 2017 April 25, 2017	- *Review* Radir Sebelumnya dan info lain-lain - Integrasi Perencanaan Strategis, Sistem Manajemen & Pengendalian Kinerja Korporat - Persiapan Materi RUPS LPT 2016 - Rencana MRO dan Skema Bisnis *Joint Operation* (JO) - Progress *Strategic Partnership* FTP - Progress Permasalahan Batubara - Permasalahan terkait Gas Benoa dengan PT PEL - Persetujuan Ijin Penandatanganan Consortium Agreement untuk PLTU Mulut Tambang Jambi	- Review of Previous Board of Directors Meetings and other information - Integration of Corporate Strategic Planning, Management System, and Performance Control - Preparation of GMS 2016 on Annual Calculation Report Material - MRO Planning and Joint Operation (JO) Business Scheme - Progress of FTP Strategic Partnership - Progress of Coal Issues - PT PEL and Benoa Gas dispute - Approval for the Permit to Sign the Agreement Consortium for CCP Mulut Tambang Jambi
16	2 Mei 2017 May 2, 2017	- *Review* Radir Sebelumnya dan info lain-lain - Status Progres Capaian Quick Win 2017 - Persiapan RUPS LPT AP & Rencana Pembelian Saham PDG - Laporan Pengadaan Gas Benoa - Laporan WS Manajemen resiko dan Asuransi - Coal Handling Terpadu (CHT) 4 dan progress Pekerjaan Jasa Haultecamp - Materi RUPS LPT IP 2016 - Persetujuan Program dan Anggaran CSR Unit Persetujuan Program dan Anggaran CSR Unit - Penunjukkan Konsultan Hukum Mulyana & Daroe	- Review of Previous Board of Directors Meetings and other information - Status of Quick Win 2017 Progress - Preparation of PT AP GMS on Annual Calculation Report and PDG Stock Purchase Plan - Benoa Gas Procurement Report - Risk Management and Insurance WS Report - Integrated Coal Handling (CHT) 4 and Holtekamp Service work progress - IP GMS 2016 on Annual Calculation Report - Approval for CSR Program and Budget - Appointment of Legal Consultant Mulyana & Daroe
17	24 Mei 2017 May 24, 2017	- *Review* Radir Sebelumnya dan info lain-lain - Skema Pendanaan GCL IT dan Rencana Setoran Modal - Update Status Engineering Center - Keputusan Efektifitas *Life Cycle Management* (LCM) dan Maximo dalam Penyusunan RKA	- Review of Previous Board of Directors Meetings and other information - GCL IT Funding Scheme and Paid-up Capital Plan - Engineering Center Status Update - Decision for the Effectiveness of Life Cycle Management (LCM) and Maximo in WP&B Preparation
18	30 Mei 2017 May 30, 2017	- *Review* Radir Sebelumnya dan info lain-lain - Laporan Progres Penyiapan Lahan Suralaya 9-10 - Rencana Green Power Plant UP Suralaya - Laporan Pengelolaan K3L Jangka Panjang dan Jangka Pendek - Laporan Upaya Peningkatan Keandalan Pembangkit	- Review of Previous Board of Directors Meetings and other information - Suralaya 9-10 Site Preparation Progress Report - Suralaya GU Green Power Plant Program - Long-term and Short-term Occupational Health, Safety, and Environment Management Report - Report of Power Plant Reliability Improvement Efforts
19	2 Juni 2017 June 2, 2017	- *Review* Radir Sebelumnya dan info lain-lain - Laporan Konsultatif CDB - Persiapan RUPS LPT AP - Rencana Perubahan Skema Bisnis TPGP - Laporan Status Progress ERP	- Review of Previous Board of Directors Meetings and other information - CDB Consultative Report - Preparation of AP GMS on Annual Calculation Report - Plan on TPGP Business Scheme Changes - ERP Progress Status Report

No	Tanggal Pelaksanaan Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	
20	19 Juni 2017 June 19, 2017	- *Review* Radir Sebelumnya dan info lain-lain - Pembahasan *Update* Proyek Investasi Pengembangan Usaha Tahun 2017-2018	- Review of Previous Board of Directors Meetings and other information - Discussion of Business Development Investment Project 2017-2018 Update
21	20 Juli 2017 July 20, 2017	- *Review* Radir Sebelumnya dan info lain-lain - Laporan Progress Penyiapan Lahan Proyek Suralaya 9-10	- Review of Previous Board of Directors Meetings and other information - Suralaya 9-10 Project Site Preparation Progress Report
22	21 Juli 2017 July 21, 2017	- *Review* Radir Sebelumnya dan info lain-lain - Unit Layanan sertifikasi - *Diagnostic Sheet* Tata kelola Pembangkit - Usulan RKAP 2018 - Persetujuan Anggaran CSR - Program Satuan Audit Internal - Rencana Setoran Modal PIT	- Review of Previous Board of Directors Meetings and other information - Certification Service Unit - Power Plant Governance Diagnostic Sheet - Inputs on WP&B 2018 - CSR Budget Approval - Internal Audit Unit Programs - PIT Paid-up Capital Plan
23	3 Agustus 2017 August 3, 2017	- *Review* Radir Sebelumnya dan info lain-lain - Progres IPP PLTU Jawa 9&10 dan Rencana Tender EPC PLTU - Presentasi Konsultan Hukum LO Penunjukan JO - Rencana Tender *Engineering Procurement and Construction* (EPC) PLTD Senayan PMP - Laporan Realisasi KKU SM 1 tahun 2017 - Paparan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Pengendaliannya	- Review of Previous Board of Directors Meetings and other information - Progress of Java SPP 9&10 IPP and SPP EPC Bidding Plan - Presentation from LO Legal Consultant on JO Appointment - DPP Senayan PMP Engineering Procurement and Construction (EPC) Bidding Plan - KKU SM 1 Realization Report 2017 - Explanation of Company Long-term Plan and its Control
24	7 Agustus 2017 August 7, 2017	- Review Radir Sebelumnya dan info lain-lain - Persetujuan Penandatanganan Obligor *Acknowledgement* Amandemen Dokumen Proyek PLTA Rajamandala - EPC Contractor PLTU Jawa 9-10 with *Performance Guarantee* - Laporan Perkembangan CHT-4 - Konsinyering Struktur Organisasi IP dan Kantor Pusat	- Review of Previous Board of Directors Meetings and other information - Approval for the Signing of Obligor Acknowledgment of Amendment to HPP Rajamandala Project Document - SPP Java 9-10 EPC Contractor with Performance Guarantee - CHT-4 Progress Report - Work Committee Meeting on IP Organizational Structure and Head Office
25	16 Agustus 2017 August 16, 2017	- *Review* Radir Sebelumnya dan info lain-lain - Arahan Dirut - Laporan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU), Paparan Peta Strategi dan Persiapan ALCO - Laporan Hasil Audit s.d Semester I 2017	- Review of Previous Board of Directors Meetings and other information - President Director's Directives - Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) Report, Explanation of ALCO Strategic Map and Preparation - Report on Audit Findings of Semester I 2017
26	24 Agustus 2017 August 24, 2017	- *Review* Radir Sebelumnya dan info lain-lain - Strategi Jasa O&M - Laporan Konsultatif Jasa MRO - Persetujuan Program Desa Emas di karimun Jawa - Review Harga Batu Bara - Program PLTU Mulut Tambang Kaltim 5	- Review of Previous Board of Directors Meetings and other information - O&M Services Strategy - MRO Services Consultative Report - Approval for Gold Village Program in Karimunjawa - Coal Price Review - SPP Mulut Tambang East Kalimantan 5 Program
27	30 Agustus 2017 August 30, 2017	- *Review* Radir Sebelumnya dan info lain-lain - Paparan Suralaya Tentang Kualitas Batubara 2017 dan Upaya Perbaikan Heatrate dan Peningkatan Keandalan - Paparan *Community of Expertise* - Laporan Pengelolaan FABA - Paparan MRO - Rapat Konsultatif PT ADC tentang *Port Management* Suralaya - Rencana Pengadaan Barge Mounted Power Plant (BMPP) Sambelia 30 MW dengan Penunjukkan Langsung ke PT PAL	- Review of Previous Board of Directors Meetings and other information - Explanation of Suralaya on Coal Quality 2017 and Heat Rate Repair and Reliability Improvement - Explanation of Community of Expertise - FABA Management Report - Explanation of MRO - PT ADC Consultative Meeting on Suralaya Port Management - Barge Mounted Power Plant (BMPP) Sambelia 30 MW Procurement Plan and Direct Appointment to PT PAL

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

FREQUENCY AND ATTENDANCE OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

No	Tanggal Pelaksanaan Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	
28	18 September 2017 September 18, 2017	- *Review* Radir Sebelumnya dan info lain-lain - Laporan Progres EBA - Laporan Progres RKAP 2018 - Laporan Rencana HUT IP & Employee Gathering - Laporan Rencana Program PI Sytem	- Review of Previous Board of Directors Meetings and other information - EBA Progress Report - WP&B 2018 Progress Report - IP Anniversary Commemoration and Employee Gathering Plan Report - PI System Program Plan Report
29	10 Oktober 2017 October 10, 2017	- *Review* Radir Sebelumnya dan info lain-lain - *Entry* Meeting KAP 2017 - Pengalihan Pandean Lamper - Sewa Lahan Pelindo - Program Pemanfaatan FABA - Kompresor PLTGU Priok	- Review of Previous Board of Directors Meetings and other information - KAP 2017 Entry Meeting - Transfer of Pandean Lamper - Pelindo Land Lease - FABA Utilization Program - CCPP Priok Compressor
30	16 Oktober 2017 October 16, 2017	- Pembahasan RJPP - Revisi Kontrak Manajemen	- Discussion on Company Long-term Plan - Management Contract Revision
31	18 Oktober 2017 October 18, 2017	- *Review* Radir Sebelumnya dan info lain-lain - Pembahasan RJPP - Proses Bisnis Proyek dan Pengendalian	- Review of Previous Board of Directors Meetings and other information - Discussion on Company Long-term Plan - Project and Control Business Project
32	31 Oktober 2017 October 31, 2017	- Review Radir Sebelumnya dan Arahan Direktur Utama - Paparan Manajemen Aset Non Teknis (Fasilitas & Sarana PT IP) - Paparan Penyebab Kemunduran PLTP Kamojang Unit 1 - Paparan Pengelolaan PLTP IP (Materi Jawaban kepada PLN) - Penyampaian Kajian Jangka Panjang Baik Teknis, Komersial dan *Demand* atas Aset Pembangkit Eksisting yang Sudah Berumur 15 Tahun (Rencana LCM Pembangkit) - Laporan Progress IP Pintar	- Review of Previous Board of Directors Meetings and President Director's Directives - Explanation of Non-Technical Asset Management (PT IP Facilities) - Explanation of Delay in GPP Kamojang Unit 1 - Explanation of IP GPP Management (Reply Material to PLN) - Submission of Long-term Review of Technical, Commercial, and Demand of Existing Power Plant Assets of over 15 years (Power Plant LCM Plan) - IP Pintar Progress Report
33	7 November 2017 November 7, 2017	- *Review* Radir Sebelumnya & Arahan Direktur Utama - Laporan Persiapan Forum Audit Internal - Laporan Persiapan Lomba Karya Inovasi (LKI) & Persiapan Semesta Budaya - Pengembangan Kompetensi - Laporan Progres Pengelolaan FABA & Sedimen Waduk Mrica serta Standardisasi Warna Lantai Pembangkit - Laporan Pengelolaan Keamanan	- Review of Previous Board of Directors Meetings and President Director's Directives - Internal Audit Forum Preparation Report - Report of Lomba Karya Inovasi (LKI - Innovative Work Contest) and Semesta Budaya Preparations - Competency Building - Progress Report of FABA & Mrica Reservoir Sediment Management and Power Plant Floor Color Standardization - Security Management Report
34	17 November 2017 November 17, 2017	- *Review* Radir Sebelumnya & Arahan Direktur Utama - Laporan Skema Bisnis Pengelolaan Proyek Penugasan PLN ke IP & Rencana Road Show Pencarian Mitra Strategis Pengembangan Pembangkit - Laporan Rencana Terowongan Nanjung & Hasil Koordinasi dengan KEMENPUPR - Pemaparan Strategi Jasa O&M untuk Pembangkit Kecil yang akan Dikelola Penuh oleh CDB	- Review of Previous Board of Directors Meetings and President Director's Directives - Report of PLN to IP Assignment Project Management Business Scheme and Road Show Plan for the Search of Strategic Partner for Power Plant Development - Report of Nanjung Tunnel Plan and Result of Coordination with the Ministry of Public Works and Public Housing - Explanation of O&M Services Strategy for Small Power Plants to be Fully Managed by CDB

No	Tanggal Pelaksanaan Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	
35	21 November 2017 November 21, 2017	- *Review* Radir Sebelumnya dan Arahan Dirut - Laporan Realisasi KPI Korporat s.d Oktober 2017 dan Prognosa s.d Desember 2017 - Persetujuan Pembayaran Lisensi Microsoft - Laporan Rencana Pembangunan Gedung Kantor Pusat PT IP Di Area PLTD Senayan - Laporan Percepatan Usulan Anggaran Investasi (UAI) 2018 - Laporan Progres PLTD *Built-Operate-Transfer* (BOT) - Laporan Progres IRP, ADC, O&M CDB - Laporan Kebutuhan Pendanaan dibawah PIT - Laporan Temuan KAP Potensi Penurunan Nilai Aset (PSAK 48) - Laporan *Desk Study* Potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dan Usulan Tindak Lanjut - Persetujuan Pemakaian Anggaran CSR	- Review of Previous Board of Directors Meetings and President Director's Directives - Report of Corporate KPI Realization until October 2017 and Prognosis until December 2017 - Approval for Microsoft License Payment - Report of PT IP Head Office Building Construction Plan in DPP Senayan Area - Report of Investment Budget Proposal (UAI) 2018 Acceleration - DPP Build-Operate-Transfer (BOT) Progress Report - IRP, ADC, O&M CDB Progress Report - Report of Funding Needs under PIT - Report of Public Accountant Firm's Finding on Potential Impairment of Assets (PSAK 48) - Report of Desk Study on New and Renewable Energy and Proposed Follow-up - CSR Budget Utilization Approval
36	27 November 2017 November 27, 2017	- *Review* Radir Sebelumnya dan Arahan Dirut - Pemaparan Sewa Lahan Pelindo PLTU Perak - Pembahasan Materi Radekom - Pembahasan Persiapan PRA RUPS RKAP	- Review of Previous Board of Directors Meetings and President Director's Directives - Explanation of SPP Perak Pelindo Land Lease - Discussion of Board of Commissioners Meeting Materials - Discussion of Preparation of pre-GMS WP&B
37	5 Desember 2017 December 5, 2017	- *Review* Radir Sebelumnya dan Arahan Dirut - Laporan Rancangan Pasokan Batubara PT ADC - Laporan Evaluasi Proyek PLTU Tambak Lorok Unit 3 - Pembahasan Persiapan PRA RUPS RKAP 2018	- Review of Previous Board of Directors Meetings and President Director's Directives - Report of PT ADC Coal Supply Plan - Report of SPP Tambak Lorok Unit 3 Project Evaluation - Discussion of Preparation of pre-GMS WP&B 2018
38	11 Desember 2017 December 11, 2017	- *Review* Radir Sebelumnya dan Arahan Dirut - Laporan Pengembangan Usaha antara lain PLTD Senayan, MPP, PLTU Mulut Tambang - Pemaparan Proses Bisnis Proyek dan Pengendalian - Pemaparan Pengelolaan Program S2 PT Indonesia Power - Laporan Efektivitas Organisasi - Mekanisme Pengawalan TP4P/T4PD atas Proyek Penugasan PLN Kepada IP - Laporan Perjanjian Komersial PT IP dan Laporan PLTDG Pesanggaran untuk Percepatan Kontrak	- Review of Previous Board of Directors Meetings and President Director's Directives - Report of Business Development, among others DPP Senayan, MPP, SPP Mulut Tambang - Explanation of Project and Control Business Project - Explanation of PT Indonesia Power S2 Program Management - Report of Organizational Effectiveness - Mechanism of TP4P/T4PD Escort for PLN Assignment Project to IP - Report of PT IP Commercial Agreement and Report of DGPP Pesanggaran for Contract Acceleration
39	20 Desember 2017 December 20, 2017	- Review Radir Sebelumnya dan Arahan Dirut - Laporan *Reliability, Efficiency and Optimization Centre* (REOC) - Pemaparan Program Transformasi *Centre of Excellent* - Pengajuan Ijin Prinsip UAI 2018 diatas Rp50 Milyar - Pemaparan Rencana Pengadaan Batubara PLTU Suralaya 1-7 tahun 2019-2026	- Review of Previous Board of Directors Meetings and President Director's Directives - Reliability, Efficiency and Optimization Center (REOC) Report - Explanation of Transformation Center of Excellent Program - Application of Principle Permit for UAI 2018 above Rp50 billion - Explanation of Coal Procurement Plan of SPP Suralaya 1-7 in 2019-2026

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS



Pada dasarnya kinerja Direksi dan Dewan Komisaris akan dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS. Secara umum, evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Pedoman Kerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Indonesia Power Nomor 178.K/010/IP/2013 dan 006. SK/DEKOM-IP/2013 tanggal 21 November 2013.

Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dievaluasi melalui:

1. Pemegang Saham secara kolektif dalam RUPS. Indikator penilaian kinerja Direksi tahun 2017 adalah pencapaian kontrak kerja manajemen dalam *Key Performance Indicators* (KPI) Korporat tahun 2017 dan tingkat kesehatan Perusahaan.

2. Pencapaian hasil *asessment* GCG. Penilaian kinerja diukur dari hasil pencapaian *score assessment* GCG khususnya pada penilaian aspek Dewan Komisaris serta aspek Direksi dan organ penunjangnya. Pelaksanaan *assessment* GCG merujuk pada Keputusan Sekretaris Kementrian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang

Essentially, the performances of the Board of Directors and the Board of Commissioners will be evaluated by the Shareholders in the GMS. In general, the assessment of performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors in the Board Manual was ratified by Joint Decree of the Board of Directors and the Board of Commissioners Numbers 178.K/010/IP/2013 and 006. SK/DEKOMIP/2013 dated November 21, 2013.

The performances of the Board of Commissioners and the Board of Directors are evaluated by:

1. The Shareholders collectively in the GMS. The indicators for the Board of Directors' performance in 2017 were the achievement of management work contract in the Corporate Key Performance Indicators (KPI) and Company soundness level.
2. Achievement of GCG assessment. The performance can be measured by the score of GCG assessment, particularly on the assessment of the Board of Commissioners, Board of Directors, and their supporting organs. The implementation of GCG assessment refers to Decree of the Secretary to the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-

Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada Badan Usaha MIlik Negara.

16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 on Indicators/ Parameters of Assessment and Evaluation on Good Corporate Governance Implementation at State-Owned Enterprises.

Pelaksanaan penilaian dilakukan pada saat RUPS Laporan Perhitungan Tahunan (LPT), untuk kinerja tahun buku 2016 telah dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2017 dan penilaian *assessment* GCG tahun 2017 dilakukan secara *self-assessment* di bulan Januari - Februari 2018.

The assessment is performed during the GMS on Annual Calculation Report; the performance for the fiscal year 2016 was carried out on May 24, 2017, while GCG assessment in 2017 was performed internally (self-assessment) in January-February 2018.

Tabel Penilaian berdasarkan Assessment GCG
Table: GCG Assessment Result

	Jumlah Indikator Penilaian Number of Assessment Indicators	**Jumlah Parameter Penilaian** Number of Assessment Parameters	**Skor Pencapaian** Actual Score	**Skor Maksimum** Maximum Score	**Presentase (%)** Percentage (%)
Dewan Komisaris Board of Commissioners	12	44	32,87	35	93,93
Direksi Board of Directors	13	52	32,78	35	93,66

Dari tabel di atas, penilaian berdasarkan *assessment* GCG dilakukan terhadap penilaian penerapan atas 12 indikator dengan 44 parameter dalam aspek Dewan Komisaris memperlihatkan skor capaian 32,87 dari skor maksimum 35 atau 93,93%. Sedangkan penilaian Direksi berdasarkan *assessment* GCG yang dilakukan terhadap penilaian penerapan atas 13 indikator dengan 52 parameter dalam aspek Direksi memperlihatkan skor capaian 32,78 dari skor maksimum 35 atau 93,66%. Dengan adanya hasil pencapaian tersebut menunjukan bahwa kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Indonesia Power telah mencapai klasifikasi kualitas penerapan GCG “Sangat Baik”.

From the table above, the GCG assessment was performed to the implementation of 12 indicators and 44 parameters in the Board of Commissioners aspect, with the actual score of 32.87 out of the maximum score of 35 or 93.93%. Meanwhile, the Board of Directors GCG assessment was performed to the implementation of 13 indicators and 52 parameters in the Board of Directors aspect, with the actual score of 32.78 out of the maximum score of 35 or 93.66%. The scores indicate that the performances of Indonesia Power Board of Commissioners and the Board of Directors were “Very Good” in terms of GCG implementation.

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

POLICY ON THE REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan usulan dari Dewan Komisaris dengan sebelumnya mendapatkan rekomendasi dari Fungsi Nominasi dan Remunerasi. Rekomendasi Fungsi Nominasi dan Remunerasi tersebut diserahkan kepada Dewan Komisaris dan disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan. Prosedur dan mekanisme penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan digambarkan dalam skema berikut ini.

The remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors is determined by the GMS by taking into account the inputs from the Board of Commissioners with prior recommendations from the Nomination and Remuneration Function. The recommendations of the Nomination and Remuneration Function was submitted to the Board of Commissioners to be handed over to the GMS for approval. The procedure and mechanism for the determination of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors are illustrated in the following scheme.

Skema Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Scheme: Determination of Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors



Penetapan penghasilan berupa honorarium/gaji, tunjangan, dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pendapatan, aktiva, kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan, tingkat inflasi dan faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penetapan penghasilan yang berupa tunjangan dan tantiem bersifat variabel, dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat kesehatan, dan kemampuan keuangan, serta faktor-faktor lain yang relevan (*merit system*) yang berlaku umum dalam industri yang sejenis. Dalam hal perhitungan honorarium/gaji dengan memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan honorarium lebih rendah dari pada tahun sebelumnya, maka honorarium yang dipakai adalah sama dengan honorarium/gaji tahun sebelumnya.

The determination of remuneration such as honorarium/salary, allowances, and permanent facilities is performed by taking into account revenues, assets, the Company's financial capability and condition, inflation rate, and other relevant factors, and may not conflict with the laws and regulations. Meanwhile, the determination of remuneration such as allowances and tantiem is based on merit system, by considering the achievement of target, soundness level, financial capability, and other relevant factors generally applied in the similar industries. In the event where the calculation of honorarium/salary by taking into account relevant factors results in a lower honorarium compared to the previous year, the honorarium given will be in the same amount with the previous year's honorarium/salary.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan tahun 2017 ditetapkan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler perihal Persetujuan Tantiem Tahun Buku 2016 dan Remunerasi Tahun Buku 2017 bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta Bonus Karyawan Tahun Buku 2016. Keputusan Pemegang Saham menetapkan dasar remunerasi bagi Direktur Utama dan Dewan Komisaris yaitu sebagai berikut:

1. Gaji/honorarium.
   a. Gaji Direktur Utama ditetapkan sebesar Rp90 juta.
   b. Gaji anggota Direksi (selain Direktur Utama) dan honorarium anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:
      - Direktur: 90% dari Direktur Utama
      - Komisaris Utama: 45% dari Direktur Utama
      - Komisaris: 90% dari Komisaris Utama
2. Tunjangan/Fasilitas
   Tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris diberikan dengan merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER- 04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara tanggal 10 Maret 2014 dan perubahannya Nomor PER-02/MBU/06/2016 tanggal 20 Juni 2016.

Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Structure

The remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors in 2017 was determined according to Circular Shareholders Decree on Approval for Tantiem 2016 and Remuneration 2017 for the Board of Directors and the Board of Commissioners, and Employee Bonus 2016. Shareholders Decree determines the basis of remuneration for the President Director and the Board of Commissioners as follows:

1. Salary/Honorarium
   a. The salary for the President Director is Rp90 million.
   b. The salary for the members of the Board of Directors (apart from the President Director) and the honorarium for the members of the Board of Commissioners is set as follows:
      - Directors: 90% of President Directors' Salary
      - President Commissioner: 45% of President Directors' Salary
      - Commissioners: 90% of President Commissioner' Salary
2. Allowances/Facilities
   The allowances/facilities for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners are provided by referring to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER- 04/MBU/2014 on Guidelines for the Determination of Remuneration for the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises dated March 10, 2014 and its amendment under registration number PER-02/MBU/06/2016 dated June 20, 2016.

Pengungkapan Remunerasi, Bonus Kinerja, dan Bonus Non Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Perusahaan memberikan remunerasi kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi berupa gaji/honorarium, bonus kinerja (tantiem) dan bonus non kinerja (tunjangan). Seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh RUPS. Berikut

Disclosure of Remuneration, Performance Bonus and Non-Performance Bonus for the Board of Commissioners and the Board of Directors

The Company provides remuneration for the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors in the forms of salary/honorarium, performance bonus (tantiem), and non-performance bonus (allowances). All members of the board of Commissioners and the Board of Directors do not take and/or receive personal gain from the Company apart from the remuneration and

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

POLICY ON THE REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

rincian besarnya remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Tahun 2017:

other facilities set in the GMS. Here is the details of each remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors in 2017:

Remunerasi, Bonus Kinerja, dan Bonus Non Kinerja Dewan Komisaris

Remuneration, Performance Bonus and Non-Performance Bonus for the Board of Commissioners

Tabel Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2017
Table: Board of Commissioners Remuneration in 2017

Jenis Remunerasi Remuneration Type		Jumlah Anggota Dewan Komisaris Total Members of the Board of Commissioners	Jumlah (Rp) Total (Rp)
Honorarium	Honorarium	6	3.564.000.000
Tantiem	Tantiem	6	2.271.360.000
Tunjangan	Allowance	6	1.009.800.000
Jumlah	**Total**	**6**	**6.845.160.000**

Tabel Remunerasi Masing-Masing Anggota Dewan Komisaris Tahun 2017
Table: Remuneration for Each Member of the Board of Commissioners in 2017

Nama Dewan Komisaris Name of Board of Commissioners	Jabatan Position	Honor per Bulan Monthly Honorarium	Tunjangan Transport Transport Allowances	Total per Bulan Monthly Total	Tantiem	THR Religious Holiday Allowance	Penghasilan per Tahun Annual Salary
Bagus Setiawan	Komisaris Utama President Commissioner	54.000.000	10.800.000	64.800.000	249.600.000	54.000.000	1.081.200.000
Ahmad Yani	Komisaris I Commissioner	48.600.000	9.720.000	58.320.000	673.920.000	48.600.000	1.422.360.000
Abdi Mustakim	Komisaris I Commissioner	48.600.000	9.720.000	58.320.000	673.920.000	48.600.000	1.422.360.000
Agus Hernawan	Komisaris I Commissioner	48.600.000	9.720.000	58.320.000	224.640.000	48.600.000	973.080.000
Munir Ahmad	Komisaris I Commissioner	48.600.000	9.720.000	58.320.000	224.640.000	48.600.000	973.080.000
Tri Setyo Nugroho	Komisaris I Commissioner	48.600.000	9.720.000	58.320.000	224.640.000	48.600.000	973.080.000

Remunerasi Dewan Komisaris Indonesia Power dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan yaitu sebagai berikut.

The remuneration for the Board of Commissioners in one year is grouped based on the following ranges.

Tabel Kelompok Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2017
Table: Board of Commissioners Remuneration Group in 2017

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun Total Remuneration per Person in 1 year		2017
Di Atas 1 miliar	Above 1 billion	3
Di antara 500 juta s/d 1 miliar	Around 500 million to 1 billion	3
Di Bawah 500 juta	Below 500 million	0

Remunerasi, Bonus Kinerja, dan Bonus Non Kinerja Direksi

Remuneration, Performance Bonus and Non-Performance Bonus for the Board of Directors

Tabel Remunerasi Direksi Tahun 2017
Table: Board of Directors Remuneration in 2017

Jenis Remunerasi Remuneration Type		Jumlah Anggota Direksi Total Members of the Board of Directors	Jumlah (Rp) Total (Rp)
Honorarium	Honorarium	6	7.920.000.000
Tantiem	Tantiem	6	8.361.600.000
Tunjangan	Allowance	6	660.000.000
Jumlah	**Total**	**6**	**16.941.600.000**

Tabel Remunerasi Masing-Masing Anggota Direksi Tahun 2017
Table: Remuneration for Each Member of the Board of Directors in 2017

Nama Direksi Name of Board of Directors	Jabatan Position	Gaji per Bulan Monthly Salary	Total per Bulan Monthly Total	Tunjangan Cuti Leave Allowance	Tantiem	THR Holiday Allowances	Penghasilan per Tahun Annual Salary
Sripeni Inten Cahyani	Direktur Utama | President Director	120.000.000	120.000.000	0	1.622.400.000	120.000.000	3.182.400.000
Eri Prabowo	Direktur Operasional I Director of Operations I	108.000.000	108.000.000	0	1.497.600.000	108.000.000	2.901.600.000
Antonius RT Artono	Direktur Operasional II Director of Operations II	108.000.000	108.000.000	0	1.497.600.000	108.000.000	2.901.600.000
Hudiono	Direktur Keuangan | Director of Finance	108.000.000	108.000.000	0	1.123.200.000	108.000.000	2.527.200.000
Adi Supriono	Direktur Pengembangan & Niaga	108.000.000	108.000.000	0	1.123.200.000	108.000.000	2.527.200.000
Roikhan	Direktur SDM dan Administrasi	108.000.000	108.000.000	0	1.497.600.000	108.000.000	2.901.600.000

Remunerasi Direksi Indonesia Power dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan yaitu sebagai berikut.

The remuneration for the Board of Directors in one year is grouped based on the following ranges.

Tabel Kelompok Jumlah Remunerasi Direksi Tahun 2017
Table: Board of Directors Remuneration Group in 2017

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun Total Remuneration per Person in 1 year		2017
Di Atas 1 miliar	Above 1 billion	6
Di antara 500 juta s/d 1 miliar	Around 500 million to 1 billion	0
Di Bawah 500 juta	Below 500 million	0

Opsi Saham

Sampai dengan periode laporan, tidak terdapat *share option* atau penawaran opsi saham yang ditawarkan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Indonesia Power.

Stock Option

Until the reporting period, there were no stock options to the members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and Executives of Indonesia Power.

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk bekerja secara kolektif dalam menjaga efektivitas tugas dan tanggung jawabnya, khususnya dari segi pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit internal maupun eksternal serta pengawasan penerapan GCG di Perusahaan.

Audit Committee was established by the Board of Commissioners to work collectively to maintain the effectiveness of their duties and responsibilities, particularly in terms of the monitoring and evaluation of the internal and external audit planning and implementation as well as supervision of GCG implementation at the Company.

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Audit

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dan oleh karenanya Komite Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit terakhir yang dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 006.SK/DEKOM-IP/2017 tanggal 25 Oktober 2017. Pemberhentian anggota Komite Audit dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Appointment and Dismissal of Audit Committee

The Audit Committee was established by the Board of Commissioners and therefore it reports directly to the Board of Commissioners. The appointment and dismissal of the Audit Committee members were last performed by the Board of Commissioners under Board of Commissioners' Decree No. 006.SK/DEKOM-IP/2017 dated October 25, 2017 The dismissal of an Audit Committee member is performed in the case where the member's term of office expires, and based on the Board of Commissioners Decree, the member is dismissed for being unable to meet the specified performance target and/or is incompetent of performing his/her duties.

Susunan dan Komposisi Anggota Komite Audit

Pada tahun 2017 telah terjadi perubahan komposisi Komite Audit yang menjabat ditahun 2017. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002.SK/DEKOM-IP/2017 tanggal 17 Maret 2017, telah dilakukan perpanjangan masa kerja Komite Audit. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, komposisi anggota Komite Audit Indonesia Power berjumlah enam orang, termasuk anggota dari unsur Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 006.SK/DEKOM-IP/2017 tanggal 25 Oktober 2017.

Composition of Audit Committee

There was a change in the Audit Committee composition in 2017. Pursuant to Decree of the Board of Commissioners No. 002.SK/DEKOM-IP/2017 dated March 17, 2017, the extension of the Audit Committee term of office was performed. Until December 31, 2017, the Audit Committee of Indonesia Power consisted of six members, including the member from the Board of Commissioners as determined by Board of Commissioners' Decree No. 006.SK/DEKOM-IP/2017 dated October 25, 2017.

Tabel Komposisi Komite Audit Tahun 2017
Table: Audit Committee Membership in 2017

Komposisi Januari-Oktober 2017 Composition in January-October 2017	Komposisi Per 31 Desember 2017 Composition per December 31, 2017	Jabatan Position	
Agus Hernawan	Agus Hernawan	Ketua merangkap Anggota	Head and Member
Abdi Mustakim	Abdi Mustakim	Wakil Ketua I merangkap Anggota	Deputy Head I and Member
Munir Ahmad	Munir Ahmad	Wakil Ketua II merangkap Anggota	Deputy Head II and Member
Sudirmanto	Binsar Siregar	Sekretaris merangkap Anggota	Secretary and Member
Dewa Gede Ngurah Ambara	S. Obrien Krisma Wanto	Anggota Komite Audit	Audit Committee Member
Jefri Rosadi	Joko Tri Susilo	Anggota Komite Audit	Audit Committee Member

Profil Anggota Komite Audit
Audit Committee Member Profile

Nama Name	Profil Singkat Brief Profile	
 **Agus Hernawan** Ketua Komite Audit Head of Audit Committee	Profil ketua Komite Audit terkait jabatan, periode jabatan, riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) telah diuraikan pada bab Profil Perusahaan bagian Identitas dan Riwayat Singkat Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.	The profile of the Head of Audit Committee on position, term of office, education history (Major and Educational Institution), and work experience (Position, Institution, and Term of Office) is described in the chapter Company Profile, section Identity and Brief Profile of the Board of Commissioners of this Annual Report.
 **Abdi Mustakim** Wakil Komite Audit I Deputy Head I of Audit Committee	Profil wakil Komite Audit I terkait jabatan, periode jabatan, riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) telah diuraikan pada bab Profil Perusahaan bagian Identitas dan Riwayat Singkat Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.	The profile of the Deputy Head I of Audit Committee on position, term of office, education history (Major and Educational Institution), and work experience (Position, Institution, and Term of Office) is described in the chapter Company Profile, section Identity and Brief Profile of the Board of Commissioners of this Annual Report.
 **Munir Ahmad** Wakil Komite Audit II Deputy Head II of Audit Committee	Profil wakil Komite Audit II terkait jabatan, periode jabatan, riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) telah diuraikan pada bab Profil Perusahaan bagian Identitas dan Riwayat Singkat Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.	The profile of the Deputy Head II of Audit Committee on position, term of office, education history (Major and Educational Institution), and work experience (Position, Institution, and Term of Office) is described in the chapter Company Profile, section Identity and Brief Profile of the Board of Commissioners of this Annual Report.

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

Nama Name	Profil Singkat Brief Profile	
 **Binsar Siregar** Sekretaris Komite Audit Secretary to Audit Committee	Lahir di P. Siantar, 9 September 1960. Domisili di Bekasi. Meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari STTN/ISTN tahun 1989. Menjabat sebagai Sekretaris Komite Audit merangkap sebagai anggota pada tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 006.SK/DEKOM-IP/2017 tanggal 25 Oktober 2017. Selain sebagai Sekretaris Komite Audit merangkap sebagai anggota, juga menjabat sebagai Direktur Pemasaran dan Operasi PT EPN (2017-sekarang). Beberapa jabatan lain yang pernah dipegangnya adalah Kepala Bidang Kinerja dan Mutu (2014-2016) dan Kepala Bidang Kinerja (2009-2014). Pelatihan yang pernah diikuti antara lain Insurance Training and Seminar (2015), Requirements and Key Elements of Auditing BS ISO 55001:2014 (2015), ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 (2015), Pengambilan Keputusan untuk Manajer Menengah & Setara (2014).	Born in Pematang Siantar on September 9, 1960. Domiciled at Bekasi. Earned Bachelor of Mechanical Engineering from STTN/ISTN in 1989. Serving as the Secretary and Member of the Audit Committee in 2017 under Board of Commissioners' Decree No. 006.SK/DEKOM-IP/2017 dated October 25, 2017. Apart from serving as the Secretary and Member of the Audit Committee, he also serves as the Director of Marketing and Operations at PT EPN (2017-current). Some of the positions he attended include Head of Performance and Quality Department (2014-2016) and Head of Performance Department (2009-2014). The attended trainings include Insurance Training and Seminar (2015), Requirements and Key Elements of Auditing BS ISO 55001:2014 (2015), ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 (2015), Decision Making for Middle Managers & Equal Positions (2014).
 **S. Obrien Krisma Wanto** Anggota Komite Audit Audit Committee Members	Lahir di Kediri, 30 September 1965. Domisili di Tangerang. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Brawijaya tahun 1992. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit pada tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 006.SK/DEKOM-IP/2017 tanggal 25 Oktober 2017. Selain sebagai Anggota Komite Audit, juga menjabat sebagai Manajer Senior Anggaran I pada Divisi Anggaran Direktorat Keuangan PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2016-sekarang). Beberapa jabatan lain yang pernah dipegangnya adalah Manajer Keuangan, SDM, dan Administrasi PT PLN (Persero) Unit Pembangkitan Jawa Bali (2014-2016), Senior Specialist II Kinerja (Plt. Manajer Bidang Keuangan, SDM, dan Administrasi) PT PLN (Persero) Unit Pembangkitan Jawa Bali (2014), Senior Specialist II Kinerja (Plt.Manajer Keuangan) PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur (2013-2014). Pelatihan yang pernah diikuti antara lain Manajemen Keuangan Dasar Level MM/F-II Persyaratan Pembelajaran EE/SSE II (2015), Pendalaman Obligasi (2015), Pendalaman Pendapatan Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi (2015), Workshop Refreshment ASSE (2014).	Born in Kediri on September 30, 1965. Domiciled at Tangerang. He earned the Bachelor of Economic Accounting from Universitas Brawijaya (1992). Serving as the Member of the Audit Committee in 2017 under Board of Commissioners' Decree No. 006. SK/DEKOM-IP/2017 dated October 25, 2017. Apart from serving as the Member of the Audit Committee, he also serves as the Senior Manager of Budget I at the Budget Division of the Directorate of Finance, PT PLN (Persero) Head Office (2016-current). Some of the other positions served include Manager of Finance, HR, and Administration at PT PLN (Persero) Unit Pembangkitan Jawa Bali (2014-2016), Senior Specialist II for Performance (Acting Manager of Finance, HR, and Administration Division) at PT PLN (Persero) Unit Pembangkitan Jawa Bali (2014), Senior Specialist II for Performance (Acting Manager of Finance) at PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur (2013-2014). The attended trainings include Basic Financial Management Level MM/F-11 Learning Requirements EE/SSE II (2015), In-Depth Study on Bonds (2015), In-Depth Study on National Revenue and Economic Growth (2015) ASSE Refreshment Workshop (2014).

Nama Name	Profil Singkat Brief Profile	
 **Joko Tri Susilo** Anggota Komite Audit Audit Committee Member	Lahir di Sukoharjo, 6 Oktober 1979. Domisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Industri dari Institut Teknik Bandung tahun 2004. Meraih Sertifikat Kompetensi PT PLN (Persero) Unit Sertifikasi tahun 2015. Selain sebagai Anggota Komite Audit, juga menjabat sebagai Deputi Manajer Assesmen, Pemantauan dan Pelaporan Risiko Kepatuhan Bidang Risiko Legal dan Kepatuhan Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan Direktorat Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2017-sekarang). Beberapa jabatan lain yang pernah dipegangnya adalah Analyst Kepatuhan (PLT Deputi Manajer Assesmen, Pemantauan dan Pelaporan Risiko Kepatuhan) Bidang Risiko Legal dan Kepatuhan Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan Direktorat Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2016-2017). Pelatihan yang pernah diikuti antara lain Leadership And Fraud Risk Mitigationleadership And Fraud Risk Mitigation (2016), Workshop Integritas Pelayanan Publik (2010).	Born in Sukoharjo on October 6, 1979. Domiciled at Jakarta. Earned the Bachelor of Industrial Engineering from Institut Teknik Bandung, 2004. Earned Competency Certificate from PT PLN (Persero) Certification Unit, 2015. Apart from serving as the Member of the Audit Committee, he also served as the Deputy Manager of Compliance Risk Assessment, Monitoring, and Reporting at the Department of Legal Risk and Compliance, Division of Risk Management and Compliance, Directorate of Corporate Planning of PT PLN (Persero) Head Office (2017-current). Some other positions served include Compliance Analyst (Acting Deputy Manager of Compliance Risk Assessment, Monitoring, and Reporting) at the Department of Legal Risk and Compliance, Division of Risk Management and Compliance, Directorate of Corporate Planning of PT PLN (Persero) Head Office (2016-current). The attended trainings include Leadership and Fraud Risk Mitigation (2016) and Public Service Integrity Workshop (2010).

Independensi Anggota Komite Audit

Independensi anggota Komite Audit tercermin dalam hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham serta pengurus dalam partai politik. Sesuai dengan peraturan tentang pelaksanaan GCG, seluruh anggota Komite Audit Indonesia Power bersifat independen dan tidak memiliki rangkap jabatan di dalam dan di luar Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak independen sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Independence of Audit Committee Members

The independence of the Audit Committee members is shown in the familial, financial, managerial, shareholding relationships and affiliation with political parties. According to the provision on GCG implementation, all members of Audit Committee at Indonesia Power are independent parties who serve not concurrent positions inside and outside the Company that may affect their capability to act independently as described in the following table:

Tabel Independensi Komite Audit
Table: Audit Committee Independence

Aspek Independensi Independence Aspect		Agus Hernawan	Abdi Mustakim	Munir Ahmad	Binsar Siregar	S. Obrien Krisma Wanto	Joko Tri Susilo
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	No financial relationship with the Board of Commissioners and the Board of Directors	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki Hubungan kepengurusan di Indonesia Power, anak Perusahaan maupun Perusahaan afiliasi	No managerial relationship at Indonesia Power, Subsidiaries, or Affiliates	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki Hubungan kepemilikan saham di Indonesia Power	No shareholding in Indonesia Power	√	√	√	√	√	√

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

Aspek Independensi Independence Aspect		Agus Hernawan	Abdi Mustakim	Munir Ahmad	Binsar Siregar	S. Obrien Krisma Wanto	Joko Tri Susilo
Tidak memiliki Hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau sesame anggota Komite Audit	No familial relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or other members of the Audit Committee	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintah daerah	Not serving as the member of a political party management or as regional government official	√	√	√	√	√	√

Pedoman Kerja Komite Audit (Piagam Komite Audit)

Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, Komite Audit Indonesia Power telah dilengkapi Pedoman Kerja dalam Piagam Komite Audit yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 240.K/010/IP/2016 dan Nomor 014. SK/DEKOM-IP/2016 tentang Piagam Komite Audit PT Indonesia Power. Piagam Komite Audit mengatur hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota Komite Audit, antara lain fungsi dan tugas pokok Komite Audit, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit, Kode Etik, Rapat Komite Audit, Penilaian kinerja Komite Audit serta honorarium dan pembebanan biaya Komite Audit.

Audit Committee Charter

In performing its functions and roles, the Audit Committee refers to the Audit Committee Charter set under Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners Numbers 240.K/010/IP/2016 and 014.SK/DEKOM-IP/2016 on PT Indonesia Power Audit Committee Charter. The Audit Committee Charter provides the matters on the implementation of duties and responsibilities of the Audit Committee members, such as the core functions and duties, obligations, responsibilities and authorities, Code of Conduct, Audit Committee Meetings, Audit Committee Performance Assessment, and Honorarium and Expenses of the Audit Committee.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dengan melakukan penilaian terhadap *internal control* atas kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh Manajemen Perusahaan dengan tugas pokoknya antara lain:

1. Menelaah program audit tahunan yang disusun Auditor Internal dan Auditor Eksternal
2. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Internal dan Auditor Eksternal
3. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai tindak lanjut temuan audit, termasuk temuan signifikan yang belum ditindak lanjuti secara tuntas
4. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti Laporan Keuangan, Proyeksi dan Informasi Keuangan lainnya

Duties and Responsibilities of Audit Committee

The Audit Committee assists the Board of Commissioners in performing the supervisory duty by assessing the internal control of the activities performed by the Management, with the following core duties:

1. Reviewing the annual audit program prepared by Internal and External Auditors.
2. Reviewing the sufficiency of audits performed by Internal and External Auditors.
3. Providing inputs to the Board of Commissioners on follow-ups on audit findings, including significant findings not completely followed through.
4. Reviewing the financial information to be issued by the Company, such as Financial Statements, Projections, and other Financial Information.

5. Memberikan saran kepada Manajemen melalui Dewan Komisaris mengenai berbagai hal yang dapat meningkatkan kelancaran dan efektivitas proses audit
6. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai perubahan dan penyempurnaan Piagam Komite Audit
7. Mengevaluasi hasil pemantauan Auditor Internal atas tindak lanjut hasil audit dan menelaah kecukupan sumber daya serta kualifikasi tenaga Auditor Internal
8. Bersama tim seleksi memilih Auditor Eksternal yang akan melakukan audit dan mengusulkan agar dilakukan penggantian Auditor Eksternal apabila yang sedang bertugas dinilai tidak kompeten
9. Memantau pelaksanaan GCG dan melakukan evaluasi hasil *assessment* berkala atas penerapan GCG guna memastikan prinsip-prinsip GCG diterapkan dalam pengelolaan Perusahaan oleh organ Perusahaan termasuk organ pendukungnya
10. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi tentang penyempurnaan sistim dan kelengkapan GCG Perusahaan terutama berkenaan dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*GCG Code*); Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*); *Statement of Corporate Intent* (SCI); Pedoman kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*); *Road Map* dan laporan tentang pelaksanaan GCG sebagai bagian dari Laporan Tahunan di Perusahaan
11. Membuat laporan tertulis dan melakukan paparan kepada Dewan Komisaris
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Providing inputs to the Management via the Board of Commissioners on matters that may improve the continuity and effectiveness of audit process.
6. Providing inputs to the Board of Commissioners on the changes and improvements of Audit Committee Charter.
7. Evaluating the result of Internal Auditor's monitoring for the follow-up on audit findings and reviewing the sufficiency of resources and qualification of Internal Auditors.
8. Together with selection team, screening the External Auditor to perform the audit and proposing the replacement for unavailable or incompetent External Auditor.
9. Monitoring the GCG implementation and evaluating the result of periodical GCG assessment to ensure proper implementation of GCG principles in the Company management by the Company organs, including their supporting organs.
10. Evaluating and providing recommendations on the improvement of GCG system and integrity, particularly on GCG Code, Code of Conduct, Statement of Corporate Intent (SCI), Board Manual, Roadmap, and GCG implementation report as the part of the Annual Report.
11. Preparing written report and giving explanations to the Board of Commissioners.
12. Performing other duties assigned by the Board of Commissioners under the Board's scope of duties and responsibilities, in accordance with the applicable laws and regulations.

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit telah diikutsertakan dalam berbagai program pendidikan, pelatihan, maupun *workshop* sesuai dengan bidang keahliannya guna meningkatkan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite Audit. Berikut tabel pengembangan kompetensi Komite Audit Indonesia Power tahun 2017:

Competency Development for Audit Committee

All Audit Committee members have attended various education, trainings, and workshops according to their expertise to develop their competencies and support the Audit Committee duties. The following table presents competency building programs for the Audit Committee in 2017:

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

Tabel Pelatihan Komite Audit Tahun 2017
Table: Audit Committee Competency Building in 2017

Nama Peserta Name of Participant	Nama Diklat Name of Education and Training	Nama Lembaga Name of Institution	Tanggal Date	Lokasi Location
Binsar Siregar	Directorship Program PT Indonesia Power Tahun 2017	Komite Nasional Kebijakan Governance National Committee on Corporate Policy	28 November 2017 November 28, 2017	Bogor
S. Obrien Krisma Wanto	Directorship Program PT Indonesia Power Tahun 2017	Komite Nasional Kebijakan Governance National Committee on Corporate Policy	28 November 2017 November 28, 2017	Bogor
Joko Tri Susilo	Directorship Program PT Indonesia Power Tahun 2017	Komite Nasional Kebijakan Governance National Committee on Corporate Policy	28 November 2017 November 28, 2017	Bogor

Program Kerja Komite Audit

Program kerja Komite Audit Perusahaan tahun buku 2017 antara lain:

1. Rapat rutin Internal Komite Audit sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan.
2. Rapat koordinasi Komite Audit dengan Satuan Audit Internal PT Indonesia Power, dilaksanakan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan dan Rapat dilaksanakan di Kantor pusat PT Indonesia Power atau di Unit Pembangkitan (UP)/Unit Jasa Pemeliharaan (UJH)/Unit Jasa Pembangkitan (UJP)/ Unit Pembangkitan dan Jasa Pembangkitan (UPJP) jika diperlukan.
3. Apabila diperlukan, Komite Audit dapat mengundang Manajemen Perseroan dan atau Satuan Audit Internal PT Indonesia Power untuk memberikan informasi yang diperlukan.
4. Rapat Evaluasi Kinerja Perusahaan dan Pelaksanaan GCG antara Komite Audit Dewan Komisaris PT Indonesia Power dengan Sekper PT Indonesia Power, dilaksanakan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam tiga bulan.
5. Peninjauan ke Unit Pembangkitan (UP)/Unit Jasa Pemeliharaan (UJH)/Unit Jasa Pembangkitan (UJP)/ Unit Pembangkitan dan Jasa Pembangkitan (UPJP) jika diperlukan.
6. Rapat dengan KAP dan SATADI mengenai rencana pemeriksaan tahunan dan hasil Audit rutin/khusus KAP dilingkungan PT Indonesia Power.

Audit Committee Work Program

The work programs of the Audit Committee in 2017 were:

1. Periodical Audit Committee internal meetings at least once in a month.
2. Audit Committee coordination meeting with PT Indonesia Power Internal Audit unit, at least once in a month, held at PT Indonesia Power Head Office or at the Generating Unit (GU)/Maintenance Service Unit (MSU)/Generating Service Unit (GSU)/ Generating and Generating Service Unit (GGSU) if necessary.
3. If necessary, the Audit Committee may invite the Management of the Internal Audit Unit to provide required information.
4. Evaluation Meeting of Company Performance and GCG Implementation between the Audit Committee and Corporate Secretary, at least once in three months.
5. Monitoring of Generating Unit (GU)/Maintenance Service Unit (MSU)/Generating Service Unit (GSU)/ Generating and Generating Service Unit (GGSU) if necessary.
6. Meeting with Public Accountant Firm and Internal Audit Unit on annual audit plan and result of regular/ special audit in PT Indonesia Power.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Tahun 2017

Komite Audit melaksanakan tugasnya sebagai organ pendukung Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi serta memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor melalui

Report on Audit Committee Activity in 2017

The Audit Committee performs its duty as the Board of Commissioners supporting organ in providing recommendations and ensuring the effectiveness of internal control system and the effectiveness of the implementation of the internal and external auditors'

pembahasan bersama fungsi-fungsi terkait dan dalam rapat Komite Audit. Seluruh temuan, catatan dan rekomendasi dari hasil pelaksanaan kegiatan, penelaahan dan analisa Komite Audit selama tahun 2017 telah dikomunikasikan dan didiskusikan dengan manajemen Indonesia Power, Satuan Audit Internal (SAI) dan auditor eksternal, serta telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan tindak lanjut dari Manajemen Perusahaan.

Sepanjang tahun 2017, Komite Audit telah merekomendasikan beberapa hal penting yang perlu ditindaklanjuti di antaranya:

1. Meminta SATADI (Satuan Audit Internal) melakukan monitoring lebih lanjut terhadap action plan dan implementasinya untuk hal-hal yang menjadi bahasan pada Laporan Hasil Audit (LHA)
2. Dalam rangka mengukur pencapaian kinerja keuangan Perusahaan, maka perlu untuk merumuskan indikator penilaian keuangan dan disampaikan kepada Komite Dewan Komisaris
3. Mempersiapkan strategi *action* penyediaan energi primer/gas guna menjamin semua unit pembangkit di masing-masing lokasi dapat beroperasi sesuai dengan yang direncanakan
4. Melakukan analisa, evaluasi dan menyiapkan mitigasi lebih lanjut terhadap Master Plan IT Tahun 2017-2021 sesuai dengan perkembangan bisnis Perusahaan dan *roll over* RJPP.
5. Melengkapi program kerja GCG tahun 2017 dengan time schedule untuk mengendalikan pengawasan secara terukur
6. Dalam perencanaan *business continuity* PLTP Kamojang, diperlukan jaminan bahwa pasokan energy primer uap tetap tersedia sampai umur ekonomis pembangkitnya
7. Tindak lanjut dan manajemen letter dari SATADI yang belum terselesaikan agar menjadi perhatian dari seluruh manajemen Indonesia Power sehingga dapat segera selesai ditindaklanjuti.

Rapat Komite Audit

Komite Audit melaksanakan rapat guna membahas berbagai aspek terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit dalam mendukung fungsi pengawasan dan konsultasi Dewan Komisaris serta memberikan rekomendasi atas telaah yang telah dilakukan oleh Komite Audit. Berdasarkan Piagam Komite Audit, rapat diselenggarakan secara berkala terdiri dari rapat koordinasi Komite Audit dengan Satuan Audit Internal

duties via discussion with relevant functions and during Audit Committee meetings. All findings, notes, and recommendations resulted from the Audit Committee's activities, reviews, and analyses in 0217 were disclosed and discussed with Indonesia Power Management, Internal Audit Unit, and external auditor, and reported to the Board of Commissioners for improvement and follow-up by the Management.

For 2017, the Audit Committee has provided recommendations on several significant issues that require follow-ups, which include:

1. Requiring the Internal Audit Unit to perform further monitoring on the action plan and its implementation for the matters discussed in the Audit Result Report (LHA).
2. To measure the Company's financial performance, formulating and submitting financial assessment indicators to the Board of Commissioners Committees.
3. Preparing strategic action on primary energy/gas supply to ensure that all generating units at each location operates as planned.
4. Performing analysis, evaluation, and preparing further mitigation to IT Master Plan 2017-2021 according to Company business development and rollover Company Long-Term Plan.
5. Preparing time schedule for GCG work program 2017 for measured monitoring.
6. In planning GPP Kamojang business continuity, ensuring that steam primary energy supply remains available until the power plants' useful life.
7. The management needs to take note that uncompleted follow-ups and management letters of the Internal Audit Unit must be settled.

Audit Committee Meeting

The Audit Committee holds meetings to discuss various aspects on the duties and responsibilities of the Audit Committee to support the supervisory and consultancy function of the Board of Commissioners and provide recommendation for the analysis conducted by the Audit Committee. According to the Audit Committee Charter, these meetings are hold periodically, comprising coordination meeting with Internal Audit

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

yang dilaksanakan minimal sebulan sekali serta pertemuan dengan auditor eksternal minimal sebulan sekali pada saat ada jadwal pemeriksaan audit. Dalam pelaksanaan rapat, Komite Audit dapat mengundang Manajemen melalui Satuan Audit Internal untuk memberikan informasi yang diperlukan.

Selama tahun 2017, Komite Audit telah menyelenggarakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali. Keputusan yang diambil dalam rapat Komite Audit telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Komite Audit yang di tandangani oleh ketua rapat dan didistribusikan kepada semua anggota Komite Audit yang menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat (*disenting opinion*) yang terjadi dalam rapat akan dicantumkan dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat. Berikut frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Komite Audit dalam rapat Komite tahun 2017:

Unit at least once in a month and meeting with external auditor at least once in a month during ongoing audit schedule. In the meeting, the Audit Committee may invite the Management via the Internal Audit unit to provide required information.

In 2017, the Audit Committee has held nine (9) meetings. The resolutions made in the Audit Committee meetings were properly recorded and documented in the Minutes of Audit Committee meeting signed by the Meeting Chairman and distributed to all attending and non-attending Audit Committee members. Dissenting opinions in the meetings are recorded in the minutes with the reason for the dissents. The followings are the frequency and attendance of the Audit Committee in their meetings in 2017:

Tabel Frekuensi Kehadiran Rapat Komite Audit Tahun 2017
Table: Frequency and Attendance of Audit Committee Meeting in 2017

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Attendance	%
Bagus Setiawan	9	0	0
Abdi Mustakim	9	5	56
Agus Hernawan	9	0	0
Munir Ahmad	9	2	22
Sudirmanto*	8	8	100
Dewa Gede Ngurah Ambara**	7	3	43
Jefri Rosiadi***	4	1	25
Binsar Siregar****	1	1	100
S. Obrien Krisma Wanto****	1	1	100
Joko Tri Susilo****	1	1	100

Keterangan:
*) Berhenti menjabat tanggal 25 Oktober 2017;
**) Mengundurkan diri tanggal 17 Juli 2017;
***) Mengundurkan diri tanggal 16 Februari 2017;
****) Mulai mejabat pada tanggal 25 Oktober 2017

Remarks:
*) Left the position on October 25, 2017;
**) Resigned on July 17, 2017;
***) Resigned on February 16, 2017;
****) Assuming the position on October 25, 2017

Penilaian Kinerja Komite Audit Tahun 2017

Berdasarkan Piagam Komite, kinerja Komite Audit dievaluasi oleh Dewan Komisaris setiap akhir tahun berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Komite Audit. Penilaian kinerja Komite Audit tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan Komite Audit. Hasil penilaian tersebut menjadi bahan

Performance Assessment of Audit Committee in 2017

According to the Committee Charter, the performance of the Audit Committee is evaluated by the Board of Commissioners at every end of year based on the actual and completed work programs as contained in the Audit Committee Work Plan and Budget. The assessment of Audit Committee performance is reported to the Board of Commissioners in the Audit Committee report. The

pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite Audit untuk periode jabatan berikutnya. Berikut hasil penilaian dan penetapan koefisien kinerja triwulanan bagi anggota Komite Audit Indonesia Power tahun 2017:

assessment result serves as the consideration for the Board of Commissioners to re-appoint and/or dismiss the Audit Committee members for the subsequent term of office. The following table presents the result of assessment and performance coefficient on quarterly basis for the Audit Committee members in 2017:

Tabel Penilaian Kinerja Komite Audit TW IV Tahun 2017
Table: Audit Committee Performance Assessment for Q4 2017

Parameter Parameter		**Penilaian** I Assessment		
		Binsar Siregar	**S. Obrien Krisma Wanto**	**Joko Tri Susilo**
Kontribusi terhadap pencapaian target Tim	Contribution to team target achievement	3	4	4
Jumlah Kajian, Analisis, Rekomendasi	Number of Reviews, Analyses, and Recommendations	3	4	4
Tingkat keaktifan dalam kegiatan Tim	Engagement in Team	4	3	4
Kerjasama dalam Tim	Collaboration in Team	4	3	3
Mutu dan Kualitas Konsep	Quality of Concept	3	4	3
Jumlah Nilai Kinerja	**Total Performance Score**	**17**	**18**	**18**
Koefisien	**Coefficient**	**1,0**	**1,2**	**1,2**

Keterangan:
1 = Tidak Sesuai Harapan; 2 = Kurang Sesuai Harapan; 3 = Sesuai Harapan; 4 = Melampaui Harapan

Remarks:
1 = Did not meet expectation; 2 = Almost meet expectation; 3 = Meet expectation; 4 = Exceed Expectation

Jumlah Nilai Total Score	**Kinerja Koefisien** Coefficient Performance
5-7	0,4
8-11	0,6
12-13	0,8
14-17	1,0
18-20	1,2

KOMITE MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Komite Manajemen Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam bidang pengawasan penerapan manajemen risiko yang efektif serta melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi. Komite Manajemen Risiko secara aktif memberikan masukan penyempurnaan terkait dengan pengawasan dan pengendalian risiko serta pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi telah berjalan efektif.

The Risk Management Committee is responsible for assisting the Board of Commissioners in monitoring the implementation of effective risk management and conducting the functions of nomination and remuneration. The Committee actively gives input on improvements related to supervision and risk control, as well as nomination and remuneration function which has been carried out effectively.

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Manajemen Risiko

Pengangkatan dan pemberhentian para anggota Komite Manajemen Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Komisaris Indonesia Power. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Manajemen Risiko terakhir yang dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 005.SK/DEKOM-IP/2017 tanggal 25 Oktober 2017. Pemberhentian Komite Manajemen Risiko dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Appointment and Dismissal of Risk Management Committee

The Board of Commissioners appoints and dismisses the Committee Members based on the Decree issued by the Company's Board of Commissioners. The last Committee appointment and dismissal was carried out based on Board of Commissioners' Decree No. 005.SK/DEKOM-IP/2017 dated October 25, 2017. The dismissal of a member of the Risk Management Committee shall be conducted if the incumbent finishes their term of office, and if, based on a Decree of the Board of Commissioners, the incumbent fails to meet the performance standards set and/or is not competent in performing his/her duties.

Susunan dan Komposisi Anggota Komite Manajemen Risiko

Pada tahun 2017, susunan Komite Manajemen Risiko Indonesia Power mengalami perubahan komposisi anggota. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003.SK/DEKOM-IP/2017 tanggal 17 Maret 2017, telah dilakukan perpanjangan masa kerja Komite Manajemen Risiko. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 005.SK/DEKOM-IP/2017 tanggal 25 Oktober 2017, komposisi anggota Komite Manajemen Risiko per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Composition of Risk Management Committee

The composition of Indonesia Power Risk Management Committee experienced several changes in 2017. Pursuant to Board of Commissioner's Decree No. 003. SK/DEKOM-IP/2017 dated March 17, 2017, the Risk Management Committee's service year was extended. Further, based on Board of Commissioner's Decree No. 005.SK/DEKOM-IP/2017 dated October 25, 2017, the Committee membership per December 31, 2017 is as follows:

Tabel Susunan dan Komposisi Komite Manajemen Risiko Tahun 2017
Table: Risk Management Committee Membership for 2017

Komposisi Januari-Oktober 2017 The Composition of January-October 2017	Komposisi Per 31 Desember 2017 Composition as of December 31, 2017	Jabatan Position	
Tri Setyo Nugroho	Tri Setyo Nugroho	Ketua merangkap Anggota	Chairman and Member
Ahmad Yani	Ahmad Yani	Wakil Ketua I merangkap Anggota	Vice Chairman I & Member
Munir Ahmad	Munir Ahmad	Wakil Ketua II merangkap Anggota	Vice Chairman II & Member
Agustinus Lilik Ismanto	Sudirmanto	Sekretaris merangkap Anggota	Secretary & Member
Supriyanto	Arif Wahyu Adi	Anggota Komite	Committee Member
Alfath Cordea Imalutha	Giovany	Anggota Komite	Committee Member

Profil Anggota Komite Manajemen Risiko

Risk Management Committee Member Profile

Nama Name	Profil Singkat Brief Profile	
 **Tri Setyo Nugroho** Ketua Komite Manajemen Risiko Head of the Management Risk	Profil Ketua Komite Manajemen Risiko terkait jabatan, periode jabatan, riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) telah diuraikan pada bab Profil Perusahaan bagian Identitas dan Riwayat Singkat Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.	Profile of Chairman of the Risk Management Committee, related to the position, term of service, education background (field of study and institution) and work experience (position, institution and served period) has been described in the Board of Commissioners' profile in this Annual Report.
 **Ahmad Yani** Wakil Ketua I | Vice Chairman I	Profil Wakil Komite Manajemen Risiko I terkait jabatan, periode jabatan, riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) telah diuraikan pada bab Profil Perusahaan bagian Identitas dan Riwayat Singkat Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.	Profile of Vice Chairman I of the Risk Management Committee, related to the position, term of service, education background (field of study and institution) and work experience (position, institution and served period) has been described in the Board of Commissioners' profile in this Annual Report.
 **Munir Ahmad** Wakil Ketua II | Vice Chairman II	Profil Wakil Komite Manajemen Risiko II terkait jabatan, periode jabatan, riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) telah diuraikan pada bab Profil Perusahaan bagian Identitas dan Riwayat Singkat Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.	Profile of Vice Chairman II of the Risk Management Committee, related to the position, term of service, education background (field of study and institution) and work experience (position, institution and served period) has been described in the Board of Commissioners' profile in this Annual Report.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Nama Name	Profil Singkat Brief Profile	
 **Sudirmanto** Sekretaris merangkap Anggota Secretary & Member	Lahir di Jakarta tanggal 9 Oktober 1958. Berdomisili di Tangerang. Meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Sekolah Tinggi Teknik Mesin (STTN) tahun 1986 dan Master Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM School of Management tahun 1999. Menjabat sebagai Sekretaris Komite Manajemen Risiko pada tahun 2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 005.SK/DEKOM-IP/2016 tanggal 25 Oktober 2017. Beberapa jabatan lain yang pernah dipegangnya adalah Sekretaris Komite Audit PT Indonesia Power (2016-2017), Kepala Satuan Audit PT Indonesia Power (2010-2014), General Manager UBP Suralaya (2008-2010), Vice President Pengusahaan Pembangkit Kelompok II (2006-2008), General Manager UBP Semarang (2004-2006). Pelatihan yang pernah diikuti antara lain: Bisnis dan Kontrak Batubara Indonesia Power; *Risk Assesment* dan *Risk Assesment International Control Review*; Standar Profesi Audit Internal & *Quality Assurance*; serta *Risk Based Audit*.	Born in Jakarta, October 9, 1958 he was now lives in Tangerang. He achieved his Bachelor of Engineering from the National Engineering Institute (STTN) in 1986 and Master's degree in Management of PPM School of Management in 1999. Based on Board of Commissioners' Decree No. 005.SK/DEKOM-IP/2016 dated October 25, 2017, he was appointed as Secretary of the Risk Management Committee. Ha previously served as Secretary of PT Indonesia Audit Committee (2016-2017), Head of PT Indonesia Internal Audit (2010-2014), General Manager of Suralaya GU (2008-2010), Vice President of Power Plant Operations Group II (2006-2008), General Manager of Semarang GU (2004-2006). Several training he took include: Coal Business and Contract of PT Indonesia Power, Risk Assessment and Risk Assessment International Control Review, Internal Audit Professional Standards & Quality Assurance and Risk Based Unit.
 **Arif Wahyu Adi** Anggota Komite Committee Member	Lahir di Pati, 5 Juli 1965. Berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung tahun 1990, Master of Science & Engineering (MScE), Bidang Materials Science & Engineering dari Universitas Indonesia tahun 2000 dan Magister Bisnis & Administrasi Teknologi (MBA) dari Institut Teknologi Bandung tahun 2001. Selain sebagai Anggota Komite Manajamen Risiko, juga menjabat sebagai Senior Manager of Employee Performance Management (2016-sekarang). Beberapa jabatan lain yang pernah dipegangnya adalah Senior Manager of Quality Mgt & Corporate Performance (2013-2016), Staf Ahli Direktur Pengembangan & Niaga (2012-2013).	Arif Wahyu Adi was born in Pati, July 5, 1965 and now lives in Jakarta. He completed his Engineering Degree from ITB in 1990, Master's degree in Materials Science & Engineering from Universitas Indonesia in 2000 and second Master's degree in Business and Technology Administration from ITB in 2001. In addition to serving as a Member of the Risk Management Committee, he also holds the office of Senior Manager of Employee Performance Management (2016-present), Senior Manager of Quality Management & Corporate Performance (2013-2016) and Expert Staff to the Development & Commercial Director (2012-2013).
 **Giovany** Anggota Komite Committee Member	Lahir di Cirebon, 14 Desember 1982. Berdomisili di Bandung. Meraih gelar Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Nasional tahun 2005. Selain sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko, juga menjabat sebagai Deputi Manajer Kebijakan Perencanaan HCMS Pada Bidang Human Capital Management System Divisi Human Capital Management System Direktorat Human Capital Management PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2017-sekarang). Beberapa jabatan lain yang pernah dipegangnya adalah Analyst Kebijakan HCMS (Plt Deputi Manajer Perencanaan Kebijakan HCMS) PT PLN (Persero) (2016-2017), Analyst Evaluasi HCMS Pada Sub Bidang Evaluasi HCMS PT PLN (Persero) (2015-2016). Pelatihan yang pernah diikuti antara lain: Development of Identified Personnel on The Expert/Technical Track (2015); Workshop LNA (Learning Need Analysis) Pembelajaran Kepemimpinan (2015); Workshop Teknik Penyusunan PP/PKB yang Efektif Bagi Bumn dan Anak Perusahaan (2017).	He was born in Cirebon, December 14, 1982 and now lives in Bandung. He achieved his Industrial Engineering Degree from Institut Teknologi Nasional in 2005. Besides a Member of the Risk Management Committee, he serves as Deputy Manager of Human Capital Management System (HCMS) Planning Policy in Human Capital Management System Division of the Directorate of Human Capital Management at the Head Office of PT PLN (Persero) from 2017 to present. Beforehand, he served as HCMS Policy Analyst (HCMS Policy Planning Caretaker Deputy Manager) in PT PLN (Persero) (2016-2017), HCMS Evaluation Analyst of PT PLN (Persero) (2015-2016). Several training courses he attended were Development of Identified Personnel on the Expert/Technical Track (2015), Learning Need Analysis Workshop, Leadership Development (2015), Workshop on the Effective Methods for Preparing Company Regulation/Collective Labor Agreement with State-Owned Enterprises and Their Subsidiaries (2017).

Independensi Anggota Komite Manajemen Risiko

Sesuai dengan peraturan pelaksanaan GCG, seluruh anggota Komite Manajemen Risiko bersifat independen dan tidak rangkap jabatan di dalam dan di luar Perusahaan yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak independen. Independensi anggota Komite Manajemen Risiko tercermin dalam hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan, serta kepemilikan saham di Indonesia Power dan perusahaan lainnya sebagaimana berikut:

Independence of Risk Management Committee Members

In line with the regulation on GCG implementation, all members of the Risk Management Committee are independent and do not hold concurrent position inside and outside of the Company that may influence their ability to act independently. Independence of the Committee members Risk Management is reflected on the familial relationship, financial relationship, management relationship, share ownership in Indonesia Power, and other companies, as follows:

Tabel Independensi Komite Manajemen Risiko
Table: Risk Management Committee Independence

Aspek Independensi Aspect of Independence		Tri Setyo Nugroho	Ahmad Yani	Munir Ahmad	Sudirmanto	Arif Wahyu Adi	Giovany
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	Does not have financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors.	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki Hubungan kepengurusan di Indonesia Power, anak Perusahaan maupun Perusahaan afiliasi	Does not have management relationship in Indonesia Power, subsidiaries or affiliated companies.	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki Hubungan kepemilikan saham di Indonesia Power	Does not have share ownership relation in Indonesia Power	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki Hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau sesama anggota Komite Manajemen Risiko	Does not have any familial relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of the Risk Management Committee	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintah daerah	Does not serve on the board of political parties, local government officials	√	√	√	√	√	√

KOMITE MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Pedoman Kerja Komite Manajemen Risiko (Piagam Komite Manajemen Risiko)

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Manajemen Risiko mengacu pada Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Nomor 241/010/IP/2016 dan Nomor 016.SK/DEKOM-IP/2016 Tentang Piagam Komite Manajemen Risiko PT Indonesia Power. Piagam ini dijadikan pedoman kerja bagi Komite Manajemen Risiko untuk mendukung pelaksanaan efektifitas pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan penerapan GCG. Piagam tersebut mengatur hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota Komite Manajemen Risiko antara lain fungsi dan tugas pokok Komite Manajemen Risiko, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang, Kode etik, rapat Komite Manajemen Risiko, Penilaian kinerja dan honorarium dan pembebanan biaya Komite Manajemen Risiko.

Work Guidelines of Risk Management Committee (Risk Management Committee Charter)

In carrying out its duties and responsibilities, the Risk Management Committee refers to Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners No. 241/010/IP/2016 and No. 016.SK/DEKOM-IP/2016 on Risk Management Committee Charter of PT Indonesia Power. The charter becomes work guidelines for Risk Management Committee to support the effectiveness of the Board of Commissioners' functions, duties and responsibilities in implementing GCG. The charter regulates matters related to the duties and responsibilities of the Committee Member, such as its main duties and functions as well as obligations, responsibilities and authorities, Code of Conduct, Committee's Meeting, Performance Assessment, honorarium and expenditures.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dengan melakukan penelaahan terhadap Kajian Risiko atas kelayakan kegiatan yang direncanakan oleh Manajemen Perseroan dan termasuk melakukan penelaahan terhadap kebijakan di bidang Nominasi & Remunerasi. Adapun tugas pokok Komite Manajemen Risiko yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris berupa penelaahan terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko serta Kajian Risiko yang dilakukan oleh Manajemen Perseroan.
2. Memantau dan memastikan bahwa semua kegiatan Perseroan yang ada di dalam RJP dan RKAP telah memperhatikan prinsip-prinsip Manajemen Risiko.
3. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai tindak lanjut hasil evaluasi, terutama terhadap kebijakan yang mempunyai dampak keuangan yang signifikan.
4. Memberikan rekomendasi kepada Manajemen Perseroan melalui Dewan Komisaris untuk merancang dan melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko, termasuk berbagai hal yang dapat meningkatkan kelancaran dan efektivitas proses kajian risiko.

Duties and Responsibilities of Risk Management Committee

The Risk Management Committee is responsible for assisting the Board of Commissioners in carrying out supervisory duties, by reviewing Risk Assessment on the feasibility of activities planned by the Company's Management, including reviewing Nomination and Remuneration policy. Main duties of Risk Management Committee are as follows:

1. Providing input to the Board of Commissioners in the form of reviews on risk management and risk assessment conducted by the Company's Management.
2. Monitoring and ensuring that every Company's activity in the Long Term Corporate Plan (RJP) and Work Plan & Budget (RKAP) keeps the Risk Management principles in mind.
3. Providing input to the Board of Commissioners on the follow up of evaluation result, especially on the policy with significant financial impact.
4. Providing recommendation to the Company's Management through the Board of Commissioners to design and implement Risk Management policy, including on matters that may improve continuity and effectivity of risk assessment process.

5. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai perubahan dan penyempurnaan Piagam Komite Manajemen Risiko.
6. Memberi rekomendasi tentang sistem penggajian dan pemberian tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
7. Memberikan rekomendasi kepada Direksi/ Manajemen Eksekutif untuk merancang dan melaksanakan kebijakan Nominasi dan Remunerasi yang efektif, termasuk berbagai hal yang dapat meningkatkan kelancaran dan efektivitas Perseroan yang terkait dengan sistem Nominasi dan Remunerasi.
8. Membuat laporan kepada Dewan Komisaris.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko antara lain melaporkan segera hasil evaluasi yang telah dilakukan kepada Dewan Komisaris, yaitu meliputi: (1) Laporan Berkala, berisi pokok-pokok hasil kerjanya berdasarkan penugasan Dewan Komisaris; (2) Laporan Khusus, berisi Kajian Risiko yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan usaha Perusahaan; (3) Rekomendasi sesuai hasil telaahan dan evaluasi terhadap Kajian Risiko yang telah dilakukan; serta (4) Rekomendasi sesuai hasil penelaahan terhadap kebijakan dibidang Nominasi & Remunerasi.

Program Kerja Komite Manajemen Risiko Tahun 2017

Program Kerja Komite Manajemen Risiko tahun 2017 diantaranya melakukan penelahan terhadap Kajian Risiko atas kelayakan kegiatan yang direncanakan oleh Manajemen Perusahaan, serta mengevaluasi dan melakukan pengawasan fungsi Nominasi dan Remunerasi di Perusahaan, yang meliputi:

1. Rapat rutin internal Komite Manajemen Risiko sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan.
2. Rapat koordinasi Komite Manajemen Risiko dengan Bidang Manajemen Risiko Indonesia Power, dilaksanakan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan.

5. Providing input to the Board of Commissioners on amendment and refinement of the Risk Management Committee Charter.
6. Suggesting recommendation on salary and allowances system for Members of the Board of Commissioners and Directors.
7. Giving recommendation to Directors/Executive Management to design and perform effective Nomination and Remuneration policy, including matters that may improve the Company's continuity and effectivity related to the Nomination and Remuneration system.
8. Compiling report to the Board of Commissioners.
9. Carrying out other duties given by the Board of Commissioners as long as they remain within the scope of the Board's duties and responsibilities.

The responsibilities of the Risk Management Committee, among others, are to report evaluation result performed to the Board of Commissioners which covers: 1) Regular Report, contains main result based on the assignment of Board of Commissioners, 2) Special Report, contains Risk Assessment that is predicted to be able to disrupt Company's business activity, 3) Recommendation as per review and evaluation on Risk Assessment performed, and 4) Recommendation as per assessment result on the policy in the field of Nomination and Remuneration.

Risk Management Committee Work Program in 2017

Risk Management Committee Work Program for 2017 among others included reviewing the Risk Assessment on the feasibility of activities planned by the Management and evaluating as well as supervising Nomination and Remuneration function at the Company, which covers:

1. Routine internal meeting of the Risk Management Committee at least once a month.
2. Coordination meeting between the Risk Management Committee and Risk Management Division of PT Indonesia Power at least once a month.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT COMMITTEE

3. Rapat koordinasi Komite Manajemen Risiko dengan Manajemen SDM Indonesia Power, dilaksanakan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan.
4. Rapat berkala dengan Dewan Komisaris sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
5. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas penelaahan pelaksanaan Manajemen risiko serta Kajian Risiko
6. Memantau dan meastikan semua kegiatan Perseroan yang ada dalam RJP dan RKAP telah memperhatikan prinsip Manajemen Risiko
7. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai tindak lanjut hasil evaluasi
8. Memberikan rekomendasi kepada Manajemen melalui Dewan Komisaris untuk merancang dan melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko
9. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai perubahan dan penyempurnaan Piagam Komite Manajemen Risiko
10. Memberikan rekomendasi tentang sistem pengajian dan pemberian tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
11. Memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk merancang dan melaksanakan kebijakan Nominasi dan Remunerasi yang efektif

3. Monthly coordination meeting of the Risk Management Committee with PT Indonesia Power Human Resources Management held at least once a month.
4. Periodic meeting with the Board of Commissioners at least once in two months.
5. Providing the Board of Commissioners with input on the implementation of Risk Management and Risk Assessment.
6. Monitoring and ensuring that every Company's activity in RJP and RKAP keeps the Risk Management principles in mind.
7. Providing input to the Board of Commissioners on the follow up of evaluation result.
8. Providing recommendation to the Management through the Board of Commissioners to design and implement Risk Management policy.
9. Providing input to the Board of Commissioners on amendment and refinement of the Risk Management Committee Charter.
10. Suggesting recommendation on salary and allowances system for Members of the Board of Commissioners and Directors.
11. Giving recommendation to the Board of Directors to design and perform effective Nomination and Remuneration policy.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Manajemen Risiko Tahun 2017

Selama tahun 2017, Komite Manajemen Risiko telah secara aktif memberikan masukan penyempurnaan terkait dengan pengawasan dan pengendalian risiko antara lain meliputi:

1. Membuat kajian risiko secara komprehensif termasuk *financial projection* terkait pemanfaatan dana dari sumber pendanaan EBA dan KFW sehingga penggunaan dana tepat sasaran.
2. Memastikan bahwa pemahaman akselerasi terhadap Grand Desain diklat akselerasi kompetensi operator berjalan optimal selain proses seleksi materi, proses pembimbingan serta langkah mitigasinya
3. Seluruh proses pemilihan Mitra Strategis, pembentukan SPC dan penyetoran modal harus mengikuti prosedur korporasi dan peraturan yang berlaku serta dilaksanakan dengan teliti dan sesuai dengan kaidah GCG.
4. Melakukan evaluasi terhadap *assessment* pencapaian kinerja GCG di Unit Perusahaan sehingga hasilnya dapat mencerminkan pelaksanaan GCG di Unit bersangkutan

Report on Risk Management Committee Activity in 2017

Throughout 2017, the Risk Management Committee actively provided input for improvements on supervision and risk control, as well as nomination and remuneration function, which cover:

1. Drafting comprehensive Risk Assessment report including financial projection related to budget allocation of EBA & KFW funds to ensure it effectiveness.
2. Ensuring accelerated understanding of the Grand Design for accelerated competency training is smooth, including the relevant processes from selection of materials, facilitation to mitigation measures.
3. Making sure all selection processes for Strategic Partners, SPC organization and capital deposit follow corporate procedures and the applicable regulations as well as ensuring they are implemented in keeping with the GCG principles.
4. Evaluating GCG performance assessment in the Units so its results represent GCG implementation in the Units in question.

5. Memperhatikan pentingnya hasil *assessment* implementasi manajemen risiko di Perusahaan sampai ke semua unit guna menjamin bahwa seluruh risiko yang akan dihadapi telah dikelola dengan baik.
6. Mengkomunikasikan dan menyelaraskan pengembangan aplikasi ProRBA oleh Bidang Manajemen Risiko dengan Satuan Internal Audit.

5. Highlighting the importance of the results of risk management assessment in the Company's Units as a way to guarantee that all risks are well-managed.

6. Communicating and aligning development of ProRBA application by the Risk Management Division with the Internal Audit.

Rapat Komite Manajemen Risiko

Rapat koordinasi Komite Manajemen Risiko dengan Bidang Manajemen Risiko dilaksanakan minimal sebulan sekali. Dalam pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko dapat mengundang Manajemen Perusahaan melalui Bidang Manajemen Risiko untuk memberikan informasi yang diperlukan. Keputusan Rapat Komite Manajemen Risiko diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara setuju terbanyak. Apabila suara setuju dan tidak setuju berimbang maka usulan dianggap ditolak.

Selama tahun 2017, Komite Manajemen Risiko telah menyelenggarakan rapat internal sebanyak 7 (tujuh) kali. Berikut frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Komite Manajemen Risiko dalam rapat Komite tahun 2017:

Risk Management Committee Meeting

Coordination meeting of the Risk Management Committee with Risk Management Division is held on a monthly basis at least once. In the meeting, the Committee may invite the Management through Risk Management Division to provide relevant information. The decision is made through deliberation to reach consensus. In the event that it could not be achieved, the decision shall be made based on the majority vote. If there is an equal number of votes on those who agree and those who don't, the proposal is considered rejected.

During the course of 2017, the Risk Management Committee held 7 internal meetings. The following is the meeting frequency and attendance in the Committee's meeting in 2017:

Tabel Frekuensi Rapat Komite Manajemen Risiko Tahun 2017
Table: Frequency and Attendance of Risk Management Committee Meeting in 2017

Nama Name	Jumlah Rapat Meeting	Jumlah Kehadiran Attendance	%
Tri Setyo Nugroho	7	4	57
Ahmad Yani	7	0	0
Munir Ahmad	7	0	0
Agustinus Lilik Ismanto *	6	5	83
Supriyanto *	6	5	83
Alfath Cordea Imalutha *	6	5	83
Sudirmanto **	1	1	100
Arif Wahyu Adi **	1	0	0
Giovany **	1	1	100

Keterangan:
*) Menjabat sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
**) Mulai menjabat pada tanggal 25 Oktober 2017

Remark:
*) Served until October 25, 2017;
**) Started to serve on October 25, 2017

KOMITE MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Penilaian Kinerja Komite Manajemen Risiko Tahun 2017

Komite Manajemen Risiko dievaluasi oleh Dewan Komisaris setiap akhir tahun, yaitu berdasarkan realisasi atas penyelesaian program kerja dan anggaran komite manajemen risiko dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam Laporan Komite Manajemen Risiko termasuk pencantuman risalah rapat yang memuat saran, rekomendasi dan masukan terkait dengan pelaksanaan tugas komite. Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite Manajemen Risiko untuk periode jabatan berikutnya. Berikut hasil penilaian dan penetapan koefisien kinerja triwulanan bagi anggota Komite Manajemen Risiko Indonesia Power tahun 2017:

Performance Assessment of Risk Management Committee in 2017

The Risk Management Committee is evaluated by the Board of Commissioners at the end of each year, based on realization and completion of the RKA, and it is reported to the Board of Commissioners in Risk Management Committee Report, including the Minutes of Meeting that contains suggestions, recommendations and input related to the Committee's duties. The result of assessment becomes consideration for the Board of Commissioners to reappoint and/or dismiss Risk Management Committee Members for the next term of office. The following is the assessment result and coefficient determination for quarterly performance of Members of Indonesia Power Risk Management Committee in 2017:

Tabel Penilaian Kinerja Komite Manajemen Risiko TW IV Tahun 2017
Table: Risk Management Committee Performance Assessment for Q4 2017

Parameter Parameter		Penilaian | Assessment		
		Sudirmanto	**Arif Wahyu Adi**	**Giovany**
Kontribusi terhadap pencapaian target Tim	Contribution to Team target achievement	4	4	4
Jumlah Kajian, Analisis, Rekomendasi	Review, Analysis, Recommendation	4	4	4
Tingkat keaktifan dalam kegiatan Tim	Activity Level in Team	4	4	4
Kerjasama dalam Tim	Cooperation in Team	4	4	4
Mutu dan Kualitas Konsep	Concept Quality	4	4	4
Jumlah Nilai Kinerja	**Total Performance Rate**	20	20	20
Koefisien	**Coefficient**	**1,2**	**1,2**	**1,2**

Keterangan:
1 = Tidak Sesuai Harapan; 2 = Kurang Sesuai Harapan; 3 = Sesuai Harapan;
4 = Melampaui Harapan

Remark:
1 = Did not meet expectation; 2= Almost meet expectation; 3= Meet expectation;
4 = Exceed Expectation

Pengembangan Kompetensi Komite Manajemen Risiko

Seluruh anggota Komite Manajemen Risiko telah diikutsertakan dalam berbagai program pendidikan, pelatihan, maupun *workshop* sesuai dengan bidang keahliannya guna meningkatkan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Berikut tabel pengembangan kompetensi Komite Manajemen Risiko Indonesia Power tahun 2017:

Risk Management Committee Competency Development

All members of the Risk Management Committee participated in numerous education programs, training and workshops within their area of expertise, in order to improve competencies to support the implementation of its duties. The following is a table of the Risk Management Committee Competency Development in 2016:

Tabel Pelatihan Komite Manajemen Risiko Tahun 2017
Table: Risk Management Committee Training in 2017

Nama Peserta Participant	Nama Diklat Training	Nama Lembaga Institution	Tanggal Date	Lokasi Location
Arif Wahyu Adi	Directorship Program PT Indonesia Power Tahun 2017	Komite Nasional Kebijakan Governance National Committee on Governance Policy	28 November 2017 November 28, 2017	Bogor
Giovany	Directorship Program PT Indonesia Power Tahun 2017	Komite Nasional Kebijakan Governance National Committee on Governance Policy	28 November 2017 November 28, 2017	Bogor

FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI
NOMINATION AND REMUNERATION FUNCTION

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, bahwa jumlah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) Komite, yaitu Komite Audit dan Komite lainnya jika diperlukan. Komite Indonesia Power saat ini berjumlah dua Komite yaitu Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko. Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 005.SK/DEKOM-IP/2017 tanggal 25 Oktober 2017, pelaksana Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Komite Manajemen Risiko. Fungsi ini dijalankan untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam memastikan bahwa sistem pengendalian internal Perusahaan telah berfungsi secara efisien dan efektif.

In line with Regulation of the State Minister of State-Owned Enterprises No. PER-12/MBU/2012 on Supporting Organs of Board of Commissioners/ Supervisory Board of the State-Owned Enterprises, the number of committees established by Board of Commissioners comprised of 2 (two) Committees, i.e. Audit Committee and other Committees, if required. Currently, there are two committees in Indonesia Power, i.e. Audit Committee and Risk Management Committee, and the function of nomination and remuneration is performed by Risk Management Committee. The function is carried out in order to assist the execution of duties and functions of the Board of Commissioners to ensure that the Company's internal control system functions efficiently and effectively.

Independensi Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Komite Manajemen Risiko dalam menjalankan Fungsi Nominasi dan Remunerasi bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Secara keseluruhan, Komite Manajemen Risiko juga menjalankan fungsi sebagai Penilai independen dalam melakukan penelaahan terhadap kegiatan Manajemen Perusahaan melalui usulan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan telah dilengkapi dengan hasil kajian Manajemen Risiko untuk kegiatan Perusahaan yang memiliki potensi risiko yang dapat mempengaruhi Kinerja Perusahaan. Selain itu, Fungsi Nominasi dan Remunerasi Indonesia Power juga melakukan penelaahan terhadap kebijakan dibidang Nominasi dan Remunerasi serta kegiatan lain yang masuk kedalam lingkup tugas pengawasan Dewan Komisaris terhadap kinerja Manajemen Perusahaan.

Independence of Nomination and Remuneration Function

The Risk Management Committee is independent in performing Nomination and Remuneration function, both in the performance of its duties and in reporting which directly goes to the Board of Commissioners. Overall, the Risk Management Committee is performing the function as Independent Assessor in reviewing the Company's Management activities through the proposal submitted to the Board of Commissioners, and completed with the Risk Management study for activities that have potential risks that may influence the Company's performance. In addition, the Nomination and Remuneration Function also reviews policies for Nomination and Remuneration, as well as other activities within the scope of Board of Commissioners' supervision over the Company's Management performance.

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Tugas dan tanggung jawab Fungsi Nominasi dan Remunerasi Indonesia Power diantaranya yaitu: (1) Memberikan pertimbangan kepada Dewan Komisaris terkait dengan nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang saham untuk diputuskan; dan (2) Memberikan pertimbangan kepada Dewan Komisaris terkait dengan usulan remunerasi bagi anggota Direksi

Duties and Responsibilities of Nomination and Remuneration Function

Duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Function of Indonesia Power, among others: (1) Provide consideration to the Board of Commissioners related to nomination of members of the Board of Directors and Board of Commissioners, to be subsequently submitted to the shareholders who will make the decision; and (2) Provide consideration to the Board of Commissioners related to the proposed remuneration

dan Dewan Komisaris, untuk selanjutnya diputuskan oleh Pemegang Saham.

Program Kerja Fungsi Nominasi dan Remunerasi Tahun 2017

Program kerja Fungsi Nominasi dan Remunerasi tahun 2017, yaitu:

1. Memberikan rekomendasi tentang sistem penggajian dan pemberian tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
2. Memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk merancang dan melaksanakan kebijakan Nominasi dan Remunerasi yang efektif.

Rapat Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Di lingkungan Perusahaan, Fungsi Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Komite Manajemen Risiko. Sejalan dengan ketentuan yang tercantum pada *Board Manual* maupun GCG *Code*, keberadaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi tersebut untuk memberikan pertimbangan kepada Dewan Komisaris terkait dengan nominasi calon Direksi serta pennetuan remunerasi bagi Direksi. Dengan demikian, rapat-rapat Fungsi Nominasi dan Remunerasi melekat pada kegiatan yang dijalankan oleh Komite Manajemen Risiko.

Kebijakan Suksesi Direksi

Indonesia Power memiliki mekanisme suksesi Direksi yang dijalankan secara transparan dan terstruktur. Langkah tersebut dilakukan demi menjamin keberlanjutan jalannya Perusahaan. Kebijakan suksesi Direksi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemegang saham, yaitu PT PLN (Persero) dengan mempertimbangkan usulan dan masukan dari Fungsi Nominasi dan Remunerasi, yang dijalankan oleh Komite Manajemen Risiko Perusahaan. Ketentuan mengenai kebijakan suksesi direksi juga mengacu pada Anggaran Dasar dan Board Manual Perusahaan. Penentuan KPI Direksi berasal dari kontrak manajemen yang diturunkan menjadi KPI masing-masing anggota Direksi. *Cascading* KPI atau penurunan KPI dilakukan melalui pendekatan *balance scorecard*. KPI Direksi kemudian diturunkan ke level eksekutif utama, eksekutif senior, dan seterusnya.

for Directors and the Board of Commissioners, to be subsequently decided by Shareholders.

Work Program of Nomination and Remuneration Function in 2017

Work program of the Nomination and Remuneration Function in 2017 included:

1. Provide recommendation on the salary and allowances system for members of the Board of Commissioners and Board of Directors.
2. Provide recommendation to Directors to design and conduct effective Nomination and Remuneration Policy.

Nomination and Remuneration Function Meeting

In the Company's environment, Nomination and Remuneration Function is performed by Risk Management Committee. Consistent with the provisions contained in the Board Manual and GCG Code, the Nomination and Remuneration Function is to provide consideration to the Board of Commissioners related to nomination of Board of Directors candidates and remuneration stipulation for Directors. Therefore, the Nomination and Remuneration Function Meetings are attached to the activities performed by Risk Management Committee.

Succession Policy of the Board of Directors

Indonesia Power has succession mechanism of the Board of Directors that is performed transparently and structurally. Such mechanism is taken to ensure the Company's sustainability. Succession policy of the Board of Directors is conducted in line with the regulations set by shareholders, i.e. PT PLN (Persero), taken into considerations the inputs from Nomination and Remuneration Function, which is performed by the Company's Risk Management Committee. The regulation regarding the succession policy refers to the Company's Articles of Association and Board Manual. KPI determination for Directors is derived from management contract into KPI for each member of Board of Directors. Cascading KPI is performed using balanced scorecard approach. KPI Directors is then cascaded to the main executive level, senior executives, and so on.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS
SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Guna memenuhi kepatuhan peraturan dan perundang-undangan serta dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Dewan Komisaris menunjuk Sdr. Didy Poeriadi sebagai Sekretaris Dewan Komisaris Indonesia Power yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 009.SK/DEKOM-IP/2016. Sekretaris Dewan Komisaris diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris yang dibantu oleh seorang staf pegawai Sekretariat Dewan Komisaris dari Indonesia Power dan seorang pegawai *outsourcing*. Sekretaris Dewan Komisaris memiliki peran membantu Dewan Komisaris dalam mendukung fungsi pengawasan dan pemberian arahan mengenai praktik tata kelola perusahaan yang baik.

In an effort to fulfill the compliance with regulations and put good corporate governance into effect, the Board of Commissioners appointed Didy Poeriadi as Secretary of the Board Commissioners, appointed as per Board of Commissioners' Decree No. 009.SK/DEKOM-IP/2016. The Board of Commissioners' Secretary is appointed and directly reports to the Board of Commissioners, assisted by an employee with Secretariat to the Board of Commissioners and an outsourcing employee. The role of Board of Commissioners' Secretary is to assist the Board of Commissioners in supporting supervision function and giving directions on good corporate governance practices.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris



Didy Poeriadi
Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of Board of Commissioners

Lahir di Kediri, 9 Februari 1954. Domisili di Tangerang. Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Sepuluh November tahun 1980. Diangkat menjadi Sekretaris Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 009.SK/DEKOM-IP/2016 tanggal 20 September 2016.

Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris PT Indonesia Power tahun 2011 - sekarang, beberapa jabatan lain yang pernah dipegangnya adalah Komisaris PT Cogindo DayaBersama tahun 2011, Komisaris PT Indonesia Power tahun 2010, Kepala Satuan Manajemen Risiko PT PLN (Persero) tahun 2009, Management Consulting Group PT PLN (Persero) tahun 2008.

Pendidikan dan Pelatihan yang pernah diikuti yaitu *Risk Management and Internal Control System*, UU Perseroan Terbatas & UU Penanaman Modal, *Operational Risk Excellence in Organizations*, Aspek prosedural dan aspek pidana korupsi Keppres No. 80 thn 2003, *Professional Risk Managers Tutorial* Modul I, II, III, IV, *Integrating ERM and Balance Scorecard, Building World Class Board*, dan *Project Training for Thermal Power Plant.*

Secretary of the Board of Commissioners Profile

Didy Poeriadi was born in Kediri, February 9, 1954, and he now lives in Tangerang. He completed his Electro Engineering degree from Institut Teknologi Sepuluh November in 1980. He serves as Secretary of the Board of Commissioners' based on Decree No. 009.SK/DEKOM-IP/2016 dated September 20, 2016.

Before holding his current office at PT Indonesia Power from 2011 to the present, he took on several positions including member of Board of Commissioners at PT Cogindo Daya Bersama in 2011, a Commissioner of PT Indonesia Power in 2010, Head of Risk Management Unit with PT PLN (Persero) in 2009 and Management Consulting Group of PT PLN (Persero) in 2008.

Several training courses that Didy attended are Risk Management and Internal Control System, Limited Liability Company and Investment Laws, Operational Risk Excellence in Organizations, Procedural and Criminal Aspects of Corruption based on Presidential Decree No. 80 of 2003, Professional Risk Managers Tutorial Module I-IV, Integrating ERM and Balance Scorecard, Building World Class Board and Project Training for Thermal Power Plant.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dewan Komisaris mengacu pada Pedoman Kerja yang tercantum dalam *Board Manual*. Tugas dan tanggung jawab utama Sekretaris Dewan Komisaris adalah membantu kelancaran pekerjaan dan memberikan dukungan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang mencakup:

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners' Secretary

In performing his jobs, the Secretary refers to Working Guidelines in the Board Manual. The Secretary's main duties and responsibilities involve assisting and supporting the Board of Commissioners to complete their duties and functions, which consists of:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris.
2. Menyelenggrakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya.
3. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan:
   a. Monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris.
   b. Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola Perusahaan.
   c. Dukungan administrasi serta monitoring berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.
4. Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris dan tenaga ahli Dewan Komisaris untuk keperluan Dewan Komisaris.

Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris telah melakukan berbagai kegiatan dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya sepanjang tahun 2017, antara lain:

1. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Dewan Komisaris.
2. Mengkoordinir penyediaan informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris, seperti laporan berkala dari Direksi (Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan, Laporan Hasil Pemeriksaan SPI) serta laporan/informasi lainnya mengenai Perusahaan.
3. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyiapan dan pengiriman undangan, penyampaian materi rapat serta pembuatan risalah rapat.
4. Mengadministrasikan risalah rapat dan dokumen Dewan Komisaris lainnya serta mengirimkan hasil-hasil keputusan rapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

1. Conducting administrative and secretarial activities within the Board of Commissioners.
2. Conducting meetings for the Board of Commissioners and meetings between the Board of Commissioners with Shareholders, Board of Directors or related parties.
3. Providing data/information required by the Board of Commissioners and committees within the Board of Commissioners related to:
   a. Monitoring of decision results follow-up, recommendation and direction of the Board of Commissioners.
   b. Administrative material regarding the report/ activities of the Board of Directors in managing the Company.
   c. Administrative support and monitoring related to matters that need approval or recommendation of the Board of Commissioners in relation to management activities of the Company.
4. Collecting technical data from committees within the Board of Commissioners and the Board of Commissioners experts for the interest of the Board of Commissioners.

Report on the Implementation of the Secretary's Duties

The Board of Commissioners' Secretary conducted various activities in supporting the implementation of the tasks of the Board of Commissioners and submitted report on the implementation of his duties in 2016 as follows:

1. Conducting secretarial activities within the Board of Commissioners.
2. Coordinating the provision of information required by the Board of Commissioners, such as regular report from the Board of Directors (Monthly Report, Quarterly Report, Annual Report, Internal Auditor Results Report) and other reports/information regarding the Company.
3. Conducting meetings of the Board of Commissioners, including but not limited to preparation and distribution of invitation, material presentation and drafting minutes of meetings.
4. Administrating minutes of meetings and other documents of the Board of Commissioners as well as sending meeting decision results to the interested parties.

SEKRETARIS PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARY

Sekretaris Perusahaan adalah suatu fungsi yang dibentuk untuk berinteraksi dengan pemegang saham, investor dan *stakeholders* lainnya. Sekretaris Perusahaan memiliki akses langsung ke Direksi dan bersinergi dengan fungsi-fungsi lain untuk mendapatkan informasi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya. Tugas Sekretaris Perusahaan adalah meliputi penerapan GCG, pelaksanaan rapat Direksi dan Komite Direksi, pelaksanaan RUPS dan RUPS LB, dan hubungan *stakeholders*.

Corporate Secretary is a function created to interact with the shareholders, investor and other stakeholders. Corporate Secretary has a direct access to the Board of Directors and establishes synergies with other corporate functions in providing necessary information for the performance of its duties. Corporate Secretary will be dealing with the GCG implementation, managing the Board of Directors and Board of Commissioners' meetings, General Meeting of Shareholders (RUPS) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPS LB) and stakeholders relations.

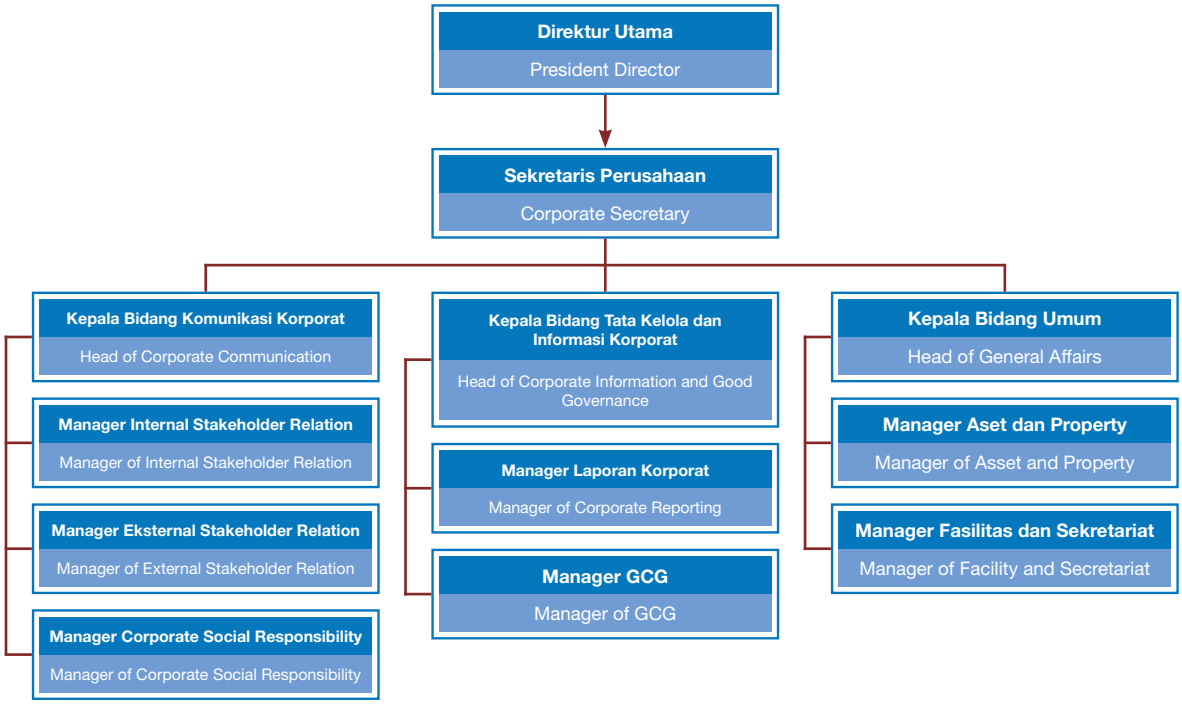
Struktur Organisasi Sekretariat Perusahaan

Struktur Organisasi Sekretariat Perusahaan ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor 203.K/010/IP/2017 tentang Bagan Susunan Jabatan, Tingkat Jabatan dan Formasi Jabatan pada Sekretariat Perusahaan Indonesia Power tanggal 12 Oktober 2017. Fungsi Sekretariat Perusahaan dipimpin oleh seorang kepala yang disebut Sekretaris Perusahaan. Dalam struktur organisasi Perusahaan, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Dalam menjalankan fungsi dan perannya, Sekretaris Perusahaan mencakup Bidang Komunikasi Korporat, Bidang Tata Kelola dan Informasi Korporat serta Bidang Umum. Sekretaris Perusahaan memiliki peranan penting dalam memfasilitasi komunikasi antara organ Perusahaan, hubungan antara Perusahaan dengan *stakeholders*, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Untuk mendukung peran tersebut, Sekretaris Perusahaan memiliki 5 (lima) fungsi utama, yaitu sebagai Pejabat Penghubung, Komunikator Perusahaan, Pelaksana GCG, Penatausahaan Dokumen Perusahaan, Pusat Informasi dan Publikasi Resmi Perusahaan.

Corporate Secretary Organizational Structure

The organizational structure of the Corporate Secretary is laid down in Board of Commissioners' Decree No. 203.K/010/IP/2017 on Organizational Structure, Rank and Formation of PT Indonesia Power Corporate Secretary dated October 12, 2017. As a function, the Corporate Secretary is headed by Corporate Secretary. In the organizational structure, Corporate Secretary is responsible to the President Director. In performing his/her roles and function, Corporate Secretary manages Corporate Communication, Good Governance, Corporate Information and General Affairs. Corporate Secretary has a pivotal role in bridging the communication among the Company's organs as well as between the Company and stakeholders, and also compliance with the applicable regulations. In order to support these roles, the Corporate Secretary has 5 (five) main functions, I.e. as the Liaison Officer, Company's Communicator, GCG Executor, Company Document Administrator, Information Center and Official Publication of the Company.

Struktur Organisasi Sekretariat Perusahaan
Corporate Secretary Organizational Structure



Profil Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Profile



Del Eviondra
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan saat ini dijabat oleh Sdr. Del Eviondra. Berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Indonesia tahun 1992. Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Indonesia Power Nomor 176.K/020/IP/2016.

Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan tahun 2016 s.d sekarang, beberapa jabatan lain yang pernah dipegangnya adalah Kepala Divisi Niaga dan Settlement tahun 2015, Kepala Divisi Niaga tahun 2014-2015, General Manager UBP Saguling tahun 2012-2015, General Manajer UBP Mrica tahun 2011-2012.

Pendidikan dan Pelatihan yang pernah diikuti diantaranya: *Strategy Formulation with Balanced Scorecard, Workshop Senior Leader Capacity Building Manajemen Risiko;* Peran KPK, PPATK dan Korporasi Dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU; *ECITB Health and Safety Passport.*

The current Corporate Secretary is Mr. Del Eviondra. He lives in Jakarta. He achieved his Mechanical Engineering degree from Universitas Indonesia in 1992. He serves as Corporate Secretary based on Board of Commissioners' Decree No. 176.K/020/IP/2016.

Before his appointment as Corporate Secretary in 2016, he held such positions as the Head of Commerce and Settlement Division (2015), Head of Commerce Division (2014-2015), General Manager of Saguling GU (2012-2015) and General Manager of Mrica GU (2011-2012).

Training and courses he has taken are Strategy Formulation with Balanced Scorecard; Senior Leader Workshop on Risk Management Capacity Building; the Role of the Corruption Eradication Commission (KPK) and Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) as well as Corporates in Preventing and Eradicating Money Laundering; ECITB Health and Safety Transport.

SEKRETARIS PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARY

Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan

Dalam menjalankan fungsinya, Sekretaris Perusahaan telah memiliki pedoman kerja yang dituangkan dalam *Board Manual*. Pedoman tersebut mencakup tugas pokok organisasi Sekretariat Perusahaan, uraian tugas Sekretaris Perusahaan, dan Pedoman Komunikasi Perusahaan serta hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas fungsi Sekretaris Perusahaan. Dengan adanya Pedoman Kerja ini, diharapkan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan akan lebih terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 193.K/010/IP/2017 tanggal 12 Oktober 2017 adalah memastikan terkelolanya tata hubungan dengan pengurus Perusahaan, lembaga terkait dan seluruh *stakeholder* Perusahaan dalam rangka terpenuhinya kewajiban dan tanggung jawab Perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan/peraturan lainnya yang terkait dengan menggunakan suatu sistem informasi terpadu sesuai InPower IMS. Tugas pokok Sekretaris Perusahaan, diantaranya:

1. Menyusun dan mengendalikan program kerja dan anggaran untuk RJPP dan RKAP
2. Menyusun dan mengkaji kebijakan, strategi, proses bisnis dan prosedur
3. Menyusun usulan dan perencanaan pengadaan Sekretariat Perusahaan
4. Menyusun kajian risiko dan mengelola mitigasinya atas kegiatan di lingkungan Sekretariat Perusahaan
5. Menyusun dan mengendalikan kebijakan, sasaran, desain dan strategi komunikasi internal termasuk pengelolaan media sosial, kegiatan Perusahaan dan protokoler.
6. Menyusun dan mengendalikan kebijakan, sasaran, desain dan strategi komunikasi eksternal termasuk pengelolaan *website, media relation* dan *sponsorship* termasuk komunikasi dengan lembaga Negara dan lembaga pembuat kebijakan ketenagalistrikan. Mengendalikan sasaran dan strategi serta kegiatan *corporate social responsibility*
7. Mengelola laporan korporat (Laporan Manajemen, Laporan Kinerja, *Annual Report*) rapat korporat (RUPS, RADIR, RADEKOM, ALCO, RAKOR), laporan statistik Perusahaan, KIP dan Prosedur serta Surat Keputusan terkait informasi korporat

Corporate Secretary Working Guidelines

In accomplishing his tasks, the Corporate Secretary already has Working Guidelines in the Board Manual. The guidelines cover the main tasks of the Corporate Secretariat, the job description of the Corporate Secretary and Guidelines for Corporate Communication and other matters related to the implementation of the Corporate Secretary function. With these Working Guidelines, it is expected that the implementation of the Corporate Secretary's duties will be better oriented and effective as well as may serve as one of the tools for evaluating its performance.

Duties and Responsibilities of Corporate Secretary

The tasks and responsibilities of the Corporate Secretary based on Directors' Decree No. 193.K/010/IP/2017 dated October 12, 2017 are to ensure that the relations with the boards, related institutions, and all the Company stakeholders are well managed in order to fulfill the obligations and responsibilities of the Company in accordance with the articles of association and other provisions/regulations. The main tasks of the Corporate Secretary include:

1. Drafting and controlling work program and budget for RJPP and RKAP.
2. Drafting and reviewing business policies, strategies, processes and procedures.
3. Drafting procurement proposals and planning of the Corporate Secretariat.
4. Drafting risk assessment and managing its mitigation for the activities within the Corporate Secretariat.
5. Drafting and controlling policies, targets, designs and internal communication strategies, including managing the use of social media, and corporate as well as protocolar activities.
6. Drafting and controlling policies, targets, designs and external communication strategies, including the managing of website, media relation and sponsorship, maintaining communication with State agencies and the national council of electricity policy as well as controlling the strategies and activities of Corporate Social Responsibility.
7. Managing corporate reporting (Management Report, Performance Report, Annual Report), corporate meetings (RUPS, Directors' Meeting or RADIR, the Board of Commissioners Meeting or RADEKOM, ALCO, Coordination Meeting or RAKOR), corporate statistic report, KIP, Procedures and Decrees regarding corporate information.

8. Mengendalikan *Roadmap* dan kebijakan tata kelola/GCG
9. Mengelola kegiatan penyediaan fasilitas Perusahaan dan kesekretariatan
10. Mengelola *asset* dan *property* Perusahaan
11. Menyusun laporan rutin dan non rutin.
12. Melakukan pembinaan kegiatan terkait bidang kerja kepada UP, UJP, UPJP, UJH dan Unit Proyek.

8. Controlling Roadmap and governance/GCG policies.
9. Managing the provision of Company and secretariat facilities.
10. Managing corporate assets and properties.
11. Drafting periodic and non-periodic reports.
12. Providing guidance on the work-related activities to GU, GSU, GGSU, MSU and Project Unit.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

Sebagai wujud kepatuhan Indonesia Power terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan dengan penyusunan dan penyerahan laporan berkala kepada regulator, PT PLN (Persero) selaku pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya. Laporan berkala yang telah disampaikan Sekretaris Perusahaan selama tahun 2017 yaitu Laporan Manajemen Triwulanan, Laporan Kinerja Bulanan, Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Statistik. Selama tahun 2017, Sekretaris Perusahaan telah melakukan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk Laporan Sekretaris Perusahaan. Laporan tersebut memuat realiasi program kerja Sekretariat Perusahaan pada tahun 2017 mencakup implementasi GCG, program CSR, *Stakeholder Relations*, Pelaksanaan RUPS serta mendokumentasikan rapat internal Direksi dan Dewan Komisaris.

Implementation of Corporate Secretary's Duties

In compliance with the prevailing laws and regulations, Indonesia Power Corporate Secretary drafts and submits periodic reports to the regulator, PT PLN (Persero), as a shareholder, and other interested parties. Periodic reports submitted by the Corporate Secretary in 2017 were quarterly Management Report, Monthly Performance Report, Annual Report, Sustainability Report and Statistics Report. In 2017, Corporate Secretary conducted various activities and reported them on a Corporate Secretary Report. This detailed implementation of the work programs in 2017, including the implementation of GCG, CSR program, Stakeholder Relations, RUPS and documenting internal meetings of the Board of Directors and Board of Commissioners.

Program Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan Tahun 2017

Sepanjang tahun 2017, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti kegiatan pelatihan, di antaranya sebagai berikut:

Corporate Secretary Competency Development Program in 2017

In 2017, the Corporate Secretary partook in several training activities including:

Tabel Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan Tahun 2017
Table: Competency Development Program of the Corporate Secretary in 2017

Nama Pelatihan Training		Waktu Pelaksanaan Date	Tempat/Penyelenggara Venue
Implementasi dan Pengembangan Sistem *Monitoring* GCG Di PT PLN (Persero) dan Anak Perusahaan	Implementation and Development GCG Monitoring System at PT PLN (Persero) and Its Subsidiaries	16-18 Januari 2017 January 16-18, 2017	Semarang/PT PLN (Persero)
Workshop Assessment GCG	GCG Assessment Workshop	24-26 Februari 2017 February 24-26, 2017	Bali/BPKP
Training of Trainer Pengendalian Gratifikasi	Training of Trainer on Gratification Control	3-4 Agustus 2017 August 3-4, 2017	Bali/PT PLN (Persero) dan I and Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Forum GCG Anak Perusahaan PT PLN (Persero) Bersama KPK	GCG Forum for Subsidiaries of PT PLN (Persero) with KPK	12-13 Oktober 2017 October 12-13, 2017	Malang/PT PLN (Persero)

AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT

Audit Internal merupakan bagian dari organisasi Perusahaan yang memiliki peranan penting dalam perkembangan Perusahaan yaitu bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapat profesional dan independen serta rekomendasi perbaikan kepada Direktur Utama serta Manajemen terkait mengenai kegiatan atau operasional Perusahaan.

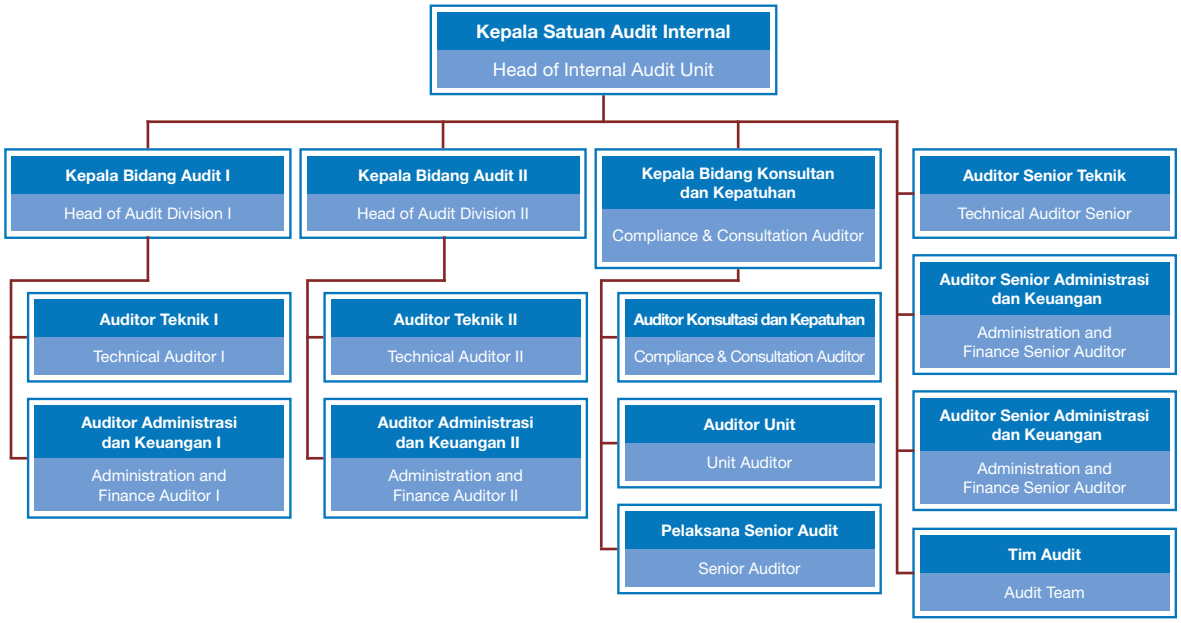
Internal Audit is part of Indonesia Power corporate organization that has a pivotal role for developing bringing the Company forward, i.e. responsible for giving independent and professional advice as well as recommendation for improvement in terms of the Company's activities or operations to the President Director and related Managerial functions.

Struktur Organisasi Audit Internal

Struktur Organisasi Satuan Audit Internal ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor 204.K/010/IP/2017 tentang Bagan Susunan Jabatan, Tingkat Jabatan dan Formasi Jabatan pada Satuan Audit Internal Indonesia Power tanggal 12 Oktober 2017. Fungsi Audit Internal dipimpin oleh seorang kepala yang disebut Kepala Satuan Audit Internal (KSAT ADI) yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. Secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Perusahaan.

Internal Audit Organizational Structure

Internal Audit Organizational Structure is set forth in Directors' Decree No. 204.K/010/IP/2017 on Organizational Structure, Rank and Formation of PT Indonesia Power Internal Audit dated October 12, 2017. This unit is led by the Head of Internal Audit (KSAT ADI) appointed and dismissed by the Board of Directors with approval from the Board of Commissioners. KSAT ADI reports directly to the President Director.



Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Satuan Audit Internal

Satuan Audit Internal merupakan organisasi audit internal yang bersifat independen dan obyektif, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Audit Internal (KSAT ADI) yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Pengangkatan KSAT ADI berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 483.K/020/IP/2017 tanggal 12 Oktober 2017. KSAT ADI bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berkaitan dengan hasil audit.

Parties Appointing and Dismissing the Head of Internal Unit

Internal Audit is an independent and objective organization for internal audit, led by Head of Internal Audit who is appointed and dismissed by President Director with approval from the Board of Commissioners. Appointment of the Head of Internal Audit was based on Directors' Decree No. 483.K/020/IP/2017 dated October 12, 2017. The Head reports directly to the President Director and may communicate directly to the Board of Commissioners to inform matters relevant to audit result.

Profil Kepala Satuan Audit Internal

Head of Internal Audit Profile



Rachmanto Kusumonegoro
Kepala Satuan Audit Internal
Head of Internal Audit Unit

Kepala Satuan Audit Internal saat ini dijabat oleh Sdr. Rachmanto Kusumonegoro. Berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Akutansi dari STAN tahun 1993 dan Master Bidang Manajemen dari Universitas Pancasila tahun 2001. Menjabat sebagai Kepala Satuan Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Indonesia Power Nomor 483.K/020/IP/2017.	The current Head of Internal Audit is Mr. Rachmanto Kusumonegoro. He lives in Jakarta, and achieved Accounting Degree from STAN in 1993 and Master's Degree in Management Studies from Universitas Pancasila in 2001. He served as the Head of Internal Audit Unit based on Directors' Decree No. 483.K/020/IP/2017.
Sebelum menjabat sebagai Kepala Satuan Audit Internal tahun 2017 s.d sekarang, beberapa jabatan lain yang pernah dipegangnya adalah Eksekutif Senior Bidang Keuangan Kantor Pusat tugas karya ke PT Cogindo DayaBersama tahun 2014-2017, Kepala Divisi Akutansi tahun 2012-2014, Kepala Bidang Audit Keuangan dan Administrasi tahun 2010- 2012.	Before assuming the role of Internal Audit Head in 2017, he held such offices as Executive Senior of Financial Office in PT Cogindo Daya Bersama (2014-2017), Head of Accounting Division (2012-2014), Head of Financial Audit and Administration (2010-2012).
Pendidikan dan Pelatihan yang pernah diikuti diantaranya: Qualified Internal Auditor, Certified Risk Management Professional, Certified Fraud Examiner, Certification Accountant.	Several training programs he took part in are Qualified Internal Auditor, Certified Risk Management Professional, Certified Fraud Examiner, Certification Accountant.

Komposisi Personil dan Sertifikasi Profesi Satuan Audit Internal

Formasi SAI Indonesia Power tahun 2017 adalah sebanyak 42 orang, yang terdiri dari 1 orang Kepala Satuan, 3 orang Kepala Bidang, 2 orang Auditor Senior, 25 orang Auditor, dan 11 orang Pelaksana Senior. Dari formasi tersebut, saat ini telah terisi 28 orang pegawai yang terdiri dari 1 orang Kepala Satuan, 3 orang kepala bidang, 23 auditor, dan 1 orang pelaksana.

Composition and Professional Certification of Internal Audit

In 2017 the formation of Company's Internal Audit comprised 42 personnel, consisting of 1 Unit Head, 3 Division Heads, 2 Senior Auditors and 11 Senior Officers. In its current formation, there are 28 employees made up of 1 Unit Head, 3 Division Heads, 23 auditors and 1 officer.

AUDIT INTERNAL

INTERNAL AUDIT

Auditor telah memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, hal ini ditandai dengan sertifikasi yang dimiliki oleh sebagian besar auditor dan akan diikuti oleh auditor lainnya. Sebanyak 13 auditor telah bersertifikasi QIA (*Qualified Internal Auditor*) dan sebanyak 5 auditor bersertifikasi CFE (*Certified Fraud Examiner*).

In performing their duties and functions, most of the auditors have possessed qualified and reliable skills as proven by relevant certifications, and those who have yet to have it would follow through. There are 13 auditors certified in Qualified Internal Auditor and 5 auditors are Certified Fraud Examiner.

Tabel Sertifikasi Profesi Audit Internal Tahun 2017
Table: Internal Audit Professional Certification in 2017

No.	Nama | Name	Sertifikasi | Certification	
1.	Rachmanto	• Qualified Internal Auditor • Certified Risk Management Professional • Certified Fraud Examiner • Certification Accountant	• Qualified Internal Auditor • Certified Risk Management Professional • Certified Fraud Examiner • Certification Accountant
2.	Mangihut Samosir	• Qualified Internal Auditor • Certified Fraud Examiner	• Qualified Internal Auditor • Certified Fraud Examiner
3.	Windi Winarso	Qualified Internal Auditor	Qualified Internal Auditor
4.	Roedi Rachmanto	• Qualified Internal Auditor • Certified Fraud Examiner	• Qualified Internal Auditor • Certified Fraud Examiner
5.	Syarif	• Qualified Internal Auditor • Certified Fraud Examiner	• Qualified Internal Auditor • Certified Fraud Examiner
6.	Suwarna	• Qualified Internal Auditor • Qualified Risk Management Professional	• Qualified Internal Auditor • Qualified Risk Management Professional
7.	Riyadi	Qualified Internal Auditor	Qualified Internal Auditor
8.	Agus Yuwono	Qualified Internal Auditor	Qualified Internal Auditor
9.	Bismo Siswandanu	Audit Internal Tingkat Dasar 2	Basic Internal Audit Level 2
10.	Yudi Mulyadi	• Qualified Internal Auditor • Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan Level 3	• Qualified Internal Auditor • Accounting and Financial Development Center Level 3
11.	Gunawan Setyo Budi	• Qualified Internal Auditor • Certified Fraud Examiner	• Qualified Internal Auditor • Certified Fraud Examiner
12.	Ade Hendriana	Qualified Internal Auditor	Qualified Internal Auditor
13.	Muarief Edhi Pambudi	Qualified Internal Auditor	Qualified Internal Auditor
14.	Rusman Tambunan	Audit Internal Tingkat Dasar 2	Basic Internal Audit Level 2
15.	Chairuddin	Audit Internal Tingkat Dasar 2	Basic Internal Audit Level 2
16.	Ika Ramalia S	Audit Internal Tingkat Dasar 1	Basic Internal Audit Level 1
17.	Pangastuti SW	Audit Internal Tingkat Dasar 1	Basic Internal Audit Level 1
18.	Agnes Isti	Audit Internal Tingkat Dasar 1	Basic Internal Audit Level 1
19	Misni	Audit Internal Tingkat Dasar 2	Basic Internal Audit Level 2
20.	Mujiwartono	Audit Internal Tingkat Dasar 1	Basic Internal Audit Level 1
21	Robert Sunarijanto	Audit Internal Tingkat Dasar 1	Basic Internal Audit Level 1
22	Wahyu Tri Asmara	Audit Internal Tingkat Dasar 1	Basic Internal Audit Level 1
23	Marpodho	Audit Internal Tingkat Dasar 1	Basic Internal Audit Level 1
24	Setyo Harsono	Audit Internal Tingkat Dasar 1	Basic Internal Audit Level 1
25	Hasan Basori	Audit Internal Tingkat Dasar 1	Basic Internal Audit Level 1
26	M Reza Pahlevi	Qualified Internal Auditor	Qualified Internal Auditor
27	Ari Rachmat Slamet	Audit Internal Tingkat Dasar 2	Basic Internal Audit Level 2
28	Makhfuzi Fahmi	Audit Internal Tingkat Dasar 2	Basic Internal Audit Level 2

Pedoman Audit Internal (Internal Audit Charter)

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Audit Internal telah dilengkapi Pedoman Kerja yang disebut dengan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris dan terakhir diubah berdasarkan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 134.K/010/IP/2014 tanggal 20 Agustus 2014. Piagam Audit Internal merupakan pedoman standar yang memuat ukuran minimal tentang fungsi Audit Internal serta aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Internal. Piagam Audit Internal ini ditujukan pula untuk terciptanya kesamaan pemahaman dan landasan mengenai tingkat pemeliharaan kepentingan dan komitmen dari semua pihak yang terkait dengan Indonesia Power.

Di samping mengacu pada Piagam Audit Internal, Satuan Audit Internal berpedoman pada Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) dan penyempurnaan perangkat operasional melalui aplikasi *Risk Based Audit* (ProRBA) yang akan diintegrasikan dengan penerapan manajemen risiko. Pada 2017, Satuan Audit Internal telah melakukan evaluasi terhadap Piagam Audit Internal dan Pedoman Audit Internal. Perbaikan Piagam Audit Internal mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* (Standards) dan akan diberlakukan secara efektif pada tahun 2018.

Internal Audit Charter

In order to support its duties, Indonesia Power Internal Audit is equipped with an Internal Audit Charter as reference in carrying out the function of internal audit and supervision. Internal Audit Charter is set forth based on a Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners, and the latest amendment made based on Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners No. 134.K/010/IP/2014 dated August 20, 2014 on Internal Audit Charter. The Charter is a standard guideline that contains at least the functions of Internal Audit and aspects related to the Internal Audit implementation. Internal Audit Charter is aimed to create mutual understanding and foundation to maintain the level of interests and commitments from every party related to Indonesia Power.

In addition to the Charter, Internal Audit refers to Annual Audit Work Program (PKAT) and improvement of operating tools through the application of Risk Based Unit (ProRBA) that will be integrated into risk management implementation. In 2017, the Unit evaluated Internal Audit Charter and Internal Audit Guidelines and made revisions according to the prevailing regulations and the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing. The revised versions will be effective in 2018.

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

Sesuai dengan Piagam Audit Internal, uraian tugas Audit Internal adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan fungsi pengawasan dan audit internal Perusahaan untuk memastikan terlaksananya kepatuhan pada pelaksanaan *Standard Operation Procedure* (SOP).
2. Meningkatkan kecermatan kualitas kerja operasi dan pemeliharaan serta terlaksananya tertib administrasi, tertib anggaran, dan kepatuhan untuk mewujudkan tercapainya *cost efficiency* dan *cost effectiveness*.
3. Memberikan jasa konsultasi kepada pemilik proses bisnis atas permintaan pemilik proses bisnis atau atas inisiatif Satuan Audit Internal dalam rangka mengidentifikasi kecukupan pengendalian yang akan diterapkan untuk menjamin tercapainya

Duties and Responsibilities of Internal Audit

In accordance with Internal Audit Charter, the duties of Internal Audit are described as follows:

1. Carry out supervisory function and internal audit of the Company to ensure the compliance with Standard Operation Procedure (SOP)
2. Improve the quality details of operations and maintenance, and the implementation of administration, budget, and compliance to realize cost efficiency and cost effectiveness.
3. Give consulting service to business process owner on request by the business process owner or by initiatives from Internal Audit Unit in order to identify the adequacy of control that will be implemented to ensure the achievement of Company's target.

AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT

sasaran Perusahaan. Dalam melaksanakan peran "*consulting*" tersebut Auditor Internal melaporkan kepada Kepala Satuan Audit Internal sebelum dan sesudah pelaksanaan pekerjaan. Terkait hal ini, tugas Auditor Internal hanya memberikan jasa konsultasi sesuai dengan standar profesi, sedangkan tanggung jawab atas pelaksanaan hasil konsultasi tetap berada pada pemilik proses bisnis dan tidak mengurangi wewenang Satuan Audit Internal untuk melaksanakan fungsi tugas assurance-nya. Untuk menjamin obyektivitas atas hasil audit, maka Auditor tidak diperbolehkan melaksanakan audit terhadap kegiatan yang merupakan hasil konsultasinya.

In performing the 'consulting' role, Internal Audit reports to Head of Internal Audit Unit before and after the audit. Related to this, Internal Auditor gives consultation services in line with the professional standards and the responsibility for consultation is on the business process owner, without prejudice to the Internal Audit Unit's rights to carry out its assurance function. To ensure the objectivity of audit result, the Auditors are not allowed to perform an audit on the activity that was the result of his/her consultation.

Adapun dalam pelaksanaannya auditor internal bertanggung jawab untuk:

1. Melakukan penilaian atas kecukupan dan efektivitas pengendalian internal pada masing-masing proses bisnis dalam Perusahaan.
2. Mengembangkan rencana audit tahunan yang dituangkan dalam Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) yang fleksibel dengan menggunakan metodologi pendekatan risiko.
3. Melaksanakan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT), termasuk segala tugas-tugas lain yang diminta oleh Direktur Utama dan Komite Audit Dewan Komisaris melalui Direktur Utama.
4. Secara berkesinambungan mengembangkan kompetensi auditor dengan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang cukup serta sertifikasi profesional.
5. Berperan aktif dalam pengawasan mekanisme pelaksanaan *Code of Conduct* serta pencegahan tindakan kecurangan.
6. Melakukan audit investigasi terhadap indikasi kecurangan di dalam organisasi dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Utama.
7. Menyampaikan laporan kegiatan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komite Audit Dewan Komisaris mengenai rangkuman kegiatan audit.
8. Melaksanakan fungsi jasa konsultasi sedemikian rupa sehingga tidak mengurangi independensi dan obyektivitas Satuan Audit Internal dalam melakukan kegiatan memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) terhadap kegiatan-kegiatan yang menjadi obyek konsultasi.
9. Melaporkan isu-isu penting yang berhubungan dengan proses pengendalian kegiatan Perusahaan, unit usaha dan afiliasinya.

In the audit, the internal auditor is responsible for:

1. Assessing the adequacy and effectiveness of internal control for each business process in the Company.
2. Developing annual audit plan which is set in the PKAT that is flexible and uses a risk approach methodology.
3. Implementing the PKAT, in addition to other duties requested by the President Director and Board of Commissioners' Audit Committee through President Director.
4. Continuously developing auditor's competence with adequate knowledge, skills and experience, with professional certification.
5. Actively supervising the implementation mechanism of Code of Conduct, and preventing fraud.
6. Performing investigation audit on the alleged fraud in the organization and reporting the result to President Director.
7. Reporting its activities to the President Director, with a copy to the Board of Commissioners' Audit Committee on the summary of the audit.
8. Performing consulting services in a way that does not lessen the independence and objectivity of Internal Audit Unit by conducting an activity that gives reasonable assurance on activities that become the consultation objects.
9. Reporting important issues related to activity control process of the Company, business unit and affiliates.

Program Pengembangan Kapabilitas Personil Audit Internal

Indonesia Power senantiasa melakukan program peningkatan kompetensi Satuan Audit Internal dengan melakukan program pengembangan kompetensi auditor secara sistematis dan berjenjang. Pada tahun 2017 Satuan Audit Internal telah mengikuti pelatihan *National Anti Fraud Conference* 2017 yang diadakan oleh ACFE yang diikuti sebanyak 2 (dua) orang. Selain itu, pada tahun 2017 personil Audit Internal juga telah mengikuti beberapa pelatihan, sebagaimana tabel berikut.

Internal Audit Competency Development Program

Indonesia Power continuously conducts competency development for Internal Audit by ensuring auditor competency development is managed systematically and gradually. In 2017, two auditors attended the National Anti-Fraud Conference training organized by ACFE. In addition, the same year saw several Internal Auditors followed training described in the table below:

Tabel Pelatihan Auditor Internal Tahun 2017
Table: Internal Audit Training in 2017

Nama Pelatihan Training		Waktu Pelaksanaan Date	Tempat Location
Workshop peningkatan pemahaman ERP	Improving ERP Awareness Workshop	12-14 Juli 2017 July 12-14, 2017	Semarang
Workshop Aplikasi elektornic risk based audit system	Workshop on Risk-Based Audit System Electronic Application	9-10 Oktober 2017 October 9-10, 2017	Bali
Workshop "Transformasi Audit Internal untuk Peningkatan Efektivitas Pengendalian Perusahaan"	Workshop on Internal Audit Transformation for Improved Effectiveness of Company Control	15-17 November 2017 November 15-17, 2017	PT Indonesia Power Kantor Pusat dan Bogor
Workshop "Peningkatan Pemahaman Internal Control Dan Sinergi Eksekusi Process Business"	"Internal Control Development and Synergy in Executing Business Processes" Workshop	4-6 Desember 2018 December 4-6, 2018	Perak

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal Tahun 2017

Selama tahun 2017, Satuan Audit Internal Indonesia Power telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan Program Kerja Audit Tahunan Perusahaan yang disusun berdasarkan analisa risiko yang mempengaruhi kelangsungan operasional Perusahaan dan menitikberatkan pada sistem keandalan unit dan sarana pendukung lainnya yang memiliki risiko signifikan. Program kerja audit tersebut disampaikan kepada Direktur Utama dan di-*review* oleh Komite Audit. Berikut laporan hasil pelaksanaan Audit Internal tahun 2017:

Report on Internal Audit Activity in 2017

Throughout 2017, Internal Audit Unit organized numerous activities in line with the PKAT, which was prepared based on the risk analysis that influences the Company's operating continuity, and emphasizes unit reliability system and other facilities with significant risks. Such audit work program is submitted to the President Director and reviewed by the Audit Committee. The following is the report on Internal Audit Activity for the year 2017:

AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT

Audit Operasional Pada Unit

Audit Operasional Unit pada tahun 2017 telah seluruhnya dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

Unit Operations Audit

Unit Operations Audit 2017 had been completed with the following details:

No.	Unit	Laporan Hasil Audit / Audit Result Report	
		No.	Tanggal / Date
Semester I Tahun 2017 | First Half of 2017			
1	UJP I GSU Pangkalan Susu	006/LHA/UJPPNS/SMT-I/2017	10 Maret 2017 | March 10, 2017
2	UP I GU Saguling	007/LHA/UPSGL/SMT-I/2017	17 Maret 2017 | March 17, 2017
3	UJP I GSU Jabar 2 Palabuhan Ratu	008/LHA/UJPJPR/SMT-I/2017	17 Maret 2017 | March 17, 2017
4	UP I GU Mrica	009/LHA/UPMRC/SMT-I/2017	31 Maret 2017 | March 31, 2017
5	UJP I GSU Jateng 2 Adipala	010/LHA/UJPADP/SMT-I/2017	13 April 2017 | April 13, 2017
6	UPJP I GGSU Kamojang	011/LHA/UPJPKMJ/SMT-I/2017	21 April 2017 | April 21, 2017
7	UJP I GSU Banten 1 Suralaya	012/LHA/UJPBSR/SMT-I/2017	5 Mei 2017 | May 5, 2017
8	UPJP I GGSU Priok	013/LHA/UPJPTGP/SMT-I/2017	22 Mei 2017 | May 22, 2017
9	UJP I GSU Banten 2 Labuan	014/LHA/UJPBLB/SMT-I/2017	24 Mei 2017 | May 24, 2017
10	UJH I UMS	1/LHK/IP/2017	17 Februari 2017 | February 17, 2017
Semester II Tahun 2017 | Second Half of 2017			
1	UJP I GSU Banten 3 Lontar	018/LHA/UJPBLT/SM-II/2017	25 Agustus 2017 | August 25, 2017
2	UP I GU Bali	017/LHA/UPBLI/SMT-II/2017	31 Agustus 2017 | August 31, 2017
3	UP I GU Semarang	021/LHA/UPSMG/SMT-II/2017	20 Oktober 2017 | October 20, 2017
4	UJP I GSU Barru	022/LHA/UJPBRU/SMT-II/2017	13 Oktober 2017 | October 13, 2017
5	UPJP I GGSU Perak Grati	024/LHA/UPJPPGT/SMT-II/2017	9 November 2017 | November 9, 2017
6	UJP I GSU Jeranjang	025/LHA/UJPJRG/SMT-II/2017	3 Maret 2017 | March 3, 2017
7	UP I GU Suralaya	026/LHA/UPSLA/SMT-II/2017	6 Desember 2017 | December 6, 2017
8	UJP I GSU Cilegon	027/LHA/UJPCLG/SMT-II/2017	30 November 2017 | November 30, 2017

Audit Operasional Kantor Pusat

Pada tahun 2017, Satuan Audit Internal telah melaksanakan audit di Kantor Pusat terhadap 3 (tiga) obyek audit dan 1 (satu) satuan kerja yang terdiri dari:

Head Office Operations Audit

In 2017, Internal Audit organized auditing process at the Head Office of 3 (three) audit objects and 1 (one) work unit consisting of:

No.	Kantor Pusat / Head Office	Laporan Hasil Audit / Audit Result Report	
		No.	Tanggal / Date
Semester I Tahun 2017 | First Half of 2017			
1	DIVEIP1 & DEPEU (Pengelolaan Batubara) DIVEIP1 & DEPEU (Coal Management)	005/LHP/IP-DIVEIP1-DEPPEU/2017	8 Maret 2017 | March 8, 2017
2	Capex	015/LHA/IP-INV/2017	16 Juni 2017 | June 16, 2017
3	Pengelolaan TOP | TOP Management	016/LHA/IP-TOP/2017	16 Juni 2017 | June 16, 2017
Semester II Tahun 2017 | Second Half of 2017			
1	Satuan Perencanaan, Kinerja dan Manajemen Risiko Korporat Planning, Performance, Corporate Risk Management Work Unit	028/LHA/IP-SATPKR/2017	13 Desember 2017 | December 13, 2017

Kegiatan Konsultasi dan Kepatuhan

Satuan Audit Internal telah melaksanakan beberapa kegiatan konsultasi dan kepatuhan sesuai permintaan *user* selama tahun 2017. Berikut kegiatan konsultasi dan kepatuhan yang telah dilaksanakan:

1. Pendampingan Pembuatan Dokumen Pengadaan *Emergency Recovery* Generator Unit 1 UJP Labuan
2. *Review* atas Proses Pengadaan *Stategic Partner of Operation and Maintenance for* PLTU Suralaya #8 and PLTU Palabuhan Ratu
3. *Review* Draft Perjanjian Pekerjan Jasa Konstruksi Pengalihan Jalan Pengembangan Pembangkit PLTU Suralaya 2 x 1000 MW
4. *Review* Draft Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan High Pressure Heater 6 unit 7 UP Suralaya
5. *Review* Pekerjaan Revitalisasi Mill Air System dan Induces Draft Fan System (Penggantian Paf Outlet Dan Mill Hot DA Damper)
6. Monitoring Proses Pengadaan dan Eksekusi Gasifikasi dan Rehabilitasi PLTU Tambaklorok 3 200 MW UP Semarang
7. *Review* Tagihan Jasa Operasi dan Pemeliharaan PRA COD PLTGU Grati (Peaker) 450 MW Periode Juli 2017
8. *Review* Pengadaan New 3rd Stage Bucket dan New 2nd Stage Nozzle GTG 1.3 MI PLTU Tambaklorok.

Consultation and Compliance Activity

Internal Audit also organized a series of activities in consultation and compliance upon user request. Below are consultation and compliance activities that had been carried in 2017:

1. Assistance in drafting document on Emergency Recovery Generator Unit 1 in Labuan GSU.
2. Review on the procurement process of Operation and Maintenance Strategic Partner for Suralaya 8 GSU and Palabuhan Ratu GSU.
3. Review of Draft Agreement on Construction Work to Move Power Plant Road for SPP Suralaya (2x1000 MW).
4. Review of Agreement on Procurement and Installation of 6 High Pressure Heaters in Units 7 of Suralaya GU.
5. Review on Revitalization of Mill Air System and Induces Draft Fan System (Replacement of Paf Outlet and Hot Mill DA Damper)
6. Monitoring of Procurement and Execution of Gasification and Rehabilitation in SPP Tambak Lorok (3200 MW) and Semarang GU.
7. Review on Operations and Maintenance Bills of PRA COD GTPP Grati (Peaker) 450 MW for July 2017.
8. Review of Procurement of the New 3rd Stage Bucket and New 2nd Stage Nozzle of GTG 1.3 MI at GTPP Tambaklorok.

Audit atas Implementasi ICoFR

Selama tahun 2017, SATADI telah melakukan audit atas implementasi *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) berupa pelaporan *Control Self Assessment* (CSA) dalam suatu aplikasi yang dilakukan oleh setiap pemilik *control*, secara uji petik pada 6 unit dengan hasil sebagai berikut:

Audit of ICoFR Implementation

During the course of 2017, the Internal Audit carried out ICoFR audit in the form of Control Self Assessment (CSA) reporting carried out by the control owner and used selected sampling in 6 units, with the following results:

No.	Unit	Semester	Uraian Summary	Judul Title	
1	UPJP I GGSU Priok	1	Catatan Report	Penerapan Program ICoFR Untuk Proses Pengadaan Material dan Jasa Pemeliharaan Di Unit Pembangkit Priok Belum Optimal.	ICoFR Program Implementation for Procurement of Materials and Maintenance Services at GU Priok has not been optimized yet.
2	UJP I GSU Jeranjang	2	Catatan Report	Pelaksanaan CSA (*Control Self Assessment*) Atas Pengendalian Internal Segmen B – Biaya Operasi, Segmen C – Aset Tetap dan Segmen D – Persediaan Belum Efektif	CSA over Internal Control of Segment B in Operating Cost, Segment C in Fixed Assets and Segment D in Supply has not been effective yet.
3	UJP I GSU Lontar	2	Catatan Report	Pelaporan Atas Pelaksanaan Pengendalian Laporan Keuangan (ICoFR) Belum Didukung Dokumentasi Yang Seharusnya	ICoFR Implementation has not been supported by proper documentation.
4	UJP I GSU Barru	2	Catatan Report	Penerapan Program ICoFR di UJP Barru Belum Optimal	ICoFR Implementation in Barru GSU has not been optimized yet.

AUDIT INTERNAL

INTERNAL AUDIT

No.	Unit	Semester	Uraian Summary	Judul Title	
5	UP I GU Semarang	2	Catatan Report	Implementasi ICoFR untuk Pengendalian Tingkat Transaksional tidak Efektif.	ICoFR Implementation for Transactional Controlling has not been effective.
6	UPJP I GGSU Perak Grati	2	Catatan Report	Penerapan Program ICoFR dan Pelaksanaan CSA (*Control Self Assessment*) di UPJP Perak Grati Tidak Efektif	ICoFR Implementation and CSA in Perak Grati GGSU have not been effective.

Berdasarkan hasil audit ICoFR tersebut permasalahan yang ditemukan bersifat minor dan dapat diperbaiki dengan mendesain ulang control yang ada disesuaikan dengan perkembangan struktur organisasi terkini dan meningkatkan ketelitian dengan melampirkan atribut control dalam pelaporan transaksinya. Dengan hasil audit tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum pengendalian yang dilakukan Manajemen dalam pelaporan keuangan telah didukung pengendalian yang efektif sehingga diharapkan tidak terdapat salah saji yang material atas laporan keuangan yang disusun perusahaan.

Based on the ICoFR audit result above, the issues found were classified as minor which can be fixed by finetuning the existing control element to the current organizational structure development and improving the accuracy by including control attributes in its transactional reporting. The audit result shows that the Company's management in financial reporting has been supported by effective control so it is expected that it could minimize inaccurate, material representation in the financial reports.

Kegiatan Pendukung Audit Lainnya

1. Melaksanakan pendampingan dalam rangka Audit Laporan Keuangan, Kinerja, dan Kepatuhan terhadap Perundangan dan Pengendalian Intern dari KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan berdasarkan surat No. 2444/KEU.02.02/DIVAKT/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Audit Interim Tahun 2016
2. Melaksanakan pendampingan pemeriksaan BPK RI Tahap II atas Perhitungan Penggunaan Subsidi Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2016 sesuai Surat Tugas BPK No. 02/ST/IX-XX.1/01/2017 tanggal 3 Januari 2017
3. Sesuai surat pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan operasional No. 0342/SPI.01.04/Ins.Reg.PST/2017 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2017 s/d 15 Agustus 2017, Satuan Audit Internal PT Indonesia Power melaksanakan pendampingan 4 (empat) Tim Audit Operasional SPI PLN sesuai dengan:
   - Surat nomor 058/PO/TI/SPI.01.04/INSP.PST/2017 tanggal 6 Juli 2017 tentang Surat Tugas Audit Teknologi Informasi
   - Surat nomor 067/PO REG.20/SPI.01.01/INSP.PST/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang Surat Tugas Audit Operasioanal pada Unit Jasa Pemeliharaan dan Unit Jasa Pembangkitan

Other Audit Supporting Activity

1. Assisting audit of Financial, Performance and Compliance Report in accordance with Internal Control and relevant regulations by the Public Accounting Firm (KAP) of Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners, based on Letter No. 2444/KEU.02.02/DIVAKT/2016 dated October 17, 2016 on Interim Audit in 2016.
2. Assisting the phase II of the Supreme Audit Board (BPK)'s audit on the Use of Electricity Subsidy by PT PLN (Persero) in 2016 under BPK Assignment Notice No. 02/ST/IX-XX.1/01/2017 dated January 3, 2017.
3. In keeping with the Operational Inspection Notice No. 0342/SPI.01.04/Ins.Reg.PST/2017 carried out on July 10-August 15, 2017, PT Indonesia Power Internal Audit assisted 4 (four) Operations Audit teams of PT PLN in line with the following letters:
   - No. 058/PO/TI/SPI.01.04/INSP.PST/2017 dated July 6, 2017 on Letter of Assignment for Operations Audit on Information Technology.
   - No. 067/PO REG.20/SPI.01.01/INSP.PST/2017 dated July 13, 2017 on Letter of Assignment for Operations Audit in Maintenance Service and Generating Service Units.

- Surat nomor 068/PO REG.20/SPI.01.01/INSP.PST/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang Surat Tugas Audit Operasional pada Unit Pembangkitan
- Surat nomor 075/PO REG.20/SPI.01.01/INSP.PST/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang Surat Tugas Audit Operasional pada Kantor Pusat

4. Melaksanakan pendampingan kegiatan *Quality Assurance Review* yang dilaksanakan oleh PT Bina Audita Indonesia dengan nomor kontrak 184.SPK/061/IP/2017 yang berakhir pada 7 November 2017
5. Satuan Audit Internal membuat draft revisi dari Surat Keputusan Direksi No. 134.K/010/IP/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) dan Surat Keputusan Direksi No. 150.K/010/IP/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Pedoman Audit Internal Perusahaan yang saat ini sedang dalam proses *review* oleh DEPKUM untuk selanjutnya dilakukan pengesahan oleh Direktur Utama Indonesia Power
6. Merumuskan RJP Satuan Audit Internal tahun 2018-2022.

- No. 068/PO REG.20/SPI.01.01/INSP.PST/2017 dated July 13, 2017 on Letter of Assignment for Operations Audit in Generating Unit.
- No. 075/PO REG.20/SPI.01.01/INSP.PST/2017 dated July 13, 2017 on Letter of Assignment for Operations Audit Team in Head Office.

4. Assisting Quality Assurance Review organized by PT Bina Audita Indonesia based on Contract No 184.SPK/061/IP/2017 ending on November 7, 2017.
5. The Internal Audit drafted a revision to Directors' Decree No. 134.K/010/IP/2014 dated August 20, 2014 on Internal Audit Charter and Directors' Decree No. 150.K/010/IP/2014 dated September 29, 2014 on Corporate Internal Audit Guidelines currently under review by DIV KUM and that would be further sanctioned by the President Director of PT Indonesia Power.
6. Formulating RJP of Internal Audit for 2018-2022.

Monitoring Tindak Lanjut Temuan Audit

Audit dilaksanakan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan, Manajemen Risiko, dan proses Tata Kelola Perusahaan serta melakukan penilaian efisiensi dan efektivitas atas seluruh aktivitas Perusahaan. Hasil pelaksanaan Tindak Lanjut dilaporkan oleh Auditee kepada KSAT ADI, yang kemudian dievaluasi untuk menetapkan, apakah tindak lanjut tersebut sudah sesuai dengan saran yang dimaksud. Untuk Tindak Lanjut yang sudah tuntas akan dinyatakan "selesai ditindaklanjuti" dan diinformasikan kepada auditee. Adapun bagi tindak lanjut yang belum selesai dan masih berstatus "monitor" diminta untuk diselesaikan dengan penjelasan seperlunya.

Progres penyelesaian Tindak lanjut Temuan Audit Operasional untuk audit semester I 2017 adalah sebagai berikut:

Monitoring of the Follow-Up on Audit Finding

The audit is performed to evaluate the effectiveness of Internal Control System, Risk Management and Corporate Governance process, and to assess the efficiency and effectivity of all the Company's activities. Internal Audit submits audit result report to the KSAT ADI, then it would be evaluated to establish whether the follow-up had been as required by the advice. For follow-up that has been resolved and declared "follow-up completed', it would be informed to the auditor while the one that has not been resolved and remained in "under monitoring" status, it would be required to resolve with proper explanation included.

The following is follow-up on the findings of Operations Audit for the first half of 2017:

AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT

No.	Unit	Tindak Lanjut Follow-Up		
		Jumlah Temuan Findings	Temuan Ditindaklanjuti Follow-Up Completed	Status Monitor Status: Under Monitor
1	UJP I GSU Pangkalan Susu	11	11	0
2	UP I GU Saguling	13	13	0
3	UJP I GSU Jabar 2 Palabuhan Ratu	7	7	0
4	UP I GU Mrica	7	7	0
5	UJP I GSU Jateng 2 Adipala	8	8	0
6	UPJP I GGSU Kamojang	10	10	0
7	UJP I GSU Banten 1 Suralaya	11	11	0
8	UPJP I GGSU Priok	7	7	0
9	UJP I GSU Banten 2 Labuan	6	6	0
	Jumlah I Total	**80**	**80**	**0**

Progres penyelesaian Tindak lanjut Temuan Audit Operasional untuk semester II tahun 2017 sudah ditindaklanjuti seluruhnya, berikut disampaikan Instruksi Tindak Lanjut Semester II 2017:

Follow-up on the findings of Operations Audit for the second semester had been completed entirely. The following is the Follow-Up Instruction for the second half of 2017:

No.	Unit	Tindak Lanjut Follow-Up		
		Jumlah Temuan Findings	Temuan Ditindaklanjuti Follow-Up Completed	Status Monitor Status: Under Monitor
1	UJP I GSU Banten 3 Lontar	6	6	0
2	UP I GU Bali	8	8	0
3	UP I GU Semarang	12	12	0
4	UJP PLTU I GSU SPP Barru	10	10	0
5	UP I GU Perak Grati	7	7	0
6	UJP I GSU Jeranjang	6	6	0
7	UP I GU Suralaya	6	6	0
8	UJP I GSU Cilegon	12	12	0
	Jumlah I Total	**67**	**67**	**0**

Proses penyelesaian Instruksi Tindak Lanjut untuk Kantor Pusat tahun 2017 adalah sebagai berikut:

The closure of Follow-Up Instruction from the Head Office in 2017 is detailed below:

No.	Kantor Pusat Head Office	Semester	Tindak Lanjut Follow-Up		
			Jumlah Temuan Findings	Temuan Ditindaklanjuti Follow-Up Completed	Status Monitor Status: Under Monitor
1	Batubara I Coal	1	3	3	0
2	Investasi I Investment	1	2	1	1
3	TOP	1	3	3	0
4	Satuan Perencanaan Korporat, Kinerja dan Manajemen Risiko Corporate Planning, Performance & Risk Management Unit	2	4	3	1
	Jumlah I Total		**12**	**10**	**2**

Tindak lanjut untuk temuan hasil audit di Kantor Pusat sudah 83% dari keseluruhan, hal ini menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Tindak lanjut temuan hasil audit di Kantor Pusat yang masih berstatus monitor beberapa berupa kebijakan yang memerlukan waktu yang lebih untuk proses tindak lanjutnya. Kegiatan evaluasi atas pelaksanaan Tindak Lanjut Temuan dilakukan sesuai laporan tindak lanjut yang disampaikan oleh Auditee. Untuk meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil audit pada Kantor Pusat, perlu dimasukkan unsur penyelesaian tindak lanjut sebagai salah satu penilaian kinerja dari Unit Kerja yang bersangkutan.

Follow-up on audit findings at the Head Office has reached 83% of the total components. It shows an increase from the year before. Follow-up on audit findings at the Head Office with the status under monitoring includes policies which need longer time to proceed. Evaluation of the follow-up is conducted consistent with the follow-up report submitted by the Auditee. In order to improve the completion of the follow-up of audit results at the Head Office, it is necessary to include follow-up closure as one of the elements in assessing the performance the Work Unit in question.

Penyimpangan Internal

Selama tahun 2017 tidak terdapat penyimpangan yang bersifat kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh Pegawai Indonesia Power.

Internal Fraud

No internal fraud was found to be committed by PT Indonesia Power employees in 2017.

Forum Auditor Internal

Forum Audit internal tahun 2017 telah dilaksanakan dalam dua kali penyelenggaraan yaitu pada:

1. Tanggal 12 s.d 14 Juli 2017 di Unit Pembangkitan Semarang dengan tema “Peningkatan Pemahaman Enterprise Resource Planning”
2. Tanggal 15 s.d. 17 November 2017 di Indonesia Power Kantor Pusat dan Bogor dengan tema “Transformasi Audit Internal untuk Peningkatan Efektivitas Pengendalian Perusahaan”.

Internal Auditor Forum

The 2017 Internal Audit Forum was organized twice on:

1. July 12-14, 2017 in Semarang GU titled “Improving ERP Awareness”.

2. November 15-17, 2017 at PT Indonesia Power Head Office and in Bogor with the theme “Internal Audit Transformation for Improved Effectiveness of Company Control”.

Penyerahan Laporan Berkala

Setiap Laporan Hasil Audit disampaikan langsung kepada manajemen dan pihak yang diaudit (auditee) dilengkapi dengan saran tindakan perbaikan, termasuk sanksi apabila diperlukan. Kemajuan tindakan harus dilaporkan oleh pihak yang diaudit kepada SATADI setiap bulan untuk memastikan agar setiap pihak yang diaudit selalu berupaya melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Laporan Manajemen SATADI dibuat setiap bulanan, triwulan dan tahunan yang disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan aktivitas audit internal di Perusahaan. Penyampaian Laporan SATADI kepada Komite Audit dilakukan setiap selesai Laporan Hasil Audit sesuai dengan kebutuhan.

Periodic Report Submission

Every Audit Report is submitted directly to the management and the auditee, completed by suggestions for corrective actions, and sanctions if deemed necessary. The progress of action has to be reported by the auditee to the Internal Audit on a monthly basis to ensure that the auditee always strives for improvement and refinement. Internal Audit Management Report is compiled monthly, quarterly and annually, to be submitted to related parties to fulfill its responsibility for internal audit activity in the Company. The Report to the Audit Committee is submitted every time the Audit Report is completed, as necessary.



SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
INTERNAL CONTROL

Sistem pengendalian di lingkungan bisnis Perusahaan berfungsi sebagai pencegah terjadinya kecurangan dan penyelewengan. Perusahaan berupaya menerapkan Sistem pengendalian internal Perusahaan sejalan dengan *Internal Control Framework* - COSO dan menuntut peran setiap elemen yang ada dalam Organisasi Perusahaan untuk dapat membentuk kerangka pengendalian yang efektif. Pengendalian internal adalah proses yang dirancang dan dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan anggota manajemen lainnya serta seluruh personil Perusahaan, yang ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Internal control system in Indonesia Power serves as a deterrent to cheating and fraud. The Company seeks to implement an internal control system commensurate with Internal Control Framework - COSO and urges every element in the organization to create an effective control framework. It also represents a process designed and run by the Board of Commissioners, Board of Directors and other members of the management, along with all the employees, to ensure effectiveness and efficiency of the Company operations, reliability of financial report and compliance with the prevailing regulations.

Pengendalian Intern atas Kegiatan Operasional dan Pelaporan Keuangan

Indonesia Power melakukan evaluasi atau penilaian atas efektivitas pengendalian internal pada tingkat korporat maupun tingkat operasional/aktivitas dengan menerapkan dan memelihara sistem pengendalian internal dan prosedur pelaporan keuangan yang memadai sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan Sistem Pengendalian Internal yang digunakan adalah *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR). Secara garis besar, pengendalian internal yang dilakukan Indonesia Power meliputi:

1. Menciptakan lingkungan pengendalian yang dapat mendukung efektivitas pengendalian internal antara lain: (a) Memastikan bahwa semua anggota manajemen Perusahaan memiliki integritas dan nilai etika yang tinggi; (b) Menetapkan filosofi Perusahaan yang disosialisasikan dan diterapkan kepada seluruh komponen didalam Perusahaan; (c) Membuat struktur organisasi yang memungkinkan dilakukannya pengendalian secara efektif; (d) Mendorong peranan aktif dari Komite Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan agar pengendalian internal dapat berjalan dengan efektif; (e) Menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas di antara unit organisasi; (f) Menetapkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang kompetitif.
2. Menerapkan kesadaran manajemen risiko kepada semua level manajemen Perusahaan.

Internal Control on Operations and Financial Reports

Indonesia Power evaluates or assesses the effectivity of internal control at the corporate level and operations/activities level by implementing and maintaining internal control system and procedures of adequate financial reports in accordance with the prevailing rules and legislations. Internal Control System in use is the ICoFR. Overall, Indonesia Power performs internal control of the following:

1. Creating controlled environment that supports the effectivity of internal control, such as: (a) Ensuring every member of Company's management has integrity and high ethical values; (b) Establishing the Company's philosophy, which is then socialized and implemented in every component in the Company; (c) Establishing organizational structures that enables effective controls; (d) Encouraging active roles from the Board of Commissioners' Committee to supervise and provide input so that the internal control can run effectively; (e) Establishing clear duties and responsibilities among the organizational units; (f) Establishing competitive human resource development policy.
2. Implementing risk management awareness to every level of Company's management.

3. Mempersiapkan sistem informasi yang memungkinkan pengendalian internal dilakukan secara efektif, efisien dan akurat.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan antara lain dengan: (a) Supervisi dari tiap tingkatan level manajemen di dalam Perusahaan; (b) Sistem pertanggungjawaban dan penilaian yang memungkinkan untuk melakukan penilaian terhadap setiap anggota manajemen dan unit-unit dalam organisasi Perusahaan; (c) Pelaksanaan pengawasan melalui audit internal yang dilakukan oleh SATADI; (d) Pelaksanaan pengawasan melalui pemeriksaan oleh pihak independen seperti Kantor Akuntan Publik; (e) Pengawasan oleh Dewan Komisaris atas seluruh pelaksanaan aktivitas manajemen Perusahaan yang dilakukan Direksi, termasuk pengawasan oleh Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan penasihatan terkait dengan proses kecukupan dan kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan, pengelolaan risiko dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang dibantu oleh Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko. Sedangkan Direksi menerapkan sistem pengendalian internal melalui penerapan kebijakan dan prosedur perusahaan secara konsisten dan memenuhi kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, baik terkait dengan kegiatan usaha Indonesia Power, penerapan manajemen risiko, perencanaan strategis, pembagian tugas dan pendelegasian wewenang yang jelas serta kebijakan akuntansi yang memadai. Satuan Manajemen Risiko bekerja sama dan/atau berkoordinasi dengan Satuan Audit Internal melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pengendalian internal (internal control) dalam berbagai kegiatan operasional perusahaan. Pengendalian internal di lingkungan Indonesia Power terus dievaluasi agar mampu mengikuti perkembangan usaha Perusahaan maupun regulasi yang berlaku.

3. Preparing information system that enables effective, efficient and accurate internal control.

4. Monitoring and evaluating, that is performed by among others [a] Supervision on every management level within the Company, [b] Accountability and assessment system that enable the evaluation of every member of management and units in the Company's organization, [c] Implementation of supervision through internal audit by the Internal Audit Unit, [d] Supervision through audit by independent party, such as a KAP, [e] Supervision by Board of Commissioners on all management activities conducted by the Directors, including supervision by Audit Committee and Risk Management Committee.

The Board of Commissioners supervises and provides input related to the adequacy and fairness process in compiling financial statements, risk management by taking into account the prudence principles, which is assisted by Audit Committee and Risk Management Committee. Directors applied internal control system through the Company's policy and procedures implementation consistently and in compliance with prevailing regulations, that is related to the business activity in Indonesia Power, risk management implementation, strategic planning, tasks division and clear authority delegation as well as adequate accounting policy. Risk Management Unit cooperates and/or coordinates with Internal Audit to conduct efforts in improving the internal control in various Company's operations. Internal control within Indonesia Power is continuously evaluated in order to follow the development of Company's business and the prevailing regulations.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
INTERNAL CONTROL

Internal Control over Financial Reporting (ICoFR)

ICoFR (*Internal Control over Financial Reporting*) merupakan proses yang didesain oleh, atau di bawah pengawasan pimpinan Perusahaan untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait dengan:

1. Keandalan pelaporan keuangan
2. Penyusunan laporan keuangan untuk pihak luar sesuai dengan pedoman yang berlaku

ICoFR berhubungan dengan pengelolaan risiko pelaporan keuangan, akan tetapi inisasi transaksi dan penyebab risiko terletak di banyak fungsi non keuangan. Dengan demikian, kekuatan pengendalian laporan keuangan dangat tergantung pada pengelolaan pengendalian pada proses-proses tersebut di fungsi non keuangan, antara lain pada proses pengelolaan pembangkit dan jasa O & M, proses pengadaan barang dan jasa serta proses pendukung lainnya. Indonesia Power telah mengeluarkan Keputusan Direksi Nomor 174.K/010/IP/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Kebijakan Implementasi Internal Control over Financial Reporting/ICOFR yang meliputi pengendalian tingkat transaksional dan berlaku di seluruh Unit dan Kantor Pusat Indonesia Power.

Adapun tahapan implementasi ICoFR Indonesia Power ditetapkan sebagai berikut:

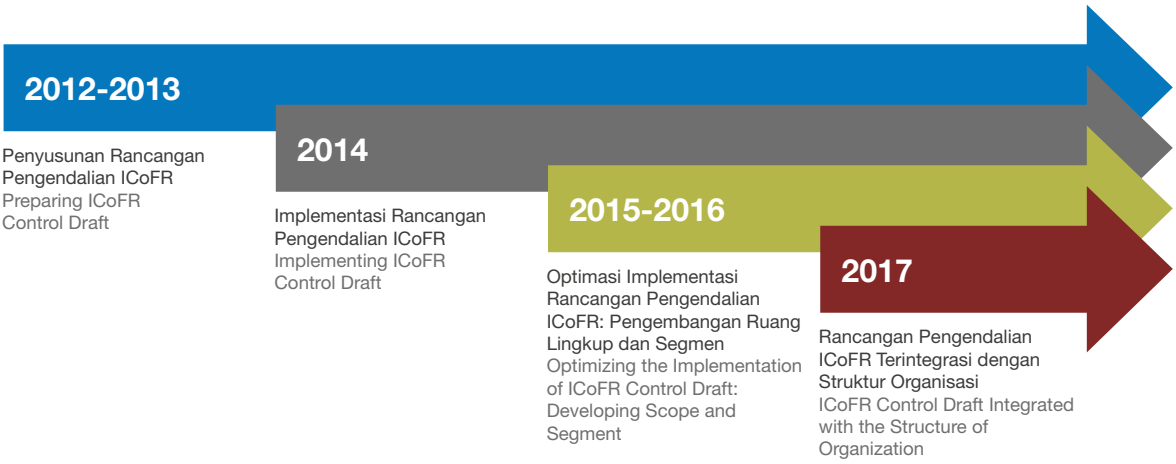
Internal Control over Financial Reporting

The ICoFR is a process designed by, or under the supervision of Company's leadership to provide assurance related to:

1. Reliability of financial statements
2. Compilation of financial reports for the external parties in line with the prevailing guidelines.

ICoFR is related to risk management on financial report, yet the transaction initiatives and the cause of risk lie in numerous non-financial functions. Therefore, the financial report control depends on the control management on the process in non-financial function, such as management process of generator and O&M services, procurement process of goods and services, as well as other supporting processes. Indonesia Power issued Directors' Decree No. 174.K/010/IP/2016 dated August 12, 2016 on the Implementation of Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) Policy, which consists of transactional level control and is applicable in every Unit and the Head Office of Indonesia Power.

The Implementation stages of ICoFR at Indonesia Power are set as follows:



Indonesia Power telah menetapkan implementasi ICoFR meliputi pengendalian tingkat transaksional yang terdiri dari segmen Pendapatan Penjualan Listrik, Biaya Operasi, Aset tetap, Persediaan, Pengembangan Proyek, Perbendaharaan, Perpajakan dan Pelaporan Keuangan. Pelaporan *Control Self Assessment* (CSA) telah dilakukan secara periodik melalui Aplikasi Online sejak 2016. Melalui penerapan ICoFR, diharapkan Indonesia Power dapat mencapai sasaran sebagai berikut:

Indonesia Power has determined that ICoFR implementation includes control at transactional level that consists of Revenue from Power Sales, Operating Costs, Fixed Assets, Supply, Project Development, Treasury, Taxation and Financial Reporting. The CSA reporting has been conducted regularly through online application since 2016. Through the ICoFR implementation, Indonesia Power is expected to achieve the targets explained below:



Kesesuaian Sistem Pengendalian Intern Dengan Kerangka (COSO - Internal Control Framework)

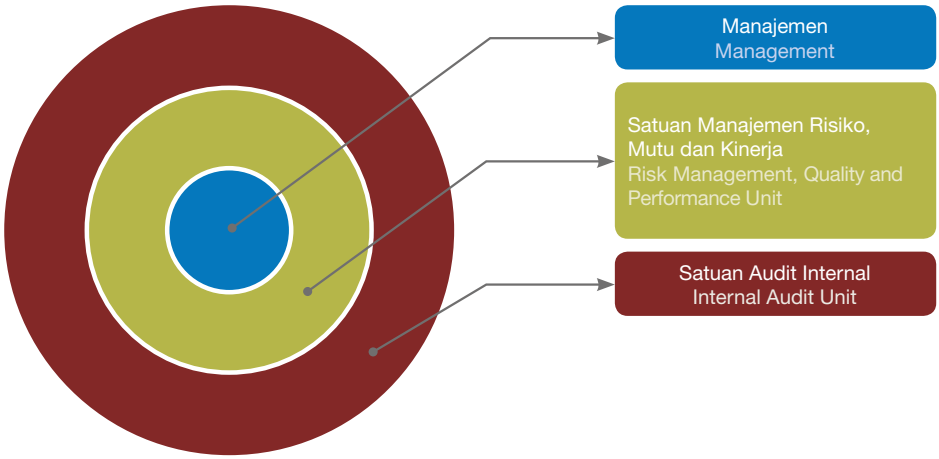
Salah satu implementasi tata kelola perusahaan yang baik adalah memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan secara efektif. Penerapan sistem pengendalian internal diarahkan untuk memastikan bahwa Perusahaan telah memiliki kehandalan laporan dan informasi keuangan, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional. Untuk itulah Indonesia Power terus berupaya menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif dengan melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai dalam Perusahaan mengacu pada prinsip-prinsip Internal Control-Integrated Framework yang diterbitkan oleh The Committee of Sponsoring Organization (COSO) of the Treadway Commission. Indonesia Power mengembangkan sistem pengendalian internal yang efektif untuk seluruh fungsi operasi dengan mekanisme pengawasan berjenjang (*three lines of defense*). Adapun skema sistem pengendalian internal Indonesia Power dapat dilihat pada gambar berikut:

Conformity of Internal Control System with COSO (Internal Control Framework)

One of the GCG practices is to ensure that internal control system runs effectively. Internal control system is directed to ensure that the Company is reliable in terms of financial reporting and information, compliance with the prevailing rules, as well as efficiency and effectivity in operational activities. Therefore, Indonesia Power keeps striving to implement internal control system effectively by involving the Board of Commissioners, Directors, and every employee in the Company, and referring to the Internal Control-Integrated Framework principles published by the Committee of Sponsoring Organization (COSO) of the Treadway Commission. Indonesia Power develops an effective internal control system for every operation functions with three lines of defense. The scheme for an internal control system in Indonesia Power can be seen in the figure:

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
INTERNAL CONTROL

Gambar Skema Sistem Pengendalian Intern Pengawasan Berjenjang
Figure: Scheme of Internal Control System with Three Lines of Defense



Keterangan:
1. Pengendalian Internal Lapis Pertama, dilaksanakan oleh pemilik proses bisnis (*Owners*)/Manajemen.
2. Pengendalian Internal Lapis Kedua, dilaksanakan oleh Satuan Manajemen Risiko, Mutu, dan Kinerja.
3. Pengendalian Internal Lapis Ketiga, dilaksanakan oleh Satuan Audit Internal.

Remark:
1. First Layer of Internal Control, conducted by owners of the business process/management.
2. Second Layer of Internal Control, conducted by Risk, Quality, and Performance Management Unit.
3. Third Layer of Internal Control, conducted by Internal Audit Unit.

Sesuai dengan prinsip-prinsip COSO *framework*, unsur pengendalian internal Indonesia Power terdiri dari: (1) Lingkungan Pengendalian; (2) Penilaian Risiko; (3) Aktivitas Pengendalian; (4) Informasi dan Komunikasi, serta (5) Pemantauan.

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan segala sesuatu yang dimiliki dan mempengaruhi pencapaian perusahaan untuk mencapai budaya sadar pengendalian, yang meliputi:

1. Nilai Integritas dan Etika sebagaimana diatur dalam Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) dan Indonesia *Power-Way*.
2. Komitmen terhadap kompetensi, yang ditetapkan dalam kebijakan SDM berbasis kompetensi (Sertifikasi).
3. Pengawasan terhadap manajemen dan Komite Audit, sebagaimana diatur dalam Board Manual, *Internal Audit Charter* dan *Audit Committee Charter*.
4. Filosofi manajemen dan gaya operasi, yang diatur lebih lanjut dalam kebijakan dan penerapan manajemen risiko.
5. Struktur organisasi, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab.

In line with COSO framework principles, internal control elements at Indonesia Power is composed of: 1] Controlled Environment, 2] Risk Assessment, 3] Controlled Activity, 4] Information and Communication, 5] Monitoring.

Controlled Environment

A controlled environment is everything that is owned and influences the Company's achievement to cultivate control awareness culture, which includes:

1. Integrity and Ethics as set forth in the Code of Conduct and Indonesia Power-Way.
2. Commitment to competency, which is set forth in the competency-based Human Resources policy (Certification).
3. Supervision on the management and Audit Committee, as stipulated in Board Manual, Internal Audit Charter, and Audit Committee Charter.
4. Management philosophy and operational style, further stipulated in policies and implementation of risk management.
5. Organizational structure as well as delegation of authorities and responsibilities.

Penilaian Risiko

Dalam menjalankan operasional bisnisnya, Indonesia Power memiliki potensi risiko yang perlu terus diidentifikasi dan diukur yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Penilaian risiko dilakukan melalui pelaksanaan *Maturity Level Assessment* manajemen risiko di Kantor Pusat dan Unit untuk memastikan bahwa risiko yang ada telah dikelola dengan baik dengan tindakan mitigasi yang diperlukan.

Aktivitas Pengendalian

Aktifitas sistem pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat oleh manajemen untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan, melalui:

1. Pembagian tugas, tanggung jawab dan kewenangan sesuai dengan fungsi dari masing-masing unit organisasi
2. Mempersiapkan sistem pencatatan data dan penyimpanan dokumen Perusahaan yang baik
3. Mempersiapkan sistem pengamanan data dan dokumen Perusahaan dengan baik
4. Manajemen SDM berbasis kompetensi
5. Komitmen penerapan manajemen risiko yang mengarah pada budaya sadar risiko
6. Melakukan penilaian atau pemeriksaan atas kinerja Perusahaan oleh pihak independen seperti oleh Kantor Akuntan Publik
7. Implementasi *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) secara konsisten dan efektif.

Informasi dan Komunikasi

Salah satu unsur penting dalam mendukung tercapainya sistem pengendalian internal yang efektif adalah pelaksanaan informasi dan komunikasi melalui berbagai forum komunikasi internal yaitu: (1) Sistem pelaporan formal; (2) Aplikasi sistem teknologi informasi, dan (3) Program komunikasi manajemen antara lain melalui Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, Rapat Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko, *coffee morning*.

Risk Assessment

In carrying out its business operations, Indonesia Power has potential risks, influenced by internal and external factors, which need to be continuously identified and measured. Risk assessment is conducted through Maturity Level Assessment of risk management at Head Office and Units, to ensure that the existing risks are managed properly with mitigation actions needed..

Controlled Activity

Controlled activities is a set of policies and procedures established by the management in order to achieve the goals set, through:

1. Delegation of tasks, responsibilities and authorities in line with the functions of each organization unit.
2. Preparation of a proper data recording and document storage system
3. Proper preparation of data security and the Company's document system
4. Competency-based Human Resources Management
5. Commitment to implement risk management to cultivate risk awareness culture
6. Assessment or audit on the Company's performance by a independent party such as KAP.
7. ICoFR implementation consistently and effectively.

Information and Communication

One important element to achieve effective internal control system is the implementation of information and communication through various internal communication forum, i.e.: (1) Formal reporting system; (2) Information technology system application, and (3) Management communication program, such as through the Board of Commissioners' Meetings, Directors' Meeting, Meeting of Audit Committee and Risk Management Committee and Coffee Morning.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
INTERNAL CONTROL

Pemantauan
Indonesia Power terus meningkatkan pemantauan implementasi sistem pengendalian internal, yang mencakup pengendalian keuangan maupun pengendalian operasional secara berkala. Tujuan pemantauan tersebut adalah untuk melihat, memastikan efektivitas pelaksanaan pengendalian internal antara rencana dan realisasi. Pemantauan dilakukan dengan pelaksanaan *assessment* oleh Satuan Perencanaan, Kinerja dan Manajemen Risiko Korporat serta dilakukan *assurance* secara berkala yang dilaksanakan oleh Satuan Audit Internal.

Monitoring
Indonesia Power continues to improve the monitoring of internal control system, which covers the financial control and operation control periodically. The objective is to observe and ensure the effectiveness of internal control, and draw a comparison between the plan and the realization. Monitoring is conducted through assessment by the Risk Management Unit as well as Quality and Performance Management Unit, and periodic assurance by the Internal Audit.

Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal
Indonesia Power secara berkesinambungan melakukan evaluasi efektivitas penerapan sistem pengendalian internal atas terjadinya perubahan kondisi internal dan eksternal sehubungan dengan ekspansi usaha dan peningkatan kapasitas yang terus berjalan. Hasil evaluasi menunjukan bahwa selama tahun 2017, sistem pengendalian internal Perusahaan telah berjalan efektif dalam mendukung kinerja operasional dan keuangan.

Sejak tahun 2012, Indonesia Power telah melakukan *Quality Assurance Review* terhadap fungsi SATADI dibantu oleh pihak independen. Pada tahun 2017 telah dilakukan *Quality Assurance Review* (QAR) oleh PT Bina Audita Indonesia terhadap Satuan Audit Internal Indonesia Power dan disimpulkan bahwa secara keseluruhan telah Memenuhi Sebagian (*Partially Conforms*) kesesuaiannya dengan Standar dan Kode Etik The Institute of Internal Auditors (IPPF-2016).

Evaluation of Internal Control System Effectiveness
Indonesia Power continuously evaluates the effectiveness of internal control system implementation with regard to any changes in internal and external situations in line with ongoing business expansion and capacity improvement. The result shows that the Company's internal control system in 2017 had run effectively in supporting operational and financial performance.

Since 2012, Indonesia Power has implemented a Quality Assurance Review (QAR) on Internal Audit's function, with the help of independent parties. In 2017, PT Bina Audita Indonesia conducted the QAR to assess PT Indonesia Power Internal Audit. It is concluded that the Company's performance Partially Conforms to the Standards and Code of Conduct set up by the Institute of Internal Auditors (IPPF-2016).

AUDIT EKSTERNAL
EXTERNAL AUDIT

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan Perusahaan dilakukan dengan melaksanakan Audit Eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Dalam penggunaan Auditor Eksternal, Indonesia Power mengacu pada ketentuan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

The function of independent monitoring over the Company's financial aspect is carried out through External Audit performed by a KAP. By engaging an External Auditor, Indonesia Power refers to Article 3 paragraph 1 of Regulation of the Minister of Finance No. 17/PMK.01/2008 dated February 5, 2008, specifying that the provision of general audit service to the financial statements of an entity shall be executed by a KAP for maximum six consecutive years and by a public accountant for a period of three consecutive years.

Penetapan Auditor Eksternal yang memeriksa laporan keuangan Perusahaan tahun buku 2017 ditetapkan melalui RUPS Tahunan tanggal 24 Mei 2017. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan. Auditor Eksternal bertanggung jawab untuk menyampaikan opini atas ketaatan Laporan Keuangan Perusahaan yang di audit terhadap Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum.

The appointment of an External Auditor in charge of examining the Company's financial statements for 2017 is set through the RUPS on May 24, 2017. To ensure independence and quality of the audit, the appointed External Auditor must not have any conflict of interest with the Company. External Auditor is responsible for giving the opinion on compliance of the audited financial statements with the prevailing Financial Accounting Standards.

Nama Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik dan Fee Audit

Sesuai arahan PT PLN (Persero) selaku pemegang saham mayoritas, terdapat 2 (dua) auditor eksternal yang melakukan audit di Indonesia Power, yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Ketentuan *fee* audit sepenuhnya menjadi tanggungan PT PLN (Persero) selaku Induk Perusahaan sekaligus pemegang saham Perusahaan. Pada tahun 2017, Akuntan Perusahaan yang ditunjuk dan dibiayai oleh PT PLN (Persero) adalah KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan. Selain melakukan audit umum, KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan tidak memberikan jasa konsultasi maupun jasa lainnya kepada Perusahaan.

Name of Public Accountant, Public Accounting Firm and Audit Fee

As per direction of PT PLN (Persero) as the majority shareholder, there are 2 (two) external auditors who perform audit in Indonesia Power, i.e. KAP and BPK. The responsibility for audit fee lies solely with PT PLN (Persero) as the Parent Company as well as the Company's shareholder. In 2017 the Public Accounting Firm appointed, and financed by PT PLN (Persero), was KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, and Partners. Other than general audit, this KAP did not provide consulting services or other services to the Company.

Berikut Kantor Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan selama 5 (lima) tahun terakhir.

The following is a list of Public Accounting Firms which audited the Company's Financial Statements in the last five years.

AUDIT EKSTERNAL
EXTERNAL AUDIT

Tabel Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan, Opini dan Fee Audit Tahun 2013-2017
Table: Public Accountant Office, Name of Accountant, Audit Opinion and Fee 2013-2017

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Publik Public Accountant	Ruang Lingkup Scope		Opini Audit Audit Opinion
2013	Osman Bing Satrio & Eny (Deloitte)	Sahat Maruli Purba Izin No.AP.0953	Laporan Keuangan Perusahaan, Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan, dan Laporan Audit Kepatuhan	Company's Financial Statements, Company's Performance Evaluation Statement, and Compliance Audit Report	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified Opinion
2014	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)	Harianto Sahari	Laporan Keuangan Perusahaan, Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan, dan Laporan Audit Kepatuhan	Company's Financial Statements, Company's Performance Evaluation Statement, and Compliance Audit Report	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified Opinion
2015	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)	Haryanto Sahari, CPA Izin No.AP.0223	Laporan Keuangan Perusahaan, Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan, dan Laporan Audit Kepatuhan	Company's Financial Statements, Company's Performance Evaluation Statement, and Compliance Audit Report	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified Opinion
2016	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Saptoto Agustomo, Izin No.AP.0499	Laporan Keuangan Perusahaan, Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan, dan Laporan Audit Kepatuhan	Company's Financial Statements, Company's Performance Evaluation Statement, and Compliance Audit Report	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified Opinion
2017	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Saptoto Agustomo, Izin No.AP.0499	Laporan Keuangan Perusahaan, Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan, dan Laporan Audit Kepatuhan	Company's Financial Statements, Company's Performance Evaluation Statement, and Compliance Audit Report	Wajar dalam semua Hal Yang material Unqualified Opinion in all material respects

Fee Audit

Ketentuan *fee audit* sepenuhnya ditetapkan oleh PT PLN (Persero) selaku Induk Perusahaan sekaligus pemegang saham. Nilai *fee* jasa audit KAP tahun buku 2017 yaitu sebesar Rp662.400.000 untuk Audit Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal untuk posisi & periode yang berakhir 31 Desember 2017.

Audit Fee

The audit fee is completely determined by PT PLN (Persero) as the parent company and shareholder. The fee for audit services rendered from the KAP hired in fiscal year 2017 equaled to Rp662,400,000 for audit of the Financial Statement, Performance Evaluation Report and Compliance to the Regulations and Internal Control Report for position and period ended on December 31, 2017.

Jasa Lain yang Diberikan Selain Jasa Audit Laporan Keuangan Tahunan

Pihak yang ditunjuk sebagai Akuntan Publik tidak memberikan jasa lain selain lingkup audit sebagaimana tersebut di atas.

Other Services Provided In Addition To Audit Services of Annual Financial Statement

Party appointed by the Company as Public Accountant does not provide any other services in addition to the scope of the audit mentioned-above.

Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal

Indonesia Power selalu berupaya meningkatkan komunikasi antara Kantor Akuntan Publik, Komite Audit dan Manajemen Perusahaan untuk dapat meminimalisir kendala-kendala yang terjadi selama proses audit berlangsung. Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan dan selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan, secara rutin dilakukan pertemuan-pertemuan yang membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan.

Komite Audit melakukan kajian atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal untuk memastikan pelaksanaan audit tidak menemui hambatan dan seluruh temuan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang ditetapkan. Direksi secara aktif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan auditor eksternal agar pelaksanaan audit berjalan efektif dan apabila terjadi kendala dalam obyek pemeriksaan dapat segera dicari solusi dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada. Direksi juga secara aktif melakukan pemantauan tindak lanjut temuan-temuan pemeriksaan audit eksternal dalam setiap rapat koordinasi antara Direksi dengan satuan-satuan kerja terkait serta melaporkan pelaksanaan tindak lanjut kepada Dewan Komisaris secara berkala.

Effectiveness of External Audit Implementation

Indonesia Power keeps striving to improve communication between the Management along with the Audit Committee and the KAP to minimize obstacles during auditing process. In order to ensure the audit proceeds pursuant to the Public Accountant Professional Standards as well as agreement and audit scope established, and completed in a timely manner, the Company holds meetings to discuss and resolve significant issues on hand.

The Audit Committee reviews the effectiveness of external audit to make sure that the audit does not encounter obstacles and all findings can be followed up in line with the authority established. The Directors actively coordinates and communicates with the external auditor so that the audit is carried out effectively, and in the event of obstacles with the objects placed under audit, solutions can be found quickly to overcome such problems. The Board of Directors also actively monitors follow-up on the external audit findings in every coordination meeting between the Board and related work units and report the follow-up to the Board of Commissioners on a regular basis.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Indonesia Power sebagai perusahaan yang bergerak dalam penyediaan energi listrik melalui pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit tentunya dihadapkan pada berbagai risiko yang mungkin terjadi. Perusahaan menyadari kegagalan operasi dan pemeliharaan pembangkit akan menimbulkan *multiplier effect* berupa tidak tersedianya energi listrik dan dampak lain berupa penurunan laba Perusahaan serta menurunnya reputasi perusahaan yang akan dirasakan oleh pemangku kepentingan. Oleh karenanya, pengelolaan risiko senantiasa diterapkan secara berkesinambungan dan menyatu dengan proses pengambilan keputusan untuk membuat pengelolaan risiko menjadi bagian dari budaya kerja korporasi.

As a company engaged in the power business, Indonesia Power through its operating and maintenance units has various risks that it might face along the way. The Company realizes that failures in operating and maintaining a power plant would cause multiplier effects, such as insufficient supply of electricity and decrease in the Company's bottom line, as well as disrepute that will in turn affect the stakeholders. Therefore, risk management is conducted continuously and integrated into decision making processes so that it could be established as an integral part of the corporate culture.

> Pada tahun 2017, Indonesia Power memperoleh penghargaan ASEAN Risk Champion dan Risk Manager of the Year dalam ajang ASEAN Risk Awards 2017 sebagai bukti manajemen pengelolaan risiko terbaik.
>
> Indonesia Power won ASEAN Risk Champion and Risk Manager of the Year in the ASEAN Risk Award 2017, attesting to the best risk management capability that the Company possesses.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko

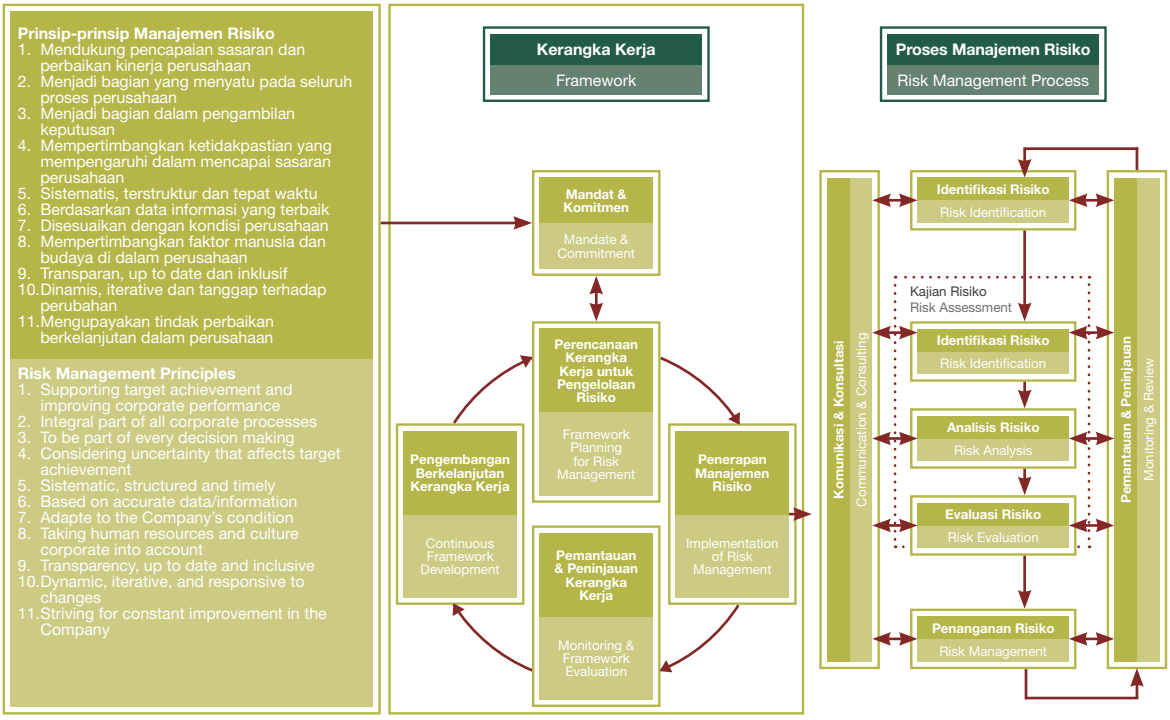
Dalam rangka penerapan manajemen risiko secara terintegrasi, Indonesia Power telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko Korporat dan menerapkan *Enterprise Risk Management* (ERM) untuk seluruh fungsi Organisasi, dengan mengadaptasi standar sistem manajemen dan *best practice*. Sesuai prinsip-prinsip manajemen risiko, Perusahaan menetapkan bahwa pengelolaan risiko harus menjadi bagian yang menyatu dalam proses bisnis dan harus diinternalisasikan menjadi bagian dari budaya Perusahaan.

Indonesia Power mengimplementasikan Sistem Manajemen Risiko sesuai dengan framework ISO 31000 untuk menghasilkan praktik manajemen risiko dengan perspektif lebih luas, mudah dipahami, terukur serta mendukung koordinasi dan integrasi antar unit kerja di Perusahaan. Penerapan Sistem Manajemen Risiko di Perusahaan terdiri dari tahapan pengelolaan risiko yang sistematis.

Risk Management Framework

In an effort to achieve integrated risk management, Indonesia Power has formulated and stipulated a Corporate Risk Management Policy and applied Enterprise Risk Management (ERM) for all organizational functions, by adopting the standards for management system and best practice. In keeping with the principles of risk management, the Company established that risk management must be inseparable of its business process and be internalized as part of the corporate culture.

Indonesia Power implements its Risk Management System in reference to ISO 31000 framework to conduct risk management practices with a broader perspective that is easy to understand, measurable and capable of supporting coordination and integration among work units in the Company. The implementation of Risk Management System in Indonesia Power consists of systematic risk management stages.



Struktur Organisasi Manajemen Risiko

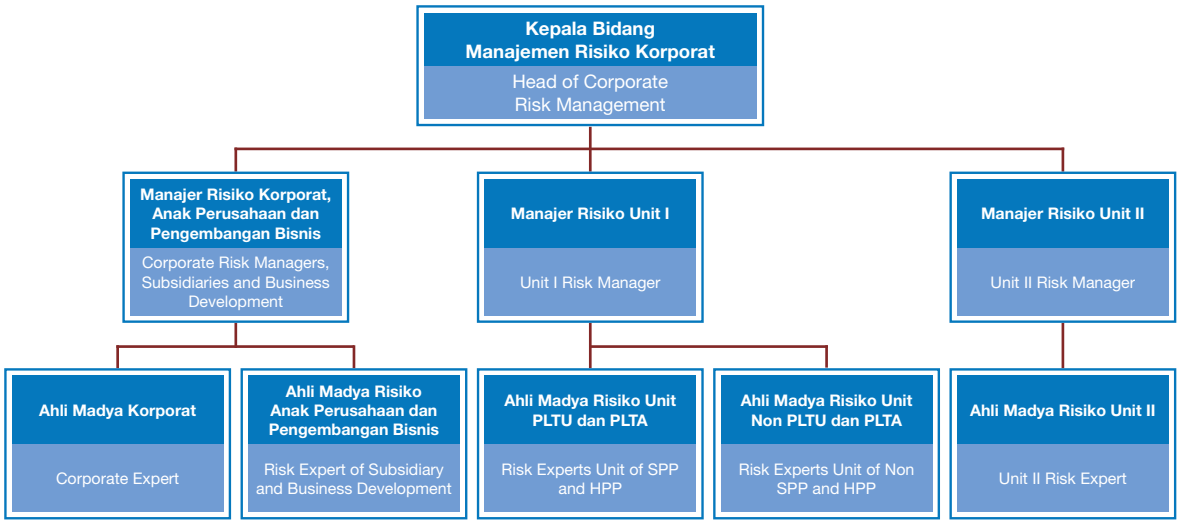
Pelaksanaan fungsi manajemen risiko korporat berada pada Satuan Perencanaan, Kinerja dan Manajemen Risiko Korporat berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 205.K/010/IP/2017 tentang Bagan Susunan Jabatan, Tingkat Jabatan dan Formasi Jabatan pada Satuan Perencanaan, Kinerja dan Manajemen Risiko Korporat. Fungsi pengelolaan risiko secara khusus tersebut merupakan bagian dari langkah preventif yang dilaksanakan Indonesia Power sehingga setiap risiko yang mungkin terjadi dalam perjalanan bisnis dapat diidentifikasi sejak dini. Selain itu, berfungsi untuk memastikan mekanisme pengelolaan risiko berjalan efektif sebagaimana diatur dalam prosedur, pedoman dan manual manajemen risiko yang disesuaikan dengan konteks usaha bidang pembangkitan sehingga mewujudkan sistem tata kelola Indonesia Power yang kuat untuk selanjutnya mampu memberikan kepastian yang wajar atas pencapaian sasaran Perusahaaan ke depan. Berikut struktur organisasi Manajemen Risiko Indonesia Power tahun 2017:

Risk Management Organizational Structure

The implementation of corporate risk management lies with the Planning, Performance and Corporate Risk Management Unit in accordance with Directors' Decree No. 205.K/010/IP/2017 on Organizational Structure of Position Title, Rank and Formation in the Planning, Performance and Corporate Risk Management Unit. Risk management function is specifically a part of preventive measures Indonesia Power takes so that each potential risk in the business journey can be identified early on. In addition, the function is to ensure an effective risk management mechanism as regulated in the procedure, guideline and manual consistent with the context of power generation business, so as to cultivate strong governance system within the Company that provides reasonable assurance in achieving the future targets. Indonesia Power's Risk Management Organizational Structure in 2017 is as follows:

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Struktur Organisasi Satuan Perencanaan, Kinerja dan Manajemen Risiko Korporat Tahun 2017
Organizational Structure of Planning, Performance and Corporate Risk Management Unit in 2017



Profil Kepala Satuan Perencanaan, Kinerja dan Manajemen Risiko Korporat



Rachmad Handoko
Kepala Satuan Perencanaan, Kinerja dan Manajemen Risiko Korporat
Head of Planning, Performance and Corporate Risk Management Unit

Kepala Satuan Perencanaan, Kinerja dan Manajemen Risiko Korporat saat ini dijabat oleh Sdr. Rachmad Handoko. Berdomisili di Bekasi. Meraih gelar Sarjana Elektro/Listrik dari Institut Teknologi Sepuluh November tahun 1993. Menjabat sebagai Kepala Satuan Perencanaan, Kinerja dan Manajemen Risiko Korporat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Indonesia Power Nomor 216.K/020/IP/2017.

Sebelum menjabat sebagai Kepala Satuan Perencanaan, Kinerja dan Manajemen Risiko pada tahun 2017, beliau menjabat sebagai Kepala Satuan Audit Internal PT Indonesia Power tahun 2015 – 2017, Ahli Senior Manajemen Proyek Tugas Karya Ke PT CDB tahun 2009-2015, Ahli Senior Manajemen Perubahan tahun 2006-2009, Enjinir Listrik tahun 2004 – 2006.

Pendidikan dan Pelatihan yang pernah diikuti diantaranya: Audit Internal Dasar Tingkat I, Forum Auditor 2015, Forum Audit Internal Implementasi SCM 2015, IHT Assessment GCG 2015, IHT Governance, Risk And Compliance, Workshop Implementasi Aplikasi Upgrade ProRBA, Audit Intern Tingkat II, Ws. Penguatan Internal Control dan Manajemen Risiko 2016 dan Workshop Capacity Building for Senior Leaders.

Profile of the Head of Planning, Performance and Corporate Risk Management Unit

The current Head of Planning, Performance and Corporate Risk Management is Mr. Rachmad Handoko. He lives in Bekasi, and achieved Electrical Engineering of Institut Teknologi Sepuluh November in 1993. He served as the Head of Planning, Performance and Corporate Risk Management Unit based on Directors' Decree No. 216.K/020/IP/2017.

Before serving as the Head of Planning, Performance and Corporate Risk Management Unit in 2017, Mr. Rachmad Handoko was the Head of PT Indonesia Power Internal Audit (2015-2017), Senior Expert of Project Management with PT CDB (2009-2015), Senior Expert of Change Management (2006-2009), Electrical Engineer (2004-2006).

Several training programs he took part in are: Basic Internal Audit Level I, Auditor Forum 2015, Forum on Internal Audit of SCM Implementation 2015, IHT Assessment of GCG 2015, IHT Governance, Risk and Compliance, ProRBA Application Upgrade Workshop, Internal Audit Level II, Internal Control and Risk Management Strengthening Workshop 2016, and Capacity Building For Senior Leaders Workshop.

Komitmen Penerapan Manajemen Risiko

Wujud mandat dan komitmen Penerapan Manajemen Risiko Korporat dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip, penjabaran tugas pokok dan tanggung jawab utama pengelolaan risiko di seluruh lingkungan perusahaan. Adapun pembagian tugas pengawasan dan pengelolaan manajemen risiko di Indonesia Power dilakukan sebagai berikut:

Commitment on the Implementation of Risk Management

The mandate and commitment of the Implementation of Corporate Risk Management are carried out based on the principles and elaboration of the main duties and responsibilities of risk management in all the Company's work units. The following is the table of delegation of responsibilities for monitoring and managing risk management at Indonesia Power:

Pihak/Pengelola Manager	Pokok dan Tanggung Jawab Utama Main Duties and Responsibilities	
Dewan Komisaris Board of Commissioners	• Mengawasi pelaksanaan pengelolaan risiko di tingkat korporat. • Memastikan adanya upaya pengawasan yang efektif, proaktif dan berkesinambungan atas berlangsungnya pelaksanaan pengelolaan risiko di tingkat korporat.	• Monitoring the implementation of risk management on corporate level. • Ensuring effective, proactive and continuous monitoring effort for risk management implementation at corporate level.
Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee	Mengawasi penerapan manajemen risiko korporat secara efektif, sesuai dengan Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Korporat yang berlaku.	Monitoring the implementation of effective corporate risk management commensurate with the prevailing Corporate Risk Management Policy.
Komite Audit Audit Committee	Mengawasi pelaksanaan fungsi audit internal perusahaan dapat terlaksana secara efektif, proaktif dan berkesinambungan, termasuk di pengawasan atas keberlangsungan pengelolaan risiko yang dilakukan oleh perusahaan.	Supervising the implementation of effective, proactive and continuous internal audit function, including monitoring on the continuity of risk management conducted by the Company.
Direksi Board of Directors	• Memastikan terbangunnya sistem pengelolaan manajemen risiko korporat. • Memastikan tersedianya profil risiko korporat. • Penanggung jawab utama pelaksanaan pengelolaan risiko di tingkat korporat. • Memastikan keberlangsungan pelaksanaan pengelolaan risiko perusahaan secara efektif, proaktif dan berkesinambungan sesuai dengan Peraturan dan Kebijakan yang berlaku serta elemen tata kelola Manajemen Risiko Korporat (kriteria dampak dan kemungkinan, format peta risiko, standar respon risiko, kebijakan Manajemen Risiko). • Memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam penerapan manajemen risiko (SDM, finansial serta infrastruktur pendukung lainnya) • Sebagai pengambil keputusan dalam pengelolaan risiko di tingkat korporat.	• Ensuring the establishment of corporate risk management system. • Ensuring the availability of corporate risk profile. • The key party in charge of risk management at corporate level. • Ensuring effective, proactive and continuous corporate risk management in accordance with the prevailing Regulations and Policies, as well as consistent with the elements of Corporate Risk Management governance (impact and possibility criteria, risk mapping format, risk response standard and Risk Management Policy). • Ensuring the availability of necessary resources in implementing risk management (human resources, finance and other supporting infrastructure). • Decision maker in risk management on corporate level.
Satuan Perencanaan, Kinerja dan Manajemen Risiko Korporat Planning, Performance, and Risk Management Corporate	• Membangun sistem pengelolaan risiko, memastikan keberlangsungan pelaksanaan pengelolaan risiko secara efektif, proaktif dan berkesinambungan di seluruh tingkatan perusahaan. • Memastikan keberlangsungan pelaksanaan pengelolaan risiko secara efektif, proaktif dan berkesinambungan di berbagai tingkatan perusahaan melalui fasilitasi dan konsultasi (serta rekomendasi) terhadap para pemilik risiko dalam melakukan pengelolaan risiko di area tanggung jawab masing-masing. • Memastikan pelaksanaan mitigasi risiko atas kegiatan yang diverifikasi telah sesuai dengan rencana dan berhasil menurunkan level risiko ke level yang dapat diterima Perusahaan. • Melaporkan pelaksanaan manajemen risiko korporat kepada Direksi.	• Building risk management system, ensuring the implementation of effective, proactive and continuous risk management at all levels within the Company. • Ensuring the continuity of effective, proactive and continuous risk management on various corporate levels through facilitation and consultation (as well as recommendation) with the risk owner in risk managing each area of responsibility. • Ensuring risk mitigation of activities verified against the relevant plan in order to decrease risk levels to levels acceptable by the Company. • Reporting the implementation of corporate risk management to the Board of Directors.
Pemilik Risiko Risk Owner	• Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan risiko (berikut pelaporannya) secara efektif, proaktif dan berkesinambungan pada area tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka melakukan suatu upaya pemastian atas pencapaian sasaran perusahaan di tingkatnya masing-masing. • Melakukan pengelolaan risiko (berikut pelaporannya) yang dihadapi secara efektif, proaktif dan berkesinambungan.	• Responsible for conducting risk management and its reporting in effective, proactive and continuous manner in keeping with each role and area of responsibility as a way to ensure achievement of their respective target. • Managing the risk and its report using effective, proactive and continuous methods.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Pihak/Pengelola Manager	Pokok dan Tanggung Jawab Utama Main Duties and Responsibilities	
Satuan Audit Internal Internal Audit Unit	• Membantu Direksi dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan penerapan pengelolaan risiko terhadap kebijakan dan prosedur perusahaan yang berlaku berikut dengan pengajuan rekomendasi tindakan korektif/perbaikan yang diperlukan. • Melaksanakan pemeriksaan/audit atas dokumentasi/ pelaporan manajemen risikomelalui audit internal maupun koordinasi dengan auditor eksternal. • Melaksanakan pemeriksaan/audit bahwa risiko-risiko yang berpotensi mempengaruhi pencapaian sasaran Perusahaan telah dikelola dengan baik dan efektif.	• Assisting the Board of Directors in identifying incompliance in risk management with the applicable corporate procedures and policies through submission of recommended corrective actions. • Auditing documentation/reporting of risk management through both internal and external auditor. • Auditing potential risks so that those which may affect achievement of the Company's target are effectively and properly managed.

Roadmap Enterprise Risk Management (ERM)

Indonesia Power telah menyusun Roadmap Manajemen Risiko tahun 1995 sampai 2020. *Roadmap* ERM merupakan acuan pelaksanaan tugas Satuan Perencanaan, Kinerja dan Manajemen Risiko Korporat. *Roadmap* ini disusun berdasarkan penerapan manajemen risiko berbasis *governance*, yang mengklasifikasikan tiga aspek dalam proses implementasi manajemen risiko, yaitu:

1. Aspek struktural, yaitu aspek yang memastikan arah penerapan, struktur organisasi, penerapan dan akuntabilitas pelaksanaan manajemen risiko dalam organisasi, penyediaan sumber daya dan sebagainya;
2. Aspek operasional, yaitu aspek yang menunjukkan tahapan proses implementasi yang sistematis dan terarah, mulai dari penyusunan Pedoman Manajemen Risiko Perusahaan, *briefing* untuk Komisaris, Direktur dan *Senior Leader*, serta pelatihan para pemangku risiko hingga penerapannya;
3. Aspek perawatan, yaitu aspek yang memastikan adanya upaya menjaga efektivitas penerapan dan perbaikan yang berkesinambungan melalui *monitoring* dan *review* serta *maturity level assessment* manajemen risiko.

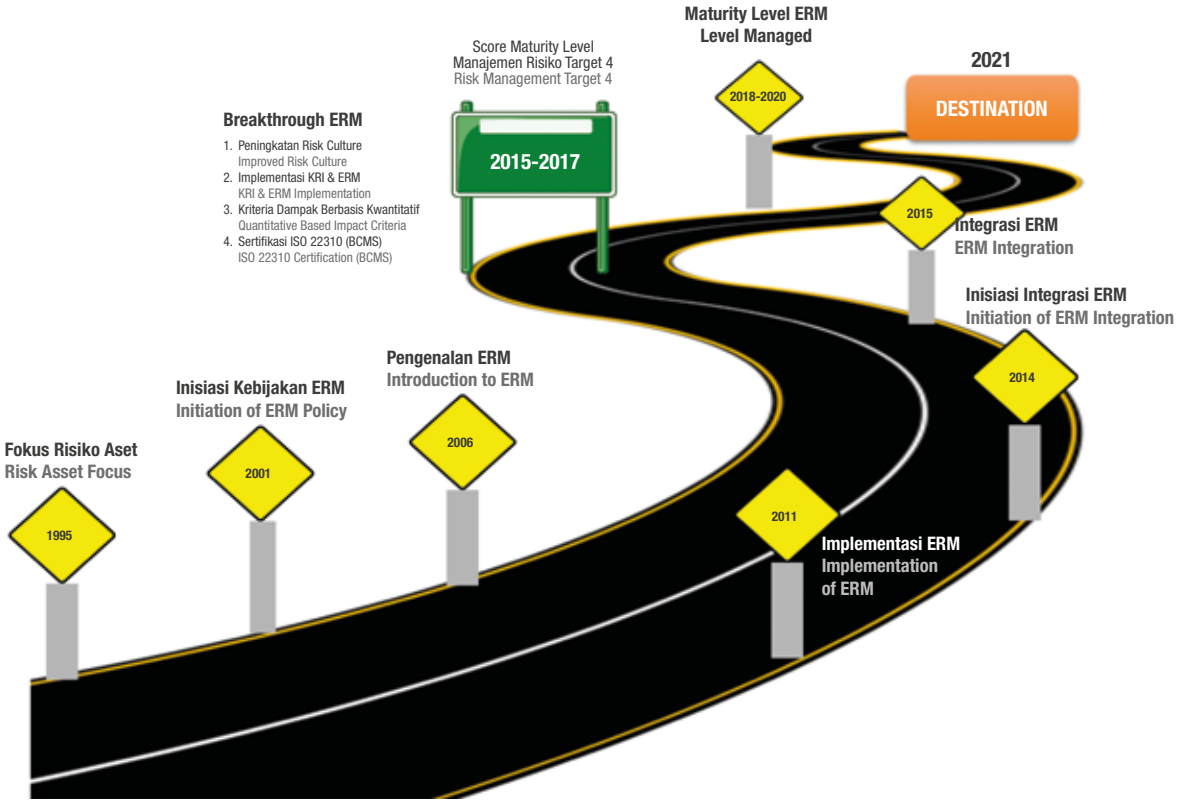
The ERM Roadmap

Indonesia Power had formulated a Roadmap of Risk Management for the years 1995-2020. The Roadmap serves as a reference in fulfilling the duties of the Planning, Performance and Corporate Risk Management Unit. This roadmap was written based on the governance-based risk management that classifies three aspects in risk management process as follows:

1. Structural aspect as the aspect that ensures direction of the risk management implementation together with its organizational structure, accountability within the organization, availability of resources and so on.
2. Operational aspect as the aspect that demonstrates systematic and guided implementation stages, right from the preparation of Corporate Risk Management Guidelines; briefing to the Board of Commissioners, Board of Directors and Senior Leader; and training for the risk holders down to its implementation.
3. Maintenance aspect as the aspect that ensures the effectiveness of implementation and continuous improvement through monitoring and review as well as maturity level assessment in risk management.

Dengan adanya *Roadmap* Manajemen Risiko diharapkan langkah-langkah dalam perencanaan dan pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan akan lebih terarah. Berikut *Roadmap* Manajemen Risiko Indonesia Power tahun 1995-2020:

With the presence of such Roadmap, it is expected that stages in the planning and implementation of corporate risk management be better oriented. The following is the ERM Roadmap of Indonesia Power for 1995-2020:



Business Continuity Management System

Penerapan manajemen risiko di Indonesia Power telah mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan Perusahaan. Beberapa aktivitas utama Indonesia Power telah dipetakan, yang jika terpapar krisis dapat mengakibatkan tidak tersedianya energi listrik. Oleh karena itu, Indonesia Power berupaya membentuk *Business Continuity Management System* (BCMS) yang terintegrasi dengan proses manajemen risiko sebagai bentuk penanganan risiko. BCMS berperan dalam upaya meminimalisir dampak dari krisis terhadap aktivitas utama Indonesia Power sebagai penyedia energi listrik. Penerapan BCMS akan dimulai dari *awareness* terhadap krisis sampai ke langkah-langkah yang dilakukan saat krisis terjadi.

Business Continuity Management System

Indonesia Power has identified risks that might obstruct Company's objectives achievement in the implementation of risk management within. Several core activities of Indonesia Power have been mapped out, ones that would cause the unavailability of electrical energy had they been exposed to crisis. Therefore, Indonesia Power established Business Continuity Management System (BCMS) that is integrated with risk management process as a form of risk management. BCMS serves to minimize the impact of crisis towards core activities of Indonesia Power as an electrical energy supplier. The implementation of BCMS starts from the awareness towards crisis stage up until the steps required to be carried out when crisis arises.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Pada tahun 2017 Indonesia Power telah menerapkan ISO 22301 tentang *Business Continuity Management* sampai dengan sertifikasi ISO 22301. ISO 22301 adalah standar internasional yang menentukan persyaratan untuk menerapkan Sistem *Business Continuity Management* (BCM). Standar ini memberikan panduan bagi organisasi untuk membangun dan terus meningkatkan sebuah sistem kelangsungan bisnis yang memungkinkan mereka untuk mengurangi terjadinya suatu peristiwa yang mengganggu, merespons secara efektif ketika terjadi gangguan, dan cepat pulih jika kasus peristiwa serupa itu muncul.

In 2017, Indonesia Power implemented ISO 22301 on the Business Continuity Management until it obtained ISO 22301 Certification. ISO 22301 is an international standard that sets up requirements for implementing the BCMS. This standard provides a guideline for organizations to build and constantly improve a sustainable business system that enable them to minimize any potentially disrupting incident, to respond effectively when an incident takes place and to quickly recover if similar incident occurs in the future.

Program Kerja dan Realisasi Implementasi Manajemen Risiko Tahun 2017

Work Program and Risk Management Implementation in 2017

Program Kerja Work Program		Realisasi Implementasi Implementation
Set Up dokumen BCM-ISO 22301	BCM-ISO 22301 Document Set Up	100%
Pengembangan *Key Risk Indicator* (KRI) & *Early Warning System* (EWS)	Development of Key Risk Indicator (KRI) & Early Warning System (EWS)	50%
Kebijakan Tentang: Standar baku kompetensi jabatan terkait ERM pada setiap jenjang jabatan	Policy on the standard competencies for ERM-related position in each rank	Realokasi ke tahun 2018 Rescheduled to 2018
Implementasi KRI & EWS	Implementation of KRI & EWS	Realokasi ke tahun 2018 Rescheduled to 2018
Kebijakan Tentang: Persyaratan pelatihan manajemen risiko pada fungsi manajemen risiko pada tingkat Pusat dan Unit.	Policy on the requirement for Risk Management Training in risk management function at Head Office and Unit levels.	Realokasi ke tahun 2018 Rescheduled to 2018
Sertifikasi ISO 22301 (BCM)	ISO 22301 (BCM) Certification	100%
Draft Agregasi profil Risiko 2018 di Pro-RBA	Draft Aggregated Risk Profile at Pro-RBA	100%
Pengembangan Aplikasi New Pro-RBA (IRMA)	Development of Pro-RBA New Application (IRMA)	100%
Laporan Kegiatan ERM ke Komite Dewan Komisaris	ERM Activity Report to Committees under the Board of Commissioners	100%
Rekonsilasi Laporan Mitigasi Risiko Semester I & II Tahun 2017.	Reconciliation of Risk Mitigation Report in Semester I & II 2017.	100%
Peningkatan *Awareness* ERM tingkat Eksekutif & *Senior Leader* (BCM)	ERM Awareness Improvement on executive & Senior Leader (BCM) levels	100%
Capacity Building Risk Management for Senior Leader (sertifikasi senior leader)	Capacity Building Risk Management for Senior Leader (senior leader certification)	100%
Training *Awareness* ISO 22301 (BCM)	ISO 22301 (BCM) Awareness Training	Realokasi ke tahun 2018 Rescheduled to 2018
Training Audit Internal ISO 22301 (BCM)	ISO 22301 (BCM) Internal Audit Training	Realokasi ke tahun 2018 Rescheduled to 2018
Training ERM tingkat Internasional	ERM International level training	100%
Workshop Penyusunan profil Risiko 2018	Risk Profiling Workshop 2018	100%
Capacity Building Risk Culture Senior Leader	Capacity Building Risk Culture Senior Leader	100%
Penetapan *Risk Profile* Korporat-Unit tahun 2017	Determining Risk Profile Corporate-Unit 2017	100%
Verifikasi DMR Usulan Anggaran Investasi (UAI) 2017 & Program Strategis 2017.	DMR Verification on Investment Budget Proposal (UAI) 2017 & Strategic Program 2017.	100%
Risk Mapping	Risk Mapping	100%
Benchmark Manajemen Risiko	Risk Management Benchmarking	100%
Assesment Maturity Level ERM Semester I	ERM Maturity Level Assessment Semester I	100%
Risk Survey	Risk Survey	100%

Program Kerja Work Program		Realisasi Implementasi Implementation
Forum Manajemen Risiko IP-AP 2017	IP-AP Risk Management Forum 2017	100%
Audit Internal ISO 22301	ISO 22301 Internal Audit	100%
Assesment Maturity Level ERM Semester II	ERM Maturity Level Assessment Semester II	100%
ERM maturity level 3.8	ERM Maturity Level 3.8	100%
ASEAN Award (Risk Champion & GRC Award)	ASEAN Award (Risk Champion & GRC Award)	100%
Pengesahan Profil Risiko Korporat 2018	Stipulation of Corporate Risk Profile 2018	100%
Penetapan Kriteria Dampak secara Kwantitatif	Determination of Quantitative Impact Criteria	Realokasi ke tahun 2018 Rescheduled to 2018
Penetapan Kebijakan BCM semua Unit	Ratification of BCM Policy for all Units	Realokasi ke tahun 2018 Rescheduled to 2018

Profil Risiko

Indonesia Power terus berupaya mengimplementasikan manajemen risiko secara efektif pada setiap jenjang organisasi perusahaan yaitu korporat dan unit dengan mempertimbangkan prioritas dan manfaat tiap program kerja/proyek bagi kelangsungan perusahaan. Dalam rangka menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dalam perusahaan, maka sebagai bentuk komitmen manajemen dalam implementasi GCG tersebut, Indonesia Power telah menyusun Profil Risiko Perusahaan tahun 2017 sebagai acuan dalam menyusun dari RKAP 2017, yang menunjukkan identifikasi atas risiko-risiko utama (*key risk*) yang akan mempengaruhi pencapaian sasaran perusahaan tahun 2017, beserta rencana pengelolaannya guna memberikan keyakinan akan tercapainya sasaran, dan sumber daya perusahaan dapat dimanfaatkan dengan lebih optimal. Dengan pendekatan yang komprehensif dalam mengelola risiko-risiko perusahaan secara menyeluruh diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja perusahaan sehingga menghasilkan *value added* bagi segenap pemangku kepentingan.

Risk Profile

Indonesia Power constantly implements an effective risk management on every rank of company's organization, that is on the corporate and unit level, taking into accounts the priority and benefit of each work/project program within the Company's sustainability. In implementing good corporate governance within the Company, as a form of managerial commitment in GCG implementation, Indonesia Power prepared Corporate Risk Profiles in 2017 used as the reference in preparing of RKAP 2017, that shows the identification of key risks that would affect company's targets achievement in 2017, along with the management plan to provide trust in achieving company's targets and for company's resources to be utilized optimally. Through a comprehensive approach in managing corporate's risks thoroughly, it is hoped that company's performance can be improved to provide added values for all stakeholders.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Peta Risiko 2017

Pelaksanaan program kerja strategis dan operasional merupakan tindakan mitigasi risiko Perusahaan. Indonesia Power telah mengelola risiko usahanya secara efektif dengan peta risiko. Penyusunan Profil Risiko tahun 2017 dilakukan dengan mengacu pada sasaran, faktor internal dan eksternal serta, dan fokus Perusahaan tahun 2017, yang telah diselaraskan dengan rencana jangka panjang perusahaan sebagaimana tergambar pada peta risiko dibawah ini.

Risk Mapping in 2017

The implementation of strategic and operational work program is Company's risk mitigation action. Indonesia Power has managed its business risks effectively by mapping possible risks. The formulation of Risk Profile in 2017 was carried out accordingly to company's target, internal and external factors and focus in 2017, that had been synchronized with RJP as illustrated in the following risk map.

Gambar Peta Risiko Tahun 2017
Figure: Risk Mapping in 2017

Peta Risiko PT Indonesia Power Tahun 2017 (Hasil *Review*)
PT Indonesia Power Risk Map 2017 (Review Result)

	Sangat Besar Very Large	E	Moderat Moderate	Moderat Moderate	Tinggi High	Ekstrem Extreme O.2.2	Ekstrem Extreme S.5.1; O.4.1
	Besar Large	D	Rendah Low	Moderat Moderate	Tinggi High	Tinggi High	Ekstrem Extreme O.2.3; O.4.4
	Sedang Medium	C	Rendah Low	Moderat Moderate	Tinggi High	Tinggi High	Ekstrem Extreme P.2.3
	Kecil Small	B	Rendah Low	Rendah Low	Moderat Moderate	Tinggi High	Ekstrem Extreme
	Sangat Kecil Very Small	A	Rendah Low	Rendah Low	Moderat Moderate	Tinggi High	Tinggi High
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan Not Significant	Minor	Medium	Major	Malapetaka Disaster
			Dampak Impact				

Tahun 2017, Perusahaan menghadapi beberapa risiko utama antara lain:

1. Risiko K3: Terjadi kecelakaan kerja (O.2.3) dengan tingkat risiko ekstrem 5,D=5D (Dampak malapetaka, Kemungkinan: besar).
   Sebagaimana industri besar lainya, lingkungan pembangkit memiliki risiko atas keamanan, kesehatan & keselamatan kerja serta Lingkungan Hidup; khususnya di PLTU Batubara antara lain terhadap kemungkinan ledakan dan kebakaran, kecelakaan kerja, gempa, banjir dll

In 2017 the Company faced some key risks, such as:

1. OHS Risk: Accident occurred (0.2.3) with an extreme risk level of 5,D=5D (which means, "Catastrophic" in terms of Impact and registers as "High" on the scale of Possibility).
   As with other large scale industries, power generating environment poses risks of security, occupational healthy and safety, as well as environment, especially in coal steam power plant, such as the possibility of explosion and fire, work accident, earthquake, flood, and so on.

2. Risiko Bisnis: Terancamnya Bisnis Perusahaan (S.5.1) dengan tingkat risiko ekstrem 5,E=5E (Dampak: Malapetaka, Kemungkinan: Sangat Besar)
   Pangsa pasar Penjualan Listrik PT Indonesia Power mengalami tren penurunan dalam lima tahun terakhir, seiring dengan bermunculannya pembangkit-pembangkit baru yang dibangun oleh PLN ataupun IPP.
3. Risiko Pendanaan Proyek: Belum tersedianya Dana atau Kesulitan dalam mendapatkan pendanaan Proyek (P.3.2) dengan tingkat risiko ekstrem 5,C=5C (dampak: Malapetaka, Kemungkinan: Sedang)
   Perusahaan terikat Indenture Covenant Global Bond PT PLN (Persero) sehingga tidak dapat memperoleh pendanaan investasi ekternal.
4. Risiko Efisiensi: Realisasi NHPR lebih tinggi dari penetapan Pemerintah (O.4.4) dengan tingkat risiko ekstrem 5,D = 5D (Dampak: Malapetaka, Kemungkinan: Besar).
   Adanya rencana Pemerintah untuk menerapkan PBR akan meningkatkan menuntut perusahaan untuk meningkatkan efisiensi pmbangkitan dengan indikator pencapaian NPHR. NPHR akan ditetapkan oleh Pemerintah, dan masih terdapat gap pemahamaan atas perbedaan nilai NPHR pada saat *commissioning*, saat *performance test* dan saat realisasi operasional. Selain NPHR, Faktor pemicu biaya operasi sangat ditentukan oleh harga energi primer, di mana mulai akhir tahun 2016 telah terdapat tren kenaikan harga batubara yang sangat signifikan.
5. Risiko Kesiapan Pembangkitan: Outage dan derating akibat ketidaksiapan peralatan (B3) dengan tingkat risiko Ekstrem (Dampak: Malapetaka, Kemungkinan: Sangat Besar).
   Kondisi pembangkit milik Perusahaan pada umumnya memiliki umur rata-rata lebih dari 23 tahun sehingga untuk menjaga keandalan memerlukan sumberdaya yang cukup. Selain hal tersebut, PLTU FTP 1 EAF-nya meskipun masih relatif baru telah menghadapi permasalahan *poor design* dan yang berdampak meningkatnya gangguan pada PLTU tersebut.
6. Risiko Human Capital: Jumlah SDM/Human Capital tidak memenuhi kebutuhan formasi jabatan (O.2.2) dengan tingkat risiko Ekstrem 4,D=4D (Dampak: Signifikan, Kemungkinan: Besar).
   Pertumbuhan Perusahaan dari segmen bisnis Jasa O&M serta adanya rencana pembangunan pembangkit baru memerlukan proses bisnis baru, perluasan organisasi dan sumber daya manusia yang lebih besar serta dalam waktu yang segera.

2. Business Risk (S.5.1) with an extreme risk level classified under 5,E=5E category (which means “Catastrophic” in Impact and has a “Very High” scale of Possibility)
   The market share of Indonesia Power’s electricity sales has recorded a decrease in the past five years, as new power plants that were built by PLN or IPP emerged.
3. Project Funding Risk: Unavailability or difficulty in obtaining project funding (P.3.2) with an extreme risk level classified as 5.C=5C (meaning “Catastrophic” in terms of Impact and has a “Medium” scale of Possibility)
   The Company is tied to PT PLN’s Indenture Covenant Global Bond which has rendered it incapable of getting external investment.
4. Efficiency Risk: the actual NHPR is higher than what the government determined (0.4.4), making it falling into an extreme risk level of 5,D=5D, (which means “Catastrophic” in Impact and grouped as having a “High” scale of Possibility).
   The government’s plan on PBR implementation would improve demand for power generating efficiency by applying an indicator for NHPR achievement. NHPR would be implemented by the government, but there remains a gap in defining the differences of NPHR values at the commissioning process, test performance and during operations. In addition, the operational cost is determined by the main energy source price, in which there was a significant raise of coal price since the end of 2016.
5. Generating Preparedness Risk: the outage and derating condition due to equipment unpreparedness (B3) which classifies as an extreme risk level (“Catastrophic” in Impact and ”Very High” in possibility). Most of the Company’s power plants have an average age of more than 23 years, so to maintain their reliability requires adequate resources. In addition, the newest Steam Power Plant FTP 1 EAF has faced poor design issue which has led to increasing trouble at the power plant.

6. Human Capital Risk: insufficient amount of human resources or human capital to fulfill the needs of positional formation (0.2.2) with an extreme risk level of 4,D=4D (which means “Significant” in terms of Impact, and “High” in possibility).
   The Company’s growth in O&M business segment and the plan for establishing new power plants require new business process, well-planned management, widened organization scope, more human resources, and immediate delivery in time.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Upaya Mitigasi Risiko
Sejalan dengan pengelompokan risiko perusahaan secara korporat di atas, Indonesia Power telah melakukan langkah mitigasi untuk mengurangi dampak ataupun kerugian yang dapat terjadi akibat risiko tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Risk Mitigation Efforts
In line with corporate risks grouping elaborated on the previous passage, Indonesia Power has carried out mitigation effort to reduce the negative impact or loss that might occur as consequence of risks, it is explained in the following table:

Tabel Mitigasi Risiko Tahun 2017
Table: Risk Mitigation in 2017

Sasaran Utama	Kelompok Risiko Risk Group	Tingkat Risiko Risk Level	Kejadian Cause	Penyebab Trigger	Mitigasi Mitigation
Business Development Excellence	K3L (O.2.3) OHSE (O.2.3)	Ekstrem (5D) Extreme (5D)	Kecelakaan kerja katastrofik Catastrophic Work Accident	Infrastruktur K3 belum memadai Insufficient OHS infrastructure	a. Standardisasi dan kelengkapan infrastruktur K3 Standardization & completeness of OHS infrastructure
				Disiplin K3 masih kurang OHS ill discipline	a. Pengetatan dan Pengawasan Implementasi Prosedur K3 Tightening & Supervision of OHS Procedure Implementation b. Peningkatan *awareness*, pengetahuan, Budaya K3 melalui pelatihan & sertifikasi Improving awareness and knowledge of OHS as well as establishing OHS culture through training & certification
			Pencemaran lingkungan di atas ambang batas Environmental pollution above the threshold	Kerusakan peralatan dan lemahnya pengawasan projek Equipment damage and poor plant operational supervision	a. Standardisasi dan kelengkapan infrastruktur Lingkungan Standardization & completeness of environmental infrastructure. b. Pengetatan dan Pengawasan Implementasi prosedur lingkungan Tightening & Supervision of environmental procedure implementation
	Bisnis (S.5.1) Business (S.5.1)	Ekstrem (5E) Extreme (5E)	Penurunan pangsa pasar Decrease in market share	Pembangkit eksisting ketinggalan teknologi dan belum ada penambahan pembangkit baru Technologically obsolete generators and no new plant addition	Program Pengembangan usaha dengan teknologi efisien didukung pengendalian eksekusi proyek tepat biaya, mutu dan waktu. Efficient development program supported by controlled budget, quality and time.
				Perusahaan kalah merit The company lost its merit order	Peningkatan merit order melalui penurunan Biaya Pokok Produksi (BPP) dari penurunan biaya logistik batubara dan gas serta optimasi produksi PLTA dan PLTP Increase of merit order through decrease of production cost from the decreasing coal logistics cost and optimization of gas and HPP and GPP production
			Kenaikan harga listrik akibat revaluasi Increased electricity price due to revaluation	Kenaikan biaya penyusutan dan pajak tangguhan Increased depreciation and deferred taxes	a. Negosiasi harga PPA berdasar pembanding (harga IPP) Negotiation of PPA price based on comparison (IPP price) b. Antisipasi kompensasi rugi fiskal (PSAK 46) Anticipating fiscal loss compensation
	Pendanaan project (P.2.3) Project funding (P.2.3)	Ekstrem (5C) Extreme (5C)	Tidak tersedianya pendanaan *project* Zero project funding	Terikat *indenture covenance global bond* Tied to indenture of covenance global bond	Kredit Investasi Kolektif Efek Beragunan Aset (KIK EBA). Collective investment credit of asset-backed securities (KIK EBA)

Sasaran Utama	Kelompok Risiko Risk Group	Tingkat Risiko Risk Level	Kejadian Cause	Penyebab Trigger	Mitigasi Mitigation
Operation & Maintenance Excellence	K3L (O.2.3) OHSE (O.2.3)	Ekstrem (5D) Extreme (5D)	Kecelakaan kerja katastrofik Catastrophic work accident	Infrastruktur K3L belum memadai Insufficient OHSE infrastructure	c. Standardisasi dan kelengkapan infrastruktur K3 Standardization & completeness of OHS infrastructure
				Disiplin K3 masih kurang OHS ill discipline	a. Pengetatan dan Pengawasan Implementasi Prosedur K3 Tightening & Supervision of OHS Procedure Implementation b. Peningkatan *awareness*, pengetahuan, Budaya K3 melalui pelatihan & sertifikasi Developing awareness and knowledge of OHS as well as establishing OHS culture through training & certification
			Pencemaran lingkungan di atas ambang batas Environmental pollution above the threshold	Kerusakan peralatan dan lemahnya pengawasan operasi pembangkit Equipment damage and poor plant operational supervision	a. Standardisasi dan kelengkapan infrastruktur Lingkungan Standardization & completeness of environmental infrastructure. b. Pengetatan dan Pengawasan Implementasi prosedur operasi Tightening & Supervision of environmental procedure implementation c. Pemenuhan Proper Hijau Green PROPER achievement
	Efisiensi Pembang-kitan (O.4.4) Efficient Generation (O.4.4)	Ekstrem (5D) Extreme (5D)	Realisasi NPHR lebih tinggi dari penetapan Pemerintah NPHR higher than what the Government sets up	Perbedaan metode ukur oleh regulator dan Perusahaan Different measurement methods between the regulator and the Company	a. Koordinasi dan diskusi dengan regulator mengenai metode ukur NPHR saat Commisioning, *Performance Test*, & Realisasi coordination & discussion regarding NPHR measuring method in Commissioning, Performance Test, & Realization
				Teknologi ketinggalan Obsolete technology	Modifikasi/update teknologi untuk peningkatan efisiensi Technological modification for efficient improvement
				Lemahnya pengawasan operasi pembangkit Poor plant operational supervision	Pengendalian kualitas Batubara dan Implementasi program 5E (*Enhancing & Embedding Energy Efficiency Exellence*) coal quality control & 5E program (Enhancing & Embedding Energy Efficiency Exellence) implementation
	Kesiapan Pembangkit (O.4.1) Generator's Preparedness (O.4.1)	Ekstrem (5E) Extreme (5E)	Outage dan derating akibat ketidaksiapan peralatan Outage & derating due to unprepared equipment	a. Kegagalan peralatan Equipment failure	a. Pembentukan engineering center, penggantian part utama, dan modernisasi peralatan Engineering center establishment, main part replacement and equipment upgrade b. Percepatan major overhaul dan program *stockiest* (khusus untuk pembangkit PLTU FTP), Acceleration of major overhaul and special stockiest program for SPP generators
				b. Kompetensi SDM di PLTU *Fast Track Program* (FTP) belum memenuhi kebutuhan Insufficient human resource competencies in SPP included in the Fast Track Program (FTP)	Strategic partnership pada PLTU FTP untuk peningkatan keandalan dan jaminan performance, perbaikan *design* pembangkit & konstruksi PLTU FTP, serta Pembentukan Engineering Center Strategic partnership with FTP SPP to improve performance guarantee and reliability, power plant design and construction improvement, and establishment of Engineering Center
				c. Penurunan daya beli akibat kenaikan harga batubara Decrease in purchasing power due to rising coal prices	a. Koordinasi dengan PLN, untuk mengusulkan harga khusus bagi PLN Grup. Coordinating with PLN to propose a special price for PLN Group b. Optimasi alokasi pasokan batubara berdasarkan prioritisasi harga terendah (Rp/kWh) dari masing-masing pemasok. Optimized allocation of coal supply based on the lowest price prioritization (Rp/kWh) in each supplier. c. Pemberdayaan penyediaan batubara oleh PLN Grup. Coal supply improvement by PLN Group
			Program kapitalisasi belum mencukupi untuk mencapai umur sesuai revaluasi The capitalization program insufficient to reach the expected age based on revaluation	Program pemeliharaan dan investasi rutin belum memadai Inadequate routine maintenance and investment	Peningkatan program pemeliharaan dan investasi/kapitalisasi untuk menyesuaikan hasil revaluasi Improvement of maintenance program and investment/capitalization in line with revaluation

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Sasaran Utama	Kelompok Risiko Risk Group	Tingkat Risiko Risk Level	Kejadian Cause	Penyebab Trigger	Mitigasi Mitigation
Human Capital Excellence	Human Capital (O.2.2)	Esktrem (4D) Extreme (4D)	Kebutuhan Human Capital belum terpenuhi Human capital needs have not been met	a. Pertumbuhan bisnis tidak diikuti oleh ketersediaan SDM Business development is not accompanied by human resources availability	Rekrutmen pegawai untuk memenuhi kekosongan formasi jabatan Recruitment to fulfill empty position
				b. Remunerasi dan jenjang karir kurang bersaing Remuneration and career path are less competitive	a. Penyempurnaan jalur karir dan remunerasi Clear career path and remuneration b. Penajaman peran organisasi dan KPI Individu Strengthening the roles of organization and individuals
				c. Kompetensi SDM belum memenuhi kebutuhan Insufficient HR competencies	a. Penguatan kompetensi Competency development b. Percepatan kompetensi O&M Pembangkitan Accelerated O&M Generating Competencies

Evaluasi Efektivitas Sistem Manajemen Risiko Tahun 2017

Pengelolaan Risiko atas Pelaksanaan Proyek/Kegiatan

Pengelolaan risiko dilaksanakan di seluruh lini proses dan kegiatan Perusahaan oleh pemilik program atau pemilik proses sebagai pemilik risiko (*risk owner*). Satuan Perencanaan, Kinerja dan Manajemen Risiko Korporat bertanggung jawab dalam memastikan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai kebijakan dan ketentuan, serta selalu mengikuti acuan *best practice*. Salah satu tahapan terpenting dalam penerapan manajemen risiko untuk mendukung pencapaian target kinerja jangka pendek dan panjang, adalah penyusunan Dokumen Manajemen Risiko (DMR) oleh Satuan kerja, Divisi maupun UP, UPJP, UJP dan UJH Indonesia Power sebagai risk owner. DMR merupakan dokumen perencanaan yang meliputi Kajian Kelayakan Operasi (KKO), Kajian Kelayakan Lingkungan (KKL), Kajian Hukum (KH), Kajian Kelayakan Finansial (KKF) dan Kajian Risiko (KR). Satuan Perencanaan, Kinerja dan Manajemen Risiko Korporat memberikan *coaching* dan mentoring terhadap penyusunan DMR yang dilakukan oleh Satuan kerja, Divisi maupun Unit yang memerlukan, serta melakukan verifikasi atas DMR tersebut, sesuai dengan kewenangan yang diatur melalui Keputusan Direksi. Selain melaksanakan pendampingan dan verifikasi untuk penyusunan DMR program/proyek kegiatan di tingkat *risk owner*, Satuan Perencanaan, Kinerja dan Manajemen Risiko Korporat juga melaksanakan berbagai kajian risiko strategis dalam mendukung pengambilan keputusan Direksi dan proses permohonan persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS. Dengan pendekatan ini, maka seluruh Keputusan yang diambil telah berbasis risiko.

Evaluation of Risk Management System Effectiveness in 2017

Risk Management of Project/Program Implementation

Risk management is carried out in all lines of the Company's process and activity by program owner or process owner as the risk owner. The Planning, Performance and Corporate Risk Management Unit is responsible for ensuring that risk management implementation has been carried out accordingly to the policy and guideline and in reference to best practice. One of the pivotal stages in risk management implementation to support the achievement of both short and long term performance targets is to compose Risk Management Document (DMR) by Work Unit, Division, including GU, GGSU, GSU and MSU of Indonesia Power as the risk owner. DMR is a planning document that covers Operational Feasibility Study (KKO) Environmental Feasibility Study (KKL), Legal Study (KH), Financial Feasibility Study (KKF) and Risk Assessment (KR). The Planning, Performance and Corporate Risk Management Unit provides coaching and mentoring towards the formulation of DMR that is carried out by Work Unit, Division and other Units that requires the document and to verify the DMR in accordance with the authority regulated under the relevant Directors' Decree. Other than providing accompaniment and verification for DMR program/project formulation on risk owner level, Risk Management Unit also carries out several strategic risk studies in supporting decision-making process by the Board of Commissioners or GMS. Through this approach, all decisions taken are based on risks.

Pemantauan dan Peninjauan Penerapan Manajemen Risiko

Untuk memastikan keefektifan pengelolaan risiko sebagai enabler dalam pencapaian sasaran perusahaan, maka perlu dilakukan pemantauan dan peninjauan penerapan manajemen risiko. Sasaran dilakukannya pemantauan dan peninjauan tersebut adalah untuk: (1) Mengevaluasi pemenuhan kaidah, kebijakan dan ketentuan pengelolaan risiko; (2) Mengukur keefektifan sistem pengelolaan risiko; (3) Alat manajemen untuk mensinkronisasikan ERM sebagai *enabler* dari kegiatan-kegiatan perusahaan; (4) Identifikasi langkah-langkah perbaikan secara bertahap Pemantauan dan peninjauan tersebut dilakukan melalui optimalisasi penggunaaan aplikasi IRMA (Integrated Risk Management Application).

Assessment Maturity Level Manajemen Risiko

Indonesia Power senantiasa melakukan *assessment* terhadap pelaksanaan manajemen risiko. *Maturity level assessment* dilakukan untuk mengetahui tingkat kematangan penerapan manajemen risiko. *Assessment* tersebut dilaksanakan oleh Indonesia Power secara mandiri untuk mengukur *maturity level* unit bisnis dan PT PLN (Persero) untuk *maturity level* korporat. Indonesia Power melaksanakan *asessment* berdasarkan enam kategori penilaian, yaitu:

1. Business Policies
2. Business Process
3. People and Organization
4. Management Reports
5. Methodologies

Berdasarkan *assessment* terhadap enam kategori tersebut, tren skor *maturity level* semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa internalisasi budaya pengelolaan risiko di Indonesia Power telah mulai menunjukkan hasil dan keefektifannya.

Monitoring and Reviewing of Risk Management

To ensure the effectiveness of risk management as an enabler to achieve Company's targets, the Company conducts monitoring and reviewing of risk management implementation. The purposes of monitoring and reviewing are as follows: (1) evaluating the fulfillment of rules, policies and regulations of risk management (2) measuring the effectiveness of risk management system; (3) management tool for synchronizing ERM as an enabler of company's activities; (4) identifying stages of improvement gradually. Monitoring and reviewing are carried out through the optimization of IRMA (Integrated Risk Management Application) application utilization.

Assessment Maturity Level for Risk Management

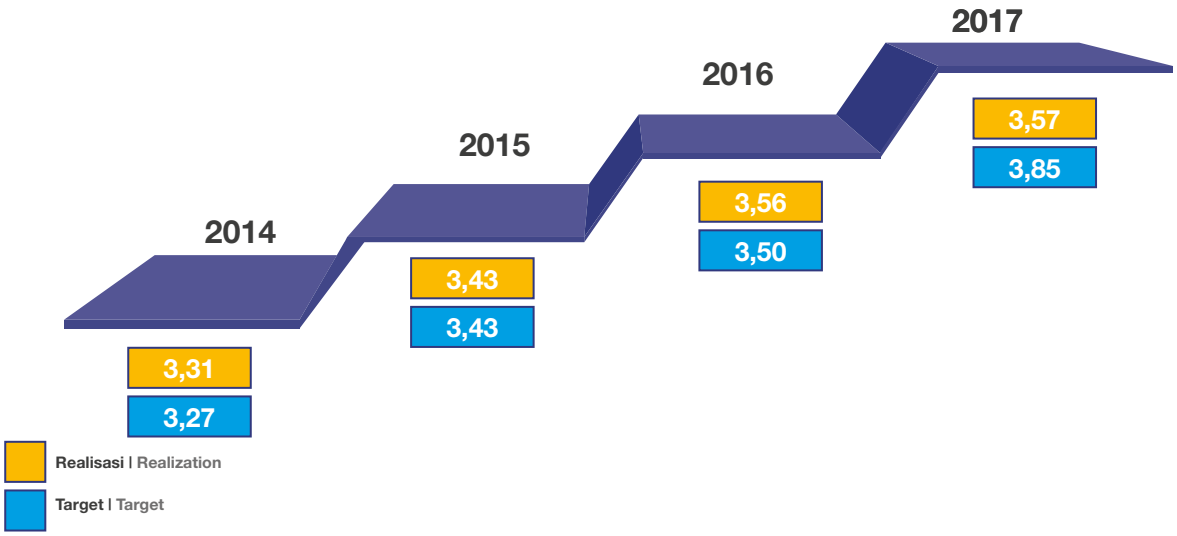
Indonesia Power constantly performs assessment toward the implementation of risk management. Maturity level assessment is carried out to find out the level of maturity of risk management implementation. This assessment is carried out independently by Indonesia Power to measure the maturity level of business unit and PT PLN (Persero) for its corporate maturity level. Indonesia Power conducts this assessment based on six categories of evaluation, i.e.:

1. Business Policies
2. Business Process
3. People and Organization
4. Management Reports
5. Methodologies

Based on the assessment of those six categories, the score of maturity level has increased year after year. This indicates that the internalization of risk management culture within Indonesia Power has shown positive result and effectiveness.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

***Achievement of Score Maturity Level* - ERM Tahun 2014-2017**
Achievement of ERM Maturity Level Score for 2014-2017



Pada tahun 2017 *assessment* dilakukan oleh Tim PT PLN (Persero) dan konsultan independen dengan enam kriteria. Penilaian tersebut memperoleh skor 3,85 dari skor maksimum 5. Hal ini mengindikasikan bahwa beberapa aspek telah menunjukkan kematangan implementasi manajemen risiko terutama bisnis *policy*, namun untuk aspek *People and Organization* serta *Methodologies* masih membutuhkan perbaikan. Dengan adanya pelaksanaan *assessment* penerapan manajemen risiko, Indonesia Power memperoleh gambaran tentang implementasi manajemen risiko secara komprehensif sehingga perbaikan dan penyempurnaan berkelanjutan dapat dilaksanakan dengan konsisten untuk membangun tata kelola perusahaan yang efektif dan efisien.

In 2017, the assessment was carried out by PT PLN (Persero) Team and independent consultant with six criteria. The assessment score was 3.85 out of a maximum of 5. This indicates that several aspects have shown maturity in risk management implementation, particularly in Business Policy, but People and Organization as well as Methodologies still have a room for improvement. By implementing risk management assessment, Indonesia Power has managed to gain a comprehensive description of risk management implementation so that sustainable improvement and refinement can be consistently carried out to build an effective and efficient corporate governance.

Pengembangan Infrastruktur Manajemen Risiko

Infrastruktur manajemen risiko juga aktif dikembangkan oleh Indonesia Power. Salah satu pengembangan tersebut adalah membangun aplikasi pro-RBA (Risk Based Audit) berbasis web pada tahun 2014 dan mulai dioperasikan sejak awal tahun 2015, yang kemudian dikembangkan menjadi aplikasi IRMA (Integrated Risk Management Application) di tahun 2017. Aplikasi ini bertujuan agar pengelolaan risiko berjalan efektif dengan cara otomatisasi proses penyusunan kajian manajemen risiko. Aplikasi ini memberikan beberapa kemudahan diantaranya:

1. **Taksonomi risiko**
   Taksonomi risiko memungkinkan keseragaman dalam pengungkapan deskripsi risiko. Taksonomi risiko bersifat fleksibel karena memberikan ruang untuk menuangkan penyebab dari risiko yang mungkin berbeda-beda;
2. **Agregasi profil risiko**
   Agregasi profil risiko dari tingkat unit sampai ke korporat dapat dengan mudah diperoleh karena disusun dengan otomatisasi yang apabila pengelolaan risiko dilakukan secara manual akan sulit diperoleh karena antara unit dan korporat tidak saling terhubung dan jumlah yang banyak;
3. **Monitor langkah-langkah mitigasi risiko efektif**
   Hal ini dapat terjadi karena aplikasi telah terhubung dengan fungsi Audit Internal. Auditor akan memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi yang telah disusun, dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat oleh pemilik risiko (*risk owner*) dan sekaligus pemilik bisnis proses. Audit dilakukan sejak dini di tahap perencanaan sehingga pengelolaan risiko menjadi efektif, termasuk monitoring mitigasi risiko.
4. **Pembuatan Dokumen Manajemen Risiko**

   Seluruh perencanaan program kerja Unit maupun Korporat dituangkan dalam DMR secara online sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing divisi. Proses pembuatan DMR menggunakan aplikasi sehingga mempermudah dalam pelaksanaan monitoring dan menjamin keamanan data yang ada sekaligus sebagai salah satu program paperless dari sebelumnya menggunakan dokumen fisik.

Risk Management Infrastructure Development

Indonesia Power actively develops risk management infrastructure. One of such developments is building the web-based pro-RBA (Risk Based Audit) application in 2014. The application started to operate since the beginning of 2015, and then developed into an IRMA (Integrated Risk Management Application) in 2017. This application is intended to ensure that risk management can be carried out effectively through an automation process of risk management assessment. This application provides several conveniences which, inter alia, include:

1. **Risk Taxonomy**
   Risk taxonomy allows homogeneity in risk description disclosure. Risk taxonomy is flexible in terms of providing the space to share causes of risk that may differ.
2. **Risk Profile Aggregation**
   Risk profile aggregation from the Unit to Corporate level can be easily acquired because it is compiled through automation. Therefore, I f the risk management is still carried out manually, the information may be hard to obtain since Unit and corporate were not connected, especially taking into accounts the large number of it.
3. **Monitoring effective risk mitigation stages**
   This is made possible since the application has been connected to internal audit function. The auditor will ensure that the mitigation measures that have been prepared would be carried out properly by risk owner and business process owner. Audit is carried out early during the stage of planning so that risk management can be effective, including the monitoring process of risk mitigation.
4. **Preparation of Risk Management Documentation (DMR)**
   All the planning of work plan at both unit and corporate levels is accommodated in DMR that can be accessed in online platform, in accordance with the responsibility and authority of each division. DMR is created using an application that facilitates monitoring and ensures security of the existing data as well as represents a transition into the paperless program from the use of physical/printed documents beforehand.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Keseluruhan pengembangan tersebut dilaksanakan Indonesia Power dalam rangka menyempurnakan penerapan manajemen risiko di lingkungan Perusahaan. Penerapan manajemen risiko yang berjalan efektif dan efisien selanjutnya diintegrasikan sepenuhnya ke dalam *governance* Indonesia Power untuk memberikan kepastian pencapaian sasaran Perusahaan sehingga meningkatkan kepercayaan dan membentuk citra positif Indonesia Power di kalangan para pemangku kepentingan.

The entire development is conducted by Indonesia Power to improve the implementation or risk management within the Company. Effective and efficient risk management implementation would then be integrated fully into the governance of Indonesia Power to ascertain achievement of the Company's targets, improve trust and shape a positive image of Indonesia Power among the stakeholders.

Pengembangan Manajemen Risiko Berkelanjutan

Peran penting manajemen risiko terhadap keberlanjutan operasional mendorong Indonesia Power untuk melakukan upaya pengembangan secara berkelanjutan. Indonesia Power mengembangkan tidak hanya infrastruktur pendukung pelaksanaan manajemen risiko tetapi juga SDM yang berperan sebagai eksekutornya. Kompetensi SDM senantiasa ditingkatkan dengan mengirimkan pegawai kepada Lembaga Penyelenggara Pelatihan baik diselenggarakan oleh PT PLN (Persero) maupun internal Indonesia Power. Program pelatihan dan seminar Manajemen Risiko dilaksanakan bagi para pegawai Perusahaan yang terlibat langsung dalam pengelolaan risiko. Pengembangan kompetensi tersebut dilakukan melalui program sertifikasi tingkat lokal maupun internasional, serta program-program pelatihan bidang manajemen risiko lainnya. Pengembangan kompetensi manajemen risiko diadakan bagi Risk owner, Pengelola Risiko Kantor Pusat, Unit kerja dan Perwakilan pengelola risiko PT PLN dan anak perusahaannya.

Development of Sustainable Risk Management

The important role risk management plays in operations sustainability encourages Indonesia Power to perform sustainable development. Indonesia Power develops both supporting infrastructure and human resource as the executor in implementing risk management. Personnel competency is constantly improved by sending the employees to Training Institution, held both by PT PLN (Persero) and internally in Indonesia Power. Training program and seminar on Risk Management are held for Company's employees that are directly involved in risk management. The development of this competency is carried out through certification program, both on national and international levels, and other training programs on risk management. Development of risk management competency is organized by Risk Owner, Risk Manager at the Head Office, Work Unit, and representatives of risk management at PT PLN and its subsidiaries.

Pada tahun 2017 telah diadakan pelatihan Capacity Building & Sertifikasi QRMP General Manager & Senior Leader PT Indonesia Power yang dilaksanakan pada tanggal 3-6 Mei 2017 di Sub Unit PLTA Bengkok.

In 2017, Indonesia Power organized Capacity Building and QRMP Certification programs for its General Managers and Senior Leaders on May 3-6, 2017 in Sub-Unit HPP Bengkok.

Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah personel yang memiliki sertifikasi di bidang Risiko adalah sebagai berikut:

As at end of 2017, the number of personnel having risk certification is as follows:

Tabel Sertifikasi Bidang Manajemen Risiko Pegawai Perusahaan Tahun 2017
Table: Certification of Company's Risk Management Employee 2017

No	Nama Name	Keterangan Description
1	Hadi Munib	QRMP- BNSP Certified
2	Dwi Handoyo Saputro	QRMP- BNSP Certified
3	Rusdiansyah	QRMP- BNSP Certified
4	Buyung Arianto	QRMP- BNSP Certified
5	Zaenal Mustofa	QRMP- BNSP Certified
6	Aliansyah Abdullah	QRMP- BNSP Certified
7	Bayu Husodho	QRMP- BNSP Certified
8	Pelitabaru Pakpahan	QRMP- BNSP Certified
9	Sudjilan	QRMP- BNSP Certified
10	Zudhi Rahmanto	QRMP- BNSP Certified
11	Moch Chairul	QRMP- BNSP Certified
12	Agung Siswanto	QRMP- BNSP Certified
13	Ria Tri Sakya	QRMP- BNSP Certified
14	Eko Yuniarto	QRMP- BNSP Certified
15	Usvizal Zaenuddin	QRMP- BNSP Certified
16	Rahmi Sukma	QRMP- BNSP Certified
17	Andiek Tri Feriyanto	QRMP- BNSP Certified
18	Tarwaji	QRMP- BNSP Certified
19	Igan Subawa Putra	QRMP- BNSP Certified
20	Suparlan	QRMP- BNSP Certified
21	Hendry Asdayoka Putra	QRMP- BNSP Certified
22	Cita Dewi	QRMP- BNSP Certified
23	Budi Wibowo	QRMP- BNSP Certified
24	Andi Agung Bawono	QRMP- BNSP Certified
25	Roedi Rachmanto	QRMP- BNSP Certified

PENGADAAN BARANG/JASA
PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

Indonesia Power telah memiliki kebijakan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Keputusan Direksi Nomor 218.K/010/IP/2016 tanggal 1 November 2016 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT Indonesia. Kebijakan ini mengatur ketentuan mengenai pengguna barang dan jasa, pengelolaan perencanaan pengadaan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, manajemen penyedia barang/jasa, pelaksana pengadaan, pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat yang berwenang serta penyedia barang/jasa sesuai dengan tugas, fungsi, hak dan kewajiban masing-masing termasuk optimalisasi proses pengadaan barang/jasa sebagai upaya peningkatan *value* Perusahaan melalui efisiensi biaya pengadaan dengan tetap menunjang kegiatan operasi Perusahaan. Kebijakan tersebut dijadikan sebagai pedoman prosedur pengadaan barang dan jasa yang disusun agar dapat menciptakan proses pengadaan barang dan jasa yang berkualitas dan beretika.

Indonesia Power has enacted a policy for procurement of goods and services in Directors' Decree No. 218.K/010/IP/2016 dated November 1, 2016 on Guidelines for Procurement of PT Indonesia Power Goods/Services. The policy regulates the user of goods and services, procurement planning management, procurement management, management of the vendors of goods/services, procurement manager, officer assigned as the authorized official, vendors of goods and services, in line with the duties, functions, rights, and responsibilities, including the process optimization for procurement of goods/services in order to improve the Company's value through procurement cost efficiency by supporting the Company's operations. The policy is the procedure guidelines in procurement of goods and services, and is set up to create quality and ethical procurement process.

Dalam proses pengadaan barang/jasa, seluruh kegiatan proses pemilihan pemasok, pemberian informasi tentang pemesanan, sistem pembayaran, dan akses terhadap penanganan keluhan diberikan perlakuan yang sama bagi semua calon pemasok, serta melakukan evaluasi dan survei atas perlakuan terhadap pemasok. Seluruh informasi mengenai pengadaan yang dilakukan Perusahaan beserta perkembangannya diinfokan secara publik dalam *website* Indonesia Power http://eproc.indonesiapower.co.id/ver1.1/main.

In the process of procurement of goods and services, the entire process such as vendor selection, information on order, payment system, and access on complaint handling are equal for every vendor candidate, and vendor candidate is evaluated and surveyed. All information related to Company's procurement and its development is informed to the public through this website page http://eproc.indonesiapower.co.id/ver1.1/main.

Etika Perusahaan Dalam Pengadaan Barang/Jasa

Hubungan Perusahaan dengan pemasok didasarkan pada prinsip-prinsip praktik usaha yang sah, efisien dan wajar (*fair*) sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Untuk itu, sebagai bentuk komitmen penerapan GCG dalam pengadaan barang dan jasa, Indonesia Power mewajibkan vendor dan mitra kerja untuk menandatangani Pakta Integritas dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa. Hal ini ditujukan agar seluruh proses bisnis dan operasional dapat berjalan secara obyektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pengambilan keputusan dilakukan dengan obyektif, menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak.

Corporate Ethics in Procurement of Goods and Services

Relationship between the Company and its suppliers are based on the principles of legitimate, efficient and fair business practices, in accordance with the GCG principles. Thus, as a commitment of GCG implementation in the process of procurement of goods and services, Indonesia Power requires vendors and partners to sign an Integrity Pact in relation to the procurement. This is intended to make sure that the entire operations and business processes run objectively and comply with the prevailing regulation. The decision making process is completed objectively, avoiding unfair domination exerted by any stakeholders, and done in an independent manner.

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya sasaran Pengadaan Barang/Jasa;
2. Bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi kejujuran, kemandirian dan menjaga informasi yang bersifat rahasia;
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
4. Bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kewenangannya;
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran Keuangan Perusahaan;
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan; dan
8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Parties related to the procurement of goods and services shall comply the ethics as follow:

1. Carry out the duties orderly, with a sense of responsibility, expediency and accuracy in order to achieve the target of goods and services procurement.
2. Work professionally by upholding honesty, self-reliance and ability to keep confidential information.
3. Do not influence one another, directly or indirectly, that may cause unhealthy competition.
4. Be responsible for all decisions made in under their authority.
5. Avoid and prevent conflict of interests between related parties, directly or indirectly, in procurement of goods and services.
6. Avoid and prevent financial leakage and excessive spending.
7. Avoid and prevent abuse of authority and/or collusion for personal gain, that of group or parties, either directly or indirectly, that would harm the Company.
8. Do not accept, offer or promise to offer or receive any gifts, rewards, commissions, rebates or any things to whoever is known or suspected to be associated with procurement of goods and services.

PENGADAAN BARANG/JASA
PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Value for Money merupakan prinsip utama dalam pengadaan barang/jasa di Indonesia Power. Artinya, untuk jumlah anggaran yang dibelanjakan dapat diperoleh barang/jasa yang bernilai atau bermanfaat bagi pembeli, mencakup aspek kualitas, kuantitas, waktu penerimaan, tempat penerimaan, tepat sosial dan ekonomi serta harga yang wajar. Indikator keberhasilan proses pengadaan di Perusahaan terdiri dari enam *rights*, yaitu:

Principle of Procurement of Goods and Services

Value for Money is the main principle for procurement of goods and services in Indonesia Power. It means that the budget expended shall obtain goods/services that is valuable or beneficial for buyer and cover aspects of quality, quantity, timely delivery, place of delivery, proper sources, and reasonable price. The indicator for succeed procurement in the Company consists of six rights:



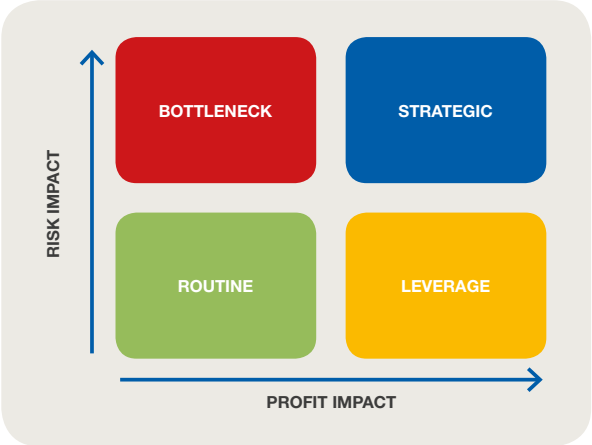
Pendekatan Strategis Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam mencapai sasaran utama pengadaan barang dan jasa yaitu menjamin terlaksananya kegiatan usaha serta penciptaan nilai tambah (*value creation*) dan peningkatan daya saing Perusahaan, Indonesia Power telah melakukan pendekatan strategis berdasarkan *tools* yang biasa digunakan dalam *best practice* Pengadaan yaitu *supply positioning model*. Adapun *Kraljic supply positioning model* sebagai berikut:

Strategic Approach for Procurement of Goods and Services

The main target for procurement of goods and services is to ensure the continuity of business activity, value creation and competitiveness enhancement. Indonesia Power has made strategic approach based on the tools generally used in procurement best practices. Kraljic's supply positioning model is illustrated as follows:

Supply Positioning Model
Supply Positioning Model



Dalam *supply positioning model* tersebut terdapat *Profit Impact* yaitu hal-hal yang bisa menambah profit atau menghindari kehilangan profit atau menghindari penambahan biaya Perusahaan, serta *Supply Risk* yaitu semua bentuk risiko yang berpengaruh pada Perusahaan terkait dengan pengadaan yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal ataupun faktor eksternal. Berdasarkan konsep manajemen risiko, terdapat risiko yang dapat dihilangkan, dihindari, dipindahkan atau dimitigasi/kelola.

There are two aspects in supply positioning model. The first one is Profit Impact which refers to matters that may increase profit or avoid loss of profit or additional costs for the Company. The second is Supply Risk, which means all forms of risk that may influence the Company related to the procurement, which can be influenced by both internal and external factors. According to the risk management concept, there are risks that can be eliminated, avoided, transferred, or mitigated/managed.

Adapun definisi dari masing-masing kuadran pada *supply positioning model* adalah sebagai berikut:

1. *Routine*, merupakan barang/jasa yang memiliki risiko rendah dan nilai yang relatif rendah. Contoh dari kategori ini adalah *consumable material, office appliances*, peralatan IT dan lain sebagainya. Biasanya mewakili sekitar 80% dari jumlah transaksi, tetapi hanya sekitar 5% dari total pengadaan, sehingga dalam beberapa kasus beban administrasi pengadaan sebenarnya mungkin lebih dari nilai barang/jasa. Oleh karena itu, strategi pengadaan untuk kategori ini antara lain dengan cara meminimalkan pekerjaan administratif melalui penyederhanaan proses pengadaan.
2. *Leverage*, merupakan barang/jasa yang memiliki risiko rendah namun memiliki nilai yang relatif tinggi. Contoh kategori ini antara lain adalah bahan kimia, pelumas, *belt conveyor* dan lain sebagainya. Biasanya mewakili 10-15% dari total pengadaan. Strategi keseluruhan untuk kategori ini antara lain dengan meningkatkan leverage, misalnya

The definition of each quadrant on supply positioning model is described below:

1. Routine, refers to goods/services with low risk and relatively low value. The example from this category is consumable material, office appliances, IT devices, etc. Usually, it represents around 80% of the total transactions, but only 5% of the total procurement, so that in several cases of procurement load may be more that the value of goods/services. Therefore, the strategy of this category is to minimize administrative work through simplification of procurement process.
2. Leverage, refers to goods/services with low risk but relatively high value. The example of this category is chemical, lubricants, belt conveyor, etc. Usually, it represents 10-15% of total procurement. The strategy for this category is to enhance leverage, such as by consolidating the needs to obtain economic scale and more competitive price, and

PENGADAAN BARANG/JASA
PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

dengan mengkonsolidasikan kebutuhan untuk mendapatkan skala ekonomi dan harga yang lebih kompetitif, sementara itu pada saat yang sama memaksimalkan persaingan dan meminimalkan biaya transaksi.

3. *Bottleneck*, merupakan barang/jasa yang memiliki risiko tinggi namun nilai relatif rendah contohnya antara lain *card control*, parts khusus yang penyedianya spesifik atau terbatas. Strategi untuk kuadran ini adalah mengurangi risiko dengan mengamankan pasokan, karena kegagalan pasokan dapat menyebabkan operasional terhenti. Strategi yang dapat ditempuh antara lain menjaga tingkat stok yang lebih tinggi atau mencari alternatif Penyedia lain.
4. *Strategic*, merupakan barang/jasa yang memiliki risiko tinggi serta nilai yang relatif tinggi. Biasanya sebuah organisasi hanya memiliki jumlah perjanjian/kontrak yang sedikit dalam kategori ini, tetapi dapat mewakili 60-70% dari total pengadaan. Contoh kategori ini adalah energi primer, *spare part* untuk keperluan *outage* dan lain sebagainya.

at the same time, maximizing the competition and minimizing the transaction cost.

3. Bottleneck, refers to goods/services with high risk but relatively low value. The example of this category is card control, particular part with specific or limited vendor. The strategy for this quadrant is to lessen the risk by securing supply, because supply failures may cause the operations to stop. Strategy for this problem is to maintain high supply or look for alternative Suppliers/Vendors.
4. Strategic, refers to goods/services with high risk and relatively high value. Usually, an organization has a few of agreements/contracts in this category, but it represents 60-70% of total procurement. The example of this category is primary energy, spare part for outage need, etc.

Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2017

Sepanjang tahun 2017, Fungsi pengadaan barang dan jasa telah melakukan berbagai kegiatan diantaranya:

1. Untuk mencapai 6 *rights* pengadaan, telah diterbitkan lebih dari 21 kontrak payung pada tahun 2017 kepada penyedia yang posisinya di hulu.
2. Untuk meningkatkan Kompetensi buyer di lingkungan perusahaan untuk menjawab tantangan Perusahaan yang semakin ketat, telah dilaksanakan 3 kali In House Training dan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa selama tahun 2017.
3. Dalam rangka meningkatkan kompetensi buyer di bidang logistik serta upaya dalam optimalisasi transaksi, telah diadakan *workshop* expor impor dengan narasumber DITJEN Bea Cukai dengan Kementrian Perdagangan.

Procurement of Goods and Services in 2017

In 2017, procurement of goods and services carried out its functions through the following activities:

1. To ensure fulfillment of the six rights in procurement, the Company issued more than 21 umbrella agreements in 2017 to upstream vendors.
2. To improve the Company's buyer competencies and rise to the challenges faced, Indonesia Power organized three in-house training sessions and certification for procurement of goods and services in 2017.
3. In an effort to increase the buyer competencies in logistics and optimize the transaction, Indonesia Power organized a workshop on exports-imports by inviting keynote speakers from the Directorate General of Custom and Excise and the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia.

Pelaksanaan *Vendor Gathering*

Indonesia Power senantiasa berupaya menjalin hubungan yang harmonis dengan para pemasok (vendor). Komitmen ini diwujudkan melalui penyelenggaraan vendor meeting yang dilakukan antara Perusahaan dengan para pemasok. V*endor gathering* merupakan sarana meningkatkan komunikasi antara Perusahaan dengan para mitra kerja. Dalam *vendor gathering* disampaikan program-program dan kebijakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Perusahaan serta mendengar masukan dari mitra kerja untuk meningkatkan kinerja dalam hubungan kemitraan dalam proses pengadaan barang/jasa. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan pemahaman pemasok terhadap proses pengadaan maupun informasi lain yang bermanfaat bagi pemasok. Kegiatan tersebut diharapkan mampu menciptakan proses pengadaan yang kompetitif, efektif dan efisien.

Dalam *vendor gathering* dilakukan juga Survei Perilaku Etis yakni Survei kepada Pemasok mengenai praktek GCG Perusahaan yang dinilai oleh pemasok. Pelaksanaan survei perilaku etis menjadi salah satu aspek penilaian GCG di setiap Unit Indonesia Power. Evaluasi kinerja penyedia barang/jasa dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi *supply chain management*. Berikut hasil evaluasi kinerja *vendor* tahun 2017:

Vendor Gathering

Indonesia Power commits to maintain good relationship with vendors. This commitment is demonstrated by organizing vendor meetings in which both the Company and vendors partake. Vendor Gathering is a means to increase communication between the Company and its work partners. In this gathering, the Company shares programs and policies regarding procurement of goods and services applicable at the Company, receives feedbacks from the vendors to enhance its performance and partnership relations in goods and services procurement process. Indonesia Power facilitates this gathering as a way to strengthen understanding on the supplier part of the process and provides vendors with the necessary information. It is expected that this could help create competitive, effective and efficient procurement process.

Indonesia Power also conducts an Ethical Behavior Survey, where Suppliers assesses GCG implementation in all Indonesia Power Units. The evaluation of vendors' performance is conducted by employing supply chain management applications. The following is evaluation of the vendor's performance in 2017.

Tabel *Reward* pada *Vendor Gathering* Tahun 2017
Table: Reward in Vendor Gathering 2017

Vendor	Kategori Category	Penilaian Assessment
PT Bando Indonesia	Spare Part & Equipment Pembangkit Spare Part & Equipment Generator	Terbaik I The Best
PT Berau Coal	Batubara I Coal	Terbaik I The Best
PT Mitra Integrasi Informatika	Teknologi Informasi I Information Technology	Terbaik I The Best

KODE ETIK PERUSAHAAN
CODE OF CONDUCT

Kode Etik, atau *Code of Conduct* merupakan pijakan paling mendasar bagi Perusahaan, manajemen, pemangku kepentingan maupun pemegang saham dalam menjalin hubungan yang sesuai dengan tujuan Perusahaan dan asas kepatutan. Kode Etik berperan penting sebagai pedoman perilaku yang mengatur hubungan etika kerja antar elemen dalam Perusahaan, khususnya terkait hubungan yang dilandasi atas profesionalitas yang diharapkan dapat terus memberikan nilai tambah bagi proses pengelolaan Perusahaan.

Dalam menjalankan komitmen sebagai Perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai GCG, Indonesia Power senantiasa mendorong kepatuhan terhadap standar etika serta berkomitmen untuk mengimplementasikannya, dan mewajibkan seluruh pimpinan di setiap tingkatan dalam Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pedoman perilaku dipatuhi dan dijalankan dengan baik pada jajaran masing-masing.

The Code of Conduct lays down a foundation for the Company, management, stakeholders and shareholders to maintain relationships that serve the Company purposes and the principle of appropriateness. The Code of Conduct plays an important role in providing behavior guidelines for maintaining work ethics between elements of the Company, particularly professional relationship expected to give additional values in the Company's management process.

In fulfilling the commitment as a company that upholds GCG values, Indonesia Power at all times promotes compliance with ethical standards and is committed to put them into practice, and requires all leaders on each level to assume responsibility for ensuring that this Code of Conduct is complied and implemented in all elements.

Pokok-Pokok Kode Etik Perusahaan

Indonesia Power memiliki Kode Etik yang tertuang dalam bentuk pernyataan secara tertulis tentang nilai-nilai etika yang berlaku di lingkungan Perusahaan dan menjadi kebijakan dan standar perilaku yang diwajibkan bagi seluruh insan Perusahaan. Pedoman Etika Perusahaan disahkan berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor 247.K/010/IP/2016 dan Nomor 17.SK/Dewan Komisaris-IP/2016 tanggal 20 Desember 2016. Secara garis besar muatan Pedoman Etika Perusahaan terbagi menjadi 5 (lima) bagian utama, yaitu sebagai berikut:

Code of Conduct Principles

The Company has its Code of Conduct written which discusses ethical values that the Company embraces and establishes as the standard and policy for ensuring compliant behaviors required from Indonesia Power personnel. This Code of Conduct is legalized based on Directors' Decree No. 247.K/010/IP/2016 and Board of Commissioners' Decree No. 17.SK/Dekom-IP/2016 dated December 20, 2016. Generally, the Code of Conduct is divided into five parts described as follows:

Pedoman Etika Perusahaan
The Company's Code of Conduct

Pernyataan Visi dan Misi Vision and Mission Statement	**Nilai dan Budaya** Values and Culture
Pentingnya Pedoman Etika Perusahaan Importance of a Company Code of Conduct	**Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Etika Perusahaan** Guidelines on the Implementation of Code of Conduct
Kebijakan Etika Perusahaan Mengatur tentang Standar Etika Bisnis dan Etika Perilaku setiap insan Indonesia Power dalam hubungannya dengan berbagai *stakeholders* mulai dari pegawai, pelanggan, pemasok, masyarakat, pemerintah, pesaing, dan mitra kerja. **Corporate Ethics Policy** Regulating Standards of Business Ethics and Behavioral Ethics for each and every Indonesia Power personnel in conducting relationships with various stakeholders, from its employees, customers, suppliers, the government, competitor and vendors.	

Pemberlakuan Kode Etik Perusahaan

Implementasi GCG merupakan alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan. Untuk itulah, Indonesia Power berkomitmen mengimplementasikan GCG secara konsisten melalui penerapan Kode Etik Perusahaan. Pedoman Etika Perusahaan disusun untuk menjadi acuan perilaku bagi seluruh Insan Indonesia Power sebagai bagian dari usaha pencapaian Visi dan Misi perusahaan. Seluruh insan Indonesia Power mencakup pegawai, Direksi, Dewan Komisaris dan Komite di bawah Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk bertingkah laku sesuai dengan budaya Perusahaan.

Pernyataan Kepatuhan terhadap Pedoman Etika Perusahaan

Indonesia Power berupaya menegakan Pedoman Etika dalam bentuk sikap, perbuatan, dan komitmen yang dilakukan dengan penuh kesadaran melalui beberapa kegiatan yaitu:

1. Pernyataan Kepatuhan terhadap Pedoman Etika
   Setiap jajaran Indonesia Power wajib membaca, memahami dengan baik, dan menandatangani Pernyataan Kepatuhan terhadap Pedoman Etika termasuk aspek budaya perusahaan.

2. Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan
   Setiap jajaran Indonesia Power harus membuat pernyataan bebas benturan kepentingan setiap tahun. Dalam pernyataan tersebut disebutkan situasi yang memiliki potensi benturan kepentingan harus dihindari.
3. Pakta Integritas
   Penandatanganan Pakta Integritas dilakukan oleh pejabat pemegang kewenangan dan seluruh rekanan/mitra Indonesia Power yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, Pakta Integritas ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi Indonesia Power serta seluruh pegawai dalam rangka implementasi pengendalian Gratifikasi.

Enactment of the Company's Code of Conduct

The GCG implementation is a means to enhance values and business growth sustainably in the long term. Therefore, Indonesia Power commits to GCG implementation consistently through fulfillment of the Code of Conduct. The Code of Conduct is written as a reference for all Indonesia Power personnel to conduct their behavior toward achievement of the corporate's Vision and Mission. Every Indonesia Power Personnel from the employees, Directors, Board of Commissioners, Committees reporting to the Board of Commissioners is responsible for behaving in accordance with the Company's culture.

Statement of Compliance with the Code of Conduct

Indonesia Power strives to uphold the Code of Conduct by adopting attitudes, taking actions and making commitments fulfilled with full awareness through various activities such as:

1. Statement of Compliance with the Company's Code of Conduct
   Indonesia Power personnel at every level must read, understand and sign the Statement of Compliance with the Company's Code of Conduct, including corporate cultural aspects.
2. Declaration of Absence of Conflict of Interests
   Every Indonesia Power personnel is required to make Declaration of Absence of Conflict of Interests every year. In this statement, it is mandatory to certify that situations with a potential conflict of interests shall be avoided.
3. Integrity Pact
   Integrity Pact is signed by every authorized official and every partner of Indonesia Partner who is involved in the process of procurement of goods and services. In addition, Integrity Pact is signed by Board of Commissioners and Directors of Indonesia Power in order to exert the Gratification Control.

KODE ETIK PERUSAHAAN
CODE OF CONDUCT

Sosialisasi Kode Etik Perusahaan

Agar pelaksanaan pedoman perilaku dapat berjalan efektif, Indonesia Power senantiasa melakukan sosialisasi penerapan atau implementasi *Code of Conduct* kepada Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi serta seluruh pegawai melalui berbagai media komunikasi antara lain *e-mail, website, intranet*, visual manajemen, dan forum lainnya.

Pedoman Etika Perusahaan menjadi materi yang wajib disosialisasikan oleh seluruh unit dan merupakan salah satu target kinerja Unit di dalam aspek OCR (*Organization Capital Readiness*). Selain itu, Indonesia Power telah melaksanakan beberapa kegiatan yang mencerminkan sosialisasi Pedoman Etika Perusahaan diantaranya dengan melakukan program orientasi bagi pegawai baru atau penyegaran secara berkala bagi seluruh pegawai Indonesia Power. Sosialisasi ini dimaksudkan agar insan Indonesia Power senantiasa patuh terhadap *Code of Conduct* dan secara sadar dan sukarela akan mengimplementasikan *Code of Conduct* dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Dissemination of the Company's Code of Conduct

In order to ensure effective implementation of the Code of Conduct, Indonesia Power constantly disseminates information regarding adoption of the Code to the Board of Commissioners and its supporting organs, the Board of Directors and officers who immediately report to them, as well as every employee. Such dissemination effort is conducted through various communication media including e-mail, website, intranet, visual management, etc..

The Code of Conduct becomes a mandatory material to disseminate by all units and is one of Unit's performance targets under the Organization Capital Readiness aspects. In addition, the Company conducted several activities representing dissemination of the Code of Conduct, such as organizing orientation program for new staff or periodic team building for all Indonesia Power personnel. It is expected that all Indonesia Power personnel comply with the Code of Conduct and readily as well as willingly carry it out in day-to-day performance of their jobs.

Penegakan Kode Etik Perusahaan

Perusahaan berkomitmen untuk melakukan penegakan Kode Etik di seluruh lini Perusahaan dengan melakukan pemantauan secara berkala terhadap penegakan dan menyediakan fasilitas bagi pengaduan terhadap pelanggaran Pedoman Etika tersebut. Pegawai dapat melaporkan dugaan pelanggaran atas Pedoman Etika Perusahaan tersebut kepada atasan, Pejabat Yang Berwenang Menindak (PYBM) serta melalui mekanisme *Whistle Blowing System* (WBS). Seluruh laporan tersebut harus disertai data dan/atau bukti-bukti akurat sehingga pelanggaran dapat diproses lebih lanjut. Setiap pelanggaran atas Pedoman Etika Perusahaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pengenaan sanksi tersebut tidak bersifat diskriminatif.

Pelapor dapat melaporkan indikasi *fraud*, kriminal, pelanggaran kebijakan perusahaan dan pelanggaran kode etik yang melibatkan segenap jajaran Indonesia Power dengan menyampaikan pengaduan melalui media pelaporan yaitu *e-mail* pengaduan@indonesiapower.co.id, PO BOX 9000 Jakarta 10000, *drop box* di *lobby*

Enforcement of the Company's Code of Conduct

The Company commits to enforce the Code of Conduct by undertaking regular monitoring of the Code implementation and facilitates submission of complaints regarding violation to the Code. The employees may report alleged violations of the Code of Conduct to their supervisor, the authorized officials and through the Whistle Blowing System (WBS) mechanism. Every report must be accompanied by accurate evidence so that the violation may be processed further. Every violation of the Code must be subjected to sanctions in accordance with the prevailing regulations and such sanction shall not be discriminatory.

Any indication of fraud, criminal act and violation to the Code of Conduct and corporate policy involving all elements in Indonesia Power may be reported by complain submission through email to pengaduan@indonesiapower.co.id, PO BOX 9000 Jakarta 10000, drop box at the first floor of Indonesia Power Head Office

lantai 1 Kantor Pusat Indonesia Power, dan surat resmi ke alamat Perusahaan. Indonesia Power berkomitmen dalam menjaga kerahasiaan informasi pelapor dan pihak yang diduga melakukan pelanggaran sebagai penerapan prinsip kerahasiaan (*confidentiality*). Identitas pelapor hanya diketahui oleh admin pengaduan pelanggaran kecuali pelapor mengizinkan untuk dibuka identitasnya.

and formal letter to the Company's address. Indonesia Power commits to maintain confidentiality regarding the whistle blower's identity and alleged perpetrator who is suspected to commit violation, which fulfills the principle of confidentiality. The informant's identity would only be known by the complaint administrator, unless the informant permits that its identity be disclosed.

Jenis Sanksi dan Jumlah Pelanggaran Kode Etik Perusahaan

Segala pelanggaran atas Kode Etik akan dikenakan sanksi berupa tindakan disiplin ringan, sedang dan berat. Sebagaimana diuraikan dalam SK Nomor 258.K/010/IP/2017 terkait ketentuan Penegakan Disiplin Pegawai Pasal 42, untuk memberikan efek jera kepada pegawai, maka hak-hak pegawai yang hilang selama masa sanksi disiplin diantaranya tidak diberikan tunjangan posisi, tidak dapat dipromosikan, tidak dapat memperoleh penyesuaian atau kenaikan grade, tidak dapat mengikuti program pendidikan, pelatihan, atau pengembangan individu dan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.

Sepanjang 2017 Perusahaan telah mengeluarkan sanksi kepada pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik Perusahaan, sebagaimana tabel berikut.

Types of Sanction and Number of Violations to the Code of Conduct

Any violation of the Code of Conduct shall be subjected to sanctions ranging from light, medium to and heavy ones. As elaborated by Decree No. 258.K/010/IP/2017 on Enforcement of the Code of Conduct in Article 42, employees who commit violations would be denied their rights during disciplinary sanction in order to give deterrent effects. This includes the loss of position allowance, loss of right to promotion, inability to obtain adjustment or increase in grade, inability to attend training or education program or individual development and inability to do business travel abroad.

During the course of 2017, the Company handed down the following sanctions to employees violating the Code of Conduct, as illustrated in the table below.

Tabel Jumlah Pelanggaran Kode Etik tahun 2017
Table: Number of Violations to the Code of Conduct 2017

No	Sanksi Type of Sanction		2017
1	Tindakan Disiplin Ringan	Light Disciplinary Measures	1
2	Tindakan Disiplin Sedang	Medium Disciplinary Measures	4
3	Tindakan Disiplin Berat	Heavy Disciplinary Measures	1

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM

Sebagai salah satu upaya Perusahaan untuk memastikan kegiatan operasional yang patuh pada peraturan dan pedoman perilaku, Indonesia Power telah membentuk Sistem Pelaporan Pelanggaran (*whistle blowing system*/WBS). Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran merupakan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaan khususnya dalam bidang transparansi dan akuntabilitas. Kebijakan ini memfasilitasi semua pihak baik pimpinan, karyawan, maupun pihak luar yang terkait dengan Perusahaan untuk melakukan pelaporan pelanggaran terhadap adanya indikasi tindakan-tindakan yang melanggar dan/atau menyalahgunakan peraturan, tata nilai dan kebijakan Perusahaan.

As one of the Company's effort to ensure operational activities run consistently with the applicable regulations, Indonesia Power has put the WBS in place. The implementation of WBS demonstrates a commitment to strengthen the quality of good corporate governance, especially in terms of transparency and accountability. This policy accommodates all Indonesia Power personnel, from the leadership to employees as well as relevant parties outside the Company, as a way to flag indication of acts that infringe and/or breaks the rules, value system and the Company's policy.

Kebijakan dan Tujuan WBS

Dalam rangka memastikan praktik bisnis yang beretika, sehat dan berintegritas, Indonesia Power telah memiliki dan menerapkan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor 136.K/020/IP/2011 dan Nomor 011. SK/DEKOM-IP/2011 tentang Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*/ WBS) Indonesia Power. Kebijakan WBS merupakan jalur komunikasi pegawai, pelanggan, mitra kerja, dan stakeholder lainnya dalam melaporkan kejadian yang diduga berhubungan dengan tindakan *fraud*, kriminal, pelanggaran kebijakan perusahaan dan pelanggaran kode etik yang melibatkan segenap jajaran Indonesia Power.

Kebijakan WBS diharapkan dapat mendorong semua pihak untuk melaporkan pelanggaran tanpa disertai rasa takut akan menjadi korban, diskriminasi, atau mengalami kerugian. Di samping itu, adanya kebijakan WBS dimaksudkan untuk (a) mengungkapkan berbagai permasalahan yang tidak sesuai dengan etika dalam *Code of Conduct* maupun kebijakan perusahaan lainnya, (b) menjadi dasar dalam menangani pengaduan pelanggaran dari *stakeholders* untuk menjamin adanya mekanisme penyelesaian yang efektif dan (c) mendorong terciptanya reputasi Indonesia Power sebagai entitas bisnis yang bertanggung jawab.

WBS Policy and Purpose

In order to ensure ethical, healthy and high integrity business practices, Indonesia Power has stipulated and adopted a Whistle Blowing System Policy since 2011 based on Joint Decree of the Board of Commissioners No. 011.SK/DEKOM IP/2011 and Board of Directors No. 136.K/020/IP/2011 and on PT Indonesia Power Whistle Blowing System (WBS) Policy. WBS Policy provides a communication platform for employees, customers, vendors and other relevant parties to report event that is allegedly related to fraud, criminal act, violations of the Company's policy and to the Code of Conduct involving all levels at Indonesia Power.

WBS Policy is expected to encourage all parties to report violations without fear of victimization, discrimination, or loss. In addition, the WBS policy existence is aimed to (a) disclose issues that are inconsistent with Code of Conduct or other Company's regulations, (b) become the foundation to handle violation reports from stakeholders to ensure the existence of effective finishing solution and (c) encourage the establishment of Indonesia Power's reputation as responsible business entity.

Penyampaian Laporan Pelanggaran

Laporan yang dapat disampaikan melalui WBS adalah laporan tindak pelanggaran yang meliputi perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perusahaan maupun para pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh Pegawai, Direksi, Dewan Komisaris, Komite Dewan Komisaris mengacu pada Pedoman Etika Perusahaan. Pengaduan pelanggaran dapat disampaikan melalui *website* atau *email* maupun surat resmi. Indonesia Power memberi kesempatan seluas-luasnya bagi pelapor pengaduan pelanggaran, baik dari pihak internal Indonesia Power maupun *stakeholders* eksternal dengan mencantumkan identitas yang jelas maupun tanpa identitas, dan bukti pendukung adanya indikasi pelanggaran.

WBS Reporting Submission

Report that can be submitted through WBS is a report of violation act that covers unethical/immoral behavior, or other actions that may cause loss for the Company or stakeholders, conducted by Employee, Directors, Board of Commissioners, Board of Commissioners' Committees, and referring to Company's Code of Conduct. Violation report can be submitted through website or email or official letter. Indonesia Power opens up wide opportunity for the whistle blower to report violation, both from the internal party of Indonesia Power or external stakeholders, by putting clear identity or unknown, and proof of the violation indication.

Perlindungan Bagi Pelapor

Indonesia Power telah menerapkan berbagai langkah untuk memastikan bahwa setiap pelapor yang melapor dengan itikad baik akan dilindungi dan informasi yang masuk diperlakukan secara rahasia. Identitas pelapor hanya diketahui oleh admin pengaduan pelanggaran kecuali pelapor mengizinkan untuk dibuka identitasnya. Prinsip kerahasiaan identitas pelapor diharapkan dapat mendorong setiap pegawai melaporkan adanya dugaan pelanggaran, melindungi pelapor termasuk terhadap pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan atau pangkat, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya serta catatan yang merugikan dalam file data pribadinya. Apabila hasil investigasi menyimpulkan bahwa pengaduan yang disampaikan ternyata tidak benar atau mengandung unsur itikad tidak baik, menyampaikan bukti palsu, ada unsur kedengkian, tanpa dasar yang jelas, maka pelapor tersebut dapat digugat balik atau dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Whistle Blower Protection

Indonesia Power has taken an array of measures to ensure that every whistle blower who reports in good faith will be protected and the information will be treated confidentiality. The whistle blower's identity will be only known by the complaint administrator, unless the informant permits disclosure of information regarding its identity. The principle of confidentiality is expected to encourage any employee to report alleged violation, protect the whistleblower against unfair dismissal, demotion, harassment, or discrimination in any form, as well as adverse records on his personal file. If the investigation concluded that the report is untrue or contained element of bad faith or false proof, or there is an element of malice without clear foundation, the whistleblower may be sued or subject to sanctions in accordance with the prevailing regulations.

Pengelolaan WBS

Pengelola pengaduan pelanggaran sesuai kebijakan WBS yang ditetapkan dilakukan melalui 2 (dua) saluran. Pengaduan Pelanggaran jalur Dewan Komisaris, diketuai oleh Ketua Komite Audit, bertanggung jawab untuk menerima dan menangani pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Komite. Pengaduan pelanggaran jalur Direksi, terbagi berdasarkan jenjang jabatan oknum

Reporting Management

Violation reporting management in line with the WBS policy is set up through 2 (two) channels. Violation report through the Board of Commissioners is chaired by the Head of Audit Committee, and is responsible to receive and handle violation report that allegedly is committed by member of the Board of Directors, Board of Commissioners and Committees. Violation report through the Board of Directors is classified according

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM

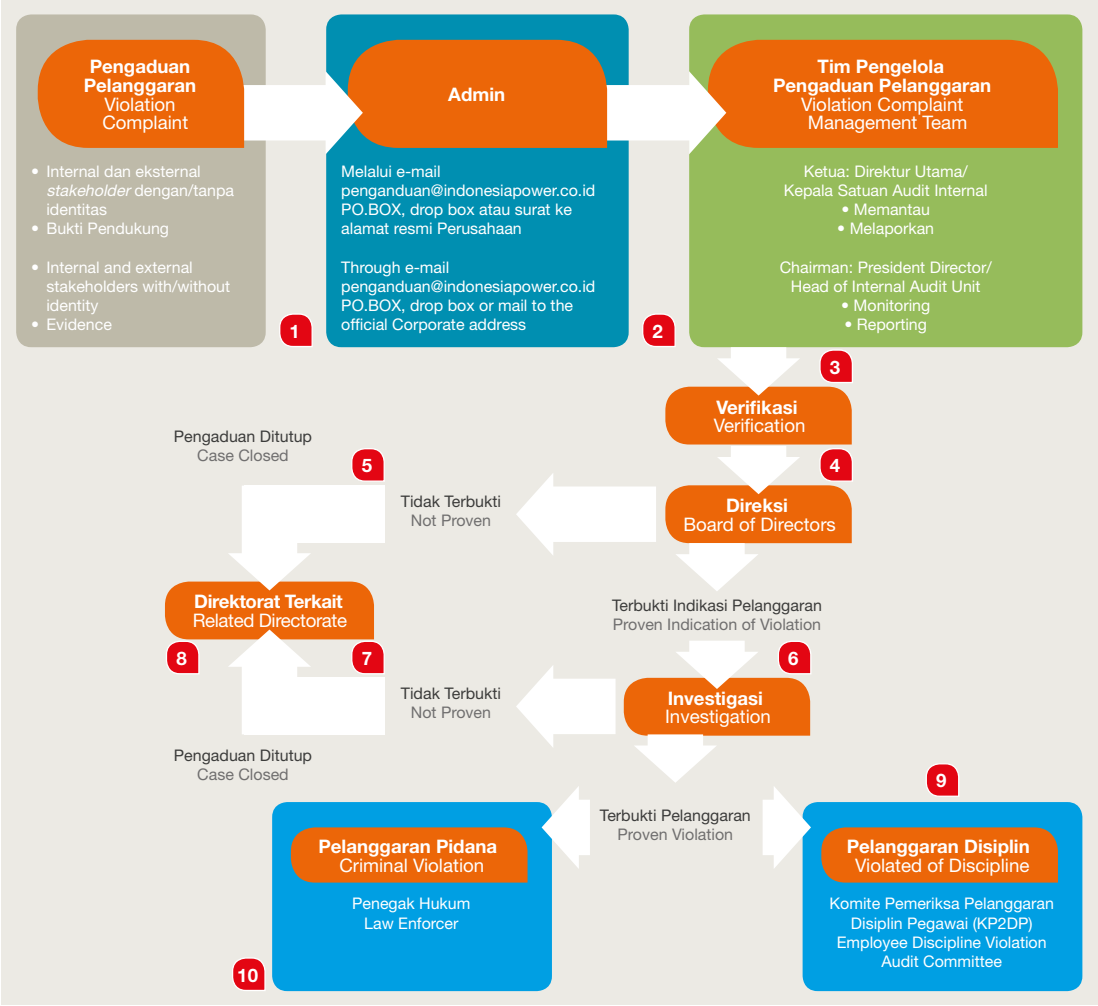
terduga pelaku pelanggaran, yaitu: (1) Pengaduan pelanggaran diduga dilakukan oleh pegawai jenjang Eksekutif Utama maka tim diketuai oleh Direktur Utama dan (2) Pengaduan pelanggaran diduga dilakukan oleh pegawai lainnya maka tim diketuai oleh Kepala Satuan Audit Internal.

to the level of the alleged perpetrator, i.e.: (1) When violation is allegedly conducted by Top Executives, then the team will be led by the President Director, and (2) When violation is allegedly committed by other employee levels, the team will be led by the Head of Internal Audit Unit.

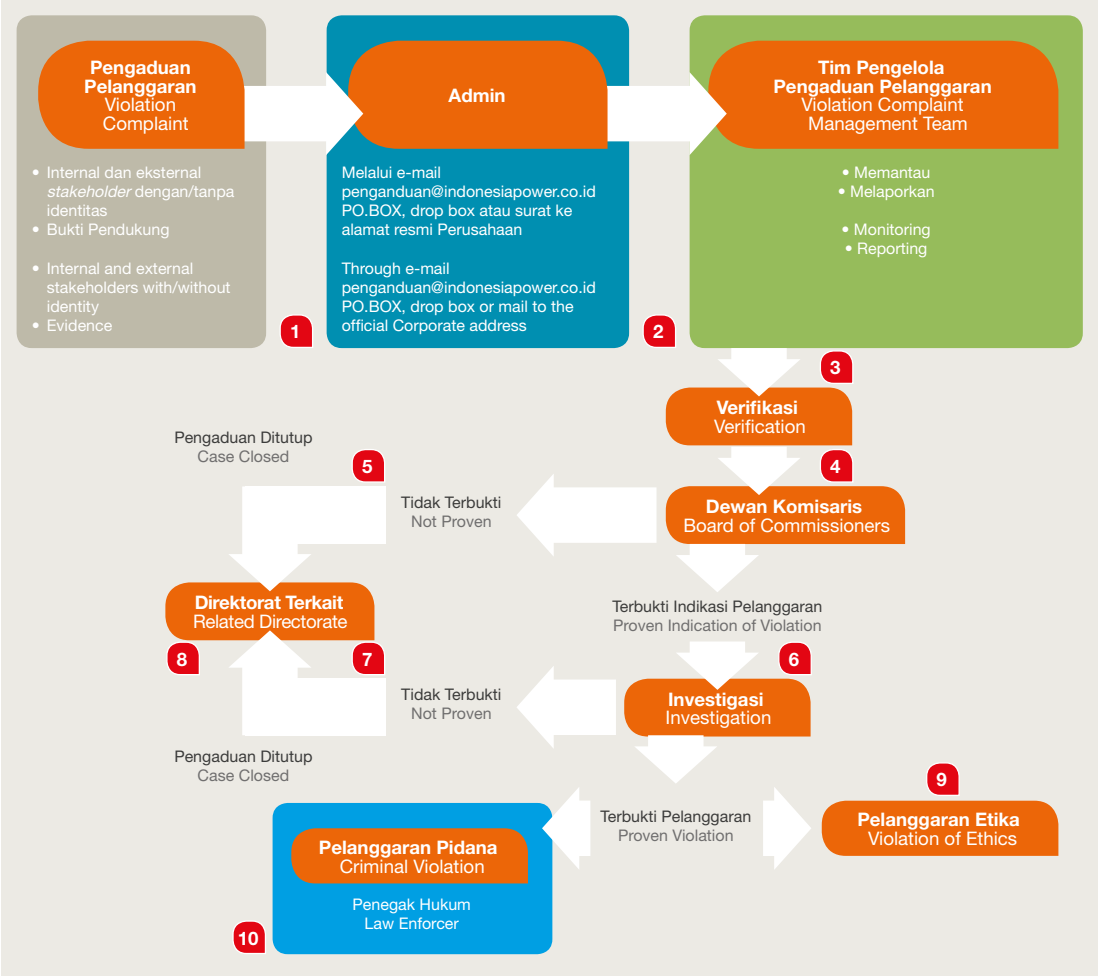
Mekanisme Pelaporan dan Penanganan Pengaduan

Mechanisms for Reporting and Complaint Handling

Skema WBS yang Melibatkan Oknum Pegawai
Scheme: WBS Involving Employees



Skema WBS yang Melibatkan Oknum Direksi dan Dewan Komisaris Beserta Organ Penunjangnya
Scheme: WBS Involving Members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Supporting Organs



Pengaduan yang masuk melalui kedua jalur pengaduan pelanggaran tersebut akan dilakukan proses verifikasi telebih dahulu untuk menunjukkan apakah pengaduan yang disampaikan benar dan ditemukan adanya bukti untuk ditindaklanjuti dengan proses investigasi. Pelaku pelanggaran yang terbukti berdasarkan hasil investigasi akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku tergantung jenis pelanggaran yang dilakukannya.

The report submitted via both lines will go through verification process to identify whether the report submitted is true and corroborated by evidence that needs to be followed in investigation process. The convicted perpetrator, based on the result of investigation will be processed in accordance with the applicable regulations depending on the type of violation committed.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM

Sosialisasi WBS

Sosialisasi terkait WBS diberikan kepada pihak internal melalui berbagai media antara lain dengan *workshop*, intranet, mading, brosur, buletin, *banner*, majalah Indonesia Power, maupun Laporan Tahunan. Sedangkan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan eksternal untuk tahun 2017 dilakukan melalui *website*, Laporan Tahunan, dan *Vendor Meeting* di Kantor Pusat maupun masing-masing Unit Bisnis. Melalui sosialisasi Indonesia Power berupaya memberikan pemahaman dan kesadaran seluruh karyawan maupun pihak terkait lainnya untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran guna meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran lain yang mungkin muncul.

Dissemination of the WBS Information

Dissemination of the WBS information is performed internally through numerous media such as workshop, intranet, wall magazine, brochure, bulletin, banner, Indonesia Power's magazine, and Annual Report. Socialization to the external stakeholders in 2016 is conducted through website, Annual Report, and Vendor Meeting in Head Office or each Unit. Through the dissemination, Indonesia Power attempts to ensure understanding and awareness on the part of every employee or other related parties to report any form of violations in order to minimize the occurrence of possible violations that may arise.

Jumlah Pengaduan dan Tindak Lanjutnya Tahun 2017

Indonesia Power terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan pelaporan dengan secara aktif merespon dan menindaklanjuti setiap pelaporan yang masuk. Hal tersebut diharapkan mampu menekan tingkat pelanggaran yang ada di lingkungan Perusahaan. Selama tahun 2017, pelaporan pelanggaran yang masuk sebanyak 10 laporan dan seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti.

Dalam mendukung penerapan sistem pelaporan di Perusahaan, Indonesia Power memberikan apresiasi bagi pelapor dan sanksi bagi pelaku pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan disiplin pegawai yang telah ditetapkan. Perusahaan terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan pelaporan dengan secara aktif merespon dan menindaklanjuti setiap pelaporan yang masuk. Pengaduan yang masuk telah ditindaklanjuti seluruhnya sampai dengan proses akhir.

Number of Reports and Their Follow-Ups in 2017

Indonesia Power continues to attempt to enhance the quality of reporting management by actively responding to it and following-up on every report. This is expected to be an effective way to diminish violation level within the Company's environment. In 2017, there were 10 violation reports with follow-ups having been resolved.

In order to support the whistleblowing system in the Company, Indonesia Power gives appreciation to the whistleblower and sanctions to the perpetrators in line with the laws and regulations and employee's disciplinary regulation that has been set forth. The Company strives to improve the quality of whistle blowing system by actively responding to and following up on every report received. The reports received had been followed up until the process completed.

Peran Dewan Komisaris terhadap Implementasi WBS

Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan atas kecukupan dan efektivitas pelaksanaan WBS di Perusahaan. Pemantauan pelaksanaan WBS diserahkan kepada Komite Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit. Laporan WBS juga dibahas dalam rapat Komite Audit dengan Kepala Satuan Audit Internal, dimana dalam rapat tersebut Dewan Komisaris memberikan rekomendasi terkait laporan WBS yaitu menyarankan kepada Satuan Audit Internal agar meminta unit yang bersangkutan mengupayakan penyelesaiannya secara tuntas. Dengan adanya pengawasan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan WBS serta mampu menekan tingkat pelanggaran yang ada di lingkungan Perusahaan.

Board of Commissioners' Roles on WBS Implementation

The Board of Commissioners is responsible for supervising the adequacy and effectiveness of WBS implementation in the Company. The monitoring of WBS implementation is handed over to the Board of Commissioners' Committee, i.e. Audit Committee. Specifically, WBS report is discussed in the Audit Committee's Meeting with the Head of Internal Audit where the Board of Commissioners gave recommendations related to WBS report, i.e. suggesting that the Internal Audit Unit to ask the related unit to try resolving the issue. The supervision is expected to improve the WBS management effectiveness as well as reduce the level of violations within the Company.

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI OLEH PERUSAHAAN
LEGAL ISSUES FACED BY THE COMPANY

Sepanjang tahun 2017, anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi Indonesia Power yang sedang menjabat tidak memiliki permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana.

In 2017, there were no members of the Board of Commissioners and Directors involved in legal issues, either civil or criminal cases.

Perkara penting yang dihadapi Perusahaan adalah Kasus Litigasi yang dihadapi oleh Perusahaan, Entitas Anak, Dewan Komisaris dan Direksi. Kasus Litigasi dapat diartikan sebagai permasalahan hukum yang penyelesaiannya dilakukan melalui Lembaga Peradilan, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Pajak, maupun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam melaksanakan kegiatan Perusahaan, manajemen dan struktural Indonesia Power senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengantisipasi setiap tindakan yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum.

Legal issues that the Company faced included litigation involving the Company, Subsidiaries, the Board of Commissioners and Board of Directors. Litigation is defined here as a legal issue of which its resolution is achieved through legal proceedings in court, either District Court, Provincial Court, Tax Court or Court for Corruption Crimes. In conducting the Company's activities, Indonesia Power's structural management always ensure compliance with the applicable regulation and anticipates all actions that potentially lead to legal issues.

Tabel Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan Tahun 2017
Table: Legal Issues Faced by the Company in 2017

Tergugat Defendant		Jumlah Perkara Tahun 2017 Number of Case in 2017	
		Perdata Civil	Pidana Criminal
Perusahaan	Company	5	1
Dewan Komisaris	Board of Commissioners	0	0
Direksi	Board of Directors	0	0
Entitas Anak	Subsidiaries	0	0

Permasalahan Hukum Perusahaan

Sampai dengan 31 Desember 2017, terdapat 5 (lima) kasus hukum perdata dimana 4 (empat) kasus hukum telah selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan 1 (satu) kasus hukum masih dalam proses penyelesaian. Sedangkan permasalahan hukum pidana yang terjadi pada tahun 2017 yaitu sebanyak 1 (satu) kasus pidana yang masih dalam proses penyelesaian.

Company's Legal Issues

As per December 31, 2017, there were five civil cases of which four were settled and the related decisions have had permanent legal forces while one case remains in progress. As for criminal case, Indonesia Power faced one case in 2017 which is currently still in the resolution process.

Permasalahan Hukum Perdata
Civil Case

Pihak yang Berperkara Parties Involved in the Case	Pemohon: Leader Konsorsium PT Boma Bisma Indra (Persero) - PT Indo Surya Persada Termohon I: Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya Termohon II: PT Indonesia Power Unit Pembangkitan Semarang	Applicant: Consortium Leader PT Boma Bisma Indra (Persero) - PT Indo Surya Persada (BBI-ISP) Defendant I: Indonesia National Board of Arbitration (BANI) Surabaya Representative Defendant II: PT Indonesia Power Generating Unit Semarang
Pokok Permasalahan Perkara Merit of the Case	a. PT Indonesia Power dimenangkan putusan BANI Surabaya atas Perkara Arbitrase No. 18/ARB/BANI-SBY/VI/2015, isi putusan sebagai berikut: i. Pada pokoknya Majelis Arbiter berpendapat bahwa Termohon (Indonesia Power UP Semarang) tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil yang diajukan oleh Pemohon (Konsorsium) sebesar Rp7.670.937.380,- telah ditolak BANI ii. PT Indonesia Power UP Semarang berhak atas pencairan jaminan pelaksanaan kepada Bank Jatim sebesar Rp509.303.950,- b. Leader konsorsium PT BBI-ISP mengajukan permohonan pembatalan putusan BANI Sby kepada PN Semarang dan PN Semarang mengabulkan permohonan pembatalan putusan BANI Surabaya dengan nilai gugatan sebesar Rp2.600.000.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) c. Indonesia Power bekerjasama dengan JAMDATUN dan telah ditunjuk Jaksa Pengacara Negara pada JAMDATUN mewakili IP sebagai kuasa hukum dalam proses banding/kasasi di Mahkamah Agung.	a. PT Indonesia Power won as ruled by BANI Surabaya in Arbitration Case No. 18/ARB/BANI-SBY/VI/2015, of which the decision is detailed as follows: i. In essence, the Arbitrary Panel is of the opinion that the Defendant (Indonesia Power Semarang GU) is not proven to have committed Unlawful Act, so that the claim for material and immaterial damages filed by the Applicant (Consortium) in the amount of Rp7,670,937,380 was rejected by BANI. ii. PT Indonesia Power Semarang GU is entitled to disbursement of guarantee to Bank Jatim adding up to Rp509,303,950. b. Consortium leader BBI-ISP submitted a request for revocation of BANI Surabaya's decision to Semarang District Court and the Court awarded decision in favor of the applicant by granted a damage totaling Rp2,600,000,000 (two billion six hundred million rupiahs). c. Indonesia Power works closely with the Assistant Attorney General for Civil and State Administrative Cases (JAMDATUN) and a Government Law Officer had been appointed to represent IP as a legal representative in the appeal/cassation process at the Supreme Court.
Status Penyelesaian Perkara Status of Resolution	Telah diputus pada tingkat kasasi dengan memenangkan PT Indonesia Power	Decision had been made on appeal court that goes for PT Indonesia Power.
Pengaruh signifikan terhadap kondisi Perusahaan Significant impact on the Company's condition	Diajukannya Permohonan Peninjauan Kembali dari konsorsium	The consortium submitted a request for judicial review.

Pihak yang Berperkara Parties Involved in the Case	PT Belaputera Intiland PT Indonesia Power	PT Belaputera Intiland PT Indonesia Power
Pokok Permasalahan Perkara Merit of the Case	Bahwa di atas tanah HPL No. 1 milik PT Indonesia Power sebagian tanahnya di pinggiran waduk + 5 Ha telah diklaim sebagai milik PT Belaputera Intiland (PT BI) kemudian berdasarkan hasil rekonstruksi batas yang dilakukan oleh PT Geohetrands (konsultan pengukuran tanah PT Indonesia Power) tahun 2014 diketahui telah terjadi overlapping/ tumpang tindih seluas 25,14 Ha dengan tanah milik PT BI yaitu sertifikat Hak Guna Bangunan No. 12 dan 16 Desa Cipeundeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung yang secara fisik berbatasan langsung dengan Waduk Saguling	That some of the land under land use right with certificate number HPL No. 1 held by PT Indonesia Power on the banks of Saguling Reservoir with an area of +5 ha had been claimed by PT Belaputera Intiland (PT BI), and then based on reconstruction of the boundaries conducted by PT Geohetrands (land measurement consultant that the Company hired) in 2014, it was identified to have overlapped with land owned by PT BI under the Right to Build with certificate number HGB No. 12 and 16 in Cipeundeuy Village, Padalarang Sub-district, Bandung Regency which directly borders on the reservoir.

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI OLEH PERUSAHAAN

LEGAL ISSUES FACED BY THE COMPANY

Status Penyelesaian Perkara Status of Resolution	a. PT Indonesia Power pada tahun 2007 mengajukan gugatan Perdata Nomor 62/ PDT.G/2007/PN.BB di Pengadilan Negeri Bale Bandung b. Putusan sela PN Bale Bandung menyatakan Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat k. c. PT Indonesia Power mengajukan upaya banding di Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yang kemudian Putusan d. Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 04 Februari 2008 menguatkan putusan PN Bale Bandung e. Pada tanggal 07 Agustus 2008 PT Indonesia Power melaporkan PT BI ke POLDA Jabar atas dugaan tindak pidana f. Kedua belah pihak telah menyepakati untuk menunjuk BPN Kanwil Jabar sebagai Mediator dalam penyelesaian masalah serta penentuan batas tanah milik kedua belah pihak. g. Pengukuran bersama antara PT Indonesia Power, PT Belaputera dan BPN RI Pusat dengan dibantu BPN Kanwil dan Kantor Pertanahan Bandung Barat. Saat ini penyelesaian sengketa batas tanah ditangani langsung oleh BPN RI, dengan menunjuk LAPI ITB untuk melakukan pengukuran dan pemetaan ulang batas tanah IP dan PT Belaputera.	a. PT Indonesia Power in 2007 filed a civil claim under registration number No. 62/ PDT.G/2007/PN.BB with Bale Bandung District Court. b. The injunction from the District Court stated that the District Court is not authorized to examine and adjudicate the Plaintiff's claim. c. PT Indonesia Power filed an appeal with the High Court of West Java, in which the District Court decision was enforced to become a Verdict. d. The High Court of West Java on February 4, 2008 issued a verdict that strengthened the District Court's decision. e. On August 7, 2008 PT Indonesia Power reported PT BI to POLDA West Java on an alleged criminal offense. f. Both parties had agreed to appoint the National Land Agency of West Java (BPN West Java) as Mediator in the settlement of dispute and delineation of boundaries between lands owned by both parties. g. Joint land measurement between PT Indonesia Power, PT Belaputera and BPN RI at national level with the assistance from BPN Regional Office and West Bandung Land Office. Currently the settlement of dispute on land boundary is handled directly by BPN RI, by appointing LAPI ITB to conduct measurement and remapping boundaries of both IP's and PT Belaputera's land.
Pengaruh signifikan terhadap kondisi Perusahaan Significant impact on the Company's condition	Terdapat potensi pengurangan luas tanah HPL No. 1 seluas tanah yang overlapping	There is a potential reduction in the total area of land under HPL No. 1 permit that underwent overlap.

Pihak yang Berperkara Parties Involved in the Case	PT Indonesia Power PT Dam Utama Sakti Nandang Ruhana, dkk	PT Indonesia Power PT Dam Utama Sakti Nandang Ruhana, and partners
Pokok Permasalahan Perkara Merit of the Case	a. Perselisihan terkait dengan pembangunan jalan oleh PT Dam Utama Sakti di atas tanah milik PT Indonesia Power yang melintas di atas saluran air bawah tanah b. PT IP telah dimenangkan melalui Putusan MA No. 2225 K/PDT/2009 dimana berdasarkan putusan MA dinyatakan bahwa PT Dam Utama Sakti dihukum untuk membongkar jalan yang dibangun di atas tanah milik PT Indonesia Power. c. Dalam pelaksanaan upaya eksekusi atas putusan MA No. 2225 K/PDT/2009 PT Indonesia Power mendapat gugatan Peninjauan Kembali (PK) dari Nandang Ruhana, dkk. d. Meskipun demikian, PT Indonesia Power tetap mengupayakan agar Putusan MA No. 2225 K/PDT/2009 tetap dapat dilaksanakan dengan mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung dan Ketua Muda Bidang Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia	a. Disputes related to road construction by PT Dam Utama Sakti on land owned by PT Indonesia Power which passes over a waterway underground. b. PT IP has won the case through Supreme Court Verdict No. 2225 K/PDT/2009 where the Supreme Court ordered that PT Dam Utama Sakti dismantle the road it built on a piece of land owned by PT Indonesia Power. c. In the execution of the Supreme Court's verdict, PT Indonesia Power received a Judicial Review (PK) appeal from Nandang Ruhana, and partners. d. However, PT Indonesia Power still strives that Verdict No. 2225 K/PDT/2009 can still be enforced by applying for execution request to the Chairman of Bandung District Court and Assistant Head for Civil Cases of the Supreme Court of the Republic of Indonesia.
Status Penyelesaian Perkara Status of Resolution	Telah diputus MA dengan mengalahkan PT Indonesia Power	The Supreme Court awarded a verdict against PT Indonesia Power.

Pengaruh signifikan terhadap kondisi Perusahaan Significant impact on the Company's condition	Kerusakan tunnel air serta fasilitas lainnya yang berada di bawah jalan/jembatan karena adanya tumpuan beban yang berlebih	Damage to water tunnel and other facilities under the road/bridge due to excessive load.

Pihak yang Berperkara Parties Involved in the Case	Pemohon arbitrase - Konsorsium PT Energi Prima Nusantara - PT Pulau Graha Amerindo Termohon Arbitrase - PT Indonesia Power	Applicant for Arbitration - Consortium consisting of PT Pulau Graha Amerindo and PT Energi Prima Nusantara (PGA-EPN Consortium) Arbitration Defendant - PT Indonesia Power
Pokok Permasalahan Perkara Merit of the Case	a. Indonesia Power dan Kons. PGA-EPN telah mengadakan Perjanjian tentang Pekerjaan Jasa Sewa 2 (dua) Unit Alat Bongkar Batubara di Dermaga PLTU Suralaya pada tanggal 27 Oktober 2010, yang telah diubah dengan Addendum I Perjanjian tanggal 12 Agustus 2011 ("Perjanjian"). b. Dalam pelaksanaan Perjanjian tsb, Kons. PGA-EPN tidak dapat melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai Perjanjian (Wanprestasi) sehingga Kons. PGA-EPN dikenakan maksimal denda keterlambatan untuk 2 unit alat bongkar dan denda kinerja untuk 1 unit alat bongkar. Namun ternyata terdapat perbedaan perhitungan denda antara Indonesia Power dan Kons. PGA-EPN, yang kemudian menyebabkan timbulnya sengketa diantara Para Pihak. c. Penyelesaian Sengketa yang dilakukan Indonesia Power dan Kons. PGA-EPN tidak kunjung menemukan titik temu dan terjadi berlarut-larut,karena Para Pihak tidak dapat mengakomodir keinginan Pihak lainnya, sehingga pada akhirnya sengketa ini dibawa ke BANI	a. Indonesia Power and the PGA-EPN Consortium entered into a Lease Service Agreement of 2 (two) Units of Coal Unloading Equipment at SPP Suralaya on October 27, 2010, as amended by Addendum I to the Agreement dated August 12, 2011 (the "Agreement"). b. In the implementation of the Agreement, the PGA-EPN could not meet all of its obligations under the Agreement (breach) so that it was subjected to a maximum fine for late delivery for 2 coal unloading units and a performance penalty for 1 unloading unit. However, there were differences in the calculation of fines between Indonesia Power and the Consortium which then sparked a dispute between the Parties. c. Attempts at settlement of dispute between these two parties had not reached a common ground and it was protracted as the Parties could not accommodate the wishes of the other Party, so in the end the dispute was brought to the BANI.
Status Penyelesaian Perkara Status of Resolution	a. Telah diputus BANI namun sampai dengan saat ini belum dapat dieksekusi karena keberadaan PT Pulau Graha Amerindo yang merupakan anggota konsorsium tidak ditemukan keberadaannya (kantor sesuai kedudukan hukumnya sudah tidak operasi) b. PT Energi Prima Nusantara menyampaikan bahwa terhadap kewajiban konsorsium kepada PT Indonesia Power, PT EPN maksimum membayar sebesar Rp500 juta.	a. BANI had issued a decision, but it has yet to be able to be executed because the presence of PT Pulau Graha Amerindo as a member of the consortium was not found (the office according to its legal domicile is no longer in operations) b. PT Energi Prima Nusantara acknowledged that in relation to the consortium obligation to PT Indonesia Power, PT EPN shall pay a maximum of Rp500 million.
Pengaruh signifikan terhadap kondisi Perusahaan Significant impact on the Company's condition	Konsorsium belum dapat membayar kewajibannya sesuai putusan BANI yaitu Rp4.740.889.833.	The consortium has not been able to pay its obligations under BANI's decision which adds up to Rp4,740,889,833.

Pihak yang Berperkara Parties Involved in the Case	Arnold Pardede PT Indonesia Power	Arnold Pardede PT Indonesia Power
Pokok Permasalahan Perkara Merit of the Case	a. Sdr. Arnold mengajukan gugatan pada tanggal 6 Januari 2017, Nomor Gugatan 04/Pdt.G/2017/PN.Srg, atas pembebasan lahan untuk proyek PLTU 2x1000 MW Banten Suralaya b. Tanggal 5 Juni 2017, Majelis Hakin Pengadilan Negeri Serang mengeluarkan putusan terkait gugatan Sdr. Arnold, yang isinya menyatakan gugatan kabur dan tidak dapat diterima c. Tanggal 5 Juli 2017, Sdr. Arnold menyerahkan Memori Kasasi ke Mahkamah Agung	a. Mr. Arnold filed a claim on January 6, 2017, under registration number: No. 04/Pdt.G/2017/PN.Srg, for land relinquishment of a 2x1000 MW project in SPP Banten Suralaya. b. On June 5, 2017, the Panel of Judges of Serang District Court issued a decision related to Mr. Arnold's claim, whose content stated the lawsuit is unsubstantiated and thus unacceptable. c. On July 5, 2017, Mr. Arnold handed an Appeal Brief to the Supreme Court.

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI OLEH PERUSAHAAN

LEGAL ISSUES FACED BY THE COMPANY

Status Penyelesaian Perkara Status of Resolution	Berdasarkan informasi dari JPN selaku kuasa hukum PT Indonesia Power, telah diputus dengan memenangkan PT Indonesia Power	Based on information from the Government Law Office as PT Indonesia Power's attorney, the decision had swung to the Company's favor.
Pengaruh signifikan terhadap kondisi Perusahaan Significant impact on the Company's condition	Tidak ada pengaruh bagi Perusahaan	No influence for the Company.

Permasalahan Hukum Pidana

Criminal Case

Pihak yang Berperkara Parties Involved in the Case	PT Belaputera Intiland PT Indonesia Power	PT Belaputera Intiland PT Indonesia Power
Pokok Permasalahan Perkara Merit of the Case	a. PT Belaputera Intiland memulai pelaksanaan pembangunan jembatan di atas sungai Cireundeu dan telah berjalan sejak Januari 2013 b. PT Indonesia Power menyampaikan keberatan dan tidak memberikan izin kepada PT Belaputera Intiland untuk melaksanakan pembangunan jembatan di atas Sungai Cireundeu, melalui Surat PT Indonesia Power No. 717/090/IP/2013 tanggal 13 Juni 2013 Perihal Tanggapan PT Indonesia Power Atas Rencana Pembangunan Jembatan Cireundeu c. PT Indonesia Power telah berulang kali memberikan surat peringatan untuk menghentikan kegiatan pembangunan tanpa izin tersebut kepada PT Belaputera Intiland. d. PT IP melalui kuasa hukum Iwan Agustian, SH telah membuat laporan polisi Nomor: LPB/18/I/2016/JABAR tanggal 9 Januari 2016 dengan terlapor Sdr. Sanusi Tanawi (PT Belaputera Intiland)	a. PT Belaputera commenced construction of a bridge over the Cireundeu River and this has been running since January 2013. b. PT Indonesia Power complained and did not give permission to PT Belaputera Intiland to carry out the construction through a letter under registration number: No. 717/090/IP/2013 dated June 13, 2013 on PT Indonesia Power Response to Cireundeu Bridge Construction Plan. c. PT Indonesia Power has repeatedly issued a warning notice to stop the construction activities without such permission to PT Belaputera Intiland. d. IP through its attorney Iwan Agustian, S.H. submitted a police report under registration number: LPB/18/I/2016/JABAR dated January 9, 2016 with the reported Mr. Sanusi Tanawi (PT Belaputera Intiland)
Status Penyelesaian Perkara Status of Resolution	Progres pelaporan polisi sebagai berikut: 1. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) No. B/196/III/2016/DIT.RESKRIM UM tertanggal 21 maret 2016, penyidik berkesimpulan telah memiliki bukti permulaan yang cukup sehingga menaikan status dari penyelidikan ke penyidikan. 2. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Polda Jabar, sesuai dengan surat tanggal 27 Januari 2017, No. B/73/I/2017/Ditreskrim Um, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang pada pokoknya memberitahukan bahwa proses penyidikan perkara dihentikan karena bukan tindak pidana.	Progress on the follow up of the police report is as follows: 1. Based on Notice on the Progress of Investigations (SP2HP) No. B/196/III/2016/DITRESKRIM UM dated March 21, 2016, the investigator concluded that there is sufficient initial proof to change the status from inquiry to investigation. 2. Based on SP2HP from the West Java Provincial Police, pursuant to letter dated January 27, 2017, No. B/73/I/2017/DIT. RESKRIM UM, the process of investigation into the case is terminated because it is not a crime.
Pengaruh signifikan terhadap kondisi Perusahaan Significant impact on the Company's condition	a. Penggunaan Tanah Indonesia Power tanpa Izin b. Kerusakan Lingkungan sekitar waduk	a. Using Indonesia Power's land without permission b. Environmental damage around the dam

Informasi terkait Sanksi Administrasi

Sepanjang tahun 2017, tidak ada sanksi administrasi yang dikenakan kepada Perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan Dewan Komisaris oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan, dan lainnya).

Administration Sanction based Information

In 2017, no administration sanction was imposed to the Company, subsidiaries, member of the Board of Directors and Board of Commissioners by related authorities (capital market, banking and so on).

KEBIJAKAN TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK KREDITUR

POLICY ON THE FULFILLMENT OF CREDITOR'S RIGHTS

Dalam praktik ASEAN *Corporate Governance Scorecard* mengungkapkan bahwa mitra bisnis termasuk kreditur berhak memperoleh informasi yang relevan sesuai hubungan bisnis dengan perusahaan sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan yang adil dan wajar. Lebih lanjut disebutkan bahwa untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, Indonesia Power menyediakan informasi material dan relevan, mudah diakses, dan dipahami oleh Pemangku Kepentingan termasuk kreditur.

The implementation of ASEAN Corporate Governance Scorecard shows that such business partners as creditor reserve the rights to obtain information relevant to the relationship at hand in order to support both parties in making fair and reasonable decisions. Further, to maintain objectivity in running the business, the Company provides material and relevant information, which is easy to access and easy to understand by the Stakeholders, including creditor.

Kebijakan hubungan dengan kreditur tertuang dalam Kode etik Perusahaan yang di dalamnya diatur mengenai berbagai hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, antara lain sebagai berikut:

The policy regarding relationship with creditors is written in the Company's Code of Conduct that regulates various things that are either allowed and not allowed, such as:

The Do's	
• Pemilihan berdasarkan kreditur/investor dilakukan aspek kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan serta berdasarkan prosedur dan mekanisme yang berlaku. • Menyampaikan informasi keuangan maupun non-keuangan secara akuntabel untuk menjaga kepercayaan kreditur/investor; • Kreditur dan investor mematuhi ketentuan yang berlaku; • Komitmen untuk memenuhi setiap kontrak perjanjian yang telah disepakati dengan kreditur/ investor; • Syarat perjanjian mengedepankan prinsip transparansi dan kewajaran (*fairness*) sehingga tidak merugikan salah satu pihak.	• Creditor/investor is selected based on the credibility and bonafide aspects which can be accounted for and has the applicable procedure and mechanism as it underlying foundation. • Presenting both financial statement and non-financial report in an accountable manner to maintain the creditor/investor's trust. • Both creditor and investor comply with the prevailing laws. • Commitment to fulfill every contract agreement agreed with the creditor/investor. • Terms of agreement prioritize transparency and fairness, so they do not harm either party.

The Don't's	
• Pembukuan ganda untuk kepentingan kreditur/ investor; • Pelanggaran kontrak/perjanjian; • Syarat perjanjian yang tidak transparan dan wajar.	• Double bookkeeping for the benefit of creditors. • Violation of contract/agreement • Term of agreements that are not transparent and reasonable

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

ACCESS TO INFORMATION AND COMPANY DATA

Indonesia Power menjamin hak publik untuk mendapatkan informasi yang relevan dan dibutuhkan sepanjang informasi tersebut tidak bersifat rahasia. Untuk itu Perusahaan senantiasa memberikan informasi secara tepat waktu, akurat lengkap sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku maupun etika bisnis mengenai Perusahaan kepada Pemegang Saham dan *Stakeholders*. Penyebaran informasi kepada seluruh pemangku kepentingan merupakan bagian penting dari implementasi prinsip transparansi informasi. Oleh karena itu Perusahaan menyediakan akses informasi seluasluasnya melalui berbagai media.

Indonesia Power guarantees the public's right to relevant and necessary information as long as it is not of a confidential nature. Therefore, the Company at all times strives to provide both the Shareholders and Stakeholders with punctual, accurate and thorough information in accordance with the relevant laws and regulations as well as business ethics of the Company. The dissemination of information to all stakeholders is pivotal to the implementation of information transparency principle. Thus, the Company provides the information and opens wide access through various media to the public.

Indonesia Power telah memiliki kebijakan mengenai keterbukaan informasi yang diatur dalam Keputusan Direksi Nomor 37.K/010/IP/2012 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pedoman Komunikasi Perusahaan dan Keputusan Direksi Nomor 246.K/010/IP/2017 tanggal 31 Desember 2017 tentang Pelayanan, Pengungkapan dan Keterbukaan Infomasi Publik. Aspek yang diatur dalam kebijakan tersebut, antara lain sebagai berikut:

Indonesia Power has regulated information transparency policy as specified in Director's Decree No. 37.K/010/IP/2012 dated March 21, 2012 on Corporate Communication Guidelines and Director's Decree No. 246.K/010/IP/2017 dated December 31, 2017 on Public Information Services, Disclosure and Transparency. The following table explains some aspects regulated in this policy:

Pedoman Komunikasi Perusahaan Corporate Communication Guidelines		**Pelayanan, Pengungkapan dan Keterbukaan Infomasi Publik** Public Information Services, Disclosure and Transparency	
Komunikasi Perusahaan, *Stakeholders* Perusahaan, Strategi Komunikasi, Penanggung Jawab Kegiatan Komunikasi Perusahaan, Klasifikasi Informasi dan Pengungkapan Informasi ke Publik, Juru Bicara dan Substansi Materi Informasi, Koordinasi Pengumpulan Data dan Penyebarannya, Manajemen Krisis, Desentralisasi Pengelolaan Komunikasi, Program dan Anggaran dan Pelaporan dan Evaluasi	Corporate Communication, Company's Stakeholders, Communication Strategy, PIC of Corporate Communication Activities, Classification of Information and Disclosure of Information to the Public, Spoke Person and Information Substance, Coordination of Data Collection and Dissemination, Crisis Management, Decentralized Communication Management, Program and Budgeting as well as Reporting and Evaluation	Pengungkapan Informasi Publik, Hak Pemohon Informasi Publik, Kewajiban Pengguna Informasi Publik, Hak dan Kewajiban Perusahaan, Mekanisme Penyampaian Informasi Publik, Pengelolaan Informasi Publik, Tugas dan Tanggung Jawab PPID, Wewenang PPID, Standar Pelayanan Informasi Publik, Pelanggaran terhadap Pengungkapan Informasi Publik.	Disclosure of Public Information, Rights of the Public Information Applicant, Duties of Public Information User, Company's Duties and Responsibilities, Mechanism of Public Information Submission, Management of Public Information, Duties and Responsibilities of PPID, Authorities of PPID, Standard of Public Information Services, Violation to Disclosure of Public Information.

Pengelola Akses Informasi

Indonesia Power telah menunjuk juru bicara sekaligus pejabat pengelola informasi dan dokumen (PPID) Perusahaan, yaitu Sekretaris Perusahaan sebagai PPID Kantor Pusat dan Manajer Pengelola Kehumasan sebagai PPID Unit Kerja.

Information Access Manager

Indonesia Power has appointed spoke person as well as information and document officer executives (PPID) of the Company, i.e. Corporate Secretary as PPID at the Head Office and Public Relations Manager as PPID in a Work Unit.

Pelayanan Informasi Publik PT Indonesia Power
Kantor Pusat
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18, Lantai 3, Jakarta 12950
Tel 021 (526 7666), Fax 021 (5252623)
Website www.indonesiapower.co.id

PT Indonesia Power Information Center
Head Office
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18, 3rd Floor, Jakarta 12950
Tel 021 (526 7666), Fax 021 (5252623)
Website www.indonesiapower.co.id

Melalui pelayanan informasi publik ini, masyarakat dapat mengakses dan mengetahui informasi mengenai Perusahaan, Proses Bisnis, tanggung jawab sosial Perusahaan, dan informasi terkait lainnya yang diatur oleh Undang-undang.

Through the public information services, the public can access and gain information about the Company, Business Process, Corporate Social Responsibility and other relevant information regulated by Law.

Media Informasi dan Komunikasi

Indonesia Power senantiasa memberikan kemudahan informasi kepada *stakeholders* untuk mengakses informasi mengenai Perusahaan melalui media/sarana komunikasi yang telah disediakan antara lain sebagai berikut:

Communication and Information Media

Indonesia Power continues to allow its stakeholders to easily and conveniently access information about the Company through communication media provided, such as:

Website

Stakeholders dapat mengakses informasi komprehensif mengenai kegiatan operasional dan kinerja Perusahaan serta berbagai informasi lain yang diperlukan oleh pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan mengakses situs www.indonesiapower.co.id. Informasi dalam *website* disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang mencakup informasi antara lain terkait dengan Profil Perusahaan secara lengkap; Program Korporat yang dilakukan meliputi Manajemen Mutu, Manajemen Aset, serta Budaya Perusahaan; Tata Kelola Perusahaan, Laporan Publikasi; Pedoman Etika Perusahaan; Kebijakan Sistem

Website

Stakeholders can access comprehensive information related to the Company's operations and performance, as well as other information required by shareholders and other interested parties by accessing www.indonesiapower.co.id. Information in the website is presented in Bahasa Indonesia and English, and covers the Company Profile completely, Corporate Program conducted, including Quality Management, Assets Management, as well as Corporate Culture; Governance, Publication Report; Corporate Code of Ethics; Whistleblowing Policy, and Statistics Report. For more interactive communication with the stakeholder,

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

ACCESS TO INFORMATION AND COMPANY DATA

pelaporan Pelanggaran dan Laporan Statistik. Untuk komunikasi interaktif dengan *stakeholder*, Indonesia Power menyediakan email: kontak-ip@indonesiapower.co.id

Indonesia Power provides an email contact: kontakip@indonesiapower.co.id.



Intranet

Intranet merupakan media *online* bagi internal Indonesia Power yang menyampaikan informasi aktivitas Perusahaan dan pegawai yang diperbaharui setiap saat. Intranet tersebut dapat diakses oleh setiap pegawai yang terhubung dengan jaringan internal Perusahaan (*Wide Area Network*/WAN). Intranet Perusahaan di-*update* rata-rata 4-8 berita per hari.

Media Elektronik Lainnya

Media elektronik yang digunakan oleh Indonesia Power sebagai sarana penyebaran data dan informasi Perusahaan, antara lain yaitu E-mail, TV Wall sebagai Manajemen Visual dan Video Conference. TV Wall di-*update* setiap 2-3 kali/hari kerja.

Media Cetak

Berkaitan dengan media cetak, Indonesia Power memberikan informasi kepada pemegang saham dan *stakeholders* dalam bentuk Majalah In.Power, majalah dinding dan poster. Majalah mencakup segala kegiatan Indonesia Power yang perlu diketahui oleh pemegang saham dan *stakeholder* maupun publik. Majalah tersebut terbit setiap dua bulan sebanyak enam edisi.

Intranet

Intranet is an online medium used internally by Indonesia Power personnel to disseminate information concerning the Company's activities and employees that are updated at any point of time. The intranet can be accessed by every employee connected to the Company's internal network (Wide Area Network/WAN). It has an average of 4-8 new updates every day.

Other Electronic Media

Electronic media that Indonesia Power uses to distribute data and information regarding the Company include email, TV Wall as Visual Management and Video Conference. The TV Wall is updated 2-3 times every business day.

Printed Media

Regarding the printed media, Indonesia provides information to the Shareholders and Stakeholders in the form of In.Power Magazine, wall magazine and poster. These magazines cover all Indonesia Power's business activities that the shareholders and stakeholders and also the public need to know. Such magazines are published bi-monthly in six editions for a year.

Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan

Indonesia Power menyediakan sarana informasi melalui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang disusun setiap tahun. Laporan ini disampaikan kepada Pemegang Saham, regulator, media massa dan masyarakat.

Annual and Sustainable Report

Indonesia Power provides information through Annual Report and Sustainability Report that are prepared on a yearly basis. The Reports are delivered to Shareholders, regulators, mass media and the general public.

Forum Komunikasi Internal

Indonesia Power menyediakan saluran komunikasi sebagai sarana diskusi antara pegawai dengan manajemen yaitu melalui *Coffee Morning*, *Team Briefing* dan *e-buletin* mingguan Indonesia Power *Weekly News* (IPWN). Hasil *Coffee Morning* secara elektronik disebarluaskan melalui *e-mail*, IPWN, dan Manajemen Visual (TV *Wall*). *Coffee morning* adalah saluran tatap muka langsung antara Manajemen dan pegawai yang dilaksanakan 1 bulan sekali. Komunikasi ini berlangsung dua arah karena Manajemen dapat menyampaikan arahan dan mensosialisasikan program kerja Perusahaan kepada seluruh pegawai dan pegawai dapat memberikan masukan dan kritikan langsung maupun tidak langsung kepada manajemen. Selain itu, beberapa Divisi di Indonesia Power juga telah melakukan komunikasi dua arah secara konsisten dengan melibatkan karyawan melalui Team Briefing yang dilakukan satu bulan sekali. Selama tahun 2017 *e-buletin Inpower Weekly News* (IPWN) terbit setiap minggu sebanyak 50 edisi.

Internal Communication Forum

Indonesia Power provides communication channel as a means of discussion between the employee sand management, i.e. through Coffee Morning, Team Briefing, and weekly e-bulletin Indonesia Power Weekly News (IPWN). Coffee Morning results is electronically disseminated through e-mail, IPWN, and Visual Management (TV Wall). Coffee morning is a direct face-to-face between the Management and employee conducted once a month. The communication is two ways because the Management can provide direction and elaborate the Company's work program to every employee, and employees may give input and feedback directly or indirectly to the management. In addition, some Divisions in Indonesia Power have also conducted two-ways communication consistently by involving employee through Team Briefing once a month. In 2017, 50 editions of e-bulletin InPower Weekly News (IPWN) were published.

Media Sosial

Untuk menyebarkan informasi tentang Perusahaan serta berkomunikasi dengan masyarakat, Indonesia Power telah memanfaatkan media sosial yaitu Facebook dan Instagram.

Social Media

To distribute information about the Company and communicate with wide society, Indonesia Power has utilized social media, such as Facebook and Instagram.


@pt.indonesiapower


PT Indonesia Power

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

ACCESS TO INFORMATION AND COMPANY DATA

Siaran Pers

Selain media komunikasi di atas, selama tahun 2017 Indonesia Power telah menerbitkan siaran pers (*press release*) sebanyak 5 (lima) kali sebagai bentuk penyampaian dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Berikut daftar *press release* yang telah diterbitkan tahun 2017:

Press Conference

In addition to the communication media above, in 2017 Indonesia Power issued five press releases as a form of communication and information transparency to the community. The following is press release issued in 2017:

Tanggal Date	Judul Release Title Release	
20 September 2017 I September 20, 2017	*Press Release* Pencatatan Perdana Efek Beragun Aset Danareksa Indonesia Power PLN1 - Piutang Usaha (EBA DIPP1)	Initial Listing of Asset-Backed Securities Mutual Funds of Indonesia Power PLN1 - Accounts Receivable
5 September 2017 I September 5, 2017	PT Indonesia Power Terbitkan Rp4 Triliun Efek Beragun Aset	PT Indonesia Power Released Rp4 Billion in Asset-Backed Securities
3 September 2017 I September 3, 2017	Partisipasi PT Indonesia Power UPJP Priok Dalam Kegiatan Arung Sungai Ciliwung	PT Indonesia Power's Priok GGSU Participated in Whitewater in Ciliwung River.
8 Agustus 2017 I August 8, 2017	Peduli Kesehatan dan Keselamatan Kerja Indonesia Power Operasikan *Center of Excellence Fire and Safety Academy*	Indonesia Power Founds a Center of Excellence for Fire and Safety Academy to Promote Occupational Health and Safety
14 Juli 2017 I July 14, 2017	*Press Release* Penandatanganan Kontrak Proyek Tambak Lorok 780 MW	Signing of Contract for Tambak Lorok 780 MW Project

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PRAKTIK *BAD CORPORATE GOVERNANCE*

STATEMENT OF NOT COMMITTING BAD CORPORATE GOVERNANCE

Sampai dengan tahun 2017 Indonesia Power maupun jajaran Dewan Komisaris dan Direksi, dalam menjalankan aktivitasnya tidak pernah melakukan praktik bad corporate governance.

Up to 2017, the Boards of Commissioners and Directors of Indonesia Power did not commit bad corporate governance practices.

Indonesia Power senantiasa berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan mematuhi seluruh regulasi terkait dengan aktivitas usaha Perusahaan maupun regulasi lainnya, termasuk melaksanakan kewajibannya dengan baik. Sampai dengan tahun 2017 Indonesia Power maupun jajaran Dewan Komisaris dan Direksi, dalam menjalankan aktivitasnya tidak pernah melakukan praktik *bad corporate governance*, seperti antara lain yang terkait dengan (1) Pencemaran lingkungan; (2) Pelanggaran hukum; (3) Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pajak; (4) Pelanggaran terhadap hak-hak karyawan; serta (5) Ketidaksesuaian pelaporan keuangan dengan peraturan yang berlaku.

Indonesia Power is always committed to implementing good corporate governance by observing all regulations related to the Company's business activity and other regulations, including that pertain to fulfillment of its duties. Until 2017, the Boards of Commissioners and Directors did not commit any bad corporate governance practices, such as: 1] Environmental damage and pollution, 2] Violation of the laws, 3] Incompliance of tax payment, 4] Infringement to employees' rights and 5] Incompatibility of financial statement with the prevailing regulations.

No	Keterangan Remark		Praktik Practice
1	Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan	Complaint of environmental damage incurred by the Company	Nihil I Zero
2	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan	Legal issues faced by the Company, subsidiaries, any member of the Boards of Directors and/or Commissioners who are in charge were not revealed in the Annual Report	Nihil I Zero
3	Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan	In-compliance in meeting tax payment obligation	Nihil I Zero
4	Kasus terkait hubungan industrial	Industrial Relations case	Nihil I Zero
5	Ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK	Incompliance with the prevailing regulations in presenting annual report and financial statement	Nihil I Zero

Mengingat Indonesia Power telah melaksanakan seluruh kegiatan usaha atau bisnis Perusahaan sesuai dengan regulasi dan praktik terbaik yang ada, dengan demikian, sampai dengan saat laporan tahunan ini dibuat, Indonesia Power tidak menerima sanksi apa pun dari regulator, baik sanksi yang bersifat material maupun administratif.

Given that Indonesia Power had conducted all of its business activities in accordance with the applicable regulations and the existing best practices, up to the date this Annual Report is prepared, Indonesia Power did not accept any sanctions from the regulator, whether material or administrative sanctions.



06

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY



“Sebagai wujud kepedulian Indonesia Power sekaligus apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan atas proses bisnis Perusahaan, Indonesia Power secara konsisten melaksanakan kegiatan CSR guna meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar lokasi operasi Indonesia Power.

As a token of its concern and appreciation for the public who have been giving trust and support towards the Company’s business process, Indonesia Power consistently runs CSR programs as a way to increase the living standards of local communities who live around its operations.”

PENDAHULUAN
INTRODUCTION



Pelaksanaan tanggung jawab sosial Indonesia Power mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pasal 74 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Secara khusus pedoman pelaksanaan kegiatan CSR Indonesia Power ditetapkan melalui Keputusan Direksi No.25.K/010/IP/2014 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan tanggal 11 Februari 2014.

The implementation of Indonesia Power Corporate Social Responsibility (CSR) programs refers to the current laws and regulations, including Article 74 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company and Government Regulation No. 47 of 2012 on Corporate Social and Environmental Responsibility.

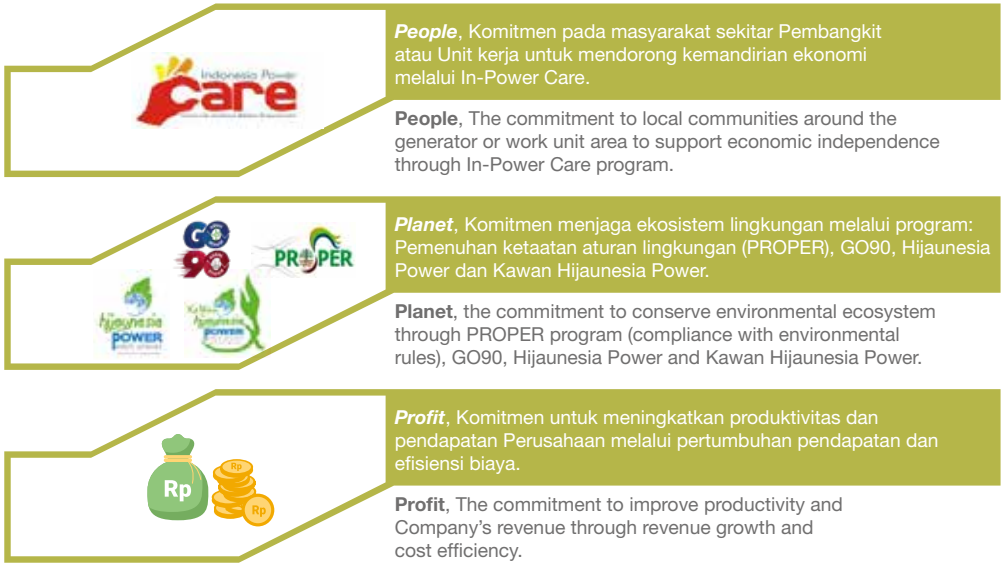
The guidelines on the implementation of Indonesia Power CSR programs are specifically established through Directors' Decree No. 25.K/010/IP/2014 on Guideline for Corporate Social and Environmental Responsibility dated February 11, 2014.

Sepanjang Tahun 2017, pelaksanaan kegiatan CSR Indonesia Power mencakup program pelestarian lingkungan hidup, program di bidang ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, program pengembangan sosial dan kemasyarakatan dan program yang terkait dengan tanggung jawab kepada pelanggan. Pelaksanaan CSR dirancang dengan memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan yang berprinsip memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa mengabaikan hak generasi mendatang.

In 2017, the CSR programs conducted encompassed environmental conservation program, employment program, health care and safety program, social development program and programs related to customer responsibility. The implementation of CSR was designed by bearing in mind the purpose of sustainable development that revolves around the principle of fulfilling current needs without disregarding future generations'.

Adapun dalam pelaksanaan program pelibatan dan pengembangan masyarakat dalam konteks pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, Indonesia Power menggunakan pendekatan *tripple bottom lines* (*people, planet & profit*), dimana upaya untuk menjaga lingkungan sekitar (*planet*) dan menjaga keseimbangan kehidupan sosial (*people*) sejalan dengan pertumbuhan laba Perusahaan (*profit*).

As for the implementation of community engagement and development programs, within the context of social and environmental responsibility, Indonesia Power used triple bottom lines approach (people, planet and profit), where efforts in conserving the environment (planet) and maintaining the balance of social life (people) are in line with those aimed at profit growth.



People, Komitmen pada masyarakat sekitar Pembangkit atau Unit kerja untuk mendorong kemandirian ekonomi melalui In-Power Care.

People, The commitment to local communities around the generator or work unit area to support economic independence through In-Power Care program.

Planet, Komitmen menjaga ekosistem lingkungan melalui program: Pemenuhan ketaatan aturan lingkungan (PROPER), GO90, Hijaunesia Power dan Kawan Hijaunesia Power.

Planet, the commitment to conserve environmental ecosystem through PROPER program (compliance with environmental rules), GO90, Hijaunesia Power and Kawan Hijaunesia Power.

Profit, Komitmen untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan Perusahaan melalui pertumbuhan pendapatan dan efisiensi biaya.

Profit, The commitment to improve productivity and Company's revenue through revenue growth and cost efficiency.

Dengan pendekatan *tripple bottom lines* yang meliputi kinerja lingkungan, sosial dan ekonomi, diharapkan keberadaan Indonesia Power tidak hanya bermanfaat bagi para pemegang saham, tetapi juga bagi pemangku kepentingan yang lebih luas yaitu pekerja, pelanggan, *vendor*, masyarakat sekitar dan Negara.

By making the triple bottom lines approach that comprises of environmental, social and economic performances, Indonesia Power is expected to provide benefits not only to the shareholders, but also to all stakeholders that consist of employees, customers, vendors, surrounding communities, and the State.

PENDAHULUAN
INTRODUCTION

Landasaan Pelaksanaan CSR Indonesia Power

Pelaksanaan CSR Indonesia Power berlandaskan pada *Roadmap*, visi, misi dan tujuan CSR sebagaimana penjelasan berikut:

Roadmap CSR

Dalam rangka mencapai keberlanjutan bisnis, Indonesia Power merumuskan strategi-strategi Perusahaan dengan menyusun *Roadmap* CSR 2015-2019 yang merupakan *grand strategy* dan *milestone* implementasi CSR sampai dengan tahun 2019 guna mengintegrasikan strategi CSR ke dalam strategi Perusahaan.

The Basis for Indonesia Power CSR Implementation

The implementation of Indonesia Power CSR is based on the CSR Roadmap, vision, mission and purposes that are explained below:

CSR Roadmap

In achieving business sustainability, Indonesia Power formulated company strategies by preparing the CSR Roadmap for 2015-2019 that serves as the grand strategy and milestone of CSR implementation up to 2019 for integrating CSR strategies into corporate strategies.



Visi, Misi dan Tujuan CSR

Visi dan Misi CSR

Visi dan Misi CSR Indonesia Power adalah:

"Bersahabat dengan lingkungan dan menjadikan tanggung jawab sosial Perusahaan sebagai bagian dari tata kelola Perusahaan yang baik"

Tujuan CSR

"Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berkembang secara berkelanjutan"

CSR Vision, Mission and Purpose

CSR Vision and Mission

Indonesia Power's Vision and Mission are as follows:

"Building a friendly relation with the environment and enacting corporate social responsibility as part of the proper corporate governance"

The Purpose of CSR

"Create an independent and sustainable society"

Dukungan Indonesia Power dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Indonesia Power's Support to Sustainable Development Goals (SDGs)



Sebagai kelanjutan dari program *Millenium Development Goals* (MDGs), Pemerintah Indonesia mendorong dunia bisnis agar ikut serta berkontribusi dalam pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs). Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang salah satu fungsinya adalah "agen pembangunan", Indonesia Power secara konsisten menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya tujuan pembangunan berkelanjutan.

To continue Millennium Development Goals (MDGs) program, the Government of Indonesia supports businesses to participate in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). As one of the state-owned enterprises (BUMN) whose functions include acting as an "agent of development", Indonesia Power consistently shows its commitment in supporting achievement of the sustainable development goals.

PENDAHULUAN
INTRODUCTION

Sejalan dengan tujuan tersebut, Indonesia Power terus melaksanakan program-program keberlanjutan melalui kegiatan-kegiatan CSR dan serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu antara lain dengan kegiatan operasional yang pro lingkungan (*Green Power Plant*) dan pro masyarakat (In-Power Care & Hijaunesia Power). *Green Power Plant* dilakukan melalui pengembangan & pemanfaatan energi baru terbarukan, efisiensi energi, efisiensi air dan pengelolaan limbah yang tepat, sedangkan untuk kegiatan pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati dijalankan melalui program Hijaunesia Power.

Adapun Informasi tambahan terkait pelaksanaan kegiatan CSR Indonesia Power dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan yang merupakan laporan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan. Penyusunan Laporan Keberlanjutan Perusahaan mengacu kepada Pedoman Pelaporan Keberlanjutan (*Sustainability Reporting Guidelines*) yang disusun oleh Global Reporting Initiative (GRI) standar dengan tingkat kesesuaian "*Core*" termasuk G4 *Financial Services Sector Disclosures*. Laporan Keberlanjutan 2017 ini merupakan laporan berkala yang mengungkapkan kinerja keberlanjutan Perusahaan dalam melaporkan kinerja lingkungan, sosial dan ekonomi perusahaan.

In line with those goals, Indonesia Power continues to implement sustainable programs through CSR activities and an array of policies aiming to reach the sustainability development goals, such as implementing pro-environmental operations program (Green Power Plant) and pro-society program (In-Power Care and Hijaunesia Power). Green Power Plant is implemented through development and utilization of renewable energy, water and energy efficiency as well as proper waste disposal and management. Meanwhile, environmental and biodiversity conservation is carried out through Hijaunesia Power program.

Regarding the additional information related to Indonesia Power CSR implementation, it could be reviewed from the Sustainability Report that serves as the environmental and social responsibility report. The preparation of the Sustainability Report is based on the Sustainability Reporting Guidelines according to Global Reporting Initiative standards with the equal compliance level, including G4 Financial Sector Disclosures. The 2017 Sustainability Report 2017 is a seasonal report which reveals corporate sustainability performance in environmental, social, and economic sectors.

METODE DAN PROGRAM PELAKSANAAN CSR INDONESIA POWER

INDONESIA POWER CSR IMPLEMENTATION METHOD AND PROGRAM



Metode Pelaksanaan CSR

Pelaksanaan program CSR Indonesia Power disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah, dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait diantaranya pemerintah setempat dan para pihak yang terlibat langsung.

Agar program CSR tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat dan tepat sasaran, langkah awal dalam mengidentifikasi wilayah yang terdampak langsung dengan kegiatan operasional Perusahaan adalah dengan cara melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Hasil dari analisis tersebut, Perusahaan melakukan pemetaan sosial (*social mapping*). Melalui pelaksanaan *social mapping* tersebut, maka didapat sebanyak 101 desa/ kelurahan yang berada di 20 Unit Kerja Perusahaan masuk dalam lingkup komunitas yang menjadi prioritas utama Perusahaan dalam menjalankan program CSR.

Method of CSR Implementation

The implementation of Indonesia Power CSR program was adjusted to the conditions in each are and coordinated with related parties, such as local government and other parties that directly involved.

In order for CCR to give significant impacts to the local communities and make it effective, the first step to take was identifying the areas directly impacted by operational activities through the Environmental Impact Assessment (AMDAL). The Company then conducted social mapping based on the analysis results. Through social mapping method, there were 101 villages/ kelurahans (villages in urban settings) located around 20 Work Units listed in the community scope prioritized by the Company in conducting CSR program.

METODE DAN PROGRAM PELAKSANAAN CSR INDONESIA POWER

INDONESIA POWER CSR IMPLEMENTATION METHOD AND PROGRAM

Pelaksanaan *Social Mapping* Tahun 2017

Social Mapping in 2017

No	Unit Kerja Work Unit	Jumlah Desa Number of Villages	No	Unit Kerja Work Unit	Jumlah Desa Number of Villages
1	UP I GU Suralaya & UJP GGSU Banten 1 Suralaya	4	13	UJP PLTU I GSU SPP Cilegon	4
2	UPJP I GGSU Priok	3	14	UJP PLTU I GSU SPP Jeranjang	2
3	UP I GU Saguling	15	15	UJP PLTU I GSU SPP Barru	3
4	UP I GU Mrica	15	16	UJP PLTU I GSU SPP Holtekamp	7
5	UP I GU Semarang	4	17	UJP PLTU I GSU SPP Pangkalan Susu	3
6	UP I GU Perak Grati	11	18	UJP PLTU I GSU SPP Adipala	4
7	UP I GU Bali - PLTG I GTPP Pemaron	2	19	UJP PLTU I GSU SPP Palabuhan Ratu	3
8	UP I GU Bali - PLTG I GTPP Gilimanuk	1	20	UJP PLTU I GSU SPP Labuan	4
9	UP I GU Bali - PLTG I GTPP Pesanggaran	1	21	PLTD I DPP Karimunjawa	4
10	UJH I MSU	2	22	PLTP I GPP Ulumbu	4
11	Kantor Pusat I Head Office	2	23	PLTU I SPP Sanggau	3
12	UPJP I GGSU Kamojang	8			

Program CSR Indonesia Power

Sejalan dengan tagline InPower-Care (Indonesia Power-*Community Assistance, Relation, and Empowerment*), program CSR Indonesia Power berfokus pada 3 (tiga) pilar keberlanjutan Perusahaan yaitu "Pelayanan Masyarakat, Pembinaan Hubungan, dan Pemberdayaan Masyarakat".

Indonesia Power CSR Program

In line with InPower-Care tagline (Indonesia Power - Community Assistance, Relation and Empowerment), Indonesia Power CSR focuses on three pillars of Corporate Sustainability, they are: Community Assistance, Community Relations and Community Empowerment.



METODE DAN PROGRAM PELAKSANAAN CSR INDONESIA POWER

INDONESIA POWER CSR IMPLEMENTATION METHOD AND PROGRAM

Selaras dengan hal tersebut, maka secara garis besar program Tanggung Jawab Sosial Indonesia Power dibagi menjadi 4 (empat) bidang utama yaitu:

In accordance with the program, Indonesia Power CSR program is divided into four main fields; they are:

Program Tanggung Jawab Sosial Indonesia Power
Indonesia Power Social Responsibility Program



PELAKSANA PENGELOLAAN CSR
CSR MANAGER

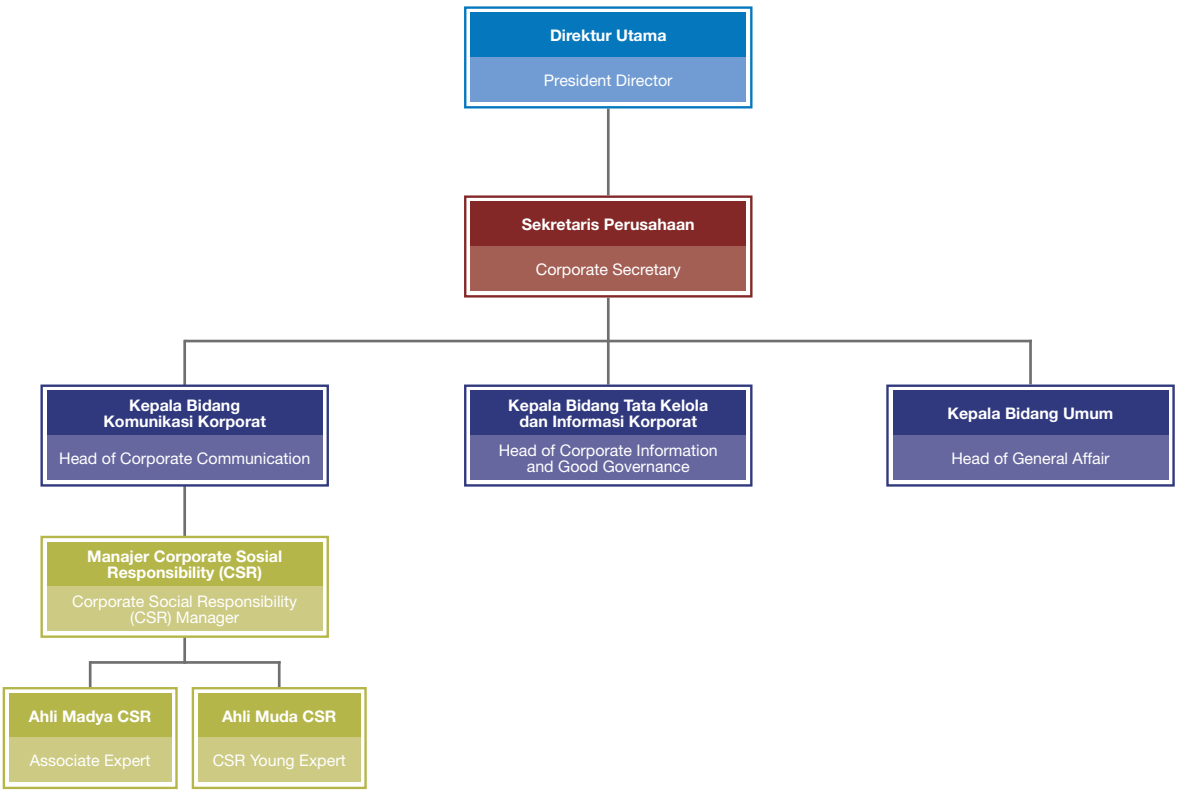
CSR Indonesia Power dikelola oleh Bidang Komunikasi Korporat yang membawahi Manajer Corporate Social Responsibility (CSR). Tugas dan tanggung jawab Manajer CSR adalah menyelaraskan program CSR untuk menjamin *sustainability* Perusahaan, melakukan analisa *stakeholders*, melaksanakan program CSR mulai dari perencanaan, pendampingan sampai dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Indonesia Power CSR is managed by Corporate Communication that oversees CSR Manager. The main duties and responsibilities of CSR Manager is aligning CSR program to ensure corporate sustainability, analyzing stakeholders and conducting CSR program from the planning, mentoring to evaluating every activity.

Struktur pengelola CSR Indonesia Power adalah sebagai berikut:

The structure of Indonesia Power CSR management is as follows:

Struktur Organisasi CSR Indonesia Power
Indonesia Power CSR Organization Structure



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO THE ENVIRONMENT



Dalam melakukan kegiatan operasional, Indonesia Power telah dilengkapi dengan standar nasional dan internasional, dimana Pada tingkat nasional, Indonesia Power melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan terkait dan ketentuan Rencana Pengelolaan/Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL/RPL) yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) maupun Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi dan Daerah yang harus dipenuhi oleh masing-masing Unit.

Adapun untuk tingkat standar internasional, Indonesia Power menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan yang mengacu kepada ISO 14001:2015 yang telah di integrasikan ke dalam *Integrated Manajemen System* (IMS).

In conducting its operations, Indonesia Power is equipped with international and national working standards. At national level, Indonesia Power performs environmental management and monitoring, in line with related regulations and provisions on Environmental Management/Monitoring Plan issued by the Ministry of Environment and Forestry and Environmental Agency at the Provincial and District level, which each unit has to meet.

As for the international standards, Indonesia Power applies Environmental Management System that refers to ISO 14001:2015 that has been integrated into the Integrated Management System (IMS).

Kebijakan

Pengelolaan Lingkungan hidup Indonesia Power selain mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga mengacu kebijakan Internal Perusahaan yang diatur dalam:

1. Keputusan Direksi Nomor 41.K/010/IP/2012 tentang Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan di PT Indonesia Power.
2. Keputusan Direksi Nomor 152.K/010/IP/2014 tentang Pengelolaan Limbah Di Lingkungan Perusahaan.
3. Keputusan Direksi Nomor 249.K/010/IP/2015 tentang Pedoman Penerapan *Green Power Plant* di Lingkungan PT Indonesia Power.
4. Keputusan Direksi Nomor 73.K/010/IP/2016 tentang Pengelolaan Limbah Unit Jasa Pembangkitan PLTU Batubara FTP-1 Jawa.
5. Keputusan Direksi Nomor 211.K/010/IP/2016 tentang Komitmen Menjaga Ekosistem dan Pelestarian dalam Menjaga Keberlanjutan Planet di PT Indonesia Power.
6. Keputusan Direksi Nomor 224.K/010/IP/2017 tentang Pengelolaan Sedimen Di Lingkungan PT Indonesia Power.

Policy

Besides adhering to Law of the Republic of Indonesia No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, Indonesia Power environmental management also refers to the corporate internal policies that have been regulated in:

1. Directors' Decree No. 41.K/010/IP/2012 on Occupational Health, Safety and Environmental Policy at PT Indonesia Power.
2. Directors' Decree No. 152.K/010/IP/2014 on Waste Management within the Environment of PT Indonesia Power.
3. Directors' Decree No. 249.K/010/IP/2015 on Guidelines for Green Power Plant Implementation within the Environment of PT Indonesia Power.
4. Directors' Decree No. 73.K/010/IP/2016 on Waste Management within Generating Service Unit of SPP Batubara FTP-1 Java.
5. Directors' Decree No. 211.K/010/IP/2016 on Commitment to Preserve and Conserve Ecosystem in Ensuring the Earth's Sustainability at PT Indonesia Power.
6. Directors' Decree No. 224.K/010/IP/2017 on Sediment Processing Management in PT Indonesia Power.

Rencana Kegiatan terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam rangka menciptakan Perusahaan yang ramah lingkungan, Indonesia Power telah menetapkan rencana kegiatan pengelolaan lingkungan tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut:

1. Implementasi Pengelolaan Emisi Udara;
2. Implementasi Pengelolaan Limbah;
3. Implementasi Penghijauan dan Keanekaragaman Hayati;
4. Implementasi Pengembangan Pembangkit Ramah Lingkungan (*Green Power Plant*);
5. Implementasi Konservasi Air;
6. Implementasi Efisiensi Energi;
7. Implementasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML).

Environmental Management Program

In aiming to create an eco-friendly company, Indonesia Power planned several activities in environmental management in 2017 with details as follows:

1. Air Emission Management
2. Waste Management
3. Reforestation and Biodiversity
4. Green Power Plant Development
5. Water Conservation
6. Energy Efficiency
7. Environmental Management System (SML).

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO THE ENVIRONMENT

Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Dampak Kegiatan

Berikut adalah realisasi kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh Indonesia Power selama tahun 2017.

Implementasi Pengelolaan Emisi Udara

Pengelolaan emisi udara dilakukan melalui pemantauan dan pengukuran rutin serta pengendalian proses agar seluruh emisi gas buang yang dikeluarkan oleh Unit Pembangkitan yang dikelola memenuhi baku mutu Lingkungan.

Kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan emisi udara oleh indonesia Power selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. **Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)**

   Secara rutin, Indonesia Power telah melakukan perhitungan inventarisasi gas rumah kaca meliputi seluruh emisi CO2, CH4, dan N2O dari sumber konsumsi bahan bakar operasional pembangkit, bahan bakar kendaraan operasional, dan konsumsi listrik eksternal sebagai wujud kepatuhan terhadap Peraturan Presiden Nomor 61 tanggal 20 September 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

   Inventarisasi gas rumah kaca pada tahun 2017 adalah 51.621.966,17 ton CO2e hasil perhitungan tersebut mengalami penurunan 2,92% dibanding tahun 2016 sebesar 53.177.297,09 ton CO2e.

2. **Program Verifikasi dan Sertifikasi Data Base Line Emisi GRK**

   Pada tahun 2017, Indonesia Power kembali melakukan inventarisasi GRK dari seluruh kegiatan perusahaan di Indonesia dengan menggunakan tahun 2012 sebagai tahun dasar perhitungannya.

   Rasio intensitas emisi Perusahaan menggunakan denominator jumlah produksi listrik bruto sebagai faktor yang paling relevan. Rasio Intensitas emisi Indonesia Power tahun 2017 adalah sebesar 0,72 kg CO2e/kWh, hasil tersebut menurun sebesar 11,11% dibandingkan tahun 2016 sebesar 0,81 kg CO2e/kWh.

Environmental Management Activities and Their Impacts

Below are environmental management activities conducted by Indonesia Power in 2017.

Air Emission Management

Air emission management was conducted through routine monitoring and measurement as well as process control so that exhaust emission resulted from the Generating Unit meet the environmental quality standards.

Indonesia Power conducted the following activities in managing air emission throughout 2017:

1. **Greenhouse Gas (GHG) Emissions Inventory**

   Indonesia Power has regularly taken inventory of GHG emissions, which include CO2, CH4, and N2O resulted from fuel consumption of generating unit, vehicle fuel consumption and external power consumption to comply with Presidential Decree No. 61 dated September 20, 2011 on National Action Plan to Reduce Greenhouse Gas Emissions.

   The inventory of GHG Emissions in 2017 was 51,621,966.17 ton CO2e that decreased 2.92% compared to the previous year, which saw the GHG Emissions amounting to 53,177,297.09 tons CO2e.

2. **Verification and Certification Program of GHG Emissions Baseline Data**

   In 2017, Indonesia Power inventoried GHG from all of its activities in Indonesia by using data in 2012 as the basis of calculation.

   The Company utilized the amount of gross electricity production as the most relevant factor. Indonesia Power's emission intensity ratio in 2017 reached the amount of 0.72 kg CO2e/kWh. The 2017 ratio decreased by 11.11% compared to that of 2016 that reached 0.81 kg CO2e/kWh.

3. Emisi Gas Buang

Pada tahun 2017, Indonesia Power telah melakukan kewajiban menghitung beban emisi gas buang yang dihasilkan oleh cerobong pembangkit sebagai bentuk kepatuhan terhadap penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Tidak Bergerak Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Thermal.

Emisi Gas Buang Indonesia Power tahun 2017 sebesar 154.998.624,27 kg meningkat 28,43% dibandingkan tahun 2016 sebesar 120.689.439,80 kg dikarenakan terjadi kenaikan total produksi Indonesia Power setiap tahunnya.

Untuk melihat tingkat pengurangan kontribusi emisi gas buang yang dihasilkan dari pembangkit Perusahaan, Indonesia Power juga melakukan perhitungan intensitas emisi gas buang dengan menggunakan denominator jumlah produksi listrik bruto sebagai faktor yang paling relevan.

Pada tahun 2017, rasio intensitas emisi gas buang Indonesia Power adalah sebesar 0,0022 kg/kWh yang meningkat 22,22% dari nilai intensitas tahun 2016 yaitu sebesar 0,0018 kg/kWh. Peningkatan ini dikarenakan terjadinya kenaikan total produksi bruto.

4. Mekanisme Pembangunan Bersih

Mekanisme Pembangunan Bersih (*Clean Development Mechanism*-CDM) merupakan suatu proyek yang bertujuan untuk mereduksi emisi gas rumah kaca (GRK) guna mendukung pembangunan berkelanjutan. Mekanisme CDM pada dasarnya merupakan perdagangan karbon, dimana negara berkembang dapat menjual kredit penurunan emisi kepada negara yang memiliki kewajiban untuk menurunkan emisi.

Pada tahun 1994, dua unit pembangkit listrik mulai beroperasi dengan kapasitas 2 x 55 MW. 3 (Tiga) tahun kemudian satu unit tambahan lagi dapat dioperasikan dengan kapasitas yang sama. Pada tahun 2004 kapasitas pembangkit dinaikkan menjadi 3 x 60 MW melalui program *Capacity Upgrade*, sehingga produk yang dihasilkan berupa energi listrik disalurkan ke sistem ketenagalistrikan Jawa Bali Madura dengan kapasitas total kapasitas 180 MW.

3. Exhaust Gas Emission

In 2017, Indonesia Power calculated exhaust gas emissions that resulted from generators as a form of compliance with Minister of Environment Regulation No. 21 of 2008 on Quality Standard of Fixed Emission for Thermal Power Plant Activities and/or Enterprises.

Indonesia Power's Exhaust Gas Emissions in 2017 reached 154,998,624.27 kg. This amount increased 28.43% compared to the previous year that reached 20,689,439.80 kg in 2016. This happened because the increased total production every year.

To look at the decreasing level of exhaust gas emissions produced by the Power Plants, the Company calculated exhaust gas emission intensity by utilizing gross electricity production as the most relevant factor.

In 2017, the exhaust gas emission intensity ratio resulted reached 0.0022 kg/kWh that decreased by 22.22% from the intensity value in 2016 which stood at 0.0018 kg/kWh. The increase was due to the raise in total gross production.

4. Clean Development Mechanism

Clean Development Mechanism (CDM) is a project to reduce GHG emissions as a way to support sustainable development. The CDM is basically carbon emission trading where developing countries may sell emission reduction credit to countries that have an obligation to decrease the amount of emission.

In 1994, two generating units started its operations with the capacity of 2 x 55 MW. Three years later, an additional unit could operate in the same capacity. In 2004, the generating unit capacity was upgraded to 3 x 60 MW through Capacity Upgrade program, so the generated electricity could be channeled to the electrification system in Java, Bali and Madura with a total capacity of 180 MW.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO THE ENVIRONMENT

Proyek *capacity upgrade* Unit PLTP Gunung Salak ini diikutsertakan dalam proyek CDM melalui metode VCS (*Voluntary Carbon Standard*). Verifikasi dan validasi Proyek ini selesai pada tahun 2009 dan hingga sekarang Unit PLTP Gunung Salak telah menghasilkan reduksi emisi karbon sebesar 866.010 VCUs.

The capacity upgrade project for GPP Gunung Salak was included in CDM project through the Voluntary Carbon Standard (VCS) method. The verification and validation of the project completed in 2009 and up to now, GPP Gunung Salak has reduced carbon emission in the amount of 866,010 VCUs.

Emisi GRK yang Dijual/Dilelang/Diberikan Melalui Skema CDM di Unit Gunung Salak
GRK Emissions Sold/Auctioned/Given Away through CDM Mechanism in GPP Gunung Salak

Tahun Year	*Verified Emission Reduction* (VER) (Ton VCUs)		
	Verified	*Sold*	*Remain*
2013	-	94.236,00	359.591,35
2014	118.760,00	94,77	478.256,58
2015	-	-	478.256,58
2016	-	-	478.256,58
2017	-	-	478.256,58
Total	**866.010,00**	**387.753,42**	**478.256,58**

Implementasi Pengelolaan Limbah

Dalam operasionalnya, pembangkit selain menghasilkan energi listrik juga meghasilkan produk sampingan berupa limbah yang memiliki dampak dapat mencemari lingkungan, oleh karena itu Indonesia Power senantiasa melakukan pengelolaan limbah dengan mengkategorikan limbah yang ditimbulkan dari kegiatan pembangkit menjadi dua, yaitu limbah B3 (limbah bahan dan berbahaya) dan limbah non-B3 (non-bahan beracun berbahaya). Untuk mengelola limbah yang dihasilkan, Indonesia Power juga menerapkan sistem 3R (*Reuse, Reduce* dan *Recycle*).

Waste Management

In its operating activity, generating units produce electricity and also by-product in the form of waste which could pollute the environment. Thus, Indonesia Power conducts waste management by classifying waste produced from generating unit activities into two categories, i.e. B3 waste (toxic and hazardous waste) and non-B3 waste (non-toxic and hazardous waste). In managing waste disposal, Indonesia Power has applied the 3R system (Reuse, Reduce and Recycle).

Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3
B3 & Non-B3 Waste Management

Pengelolaan Limbah LB3 B3 Waste Management		Pengelolaan Limbah Non B3 Non-B3 Waste Management	
a. Penggunaan kembali minyak pelumas trafo dan pelumas mesin pembangkit dengan penyaringan dan pemurnian ulang (*reduce* limbah pelumas). b. Pemanfaatan limbah *Fly Ash* dan *Bottom* Ash menjadi batako dan paving blok sesuai dengan Izin Pemanfaatan yang telah dimiliki oleh Unit Pembangkitan Suralaya pada Oktober 2017.	a. Reusing transformers and generators' lubricants through filtering and re-purification (reducing lubricant waste) b. Turning Fly Ash and Bottom Ash waste into concrete brick and paving block according to Utilization Permit obtained by Suralaya GU in October 2017	a. Pemanfaatan limbah serasah *mangrove* untuk memproduksi batik. b. Pemanfaatan limbah koran untuk dijadikan berbagai produk-produk *handycraft*. c. Pengembangan kompos organik dan daur ulang sampah plastik melalui program Hijaunesia Power. d. Pemanfaatan aplikasi *online* untuk menggantikan keperluan pencetakan (*reduce* limbah kertas).	a. Utilizing mangrove litter waste for batik production. b. Utilizing newspaper waste for handicraft. c. Developing organic compost and plastic waste recycling through Hijaunesia Power program. d. Utilizing online application for replacing printed needs (reducing paper waste)

1. Pengelolaan limbah B3

Limbah B3 yang ditimbulkan Indonesia Power dari kegiatan konversi energi primer menjadi listrik terdiri dari *Fly Ash, Bottom Ash*, Pelumas bekas, dan lainnya. Dalam mengelola limbah B3, semua unit telah memiliki Izin untuk melakukan penyimpanan sementara, untuk selanjutya akan diserahkan kepada pihak ketiga dalam proses pengangkutan dan pengolahannya.

Jumlah limbah B3 yang ditimbulkan Perusahaan sebesar 552.353,04 ton yang meningkat 18,06% dari tahun 2016 yaitu sebesar 467.852,63 ton. Peningkatan ini dikarenakan terjadinya kenaikan total produksi bruto pembangkit dimana berat limbah ini berasal dari limbah abu batubara. Namun, pada tahun 2017 Indonesia Power telah melakukan pemanfaatan limbah sebesar 104,80 ton untuk menjadi batako dan *paving block*.

2. Pengelolaan Limbah Non B3

Indonesia Power melakukan pengelolaan sampah (limbah non B3) dengan melakukan pemisahan jenis sampah menjadi sampah organik dan non organik. Dimana sampah organik akan dilanjutkan ke proses pengomposan dan sampah non organik akan dikelola oleh pihak ketiga atau mitra perusahaan untuk dijadikan cinderamata atau kerajinan tangan.

Pada tahun 2017, Pada tahun 2017, jumlah limbah non B3 yang ditimbulkan Perusahaan sebesar 9.533,36 ton yang meningkat 32,40% dari tahun 2016 yaitu sebesar 7.200,60 ton. Peningkatan ini dikarenakan terjadinya kenaikan total produksi bruto pembangkit dimana berat limbah ini berasal dari sampah yang tersaring pada *screen* yang terdapat pada *Intake* pembangkit.

Implementasi Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Program Penghijauan

Dalam melaksanakan program pelestarian keanekaragaman hayati dan lingkungan, Departemen Kepatuhan K3 dan Lingkungan bekerjasama dengan Bidang Komunikasi Korporat melakukan program *Eco Office*, program Hijaunesia Power dan program Kawan Hijaunesia Power. Dengan adanya program tersebut, diharapkan akan berdampak pada penambahan keanekaragaman hayati dan kembalinya fauna langka di lingkungan sekitar pembangkit.

1. B3 Waste Management

B3 waste produced by Indonesia Power from its conversing primary energy into electricity consists of Fly Ash, Bottom Ash, used lubricants and so on. In processing B3 waste, all work units have had environmental permits to carry out temporary waste storage that would then be distributed to the third party for safe waste transport and further waste processing.

Indonesia Power produced B3 waste in the amount of 552,353.04 tons, an increase of 18.06% from 2016 of 467,852.63 tons. This was caused by increased total gross production of generating units in which the waste came from coal ash. In 2017, Indonesia Power utilized coal ash waste in the amount of 104.80 tons for concrete brick and paving block.

2. Non-B3 Waste Management

Indonesia Power has managed non-B3 waste by dividing it into two categories, organic and non-organic trash. Organic trash would be processed into compost while non-organic trash would be processed by the third party or the Company's partners into souvenir or handicraft.

In 2017, the amount of non-B3 waste the Company produced was 9,533.36 tons. This meant an increase by 32.40% from the previous year that reached 7,200.60 tons. This amount was caused by the increase in total gross production of generating units, in which the waste came from litter removed from the screens on generators' intakes.

Biodiversity Conservation and Reforestation

In carrying out the biodiversity and environmental conservation program, Department of Occupational Health and Safety (OHS) and Environmental Compliance collaborates with Corporate Communication to perform Eco Office, Hijaunesia Power and Kawan Hijaunesia Power Programs. By carrying out those programs, it is expected that it would increase biodiversity and attract rare wildlife to return to its habitat around the power plant.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO THE ENVIRONMENT

1. *Eco Office*

Program *Eco Office* atau kantor peduli lingkungan merupakan refleksi kebijakan Perusahaan dalam menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) sebagai upaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan nyaman.

Beberapa kegiatan *Eco Office* Indonesia Power antara lain pengelolaan sampah, pemasangan *eco sign* pada saklar lampu, keran air, lokasi strategis dan ruang publik lainnya di sekitar lingkungan Perusahaan dan Unit Pembangkitan.

1. Eco Office

Eco Office Program or environmental friendly office is a reflection of company's policy in implementing Environmental Management System as a way to create a clean and comfortable work place.

Several activities under Indonesia Power Eco Office program were trash management and eco sign installment on light switch, water faucet, strategic locations and other public spaces around the Company environment and the generating unit.

Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3
Eco Office at Generating Units



Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai bentuk dan ajakan kepedulian terhadap lingkungan, serta edukasi tentang pentingnya mengenal jejak karbon melalui sosialisasi yang intensif dan penghitungan masal jejak karbon dengan *carbon calculator*. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu mencegah dampak perubahan iklim dan menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Those activities were conducted as a way of encouragement to raise environmental awareness and a form of education regarding the importance of recognizing carbon footprint through intensive dissemination and mass calculation of carbon footprint using carbon calculator. This goes along with the sustainable development goal of mitigating the impact of climate change and ensuring sustainable production and consumption.

2. *Hijaunesia Power*

Program Hijaunesia Power merupakan kegiatan kampanye Indonesia Power yang diselenggarakan dalam mendukung konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia, selaras dengan hal tersebut, Indonesia Power bersinergi dengan lingkungan alam sekitar yaitu melalui budidaya flora dan fauna yang dilindungi.

Berikut adalah daftar budidaya Flora dan Fauna yang telah dilakukan oleh Indonesia Power bersama Unit sampai dengan tahun 2017:

2. Hijaunesia Power

Hijaunesia Power Program represents Indonesia Power's campaign to support biodiversity conservation. Hence, to realize the purpose, Indonesia Power ensures synergy with the surrounding environment, such as by cultivating protected flora and fauna.

The following is the explanation of flora and fauna conservation conducted by Indonesia Power up to 2017:

Unit	Lokasi Perlindungan Conservation Area	Flora dan Fauna yang Dilindungi Protected Flora and Fauna	
PLTP I **GPP Gunung Salak - UPJP** I **GGSU Kamojang**	Taman Nasional Gunung Halimun Salak Mount Halimun Salak National Park	Monitoring 6 ekor elang jawa,	Monitoring 6 javan eagles
		Monitoring 8 ekor Owa Jawa	Monitoring 8 silvery gibbons
		Monitoring 3 Ekor Macan: 1 Ekor Macan Kumbang Betina dan 2 Ekor Macan Tutul Jantan.	Monitoring 3 eopards: 1 female Javan leopard and 2 male Javan leopards
		Penanaman dan Pemeliharaan Pohon: Jirak 2700 batang, Pongkongan 450 batang, Kisireum 900 batang, Huru 2.100 batang, Puspa 4.100 batang, Kihujang 750 batang.	Reforestation and tree upkeep: 2,700 *jirak* trees (*Symplocos fasciculata Zoll*), 450 *pongkongan* trees, 900 *kisireum* trees (*Syzygium rostratum*), 2100 *huru* trees (*Cinnamomum porrectum*), 4,100 *Puspa* trees (*Schima wallichii*) and 750 *kihujan* trees (*Engelhardia spicata Lesch. ex Blume*).
PLTG I **GTPP Gilimanuk - UP** I **GU Bali**	Kawasan Taman Nasional Bali Barat West Bali National Park	Penambahan konservasi menjadi 225 ekor burung Jalak Bali	Adding 225 Bali mynas into the conservation area
	Lingkungan Pembangkit Generating Environment	Penangkaran dan pelepasliaran 400 ekor tukik (Penyu lekang (Lepidochelys oliyacea)	Breeding and releasing 400 sea turtles (*Lepidochelys oliyacea*)
PLTG I **GTPP Pesanggaran - UP** I **GU Bali**	Lingkungan Unit Unit Environment	Penanaman 685 pohon Mangrove	Planting 685 mangrove trees
		penangkaran 715 ekor Tukik (Penyu)	Breeding 715 sea turtles
	Taman Wisata Lembu Putih, Gianyar Gianyar's Lembu Putih Recreation Park	Konservasi 49 Ekor Sapi Putih Taro	Conserving 49 Taro white cattle
PLTG I **GTPP Pemaron**	Lingkungan Unit Unit Environment	Penanaman 22.242 Pohon Cemara Geseng	Planting 22.242 geseng pine trees
		Penangkaran 1.225 Ekor Tukik (Penyu)	Breeding 1,225 sea turtles
UPJP I **GGSU Perak Grati**	Lingkungan Unit Unit Environment	Penangkaran 6 ekor Rusa Timor	Breeding 6 Javan deers
UPJP I **GGSU Priok**	Lingkungan Unit Unit Environment	- Budidaya dan pelepasliaran Jalak Bali - Konservasi Mangrove, total sejumlah 1.725 pohon (2014-2017)	- Upkeeping and releasing of Bali Mynas - Mangrove conservation, with a total of 1,725 trees (2014-2017)
UP I **GU Semarang**	Lingkungan Unit Unit Environment	a. Konservasi melati (*Jasminum sambac)* b. Konservasi palem kipas *(Livistona rotundifolia)* c. Konservasi Anggrek Karawai (Dendrobium Jingga (Renanthera matutina), Anggrek Sendok (*Spathoglottis zurea), dan Anggrek Larat (Dendrobium phalaenopsis).*	a. Conserving jasmine (*Jasminum sambac*) b. Conserving palem kipas (*Livistona rotundifolia*) c. Conserving the following orchid species: *Renanthera matutina, Spathoglottis zurea* and *Dendrobium phalaenopsis*
UJP I **GSU Labuan**	Taman Nasional Ujung Kulon Ujung Kulon National Park	- Konservasi Owa Jawa - Konservasi tanaman endemic Banten yaitu Pohon kokoleceran (Vatica bantamensis)	- Conserving Silvery Gibbons - Conserving Banten endemic *kokoleceran* tree (*Vatica bantamensis*)
	Lingkungan Unit (Taman Kehati) Unit Environment (Kehati Park)	10 tanaman kokoleceran (Vatica bantamensis), total 17.157 jenis tanaman di taman kehati UJP Labuan	As many as 10 kokoleceran trees (*Vatica bantamensis*), adding to a total of 17,157 species in Taman Kehati of Labuan GSU.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO THE ENVIRONMENT

Unit	Lokasi Perlindungan Conservation Area	Flora dan Fauna yang Dilindungi Protected Flora and Fauna	
UJP I GSU Banten 1 Suralaya	Lingkungan Unit (Kebun Raya Mini) Unit Environment (Mini Botanical Garden)	Konservasi 24 jenis tumbuhan langka, diantaranya: Borahol, Daro daroh, Eboni, Empapak lawai, Kamper, Kayu rasak dll.	Conserving 24 *rare* tree species, such as Burahol (*Stelechocarpus burahol*), *Daru* (*Punica granatum*), *Eboni* (*Diospyros celebica*), *Empapak lawai* (*Myristica iners*), *Kamper* (*Cinnamomum camphora*), *Kayu rasak* (*Vatica rassak*), etc.

3. *KaWan Hijaunesia Power*

3. KaWan Hijaunesia Power

Program KaWan Hijaunesia Power merupakan sinergi Indonesia Power dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Gerakan Pramuka dalam menjaga dan melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup. Program ini merupakan penggabungan program KaWan GAUL (Saka Kalpataru Wanabakti Gerakan Aksi untuk Lingkungan) dan program Hijaunesia Power.

Sejak 9 Agustus 2016, Direktur Utama Indonesia Power dilantik sebagai Anggota Majelis Pembimbing pada Satuan Kerja Pramuka (Mabi Saka) Kalpataru dan Wanabakti Nasional masa bakti 2016-2019 melalui Keputusan Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Nasional No. 112 Tahun 2016.

Inisiasi program ini dilakukan dalam rangka memengaruhi kaum muda dan masyarakat umum dalam berpartisipasi secara progresif dan kreatif dalam kegiatan kepramukaan khususnya di bidang lingkungan melalui penanaman pohon di sekitar Unit Pembangkit Perusahaan.

Selama tahun 2017, Indonesia Power telah menyelenggarakan program konservasi lingkungan dengan melakukan penghijauan melalui penanaman pohon sebanyak 56.458 pohon dengan rincian jumlah penanaman pohon pada masing-masing Unit sebagai berikut:

KaWan Hijaunesia Power program is a synergy between Indonesia Power and the Ministry of Environment and Forestry as well as the Scout Movement in raising awareness to preserve ecosystem and the environment. KaWan Hijaunesia Power program incorporates KaWan GAUL (Saka Kalpataru Wanabakti Gerakan Aksi untuk Lingkungan) into Hijaunesia Power.

As of August 9, 2016, the President Director of Indonesia Power was inaugurated as Member of the National Supervising Council of the Scout Task Force (Mabi Saka) Kalpataru and Wanabakti during the period 2016-2019 through Decree of the Head of Indonesian Scout Movement No. 112 of 2016.

The program was initiated as a way to influence young people so that they participate in the Scout Movement progressively and creatively, particularly in environmental issues through reforestation program in the surroundings of the Company's Generating Units.

During the course of 2017, Indonesia Power organized environmental conservation program by planting 56,458 trees, with details of tree planting in each unit as follows:

Jumlah Penanaman Pohon Indonesia Power
Tree Planting by Indonesia Power

Unit	Jumlah Pohon Total of Trees	Unit	Jumlah Pohon Total of Trees
UP I GU Suralaya	1.948	UJP PLTU I GSU SPP Banten 1 Suralaya	132
UPJP I GGSU Priok	2.017	UJP PLTU I GSU SPP Banten 2 Labuan	1.061
UP I GU Saguling	5.508	UJP PLTU I GSU SPP Banten 3 Lontar	5.517
UPJP I GGSU Kamojang	1.524	UJP PLTU I GSU SPP Jawa Barat 2 Palabuhan Ratu	839
UP I GU Mrica	5.265	UJP PLTU I GSU SPP Jawa Tengah 2 Adipala	4.848
UP I GU Semarang Unit Tambak Lorok	760	UJP PLTGU I GSU CCPP Cilegon	850
UP I GU Perak Grati Unit PLTGU I CCPP Grati	9.482	UJP PLTU I GSU SPP Pangkalan Susu	6.642
UP I GU Bali Unit Pesanggaran	4.275	UJP PLTU I GSU SPP Barru	1.450
UP I GU Bali Unit Gilimanuk	1.500	UJP PLTU I GSU SPP Jeranjang	2.590
UP I GU Bali Unit Pemaron	750		

Implementasi Pengembangan Pembangkit Ramah Lingkungan (*Green Power Plant*)

Green Power Plant salah satu program strategis Indonesia Power untuk mendukung Perusahaan dalam beroperasi secara andal, aman dan ramah lingkungan yang berhasil meningkatkan benefit, baik terhadap ekonomi, sosial maupun lingkungan guna mendukung keberlanjutan usaha secara jangka panjang.

Selama tahun 2017, program yang telah dilakukan dalam mewujudkan *Green Power Plant* adalah sebagai berikut:

1. Pemantauan, pemeriksaan, evaluasi dan pembinaan pengelolaan lingkungan untuk seluruh Unit Pembangkitan, Unit Jasa Pembangkitan, dan Kantor Pusat.
2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam pengelolaan kimia melalui Forum Komunikasi Kimia 2017.
3. Berbagi informasi, teknologi, dan keberhasilan dalam pengelolaan Lingkungan antar unit melalui Forum Komunikasi Lingkungan 2017.
4. Pendampingan, pemeriksaan, dan koordinasi dalam penyusunan Dokumen *Comply Regulation* dan *Beyond Compliance*.
5. Melakukan upaya peningkatan kompetensi personil lingkungan dengan pelatihan Perhitungan Indeks Keanekaragaman Hayati, Inventarisasi *Carbon Footprint*, Audit Energi dan Manajer Energi.

Green Power Plant Development

Green Power Plant is one of Indonesia Power's strategic plans to support its operations to be reliable, safe and eco-friendly in order to increase the benefits it provides to the economic, social and environmental aspects, as a way to support business continuity in the long run.

There were several programs Indonesia Power carried out to realize Green Power Plant in 2017:

1. Monitoring, inspecting, evaluating and developing all Generating Units, Generating Service Units and Head Office in terms of environmental management.
2. Enhancing understanding and knowledge of chemical management through the Chemicals Communication Forum 2017.
3. Sharing knowledge, technology and success stories in environmental management among units through the Environmental Communication Forum 2017.
4. Assistance, investigation and coordination in the preparation of Comply Regulation and Beyond Compliance documents.
5. Developing environmental personnel's competencies by organizing Biodiversity Index Calculation, Carbon Footprint Inventory as well as Energy and Energy Manager Audit training events.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO THE ENVIRONMENT

6. Melakukan inventarisasi emisi GHG/*Carbon Footprint* untuk tahun 2016 dan 2017 berdasarkan data *baseline* tahun 2012 yang telah disertifikasi oleh lembaga verifikasi dan sertifikasi independen (TUV SUD).
7. Melakukan penghijauan di lingkungan Unit Pembangkit dengan menanam berbagai jenis pohon endemik yang berdampak untuk mereduksi emisi dan meningkatkan Keanekaragaman Hayati.
8. Memberikan penghargaan bagi prestasi pengelolaan lingkungan pada Unit yang telah berhasil dalam pencapaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan.
9. Melakukan kunjungan dan koordinasi kepada pihak eksternal terkait bidang lingkungan melalui acara *Workshop* Lingkungan.
10. Sertifikasi Manajer Energi dan Auditor Energi untuk mendukung serta meningkatkan pencapaian efisiensi energi di seluruh bidang pembangkitan.

6. Inventorying GHG/Carbon Footprint emissions for 2016 and 2017 based on the 2012 baseline data certified by an independent verification and certification body (TUV SUD).
7. Replanting more trees in the surrounding areas of Generating Units by planting an array of endemic trees which are useful to reduce emission and increase biodiversity richness.
8. Awarding Units conducting excellent environmental management and commanding successfully achievement in Environmental Managing Performance.
9. Visiting and coordinating with external parties related to environmental issues through Environmental Workshop.
10. Encouraging certified Energy Manager and Energy Auditor as a way to support and develop energy efficiency achievement in all generating fields.

Penilaian Kinerja Bidang Lingkungan Hidup (PROPER)

Informasi peringkat PROPER oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang diterima Indonesia Power dalam lima tahun terakhir dapat dilihat secara detail pada tabel berikut ini:

Environmental Performance Assessment (PROPER Rating)

The details of PROPER ratings by the Ministry of Environment received by Indonesia Power within the last five years can be seen in the table below:

Unit	Peringkat Rating				
	2013	2014	2015	2016	2017
PLTU I SPP Suralaya	**Biru** I Blue	**Hijau** I Green	**Hijau** I Green	**Hijau** I Green	**Hijau** I Green
PLTGU I CCPP Priok	**Biru** I Blue	**Biru** I Blue	**Hijau** I Green	**Hijau** I Green	**Hijau** I Green
PLTGU/PLTU I CCPP/SPP Tambak Lorok	**Hijau** I Green	**Biru** I Blue	**Hijau** I Green	**Hijau** I Green	**Hijau** I Green
PLTG I GTPP Sunyaragi	**Biru** I Blue	**Biru** I Blue	**Biru** I Blue	**Biru** I Blue	**Biru** I Blue
PLTG/PLTGU I GTPP/CCPP Grati	**Hijau** I Green	**Hijau** I Green	**Hijau** I Green	**Hijau** I Green	**Biru** I Blue
PLTG I GTPP Pesanggaran	**Hijau** I Green	**Biru** I Blue	**Biru** I Blue	**Hijau** I Green	**Hijau** I Green
PLTG I GTPP Gilimanuk	**Biru** I Blue	**Biru** I Blue	**Biru** I Blue	**Hijau** I Green	**Hijau** I Green
PLTG I GTPP Pemaron	**Biru** I Blue	**Biru** I Blue	**Biru** I Blue	**Biru** I Blue	**Biru** I Blue
PLTP I GTPP Kamojang-Darajat	**Hijau** I Green	**Hijau** I Green	**Hijau** I Green	**Hijau** I Green	**Hijau** I Green
PLTP I GTPP Gunung Salak	**Hijau** I Green	**Hijau** I Green	**Biru** I Blue	**Biru** I Blue	**Biru** I Blue
UJP I GSU Labuan *	**Biru** I Blue	**Biru** I Blue	**Biru** I Blue	**Hijau** I Green	**Hijau** I Green
UJP I GSU Lontar *	**Belum** I Not Yet	**Belum** I Not Yet	**Belum** I Not Yet	**Biru** I Blue	**Biru** I Blue
UJP I GSU Suralaya 8 *	**Biru** I Blue	**Biru** I Blue	**Biru** I Blue	**Biru** I Blue	**Hijau** I Green
UJP I GSU Palabuhan Ratu *	**Belum** I Not Yet	**Belum** I Not Yet	**Belum** I Not Yet	**Biru** I Blue	**Biru** I Blue
UJP I GSU Cilegon *	**Belum** I Not Yet	**Hijau** I Green	**Hijau** I Green	**Hijau** I Green	**Hijau** I Green

*) Pengelolaan UJP diatas sebagai *asset manager* dimulai pada tahun 2016 sebelumnya dilakukan oleh UPJB PT PLN (Persero)

*) Indonesia Power's role as the asset manager of the GSUs above started in 2016 and previously UPJB PT PLN (Persero) assumed the role.

Selama tahun 2017, Indonesia Power telah meraih kinerja positif dalam pengelolaan lingkungan dengan diraihnya 9 PROPER Hijau dan 6 PROPER Biru.

Implementasi Konservasi Air

Dalam menjalankan aktivitas produksinya, Indonesia Power sangat bergantung pada kesediaan air sebagai salah satu energi utama untuk memproduksi listrik pada pembangkitnya. Oleh karena itu Indonesia Power senantiasa melakukan pembaruan dalam pengelolaan air dan limbah buangan melalui sistem prosedur dan teknologi yang andal.

Dalam pengelolan air yang diambil untuk keperluan proses pembangkit, setiap unit melakukan upaya untuk konservasi air dengan mendaur ulang air yang telah dipakai untuk keperluan lain serta mendaur ulang air limbah dengan instalasi pengolah air agar hasilnya dapat dipakai kembali ke dalam proses.

Selama tahun 2017, Indonesia Power menggunakan air sebanyak 13.579.808,50 m^3 mengalami peningkatan 33,65% dari tahun 2016 sebanyak 10.160.908,02 m^3, peningkatan ini disebabkan oleh adanya kenaikan total produksi di tahun 2017.

Guna melihat tingkat efisiensi penggunaan air, Indonesia Power melakukan perhitungan intensitas air dengan menggunakan denominator jumlah produksi listrik bruto sebagai faktor yang paling relevan. Pada tahun 2017, rasio intensitas air Indonesia Power adalah sebesar 0,00019 m^3/kWh yang meningkat 21,94% dari tahun 2016 yaitu sebesar 0,00016 m^3/kWh. Peningkatan ini dikarenakan terjadinya kenaikan total produksi.

Adapun inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air yang dilakukan Indonesia Power yaitu melalui Pemanfaatan limbah cair dengan sistem RO (*Reverse Osmosis*) dan Reusing limbah cair PLTU batubara untuk penyiraman *stock pile*. Pada tahun 2017, Indonesia Power telah melakukan konservasi air sebesar 1.382.914,63 m^3 untuk proses produksi dan 42.718,55 m^3 untuk kebutuhan domestik.

Pengelolaan air Indonesia Power telah diuji sesuai dengan standar baku mutu yang berlaku untuk kegiatan produksi dan domestik. Pengujian dilakukan secara rutin setiap satu/tiga bulan sekali sesuai dengan ketentuan pada RKL RPL dan dianalisa melalui laboratorium yang

In 2017, Indonesia Power accomplished good performance in managing the environment as proven by 9 Green PROPER and 6 Blue PROPER ratings.

Water Conservation

In conducting production activities, Indonesia Power relies heavily on clean water supply as one of the primary energy sources to produce electricity in its power plants. Therefore, Indonesia Power always renews the management of water and waste through a system of reliable technology and procedures.

To manage water that is retrieved for generator's process, each unit conducts a water conservation method by recycling the used water for other purposes and recycling waste water by using water treatment that improves water quality so it can be utilized in the process.

In 2017, Indonesia Power used 13,579808.50 m^3 of water, an increase of 33.65% from the year 2016 that reached 10,160,908.02 m^3. This was caused by the raise in 2017's total production.

To look at efficiency of water use, Indonesia Power calculated water intensity by employing gross electricity production as the most relevant factor. In 2017, the ratio of water intensity stood at 0.00019 m^3/kWh, or increased by 21.94% from that of 2016 which was 0.00016 m^3/kWh. The cause of such increase was the increasing total production.

Several initiatives taken to increase the efficiency of water consumption by Indonesia Power included employing Reverse Osmosis system to utilize waste water and reusing coal liquid waste of coal based SPP for stockpile watering. In 2017, Indonesia Power managed to record 1,382,914.63 m^3 in water conservation for production process and 42,718.55 m^3 for domestic needs.

Indonesia Power water management has been tested accordingly to applied quality standard for domestic and production needs. The assessment is carried out monthly or once every three months according to the provisions of the Environmental Management Plan and

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO THE ENVIRONMENT

terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pada tahun 2017, hasil pengujian kualitas air Indonesia Power telah taat 100% karena berada di bawah baku mutu yang telah ditetapkan.

Implementasi Efisiensi Energi

Dalam proses produksi listrik, Indonesia Power menggunakan energi primer sebagai bahan baku (material) yang berasal dari energi fosil dan energi baru terbarukan, oleh karenanya Indonesia Power melakukan peningkatan efisiensi energi dari proses produksi dan utilitas pendukung, proses yang lebih ramah lingkungan, efisiensi dari mesin-mesin pembangkit, dan efisiensi dari bangunan. Selain itu, penggunaan energi secara efisien juga dapat berkontribusi pada pengurangan emisi dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih.

Kegiatan efesien energi yang dilakukan oleh Indonesia power adalah dengan mengurangi pemakaian listrik agar tercapainya penghematan listrik untuk pemakaian sendiri melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Efisiensi Energi pada Pembangkit

Dalam melakukan operasinya, Indonesia Power menggunakan berbagai jenis energi primer yaitu energy fosil dan energy terbarukan. Energi fosil terdiri dari batu Bara, High Speed Diesel (HSD), Marine Fuel Oil (MFO) dan Gas Alam, adapun nergi terbarukan terdiri dari Panas Bumi dan Air.

Selama tahun 2017, jumlah konsumsi energi fosil sebesar 363.783.223 gigajoule yang mengalami peningkatan 106% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 342.110.138 gigajoule. hal tersebut dikarenakan terdapat peningkatan CF PLTU Suralaya. sedangkan Jumlah konsumsi energi terbarukan di tahun 2017 adalah sebesar 25.013.954 gigajoule yang mengalami penurunan 8% dari tahun sebelumnya 28.528.009 gigajoule. Hal tersebut dikarenakan oleh penurunan produksi PLTA di tahun 2017 akibat variasi musim (tahun 2016 musim basah, 2017 musin normal).

Selain itu, Indonesia Power juga menghitung intensitas energi yang bertujuan untuk melihat tingkat efisiensi penggunaan energi Perusahaan. Rasio intensitas energi Perusahaan menggunakan denominator jumlah produksi listrik sebagai faktor yang paling relevan. Pada tahun 2017, rasio intensitas energi Indonesia Power adalah sebesar 9.221,68 gigajoule/GWh.

Environmental Monitoring Plan (RKL-RPL) by a KAN-accredited laboratory.

Energy Efficiency

In the electricity production process, Indonesia Power uses primary energy as raw material, which is derived from fossil energy and new, renewable energy. The electricity is generated from fossil fuel (non-renewable resources) and renewable sources. Therefore, Indonesia Power improves energy efficiency from production process and the supporting utility, more eco-friendly process, generator machines efficiency and building utilization efficiency. In addition, efficient energy use can contribute to reduction of emission and creation of cleaner environment.

Activities to achieve energy efficiency are undertaken by Indonesia Power to lower power consumption as a way to achieve electricity savings for own use through:

1. Energy Efficiency in Power Plant

In daily operations, Indonesia Power utilizes an array of primary energy sources of fossil fuel and renewable energy resources. Fossil fuel consists of coal, High Speed Diesel (HSD), Marine Fuel Oil (MFO) and natural gas. Meanwhile, geothermal energy and water are categorized as renewable energy resources.

In 2017, fossil fuel consumption reached 363,783,223 gigajoule that increased 106% from 2016 which amounted to 342,110,138 gigajoule. This was owing to increase of CF in SPP Suralaya. Meanwhile, total consumption of renewable energy in 2017 was 25,013,954 gigajoule, which decreased 8% from the year before that added up to 28,528,009 gigajoule. The decreasing consumption was caused by lower hydro power plant production in 2017 because of the impacts of climate change (2016 was mostly wet while 2017 was quite normal).

In addition, Indonesia Power calculated energy intensity aimed to observe the Company's efficiency level of energy utilization. To calculate this, Indonesia Power utilized the amount of electricity production as the most relevant factor. In 2017, Indonesia Power's energy intensity ratio was 9,221.68 gigajoule/GWh.

2. Pengembangan Pembangkit Energi Baru Terbarukan

Dalam rangka menjaga mutu lingkungan, Indonesia Power terus berupaya menyeimbangkan penggunaan EBT sebagai energi dalam melaksanakan kegiatan produksi. Energi Baru Terbarukan (EBT) merupakan *green energy* yang bersumber dari air, panas bumi, tenaga surya, gelombang air laut, biomassa, biofuel, hingga yang berasal dari sampah, memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi energi listrik.

Oleh karenanya, sejak tahun 1995, Indonesia Power telah memiliki pembangkit-pembangkit bertenaga EBT. Sampai dengan tahun 2017, terdapat tiga jenis pembangkit yang menggunakan EBT sebagai sumber energi, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air berupa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) serta Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

Berikut ini program pengembangan pembangkit dengan energi terbarukan Indonesia Power:

2. New, Renewable Energy-Based Power Plant Development

In order to maintain environmental quality, Indonesia Power continues to strike a balance in the use of New and Renewable Energy (NRE) as the energy source in production. NRE is green energy that is sourced from water, geothermal, solar energy, ocean wave, biomass, biofuel and waste that can be developed to produce power.

Therefore, Indonesia Power has had NRE-powered plants since 1995. Until 2017, Indonesia Power has three types of power plants using NRE as a source of energy: hydro power plant, micro-hydro power plant and geothermal power plant.

Below is Indonesia Power's renewable energy power plant development:

No	Jenis Pembangkit Type of Generator	Pengembangan Proyek Pembangkit Development of Generator Project	
1	PLTA | HPP	**PLTA Rajamandala** Sedang membangun PLTA Rajamandala berkapasitas 1x47 MW. Nantinya, PLTA Rajamandala dapat menghasilkan listrik sekitar 181 GWh per tahun atau setara dengan produksi listrik yang dihasilkan oleh 70juta liter bahan bakar minyak (BBM).	**HPP Rajamandala** Rajamandala is developing a hydro power plant 1x47 MW in capacity. Going forward, Rajamandala would be able to generate 181 GWh per year, or equal to power consumption produced by 70 million liters of oil fuel.
		PLTA Saguling UP Saguling mengoperasikan delapan sub-unit dengan total kapasitas terpasang sebesar 797 MW. PLTA Saguling dioperasikan dan dipelihara oleh UP Saguling.	**HPP Saguling** Saguling operates 8 sub-unit power plants with 797 MW capacity in total. HPP Saguling is operated and maintained by Saguling GU.
2	PLTM | MPP	pada tahun 2016 telah mulai mengembangkan beberapa PLTM (Minihidro), antara lain PLTM Lambur (8 MW) dan PLTM Harjosari (9,9 MW) di Pekalongan, PLTM Gunungwugul (3 MW) di Banjarnegara serta PLTM Cileunca 1 MW. Total produksi kedua PLTM Lambur dan Harjosari diperkirakan akan mampu memenuhi kebutuhan listrik sekitar 1,5 juta rumah tangga. Ketiga PLTM tersebut saat ini dalam tahap konstruksi. Adapula PLTMH yang sudah beroperasi, diantaranya yaitu PLTMH Siteki dan Plumbungan. Sedangkan yang sedang dalam tahap pengembangan yaitu PLTMH Brasa 2 x 1150 KW di Papua.	In 2016, Indonesia Power started to develop Mini Hydro Power Plants in several places, such as MHPP Lambur (8 MW) and MHPP Harjosari (9.9 MW) in Pekalongan, MHPP Gunungwugul (3 MW) in Banjarnegara and MHPP Cileunca (1 MW). Total production of both MHPP Lambur and Harjosari is expected to be able to meet electricity needs for 1.5 million households. The three MHPPs are now under construction while MHPP Siteki and Plumbungan are now in operation. MHPP Brasa (2 x 1150 KW) begins its construction for power plant development in Papua.
3	PLTP | GPP	Mengelola dan mengoperasikan tujuh unit PLTP dengan kapasitas total 345 MW. Pembangkit-pembangkit tersebut dioperasikan oleh tiga sub-unit, yaitu PLTP Kamojang (Kabupaten Bandung), PLTP Darajat (Garut), dan PLTP Gunung Salak (Sukabumi).	Managing and operating seven GPP units with a total capacity of 345 MW. Those power plants operate under three GPP sub-units in Kamojang (Bandung), Darajat (Garut) and Gunung Salak (Sukabumi).
4	PLTS | SPP	Selain PLTA, PLTM, dan PLTP, Indonesia Power juga akan mengembangkan pembangkit listrik di Pemaron, Bali yang menggunakan panel surya (Photo Voltaic – PV). Rencananya PLTS Pemaron akan menempati lokasi seluas sekitar 1,4 ha yang berada satu kawasan dengan PLTG Pemaron. Dengan memanfaatkan luas lahan tersebut, PV yang dipasang akan menghasilkan kapasitas lebih dari 1 MWp.	Indonesia Power will develop a solar power plant in Pemaron, Bali using Photo Voltaic (PV) cells in addition to HPP, MHPP and GPP. SPP Pemaron will be situated in an area of 1.4 ha area along with the GPP. By maximizing the area in question, the installed PV cells will generate more than 1 MWp in capacity.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO THE ENVIRONMENT

No	Jenis Pembangkit Type of Generator	Pengembangan Proyek Pembangkit Development of Generator Project	
5	PLTBM I BPP	Pada bulan November 2016, Indoneisia Power menandatangani MoU (Memorandum of Understanding) untuk pengembangan PLT Biomassa dari palet kayu yang akan dikembangkan di Merauke (Papua). Energi biomassa adalah energi yang berasal dari bahan organik sebagai hasil proses fotosintetik, baik berupa produk maupun buangan. Biomassa dapat berasal dari tanaman, pepohonan, rumput, limbah pertanian, limbah hutan, dan kotoran ternak.	In November 2016, Indonesia Power signed an MOU for developing a Biomass Power Plant utilizing wood pallet and this project would take place in Merauke (Papua). Biomass energy is derived from organic materials as a result of photosynthesis, both from the product and its waste. Biomass may come from plants, grass, agricultural waste, forest waste and animal manure.
6	PLTSa I WEPP	Bekerja sama dengan STT PLN dan Pemerintah Kabuaten Klungkung, PT Indonesia Power melaksanakan joint research waste to energy dengan program Tempat Olah Sampah Setempat untuk Kelistrikan Indonesia (TOSS-KLISI). Dengan metode peyeumisasi, sampah diolah menjadi produk briket untuk kompor yang merupakan baian dari program CSR serta pellet yang selanjutnya menjadi feedstock bagi gasifier yang hasil gasnya dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar diesel. Selain itu pellet sampah ini dengan penerapan standar yang sesuai berpotensi untuk digunakan sebagai suplisi batu bara terutama di PLTU jenis boiler stocker maupun coal fuidized bed.	In collaboration with STT PLN and Klungkung Regency, PT Indonesia Power conducted a joint research on waste to energy in under the Local Waste Processing for the Nation's Electricity (*Tempat Olah Sampah Setempat untuk Kelistrikan Indonesia* or "TOSS-KLISI") program. By implementing natural fermentation method, trashes are processed into charcoal bricket and pellet that would be processed into feed stock of gasifier whose outcomes can be used as a diesel substitute. This program is also part of the CSR agenda. In addition, the trash pellet, with proper, standard application, can be used as a supplement to coal supply for SPPs, particularly for boiler stocker and coal fuidized bed ones.

3. Program PPE (Program Peningkatan dan Pembudayaan Manajemen Efisiensi Energi)

Dalam rangka membudayakan efisiensi energi di seluruh Unit Pembangkit serta sebagai langkah proaktif dalam menghadapi Program *Performance Based Regulatory* (PBR) oleh pemerintah yang akan diberlakukan mulai tahun 2017 yang bertujuan untuk mengurangi kontribusi Perusahaan terhadap emisi gas rumah kaca (GRK) guna menciptakan proses pembangkitan yang lebih ramah lingkungan, Indonesia Power melakukan efesiensi energy melalui program PPE.

Inisiatif efisiensi energi pada program ini diantaranya yaitu menaikan *speed air pre heater (mode high speed)* ketika *outlet flue gas temp* tinggi, purifikasi minyak pelumas menghilangkan *bubbling*, optimasi pengaturan beban berdasarkan *heat rate* unit, pemasangan *blade LP turbine*, mengurangi sudut kemiringan *Blade Fan Cooling Tower* PLTP Kamojang, dan program lainnya. Melalui program ini, Indonesia Power berhasil melakukan efisiensi energi sebesar 1.614,69 kCal/kWh atau 6.760.384,09 gigajoule.

3. Improvement and Internalization of Energy Efficiency Management Program (PPE Program)

Indonesia Power manages the PPE Program to achieve energy efficiency in order to establish energy efficiency culture in all Generating Units, and to take proactive measures for welcoming the Performance Based Regulatory (PBR) Program designed by the Government and implemented since 2007. The PBR aims to reduce the Company's contribution to GHG emissions, so that eco-friendly power generating processes could be carried out on the ground.

The initiatives to promote energy efficiency include raising the preheater air speed (high speed mode) when the outlet flue gas temperature is high, purifying lubricants to diminish the bubbling, optimizing the load adjustment based on heat rate unit, installing blade LP turbine, decreasing the blade fan cooling tower's tilt angle in GPP Kamojang, and other program. As a result, Indonesia Power managed to save energy adding up to 1,614.69 kCal/kWh or 6,760,384.09 gigajoule.

Implementasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML)

Guna memberikan panduan dasar agar kegiatan bisnis yang dijalankan senantiasa ramah lingkungan, Indonesia Power membentuk program SML.

Selama tahun 2017, Indonesia Power telah melaksanakan program pelestarian lingkungan dengan melakukan kegitan sebagai berikut:

Environmental Management System (SML)

In order to provide a basic guideline for promoting eco-friendly business operations, Indonesia Power set up the SML program.

For the year 2017, Indonesia Power implemented environmental conservation program through activities as follows:

1. Memenuhi peraturan perundang-undangan mengenai K3, Lingkungan, Pengamanan, dan yag berkaitan dengan mutu, persyaratan pelanggan serta *Standard* Nasional dan Internasional yang berlaku, serta berkaitan dengan proses bisnis Perusahaan.
2. Menerapkan dan melaksanakan secara konsisten Sistem Manajemen Mutu, K3, Lingkungan, dan Pengamanan.
3. Menjadikan kebijakan ini sebagai dasar dalam menetapkan tujuan dan sasaran dalam melalukan pengelolaan lingkungan.
4. Mencegah pencemaran terhadap air, tanah dan udara, mendorong adanya sistem pengelolaan lingkungan yang efektif dengan mengutamakan konsep 3R limbah padat Non B3 (sampah), serta pengurangan dan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), mengurangi pemakaian freon untuk mengurangi pencemaran udara, dan melaksanakan program penghijauan guna menurunkan emisi dan gas rumah kaca, mendorong penggunaan transportasi yang efisien pada semua kegiatan serta melakukan uji emisi kendaraan secara berkala, mengembangkan konservasi sumber daya alam melalui efisiensi energi secara efektif dalam konsumsi energi listrik, melakukan upaya konservasi air dengan menerapkan proses 4R (*Reduce, Reuse, Recycle,* dan *Recovey*), mengoptimalkan penggunaan air laut untuk sirkulasi air pendingin, mendorong program kepedulian dan pengembangan masyarakat sekitar (*Community Development*/CSR), dan program perlindungan keanekaragaman hayati.
5. Memberian pemahaman/kepedulian dan pelatihan mengenai Mutu, K3, Lingkungan, dan Pengamanan secara terus menerus kepada seluruh pegawai baik *organic* maupun mitra kerja.
6. Meningkatkan peran aktif dan menanamkan kepedulian pegawai terhadap lingkungan.
7. Memelihara dan mendokumentasikan dokumen-dokumen terkait Sistem Manajemen Mutu, K3, Lingkungan, dan Pengamanan.
8. Mengkomunikasikan kebijakan ini kepada seluruh kontraktor/*supplier* atau mitra kerja untuk dapat mengikuti kebijakan ini serta mengkomunikasikan kepada masyarakat setempat.

1. Ensuring compliance with legislation on OHS, Environment, Security and those regulating quality, customer care, in accordance with the national and international standards that relate to business processes at Indonesia Power.
2. Consistently implementing the Quality Management System for OHS, Environment and Security.
3. Laying the relevant policy down as groundwork for formulating the goals and targets of environmental management.
4. Preventing water, land and air pollution, supporting effective environmental management by upholding the principles of Reduce, Recycle and Reuse non-toxic and hazardous solid waste, decreasing and recycling toxic and hazardous waste, diminishing the use of aerosol propellant to reduce air pollution, replanting more trees to decrease GHG emissions, promoting efficient transport in all activities and conducting emission test regularly, developing natural resources conservation on energy effective and efficient basis in using electricity, conserving water by practicing the principle of 4R (Reduce, Reuse, Recycle and Recovery), optimizing sea water for cooling system, supporting Community Development (CSR) and running a biodiversity conservation program.
5. Raising awareness/advancing concern and delivering training on Quality, OHS, Environment and Security among employers, both organic personnel and vendors.
6. Increasing employees' awareness of the environment and improving their active roles accordingly.
7. Maintaining and filing related documents on Quality Management System, OHS, Environment and Security.
8. Communicating the relevant policies to contractors/suppliers/vendors/local communities to enable compliance with them.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO THE ENVIRONMENT

9. Melakukan perbaikan berkelanjutan, penyempurnaan, dan peningkatan secara terus menerus terhadap sasaran organisasi pada setiap proses bisnis masing-masing bidang.

9. Constantly making improvements, refining and intensifying organizational targets in every business process done at every division.

Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan

Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, Indoneisa Power selalu terbuka jika ada laporan pengaduan dari masyarakat terhadap dampak lingkungan yang mungkin timbul berkaitan dengan operasional Perusahaan. Pengaduan masalah lingkungan tersebut disampaikan kepada Unit Pembangkit terkait yang di tujukan kepada General Manager masing-masing unit.

Selama tahun 2017, Indonesia Power tidak mendapat denda atau sanksi berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap undang-undang yang berkaitan dengan masalah lingkungan.

Environmental Problem Complaint Mechanism

As a commitment to raise awareness on the environment, Indonesia Power opens its door to receive any complain from the public for any environmental impacts that might arise from the Company's operational activities. Environmental complaint is submitted to the related Generating Unit and specified to the Unit's General Manager.

In 2017, Indonesia Power was not subjected to any fine/penalty or in relation to non-compliance with laws governing environmental issues.

Sertifikasi di Bidang Lingkungan yang Dimiliki Indonesia Power

Selama tahun 2017, Indonesia Power meraih kinerja positif dalam pengelolaan lingkungan (Proper). Kinerja positif ini dibuktikan dengan diraihnya 9 Proper Hijau oleh PLTU Suralaya, PLTGU Priok, PLTGU/PLTU Tambak Lorok, PLTG Pesanggaran, PLTG Gilimanuk, PLTP Kamojang - Darajat, UJP Labuan, UJP Banten 1 Suralaya dan UJP Cilegon.

Selain pencapaian PROPER, pada tahun 2017 Indonesia Power juga berhasil meraih penghargaan pada ajang Indonesia *Green Company Achievement* dan SRI Kehati Appreciation 2017 dari Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) dan Majalah SWA. Penghargaan ini menunjukkan bahwa Indonesia Power telah memenuhi prinsip-prinsip *Sustainable & Responsible Investment* (SRI) dan *Green Company* yang mewujudkan lingkungan sehat dan meminimalisasi kerusakan lingkungan serta secara berkelanjutan menjaga kelangsungan alam. Selanjutnya, Indonesia Power juga memperoleh PROPER Daerah (PROPERDA) dari Provinsi Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Jawa Barat sebagai Perusahaan yang peduli terhadap lingkungan.

Environmental Certification

Throughout 2017, Indonesia Power showed positive performance in managing the environment. This positive performance was demonstrated by PROPER ratings received, i.e. 9 green PROPER ratings for SPP Suralaya, CCPP Priok, CCPP/SPP Tambak Lorok, GTPP Pesanggaran, GTPP Gilimanuk, GPP Kamojang - Darajat, Labuan GSU, Banten 1 Suralaya GSU and Cilegon GSU.

In the same year, Indonesia Power also won an award at Indonesia Green Company Achievement and SRI Kehati Apprecication from Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) Foundation and SWA Magazine. This achievement shows that Indonesia Power has fulfilled the principles of Sustainable & Responsible Investment (SRI) and Green Company in establishing healthy environment, minimizing environmental damage and preserving the natural environment in a sustainable manner. Furthermore, Indonesia Power obtained PROPER at local level (PROPERDA), an award given to a company proven to give the best performance in managing environmental issues, from the Provincial Governments of Central Java, Special Region of Jakarta and West Java.

Biaya Pengelolaan Lingkungan

Selama tahun 2017, biaya pengelolaan lingkungan Indonesia Power adalah Rp17.765,12 miliar dengan rincian sebagai berikut:

Environmental Management Cost

During 2017, Indonesia Power's environmental management costs are Rp17,765.12 billion with details as follows:

Program	**Pemeliharaan Lingkungan** Environmental Maintenance	**Dokumentasi Lingkungan** Environmental Documentation	**Pemantauan Lingkungan** Environmental Monitoring	**Pengelolaan Lingkungan** Environmental Management	**Pemeliharaan Instalasi/Alat Pengelolaan Lingkungan** Installation/ Maintenance of Environmental Management Equipment
Biaya (Rp miliar)	4487,34	3941,56	3962,81	5136,64	236,78

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN EMPLOYMENT AND OHS



Dalam pelaksanaan kegiatan tanggung jawab Perusahaan terhadap ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, Indonesia Power membagi kegiatan tersebut menjadi 2 (dua) bidang kegiatan yaitu:

- Kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Ketenagakerjaan; dan
- Kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

In fulfilling its responsibilities for employment, occupational health and safety, Indonesia Power classifies those into two categories:

- Corporate Social Responsibility to Employment, and
- Corporate Social Responsibility to OHS.

A. Kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan

Kebijakan

Kebijakan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), Indonesia Power mengacu pada Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Direksi Nomor: 84.K/010/IP/2015 tentang Sistem Pembinaan Kompetensi dan Karir Pegawai.

Rencana kegiatan

Dalam rangka meningkatkan hubungan industrial antara Perusahaan dengan pegawai, Indonesia Power setiap tahunnya menyusun rencana kegiatan dalam pengelolaan ketenagakerjaan. Rencana kegitan dalam pengelolaan ketenagakerjaan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

A. Corporate Social Responsibility in Employment

Policy

Regarding Human Resources Management, Indonesia Power refers to Law of the Republic Indonesia No. 13 of 2013 on Labor and Director's Decree No. 84.K/010/IP/2015 on Employee Competency and Career Development System.

Program

As a way to improve industrial relations, Indonesia Power prepares an action plan on labor management every year. The details of action plan in 2017 can be seen below:

Rencana Kegiatan Program	Realisasi Kegiatan Realization
Distribusi buku PKB periode tahun 2017-2018 Distribution of Collective Labor Agreement (CLA) books for the period 2017-2018	100% pegawai memiliki buku PKB periode tahun 2017-2018 100% of the employees have CLA books for 2017-2018
Sosialisasi PKB periode tahun 2017-2018 Dissemination of CLA-related information for the period 2017-2018	Pegawai memahami isi PKB periode tahun 2017-2018 The employees understand the 2017-2018 CLA

Pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Ketenagakerjaan dan Dampak Kuantitatif

Pelaksanaan kegiatan terkait Tanggung Jawab Perusahaan terhadap pegawai selama tahun 2017.

Pengembangan Kompetensi

Secara konsisten, Indonesia selalu berupaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas serta produktivitas sumber daya manusia melalui berbagai program pengembangan dengan berbagai program pendidikan dan pelatihan, *training* maupun studi banding yang disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan.

Implementation of Corporate Responsibility Programs in Employment and Their Quantitative Impacts

Corporate Responsibility activities related to employees during 2017 as follows.

Competency Development

Indonesia Power consistently commits to developing and improving its human resources through an array of development, education, training and field trip programs pursuant to the Company's needs.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN EMPLOYMENT AND OHS

Selama tahun 2017, program pengembangan bagi pegawai Indonesia Power dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

1) Program Pelatihan dan Pendidikan yang ditunjukan untuk pegawai akselerasi kompetensi
2) *Training Work Station* (Simulator) di lakukan oleh *Learning Center* Indonesia Power yang terletak di di PLTU Perak, Surabaya
3) Sertifikasi Kompetensi baik untuk Sertifikasi Baru maupun Perpanjangan
4) Membangun sebuah komunitas keahlian pembangkitan dilingkungan Perusahaan yang disebut *Community of Expertise* (ComEt).

Uraian lebih rinci terkait pengembangan kompetensi pegawai dijelaskan dalam Bab Profil Perusahaaan Sub Bagian Profil Pegawai Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Perlindungan terhadap Pegawai (Hubungan Industrial)

Sebagai wujud kepatuhan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pasal 28 E ayat 3, Indonesia Power senantiasa berkomitmen menjaga hubungan baik kepada seluruh pegawai yang berada dilingkungan Perusahaan, untuk itu Indonesia Power memberikan kebebasan bagi pegawai untuk membentuk Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP-IP) sebagai sarana bagi pegawai untuk berorganisasi dan menyalurkan aspirasinya, PPIP telah resmi terdaftar di Kantor Kemenakertrans RI dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No.KEP 413/M/BW/1999 tanggal 5 November 1999 dan telah dicatatkan ulang berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.KEP 16/MEN/2001 tanggal 15 Februari 2001.

Sepanjang tahun 2017, Indonesia Power telah berpartisipasi dalam melaksanakan hubungan industrial, melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pertemuan periodik PPIP dan Manajemen.
2. Pengisian *logbook* keluhan pegawai 2017.
3. Pembahasan SK Peraturan Disiplin.
4. Monitoring pelanggaran disiplin di seluruh unit.
5. Komunikasi rutin dengan PPIP

Several development programs conducted by Indonesia Power that were aimed at its employees in 2017 included:

1) Training and Education program directed to accelerated competency employees.
2) Work Station Training (Simulator) conducted by Indonesia Power Learning Center in SPP Perak, Surabaya.
3) Conducting Competency Certification program for both new and renewed certification.
4) Building a generating expertise community within the Company, i.e. Community of Expertise (ComEt).

Further details of employee competency development are explained in the Company Profile Chapter - Sub-chapter on employee profile of this Annual Report.

Industrial Relations

In compliance with the 1945 Constitution of the Republic Indonesia (UUD 1945) Chapter 28 E, Article 3, Indonesia Power commits to maintain good relationships with all employees in the Company environment. Therefore, Indonesia Power allows the employees to form the Indonesia Power Labor Union (PP-IP) as a platform to actively participate in an organization and raise their aspirations. The PP-IP has officially registered with the Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia in accordance with Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia No. KEP 413/M/BW/1999 on November 5, 1999 and re-registered based on Decree of the Minister of Manpower and Transmigration No. KEP 16/MEN/2001 dated February 15, 2001.

In 2017, Indonesia Power carried Industrial Relation-related programs as follows:

1. Regular meetings between PP-IP and the management team.
2. Filling employee complaint logbook in 2017.
3. Review of the new Decree on Disciplinary.
4. Monitoring disciplinary violations at all units.
5. Regular communications with the PP-IP.

Remunerasi Pegawai

Dalam rangka peningkatan produktivitas kerja, Indonesia Power memberikan paket remunerasi yang kompetitif bagi karyawannya yang sesuai nilai pekerjaannya secara internal dan eksternal.

Bentuk remunerasi yang diberikan Indonesia Power berupa kompensasi dan manfaat pegawai. Kebijakan terkait sistem remunerasi Indonesia Power telah tercantum di dalam PKB Bab VI tentang Penghargaan.

Remunerasi berupa Kompensasi
Remuneration in the form of Compensation

1. Gaji: *Pay for Person* (P1) dan *Pay for Position* (P2).
2. Tunjangan lainnya yaitu Tunjangan tetap yang terdiri dari Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Tunjangan Cuti Tahunan, Tunjangan Cuti Besar, Tunjangan Winduan.
3. *Pay for Performance* (P3).

1. Salary: Pay for Person (P1) and Pay for Position (P2).
2. Other allowances, i.e. Fixed Allowance consisting of Religious Holiday Allowance, Annual Leave Allowance, Long Leave Allowance, Eight Year Allowance.
3. Pay for Performance (P3).

Pemberian komponen remunerasi bagi pegawai selain berdasarkan nilai pekerjaannya secara internal dan eksternal, juga berdasarkan pada status kepegawaian yang tetap dan tidak tetap, namun, walaupun demikian, Indonesia Power memastikan bahwa hak-hak pegawai tidak tetap telah sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku.

Employee Remuneration

To improve working productivity, Indonesia Power offers competitive remuneration package to its employees based on their job description and work performances, both internally and externally.

Indonesia Power offers remuneration in the form of employee compensation and benefits. The relevant policy on Indonesia Power's remuneration system is regulated in Chapter VI on Compensation of the CLA.

Remunerasi berupa Manfaat Pegawai
Remuneration in the form of Employee Benefits

1. Fasilitas yang terdiri dari Rumah Jabatan, Kendaraan Dinas, Perjalanan Dinas, Sarana Kerja.
2. Benefit yang terdiri dari Tunjangan Hari Tua, Pemeliharaan Kesehatan, Tunjangan Kecelakaan Kerja, Uang Pelepasan bagi Pegawai yang berhenti bekerja atau pensiun, Bantuan Pemakaman dan Duka Cita, Pakaian Kerja, Pakaian Dinas, dan Pakaian Olah Raga, Pendidikan dan Pelatihan, Family dan/atau *Employee Gathering*.

1. Facilities consisting of Business House, Business Car, Business Trip, Work Facilities.
2. Benefits consisting of Pension, Healthcare, Work Accident Allowance, Severance Payment for Employees who resign or retire, Assistance for Burial Costs, Work Uniform, Business Uniform, and Sports Attire, Education and Training, Family and/or Employee Gathering.

Indonesia Power provides remuneration to its employees based on the values of the works performed, both internally and externally, and also their employment status whether or not it is permanent. However, Indonesia Power ensures that non-permanent employees are hired in line with the prevailing legislation.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN EMPLOYMENT AND OHS

Perbedaan Komponen Remunerasi berdasarkan Status Kepegawaian

Different Components of Remuneration based on Employment Status

Kebijakan Policy	Benefits		Status Kepegawaian Employment Status		
			Pegawai Tetap Permanent Employees	**TKWT** Fixed Term Employee	***Outsourcing***
Remunerasi	Gaji/Imbalan	Remuneration/Reward	√	√	√
	Kompensasi Lembur	Overtime Pay	√	-	√
	Uang Pelepasan	Severance Payment	√	-	-
	Tunjangan Hari Tua	Pension	√	-	-
	Asuransi	Insurance	-	-	√
Pemeliharaan Kesehatan Healthcare	Jaminan Kesehatan	Health Coverage	√	√	√
	Tunjangan Kecelakaan Kerja	Work Accident Allowance	√	√	√
Pendidikan/Pelatihan Education/Training	Pendidikan Formal	Formal Education	√	-	-
	Pelatihan	Training	√	-	√
Kebijakan Lainnya Other Policies	Pinjaman Lunak	Soft Loan	√	-	-
	Bantuan Pemakaman dan Dukacita	Bereavement Assistance	√	-	-
	Bantuan Bencana Alam	Natural Disaster Aid	√	-	-
	Family Gathering	Family Gathering	√	-	-
	Bantuan Fasilitas Sewa Rumah (BFSR)	House Rent Assistance	√ (tertentu) (specific)	-	-
Fasilitas Kerja Work Facilities	Pakaian Kerja/OR	Work/Sport Attire	√	-	√
	Rumah Jabatan	Company Housing	√ (tertentu) (specific)	-	-
	Kendaraan Dinas	Business Vehicle	√ (tertentu) (specific)	-	-
	Kendaraan Operasional	Operational Vehicle	√	√	√
	Perjalanan Dinas	Business Trip	√	√	√
	Alat Komunikasi	Communication Device	√ (tertentu) (specific)	-	-
	Alat Penunjang	Supporting Equipment	√	√	√

Tingkat *Turnover* Pegawai

Jumlah *turnover* pegawai tahun 2017 sebesar 4,209, jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2016 yaitu 3,725. Peningktan ini disebabkan oleh pegawai yang pensiun. Berikut adalah tabel *turnover* pegawai Indonesia Power dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

Employee Turnover Rate

In 2017, the number of employee turnover reached 4,209. This increased from the corresponding number in 2016, which was 3,725, due to retirement. The following table illustrates Indonesia Power's employee turnover in the last three years:

Penyebab / Cause		2015	2016	2017
Pensiun	Pension	135	157	154
Meninggal Dunia	Death	7	8	10
Diberhentikan	Termination	1	2	1
Mengundurkan Diri	Resignation	4	4	5
Jumlah *Turnover*	**Total Turnover**	**147**	**171**	**169**
Total Pegawai	**Total Employees**	**3.639**	**3.725**	**4.209**
Persentasi *Turnover*	**Turnover Percentage**	**4%**	**4,59%**	**4,02%**

Tingkat *turnover* pegawai Indonesia Power mengalami peningkatan sebesar 4,02%, hal ini Dikarenakan jumlah pegawai yang signifikan pada *turnover* ini adalah karena telah memasuki pensiun normal, sedangkan pegawai yang mengundurkan diri jumlahnya tidak signifikan, maka bisa disimpulkan sistem yang ada di Indonesia Power masih baik.

Indonesia Power's employee turnover increased to 4.02%. The main cause of this turnover is the significant number of retired employees and while the number of resignation was insignificant. Thus, it can be concluded that Indonesia Power's management remains sound.

Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja

Dalam hal praktik ketenagakerjaan Indonesia Power berupaya menerapkan prinsip keberagaman yakni dengan melakukan pengelolaan pegawai yang memiliki jenis kelamin, pendidikan, dan latar belakang yang beragam. Selain menerapkan prinsip keberagaman, Indonesia Power juga menerapkan prinsip kesetaraan mulai dari tahap rekrutmen, program pelatihan dan pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir, sampai dengan pemberian remunerasi dan kesejahteraan kepada pegawai tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, agama, dan faktor keberagaman lainnya.

Selama tahun 2017, tidak terdapat laporan mengenai insiden diskriminasi yang berlandaskan pada ras, warna kulit, gender, agama, opini politik, asal usul sosial dan segala bentuk diskriminasi lainnya yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal di seluruh operasional Perusahaan.

Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

Indonesia Power menyediakan sarana pengaduan pegawai terkait praktik ketenagakerjaan yang menyimpang dari aturan yang berlaku guna memberikan perlindungan bagi pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.

Sejalan dengan PKB Bab VIII Hubungan Industrial Pasal 133 tentang Keluh Kesah Pegawai dan Pasal 134 tentang Penyelesaian Keluh Kesah Pegawai, mekanisme penyampaian keluhan pegawai dapat dilihat pada *Flow chart* sebagai berikut:

Gender Equality and Employment Opportunity

Indonesia Power commits to implement the principle of diversity at the workplace by managing its employees with their respective gender, education and cultural backgrounds. In addition, Indonesia Power puts into effect the equality principle right from the recruitment process, then to training and competency development, performance assessment, career development and remuneration package to the employees without discriminating on gender, religion and other diversity factors.

Throughout 2017, there had not been any report regarding discrimination incident based on race, skin color, gender, religion, political belief, social background and other forms of discrimination involving any of the internal and external stakeholders at all operational levels of the Company.

Employment Problem Complaint Mechanism

In order to provide protections for employee in carrying out their duties and responsibilities effectively, Indonesia Power provides complaint channel for the employee related to the Company.

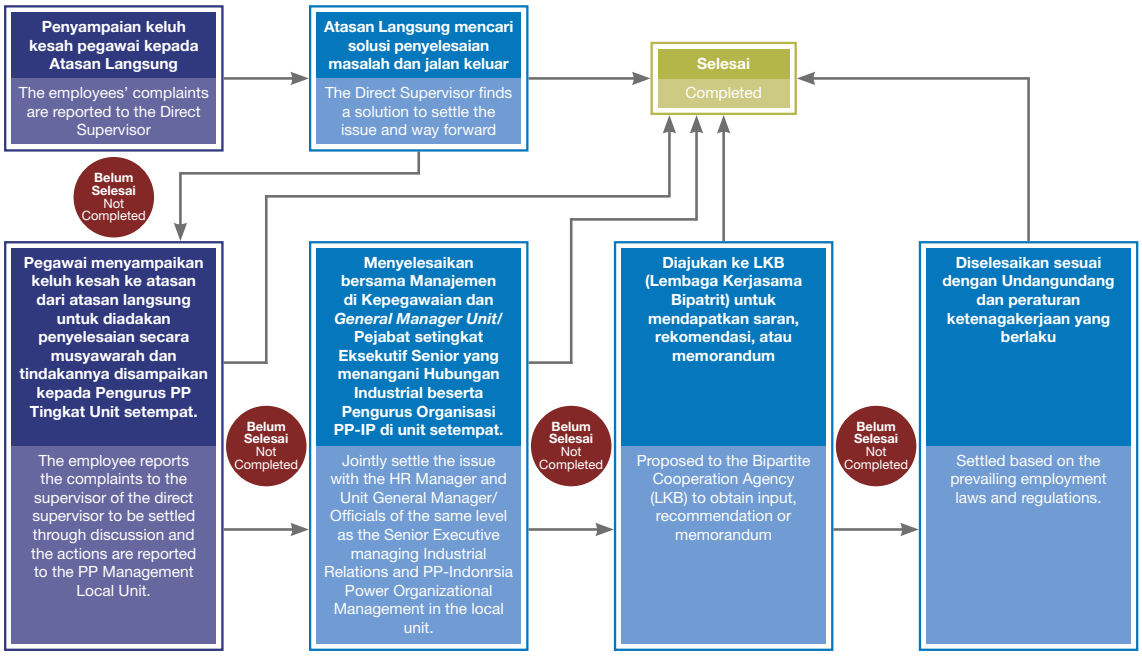
In line with Article 133 on Employee Complaint and Article 134 on Resolution of Employee Complaint of Chapter VIII regarding Industrial Relations on the CLA, the complaint mechanism for employees can be seen on the following chart:

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN EMPLOYMENT AND OHS

Mekanisme Pengaduan Pegawai

Employee Complaint Mechanism



Selama tahun 2017 tidak terdapat pengaduan terkait pelanggaran praktik ketenagakerjaan dan pelanggaran hak asasi manusia termasuk insiden diskriminasi yang diajukan pegawai kepada Perusahaan

During the course of 2017, there had not been any complaint regarding employment practices and human rights violation, including discriminative incident reported by the employees to the Company.

Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Ketenagakerjaan

Biaya pengelolaan ketenagakerjaan Indonesia Power selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Expenses for Employment Activities

The following is labor management cost spent by Indonesia Power in 2017:

Gaji Salary	***Pay For Performance* (P3)**	**Bonus/Insentif** Bonus/Incentives	**Dalam Bentuk Kompensasi Pegawai (A)** In the Form of Compensation (A)	**Dalam Bentuk Manfaat Pegawai (B)** In the Form of Benefits (B)	**Dalam Bentuk Diklat dan Lainnya (C)** In the Form of Training and Others (C)
517,8	265,9	355,5	1.139,3	804,6	161,9

B. Kegiatan Tanggung Jawab Sosial terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Dalam rangka menjamin keselamatan dan kesehatan seluruh pegawai, Indonesia Power memiliki 4 (empat) pilar keselamatan ketenagalistrikan, yaitu keselamatan tenaga kerja, keselamatan masyarakat umum di sekitar pembangkit, keselamatan aset pembangkitan, serta keselamatan lingkungan di dalam dan sekitar pembangkit.

B. Corporate Social Responsibility in OHS

To ensure the health and safety of its workforce, Indonesia Power has established four pillars of electrical safety which include labor safety, public safety around the power plant, power plant asset safety and environmental safety within and around the power plant.

Pilar Keselamatan Ketenagalistrikan
Pillars of Electrical Safety



Indonesia Power menjamin keselamatan dan kesehatan seluruh pegawai melalui penyediaan lingkungan kerja yang aman, nyaman, produktif serta bebas dari kecelakaan, kebakaran, pencemaran lingkungan dan penyakit akibat kerja.

Selain itu, pada tahun 2017 fungsi K3 Indonesia Power telah menyusun *Roadmap* K3 untuk tahun 2017-2020 sebagai tahapan dalam kegiatan K3 setiap tahunnya.

Indonesia Power guarantees all employees' safety and health by providing a safe, comfortable, and productive work environment that are free from accident, fire, environmental pollution and work-related diseases.

Moreover, Indonesia Power designed an OHS Roadmap in 2017 for the years 2017-2020 as the guideline for OHS activities every year.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN EMPLOYMENT AND OHS

Roadmap K3 2017-2020 Indonesia Power

Indonesia Power OHS Roadmap of 2017-2020



Kebijakan

Kebijakan yang menjadi acuan Indonesia Power dalam pengelolaan K3 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 86 ayat 2 " Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja";
2. Keputusan Direksi No: 065.K/010/IP/2008 tentang Ketentuan Kecelakaan Dinas/kerja
3. Keputusan Direksi No: 16.K/010/IP/2010 tentang Penerangan Dalam Tempat Kerja
4. Keputusan Direksi No:23.K/010/IP/2010 tentang Penerapan Program 5S di Seluruh Unit Kerja
5. Keputusan Direksi PT Indonesia Power No: 41.K/010/IP/2012 tentang Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan di PT Indonesia Power.
6. Keputusan Direksi No: 5.K/010/IP/2011 tentang Pedoman Operasi Baku Manajemen Housekeeping (5S)
7. Keputusan Direksi PT Indonesia Power No: 165.K/010/IP/2016 tentang Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja PLTU Batubara di PT Indonesia Power.
8. Surat Edaran Direksi Nomor: 14.E/012/IP/2017 tentang Petunjuk Warna Cat Lantai Pada Pembangkit

Policy

Below are policies that the Company adheres to in its OHS management:

1. Law No. 13 of 2003 Article 86 paragraph 2 "In order to protect the safety of workers/laborers to achieve optimal productivity, efforts shall be made in occupational health and safety".
2. Directors' Decree No. 065.K/010/IP/2008 regarding Provisions on Work/Occupational Accidents;
3. Directors' Decree No. 16.K/010/IP/2010 on Lighting at the Workplace;
4. Directors' Decree No: 23.K/010/IP/2010 on Implementation of the 5S Program at All Work Units;
5. Directors' Decree No. 41.K/010/IP/2012 on Safety Policies and Occupational Health & Safety and the Environment of PT Indonesia Power;
6. Directors' Decree No. 5.K/010/IP/2011 on Standard Operating Procedure for Housekeeping Management (5S);
7. Directors' Decree No. 165.K/010/IP/2016 regarding Policy on Occupational Health and Safety in Coal Based SPP of PT Indonesia Power;
8. Directors' Circular No. 14.E/012/IP/2017 on Power Plant Floor Color Coding.

Rencana kegiatan

Pada tahun 2017, Indonesia Power menyusun rencana kegiatan K3 Perusahaan sebagai berikut:

1. Pelatihan, *Workshop*, Sertifikasi;
2. Sayembara Kuis K3;
3. Peresmian *Centre of Excellence Fire & Safety Academy* (FSA) di Pandean Lamper, Semarang, Jawa Tengah
4. Lomba K3 (Cerdas Cermat, Lomba Pemadam Kebakaran, *First Aider*)
5. Launching Aplikasi *Near Miss*
6. Peresmian Unit Percontohan K3

Program

The Company in 2017 designed an Occupational Health and Safety program as follows:

1. Training, Workshop and Certification;
2. OHS Competition;
3. Inauguration of Centre of Excellence for Fire & Safety Academy (FSA) in Pandean Lamper, Semarang, Central Java;
4. OHS Contests (Quiz, Firefighting Competition, First Aider);
5. Near Miss App Launching;
6. Inauguration of OHS Pilot Unit.

Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan terkait K3 dan Dampak Kegiatan

Sepanjang tahun 2017 bentuk kegiatan K3 dilakukan berdasarkan rencana kegiatan yang telah di tetapkan oleh Indonesia Power dengan realisasi sebagai berikut:

Implementation of Corporate Responsibility Programs in OHS and Their Impacts

The Company undertook OHS activities explained below throughout 2017 based on the established program:

Pelatihan dan *Workshop* K3

Dalam rangka pemenuhan *gap* kompetensi pegawai K3, Indonesia Power telah melaksanakan pelatihan, *workshop* dan sertifikasi bagi pegawai sebagai berikut:

OHS Training and Workshop

To fulfil the gap in personnel competencies in the field of OHS, Indonesia Power organized the following training, workshop and certification events:

Waktu Pelaksanaan Time	Jumlah Peserta Total of Participants	Materi Pelatihan Training Topic	
3 s/d 4 Mei I May	21 orang I people	Pelatihan dan Simulasi Tanggap Darurat	Emergency Response Training and Simulation
26 s/d 28 April	27 orang I people	Training *Safety Officer Tingkat* Pelaksana K3	Training of Safety Officer for OHS Facilitator
12 s/d 14 Juli I July	17 orang I people	Training *Safety Officer Tingkat* Penyelia K3	Training of Safety Officer for OHS Supervisor
21 s/d 23 Agustus I August	39 orang I people	IHT *Fire Protection Inspection, Testing*, dan *Maintenance based* NFPA	IHT Fire Protection Inspection, Testing, & Maintenance based on the National Fire Protection Association (NFPA)
11 s/d 12 Oktober I October	37 orang I people	IHT *Contractor Safety Management System*	IHT for Contractor Safety Management System
21 s/d 22 Desember I December	19 orang I people	IHT *Behaviour Based Safety*	IHT for Behavior-Based Safety
12 s/d 13 April	39 orang I people	IHT Petugas Peran Kebakaran	IHT for Firefighting Personnel
18 s/d 22 Juli I July	27 orang I people	IHT Regu Pemadam Kebakaran	IHT for Firefighting Team
5 s/d 8 September	18 orang I people	IHT Kord Pemadam Kebakaran	IHT for Firefighting Team Coordinator
16 s/d 20 Oktober I October	15 orang I people	IHT Ahli K3 Kebakaran	IHT for OHS Firefighting Expert
3 s/d 5 Mei I May	31 orang I people	Workshop Penyusunan HIRADC & Identifikasi Peraturan Perundangan K3	Workshops on HIRADC Organization & Identification of OHS Legislation
27 s/d 29 November	26 orang I people	Sertifikasi P3K	First Aid Certification
13 s/d 25 November	14 orang I people	Sertfikasi AK3U	AK3U Certification
28 s/d30 November	39 orang I people	*Workshop* P2-HIV dan K3	P2-HIV & OHS Workshops

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN EMPLOYMENT AND OHS

Waktu Pelaksanaan Time	Jumlah Peserta Total of Participants	Materi Pelatihan Training Topic	
Oktober - Desember October - December	269 orang | people	Training Advance Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran *Low Rank Coal* pada PLTU	Advanced Training on Prevention and Mitigation of Low Rank Coal Fire at SPP
15-16 November	15 orang | people	*Hazard and Operability Study* (HAZOP)	Hazard and Operability Study (HAZOP)
28-31 Agustus | August	10 orang | people	*Workshop Oil & Gas Hazard Assessment & Analysis*	Hazard Oil & Gas Assessment & Analysis Workshop
September s/d Desember | December	20 orang | people	Sertifikasi *National Fire Protection Association* (NFPA)	NFPA Certification
8 November	19 orang | people	*Basic Industrial Fire Fighting Course*	Basic Industrial Fire Fighting Course

Sayembara Kuis K3

Sebagai bentuk peningkatan partisipasi pegawai unit K3 serta sebagai media sosialisasi dan peningkatan *awareness* pegawai terhadap K3, Indonesia Power mengadakan sayembara kuis K3 yang dilaksankan setiap bulan.

OHS Competition

As a token of improved participation on the employee part, as well as to disseminate information and raise awareness of OHS issues, Indonesia Power organizes an OHS quiz on a monthly basis.







Peresmian *Centre of Excellence Fire & Safety Academy* (FSA)

Guna menumbuhkan budaya K3 serta membangun kepedulian dan kesadaran akan pentingnya K3, Indonesia Power membangun *Center of Excel lence Fire & Safety Academy* (FSA) di Pandean Lamper, Semarang, Jawa Tengah dan telah diresmikan pada tanggal 8 Agustus 2017. Sejak diresmikan FSA Pandean Lamper pun menjadi pusat pelayanan beragam kebutuhan pelatihan, *assessment*, dan konsultasi di bidang operasi pembangkit listrik yang mengedepankan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta memiliki fasilitas simulator untuk operasi.

Kehadiran *Fire & Safety Academy* (FSA) merupakan salah satu wujud komitmen Indonesia Power untuk menumbuhkan budaya Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) dalam operasional pembangkit. Khususnya, pembangkit-pembangkit termal (PLTU) yang menggunakan batubara berkalori rendah (*low rank coal*) sebagai energi primer. Indonesia Power melalui Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Indonesia Power (YPKIP), mengemas FSA sebagai sebuah lembaga training, jasa pelayanan, dan jasa konsultasi *Fire & Safety*, yang fokus pada pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran pada instalasi ketenagalistrikan.

Inauguration of Centre of Excellence for Fire & Safety Academy (FSA)

As a way to develop OHS culture and increase awareness of the importance of OHS, Indonesia Power built a Centre of Excellence for Fire & Safety Academy (FSA) in Pandean Lamper, Semarang, Central Java. The facility was inaugurated on August 8, 2017. Since then, the FSA has become the center for meeting various training, assessment and consultation needs in power plant operations that put OHS first and is equipped with training simulator.

The establishment of the FSA hints at one of Indonesia Power's commitments on developing OHS culture in power plant operations, especially for SPPs which use low rank coal as its main fuel source. Through the Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Indonesia Power (YPKIP), the Company presents the FSA as an institution that provides training, service and consultation on Fire & Safety focused on fire prevention and mitigation of fire hazards in electrical installation.

Perlombaan K3

Selama tahun 2017, Unit K3 Indonesia Power telah mengadakan berbagai perlombaan sebagai berikut:

Lomba Cerdas Cermat K3

Pada tanggal 21-23 Februari 2017, Indonesia Power mengadakan kegiatan lomba cerdas cerrmat k3 yang diikuti oleh seluruh unit Indonesia Power guna meningkatkan pengetahuan pegawai terkait K3.

OHS Contests

The following are contests that Indonesia Power OHS Unit organized in 2017:

OHS Pop Quiz

On February 21-23, 2017 the Company organized an OHS quiz in which all Indonesia Power Units participated in order to expand the employees' OHS knowledge.





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN EMPLOYMENT AND OHS

Lomba Pemadam Kebakaran

Guna menumbuhkan budaya K3 (Keselamatan & Kesehatan Kerja) serta membangun kepedulian dan kesadaran akan pentingnya K3, Indonesia Power telah melaksanakan lomba pemadam kebakaran pada tanggal 10 Mei 2017 di *Fire & Safety Academy*.

Fire Fighting Competition

In strengthening OHS culture and developing awareness of as well as concern for the importance of OHS, Indonesia Power organized a fire fighting competition on May 10, 2017 in the FSA.





Lomba First Aider

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai Indonesai Power dalam penjagaan keamaan Perusahaan, Indonesia Power telah melaksanakan Lomba *First Aider* antar Unit Pembangkit pada tanggal 24-26 Oktober 2017 di *Fire & Safety Academy*, Pandean Lamper - Semarang dengan materi penanganan luka bakar, patah tulang, dan henti jantung, serta evakuasi korban.

First Aider Competition

In an effort to develop the competencies of its personnel in ensuring the Company's safety and security, Indonesia Power organized First Aider Competition for Generating Units on October 24-26, 2017 at the FSA premise in Pandean Lamper, Semarang. The competition covered the handling of burn, fracture, cardiac arrest and victim evacuation.





Launching Aplikasi Near Miss

Near Miss App Launching

Indonesia Power telah mengembangkan sebuah inovasi dalam rangka meningkatkan Keselamatan,dan Kesehatan Kerja (K3), khususnya di lingkungan pembangkit. Aplikasi yang diberi label *Near Miss* ini sekaligus menjadi wujud tata kelola pembangkitan yang mengedepankan aspek K3.

Indonesia Power has created an innovation aimed to increase OHS, particularly in the power plant area. This app, named Near Miss App, serves as a medium to conduct generating management with OHS as a priority.

8 Agustus 2017, Indonesia Power telah me*launching* sebuah aplikasi digital yang terintegrasi ke dalam Maximo, yaitu Aplikasi *Near Miss*. Aplikasi *Near Miss* adalah sebuah aplikasi pelaporan kejadian hampir celaka (*Near Miss*) yang disajikan secara *online* dan *realtime*. Sesuai dengan istilah yang disematkan pada aplikasi ini, *Near Miss* didefinisikan sebagai sebuah peristiwa hampir celaka yang disebabkan oleh kondisi tempat kerja yang tidak aman dan/atau kebiasaan orang yang tidak aman.

Melalui aplikasi ini, seluruh insan Indonesia Power dapat memberikan kontribusinya dalam melaporkan kondisi tempat kerja yang tidak aman dan/atau kebiasaan orang yang tidak baik dalam bekerja. Disamping itu, secara tidak langsung, aplikasi ini akan menimbulkan efek positif, antara lain.

1. Munculnya kepedulian dalam bentuk *Social Relation* K3.
2. Tindakan kepada perilaku pekerja berupa pemberian surat peringatan.
3. Tindak lanjut perbaikan terhadap aset dengan menggunakan Aplikasi Maximo.
4. Pemenuhan Pelaporan sesuai dengan PERMENAKER No. 3 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan.

Peresmian Unit Percontohan K3

Indonesia Power menggelar soft launching UJP PLTU Banten 3 Lontar sebagai PLTU Percontohan K3L *launching Safety Center* pada tanggal 1 Maret 2017.

Tingkat Kecelakaan Kerja

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 41.K/010/IP/2012 tentang Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan di PT Indonesia Power pasal 24, kecelakaan kerja didefinisikan yaitu kecelakaan yang terjadi berkaitan langsung dengan waktu jam kerja sesuai bidang tugas pekerjaan, kewajiban dan tanggung jawab sehari-hari yang pelaksanaan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selama tahun 2017, terdapat 3 (tiga) kecelakaan kerja, dimana para korban tersebut telah di tindaklanjuti oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam PKB Indonesia Power.

On August 8, 2017, Indonesia Power launched a digital application integrated in Maximo, named Near Miss App. Near Miss is an application which reports near miss incident that can be accessed online and real-time. As the app name suggests, Near Miss is defined as unplanned event that has the potential to cause accident but does not happen that is caused by unsafe working conditions or unsafe acts.

With this application, it is expected that all Indonesia Power personnel contribute to reporting unsafe conditions in their work environment or unsafe acts taken at work. In addition, the application indirectly gives such positive impacts as:

1. Increased awareness of OHS Social Relation.
2. Issuance of a warning notice for unsafe acts.
3. Corrective actions on assets by utilizing Maximo App.
4. Reporting as specified in Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration No. 3 of 1998 on Procedures for Reporting and Investigating Accidents.

Inauguration of OHS Pilot Unit

Indonesia Power organized a soft launching of Safety Center at GGSU SPP Banten 3 Lontar which becomes the Pilot SPP Unit for Occupational Health, Safety and Environment (OHSE) on March 1, 2017.

Work Accident Rate

Based on Article 24 of Directors' Decree No. 41.K/010/IP/2012 on Occupational Health, Safety and Environment Policy at PT Indonesia Power, work accident is defined as any accident that occurs during work hours in the relevant work field according to daily duties and responsibilities carried out in line with the related procedures. In 2017, three work accidents were recorded in which the Company followed up accordingly on all the victims as the CLA mandates.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN EMPLOYMENT AND OHS

Pemberian *Zero Accident Award*

Pada Tahun 2017, Indonesia Power kembali mendapatkan penghargaan *Zero Accident* secara nasional untuk kinerja K3 tahun 2017 kepada 14 Unit Pembangkit dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Zero Accident Award

In 2017, Indonesia Power once again succeeded to win Zero Accident Award at national level for its OHS performance, conferred to 14 GUs by the Ministry of Manpower.

Program Kesehatan

Selama tahun 2017, Indonesia Power telah melakukan berbagai kegiata guna menciptakan pegawai bebas dari penyakit akibat kerja dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan kepada seluruh pegawai.

Kegiatan terkait upaya peningkatan kesehatan pegawai yang dilakukan Perusahaan selama tahun 2017:

1. *Medical check up*
2. Melakukan *risk assessment* di masing-masing area kerja sesuai potensi bahayanya terhadap kesehatan
3. Memastikan ketersediaan dan penggunaan alat pelindung diri yang benar dan standar.
4. *Monitoring* dan pengukuran Lingkungan kerja
5. Sertifikasi *hygiene* kantin
6. Adanya himbauan kepada seluruh unit dalam penempatan pegawai mempertimbangkan faktor fisik dan mental pegawai yang dinyatakan sehat dalam bekerja berdasarkan riwayat kesehatan pegawai
7. Pemeriksaan kesehatan secara berkala
8. Memberikan *extra fooding*
9. Memberikan sosialisasi/penyuluhan kesehatan kerja
10. Kunjungan dokter perusahaan ke pegawai
11. Pengukuran Lingkungan kerja secara berkala
12. Program olah raga setiap jumat, Zumba/Yoga/ Pilates
13. Menyediakan *fitness center.*

Health Care Program

In 2017, the Company organized various activities to create work related and work caused diseases-free employees.

The following are the health programs conducted by Indonesia Power:

1. Medical check-up
2. Risk assessment at each unit in accordance with the health hazard potentials to the employees
3. Ensuring the availability and use of proper, standardized personal protective equipment (PPE)
4. Monitoring and measurement of work environments
5. Certification on canteen hygiene
6. Calling for all units to assign employees based on their mental and physical conditions as stated fit to work based on their medical history
7. Regular medical check-up
8. Extra fooding for the employees
9. Organizing dissemination of information on occupational health
10. Company doctor's visit to employees
11. Regular environmental measurement
12. Friday sporting program, zumba/yoga/pilates
13. Building fitness center

Kegiatan Lainnya

1. Pemantauan dan pembinaan terhadap pengelolaan K3 melalui *monitoring* dan *feedback* pelaporan bulanan K3 yang dilakukan secara rutin setiap bulan
2. *Video conference* kegiatan P2K3 dengan pengelola K3 unit dilakukan setiap bulan, secara bergantian antara UJP dan UP.
3. Melakukan penyempurnaan *Fire Protection System* sesuai NFPA/FM Global dengan melakukan *assessment fire protection review programs* di UJP Suralaya 8 dan UJP Pangkalan Susu
4. Melengkapi peralatan kebutuhan K3 sesuai standar dengan mengadakan *Wearpack Coverall Fire Resistance* (Baju Kerja Tahan Api) untuk pegawai Operasi dan Pemeliharaan di area Pembangkit khususnya PLTU *Low rank coal*
5. Melakukan pemasangan *watermist* di UJP Barru dan UJP Jeranjang
6. Melakukan resertifikasi SMK3 di 3 unit sebagai berikut: UJH, UPJP Priok, UP Mrica.
7. Implementasi CCTV FEWS (*Fire Early Warning System*) di PLTU UJP Jawa dengan progress 100% untuk pemasangan CCTV di UJP Lontar & UJP Adipala, sedangkan *progress* tahap pemasangan di UJP Suralaya 8, UJP Labuan, dan UJP Palabuhan Ratu.
8. Implementasi *industrial cleaning service* dengan PT Haleyora Powerindo selaku kontraktor *industrial cleaning service* di UJP Lontar dan UJP Palabuhan Ratu
9. Melengkapi perlengkapan Alat Pelindung Diri bagi pegawai Direktorat Operasi
10. Forum K3 pada tanggal 28 - 30 November 2017 dengan agenda pembahasan standardisasi K3 di Unit Pembangkit
11. Pembuatan instruksi kerja, silabus, dan modul pelatihan Pekerjaan Dalam Kondisi Operasi (PDKO).

Other Activities

1. Monitoring and development of OHS management are carried out through monthly OHS reporting feedback.
2. Monthly video conference on the activities of the Occupational Health & Safety Management Committee (P2K3) and Unit OHS manager, alternately between GU and GSU.
3. Improving Fire Protection System in accordance with the Global NFPA/FM by conducting fire protection review assessment programs in Suralaya 8 GSU and Pangkalan Susu GSU.
4. Completing OHS standardized equipment through procurement of Fire Resistant Wearpack Coverall for Operations and Maintenance Units personnel, particularly in low rank coal SPP.
5. Installing water mist facilities at Barru GSU and Jeranjang GSU,
6. Facilitating SMK3 re-certification for 3 units: MSU, Priok GGSU and Mrica GU.
7. Implementing Fire Early Warning System (FEWS) CCTV at GSU SPPs in Java, with CCTV installment in Lontar and Adipala GSU 100% completed while the installment in Suralaya 8 GSU, Labuan and Palabuhan Ratu GSU.
8. Procuring industrial cleaning service from PT Haleyora Powerindo as the contractor at Lontar and Palabuhan Ratu GSU.
9. Completing PPE for the Operational Directors personnel.
10. Organizing an OHS Forum on November 28-30, 2017 with the agenda of discussing OHS standardization at GUs.
11. Developing training module, syllabus and work instruction of Working in Operating Conditions (PDKO).

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN EMPLOYMENT AND OHS

Sarana dan Keselamatan Kerja

Untuk menjamin efektivitas penerapan keselamatan kerja. Indonesia Power telah melengkapi seluruh kantor operasionalnya dengan berbagai perangkat keselamatan kerja. Sarana keselamatan kerja yang di miliki oleh Indonesia Power adalah sebagai berikut:

Occupational Facilities and Safety

To ensure the effectiveness of safety practices, Indonesia Power equips all of its operating offices with safety equipment. Such safety equipment includes:

Sarana dan Keselamatan Kerja Occupational Facilities and Safety	**Kegunaan Sarana dan Keselamatan Kerja** Utilization of Occupational Facilities and Safety		**Tempat Penggunaan** Place
Alat Pelindung Diri (APD) Personal Protection Equipment (APD)	Melindungi sebagian atau seluruh badan personil dari potensi bahaya yang jenisnya disesuaikan dengan potensi bahaya yang ada di area kerjanya.	Protecting some parts or all parts of personnel's body from potential hazard of which the type is adjusted to the kind of hazard that may arise in different work fields.	Sebagian atau seluruh bagian tubuh personil Some parts or all parts of personnel's body
Rambu-Rambu K3 (*Safety Sign*) Safety Signs	Menunjukkan adanya potensi bahaya di area kerja. mengingatkan personil untuk berperilaku aman. menunjukkan lokasi peralatan pemadam dan tanggap darurat. dan memberikan arahan/petunjuk saat keadaan darurat.	Reminder of potential hazard in the work area, encouraging personnel to work carefully. Showing the location of fire extinguisher and other emergency tools and giving directions during an emergency.	Ditempatkan di area yang strategis/mudah terlihat dan sesuai risiko yang ditimbulkan Placed in strategic and visible areas accordingly to potential risks in certain areas
Sistem Proteksi Kebakaran (Manual & Automatis): 1) APAR 2) Hydrant 3) APAT 4) Mobil Damkar 5) Pompa Fire Fighting 6) Deluge Sprinkler System 7) Fire Alarm System 8) Low Pressure CO2 System 9) Foam System 10) Wet sprinkler system Fire Protection System (Manual & Automatic): 1) Fire Extinguisher 2) Hydrant 3) Traditional Fire Extinguisher 4) Fire Truck 5) Fire Fighting Pumps 6) Deluge Sprinkler System 7) Fire Alarm System 8) Low-Pressure CO2 System 9) Foam System 10) Wet sprinkler system	Untuk mengendalikan potensi bahaya kebakaran yang dapat terjadi di area pembangkit listrik	To control the potential of fire that might occur around the area of Generating Unit	Seluruh area pembangkit All area of Generating Unit
Fasilitas tanggap darurat: 1) Tim Tanggap darurat 2) Ambulance 3) Kotak P3K 4) Perlengkapan tanggap darurat lainnya (Tandu. Breathing Apparatus. dll) Emergency Preparedness Facilities: 1) Emergency Team 2) Ambulance 3) First Aid Kit 4) Other emergency equipment (Stretcher, Breathing Apparatus, etc.)	Tersedianya perlengkapan tanggap darurat pada kondisi emergency	The availability of emergency preparedness facilities during emergency condition	Area Evakuasi Evacuation Area
Vacuum Truck Vacuum Truck	Kendaraan penghisap debu melalui pipa saluran dengan koneksi dari pipa Vacuum ke dalam truck menggunakan mesin.	Vacuum vehicle that operates through pipeline connected from the vacuum pipe into the truck by utilizing machines.	Area transfer tower dan bunker Transfer tower and bunker area

Penghargaan dan Sertifikasi terkait K3

Penghargaan dan sertifikasi yang telah diraih oleh Indonesia Power selama tahun 2017 adalah:

1. Penghargaan kecelakaan Nihil (*Zero Accident Award*) dari Kementrian Ketenagakerjaan kepada UP Suralaya, UPJP Priok, UPJP Kamojang, UPJP Kamojang-Darajat, UPJP kamojang-Gunung Salak, UP Saguling, UP Semarang, UPJP Perak Grati, UP Mrica, UP Bali, UJH, UJP Suralaya 8, UJP lontar, dan UJP Adipala
2. Bendera Emas SMK3 untuk UP Bali, UP Suralaya, dan UPJP Perak Grati dari Kementerian Ketenagakerjaan
3. Penghargaan Platinum untuk P2HIV (Program Penanggulangan HIV) dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk UP Bali.

Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan K3

Selama tahun 2017, Biaya pengelolaan K3 yang telah dikeluarkan oleh Indonesia Power adalah sebesar Rp55,48 miliar (OPEX) dan Rp949,99 miliar (CAPEX).

OHS Award and Certification

The following are achievements and certifications that Indonesia Power obtained throughout 2017:

1. Zero Accident Award from the Ministry of Manpower and Transmigration to Suralaya GU, Priok GGSU, Kamojang GGSU, Kamojang GGSU-Darajat, Kamojang GGSU-Gunung Salak, Saguling GU, Semarang GU, Perak Grati GGSU, Mrica GU, Bali GU, MSU, Suralaya 8 GSU, Lontar GSU and Adipala GSU.
2. SMK3 Gold Flags for Bali GU, Suralaya GU and Perak Grati GGSU from the Ministry of Manpower.
3. Platinum Award for HIV Prevention Program from the Ministry of Manpower for Bali GU.

Spending for OHS Activities

Total spending by Indonesia Power for OHS activities in 2017 stood at Rp55.48 billion (OPEX) and Rp949.99 billion (CAPEX).

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT



Pelaksanaan CSR Indonesia Power terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan dijalankan melalui program InPower-Care (Indonesia Power-*Community Assistance, Relation, and Empowerment*) yang memiliki 3 (tiga) pilar keberlanjutan Perusahaan yakni Pelayanan Masyarakat, Pembinaan Hubungan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Indonesia Power carried out its CSR activities in social and community development through InPower-Care (Indonesia Power-Community Assistance, Relation and Empowerment) anchored by three sustainable pillars: Community Assistance, Community Relations and Community Empowerment.

Kebijakan

Kebijakan CSR terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan, Indonesia Power mengacu pada:

1. Keputusan Direksi No. 25.K/010/IP/2014 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan tanggal 11 Februari 2014
2. Keputusan Direksi No. 26.K/010/IP/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan InPower Care di Lingkungan PT Indonesia Power tanggal 11 Februari 2014

Policy

In assuming its CSR role for social and community development, Indonesia Power refers to these policies:

1. Directors' Decree No.25.K/010/IP/2014 on Guidelines on Corporate Social and Environmental Responsibilities dated February 11, 2014.
2. Directors' Decree No. 26.K/010/IP/2014 on Guidelines for the Implementation of In-Power Care within PT Indonesia Power dated February 11, 2014.

3. Keputusan Direksi No.51.K/010/IP/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Bisnis (update untuk kriteria penilaian pelaksanaan *Community Development*
4. Edaran Direksi No. 07.E/012/IP/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Perusahaan tanggal 10 Maret 2014.

3. Directors' Decree No. 51.K/010/IP/2014 on Guidelines on Business Unit Performance Assessment (updated for criteria of Community Development assessment).
4. Directors' Circular No. 07.E/012/IP/2014 on Guidelines for Corporate Social Assistance Implementation dated March 10, 2014.

Rencana Kegiatan CSR terhadap Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Sejalan dengan InPower-Care, rencana kegiatan Kegiatan CSR terhadap Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan Indonesia Power adalah Pelayanan Masyarakat, Pembinaan Hubungan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Selain itu, sesuai dengan RKAP tahun 2017, Program utama CSR terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan adalah menjaga ekosistem melalui Kawan Hijaunesia Power dan IP Mengajar.

CSR Program in Social and Community Development

In line with the InPower-Care program, CSR activities in Social and Community Development are carried out under the pillars of Community Assistance, Community Relations and Community Empowerment.

Consistent with the 2017 Action Plan, the main CSR program related to social and community development was showing the commitment to safeguard the ecosystem through Kawan Hijaunesia Power and IP Mengajar.

Realisasi Kegiatan CSR terhadap Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Berikut adalah realisasi atas rencana program InPower-Care selama tahun 2017.

CSR Activities in Social and Community Development

The table below shows the implementation of InPower-Care action plan in 2017.

Realisasi Program Unggulan InPower-Care di Wilayah Operasi tahun 2017
InPower-Care Key Programs in Operating Areas Throughout 2017

Unit Operasi Operation Unit	Jenis Program Program Type	Nama Program Program Name	
UPJP I GGSU Priok	Lingkungan I Environment	Kampung Sehat Hijaunesia Power	Hijaunesia Power Healthy Kampong
	Lingkungan I Environment	Pengembangan Kompos Organik (Konik)	Organic Compost Production
	Pendidikan I Education	Pengembangan PAUD Anak Berkebutuhan Khusus	Development of Early Childhood Education for Children with Special Needs
UPJP I GGSU Kamojang	Pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan Economic development for rural communities	- Program Kampung Pelag Mandiri dan Sejahtera Berbasis Lingkungan - Sentra Wisata Lingkungan Kamojang Hijau - Pemberdayaan perempuan membuat keterampilan limbah Koran - Pengolahan aneka Snack (Jamur Tiram, Lauk Leutix, Cabe Crispy, Peuyeum Crispy, dll)	- Environment-based Self-Reliant & Prosperous Kampong Program - Kamojang Green Tourism Destination - Newspapers waste to handicraft by women - Improvement of traditional snack production (oyster mushroom, leutix side dishes, crispy chili and peuyeum, etc.)

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

Unit Operasi Operation Unit	Jenis Program Program Type	Nama Program Program Name	
UP I GU Saguling	Pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan Economic development for rural communities	- Alih Profesi Penambang Pasir Liar menjadi Peternak itik, tergabung dalamkelompok "Itik Sawargi I - Pengembangan Kerajinan Bambu "Bambaray"	- Transition from illegal sand miners to duck breeders under the group "Itik Sawargi" - "Bambaray" bamboo handicraft development
UP I GU Semarang	Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir Economic development for coastal communities	- Pengolahan Makanan berbahan dasar Ikan - Budidaya ikan Bandeng dan Rumput Laut	- Fish-based processed food - Milkfish and seaweed cultivation
	Pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan Economic development for rural communities	- Pengembangan Kampoeng Tematik "Alam Malon" - Batik Mangrove	- "Malon" thematic kampong development - Mangrove-based batik production
UP I GU Bali	Pengembangan ekonomi masyarakat desa Economic development for rural communities	- Pengembangan Kelompok Serati Banten - Inisiasi Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS)	- Traditional village development (Serati Group) in Banten - Local waste processing (TOSS) initiative
	Keanekaragaman Hayati Biodiversity	- Penangkaran dan pelepasliaran Tukik - Pelestarian Sapi Putih Taro	- Sea turtle breeding and release - Taro white cattle
UP I GU Suralaya	Pengembangan ekonomi masyarakat desa Economic development for rural communities	- Kelompok Pengrajin Majun - Program Kelompok Usaha Bersama Berprestasi	- Dust cloth production - SME development program (Bersama Berprestasi Group)
	Lingkungan I Environment	Pemanfaatan Limbah Faba menjadi Paving Block	Waste-based paving block production
UP I GU Mrica	Pengembangan ekonomi masyarakat desa Economic development for rural communities	- Sekolah Lapangan Petani Kopi - Sentra Produksi makanan ringan	- Coffee Farmers Field Training - Snacks production center
	Budaya I Culture	Batik Gumelem	Gumelem batik creation
UPJP I GGSU Perak Grati	Energi Alternatif I Alternatives Energy	Kampung Biogas desa mandiri energi	Biogas and energy self-reliant kampong
	Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir Economic development for coastal communities	UKM Harmoni	SME development program (Harmoni)
	Pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan Economic development for rural communities	Pupuk Kandang Organik	Animal manure production
UJH I MSU	Pengembagan ekonomi masyrakat miskin kota Development of poor urban community economy	- Usaha Kecil Menengah "BKB Tani Petamburan" - Olahan Ikan "Ulam Sari Mandiri"	- SME development for "BKB Tani Petamburan" - "Ulam Sari Mandiri" fish-based processed food
	Pelestarian Budaya Betawi Betawi Cultural Preservation	Perguruan Silat Naga Sembilan Kota Bambu Selatan	Naga Sembilan Martial Arts School of Kota Bambu Selatan
UJP I GSU Banten 2 Labuan	Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir Economic development for coastal communities	Pelestarian Anyaman Dudukuy/Tudung Khas Banten	Preservation of Banten traditional plait craft
		Pemberdayaan Kelompok Berkah Utama Nelayan	Fishermen empowerment for Berkah Utama Group
	Sehat Bersama Indonesia Power Healthy With Indonesia Power	Program pemulihan balita BGM (Bawah Garis Merah).	Health care for malnutrition in children under five years old
UJP I GSU Banten 3 Lontar	Pendidikan I Education	Sekolah Adiwiyata	Adiwiyata school
UJP I GSU Banten 1 Suralaya	Pengembangan Masyarakat Peternak Community Development Breeders	Kampoeng Ternak Cipala	Cipala Livestock Kampong
	Keanekaragaman Hayati	Hutan Kota Cilegon	Cilegon Urban Forest
	Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Community Based Waste Management	Bank Sampah Puma Mandiri	Puma Mandiri Waste Bank

Unit Operasi Operation Unit	Jenis Program Program Type	Nama Program Program Name	
UJP I GSU Jabar 2 Palabuhan Ratu	Lingkungan I Environment	- Pemanfaatan LImbah FABA menjadi Kerajinan Keramik - Bank Sampah	- Waste-based ceramic craft - Waste Bank
	Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir Economic development for coastal communities	Olahan Ikan Laut: abon dan bakso	Fish-based processed food: shredded fish and meatballs
UJP I GSU Adipala	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Economic development for rural communities	Pengembangan Batik Seloka Kelompok Wanita Tani dan Pembudi Daya Ikan (KWTPI)	Seloka Batik business development Women Farmers and Fish Farming Group (KWTPI)
	Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir Economic development for coastal communities	Pengembangan wisata Taman Indah Bunton	Bunton Indah Tourism Park development
UJP I GSU Pangkalan Susu	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir Economic development for coastal communities	Budidaya udang Vaname	Vannamei shrimp Farming
Kantor Pusat I Head Office	Pendidikan I Education	- Indonesia Power Mengajar - IP Pintar - Pengembangan Perpustakaan Kelurahan Tegal Parang	- Indonesia Power Mengajar teaching program - Indonesia Power Pintar (IP Pintar) program - Tegal Parang Community Library development
UJP PLTU I GSU SPP Jeranjang	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Economic development for rural communities	- Pengelolaan Limbah Kotoran Sapi menjadi Pupuk Kompos - Mitra Mandiri Produk Makanan Ringan Khas Lombok	- Cow manure Composting production - Lombok traditional snacks production
	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir Economic development for coastal communities	Binaan CSR Kelompok Nelayan	Fishermen group development
UJP PLTU I GSU SPP Barru	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Economic development for rural communities	Pengolahan Telur Asin	Salted eggs production
	Lingkungan I Environment	Pemanfaatan limbah FABA menjadi Paving Block	Waste-based paving block production
	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir Economic development for coastal communities	Pengolahan makan ringkan "Kerupuk Amplang"	"Kerupuk Amplang" fish chips production

Indonesia Power Mengajar

Pada awal tahun 2017, Indonesia Power menyelenggarakan Program Indonesia Power Mengajar (IP Mengajar), dimana seluruh jajaran Direksi dan Dewan Komisaris beserta senior *leader* Perusahaan turun langsung ke berbagai sekolah sebagai pengajar di sekitar lingkungan Unit Pembangkitan di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Kalimantan, hingga Papua.



Indonesia Power Mengajar Teaching Program

In 2017, Indonesia Power organized Indonesia Power Mengajar (IP Mengajar) teaching program. In this program, all the Board of Directors and Board of Commissioners as well as senior leaders participated as volunteering teachers at schools around the GUs in Sumatra, Java, Bali, West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan and Papua.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT





Sampai dengan akhir tahun 2017, Perusahaan telah menyalurkan bantuan dana dengan total sebesar Rp648 juta yang diberikan kepada 21 sekolah di 22 lokasi pembangkitan Perusahaan.

Adapun bantuan diberikan dalam bentuk sarana untuk menunjang kegiatan belajar siswa seperti laptop, printer, *projector* set, bibit pohon, dan tumblr untuk menunjang kesehatan siswa.

Until the end of 2017, Indonesia Power distributed aids in the amount of Rp648 million to 21 schools around 22 GUs.

The aid Indonesia Power provided included school facilities that support such teaching-learning processes as laptops, printers, projector sets, tree seedlings and tumblers so they could carry drinking water with them.

Program ini sejalan dengan SDGs yaitu turut mendukung program pemerintah dan juga masyarakat dunia untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

This teaching program goes in line with the SDGs in which Indonesia Power actively supports both the government and the international community program to reduce poverty and enhance education quality in Indonesia.

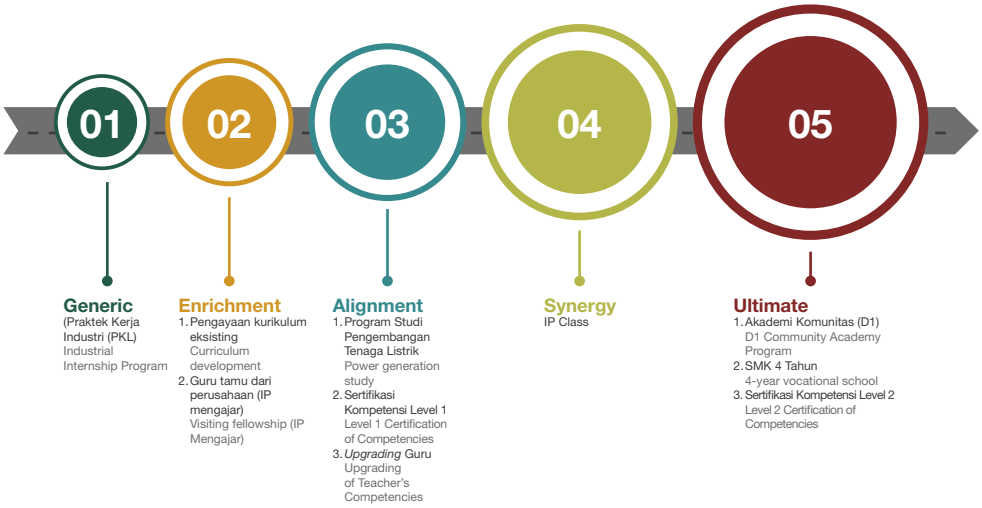
IP Pintar

Sebagai tindak lanjut program IP Mengajar dan selaras dengan program pemerintah mengenai revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Indonesia Power meluncurkan program Indonesia Power Pintar (IP Pintar) yang merupakan hasil kerjasama Perusahaan dengan Dinas Pendidikan bersama SMK yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi siswa-siswi SMK di bidang Pembangkitan Tenaga Listrik dan juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk magang dan mendapatkan sertifikasi setelah lulus mengikuti program tersebut.

IP Pintar Program

As a follow up on IP Mengajar and pursuant to the government program for revitalizing Vocational School, Indonesia Power launched IP Pintar in collaboration with the Education Agency and Vocational Schools. This aims at developing Vocational School students' competencies in power generation, giving potential students opportunities to get on-the-job training at the Company as interns and receive certifications upon completion.

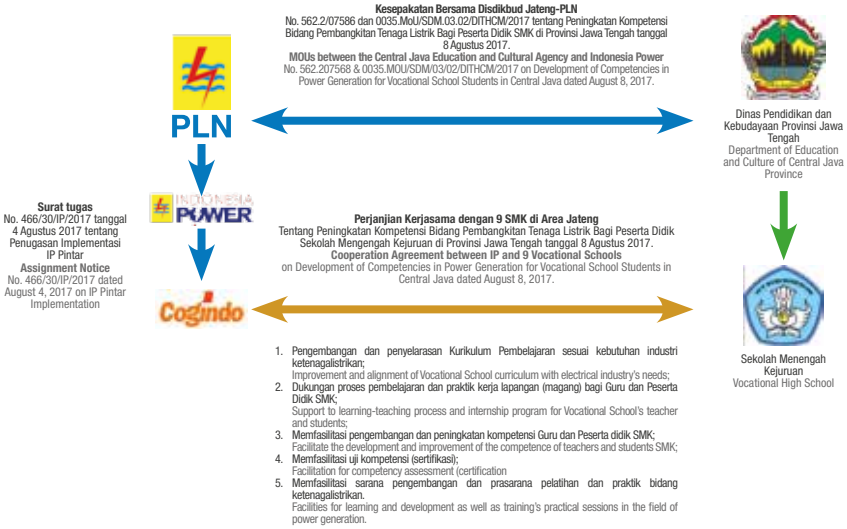
Road Map IP Pintar
IP Pintar Road Map



Pada tahap inisiasi ini, Perusahaan telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Jawa Tengah dan 9 (Sembilan) Sekolah Menengah Kejuruan di Jawa Tengah untuk mengikuti program IP Pintar. Nantinya siswa-siswi SMK tersebut akan mendapatkan pengembangan kompetensi pada bidang pembangkitan tenaga listrik melalui pembelajaran langsung atau praktek kerja industri (Prakerin) di Unit Perusahaan serta dibekali dengan sertifikasi kompetensi level 1 dan berkesempatan untuk bergabung dengan IP Group.

During this initial phase, Indonesia Power worked closely with the Central Java Education Agency and nine Vocational Schools in Central Java to deliver IP Pintar Program. In the future, those students were to be trained to develop their skills in power generation through internship program with Indonesia Power Units. They were given Level 1 Certification of Competencies. The students taking the internship also had the opportunity to join IP Group.

Skema Kerjasama dan Lingkup
Scheme and Scope of the Collaboration



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

Kampoeng Alam Malon Gunung Pati Semarang

Malon Green Kampoeng in Gunung Pati, Semarang



Kampoeng Alam Malon merupakan satu bagian dari wilayah Kelurahan Gunungpati, Kecamatan Gunungpati Semarang, yang pada Tahun 2016 ditunjuk menjadi salah satu dari 16 wilayah yang menerima program "Kampoeng Tematik" Kota Semarang.

Kampung Malon mempunyai potensi hasil perkebunan, baik durian, klengkeng, coklat maupun buah-buahan lainnya. Disamping hasil kebun tersebut, di Kampung Malon juga terdapat pengrajin batik yang cukup dikenal, yaitu Batik Zie dan Batik Salma. Kampung Malon juga mempunyai padepokan "Ilir-Ilir" yang semula diharapkan bisa untuk mewadahi seni dan budaya masyarakat setempat, hanya saja padepokan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Dengan potensi yang dimiliki tersebut, Malon dicanangkan sebagai kampung tematik "Kampoeng Alam Malon".

7.095 lembar
Produksi kain batik tahun 2017 oleh kelompok Batik Zie

7,095 pieces
of batik clothes produced by Batik Zie in 2017

Dampak yang dirasakan penerima bantuan:
Dengan adanya Kampoeng Alam Malon sebagai kampung binaan Indonesia Power UP Semarang diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru melalui terbentuknya kelompok sadar wisata kampoeng alam malon sehingga dapat memandirikan masyarakat kampung alam malon secara ekonomi.

Malon Green Kampoeng is a part of Gunung Pati Village, Gunung Pati Sub-district, Semarang appointed as one of 16 areas that received thematic kampoeng program in Semarang.

Malon Kampong has fruit farming potentials, such as durian, longan and cacao. In addition, this kampong is well-known for its batik craftsmen such as Batik Zie and Batik Salma. Malon also has "Ilir-Ilir" community expected to accommodate local communities' cultural and art activities, but it has yet to run as expected. With these potentials, Malon is expected to be a thematic kampong called "Malon Green Kampoeng".

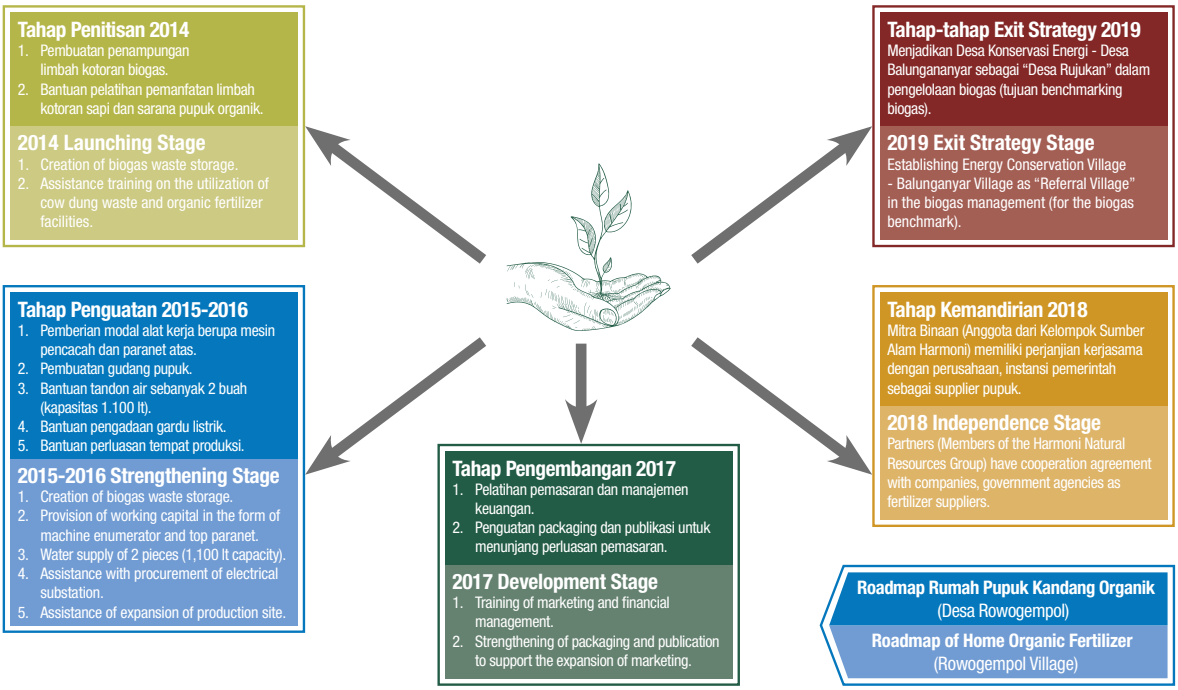
4 Kelompok
Bertambah yaitu kelompok batik kristal, batik manggis, batik citra, batik delima

4 additional batik groups:
Batik Kristal, Batik Manggis, Batik Citra and Batik Delima

Positive impact for the beneficiary:
The presence of Malon Green Kampoeng under the auspice of Semarang GU is expected to create more job opportunities accommodated in Malon Green tourism group, so they could rely on themselves to make ends meet.

Pupuk Kandang Organik "Sumber Alam Harmoni"

"Sumber Alam Harmoni" Organic Fertilizer



Pupuk Kandang Organik "Sumber Alam Harmoni" merupakan program CSR Indonesia Power UPJP Perak Grati yang baru dibentuk pada tahun 2017. Program CSR ini dibentuk berdasarkan Permasalahan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kotoran sapi yang sudah menjadi masalah yang harus ditangani lebih lanjut. Selaras dengan hal tersebut Indonesia Power UPJP Perak Grati memanfaatkan kotoran sapi menjadi pupuk kandang organik sehingga dapat dimanfaatkan dan menjadi nilai ekonomi bagi masyarakat.

Dampak yang dirasakan penerima bantuan yaitu:
1. Mitra Binaan dapat meningkatkan penghasilan setiap bulannya dengan penjualan pupuk kandang organik yang dihasilkan
2. Membantu para peternak sapi untuk membuang dan mendistribusikan kotoran sapi.

"Sumber Alam Harmoni" Organic Fertilizer is an Indonesia Power CSR program run in Perak Grati GGSU that was launched in 2017. This program was initiated to overcome environmental issues due to cow manure. Accordingly, Perak Grati GGSU turns cow waste into organic fertilizer so the local communities could use it to make a living.

Positive impacts for the beneficiary:
1. Beneficiary Partner could improve their income by selling the organic fertilizer
2. Helping the cow breeder to put cow waste in the right place.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

Pemberdayaan Masyarakat Ternak Itik "Sawargi"

"Sawargi" Duck Breeding Development



Program ini merupakan program CSR UP Saguling di Desa Jati, Saguling, Kabupaten Bandung Barat dimana dilakukan pemberdayaan masyarakat dengan pengembangan alih profesi penambang pasir liar ke peternak itik.

Ternak Itik Sawargi telah berdiri sejak tahun 2011, tahun 2017, jumlah Produksi Telur sebanyak 700.794 butir telur yang dikelola oleh 35 orang anggota kelompok.

Sawargi Duck Breeding is one of Indonesia Power CSR programs run in Jati Village, Saguling, West Bandung District where the Company facilitates the transition from sand miners into duck breeders.

Managed by 35 people, Sawargi was established in 2011, and until 2017 it had produced 700,794 eggs.

UKM Bandeng Presto

Milkfish Presto Production





Program ini bertujuan untuk menciptakan peluang bagi masyarakat pesisir dalam menentukan kebutuhan, serta merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekonomi warga pesisir yang beradaa di dua wilayah Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur dan Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari. Selama tahun 2017 UKM Bandeng Presto berhasil memproduksi 14.645 Kg Bandeng Presto.

This program aims to open up more opportunities for coastal communities to make a living, and plan as well as carry out economic activities with the communities in two kelurahans, Kemijen of East Semarang Sub-district and Tambakrejo of Gayamsari Sub-district. Throughout 2017, the production of milkfish presto reached 14,645 kg.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) "Harmoni"

Masyarakat pesisir Lekok mayoritas bekerja sebagai nelayan. Dalam menopang perekonomiannya masyarakat lekok memasarkan hasil laut berupa ikan dan olahan hasil laut serta kerajinan laut. Dalam pelaksanaannya, masyarakat terkendala dengan pemasaran dan permodalan dalam peningkatan produktifitas sehingga perlu adanya perhatian dalam mengatasi permasalahan tersebut. oleh karenanya Indonesia Power UPJP Perak Grati membentuk UKM Harmoni sebagai wadah masyarakat Lekok dalam memasarkan hasil olahan laut sehingga dapat memberikan nilai tambah terhadap perekonomian masyarakat sekitar.

"Harmoni" SME Unit

Most people in the coastal area of Lekok are fishermen. To make a living, the people of Lekok sell processed seafood to sea animal-based handicraft products. In their businesses, the community members are restricted by the lack of marketing flair and working capital for improving their productivity, so they need help to overcome those obstacles. Therefore, Perak Grati GGSU formed a SME unit called Harmoni. This enterprise enables Lekok people to market their processed seafood products, thus providing added values to the surrounding communities.



Dampak langsung yang dirasakan masyarakat Lekok dengan adanya program UKM Harmoni ini adalah:

1. Produksi hasil olahan laut meningkat.
2. Pengrajin dapat memproduksi hasil olahan dan kerajinan laut dengan peralatan yang memadai.
3. Pemasaran dapat berjalan lancar dengan bantuan publikasi pemasaran baik melalui media cetak maupun pameran produk.

Direct impacts that the community members of Lekok enjoy include:

1. Increased seafood processing productivity
2. The craftsmen could create sea animal-based handicrafts and produce processed seafood using sufficient equipment.
3. Marketing strategy through ad publication in printed media and product exhibition.

Kampung Sehat Hijaunesia Power

Kampung Sehat Hijaunesia Power (KSHP) merupakan wilayah percontohan lingkungan bersih dan sehat di Jakarta Utara. Pada tahun 2017 ini hingga tahun 2018 mendatang, UPJP Priok akan tetap menjalankan KSHP di wilayah RW 011 Kelurahan Warakas. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, KSHP tetap fokus pada lima aspek yaitu Kebersihan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pendidikan, dan Ekonomi Mandiri Masyarakat. Di tahun ini KSHP telah memasuki tahap penguatan

Hijaunesia Power Healthy Kampong

Hijaunesia Power Healthy Kampong (KSHP) is a pilot project of healthy and clean environment in North Jakarta. Priok GGSU has since 2017 implemented KSHP program in Community Group 011, of Kelurahan Warakas and carried on to 2018. Like the previous years, KSHP has focused on five aspects, i.e. Cleanliness, Health, Environment, Education and Community Empowerment. In this year, KSHP enters its strengthening and developing phase. KSHP becomes

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

dan pengembangan. Program KSHP menjadi salah satu program unggulan yang mampu meningkatkan citra positif perusahaan dan membuktikan misi perusahaan yang bersahabat dengan lingkungan.

one of the main programs capable of enhancing the Company's positive image and proving the Company's mission as an eco-friendly company.



Dampak dari program KSHP adalah adanya peningkatan penghijauan, peningkatan jumlah warga lulus sekolah 9 tahun, serta peningkatan indeks kesehatan masyarakat dengan indikator menurunnya jumlah balita dan lansia yang berobat ke Puskesmas. Dampak positif lainnya adalah terjadinya penurunan penggunaan jumlah energi listrik yang diketahui dari hasil *random* setelah penggunaan lampu hemat energi oleh warga maupun pada fasilitas umum. Tak hanya bagi masyarakat dan lingkungan, KSHP juga memberikan manfaat bagi perusahaan.

The benefits from KSHP include more trees planted, increasing number of 9-year basic education completion, increased health mass index as measured from the decreasing number of children under five and elders going to Community Health Centers. Another positive impact is more people use eco-friendly lamps both for domestic purposes and in public facilities. KSHP is proven not only good for local communities and the environment, but also for the Company.

Program Donasi

Selama tahun 2017, Program donasi yang telah dilakukan Indonesia Power dengan kegiatan sebagai berikut:

Donation Program

The following is donation program undertaken by the Company in 2017:

Program Program	Kegiatan Activity	
Kesehatan Health	- Melakukan kegiatan Aksi Donor Darah yang diadakan di seluruh unit Indonesia Power. Kegiatan Donor Darah terkumpul 2.718 kantong darah - Mengadakan Puskesmas keliling di UP Semarang yang dihadiri oleh 188 pasien umum dengan 89 pemeriksaan lab sederhana, pemberian makanan tambahan (MPT) 58 bayi - Membuka pengobatan di Klinik Bakti Indonesia Power UPJP Kamojang dan dihadiri oleh 4.113 pasien.	- Organizing Blood Donation at all units of Indonesia Power. This activity managed to collect 2,718 blood bags. - Organizing Mobile Community Health Center in Semarang GU. It provided health services to 188 patients with 89 simple laboratory check up and supplementary food distribution for babies. - Opening health treatment at Bakti Indonesia Power Clinic in Kamojang GGSU. As many as 4,113 patients used the services provided.
Santunan anak yatim Donations to orphans	Melakukan santunan kepada anak yatim sebanyak 846 pada tanggal 20 juni 2017 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh unit kerja Indonesia Power.	Handing out donations to 846 orphans on June 20, 2017 organized simultaneously in all the work units.

Program Program	Kegiatan Activity	
Beasiswa Scholarship	Menyalurkan beasiswa kepada Sekolah Dasar (SD) sebanyak 273 orang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 69 orang, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 58 orang dan Perguruan Tinggi (PT) sebanyak 16 orang.	Distributing scholarships to 273 pupils of Elementary School, 69 students of Junior High School, 58 students of High School and 16 of higher education students.

IP Bersih - Sosialisasi Kebijakan Anti Korupsi/Gratifikasi

Sebagai wujud Indonesia Power mendukung program pemerintah dalam larangan tindakan Korupsi di Indonesia, Indonesia Power menghimbau kepada seluruh insan Indonesia Power untuk tidak melakukan tindakan korupsi, pencegahan pencucian uang dan tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun.

implementasi terkait himbauan larangan tindakan koripsi, gratifikasi dan pencegahan pencucian uang dilakukan melalui melalui program pendukung diantaranya Indonesia Power Bersih (IP Bersih) dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemahaman anti korupsi melalui pelatihan Pengendalian Gratifikasi dan laporan Harta kekayaan penyelenggara Negara kepada Agen Perubahan dan Pengelola GCG di seluruh Unit Kerja perusahaan.
2. Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi melalui penyusunan laporan Penerimaan dan Penolakan Gratifikasi dari seluruh unit kerja perusahaan.
3. Pengelolaan Pelaporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada pegawai tingkat eksekutif, eksekutif senior dan eksekutif utama yang menjadi wajib Lapor.
4. Penyelenggaraan *Vendor Meeting* untuk membangun komunikasi kebijakan anti korupsi perusahaan dengan mitra kerja.

Himbauan larangan menerima hadiah/imbalan dan gratifikasi tertuang dalam Kebijakan Direksi No. 161.K/020/IP/2014 tentang Pedoman Indonesia Power Bersih. Pedoman IP Bersih diterbitkan untuk dipergunakan oleh seluruh elemen Indonesia Power, mulai dari Direksi, Pejabat, Pegawai hingga para Pemangku Kepentingan di lingkungan Indonesia Power. Pedoman tersebut telah dikomunikasikan kepada seluruh stakeholder melalui pemasangan banner tentang anti korupsi/gratifikasi baik di Kantor Pusat maupun di unit pembangkit.

IP Bersih - Dissemination of Anti-Corruption/Gratification Policies

As a commitment to supporting the government's anticorruption policy, Indonesia Power urges that all of its personnel be free from corruption and money laundering as well as avoid gratification, in any form.

The implementation of anti-corruption, gratification and money laundering practices was strengthened through such supporting programs as IP Bersih, which conducted the following activities:

1. Improving awareness of anticorruption through training on gratification control and State Official Wealth Report to the agents of change and GCG manager in all units.
2. Gratification control management by reporting gratification acceptance and rejection at all Indonesia Power units.
3. Reporting management of LHKPN to the executives, senior executives and top executive required to submit their reports.
4. Organizing Vendor Meetings to establish communication regarding anti-corruption policy with the vendors.

The urge to keep away from receiving gift/reward and gratification is written on Directors' Decree No. 161.K/020/IP/2014 on Guidelines for Clean Indonesia Power (IP Bersih Guideline). The IP Bersih Guideline was issued and utilized by every corporate element, from the Board of Directors, Officials, Employees and Stakeholders. This guideline has been disseminated to all stakeholders by putting up banners regarding anti-corruption or anti-gratification both in Head Office and at GUs.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

Informasi tambahan terkait IP Bersih - Sosialisasi Kebijakan Anti Korupsi/Gratifikasi dapat dilihat dibagian Pendahuluan pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan Ini.

Additional information regarding IP Bersih and Dissemination of Anti-Corruption/Gratification Policy is available on the Introduction section of the Good Corporate Governance Chapter in this Annual Report

Biaya Program

Pada tahun 2017, Indonesia Power telah merealisasikan anggaran kegiatan InPower-Care sebesar Rp28.384 juta dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Program Cost

In 2017, the Company's use of InPower-Care budget reached Rp28,384 million which is broken down below:

Bakti Pelayanan Masyarakat Community Assistance	**Bakti Pembinaan Hubungan** Community Relations	**Bakti Pemberdayaan Masyarakat** Community Empowerment
Rp6.413 juta	Rp9.085 juta	Rp12.886 juta

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KONSUMEN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO THE CUSTOMER



Indonesia Power berkomitmen untuk selalu memberikan nilai tambah dalam setiap produk dan pelayanan yang ditawarkan serta memberikan perlindungan maksimal kepada kosumen yang selanjutnya disebut pelanggan.

Bentuk komitmen Indonesia Power terhadap perlindungan pelanggan salah satunya adalah dengan menjalankan berbagai rangkaian prosedur operasi standar keselamatan dan kesehatan pelanggan. Dalam pelaksanaanya, energi listrik tidak disalurkan secara langsung kepada pelanggan, melainkan melalui jaringan transmisi kepada PT PLN Persero yang merupakan pembeli tunggal daya listrik yang diproduksi oleh Indonesia Power sehingga risiko keselamatan dan kesehatan pelanggan relatif kecil.

Indonesia Power commits at all times to give added values in its products and services to the consumer, hereinafter the customer, and to provide them with the necessary, optimal protection.

The Company's commitment on customer protection is visible from, among other things, putting into effect the standard operating procedures for customer's health and safety. On the ground, electrical power that Indonesia Power produces does not channel directly to the customer, but goes through the transmission lines of PT PLN (Persero) as the main customer of the power the Company produces, so that safety and health risks are relatively low.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KONSUMEN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO THE CUSTOMER

Kebijakan

Dalam melakukan pengelolaan hubungan dengan Pelanggan, Indonesia Power mempunyai kebijakan khusus yang tertuang dalam:

1. Keputusan Direksi Nomor 103.K/010/IP/2013 tentang Kebijakan Fokus Pelanggan PT Indonesia Power;
2. *Code of Conduct* tentang Pelanggan;
3. Prosedur Manajemen Komplain.

Policy

In managing its customer relation, Indonesia Power has put in place particular policies set forth in:

1. Directors' Decree No. 103.K/010/IP/2013 on Customer-Focused Policy of PT Indonesia Power;
2. Code of Conduct on the Customer;
3. Complaint Management Procedure.

Rencana Kerja terkait Kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Pelanggan

Berikut merupakan rencana program kerja dalam rangka meningkatkan kepuasan Pelanggan yang telah dilakukan oleh Indonesia Power untuk tahun 2017, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi dan kegiatan bersama pelanggan
2. Workshop bersama pelanggan
3. Penandatanganan komitmen bersama yang disaksikan oleh pelanggan atas *Action Plan* hasil survey kepuasan pelanggan
4. Melakukan perbaikan sesuai dengan *Action Plan* yang sudah dibuat
5. Melakukan Survey Kepuasan Pelanggan
6. Kegiatan Lainnya.

Program

Below are programs carried out in order to raise customer satisfaction completed by Indonesia Power in 2017:

1. Engaging the customers through dissemination of information and a joint function.
2. Holding a workshop involving the customer.
3. Signing off of a joint commitment on conducting the action plan prepared based on customer satisfaction surveys, before the presence of customers.
4. Taking corrective actions as recommended by the Action Plan.
5. Undertaking a Customer Satisfaction Survey.
6. Other activities

Realisasi Kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Pelanggan serta Dampak Kegiatan

Sejalan dengan rencana kegiatan Program kerja kepuasan Pelanggan yang telah ditetapkan oleh Indonesia Power, pelaksanaan kegiatan Perusahaan terkait pelanggan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Implementation of Corporate Responsibility Programs to Customers and Its Impacts

In line with the program established regarding customer satisfaction, the activities carried out throughout 2017 were:

1. **Melakukan sosialisasi dan kegiatan bersama pelanggan**
   Dalam rangka meningkatkan nilai kepuasan pelanggan dan *engagement*, Indonesia Power telah melakukan sosialisasi Sinergi Turunkan BPP Terangi Nusantara pada tanggal 23 juli 2017 di PLN APP Cilegon yang dibarengi dengan kegiatan bersama pelanggan yaitu Gowes Bersama.

1. **Dissemination of information and holding a joint function with the customer**
   In an effort to increase customer satisfaction and engagement, Indonesia Power conducted an event to disseminate information on "Synergy for Lower Generating Main Cost (BPP) to Brighten Up the Archipelago" on July 23, 2017 at PLN APP Cilegon, wrapped out by fun bike together with the customers.




2. ***Workshop* bersama pelanggan**
   Guna memenuhi harapan pelanggan serta melakukan diskusi pembangkit antara IP dan PLN, Indonesia Power melakukan *Workshop* Penyusunan *Action Plan* hasil survey kepuasan pelanggan yang di hadiri seluruh unit indonesia Power dengan mengundang PT PLN (Persero) dan PLN (Persero) P2B yang dilaksanakan pada tanggal 22-24 Februari 2017.

2. **Workshop with the Customer**
   In order to meet customer expectations and facilitate conversations on power generation between Indonesia Power and PLN, Indonesia Power organized an Action Planning Workshop based on the results of customer satisfaction surveys. All the Company units attended the workshop, with invitees from PT PLN (Persero) and PLN (Persero) P2B on February 22-24, 2017.




TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KONSUMEN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO THE CUSTOMER

3. **Penandatanganan komitmen bersama yang disaksikan oleh pelanggan atas *action plan* hasil survei kepuasan pelanggan**
   Sebagi wujud Indonesia Power berkomitmen dalam memenuhi harapan pelanggan, pada tanggal 22-24 Februari 2017 telah dilakukan penandatanganan komitmen bersama terkait *action plan* yang sudah disusun oleh Indonesia Power.

4. **Melakukan perbaikan sesuai dengan *Action Plan* yang Sudah Dibuat**
   Selama tahun 2017, setiap unit Indonesia Power telah melaksanakan perbaikan sesuai dengan komitmen bersama action plan kepuasan pelanggan yang telah disusun oleh Indonesia Power.

5. **Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelanggan Tahun 2017**
   Secara berkala, Indonesia Power selalu mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan Perusahaan. Survei kepuasan pelanggan Indonesia Power untuk tahun buku 2017 dilakukan pada tanggal 4 september-4 oktober 2017 oleh PT SUCOFINDO dengan responden Pelanggan Grid (500 KV dan 150 KV), Pelanggan *Embedded* (20 KV) dan Pelanggan Jasa OM.

   Pengukuran survei tersebut menggunakan 2 (dua) metode yaitu:
   a. Metode Kuantitatif, melalui kuesioner yang sifatnya *close/open question.*
   b. Metode Kualitatif, melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan *Indepth Interview*

   Hasil survey tersebut menunjukan peningkatan dibanding tahun 2016 sebesar 86,86.menjadi 88,88

3. **Execution of a joint commitment on conducting the action plan prepared based on customer satisfaction surveys before customer**
   To make good on its commitment on meeting customer expectation, on February 22-24, 2017 a joint commitment on an action plan the Company had prepared was executed along with the customer.

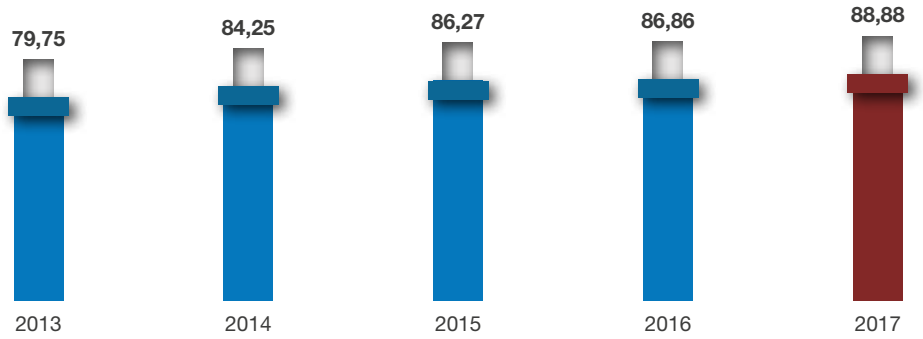
4. **Taking corrective actions based on the Action Plan**
   Throughout 2017, all units in Indonesia Power had taken corrective actions in keeping with the Company's commitment and the Action Plan which refer to the customer satisfaction surveys.

5. **Conducting Customer Satisfaction Survey for 2017**
   Periodically, Indonesia Power measures customer satisfaction to its services. This survey in 2017 was conducted on September 4-October 4, 2017 by PT SUCOFINDO, with respondents from Grid Customers (500 KV and 150 KV), Embedded Customer (20 KV) and OM Customer.

   The survey employed two methods:
   a. Quantitative method, through close/open questionnaire.
   b. Qualitative Method, through Focus Group Discussion (FGD) and In-depth Interview

   The results showed that there was significant increase seen in rating compared to 2017, i.e. from 86.86 to 88.88.

Grafik Hasil Survei Kepuasan Pelanggan Indonesia Power Tahun 2013-2017
Graph: Indonesia Power Customer Satisfaction Survey Results 2013-2017



6. Kegiatan Lainnya

a. Kesehatan dan Keselamatan pelanggan
Indonesia Power selalalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dengan memastikan segala sesuatunya sesuai dengan rangkaian prosedur operasi standar keselamatan dan kesehatan pelanggan guna menjaga keselamatan dan kesehatan pelanggan.

Selama tahun 2017 tidak terdapat insiden ketidakpatuhan tentang dampak keselamatan dan kesehatan dalam pendistribusian energi listrik kepada pelanggan dan pengaduan mengenai ketidaknyamanan pelanggan.

b. Informasi Produk
Indonesia Power telah menyediakan sarana akses data dan informasi laporan Tahunan Indonesia Power dan *website* Indonesia Power dengan alamat www.indonesiapower.co.id guna mempermudah pelayanan dan akses terkait informasi produk Indonesia Power.

c. Sarana, Jumlah dan Penanggulangan Atas Pengaduan Pelanggan
Indonesia Power telah menyediakan sarana media komunikasi hubungan dengan pelanggan guna menangani keluhan dan pertanyaan dari pelanggan mengenai produk, sehingga pelanggan dapat berinteraksi secara langsung untuk menyampaikan keluhan, pertanyaan, saran/masukan dan tingkat kepuasan terhadap produk dan layanan yang diberikan oleh Indonesia Power.

6. Other Activities

a. Customer Safety and Health
The Company always commits to give the best services by ensuring all aspects follow the operating procedures for customer safety and health.

In 2017, there was not any incident of incompliance which might lead to safety and health issues in the distribution of electricity to the customers. The same was true with complaints regarding inconvenience on the customer's part, which was none.

b. Product Knowledge
Indonesia Power provides access to data and information contained in the Company's annual reports on its website, www.indonesiapower.co.id, to facilitate information access and services associated with Indonesia Power's products.

c. Facilities, quantity and mitigation of customer complaints
The Company also provides communication channels with the customers to handle complains and address questions regarding its product so that the customer can interact directly in submitting their complaint, question, suggestion or feedback and satisfaction level toward the services and products on offer.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KONSUMEN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO THE CUSTOMER

Media komunikasi hubungan dengan pelanggan yang digunakan oleh Indonesia Power adalah:

Media of communications used by the Company in establishing communication with the customers are:

Media Komunikasi Utama Main Communication Media	A	B	C	D	**Proses Menetapkan Persyaratan Dukungan Pelanggan** Establishing Requirements for Customer Support		**Proses Menyebarluaskan Persyaratan ke Internal Tenaga Kerja** Disseminating the Requirements the Workforce
PLN melalui PLN P3B-JB (energi listrik 500kV dan 150 kV) I PLN through PLN P3B-JB (500 KV & 150 KV)							
Telepon • 021-526 7666 • Ext.2222/3333: Operasional *real time* (ETMC) • Ext.2222/3333: Realisasi kinerja pembangkit **(HDKP)** • Ext.3115: Informasi ROM serta ROB dan ROT • Telepon Direct ETMC 021-522 9813: Kondisi pembangkit • *Handphone* ETMC 0811 937 740: Kondisi pembangkit dan operasional • *Hotline* Unit Pembangkit: Naik turun beban, *Start-stop* pembangkit, kondisi pembangkit **Phone** • 021-526 7666 • Ext. 2222/3333: real-time operation (ETMC) • Ext. 2222/3333: realization of power plant performance **(HDKP)** • Ext. 3115: Information on Weekly Operations Plan (ROM), Monthly Operations Plan (ROB) and Annual Operations Plan (ROT) • Direct call to ETMC 021-522 9813: plant condition • ETMC mobile 0811 937 740: power plant and operation conditions • Power Plant Hotline: load fluctuation, plant start-stop, plant conditions	√	√	√	√	• Menetapkan PIC untuk telepon • Menetapkan *respon time* • Menetapkan tata cara menerima dan menjawab telepon • Evaluasi informasi dan efektivitas media untuk perbaikan	• Determining PIC for phone calls • Setting response time • Establishing etiquette to receive and answer calls • Evaluating information and media effectiveness for improvement	• Menetapkan instruksi kerja (IPM,IK) • Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait • Determining work instruction (IPM, IK) • Disseminating relevant information to the related employees
Website • Aplikasi HDKS: naik turun beban dan start-stop pembangkit • Aplikasi HDKP IKP: ketidaksiapan pembangkit • Aplikasi GAIS: kinerja pembangkit • Aplikasi JBOS Plan: perencanaan pembangkit • Aplikasi Rapsodi: kondisi sistem • Aplikasi Neraca Energi: kWh energy **Website** • HDKS: Load fluctuation, plant start-stop • HDKP IKP: power plant unpreparedness • GAIS: power plan performance • JBOS Plan: power plant planning • Rapsodi: system condition • Neraca Energi: kWh energy	√ √ √ √ √ √	√ - - √ - -	- - 	 √ 	• Menetapkan PIC untuk setiap aplikasi sesuai dengan Tupoksi • Menetapkan *response time* mengacu pada Protap • Evaluasi informasi dan efektivitas media untuk perbaikan	• Determining PIC for every application in line with job descriptions • Determining response time referring to procedures • Evaluating information and media effectiveness for improvement	• Menetapkan instruksi kerja (IPM,IK) • Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait • Establishing work instruction (IPM, IK) • Disseminating relevant information to the related employees
E-mail etmc@indonesiapower.co.id: perencanaan operasi, operasional *real time* **E-mail** etmc@indonesiapower.co.id: operation plan, real-time operations	√	√	-	√	• Menetapkan kesiapan pembangkit (ROB, ROM, dan ROH) • Evaluasi informasi dan efektivitas media untuk perbaikan	• Determining plant readiness (ROB, ROM and Daily Operation Plan or ROH) • Evaluating information and media effectiveness for improvement	• Menetapkan instruksi kerja • Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait • Establishing work instruction • Disseminating relevant information to the related employees

Media Komunikasi Utama Main Communication Media	A	B	C	D	Proses Menetapkan Persyaratan Dukungan Pelanggan Establishing Requirements for Customer Support		Proses Menyebarluaskan Persyaratan ke Internal Tenaga Kerja Disseminating the Requirements the Workforce
Surat PT Indonesia Power Jl. Gatot Subroto Kav.18: PPA, *settlement*, perencanaan operasi, kondisi pembangkit **Letter** PT Indonesia Power Jl. Gatot Subroto Kav. 18: PPA, settlement, operation plan, power plant condition	√	√	√	√	• Menetapkan PJBTL dan tarif komponen ABCD • Menetapkan JTF • Menetapkan perencanaan penjualan • Menetapkan kondisi status pembangkit • Evaluasi informasi dan efektivitas media untuk perbaikan	• Establishing PJBTL and tariff of ABCD component • Determining JTF • Determining sales plan • Determining power plant status • Evaluating information and media effectiveness for improvement	• Menetapkan instruksi kerja • Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait • Determining work instruction • Disseminating relevant information to the related employees
Rapat Rapat Alokasi Energi (RAE) **Meeting** Energy Allocation Meeting	√	√	√	√	• Menetapkan hasil evaluasi energi bulan yang lalu dan perencanaan bulan depan • Evaluasi informasi dan efektivitas media untuk perbaikan	• Determining the results of preceding months' energy evaluation and planning for the next months • Evaluating information and media effectiveness for improvement	• Menetapkan Instruksi kerja • Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait • Establishing work instruction • Disseminating relevant information to the related employees
PLN melalui PLN Distribusi (energi listrik ≤20kV I PLN through PLN Distribution (electricity ≤ 20kV)							
Telepon • 021-526 7666 • *Mobile Phone* ETMC: 0811 937 740 • Telepon *direct* ETMC: 021-522 9813 **Phone** • 021-526 7666 • ETMC mobile: 0811 937 740 • ETMC Hotline: 021-522 9813	√	√	√	√	• Menetapkan PIC untuk telepon • Menetapkan *response time* • Menetapkan tata cara menerima dan menjawab telepon	• Determining PIC for handling phone calls • Setting up response time • Establishing etiquette to receive and answer calls	• Menetapkan Instruksi kerja • Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait • Establishing work instruction • Disseminating relevant information to the related employees
E-mail E-mail kepada Divisi Niaga/personal E-mail: Settlement/kontrak **E-mail** E-mail to DIV PST/personal e-mail: Settlement/contract	√	√	√	√	Menetapkan kesiapan pembangkit (ROB dan ROM	Determining plant readiness (ROB and ROM)	• Menetapkan Instruksi kerja • Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait • Establishing work instruction • Disseminating relevant information to the related employees
Surat PT Indonesia Power Jl. Gatot Subroto Kav.18: Settlement/kontrak **Letter** PT Indonesia Power Jl. Gatot Subroto Kav. 18: Settlement/contract	√	√	√	√	• Menetapkan kontrak single price • Menetapkan JTF • Menetapkan perencanaan penjualan • Menetapkan kondisi status pembangkit	• Setting single price contract • Establishing JTF • Establishing sales plan • Determining power plant status	• Menetapkan Instruksi kerja • Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait • Determining work instruction • Disseminating relevant information to the related employees
Rapat Rapat pembahasan kontrak dan *settlement* **Meeting** Discussion of contract and settlement	√	√	√	√	Menetapkan hasil evaluasi energi bulan yang lalu dan perencanaan bulan depan	Determining the results of preceding months' energy evaluation and planning for the next months	• Menetapkan Instruksi kerja • Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait • Establishing work instruction • Disseminating relevant information to the related employees
PLN pelanggan jasa O&M I PLN through O&M services							
Telepon • 021-526 7666: koordinasi, progres, kajian • Telepon personal: koordinasi, progres, kajian **Phone** • 021-526 7666: coordination, progress, review • Personal phone: coordination, progress, review	√	√	√	√	• Menetapkan PIC untuk telepon • Menetapkan *response time* • Menetapkan tata cara menerima dan menjawab telepon	• Determining PIC for handling phone calls • Establishing response time • Determining etiquette to receive and answer calls	• Menetapkan instruksi kerja • Melakukan rapat internal Jasa O&M • Establishing work instruction • Conducting internal O&M Service meeting
E-mail E-mail ke DIV PNB/personal e-mail **E-mail** E-mail to DIV EPS II/personal e-mail	√	√	√	√	Menetapkan kesiapan pembangkit (ROB, ROM, dan ROH)	Determining power plant readiness (ROB, ROM and ROH)	• Menetapkan instruksi kerja • Melakukan rapat internal Jasa O&M • Determining work instruction • Holding internal O&M Service meeting
Rapat Rapat Jasa O&M **Meeting** O&M Service Meeting	√	√	√	√	Menetapkan hasil evaluasi kontrak yang masih berjalan	Determining the ongoing contract evaluation results	• Menetapkan instruksi kerja • Melakukan rapat internal Jasa O&M • Establishing work instruction • Organizing internal O&M Service meeting

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KONSUMEN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO THE CUSTOMER

Jumlah Pengaduan Pelanggan

Selama tahun 2017, Indonesia Power tidak menerima berbagai keluhan dari pelanggan baik itu yang berupa aspek kesehatan dan keselamatan maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan terkait dengan penyediaan informasi produk dan komunikasi pemasaran.

Number of customer complaints

In 2017, Indonesia Power had not received any customer's complaint, either related to safety and health aspects or on compliance with related regulations on provision of product information and marketing communications.

Jumlah Pengaduan Pelanggan Tahun 2017
The Number of Customer's Complaint in 2017

Aspek Aspect		Jumlah Pengaduan Number of Complaints
Aspek kesehatan dan keselamatan terkait dengan pendistribusian listrik kepada pelanggan dan pengaduan mengenai privasi pelanggan	Health and safety aspects related to power distribution for the customers and complaints about their privacy	0 (Tidak ada pengaduan dari pelanggan) (Zero complaint)
Ketidakpatuhan terhadap peraturan terkait dengan penyediaan informasi produk dan komunikasi pemasaran	Incompliance with relevant regulations on provision of product information and marketing communications	0 (Tidak ada pengaduan dari pelanggan) (Zero complaint)

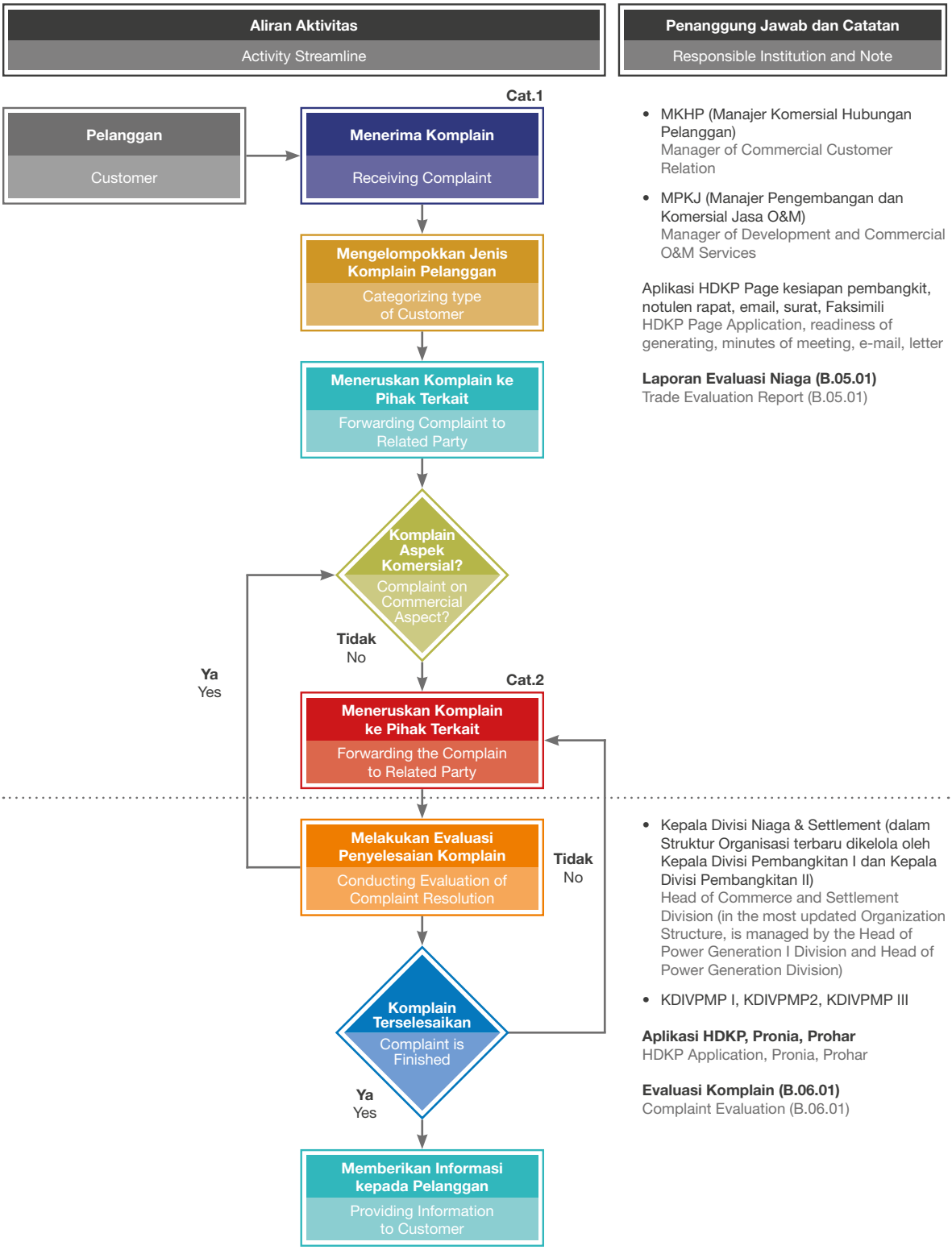
Penanggulangan atas Pengaduan Pelanggan

Dalam hal terjadi keluhan pelanggan, Indonesia Power senantiasa akan menindaklanjuti keluhan pelanggan. Penanganan pengaduan pelanggan dilaksanakan oleh Divisi Niaga & Settlement (dalam Struktur Organisasi terbaru dikelola oleh Divisi Pembangkitan I dan Divisi Pembangkitan II) dan dimonitor secara otomatis dalam Aplikasi Harian Deklarasi Ketidaksiapan Pembangkit (HDKP). Hasilnya dikompilasi dan dievaluasi oleh Kepala Divisi Niaga & Settlement (dalam Struktur Organisasi terbaru dikelola oleh Kepala Divisi Pembangkitan I dan Kepala Divisi Pembangkitan II) dan Unit/Divisi terkait untuk mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi dan kemudian ditindaklanjuti (sesuai dengan IPM.06.07).

Customer Complaint Mitigation

In case of customer complaint, the Company commits to follow up on such complaint. The Commerce and Settlement Division (in the most updated Organizational Structure reporting to the Power Generating Division I and II) handles customer complaint and it is automatically monitored on Daily Statement on Plant Unpreparedness (HDKP) Application. The result would then be compiled and evaluated by the Head of Commerce and Settlement (in the most updated Organizational Structure the Head of Power Generating Division I and Head of Power Generating Division II), as well as related Unit/ Division to find solutions to situations at hand and then take follow-up actions (in accordance with IPM.06.07).

Mekanisme Pengelolaan Keluhan Pelanggan
Customer Complaint Management Mechanism



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KONSUMEN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO THE CUSTOMER

d. Upaya Perusahaan dalam memenuhi hak dan harapan pelanggan.

Berikut adalah langkah Indonesia Power dalam memenuhi hak dan harapan pelanggan:

d. The Company's effort in ensuring customer's rights and meeting their expectations.

The following is the scheme Indonesia Power carries out to ensure customer's rights and fulfill their expectations.

		Uraian Description	**Proses Memenuhi Dukungan Pelanggan** Process of Fulfilling Customer's Support	**Proses Menyebarluaskan Persyaratan Dukungan Pelanggan ke Pihak Terkait** Process of Disseminating Terms of Customer's Support to Related Parties
Energi Listrik | Electrical Energy	Grid (500 kV dan 150 kV)	Kesiapan 24 jam *Operator Control Room* dan ETMC 24 Hours Readiness of Control Room Operator and ETMC	• Menetapkan PIC • Menetapkan durasi kesiapan • Menetapkan tata cara menerima dan menjawab telepon • Evaluasi informasi dan efektivitas media untuk perbaikan • Determining PIC • Determining duration of readiness • Determining etiquette of receiving and answering phone calls • Evaluating information and media effectiveness for improvement	Membuat dan menetapkan prosedur terkait Pengendalian Niaga Formulating and determining procedure regarding Commerce Control
		Optimalisasi penggunaan aplikasi *realtime* kesiapan pembangkit Optimization of application utilization on generator's real-time readiness	• Menetapkan PIC untuk setiap aplikasi sesuai dengan Tupoksi • Menetapkan *response time* mengacu pada Protap • Evaluasi informasi dan efektivitas media untuk perbaikan • Determining PIC for each application in accordance with their job description • Determining Response Time accordingly to Standard Operating Procedure • Evaluating information and media effectiveness for improvement	Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait Protap Conducting socialization toward employees regarding Standard Operating Procedure
	Embedded (20kV)	Kesiapan *Operator Control Room* Readiness of Control Room Operator	• Menetapkan PIC • Menetapkan durasi kesiapan • Menetapkan tata cara menerima dan menjawab telepon • Evaluasi informasi dan efektivitas media untuk perbaikan • Determining PIC • Determining duration of readiness • Determining etiquette of receiving and answering phone calls • Evaluating information and media effectiveness for improvement	Membuat dan menetapkan prosedur terkait Pengendalian Niaga Formulating and determining procedure regarding Commerce Control
Jasa O&M | O&M Services		Kesiapan *Operator Control Room* dan ETMC Readiness of Control Room Operator and ETMC	• Menetapkan PIC • Menetapkan durasi kesiapan • Menetapkan tata cara menerima dan menjawab telepon • Evaluasi informasi dan efektivitas media untuk perbaikan • Determining PIC • Determining duration of readiness • Determining etiquette of receiving and answering phone calls • Evaluating information and media effectiveness for improvement	Membuat dan menetapkan prosedur terkait Pengendalian Niaga Formulating and determining procedure regarding Commerce Control
		Optimalisasi penggunaan aplikasi *realtime* kesiapan pembangkit Optimization of application utilization on generator's real-time readiness	• Menetapkan PIC untuk setiap aplikasi sesuai dengan Tupoksi • Menetapkan response time mengacu pada Protap • Evaluasi informasi dan efektivitas media untuk perbaikan • Determining PIC for each application in accordance with their job description • Determining Response Time accordingly to Standard Operating Procedure • Evaluating information and media effectiveness for improvement	Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait Protap Conducting socialization toward employees regarding Standard Operating Procedure

Dampak atas Kegiatan Perusahaan terhadap Pelanggan

Secara garis besar kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Indonesia Power terkait pelanggan selama tahun 2017, menyebabkan timbulnya dampak positif bagi Perusahaan diantaranya sebagai berikut:

1. Pelanggan dapat melihat komitmen Indonesia Power dalam menindaklanjuti suara pelanggan yang didapat dalam hasil survei pelanggan tahun 2017.
2. Indonesia Power, khususnya setiap unit pembangkit, memiliki rencana tahunan dalam hubungannya dengan pelanggan, sehingga akan lebih mudah memetakan perbaikan yang akan dicapai di tahun 2017.
3. Mendekatkan komunikasi antara Indonesia Power dengan pelanggan.
4. Indonesia Power mendapatkan informasi ter*update* terkait Protap dan informasi *case* yang selama ini pernah terjadi dalam *dispatching* pembangkit sehingga dapat menjadi referensi perbaikan unit pembangkit di lapangan.
5. *Surveyor Independent* dapat memberikan hasil penilaian yang mandiri dan tanpa campur tangan pihak manapun.
6. Indonesia Power mendapatkan hasil *survey* untuk dapat ditindaklanjuti di tahun mendatang.
7. Indonesia Power mendapatkan informasi terkait suara pelanggan secara langsung, yang dapat digunakan untuk perbaikan dalam hubungan dengan pelanggan.
8. Indonesia Power mendapatkan hasil survei baik secara kuantitatif dan kualitatif atas penilaian pelanggan.
9. Hasil survei digunakan sebagai gambaran atas performansi unit pembangkit di mata pelanggan dan dipakai untuk perbaikan ditahun mendatang.
10. Indonesia Power mendapatkan referensi sebagai *supplement* agenda perbaikan di tahun mendatang.

Biaya yang dikeluarkan untuk Kegiatan Pelanggan

Biaya kegiatan pelanggan yang telah dikeluarkan oleh Indonesi Power selama tahun 2017 adalah sebesar Rp649.704.000.

Impacts of the Company's Activities on the Customer

In general, activities the Company conducted regarding the customers in 2017 brought about positive impacts as follows:

1. The customers could observe Indonesia Power's commitment to following up on their feedbacks in 2017's customer surveys.
2. The Company, particularly in each generating unit, has an annual plan for dealing with customers so that it would be easier for mapping the improvements achieved in 2017.
3. Improving communication between Indonesia Power and the customers.
4. Indonesia Power obtained the most updated information regarding Standard Operating Procedures and information on cases that have occurred in plant's dispatching unit, so it can be utilized as a reference for repair works to the power plant in question.
5. Independent surveyor could provide an independent and impartial evaluation without interference from any parties.
6. The Company received the survey results to be followed up in the following years.
7. The Company acquired information regarding direct customer feedbacks that can be used for improving its customer handling.
8. Indonesia Power obtained the survey results over customer's opinion, both quantitatively and qualitatively.
9. The survey results illustrate a power plant's performance in the eyes of the customers and can be used as a reference point for future improvements.
10. The Company obtained reference as a supplement to its agenda for improvement in the upcoming years.

Total Spending for Corporate Responsibility Programs to Customers

Total costs that Indonesia Power spent on CSR activities aimed at the customer in 2017 added up to Rp649,704,000.



07

LAPORAN KEUANGAN

FINANCIAL REPORT



PT INDONESIA POWER
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

DIRECTOR'S STATEMENT LETTER RELATING TO THE RESPOSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2017 AND 2016 AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2017 AND 2016

Kami yang bertandatangan dibawah ini/ *We, the undersigned*:

1. Nama/ *Name* : Sripeni Inten Cahyani
   Alamat kantor/ *Office address* : Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta Selatan
   Alamat Domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/ *Domicile as stated in ID Card* : Jl. Pertengahan RT.013/ RW.007 Jakarta Timur
   Nomor telepon/*Phone number* : 08118877567
   Jabatan/ *Position* : Direktur Utama/ *President Director*

2. Nama/ *Name* : Hudiono
   Alamat kantor/ *Office address* : Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta Selatan
   Alamat Domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/ *Domicile as stated in ID Card* : Jl. Tubagus Ismail V No. 16/157D, Kec. Coblong, Bandung
   Nomor telepon/*Phone number* : 0811245899
   Jabatan/ *Position* : Direktur Keuangan/ *Finance Director*

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian;
2. Laporan Keuangan Konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan Keuangan Konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Perusahaan dan entitas anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

state that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements;*
2. *The Consolidated Financial Statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information contained in the Consolidated Financial statements is complete and correct;*
   b. *The Consolidated Financial Statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or facts;*
4. *We are responsible for the internal control system of the Company and subsidiaries.*

The statement letter is made truthfully.

Jakarta, 23 Februari/ *February* 23, 2018

METERAI TEMPEL 7D641AEF710447470 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Sripeni Inten Cahyani
Direktur Utama/
President Director

Hudiono
Direktur Keuangan/
Finance Director

RSM

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Nomor/*Number* : R/179.AGA/sat.2/2018

Laporan Auditor Independen/ *Independent Auditors' Report*

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Shareholders, Board of Commissioners, and Directors

PT Indonesia Power

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Indonesia Power ("Perusahaan") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Indonesia Power ("the Company") and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2017, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the consolidated financial statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor
Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditors' responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan is a member of the RSM network. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence: KMK No.477/KM.1/2015
Registered at the Indonesia Financial Services Authority (OJK)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Indonesia Power dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Indonesia Power and its subsidiaries as of December 31, 2017, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Saptoto Agustomo
Nomor Izin Akuntan Publik: AP. 0499/
Public Accountant License Number: AP. 0499

Jakarta, 23 Februari / *February 23,* 2018

PT INDONESIA POWER
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Daftar Isi	**Halaman/ *Page***	***Table of Contents***
Surat Pernyataan Direksi		***Directors' Statement Letter***
Laporan Auditor Independen		***Independent Auditors' Report***
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016		***Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2017 and 2016***
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	*Consolidated Statements of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	*Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	5	*Consolidated Statements of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian	6	*Consolidated Statements of Cash Flows*
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	7	*Notes to the Consolidated Financial Statements*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2017 and 2016
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2017 Rp	2016 Rp	
ASET				***ASSETS***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Aset tetap	6	135,092,818	193,520,890	*Property, plant and equipment*
Properti investasi	7	183,637	--	*Investment properties*
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	9	618,394	267,047	*Investments in associate and joint ventures*
Aset pajak tangguhan	29	2,404	1,212	*Deferred tax assets*
Piutang pihak berelasi	10	477,644	481,336	*Receivable from related parties*
Piutang lain-lain	14	31,546	34,116	*Other receivables*
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	17	14,367	17,366	*Prepaid expenses and advances*
Aset keuangan dari konsesi jasa - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	8	46,487,520	--	*Financial asset of service concession - net of current portion*
Aset tidak lancar lain	11	400,416	533,619	*Other non-current assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar		**183,308,746**	**194,855,586**	***Total Non-current Assets***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	12	4,841,012	1,500,820	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha	13			*Trade receivables*
Pihak berelasi		25,617,750	21,615,875	*Related parties*
Pihak ketiga		28,955	50,766	*Third parties*
Piutang lain-lain	14	15,428	12,025	*Other receivables*
Persediaan	15	1,975,340	1,963,398	*Inventories*
Pajak dibayar dimuka	16	1,130,507	660,545	*Prepaid taxes*
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	17	282,230	186,875	*Prepaid expenses and advances*
Aset keuangan dari konsesi jasa jatuh tempo dalam satu tahun	8	1,103,982	--	*Current maturities of financial asset of service concession*
Piutang pihak berelasi	10	35,092	42,134	*Receivables from related parties*
Jumlah Aset Lancar		**35,030,296**	**26,032,438**	***Total Current Assets***
JUMLAH ASET		**218,339,042**	**220,888,024**	***TOTAL ASSETS***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATE STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)
December 31, 2017 and 2016
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2017 Rp	2016 Rp	
EKUITAS DAN LIABILITAS				***EQUITY AND LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham Modal dasar - 20.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 5.215.647.600 saham	18	2,607,824	2,607,824	*Capital stock - par value of Rp500 (full amount) per share Authorized - 20,000,000,000 shares Subscribed and paid-up - 5,215,647,600 shares*
Tambahan modal disetor	19	5,513,843	5,513,843	*Additional paid-in capital*
Saldo laba				*Retained earnings*
Ditentukan penggunaannya		2,122,213	2,122,213	*Appropriated*
Tidak ditentukan penggunaaannya		37,325,468	36,990,310	*Unappropriated*
Penghasilan komprehensif lain		161,487,658	165,944,572	*Other comprehensive income*
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		209,057,006	213,178,762	*Equity attributable to owners of the parent*
Kepentingan non-pengendali		73,159	43,780	*Non-controlling interests*
JUMLAH EKUITAS		**209,130,165**	**213,222,542**	***TOTAL EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas pajak tangguhan	29	847,476	413,167	*Deferred tax liabilities*
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun				*Long-term liabilities - net of current portion*
Utang sewa pembiayaan	21	--	144,949	*Lease liabilities*
Liabilitas imbalan kerja	32	2,826,088	2,552,919	*Employee benefits liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		**3,673,564**	**3,111,035**	***Total Non-current Liabilities***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha	20			*Trade payables*
Pihak berelasi		1,179,179	955,413	*Related parties*
Pihak ketiga		2,685,144	2,380,734	*Third parties*
Utang pajak	22	318,084	251,758	*Taxes payable*
Biaya masih harus dibayar		951,415	555,569	*Accrued expenses*
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun				*Current maturities of long-term liabilities*
Utang sewa pembiayaan	21	145,807	106,991	*Lease liabilities*
Utang pihak berelasi		16,564	37,796	*Payable to related parties*
Liabilitas imbalan kerja	32	239,120	262,364	*Employee benefits liabilities*
Utang lain-lain		--	3,822	*Other payables*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**5,535,313**	**4,554,447**	***Total Current Liabilities***
JUMLAH LIABILITAS		**9,208,877**	**7,665,482**	***TOTAL LIABILITIES***
JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS		**218,339,042**	**220,888,024**	***TOTAL EQUITY AND LIABILITIES***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2017 Rp	2016 Rp	
PENDAPATAN USAHA				***REVENUES***
Penjualan tenaga listrik	23	20,974,180	34,504,119	*Sale of electricity*
Pendapatan dari konsesi jasa	8	15,592,752	--	*Revenue of service concession*
Pendapatan jasa	24	2,869,486	2,201,835	*Service revenues*
Jumlah Pendapatan Usaha		**39,436,418**	**36,705,954**	*Total Revenues*
BEBAN USAHA				***OPERATING EXPENSES***
Bahan bakar dan pelumas	25	13,977,467	21,987,360	*Fuel and lubricants*
Konsesi jasa	8	11,722,323	--	*Service concession*
Penyusutan	6	3,688,555	4,807,373	*Depreciation*
Pemeliharaan	26	2,994,122	3,687,470	*Maintenance*
Kepegawaian	27	2,274,026	1,741,670	*Personnel*
Sewa	28	17,919	32,789	*Lease*
Lain-lain		395,534	353,368	*Others*
Jumlah Beban Usaha		35,069,946	32,610,030	*Total Operating Expenses*
LABA USAHA		**4,366,472**	**4,095,924**	***OPERATING INCOME***
Penghasilan keuangan		229,056	56,329	*Financial income*
Keuntungan kurs mata uang asing - bersih		3,081	77,071	*Gain on foreign exchange - net*
Beban keuangan		(1,001,924)	(42,063)	*Financial cost*
Lain-lain - bersih		133,722	(91,508)	*Others - net*
LABA SEBELUM PAJAK		**3,730,407**	**4,095,753**	***INCOME BEFORE TAX***
BEBAN PAJAK	29	**(498,084)**	**(1,209,049)**	***TAX EXPENSES***
LABA TAHUN BERJALAN		**3,232,323**	**2,886,704**	***INCOME FOR THE YEAR***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (Continued)
For the Years Ended December 31, 2017 and 2016
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2017 Rp	2016 Rp	
LABA TAHUN BERJALAN		**3,232,323**	**2,886,704**	***INCOME FOR THE YEAR***
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan				***Other comprehensive income for the year***
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Item that may be reclassified subsequently to profit or loss:*
Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas ventura bersama		15,006	--	*Share of other comprehensive income from joint ventures*
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will not be reclassified to profit or loss:*
Surplus revaluasi aset tetap		(4,384,773)	--	*Property, plant and equipment revaluation surplus*
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		(116,196)	28,887	*Remeasurement on defined benefit plans*
Manfaat (beban) pajak terkait		29,049	(250,597)	*Related income tax benefit (expense)*
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak		**(4,456,914)**	**(221,710)**	***Other comprehensive income for the year after tax***
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**(1,224,591)**	**2,664,994**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
Laba tahun berjalan diatribusikan kepada:				*Income for the year attributable to:*
Pemilik entitas induk		3,220,175	2,885,017	*Owners of the parent*
Kepentingan non-pengendali		12,148	1,687	*Non-controlling interest*
Jumlah		**3,232,323**	**2,886,704**	***Total***
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan diatribusikan kepada:				*Total comprehensive income for the year attributable to:*
Pemilik entitas induk		(1,236,739)	2,663,307	*Owners of the parent*
Kepentingan non-pengendali		12,148	1,687	*Non-controlling interest*
Jumlah		**(1,224,591)**	**2,664,994**	***Total***
LABA PER SAHAM DASAR (Dalam Rupiah penuh)	30	**617**	**553**	*BASIC EARNINGS PER SHARE (In Rupiah full amount)*

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended December 31, 2017 and 2016
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Subscribed and paid-up capital stock* Rp	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital* Rp	Saldo laba/ *Retained earnings*		Penghasilan komprehensif lain/ *Other comprehensive income*			Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ *Equity attributable to owner of the parent* Rp	Kepentingan non-pengendali/ *Non-controlling interests* Rp	Jumlah ekuitas/ *Total equity* Rp	
				Ditentukan penggunaannya/ *Appropriated* Rp	Tidak ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated* Rp	Surplus revaluasi aset tetap/ *Property, plant and equipment revaluation surplus* Rp	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti/ *Remeasurement on defined benefit plans* Rp	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas ventura bersama/ *Share of other comprehensive income from joint venture* Rp				
Saldo per 1 Januari 2016		**2,607,824**	**5,503,726**	**2,122,213**	**38,313,162**	**166,549,207**	**(382,925)**	**--**	**214,713,207**	**43,064**	**214,756,271**	***Balance as of January 1, 2016***
Dividen	31	–	–	–	(4,207,869)	–	–	–	(4,207,869)	(1,098)	(4,208,967)	*Dividends*
Aset pengampunan pajak	19	–	10,117	–	–	–	–	–	10,117	127	10,244	*Tax amnesty assets*
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		–	–	–	2,885,017	(243,375)	21,665	–	2,663,307	1,687	2,664,994	*Total comprehensive income for the year*
Saldo per 31 Desember 2016		**2,607,824**	**5,513,843**	**2,122,213**	**36,990,310**	**166,305,832**	**(361,260)**	**--**	**213,178,762**	**43,780**	**213,222,542**	***Balance as of December 31, 2016***
Penyertaan modal tahun berjalan		–	–	–	–	–	–	–	–	18,333	18,333	*Capital subscription during the year*
Dividen	31	–	–	–	(2,885,017)	–	–	–	(2,885,017)	(1,102)	(2,886,119)	*Dividends*
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		–	–	–	3,220,175	(4,384,773)	(87,147)	15,006	(1,236,739)	12,148	(1,224,591)	*Total comprehensive income for the year*
Saldo per 31 Desember 2017		**2,607,824**	**5,513,843**	**2,122,213**	**37,325,468**	**161,921,059**	**(448,407)**	**15,006**	**209,057,006**	**73,159**	**209,130,165**	***Balance as of December 31, 2017***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2017 Rp	2016 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan	24,171,240	23,003,563	*Cash receipts from customers*
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	(21,365,075)	(19,879,618)	*Cash paid to suppliers and employees*
Kas diperoleh dari aktivitas operasi	2,806,165	3,123,945	*Cash provided by operations*
Penerimaan bunga	83,548	56,329	*Interest received*
Pembayaran pajak penghasilan	(301,533)	(432,109)	*Income tax paid*
Pembayaran pengampunan pajak	--	(211)	*Payment of tax amnesty*
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	**2,588,180**	**2,747,954**	***Net cash provided by operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Perolehan aset tetap	(2,525,201)	(1,965,818)	*Addition of property, plant and equipment*
Penyertaan modal pada entitas ventura bersama	(354,632)	(42,355)	*Capital subscription in joint ventures*
Perolehan investasi efek beragunan aset	(312,000)	--	*Purchase of investment in asset-backed securities*
Penerimaan kembali atas piutang pihak berelasi	31,119	40,424	*Receipt of payments from receivables from related party*
Perolehan dividen dari entitas asosiasi	1,163	--	*Proceeds from dividend of associate*
Pemberian piutang pihak berelasi	--	(90,174)	*Addition of receivable from related parties*
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	**(3,159,551)**	**(2,057,923)**	***Net cash used in investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan penjualan aset keuangan dari konsesi jasa	4,000,000	--	*Proceeds from sales of financial asset of service concession*
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(106,133)	(83,950)	*Payments of lease liabilities*
Perolehan penyertaan modal dari pihak non-pengendali	18,333	--	*Proceeds from non-controlling party for capital subscription*
Pembayaran dividen kepada pihak non-pengendali	(1,102)	(1,098)	*Payment of dividends to non-controlling parties*
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	**3,911,098**	**(85,048)**	***Net cash provided by (used in) financing activities***
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	3,339,727	604,983	***NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	465	(541)	*Effect of changes in foreign currency*
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	1,500,820	896,378	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**4,841,012**	**1,500,820**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR***

Tambahan informasi transaksi non kas disajikan dalam Catatan 37

Additional information of non cash transaction are presented in Note 37

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

1. Umum

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Indonesia Power ("Perusahaan") didirikan di Jakarta berdasarkan akta notaris No. 15 tanggal 3 Oktober 1995 dari Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C2-12496-HT.01.01.Th.95 tanggal 3 Oktober 1995 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9249 tanggal 7 November 1995, Tambahan No. 89.

Anggaran Dasar Perusahaan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 88 tanggal 12 Agustus 2008 dari Imas Fatimah S.H., notaris di Jakarta, dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-55306.AH.01.02 Th 2008 tanggal 25 Agustus 2008 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 32 tanggal 21 April 2009, Tambahan No. 11089.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor atau satuan-satuan usaha yang tersebar di wilayah Indonesia. Kantor pusat Perusahaan beralamat di Gedung PLN Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat yang mencakup aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

a) Penyediaan tenaga listrik yang ekonomis, bermutu tinggi dan dengan keandalan yang baik.
b) Usaha yang berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik yang meliputi:
   - Jasa survey, investigasi, desain, konstruksi/ pemasangan instalasi, operasi dan pemeliharaan, persewaan peralatan pembangkitan, serta pendidikan dan pelatihan.

1. General

a. Establishment and General Information

PT Indonesia Power (the "Company") was established in Jakarta based on the notarial deed No. 15 dated October 3, 1995 of Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., The deed of establisment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his decision letter No. C2-12496-HT.01.01.Th.95 dated October 3, 1995, and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 9249 dated November 7, 1995, Supplement No.89.

The Company's articles of association have been amended several times, most recently by the notarial deed No. 88 dated August 12, 2008 of Imas Fatimah S.H., notary in Jakarta to conform with Law No. 40 year 2007 on Limited Liability Companies. This change was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decision letter No. AHU-55306.AH.01.02 Th 2008 dated August 25, 2008, and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 32 dated April 21, 2009, Supplement No. 11089.

The Company is domiciled in Jakarta, with offices or business units spread all over Indonesia. The Company's head office is located in PLN Building Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta.

In accordance with article 3 of the Company's articles of association, the scope of its activities is to run electricity business based on sound industrial and trade principles which include the following activities:

a) Supply electricity which are economical, high quality and reliable.

b) Business related to supply of electricity includes:
   - *Survey services, investigation, design, construction/ installation, operation and maintenance, rental of generation equipment, and training and education.*

- Produksi, perbaikan dan perdagangan peralatan tenaga listrik.
- Produksi, pengolahan, pengangkutan dan perdagangan batu bara, gambut, biomas dan gas alam.
- Produksi dan pengusahaan energi panas bumi.
- Kogenerasi.

Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha (grup) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN"), suatu Perusahaan yang berdomisili di Jakarta, Indonesia.

- *Production, repairs, and trading of electricity equipment.*
- *Production, preparation, transportation, including trading of coal, peat, biomass and natural gas.*
- *Production and generation of geothermal energy.*
- *Cogeneration.*

The Company is one of the group of companies owned by Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN"), a company domiciled in Jakarta, Indonesia.

b. Susunan Pengurus dan Informasi Lain
Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:

b. Management and Other Information
As of December 31, 2017 and 2016, the composition of the Company's management consists of the following:

	2017 dan/*and* 2016	
Komisaris Utama	Bagus Setiawan	*President Commissioner*
Komisaris	Munir Ahmad	*Commissioner*
Komisaris	Tri Setyo Nugroho	*Commissioner*
Komisaris	Agus Hernawan	*Commissioner*
Komisaris	Ahmad Yani	*Commissioner*
Komisaris	Abdi Mustakim	*Commissioner*
Direktur Utama	Sripeni Inten Cahyani	*President Director*
Direktur Operasional I	Eri Prabowo	*Operational Director I*
Direktur Operasional II	Antonius Resep Tyas Artono	*Operational Director II*
Direktur Sumber Daya Manusia dan Administrasi	Roikhan	*Human Resource and Administration Director*
Direktur Pengembangan dan Niaga	Adi Suprijono	*Development and Commercial Director*
Direktur Keuangan	Hudiono	*Finance Director*

Pada tanggal 31 Desember 2017 and 2016, jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak masing-masing 4.854 (tidak diaudit) dan 5.240 (tidak diaudit).

As of December 31, 2017 and 2016, the Company and subsidiaries had a total number of employees of 4,854 (unaudited) and 5,240 (unaudited), respectively.

2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") Baru dan Revisi, serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

2. New and Revised Statements of Financial Accounting Standard ("SFAS") and Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISAK")

a. PSAK Baru dan Revisi, serta ISAK yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017
Pengesahan amandemen dan penyesuaian atas PSAK dan ISAK yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI"), berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017, adalah sebagai berikut:

a. New and Revised SFAS and ISFAS effective for the year beginning on or after January 1, 2017

Ratification of amendments and improvements of SFAS and ISFAS issued by the Financial Accounting Standard Board of the Indonesian Institute of Accounting ("DSAK-IAI"), effective for the year beginning on or after January 1, 2017, are as follows:

- PSAK 1 (Amandemen): Penyajian Laporan Keuangan, tentang petunjuk untuk materialitas dan penggabungan, penyajian sub total, struktur dari laporan keuangan dan pengungkapan kebijakan akuntansi.
- PSAK 3 (Amandemen): Laporan Keuangan Interim, tentang klarifikasi apa yang dimaksud dengan acuan dalam standar terhadap informasi yang diungkapkan di tempat lain di laporan keuangan interim.
- PSAK 24 (Amandemen): Imbalan Kerja, tentang klarifikasi penentuan tingkat diskon untuk imbalan pascakerja, bahwa mata uang yang mendenominasi kewajiban tersebut yang menentukan, bukan negara dimana kewajiban tersebut timbul.
- PSAK 58 (Amandemen): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan, tentang klarifikasi bahwa ketika sebuah aset (atau kelompok lepasan) direklasifikasi dari dimiliki untuk dijual ke dimiliki untuk didistribusikan, atau sebaliknya, tidak merupakan perubahan rencana untuk menjual atau mendistribusikan, dan tidak perlu dicatat seperti tersebut.
- PSAK 60 (Amandemen): Instrumen Keuangan: Pengungkapan, tentang apa yang dimaksud dengan keterlibatan berkelanjutan dalam konteks ini.
- ISAK 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK No. 13 Properti Investasi.
- ISAK 32: Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

b. PSAK Baru dan Revisi, serta ISAK yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018 dan setelahnya

Amandemen standar dan interpretasi berikut ini efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu:

- PSAK 2 (Amandemen): Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan, yang mensyaratkan entitas untuk menjelaskan perubahan pada

- *SFAS 1 (Amendment): Presentation of Financial Statements regarding the guidance on materiality and aggregation, the presentation of subtotals, the structure of financial statements and the disclosure of accounting policies.*
- *SFAS 3 (Amendment): Interim Financial Statements, regarding clarification on the reference in the standard to information disclosed elsewhere in the interim financial report.*
- *SFAS 24 (Amendment): Employee Benefits, regarding clarification on when determining the discount rate for post-employment benefit obligations, it is the currency that the liabilities are denominated in that is important, and not the country where they arise.*
- *SFAS 58 (Amendment): Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations, regarding clarification on when an asset (or disposal group) is reclassified from 'held-for-sale' to 'held-for-distribution', or vice versa, this does not constitute a change to a plan of sale or distribution, and it does not have to be accounted for as such.*
- *SFAS 60 (Amendment): Financial Instruments: Disclosure, regarding guidance on what is meant by continuing involvement in this context.*
- *ISFAS 31: Interpretation of PSAK No. 13 Investment Property.*
- *ISFAS 32: Definition and Hierarchy of Financial Accounting Standards.*

The implementation of the above standards had no significant effect on the amounts reported for the current period or prior financial years.

b. New and Revised SFAS and ISFAS effective for the year beginning on or after January 1, 2018 and onwards

The following amendments and interpretations of standard will be effective for the year beginning on or after January 1, 2018, for which early adoption is permitted, namely:

- *SFAS 2 (Amendment): Statement of Cash Flows about Disclosure Initiative, which requires entity to explain changes in their liabilities for which cash flows*

kewajibannya untuk arus kas yang telah, atau yang akan di klasifikasi sebagai aktivitas pembiayaan pada laporan arus kas.

- PSAK 13 (Amandemen): Properti Investasi tentang pengalihan properti investasi.
- PSAK 15 (Penyesuaian): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, tentang kepentingan jangka panjang pada entitas asosiasi dan ventura bersama.
- PSAK 16 (Amandemen): Aset Tetap-Agrikultur: Tanaman Produktif, tentang klarifikasi atas aset biologis yang memenuhi definisi dari tanaman produksi dicatat sebagai aset tetap.
- PSAK 46 (Amandemen): Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi, tentang klarifikasi persyaratan untuk mengakui aset pajak tangguhan atas rugi yang belum terealisasi.
- PSAK 53 (Amandemen): Pembayaran Berbasis Saham, tentang klasifikasi dan pengukuran transaksi pembayaran berbasis saham.
- PSAK 67 (Amandemen): Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain, tentang kepentingan di entitas yang dikategorikan sebagai dimiliki untuk dijual kecuali untuk ringkasan informasi keuangan.
- PSAK 69: Agrikultur
- PSAK 111: Akuntansi Wa'd

Interpretasi standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- ISAK 33, Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 15 (Amandemen): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

have been, or will be classified as financing activities in the statement of cash flows.

- *SFAS 13 (Amendment): Investment Property, regarding transfer of investment property.*
- *SFAS 15 (Improvement): Investments in Associates and Joint Ventures, regarding long term interest in associates and joint ventures.*
- *SFAS 16 (Amendment): Property, Plant and Equipment-Agriculture: Bearer Plants, regarding clarification on biological assets that meet the definition of bearer plants are accounted for as fixed assets.*
- *SFAS 46 (Amendment): Income Tax: Recognition on Deferred Tax Assets for Unrealized Losses, regarding clarification on the requirements for recognizing deferred tax assets on unrealized losses.*
- *SFAS 53 (Amendment): Share-based Payment, regarding classification and measurement of share-based payment transactions.*
- *SFAS 67 (Amendment): Disclosures of Interest in Other Entities, regarding interests in entities classified as held-for-sale except for summarised financial information.*
- *SFAS 69: Agriculture*
- *SFAS 111: Wa'd Accounting*

Interpretation to standard effective for periods beginning on or after January 1, 2019, with early application is permitted:

- *ISFAS 33, Foreign Currency Transactions and Advance Consideration*

Standards and amendments to standards effective for periods beginning on or after January 1, 2020, with early application is permitted are:

- *SFAS 15 (Amendment): Investments in Associates and Joint Ventures: Long Term Interest in Associate and Joint Ventures*

- PSAK 62 (Amandemen): Kontrak Asuransi - Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi
- PSAK 71: Instrumen Keuangan
- PSAK 71 (Amandemen): Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK 73: Sewa

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan dan entitas anak masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen standar, dan interpretasi atas standar serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak.

- *SFAS 62 (Amendment): Insurance Contract - Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contracts*
- *SFAS 71: Financial Instruments*
- *SFAS 71 (Amendment): Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation*
- *SFAS 72: Revenue from Contracts with Customers*
- *SFAS 73: Leases*

As of the authorization date of these consolidated financial statements, the Company and subsidiaries are still evaluating the potential impact of these new standards, amendments, and interpretations of standards to the Company and subsidiaries' consolidated financial statements.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting

a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan ("SAK")
Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang meliputi PSAK dan ISAK yang diterbitkan oleh DSAK-IAI.

b. Dasar Penyusunan
Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian adalah dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah ("Rp"), yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anak. Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

3. Summary of Significant Accounting Policies

a. Compliance with the Financial Accounting Standards ("FAS")
The financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include SFAS and ISFAS issued by the DSAK – IAI.

b. Basis of Preparation
The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared on the accrual basis of accounting. The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah ("Rp"), which is also the functional currency of the Company and subsidiaries. The measurement basis is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

c. Dasar Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak (termasuk entitas bertujuan khusus) yang dikendalikan oleh Perusahaan atau entitas anak. Pengendalian dianggap ada ketika Perusahaan memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan suatu entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

Hasil entitas anak yang diakuisisi atau dijual selama periode berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sejak tanggal efektif akuisisi dan sampai dengan tanggal efektif penjualan.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Perusahaan.

Seluruh transaksi antar perusahaan, saldo, penghasilan dan beban dieliminasi pada saat konsolidasi.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Perusahaan dan entitas anak pada entitas anak masing-masing yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepentingan Perusahaan dan entitas anak dan kepentingan non-pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas entitas anak. Setiap perbedaan antara jumlah kepentingan non-pengendali disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik Perusahaan.

Jika Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Perusahaan:
(a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;

c. *Basis of Consolidation*

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and subsidiaries (including special purpose entities) controlled by the Company or subsidiaries. Control is achieved when the Company is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity.

The results of subsidiaries acquired or disposed of during the period are included in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income from the effective date of acquisition or up to the effective date of disposal, as appropriate.

When necessary, adjustments are made to the financial statements of the subsidiaries to bring the accounting policies used in line with those used by the Company.

All intra-group transactions, balances, income and expenses are eliminated on consolidation.

Changes in the Company and subsidiaries' interests in the respective subsidiaries that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions. The carrying amount of the Company and subsidiaries' interest and the non-controlling interests are adjusted to reflect the changes in their relative interests in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the Company.

If the Company loses control over the subsidiary, the Company:
(a) Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control ceases;

(b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non pengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non pengendali);
(c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima, jika ada, dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
(d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
(e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
(f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

(b) Derecognizes the carrying amounts of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control ceases (including any components of other comprehensive income attributable to them);
(c) Recognizes the fair value of the consideration received, if any, from the transaction, event or circumstance that resulted in the cessation of control;
(d) Recognizes any investment retained in the former subsidiary at its fair value at the date when control ceases;
(e) Reclassifies to profit or loss, or directly transfer to retained earnings if required by other Financial Accounting Standards, the amounts recognized in other comprehensive income in relation to the former subsidiary;
(f) Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the owners of the parent.

d. Kombinasi Bisnis
Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Perusahaan dan entitas anak, liabilitas yang diakui oleh Perusahaan dan entitas anak kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dan entitas anak dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

d. Business Combination
Business combination is a transaction or other events in which an acquirer obtains control of one or more businesses. Business combination is accounted for using the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Company and subsidiaries, liabilities incurred by the Company and subsidiaries to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Company and subsidiaries in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized in profit or loss as incurred.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant standards.

Kepentingan non-pengendali yang menyajikan bagian kepemilikan dan memberikan mereka hak atas bagian proposional dari aset neto entitas dalam hal terjadi likuidasi pada awalnya diukur baik pada nilai wajar ataupun pada bagian proporsional kepemilikan kepentingan non-pengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Pilihan dasar pengukuran dilakukan atas dasar transaksi. Kepentingan non-pengendali jenis lain diukur pada nilai wajar atau, jika berlaku, pada dasar pengukuran lain yang ditentukan oleh standar akuntansi lain.

Non-controlling interests that are present ownership interests and entitles their holders to a proportionate share of the entity's net assets in the event of liquidation may be initially measured either at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. The choice of measurement basis is made on a transaction-by-transaction basis. Other types of non-controlling interests are measured at fair value or, when applicable, on the basis specified in another accounting standard.

Bila imbalan yang dialihkan oleh Perusahaan dan entitas anak dalam suatu kombinasi bisnis termasuk aset atau liabilitas yang berasal dari pengaturan imbalan kontinjen (*contingent consideration arrangement*), imbalan kontinjen tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan termasuk sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis. Perubahan dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap *goodwill*. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang berasal dari informasi tambahan yang diperoleh selama periode pengukuran (yang tidak melebihi satu tahun sejak tanggal akuisisi) tentang fakta-fakta dan kondisi yang ada pada tanggal akuisisi.

When the consideration transferred by the Company and subsidiaries in a business combination includes assets or liabilities resulting from a contingent consideration arrangement, the contingent consideration is measured at its acquisition-date fair value and included as part of the consideration transferred in a business combination. Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against goodwill. Measurement period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period (which cannot exceed one year from the acquisition date) about facts and circumstances that existed at the acquisition date.

Perubahan selanjutnya dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang tidak memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran tergantung pada bagaimana imbalan kontinjen tersebut diklasifikasikan. Imbalan kontinjen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada tanggal sesudah tanggal pelaporan dan penyelesaian selanjutnya dicatat dalam ekuitas. Imbalan kontinjen yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas diukur kembali setelah tanggal pelaporan sesuai dengan standar akuntansi yang relevan, dengan diakui keuntungan atau kerugian terkait dalam laba rugi atau dalam pendapatan komprehensif lain.

The subsequent accounting for changes in the fair value of the contingent consideration that do not qualify as measurement period adjustments depends on how the contingent consideration is classified. A contingent consideration that is classified as equity is not remeasured at subsequent reporting dates and its subsequent settlement is accounted for within equity. A contingent consideration that is classified as an asset or liability is remeasured subsequent to the reporting dates in accordance with the relevant accounting standards, as appropriate, with the corresponding gain or loss being recognized in profit or loss or in other comprehensive income.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Perusahaan dan entitas anak atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugiannya, jika ada, diakui di dalam laba rugi. Jumlah yang berasal dari kepemilikan sebelum tanggal akuisisi yang sebelumnya telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi dimana perlakuan tersebut akan sesuai ketika kepemilikannya dilepas/ dijual.

When a business combination is achieved in stages, the Company and subsidiaries' previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. Amounts arising from interests in the acquiree prior to the acquisition date that have previously been recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where such treatment would be appropriate when those interests were disposed of.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Perusahaan dan entitas anak melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

If the initial accounting for a business combination is incompleted by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Company and subsidiaries report provisional amounts for the items for which the accounting is incompleted. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have affected the amount recognized as of that date.

e. Transaksi dan Penjabaran Mata Uang Asing

Pembukuan Perusahaan dan entitas anak, diselenggarakan dalam mata uang Rupiah, mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsionalnya). Transaksi-transaksi selama periode berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi komprehensif, kecuali selisih kurs mata uang asing yang dikapitalisasi sebagai biaya pinjaman.

e. Foreign Currency Transactions and Translation

The accounts of the Company and subsidiaries, are maintained in Indonesian Rupiah, the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency). Transactions during the period involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the rates of exchange prevailing at that date. The resulting gains or losses are credited or charged to profit or loss, except those foreign exchange differences which are capitalized as borrowing costs.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, kurs konversi yang digunakan Perusahaan dan entitas anak sebagai berikut:

The conversion rates used by the Company and subsidiaries on December 31, 2017 and 2016 are as follows:

	2017 Kurs tengah/ *Middle rate* Rp *)	2016 Kurs tengah/ *Middle rate* Rp *)
Mata uang/ *Currency*		
JPY	120	115
US$	13,548	13,436
EUR	16,174	14,162
CHF	13,842	13,178

*) dalam jumlah penuh/ *in full amount*

f. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan dan entitas anak (entitas pelapor):

a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. memiliki pengaruh signifikan atas pelapor atau entitas pelapor; atau
   iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain).
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

f. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Company and subsidiaries (the reporting entity):

a. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
   i. has control or joint control over the reporting entity;
   ii. has significant influence over the reporting entity; or
   iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

b. An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions apply:
   i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
   ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
   iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
   iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.

v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a), atau

vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas palapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

g. Aset Keuangan
Pengakuan dan Pengukuran Awal
Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan

v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.

vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a), or

vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

viii. Entities, or members of the Company to which the entity is part of the Company, providing services to the entity's key management personnel or to the parent entity of the reporting entity.

A government related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by a government. Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Government related entity can be an entity which is controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or Local Government being the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the Ministry of BUMN as shareholder's representative.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

g. Financial Assets
Initial Recognition and Measurement
All financial assets are recognized and derecognized on the trade date where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose terms require delivery of the financial asset within the time

aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

frame established by the market concerned and are initially measured at fair value plus transaction costs, except for those financial assets classified as a fair value through profit or loss, which are initially measured at fair value.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Aset keuangan Perusahaan dan entitas anak diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, dan yang tersedia untuk dijual.

Subsequent Measurement of Financial Assets

The Company and subsidiaries' financial assets are classified into the following specified categories: financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, and available-for-sale.

i. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

i. Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")

Financial assets at FVTPL are financial assets held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial asset classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

After initial recognition, financial assets at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value of financial assets are recognized in profit or loss.

ii. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

(a) pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

ii. Loans and Receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

(a) those that intends to sell immediately or in the near term and upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss;

(b) pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
(c) pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

iii. Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual ("AFS")
AFS aset keuangan adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan baik sebagai AFS atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan pada FVTPL.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam pengasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen ekuitas yang tidak tercatat di pasar aktif dengan menggunakan teknik penilaian berdasarkan asumsi yang wajar. Dalam keadaan tertentu dimana kisaran estimasi nilai wajar yang realistis cukup signifikan dan probabilitas berbagai estimasi tidak dapat dinilai secara wajar, maka Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen AFS tersebut pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

(b) those that upon initial recognition designated as available for sale; or

(c) those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration.

After initial recognition, loans and receivables are measured at amortized cost using the effective interest method.

iii. Available-for-Sale Financial Assets ("AFS")
AFS financial assets are non-derivative financial assets that are either designated as AFS or are not classified as loans and receivables, held to maturity investments or financial assets at FVTPL.

On subsequent measurement, the AFS are carried at fair value, with gains or losses recognized in other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gain and losses, until they are derecognized. At that time, the cummulative gain or losses previously recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as reclassification adjustment.

The Company measures the fair value of non-listed equity instruments by applying valuation techniques based on reasonable assumptions. In the limited case where the range of reasonable fair value measurements is significantly wide and the probabilities of the various estimates cannot be reasonably assessed, the Company records such AFS instruments at cost less impairment.

Dividen atas instrumen ekuitas AFS, jika ada, diakui pada laba rugi pada saat hak Perusahaan dan entitas anak untuk memperoleh pembayaran dividen ditetapkan.

Dividends on AFS equity instruments, if any, are recognized in profit or loss when the Company and subsidiaries' rights to receive the dividends are established.

Metode Suku Bunga Efektif
Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Effective Interest Method
The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and of allocating interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and other forms paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or, where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan.

Income is recognized on an effective interest basis for financial instruments.

Penurunan Nilai Aset Keuangan
Aset keuangan dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Impairment of Financial Assets
Financial assets are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting date. Financial assets are impaired where there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset and the estimated future cash flows of the investment have been affected.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti objektif penurunan nilai.

For listed and unlisted equity investments classified as AFS, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is considered to be objective evidence of impairment.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:
- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau

For all other financial assets, objective evidence of impairment could include:
- *significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or*

- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.
- terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual tetapi penurunan secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan dan entitas anak atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan *default* atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Perubahan nilai tercatat akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang diakui dalam laba rugi.

- *breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments; or*
- *it becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organisation.*
- *observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a group of financial assets since the initial recognition, such as adverse changes in the payment status of borrowers or economic condition that correlate with defaults.*

For certain categories of financial asset, such as receivables, assets that are assessed not to be impaired individually are, in addition, assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Company and subsidiaries' past experiences of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

For financial assets carried at amortized cost, the amount of the impairment is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in profit or loss.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas dicatat ke laba rugi.

When an AFS financial asset is considered to be impaired, cumulative gains previously recognized in equity are recognized in profit or loss.

Pengecualian dari instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara objektif dengan sebuah peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

With the exception of AFS equity instruments, if, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed through profit or loss to the extent that the carrying amount of the investment at the date the impairment is reversed does not exceed what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dipulihkan melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke penghasilan komprehensif lain.

In respect of AFS equity, impairment losses previously recognized in profit or loss are not reversed through profit or loss. Any increase in fair value subsequent to an impairment loss is recognized directly in other comprehensive income.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan
Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan dan entitas anak mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan dan entitas anak tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan dan entitas anak mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan dan entitas anak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan dan entitas anak masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Derecognition of Financial Assets
The Company and subsidiaries derecognize a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when they transfer the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Company and subsidiaries neither transfer nor retain substantially all the risks and rewards of ownership and continue to control the transferred asset, the Company and subsidiaries recognize their retained interest in the asset and an associated liability for amounts they may have to pay. If the Company and subsidiaries retain substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company and subsidiaries continue to recognize the financial asset and also recognize a collateralized borrowing for the proceeds received.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the assets carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and

keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Perusahaan dan entitas anak masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Perusahaan dan entitas anak mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

Reklasifikasi
Perusahaan dan entitas anak tidak mereklasifikasi instrumen derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Perusahaan dan entitas anak sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Perusahaan dan entitas anak dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Perusahaan dan entitas anak tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is recognized in profit or loss.

On derecognition of a financial asset other than in its entirety (e.g., when the Company and subsidiaries retain an option to repurchase part of a transferred asset), the Company and subsidiaries allocate the previous carrying amount of the financial asset between the part they continue to recognize under continuing involvement and the part they no longer recognize on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss. A cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.

Reclassification
The Company and subsidiaries shall not reclassify a derivative instrument out of the fair value through profit or loss category while it is held or issued and not reclassify any financial instrument out of the fair value through profit or loss category if upon initial recognition it was designated by the Company and subsidiaries as at fair value through profit or loss. The Company and subsidiaries may reclassify the financial asset out of the fair value through profit or loss category if it is no longer held for the purpose of selling or repurchasing it in the near term. The Company and subsidiaries shall not reclassify any financial instrument into the fair value through profit or loss category after initial recognition.

Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Perusahaan dan entitas anak, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

If, as a result of a change in the Company and subsidiaries' intention or ability, it is no longer appropriate to classify an investment as held-to-maturity investments, it shall be reclassified to available-for–sale investments and remeasured at fair value. Whenever sales or reclassification of more than insignificant amount of held-to-maturity investments, any remaining held-to-maturity investments shall be reclassified as available for sale, other than sale or reclassification that are so close to maturity or the financial asset's call date, occur after all the financial asset's original principal has been collected substantially through scheduled payments or prepayments, or are attributable to an isolated event that is beyond control, non-recurring, and could not have been reasonably anticipated.

Pengukuran Nilai Wajar
Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabillitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:
(i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1)
(ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2)
(iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3)

Fair Value Measurement
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value of financial assets and financial liabilities is estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Fair values are categorized into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:
(i) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1)
(ii) Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2)

(iii) Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3)

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Perusahaan dan entitas anak sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Perusahaan dan entitas anak menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Company and subsidiaries use market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Company and subsidiaries use valuation techniques that are appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Perpindahan antara level hirarki nilai wajar diakui oleh Perusahaan dan entitas anak pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Company and subsidiaries at the end of the reporting period during which the change occurred.

h. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi Sebagai Liabilitas atau Ekuitas
Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dan entitas anak diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

h. Financial Liabilities and Equity Instruments

Classification as Debt or Equity
Financial liabilities and equity instruments issued by the Company and subsidiaries are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Instrumen Ekuitas
Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan dan entitas anak setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Equity Instruments
An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Company and subsidiaries after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded as the proceeds received, net of direct issue costs.

Liabilitas Keuangan
Utang usaha, utang lain-lain dan biaya yang masih harus dibayar. Pinjaman lainnya pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif.

Financial Liabilities
Accounts payable, other payables and accrued expenses. Other borrowings are initially measured at fair value, net of transaction costs, and are subsequently measured at amortized cost, using the effective interest rate method, with interest expense recognized on an effective yield basis.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Derecognition of Financial Liabilities

Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan dan entitas anak telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan

The Company and subsidiaries derecognize financial liabilities, when and only when the Company and subsidiaries' obligations are discharged, cancelled or expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the

pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

considerations paid and payable is recognized in profit or loss.

i. Saling Hapus Antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anak saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika:

- saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan
- berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

i. Netting of Financial Assets and Financial Liabilities

The Company and subsidiaries only offset financial assets and liabilities and present the net amount in the statement of financial position where they:

- *currently have a legal enforceable right to set off the recognized amount; and*
- *intend either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.*

j. Aset tetap – Pemilikan Langsung

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan dan entitas anak melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas kelas-kelas aset berikut ini dari model biaya menjadi model revaluasi:

- Tanah
- Bangunan umum, waduk dan prasarana
- Instalasi dan mesin pembangkit
- Perlengkapan transmisi
- Perlengkapan distribusi
- Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi
- Material cadangan utama

Perubahan kebijakan akuntansi tersebut dicatat secara prospektif sesuai dengan PSAK No. 25 (Revisi 2015).

Kelas aset di atas, disajikan sebesar nilai wajar dikurangi penyusutan dan penurunan nilai. Tanah tidak disusutkan. Penilaian terhadap aset-aset tersebut dilakukan oleh penilai independen eksternal yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset, dan nilai netonya disajikan kembali sebesar nilai revaluasian aset tetap.

j. Property, Plant and Equipment – Direct Acquisitions

On December 31, 2015, the Company and subsidiaries changed their accounting policy for the following classes of assets from the cost model to the revaluation model:

- *Land*
- *Buildings, reservoir and infrastructure*
- *Installations and power plant*
- *Transmission equipment*
- *Distribution equioment*
- *Telecommunication and data processing equipment*
- *Major spare parts*

That change in accounting policy is treated prospectively in accordance with SFAS No. 25 (Revised 2015).

The classes of asset above, are shown at fair value less subsequent depreciation and impairment losses. Land is not depreciated. Valuation of those assets is performed by external independent valuers which are registered with the Financial Service Authority. Valuations are performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount. Any accumulated depreciation at the date of revaluation is eliminated against the gross carrying amount of the asset and the net amount is restated to the revalued amount of the property, plant and equipment.

Aset tetap lainnya disajikan sebesar harga perolehan dikurangi dengan penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Harga perolehan termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut.

All other property, plant and equipment are stated at historical cost less depreciation and impairment losses. Historical cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi aset tetap yang menggunakan model revaluasi dikreditkan pada "surplus revaluasi aset" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain. Penurunan yang menghapus nilai kenaikan sebelumnya atas aset yang sama dibebankan terhadap "surplus revaluasi aset" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain; penurunan lainnya dibebankan pada laba rugi.

Increases in the carrying amount arising on revaluation of property, plant and equipment that use revaluation model are credited to "asset revaluation surplus" as part of other comprehensive income. Decreases that offset previous increases of the same asset are debited against "asset revaluation surplus" as part of other comprehensive income; all other decreases are charged to profit or loss.

Biaya awal untuk mendapatkan hak atas tanah diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah dan biaya-biaya tersebut tidak disusutkan. Aset, kecuali tanah, disusutkan hingga mencapai estimasi nilai sisa dengan menggunakan metode garis lurus hingga mencapai estimasi nilai sisa selama masa manfaatnya sebagai berikut:

Initial costs incurred to obtain land are recognized as part of the acquisition cost of the land and these costs are not depreciated. Assets, except land, are depreciated to their residual value using the straight-line method to their residual values over their expected useful life as follows:

	2017 dan/*and 2016* **(Tahun/ *Years*)**		
Bangunan umum, waduk dan prasarana	10 - 50	10 - 50	*Buildings, reservoir and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	12 - 40	12 - 40	*Installations and power plant*
Perlengkapan transmisi	40	40	*Transmission equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	10	10	*Telecomunication and data processing equipment*
Perlengkapan umum	5	5	*General equipment*
Kendaraan bermotor	5	5	*Motor vehicles*
Material cadangan utama	10 - 50	10 - 50	*Major spare parts*

Aset sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset yang dimiliki sendiri atau jika lebih pendek, disusutkan selama periode masa sewa ketika tidak ada kepastian yang memadai bahwa Perusahaan dan entitas anak akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

Assets held under finance leases are depreciated over their expected useful lives on the same basis as owned assets or where shorter, the term of the relevant leases where there is no reasonable certainty that the Company and subsidiaries will obtain ownership at the end of the lease term.

Masa manfaat ekonomis, nilai sisa dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

The cost of maintenance and repairs are charged to consolidated statement of comprehensive income as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of property, plant and equipment, are recognized as asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi.

When property, plant and equipment are retired or otherwise disposed of, their carrying values are removed from the accounts. Any resulting gain or loss is reflected in profit or loss.

Aset yang untuk sementara waktu tidak digunakan dalam operasi dicatat sebagai bagian dari aset tetap. Aset yang sementara waktu tidak digunakan dalam operasi disusutkan dengan metode dan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.

Assets that are temporarily not used in operations are recorded as part of property, plant and equipment. Assets not used in operations are depreciated using the same method and based on the economic useful lives of the property, plant and equipment.

k. Pekerjaan Dalam Pelaksanaan
Pekerjaan dalam pelaksanaan merupakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan pembangunan aset tetap. Pekerjaan dalam pelaksanaan dinyatakan sebesar biaya perolehan, termasuk biaya pinjaman selama masa pembangunan dari pinjaman yang digunakan untuk pembangunan dan beban penyusutan aset tetap yang digunakan dalam pekerjaan pembangunan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

k. Construction in Progress
Construction in progress represents costs directly related to the construction of property, plant and equipment. Construction in progress is stated at cost, which includes borrowing costs during construction on debts incurred to finance the construction and depreciation of property and equipment that were used in the construction. Construction in progress is transferred to the respective property, plant and equipment account when completed and ready for use.

l. Properti Investasi
Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

l. Investment Properties
Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in the daily business activities.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Investment property is recognized as an asset when, and only when it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity; and the cost of the investment property can be measured reliably.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

An investment property shall be measured initially at its cost, comprises its purchase price and any directly attributable expenditure (professional fees for legal services, property transfer taxes and other transaction costs). Transaction costs are included in the initial measurement.

Setelah pengakuan awal, Perusahaan dan entitas anak memilih menggunakan model nilai wajar dan mengukur seluruh properti investasi berdasarkan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

After initial recognition, the Company and subsidiaries choose to use fair value model and measure all of its investment property at fair value. Any gain or loss arising from a change in the fair value of investment property is recognized in profit or loss for the period in which it arises.

Penentuan nilai wajar investasi didasarkan pada penilaian oleh penilai independen yang mempunyai kualifikasi profesional yang telah diakui dan relevan seta memiliki pengalaman terkini di lokasi dan kategori properti investasi yang dinilai.

The fair value of investment property is based on a valuation by an independent valuer who holds a recognized and relevant professional qualification and has recent experience in the location and category of the investment property being valued.

Pengalihan ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik dan dimulainya sewa operasi kepada pihak lain atau selesainya pembangunan atau pengembangan.

Transfer to investment property made when, and only when, there is a change in use, evidenced by end of owner-occupation and commencement of an operating lease to another party or end of construction or development.

Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

Transfer from investment property made when, and only when, there is a change in use, evidenced by commencement of owner occupation or commencement of development with a view to sale.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

An investment property is derecognized on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, and are recognized in profit or loss in the period of the retirement or disposal.

m. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Aset yang diamortisasi atau disusutkan dikaji untuk penurunan nilai jika terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat kemungkinan tidak dapat dipulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui sebesar kelebihan jumlah tercatat aset atas jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Dalam rangka menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah (unit penghasil kas). Aset non-keuangan yang mengalami penurunan nilai, ditelaah untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pembalikan penurunan nilai, pada setiap tanggal pelaporan.

Pembalikan rugi penurunan nilai, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi. Pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan didepresiasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan.

m. Impairment of Non-Financial Assets

Assets that are subject to amortization or depreciation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less cost to sell and its value-in-use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest level for which there are separately identifiable cash flows (cash generating units). Non-financial assets that have suffered an impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

Reversal on impairment loss for assets would be recognized if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal on impairment losses will be immediately recognized in profit or loss. The reversal will not result in the carrying amount of an asset that exceeds what the depreciated cost would have been had the impairment not been recognized at the date at which the impairment was reversed.

n. Sewa

Klasifikasi Sewa

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset kepada *lessee*. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Sebagai *lessor*

Sewa di mana Perusahaan dan entitas anak tidak mengalihkan secara substantial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

n. Leases

Lease Classification

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee. All other leases are classified as operating leases.

As lessor

Lessee where the Company and subsidiaries does not transfer substantially all the risks and rewards of the asset ownership are classified as operating leases.

Sebagai *lessee*
Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pengurangan dari liabilitas sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga konstan atas saldo liabilitas. Rental kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

Pembayaran sewa operasi (dikurangi dengan insentif yang diterima dari *lessor*) diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Rental kontinjen diakui dalam sewa operasi sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari beban sewa dengan dasar garis lurus, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik
Perusahaan mengadakan perjanjian jual beli tenaga listrik ("PPA") dengan PT PLN (Persero) menggunakan formula tarif yang telah ditetapkan, namun dengan tingkat ketersediaan pembangkit yang ditentukan setiap tahun.

Perusahaan menetapkan bahwa beberapa perjanjian pembelian tenaga listrik dengan Penghasil Listrik Independen (IPP) memenuhi persyaratan sebagai sewa dengan dasar bahwa Perusahaan dan IPP memiliki perjanjian *take or pay*, dimana Perusahaan mengambil lebih dari jumlah yang tidak signifikan dari seluruh listrik dan energi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik. Jenis perjanjian ini ditetapkan sebagai sewa pembiayaan dimana porsi signifikan dari risiko dan manfaat atas sejumlah pembangkit listrik telah dialihkan ke Perusahaan dengan dasar bahwa masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset dan terdapat opsi beli pada akhir masa sewa.

As lessee
Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Contingent rents are recognized as expenses in the periods in which they are incurred.

Operating lease payments (net of any incentives received from the lessor) are recognized as expenses on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset. Contingent rentals arising under operating leases are recognized as expenses in the period in which they are incurred.

In the event that lease incentives are received when entering into operating leases, such incentives are recognized as a liability. The aggregate benefit of incentives is recognized as a reduction of rental expense on a straight-line basis, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed.

Power Purchase Agreements
The Company entered into power purchase agreement ("PPA") with PT PLN (Persero) using stipulated tariff formula, but with the power plant availability factors are determined yearly.

The Company determined that certain power purchase agreements with Independent Power Producer (IPP) qualify as leases on the basis that the Company and the IPP have take or pay arrangements where the Company is taking more than an insignificant amount of electricity and energy output from the power plants. This type of arrangement is determined to be a finance lease where a significant portion of the risks and rewards of ownership of certain power plants have been transferred to the Company on the basis that the lease term is for the major part of the economic life of the assets and there is bargain purchase option at the end of the lease term.

ISAK 8, "Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa" memberikan panduan untuk menentukan apakah suatu perjanjian merupakan sewa atau mengandung sewa sehingga harus diperlakukan sesuai dengan PSAK 30 (Revisi 2011), "Sewa".

ISFAS 8, "Determining Whether an Arrangement Contains a Lease" provides guidance in determining whether an arrangement is in substance a lease that should be accounted for in accordance with SFAS 30 (Revised 2011), "Leases".

o. Perjanjian Konsesi Jasa atas Pembelian Jual Beli Tenaga Listrik ("PJBTL") dengan PLN

Perjanjian konsesi jasa adalah pengaturan di mana pemerintah atau badan lain ("*grantor*") memberikan kontrak untuk penyediaan layanan umum, seperti jalan, distribusi energi, penjara, atau rumah sakit, kepada swasta ("operator"). Hal ini sering dirujuk sebagai pengaturan "publik-ke-swasta". Jenis pengaturan publik-ke-swasta yang biasanya termasuk dalam ruang lingkup interpretasi adalah pengaturan "bangun-guna-serah". Dalam pengaturan ini, operator membangun infrastruktur yang akan digunakan untuk menyediakan layanan umum dan mengoperasikan serta memelihara infrastruktur tersebut selama jangka waktu tertentu. Operator menerima pembayaran untuk layanan mereka selama periode pengaturan. Perikatan akan mengatur standar kinerja, mekanisme penetapan harga, dan pengaturan arbitrase atas sengketa. Dalam beberapa kasus, operator dapat meningkatkan nilai infrastruktur yang ada.

Beberapa syarat yang umum pada pengaturan konsesi jasa meliputi:

- *Grantor* adalah entitas sektor publik, termasuk badan pemerintah, atau swasta dimana tanggung jawab untuk layanan telah didelegasikan.
- Operator bertanggung jawab setidaknya untuk beberapa manajemen infrastruktur dan layanan terkait sehingga tidak hanya bertindak sebagai agen atas nama *grantor*.
- Kontrak akan mengatur harga awal yang dapat dipungut oleh operator dan mengatur revisi harga selama periode pengaturan jasa.

Pengaturan PJBTL antara PLN dan Perusahaan dan entitas anak memenuhi definisi perjanjian konsesi jasa di mana PLN

o. Service Concession Arrangements on Power Purchase Agreements ("PPA") with PLN

Service concession arrangement are arrangement whereby a government or other body (the "grantor") grants contracts for the supply of public services, such as roads, energy distribution, prisons, or hospitals, to a private sector entity (the "operator"). This is often reffered to as a "public-to-private" arrangement. Typical type of public-to-private arrangement that would generally fall within the scope of interpretation is a "build-operate-transfer" arrangement. In this arrangement, an operator constructs the infrastructure that will be used to provide the public service and operates and maintains that infrastructure for a specified period of time. The operator is paid for their services over the period of the arrangement. A contract sets out performance standards, pricing mechanisms, and arrangements for arbitrating disputes. In some cases, the operator may upgrade the existing infrastructure.

Some common features of service concession arrangements include:

- *The grantor is a public sector entity, including a governmental body, or a private sector entity to which the responsibility for the service has been devolved.*
- *The operator is responsible for at least some of the management of the infrastructure and related services thus does not merely act as an agent on behalf of the grantor.*
- *The contract sets the initial prices to be levied by the operator and regulates price revisions over the period of the service arrangement.*

The PPA arrangement between PLN and the Company and subsidiary meets the definition of a service concession

bertindak sebagai *grantor* dan Perusahaan bertidak sebagai operator.

Di bawah akuntansi konsesi jasa, Perusahaan dan entitas anak tidak mengakui infrastruktur sebagai aset tetap tetapi mengakui itu sebagai aset keuangan, karena Perusahaan dan entitas anak memiliki hak tanpa syarat untuk menerima uang tunai dari PLN melalui pembayaran kapasitas sesuai dengan PJBTL. Aset keuangan dicatat sebagai "pinjaman dan piutang" sesuai dengan PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".

Perusahaan mengakui pendapatan keuangan (dari aset keuangan), jasa operasi (bahan bakar dan pemeliharaan) dan konstruksi. Perusahaan menghitung pendapatan dari jasa operasi sesuai dengan PSAK 23, "Pendapatan" dan menghitung pendapatan konstruksi sesuai dengan PSAK 34, "Kontrak Konstruksi"

arrangement where PLN acts as the grantor and the Company acts as the operator

Under service concession accounting, the Company and subsidiary does not recognize the infrastructure as property and equipment but recognizes it as a financial assets, as the Company and subsidiary has an unconditional right to receive cash from PLN through the capacity payments under the PJBTL. The financial assets is accounted as "loan and receivable" in accordance with SFAS 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement".

The Company recognizes financial revenue (from the financial asset), service operation (fuel and maintenance) and construction. The Company accounts for revenue from service operation in accordance with SFAS 23, "Revenue" and accounts for revenue from construction in accordance with SFAS 34, "Construction Contract"

p. Kas dan Setara Kas
Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Untuk kebijakan akuntansi pinjaman yang diberikan dan piutang, lihat Catatan 3.g.

p. Cash and Cash Equivalents
For cash flow presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash in hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

Restricted cash in banks and time deposits are classified as loans and receivables. Refer to Note 3.g for the accounting policy on loans and receivables.

q. Persediaan
Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak.

Di dalam penentuan nilai realisasi bersih, Perusahaan dan entitas anak tidak menurunkan nilai persediaan yang digunakan untuk produksi tenaga listrik apabila Perusahaan dan entitas anak mampu memperoleh pendapatan penjualan tenaga listrik di atas biaya perolehan persediaan tersebut.

q. Inventories
Inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is lower. Cost is determined using the moving average method.

In determining the net realizable values, the Company and subsidiaries do not write down inventories held in use for production of electricity below their costs when the Company and subsidiaries are able to sell electricity above the costs of inventories.

r. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Investasi pada Entitas Asosiasi
Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Perusahaan dan entitas anak memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas. Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya, dan nilai tercatat akan meningkat atau menurun untuk mengakui bagian investor atas laba rugi. Di dalam investasi Perusahaan dan entitas anak atas entitas asosiasi termasuk *goodwill* yang diidentifikasi ketika akuisisi.

Penghasilan dan aset dan liabilitas dari entitas asosiasi digabungkan dalam laporan keuangan konsolidasian dicatat dengan mengunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai PSAK 58 (Revisi 2009), Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian Perusahaan dan entitas anak atas laba rugi atas entitas asosiasi setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian perusahaan atas penghasilan komprehensif lainnya setelah tanggal perolehan diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya. Perubahan dan penerimaan distribusi dari entitas asosiasi setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi. Bagian Perusahaan dan entitas anak atas kerugian entitas asosiasi yang melebihi nilai tercatat dari investasi (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, secara substansi, merupakan bagian dari Perusahaan dan nilai investasi bersih entitas anak dalam entitas asosiasi) diakui hanya sebatas bahwa Perusahaan dan entitas anak telah mempunyai kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif atau melakukan pembayaran atas kewajiban entitas asosiasi.

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Perusahaan dan entitas anak dengan entitas asosiasi dieliminasi sebesar bagian Perusahaan dan entitas anak dalam entitas asosiasi. Kerugian yang

r. Investment in Associates and Joint Ventures

Investments in Associates
Associates are all entities over which the Company and subsidiaries have significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investments in associates are accounted for using the equity method of accounting. Under the equity method, the investment is initially recognized at cost and the carrying amount is increased or decreased to recognize the investor's share of the profit or the loss of the investee after the date of acquisition. The Company and subsidiaries investment in associates includes goodwill identified on acquisition.

The results of operations and assets and liabilities of associates are incorporated in these consolidated financial statements using the equity method of accounting, except when investment is classified as held for sale, in which case, it is accounted for in accordance with SFAS 58 (Revised 2009), Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations. In applying the equity method of accounting, the Company and subsidiaries' share of its associate's post-acquisition profits or losses is recognized in profit or loss and its share of post-acquisition other comprehensive income is recognized in other comprehensive income. These post-acquisition movements and distributions received from an associate are adjusted against the carrying amounts of the investment. Losses of the associates in excess of the Company and subsidiaries' interests in those associates (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Company and subsidiaries' net investment in the associate) are recognized only to the extent that the Company and subsidiaries have incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.

Unrealized gains on transactions between the Company and subsidiaries and associates are eliminated to the extent of the Company and subsidiaries interests in the associate. Unrealized losses are also

belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi akan disesuaikan, apabila diperlukan, agar konsisten dengan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak.

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan dan entitas anak menentukan apakah ada bukti objektif bahwa terdapat indikasi penurunan nilai untuk menentukan apakah perlu untuk mengakui penurunan nilai sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi Perusahaan dan entitas anak. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, jumlah tercatat investasi yang tersisa (termasuk *goodwill*) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48 (Revisi 2014), Penurunan Nilai Aset, sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual) dengan jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai yang diakui pada keadaan tersebut tidak dialokasikan pada setiap aset yang membentuk bagian dari nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi. Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 48 sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.

Perusahaan dan entitas anak menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:

(a) jika investasi menjadi entitas anak.

(b) jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Perusahaan dan entitas anak mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar.

(c) ketika Perusahaan dan entitas anak menghentikan penggunaan metode ekuitas, Perusahaan dan entitas anak mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika *investee* telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

eliminated unless the transaction provides evidence of impairment of the assets transferred. The accounting policies of the associates have been changed when necessary to ensure consistency with the accounting policy adopted by the Company and subsidiaries.

The Company and subsidiaries determine at each reporting date whether there is any objective evidence that impairment indicators exist to determine whether it is necessary to recognize any impairment loss with respect to the Company and subsidiaries' investment in an associate. If impairment indicators exist, the entire carrying amount of the investment (including goodwill) is tested for impairment in accordance with SFAS 48 (Revised 2014), Impairment of Assets, as a single asset by comparing its recoverable amount (higher of value in use and fair value less costs to sell) with its carrying amount. Any impairment loss recognized forms part of the carrying amount of the investment. Any reversal of that impairment loss is recognized in accordance with SFAS 48 to the extent that the recoverable amount of the investment subsequently increases.

The Company and its subsidaries discontinue the use of the equity method from the date when its investment ceases to be an associate as follows:

(a) if the investment becomes a subsidiary.

(b) If the retained interest in the former associate is a financial asset, the Company and its subsidaries measure the retained interest at fair value

(c) When the Company and its subsidaries discontinue the use of the equity method, the Company and its subsidaries account for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that investment on the same basis as would have been required if the investee had directly disposed of the related assets or liabilities.

Ketika Perusahaan dan entitas anak melakukan transaksi dengan entitas asosiasi, keuntungan dan kerugian dieliminasi sebesar kepentingan mereka dalam entitas asosiasi.

When the Company and subsidiaries transact with an associate, profits and losses are eliminated to the extent of their interest in the relevant associate.

Bagian partisipasi dalam ventura bersama
Menurut PSAK 66 (Revisi 2015), pengaturan bersama diklasifikasikan sebagai operasi bersama atau ventura bersama bergantung pada hak dan kewajiban kontraktual para investor. Perusahaan dan entitas anak telah menilai sifat dari pengaturan bersama dan menentukan pengaturan tersebut sebagai ventura bersama.

Interest in joint ventures
Under SFAS 66 (Revised 2015), investments in joint arrangements are classified as either joint operations or joint ventures depending on the contractual rights and obligations of each investor. The Company and subsidiaries have assessed the nature of its joint arrangements and determined them to be joint ventures.

Hasil operasi, aset dan liabilitas dari ventura bersama disajikan dalam laporan keuangan menggunakan metode ekuitas. Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian perusahaan dan entitas anak atas laba rugi atas ventura bersama setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian perusahaan atas penghasilan komprehensif lainnya setelah tanggal perolehan diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya. Perubahan dan penerimaan distribusi dari ventura bersama setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi.

The result of operations and assets and liabilities of a joint venture are incorporated in these financial statements using the equity method. In applying the equity method of accounting, the company and subsidiaries' share of its joint venture's post-acquisition profits or losses is recognized in profit or loss and its share of post-acquisition other comprehensive income is recognized in other comprehensive income. These post-acquisition movements and distributions received from a joint venture are adjusted against the carrying amounts of the investment.

Jika bagian Perusahaan dan entitas anak atas rugi ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya pada ventura bersama, termasuk piutang tidak lancar tanpa jaminan, maka perusahaan menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut, kecuali Perusahaan dan entitas anak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atau telah melakukan pembayaran atas nama ventura bersama.

When the Company and subsidiaries' share of the losses of a joint venture equals or exceeds its interest in the joint venture, including any other unsecured non-current receivables, the Company does not recognize further losses, unless it has obligations to make or has made payments on behalf of the joint venture.

Penyesuaian dibentuk terhadap laporan keuangan konsolidasian untuk mengeliminasi bagian Perusahaan dan entitas anak atas keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas transaksi antara Perusahaan dan entitas anak dan ventura bersama. Ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas sampai dengan tanggal dimana Perusahaan dan entitas anak kehilangan pengaturan bersama atas entitas yang diatur bersama.

Adjustments are made in the consolidated financial statements to eliminate the Company and subsidiaries' share of unrealized gains and losses on transactions between the Company and subsidiaries and the joint ventures. The joint ventures are carried at equity method until the date on which the Company and subsidiaries cease to have joint arrangements over the joint ventures.

Kebijakan akuntansi ventura bersama telah diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dari kebijakan yang diterapkan oleh Perusahaan dan entitas anak.

Perusahaan dan entitas anak mengukur dan mengakui sisa investasi pada nilai wajar setelah hilangnya pengendalian dan ventura bersama tidak menjadi entitas anak atau entitas asosiasi. Selisih antara nilai tercatat atas hilangnya ventura bersama dengan agregat nilai wajar sisa investasi dan hasil pelepasan diakui pada laba rugi. Ketika sisa investasi mempunyai pengaruh yang signifikan, investasi tersebut dicatat sebagai investasi pada entitas asosiasi.

Accounting policies of the joint ventures have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Company and subsidiaries.

The Company and subsidiaries measure and recognize the remaining investment at fair value upon loss of control, provided the joint ventures do not become subsidiaries or associates. Any difference between the carrying amount of the joint ventures upon loss of control and the aggregate of the fair value of the remaining investment and proceeds from disposal is recognized in profit or loss. When the remaining investment constitutes significant influence, it is accounted for as investment in an associate.

s. Aset Tak Berwujud

i. Biaya Pengembangan Piranti Lunak
Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada desain dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak diakui sebagai aset tak berwujud. Biaya pengembangan piranti lunak komputer diakui sebagai aset yang diamortisasi dengan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaatnya.

ii. Biaya Legal Terkait Pembaruan Hak Atas Tanah
Biaya legal terkait dengan pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak.

Setelah pengakuan awal, aset tak berwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Umur manfaat aset tak berwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas.

s. Intangible Assets

i. Software Development Cost
Costs associated with maintaining computer software programs are recognized as an expense as incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Company. and subsidiaries are recognized as intangible assets. Computer software development costs recognized as assets are amortized using the straight line method over their estimated useful lives.

ii. Legal Costs to Renew Land Rights

Legal costs related to renewal of land rights are recognized as intangible assets and amortized over the period of the land rights.

After initial recognition, intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and any accumulated impairment loss. The useful life of intangible asset is assessed to be either finite or indefinite.

Aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas
Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi selama umur manfaat ekonomi dengan metode garis lurus (atau metode lainya sepanjang mencerminkan pola manfaat ekonomik masa depan yang diperkirakan dikonsumsi oleh entitas).

Biaya Pengembangan Piranti Lunak diamortisasi dengan tingkat amortisasi sebesar 20% dengan metode garis lurus.

Biaya legal terkait pembaruan hak atas tanah diamortisasi sepanjang mana yang lebih pendek antara masa berlaku hukum hak atau umur ekonomi tanah.

Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir tahun buku.

Aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas
Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi. Umur manfaat aset takberwujud yang tidak diamortisasi ditelaah setiap tahun untuk menentukan apakah peristiwa dan keadaan dapat terus mendukung penilaian bahwa umur manfaat tetap tidak terbatas. Jika tidak, perubahan umur manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas diterapkan secara prospektif.

Aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan kapanpun terdapat suatu indikasi bahwa aset tak berwujud mungkin mengalami penurunan nilai.

t. Pengakuan Pendapatan dan Beban
Penjualan Tenaga Listrik
Pendapatan penjualan tenaga listrik diakui berdasarkan energi listrik (kWh) yang dipasok kepada PT PLN (Persero) dengan menggunakan formula tarif yang ditetapkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Formula tarif mencakup perhitungan komponen harga kapasitas, harga tetap operasi dan pemeliharaan, harga bahan bakar, tingkat pasokan energi serta variabel lainnya.

Intangible asset with finite useful life

Intangible asset with finite life is amortized over the economic useful life by using a straight-line method (or other method as it reflects the pattern in which the asset's future economic benefits are expected to be consumed by the entity).

Software Development Cost is amortized with amortization rate of 20% using straight-line method.

Legal costs to renew land rights are amortized over the validity period of the legal rights or the economic life of the land, whichever the shorter.

The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at each financial year end.

Intangible asset with indefinite useful life

Intangible asset with indefinite useful life is not amortized. The useful life of an intangible asset that is not being amortized is reviewed annually to determine whether events and circumstances continue to support an indefinite useful life assessment for that asset. If they do not, the change in the useful life assessment from indefinite to finite is accounted for on a prospective basis.

Intangible asset with indefinite useful life is tested for impairment annually and whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired.

t. Revenue and Expense Recognition
Sale of Electricity
Sale of electricity is recognized based on the supply of electricity energy (kWh) to PT PLN (Persero) using tariff formula stipulated in the power purchase agreements. The tariff formula includes calculation of capacity component, fixed cost for operations and maintenance components, fuel costs, power supply levels and other variables.

Pendapatan Bunga
Pendapatan bunga diakru berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok terutang dan tingkat bunga yang berlaku.

Interest Income
Interest revenue is accrued on timely basis, by reference to the principal outstanding and at the applicable interest rate.

Beban
Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

Expenses
Expenses are recognized as incurred on an accrual basis.

u. Imbalan Kerja

Imbalan Pascakerja
Perusahaan dan entitas anak menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetap yang memenuhi syarat. Perusahaan dan entitas anak juga memberikan imbalan pascakerja lain tanpa pendanaan kepada karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan entitas anak.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya pada saat terjadinya.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi.

Imbalan Kerja Jangka Panjang
Perhitungan imbalan kerja jangka panjang ditentukan dengan menggunakan *Projected Unit Credit*. Biaya jasa lalu diakui segera

u. *Employee Benefits*

Post-employment Benefits
The Company and subsidiaries have established a defined benefit pension plan covering all of their eligible permanent employees. The Company and subsidiaries also provide other unfunded defined post-employment benefit plans for their qualifying employees based on the Company and subsidiaries' policies.

The liability recognized in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the Projected Unit Credit Method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds (considering currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

Past-service costs are recognized immediately in profit or loss.

Long-term Benefits
Long-term benefits are determined using the Projected Unit Credit Method. Past service costs are recognized immediately in

dalam laba rugi. Perusahaan dan entitas anak mengakui keuntungan dan kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi. Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

profit or loss. The Company and subsidiaries recognized gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan when the curtailment or settlement occurs. The gain or loss on a curtailment or settlement of a defined benefit plan is recognized in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lain periode terjadinya.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions charged to other comprehensive income in the periode in which they occur.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan kerja jangka panjang di laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini liabilitas imbalan kerja pasti.

The long-term employee benefits liabilities recognized in the consolidated statement of financial position represents the present value of the defined benefit obligation.

v. Provisi

Provisi diakui ketika Perusahaan dan entitas anak memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Perusahaan dan entitas anak diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

v. Provisions

Provisions are recognized when the Company and subsidiaries have a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event and it is probable that the Company and subsidiaries will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik dari pertimbangan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

w. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Beban pajak kini

w. Income Tax

Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax expense is

ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

determined based on the taxable profit for the year computed using the prevailing tax rates.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laporan laba rugi atau yang timbul dari akuntansi awal atau kombinasi bisnis. Dalam kasus kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

Current and deferred taxes are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside profit or loss, or where they arise from the initial accounting for a business combination. In the case of a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

Untuk pendapatan yang menjadi subjek pajak penghasilan final, beban pajak diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan akuntansi yang diakui dan disajikan dalam sebagai bagian dari akun beban operasional pada tahun berjalan dikarenakan pajak tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai pajak penghasilan.

For income which is subject to final tax, tax expenses are recognized proportionally with the accounting revenue recognized and presented as part of the operating expenses account in the current year as such tax does not satisfy the criteria of income tax.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognized as a liability. If the amounts already paid in respect of current and prior periods exceed the amounts due for those periods, the excess shall be recognized as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:
a) pengakuan awal *goodwill*; atau
b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:
a) the initial recognition of goodwill; or
b) the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the consolidated financial statement carrying amounts of assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences can be utilized.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan dan entitas anak ekspektasikan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

The measurement of deferred tax assets and deferred tax liabilities reflects the consequences that would follow from the manner in which the Company and subsidiaries expect, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus, jika dan hanya jika, ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan ketika liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama serta Perusahaan dan entitas anak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Deferred tax assets and liabilities are offset, if and only if, when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority and the Company and subsidiaries intend to settle their current tax assets and current tax liabilities on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

x. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Aset Pengampunan Pajak dan Liabilitas Pengampunan Pajak diakui pada saat Surat Keterangan Pengampunan Pajak ("SKPP") diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan tidak diakui secara neto (saling hapus). Selisih antara Aset Pengampunan Pajak dan Liabilitas Pengampunan Pajak diakui sebagai Tambahan Modal Disetor.

Aset Pengampunan Pajak pada awalnya diakui sebesar nilai yang disetujui dalam SKPP.

Liabilitas Pengampunan Pajak pada awalnya diakui sebesar nilai kas dan setara kas yang masih harus dibayarkan oleh Perusahaan sesuai kewajiban kontraktual atas perolehan Aset Pengampunan Pajak.

Uang tebusan yang dibayarkan oleh Perusahaan untuk memperoleh pengampunan pajak diakui sebagai beban pada periode dimana SKPP diterima oleh Perusahaan.

Setelah pengakuan awal, Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak diukur sesuai dengan SAK yang relevan sesuai dengan klasifikasi masing-masing Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak.

x. Tax Amnesty Assets and Liabilities

Tax Amnesty Assets and Liabilities are recognized upon the issuance of Tax Amnesty Approval Letter ("TAAL") by the Minister of Finance of Republic of Indonesia, and they are not recognized as net amount (offset). The difference between Tax Amnesty Assets and Tax Amnesty Liabilities are recognized as Additional Paid-in Capital.

Tax Amnesty Assets are initially recognized at the value stated in TAAL.

Tax Amnesty Liabilities are initially measured at the amount of cash or cash equivalents to be settled by the Company according to the contractual obligation with respect to the acquisition of respective Tax Amnesty Assets.

The compensation paid by the Company to obtain the tax amnesty is recognized as expense in the period in which the Company receives TAAL.

After initial recognition, Tax Amnesty Assets and Liabilities are measured in accordance with respective relevant SAKs according to the classification of each Tax Amnesty Assets and Liabilities.

Sehubungan dengan Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak yang diakui, Perusahaan dan entitas anak telah mengungkapkan dalam laporan keuangannya:
a. Tanggal SKPP
b. Jumlah yang diakui sebagai Aset Pengampunan Pajak sesuai SKPP; dan
c. Jumlah yang diakui sebagai Liabilitas Pengampunan Pajak.

With respect to Tax Amnesty Assets and Liabilities recognized, the Company and subsidiaries have disclosed the following in its financial statements:

a. The date of TAAL
b. Amount recognized as Tax Amnesty Assets in accordance with TAAL; and
c. Amount recognized as Tax Amnesty Liabilities.

y. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba yang diatribusikan kepada pemilik induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan menyesuaikan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang dimiliki perusahaan. Perusahaan tidak memiliki efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

y. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing income for the year of attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share are calculated by adjusting the weighted average number of ordinary shares outstanding to assume conversion of all dilutive potential ordinary shares owned by the Company. The Company does not have any dilutive potential ordinary shares.

4. Pertimbangan Kritis Akuntansi dan Estimasi Akuntansi yang Signifikan

Dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diharuskan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang nilai aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari direviu secara berkelanjutan. Revisi terhadap estimasi akuntansi akan diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi, jika revisi tersebut hanya berpengaruh terhadap periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode berikutnya jika revisi tersebut mempengaruhi periode tersebut.

4. Critical Accounting Judgments and Estimates

In the application of the Company and subsidiaries' accounting policies, which are described in Note 3, the management is required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 3, Perusahaan dan entitas anak telah menentukan hal-hal berikut yang memerlukan pertimbangan signifikan:

Nilai Wajar Pembangkit Listrik di Dalam Sewa Pembiayaan

Sejumlah aset tetap dicatat berdasarkan sewa pembiayaan menurut PSAK 30. Pada saat dimulainya sewa, Perusahaan mengakui aset dan liabilitas sewa pembiayaan sebesar nilai wajar pembangkit listrik yang disewa atau, jika lebih rendah, nilai kini dari pembayaran sewa minimum, yang ditentukan pada awal masa sewa.

Perusahaan menetapkan nilai wajar dari pembangkit listrik yang disewa dengan menerapkan teknik penilaian yang sesuai dan asumsi-asumsi yang memadai, termasuk estimasi biaya yang perlu dikeluarkan untuk membangun pembangkit listrik terkait, suku bunga implisit dalam sewa dan nilai sisa aset pada masa akhir kontrak. Perubahan-perubahan selanjutnya atas asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar pada awal masa sewa tidak akan merubah nilai aset pembiayaan di masa mendatang.

Kepentingan dalam pengaturan bersama

Pertimbangan diperlukan untuk menentukan ketika Perusahaan dan entitas anak memiliki pengendalian bersama, yang membutuhkan penilaian mengenai aktivitas yang relevan dan ketika keputusan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut membutuhkan persetujuan dengan suara bulat. Perusahaan dan entitas anak menentukan bahwa aktivitas yang relevan untuk pengaturan bersama adalah aktivitas yang berkaitan dengan operasi dan pengambilan keputusan dalam pengaturan tersebut.

Pertimbangan juga diperlukan untuk mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai pengendalian bersama atau ventura bersama. Pengklasifikasian pengaturan tersebut mengharuskan Perusahaan dan entitas anak untuk menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan tersebut. Secara khusus, Perusahaan dan entitas anak mempertimbangkan:

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

In the process of applying the accounting policies described in Note 3, the Company and subsidiaries have identified the following matters under which significant judgments are made:

Fair Value of Power Plants Held Under Finance Lease

A number of property, plant and equipment are recorded based on finance lease arrangement, in accordance with SFAS 30. At the commencement of the lease, the Company recognizes the finance leased asset and liability at an amount equal to the fair value of the power plant or, if lower, the present value of the minimum lease payments, determined at the inception of the lease.

The Company determined the fair value of the finance leased power plant by applying the appropriate valuation techniques and assumptions, including the expected cost to build the power plant, the implicit interest rate of the lease and the residual value of the asset at the end of the contract. Any subsequent changes to the assumptions used to measure fair value at inception do not affect the subsequent measurement amount of the leased asset.

Joint Arrangements

Judgement is required to determine when the Company and subsidiaries have joint control, which requires an assessment of the relevant activities and when the decisions in relation to those activities require unanimous consent. The Company and subsidiaries' have determined that the relevant activities for its joint arrangements are those relating to the operating and capital decisions of the arrangement.

Judgement is also required to classify a joint arrangement as either a joint operation or a joint venture. Classifying the arrangement requires the Company and subsidiaries to assess its rights and obligations arising from the arrangement. Specifically, it considers:

- Struktur dari pengaturan bersama - apakah dibentuk melalui kendaraan terpisah

- Ketika pengaturan tersebut terstruktur melalui kendaraan terpisah, Perusahaan dan entitas anak juga mempertimbangkan hak dan kewajiban yang timbul dari:
  - Bentuk legal dari kendaraan terpisah
  - Persyaratan dari perjanjian kontraktual; dan
  - Fakta dan kondisi lain (ketika relevan)

Penilaian ini sering membutuhkan pertimbangan yang signifikan, dan kesimpulan yang berbeda mengenai pengendalian bersama dan apakah pengaturan tersebut merupakan operasi bersama atau ventura bersama, dapat memiliki dampak material terhadap akuntansi.

Perusahaan dan entitas anak memiliki pengaturan bersama yang terstruktur melalui ventura bersama, PT Rajamandala Electric Power, PT Perta Daya Gas dan PT Indo Raya Tenaga. Struktur dan persyaratan dari perjanjian kontraktual mengindikasikan bahwa Perusahaan dan entitas anak memiliki hak atas aset bersih dari pengaturan bersama tersebut. Perusahaan dan entitas anak menilai fakta dan kondisi lain yang berkaitan dengan pengaturan ini dan kesimpulan final dari penilaian yang dilakukan adalah pengaturan tersebut merupakan ventura bersama (Catatan 9).

Sumber Estimasi Ketidakpastian
Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Rugi Penurunan Nilai Pinjaman Diberikan dan Piutang
Perusahaan dan entitas anak menilai penurunan nilai pinjaman diberikan dan piutang pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi. Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang direviu secara berkala

- *The structure of the joint arrangement - whether it is structured through a separate vehicle*
- *When the arrangement is structured through a separate vehicle, the Company and subsidiaries also considers the rights and obligations arising from:*
  - *The legal form of the separate vehicle*
  - *The terms of the contractual arrangement; and*
  - *Other facts and circumstances (when relevant)*

This assessment often requires significant judgement, and a different conclusion on joint control and also whether the arrangement is a joint operation or a joint venture, may materially impact the accounting.

The Company and subsidiaries has a joint arrangement which is structured through joint ventures, PT Rajamandala Electric Power, PT Perta Daya Gas and PT Indo Raya Tenaga. These structure and the terms of the contractual arrangement indicate that the Company and subsidiaries have rights to the net assets of the arrangements. The Company and subsidiaries also assessed the other facts and circumstances relating to these arrangements and the final conclusions were that the arrangement was joint ventures (Note 9).

Key Sources of Estimation Uncertainty
The key assumptions concerning future and other key sources of estimation at the end of the reporting period, which have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are discussed below:

Impairment Loss on Loans and Receivables

The Company and subsidiaries assess their loans and receivables for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes a judgement as to whether there is an objective evidence that the loss event has occurred. Management also makes judgement as to the methodology and assumptions for estimating the amount and timing of future cash flows which are reviewed

untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya. Nilai tercatat pinjaman diberikan dan piutang diungkapkan dalam Catatan 13.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 6.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan nilai tercatat aset tetap.

Nilai Wajar Aset Tetap yang Menggunakan Model Revaluasi
Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan dan entitas anak melakukan perubahan kebijakan akuntansi dari model biaya menjadi model revaluasi untuk kelas aset tertentu. Pelaksanaan revaluasi aset tetap tersebut dilakukan oleh penilai publik independen.

Dalam proses penilaian, manajemen, dengan bantuan penilai publik independen, menentukan data dan asumsi, menelaah metode penilaian serta berdiskusi dengan penilai. Pendekatan dan metode yang digunakan dalam melakukan revaluasi tergantung pada kelas aset. Walaupun data dan asumsi Perusahaan dan entitas anak dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada data input atau asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap nilai aset yang menggunakan model revaluasi.

Nilai wajar aset tetap yang menggunakan model revaluasi diungkapkan dalam Catatan 6.

Imbalan Pascakerja
Penentuan liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Perusahaan dan entitas anak diakumulasi dan diamortisasi selama periode mendatang dan akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah biaya serta liabilitas yang diakui di masa mendatang. Walaupun asumsi Perusahaan dan entitas anak

regularly to reduce any difference between loss estimate and actual loss. The carrying amount of loans and receivables are disclosed in Notes 13.

Estimated Useful Lifes of Property, Plant and Equipment
The carrying amounts of property, plant and equipment is disclosed in Notes 6.

A change in the estimated useful life of any item of property, plant and equipment would affect the recorded depreciation expense and the carrying values of property, plant and equipment.

Fair Value of Property, plant and equipment that Use Revaluation Model
On December 31, 2015, the Company and subsidiaries changed their accounting policy from cost model to revaluation model for certain class of assets. The property, plant and equipment revaluation was performed by an independent public valuer.

Management, with the assistance of independent public valuer, determines the data inputs and assumption, assesses valuation method and hold discussions with the valuers as part of the valuation process. The approaches and methods used in the revaluation depend on the assets class. While it is believed that the Company and subsidiaries' data and assumptions are reasonable and appropriate, significant changes in data inputs or significant changes in assumptions may materially affect the value of assets that use revaluation model.

Fair value of property, plant and equipment that use revaluation model are disclosed in Note 6.

Post-Employment Benefits
The determination of the post-employment benefits is dependent on the selection of certain assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Company and subsidiaries' assumptions are accumulated and amortized over future periods and therefore, generally affect the recognized expense and liabilities recorded in such future periods. While it is believed that the Company and subsidiaries' assumptions are reasonable

dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pascakerja Perusahaan dan entitas anak.

and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the Company and subsidiaries' post-employment benefit.

Asumsi yang digunakan untuk perhitungan liabilitas imbalan pascakerja diungkapkan dalam Catatan 32.

Assumptions used in the calculation of post-employment benefit obligations are disclosed in Note 32.

Pajak Penghasilan

Perhitungan beban pajak penghasilan Perusahaan dan entitas anak memerlukan pertimbangan dan asumsi dalam menentukan pengurangan beban tertentu selama proses pengestimasian. Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ("DJP"). Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Perusahaan dan entitas anak, melalui negosiasi dengan otoritas pajak yang relevan dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Income Taxes

The calculations of income tax expense for the Company and subsidiaries require judgements and assumptions in determining the deductibility of certain expenses during the estimation process. All judgement and estimates made by management may be challenged by the Directorate General of Taxation ("DGT"). As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution *of tax positions taken by the Company and subsidiaries, through negotiations with the relevant tax authorities can take several years to complete and in some cases it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the year in which this determination is made.*

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal dan perbedaan temporer, diakui apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi atas pembentukan laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat penjualan dan biaya-biaya terkait yang terdapat risiko ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi tersebut akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward and temporary differences, are recognized only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. The assumptions about the generation of future taxable profits are heavily affected by management's estimates of the expected sales level and the associated costs which are subject to risk and uncertainty and hence there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.

5. Entitas Anak / 5. *Subsidiaries*

Perusahaan memiliki saham entitas anak baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

The Company has ownership interests, directly or indirectly, in the following subsidiaries:

Entitas anak/ *Subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Jenis usaha/ *Nature of business*	Persentase pemilikan/ *Percentage of Ownership* 2017 %	Persentase pemilikan/ *Percentage of Ownership* 2016 %	Tahun operasi komersial/ *Year of commercial operations*	Jumlah aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination *)* 2017 Rp	Jumlah aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination *)* 2016 Rp
PT Cogindo DayaBersama ("CDB")	Jakarta	*Cogeneration*, pemasok energi, jasa pelayanan dan manajemen/ *Cogeneration, energy distribution, energy service and management*	99.99	99.99	1999	1,041,329	914,789
PT Artha Daya Coalindo ("ADC")	Jakarta	Perdagangan dan jasa pengangkutan batu bara/ *Trade and coal transportation services*	80.00	80.00	1998	378,228	182,293
PT Indo Ridlatama Power ("IRP")	Kutai	Pembangkitan tenaga listrik/ *Power generation*	90.00	93.96	**)	1,186,996	607,127
PT Indo Tenaga Hijau ("ITH")	Jakarta	Pengembangan energi baru dan terbarukan/ *Development of new and renewable energy*	95.21	95.21	**)	81,725	83,708
PT Putra Indotenaga ("PIT")	Jakarta	Ketenagalistrikan dan energi/ *Electricity and energy*	99.99	99.99	2016	710,660	417,310

*) Dalam jutaan Rupiah / *Stated in millions of Rupiah*
**) Dalam tahap pengembangan/ *Under development stage*

Pada tahun 2016, Perusahaan melakukan penambahan penyertaan saham di ADC sebesar Rp15.000 yang meningkatkan modal disetor Perusahaan di ADC menjadi Rp24.000 atau setara 80% saham ADC.

In 2016, the Company increased their additional shares to ADC amounted Rp15,000 which increases the Company's paid up capital in ADC to become Rp24,000 equivalent of 80% shares in ADC.

Pada tahun 2017, berdasarkan akta No. 33 tanggal 7 November 2017 dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. notaris di Jakarta, PT Tangkuban Parahu Geothermal Power, berganti nama menjadi ITH serta menambah lingkup usahanya di bidang pengusahaan energi baru dan/ atau terbarukan.

In 2017, by notarial deed No. 33 dated November 7, 2017 of Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. notary in Jakarta, PT Tangkuban Parahu Geothermal Power, changed its name to ITH and expand the scope of its business in new and/or renewable energy.

Pada tahun 2017, Perusahaan menambah penyertaan saham di PIT sebesar Rp278.957 tanpa mengubah persentase kepemilikan.

In 2017, the Company increased additional shares to PIT amounted to Rp278,957 without changes in percentage of ownership.

Pada tahun 2016, Perusahaan melakukan penambahan penyertaan saham di IRP sebesar Rp135.000 yang meningkatkan modal disetor Perusahaan di IRP menjadi Rp337.035 atau setara 93,96% saham IRP.

In 2016, the Company increased their additional shares to IRP amounted Rp135,000 which increases the Company's paid up capital in IRP to become Rp337,035 equivalent of 93.96% shares in IRP.

Pada tahun 2017, Perusahaan dan PT Ridlatama Bangun Mandiri, pihak non-pengendali, melakukan penambahan penyertaan saham di IRP masing-masing sebesar Rp22.965 dan Rp18.333. Penambahan penyertaan saham ini mengubah kepemilikan Perusahaan di IRP menjadi 90%.

In 2017, the Company and PT Ridlatama Bangun Mandiri, non-controlling party, increased their share ownership in IRP amounted to Rp22,965 and Rp18,333, respectively. Increased in shares of ownership changed the Company's percentage of ownership to 90%.

6. Aset Tetap / 6. *Property, Plant and Equipment*

	2017					
	Saldo awal/ *Beginning balance* Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deductions* Rp	Reklasifikasi/ *Reclassification* Rp	Saldo akhir/ *Ending balance* Rp	
Biaya perolehan/ revaluasi						***Acquisition cost/ revaluation***
Pemilikan langsung						*Direct acquisitions*
Tanah	16,313,495	16,792	–	(178,317)	16,151,970	*Land*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	6,967,878	83,266	–	(556,184)	6,494,960	*Buildings, reservoir and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	167,097,755	1,131,198	–	(56,971,345)	111,257,608	*Installation and power plant*
Perlengkapan transmisi	6,331,788	83,893	–	(1,174,728)	5,240,953	*Transmission equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	50,142	17,964	–	9,128	77,234	*Telecommunication and data processing equipment*
Perlengkapan umum	825,208	53,469	–	(318,951)	559,726	*General equipment*
Kendaraan bermotor	63,161	20	–	(35,814)	27,367	*Motor vehicles*
Material cadangan utama	224,227	–	–	(24,536)	199,691	*Major spare parts*
Subjumlah	197,873,654	1,386,602	–	(59,250,747)	140,009,509	*Subtotal*
Aset sewaan						*Leased assets*
Instalasi dan mesin pembangkit	490,646	–	–	–	490,646	*Installation and power plant*
Pekerjaan dalam pelaksanaan	872,324	2,877,921	639,235	(1,131,380)	1,979,630	*Construction in progress*
Aset tidak digunakan dalam operasi	607,038	620,836	756,310	4,293,853	4,765,417	*Assets not used in operation*
Jumlah	199,843,662	4,885,359	1,395,545	(56,088,274)	147,245,202	*Total*
Akumulasi penyusutan/ akumulasi penurunan nilai						***Accumulated depreciation/ accumulated impairment***
Pemilikan langsung						*Direct acquisitions*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	313,959	317,547	–	(28,665)	602,841	*Buildings, reservoir and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	4,148,659	2,975,782	–	(1,293,215)	5,831,226	*Installation and power plant*
Perlengkapan transmisi	143,246	243,507	–	(163,924)	222,829	*Transmission equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	11,107	5,814	–	2,624	19,545	*Telecommunication and data processing equipment*
Perlengkapan umum	664,564	70,512	–	(352,679)	382,397	*General equipment*
Kendaraan bermotor	48,291	3,942	–	(37,408)	14,825	*Motor vehicles*
Material cadangan utama	75,110	10,120	–	(5,129)	80,101	*Major spare parts*
Subjumlah	5,404,936	3,627,224	–	(1,878,396)	7,153,764	*Subtotal*
Aset sewaan						*Leased assets*
Instalasi dan mesin pembangkit	357,762	61,331	–	–	419,093	*Installation and power plant*
Aset tidak digunakan dalam operasi	560,074	283,494	699,928	4,435,887	4,579,527	*Assets not used in operation*
Jumlah	6,322,772	3,972,049	699,928	2,557,491	12,152,384	*Total*
Jumlah tercatat	**193,520,890**				**135,092,818**	***Net carrying value***

	2016					
	Saldo awal/ *Beginning balance* Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deductions* Rp	Reklasifikasi/ *Reclassification* Rp	Saldo akhir/ *Ending balance* Rp	
Biaya perolehan/ revaluasi						***Acquisition cost/ revaluation***
Pemilikan langsung						*Direct acquisitions*
Tanah	16,313,124	371	–	–	16,313,495	*Land*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	6,810,717	94,221	–	62,940	6,967,878	*Buildings, reservoir and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	166,829,110	333,966	–	(65,321)	167,097,755	*Installation and power plant*
Perlengkapan transmisi	5,829,775	300,323	–	201,690	6,331,788	*Transmission equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	36,716	6,289	–	7,137	50,142	*Telecommunication and data processing equipment*
Perlengkapan umum	771,933	50,988	–	2,287	825,208	*General equipment*
Kendaraan bermotor	49,543	13,618	–	–	63,161	*Motor vehicles*
Material cadangan utama	232,895	–	–	(8,668)	224,227	*Major spare parts*
Subjumlah	196,873,813	799,776	–	200,065	197,873,654	*Subtotal*
Aset sewaan						*Leased assets*
Instalasi dan mesin pembangkit	490,646	–	–	–	490,646	*Installation and power plant*
Pekerjaan dalam pelaksanaan	331,041	1,027,814	–	(486,531)	872,324	*Construction in progress*
Aset tidak digunakan dalam operasi	894,538	–	573,966	286,466	607,038	*Assets not used in operation*
Subjumlah	1,716,225	1,027,814	573,966	(200,065)	1,970,008	*Subtotal*
Jumlah	198,590,038	1,827,590	573,966	–	199,843,662	*Total*
Akumulasi penyusutuan/ akumulasi penurunan nilai						***Accumulated depreciation accumulated impairment***
Pemilikan langsung						*Direct acquisitions*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	–	313,959	–	–	313,959	*Buildings, reservoir and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	–	4,208,504	–	(59,845)	4,148,659	*Installation and power plant*
Perlengkapan transmisi	–	143,246	–	–	143,246	*Transmission equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	–	11,107	–	–	11,107	*Telecommunication and data processing equipment*
Perlengkapan umum	612,699	51,865	–	–	664,564	*General equipment*
Kendaraan bermotor	46,522	1,769	–	–	48,291	*Motor vehicles*
Material cadangan utama	68,186	15,592	–	(8,668)	75,110	*Major spare parts*
Subjumlah	727,407	4,746,042	–	(68,513)	5,404,936	*Subtotal*
Aset sewaan						*Leased assets*
Instalasi dan mesin pembangkit	296,431	61,331	–	–	357,762	*Installation and power plant*
Aset tidak digunakan dalam operasi	821,076	198,931	528,446	68,513	560,074	*Assets not used in operation*
Jumlah	1,844,914	5,006,304	528,446	–	6,322,772	*Total*
Jumlah tercatat	**196,745,124**				**193,520,890**	***Net carrying value***

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated to the following:

	2017 Rp	2016 Rp	
Beban usaha	3,688,555	4,807,373	*Operating expenses*
Beban lain-lain	283,494	198,931	*Others*
Jumlah	**3,972,049**	**5,006,304**	***Total***

Pada tahun 2017, Perusahaan mereklasifikasi aset tetap dengan jumlah tercatat sebesar Rp53.889.508 ke aset keuangan dari konsesi jasa (Catatan 8).

In 2017, the Company reclassified property, plant and equipment with carrying value of Rp53,889,508 to financial asset of service concession (Note 8).

Perusahaan memiliki beberapa bidang tanah dengan hak legal berupa Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan ("HGB"). Hak Pakai tidak mempunyai jangka waktu sedangkan HGB Perusahaan jatuh tempo antara tahun 2018 sampai dengan 2034, tetapi dapat diperpanjang. Perusahaan juga mempunyai beberapa bidang tanah yang sedang dalam proses perpanjangan HGB dan pengurusan balik nama menjadi atas nama Perusahaan.

The Company own several pieces of land with Rights to Use and Building Use Rights ("HGB"). Rights to Use have no expiration date while HGB will expire from 2018 to 2034, but they are renewable by the Company. The Company also have several land, which are still in an extension process and in the process of transfer of certificate to the name of the Company.

Instalasi mesin pembangkit serta perlengkapan transmisi diasuransikan kepada beberapa perusahaan asuransi yaitu PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), pihak berelasi dan PT Asuransi Tugu Kresna Pratama terhadap risiko kebakaran dan kemungkinan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar US$4.455.742.928 (setara dengan Rp60.366.405) dan Rp576.040 pada tanggal 31 Desember 2017. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Power plant installations and transmission equipments were insured to several insurance companies against fire and other possible risks with PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), a related party and PT Asuransi Tugu Kresna Pratama with insurance coverage of US$4,455,742,928 (equivalent to Rp60,366,405) and Rp576,040 as of December 31, 2017. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Aset sewaan merupakan pembangkit tenaga listrik berdasarkan perjanjian dengan kerja sama operasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk – PT Mirlindo Padu Kencana dalam bentuk sewa pembiayaan.

Leased assets represents power plants under joint operation agreement with PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Mirlindo Padu Kencana which were accounted for as lease liabilities.

Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah tercatat bruto dari aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan sebesar Rp777.739.

As of December 31, 2017, gross carrying amount of property, plant and equipment that have been fully depreciated and still in used amounted to Rp777,739.

Pada tahun 2017, manajemen mengkategorikan beberapa aset tetap menjadi aset tidak digunakan dalam operasi berdasarkan pertimbangan tingkat efisiensi dan keekonomisan aset tersebut. Nilai aset tersebut telah disesuaikan ke nilai terpulihkan. Penyesuian tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan mengurangi jumlah akumulasi surplus revaluasi dalam ekuitas.

In 2017, management categorizes several property, plant and equipment into assets not used in operations based on the consideration of the efficiency and the economy of the assets. The amount of the assets is adjusted to its recoverable amount. The adjustment is recognized in other comprehensive income and reduces the amount of accumulated of surplus revaluation in the equity.

Manajemen berpendapat bahwa nilai wajar aset tetap tidak berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya sehingga tidak melakukan revaluasi aset tetap.

Management believes that the fair value of property, plant and equipment is not materially different with its carrying amount, hence did not revalue its property, plant and equipment.

Pekerjaan Dalam Pelaksanaan
Akun ini merupakan biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan pembangunan dan renovasi/ perbaikan sarana kelistrikan, sebagai berikut:

Construction In Progress
This account represents costs incurred in relation to the construction and renovation/ betterment of power supply facilities, as follows:

	2017 Rp	2016 Rp	
Pembangkit			***Power Plant***
Tenaga uap	396,381	102,430	*Steam power plants*
Tenaga panas bumi	40,046	58,337	*Geothermal power plants*
Tenaga gas	36,520	49,350	*Gas power plants*
Tenaga air	188,748	6,380	*Hydro power plants*
Tenaga gas/ uap	790,602	5,704	*Gas/ steam power plants*
Lain-lain	527,333	650,123	*Others*
Jumlah	**1,979,630**	**872,324**	***Total***

Aset Tidak Digunakan Dalam Operasi
Aset tidak digunakan dalam operasi meliputi aset tetap akan direlokasi, sementara belum digunakan dalam operasi serta aset tetap akan diperbaiki.

Penyusutan atas aset yang tidak digunakan dalam operasi sebesar Rp283.494 tahun 2017 dan Rp198.931 tahun 2016 dicatat sebagai bagian dari lain-lain bersih.

Manajemen berpendapat bahwa percepatan penyusutan atas aset yang tidak digunakan dalam operasi memadai untuk menutup risiko kerugian penurunan nilai yang mungkin timbul dari aset tersebut.

Assets Not Used In Operations
Assets not used in operations comprised of those to be relocated, those temporarily not in use in operations, and those to be repaired.

Depreciation of assets not used in operations amounting to Rp283,494 in 2017 and Rp198,931 in 2016 are recorded as part of others–net.

Management believes that accelerated depreciation on assets not used in operations is adequate to cover possible loss on impairment on the value of such assets.

7. Properti Investasi / 7. *Investment Properties*

Akun ini merupakan tanah milik Perusahaan yang terletak di Pemaron, Pesanggaran – Bali, Ngesrep – Semarang, Pasuruan – Jawa Timur dengan hak legal berupa HGB berjangka waktu dari 7 sampai 40 tahun, jatuh tempo pada 2037. Pada tanggal 31 Desember 2017, tanah tersebut akan disewakan kepada pihak ketiga atau akan digunakan untuk tujuan kenaikan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan melakukan penilaian kembali atas nilai wajar properti investasi, yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan ("KJPP RHR"), penilai independen yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan.

This account pertains to pieces of land owned by the Company, located in Pemaron, Pesanggaran – Bali, Ngesrep - Semarang, Pasuruan - East Java with HGB for periods between 7 to 40 years until 2037. As of December 31, 2017, the land will be leased to third party or being held for capital appreciation purposes.

As of December 31, 2017, the Company performs revaluation of fair value for its investment properties which is performed by Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan ("KJPP RHR"), an independent valuer registered in the Ministry of Finance and Otoritas Jasa Keuangan.

Nilai wajar properti investasi diklasifikasikan sebagai level 2 dalam hirarki nilai wajar.

Nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp183.637.

The fair values of investment properties are within level 2 of the fair value hierarchy.

The fair value of the investment properties as of December 31, 2017 amounted to Rp183,637.

8. Aset Keuangan dari Konsesi Jasa / *8. Financial Asset of Service Concession*

Akun ini merupakan tagihan jangka panjang dari PLN sehubungan dengan pembayaran kapasitas minimum di masa depan yang ditetapkan dalam PJBTL yang telah diklasifikasikan sebagai aset keuangan sebagai akibat dari adopsi ISAK 16.

This account represents long-term receivable from PLN in relation to the future minimum capacity payments set forth in PJBTL that have been classified as financial asset as a result of adoption of ISAK 16.

	2017 Rp	2016 Rp	
Pembayaran minimum kapasitas di masa depan			*Future minimum capacity payments*
Tidak lebih dari satu tahun	3,820,976	--	*Not later than one year*
Antara lebih dari satu tahun sampai lima tahun	15,530,509	--	*Later than a year but not later than five years*
Lebih dari lima tahun	72,672,416	--	*Later than five years*
Jumlah pembayaran minimum kapasitas di masa depan	92,023,901	--	*Total future minimum capacity payments*
Dikurangi penghasilan keuangan yang belum diterima	(44,432,399)	--	*Less unearned financial revenue*
Nilai kini pembayaran minimum kapasitas di masa depan	47,591,502	--	*Present value of future capacity payments*
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(1,103,982)	--	*Less: current maturity*
Bagian jangka panjang	**46,487,520**	**--**	***Long-term portion***

a. Perusahaan / *a. The Company*

Pada tanggal 10 Maret 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik ("PJBTL") atas pembangkit listrik tenaga uap Suralaya ("SLA") unit 1,2,3,4,5,6 dan 7. Jangka waktu perjanjian adalah 5 tahun, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017. Pada tanggal 22 Agustus 2017, perjanjian tersebut telah diamandemen dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017. Amandemen tersebut terutama mencakup perubahan atas jangka waktu perjanjian menjadi 30 tahun, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2046. Sehubungan dengan perjanjian tersebut, manajemen berpendapat bahwa PJBTL sesuai dengan kriteria perjanjian konsesi jasa dan melakukan reklasifikasi aset tetap SLA unit 1,2,3,4,5,6 dan 7 dengan jumlah tercatat sebesar Rp52.909.454 sebagai aset keuangan dari konsesi jasa.

On March 10, 2017, the Company entered into a power purchase agreement ("PJBTL") for Suralaya steam power plant ("SLA") unit 1,2,3,4,5,6 and 7. The term of the agreement is 5 years, effective from January 1, 2017. On August 22, 2017, the agreement has been amended and applied retroactively since January 1, 2017. The amendment primarily covers changes to the terms of the agreement into 30 years, effective from January 1, 2017 until December 31, 2046. Based on the agreement, management believes that PJBTL meets the definition of service concession arrangement and reclassify its property, plant and equipment SLA unit 1,2,3,4,5,6 and 7 with carrying value of Rp52,909,454 as financial asset from service concession.

Pada tanggal 25 April 2017, PT Danareksa Investment Management ("DIM") dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") menandatangani akta perjanjian Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Danareksa Indonesia Power PLN I – Piutang Usaha ("KIK-DIPP1"). Perjanjian tersebut mengalami beberapa kali amandemen, terakhir pada tanggal 14 September 2017. Pada perjanjian tersebut DIM akan bertindak sebagai Manajer Investasi dan BRI akan bertindak sebagai Bank Kustodian.

On April 25, 2017, PT Danareksa Investment Management ("DIM") and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") signed a deed of Collective Investment Contract Asset Backed Securities Danareksa of Indonesia Power PLN I - Accounts Receivable ("KIK-DIPP1"). The agreement has been amended several times, the latest on September 14, 2017. Based on the agreement, DIM will act as Investment Manager and BRI will act as Custodian Bank.

Pada tanggal 11 September 2017 berdasarkan surat pernyataan persetujuan pengalihan piutang komponen A dalam PJBTL, PLN, entitas induk, menyetujui Perusahaan, untuk mengalihkan piutang yang timbul atas kewajiban pembayaran tunai Komponen A SLA unit 1,2,3 dan 4 atas PJBTL pusat pembangkit listrik tenaga uap SLA unit 1,2,3,4,5,6 dan 7 yang telah diamandemen pada tanggal 22 Agustus 2017. Piutang tersebut dialihkan kepada pihak ketiga dalam rangka KIK-DIPP1, maksimal sebesar Rp5.000.000.

On September 11, 2017 based on the statement of approval for the transfer of receivables of component A under the PJBTL, PLN, a parent, approved the Company, to transfer the receivables arising from the cash payment obligations of Component A SLA steam power plant unit 1,2,3 and 4 of PJBTL SLA unit 1,2,3,4,5,6 and 7 which have been amended on August 22, 2017. The receivables are transferred to third party in KIK-DIPP1, maximum of Rp5,000,000.

Pada tanggal 14 September 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian pengikatan transaksi sekuritisasi piutang usaha PLN – PLN I No. 206.PJ/061/IP/2017 dengan DIM dan BRI. Di dalam perjanjian tersebut, IP setuju dan mengikat diri untuk menjual piutang usaha sebesar Rp4.932.107 dengan harga Rp4.000.000.

On September 14, 2017, the Company entered into an agreement for trade receivables securitization transaction of PLN - PLN I No. 206.PJ/061/IP/2017 with DIM and BRI. Under the agreement, IP agrees and binded to sell their accounts receivable amounting to Rp4,932,107 at a value price of Rp4,000,000.

b. IRP

Pada tanggal 30 Oktober 2007, IRP mengadakan PJBTL dengan PLN untuk jangka waktu 30 tahun setelah *Commercial Operation Date* ("COD") dan telah diamandemen pada tanggal 30 November 2017. Dalam PJBTL tersebut PLN akan membayar pasokan tenaga listrik yang akan disediakan oleh IRP sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan formula pembayaran. Pembayaran tersebut mencakup beberapa komponen yaitu biaya kapasitas, energi, operasional dan pemeliharaan yang tergantung pada tingkat pasokan energi serta variabel lain yang ditentukan dalam PJBTL.

b. IRP

On October 30, 2007, IRP entered into PJBTL with PLN for a period of 30 years after Commercial Operation Date ("COD"), and was amended on November 30, 2017. Based on PJBTL, PLN will pay the power supply electricity to be provided by IRP with the amount that determined by the formula of payment. The payments cover several components, that is capacity, energy, operational and maintenance costs depending on the energy supply level and other variables specified in the PJBTL.

Pada tahun 2017, manajemen berpendapat bahwa PJBTL sesuai dengan kriteria perjanjian konsesi jasa dan melakukan penyesuaian atas pekerjaan dalam pelaksanaan dengan jumlah tercatat sebesar Rp980.054 sebagai biaya konstruksi dari konsesi jasa.

In 2017, management believes that PJBTL meets the definition of service concession arrangement and adjusted its construction in progress with carrying value of Rp980,054 as construction cost of service concession.

Pada tahun 2017, Perusahaan dan entitas anak mengakui pendapatan dari konsesi jasa sebagai berikut:

In 2017, the Company and subsidiary recognized revenue of service concession as follows:

	2017 Rp	2016 Rp	
Pendapatan dari konsesi jasa			**Revenue of service concession**
Bahan bakar dan pemeliharaan	11,625,129	–	*Fuel and maintenance*
Keuangan	2,987,569	–	*Financial*
Konstruksi	980,054	–	*Contruction*
Jumlah	**15,592,752**	**–**	***Total***

Beban konsesi jasa yang diakui pada tahun berjalan sebagai berikut:

Service concession expenses recognized for the year are as follows:

	2017 Rp	2016 Rp	
Beban konsesi jasa			**Service concession expenses**
Bahan bakar dan pemeliharaan	10,742,269	–	*Fuel and maintenance*
Konstruksi	980,054	–	*Contruction*
Jumlah	**11,722,323**	**–**	***Total***

9. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / *Investments in Associate and Joint Ventures*

Rincian investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

Details of investment in associate and joint ventures are as follows:

Entitas/ *Entity*	Domisili/ *Domicile*	Jenis Usaha/ *Nature of business*	Tahun operasi komersial/ *Year of commercial operations*	Persentase penyertaan/ *Percentage of ownership* 2017 %	2016 %
PT Indo Pusaka Berau ("IPB")	Berau	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2005	46.53	46.53
PT Rajamandala Electric Power ("REP")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	*)	51,00	51,00
PT Perta Daya Gas ("PDG")	Jakarta	Transportasi, penyimpanan dan regasifikasi LNG/ *Transportation, storage and regasification of LNG*	2015	35,00	35,00
PT GCL Indotenaga ("GCL")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	*)	35,00	35,00
PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang ("PLN SC")	Jakarta	Perdagangan barang dan jasa, enjiiring *supply chain* dan konsultasi dibidang ketenagalistrikan/ *Operation and services trading, engineering supply chain and consultation in the electricity sector*	*)	49,00	–
PT Indo Raya Tenaga ("IRT")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	*)	51,00	–

*) tahap pengembangan/ *development stage*

Seluruh entitas asosiasi dan ventura bersama dicatat oleh Perusahaan dan entitas anak dengan menggunakan metode ekuitas. Seluruh entitas adalah entitas tertutup dan tidak terdapat harga pasar yang dikutip yang tersedia untuk sahamnya.

All associate and joint ventures are recorded by the Company and its subsidiary using equity method. They are private entities and there is no quoted market price available for its shares.

Per 31 Desember 2017 dan 2016, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat pembatasan dan risiko signifikan yang terkait dengan investasi pada asosiasi dan ventura bersama.

As of December 31, 2017 and 2016, management believes that there is no significant restriction and risk regarding the investment in associate and joint ventures.

Mutasi investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

The changes in investments in associate and joint ventures are as follows:

	Jumlah tercatat 31 Desember 2016/ *Carrying amount December 31, 2016* Rp	Penambahan/ *Addition* Rp	Dividen/ *Dividend* Rp	Bagian atas laba (rugi) bersih/ *Share of profit (loss)* Rp	Bagian atas penghasilan komprehensif lainnya/ *Share of other comprehensive income* Rp	Jumlah tercatat 31 Desember 2017/ *Carrying amount December 31, 2017* Rp	
Asosiasi							*Associate*
PT Indo Pusaka Berau	111,598	–	(1,163)	1,220	–	111,655	*PT Indo Pusaka Berau*
Ventura Bersama							*Joint Ventures*
PT Rajamandala Electric Power	114,807	–	–	(21,127)	14,893	108,573	*PT Rajamandala Electric Power*
PT Perta Daya Gas	–	–	–	3,016	113	3,129	*PT Perta Daya Gas*
PT GCL Indotenaga	40,642	280,622	–	(419)	–	320,845	*PT GCL Indotenaga*
PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang	–	73,500	–	372	–	73,872	*PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang*
PT Indo Raya Tenaga	–	510	–	(190)	–	320	*PT Indo Raya Tenaga*
Jumlah	**267,047**	**354,632**	**(1,163)**	**(17,128)**	**15,006**	**618,394**	***Total***

	Jumlah tercatat 1 Januari 2016/ *Carrying amount January 1, 2016* Rp	Penambahan/ *Addition* Rp	Dividen/ *Dividend* Rp	Bagian atas laba (rugi) bersih/ *Share of profit (loss)* Rp	Bagian atas penghasilan komprehensif lainnya/ *Share of other comprehensive income* Rp	Jumlah tercatat 31 Desember 2016/ *Carrying amount December 31, 2016* Rp	
Asosiasi							*Associate*
PT Indo Pusaka Berau	101,349	–	–	10,249	–	111,598	*PT Indo Pusaka Berau*
Ventura Bersama							*Joint Ventures*
PT Rajamandala Electric Power	102,347	13,447	–	(987)	–	114,807	*PT Rajamandala Electric Power*
PT Perta Daya Gas	–	–	–	–	–	–	*PT Perta Daya Gas*
PT GCL Indotenaga	–	42,355	–	(1,713)	–	40,642	*PT GCL Indotenaga*
Jumlah	**203,696**	**55,802**	**–**	**7,549**	**–**	**267,047**	***Total***

Berikut ini adalah ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi dan ventura bersama pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

The following table contains the summarized financial information for associate and joint ventures accounted using the equity method as of December 31, 2017 and 2016.

Entitas asosiasi/ *Associate*

	IPB		
	2017 Rp	2016 Rp	
Lancar			*Current*
Kas dan setara kas	61	1,670	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya	48,683	59,956	*Other current assets*
Jumlah aset lancar	48,744	61,626	*Total current assets*
Liabilitas keuangan			*Financial liabilities*
Utang usaha	44,666	22,005	*Trade payables*
Liabilitas lancar lainnya	35,463	60,804	*Other current liabilities*
Jumlah liabilitas lancar	80,129	82,809	*Total current liabilities*
Tidak lancar			*Non-current*
Aset	245,214	247,249	*Assets*
Liabilitas			*Liabilities*
Liabilitas keuangan	--	21,474	*Financial liabilities*
Liabilitas lainnya	22,107	16,035	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas tidak lancar	22,107	37,509	*Total non-current liabilities*
Aset bersih	191,722	188,557	*Net assets*
% kepemilikan efektif	**46.53%**	**46.53%**	***% of effective ownership***
Bagian atas aset bersih asosiasi	89,208	87,736	*Share of net assets of associate*
Penyesuaian metode ekuitas	22,447	23,862	*Adjustment of equity method*
Jumlah tercatat	111,655	111,598	*Total carrying value*
Pendapatan	97,247	105,410	*Revenue*
Beban pokok penjualan	(23,416)	(53,062)	*Cost of good sold*
Depresiasi dan amortisasi	(20,401)	755	*Depreciation and amortization*
Pendapatan keuangan	62	56	*Interest income*
Beban keuangan	(5,302)	(3,597)	*Interest expense*
Beban operasi	(42,733)	(24,359)	*Operating expense*
Pendapatan (beban) lain-lain bersih	387	(492)	*Other income (expense) - net*
Beban pajak penghasilan	(3,222)	(2,684)	*Income tax expense*
Laba tahun berjalan	2,622	22,027	*Profit for the year*
% kepemilikan efektif	**46.53%**	**46.53%**	***% of effective ownership***
Bagian atas laba asosiasi tahun berjalan	1,220	10,249	*Share of profit for the year of associate*
Penghasilan komprehensif lain	--	--	*Other comprehensive income*
Bagian atas penghasilan komprehensif asosiasi	--	--	*Share of other comprehensive income of associate*
Dividen yang diterima dari perusahaan asosiasi	(1,163)	--	*Dividend received from associate*

Ventura bersama/ *Joint ventures*

	2017					
	REP	PDG	GCL	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
Lancar						*Current*
Kas dan setara kas	70,799	111,309	150,891	154,461	487,460	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya	210	106,514	81,889	50	188,663	*Other current assets*
Jumlah aset lancar	71,009	217,823	232,780	154,511	676,123	*Total current assets*
Liabilitas keuangan						*Financial liabilities*
Utang usaha	12,509	822	–	–	13,331	*Trade payables*
Liabilitas lancar lainnya	21,292	40,024	1,407	11,066	73,789	*Other current liabilities*
Jumlah liabilitas lancar	33,801	40,846	1,407	11,066	87,120	*Total current liabilities*
Tidak lancar						*Non-current*
Aset	1,532,027	503,610	685,295	7,681	2,728,613	*Assets*
Liabilitas						*Liabilities*
Liabilitas keuangan	1,358,209	640,549	135	–	1,998,893	*Financial liabilities*
Liabilitas lainnya	–	4,392	–	299	4,691	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas tidak lancar	1,358,209	644,941	135	299	2,003,584	*Total non-current liabilities*
Aset bersih	211,026	35,646	916,533	150,827	1,314,032	*Net assets*
% kepemilikan efektif	**51%**	**35%**	**35%**	**49% - 51%**	**35% - 51%**	***% of effective ownership***
Bagian atas aset bersih ventura bersama	107,623	12,476	320,787	73,918	514,804	*Share of net assets of joint venture*
Penyesuaian metode ekuitas	950	(9,347)	58	274	(8,065)	*Adjustment of equity method*
Jumlah tercatat	108,573	3,129	320,845	74,192	506,739	*Total carrying value*
Pendapatan	401,387	166,889	–	–	568,276	*Revenue*
Beban pokok penjualan	(401,387)	(20,947)	–	–	(422,334)	*Cost of good sold*
Depresiasi dan amortisasi	–	(53,744)	–	–	(53,744)	*Depreciation and amortization*
Pendapatan keuangan	84,930	5,048	–	–	89,978	*Interest income*
Beban keuangan	(80,729)	(40,125)	–	–	(120,854)	*Interest expense*
Beban operasi	(1,951)	(36,070)	(5,265)	(1,045)	(44,331)	*Operating expense*
Pendapatan (beban) lain-lain bersih	(43,675)	(8,594)	4,068	1,409	(46,792)	*Other income (expense) - net*
Beban pajak penghasilan	–	(3,840)	–	–	(3,840)	*Income tax expense*
Laba (rugi) tahun berjalan	(41,425)	8,617	(1,197)	364	(33,641)	*Profit (loss) for the year*
% kepemilikan efektif	**51%**	**35%**	**35%**	**49% - 51%**	**35% - 51%**	***% of effective ownership***
Bagian atas laba (rugi) ventura bersama tahun berjalan	(21,127)	3,016	(419)	182	(18,348)	*Share of the profit (loss) for the year of joint ventures*
Penghasilan komprehensif lain	29,202	323	–	–	29,525	*Other comprehensive income*
Bagian atas Penghasilan komprehensif lain ventura bersama	14,893	113	–	–	15,006	*Share of other comprehensive income of joint ventures*
Dividen yang diterima dari ventura bersama	–	–	–	–	–	*Dividend received from joint ventures*

	2016				
	REP	PDG	GCL	Jumlah/ *Total*	
Lancar					*Current*
Kas dan setara kas	102,775	139,866	71,665	314,306	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya	205	92,428	32,973	125,606	*Other current assets*
Jumlah aset lancar	102,980	232,294	104,638	439,912	*Total current assets*
Liabilitas keuangan					*Financial liabilities*
Utang usaha	(1)	34,672	4,005	38,676	*Trade payables*
Liabilitas lancar lainnya	93,755	7,212	3,452	104,419	*Other current liabilities*
Jumlah liabilitas lancar	93,754	41,884	7,457	143,095	*Total current liabilities*
Tidak lancar					*Non-current*
Aset	846,536	566,610	20,783	1,433,929	*Assets*
Liabilitas					*Liabilities*
Liabilitas keuangan	643,326	730,317	–	1,373,643	*Financial liabilities*
Liabilitas lainnya	–	–	–	–	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas tidak lancar	643,326	730,317	–	1,373,643	*Total non-current liabilities*
Aset bersih	212,436	26,703	117,964	357,103	*Net assets*
% kepemilikan efektif	**51%**	**35%**	**35%**		***% of effective ownership***
Bagian atas aset bersih ventura bersama	108,342	9,346	41,287	158,975	*Share of net assets of joint venture*
Penyesuaian metode ekuitas	6,465	(9,346)	(645)	(3,526)	*Adjustment of equity method*
Jumlah tercatat	114,807	–	40,642	155,449	*Total carrying value*
Pendapatan	–	172,551	–	172,551	*Revenue*
Beban pokok penjualan	–	(9,877)	–	(9,877)	*Cost of good sold*
Depresiasi dan amortisasi	–	(53,869)	–	(53,869)	*Depreciation and amortization*
Pendapatan keuangan	364	1,683	5,694	7,741	*Interest income*
Beban keuangan	–	(44,218)	–	(44,218)	*Interest expense*
Beban operasi	(2,016)	(50,800)	(2,551)	(55,367)	*Operating expense*
Beban lain-lain bersih	(283)	(11,392)	(8,036)	(19,711)	*Other expense - net*
Beban pajak penghasilan	–	(4,078)	–	(4,078)	*Income tax expense*
Rugi tahun berjalan	(1,935)	–	(4,893)	(6,828)	*Loss for the year*
% kepemilikan efektif	**51%**	**35%**	**35%**	**35% - 51%**	***% of effective ownership***
Bagian atas rugi ventura bersama tahun berjalan	(987)	–	(1,713)	(2,700)	*Share of loss for the year of joint ventures*

Investasi pada entitas diatas diperoleh terutama untuk tujuan potensi pertumbuhan jangka panjang, karena seluruh entitas tersebut bergerak dalam industri ketenagalistrikan yang sama dengan industri Perusahaan dan entitas anak.

The investments in the above entities are held primarily for long-term growth potential, since these entities are engaged in the same electricity industry as the Company and subsidiaries.

IPB
Pada tahun 2017, Perusahaan memperoleh dividen tunai sebesar Rp1.163.

IPB
In 2017, the Company received cash dividends amounted to Rp1,163.

GCL
Pada tahun 2016, PIT, entitas anak, dan Taicang Harbour Golden Concord Electric - Power Generation mendirikan GCL untuk menjalankan proyek pembangkit listrik tenaga uap. PIT melakukan pembayaran investasi awal sebesar US$3.150.000 (setara dengan Rp42.355), setara dengan kepemilikan saham sebesar 35%.

GCL
In 2016, PIT, subsidiary, and Taicang Harbour Golden Concord Electric - Power Generation established GCL to implement coal fired power plant project. PIT made initial investments amounted to US$3,150,000 (equivalent to Rp42,355), equivalent to 35% ownership share.

Pada tahun 2017, PIT, entitas anak, melakukan tambahan investasi sebesar US$21.000.000 (setara dengan Rp280.622) tanpa mengubah persentase kepemilikan.

In 2017, PIT, subsidiary, made additional investments amounting to US$21,000,000 (equivalent to Rp280,622) without changes in percentage of ownership.

IRT
Pada tahun 2017, PIT, entitas anak, dan PT Barito Wahana Lestari mendirikan IRT dengan penyertaan saham masing-masing sebesar Rp510 dan Rp490 yang merupakan 51% dan 49% kepemilikan saham di IRT. PIT mempunyai pengendalian bersama atas IRT berdasarkan adanya keharusan kesepakatan bersama atas pengambilan keputusan penting.

IRT
In 2017, PIT, subsidiary, and PT Barito Wahana Lestari established IRT with share ownership amounted to Rp510 and Rp490, respectively which are 51% and 49% share ownership in IRT. PIT has joint control in IRT as there must be an unanimous consent on important decisions.

PLN SC
Pada tanggal 16 Juni 2017, Perusahaan dan PT Pembangkitan Jawa-Bali, pihak berelasi, mendirikan PLN SC dengan penyertaan saham masing-masing sebesar Rp73.500 dan Rp76.500 yang merupakan 49% dan 51% kepemilikan saham di PLN SC.

PLN SC
In June 16, 2017, the Company and PT Pembangkitan Jawa-Bali, related party, established PLN SC with share ownership amounted to Rp73,500 and Rp76,500, respectively which are 49% and 51% share ownership in PLN SC.

10. Piutang Pihak Berelasi / *10. Receivables from Related Parties*

	2017 Rp	2016 Rp	
PT Rajamandala Electric Power	263,351	236,374	*PT Rajamandala Electric Power*
PT Perta Daya Gas	224,742	260,085	*PT Perta Daya Gas*
Lain - lain	24,643	27,011	*Others*
Jumlah	**512,736**	**523,470**	***Total***
Dikurangi bagian jangka pendek	(35,092)	(42,134)	*Less current portion*
Bagian jangka panjang	477,644	481,336	***Long-term portion***

REP
Pada tanggal 4 Juli 2014, Perusahaan memberikan pinjaman jangka panjang sebesar US$9.400.000 kepada REP untuk membiayai proyek 46,6 Megawatt di PLTA Sungai Citarum di Cianjur, Jawa Barat. Pinjaman ini dikenakan bunga 10% per tahun dengan jangka waktu 17,5 tahun setelah *grace period* selama pembangunan. Tanggal *Commercial Operation Date* ("COD") PLTA telah diamandemen, terakhir kali melalui Amandemen Pertama atas Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik tertanggal 10 Agustus 2017, menjadi 57 bulan setelah tanggal pendanaan. Pokok pinjaman akan ditagihkan dan terutang setiap 6 bulan sejak tanggal COD.

REP
On July 4, 2014, the Company provided a long-term loan of US$9,400,000 to REP for the financing of the 46.6 Megawatt project in PLTA Citarum River at Cianjur, West Java. This loan bears an interest of 10% per annum with 17.5 years terms of repayment after grace period during construction. Commercial Operation Date ("COD") has been amended, most recently through the First Amendment of PPA dated August 10, 2017, into 57 months after financial close date. The principal shall be invoiced and due every 6 months started on COD.

Pada tanggal 23 November 2016, Perusahaan memberikan tambahan pinjaman sebesar Rp77.710 kepada REP dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan pinjaman sebelumnya.

On November 23, 2016, the Company provided additional long-term loan amounting to Rp77,710 to REP with similar term and condition with previous loan.

Pada tanggal 31 Desember 2017 saldo pokok pinjaman ini sebesar US$9.400.000 (setara dengan Rp127.351) dan Rp77.710. Piutang lainnya sebesar Rp58.290 merupakan piutang bunga.

At December 31, 2017, the outstanding principal of the loan amounted to US$9,400,000 (equivalent to Rp127,351) and Rp77,710. Other receivables amounting to Rp58,290 represents interest receivables.

Perusahaan tidak mengakui cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang pihak berelasi karena manajemen berpendapat seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

The Company did not recognize any allowance for impairment losses of receivable from related parties as management believes that all such receivables are collectible.

PDG

Pada tanggal 12 Juni 2013, Perusahaan memberikan pinjaman jangka panjang sebesar US$18.837.112 kepada PDG untuk membiayai proyek *Compressed Natural Gas* ("CNG") di PLTU Tambak Lorok, Semarang. Pada tanggal 30 November 2015, Perusahaan melakukan amandemen atas pinjaman jangka panjang yang diberikan kepada PDG sehingga jumlah pinjaman berubah menjadi US$18.191.529 sesuai dengan jumlah seluruh pencairan sampai dengan tanggal 9 Januari 2014 dan jangka waktu pinjaman menjadi 8 tahun dengan jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2023. Pinjaman ini dikenakan bunga 6,5% per tahun. Pokok pinjaman akan ditagihkan setiap 6 bulan dari tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan 1 Desember 2023.

PDG

On June 12, 2013, the Company provide a long-term loan of US$18,837,112 to PDG for financing Compressed Natural Gas ("CNG") project in PLTU Tambak Lorok, Semarang. On November 30, 2015, the Company made an amendment to the loan given to PDG which resulted in the revision of the total loan becoming US$18,191,529 equal to total drawdown up to January 9, 2014 and term of repayment was revised into 8 years and matured on December 1, 2023. This loan bears an interest 6.5% per annum. The principal shall be collected every 6 months from June 1, 2016 until December 1, 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2017, saldo terutang atas pokok dan bunga pinjaman sebesar US$16.197.815 atau setara Rp219.448. Piutang lainnya sebesar Rp5.294 merupakan piutang yang diantara lain, piutang bunga dan biaya relokasi pegawai.

On December 31, 2017, the outstanding principal and accrued interest of the loan amounted to US$16,197,815 or equivalent to Rp219,448. Other receivables amounted to Rp5,294 represents among others, interest receivables and costs of employees relocation.

11. Aset Tidak Lancar Lain / *11. Other Non-Current Assets*

	2017 Rp	2016 Rp	
Investasi efek beragunan aset	312,000	--	*Investments in asset-backed securities*
Uang muka pengembangan proyek	33,529	458,603	*Project development advances*
Aset tak berwujud			*Intangible assets*
Hak atas tanah	14,475	1,872	*Landrights*
Perangkat lunak	11,669	7,139	*Software*
Lain - lain	28,743	66,005	*Others*
Jumlah	**400,416**	**533,619**	***Total***

12. Kas dan Setara Kas / *12. Cash and Cash Equivalents*

	2017 Rp	2016 Rp	
Kas	344	337	*Cash on hand*
Bank			*Cash in banks*
Pihak berelasi (Catatan 33)			*Related parties (Note 33)*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)*
Rupiah	1,295,715	53,984	*Rupiah*
PT Bank Negara Indonesia (Persero)			*PT Bank Negara Indonesia(Persero)*
Rupiah	774,139	634,230	*Rupiah*
US$	16,328	27,984	*US$*
EUR	4	4,105	*EUR*
CHF	--	6,150	*CHF*
PT Bank Mandiri (Persero)			*PT Bank Mandiri (Persero)*
Rupiah	542,483	383,283	*Rupiah*
US$	22,097	300	*US$*
EUR	1,824	628	*EUR*
JPY	832	21	*JPY*
Jumlah pihak berelasi	2,653,422	1,110,685	*Total related parties*
Pihak ketiga - Rupiah			*Third parties - Rupiah*
PT Bank Bukopin	63,287	56,307	*PT Bank Bukopin*
Bank Muamalat	--	941	*Bank Muamalat*
Jumlah pihak ketiga	63,287	57,248	*Total third parties*
Jumlah kas dan bank	2,717,053	1,167,933	***Total cash on hand and in banks***
Setara kas - deposito berjangka			*Cash equivalents - time deposits*
Pihak berelasi - Rupiah (Catatan 33)			*Related parties-Rupiah (Note 33)*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)	1,500,000	10,000	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)*
PT Bank Negara Indonesia (Persero)	609,209	290,300	*PT Bank Negara Indonesia (Pesero)*
PT Bank Mandiri (Persero)	14,750	29,750	*PT Bank Mandiri (Persero)*
Jumlah pihak berelasi	2,123,959	330,050	*Total related parties*
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Bank Bukopin			*PT Bank Bukopin*
Rupiah	--	2,500	*Rupiah*
Jumlah deposito berjangka	2,123,959	332,550	***Total time deposits***
Jumlah kas dan setara kas	**4,841,012**	**1,500,820**	***Total cash and cash equivalents***
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun	**5,75% - 6,00%**	**5,75% - 7,75%**	*Interest rates per annum on time deposits*

13. Piutang Usaha / *13. Trade Receivables*

a. Berdasarkan Langganan / *a. By Debtor*

	2017 Rp	2016 Rp	
Pihak berelasi (Catatan 33)			*Related parties (Note 33)*
PLN	25,617,750	21,615,875	*PLN*
Pihak ketiga	59,386	61,957	*Third parties*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(30,431)	(11,191)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah pihak ketiga - bersih	28,955	50,766	*Total of third parties - net*
Bersih	**25,646,705**	**21,666,641**	***Net***

b. Berdasarkan umur piutang usaha yang belum diturunkan nilainya

b. By age category of trade receivables that are not impaired

	2017 Rp	2016 Rp	
Belum jatuh tempo	5,956,545	4,749,998	*Not yet due*
Jatuh tempo			*Past Due*
1 s/d 30 hari	1,774,214	2,076,741	*1 to 30 days*
31 s/d 60 hari	2,986,195	1,482,725	*31 to 60 days*
61 s/d 90 hari	5,412,187	2,498,620	*61 to 90 days*
91 s/d 120 hari	5,071,919	4,289,753	*91 to 120 days*
Lebih dari 120 hari	4,476,076	6,579,995	*More than 120 days*
Jumlah	25,677,136	21,677,832	***Total***
Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai			*Changes in the allowance for impairment losses*
Saldo awal tahun	(11,191)	(14,203)	*Balance at beginning of year*
Penambahan	(19,240)	--	*Additions*
Pemulihan	--	3,012	*Recovery*
Saldo akhir tahun	**(30,431)**	**(11,191)**	***Balance at end of year***

Pada tahun 2017 dan 2016, piutang usaha Perusahaan dari PLN diperhitungkan sebagai saling hapus terhadap utang usaha dan dividen (Catatan 37).

In 2017 and 2016, the trade receivables from PLN was offset with account payable and dividend (Note 37).

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha adalah cukup. Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah piutang usaha Perusahaan yang telah jatuh tempo tapi tidak mengalami penurunan nilai adalah sebesar Rp19.690.160. Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa piutang usaha tersebut dapat tertagih.

Management believes that the allowance made for impairment losses are adequate. As of December 31, 2017, the Company's trade receivables that are past due but hasn't been impaired amounted to Rp19,690,160. The Company's Management believes that all such receivables are collectible.

14. Piutang Lain-lain / *14. Other Receivables*

	2017 Rp	2016 Rp	
Karyawan	33,800	35,008	*Employees*
Lain-lain	13,174	11,133	*Others*
Jumlah	46,974	46,141	*Total*
Dikurangi bagian jangka pendek	(15,428)	(12,025)	*Less current portion*
Bagian jangka panjang	**31,546**	**34,116**	***Long-term portion***

Tidak ada kerugian penurunan nilai yang dicatat sehubungan dengan piutang di atas. Tidak ada jumlah yang diklasifikasikan sebagai lewat jatuh tempo sehubungan dengan piutang tersebut. Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa piutang tersebut dapat tertagih.

No impairment loss has been recorded in relation to the receivables mentioned above. No amounts in relation to these receivables are classified as past due. The Company's management considers these receivables are collectible.

15. Persediaan / *15. Inventories*

	2017 Rp	2016 Rp	
Batu bara, bahan bakar dan pelumas	1,722,208	1,668,968	*Coal, fuel and lubricants*
Material pemeliharaan	273,059	315,833	*Maintenance materials*
Jumlah	1,995,267	1,984,801	*Total*
Penyisihan penurunan nilai	(19,927)	(21,403)	*Allowance for decline in value*
Bersih	1,975,340	1,963,398	***Net***
Mutasi penyisihan penurunan nilai			*Changes in allowance for decline in value*
Saldo awal tahun	(21,403)	(21,520)	*Balance at beginning of year*
Pemulihan	1,476	117	*Recovery*
Saldo akhir tahun	**(19,927)**	**(21,403)**	***Balance at end of year***

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan yang ditetapkan memadai untuk menutup risiko penurunan nilai persediaan.

Management believes that the allowance is adequate to cover possible losses on decline in value of inventories.

Perusahaan dan entitas anak tidak mengasuransikan persediaan untuk menutup risiko atas kemungkinan kerugian yang timbul pada persediaan.

The Company and subsidiaries do not have any insurance coverage to cover the possible losses in inventories.

16. Pajak Dibayar Dimuka / *16. Prepaid Taxes*

	2017 Rp	2016 Rp	
Pajak penghasilan badan			*Corporate income tax*
Perusahaan	570,530	294,934	*The Company*
Entitas Anak	2,611	2,611	*Subsidiaries*
Pajak Pertambahan Nilai	557,366	363,000	*Value Added Tax*
Jumlah	**1,130,507**	**660,545**	***Total***

Lihat catatan 29 untuk informasi mengenai beban pajak penghasilan dan surat ketetapan pajak.

Refer to Note 29 for income tax expense information and tax assessment letters.

17. Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka / *17. Prepaid Expenses and Advances*

	2017 Rp	2016 Rp	
Biaya dibayar dimuka:			*Prepaid expenses:*
Premi asuransi	17,415	3,453	*Insurance*
Lain-lain	160,246	27,395	*Others*
Uang muka:			*Advances:*
Uang muka pembangunan pembangkit	77,113	101,565	*Advances for power plant construction*
Uang muka impor	41,823	71,828	*Import advances*
Jumlah	296,597	204,241	*Total*
Dikurangi bagian jangka pendek	(282,230)	(186,875)	*Less current portion*
Bagian jangka panjang	**14,367**	**17,366**	***Long-term portion***

18. Modal Saham / *18. Capital Stock*

Pemegang Saham/ *Stockholder*	2017 dan / *and* 2016 Jumlah saham/ *Number of shares*	Presentase pemilikan/ *Percentage of ownership*	Jumlah modal disetor/ *Total paid-capital*
PLN	5,215,647,599	100%	2,607,824
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)	1	--	--
Jumlah/*Total*	**5,215,647,600**	**100%**	**2,607,824**

19. Tambahan Modal Disetor / *19. Additional Paid-in Capital*

Tambahan modal disetor berasal dari nilai pengalihan aset tetap, aset tidak lancar lainnya dan material cadang sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 yang diterima dari PLN, pemegang saham.

Additional paid-in capital represents property, plant and equipment, non-current assets and spare parts transferred by PLN, stockholder, to the Company during 1996 to 2000.

Pada tahun 2016, tambahan modal disetor berasal dari partisipasi Perusahaan dan entitas anak dalam Pengampunan Pajak adalah sebesar Rp10.244 (Catatan 29).

In 2016, Additional paid-in capital arising from the Company and subsidiaries' participation in Tax Amnesty was amounted to Rp10,244 (Note 29).

20. Utang Usaha / *20. Trade Payables*

Akun ini merupakan liabilitas sehubungan dengan pembelian tenaga listrik, bahan bakar, barang dan jasa.

This account represents payable arising from purchase of electricity, fuel, goods and services.

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

Details of trade payables are as follows:

	2017 Rp	2016 Rp	
Pihak berelasi			***Related parties***
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	966,765	430,811	*PT Bukit Asam (Persero) Tbk*
PT Pertamina (Persero)	90,082	87,169	*PT Pertamina (Persero)*
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna	1,165	17,034	*PT Pelayaran Bahtera Adhiguna*
PT Perusahaan Gas Negara	--	117,718	*PT Perusahaan Gas Negara*
PT Nusantara Regas	--	92,815	*PT Nusantara Regas*
Lain-lain	121,167	209,866	*Others*
Subjumlah	1,179,179	955,413	*Subtotal*
Pihak ketiga	2,685,144	2,380,734	*Third parties*
Jumlah utang usaha	**3,864,323**	**3,336,147**	***Total trade payables***

21. Utang Sewa Pembiayaan / *21. Lease Liabilities*

Akun ini merupakan utang kepada kerjasama operasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Mirlindo Padu Kencana terkait perjanjian jual beli tenaga listrik dalam rangka perjanjian sewa pembiayaan atas perolehan pembangkitan

This account represents payable to joint operation PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Mirlindo Padu Kencana in relation to financial lease agreement on the acquisition of PLTD MFO 50 MW power plants, Pesanggaran

tenaga listrik PLTD MFO kapasitas 50 MW Pesanggaran yang telah diklasifikasikan ke dalam sewa pembiayaan sebagai akibat penerapan ISAK 8.

that have been classified as financial lease as a result of adoption of ISAK 8.

Nilai tunai pembayaran minimum atas utang sewa pembiayaan tersebut pada tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

The present value of minimum lease payments for such lease liabilities in 2017 and 2016 are as follows:

Berdasarkan jatuh tempo / ***By due date***

	2017 Rp	2016 Rp	
Pembayaran jatuh tempo dalam waktu:			*Minimum lease payments due:*
Tidak lebih dari satu tahun	166,220	135,273	*Not later than a year*
Antara satu sampai lima tahun	--	157,818	*Between one to five years*
Jumlah pembayaran minimum sewa	166,220	293,091	*Total minimum lease payments*
Dikurangi bunga	(20,413)	(41,151)	*Less interest*
Nilai tunai pembayaran minimum sewa pembiayaan masa datang	145,807	251,940	*Present value of future minimum lease payments*
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	145,807	106,991	*Less current maturities*
Bagian jangka panjang	--	144,949	*Long term portion*
Tingkat bunga:			*Interest rate:*
USD	**13.19%**	**13.19%**	*USD*
IDR	**15.50%**	**15.50%**	*IDR*

Beban bunga dan keuangan terkait sewa pembiayaan pada tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp28.211 dan Rp41.874.

Interest expense and financial charges related to lease liabilities in 2017 and 2016 amounted to Rp28,211 and Rp41,874, respectively.

22. Utang Pajak / *22. Taxes Payable*

	2017 Rp	2016 Rp	
Pajak kini (Catatan 29)			*Current tax (Note 29)*
Entitas anak	11,343	1,362	*Subsidiaries*
Pajak penghasilan:			*Income taxes:*
Pasal 4 (2)	8,500	6,656	*Article 4 (2)*
Pasal 15	1,145	1,066	*Article 15*
Pasal 21	100,105	46,731	*Article 21*
Pasal 22	24,560	14,096	*Article 22*
Pasal 23 dan 26	15,425	12,369	*Article 23 and 26*
Pajak pertambahan nilai	157,006	169,460	*Value added tax*
Pajak lainnya	--	18	*Other taxes*
Jumlah	**318,084**	**251,758**	***Total***

23. Penjualan Tenaga Listrik / *23. Sale of Electricity*

Akun ini merupakan penjualan tenaga listrik kepada PLN, pemegang saham (Catatan 33).

This account represents sale of electricity to PLN, stockholder (Note 33).

24. Pendapatan Jasa / *24. Service Revenues*

Akun ini terutama merupakan pendapatan sewa pembangkit listrik serta pendapatan jasa operasi dan pemeliharaan yang diperoleh dari PLN, pemegang saham (Catatan 33).

This account mainly consists of rental income from generators and revenue from operation and maintenance services obtained from PLN, stockholder (Note 33).

25. Beban Bahan Bakar dan Pelumas / *25. Fuel and Lubricants Expenses*

	2017 Rp	2016 Rp	
Bahan bakar minyak			*Fuel*
Solar High Speed Diesel	148,695	316,196	*Solar High Speed Diesel*
Residu	27,043	36,951	*Residue*
Subjumlah	175,738	353,147	*Subtotal*
Bahan bakar nonminyak			*Nonfuel*
Gas alam	11,599,190	11,473,742	*Natural gas*
Panas bumi	2,127,761	2,055,561	*Geothermal*
Air	49,622	59,646	*Water*
Batubara	–	7,997,954	*Coal*
Subjumlah	13,776,573	21,586,903	*Subtotal*
Minyak pelumas dan lain-lain	25,156	47,310	*Lubricants and others*
Jumlah	**13,977,467**	**21,987,360**	***Total***

26. Beban Pemeliharaan / *26. Maintenance Expenses*

Akun ini merupakan beban yang timbul dari pemakaian material dan jasa borongan untuk keperluan pemeliharaan. Rinciannya adalah sebagai berikut:

This account represents spare parts used and contractor fees for maintenance purposes. The details are as follows:

	2017 Rp	2016 Rp	
Jasa Borongan	2,470,257	2,975,171	*Contractor fees*
Pemakaian material	523,865	712,299	*Spare parts used*
Jumlah	**2,994,122**	**3,687,470**	***Total***

27. Beban Kepegawaian / *27. Personnel Expenses*

	2017 Rp	2016 Rp	
Tunjangan karyawan	1,377,992	966,048	*Employee allowances*
Gaji	456,145	327,469	*Salaries*
Imbalan kerja (Catatan 32)	383,355	410,108	*Employee benefits (Note 32)*
Tunjangan kesehatan	56,534	38,045	*Medical allowances*
Jumlah	**2,274,026**	**1,741,670**	***Total***

28. Beban Sewa / *28. Lease Expenses*

Akun ini merupakan biaya penyewaan mesin diesel dan genset yang ditentukan sebagai sewa operasi.

This account pertains to rental of diesel engines and gensets determined as operating leases.

29. Pajak Penghasilan / *29. Income Tax*

Beban pajak Perusahaan dan entitas anak terdiri dari:

Tax expense of the Company and subsidiaries consist of the following:

	2017 Rp	2016 Rp	
Beban pajak kini	35,918	21,979	*Current tax expense*
Beban pajak tangguhan	462,166	1,187,070	*Deferred tax expenses*
Jumlah beban pajak	**498,084**	**1,209,049**	***Total tax expense***

a. Pajak Kini / *a. Current Tax*

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi konsolidasian dan rugi fiskal Perusahaan adalah sebagai berikut:

A reconciliation between income before tax per consolidated statements of profit or loss and fiscal losses of the Company is as follows:

	2017 Rp	2016 Rp	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi konsolidasian	3,730,407	4,095,753	*Income before tax per consolidated statements of profit or loss*
Laba (rugi) sebelum pajak entitas anak	1,169,535	(23,103)	*Income (loss) before tax attributable to subsidiaries*
Laba sebelum pajak Perusahaan	4,899,942	4,072,650	*Income before tax - the Company*
Perbedaan temporer:			*Temporary differences:*
Imbalan kerja	127,361	165,941	*Employee benefits*
Sewa pembiayaan	--	(58,255)	*Lease expenses*
Penyusutan aset tetap	(6,387,122)	(17,473,670)	*Depreciation of property, plant and equipment*
Bonus	9,721	39,315	*Bonus*
Penurunan nilai persediaan	(352)	--	*Decline in value of inventories*
Biaya (pendapatan) yang tidak dapat diperhitungkan fiskal:			*Nondeductible expenses (nontaxable income)*
Kesejahteraan karyawan	394,072	227,270	*Employee welfare*
Bagian laba bersih entitas anak, asosiasi dan ventura bersama	(144,241)	(72,191)	*Share in net income of subsidiaries, associate and joint ventures*
Beban pembangunan komunitas	--	20,592	*Community development expenses*
Penghasilan bunga yang telah dikenakan pajak final	(66,940)	(33,203)	*Interest income already subjected to final tax*
Beban lain yang tidak dapat dikurangkan	424,846	630,104	*Other nondeductable expenses*
Rugi fiskal Perusahaan tahun berjalan	**(742,713)**	**(12,481,447)**	***The Company fiscal loss for the year***

Pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak. Nilai tersebut mungkin disesuaikan pada saat Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Current income tax is computed based on estimated taxable income. The amounts may be adjusted when the Annual Tax Returns are filed with the tax office.

Perhitungan beban dan utang pajak kini (pajak penghasilan lebih bayar) adalah sebagai berikut:

Current tax expense and payable (income tax overpayment) are as follows:

	2017 Rp	2016 Rp	
Beban pajak kini			*Current tax expense*
Perusahaan	--	--	*The Company*
Entitas anak	35,918	21,979	*Subsidiaries*
Jumlah	**35,918**	**21,979**	***Total***
Dikurangi pajak dibayar dimuka			*Less prepaid taxes*
Perusahaan	275,596	294,934	*The Company*
Entitas anak	24,575	23,228	*Subsidiaries*
Jumlah	**300,171**	**318,162**	***Total***
Lebih bayar pajak kini - bersih	264,253	296,183	*Current tax overpayment - net*
Terdiri dari			*Consist of*
Utang pajak kini - entitas anak	11,343	1,362	*Current tax payable - subsidiaries*
Pajak penghasilan lebih bayar			*Overpayment of income tax*
Perusahaan	275,596	294,934	*The Company*
Entitas anak	--	2,611	*Subsidiaries*
Jumlah pajak penghasilan lebih bayar	275,596	297,545	*Total overpayment of income tax*

b. Pajak Tangguhan

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan Perusahaan dan entitas anak adalah sebagai berikut:

b. Deferred Tax

The details of the Company and subsidiaries deferred tax assets and liabilities are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2016	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ *credited (charged) to profit or loss*	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lainnya/ *Credited to other comprehensive income*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	31 Desember/ *December 31,* 2017	
Aset Pajak Tangguhan						***Deferred Tax Assets***
Entitas anak – bersih	1,212	925	267	–	2,404	*Subsidiaries - net*
Liabilitas Pajak Tangguhan						***Deferred Tax Liabilities***
Liabilitas imbalan kerja	700,689	31,840	28,481	–	761,010	*Employee benefits liabilities*
Bonus	81,673	(2,430)	–	–	79,243	*Bonus*
Penyisihan persediaan	5,320	(353)	–	–	4,967	*Allowance inventories*
Sewa Pembiayaan	29,763	(42,303)	–	–	(12,540)	*Lease*
Aset tetap	(4,332,328)	(636,799)	–	–	(4,969,127)	*Property, plant and equipment*
Akumulasi rugi fiskal	3,120,362	185,678	–	–	3,306,040	*Accumulated fiscal losses*
Entitas anak - bersih	(18,646)	1,276	301		(17,069)	*Subsidiaries - net*
Liabilitas pajak tangguhan akhir tahun	**(413,167)**	**(463,091)**	**28,782**	**–**	**(847,476)**	***Deferred tax liabilities at the end of the year***
		(462,166)	**29,049**			

	1 Januari/ *January 1, 2016*	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited (charged) to profit or loss*	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lainnya/ *Credited (charged) to other comprehensive income*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	31 Desember/ *December 31, 2016*	
Aset Pajak Tangguhan						***Deferred Tax Assets***
Liabilitas imbalan kerja	666,637	41,485	(7,433)	(700,689)	--	*Employee benefits liabilities*
Bonus	75,991	5,682	--	(81,673)	--	*Bonus*
Penyisihan persediaan	1,471	3,849	--	(5,320)	--	*Inventory*
Sewa pembiayaan	39,474	(9,711)		(29,763)	--	*Lease*
Aset tetap	304,405	(4,361,176)	(275,557)	4,332,328	--	*Property, plant and equipment*
Akumulasi rugi fiskal	--	3,120,362	--	(3,120,362)	--	*Accumulated fiscal losses*
Entitas anak – bersih	305	907	--	--	1,212	*Subsidiaries - net*
Aset pajak tangguhan akhir tahun	**1,088,283**	**(1,198,602)**	**(282,990)**	**394,521**	**1,212**	***Deferred tax assets at the end of the year***
Liabilitas Pajak Tangguhan						***Deferred Tax Liabilities***
Liabilitas imbalan kerja	--	--	--	700,689	700,689	*Employee benefits liabilities*
Bonus	--	--	--	81,673	81,673	*Bonus*
Penyisihan persediaan	--	--	--	5,320	5,320	*Inventory*
Sewa Pembiayaan	--	--	--	29,763	29,763	*Lease*
Aset tetap	--	--	--	(4,332,328)	(4,332,328)	*Property, plant and equipment*
Akumulasi rugi fiskal	--	--	--	3,120,362	3,120,362	*Accumulated fiscal losses*
Entitas anak - bersih	(30,389)	11,532	211	--	(18,646)	*Subsidiaries - net*
Liabilitas pajak tangguhan akhir tahun	**(30,389)**	**11,532**	**211**	**(394,521)**	**(413,167)**	***Deferred tax liabilities at the end of the year***
		(1,187,070)	**(282,779)**			

Rekonsiliasi antara jumlah beban (manfaat) pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

Reconciliation between the total tax expense (benefit) and the amounts computed by applying the effective tax rates to income before tax is as follows:

	2017 Rp	2016 Rp	
Laba sebelum pajak menurut menurut laporan laba rugi konsolidasian	3,730,407	4,095,753	*Income before tax per consolidated statements of profit or loss*
Beban pajak sesuai tarif yang berlaku	932,601	1,023,938	*Tax expense at prevailing rate*
Pengaruh pajak atas:			*Tax effecf of:*
Aset (liabilitas) pajak tangguhan yang tidak diakui	--	75,683	*Unrecognized deferred tax asset (liabilities)*
Biaya (pendapatan) yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal			*Nondeductible expenses (nontaxable income)*
Kesejahteraan karyawan	98,518	56,818	*Employee welfare*
Bagian laba bersih entitas anak, asosiasi dan ventura bersama	(36,060)	(18,048)	*Share in net income of subsidiaries, associate and joint ventures*
Beban pembangunan komunitas	--	5,148	*Community development expenses*
Penghasilan bunga yang telah dikenakan pajak final	(16,735)	(8,301)	*Interest income already subjected to final tax*
Beban lain yang tidak dapat dikurangkan	106,212	157,526	*Other nondeductable expenses*
Penyesuaian pajak tangguhan	(586,452)	(83,715)	*Deferred tax adjustment*
Jumlah	**498,084**	**1,209,049**	***Total***

c. Lain-lain

1. Pada tanggal 27 Desember 2016, Perusahaan menerima surat keputusan Direktorat Jenderal Pajak No.KEP-72/WPJ/19/KP.03/2016 mengenai diterimanya permohonan Perusahaan atas perubahan metode depresiasi fiskal dari metode saldo menurun menjadi metode garis lurus. Keputusan ini berlaku efektif semenjak tanggal 1 Januari 2017.

2. Perusahaan dan entitas anak berpartisipasi dalam pengampunan pajak sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2016 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Tebusan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.

   Rincian Surat Ketetapan Pengampunan Pajak ("SKPP") yang diterbitkan oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia adalah:

c. *Others*

1. *On Desember 27, 2016, the Company received decision letter from Directorate General of Taxation No.KEP-72/WPJ/19/KP.03/2016 on the acceptance of the Company requisition on changing its depreciation method per fiscal from declining method into straight line method. This decision applied effectively since January 1, 2017.*

2. *The Company and subsidiaries were participated in Tax Amnesty in connection with the implementation of Regulation of the Minister of Finance No. 118/PMK.03/ 2016 on the Implementation of Law No. 11 of 2016 on Tax Amnesty, as amended by Regulation of the Minister of Finance No. 141/PMK.03/2016 and Directorate General of Tax Regulation No. PER-18/PJ/2016 on Redemption Payment of Excess Refund in the framework of Tax Amnesty. The Company participated this tax amnesty.*

   Details of Tax Amnesty Approval Letter ("SKPP") issued by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia are as follows:

Entitas / *Entity*	No. SKPP	Tanggal/ *Date*	Jumlah Aset pengampunan pajak/ *Total tax amnesty assets *)* Rp
Indonesia Power ("IP")	No. KEP-778/PP/WJP/19/2016	4 Oktober/ *October 4,* 2016	9,609
Artha Daya Coalindo ("ADC")	No. KET-1327/PP/WJP.19/2016	8 Desember/ *December 8,* 2016	635
			10,244

*) Tidak terdapat liabilitas pengampunan pajak yang dilaporkan/ *There is no tax amnesty liabilities declared*

3. Pada tanggal 27 November 2017, CDB menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") atas pajak pertambahan nilai masa April sampai dengan Desember tahun 2016 sebesar Rp10.428 dan dikompensasikan seluruhnya dengan pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Tagihan Pajak atas pajak pertambahan nilai masa April sampai dengan Desember tahun 2016 sebesar Rp10.880 dan dicatat sebagai beban lain-lain, bersih pada laporan laba rugi.

3. *On November 27, 2017, CDB received Surat Ketetapan Pajak lebih Bayar ("SKPLB") related to April to December 2016 value added tax amounting to Rp10,428 and fully compensated to paid Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Tagihan Pajak April to December 2016 amounting to Rp10,880 and recorded as other expenses, net in profit or loss.*

4. Pada tanggal 5 Januari 2018, ADC menerima SKPLB atas pajak penghasilan badan tahun 2016 yang menetapkan lebih bayar pajak badan tahun 2016 sebesar Rp570.

4. On January 5, 2018, ADC received SKPLB related to 2016 income tax which stipulate 2016 income tax overpayment amounting to Rp570.

30. Laba per Saham Dasar / *30. Basic Earnings per Share*

Laba bersih
Laba bersih untuk tujuan perhitungan laba per saham dasar tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp3.220.175 dan Rp2.885.017.

Jumlah saham
Rata-rata tertimbang saham untuk tujuan perhitungan laba per saham dasar adalah 5.215.647.600 saham tahun 2017 dan 2016.

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi dilusi saham, sehingga Perusahaan tidak menghitung laba per saham dasar dilusian.

Net income
Net income for computation of basic earnings per share in 2017 and 2016 amounted to Rp3,220,175 and Rp2,885,017, respectively.

Number of shares
The weighted average number of shares for computation of basic earnings per share was 5,215,647,600 shares in 2017 and 2016.

The Company did not calculate dilutive earnings per share because it has no potensial dilutive ordinary shares.

31. Dividen Tunai Dan Cadangan Umum / *31. Cash Dividends and General Reserve*

- Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 27 Juli 2017, pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih tahun 2016 untuk dividen sebesar Rp2.885.017.
- Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 7 Juni 2016, pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih tahun 2015 untuk dividen tunai sebesar Rp4.207.869.
- Pada tanggal 31 Desember 2017, pembayaran dividen kepada PT PLN (Persero) saling hapus dengan piutang usaha pihak berelasi (Catatan 37).

- *Based on Annual General Stockholders' Meeting dated July 27, 2017 the stockholders agreed to distribute the 2016 net income amounting to Rp2,885,017 as dividend.*
- *Based on Annual General Stockholders' Meeting dated June 7, 2016, the stockholders agreed to distribute the 2015 net income amounting to Rp4,207,869 as dividend.*
- *In December 31, 2017 the dividend payment to PT PLN (Persero) was offsetted against the trade account receivables from related parties (Note 37).*

32. Liabilitas Imbalan Kerja / *32. Employee Benefits Liabilities*

	2017 Rp	2016 Rp	
Liabilitas diakui di laporan posisi keuangan:			*Liabilities recognize on statements of financial position:*
Imbalan pascakerja			*Post - employment benefits*
Program pensiun	39,674	9,900	*Pension plan*
Imbalan pascakerja lain	1,316,594	1,224,897	*Other post - employment benefits*
Imbalan pemeliharaan kesehatan	1,639,513	1,488,014	*Health care benefits*
Imbalan jangka panjang lainnya	69,428	92,472	*Other long term benefits*
Jumlah	**3,065,208**	**2,815,283**	***Total***

	2017 Rp	2016 Rp	
Beban diakui di laba rugi: (Catatan 25)			*Expenses recognize in profit or loss: (Note 25)*
Imbalan pascakerja			*Post - employment benefits*
Program pensiun	7,969	31,412	*Pension plan*
Imbalan pascakerja lain	175,516	186,235	*Other post - employment benefits*
Imbalan Pemeliharaan kesehatan	163,564	143,517	*Health care benefits*
Imbalan jangka panjang lainnya	36,308	48,944	*Other long term benefits*
Jumlah	**383,357**	**410,108**	***Total***
Pengukuran kembali program imbalan pasti diakui di penghasilan komprehesif lain:			*Remeasurement on defined benefit plan recognized in other comprehensive income:*
Imbalan pascakerja			*Post - employment benefits*
Program pensiun	63,624	(4,738)	*Pension plan*
Imbalan pascakerja lain	56,750	(98,828)	*Other post - employment benefits*
Imbalan pemeliharaan kesehatan	22,916	74,679	*Health care benefits*
Jumlah	**143,290**	**(28,887)**	***Total***

Liabilitas Imbalan Pascakerja

Program Pensiun Imbalan Pasti
Perusahaan menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetap yang memenuhi syarat. Program pensiun ini memberikan imbalan berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan.

Dana pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun PLN ("DP-PLN"), pihak berelasi, yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. KEP-284/KM.17/1997 tanggal 15 Mei 1997.

DP-PLN telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam surat keputusan No. KEP-8/NB.1/2016 tanggal 11 Februari 2016 atas peningkatan imbalan pasti pensiun yang disediakan Perusahaan dan entitas anak dalam program dana pensiun.

Pendanaan DP-PLN terutama berasal dari iuran karyawan dan pemberi kerja masing-masing sebesar 6,00% dan 13,41% dari penghasilan dasar pensiun.

Imbalan Pemeliharaan Kesehatan
Selain program pensiun yang dikelola oleh DP-PLN, Perusahaan menyediakan imbalan program pemeliharaan kesehatan tanpa pendanaan bagi pensiunan dan tanggungannya yang memenuhi persyaratan.

Post-employment Benefits Liabilities

Defined Benefit Pension Plan
The Company established a defined benefit pension plan covering all of its eligible permanent employees. This pension plan provides benefits based on basic pension income and the period of employement.

This pension plan is managed by Dana Pensiun PLN ("DP-PLN"), a related party, whose deed of establishment was approved by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. KEP-284/KM.17/1997 dated May 15, 1997.

DP-PLN has obtained an approval from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. KEP-8/NB.1/2016 dated on February 11, 2016 in relation to the increase in pension benefits provided by the Company and subsidiaries' pension plan.

DP-PLN is mainly funded by contributions from both the employees and the employer, which are 6.00% and 13.41% from basic pension income, respectively.

Health Care Benefits
In addition to pension plan managed by DP-PLN, the Company also provide unfunded health care benefit plans for their pensioners and their eligible dependents.

Imbalan Pascakerja Lain
Selain dari program dana pensiun dan imbalan pemeliharaan kesehatan, Perusahaan dan entitas anak menyediakan imbalan pesangon dan penghargaan purna jabatan tanpa pendanaan bagi pegawai yang memenuhi syarat.

Other Post - employment Benefits
In addition to the pension plan and health care benefits, the Company and subsidiaries also provide unfunded severance benefits and completion of employment award for eligible employees.

Imbalan Jangka Panjang lainnya
Perusahaan dan entitas anak juga memberikan imbalan kerja jangka panjang tanpa pendanaan berupa uang cuti besar, tunjangan kecelakaan dinas, bantuan kematian dan pemakaman dan penghargaan winduan bagi karyawan yang memenuhi persyaratan.

Other Long Term Benefit
The Company and subsidiaries also provide unfunded defined long-term benefit plans such as long service leave, work accident, death and funeral allowances, and eight years service award for their qualifying employees.

Asumsi yang Digunakan dalam Perhitungan Liabilitas Imbalan Kerja

Assumption Used in the Calculations of Post Employment Benefits Obligation

	2017 dan/ *and* 2016	
Tabel mortalita	CSO-58	*Mortality table*
Tingkat pengunduran diri		*Resignation rate*
Usia 18 s.d. 49 tahun	0,27%	*Age 18 up to 49 years old*
Usia 50 s.d. 55 tahun	0,01%	*Age 50 up to 55 years old*
Usia Pensiun Normal	56 tahun/ *Years old*	*Normal Retirement Age*

Asumsi yang berhubungan dengan pengalaman mortalitas masa depan ditentukan berdasarkan saran aktuaris menurut statistik yang telah diterbitkan dan pengalaman setiap Perusahaan dan entitas anak. Asumsi mortalitas yang digunakan adalah tabel mortalita CSO-58 yang diterapkan dalam penghitungan liabilitas kerja jangka panjang yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Assumptions regarding future mortality experience are set based on actuarial advice in accordance with published statistics and experience by the Company and subsidiaries. The mortality assumptions used are based on the CSO-58 mortality table which applied in calculating the long term benefits liability recognized within the consolidated statement of financial position.

Penilaian aktuaria atas program pensiun, imbalan pascakerja lain, imbalan pemeliharaan kesehatan dan imbalan kerja jangka panjang lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuaria terdaftar, PT Binaputera Jaga Hikmah.

The actuarial calculation of pension plan, other post-employment benefits, health care benefits and other long-term benefits for the years ended December 31, 2017 and 2016 were prepared by a registered actuarial consulting firm, PT Binaputera Jaga Hikmah.

Pada tahun 2015, Perusahaan dan entitas anak melakukan studi untuk melihat tabel mortalitas mana yang paling sesuai dengan profil mortalitas pegawai dan pensiunan Perusahaan dan entitas anak. Dalam melakukan studi, Perusahaan dan entitas anak telah mempertimbangkan CSO-58, CSO-58 modifikasian, TMI 1 1993, TMI 2 1999, TMI 3 2011, dan Tabel Mortalita Taspen 2012. Dari studi tersebut, Perusahaan dan entitas anak menemukan bahwa tabel mortalitas yang paling

In 2015, the Company and subsidiaries conducted a study to determine which mortality tables that suits most with the Company and subsidiaries' employee and pensioners' mortality profile. In the study, the Company and subsidiaries have considered CSO-58, CSO-58 modified, TMI 1 1993, TMI 2 1999, TMI 3 2011, and Taspen mortality table 2012. Based on the study, the Company and subsidiaries found that mortality table that suits most with mortality profile of the Company and subsidiaries'

sesuai dengan profil mortalitas pegawai dan pensiunan Perusahaan dan entitas anak adalah CSO-58. Perusahaan dan entitas anak menerapkan CSO-58 secara retrospektif.

employees and pensioners is CSO-58. The Company and subsidiaries apply CSO-58 retrospectively.

(i) Program Pensiun

Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian ditentukan sebagai berikut:

(i) Pension Plan

The amounts recognized in the consolidated statement of financial position are determined as follows:

	DANA PENSIUN PT INDONESIA POWER (IP)		
	2017 Rp	2016 Rp	
Nilai kini kewajiban yang didanai	(738,607)	(657,763)	*Present value of funded obligations*
Aset program yang tidak diakui	–	–	*Plan asset not recognized*
Nilai wajar aset program	698,933	647,863	*Fair value of plan assets*
Defisit (surplus) program yang didanai	(39,674)	(9,900)	*Deficit (surplus) of funded plans*
Nilai kini kewajiban yang tidak didanai	–	–	*Present value of unfunded obligations*
Liabilitas pada laporan posisi keuangan	(39,674)	(9,900)	*Liability in the statement of financial position*

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Movement its of present value of defined benefit obligation during the year is as follows:

	2017 Rp	2016 Rp	
Pada awal tahun	657,763	576,144	*At beginning of the year*
Dibebankan ke laba rugi			*Charged to profit or loss:*
Biaya jasa kini	14,516	16,799	*Current service cost*
Biaya bunga	53,741	51,055	*Interest expense*
	68,257	67,854	
Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain:			*Charge to other comprehensive income:*
(Keuntungan) kerugian aktuarial dari:			*Actuarial (gain) loss from change in:*
Perubahan asumsi demografik	–	21,298	*Demographic assumptions*
Perubahan asumsi keuangan	24,062	(56,094)	*Financial assumptions*
Kombinasi perubahan asumsi	–	(10,302)	*Combination of change in assumptions*
Penyesuaian atas pengalaman	39,562	100,047	*Experience adjustment*
	789,644	698,947	
Pembayaran manfaat	(51,037)	(41,184)	*Benefit payment*
Pada akhir tahun	738,607	657,763	*At the end of the year*

Mutasi nilai wajar aset program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Movement of fair value of plan assets during the year is as follows:

	2017 Rp	2016 Rp	
Pada awal tahun	647,863	638,215	*At beginning of the year*
Imbal hasil atas aset program	53,801	28,938	*Return on plan assets*
Iuran pemberi kerja	14,655	16,774	*Employer's contributions*
Iuran pekerja	6,557	7,505	*Employee's contributions*
Pembayaran manfaat	(51,037)	(41,185)	*Benefit payment*
Kerugian (keuntungan) aktuarial pada aset program	27,094	(2,384)	*Actuarial loss (gain) on plan asets*
Pada akhir tahun	**698,933**	**647,863**	*At the end of the year*

Aset program terdiri dari:

Plan assets comprise the following:

	2017				2016				
	Memiliki kuotasi harga/ *Quoted Price* Rp	Tidak memiliki kuotasi harga/ *Unquoted Price* Rp	Jumlah/ *Total* Rp	%	memiliki kuotasi harga/ *Quoted Price* Rp	Tidak memiliki kuotasi harga/ *Unquoted Price* Rp	Jumlah/ *Total* Rp	%	
Instrumen ekuitas	–	130,188	130,188	18.63%	–	92,026	92,026	14.21%	*Equity instruments*
Instrumen utang	–	352,168	352,168	50.39%	–	348,236	348,236	53.75%	*Debt instruments*
Properti	–	74,851	74,851	10.71%	–	71,969	71,969	11.11%	*Property*
Kas dan setara kas	–	44,129	44,129	6.31%	–	43,434	43,434	6.70%	*Cash and cash equivalent*
Lain - lain	–	97,597	97,597	13.96%	–	92,198	92,198	14.23%	*Others*
Jumlah	–	**698,933**	**698,933**	**100%**	–	**647,863**	**647,863**	**100%**	***Total***

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2017	2016	
Tingkat diskonto	7.3%	8.5%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5%	5%	*Salary increase rate per annum*

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ *Impact on defined benefit obligation*			
	Perubahan asumsi/ *Change in Assumption*	Kenaikan asumsi/ *Increse in assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption*	
Tingkat diskonto	1%	Penurunan sebesar/ *Decrease by 2,73%*	Kenaikan sebesar/ *Increase by 3,09%*	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	1%	Kenaikan sebesar/ *Increase by 3,10%*	Penurunan sebesar/ *Decrease by 2,77%*	*Salary increase rate*
Tingkat mortalitas	1%	Penurunan sebesar/ *Decrease by 0.03%*	Kenaikan sebesar/ *Increase by 0.03%*	*Mortality rate*

Analisa sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Imbalan perhitungan sensitivitas liabilitas kerja jangka panjang atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini liabilitas imbalan kerja jangka panjang dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja jangka panjang yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

The sensitivity analysis are based on a change in a single assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the long term benefits liabilities to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the long term benefits liabilities calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the long term benefits liabilities recognized in the consolidated statement of financial position.

(ii) Imbalan Pascakerja Lain
Mutasi kewajiban imbalan pascakerja lainnya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

(ii) Other Post-Employment Benefits
Movement of post-employment benefits obligation during the year is as follows:

	2017 Rp	2016 Rp	
Pada awal tahun	1,224,897	1,284,593	*At beginning of the year*
Dibebankan ke laba rugi			*Charged to profit or loss*
Biaya jasa kini	78,401	75,744	*Current service cost*
Biaya bunga	97,115	110,491	*Interest expense*
	175,516	186,235	
Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain:			*Charge to other comprehensive income:*
(Keuntungan) kerugian aktuarial dari:			*Actuarial (gain) loss from change in:*
Perubahan asumsi demografik	–	1,984	*Demographic assumptions*
Perubahan asumsi keuangan	(13,886)	61,384	*Financial assumptions*
Kombinasi perubahan asumsi	(27,357)	225	*Combination of change in assumptions*
Penyesuaian atas pengalaman	97,993	(162,421)	*Experience adjustment*
	1,457,163	1,372,000	
Pembayaran manfaat	(140,569)	(147,103)	*Benefit payment*
Pada akhir tahun	1,316,594	1,224,897	*At the end of the year*

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2017	2016	
Tingkat diskonto	7.24%	8,42%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7.20%	8,70%	*Salary increase rate per annum*

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

		Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ *Impact on defined benefit obligation*		
	Perubahan asumsi/ *Change in Assumption*	Kenaikan asumsi/ *Increse in assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption*	
Tingkat diskonto	1%	Penurunan sebesar/ *Decrease by 7,34%*	Kenaikan sebesar/ *Increase by 8,56%*	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	1%	Kenaikan sebesar/ *Increase by 8,72%*	Penurunan sebesar/ *Decrease by 7,63%*	*Salary increase rate*
Tingkat mortalitas	1%	Penurunan sebesar/ *Decrease by 0,001%*	Kenaikan sebesar/ *Increase by 0,001%*	*Mortality rate*

(iii) Imbalan Pemeliharaan Kesehatan
Perusahaan dan entitas anak memiliki beberapa skema imbalan pemeliharaan kesehatan pascakerja. Metode akuntansi, asumsi dan frekuensi penilaian adalah sama dengan yang digunakan dalam skema pensiun imbalan pasti.

(iii) Health Care Benefits
The Company and subsidiaries operate a number of post-employment health care benefit schemes. The accounting method, assumptions and the frequency of valuations are similar to those used for defined benefit pension schemes.

Mutasi kewajiban imbalan pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Movement of defined benefit obligation over the year is as follows:

	2017 Rp	2016 Rp	
Pada awal tahun	1,488,014	1,305,460	*At beginning of the year*
Dibebankan ke laba rugi			*Charged to profit or loss:*
Biaya jasa kini	38,569	25,183	*Current service cost*
Biaya bunga	124,995	118,334	*Interest expense*
	163,564	143,517	
Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain:			*Charge to other comprehensive income:*
(Keuntungan) kerugian aktuarial dari:			*Actuarial (gain) loss from change in:*
Perubahan asumsi demografik	–	33,449	*Demographic assumptions*
Perubahan asumsi keuangan	259,051	126,545	*Financial assumptions*
Kombinasi perubahan asumsi	–	4,539	*Combination of change in assumptions*
Penyesuaian atas pengalaman	(236,135)	(89,854)	*Experience adjustment*
	1,674,494	1,523,656	
Pembayaran manfaat	(34,981)	(35,642)	*Benefit payment*
Pada akhir tahun	1,639,513	1,488,014	*At the end of the year*

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2017	2016	
Tingkat diskonto	7.29%	8.5%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan biaya kesehatan jangka panjang	6.0%	6.0%	*Long-term increase rate in health cost*

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ *Impact on defined benefit obligation*			
	Perubahan asumsi/ *Change in Assumption*	Kenaikan asumsi/ *Increse in assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption*	
Tingkat diskonto	1%	Penurunan sebesar/ *Decrease by 13,35%*	Kenaikan sebesar/ *Increase by 16,83%*	*Discount rate*
Tingkat kenaikan biaya kesehatan	1%	Kenaikan sebesar/ *Increase by 13,63%*	Penurunan sebesar/ *Decrease by 11,12%*	*Health Care increase rate*
Tingkat mortalitas	1%	Penurunan sebesar/ *Decrease by 0,63%*	Kenaikan sebesar/ *Increase by 0,64%*	*Mortality rate*

(iv) Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Mutasi kewajiban imbalan pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

(iv) Other Long-term Employee Benefits

Movement of defined benefit obligation during the year is as follows:

	2017 Rp	2016 Rp	
Pada awal tahun	92,472	83,839	*At beginning of the year*
Dibebankan ke laba rugi			*Charged to profit or loss*
Biaya jasa kini	31,020	28,000	*Current service cost*
Biaya bunga	5,288	5,802	*Interest expense*
	36,308	33,802	

	2017 Rp	2016 Rp	
Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain:			*Charge to other comprehensive income:*
(Keuntungan) kerugian aktuarial dari:			*Actuarial (gain) loss from change in:*
Perubahan asumsi demografik	–	(30)	*Demographic assumptions*
Perubahan asumsi keuangan	–	1,200	*Financial assumptions*
Kombinasi perubahan asumsi	–	–	*Combination of change in assumptions*
Penyesuaian atas pengalaman	–	13,972	*Experience Adjustment*
	128,780	132,783	
Pembayaran manfaat	(59,352)	(40,311)	*Benefit payment*
Pada akhir tahun	**69,428**	**92,472**	***At the end of the year***

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2017	2016	
Tingkat diskonto	7.24%	8.42%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7.20%	8.70%	*Salary increase rate per annum*

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ *Impact on defined benefit obligation*			
	Perubahan asumsi/ *Change in Assumption*	Kenaikan asumsi/ *Increse in assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption*	
Tingkat diskonto	1%	Penurunan sebesar/ *Decrease by 2,68%*	Kenaikan sebesar/ *Increase by 2,86%*	*Discount rate*
Tingkat kenaikan biaya kesehatan	1%	Kenaikan sebesar/ *Increase by 2,78%*	Penurunan sebesar/ *Decrease by 2,66%*	*Health Care increase rate*
Tingkat mortalitas	1%	Penurunan sebesar/ *Decrease by 0,01%*	Kenaikan sebesar/ *Increase by 0,01%*	*Mortality rate*

Perusahaan dan entitas anak terekspos dengan beberapa risiko melalui program imbalan pasti dan program kesehatan pasca-kerja. Risiko yang paling signifikan adalah sebagai berikut:

The Company and subsidiaries are exposed to a number of risks through its defined benefit pension plans and post-employment medical plans. The most significant risks are as follow:

Volatilitas aset
Liabilitas program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada tingkat imbal hasil surat utang negara. Jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program

Asset volatility
The plan liabilities are calculated using a discount rate set with reference to government bond yields. It the yield of plan assets is lower, it will generate a deficit program.

Harapan umur hidup
Sebagian besar dari liabilitas program menyediakan manfaat seumur hidup, sehingga kenaikan harapan umur hidup akan mengakibatkan kenaikan liabilitas program.

Life expectancy
The majority of the plans' obligations are to provide lifetime benefits, so that the increase in life expectancy will result in an increase in the plans' liabilities.

Investasi didiversifikasi dengan baik, sehingga kinerja buruk satu investasi tidak akan memberikan dampak material bagi seluruh kelompok aset. Proporsi terbesar aset investasi ditempatkan pada instrumen ekuitas, meskipun Perusahan dan entitas anak juga berinvestasi pada properti, obligasi, instrumen lindung nilai dan kas. Perusahaan dan entitas anak meyakini bahwa instrumen ekuitas memberikan imbal hasil yang paling baik dalam jangka panjang pada tingkatan risiko yang dapat diterima.

Investments are well-diversified, such that the failure of any single investment would not have a material impact for the entire class of assets. The largest proportion of assets is invested in equities, although the Company and subsidiaries also invests in property, bonds, hedge funds and cash. The Company and subsidiaries believes that equities offer the best returns over the long term with an acceptable level of risk.

Rata-rata durasi kewajiban imbalan pasti adalah 25 tahun.

The weighted average duration of the defined benefit obligation is 25 years.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted post-employment benefit and other long-term benefit is as follows:

	Kurang dari 1 tahun/ *Less than a year*	1 sampai 2 tahun/ *Between 1 -2 years*	2 sampai 5 tahun/ *Between 2 - 5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More that 5 years*	Jumlah/ *Total*	
Imbalan pascakerja program pensiun	47,994	49,486	58,036	1,055,382	1,210,898	*Post-employment benefit Pension plan*
Imbalan pascakerja lainnya	15,927	17,591	83,319	158,828	275,665	*Other post-employment benefit*
Imbalan pemeliharaan kesehatan	40,177	45,458	59,996	3,862,585	4,008,216	*Health care benefits*
Imbalan kerja jangka panjang	135,022	161,454	274,136	10,534,296	11,104,908	*Long term benefits*
Total	**239,120**	**273,989**	**475,487**	**15,611,091**	**16,599,687**	***Total***

Jumlah liabilitas dan beban imbalan kerja pada dan untuk tahun 2017 dan 2016 diestimasi berdasarkan perhitungan aktuaris PT Binaputera Jaga Hikmah.

Total liabilities and expenses of employee benefits as of and for years 2017 and 2016 were estimated based on calculation of actuary PT Binaputera Jaga Hikmah.

33. Sifat dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

33. Nature of Relationship and Transactions with Related Parties

Sifat Pihak berelasi:

a. Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham PLN dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
b. PLN dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) merupakan pemegang saham Perusahaan.
c. Perusahaan dan entitas anak mempunyai pengaruh signifikan atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama (Catatan 8).

Nature of Relationship:

a. Government of the Republic of Indonesia is the stockholder of the PLN and State-Owned Enterprises (BUMN).
b. PLN and Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) are the stockholder of the Company.
c. The Company and subsidiaries have significant influence on investments in associates or joint ventures (Note 8).

d. PT Pembangkitan Jawa-Bali ("PJB"), PT Pelayanan Listrik Nasional Batam ("PLN Batam"), PT PLN Batubara, dan PT Indonesia Comnets Plus merupakan perusahaan yang pemegang sahamnya sama dengan pemegang saham utama Perusahaan dan atau sebagian pengurusnya sama dengan Perusahaan.
e. Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Perusahaan.

d. PT Pembangkitan Jawa-Bali ("PJB"), PT Pelayanan Listrik Nasional Batam ("PLN Batam"), PT PLN Batubara, and PT Indonesia Comnets Plus are companies which have the same principal stockholder and or management as the Company.

e. Board of Commissioners and Directors are member of the key management of the Company.

Transaksi Pihak Berelasi
Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Perusahaan:

Transactions with Related Parties
Below is the list of related parties with which the Company has transactions:

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan/ *Nature of relationship*	Sifat transaksi/ *Nature of transaction*
PLN	Pemegang saham Perusahaan/ *stockholders of the Company*	Transaksi pembelian tenaga listrik/ *Purchase of electricity*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Bank Rakyat Indonesia")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan kas dan setara kas, dan investasi jangka pendek/ *Placement of cash and cash equivalents, and short-term investment*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan kas dan setara kas, dan investasi jangka pendek/ *Placement of cash and cash equivalents, and short-term investment*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Bank Negara Indonesia")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan kas dan setara kas, dan investasi jangka pendek/ *Placement of cash and cash equivalents, and short-term investment*
PT Pertamina Geothermal Energy	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian tenaga listrik/ *Purchase of electricity*
PT Wijaya Karya - Mirlindo Padu Kencana	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian tenaga listrik/ *Purchase of electricity*
PT Pertamina (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian bahan bakar dan minyak pelumas/ *Purchase of fuels and lubricants*
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian bahan bakar/ *Purchase of fuels*
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan/ *and* PT Nusantara Regas	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian bahan bakar/ *Purchase of fuels*
PT Wijaya Karya	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi jasa konstruksi/ *Construction services transaction*
PT Surveyor Indonesia dan/ *and* PT Sucofindo (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pelayanan teknik, survei dan pengukuran batubara/ *Engineering services, survey and coal measurement*
PT Asuransi Jasa Indonesia	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Asuransi bangunan, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi serta kapal milik Perusahaan/ *Insurance services for Company's buildings, installation and power plant, transmission equipment and vessels*

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan/ *Nature of relationship*	Sifat transaksi/ *Nature of transaction*
Perum Jasa Tirta	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian tenaga listrik/ *Purchase of electricity*
PDG dan/ *and* REP	Ventura bersama/ *Joint venture*	Pemberian pinjaman jangka panjang/ *Issuance of long-term loan*
Dana pensiun PLN	Program imbalan pascakerja/ *Post-employment benefit plan*	Pembayaran kontribusi program manfaat pasti/ *Payment of contribution for defined benefit plan*

Saldo dan Transaksi dengan Pihak berelasi / *Balances and Transactions with Related Parties*

	Catatan/ *Notes*	2017 Rp	2017 % *)	2016 Rp	2016 % *)	
Piutang pihak berelasi	10					*Receivable from related parties*
PDG		224,742	0.10%	260,085	0.12%	*PDG*
REP		263,351	0.12%	236,374	0.11%	*REP*
Lain-lain		24,643	0.01%	27,011	0.01%	*Others*
Sub jumlah		512,736	0.24%	523,470	0.25%	*Subtotal*
Kas dan setara kas	12					*Cash and cash equivalent*
Bank Negara Indonesia		1,399,680	0.64%	962,769	0.44%	*Bank Negara Indonesia*
Bank Rakyat Indonesia		2,795,715	1.28%	63,984	0.03%	*Bank Rakyat Indonesia*
Bank Mandiri		581,986	0.27%	413,982	0.19%	*Bank Mandiri*
Sub jumlah		4,777,381	2.20%	1,440,735	0.66%	*Subtotal*
Aset keuangan dari konsesi jasa	8					*Financial asset of service concession*
PLN		46,487,520	21.29%	–	–	*PLN*
Piutang usaha	13					*Trade accounts receivable*
PLN		25,617,750	11.73%	21,615,875	9.79%	*PLN*
Jumlah		**77,395,387**	**35.47%**	**23,580,080**	**10.70%**	***Total***
Utang usaha	20					*Trade accounts payable*
PT Pertamina		90,082	0.98%	87,169	1.14%	*PT Pertamina*
PT Bukit Asam (Persero) Tbk		966,765	10.50%	430,811	5.62%	*PT Bukit Asam (Persero) Tbk*
PT Nusantara Regas		–	0.00%	92,815	1.21%	*PT Nusantara Regas*
PT Perusahaan Gas Negara		–	0.00%	117,718	1.54%	*PT Perusahaan Gas Negara*
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna		1,165	0.01%	17,034	0.22%	*PT Pelayaran Bahtera Adhiguna*
Lain-lain		121,167	1.32%	209,866	2.74%	*Others*
Sub jumlah		1,179,179	12.81%	955,413	12.47%	*Subtotal*
Utang pihak berelasi						*Payable to related parties*
PLN		–	0.00%	24,670	0.32%	*PLN*
PT Indonesia Comnets Plus		–	0.00%	9,238	0.12%	*PT Indonesia Comnets Plus*
PJB		16,564	0.18%	–	0.00%	*PJB*
Dana Pensiun PLN		–	0.00%	–	0.00%	*Dana Pensiun PLN*
PT Haleyora Power		–	0.00%	3,888	0.05%	*PT Haleyora Power*
Sub jumlah		16,564	0.18%	37,796	0.49%	*Subtotal*
Jumlah		**1,195,743**	**12.99%**	**993,209**	**12.97%**	***Total***
Penjualan tenaga listrik	23					*Sales of electricity*
PLN		20,974,180	53.18%	34,504,119	94.00%	*PLN*
Pendapatan konsesi jasa	8					*Revenue of service concession*
PLN		15,592,752	39.54%	34,504,119	94.00%	*PLN*
Pendapatan Jasa	24					*Service revenues*
PLN		2,869,486	7.28%	2,179,956	5.94%	*PLN*
Jumlah		**39,436,418**	**100.00%**	**36,684,075**	**99.94%**	***Total***
Beban usaha dan konsesi jasa - bahan bakar dan pelumas	25					*Operating and service concession expenses - fuel and lubricants*
PT Pertamina (Persero)		766,551	2.19%	766,551	2.35%	*PT Pertamina (Persero)*
PT Bukit Asam (Persero) Tbk		2,364,553	6.74%	2,364,553	7.25%	*PT Bukit Asam (Persero) Tbk*
PT Perusahaan Gas Negara		1,525,235	4.35%	1,525,235	4.68%	*PT Perusahaan Gas Negara*
PT Nusantara Regas		4,349,006	12.40%	4,349,006	13.34%	*PT Nusantara Regas*
PT PLN Batubara		1,869,452	5.33%	545,913	1.67%	*PT PLN Batubara*
Lain-lain		201,430	0.57%	201,430	0.62%	*Others*
Sub jumlah		11,076,227	31.58%	9,206,775	28.24%	*Subtotal*
Beban usaha lain-lain						*Other operating expenses*

	Catatan/ Notes	2017 Rp	2017 % *)	2016 Rp	2016 % *)	
PJB		301,422	3.22%	163,702	1.54%	*PJB*
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna		269,363	2.87%	270,903	2.55%	*PT Pelayaran Bahtera Adhiguna*
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)		108,302	1.16%	108,302	1.02%	*PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)*
Lain-lain		52,791	0.56%	10,138	0.10%	*Others*
Sub jumlah		679,087	7.25%	108,302	5.11%	*Subtotal*
Jumlah		**11,755,314**	**38.83%**	**9,315,077**	**33.35%**	***Total***

*) Persentase terhadap jumlah aset/ liabilitas/ pendapatan/ beban yang bersangkutan

*) *Percentage to related total assets/ liabilities/ revenues/ expenses*

Jumlah kompensasi yang dibayarkan kepada Direksi dan Komisaris Perusahaan tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp53.207 dan Rp29.430.

Total remuneration paid to the Company Board of Directors and Commissioners in 2017 and 2016 amounted to Rp53,207 and Rp29,430.

34. Aset dan Liabilitas Moneter Dalam Mata Uang Asing

34. Monetary Assets and Liabilities Denominated In Foreign Currencies

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan dan entitas anak mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

As of December 31, 2017 and 2016, the Company and subsidiaries had monetary assets and liabilities in foreign currencies as follows:

	2017				
	JPY *)	USD *)	EUR *)	Lain-lain / *Others* **)	
Aset Moneter					***Monetary assets***
Kas dan setara kas	6,929,962	2,836,188	113,024	--	*Cash and cash equivalents*
Piutang pihak berelasi	--	25,597,777	--	--	*Receivables from related parties*
Jumlah aset moneter	6,929,962	28,433,965	113,024	--	*Total monetary assets*
Liabilitas Moneter					***Monetary liabilities***
Utang usaha	--	35,889,764	1,863,967	--	*Trade payables*
Jumlah liabilitas moneter	--	35,889,764	1,863,967	--	*Total monetary liabilities*
Aset (Liabilitas) moneter bersih	6,929,962	(7,455,799)	(1,750,943)	--	*Net monetary Assets (liabilities)*
Ekuivalent rupiah (dalam jutaan)	832	(101,011)	(28,320)	--	*Rupiah equivalent (in millions)*
Jumlah dalam Rupiah - bersih (dalam jutaan)	**(128,499)**				***Total in Rupiah - net (in millions)***

	2016				
	JPY *)	USD *)	EUR *)	Lain-lain / *Others* **)	
Aset Moneter					***Monetary assets***
Kas dan setara kas	180,389	2,105,079	334,230	457,750	*Cash and cash equivalents*
Piutang pihak berelasi	--	28,297,451	--	--	*Receivables from related parties*
Jumlah aset moneter	180,389	30,402,530	334,230	457,750	*Total monetary assets*
Liabilitas Moneter					***Monetary liabilities***
Utang sewa pembiayaan	--	13,343,608	--	--	*Lease liabilities*
Utang usaha	--	116,507,270	--	--	*Trade payables*
Jumlah liabilitas moneter	--	129,850,878	--	--	*Total monetary liabilities*
Aset (Liabilitas) moneter bersih	180,389	(99,448,348)	334,230	457,750	*Net monetary Assets (liabilities)*
Ekuivalent rupiah (dalam jutaan)	21	(1,336,188)	4,733	6,150	*Rupiah equivalent (in millions)*
Jumlah dalam Rupiah - bersih (dalam jutaan)	**(1,325,284)**				***Total in Rupiah - net (in millions)***

*) Dalam jumlah penuh
**) Aset dan liabilitas dalam mata uang asing lainnya disajikan setara US$ dengan menggunakan kurs tanggal pelaporan

*) *In full amount*
**) *Assets and liabilities denominated in other foreign currencies are presented as US$ equivalent using the exchange rate prevailing at the reporting date*

Sehubungan dengan fluktuasi kurs mata uang Rupiah terhadap mata uang asing, Perusahaan dan entitas anak mencatat laba kurs mata uang asing bersih sebesar Rp3.081 untuk tahun 2017 dan laba kurs sebesar Rp77.071 untuk tahun 2016.

In relation to the fluctuation of the Rupiah against foreign currencies, the Company and subsidiaries recorded net gain on foreign exchange of Rp3,081 for 2017 and net gain amounted to Rp77,071 for 2016.

Apabila aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2017 dijabarkan dengan menggunakan kurs penutupan mata uang asing pada tanggal 23 Februari 2018, maka liabilitas bersih dalam mata uang asing Perusahaan dan entitas anak akan turun sebesar Rp123.478.

If assets and liabilities in foreign currencies as of December 31, 2017 had been translated using the closing rates at issuance of February 23, 2018, the total net foreign currency liabilities of the Company and subsidiaries would have been decrease by Rp123,478.

35. Ikatan dan Kontinjensi / *35. Commitments and Contingencies*

Perusahaan dan entitas anak memiliki perikatan penting dan kontinjensi sebagai berikut:

The Company and subsidiaries have significant commitments and contingencies as follows:

a. PJBTL

Perusahaan dan entitas anak memiliki sejumlah PJBTL dengan PLN. Dalam perjanjian tersebut, PLN membayar pasokan tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan dan entitas anak sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan formula pembayaran. Pembayaran tersebut mencakup komponen biaya kapasitas,

a. PJBTL

The Company and subsidiaries have various PJBTL with PLN. Under those agreements, PLN will pay the Company and subsidiaries for the supply of electricity at an amount determined in accordance with the payment formula. Such payment formula includes cost of capacity, energy, as well as operations and maintenance components which

energi, operasional dan pemeliharaan yang tergantung pada tingkat pasokan energi serta variabel lain yang ditentukan dalam perjanjian.

depends on the level of energy supplied and other variables stipulated in the agreement.

b. Perjanjian Pasokan Bahan Bakar
(i) Gas

b. Fuel Supply Agreements
(i) Gas

Sektor/ *Sector*	Pemasok/ *Suppliers*	No. Perjanjian/ *Agreement no.*	Periode/ *period*	Satuan/ *Unit of measure*	Jumlah yang disepakati/ *Agreed quantity *)*
Tanjung Priok	**)	002701.Amd/HK.02/COD/2017	2017	BBTUD	27.27-30
		0135-2.PJ/EPI.03.02/DITDAN/2(	2017	BBTUD	30-36
Muara Karang dan Tanjung Priok	***)	0198-2.Pj/EPI.03.02/DITDAN/20	2017 - 2022	BBTUD	110
	****)	273.PJ/041/DIR/2012	2012 - 2022	juta Ton LNG	11.03
Grati	*****)	–	2009 - 2020	TBTU	114
		115.PJ/061/IP/2010	2012 - 2020	TBTU	106
Tambak Lorok	******)	97.PJ/061/IP/2007	2014 - 2029	TBTU	219
	*******)	107.PJ/061/IP/2012	2015 - 2026	Bcf	354
Bali	********)	01888.PJ/EPI.01.02/DIR/2016	2016 - 2017	m3	424,603

*) Dalam angka penuh
**) PT Perusahaan Gas Negara ("PGN")
***) Pertamina Hulu Energi ONWJ Ltd.; Itochu Oil Exploration Co. Ltd., Orchard Energy Java BV.; Inpex Jawa Ltd.; CNOOC ONWJ Ltd.; dan Talisman Resources (North West Java) Ltd.
****) PT Nusantara Regas. Perusahaan patungan antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
*****) Santos (Sampang) Pty Ltd., Singapore Petroleum Sampang Ltd dan Cue Sampang Pty Ltd.
******) PT Sumber Petrindo Perkasa
*******) PC Muriah Ltd
********)PT Pertamina (Persero), Total E&P Indonesia

*) *In full amount*
**) *PT Perusahaan Gas Negara ("PGN")*
***) *Pertamina Hulu Energi ONWJ Ltd.; Itochu Oil Exploration Co. Ltd., Orchard Energy Java BV.; Inpex Jawa Ltd.; CNOOC ONWJ Ltd.; and Talisman Resources (North West Java) Ltd.*
****) *PT Nusantara Regas, a Joint venture between PT Pertamina (Persero) with PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.*
*****) *Santos (Sampang) Pty Ltd., Singapore Petroleum Sampang Ltd and Cue Sampang Pty Ltd.*
******) *PT Sumber Petrindo Perkasa*
*******) *PC Muriah Ltd*
********)*PT Pertamina (Persero), Total E&P Indonesia*

(ii) Batubara

(ii) Coal

Pemasok/ *Suppliers*	No. Kontrak/ *Contract No.*	Jumlah dalam metrik ton/ *Total in metric tons *)*	Periode/ *Period*
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	12.PJ/061/IP/2013	3,400,000	2013 - 2022
PT Eksploitasi Energi Indonesia	04/PJ/061/IP/2006	480,000	2006 - 2018
PT Oktasan Baruna Persada	13.PJ/061/IP/2006	660,000	2006 - 2019
PT Berau Coal	84.PJ/061/IP/2008	2,500,000	2009 - 2018
PT Kideco Jaya Agung	85.PJ/061/IP/2008	1,500,000	2009 - 2018
PT Adaro Indonesia	117.PJ/061/IP/2014	1,500,000	2014 - 2023

*) Dalam angka penuh

*) *In full amount*

Harga pembelian batubara berkisar antara Rp716.000 (angka penuh) dan Rp1.068.863 (angka penuh) per ton sebelum penyesuaian spesifikasi batubara.

The purchase price of coal ranges from Rp716,000 (full amount) to Rp1,068,863 (full amount) per ton, which is adjusted against coal specification.

(iii) Bahan Bakar Minyak
Perusahaan melalui PLN dan PT Pertamina (Persero) ("Pertamina") mengadakan Perjanjian Payung Jual Beli Bahan Bakar Minyak No. 071.PJ/060/DIR/2001 tanggal 8 Oktober 2001. Perjanjian ini telah diadendum tanggal 16 Mei 2007 dimana PLN dan Pertamina menyepakati antara lain: (i) penggunaan harga bahan bakar bulanan ditetapkan oleh Pertamina untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 April 2007 dan harga bahan bakar 109,5% dari Mean Oil Platts Singapore ("MOPS") ditambah Pajak Pertambahan Nilai untuk periode 1 Mei 2007 sampai dengan 31 Desember 2007; (ii) harga bahan bakar setelah tanggal 31 Desember 2007 akan ditetapkan oleh kedua belah pihak setiap tahun; (iii) jangka waktu pembayaran berikut pengenaan denda keterlambatan pembayaran sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia bulanan ditambah 1,3%; (iv) efektif mulai 1 Mei 2007, saldo utang yang belum dibayar atas pembelian bahan bakar sampai dengan 30 April 2007 dikenakan bunga sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia per tahun ditambah 1,3%, sampai diselesaikan dengan menerbitkan obligasi PLN selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2007; (v) utang kepada Pertamina, termasuk obligasi yang akan diterbitkan maksimum sebesar Rp18 triliun; dan (vi) perjanjian ini berlaku untuk lima tahun sejak 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2011.

(iii) Fuel
The Company, through PLN and PT Pertamina (Persero) ("Pertamina") entered into a Fuel Sale and Purchase Agreement No. 071.PJ/060/DIR/2001 dated October 8, 2001. This agreement was amended on May 16, 2007, whereby, PLN and Pertamina agreed among others: (i) the monthly fuel price to be used for the period January 1 until April 30, 2007 is determined by Pertamina, and the fuel price of 109.5% from Mean Oil Platts Singapore ("MOPS") plus Value Added Tax for the period May 1, 2007 until December 31, 2007; (ii) the fuel price subsequent to December 31, 2007 will be determined by both parties every year; (iii) the terms of payment and penalty charges on late payment with a rate of monthly Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%; (iv) effective on May 1, 2007, the unpaid balance of payable for the purchases of fuel until April 30, 2007 will bear interest with a rate per annum of Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%, until settled by issuance of PLN bonds, which is no later than August 31, 2007; (v) the maximum payable to Pertamina, includes bonds which will be issued amounting to Rp18 trillion; and (vi) this agreement is valid for five years from January 1, 2007 until December 31, 2011.

Berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 16 Mei 2007, PT Sucofindo (Persero) ditunjuk sebagai independent surveyor.

Based on the Joint Deal Letter dated May 16, 2007, PT Sucofindo (Persero) is assigned as an independent surveyor.

Berdasarkan Addendum III Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak tanggal 7 November 2011, PLN dan Pertamina menyepakati dalam tahun 2011 sebagai berikut:

Based on Amendment III of the Fuel Sale and Purchase Agreement dated November 7, 2011, PLN and Pertamina agreed in 2011 on the following:

1. *High Speed Diesel* ("HSD")
   - Harga pembelian HSD sampai dengan 2.537.161 kiloliter (kl) di 18 titik penyerahan Pertamina adalah 105% dari MOPS.
   - Harga pembelian HSD sampai dengan 480.487 kl di titik penyerahan Pertamina Terminal Transit Manggis adalah 108% dari MOPS.
   - Harga pembelian HSD sampai dengan 2.978.360 kl di titik penyerahan di Instalasi Tanjung Priok dan Instalasi Surabaya Group adalah 108,5% dari MOPS.
   - Harga pembelian HSD diatas 5.996.008 kl atau yang diserahkan diluar 21 titik penyerahan yang ditetapkan Pertamina adalah 109,5% dari MOPS.

2. Harga pembelian Industrial Diesel Oil ("IDO") sampai dengan 3.933 kl di titik penyerahan di Kilang Plaju adalah 105% dari MOPS dan pembelian diatas 3.933 kl atau yang diserahkan diluar titik penyerahan Kilang Plaju adalah 109,5% dari MOPS.

3. Harga pembelian Marine Fuel Oil ("MFO") sampai dengan 1.193.166 kl di titik penyerahan di Kilang Cilacap adalah 105% dari MOPS dan pembelian diatas 1.193.166 kl atau yang diserahkan diluar titik penyerahan di Kilang Cilacap adalah 109,5% dari MOPS.

Tahun 2013, PLN dan Pertamina sepakat untuk menggunakan harga tahun 2011, karena amandemen Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak belum diselesaikan.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-74/MK.02/2015 kepada Menteri ESDM mengenai rekomendasi penetapan harga jual beli HSD dan MFO antara PLN dan Pertamina tahun 2014 tanggal 30 Januari 2015, pokok-pokok kesepakatan antara Pertamina dan Perusahaan antara lain:

1. *High Speed Diesel* ("HSD")
   - *The price of HSD for the purchase of up to 2,537,161 kiloliters (kl) from 18 supply points of Pertamina is 105% from MOPS.*
   - *The price of HSD for the purchase of up to 480,487 kl from the point of delivery Pertamina Terminal Transit Manggis is 108% from MOPS.*
   - *The price of HSD for the purchase of up to 2,978,360 kl from the point of delivery at Instalasi Tanjung Priok and Instalasi Surabaya Group is 108.5% from MOPS.*
   - *The price of HSD in excess of 5,996,008 kl or supplied from the point of delivery other than the 21 delivery points specified by Pertamina is 109.5% from MOPS.*

2. *The price of Industrial Diesel Oil ("IDO") for purchases of up to 3,933 kl from the point of delivery at Kilang Plaju is 105% from MOPS and for purchases in excess of 3,933 kl or supplied from point of delivery other than the supply point Kilang Plaju is 109.5% from MOPS.*

3. *The price of Marine Fuel Oil ("MFO") for purchases of up to 1,193,166 kl from the point of delivery at Kilang Cilacap is 105% from MOPS and for purchases in excess of 1,193,166 kl or supplied from the point of delivery other than the supply point Kilang Cilacap is 109.5% from MOPS.*

In 2013, PLN and Pertamina agreed to use the 2011 price, since the Fuel Sale Purchase Agreement amendment has not been completed.

Based on the Minister of Finance of the Republic of Indonesia's letter No. S 74/MK.02/2015 to Minister of ESDM regarding its recommendation on the sale and purchase price of HSD and MFO between PLN and Pertamina for 2014 dated January 30, 2015, the terms of the agreement between Pertamina and the Company are:

a. Harga jual tahun 2014 menggunakan harga berdasarkan evaluasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan sebesar HSD: MOPS + 9,19% dan MFO: MOPS + 11,94%;
b. Dalam rangka efisiensi biaya pembelian di tahun 2015, PLN diperkenankan untuk mencari sumber Bahan Bakar Minyak ("BBM") selain Pertamina, dengan tetap menjaga keamanan pasokan BBM.

PLN telah mencatat pembelian HSD dan MFO tahun 2014 berdasarkan harga tersebut.

Dalam rangka penyelesaian harga jual Bahan Bakar Minyak (HSD dan MFO) Pertamina kepada PLN, telah dilakukan pembahasan harga jual beli bahan bakar minyak (HSD dan MFO) antara Pertamina dan Perusahaan tahun 2015 di Kantor Kementerian BUMN, difasilitasi oleh Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, untuk menentukan harga transaksi BBM di tahun 2015.

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Harga Jual Beli Bahan Bakar Minyak (HSD dan MFO) antara Pertamina dan PLN tanggal 9 Februari 2016 dengan hasil sebagai berikut:
a. Harga transaksi HSD tahun 2015:
   - Januari sampai dengan September 2015 adalah 107% dari MOPS
   - Oktober sampai dengan Desember 2015 adalah 105% dari MOPS
b. Harga transaksi MFO tahun 2015 adalah 109,5% dari MOPS.

PLN telah mencatat pembelian HSD dan MFO tahun 2015 berdasarkan harga tersebut.

Berdasarkan Addendum IV Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak tanggal 16 Mei 2017, Pertamina dan PLN menyepakati perpanjangan jangka waktu pasokan hingga tahun 2020.

a. The sales price for 2014 uses the price based on the review of the Board of Finance and Development Supervision as follows: for HSD: MOPS + 9.19% and for MFO: MOPS + 11.94%;
b. For the efficiency of purchase cost in 2015, PLN is allowed to acquire from other sources of fuel than Pertamina, whilst maintaining security of fuel supply.

PLN has recorded purchases of HSD and MFO for the year 2014 based on those prices.

In settlement of the fuel sales price of Pertamina's fuel (HSD and MFO) to PLN, discussions on selling price of fuel (HSD and MFO) has been conducted between Pertamina and the Company in 2015 in the Ministry of BUMN office, facilitated by a deputy in energy business logistics and tourism, to determine the selling price of fuel in 2015

Based on the Sales and Purchase Price Agreement for Fuel (HSD and MFO) between Pertamina and PLN dated on February 9, 2016 the results are:

a. HSD transaction price for 2015:
   - *January until September 2015 is 107% from MOPS*
   - *October until December 2015 is 105% from MOPS*
b. MFO transaction price for 2015 is 109.5% from MOPS.

PLN has recorded purchases of HSD and MFO for the year 2015 based on those prices.

Based on Amendment IV of the Fuel Sale and Purchase Agreement dated May 16, 2017, Pertamina and PLN agreed to extend the period of supply until 2020.

Berdasarkan Addendum V, kesepakatan harga jual beli bahan bakar minyak (HSD dan MFO) antara Pertamina dan PLN tanggal 17 Oktober 2017, adalah sebagai berikut:

a. Harga transaksi HSD tahun 2017:
   - Januari sampai dengan Juni 2017 adalah 107% dari MOPS.
   - Juli sampai dengan Desember 2017 adalah 104,58% dari MOPS.

b. Harga transaksi MFO tahun 2017:
   - Januari sampai dengan Juni 2017 adalah 109,5% dari MOPS.
   - Juli sampai dengan Desember 2017 adalah 109,1% dari MOPS.

PLN telah mencatat pembelian HSD dan MFO tahun 2017 berdasarkan harga tersebut.

Based on Amendment V, sales and purchase price aggrement for fuel (HSD and MFO) between Pertamina and PLN dated on October 17, 2017, the result are:

a. HSD transaction price for 2017:
   - *January until June 2017 is 107% from MOPS.*
   - *July until December 2017 is 104.58% from MOPS.*

b. MFO transaction price for 2017:
   - *January until June 2017 is 109.5% from MOPS.*
   - *July until December 2017 is 109.1% from MOPS.*

PLN has recorded purchase of HSD and MFO for the year 2017 based on those prices.

(iv) Uap Panas Bumi
Melalui PLN, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Pertamina untuk pengadaan uap panas bumi untuk daerah Kamojang selama 30 tahun yang berakhir tahun 2012 dan telah melalui Amandemen I Surat Perjanjian antara Pertamina dan PLN PLTP Unit 1,2,3 di Kamojang. Sampai tahun 2015, perjanjian masih menggunakan Amandemen V Perjanjian Interim antara PT Pertamina Geothermal Energy, PLN dan IP. Pada tanggal 11 Februari 2016, dilakukan amandemen secara keseluruhan dan pernyataan kembali atas perjanjian induk, yang berlaku mulai 1 Agustus 2012 sampai dengan 31 Desember 2040. Untuk PLTP Gunung Salak perjanjian selama masa 30 tahun yang berakhir tahun 2030.

(iv) Geothermal Steam
The Company, through PLN entered into a geothermal procurement agreement with Pertamina to purchase Geothermal Steam for Kamojang area for 30 years until 2012 and has been amendment I agreement between Pertamina and PLN PLTP Unit 1,2,3 in Kamojang. Until 2015, The Agreement was still using the Fifth Amandement of the Interim Agreement between PT Pertamina Geothermal Energy, PLN and IP. On February 11, 2016, the main agreement has been wholly amended and restated, which is valid from August 1, 2012 to December 31, 2040. For PLTP Gunung Salak and Darajat, the agreement valid for 30 years until 2030.

c. Lainnya

Perjanjian Transportasi Gas Pembangkit Listrik Tambak Lorok

Pada tanggal 10 Desember 2012, Perusahaan melalui PLN menandatangani surat perjanjian kerjasama no. 278-1.PJ/041/DIR/2012 terkait transportasi gas PC Muriah Ltd. dengan PT Bakrie & Brothers Tbk untuk pembangkit listrik Tambak Lorok. Perjanjian transportasi gas tersebut kemudian dialihkan melalui novasi dan perubahan perjanjian pengangkutan gas

c. Others

Gas Transportation Agreeement for Tambak Lorok Power Plant

On December 10, 2012, the Company through PLN signed Gas Transport Agreement no. 278-1.PJ/041/DIR/2012 of PC Muriah Ltd with PT Bakrie & Brothers Tbk for Tambak Lorok's Power Plant. The agreement then redirected through novation and amendment to gas transportation agreement through pipeline dated February 22, 2016 by PT Bakrie & Brothers

melalui pipa yang ditandatangani tanggal 22 Februari 2016 oleh PT Bakrie & Brothers Tbk, PC Muriah Ltd., PLN, Saka Energi Muriah Ltd., dan PT Kalimantan Jawa Gas sebagai transporter. Perjanjian transportasi gas akan tetap berlangsung selama perjanjian penyaluran gas berlangsung.

Tbk, PC Muriah Ltd., PLN, Saka Energi Muriah Ltd., and PT Kalimantan Jawa Gas as transporter. The Gas Transport Agreement will remain effective as in the gas supply agreement.

Perjanjian Jasa Pengurusan Pengapalan, Perjanjian Fasilitas Penyimpanan *Liquid Natural Gas* ("LNG") dan Perjanjian Terminal LNG untuk PLTDG Pesanggaran
Pada tanggal 8 Desember 2015, Perusahaan dan PT Pelindo Energi Logistik menandatangani masing-masing Perjanjian Jasa Pengurusan Pengapalan, Perjanjian Fasilitas Penyimpanan LNG dan Perjanjian Terminal LNG untuk PLTDG Pesanggaran.

Agreement of Shipping Management Services, Agreement of Liquid Natural Gas ("LNG") Storage Facilities and Agreement of LNG Terminal for PLTDG Pesanggaran
On December 8, 2015, the Company and PT Pelindo Energi Logistik signed agreement of Shipping Management Services, LNG Storage Facility Services and LNG Terminal Services for PLTDG Pesanggaran.

Perjanjian Jasa Pengurusan Pengapalan dan Perjanjian Jasa Fasilitas LNG berlaku selama 7 tahun berdasarkan kontrak No. 187.PJ/061/IP/2015 dan 188.PJ/061/IP/2015, sedangkan Perjanjian Jasa Terminal LNG berlaku selama 5 tahun berdasarkan kontrak No.189.PJ/061/IP/2015.

Shipping managemet services agreement and LNG Storage agreement are effective for 7 years based on contract No. 187.PJ/061/IP/2015 and 188.PJ/061/IP/2015 respectively, while LNG Terminal Agreement is effective for 5 years based on contract No. 189.PJ/061/IP/2015.

Pada tanggal 27 Desember 2017, Perusahaan dan PT Pelindo Energi Logistik menandatangani adendum perjanjian atas Perjanjian Jasa Pengurusan Pengapalan, Perjanjian Jasa Fasilitas Penyimpanan LNG dan Perjanjian Jasa Terminal LNG melalui Perjanjian Jasa Fasilitas Midstream LNG Benoa Bali No. 307.PJ/061/IP/2017 yang berlaku sampai dengan 28 Februari 2023.

On December 27, 2017, the Company and PT Pelindo Energi Logistik signed an addendum of agreement on the Shipping Management Agreement, LNG Storage Facility Service Agreement and LNG Terminal Services Agreement through Midstream LNG Facility Agreement Benoa Bali No. 307.PJ/ 061/IP/2017 valid until February 28, 2023.

Stand By Letter of Credit ("SBLC")
Perusahaan memliki fasilitas Non Cash Loan sebagai SBLC dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang digunakan untuk jaminan perjanjian jual beli gas dengan Santos Sampang Pty. Ltd. dengan nominal sebesar US$25.008.353,81 (nilai penuh) atau setara dengan Rp336.012 per 31 Desember 2016, dengan jangka waktu 25 Januari 2016 sampai dengan 24 Januari 2017 dan diperpanjang dengan nominal sebesar US$19.996.848,40 (nilai penuh) atau setara dengan Rp268.678 dengan jangka waktu 25 Januari 2017 sampai dengan 24 Januari 2018.

Stand By Leter of Credit ("SBLC")
The Company has Non Cash Loan facility as SBLC with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, which is used as gas purchase guarantee with Santos Sampang Pty Ltd amounted of US$25,008,353.81 (full amount) or equivalent with Rp336,012 as per December 31, 2016, with period of January 25, 2016 to January 24, 2017 and extended amounted to US$19,996,848.40 (full amount) or equivalent with Rp268,678 with period from January 25, 2017 to January 24, 2018.

Permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya atas Perkara Arbitrase No. 18/ARB/BANI-SBY/VI/2015 antara konsorsium PT Boma Bisma Indra – PT Indosurya Persada dengan PT Indonesia Power Unit Pembangkitan Semarang

Yusuf Subiantoro, selaku penanggung jawab finansial pimpinan kerjasama konsorsium PT Boma Bisma Indra – PT Indosurya Persada ("BBIISP"), mengajukan permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") Perwakilan Surabaya kepada Pengadilan Negeri Semarang atas Perkara Arbitrase No. 18/ARB/BANI-SBY/VI/2015 yang telah dibacakan pada Selasa 17 Mei 2016, yang putusannya berisi tidak terbuktinya PT Indonesia Power Unit Pembangkitan Semarang melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Konsorsium BBIISP sebesar Rp7.671 ditolak oleh BANI.

Atas tuntutan perkara tersebut, pada tanggal 29 November 2016 Pengadilan Negeri Semarang memutuskan untuk membatalkan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Surabaya No. 18/ARB/BANI-SBY/VI/2015, dan menghukum PT Indonesia Power untuk membayar kepada Konsorsium atas kekurangan pembayaran sesuai Progres Laporan Kemajuan Pekerjaan senilai 26 % atau sebesar Rp2.600.

Pada tanggal 20 Desember 2016, PT Indonesia Power melalui kuasa hukumnya Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Agung mengajukan Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam Perkara Perdata No. 01/Arbitrase/2016/PN.SMG Tanggal 29 November 2016 kepada Ketua Mahkamah Agung RI.

Sampai dengan tanggal pelaporan, kasus ini masih dalam proses di Mahkamah Agung.

Cancellation Request for the Decision of Indonesian National Arbitration Board Representatives of Surabaya on Arbitration Case No. 18 / ARB / BANI-SBY / VI / 2015 between the consortium of PT Boma Bisma Indra - PT Indosurya Persada and PT Indonesia Power Semarang Generation Units

Yusuf Subiantoro, who is in charge of financial co-led consortium of PT Boma Bisma Indra PT Indosurya Persada ("BBIISP"), applied for cancellation of the decision of the Indonesian National Arbitration Board ("BANI") Representative Surabaya to Semarang District Court on Arbitration Case No. 18 / ARB / BANI-SBY / VI / 2015 which was read out on Tuesday, May 17, 2016, the decision contains no evidence of the PT Indonesia Power Semarang Generation Units committed acts against the law, so that the compensation claim filed by the Consortium BBIISP Rp7,671 - rejected by BANI.

On the demands of the case, on November 29, 2016 Semarang District Court decided to cancel the Arbitral Indonesian National Arbitration Board Surabaya No. 18 / ARB / BANI-SBY / VI / 2015, and punish PT Indonesia Power to pay to the Consortium on deficiency payments according Progress Progress Report Employment worth 26% or Rp2,600.

On December 20, 2016, PT Indonesia Power through his attorney state attorney from the Attorney General filed Appeal Against the Semarang District Court Decision in Civil Case No. 01/ Arbitration/2016/PN.SMG November 29, 2016 to the Chairman of the Supreme Court.

As of reporting date, the case is still in process at the Supreme Court.

36. Instrumen Keuangan, Manajemen Risiko Keuangan dan Risiko Modal / *36. Financial Instruments, Financial Risk Management and Capital Risk Management*

a. Kategori dan klasifikasi instrumen keuangan / *a. Categories and classes of financial instruments*

Tabel berikut ini mengungkapkan rincian instrumen keuangan Perusahaan dan entitas anak berdasarkan klasifikasi instrumen keuangan:

The following table disclosed the details of the Company and subsidiaries' financial instruments based on financial instruments classification:

	31 Desember/ *December 31, 2017*							
	Aset Keuangan/ *Financial Asset*				Liabilitas keuangan/ *Financial Liabilities*			
	Dimiliki hingga jatuh tempo/ *Held to maturity*	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loans and receivable*	Tersedian untuk dijual/ *Available for sale*	Nilai wajar melalui laba rugi/ *Fair value through profit or loss*	Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial liabilities at amortized cost*	Nilai wajar melalui laba rugi/ *Fair value through profit or loss*	Jumlah aset dan liabilitas keuangan/ *Total financial assets and liabilities*	
ASET KEUANGAN								***FINANCIAL ASSETS***
ASET KEUANGAN TIDAK LANCAR								***NON-CURRENT FINANCIAL ASSETS***
Piutang pihak berelasi	--	477,644	--	--	--	--	477,644	*Receivable from related parties*
Piutang lain-lain	--	31,546	--	--	--	--	31,546	*Other receivables*
Aset keuangan dari konsesi jasa	--	46,487,520	--	--	--	--	46,487,520	*Financial asset of service concession*
ASET KEUANGAN LANCAR								***CURRENT FINANCIAL ASSETS***
Kas dan setara kas	--	4,841,012	--	--	--	--	4,841,012	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha	--	25,646,705	--	--	--	--	25,646,705	*Trade receivable*
Piutang lain-lain	--	15,428	--	--	--	--	15,428	*Other receivables*
Aset keuangan dari konsesi jasa	--	1,103,982	--	--	--	--	1,103,982	*Financial asset of service concession*
Piutang pihak berelasi	--	35,092	--	--	--	--	35,092	*Receivables from related parties*
Jumlah aset keuangan	--	78,638,929	--	--	--	--	78,638,929	*Total financial assets*
LIABILITAS KEUANGAN								***FINANCIAL LIABILITIES***
LIABILITAS LANCAR								***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha	--	--	--	--	3,864,323	--	3,864,323	*Trade payable*
Utang lain-lain	--	--	--	--	--		--	*Other payables*
Utang pihak berelasi	--	--	--	--	16,564	--	16,564	*Payable to related parties*
Biaya masih harus dibayar	--	--	--	--	951,415	--	951,415	*Accrued expenses*
Utang sewa pembiayaan	--	--	--	--	145,807	--	145,807	*Lease liabilities*
Jumlah liabilitas keuangan	--	--	--	--	4,978,109	--	4,978,109	***Total financial liabilities***

	31 Desember/ *December 31, 2016*							
	Aset Keuangan/ *Financial Asset*				Liabilitas keuangan/ *Financial Liabilities*			
	Dimiliki hingga jatuh tempo/ *Held to maturity*	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loans and receivable*	Tersedian untuk dijual/ *Available for sale*	Nilai wajar melalui laba rugi/ *Fair value through profit or loss*	Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial liabilities at amortized cost*	Nilai wajar melalui laba rugi/ *Fair value through profit or loss*	Jumlah aset dan liabilitas keuangan/ *Total financial assets and liabilities*	
ASET KEUANGAN								***FINANCIAL ASSETS***
ASET KEUANGAN TIDAK LANCAR								***NON-CURRENT FINANCIAL ASSETS***
Piutang pihak berelasi	--	481,336	--	--	--	--	481,336	*Receivable from related parties*
Piutang lain-lain	--	34,116	--	--	--	--	34,116	*Other receivables*
ASET KEUANGAN LANCAR								***CURRENT FINANCIAL ASSETS***
Kas dan setara kas	--	1,500,820	--	--	--	--	1,500,820	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha	--	21,666,641	--	--	--	--	21,666,641	*Trade receivable*
Piutang lain-lain	--	12,025	--	--	--	--	12,025	*Other receivables*
Piutang pihak berelasi	--	42,134	--	--	--	--	42,134	*Receivables from related parties*
Jumlah aset keuangan	--	23,737,072	--	--	--	--	23,737,072	*Total financial assets*
LIABILITAS KEUANGAN								***FINANCIAL LIABILITIES***
LIABILITAS KEUANGAN TIDAK LANCAR								***NON-CURRENT LIABILITIES***
Utang sewa pembiayaan	--	--	--	--	144,949	--	144,949	*Lease liabilities*
LIABILITAS LANCAR								***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha	--	--	--	--	3,336,147	--	3,336,147	*Trade payable*
Utang lain-lain	--	--	--	--	3,822	--	3,822	*Other payables*
Utang pihak berelasi	--	--	--	--	37,796	--	37,796	*Payable to related parties*
Biaya masih harus dibayar	--	--	--	--	555,569	--	555,569	*Accrued expenses*
Utang sewa pembiayaan	--	--	--	--	106,991	--	106,991	*Lease liabilities*
Jumlah liabilitas keuangan	--	--	--	--	4,185,274	--	4,185,274	***Total financial liabilities***

b. Manajemen risiko modal

Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal. Struktur modal Perusahaan terdiri dari ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal saham (Catatan 18), tambahan modal disetor (Catatan 19) dan saldo laba.

Direksi Perusahaan dan entitas anak secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Perusahaan dan entitas anak berusaha untuk meminimalkan biaya modal sehingga dapat memaksimalkan nilai Perusahaan. Oleh karena itu, kebijakan Perusahaan dan entitas anak dalam mencari pendanaan akan selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan.

b. Capital risk management

The Company and subsidiaries manages capital risk to ensure that they will be able to continue as going concern and to ensure compliance with covenants of capital adequacy ratio. The Company capital structure consist of equity shareholders that consist of capital stock (Note 18), additional paid-in capital (Note 19), and retained earnings.

Directors of the Company and subsidiaries periodically review capital structure. As part of this review, the Directors consider the cost of capital and related risks.

The Company and subsidiaries seeks to minimize the cost of capital, in order to maximize their value. Therefore, the Company and subsidiaries policy to seek funding that will always take into account the financial risk that may arise in the future.

c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan dan entitas anak adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko keuangan, antara lain risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan dan entitas anak beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Direksi.

Dalam pengelolaan risiko, Perusahaan dan entitas anak membentuk Satuan Manajemen Risiko ("SMR") yang bertanggung jawab terhadap penyusunan kebijakan, kerangka kerja, pedoman penerapan manajemen risiko dan infrastruktur pengelolaan risiko, serta memastikan sosialisasi dan implementasi manajemen risiko tersebut di lingkungan Perusahaan dan entitas anak. Satuan ini juga bertugas untuk menyusun profil risiko yang bersifat strategis sebagai himbauan awal kepada manajemen Perusahaan dan entitas anak. SMR bertanggung jawab langsung kepada Direksi dengan pembinaan dibawah Direktur Keuangan.

c. Financial risk management objectives and policies

The Company and subsidiaries overall financial risk management and policies is to ensure that adequate financial resources are available for operation and development of their business, while managing their exposure to financial risk, which are market risk (including foreign currency risk and interest rate risk) credit risk, and liquidity risks. The Company and subsidiaries operate within defined policy that are approved by the Board of Directors.

In managing risk, the Company and subsidiaries established a Risk Management Unit ("RMU") which is responsible for the preparation of the policy, frameworks, risk management implementation guide and infrastructure of the risk management and ensuring the implementation of the risk management in the Company and subsidiaries' environment. The unit is also tasked to formulate a strategic risk profile as an early warning to the Company and subsidiaries management. RMU is responsible to the Director with guidance from Director of Finance.

Dalam kaitannya dengan risiko keuangan, manajemen menelaah dan mengeluarkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. Perusahaan dan entitas anak menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian risiko keuangan terhadap kinerja keuangan Perusahaan dan entitas anak. Berikut ini ringkasan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko tersebut:

Related to the financial risk, the management evaluate and established policies for managing each of these risks. The Company and subsidiaries applies the financial risk management policies to minimize the impact of the unpredictability of financial risks on the Company and subsidiaries financial performance. The summary of the financial risk management policies are as follows:

i. **Manajemen risiko mata uang asing**
Perusahaan dan entitas anak melakukan sejumlah transaksi dalam mata uang asing. Akibatnya, timbul eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Kebijakan Perusahaan dan entitas anak adalah untuk menjaga risiko mata uang asing dalam batas yang dapat diterima. Perusahaan dan entitas anak mencadangkan jumlah mata uang asing pada saat nilai tukar rupiah menguat dengan jumlah sesuai kebutuhan.

Sensitivitas mata uang asing
Tabel di bawah ini memaparkan rincian sensitivitas Perusahaan dan entitas anak untuk setiap 10% kenaikan dan penurunan Rupiah terhadap mata uang asing yang relevan. 10% kenaikan dan penurunan menggambarkan penilaian manajemen terhadap perubahan yang rasional pada nilai tukar setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini. Analisis sensitivitas ini hanya mencakup saldo item moneter setelah pajak dalam mata uang asing dan menyesuaikan translasi pada akhir tahun untuk 10% perubahan dalam nilai tukar mata uang asing.

i. ***Foreign currency risk management***
The Company and subsidiaries undertake many transactions denominated in foreign currencies. Consequently, there are exposures to exchange rate fluctuations. The Company and subsidiaries policy is to maintain foreign currency exposure within acceptable limits. The Company and subsidiaries reserve the foreign currency amount at the time the rupiah strengthened with amount as needed.

Foreign currency sensitivity
The following table explains details of the Company and subsidiaries sensitivity to a 10% increase and decrease in Rupiah against the relevant foreign currencies. 10% increase or decrease represents the management's assessment of the reasonably possible change in foreign currency exchange rates after considering the current economic conditions. The sensitivity analysis includes only after tax outstanding foreign denominated monetary items and adjusts their translation at the end of the year for a 10% change in foreign currency rates.

	Dampak terhadap laba setelah pajak/ *Effect to profit after tax* 31 Desember/ *December 31,* 2017				
	USD		EUR		
	10%	-10%	10%	-10%	
Aset Keuangan					*Financial Assets*
Kas dan setara kas	52	(52)	3	(3)	*Cash and cash equivalents*
Piutang pihak berelasi	34,680	(34,680)	--	--	*Receivable from related parties*
Sub jumlah aset keuangan	34,732	(34,732)	3	(3)	*assets*
Liabilitas Keuangan					*Financial Liabilities*
Utang usaha	--	--	--	--	*Trade payables*
Sub jumlah liabilitas keuangan	--	--	--	--	*liabilities*
Jumlah Laba (Rugi)	34,732	(34,732)	3	(3)	***Total Profit (Loss)***

Dampak terhadap laba setelah pajak/ *Effect to profit after tax*
31 Desember/ *December 31,* 2016

	JPY		USD		EUR		CHF		
	10%	-10%	10%	-10%	10%	-10%	10%	-10%	
Aset Keuangan									*Financial Assets*
Kas dan setara kas	2	(2)	2,121	(2,121)	355	(355)	461	(461)	*Cash and cash equivalents*
Piutang pihak berelasi	–	–	28,515	(28,515)	–		–	–	*Receivable from related parties*
Sub jumlah aset keuangan	2	(2)	30,636	(30,636)	355	(355)	461	(461)	*assets*
Liabilitas Keuangan									*Financial Liabilities*
Utang usaha	–	–	108,914	(108,914)	–	–	–	–	*Trade payables*
Sub jumlah liabilitas keuangan	–	–	108,914	(108,914)	–	–	–	–	*liabilities*
Jumlah Laba (Rugi)	**2**	**(2)**	**(78,278)**	**78,278**	**355**	**(355)**	**461**	**(461)**	***Total Profit (Loss)***

ii. Manajemen risiko tingkat suku bunga

Perusahaan dan entitas anak memiliki transaksi pada tingkat suku bunga tetap dan tingkat suku bunga mengambang. Transaksi dengan tingkat suku bunga mengambang terekspos terhadap risiko tingkat suku bunga. Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko dengan menyeimbangkan porsi pinjaman dengan bunga tetap dan mengambang.

Sensitivitas tingkat suku bunga

Analisis sensitivitas berikut telah ditentukan berdasarkan eksposur Perusahaan dan entitas anak terhadap tingkat suku bunga untuk saldo instrumen keuangan terutang setelah pajak pada tanggal pelaporan. Analisis ini disusun dengan mengasumsikan jumlah saldo aset dan liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan, terutang sepanjang tahun.

Analisis sensitivitas ini menggunakan asumsi kenaikan dan penurunan sebesar 50 basis poin pada tingkat suku bunga yang relevan dengan variable lainnya dianggap konstan. Kenaikan dan penurunan sebesar 50 basis poin merupakan penilaian manajemen atas kemungkinan perubahan yang rasional terhadap tingkat suku bunga setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, jika tingkat suku bunga mengalami kenaikan 50 basis poin dengan semua variabel lainnya tetap, maka laba setelah pajak untuk tahun berjalan lebih tinggi masing-masing Rp1.620 dan Rp4.380. Sebaliknya jika tingkat suku bunga

ii. Interest rate risk management

The Company and subsidiaries have transactions at fixed and floating interest rates. Transaction at floating interest rate are exposed to interest rate risk. The Company and subsidiaries manage the risk by maintaining an appropriate fixed and floating borrowing rate.

Interest rate sensitivity

The sensitivity analysis below have been determined based on the Company and subsidiaries exposure to interest rates for financial instruments after tax outstanding at the reporting date. The analysis is prepared assuming the amount of assets and liabilities outstanding at the reporting period end date was outstanding for the whole year.

The sensitivity analysis uses an assumption of 50 basis point increase and decrease in the relevant interest rates with all other variables held constant. 50 basis points increase or decrease represents the management's assessment of the reasonably possible change in interest rates after considering the current economic conditions.

On December 31, 2017 and 2016, if interest rate increased by 50 basis point, with all other variables constant, the profit after tax for the current year increase by Rp1,620 and Rp4,380, respectively. Otherwise if the interest rate decreased by 50 basis point, with all

mengalami penurunan 50 basis poin, dengan semua variabel lainnya tetap, maka laba setelah pajak lebih rendah masing-masing Rp1.620 dan Rp4.380.

other variables constant, the profit after tax decrease by Rp1,620 and Rp4,380, respectively.

iii. Manajemen risiko kredit

Risiko kredit timbul dari risiko kegagalan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban kontraktual yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan kepada Perusahaan dan entitas anak. Eksposur risiko kredit Perusahaan dan entitas anak timbul terutama atas piutang usaha dari pelanggan. Untuk aset keuangan lainnya seperti kas dan bank, Perusahaan dan entitas anak mengelola rekening pada beberapa Bank dengan reputasi baik dengan tujuan meminimalkan risiko kredit dan untuk menghindari konsentrasi kas yang signifikan dengan satu institusi. Perusahaan dan entitas anak menempatkan dana pada beberapa bank yang kredibel (Catatan 12).

iii. Credit risk management

Credit risk arises from the risk that counterparty will default on its contractual obligations resulting in financial loss to the Company and subsidiaries. The Company and subsidiaries exposure to credit risk mainly arises from receivables from its customers. For other financial assets such as cash and cash in bank, in order to minimize the credit risk and to avoid significant concentration of cash with one institution, the Company and subsidiaries place the funds in several credible banks (Note 12).

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian mencerminkan eksposur Perusahaan dan entitas anak terhadap risiko kredit.

The carrying amount of financial assets recorded in the consolidated financial statements, net of any allowance for losses represents the Company and subsidiaries exposure to credit risk.

Tujuan Perusahaan dan entitas anak adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dengan meminimalkan kerugian yang dapat terjadi karena meningkatnya eksposur risiko kredit.

The Company and subsidiaries' objective is to seek continual revenue growth while minimizing losses incurred due to increase of credit risk exposure.

Pelanggan Perusahaan dan entitas anak terdiri dari pihak berelasi. Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016, PLN memiliki kontribusi 100,00% dan 99,94% masing-masing dari jumlah penjualan bersih. Manajemen berkeyakinan bahwa risiko kredit terbatas karena tidak pernah ada kegagalan kredit dari PLN.

The Company and subsidiaries' customers consist of related party. For the years ended December 31, 2017 and 2016, PLN accounted for 100.00% and 99.94% of the total net sales. Management believes that the credit risk is limited because there has been no credit default from PLN.

Kualitas kredit aset keuangan
Tabel berikut ini menunjukkan kualitas aset keuangan Perusahaan dan entitas anak:

Credit quality of financial assets
The following table shows the quality of Company and subsidiaries' financial assets:

	31 Desember/ *December 31,* 2017				
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired* Rp	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not impaired* Rp	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired* Rp	Jumlah/ *Total* Rp	
Kas dan setara kas	4,841,012	–	–	4,841,012	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha	25,646,705	–	–	25,646,705	*Trade receivables*
Piutang pihak berelasi	512,736	–	–	512,736	*Receivable from related parties*
Piutang lain-lain	46,974	–	–	46,974	*Other receivables*
Aset keuangan dari proyek konsesi	47,591,502	–	–	47,591,502	*Financial asset of concession project*
Jumlah - bersih	**78,638,929**	–	–	**78,638,929**	***Total – net***

	31 Desember/ *December 31,* 2016				
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired* Rp	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not impaired* Rp	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired* Rp	Jumlah/ *Total* Rp	
Kas dan setara kas	1,500,820	–	–	1,500,820	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha	4,749,998	16,916,643	–	21,666,641	*Trade receivables*
Piutang pihak berelasi	523,470	–	–	523,470	*Receivable from related parties*
Piutang lain-lain	46,141	–	–	46,141	*Other receivables*
Jumlah - bersih	**6,820,429**	**16,916,643**	–	**23,737,072**	***Total – net***

Aset keuangan tertentu dinilai secara individu untuk penurunan nilai dan jika ditemukan terjadi penurunan nilai, rugi penurunan nilai harus diterapkan secara individu.

Certain financial assets are individually assessed for impairment and, if found to be impaired, have impairment loss assigned to them on an individual basis.

Tabel di atas termasuk aset keuangan yang mana penurunan nilainya dilakukan secara kolektif. Tidak praktis untuk mengidentifikasi penurunan nilai aset keuangan tersebut secara individual dalam portofolio aset keuangan dengan karakteristik risiko yang sama dimana penurunan nilainya dilakukan secara kolektif.

The table above includes financial assets on which collective impairment have been assessed. It is not practicable to individually identify impaired financial aset within the portfolio of financial assets with similar risk characteristics which are collectively assessed for impairment.

Kualitas kredit aset keuangan Perusahaan dan entitas anak dinilai dan dikelola berdasarkan peringkat internal. Kualitas kredit dimonitor dengan menggunakan Sistem Peringkat Perusahaan dan entitas anak. Sistem peringkat dinilai dan diperbarui secara berkala untuk menjaga akurasi dan konsistensi peringkat risiko. Kualitas kredit dan sistem peringkat Perusahaan dan entitas anak dinilai sebagai berikut:

The credit quality of Company and subsidiaries' financial assets is assessed and managed using internal ratings. The credit quality is monitores using the Company and subsidiaries Rating System. The rating system is assessed and updated regularly to maintain accurate and consistent risk rating. The internal rating of the Company and subsidiaries' are as follow:

- Tingkat tinggi
  Aset keuangan tingkat tinggi meliputi kas dan setara kas kepada pihak ketiga atau bank yang memiliki kualitas kredit yang baik. Oleh sebab itu, risiko kredit adalah minimal. Untuk piutang usaha, pelanggan maupun pihak berelasi dapat diberi peringkat tingkat tinggi jika tidak memiliki kesulitan keuangan, tidak terjadi pelanggaran kontrak, tidak ada pemberian keringanan dan memiliki kelangsungan usaha.

- Tingkat rendah
  Aset keuangan peringkat rendah termasuk piutang usaha yang tidak diklasifikasikan sebagai tingkat tinggi. Untuk piutang usaha, pelanggan dapat diberi peringkat rendah jika pelanggan memiliki kesulitan keuangan, melakukan pelanggaran kontrak, menerima pemberian keringanan, dan tidak memiliki kelangsungan usaha.

Pada tanggal 31 Desember 2017, kualitas kredit semua aset keuangan Perusahaan dan anak perusahaan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai berada dalam klasifikasi tingkat tinggi.

- *High grade*
  High grade financial asset include cash and cash equivalents to counterparties with good credit rating or bank standing. Consequently, credit risk is minimal. For trade account receivables, a customer or a related party, is given a high grade rating if it does not has a financial difficulty, no breach of contract, no waivers and will be able to continue as a going concern.

- *Standard grade*
  Low grade financial assets include trade account receivables that are not classified as high grade. For trade account receivable, a customer given a low grade rating if it is deemed to have a financial difficullty, there is a breach of contract, waivers and will not be able to continue as going concern.

As of December 31, 2017, all the Company and subsidiaries' credit quality of financial assets that are neither past due nor impaired are classified as high grade.

iv. Manajemen risiko likuiditas
Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko bahwa Perusahaan dan entitas anak akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas keuangan yang diselesaikan dengan pembayaran kas atau asset keuangan lainnya. Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada Direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Perusahaan dan entitas anak. Perusahaan dan entitas anak mendapatkan fasilitas *non-cash loan* dari beberapa bank khususnya untuk pembukaan L/C dan Bank Garansi.

iv. Liquidity risk management
Liquidity risk is defined as the risk that the Company and subsidiaries will encounter difficulty in meeting its obligations associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset. Ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the Board of Directors, which has built an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Company and subsidiaries short, medium and long-term funding and liquidity management requirements. The Company and subsidiaries obtained non-cash loan facilities from several banks in particularly for opening L/C and Bank Guarantee.

Selanjutnya Perusahaan dan entitas anak juga memelihara kecukupan dana untuk membiayai kebutuhan modal kerja berkelangsungan dengan cara mempertahankan kecukupan jumlah kas dan setara kas yang mudah dikonversi menjadi uang tunai ketika mengalami gangguan yang tak terduga dari penagihan kas.

In addition, the Company and subsidiaries maintain an adequate amount of cash and cash equivalents which may be readily converted to cash in any unforeseen interruption of its cash collections.

Tabel berikut ini Perusahaan dan entitas anak memberikan rincian tanggal jatuh tempo kontraktual untuk liabilitas keuangan dengan pembayaran yang telah disepakati pada periode 31 Desember 2017 dan 2016. Tabel tersebut telah disusun berdasarkan arus kas liabilitas keuangan yang tidak didiskontokan berdasarkan tanggal paling awal dimana Perusahaan dan entitas anak diwajibkan untuk membayar. Untuk arus bunga dengan tingkat suku bunga mengambang, nilai arus kas yang tidak terdiskonto diperoleh dari kurva tingkat suku bunga pada akhir periode. Untuk liabilitas keuangan yang didenominasi dengan mata uang asing, jumlah yang tidak didiskontokan ditranslasi dengan kurva nilai tukar *forward* yang relevan pada akhir periode pelaporan. Tanggal jatuh tempo kontraktual berdasarkan pada tanggal paling awal dimana Perusahaan dan entitas anak diwajibkan untuk membayar.

The following table details the Company and subsidiaries remaining contractual maturity for its financial liabilities with agreed repayment period as of December 31, 2017 and 2016. The table has been drawn up based on the undiscounted cash flow of financial liabilities based on the earliest date on which the Company and subsidiaries can be required to pay. To extend that interest flows are floating rate, the undiscounted is derived from interest rate curves at the end of the reporting period. For foreign currency denominated financial liabilities, the undiscounted amortization is translated using the relevant forwards exchange curve at the end of the reporting period. The contractual maturity is based on the earliest date on which the Company and subsidiaries may be required to pay.

	31 Desember/ *December 31,* 2017					
	Dalam satu tahun/ *Within one year*	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ *Over one year but not longer that three years*	lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ *Over three years but not longer that five years*	Lebih dari lima tahun/ *Over five years*	Jumlah/ *Total*	
Liabilitas						***Liabilities***
Utang pihak berelasi	–	–	–	–	–	*Payable to related parties*
Utang usaha	3,864,323	–	–	–	3,864,323	*Trade payables*
Utang lain-lain	–	–	–	–	–	*Other payables*
Jumlah	**3,864,323**	–	–	–	**3,864,323**	***Total***

	31 Desember/ *December 31,* 2016					
	Dalam satu tahun/ *Within one year*	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ *Over one year but not longer that three years*	lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ *Over three years but not longer that five years*	Lebih dari lima tahun/ *Over five years*	Jumlah/ *Total*	
Liabilitas						***Liabilities***
Utang pihak berelasi	37,796	–	–	–	37,796	*Payable to related parties*
Utang usaha	3,336,147	–	–	–	3,336,147	*Trade payables*
Utang lain-lain	3,822	–	–	–	3,822	*Other payables*
Jumlah	**3,377,765**	–	–	–	**3,377,765**	***Total***

d. Nilai wajar instrumen keuangan
Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan konsolidasian mendekati nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam jangka pendek atau memiliki tingkat suku bunga yang sesuai dengan tingkat suku bunga pasar.

d. Fair value of financial instruments
The management considers that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost in the consolidated financial statements approximate their fair values either because of their short-term maturities or they carry market interest rate.

37. Transaksi Non-Kas / *37. Non-Cash Transactions*

	2017 Rp	2016 Rp	
Aktivitas operasi, investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi arus kas:			*Non-cash operating investing and financing activities:*
Penambahan aset keuangan dari konsesi jasa dari reklasifikasi aset tetap	53,991,857	--	*Addition of financial asset of service concession from reclassification of property, plant and equipment*
Piutang usaha yang diperhitungkan dengan utang usaha	7,420,044	7,274,664	*Offsetting trade accounts receivables with trade payables*
Pembayaran dividen dengan memperhitungkan piutang usaha pemegang saham	2,885,017	4,207,869	*Dividend payment by offsetting with trade receivables*
Kerugian atas penjualan aset keuangan dari konsesi jasa	932,107	--	*Loss recognized from sales of financial asset of service concession*
Kenaikan nilai wajar properti investasi	161,042	--	*Fair value of investment properties*
Penambahan piutang pihak berelasi dari bunga tahun berjalan	20,384	--	*Addition of receivable from related party from current year interest*
Pembayaran pajak revaluasi aset tetap dengan piutang usaha	--	5,046,909	*Payment of tax revaluation on property, plant and equipment with trade receivables*
Perolehan aset tetap melalui pengampunan pajak	--	10,244	*Addition to property, plant and equipment through tax amnesty*

38. Tanggung Jawab Manajemen dan Persetujuan atas Laporan Keuangan Konsolidasian / *38. Managements Responsibility and Approval of Consolidated Financial Statements*

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2018.

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements were responsibilities of the management, and were approved by the Directors and authorized for issue on February 23, 2018.

Kriteria Annual Report Award 2017

2017 Annual Report Award Criteria

No	Kriteria dan Penjelasan	Criteria and Explanations	Halaman Page
I.	**Umum**	**General**	
1.	Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris	The Annual Report shall be written in good and correct Indonesian, and is recommended to be presented in English	√
2.	Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca	The Annual Report shall be printed with good quality using readable type and size of fonts	√
3.	Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas Nama perusahaan dan tahun *annual report* ditampilkan di: 1. Sampul muka; 2. Samping; 3. Sampul belakang; dan 4. Setiap halaman.	The Annual Report shall present clear identity of the company Company name and the annual report financial year shall be presented on: 1. Front Cover; 2. Side Cover; 3. Back Cover; and 4. Every page	√
4.	Laporan tahunan ditampilkan di *website* perusahaan Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir.	The Annual Report shall be posted in the company's website Including the latest annual report as well as those for the last four years, at least.	√
II.	**Ikhtisar Data Keuangan Penting**	**Key Financial Highlights**	
1.	Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha; 2. Laba (rugi): a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; 3. Penghasilan komprehensif periode berjalan : a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; dan 4. Laba (rugi) per saham. **Catatan:** Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif periode berjalan secara total.	Income statement in comparison for 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years Information contains the following: 1. Income; 2. Profit (loss): a. Attributable to equity holders of the parent entity; and b. Attributable to non controlling interest; 3. Total comprehensive profit (loss): a. Attributable to equity holders of the parent entity; and b. Attributable to non controlling interest; 4. Earning (loss) per share. **Note:** If the company does not have subsidiaries, the profit (loss) and other comprehensive income is presented in total.	15, 21-23

No	Kriteria dan Penjelasan	Criteria and Explanations	Halaman Page
2.	Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; 2. Jumlah aset; 3. Jumlah liabilitas; dan 4. Jumlah ekuitas.	Financial position in comparison for 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years Information contains the following: 1. Total investment on associates; 2. Total assets 3. Total liabilities; and 4. Total equity.	15, 19-20
3.	Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan.	Financial ratio in comparison for 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years Information covers 5 (five) financial ratios, which are generally applied and relevant to the company's industry.	16, 23-26
4	Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik 1. Jumlah saham yang beredar; 2. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: a. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; b. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan c. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. 3. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang: a. Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan b. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. Untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. **Catatan:** apabila perusahaan tidak memiliki kapitalisasi pasar, informasi harga saham, dan volume perdagangan saham, agar diungkapkan.	Share price information in tables and charts 1. Number of shares outstanding; 2. The table forms contain the following information: a. Market capitalization based on share price on the Stock Exchange where the shares are listed; b. Highest, lowest and closing share price based on share price on the Stock Exchange where the shares are listed; and c. Trading volume of shares on the Stock Exchange where the shares are listed. 3. The graph forms contain at least the following information: a. The closing price of shares based on share price on the Stock Exchange where the shares are listed; and b. Trading volume of shares on the Stock Exchange where the shares are listed For each quarter in the latest 2 (two) financial years. **Note:** Should be disclosed if the company does not have market capitalization, share price, and share trading volume.	18
5.	Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir Informasi memuat: 1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (*outstanding*); 2. Tingkat bunga/imbalan; 3. Tanggal jatuh tempo; dan 4. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2015 dan 2016. **Catatan:** apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/ sukuk/obligasi konversi, agar diungkapkan.	Information regarding outstanding bonds, sukuk or convertible bonds, in 2 (two) latest financial years Information contains: 1. Number of outstanding bonds, sukuk or convertible bonds; 2. Interest rate/yield; 3. Maturity date; and 4. Rating of bonds/sukuk in 2015 and 2016. **Note:** Should be disclosed if the company does not have outstanding bonds, sukuk or convertible bonds.	18

No	Kriteria dan Penjelasan	Criteria and Explanations	Halaman Page
III.	**Laporan Dewan Komisaris dan Direksi**	**Board of Commissioners and Board of Directors' Report**	
1.	Laporan Dewan Komisaris Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; 2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; 3. Pandangan atas penerapan/pengelolaan *whistleblowing system* (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut; dan 4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.	Board of Commissioners' Report Contain the following: 1. Assessment on the performance of the Board of Directors in managing the company and the basis for such evaluation; 2. Views on the business prospects of the company as prepared by the Board of Directors and the basis for such consideration; 3. Views on the implementation/management of the company's whistleblowing system (WBS), and the role of the Board of Commissioners in the WBS; and 4. Changes in the composition of the Board of Commissioners (if any) and the reason for such changes.	34-43
2.	Laporan Direksi Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain: a. kebijakan strategis; b. perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan c. kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya; 2. Analisis tentang prospek usaha; 3. Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; dan 4. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya.	Board of Directors' report Contain the following: 1. Analysis of the company's performance, covering among others: a. strategic policies; b. comparison between targets and achievements; and c. challenges faced by the company and initiatives to deal with those challenges; 2. Analysis on business prospects; 3. Developments in the implementation of GCG during the fiscal year; and 4. Changes in the composition of the Board of Directors (if any) and the reason for such changes.	46-59
3	Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; 2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.	Signatures of members of the Board of Commissioners and Board of Directors Contain the following: 1. Signatures on a separate page; 2. Statement of responsibility of the Board of Commissioners and Board of Directors for the accuracy of the contents of the Annual Report; 3. Signed by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors by stating their names and position; and 4. Written explanation in separate letter from the person(s) concerned in the event that member(s) of Board of Commissioners or Board of Directors fail to sign the annual report; or: written explanation in separate letter from other member(s) in the event that there is no written explanation from the person(s) concerned.	62-63
IV.	**Profil Perusahaan**	**Company Profile**	
1.	Nama dan alamat lengkap perusahaan Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan *website*.	Name and complete address of the company Information contains, among others, name and address, post code, telephone number, fax, email and website.	66-67

No	Kriteria dan Penjelasan	Criteria and Explanations	Halaman Page
2.	Riwayat singkat perusahaan Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan. **Catatan:** apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan	Brief history of the company Contain among others: date/year of establishment, name of the company, change of name (if any), and effective date of the change of name. **Note:** to be disclosed if the company never had a change of name	70-71
3.	Bidang usaha Uraian mengenai antara lain: 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; 2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	Line of business Description of, among others: 1. The line of business as stated in the latest Articles of Association; 2. Business activities; and 3. Product and/or services offered.	85-91
4	Struktur Organisasi Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah Direksi.	Organization structure Diagram of organization structure, containing name and position of personnel up to one level below Director, at least	94-95
5.	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Mencakup: 1. Visi perusahaan; 2. Misi perusahaan; 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku; dan 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (*corporate culture*) yang dimiliki perusahaan.	Vision, Mission and Corporate Culture Covers: 1. Vision; 2. Mission; 3. Statement that the vision and mission have been reviewed and approved by the Board of Commissioners/Directors in the fiscal year; and 4. Statement on the corporate culture.	74-79
6.	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	Profiles of members of the Board of Commissioners Contain information on: 1. Name; 2. Position and period in position (including position(s) held at other company/institution); 3. Age; 4. Domicile; 5. Education (study field and education institution); 6. Work experience (position, company, and period in position); and 7. History of assignments (period and position) as member of the Board of Commissioners at the company since the first appointment.	96-98
7.	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	Profiles of members of the Board of Directors Contain information on: 1. Name; 2. Position and period in position (including position(s) held at other company/institution); 3. Age; 4. Domicile; 5. Education (study field and education institution); 6. Work experience (position, company, and period in position); and 7. History of assignments (period and position) as member of the Board of Directors at the company since the first appointment.	99-105

No	Kriteria dan Penjelasan	Criteria and Explanations	Halaman Page
8.	Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi; 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan; 3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian; 4. Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan; dan 5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku.	Total number of employees (comparative for 2 years) and data on employee competence development programs reflecting equal opportunities for each level of the organization Information contains, among others: 1. Number of employees at each level of the organization; 2. Number of employees by education; 3. Number of employees by employment status; 4. Data on employee competence development programs during the fiscal year, concerning position of participants, type of training, and purpose of training; and 5. The costs of employee competence development programs in the fiscal year.	106-120
9.	Komposisi Pemegang saham Mencakup antara lain: 1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya; 2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: a. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; dan b. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%. 3. Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung. **Catatan:** apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan.	Shareholders composition Covering among others: 1. Names of the 20 largest shareholders and their shareholding percentage; 2. Details of shareholders and shareholding percentage: a. Names of shareholders with 5% or more shareholding; and b. Group of public shareholders with individual shareholding of less than 5% each. 3. Names of Director and Commissioner with direct or indirect share-ownership and the percentage of such shareholding. **Note:** should be disclosed if the Director and Commissioner does not own shares, directly or indirectly.	92
10.	Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi Dalam bentuk tabel memuat informasi antara lain: 1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi; 2. Persentase kepemilikan saham; 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan 4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).	List of subsidiaries and/or associated entities In table form, containing: 1. Name of subsidiary and/or associated entity; 2. Share-ownership percentage; 3. Line of business of subsidiary and/or associated entity; and 4. Operational status of subsidiary and/or associated entity (in commercial operation/not yet in commercial operation).	134-136
11.	Struktur grup perusahaan Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, *joint venture*, dan *special purpose vehicle* (SPV).	Corporate group structure Diagram of corporate group structure involving relationship of the parent company, subsidiary, associated entity, joint venture, and special purpose vehicle (SPV).	122-123

No	Kriteria dan Penjelasan	Criteria and Explanations	Halaman Page
12.	Kronologi penerbitan saham (termasuk *private placement*) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku Mencakup antara lain: 1. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*); 2. Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*); dan 3. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan. **Catatan:** apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan.	Chronology of share listing (including private placement) and/or share listing from the share issuance up to the end of the fiscal year Covers, among others: 1. Year of share issuance, number of shares issued, par value, and share offer price, for each separate corporate action; 2. Total number of shares outstanding following the corporate action; and 3. The stock exchange where the shares are listed. **Note:** should be disclosed if the company does not have a chronology of share listing.	160
13.	Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku Mencakup antara lain: 1. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; 2. Nilai penawaran efek lainnya; 3. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan 4. Peringkat efek. **Catatan:** apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan	Chronology of other securities issuance and/or listing from the time of issuance up until the end of the fiscal year Covers, among others: 1. Name of security instrument, year of issuance, interest rate/yield of securities, and maturity date; 2. Offering price of other securities; 3. The stock exchange where the securities are listed; and 4. Rating of securities. **Note:** should be disclosed if the company does not have chronology of other securities issuance/listing	161-163
14.	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan; 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan 3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek.	Name and address of supporting institutions and/or professionals Covers, among others: 1. Name and address of the company's Share Registrar; 2. Name and address of Public Accountant Firm; and 3. Name and address of rating agencies.	159
15.	Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi; 2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi; 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi; dan 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi).	Awards received during the fiscal year, or valid certification in the fiscal year, at both national and international levels Covers, among others: 1. Name of award and/or certification; 2. Year received/issued; 3. Name of institution that issued the award/ certification; and 4. Validity period (certification).	124-130
16.	Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada) Memuat informasi antara lain: 1. Nama dan alamat entitas anak; dan 2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. **Catatan:** apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan	Name and address of subsidiaries and/or branch offices or representative offices (if any) Covers information on: 1. Name and address of subsidiaries; and 2. Name and address of branch/representative office. **Note:** should be disclosed if the company does not have a subsidiary, branch office or representative office.	154-157

No	Kriteria dan Penjelasan	Criteria and Explanations	Halaman Page
17.	Informasi pada *Website* Perusahaan Meliputi paling kurang: 1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu; 2. Isi Kode Etik; 3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan; 4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir); 5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan 6. Piagam/*Charter* Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal.	Information in the corporate website Covers at the very least: 1. Information of shareholders up to the individual ultimate shareholder; 2. Contents of the Code of Conduct; 3. Information on the General Meeting of Shareholders (GMS), covering at least agenda of the GMS, summary of GMS resolutions, and information of pertinent dates, namely the dates of GMS announcement, GMS invitation, GMS event, and announcement of summary GMS resolutions; 4. Annual financial statements (last 5 years); 5. Profiles of the Board of Commissioners and Directors; and 6. Board manual/Charter of the BoC. BoD, Committees and Internal Audit Unit.	68-69
18.	Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti): 1. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris; 2. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi; 3. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit; 4. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi; 5. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya; 6. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan; dan 7. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal. yang diikuti pada tahun buku. **Catatan:** apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan	Training and education for Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit Cover at least information of type of training and participant of: 1. Training and/or education for Board of Commissioners; 2. Training and/or education for Board of Directors; 3. Training and/or education for Audit Committee; 4. Training and/or education for Nomination and Remuneration Committee; 5. Training and/or education for other Committee(s); 6. Training and/or education for Corporate Secretary; and 7. Training and/or education for Internal Audit Unit. During the fiscal year. **Note:** should be disclosed if there are no training and/or education during the fiscal year	121
V.	**Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan**	**Management Discussion and Analysis on the Company Performance**	
1.	Tinjauan operasi per segmen usaha Memuat uraian mengenai: 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha. 2. Kinerja per segmen usaha, antara lain: a. Produksi; b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; c. Penjualan/pendapatan usaha; dan d. Profitabilitas.	Operation review per business segment Includes analysis on: 1. Elaboration on each business segment. 2. Performance of each business segment, among others: a. Production; b. Increase/Decrease of production capacity; c. Sales/income; and d. Profitability.	174-200

No	Kriteria dan Penjelasan	Criteria and Explanations	Halaman Page
2.	Uraian atas kinerja keuangan perusahaan Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas; 3. Ekuitas; 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif periode berjalan; dan 5. Arus kas.	Description on the Company's financial performance An analysis comparing the performance of the current year and that of the previous year (in the form of narration and tables) and the reasons for the increase/ decrease of the accounts, including in: 1. Current assets, non-current assets, and total assets; 2. Short-term liabilities, long-term liabilities, and total liabilities; 3. Equity; 4. Sales/operating revenues, expenses, Profit (Loss), other comprehensive income, comprehensive income for the current year; and 5. Cash flows.	201-222
3.	Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan Penjelasan tentang: 1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan 2. Tingkat kolektibilitas piutang.	Discussion and analysis on solvability and level of the company receivables collectibility, by presenting relevant ratio calculation in line with the company's type of industry Explanation on: 1. Solvability, both short term and long term; and 2. Level of receivables collectibility.	223-231
4.	Bahasan tentang struktur modal (*capital structure*) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure policy*) Penjelasan atas: 1. Rincian struktur modal (*capital structure*) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; dan 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure policies*); dan 3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal.	Discussion on capital structure, and management policy on capital structure Explanation of: 1. Details of capital structure comprising of interest-bearing debts/sukuk and equity; 2. Capital structure policies; and 3. Basis for the determination of capital structure policies.	232-234
5.	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir Penjelasan tentang: 1. Nama pihak yang melakukan ikatan; 2. Tujuan dari ikatan tersebut; 3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; 4. Mata uang yang menjadi denominasi; dan 5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. **Catatan:** apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.	Discussion on material commitments of capital investments (instead of funding commitments) in the last fiscal year Explanation on: 1. Parties in the commitments; 2. Objectives of the commitments; 3. Sources of funds to meet the commitments; 4. Denomination currency of commitments; and 5. Initiatives taken to mitigate exchange rate risk. **Note:** should be disclosed if the company does not have any material commitment for capital investments in the fiscal year.	249-257

No	Kriteria dan Penjelasan	Criteria and Explanations	Halaman Page
6.	Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir Penjelasan tentang: 1. Jenis investasi barang modal; 2. Tujuan investasi barang modal; dan 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. **Catatan:** apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.	Discussion on capital investment realized at the latest financial year Explanation on: 1. Type of capital investment; 2. Objectives of capital investment; and 3. Nominal value of capital investment realized in the last fiscal year. **Note:** should be disclosed if there are no capital investment.	258-261
7.	Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan. Informasi memuat antara lain: 1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan 2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang.	Information on the comparison between initial target at the beginning of financial year and the realization and target or projection for the next year concerning income, profit, capital structure, and others considered significant target for the company. Contain information on: 1. Comparison of targets at the beginning of fiscal year and achievements; and 2. Targets or projections set for the next 1 (one) year.	237-243
8.	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. **Catatan:** apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan.	Information and material facts following the date of accounting report (Subsequent events) Description of significant events following the date of accounting report including its impact on business risk and performance in the future. **Note:** should be disclosed if there are no subsequent events.	274
9.	Uraian tentang prospek usaha perusahaan Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	Business prospects Description on business prospects related to the general industry and economy including quantitative supporting data from reliable resources	286-291
10.	Uraian tentang aspek pemasaran Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar.	Marketing aspects Description on marketing aspects of the company's products and/or services, among others marketing strategy and market shares	170-173
11.	Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir Memuat uraian mengenai: 1. Kebijakan pembagian dividen; 2. Total dividen yang dibagikan; 3. Jumlah dividen kas per saham; 4. *Payout ratio*; dan 5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas. untuk masing-masing tahun. **Catatan:** apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.	Description on dividend policy and total cash dividend per share and total dividend per year that are published or disbursed during last 2 (two) financial years Contain information on: 1. Dividend payout policy; 2. Total dividend disbursement; 3. Total cash dividend per share; 4. Payout ratio; and 5. Announcement date and cash dividend payout for each year. **Note:** To disclose if there are no dividend disbursement and its reasons.	247-248

No	Kriteria dan Penjelasan	Criteria and Explanations	Halaman Page
12.	Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) yang masih ada sampai tahun buku Memuat uraian mengenai: 1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; 2. Jangka waktu; 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan 4. Harga *exercise*. **Catatan:** apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.	Employee/Management Share Ownership Program (ESOP/MSOP) still ongoing in the fiscal year Contain information on: 1. Number of ESOP/MSOP shares and its execution; 2. Period; 3. Eligible employee/management; and 4. Exercise price. **Note:** should be disclosed if there are no such programs	273
13.	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana) Memuat uraian mengenai: 1. Total perolehan dana; 2. Rencana penggunaan dana; 3. Rincian penggunaan dana; 4. Saldo dana; dan 5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada). **Catatan:** apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.	Realization of initial public offering proceeds (in the event of the company is obligated to submit the report) Covers the following: 1. Total proceeds; 2. Proceeds utilization plan; 3. Proceeds utilization details; 4. Proceeds balance; and 5. The date of GMS/GMB resolution on the change of proceeds utilization (if any). **Note:** should be disclosed if there are no such information of realization of proceeds of public offering.	272
14.	Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi Memuat uraian mengenai: 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. **Catatan:** apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.	Material transaction information with conflict of interest and/or transaction with related parties Covers the following: 1. Name of transacting parties and the nature of related parties; 2. Description of the transaction fairness; 3. Transaction background; 4. Transaction realization at the last financial year; 5. Company policy related with transaction review mechanism; and 6. Compliance to relevant regulations and provisions. **Note:** To disclose if there are no transactions.	262-267
15.	Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir Uraian memuat antara lain: 1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan 2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. **Catatan:** apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	Description on changes in laws and regulations during the fiscal year that impacted on the company Covers information on: 1. Name of regulations; and 2. The impact (quantitative and/or qualitative) on the company, or statement of the insignificant impact **Note:** To disclose if there are no changes in the laws and regulations that have significant impacts	279-280

No	Kriteria dan Penjelasan	Criteria and Explanations	Halaman Page
16.	Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir Uraian memuat antara lain: 1. Perubahan kebijakan akuntansi; 2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan 3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. **Catatan:** apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	Description on the changes in accounting policy implemented by the company at the last financial year Descriptions include among others: 1. Changes in accounting policy; 2. Reasons for the change; and 3. Quantitative impact on the financial statements **Note:** To disclose if there are no changes in accounting policies during the fiscal year	275-278
17.	Informasi kelangsungan usaha Pengungkapan informasi mengenai: 1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; 2. *Assessment* manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan 3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan *assessment*. **Catatan:** apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir.	Information on business continuity Disclosures on: 1. Significant issues on the company business continuity at the last financial year; 2. Management assessment on point 1; and 3. Assumption implemented by the management in conducting the assessment. **Note:** if there are no issues that potentially have significant influences to the company's business continuity at the last financial year, to disclose the basis of management assumption in ensuring that there are no issues that potentially have significant influences to the company's business continuity at the last financial year.	284-285
VI.	***Good Corporate Governance***	**Good Corporate Governance**	
1.	Uraian Dewan Komisaris Uraian memuat antara lain: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; 2. Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya; dan 3. Pengungkapan mengenai *Board Manual* (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris).	Description on the Board of Commissioners Covers the following: 1. Board of Commissioners responsibilities; 2. Assessment of performance of committees under the Board and the basis for such assessment; and 3. Board Manual disclosures (Board of Commissioners work guidelines and procedures)	368-378
2.	Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris) Meliputi antara lain: 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.	Independent Commissioners (at least 30% of the total personnel of the Board of Commissioners) Covers the following: 1. Assignment criteria of Independent Commissioners; and 2. Independency statement of each Independent Commissioner.	374-375
3.	Uraian Direksi Uraian memuat antara lain: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; 2. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan 3. Pengungkapan mengenai *Board Manual* (pedoman dan tata tertib kerja Direksi).	Description on the Board of Directors Covers information on, among others: 1. Duties and responsibilities of each member of the Board of Directors; 2. Assessment of performance of committees under the Board (if any); and 3. Board Manual disclosures (Board of Directors work guidelines and procedures)	379-386

No	Kriteria dan Penjelasan	Criteria and Explanations	Halaman Page
4.	Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2015 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi Memuat uraian mengenai: 1. Kriteria yang digunakan dalam penilaian; 2. Pihak yang melakukan penilaian; 3. Skor penilaian masing-masing kriteria; 4. Rekomendasi hasil penilaian; dan 5. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi. **Catatan:** apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2015, agar diungkapkan.	GCG implementation assessment for 2015, at least for aspects of the Board of Commissioners and/or Board of Directors Covers the following: 1. Assessment criteria; 2. Assessor; 3. Assessment score on each criteria; 4. Recommendations on results of assessment; and 5. Reasons for the delay or non implementation of such recommendations. **Note**: should be disclosed if there are no GCG assessment for fiscal 2015.	342-349
5.	Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Mencakup antara lain: 1. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris; 2. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi; 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris; 4. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi; 5. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi; dan 6. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada). **Catatan:** apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.	Description of the remuneration policy for the Board of Commissioners and Board of Directors Covers the following: 1. Disclosure of procedure for the proposal and determination of remuneration for the Board of Commissioners; 2. Disclosure of procedure for the proposal and determination of remuneration for the Board of Directors; 3. Remuneration structure showing the remuneration components and amounts per component for each member of the Board of Commissioners; 4. Remuneration structure showing the remuneration components and amounts per component for each member of the Board of Directors; 5. Disclosure of indicators for the remuneration of the Board of Directors; and 6. Disclosure of performance bonus, non-performance bonus, and/or share option received by each members of the Board of Commissioners and Directors (if any). **Note:** should be disclosed if there are no performance bonus, non-performance bonus, and/or share option received by each members of the Board of Commissioners and Directors.	408-411
6.	Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan), Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan) Informasi memuat antara lain: 1. Tanggal Rapat; 2. Peserta Rapat; dan 3. Agenda Rapat. untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan.	Meeting frequency and attendance of Board of Commissioners (at least once in 2 months), Board of Directors (at least once in a month), and joint meetings of BoC and BoD (at least once in 4 months) Covers among others: 1. Date; 2. Attendance; and 3. Agenda. Of each of the meetings of BoC, BoD and Joint Meetings of BoC and BoD.	397-405

No	Kriteria dan Penjelasan	Criteria and Explanations	Halaman Page
7.	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu Dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham utama dengan pemegang saham pengendali. **Catatan:** yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali.	Information on majority and controlling shareholders, direct or indirect, up to the ultimate individual shareholder Diagram with separate illustration for majority shareholders and controlling shareholders **Note:** majority shareholders are parties that own, directly or indirectly, at least 20% of the voting rights of the total share with voting rights issued by the company, but is not the controlling shareholder	356
8.	Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali Mencakup antara lain: 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali; 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali. **Catatan:** apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.	Disclosure of affiliation between members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Majority/ Controlling Shareholders Covers, among others: 1. Affiliation between a member of the Board of Directors with fellow members of the Board of Directors; 2. Affiliation between a member of the Board of Directors with members of the Board of Commissioners; 3. Affiliation between a member of the Board of Directors with Majority and/or Controlling Shareholder; 4. Affiliation between a member of the Board of Commissioners with fellow members of the Board of Commissioners; and 5. Affiliation between a member of the Board of Commissioners with Majority and/or Controlling Shareholder. **Note:** should be disclosed if there are no affiliation relationship	392-396
9	Komite Audit Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan periode jabatan anggota komite audit; 2. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit; 3. Independensi anggota komite audit; 4. Uraian tugas dan tanggung jawab; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; dan 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit.	Audit Committee Includes the following: 1. Name, position and tenure of audit committee members; 2. Education qualifications (study field and institution) and work experience (position, company and tenure) of audit committee members; 3. Independency of audit committee members; 4. Duties and responsibilities; 5. Brief report of audit committee activity; and 6. Meeting frequency and attendance of audit committee.	412-421

No	Kriteria dan Penjelasan	Criteria and Explanations	Halaman Page
10.	Komite Nominasi dan/atau Remunerasi Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi; 2. Independensi komite nominasi dan/atau remunerasi; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi pada tahun buku; 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi; 6. Pernyataan adanya pedoman komite nominasi dan/atau remunerasi; dan 7. Kebijakan mengenai suksesi Direksi.	Nomination and/or Remuneration Committee Includes the following: 1. Name, position and brief profiles of members of the Nomination and/or Remuneration Committee; 2. Independency of Nomination and/or Remuneration Committee; 3. Duties and responsibilities ; 4. Brief report of committee activity in the fiscal year; 5. Meeting frequency and attendance; 6. Statement of committee charter; and 7. Policies on Director succession.	432-433
11.	Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; 2. Independensi komite lain; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain pada tahun buku; dan 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain.	Other committees under the Board of Commissioners Includes the following: 1. Name, position and brief profile of members of committee; 2. Independency of committee; 3. Duties and responsibilities ; 4. Committee activity in the fiscal year; and 5. Committee meeting frequency and attendance.	422-431
12.	Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan Mencakup antara lain: 1. Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; 2. Domisili; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; dan 4. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku.	Description of duties and functions of Corporate Secretary Information on, among others: 1. Name and brief work experience of Corporate Secretary; 2. Domicile; 3. Duties and responsibilities; and 4. Report of activities of Corporate Secretary in the fiscal year.	436-439
13	Uraian mengenai unit audit internal Mencakup antara lain: 1. Nama ketua unit audit internal; 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; 3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan 6. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal.	Description on Internal Audit Unit Includes the following: 1. Name of internal audit unit head; 2. Total employees (internal auditors) in internal audit unit; 3. Certification on internal audit profession; 4. Internal audit unit composition in the company's structure; 5. Brief report on internal audit unit activity implementation; and 6. The parties responsible to appoint/terminate the internal audit unit head.	440-451

No	Kriteria dan Penjelasan	Criteria and Explanations	Halaman Page
14.	Akuntan Publik Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 3. Besarnya *fee* untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan 4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. **Catatan:** apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.	Public Accountant Includes the following: 1. Name and year of public accountant that audits the annual financial statements in the last 5 years; 2. Name and year of Public Accountant Firm that audits the annual financial statements in the last 5 years; 3. The amount of fee for each service provided by public accountant at the last financial year; and 4. Other services provided by the accountant apart from the audit service of annual financial statements at the last financial year. **Note:** to disclose if there are no other services rendered	459-461
15.	Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan Mencakup antara lain: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; 2. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas sistem manajemen risiko pada tahun buku; 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut.	Description on risk management of the company Includes the following: 1. Explanation on risk management system implemented by the company; 2. Explanation on risk management system effectiveness evaluation; 3. Explanation on risks faced by the company; and 4. Risk mitigation.	462-479
16.	Uraian mengenai sistem pengendalian intern Mencakup antara lain: 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – *internal control framework*); dan 3. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pada tahun buku.	Description of internal control system Includes the following: 1. Brief explanation on internal control system, among others on financial and operational control; 2. Explanation on internal control system alignment with international standard framework (COSO – internal control framework); and 3. Explanation on internal control system effectiveness evaluation.	452-458
17.	Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan lingkungan hidup Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain. 3. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.	Description on corporate social responsibility related to environmental Covers information on, among others: 1. Activity target/plans by the Management for 2016; 2. Activities conducted and the quantitative impact of such activities; including environmental programs related to the company's operational activities such as utilization of environment-friendly materials and energy or recycled materials, waste management system, complaint handling of environmental issues, green lending, and others 3. Environmental certifications.	537-520

No	Kriteria dan Penjelasan	Criteria and Explanations	Halaman Page
18.	Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat *turnover* karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain.	Description on corporate social responsibility related to occupational, health and safety Covers information on, among others: 1. Activity target/plans by the Management for 2016; and 2. Activities conducted and quantitative impact of such activities related to occupational, heath and safety aspects, such as gender equality and equal work opportunity, work health and safety equipment, employee turnover rate, accident rate, remuneration, complaint handling of work-related issues, and others.	538-555
19.	Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan 3. Biaya yang dikeluarkan terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain.	Description on corporate social responsibility related to social and community development Covers information on, among others: 1. Activity target/plans by the Management for 2016; 2. Activities conducted and impact of such activities; and 3. Cost expended related to social and community development activities such as recruitment of local manpower, community development, donation in improvement to public facilities and infrastructure, other social donations, communications on anti-corruption policies and procedures, training on anti-corruption, and others.	556-568
20.	Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen Mencakup antara lain: 1. Target/rencana kegiatan yang pada tahun 2016 ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.	Description on corporate social responsibility related to responsibility to consumers Covers information on, among others: 1. Activity target/plans by the Management for 2016; and 2. Activities conducted and impact of such activities related to product responsibility, such as consumers health and safety, product information, facility, total and handling of consumers claims, and so forth.	569-579

No	Kriteria dan Penjelasan	Criteria and Explanations	Halaman Page
21.	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan Mencakup antara lain: 1. Pokok perkara/gugatan; 2. Status penyelesaian perkara/gugatan; 3. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan; dan 4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). **Catatan:** dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.	Significant litigation currently faced by the company, subsidiaries, and members of the Board of Commissioners and Board of Directors that served the position at the annual report period Includes the following: 1. The principal litigation/claims; 2. Settlement status of litigation/claims; 3. Impact to the company's condition; and 4. Administration sanctions charged to the company, members of the Board of Commissioners and Board of Directors, by relevant authorities (capital market, banking and others) at the last fiscal year (or a statement of no administration sanction being charged) **Note:** To disclose in the event of no litigation	496-500
22.	Akses informasi dan data perusahaan Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui *website* (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, *mailing list*, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.	Access to company information and data Description on the availability of company information and data for public access, including dissemination through company website (in Bahasa and English), mass media, mailing list, bulletin, analyst gatherings, and others.	502-506
23.	Bahasan mengenai kode etik Memuat uraian antara lain: 1. Pokok-pokok kode etik; 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; 3. Penyebarluasan kode etik; 4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan 5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. **Catatan:** apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	Discussion on code of conduct Includes the following: 1. Contents of Code of Conduct; 2. Disclosure of code of conduct application in all level of organization; 3. Code of conduct dissemination; 4. Sanctions on code of conduct violations; and 5. Number of violation and sanction in the last fiscal year. **Note:** should be disclosed if there are no violations of code of conduct in the last fiscal year.	486-489
24.	Pengungkapan mengenai whistleblowing system Memuat uraian tentang mekanisme *whistleblowing system* antara lain: 1. Penyampaian laporan pelanggaran; 2. Perlindungan bagi *whistleblower*; 3. Penanganan pengaduan; 4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan 6. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku. **Catatan:** apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk dan telah selesai diproses pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	Disclosure on whistleblowing system Includes the following mechanism of whistleblowing system: 1. Violations report submission; 2. Whistleblowers protection; 3. Claims handling; 4. Claims managers; and 5. Total claims registered; and 6. Sanctions/report processed at the last fiscal year including its follow up measures. **Note:** should be disclosed if there is no report and follow up action in the last fiscal year.	490-495

No	Kriteria dan Penjelasan	Criteria and Explanations	Halaman Page
25.	Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. **Catatan:** apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.	Diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors Composition Description of written policy regarding diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors composition regarding education, work experience, age, and gender **Note:** to disclose the reasons and considerations, if there is no policy applied	387-391
VII.	**Informasi Keuangan**	**Financial Information**	
1.	Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan. Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.	Board of Directors and/or Board of Commissioners' Statements regarding the Responsibility for the Financial Statements. Conformity with related regulations regarding the Financial Statements Responsibility	584
2.	Opini auditor independen atas laporan keuangan	Independent auditor opinion on financial statements	586
3.	Deskripsi Auditor Independen di Opini Deskripsi memuat tentang: 1. Nama dan tanda tangan; 2. Tanggal Laporan Audit; dan 3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik.	Independent Auditor Description in the Opinion Description contains the following: 1. Name & signatures; 2. Audit Report date; and 3. License of Public Accountant Firm and license of Public Accountant	585-586
4.	Laporan keuangan yang lengkap Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Laporan posisi keuangan; 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; 3. Laporan perubahan ekuitas; 4. Laporan arus kas; 5. Catatan atas laporan keuangan; 6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan 7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).	Comprehensive financial statements Comprehensively covers the financial statements elements: 1. Statements of financial position; 2. Statements of comprehensive income and other comprehensive income; 3. Statements of changes in equity; 4. Statements of cash flows; 5. Notes to financial statements; 6. Comparative information on previous periods; and 7. Statements of financial position at the beginning of previous periods upon the application of retrospective accounting policy by the entity or representation of financial statements postings, or reclassifications of postings in the financial statements (if relevant).	587-688
5.	Perbandingan tingkat profitabilitas Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya	Profitability level comparison Comparison of current profit (loss) with the previous year	590-591

No	Kriteria dan Penjelasan	Criteria and Explanations	Halaman Page
6.	Laporan Arus Kas Memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; 2. Penggunaan metode langsung (*direct method*) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.	Statements of Cash Flows Conformity to the following provisions: 1. Grouping into three category of activities of operations, investment, and financing; 2. Direct method application in the statements of cash flows from operations activity; 3. Separation of presentation between cash in and or cash out during current year in the operation, investment and financing activities; 4. Disclosure of non cash transaction shall be stated in the notes to financial statements.	593
7.	Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Meliputi sekurang-kurangnya: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; 3. Pajak penghasilan; 4. Imbalan kerja; dan 5. Instrumen Keuangan.	Summary of accounting policies Including at least: 1. Compliance statement to SAK; 2. Basis of measurement and formulation of financial statements; 3. Recognition of income and expense; 4. Employee benefits; and 5. Financial instrument.	598-631
8.	Pengungkapan transaksi pihak berelasi Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait.	Disclosure of related parties transactions The disclosures includes: 1. Name of related parties, and the nature and relationship with related parties; 2. Transaction values and its percentage to total income and expense; and 3. Total balance and its percentage to total assets or liabilities.	668-671
9.	Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2016; 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.	Disclosure related to taxes The disclosures shall includes: 1. Fiscal reconciliation and current tax expense calculation; 2. Explanation of relationship between tax expenses (income) and accounting profit; 3. Statement that Taxable Income as a result of reconciliation is use as the basis in completing the 2016 Annual corporate income tax return; 4. The details of deferred tax assets and liabilities recognized in the financial position statements for every presentation period, and total deferred tax expenses (income) recognized in the income statements if the total are not visible from the total deferred tax assets or liabilities recognized in the financial position statements; and 5. Disclosure of availability or un-availability of tax disputes.	656-660

No	Kriteria dan Penjelasan	Criteria and Explanations	Halaman Page
10.	Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Metode penyusutan yang digunakan; 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.	Disclosure related to fixed assets The disclosures shall includes: 1. Used depreciation method; 2. Description on accounting policies selected between revaluation model and cost model; 3. Significant methods and assumptions used in estimation of fixed assets fair value (for revaluation model) or disclosure of fixed assets fair value (for cost model); and 4. Reconciliation of gross total recorded and accumulation of fixed assets depreciation at the beginning and end of period by presenting: addition, deduction and reclassification.	637-641
11	Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama.	Disclosure related to operations segments The disclosures shall includes: 1. General information covering factors used to identify reported segments; 2. Information on segment's reported profit loss, assets, and liabilities; 3. Reconciliation of segment's total revenues, segment's reported profit loss, segment's assets, segment's liabilities, and segment's other material elements to related total in entity; and 4. Disclosure of entity level, which covers information on products and/or services, geographic areas and main customers.	654-655
12.	Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; 2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; 3. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; 4. Kebijakan manajemen risiko; dan 5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.	Disclosure related to Financial Instruments The disclosures shall includes: 1. Financial instrument classification; 2. Fair value of every financial instrument group; 3. Risk management objectives and policies; 4. Explanation on risks related to financial instrument: market risk, credit risk and liquidity risk; and 5. Risk analysis related to financial instrument in quantitative way.	680-688
13.	Penerbitan laporan keuangan Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.	Financial statements publication The disclosures includes: 1. Date of financial statements authorized for publication; and 2. Parties responsible to authorize the financial statements.	584, 688

LAPORAN TAHUNAN
2017
ANNUAL REPORT

The Next Level

Through Human Capital Excellence and Innovation

PT INDONESIA POWER

HEAD OFFICE
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12950

Tel. 62-21-5267666
Fax. 62-21-5251293, 5252623
Email kontak-ip@indonesiapower.co.id
www.indonesiapower.co.id